



PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023



PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2022



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 65

TAHUN 2022

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 65 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan tahunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai pedoman dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat prioritas pembangunan yang merupakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.
10. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
11. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat RAPBN adalah rancangan keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana tahunan keuangan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah rencana tahunan keuangan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan undang-undang.
14. Plafon anggaran adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran OPD setelah disepakati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA OPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA atau dokumen lain yang disamakan dengan DIPA, adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh menteri/pimpinan lembaga serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.

Pasal 2

RKPD ditetapkan dengan tujuan sebagai:

- a. pedoman Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
- b. pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) bagi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
- c. acuan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023.

Pasal 3

- (1) RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan pembangunan daerah dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB VIII PENUTUP

- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2023:

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2023, sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara di DPRD;
- b. Perangkat Daerah lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat menggunakan RKPD Tahun 2023 sebagai bahan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran dengan DPRD.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 30 Juni 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 30 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	vii
KATA PENGANTAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-4
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-6
1.4 Maksud dan Tujuan	I-7
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	I-8
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-11
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah	II-11
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-11
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-21
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah	II-37
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum	II-37
2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2021 dan Realisasi Capaian RPJMD 2019-2023 Sampai Tahun 2021	II-240
2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2021	II-240
2.2.2 Realisasi Capaian RPJMD 2019-2023 Sampai Tahun 2021	II-258
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	II-275
2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah	II-275
2.3.2 Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	II-276
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2021, Awal Tahun 2022 dan Proyeksi Tahun 2023	III-1
3.1.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi NTB	III-2
3.1.1.2 Inflasi	III-7
3.1.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka	III-8
3.1.1.4 Indeks Gini	III-10

3.1.1.5	Kemiskinan	III-11
3.1.2	Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023	III-12
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-14
3.2.1	Kebijakan Pendapatan Daerah	III-15
3.2.2	Kebijakan Belanja Daerah	III-18
3.2.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III-21
3.2.4	Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya.....	III-23
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023		IV-1
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023	IV-1
4.1.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023	IV-1
4.1.2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023	IV-5
4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023	IV-12
4.2.1	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023.....	IV-12
4.2.2	Penelaahan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD.....	IV-16
4.2.3	Isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023.....	IV-19
4.2.4	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023	IV-44
4.3	Kerja Sama Pembangunan Daerah Antar Provinsi	IV-79
4.3.1	Kerja Sama dengan Provinsi Jawa Timur	IV-79
4.3.2	Kerja Sama Regional antar Provinsi Bali, Nusa Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur.....	IV-79
4.3.3	Kerja Sama dengan Provinsi Sulawesi Selatan	IV-81
4.4	Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon dan Ekonomi Hijau, Biru dan Sirkular.....	IV-82
4.4.1	Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon.....	IV-87
4.4.2	Perencanaan Pembangunan Ekonomi Hijau	IV-89
4.4.3	Perencanaan Pembangunan Ekonomi Biru	IV-91
4.4.4	Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sirkular.....	IV-93
4.5	Inovasi	IV-94
BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KOTA		V-1
5.1	Kebijakan Umum Arah Pembangunan Kabupaten/Kota.....	V-1
5.1.1	Arah Pembangunan Wilayah Pulau Lombok	V-2
5.1.2	Arah Pembangunan Wilayah Pulau Sumbawa	V-4

5.2	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	V-7
5.3	Indikator Makro Kabupaten/kota	V-12
5.3.1	Pertumbuhan Ekonomi (LPE).....	V-12
5.3.2	Persentase Penduduk Miskin.....	V-15
5.3.3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	V-18
5.3.4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	V-22
5.4	Sinergitas Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/kota	V-23
BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH		VI-1
6.1	Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari APBN Tahun 2023..	VI-1
6.2	Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023.....	VI-22
6.3	Rencana Program dan Kegiatan yang Mendukung Prioritas Daerah (PD)	VI-27
6.4	Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)	VI-1
6.5	Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari Mitra Pembangunan.	VI-3
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH		VII-1
BAB VIII PENUTUP		VIII-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1- 1 Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi NTB Tahun 2023.....	I-4
Gambar 2- 1 Struktur Umur Penduduk NTB Tahun 2021.....	II-21
Gambar 2- 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Nusa Tenggara Barat dan Nasional Tahun 2018 – 2021 (persen).....	II-23
Gambar 2- 3 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nusa Tenggara Barat dengan Provinsi Sekitar dan Nasional Tahun 2018 – 2021 (persen).....	II-24
Gambar 2- 4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 – 2021 (persen).....	II-26
Gambar 2- 5 Laju Inflasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nasional Tahun 2018 – 2021 (persen).....	II-27
Gambar 2- 6 Inflasi Bulanan Gabungan Dua Kota (Kota Mataram dan Kota Bima) Tahun 2019–2021.....	II-28
Gambar 2- 7 Perkembangan Gini Ratio, September 2011 – September 2021.....	II-32
Gambar 2- 8 Persentase Pengeluaran Kelompok Penduduk 40 Persen terbawah Provinsi Nusa Tenggara Barat September 2020, Maret 2021, dan September 2021	II-33
Gambar 2- 9 Gambar Gini Ratio Menurut Provinsi September 2021.....	II-34
Gambar 2- 10 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 – 2021	II-34
Gambar 2- 11 Perkembangan Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 - 2021	II-35
Gambar 2- 12 Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 - 2021	II-35
Gambar 2- 13 Perkembangan Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 - 2021 (Rp 000)	II-36
Gambar 2- 14 IPM Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia Tahun 2021	II-36
Gambar 2- 15 Proporsi tingkat capaian Aspek Pelayanan Umum	II-38
Gambar 2- 16 Angka Harapan Hidup di Provinsi NTB Tahun 2019-2021.....	II-51
Gambar 2- 17 Jumlah Kasus Kematian Ibu dan Angka Kematian Ibu di Provinsi NTB Tahun 2019-2021	II-52
Gambar 2- 18 Jumlah Kematian Ibu pada tahun 2021 berdasarkan Penyebabnya.	II-53
Gambar 2- 19 Jumlah Kasus Kematian Bayi dan Angka Kematian Bayi di Provinsi NTB Tahun 2019-2021	II-53
Gambar 2- 20 Jumlah Kematian Bayi Tahun 2021 berdasarkan Penyebabnya.....	II-54
Gambar 2- 21 Persentase Stunting NTB Tahun 2019-2021	II-55
Gambar 2- 22 Nilai UHC di Provinsi NTB pada tahun 2020-2021	II-57
Gambar 2- 23 Cakupan Desa ODF di Provinsi NTB Tahun 2019 – 2021	II-59
Gambar 2- 24 Jumlah Masyarakat Yang Dilayani Menurut Fasilitas Layanan Kesehatan Tahun 2020 – 2021.....	II-73
Gambar 2- 25 Cara Pembayaran Masyarakat Dalam Mengakses Fasilitas Layanan Kesehatan Tahun 2020 – 2021	II-74
Gambar 2- 26 Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2021	II-76

Gambar 2- 27 Capaian Kinerja Kemantapan Jalan di Provinsi NTB	II-77
Gambar 2- 28 Capaian Kinerja Kemantapan Jalan Nasional.....	II-79
Gambar 2- 29 Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi Tahun 2021	II-80
Gambar 2- 30 Capaian Cakupan Air Minum Tahun 2019-2021 dan Rencana Capaian Tahun 2022-2023	II-82
Gambar 2- 31 Kejadian Bencana di Provinsi NTB Tahun 2021.....	II-92
Gambar 2- 32 TPT menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan.....	II-99
Gambar 2- 33 Setengah Pengangguran Menurut Jenis Kelamin	II-99
Gambar 2- 34 Pekerja waktu menurut jenis kelamin	II-100
Gambar 2- 35 Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB.....	II-102
Gambar 2- 36 Jenis Kasus/Permasalahan Penanganan PMI Bermasalah Di Provinsi NTB Tahun 2021.....	II-107
Gambar 2- 37 Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Formal dan Informal Tahun 2020- 2021	II-108
Gambar 2- 38 Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTBTahun 2021	II-111
Gambar 2- 39 Penerapan PPRG di OPD lingkup Pemprov NTB tahun 2020 - 2021..	II-115
Gambar 2- 40 Kekerasan berdasarkan bentuk kekerasan yang di alami korban Tahun 2019-2021.....	II-116
Gambar 2- 41 Cakupan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak Tahun 2019-2021.....	II-117
Gambar 2- 42 Target dan Capaian Skor PPH Konsumsi Tahun 2019-2023	II-118
Gambar 2- 43 Perkembangan Konsumsi Beras Penduduk NTB Periode Tahun 2017-2021	II-120
Gambar 2- 44 Target dan Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan NTB Tahun 2019 s.d 2023	II-120
Gambar 2- 45 Rata rata Usia Kawin Pertama Tahun 2019-2021	II-137
Gambar 2- 46Indikator Urusan Bidang Penanaman Modal Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019-2021 Nilai Realisasi Investasi (Milyar).....	II-148
Gambar 2- 47Perkembangan dan Proporsi PMDN dan PMA di Provinsi NTB Tahun 2019 - 2021	II-149
Gambar 2- 48 Perkembangan IPLM Provinsi NTB, NTT, Bali dan Nasional Tahun 2020 - 2021.....	II-163
Gambar 2- 49 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Provinsi NTB Tahun 2019 - 2021	II-164
Gambar 2- 50 Jumlah Anggota Perpustakaan Tahun 2019- 2021.....	II-164
Gambar 2- 51 Perkembangan capaian kinerja PDRB, NTN dan NTPi tahun 2019 - 2021	II-167
Gambar 2- 52 Perkembangan Capaian Produksi Perikanan Tahun 2019 s/d 2021..	II-168
Gambar 2- 53 Perkembangan Produksi Perikanan berdasarkan capaian produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya di Provinsi NTB Tahun 2019 - 2021.....	II-169
Gambar 2- 54 Capaian Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Target Tahun 2019 s/d 2021.....	II-169
Gambar 2- 55 Proporsi per jenis komoditas penting dan paling dominan pada produksi perikanan budidaya tahun 2021	II-170
Gambar 2- 56 Perkembangan Capaian Produksi Perikanan Tangkap Dibandingkan dengan Target Tahun 2019 - 2021	II-171

Gambar 2- 57 Perkembangan Angka Konsumsi Ikan Nasional, Target dan Capaian AKI Provinsi NTB Tahun 2019 – 2021.....	II-172
Gambar 2- 58 Perkembangan Capaian Produksi Garam Tahun 2019 s/d 2021	II-174
Gambar 2- 59 Indikator Kinerja Urusan Kehutanan Tahun 2019-2021.....	II-195
Gambar 2- 60 Perkembangan NTB Hijau 2019-2021	II-197
Gambar 2- 61 Kontribusi Komponen Pendapatan Tahun 2019-2021.....	II-232
Gambar 2- 62 Kontribusi Komponen Dana Perimbangan Tahun 2018-2021	II-234
Gambar 2- 63 Proporsi tingkat capaian IKD Provinsi NTB.....	II-264
Gambar 2- 64 Capaian Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-265
Gambar 2- 65 Proporsi tingkat capaian Aspek Daya Saing.....	II-267
Gambar 3- 1 Pertumbuhan Ekonomi NTB Tahun 2021 (c-to-c)	III-4
Gambar 3- 2 Pertumbuhan Ekonomi NTB Tahun 2022 (y-on-y)	III-4
Gambar 3- 3 Laju Pertumbuhan Ekonomi NTB, Triwulanan 2022 (y on y)	III-4
Gambar 3- 4 Laju Pertumbuhan Ekonomi NTB, Triwulanan 2022 (q on q).....	III-5
Gambar 3- 5 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi NTB Tahun 2022	III-5
Gambar 3- 5 Inflasi Tahun 2014-2021	III-7
Gambar 3- 6 Perkembangan TPT Nasional, dan Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2019 - 2021	III-8
Gambar 3- 7 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2020 - 2021	III-9
Gambar 3- 8 Ketimpangan antar kelompok pendapatan (rasio gini) dan ketimpangan regional Tahun 2021	III-11
Gambar 3- 9 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi NTB Tahun 2015 – 2021	III-12
Gambar 4- 1 Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2023	IV-4
Gambar 4- 2Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Sasaran Prioritas Pembangunan Tahun 2023.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4- 3 Perbandingan pencapaian Indikator Makro Tahun 2021 wilayah regional NTB, Bali, dan NTT.....	IV-80
Gambar 4- 4Proporsi Emisi Karbon Dioksida (CO ₂ eq) Tahun 2021	IV-84
Gambar 4- 5Peta Penurunan Intensitas Emisi di Indonesia Tahun 2021	IV-85
Gambar 4- 6Total Pencapaian Penurunan Emisi dan Intensitas Emisi Provinsi.....	IV-85
Gambar 4- 7Grafik Penurunan Emisi Semua Sektor.....	IV-86
Gambar 4- 8 Peta sebaran kawasan hutan Provinsi NTB Tahun 2019	IV-90
Gambar 4- 9 Perubahan Luas Ekosistem Mangrove Provinsi NTB.....	IV-93

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Luas Wilayah Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota	II-11
Tabel 2-2 Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2020	II-12
Tabel 2-3 Inventarisasi Cekungan Air Tanah di Provinsi NTB	II-13
Tabel 2-4 Lokasi Kawasan Rawan Tanah Longsor	II-13
Tabel 2-5 Lokasi Kawasan Rawan Gunung Berapi	II-14
Tabel 2-6 Lokasi Kawasan Rawan Tsunami	II-14
Tabel 2-7 Lokasi Kawasan Rawan Angin Topan	II-15
Tabel 2-8 Lokasi Kawasan Rawan Gelombang Pasang	II-15
Tabel 2-9 Lokasi Kawasan Rawan Kekeringan	II-16
Tabel 2-10 Lokasi Kawasan Rawan Bencana Akibat Kesalahan Manusia	II-16
Tabel 2-11 Status Penyediaan Air Provinsi NTB	II-17
Tabel 2-12 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi NTB Tahun 2020-2021 ..	II-18
Tabel 2-13 Kepadatan Penduduk Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019-2021	II-18
Tabel 2-14 Jumlah Penduduk Provinsi NTB Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016-2021	II-19
Tabel 2-15 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2017-2021 ...	II-20
Tabel 2- 16 Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2019-2021	II-22
Tabel 2- 17 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Tahun 2019-2021	II-25
Tabel 2- 18 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (miliar rupiah) Tahun 2019-2021	II-26
Tabel 2- 19 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi NTB Tahun 2012 – September 2021	II-29
Tabel 2- 20 Garis Kemiskinan dan Perubahannya Menurut Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Bulan Maret 2021 dan September 2021	II-30
Tabel 2- 21 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Maret 2021 dan September 2021	II-31
Tabel 2-22 Capaian Indikator pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-37
Tabel 2-23 Capaian Indikator pada Aspek Daya Saing Daerah	II-37
Tabel 2- 24 Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2020 – 2021	II-39
Tabel 2- 25 Rata-rata Lama Sekolah Provinsi NTB Tahun 2017–2021	II-40
Tabel 2- 26 Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SM (SMA, MA, SMK) Provinsi NTB dari Tahun 2012/2013 s.d 2020/2021	II-40
Tabel 2- 27 Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SM (SMA, MA, SMK) Provinsi NTB dari Tahun 2012/2013 s.d 2020/2021	II-41

Tabel 2- 28 Angka Melanjutkan dari Lulusan SMA ke Perguruan Tinggi Provinsi NTB Tahun 2020/2021	II-42
Tabel 2- 29 Angka Putus Sekolah (DO) SMA dan SMK Provinsi NTB dari Tahun 2015/2016 s.d 2020/2021	II-42
Tabel 2- 30 Capaian Penerapan Spm Bidang PendidikanDinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2021	II-43
Tabel 2- 31Daftar Penerima Pip Sma Per Kabupaten / Kota Tahun 2021.....	II-45
Tabel 2- 32 Daftar Penerima Pip Smk Per Kabupaten / Kota Tahun 2021	II-45
Tabel 2- 33 Daftar Penerima Pip Slb Per Kabupaten / Kota Tahun 2021	II-45
Tabel 2- 34 Target Capaian SPM Pendidikan Tingkat Provinsi NTB Tahun 2021	II-46
Tabel 2- 35 Pencapaian pemenuhan SPM pendidikan Provinsi NTB Tahun 2021 Menurut Angka Partisipasi	II-47
Tabel 2- 36 Pencapaian pemenuhan SPM pendidikan Provinsi NTB Tahun 2021 Menurut Indikator dan Mutu Layanan	II-47
Tabel 2- 37 Capaian Indikator Urusan Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2021	II-51
Tabel 2- 38 Angka Harapan Hidup Per Kabupaten/Kota Tahun 2019-2021.....	II-51
Tabel 2- 39 Jumlah Kematian Ibu Per Kabupaten/Kota Tahun 2019-2021	II-52
Tabel 2- 40 Jumlah Kasus Kematian Bayi Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi NTB Tahun 2019 – 2021	II-54
Tabel 2- 41 Persentase Stunting Per Kabupaten/Kota Tahun 2019-2021	II-55
Tabel 2- 42 Gambaran Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN Provinsi NTB Tahun 2021	II-57
Tabel 2- 43 Gambaran Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN Provinsi NTB Tahun 2021	II-58
Tabel 2- 44 Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi NTB Tahun 2021 .	II-58
Tabel 2- 45 Dana Sharing Jamkesmas Provinsi Tahun 2021.....	II-58
Tabel 2- 46 Cakupan Desa ODF Per Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB Tahun 2019-2021	II-60
Tabel 2- 47 Jumlah Posyandu berdasarkan jenis Posyandu di Provinsi NTB Tahun 2021	II-60
Tabel 2- 48 Indikator Kinerja Urusan Bidang Kesehatan Pada Rumah Sakit Mata NTB Tahun 2021	II-61
Tabel 2- 49 Capaian Kinerja Indikator Program BLKKPM Tahun 2019-2021	II-62
Tabel 2- 50 Jumlah Pelayanan Laboratorium Berdasarkan Jumlah Parameter yang diperiksa Masing-masing Bidang Pemeriksaan pada BLKKPM Tahun 2019-2021	II-62
Tabel 2- 51 Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Urusan Kesehatan pada RSUD Daerah Provinsi NTB Tahun 2020-2021	II-63
Tabel 2- 52 Cakupan Layanan Rawat Jalan, Rawat Inap dan IGD Berdasarkan Cara Pembayaran di RSUD Provinsi NTB Tahun 2019-2021	II-63
Tabel 2- 53 Sepuluh Penyakit Terbanyak Kunjungan Pasien Rawat Jalan di RSUD Provinsi NTB Tahun 2021	II-64
Tabel 2- 54 Sepuluh Penyakit Terbanyak Pasien Rawat Inap di RSUD Provinsi NTB Tahun 2021	II-64

Tabel 2- 55 Sepuluh Penyakit Terbanyak di Instalasi Gawat Darurat RSUD Provinsi NTB Tahun 2021	II-65
Tabel 2- 56 Capaian Indikator Kinerja Pelayanan RSUD Provinsi NTB tahun 2021.....	II-66
Tabel 2- 57 Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Urusan Kesehatan pada RSJ Mutiara Sukma Tahun 2020-2021	II-68
Tabel 2- 58 Jumlah Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap di RSJ Mutiara Sukma Provinsi berdasarkan Cara Bayar Tahun 2020-2021	II-68
Tabel 2- 59 Jumlah Pasien IGD di RSJ Mutiara Sukma Provinsi Berdasarkan Cara Bayar Tahun 2020-2021	II-69
Tabel 2- 60 Cakupan Pelayanan Pasien Napza Tahun 2020-2021.....	II-69
Tabel 2- 61 Lokasi dan Jumlah Klien Kegiatan ACT Tahun 2020-2021	II-70
Tabel 2- 62 Lokasi dan Frekuensi Kegiatan Integrasi Kesehatan Jiwa tahun 2020-2021..	II-71
Tabel 2- 63 Lokasi dan Frekuensi Kegiatan Mobile Clinic Tahun 2020-2021.....	II-71
Tabel 2- 64 Capaian Indikator Urusan Bidang Kesehatan pada Rumah Sakit H.L. Manambai bdulkadir Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021	II-72
Tabel 2- 65 Cakupan Rawat Jalan, Rawat Inap dan IGD Berdasarkan Cara Bayar Tahun 2020 – 2021	II-74
Tabel 2- 66 Pencapaian SPM Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2021	II-75
Tabel 2- 67 Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019-2021	II-75
Tabel 2- 68 Kondisi Jalan di Provinsi NTB (kondisi 31 Desember 2021)	II-76
Tabel 2- 69 Proporsional Jumlah Penduduk Pengguna Layanan Air Bersih Tahun 2021..	II-83
Tabel 2- 70 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang Terhadap Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam RPJMD	II-83
Tabel 2- 71 Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Provinsi NTB 2021 .	II-85
Tabel 2- 72 Capaian Indikator Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB Tahun 2021	II-85
Tabel 2- 73 Data Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi NTB Tahun 2018 – 2021	II-86
Tabel 2- 74 Data Penanganan RTLH Berdasarkan Jenis Penanganannya.....	II-87
Tabel 2- 75 Luas Kawasan Kumuh Dan Capaian Kawasan Kumuh yang Tertangani Tahun 2021	II-88
Tabel 2- 76 Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Perangkat Daerah Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2021	II-88
Tabel 2- 77 Capaian Indikator Kinerja Satpol PP Provinsi NTB berdasarkan RPJMD Tahun 2019-2023	II-90
Tabel 2- 78 Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 ..	II-91
Tabel 2- 79 Capaian Indikator Urusan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2019-2021.....	II-91
Tabel 2- 80 Kejadian Bencana Non Alam di Provinsi NTB Tahun 2021	II-93

Tabel 2- 81 Target Standar Pelayanan Minimal yang terkena dampak gangguan Tramtibum akibat Penegakan Perda/Perkada Tahun 2021	II-95
Tabel 2- 82Capaian Indikator Urusan Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB Tahun 2021	II-95
Tabel 2- 83 Data Prosentase PMKS Yang Ditangani Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021	II-96
Tabel 2- 84 Data Cakupan Penduduk Miskin yang Mendapatkan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021.....	II-97
Tabel 2- 85 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2021	II-97
Tabel 2- 86 Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Urusan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021	II-98
Tabel 2- 87 Capaian Tingkat pengangguran Terbuka (TPP) Bidang Urusan Tenaga Kerja Tahun 2019 -2021	II-98
Tabel 2- 88 Jumlah Pencari Kerja Terdaftar dan Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021	II-101
Tabel 2- 89 Jumlah Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan Keterampilan Berbasis Kompetensi di BLK/LLK tahun 2019-2021	II-102
Tabel 2- 90Upgrading Instruktur Pada Lembaga Pelatihan Kerja Milik Pemerintah (BLK/LLK) 2021	II-103
Tabel 2- 91 Jumlah Total LPKS, Instruktur, Hasil Pelatihan dan LPKS Yang Sudah Diakreditasi/Belum Diakreditasi.....	II-104
Tabel 2- 92 Pencari Kerja Terdaftar Dan Lowongan Kerja Terdaftar (Dalam Negeri) Tahun 2021	II-104
Tabel 2- 93 Pencari Kerja Terdaftar Dan Lowongan Kerja Terdaftar Tahun 2021	II-105
Tabel 2- 94 Penerimaan Remittance Oleh Pemerintah Provinsi NTB yang Dikirim Melalui Bank Indonesia Maupun Kantor Pos	II-105
Tabel 2- 95 Perkembangan Jumlah PPTKIS di Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2021	II-106
Tabel 2- 96 Perkembangan Penanganan PMI Bermasalah di Provinsi NTB 2021 Menurut Kabupaten/Kota	II-106
Tabel 2- 97 Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan Tahun 2021	II-107
Tabel 2- 98 Jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) di Provinsi NTB Menurut Kewarganegaraan Tahun 2021	II-108
Tabel 2- 99 Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Tahun 2021	II-110
Tabel 2- 100 LKS Bipartit di Perusahaan Tahun 2021	II-110
Tabel 2- 101 Jumlah Tenaga Kerja Di NTB Yang Terdaftar Sebagai Anggota BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2021	II-112
Tabel 2- 102 Perusahaan Yang Sudah Melaksanakan Wajib Lapo Ketenagakerjaan Tahun 2021	II-112
Tabel 2- 103 Jumlah dan Jenis Pengujian K3 di Perusahaan Tahun 2021	II-113
Tabel 2- 104 Kecelakaan Kerja Tahun 2021	II-113
Tabel 2- 105 Capaian Indikator Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019-2021	II-114
Tabel 2- 106 Perkembangan Capaian dan Target predikat KLA Tahun 2017 - 2023.	II-115

Tabel 2- 107 Data Kasus Kekerasan Perempuan Dewasa Dan Anak Provinsi NTB Tahun 2019 -2021	II-116
Tabel 2- 108 Situasi Kecukupan Konsumsi Energi dan Protein Penduduk NTB Tahun 2021	II-117
Tabel 2- 109 Perkembangan Ketersediaan Energi dan Protein di Nusa Tenggara Barat Tahun 2016-2020	II-119
Tabel 2- 110 Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Provinsi NTB Tahun 2017 s.d 2021	II-121
Tabel 2- 111 Perkembangan Rasio Ketersediaan terhadap Kebutuhan Pangan Strategis Provinsi NTB Tahun 2017-2021	II-122
Tabel 2- 112 Perkembangan Ketersediaan Energi dan Protein di Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2021	II-122
Tabel 2- 113 Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pertanian Tahun 2021.....	II-123
Tabel 2- 114 Rekapitulasi Tanah Terindikasi Terlantar Berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU) s.d Tahun 2021.....	II-124
Tabel 2- 115 Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2019 s.d 2021... ..	II-127
Tabel 2- 116 Capaian Kinerja Dan Indikator Nilai Indeks Kualitas Air Laut Tahun 2019-2021	II-129
Tabel 2- 117 Capaian Indikator Urusan Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB Tahun 2021.....	II-130
Tabel 2- 118 Rekapitulasi Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota Se-NTB Sampai Dengan Desember 2021	II-131
Tabel 2- 119 Capaian Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB Tahun 2021	II-131
Tabel 2- 120 Rincian Status Desa tahun 2019 – 2021	II-132
Tabel 2- 121 Rekapitulasi Jumlah Lembaga Adat di Provinsi NTB Tahun 2019-2021	II-132
Tabel 2- 122 Posyantek yang telah terbentuk di Provinsi NTB	II-133
Tabel 2- 123 Rekapitulasi Perkembangan BUMDes Aktif di NTB 2019-2021.....	II-134
Tabel 2- 124 BUMDes Yang Mendapatkan Bantuan Penguatan Modal Tahun 2019-2021	II-135
Tabel 2- 125 Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019-2021	II-136
Tabel 2- 126 Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Urusan Perhubungan Tahun 2021	II-137
Tabel 2- 127 Perkembangan Jumlah Penumpang Angkutan Laut Tahun 2020-2021	II-138
Tabel 2- 128 Kecelakaan Transportasi Penyeberangan Pelabuhan Kayangan – Pototano	II-139
Tabel 2- 129 Kecelakaan Kendaraan Bermotor Pada Tahun 2021	II-139
Tabel 2- 130 Capaian Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2021	II-140

Tabel 2- 131 Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Urusan Koperasi Tahun 2021	II-144
Tabel 2- 132 Perkembangan Koperasi Aktif Provinsi NTB Tahun 2018-2021	II-144
Tabel 2- 133 Jumlah UMKM Binaan Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB Per 31 Desember 2021	II-145
Tabel 2- 134 Usulan Koperasi Berprestasi/ Modern Tahun 2021	II-145
Tabel 2- 135 Target dan Realiasi Program Penumbuhan Koperasi Syariah Kawasan Bebas Riba di Provinsi NTB Tahun 2019 -2021.....	II-146
Tabel 2- 136 Program Penumbuhan Koperasi Syariah Provinsi NTB Tahun 2019 s/d 2021	II-147
Tabel 2- 137 Realisasi Investasi PMA Menurut Sektor Periode Tahun 2019 – 2021	II-149
Tabel 2- 138 Realisasi Investasi PMA Menurut Kabupaten/Kota Periode Tahun 2019- 2021	II-150
Tabel 2- 139 Realisasi Investasi PMDN Menurut Sektor Periode Tahun 2019 – 2021	II-151
Tabel 2- 140 Jumlah Bidang Perizinan (Izin dan Non Izin) yang Diterbitkan Tahun 2019- 2021	II-152
Tabel 2- 141 Capaian Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB Tahun 2021	II-153
Tabel 2- 142 Atlet yang dibina pada Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD) Tahun 2021.....	II-154
Tabel 2- 143 Pemuda Berprestasi di Tingkat Nasional Tahun 2021	II-154
Tabel 2- 144 Pemuda Berprestasi di Tingkat Nasional Tahun 2021	II-155
Tabel 2- 145 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB Tahun 2021	II-156
Tabel 2- 146 Capaian Indikator Kinerja Urusan Bidang Persandian Tahun 2021.....	II-157
Tabel 2- 147 Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Urusan Kebudayaan Tahun 2020 – 2021	II-159
Tabel 2- 148 Cagar Budaya (Situs) yang telah direvitalisasi di Kabupaten / Kota se NTB Tahun 2021	II-159
Tabel 2- 149 Kalender kegiatan UPT Taman Budaya Tahun 2021	II-160
Tabel 2- 150 Pengunjung Museum Negeri Provinsi NTB Tahun 2017-2021.....	II-161
Tabel 2- 151 Kalender Kegiatan Museum Negeri Provinsi NTB Tahun 2021	II-161
Tabel 2- 152 Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Urusan Perpustakaan Tahun 2019-2021	II-162
Tabel 2- 153 Judul dan Jumlah Koleksi Buku di Perpustakaan Provinsi NTB Tahun 2019 - 2021	II-165
Tabel 2- 154 Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Urusan Kearsipan Tahun 2021	II-165
Tabel 2- 155 Upaya Pengelolaan Arsip Tahun 2019 - 2021	II-165
Tabel 2- 156 Daftar Nama OPD yang Telah Memiliki Record Center sampai dengan Tahun 2021	II-166
Tabel 2- 157 Capaian Indikator Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021	II-167
Tabel 2- 158 Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya Per Komoditas Tahun 2019 – 2021	II-170

Tabel 2- 159 Perkembangan data produksi perikanan tangkap Berdasarkan Jenis Usaha dan jenis Komoditas dan Usaha tahun 2019 s/d 2021	II-171
Tabel 2- 160 Data Produksi Lobster (Ton) di Provinsi NTB Tahun 2019 s/d 2021 ...	II-172
Tabel 2- 161 Perkembangan Capaian Produksi Garam Provinsi NTB Tahun 2019-2021..	II-173
Tabel 2- 162 Proporsi kontribusi terhadap total produksi garam Provinsi NTB Tahun 2020 - 2021	II-174
Tabel 2- 163 Capaian Indikator Kinerja Daerah Provinsi NTB.....	II-176
Tabel 2- 164 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2019-2021	II-176
Tabel 2- 165 Angka Kunjungan Wisatawan Tahun 2019-2021	II-177
Tabel 2- 166 Tingkat Penghunian Kamar Dan Lama Menginap Di Provinsi NTB Tahun 2019-2021	II-178
Tabel 2- 167 Event Yang Terlaksana Di Tahun 2021	II-180
Tabel 2- 168 Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Urusan Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Tahun 2021.....	II-182
Tabel 2- 169 Capaian Pertambahan Nilai PDRB sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan 201-2021.....	II-183
Tabel 2- 170 Nilai Tukar Petani (NTP) di NTB Tahun 2019 – 2021.....	II-184
Tabel 2- 171 Produksi Komoditas Strategis Tanaman Pangan di Provinsi NTB Tahun 2019 – 2021	II-184
Tabel 2- 172 Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Jagung Tahun 2020-2021	II-185
Tabel 2- 173 Produksi Komoditas Strategis Tanaman Hortikultura di Provinsi NTB Tahun 2019-2021	II-185
Tabel 2- 174 Alat dan Mesin Pertanian Tanaman Pangan, Kelembagaan Petani, Kelompok Penangkar Benih dan Regu Pengendali Hama Tahun 2018-2021..	II-186
Tabel 2- 175 Alokasi dan Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Provinsi NTB Tahun 2017-2021	II-187
Tabel 2- 176 Hasil Sertifikasi Luas Lulus Lapangan Tanaman Pangan Padi, Jagung dan Kedelai Tahun 2018-2021.....	II-187
Tabel 2- 177 Luas Serangan OPT Tanaman Padi, Jagung dan Kedelai Tahun 2018-2021..	II-188
Tabel 2- 178 Perbanyak Benih Sumber Padi, Jagung dan Kedelai Tahun 2019-2021....	II-188
Tabel 2- 179 Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan di Provinsi NTB Tahun 2019-2021	II-189
Tabel 2- 180 Luas Areal, Produksi dan Jumlah Petani Pada Komoditi Tembakau Tahun 2019 - 2021	II-189
Tabel 2- 181 Capaian Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Urusan Pertanian pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2021	II-190
Tabel 2- 182 Data Ketersediaan Produksi Daging dan Telur Tahun 2021	II-190
Tabel 2- 183 Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) di NTB Tahun 2019 - 2021	II-191
Tabel 2- 184 Populasi Ternak di Provinsi NTB Tahun 2019 - 2021.....	II-192
Tabel 2- 185 Produksi Semen Beku Balai Inseminasi Buatan Tahun 2021.....	II-192

Tabel 2- 186 Produksi Daging di Provinsi NTB Tahun 2019-2021	II-192
Tabel 2- 187 Ternak Bibit dan Ternak Potong ke Luar dari Provinsi NTB Tahun 2019- 2021	II-193
Tabel 2- 188 Unit Usaha yang telah memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) tahun 2021	II-193
Tabel 2- 189 Data RPH / TPH Tahun 2021	II-194
Tabel 2- 190 Pasar Hewan Kabupaten/Kota Prov.NTB Tahun 2021	II-194
Tabel 2- 191 Capaian Kinerja Dan Indikator Bidang Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2019-2021	II-195
Tabel 2- 192 Rekapitulasi Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2021	II-197
Tabel 2- 193 Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021	II-198
Tabel 2- 194 Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Urusan Perdagangan Tahun 2021	II-198
Tabel 2- 195 Capaian Indikator Kinerja Pengeluaran Perkapita Tahun 2021	II-199
Tabel 2- 196 Capaian Indikator Kinerja Pengeluaran Perkapita Tahun 2021	II-199
Tabel 2- 197 Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Urusan Perindustrian Tahun 2021	II-201
Tabel 2- 198 Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Perindustrian Tahun 2021	II-202
Tabel 2- 199 Daftar IKM yang Mendaftar HaKi Merek Daerah Tahun 2021	II-203
Tabel 2- 200 Sertifikasi Halal Produk Olahan Pangan Industri Kecil Menengah (IKM) Tahun 2021	II-210
Tabel 2- 201 Daftar IKM yang di Fasilitas SNI Tahun 2021	II-213
Tabel 2- 202 Nama-Nama Mesin Yang Telah Uji Report Tahun 2021	II-214
Tabel 2- 203 Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Urusan Transmigrasi Tahun 2021	II-215
Tabel 2- 204 Penempatan Transmigran Ke Berbagai Daerah Penempatan Di Seluruh Indonesia	II-215
Tabel 2- 205 Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Urusan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan pada Biro Organisasi Tahun 2020	II-216
Tabel 2- 206 Hasil Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Tahun 2019-2021	II-217
Tabel 2- 207 Hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi Tahun 2019-2021	II-217
Tabel 2- 208 Target dan Realisasi Legislasi Daerah Tahun 2019-2021	II-218
Tabel 2- 209 Jumlah Perda/Perbup/Perwal yang Difasilitasi dan Dievaluasi Pada Tahun 2019-2021	II-218
Tabel 2- 210 Capaian Indikator Urusan Bidang Urusan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan Perjanjian Kinerja (Kepala Biro dengan Gubernur) Tahun 2021	II-219
Tabel 2- 211 Realisasi Kegiatan tender UKPBJ Sumber dana APBD Provinsi NTB Tahun 2019 sd 2021	II-219
Tabel 2- 212 Realisasi Kegiatan Tender UKPBJ Provinsi NTB Tahun 2019 sd 2021 Sumber dana APBN Provinsi NTB	II-220

Tabel 2- 213 Capaian Indikator Urusan Bidang Administasi Pemerintahan pada Sekretariat DPRD Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	II-221
Tabel 2- 214 Peraturan Daerah inisiasi DPRD Provinsi dengantujuan/masalah yang diselesaikan.....	II-222
Tabel 2- 215 Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Urusan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan Pada Badan Penghubung Daerah Tahun 2021	II-223
Tabel 2- 216 Jumlah pengunjung di Anjungan NTB TMII 2019-2021	II-223
Tabel 2- 217 Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Urusan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan Pada Inspektorat Provinsi NTB Tahun 2021	II-224
Tabel 2- 218 Hasil Audit penyelenggaraan keuangan negara/daerah tahun 2019-2021..	II-224
Tabel 2- 219 Progres Penyelesaian Tindaklanjut Temuan Hasil Pemeriksaan penyelenggaraan keuangan negara/daerah tahun 2021	II-224
Tabel 2- 220 Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Urusan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan Pembangunan Tahun 2021	II-225
Tabel 2- 221 Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021	II-225
Tabel 2- 222 Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah Sesuai RPJMD Tahun 2019-2023	II-226
Tabel 2- 223 Opini BPK RI dalam 10 (sepuluh) tahun 2011-2020	II-226
Tabel 2- 224 Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Urusan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019-2020.....	II-227
Tabel 2- 225 Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Urusan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021.....	II-227
Tabel 2- 226 Data Penghapusan BMD yang telah dilaksanakan oleh BPKAD pada Tahun 2021	II-227
Tabel 2- 227 Perkembangan Anggaran Belanja Daerah Dalam BPKAD Provinsi NTB Selaku SKPD Tahun 2019-2020	II-228
Tabel 2- 228 Anggaran Belanja Daerah Dalam BPKAD Provinsi NTB Selaku SKPD dan SKPD Tahun 2021	II-228
Tabel 2- 229 Perkembangan Anggaran Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021.....	II-229
Tabel 2- 230 Perkembangan Belanja Daerah Dalam APBD Provinsi NTB Tahun 2019-2020	II-229
Tabel 2- 231 Perkembangan Belanja Daerah Dalam APBD Provinsi NTB Tahun 2021.....	II-229
Tabel 2- 232 Perkembangan Anggaran Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021	II-229
Tabel 2- 233 Capaian Indikator Urusan Bidang Keuangan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021	II-230

Tabel 2- 234 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi NTB Tahun 2018 - 2021	II-231
Tabel 2- 235 Target dan Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2021	II-232
Tabel 2- 236 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2021	II-233
Tabel 2- 237 Indeks Profesionalisme ASN Provinsi NTB Tahun 2019-2021	II-235
Tabel 2- 238 Capaian Indikator Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB Tahun 2019 s.d. 2021	II-235
Tabel 2- 239 Capaian Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Urusan Fungsi Penunjang Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021	II-236
Tabel 2- 240 Perhitungan 40% Pengembangan Kompetensi ASN Tahun 2021	II-237
Tabel 2- 241 Masa Perhitungan Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Jenis Pengembangan dan Jenis Jabatan	II-237
Tabel 2- 242 Capaian IPA Dimensi Kompetensi Tahun Anggaran 2021	II-238
Tabel 2- 243 Capaian Pengembangan Kompetensi menurut Jenis Kompetensi dan Jenis Jabatan Tahun 2021	II-238
Tabel 2- 244 Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Urusan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021	II-239
Tabel 2- 245 Capaian Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Tahun 2021 ...	II-241
Tabel 2- 246 Target Pembangunan Berdasarkan Sasaran Pembangunan Tahun 2021	II-258
Tabel 2- 247 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	II-260
Tabel 2- 248 Proporsi tingkat capaian Indikator Kinerja Utama	II-263
Tabel 2- 249 Capaian Indikator pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-264
Tabel 2- 250 Capaian Indikator pada Aspek Daya Saing Daerah	II-266
Tabel 2- 251 Capaian Indikator pada Aspek Pelayanan Umum	II-269
Tabel 3- 1 Realisasi dan Target Pembangunan Daerah Tahun 2021-2023	III-2
Tabel 3- 2 Angkatan Kerja dan Pengangguran Tahun 2021 – 2023	III-9
Tabel 3- 3 Dampak COVID-19 terhadap Penduduk Usia Kerja, Februari 2021 – Februari 2022	III-10
Tabel 3- 4 Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah NTB Tahun 2020 – 2023	III-16
Tabel 3- 5 Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Daerah NTB Tahun 2020 – 2023 ..	III-19
Tabel 3- 6 Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah NTB Tahun 2020 – 2023	III-22
Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Utama Provinsi NTB 2019-2023	VII-1
Tabel 7. 2 Indikator Kinerja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	VII-3

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat-Nya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah dapat merampungkan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

Dokumen RKPD Tahun 2023 ini disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023, serta dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program-program prioritas dan strategis nasional tahun 2023.

Pada saat proses penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023, masih terjadi pandemi global *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang melanda Indonesia sejak akhir tahun 2020, termasuk NTB. Oleh karena itu, dampak yang timbul akibat pandemi tersebut menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan Provinsi NTB di tahun 2023.

Alhamdulillah, penyusunan RKPD Tahun 2023 ini, telah dapat diselesaikan tepat waktu; oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, baik unsur Pemerintah Pusat, seluruh Perangkat Daerah, NGO dan para pemangku kepentingan lainnya yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen RKPD ini.

RKPD Tahun 2023 ini merupakan pedoman dalam menyiapkan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Dalam menyiapkan dokumen ini tentu masih dirasakan banyak kekurangan, sehingga saran masukan penyempurnaan dari berbagai pihak sangat diperlukan. Akhirnya Semoga Allah SWT membalas kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas semua pihak dalam menyiapkan dokumen RKPD ini; insya Allah menjadi andil dan kontribusi kita Bersama dalam membangun Provinsi Nusa Tenggara Barat mewujudkan NTB Gemilang.

Mataram, 30 Juni 2022

Tim Penyusun

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR :
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NTB TAHUN 2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan pembangunan dalam lingkup NKRI berpedoman pada Pembukaan UUD 1945, hal inilah yang menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan di Indonesia. Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses yang direncanakan untuk menuju perubahan ke arah yang lebih baik di segala aspek pembangunan. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi yang memperhatikan konservasi lingkungan agar pembangunan yang berkelanjutan tetap terjaga. Selain itu perencanaan pembangunan merupakan awal dalam suatu proses pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya yang tersedia dan diharapkan dapat mendayagunakan potensi baik sumberdaya alam dan sumberdaya manusia sehingga memiliki kebermanfaatan yang lebih baik bagi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari NKRI, Pemerintah Provinsi NTB juga memiliki kewajiban dalam menyusun RKPD tersebut. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD Provinsi NTB diharapkan dapat menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat NTB baik dalam skala nasional maupun regional.

Sistem perencanaan pembangunan nasional menerapkan sistem perencanaan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Selain perencanaan dengan pendekatan-pendekatan tersebut di atas dan keselarasan dengan perencanaan pembangunan nasional, penyusunan RKPD Provinsi NTB juga dilakukan melalui peningkatan kualitas kebijakan *Money Follow Priority Programs* dengan pendekatan Tematik-Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Penguatan implementasi *Money Follow Priority Programs* dilakukan dengan memperhatikan pada (1) pengendalian perencanaan, (2) perkuatan perencanaan dan penganggaran, (3) perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah, dan (4) penguatan integrasi sumber pendanaan pembangunan.

Dengan penerapan seluruh pendekatan perencanaan tersebut, diharapkan dokumen RKPD Provinsi NTB dapat menjadi dokumen perencanaan yang memenuhi prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta

kemandirian dengan menjaga keseimbangan dan kesinambungan kemajuan dan kesatuan Nasional.

Penyusunan RKPD Provinsi NTB Tahun 2023 merupakan tahun terakhir atau tahun kelima dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2019-2023 yang telah mengalami perubahan melalui Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023. Sebagai gambaran bahwa dalam tahapan pencapaian RPJMD Provinsi NTB pada tahun pertama fokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa tahun 2018 dengan percepatan pemulihan sosial ekonomi masyarakat, tahap kedua penguatan ketahanan sosial ekonomi masyarakat melalui Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang pada masa pandemi Covid-19, tahap ketiga dan keempat fokus pada pemulihan sosial ekonomi masyarakat dengan penguatan industrialisasi dan penanggulangan kemiskinan dampak pandemi Covid-19 dan tahun kelima atau tahun terakhir adalah merupakan pencapaian kegemilangan masyarakat NTB yang sejahtera dan mandiri dengan Indeks Pembangunan Manusia yang semakin tinggi dengan mengusung Tema: ***“Peningkatan Produktivitas Industri dan Diversifikasi Ekonomi yang Inklusif Untuk Mewujudkan Kegemilangan NTB yang Berkelanjutan”***.

Selanjutnya berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 16 yang mengamanatkan bahwa RKPD disusun dengan tahapan yaitu: persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD. Penyusunan RKPD dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi dan sinkronisasi diantara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, fungsi dan kedudukan RPJMD adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan penjabaran operasional per tahun selama lima tahun dari RPJMD, dimana RKPD berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang tetap mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA). Sementara itu, hubungan antar dokumen perencanaan mulai dari RPJMD, RKPD, RENSTRA dan RENJA dengan dokumen anggaran, bahwa dokumen perencanaan bermuara pada penganggaran (APBD) yang melalui beberapa tahapan kebijakan keuangan yang perlu dirumuskan bersama baik antara pemerintah dan masyarakat maupun antara pemerintah dan legislatif yaitu KUA dan PPAS.

Dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2023, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan masih dalam penanganan dan pemulihan dampak pandemi Covid-19. Oleh sebab itu dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2023, prioritas dalam rangka pemulihan perekonomian dan kesehatan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi dampak Covid-19 merupakan tambahan prioritas pembangunan dari prioritas lainnya yang sudah

ditetapkan dalam RPJMD. Penambahan prioritas ini akan ditegaskan kembali dalam setiap tahapan perencanaan sejak Forum Konsultasi Publik, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2023 hingga ditetapkan dan dilaksanakan pada APBD Provinsi NTB Tahun 2023.

Penyusunan RKPD Tahun 2023 merupakan momentum penting dalam perencanaan pembangunan di tengah pandemi Covid-19 menuju masa endemi, dimana ada 7 (tujuh) aksi dalam penanganannya yaitu (1) Memulihkan kegiatan ekonomi masyarakat, (2) Meningkatkan kemajuan pembangunan manusia, (3) Meningkatkan produktivitas industri, (4) Meningkatkan diversifikasi ekonomi inklusif, (5) Meningkatkan PAD dan pelayanan publik, (6) Memastikan kemantapan infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan, dan (7) Penurunan kemiskinan.

Dengan 7 (tujuh) aksi tersebut, diharapkan dapat mencapai Kegemilangan NTB yang tercermin dalam beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi daerah melalui peningkatan capaian vaksinasi, jaminan kesehatan, penguatan sektor produktif (pertanian, industri dan infrastruktur);
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui layanan kesehatan berkualitas, layanan pendidikan dan pendidikan vokasi;
3. Peningkatan industrialisasi sektor unggulan daerah melalui pengembangan industrialisasi pengolahan, pengembangan industri kreatif dan pengembangan ekonomi Hijau-Biru-Sirkular;
4. Perluasan lapangan kerja melalui penyediaan akses lapangan kerja, membangun kemitraan dengan dunia usaha dan peningkatan investasi;
5. Peningkatan pendapatan daerah melalui pengembangan potensi sumber pendapatan daerah, peningkatan layanan publik dan peningkatan sarana dan prasarana;
6. Infrastruktur layanan dasar yang mendukung penanggulangan kemiskinan, industrialisasi, diversifikasi ekonomi, kesiapsiagaan bencana dan kualitas lingkungan; dan
7. Target penurunan kemiskinan menjadi satu digit dan penanggulangan kemiskinan ekstrim melalui Gerakan Multi Pihak.

Berdasarkan pendekatan dan metode perencanaan penyusunan RKPD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka proses penyusunan RKPD Provinsi NTB Tahun 2023 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu diawali dengan *Kick Off Meeting*, Workshop Evaluasi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah, Temu Konsultasi Kewilayahan-Rapat Kerja Bappeda/Pemerintah Daerah Kabupaten/kota se-NTB untuk mendapatkan isu kewilayahan, Workshop Perumusan Isu Strategis Lintas Sektor, Musrenbang Kabupaten/kota se-NTB, Forum Konsultasi Publik untuk mendapatkan saran dan masukan dari mitra pembangunan (stakeholders), Forum Perangkat Daerah, Forum Gabungan Perangkat Daerah, Pra-Musrenbang dan diakhiri dengan Musrenbang Provinsi NTB.

Setelah pelaksanaan Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional dilanjutkan dengan penyusunan rancangan akhir RKPD Provinsi NTB Tahun 2023 untuk penajaman

dan penetapan daftar rencana program/kegiatan prioritas Provinsi NTB. Setelah rancangan akhir RKPD Tahun 2023 tersusun, dilanjutkan dengan proses penetapan RKPD Tahun 2023 melalui Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi NTB Tahun 2023 pada minggu ke-IV bulan Juni 2022.



Gambar 1- 1 Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi NTB Tahun 2023

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen RKPD Provinsi NTB Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26);
27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi NTB: 12/297/2017);
28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 2; Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2-40/2021).

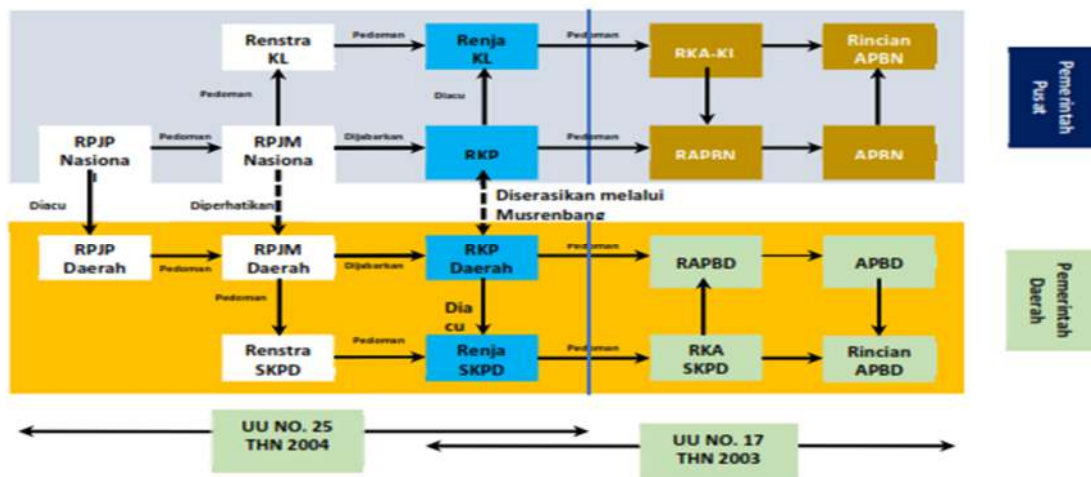
1.3 Hubungan Antar Dokumen

Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.1. Posisi dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan merupakan penjabaran RPJMD yang berpedoman pada RPJPD. Keberadaan RKPD tersebut dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, merupakan satu bagian

penting yang akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) perangkat daerah, dimana Renja perangkat daerah akan menjadi bahan masukan dalam finalisasi RKPD. Dalam hubungannya dengan RKP, RKPD diserasikan dengan RKP melalui forum Musrenbang Nasional.

Dalam menyusun RKPD Tahun 2023, Pemerintah Provinsi NTB memperhatikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan RKPD merupakan bagian dari penerapan sistem perencanaan pembangunan nasional, dan bagian dari penerapan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu. RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat disusun dengan memperhatikan kebijakan tingkat nasional, yang mengacu pada RKP tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020-2024 serta Renstra masing-masing Kementerian dan Lembaga Pemerintah non Kementerian di tingkat pusat. Selain itu dalam konteks Daerah, dokumen RKPD Tahun 2023 juga disusun dengan memperhatikan kebijakan jangka panjang daerah sesuai RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025 yang dijabarkan melalui RPJMD Tahun 2019-2023 dengan mengacu pada penetapan program prioritas serta memperhatikan Renstra Masing-masing Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Selanjutnya dalam kaitannya dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka dokumen RKPD Provinsi NTB menjadi pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS, yang merupakan dasar untuk penyusunan RKA-SKPD dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan APBD NTB. Dengan demikian, dokumen RKPD Provinsi NTB Tahun 2023 menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan dengan dokumen lainnya dan menjadi bagian dalam proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.



Gambar 1- 2 Hubungan antar dokumen perencanaan

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Dokumen RKPD Provinsi NTB Tahun 2023 adalah menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi NTB yang memuat arah kebijakan, sasaran, prioritas dan program pembangunan serta kegiatan yang bersifat terukur, terpadu, berorientasi pada pendekatan fungsi pembangunan dan berkelanjutan dalam rangka untuk mewujudkan

sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan RKPD Provinsi NTB Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

8. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Provinsi NTB;
9. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
10. Menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 dan sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023;
11. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
12. Menjadi acuan penyelarasan prioritas pembangunan Provinsi dengan Kabupaten/Kota tahun 2023;
13. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
14. Menjadi acuan dalam pengembangan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Provinsi NTB, Pelaku Usaha Swasta dan Masyarakat; dan antar Pemerintah Provinsi NTB dengan pemerintah daerah lainnya.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika dokumen RKPD Tahun 2023, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
Menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan dokumen RKPD Provinsi NTB Tahun 2023.
- 1.2. Dasar Hukum
Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Provinsi NTB Tahun 2023.
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
Menjelaskan hubungan antara RKPD Provinsi NTB Tahun 2023 dengan dokumen perencanaan lainnya.
- 1.4. Maksud dan Tujuan
Menjelaskan tujuan dan maksud dalam penyusunan RKPD Provinsi NTB Tahun 2023.
- 1.5. Sistematika
Menguraikan sistematika yang digunakan dalam penyusunan RKPD Provinsi NTB Tahun 2023.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

Menjelaskan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2022 dan Realisasi RPJMD

Menjelaskan mengenai evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2022 dan RPJMD Tahun 2019-2023.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Menjelaskan permasalahan utama mengenai urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menjelaskan mengenai kondisi pembangunan ekonomi NTB Tahun 2021-2022 dan tantangan atau prospek perekonomian Tahun selanjutnya.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menjelaskan mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, menjelaskan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran pembangunan Nasional Tahun 2023 dan tujuan sasaran pembangunan Provinsi NTB Tahun 2023.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

Menjelaskan tentang arah kebijakan dan rumusan prioritas pembangunan Nasional Tahun 2023, Telaahan terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD, isu strategis dan arah kebijakan pembangunan Provinsi NTB Tahun 2023, Prioritas Pembangunan Pemerintah NTB Tahun 2023 dan sinkronisasi dan keterkaitan antara prioritas pembangunan Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2023.

4.3. Kerja Sama Pembangunan Daerah Antar Provinsi

Menjelaskan mengenai kerjasama dengan Provinsi Jawa Timur dan Kerjasama Regional Sulawesi Selatan, Bali dan NTT

4.4. Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon dan Ekonomi Hijau, Biru dan Sirkular

4.5. Inovasi

Menjelaskan mengenai Inovasi Perencanaan tahunan daerah dan inovasi pembangunan daerah

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

- 5.1. Kebijakan Umum Arah Pembangunan Kabupaten/kota
- 5.2. Penerapan Standar Pelayanan Minimal
- 5.3. Indikator Makro Kabupaten/kota
- 5.4. Sinergitas Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/kota

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2023

- 6.1. Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari APBN Tahun 2023
Menjelaskan mengenai dana dekonsetrasi dan tugas pembantuan.
- 6.2. Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023
- 6.3. Rencana Program Kegiatan yang Mendukung Prioritas Daerah (PD)
- 6.4. Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
- 6.5. Rencana Program Kegiatan yang Bersumber dari Mitra Pembangunan
Menjelaskan sumber-sumber pendanaan pembangunan Non APBD yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan daerah.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

- 7.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Memuat penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada akhir tahun perencanaan.
- 7.2. Penetapan Proyeksi Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Menjelaskan mengenai indikator kinerja kunci tingkat dampak (*impact*) dan indikator kinerja tingkat hasil (*outcome*).

BAB VIII PENUTUP

Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan RKPD Provinsi NTB diperlukan sinergitas di jajaran pemerintah Provinsi NTB, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Aspek Geografi

Luas wilayah Provinsi NTB mencapai 49.312,19 km² terdiri dari daratan seluas 18.572,32 km² (40,81%) dan perairan laut seluas 29.187,71 km² (59,19%) dengan panjang garis pantai 2.333 km. Terdapat dua pulau besar yaitu Pulau Lombok seluas 4.699,83 km² (23,35%) dan Pulau Sumbawa seluas 15.424,65 km² (76,65%) yang dikelilingi oleh 415 pulau-pulau kecil (Tabel 2-1). Secara geografis, Provinsi NTB terletak antara 115°46' - 119°05' Bujur Timur dan 8°10' - 9°5' Lintang Selatan dengan batas wilayah: sebelah utara Laut Jawa dan Laut Flores, sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah barat Selat Lombok & Provinsi Bali, dan sebelah timur Selat Sape & Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel 2-1 Luas Wilayah Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Luas (km ²)	Persentase	Jumlah Pulau
Lombok Barat	896,56	4,83	125
Lombok Tengah	1.095,03	5,90	26
Lombok Timur	1.230,76	6,63	39
Lombok Utara	776,25	4,18	3
Mataram	61,30	0,33	-
Sumbawa Barat	1.849,02	9,96	16
Sumbawa	6.643,98	35,77	65
Dompu	2.391,54	12,88	21
Bima	3.405,63	18,34	120
Kota Bima	222,25	1,20	-
NTB	18.572,32	100,00	415

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022

Secara Administratif Provinsi NTB terdiri atas 8 kabupaten dan 2 kota dengan 117 kecamatan dan 1.152 desa/kelurahan. Jumlah kecamatan, desa/kelurahan dan luas wilayah menurut kabupaten/kota di Provinsi NTB disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-2 Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2020

NO	KABUPATEN / KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	LUAS WILAYAH (Km ²)
1	Kabupaten Lombok Barat	10	122	1.053,87
2	Kabupaten Lombok Utara	5	43	809,53
3	Kabupaten Lombok Tengah	12	139	1.169,58
4	Kabupaten Lombok Timur	21	254	1.605,55
5	Kabupaten Sumbawa	24	165	6.643,98
6	Kabupaten Dompu	8	81	2.320,00
7	Kabupaten Bima	18	192	4.389,40
8	Kabupaten Sumbawa Barat	8	65	1.849,02
9	Kota Mataram	6	50	61,30
10	Kota Bima	5	41	222,25
	Jumlah	117	1.152	20.124,48

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2021

- Topografi

Topografi wilayah Provinsi NTB bervariasi dari 0 – 3.726 mdpl untuk Pulau Lombok dan 0 – 2.755 mdpl untuk Pulau Sumbawa, dengan klasifikasi ketinggian wilayah 0 - 100 mdpl sekitar 23,76% (seluas 478.911 Ha), ketinggian 100 - 500 mdpl sekitar 37,39% (seluas 753.612 Ha), ketinggian 500 - 1000 mdpl sekitar 15,25% (seluas 307.259 Ha) dan lebih dari 1000 mdpl 23,60% (seluas 475.533 Ha).

- Geologi

Geologi wilayah Provinsi NTB didominasi oleh batuan gunung api serta aluvium (resen). Batuan tertua berumur tersier sedangkan yang termuda berumur kuartar. Batuan tersier di Pulau Lombok terdiri dari perselingan batu pasir kuarsa, batu lempung, breksi, lava, tufa dengan lensa-lensa batu gamping, batu gamping, dan dasit. Batuan tersier di Pulau Sumbawa terdiri dari lava, breksi, tufa, andesit, batu pasir tufan, batu lempung, dasit, tonalit, tufa dasitan, batu gamping berlapis, batu gamping tufan, dan lempung tufan.

- Hidrologi

Sub satuan wilayah sungai/daerah aliran sungai di satuan wilayah sungai Lombok dan satuan wilayah sungai Sumbawa dibagi menjadi 18 sub satuan wilayah sungai/daerah aliran sungai (SSWS/DAS) berdasarkan SK Gubernur NTB No. 147 Tahun 1999. Satuan wilayah sungai (SWS) Lombok terdiri dari 4 (empat) SSWS meliputi: Dodokan, Menanga, Putih dan Jelateng. Sedangkan SWS Sumbawa terdiri dari 14 (empat belas) SSWS meliputi Jereweh, Rea, Rhee, Moyo Hulu, P, Moyo, Empang, Hoddo, Banggo, Parado, Sari, Rimba, Baka, Bako, dan Beh.

Inventarisasi cekungan air tanah di Provinsi NTB sebagaimana dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2-3 Inventarisasi Cekungan Air Tanah di Provinsi NTB

No	Cekungan Air	Luas (Km ²)	Air Tanah Bebas (Juta M ³ /Tahun)	Air Tanah Tertekan (Juta M ³ /Tahun)
1	Mataram – Selong	2.366	662	8
2	Tanjung – Sambelia	1.124	224	22
3	Sumbawa Besar	1.404	183	25
4	Empang	345	35	3
5	Pekat	977	220	10
6	Sanggar – Kilo	1.419	320	14
7	Dompu	375	63	6
8	Bima	1,102	165	16
9	Tawali – Sape	363	36	3

Sumber : Kajian Revisi RTRW Provinsi NTB, 2020

- **Klimatologi**

Berdasarkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pada tahun 2017 temperatur udara maksimum di Provinsi NTB berkisar 33,2°C – 33,6°C, temperatur udara minimum 17°C – 21,4°C dan temperatur rata-rata 26,9°C–27,6°C. Kelembaban udara rata-rata 78%-85%, kelembaban udara minimum 57% - 64% dan kelembaban udara maksimum 94% - 96%. Kecepatan angin rata-rata 3-5 knots, tekanan udara antara 1003,1 – 1009,8 mb, lamanya penyinaran matahari 69% - 79% dan curah hujan berkisar antara 1.775 mm – 2.874 mm.

Curah hujan terendah terjadi pada bulan September sebesar 1 mm dan tertinggi pada bulan Desember sebesar 398 mm. Sementara, hari hujan terendah terjadi pada bulan Juli dan Oktober sebanyak 1 hari dan tertinggi di bulan Desember sebanyak 25 hari. Lama penyinaran matahari terendah terjadi pada bulan Januari sebesar 61% sedangkan tertinggi terjadi pada bulan Oktober sebesar 93%. Rata-rata kecepatan angin setiap bulan berkisar antara 3 sampai 5 knots. Rata-rata kecepatan angin terendah terjadi di bulan Februari dan Desember serta tertinggi pada bulan Agustus, September, dan Oktober.

- **Wilayah Rawan Bencana**

Wilayah Rawan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-4 Lokasi Kawasan Rawan Tanah Longsor

Lokasi	Kawasan Rawan Tanah Longsor
Rawan Tanah Longsor Tipe A	
Kab. Lombok Barat dan Lombok Utara	Kawasan sekitar Rinjani, Malimbu dan Sekotong
Kab. Lombok Tengah	Kawasan sekitar Rinjani bagian selatan
Kab. Lombok Timur	Kawasan sekitar Rinjani bagian timur dan sekitar Gunung Nangi

Lokasi	Kawasan Rawan Tanah Longsor
Kab. Sumbawa Barat	Kawasan sekitar Taliwang, Seteluk, Jereweh, Maluk dan Punik
Kab. Sumbawa	Kawasan sekitar Alas, Semongkat, Lenangguar dan Empang
Kab. Dompu	Kawasan Sekitar Tambora, Ranggo dan Paradowane
Kab dan Kota Bima	Kawasan sekitar Tambora Bagian timur, Bima dan Karumbu
Rawan Tanah Longsor Tipe B	
Kab. Lombok Barat	Kawasan Sekitar Rinjani, Malimbu, Lembar dan Sekotong
Kab. Lombok Tengah	Kawasan sekitar Rinjani bagian selatan dan sekitar Kuta
Kab. Lombok Timur	Kawasan Sekitar Rinjani bagian timur dan sekitar Gunung Nangi
Kab. Dompu	Kawasan sekitar Tambora bagian barat
Kab. Bima	Kawasan sekitar Tambora bagian timur dan sekitar Gunung Kuta

Sumber : Kajian Revisi RTRW Provinsi NTB, 2020

Berikut ini lokasi rawan bencana gunung berapi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel 2-5 Lokasi Kawasan Rawan Gunung Berapi

Lokasi	Kawasan Rawan Gunung Berapi
Gunung Rinjani	
Kab. Lombok Utara	Daerah Bahaya: Kecamatan Bayan dan Kampung Batusantek (sepanjang alur sungai Kokok Putih)
Kab. Lombok Timur	Daerah Bahaya: Kecamatan Aikmel, Sambelia, dan sepanjang alur Kokok Putih
Gunung Tambora	
Kab. Dompu	Daerah Bahaya: Daerah di sekitar kaldera dengan luas kurang lebih 58,7 km ²
Kota Bima	Daerah Waspada: jalur sepanjang sungai Ngguwu kara, sungai Ngguwu Tula (ketiganya termasuk Desa Beringin Jaya) dan Sungai Hodo (Desa Kesi)
Kab. Bima	Daerah Waspada : jalur sepanjang sungai Oi Marai dan sungai Mango (Desa Kawinda Toi), sungai Panihi (Desa Kawinda Nae), dan sungai Sumba (Desa Labuhan Kenanga)
Gunung Api Sangiang	
Kab. Bima	Daerah terlarang : daerah yang termasuk dalam lingkaran dengan jari-jari kurang lebih 5,0 Km ² yang berpusat di Puncak Doro Api yang diperluas sepanjang alur sungai kering Oi Sola, Oi sori Buntu, Sori Belanda, Sori Mbere, Sori Do Japa, Sori Panda, Sori Iso dan Sori Berano
	Daerah Bahaya I : hampir seluruh daratan pulau Sangiang termasuk dalam daerah ini, kecuali kampung Toro Panda yang berada di bagian selatan
	Daerah Bahaya II : daerah di sekeliling pantai pulau Sangiang

Sumber : Kajian Revisi RTRW Provinsi NTB, 2020

Berikut ini lokasi rawan bencana Tsunami di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel 2-6 Lokasi Kawasan Rawan Tsunami

Lokasi	Kawasan Rawan Tsunami
Kab. Lombok Barat	Kawasan Pesisir bagian selatan Kabupaten Lombok Barat

Lokasi	Kawasan Rawan Tsunami
Kab. Lombok Tengah	Kawasan pesisir bagian selatan Kabupaten Lombok Tengah yaitu Selong Belanak, Kuta, Tanjung Aan, Gerupuk dan Teluk Awang
Kab. Lombok Timur	Kawasan pesisir selatan Kabupaten Lombok Timur yaitu Ekas, Tanjung Ringgit, Tanjung Luar, Labuhan Haji
Kab. Sumbawa Barat	Kawasan pesisir bagian barat dan selatan yaitu Maluk, Benete, Tongo, Sejongong dan Sekongkong
Kab. Sumbawa	Kawasan pesisir bagian utara dan selatan yaitu Alas, Utan, Badas, Sumbawa Besar, Prajak, Labuhan Moyo Hilir, Empang dan Plampang bagian selatan, Lunyuk dan Teluk Panas, Plampang
Kab. Dompu	Kawasan pesisir bagian barat dan selatan Kabupaten Dompu, yakni Calabai, Nangamiro dan Kilo, serta pantai Hu'u di pesisir bagian selatan
Kota Bima	Pantai bagian barat Kota Bima
Kab. Bima	Kawasan pesisir bagian timur dan selatan Kabupaten Bima, yakni Sape dan Lambu, Karumbu dan daerah sekitarnya

Sumber : Kajian Revisi RTRW Provinsi NTB, 2020

Berikut ini lokasi rawan bencana angin topan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel 2-7 Lokasi Kawasan Rawan Angin Topan

Lokasi	Kawasan Rawan Angin Topan
Kab. Lombok Barat dan Lombok Utara	Kecamatan Gerung dsk, Sekotong Tengah, Darmada dsk, dan Bayan dsk
Kab. Lombok Timur	Kecamatan Gerung dsk, Sekotong Tengah, Darmada dsk, dan Bayan dsk
Kab. Sumbawa Barat	Kecamatan Brang Rea dsk
Kab. Sumbawa	Kecamatan Alas dsk, Unter Iwes dsk, Empang-Tarano dsk
Kab. Dompu	Hampir seluruh wilayah di Kabupaten Dompu
Kab. Bima	Kecamatan Woha dsk, monta dsk, Woja dsk

Sumber : Kajian Revisi RTRW Provinsi NTB, 2020

Berikut ini lokasi rawan bencana gelombang pasang di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel 2-8 Lokasi Kawasan Rawan Gelombang Pasang

Lokasi	Kawasan Rawan Gelombang Pasang
Kota Mataram	Sepanjang pesisir bagian barat yaitu Sekip dan Ampenan
Kab. Lombok Barat dan Lombok Utara	Sepanjang Pesisir Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara
Kab. Lombok Tengah	Pantai bagian selatan Kabupaten Lombok Tengah yaitu Selong Belanak, Kuta Tanjung Aan, Gerupuk dan Pantai Awang
Kab. Lombok Timur	Pantai selatan dan timur Kabupaten Lombok Timur yaitu Ekas, Tanjung Ringgit, Tanjung Luar, Labuhan Haji, Labuhan Lombok
Kab. Sumbawa Barat	Pantai bagian barat dan selatan yaitu Maluk, Benete, Tongo, Sejongong dan Sekongkong

Lokasi	Kawasan Rawan Gelombang Pasang
Kab. Sumbawa	Pantai bagian utara dan selatan yaitu Alas, Utan, Badas, Sumbawa Besar, Prajak, Labuhan Moyo Hilir, Empang dan Plampang bagian selatan, Lunyuk dan Teluk Panas, Plampang
Kab. Dompu	Pantai bagian barat Kabupaten Dompu, yakni Calabai, Nangamiro dan Kilo, serta Pantai Hu'u di pesisir bagian selatan
Kota Bima	Pantai bagian barat Kota Bima
Kab. Bima	Pantai bagian utara dan timur Kabupaten Bima, yakni Donggo dsk, Sape dan Lambu, Wera, Karumbu dan daerah sekitarnya

Sumber : Kajian Revisi RTRW Provinsi NTB, 2020

Berikut ini lokasi rawan bencana kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel 2-9 Lokasi Kawasan Rawan Kekeringan

Lokasi	Kawasan Rawan Tanah Kekeringan
Kab. Lombok Barat dan Lombok Utara	Kecamatan Lembar, Sekotong dan sekitarnya, Kedondong, Malimbu, Pemenang dan sekitarnya, Tanjung, Liuk-Kayangan-Selengen-Bayan, dan Medas
Kab. Lombok Tengah	Praya Barat, Praya Timur, Pujut, Praya Tengah, Janapria dan Praya Barat Daya
Kab. Lombok Timur	Keruak-Jerowaru-Sakra-Sakra Barat-Sakra Timur-Sikur, Labuhan Haji, Pringgabaya, Kecamatan Sambelia dan sekitarnya
Kab. Sumbawa Barat	Sejorong, Maluk, Jereweh-Endeh-Bertong Taliwang-Tepas-Seteluk-Labuhan Sepakeh
Kab. Sumbawa	Lunyuk Besar-Kopo-Batu Lanteh-Baturotok Punik, Alas-Penyengar-Utan-Potopedu-Rhee Loka, Lenangguar-Semongkat, Pototano-Labuhan-Serading-Batubulan-Lopok-Lape-kalaning-Tanjungberu Pungkit, Plampang-Empang
Kab. Dompu	Kempo, Hu'u, Kilo dan Mbawi
Kab. dan Kota Bima	Sila, Paradowane, Bima dan Sekitarnya, Tawali, Sape, dan P.Sangiang

Sumber : Kajian Revisi RTRW Provinsi NTB, 2020

Lokasi rawan bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tersebar di wilayah di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa yaitu daerah/kawasan yang berpotensi dan/atau yang pernah mengalami gempa skala VII s.d XII MMI (*modified mercally intensity*).

Untuk bencana yang timbul akibat kesalahan manusia, teridentifikasi kawasan rawan banjir sebagai berikut.

Tabel 2-10 Lokasi Kawasan Rawan Bencana Akibat Kesalahan Manusia

Lokasi	Kawasan Rawan Tanah Bencana Akibat Kesalahan Manusia
Kota Mataram	Daerah Ampenan Utara, Kopajali, Sekitar Kekalik, Sungai Meninting, Sungai Midang, Sungai Ancar, Sungai Unus dan Sungai Jangkak
Kab. Lombok Barat dan Lombok Utara	Daerah Empol (Sekotong Tengah), Bayan, Gangga-Lempenge, sepanjang sungai Penggolong Rempek dan Anyar, Sungai

Lokasi	Kawasan Rawan Tanah Bencana Akibat Kesalahan Manusia
	Bentek, Menggala (Pemenang), Berora, Gerung dan Jembatan Kembar
Kab. Lombok Tengah	Daerah di sepanjang aliran sungai yang terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Tengah
Kab. Lombok Timur	Daerah di sepanjang aliran sungai yang terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Timur
Kab. Sumbawa dan Sumbawa Barat	Sepanjang Brang Moyo di daerah Poto Tengke Moyo Hilir, Brang Beh di Lunyuk, Brang Rea di Taliwang, Brang Benete di Jereweh, Brang Labuhan Mapin di Alas, Brang Utan di Utan Rhee, Brang Muir di Plampang, Empang, Moyo Hulu, Ropang dan Lape Lopok
Kab. Dompu	Daerah di sepanjang aliran sungai yang terdapat di Kabupaten Dompu
Kota Bima	Daerah di sepanjang pantai di Kota Raba, khususnya yang dekat dengan lembah sungai
Kab. Bima	Daerah di sepanjang aliran sungai di Sori Wawo Maria, daerah Sape dan sekitarnya, Karumbu, Lambu, Ntoke-Tawali, Wera, Jatiwangi, dan daerah sekitar aliran sungai lainnya di wilayah Kabupaten Bima

Sumber : Kajian Revisi RTRW Provinsi NTB, 2020

Daya dukung air dapat dihitung menggunakan metode jasa ekosistem. Angka persentase yang ditampilkan dari hasil perhitungan jasa ekosistem adalah persentase lahan yang potensial dalam menghasilkan air. Kelas tinggi sedang dan rendah menunjukkan penyediaan air di Provinsi NTB.

Untuk menggambarkan status kemampuan daya dukung air pada Provinsi NTB, jumlah ketersediaan air pada provinsi NTB selanjutnya dibandingkan dengan tingkat konsumsi. Sehingga akan menghasilkan besaran selisih penyediaan (melampaui/belum melampaui) daya tampung.

Tabel 2-11 Status Penyediaan Air Provinsi NTB

Ketersediaan (m ³)	Kebutuhan (m ³)			Selisih (m ³)	Status Ketersediaan
	Domestik	Lahan	Total		
4.735.817.287	190.426.032	8.204.726.871	8.395.152.903	3.659.335.615	Terlampaui

Sumber: Bappeda Prov. NTB. 2019

Kebutuhan total air di Provinsi NTB sebesar 8.395.152.903 m³ sedangkan ketersediaan air sebanyak 4.735.817.287 m³ sehingga sudah berhasil melampaui kebutuhan dengan jumlah selisih 3.659.335.615 m³.

2.1.1.2 Demografi NTB

Perkembangan penduduk Provinsi NTB terus mengalami peningkatan. Jumlah penduduk NTB tahun 2020-2021 cenderung meningkat disebabkan oleh kelahiran alamiah dan migrasi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2020, jumlah penduduk Provinsi NTB tahun 2020 sebanyak 5.320.092 jiwa, terdiri atas laki-laki 2.656.208 jiwa (49,93%) dan perempuan 2.663.884 jiwa (50,07%).

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk yang dilaksanakan BPS Provinsi NTB Tahun 2020, laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan yakni, hal ini disebabkan adanya perubahan perhitungan menggunakan variabel baru yang bersumber data administrasi kependudukan.

Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk NTB tahun 2020 – 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-12 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi NTB Tahun 2020-2021

No	Kabupaten/Kota	Penduduk (Ribu)		Laju Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2020	2021
1	Lombok Barat	721,4	731,8	1,80	1,91
2	Lombok Tengah	1.034,9	1.049,7	1,80	1,92
3	Lombok Timur	1.325,2	1.343,9	1,77	1,88
4	Lombok Utara	247,4	251,5	2,08	2,19
5	Mataram	429,7	432,0	0,63	0,74
Pulau Lombok		3.758,6	3.808,9	1,62	1,73
6	Sumbawa Barat	145,8	148,5	2,33	2,44
7	Sumbawa	509,8	517,8	1,99	2,10
8	Dompu	236,7	238,2	0,75	0,87
9	Bima	514,1	520,4	1,53	1,65
10	Kota Bima	155,1	156,2	1,82	1,93
Pulau Sumbawa		1.561,5	1.581,1	1,68	1,80
Jumlah		5.320,0	5.390,0	1,63	1,76

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022

Persebaran penduduk di Provinsi NTB belum merata, persentase penduduk yang tinggal di Pulau Lombok mencapai 70,65% sementara di Pulau Sumbawa sebesar 29,35%. Ketimpangan distribusi penduduk berdampak pada munculnya masalah menurunnya kualitas lingkungan hidup seperti ketersediaan sumber air, kerusakan hutan dan lahan, alih fungsi lahan, pencemaran lingkungan, pendangkalan sungai, dan lain-lain. Persebaran penduduk Provinsi NTB disajikan pada tabel dan gambar berikut.

Tidak meratanya distribusi penduduk antara kedua pulau tersebut di Provinsi NTB berimplikasi pada tingginya ketimpangan kepadatan penduduk di antara kedua pulau tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2-13 Kepadatan Penduduk Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019-2021

NO	KABUPATEN/KOTA	KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM ²)		
		2019	2020	2021
1	Lombok Barat	659.46	684.60	694
2	Lombok Tengah	810.11	884.81	898

3	Lombok Timur	747.79	825.41	837
4	Lombok Utara	272.27	305.61	311
5	Kota Mataram	7,939.89	7,008.99	7,048
	Pulau Lombok	755.39	799.74	
6	Sumbawa Barat	80.37	78.85	80
7	Sumbawa	68.89	76.72	78
8	Dompu	108.74	102.01	103
9	Bima	111.31	117.12	119
10	Kota Bima	778.54	698.04	703
	Pulau Sumbawa	98.55	101.23	
	Provinsi NTB	251.95	264.36	255

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022 (diolah)

Merujuk pada tabel di atas, Pulau Lombok mempunyai tingkat kepadatan penduduk lebih tinggi yakni delapan kali lipat dari Pulau Sumbawa yakni masing-masing sebesar 799,74 jiwa/km² dibandingkan 101,23 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kota Mataram yakni 7.008,99 jiwa/km² dan terendah adalah Kabupaten Sumbawa sebesar 76,72 jiwa/km².

Sex ratio merupakan perbandingan antaran jumlah penduduk laki dibanding jumlah penduduk perempuan. Sex ratio penduduk Provinsi NTB Tahun 2020 mencapai 99,71%. Besarnya sex ratio pada tahun 2019 adalah 94,36%, artinya jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk perempuan. Namun demikian, pertumbuhan penduduk laki-laki sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk perempuan meskipun secara keseluruhan cenderung menurun dari 1,17% tahun 2018 menjadi 1,13% di tahun 2019. Tabel berikut menyajikan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan pertumbuhannya secara rinci selama periode tahun 2016 - 2021.

Tabel 2-14 Jumlah Penduduk Provinsi NTB Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016-2021

Thn	Penduduk (Jiwa)			Pertumbuhan (%)			Sex Ratio
	L	P	Jumlah	L	P	Jlh	
2016	2.375.750	2.520.412	4.896.162	1,28	1,23	1,25	94,26
	48,52%	51,48%	100%				
2017	2.405.080	2.550.498	4.955.578	1,23	1,19	1,21	94,3
	48,53%	51,47%	100%				
2018	2.433.731	2.579.956	5.013.687	1,19	1,16	1,18	94,33
	48,54%	51,46%	100%				
2019	2.461.652	2.608.733	5.070.385	1,15	1,12	1,14	94,36
	48,55%	51,45%	100%				
2020	2.656.208	2.663.884	5.320.092	7,90	2,11	10,02	99,71
	49,93%	50,07%	100%				
2021	2.695.552	2.694.446	5.390.998	1,48	1,15	1,31	100,00
	50,01%	49,99%	100%				

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022

Berdasarkan pada kelompok umur diketahui bahwa jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun) pada tahun 2021 sebanyak 3.626.598 orang atau sebesar 67,28% atau meningkat 1,34% dibandingkan tahun 2020. Sementara, kelompok umur tidak produktif sebesar 1.763.400 orang atau 32,72%. Penduduk perempuan usia produktif lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki yaitu mencapai 50,28% sedangkan laki-laki sebesar 49,72%. Dengan demikian, jumlah penduduk laki-laki tidak produktif (50,29%) lebih tinggi dari penduduk perempuan (49,72%). Adapun rasio ketergantungan (dependency ratio) sebesar 48,62 atau cenderung mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan semakin banyaknya sumber daya manusia yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi. Tabel berikut menyajikan jumlah penduduk berdasarkan pada kelompok umur dan jenis kelamin serta rasio ketergantungan tahun 2017 – 2021.

Tabel 2-15 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2017-2021

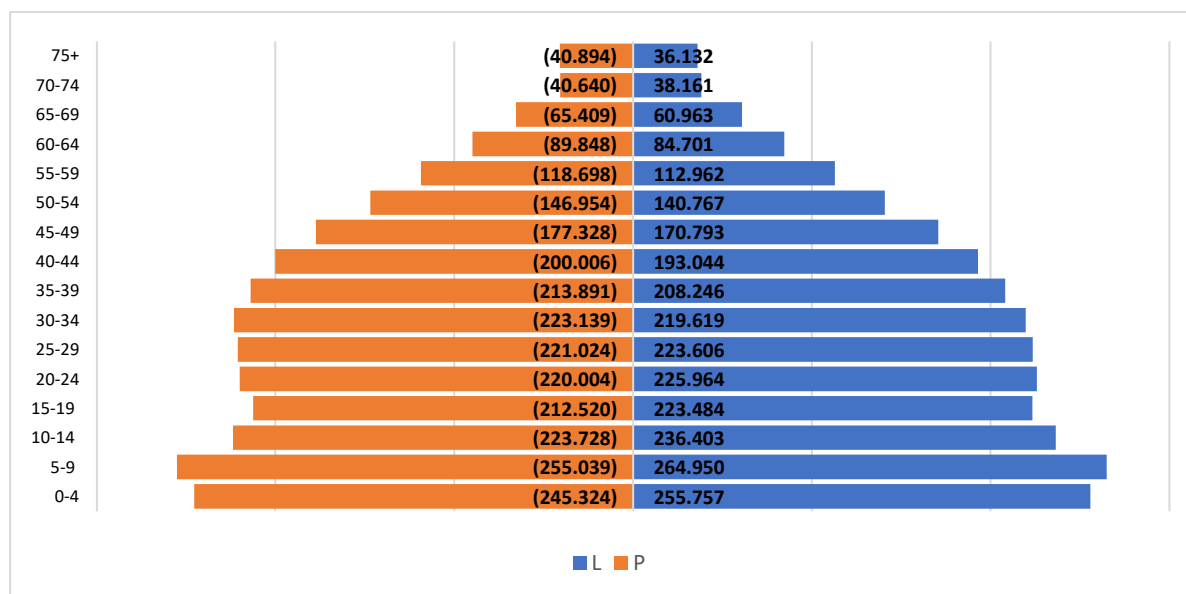
TAHUN	JENIS KELAMIN	KELOMPOK UMUR (TAHUN)			Dependency Ratio
		0 - 14	15 - 64	65	
2017	Laki	749.138	1.540.900	115.042	56,08
	Perempuan	718.95	1.697.088	134.46	50,29
	Total	1.468.088	3.237.988	249.502	53,04
2018	Laki	751.919	1.563.026	118.786	55,71
	Perempuan	722.099	1.719.054	138.803	50,08
	Total	1.474.018	3.282.080	257.589	52,76
2019	Laki	753.255	1.584.052	124.312	55,40
	Perempuan	723.150	1.741.351	144.265	49,81
	Total	1.476.405	3.325.403	268.577	52,47
2020	Laki	752.810	1.773.593	129.805	49,76
	Perempuan	719.174	1.805.088	139.622	47,58
	Total	1.471.984	3.578.681	269.427	48,66
2021	Laki	757.110	1.803.186	135.256	49,49
	Perempuan	724.091	1.823.412	146.943	47,77
	Total	1.481.201	3.626.598	282.199	48,62

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022

Pemerintah Provinsi NTB menghadapi tantangan terkait dengan bertambahnya jumlah penduduk, ketidakmerataan sebaran penduduk antara Pulau Lombok dengan Pulau Sumbawa, meningkatnya tingkat kepadatan dan semakin bertambahnya penduduk kelompok umur produktif. Situasi dan kondisi ini telah mendorong pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan komprehensif kaitannya dengan strategi pembangunan yang tidak hanya mampu menyerap tenaga kerja melainkan juga memiliki daya ungkit dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga diharapkan dapat berkontribusi nyata bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Bonus demografi adalah suatu fenomena dimana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedangkan proporsi usia nonproduktif (0-14 tahun dan 65+ tahun) semakin berkurang. Berdasarkan struktur umur penduduk NTB 2021, kelompok umur produktif (15-64) lebih mendominasi. Struktur umur penduduk tersebut disajikan pada gambar berikut.

Gambar 2- 1 Struktur Umur Penduduk NTB Tahun 2021



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek pemerataan juga menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan pembangunan. Dalam bagian ini akan diuraikan beberapa indikator yang menggambarkan kondisi tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2.1.2.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian Nusa Tenggara Barat secara makro adalah melalui data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan.

Kinerja ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 2,30 persen dibandingkan tahun 2020. Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 8,94 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 67,60 persen.

Selanjutnya, berdasarkan sumber laju pertumbuhan secara *year-on-year* triwulan IV-2021 terhadap triwulan IV-2020 ekonomi Nusa Tenggara Barat juga mengalami pertumbuhan sebesar 3,16 persen. Dimana dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,14 persen sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Luar Negeri mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 19,72 persen.

Secara umum perekonomian Nusa Tenggara Barat mulai pulih setelah dua tahun secara nasional mengalami dampak pandemi Covid-19. Adapun struktur PDRB Nusa Tenggara Barat menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan IV tahun 2021 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 19,95 persen; diikuti oleh Pertambangan dan Penggalan sebesar 18,69 persen; Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,82 persen; dan Konstruksi sebesar 10,76 persen. Sedangkan PDRB Nusa Tenggara Barat dari sisi pengeluaran Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 67,60 persen; diikuti Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 3,81 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 1,79 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 0,54 persen, dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) sebesar 0,52 persen. Sementara itu, Komponen Impor LN yang menjadi pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran mengalami kontraksi sebesar 43,22 persen.

Kinerja ekonomi Nusa Tenggara Barat pada triwulan IV-2021 menunjukkan arah perbaikan terutama dari sisi lapangan usaha dan komponen pengeluaran yang memberikan andil terbesar dalam perekonomian masyarakat Nusa Tenggara Barat, hal ini memberikan optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi selama tahun 2021 lebih baik dibanding tahun 2020 dimana pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat mengalami kontraksi sebesar 0,64 persen pada tahun 2020. Terkontraksinya pertumbuhan ekonomi merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang terjadi mulai pada triwulan III-2020 sebesar 1,25 persen, dengan kontraksi terdalam terjadi pada kategori industri pengolahan sebesar 20,02 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, kontraksi terjadi pada komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit (PK-LNPRT) sebesar 0,96 persen, hal ini menyebabkan penurunan aktivitas produksi pada beberapa lapangan usaha.

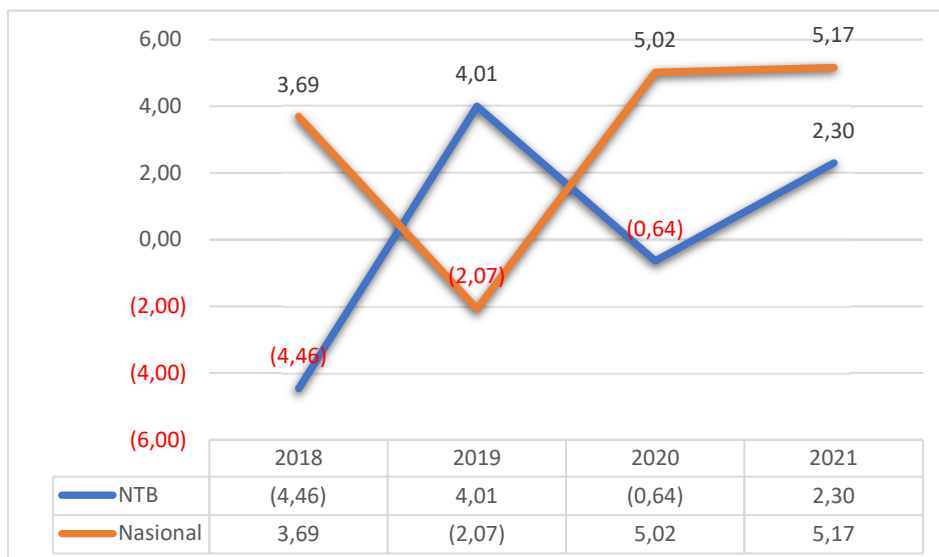
Tabel 2- 16 Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2019-2021

No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010			Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	1,38	-0,41	1,14	22,92	23,18	22,80
2	Pertambangan dan Penggalan	0,18	27,66	-0,15	13,49	17,43	17,33
3	Industri Pengolahan	4,07	-2,41	2,10	4,12	4,04	4,00
4	Pengadaan Listrik dan Gas	11,01	8,87	7,73	0,08	0,08	0,09

No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010			Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,64	4,19	0,49	0,08	0,08	0,08
6	Konstruksi	12,22	-14,26	8,94	10,56	9,09	9,75
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,37	-4,98	1,72	14,95	14,19	13,98
8	Transportasi dan Pergudangan	1,34	-31,36	2,14	7,28	4,96	4,99
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,03	-28,24	1,35	2,03	1,44	1,41
10	Informasi dan Komunikasi	4,12	12,38	4,98	1,96	2,20	2,21
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,40	11,12	4,39	3,65	4,03	4,24
12	Real Estate	4,76	1,04	1,47	3,26	3,28	3,19
13	Jasa Perusahaan	5,01	-3,44	0,33	0,18	0,18	0,17
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,63	2,92	1,74	6,17	6,57	6,49
15	Jasa Pendidikan	7,04	0,82	1,67	5,05	5,16	5,11
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,11	-2,38	7,87	2,02	2,01	2,09
17	Jasa Lainnya	5,47	-6,20	1,65	2,19	2,09	2,06
	PDRB dengan Tambang	3,90	-0,62	2,30	100,00	100,00	100,00
	PDRB tanpa Tambang						

Sumber : BPS NTB, 2022

Gambar 2- 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Nusa Tenggara Barat dan Nasional Tahun 2018 - 2021 (persen)

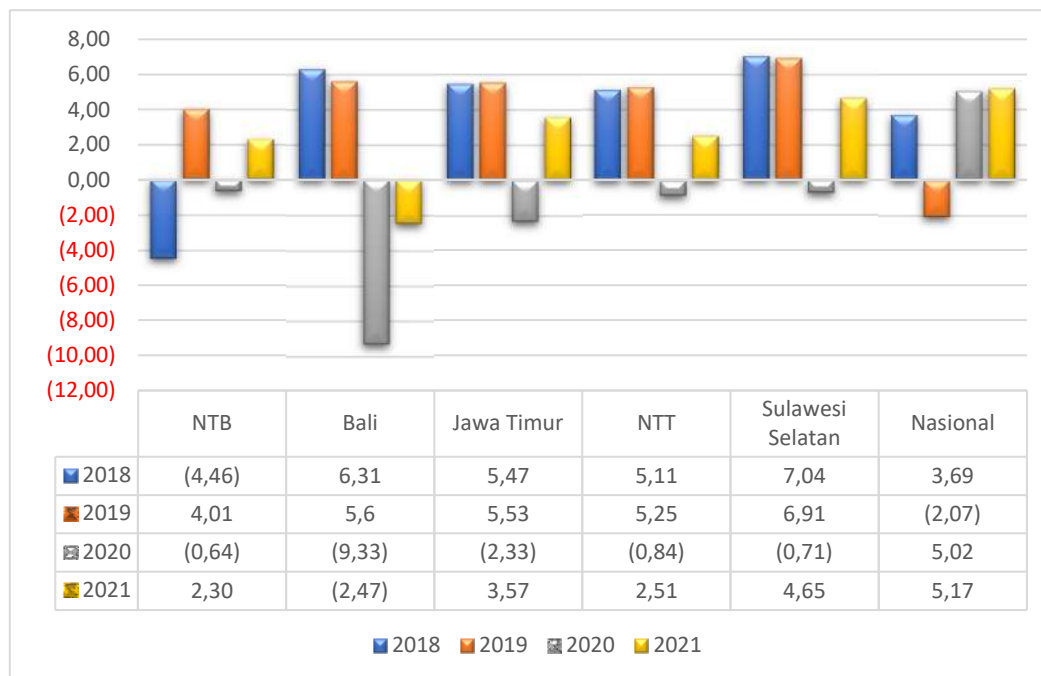


Sumber : BPS NTB, 2022. Diolah Bappeda Provinsi NTB, 2022

Pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir mengalami peningkatan yang lebih baik dari nasional, walaupun angka pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat secara nasional belum tercapai. Selanjutnya

perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat dibandingkan dengan Provinsi sekitar seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Bali dan Provinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat termasuk dalam kelompok sudah memenuhi target dalam RKP dimana Provinsi sekitarnya tersebut masih jauh dari target dalam RKP (>5% deviasi dari nilai target). Adapun Bali pada tahun 2021 mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar 2,47 persen selanjutnya Jawa Timur mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 3,57 persen, Nusa Tenggara Timur dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,51 persen dan Sulawesi Selatan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,65 persen serta semua Provinsi sekitar yang menjadi perbandingan dari laju pertumbuhan ekonomi secara nasional mengalami deviasi dari nilai target RKP yaitu dibawah 5 persen. Adapun perbandingan laju pertumbuhan dengan provinsi sekitar bisa dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2- 3 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nusa Tenggara Barat dengan Provinsi Sekitar dan Nasional Tahun 2018 – 2021 (persen)



Sumber : simreg.bappenas.go.id, 2022. Data diolah Bappeda Provinsi NTB, 2022

Selanjutnya perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2021 mencapai Rp140,15 triliun sedangkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp95,44 triliun, ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat dibandingkan tahun 2020 dengan ADHB sebesar Rp133,61 triliun dan berdasarkan ADHK 2010 mencapai Rp93,288 triliun merupakan refleksi capaian yang diperoleh dalam pembangunan dimana nilai tambah barang dan jasa meningkat pada tahun 2021 pada masa pandemi Covid-19.

Tabel 2- 17 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Tahun 2019-2021

No	Sektor Ekonomi	Atas Dasar Harga Berlaku (ADH)			Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)		
		2019	2020*	2021**	2019	2020*	2021**
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	30.368,89	30.976,8	31.960,4	21.569,97	21.466,1	21.711,2
2	Pertambangan dan Penggalian	17.995,65	23.288,9	24.283,2	13.121,22	16.606,1	16.580,7
3	Industri Pengolahan	5.442,72	5.393,7	5.604,5	4.441,24	4.351,6	4.442,9
4	Pengadaan Listrik dan Gas	106,27	112,9	120,4	88,00	95,8	103,2
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	105,46	111,8	114,0	72,32	76,0	76,4
6	Konstruksi	13.986,70	12.142,2	13.667,3	10.408,06	8.925,5	9.723,1
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19.795,66	18.962,3	19.596,8	13.583,10	12.908,9	13.131,5
8	Transportasi dan Pergudangan	9.650,36	6.625,9	6.998,2	6.594,80	4.526,6	4.623,5
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2686,8	1.924,6	1.973,0	1.580,49	1.130,0	1.145,2
10	Informasi dan Komunikasi	2.598,25	2.934,4	3.099,0	2.368,19	2.655,5	2.787,6
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.840,13	5.389,1	5.943,6	3.319,08	3.688,0	3.849,8
12	Real Estate	4.363,71	4.381,1	4.464,7	2.936,50	2.962,6	3.006,3
13	Jasa Perusahaan	245,13	239,4	240,3	173,88	167,7	168,3
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.174,65	8.772,8	9.096,0	4.859,12	5.001,0	5.088,0
15	Jasa Pendidikan	6.700,49	6.888,9	7.168,6	4.574,89	4.609,5	4.686,4
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.685,38	2.679,4	2.932,4	2.096,05	2.041,6	2.202,1
17	Jasa Lainnya	2.918,13	2.789,4	2.890,8	2.227,81	2.076,4	2.110,6
	PDRB dengan Tambang	132.674,15	133.613,7	140.153,3	94.014,74	93.288,9	95.436,8
	PDRB tanpa Tambang	114.678,49			80.893,52		

Sumber : BPS NTB, 2022

*: Angka Sementara

**: Angka Sangat Sementara

Pada sisi pengeluaran terjadi pertumbuhan pada tahun 2021 berdasarkan PDRB atas dasar berlaku dan harga konstan 2010. Komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah komponen Ekspor Luar Negeri tumbuh sebesar 67,60 persen, selanjutnya Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 3,81 persen dan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 1,79 persen. dimana ada salah satu komponen yang mengalami kontraksi sangat tinggi melebihi tahun 2020 adalah pada komponen Impor Luar Negeri sebesar -43,22 persen pada tahun 2021. Sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini dalam miliar rupiah.

Tabel 2- 18 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (miliar rupiah) Tahun 2019-2021

No	Komponen	Atas Dasar Harga Berlaku (ADH)			Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010		
		2019	2020*	2021**	2019	2020*	2021**
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	83.915,7	82.080,7	85.129,0	58.442,8	56.729,8	57.746,6
2	Pengeluaran Konsumsi LNPR	2.201,7	2.178,7	2.230,8	1.513,8	1.488,1	1.496,1
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	20.238,8	20.758,3	21.226,6	12.366,5	12.509,3	12.574,5
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	51.936,9	49.488,7	53.023,0	32.163,9	30.386,4	31.543,4
5	Perubahan Inventori	813,0	824,3	321,0	299,3	296,8	113,1
6	Ekspor LN	5.890,2	8.899,8	16.593,8	3.865,4	5.577,5	9.348,1
7	Impor LN	4.325,9	4.106,2	2.298,9	2.608,5	2.456,0	1.394,5
8	Net Ekspor AD	-28.170,3	-26.510,6	-36.071,9	-12.170,7	-11.243,1	-15.990,6
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	132.500,1	133.613,7	140.153,3	93.872,4	93.288,9	95.436,8

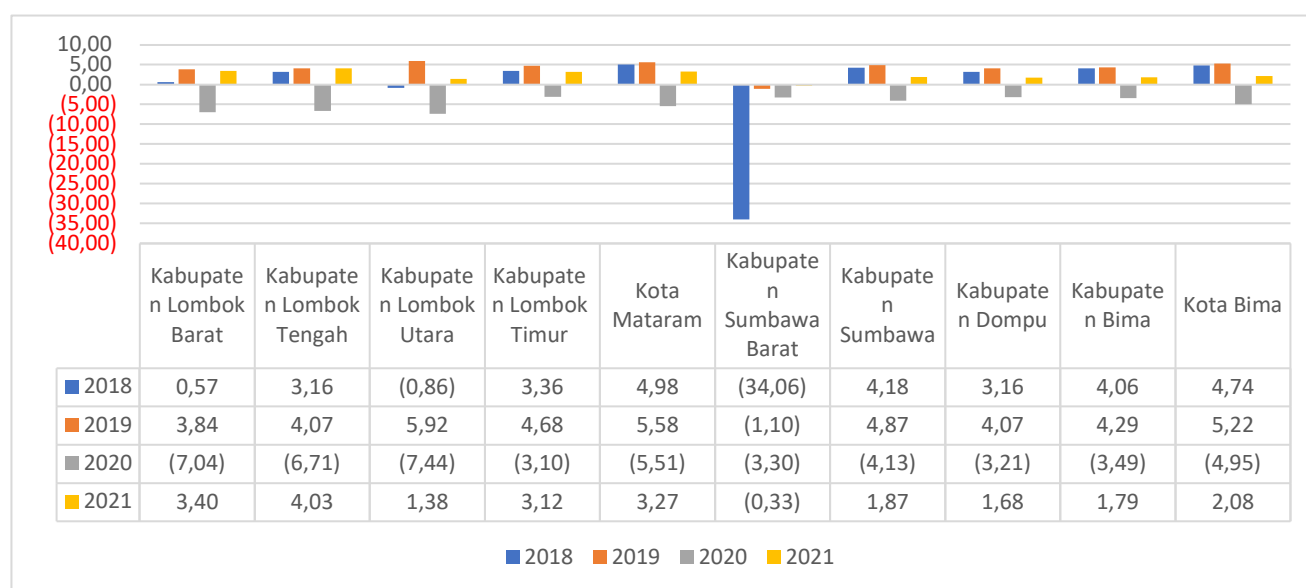
Sumber : BPS NTB, 2022

*: Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara

Secara spasial struktur perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat terbentuk oleh sepuluh (10) Kabupaten/kota, dimana pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat sebesar 2,30 persen. Adapun Kabupaten/kota yang mengalami kontraksi pada tahun 2021 adalah Kabupaten Sumbawa Barat dengan kontraksi sebesar 0,33 persen. selanjutnya Kabupaten/kota yang mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi adalah pada Kabupaten Lombok Barat dengan laju pertumbuhan sebesar 3,40 persen. Adapun laju pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2- 4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 - 2021 (persen)



Sumber : NTB dalam angka, 2022. Data diolah Bappeda NTB, 2022

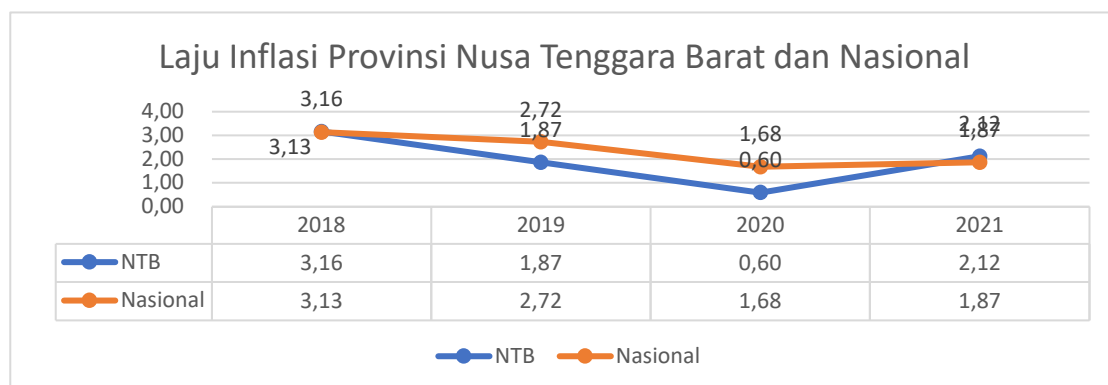
2.1.2.2 Laju Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Andil Inflasi merupakan besarnya sumbangan setiap komoditas yang mengalami fluktuasi harga terhadap inflasi atau deflasi yang terjadi di suatu kota atau secara nasional. Besarnya nilai perubahan indeks (inflasi/deflasi) yang terjadi setiap bulan, merupakan gabungan andil dari jenis barang/jasa yang mengalami fluktuasi harga pada bulan yang bersangkutan.

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pertama, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Kedua, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (*uncertainty*) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan, pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi dan Ketiga, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai Rupiah.

Inflasi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Laju inflasi Gabungan Dua Kota tahun kalender Desember 2021 sebesar 2,12 persen, lebih tinggi dibandingkan inflasi tahun kalender Desember 2020 sebesar 0,60 persen. Sedangkan laju inflasi “tahun ke tahun” Desember 2021 sebesar 2,12 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan laju inflasi “tahun ke tahun” di bulan Desember 2020 sebesar 0,60 persen. Selanjutnya laju inflasi tahun 2021 ini lebih tinggi dengan realisasi inflasi Nasional sebesar 1,87 persen.

Gambar 2- 5 Laju Inflasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nasional Tahun 2018 – 2021 (persen)



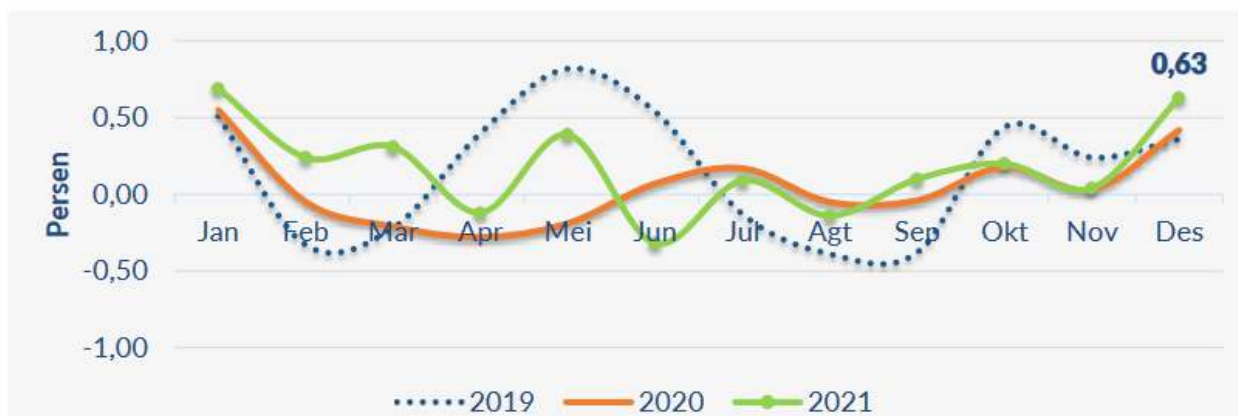
Sumber : NTB dalam angka, 2022. Data diolah Bappeda NTB, 2022

Berdasarkan hasil pemantauan, perkembangan harga berbagai komoditas secara umum menunjukkan peningkatan. Pada Bulan Desember 2021, inflasi Gabungan Dua Kota (Kota Mataram dan Kota Bima) sebesar 0,63 persen, atau terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,31 pada bulan November 2021 menjadi 105,97 pada bulan Desember 2021. Dengan angka inflasi tersebut, maka laju inflasi Gabungan tahun kalender (Desember 2021 terhadap Desember 2020) sebesar 2,12 persen dan laju inflasi tahun ke tahun' (Desember 2021 terhadap Desember 2020) sebesar 2,12 persen.

Inflasi Gabungan Dua Kota Bulan Desember 2021 sebesar 0,66 persen terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan dengan kenaikan indeks pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 1,38 persen; Kelompok Transportasi sebesar 1,11 persen; Kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,22 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,18 persen; Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,18 persen; Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 0,14 persen; Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,11 persen; Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 0,10 persen; dan Kelompok Pendidikan sebesar 0,00 persen. Sedangkan penurunan indeks terjadi pada Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,18 persen dan Kelompok Kesehatan sebesar 0,01 persen.

Lima komoditas yang mengalami kenaikan harga tertinggi di bulan Desember 2021 ini antara lain Cabai Rawit, Tomat, Angkutan Udara, Minyak Goreng, dan Tongkol Diawetkan. Sedangkan lima komoditas yang mengalami penurunan harga terbesar antara lain Daging Ayam Ras, Ikan Bandeng/Ikan Bolu, Bawang Merah, Ikan Ekor Kuning, dan Daun Kelor.

Gambar 2- 6 Inflasi Bulanan Gabungan Dua Kota (Kota Mataram dan Kota Bima) Tahun 2019–2021



Sumber : NTB dalam angka, 2022

Pada bulan Desember 2021 kelompok komoditas yang memberikan andil/sumbangan inflasi adalah Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 0,4401 persen; Kelompok Transportasi sebesar 0,1246 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,0375 persen; Kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,0121 persen; Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 0,0105 persen; Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan

Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,0084 persen; Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,0076 persen; Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 0,0015 persen; dan Kelompok Pendidikan sebesar 0,0000 persen. Sedangkan kelompok komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi adalah Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,0050 persen dan Kelompok Kesehatan sebesar 0,0001 persen

2.1.2.3 Tingkat Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat pada September 2021 tercatat sebesar 735,30 ribu orang (13,83 persen). Nilai ini lebih rendah dibandingkan kondisi Maret 2021, dimana jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat sebesar 746,66 ribu orang (14,14 persen). Terlihat adanya penurunan persentase penduduk miskin (P0) selama periode Maret 2021 – September 2021 yaitu sebesar 0,31 persen poin. Selain itu, nilai ini juga lebih rendah dibandingkan dengan September 2020 yang tercatat sebesar 746,04 ribu orang (14,23 persen).

Sejak Maret 2012 sampai September 2021 persentase penduduk miskin lebih sering mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin terendah adalah pada September 2019 yaitu sebesar 705,68 ribu orang. Sedangkan persentase penduduk miskin yang terendah selama periode tersebut adalah pada September 2021 yaitu sebesar 13,83 persen.

Tabel 2- 19 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi NTB Tahun 2012 – September 2021

Bulan	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Persentase Penduduk Miskin	Perubahan
Maret	2012	862,52	18,63	-1,1 poin
September		840,11	18,02	-0,61 poin
Maret	2013	843,66	17,97	0,05 poin
September		815,50	17,25	-0,72 poin
Maret	2014	820,82	17,24	-0,01 poin
September		816,62	17,05	-0,19 poin
Maret	2015	823,89	17,1	-0,05 poin
September		802,29	16,54	-0,56 poin
Maret	2016	804,45	16,48	-0,06 poin
September		786,58	16,02	-0,46 poin
Maret	2017	793,78	16,07	0,05 poin
September		748,12	15,05	-1,02 poin
Maret	2018	737,46	14,75	-0,3 poin
September		735,62	14,63	-0,12 poin
Maret	2019	735,96	14,56	-0,07 poin
September		705,68	13,88	-0,68 poin
Maret	2020	713,89	13,97	0,09 poin
September		746,04	14,23	0,26 poin
Maret	2021	746,66	14,14	-0,09 poin
September		735,30	13,83	-0,31 poin

Sumber : BPS NTB, diolah dari data suspenas, 2021

Memperhatikan Tabel tersebut di atas, perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin Provinsi Nusa Tenggara Barat cenderung mengalami penurunan. Namun kalau diamati setiap periode, penurunan penduduk miskin bersifat fluktuatif dan poin penurunannya bervariasi. Perkembangan tingkat kemiskinan bulan Maret 2021 sampai dengan September 2021 dijelaskan bahwa jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat pada bulan Maret 2021 sebesar 746,66 ribu orang, sedangkan pada September 2021 sebesar 735,30 atau berkurang sekitar 11.40 ribu orang. Adapun persentase penduduk miskin pada periode Maret 2021 – September 2021 mengalami penurunan sebesar 0,31 persen poin dari 14,14 persen menjadi 13,83 persen. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2021 sebesar 14,92 persen, turun 0,38 persen poin menjadi 14,54 persen pada September 2021. Sejalan dengan perkotaan, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan turun dari 13,37 persen pada Maret 2021 menjadi 13,12 persen pada September 2021.

Selanjutnya, untuk garis kemiskinan Nusa Tenggara Barat selama Maret 2021 – September 2021, Garis Kemiskinan mengalami kenaikan 4,30 persen, yaitu dari Rp 423.505,- per kapita per bulan pada Maret 2021 menjadi Rp 441.711,- per kapita per bulan pada September 2021. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditas makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada September 2021 sumbangan GKM terhadap GK sebesar 74,42 persen.

Tabel 2- 20 Garis Kemiskinan dan Perubahannya Menurut Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Bulan Maret 2021 dan September 2021

Daerah	Bulan	Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)		
			Makanan	Bukan Makanan	Total
Perkotaan	Maret	2021	325.304	109.147	434.451
	September		336.346	116.509	452.855
	Perubahan Maret s.d September (%)		3,39	6,75	4,24
Perdesaan	Maret		311.567	101.079	412.646
	September		320.916	109.465	430.381
	Perubahan Maret s.d September (%)		3,00	8,30	4,30
Perkotaan dan Perdesaan	Maret		318.425	105.080	423.505
	September		328.699	113.012	441.711
	Perubahan Maret s.d September (%)		3,23	7,55	4,3

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021 dan September 2021

Pada September 2021, lima komoditas makanan yang memberi sumbangan terbesar pada Garis Kemiskinan di daerah perkotaan secara berurutan dengan share masing-masing komoditas adalah beras 18,96 persen; rokok kretek filter 11,55 persen; daging ayam ras 3,71 persen; telur ayam ras 3,18 persen; dan kue basah 2,70 persen. Pada daerah perdesaan, lima komoditas makanan yang memberi sumbangan terbesar pada Garis Kemiskinan September 2021 secara berurutan dengan share masing-masing komoditas adalah beras 20,72 persen; rokok kretek filter 12,04 persen; telur ayam ras 2,98 persen; daging ayam ras 2,94 persen; dan kue basah 2,63 persen.

Untuk komoditas non makanan, lima komoditas yang memberi sumbangan terbesar pada Garis Kemiskinan di daerah perkotaan secara berurutan dengan share masing-masing komoditas adalah perumahan 9,61 persen; bensin 2,65 persen; pendidikan 2,00 persen; listrik 1,41 persen; dan perlengkapan mandi 1,36 persen. Pada daerah perdesaan, lima komoditas non makanan yang memberi sumbangan terbesar pada Garis Kemiskinan September 2021 secara berurutan dengan share masing-masing komoditas adalah perumahan 11,02 persen; bensin 1,95 persen; pendidikan 1,40 persen; perlengkapan mandi 1,27 persen; dan listrik 1,21 persen.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan nilai Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2- 21 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) Menurut Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Maret 2021 dan September 2021

Tahun 2021	Kota	Desa	Kota dan Desa
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			
Maret	2,351	2,129	2,239
September	2,433	2,573	2,503
Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)			
Maret	0,511	0,471	0,491
September	0,537	0,719	0,628

Sumber: Diolah dari data Susenas Maret 2021 dan September 2021

Pada periode Maret 2021 – September 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami peningkatan. Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 2,239 pada Maret 2021 menjadi 2,503 pada September 2021. Peningkatan nilai indeks ini berarti bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauhi Garis Kemiskinan. Demikian juga, Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) mengalami peningkatan dari 0,491 pada Maret 2021 menjadi 0,628 pada September 2021. Ini berarti ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin melebar.

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di daerah perkotaan dan perdesaan mengalami peningkatan. Di daerah perkotaan, P1 meningkat sebesar 3,48 persen, yaitu

dari 2,351 pada Maret 2021 menjadi 2,433 pada September 2021. Di daerah perdesaan, P1 juga mengalami peningkatan dari 2,129 pada Maret 2021 menjadi 2,573 pada September 2021, atau meningkat 20,87 persen.

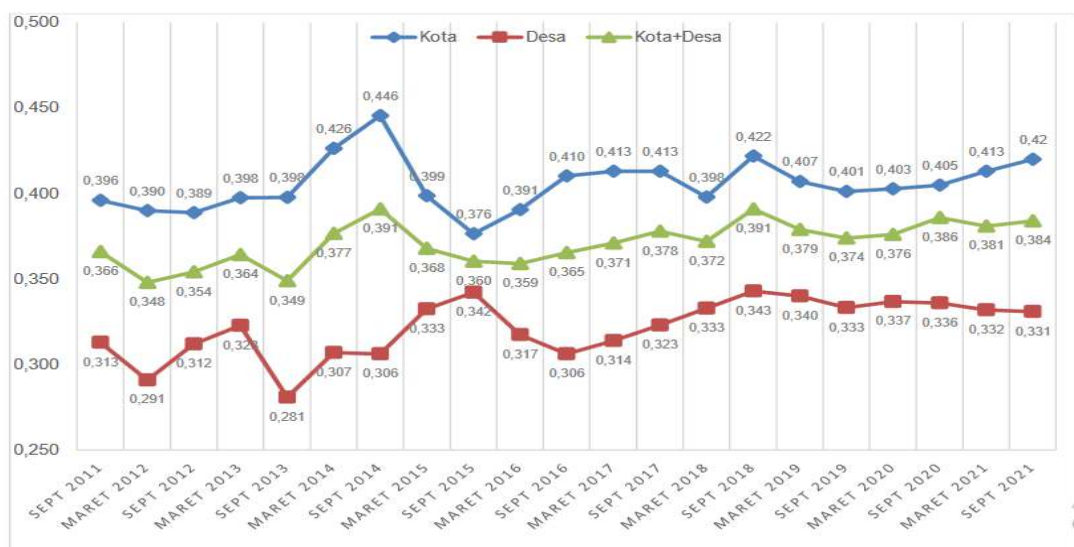
Untuk nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami peningkatan baik di daerah perkotaan maupun di perdesaan. Di daerah perkotaan, P2 Maret 2021 sebesar 0,511 menjadi 0,537 pada September 2021, atau meningkat 0,026 poin. Sedangkan di daerah perdesaan, P2 juga mengalami peningkatan dari 0,471 pada Maret 2021 menjadi 0,719 pada September 2021, atau meningkat 0,248 poin.

2.1.2.4 Gini Ratio

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio, nilai Gini Ratio berkisar antara 0 - 1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio provinsi Nusa Tenggara Barat pada September 2021 adalah sebesar 0,384, lebih tinggi dari Maret 2021 tetapi lebih rendah dibandingkan September 2020. Dalam sepuluh tahun terakhir, nilai Gini Ratio provinsi NTB berfluktuasi dalam rentang yang cukup stabil, yaitu diantara 0,348 sampai 0,391. Nilai tertinggi Gini Ratio NTB adalah 0,391 yaitu pada September 2014 dan September 2018. Sedangkan nilai terendah adalah 0,348 yaitu pada September 2012.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2021 tercatat sebesar 0,420, mengalami kenaikan sebesar 0,007 poin dibanding Gini Ratio Maret 2021 yang sebesar 0,413. Jika dibandingkan Gini Ratio September 2020 yang sebesar 0,405, Gini Ratio September 2021 daerah perkotaan meningkat sebesar 0,015 poin. Kemudian untuk daerah perdesaan, Gini Ratio September 2021 tercatat sebesar 0,331. Berbeda dengan daerah perkotaan, Gini Ratio pada daerah perdesaan justru turun 0,001 poin dari Maret 2021. Sedangkan jika dibandingkan September 2020, nilai ini turun 0,005 poin.

Gambar 2- 7 Perkembangan Gini Ratio, September 2011 – September 2021



Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

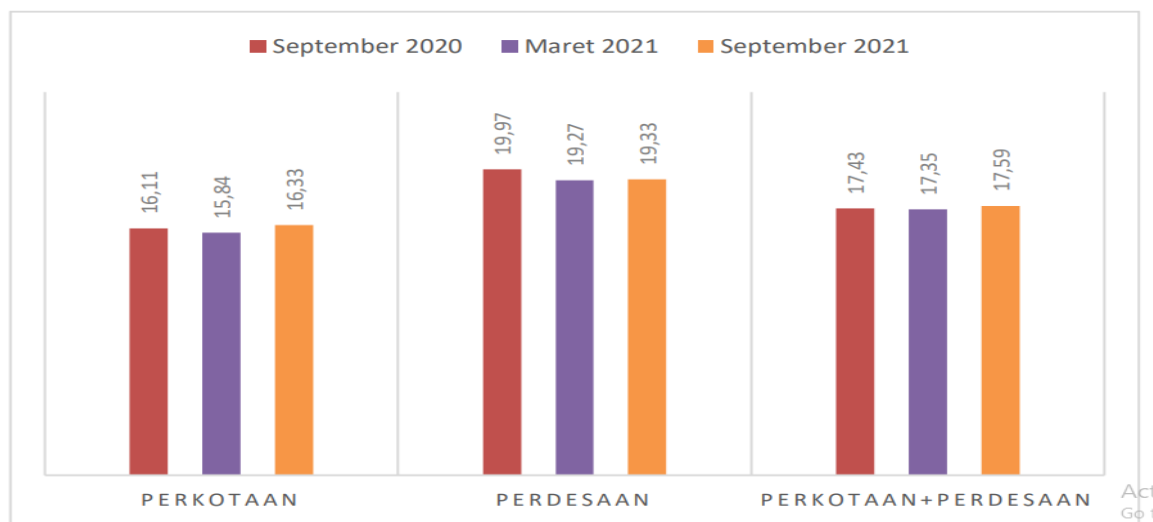
Selain Gini Ratio, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan

ukuran ketimpangan Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini, tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen.

Perkembangan distribusi persentase pengeluaran Nusa Tenggara Barat pada September 2021, pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 17,59 persen, yang berarti provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada kategori ketimpangan rendah. Persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah pada September 2021 ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2021 yang sebesar 17,35 persen. Selain itu, jika dibandingkan dengan September 2020, nilai ini mengalami kenaikan 0,16 persen poin.

Sejalan dengan informasi yang diperoleh dari Gini Ratio, ukuran ketimpangan Bank Dunia pun mencatat hal yang sama yaitu ketimpangan di perkotaan lebih parah dibandingkan dengan ketimpangan di perdesaan. Persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan pada September 2021 adalah sebesar 16,33 persen atau tergolong ketimpangan sedang. Sementara itu, persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perdesaan pada September 2021 adalah sebesar 19,33 persen yang berarti berada pada kategori ketimpangan rendah.

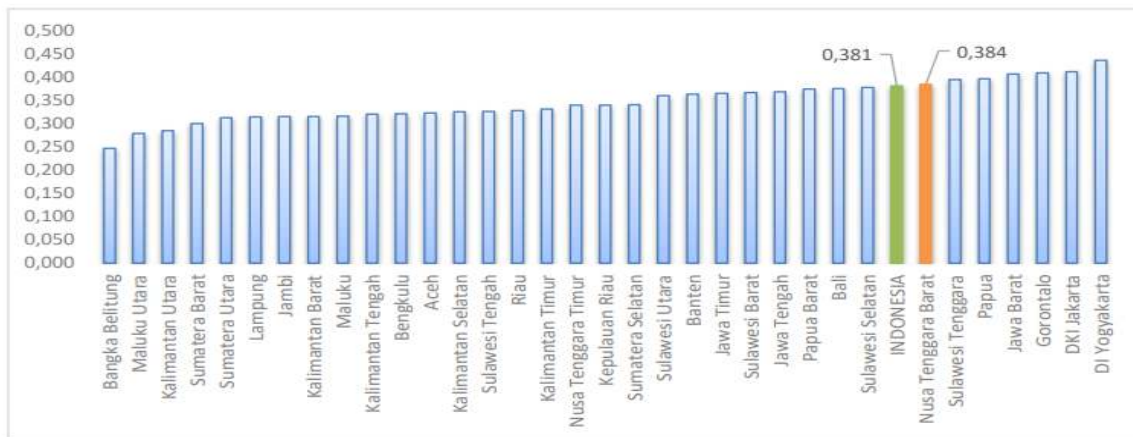
Gambar 2- 8 Persentase Pengeluaran Kelompok Penduduk 40 Persen terbawah Provinsi Nusa Tenggara Barat September 2020, Maret 2021, dan September 2021



Sumber: Diolah dari data Susenas September 2020, Maret 2021, dan September 2021

Selanjutnya apabila dibandingkan secara nasional dengan Provinsi lainnya yang diurutkan dari persentase terkecil, Gini Ratio Provinsi NTB pada September 2021 berada di urutan ke 28 dari 34 Provinsi di Indonesia. Kemudian, provinsi di Indonesia yang tercatat sebagai provinsi dengan Gini Ratio terendah pada September 2021 adalah Provinsi Bangka Belitung dengan Gini Ratio sebesar 0,247. Sementara provinsi dengan Gini Ratio tertinggi ditempati oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Gini Ratio sebesar 0,436.

Gambar 2- 9 Gambar Gini Ratio Menurut Provinsi September 2021



Sumber: Diolah dari data Susenas September 2020, Maret 2021, dan September 2021

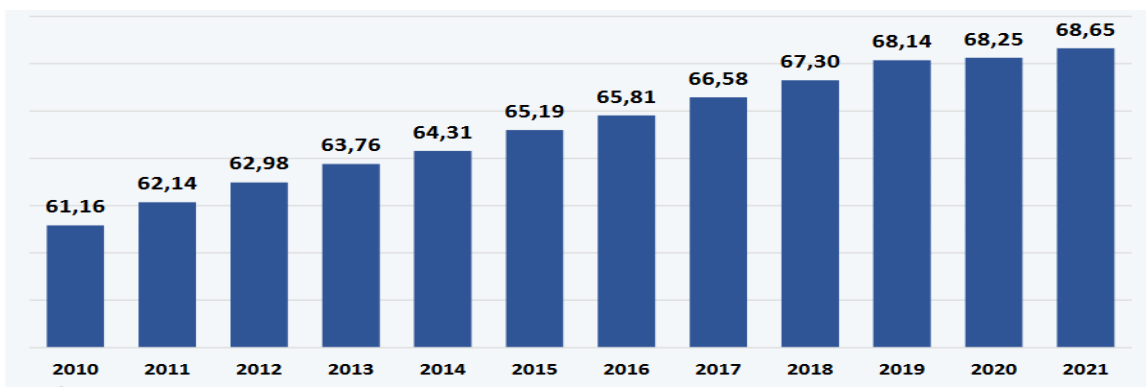
Dibanding dengan Gini Ratio nasional yang sebesar 0,381, terdapat tujuh provinsi dengan angka Gini Ratio lebih tinggi, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (0,436), DKI Jakarta (0,411), Gorontalo (0,409), Jawa Barat (0,406), Papua (0,396), Sulawesi Tenggara (0,394) dan Nusa Tenggara Barat (0,384).

2.1.2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak.

Dalam satu dekade pembangunan manusia di Provinsi NTB terus mengalami kemajuan. IPM Provinsi NTB meningkat dari 61,16 pada tahun 2010 menjadi 68,14 pada tahun 2019. Selama periode tersebut, IPM Provinsi NTB rata-rata tumbuh sebesar 1,21 persen per tahun. Namun, pandemi COVID-19 telah membawa sedikit perubahan dalam pencapaian pembangunan manusia Provinsi NTB. IPM tahun 2020 tercatat sebesar 68,25 atau tumbuh 0,16 persen, melambat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Kemudian IPM Provinsi NTB tahun 2021 adalah sebesar 68,65 atau tumbuh 0,59 persen. Dengan capaian ini, rata-rata pertumbuhan IPM tahun 2010-2021 menjadi sebesar 1,06 persen per tahun.

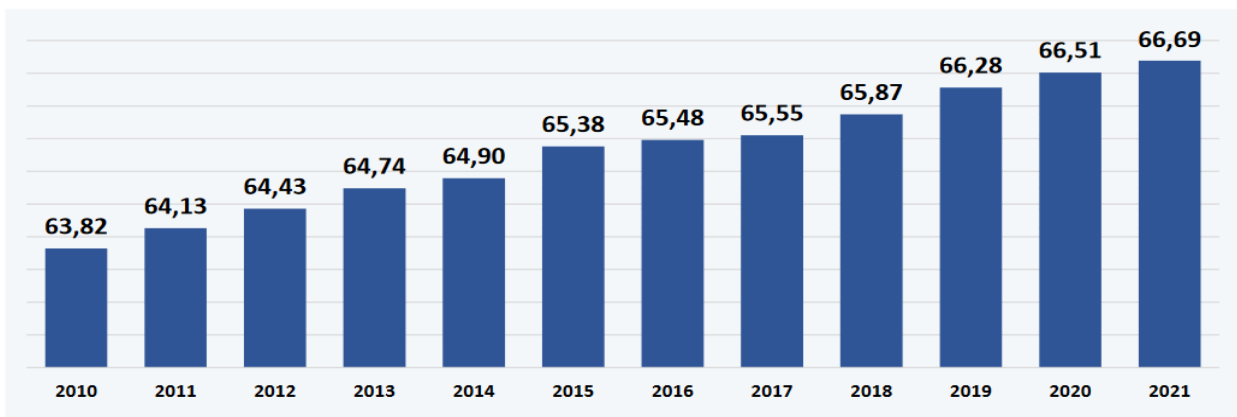
Gambar 2- 10 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 – 2021



Sumber: BPS NTB, 2021

Hal ini menunjukkan bahwa IPM Provinsi NTB masih berada pada kategori capaian sedang. Pertumbuhan IPM Provinsi NTB di tahun 2021 mencapai 0,59 persen. Dari dimensi kesehatan yang digambarkan oleh indikator Umur Harapan Hidup, di tahun 2021 Provinsi NTB mencapai 66,69 tahun. Indikator ini meningkat sebanyak 0,18 tahun dibandingkan tahun 2020. Dimensi pendidikan digambarkan oleh indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. HLS Provinsi NTB di tahun 2021 Provinsi NTB mencapai 13,90 tahun, meningkat 0,20 tahun dibandingkan tahun 2020. Sedangkan RLS-nya sebesar 7,38 tahun dan nilai ini meningkat sebanyak 0,07 tahun dibanding tahun sebelumnya. Dari dimensi hidup layak yang digambarkan oleh indikator Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan, capaian Provinsi NTB di tahun 2021 sebesar 10,38 juta rupiah per orang per tahun. Indikator ini meningkat sebanyak 26 ribu rupiah dibandingkan tahun 2020.

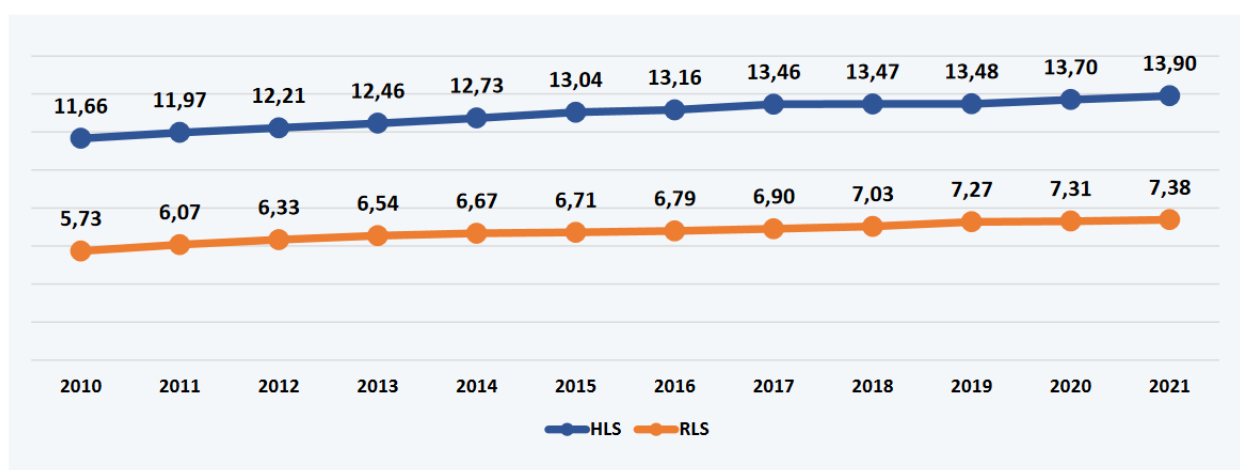
Gambar 2- 11 Perkembangan Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 - 2021



Sumber: BPS NTB, 2021

Selanjutnya dari dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas.

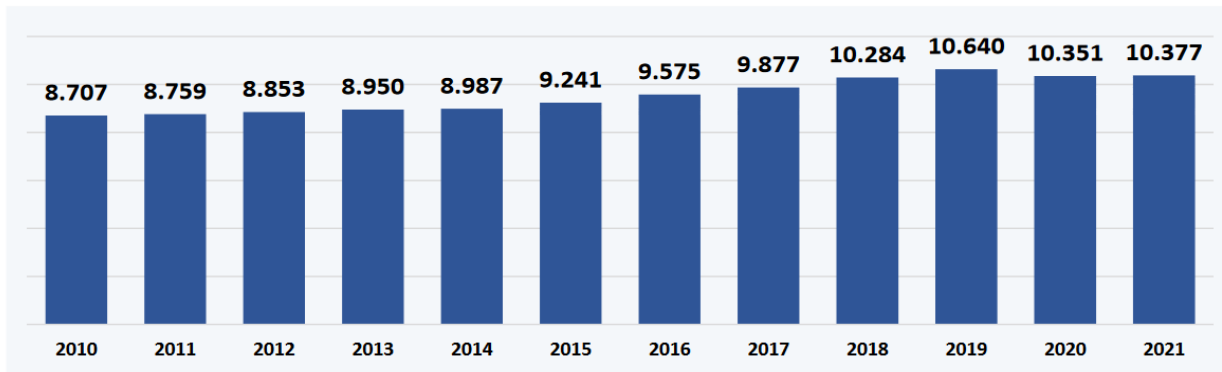
Gambar 2- 12 Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 - 2021



Sumber: BPS NTB, 2021

Kemudian dari dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (atas dasar harga konstan 2010) yang disesuaikan.

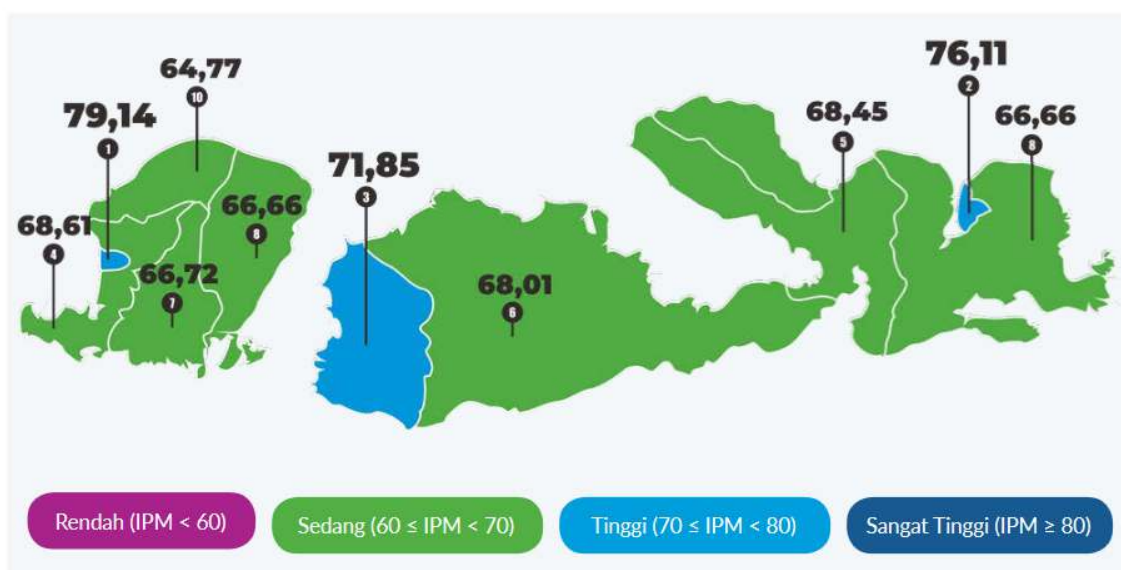
Gambar 2- 13 Perkembangan Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 - 2021 (Rp 000)



Sumber: BPS NTB, 2021

Seiring dengan pertumbuhan IPM Provinsi NTB, pada tahun 2021 sepuluh kabupaten/kota di Provinsi NTB juga mengalami peningkatan IPM. Wilayah yang mengalami peningkatan IPM terbesar adalah Kabupaten Dompu, sebaliknya Kota Mataram mengalami peningkatan IPM yang terendah. Dari sisi perbandingan antar kabupaten/kota, tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam kategori capaian dan peringkat di masing-masing kabupaten/kota. Urutan IPM terendah masih ditempati oleh Kabupaten Lombok Utara (64,77), sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh Kota Mataram (79,14). Jumlah kabupaten/kota di Provinsi NTB dengan status capaian pembangunan manusia yang “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$) pada tahun 2021 ada sebanyak 3 kabupaten/kota, sedangkan 7 lainnya masih berstatus “sedang” (capaian $60 \leq \text{IPM} < 70$). Sejak tahun 2017, IPM Kabupaten Sumbawa Barat mencapai status tinggi dan bersanding dengan Kota Mataram dan Kota Bima yang telah lama menyandang status tinggi.

Gambar 2- 14 IPM Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia Tahun 2021



Sumber: BPS NTB, 2021

Adapun capaian indikator kinerja daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2-22 Capaian Indikator pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN	REALIS ASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET CAPAIAN	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
			2020			2021		
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pertambangan Bijih Logam	%	2,5-2,75	-5,19	-197,71	2,5-3,5	4,09	155,81
2	Inflasi	%	3,0 - 4,0	0,68	177,33	3,0 - 4,0	2,12	129,33
3	Tingkat Kemiskinan	%	13,64	14,23	95,67	13,42	13,83	96,94
4	Gini Ratio	Point	0,379	0,386	98,15	0,353	0,384	91,34
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	68,64	68,25	99,43	68,84	68,65	99,72

Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2021

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah menunjukkan kemampuan suatu daerah menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Aspek daya saing Provinsi NTB diukur menggunakan pendekatan 7 indikator sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2-23 Capaian Indikator pada Aspek Daya Saing Daerah

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET CAPAIAN	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
			2020			2021		
B	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1	Indeks Kriminalitas	Point	15,65	13,09	116,36	14,85	10,67	128,15
2	Indeks Aksesibilitas	Point	77,14	NA	NA	78,56	78,81	100,32
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Point	77,16	NA	NA	67,98	69,89	102,81
4	Ketaatan Terhadap RTRW	%	88,45	NA	NA	89,03	76,38	85,79
5	Indeks Risiko Bencana	Point	126,91	NA	NA	123,11	122,33	100,63
6	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	B	NA	NA	B	B	100
7	Indeks Pelayanan Publik	Point	3,93	NA	NA	4,23	3,54	83,69

Sumber: Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2021

Dari 7 indikator untuk mengukur aspek daya saing daerah, terdapat 5 (lima) indikator tercapai atau memenuhi target yaitu Indeks Kriminalitas, Indeks Aksesabilitas, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Indeks Risiko Bencana dan Indeks Reformasi Birokrasi, sedangkan 2 (dua) indikator yang belum memenuhi target yaitu Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana, dan Indeks Pelayanan Publik.

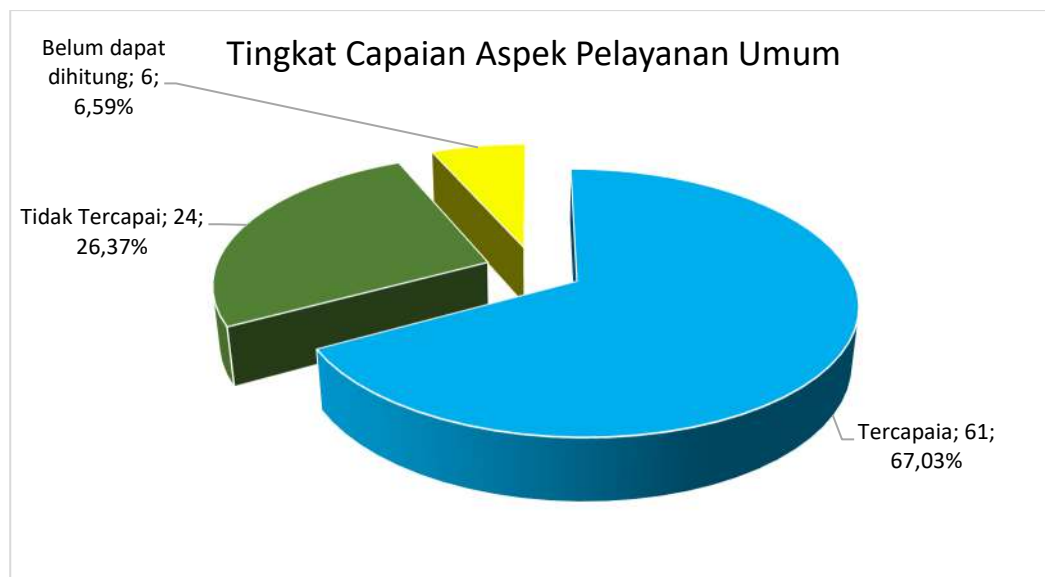
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

Aspek Pelayanan Umum merupakan bagian dari pelayanan publik baik dalam bentuk barang maupun jasa yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab atau urusan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Terdapat 91 indikator kinerja untuk mengukur

pelayanan umum yang terdiri dari urusan wajib terkait pelayanan dasar sebanyak 21 indikator yang tersebar pada 6 urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib terkait pelayanan dasar sebanyak 32 indikator yang tersebar pada 18 urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan 20 indikator yang tersebar pada 8 urusan pilihan, serta fungsi penunjang urusan sebanyak 18 indikator yang tersebar 7 fungsi penunjang urusan.

Dari 91 indikator untuk mengukur aspek pelayanan umum, terdapat 61 indikator (67,03%) tercapai atau memenuhi target bahkan melampaui target, sedangkan 24 indikator (24,37%) belum memenuhi target, namun 8 indikator diantaranya dengan tingkat capaiannya sangat tinggi mencapai diatas 90%. Dan masih terdapat 8 indikator belum tersedia (Not Available) karena belum dapat dihitung atau menunggu rilis resmi dari lembaga terkait.

Gambar 2- 15 Proporsi tingkat capaian Aspek Pelayanan Umum



Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2021

A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Daerah diwajibkan memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan penyelenggaraan urusan tersebut berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah pusat dalam bentuk peraturan pemerintah. Standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ini, mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat umum serta sosial.

1. Bidang Pendidikan

Kinerja pembangunan pendidikan dapat dilihat dari indikator indeks pendidikan, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan antara lain peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, evaluasi dan perbaikan kurikulum serta peningkatan kualitas, kompetensi dan profesionalisme guru. Indikator pendidikan menggambarkan kondisi dan perkembangan pendidikan secara tepat antara lain Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Melek Huruf (AMH), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS).

Tabel 2- 24 Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2020 – 2021

No	Indikator Bidang Urusan (Satuan)	Tahun 2020		Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
	PENDIDIKAN				
1	Indeks Pendidikan (Point)	62,03	62,42	62,39	63,21
2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,62	13,70	13,68	13,90
3	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	6,98	7,31	7,01	7,38
4	Persentase APK SMA/MA/SMK/Paket C	98,63	102,21	99,15	106,41
5	Persentase APM SMA/MA/SMK/Paket C	92,42	92,53	93,40	96,65
6	Persentase APS SMA/MA/SMK/Paket C	95,79	95,79	96,68	98,08
7	Rasio Ketersediaan Ruang Kelas / Rombongan Belajar	1:02	1:30	1:1	1:0,92
8	Persentase APK PK-PLK	69	81,71	69,40	84,19
9	Rasio Guru Terhadap murid pendidikan Menengah (SMA, SMK)	1:20	1:20	1 : 18	1 : 11
10	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata untuk SLB	1:15	1:7	1 : 8	1:5

Sumber: Dinas Dikbud, Provinsi NTB, BPS NTB, 2021

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa indikator Pendidikan mengalami peningkatan capaian pada tahun 2021 dibandingkan capaian tahun 2020, meskipun peningkatan capaian untuk harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah tahun 2021 tidak terlalu signifikan namun telah mencapai target yang ditetapkan.

Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. AHLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang termasuk pada jenjang Sekolah Menengah (SM) yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Diasumsikan bahwa peluang anak-anak akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.

Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2021 ditargetkan 13,68 tahun, realisasinya sebesar 13,90 tahun (capaian sebesar 101,61%). Capaian tahun 2021 meningkat sebesar 0,20 poin dari capaian tahun 2020 yaitu sebesar 13,70 tahun. Berdasarkan AHLS pada tahun 2021 secara rata-rata anak usia 7 tahun keatas memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,9 tahun atau setara dengan Diploma II.

Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) adalah jumlah tahun yang digunakan dalam menjalani pendidikan formal, dihitung berdasarkan penduduk usia 25 tahun keatas

dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir/selesai, tanpa memperhitungkan apakah tinggal kelas atau tidak. Angka ini juga bisa menggambarkan kualitas pendidikan penduduk dalam sebuah wilayah.

Tabel 2- 25 Rata-rata Lama Sekolah Provinsi NTB Tahun 2017-2021

No	Kabupaten/Kota	Rata-rata Lama Sekolah				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Lombok Barat	6,15	6,36	6,37	6,41	6,42
2.	Lombok Tengah	5,95	6,16	6,27	6,28	6,29
3.	Lombok Timur	6,32	6,49	6,69	6,70	6,71
4.	Sumbawa	7,54	7,63	7,91	7,92	8,15
5.	Dompu	8,11	8,26	8,53	8,44	8,72
6.	Bima	7,58	7,72	7,77	7,78	7,91
7.	Sumbawa Barat	8,18	8,38	8,53	8,66	8,72
8.	Lombok Utara	5,54	5,73	5,84	5,91	6,04
9.	Kota Mataram	9,32	9,48	9,45	9,46	9,54
10.	Kota Bima	10,14	10,28	10,38	10,49	10,65
	NTB	6,90	7,06	7,27	7,31	7,38

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2021,

Rata-rata lama sekolah di Provinsi NTB menunjukkan peningkatan dari tahun 2017 sampai 2021. Rata-rata lama sekolah tahun 2021 sebesar 7,38 tahun ini artinya penduduk di Provinsi NTB yang berusia 25 tahun ke atas memiliki rata-rata lama sekolah 7,38 tahun, atau rata-rata penduduk di Provinsi NTB telah menamatkan pendidikan minimal kelas VII (atau kelas 1 SMP).

Indeks pendidikan merupakan pencerminan pencapaian rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Indikator pembentuk indeks Pendidikan adalah Angka Melek Huruf dan Rata-Rata Lama Sekolah. Indeks Pendidikan NTB pada tahun 2021 targetnya 62,39 poin sedangkan realisasinya sebesar 63,21 poin hal ini menunjukkan bahwa pembangunan bidang pendidikan di Provinsi NTB sudah cukup baik dengan capaian 101,32 persen.

Salah satu bentuk penilaian tentang pemanfaatan fasilitas pendidikan dilihat dari partisipasi sekolah. Angka Partisipasi Sekolah adalah Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Angka Partisipasi sekolah mempengaruhi rata-rata lama sekolah. Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2- 26 Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SM (SMA, MA, SMK) Provinsi NTB dari Tahun 2012/2013 s.d 2020/2021

No	Tahun	Penduduk Usia 16-18 Tahun	Peserta Didik Seluruhnya						APK					Total APK (SM)
			SMA	MA	SMK	SMA LB	Paket C	Jumlah	SMA	MA	SMK	SMA LB	Paket C	
1.	2012/2013	259,702	97,911	56,849	53,75	117	6,126	214,753	37.70	21.89	20.70	0.05	2.36	82.69
2.	2013/2014	264,659	97,238	56,609	58,001	127	11,391	223,366	36.74	21.39	21.92	0.05	4.30	84.40
3.	2014/2015	265,971	100,537	57,768	62,201	189	5,722	226,417	37.80	21.72	23.39	0.07	2.15	85.13
4.	2015/2016	267,108	103,076	60,584	63,106	223	6,811	233,8	38.59	22.68	23.63	0.08	2.55	87.53

5.	2016/2017	267,146	105,777	66,194	67,226	290	6,88	246,367	39.60	24.78	25.16	0.11	2.58	92.22
6.	2017/2018	267,651	104,949	70,705	71,571	423	14.454	262.102	39,21	26,42	26,74	0,16	5,40	97,93
7.	2018/2019	267,595	101,066	67,282	72,684	479	22.194	263.705	37,77	25,14	27,16	0,18	8,29	98,55
8.	2019/2020	269,479	103,733	64,261	78,681	481	28,269	275,425	38,494	23,85	29,20	0,18	10,49	102,21
9.	2020/2021	270,370	104,552	73,517	82,138	585	27,497	288,289	38,67	27,19	30,38	0,22	10,17	106,63

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2021

Tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk usia 16-18 tahun semakin meningkat dari tahun 2012-2021, dimana APK pada jenjang Sekolah Menengah (SM) pada tahun 2021 sebesar 106,63 persen mengalami peningkatan sebesar 4,42% dari tahun 2020 yaitu sebesar 102,21 persen. APK-SM pada tahun 2021 sebesar 106,63 persen jika perhitungan menggunakan peserta didik SMALB sebagai salah satu variabelnya namun jika peserta didik SMALB dianulir dengan asumsi bahwa mereka sudah dihitung dalam APK pendidikan khusus maka capaian APK tanpa peserta didik SMALB adalah sebesar 106,41 persen artinya jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang SM (PUS 16-18 tahun) keseluruhan sudah bersekolah, namun ada sekitar 6,41 persen peserta didik yang usianya dibawah atau diatas dari (PUS 16-18 tahun) masih bersekolah di jenjang Sekolah Menengah (SM).

APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu (sesuai dengan usianya) sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2- 27 Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SM (SMA, MA, SMK) Provinsi NTB dari Tahun 2012/2013 s.d 2020/2021

No	Tahun	Penduduk Usia 16-18 Tahun	Siswa Usia 16-18 tahun						APM				Total APM (SM)
			SMA	MA	SMK	Paket C	SMA LB	Jumlah	SMA	MA	SMK	Paket C	
1.	2012/2013	259,702	85,462	50,383	46,599	5,944	70	188,458	32.91	19.40	17.94	2.29	72.57
2.	2013/2014	264,659	88,879	53,322	51,435	4,078	76	197,79	33.58	20.15	19.43	1.54	74.73
3.	2014/2015	265,971	88,945	52,52	56,636	3,979	113	202,194	33.44	19.75	21.29	1.50	76.02
4.	2015/2016	267,108	93,846	54,987	58,12	3,381	134	210,468	35.13	20.59	21.76	1.27	78.80
5.	2016/2017	267,146	96,647	60,212	62,24	3,381	174	222,654	36.18	22.54	23.30	1.27	83.35
6.	2017/2018	267,651	98,354	66,799	66,509	3,381	254	235,296	36,75	24,96	24,85	1,26	87,91
7.	2018/2019	267,595	97,551	64,887	69,130	4,719	310	236,597	36,45	24,25	25,83	1,76	88,42
8.	2019/2020	269,479	100,863	62,403	75,397	10,358	330	249,351	37,43	23,16	27,98	3,84	92,53
9.	2020/2021	270,370	101,540	70,000	78,854	10,573	346	261,313	37,56	25,89	29,17	3,91	96,65

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2021

Perkembangan terhadap angka melanjutkan sekolah dan angka drop out di Provinsi NTB cenderung membaik yang berimplikasi pada pencapaian rata-rata lama sekolah.

Tabel 2- 28 Angka Melanjutkan dari Lulusan SMA ke Perguruan Tinggi Provinsi NTB Tahun 2020/2021

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah Lulusan SMA (Orang)	Angka melanjutkan dari SMA ke Perguruan Tinggi	%	Ket
1.	Kota Mataram	3.842	1.031	26,83	
2.	Lombok Barat	2.985	371	12,43	
3.	Lombok Tengah	4.345	1.046	24,07	
4.	Lombok Timur	6.306	1.814	28,77	
5.	Lombok Utara	1.198	324	27,05	
6.	Sumbawa Barat	960	285	29,69	
7.	Sumbawa	3.013	1.213	40,26	
8.	Dompu	2.442	494	20,23	
9.	Kota Bima	1.350	291	21,56	
10.	Bima	5.565	861	15,47	
Total		32.006	7.730	24,15	

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa angka melanjutkan sekolah dari jenjang SMA ke Perguruan Tinggi sebesar 24,15 persen atau 7.730 orang dari total lulusan tahun 2020/2021 yaitu 32.006 orang capaian ini tergolong rendah karena hingga laporan ini disusun masih banyak sekolah baik negeri maupun swasta yang belum melaporkan data jumlah lulusannya yang melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi.

Tabel 2- 29 Angka Putus Sekolah (DO) SMA dan SMK Provinsi NTB dari Tahun 2015/2016 s.d 2020/2021

No.	Tahun	Angka Putus Sekolah (DO) SMA dan SMK			
		SMA	%	SMK	%
1	2015/2016	828	0,82	955	1,53
2	2016/2017	688	0,67	864	1,37
3	2017/2018	422	0,4	548	0,81
4.	2018/2019	393	0,37	465	0,65
5.	2019/2020	47	0,05	249	0,34
6.	2000/2021	972	0,92	1.241	1,91

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2021

Berdasarkan table diatas menunjukkan bahwa DO tahun 2021 pada jenjang SMA sebesar 0,92 persen tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 0,30 persen dan untuk jenjang SMK jumlah DO sebanyak 1.241 atau 1,91 persen tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 0,65 persen hal ini disebabkan diantaranya karena lemahnya kontrol guru dan orang tua pada saat Belajar Dari Rumah (BDR) dilakukan karena Covid 19 sehingga semangat belajar anak-anak menjadi kendor dan juga tingginya pernikahan dini namun demikian kedepannya jika BDR masih perlu dilakukan maka diharapkan Guru dan Orang tua dapat bersinergi dalam memantau dan mengawasi peserta didik sehingga semangat belajar tidak kendor dan memberikan pengertian pentingnya arti pendidikan bagi masa depan mereka sehingga tidak tergiur dengan melakukan pernikahan usia muda.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Dikbud Provinsi NTB berkewajiban melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan. Capaian Penerapan SPM bidang pendidikan tahun anggaran 2021 sebagaimana tergambar pada tabel berikut ini.

Tabel 2- 30 Capaian Penerapan Spm Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM		INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT,			TOTAL PENCAPAIAN
1	2		3			4
A.	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT					98.08%
1 .	Pendidikan Menengah Atas		Jumlah Warga Negara Usia 16 - 18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah			98,08%
	• Jumlah yang Harus Dilayani		*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	57,19%
			63.856	36.493	27.363	
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	
	1.	buku teks pelajaran	63.856	0	63.856	0
	2.	perlengkapan belajar	127.712 Paket (63.856 x 2 semester)	0	127.712 Paket (63.856 x 2 semester)	0
	3.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	63.856	36.493	27.363	57,19%
	4.	Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	330 Orang	330 Orang	0	100 %
	5.	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	8.759 Orang	8.649 Orang	110 Orang	98,74 %
	6.	Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	330 Orang	150 Orang	180 Orang	45,45%
7.	satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	330 Sekolah	321 Sekolah	9 Sekolah	97,27 %	
8.	jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	3.490 Rombel	3.490 Rombel	0	100 %	
2 .	Pendidikan Menengah Kejuruan		Jumlah Warga Negara Usia 16 - 18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah			98,08 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani		*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	82,56%
			29.086 Orang	24.014 Orang	29.086 Orang	
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	
	1.	buku teks pelajaran	29.086	0	0	0
	2.	perlengkapan belajar	58.172 Paket (29.086 x 2 Semester)	0	0	0
	3.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	29.086 Orang	24.014 Orang	5.072 Orang	82,56%
	4.	Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	327 Orang	327 Orang	0	100

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM		INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT,			TOTAL PENCAPAIAN
1	2		3			4
	5.	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	7.479 Orang	6.803 Orang	676 Orang	90,96 %
	6.	Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	327 Orang	109 Orang	218 Orang	33,33 %
	7.	satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	460 Program	444 Program	16 Program	96,52 %
	8.	jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	3.142 Rombel	3.142 Rombel	3.142 Rombel	100 %
3 .	Pendidikan Khusus		Jumlah Warga Negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus			84,19%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :		*jumlah total yang harus dilayani			100%
			2.897	2.879	2.879	
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	
						Persentase capaian mutu 100%
	1.	buku teks pelajaran	(2.897 x 2 semester)	0	2.897	0 %
	2.	perlengkapan belajar	5.794 Paket (2.897 x 2 semester)	0	5.794 Paket (2.897 x 2 semester)	0 %
	3.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	2.897 Orang	2.897 Orang	0	100 %
	4.	Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	50 Orang	50 Orang	0	100 %
	5.	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	736 Orang	667 Orang	69 Orang	90,63%
	6.	Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	50 Orang	10 Orang	40 Orang	20%
	7.	satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	50 Sekolah	42 Sekolah	8 Sekolah	84 %
	8.	jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	786 Rombel	786 Rombel	786 Rombel	100 %

Sumber Data : Bidang SMK Dinas Dikbud Provinsi NTB, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian SPM bidang pendidikan untuk indikator Jumlah Warga Negara Usia 16 - 18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah sebesar 98,08% belum mencapai target tahunan yang ditetapkan yaitu sebesar 100% setiap tahunnya artinya masih ada 1,92% penduduk usia 16 s.d. 18 yang tidak berada pada jenjang pendidikan menengah.

Untuk indikator Jumlah Warga Negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus adalah sebesar 84,19% angka ini mengalami peningkatan sebanyak 2,48% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yaitu sebesar 81,71% namun belum mencapai target nasional yaitu sebesar 100% artinya masih ada penduduk usia 4 s.d. 18 tahun penyandang disabilitas belum berpartisipasi dalam pendidikan khusus sebanyak 15,81% hal ini disebabkan karena rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas dan masih ada stigma di masyarakat bahwa memiliki anak dengan kebutuhan khusus adalah suatu hal yang memalukan sehingga cenderung

ditutupi yang mengakibatkan anak tersebut tidak diberikan haknya untuk menerima layanan pendidikan sebagaimana mestinya.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pelayanan berupa pembebasan biaya pendidikan kepada peserta didik miskin atau tidak mampu pemegang KIP melalui layanan PIP dengan jumlah penerima sebanyak 36.493 orang untuk SMA dan 24.014 orang untuk SMK serta 1.240 orang untuk SLB.

Tabel 2- 31Daftar Penerima Pip Sma Per Kabupaten / Kota Tahun 2021

No.	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH PENERIMA		KET.
1	KABUPATEN BIMA	10.237	Orang	
2	DOMPU	1.964	Orang	
3	LOMBOK BARAT	2.853	Orang	
4	LOMBOK TENGAH	4.508	Orang	
5	LOMBOK TIMUR	9.648	Orang	
6	LOMBOK UTARA	1.264	Orang	
7	SUMBAWA BARAT	838	Orang	
8	SUMBAWA	2.459	Orang	
9	KOTA BIMA	1.189	Orang	
10	KOTA MATARAM	1.533	Orang	
TOTAL		36.493	Orang	

**sumber Data : Sipintar Enterprise Program Indonesia Pintar Kemendikbud*

Tabel 2- 32 Daftar Penerima Pip Smk Per Kabupaten / Kota Tahun 2021

No.	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH PENERIMA		KET.
1	KABUPATEN BIMA	1.844	Orang	
2	DOMPU	1.209	Orang	
3	LOMBOK BARAT	3.574	Orang	
4	LOMBOK TENGAH	3.724	Orang	
5	LOMBOK TIMUR	6.918	Orang	
6	LOMBOK UTARA	833	Orang	
7	SUMBAWA BARAT	463	Orang	
8	SUMBAWA	1.982	Orang	
9	KOTA BIMA	997	Orang	
10	KOTA MATARAM	2.470	Orang	
TOTAL		24.014	Orang	

**sumber Data : Sipintar Enterprise Program Indonesia Pintar Kemendikbud*

Tabel 2- 33 Daftar Penerima Pip Slb Per Kabupaten / Kota Tahun 2021

No.	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH PENERIMA		KET.
1	KABUPATEN BIMA	257	Orang	
2	DOMPU	153	Orang	

3	LOMBOK BARAT	101	Orang	
4	LOMBOK TENGAH	131	Orang	
5	LOMBOK TIMUR	224	Orang	
6	LOMBOK UTARA	25	Orang	
7	SUMBAWA BARAT	19	Orang	
8	SUMBAWA	81	Orang	
9	KOTA BIMA	103	Orang	
10	KOTA MATARAM	146	Orang	
TOTAL		1.240	Orang	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penerima PIP untuk jenjang SLB sebanyak 1.240 orang dan untuk SLB penerima pembebasan biaya pendidikan tidak hanya bagi pemegang kartu PIP namun bagi semua peserta didik SLB yang jumlah keseluruhannya yaitu sebanyak 3.647 orang hal ini menunjukkan komitmen dan kepedulian yang tinggi dari pemerintah khususnya bagi penduduk usia 4 s.d. 18 tahun penyandang disabilitas agar mereka dapat terlayani haknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Selanjutnya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan pendidikan sebagaimana secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Jenis Layanan Dasar Bidang Pendidikan untuk daerah provinsi terdiri atas:

- Pendidikan menengah yaitu Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- Pendidikan khusus yaitu, Sekolah Luar Biasa baik SD, SMP dan SMA.

Adapun target capaian SPM pendidikan tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 2- 34 Target Capaian SPM Pendidikan Tingkat Provinsi NTB Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Target Capaian
1.	Pendidikan Menengah	Jumlah anak usia 16 – 18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah / jumlah anak Usia 16 – 18 tahun pada provinsi yang bersangkutan x 100%	270.370 Siswa	100% Tiap Tahun
2.	Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	4.433 Siswa	100% Tiap Tahun

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB Tahun 2022

Adapun capaian pemenuhan SPM Pendidikan Provinsi NTB tahun 2021 menurut angka partisipasi dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2- 35 Pencapaian pemenuhan SPM pendidikan Provinsi NTB Tahun 2021 Menurut Angka Partisipasi

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
-1	-2	-3			-4
Capaian SPM Pendidikan					91,14 %
1 .	Jumlah Warga Negara Usia 16 - 18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah				98,08 %
Jumlah yang Harus Dilayani :		*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	
		270.370	265.172	5.198	
2 .	Jumlah Warga Negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus				84,19 %
Jumlah yang Harus Dilayani :		*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	
		4.433	3.732	701	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB Tahun 2022

Selanjutnya, capaian penerapan SPM Pendidikan Provinsi NTB tahun 2021 menurut indikator dan mutu layanan dasar melalui pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2- 36 Pencapaian pemenuhan SPM pendidikan Provinsi NTB Tahun 2021 Menurut Indikator dan Mutu Layanan

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT,			TOTAL PENCAPAIAN
1	2	3			4
A.	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT				67,08%
1 .	Pendidikan Menengah Atas	Jumlah Warga Negara Usia 16 - 18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah			68,11%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	<i>*jumlah total yang harus dilayani</i>	<i>*jumlah total yang Terlayani</i>	<i>*yang belum Terlayani</i>	57,15%
		63.856	36.493	27.363	

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT,			TOTAL PENCAPAIAN
1	2	3			4
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase capaian mutu 100%
	1. <i>buku teks pelajaran</i>	63.856 paket	36.493 paket	27.363 paket	57,15%
	2. <i>perlengkapan belajar</i>	127.712 paket (63.856 x 2 semester)	0	127.712 Paket (63.856 x 2 semester)	0
	3. <i>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik</i>	63.856	36.493	27.363	57,15%
	4. <i>Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV</i>	330 Orang	294 Orang	36 Orang	89,09%
	5. <i>Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV</i>	8.759 Orang	8.649 Orang	110 Orang	98,74 %
	6. <i>Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat</i>	330 Orang	150 Orang	180 Orang	45,45%
	7. <i>satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c</i>	330 Sekolah	321 Sekolah	9 Sekolah	97,27 %
	8. <i>jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan</i>	3.490 Rombel	3.490 Rombel	0	100 %
2.	Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Warga Negara Usia 16 - 18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah			71,56 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	<i>*jumlah total yang harus dilayani</i>	<i>*jumlah total yang Terlayani</i>	<i>*yang belum Terlayani</i>	
		29.086 Orang	24.014 Orang	5.072 Orang	82,56%
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase capaian mutu 100%
	1. <i>buku teks pelajaran</i>	29.086 paket	24.014 paket	5.072 paket	82,56%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM		INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT,			TOTAL PENCAPAIAN
1	2		3			4
	2.	perlengkapan belajar	58.172 Paket (29.086 x 2 Semester)	0	58.172 Paket	0
	3.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	29.086 Orang	24.014 Orang	5.072 Orang	82,56%
	4.	Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	327 Orang	283 Orang	44 Orang	86,54%%
	5.	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	7.479 Orang	6.803 Orang	676 Orang	90.96 %
	6.	Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/ tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	327 Orang	109 Orang	218 Orang	33,33 %
	7.	satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	460 Program	444 Program	16 Program	96,52 %
	8.	jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	3.142 Rombel	3.142 Rombel	0	100 %
3 .	Pendidikan Khusus		Jumlah Warga Negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus			61,58%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :		*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	100%
			2.897	2.897	0	
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	
			Persentase capaian mutu 100%			
	1.	buku teks pelajaran	(2.897 x 2 semester)	0	2.897	0 %
	2.	perlengkapan belajar	5.794 Paket (2.897 x 2 semester)	0	5.794 Paket (2.897 x 2 semester)	0 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT,			TOTAL PENCAPAIAN
1	2	3			4
	3. <i>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik</i>	2.897 Orang	2.897 Orang	0	100 %
	4. <i>Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV</i>	50 Orang	49 Orang	1 Orang	98 %
	5. <i>Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV</i>	736 Orang	667 Orang	69 Orang	90,63%
	6. <i>Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat</i>	50 Orang	10 Orang	40 Orang	20%
	7. <i>satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c</i>	50 Sekolah	42 Sekolah	8 Sekolah	84 %
	8. <i>jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan</i>	786 Rombel	786 Rombel	786 Rombel	100 %

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB Tahun 2022

2. Bidang Kesehatan

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan merupakan unsur wajib yang harus dilaksanakan dan menjadi hak masyarakat untuk mendapat hak-hak dasar terkait dengan pelayanan kesehatan. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan diselenggarakan oleh 4 (empat) Perangkat Daerah, yakni Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Provinsi, Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi, dan Rumah Sakit H.L. Manambai Abdul Kadir dengan hasil pelaksanaan sebagai berikut.

a. Dinas Kesehatan

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan Tahun 2021 diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dengan indikator bidang urusan berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah 1) Angka Harapan Hidup, 2) Angka Kematian Ibu, dan 3) Angka Kematian Bayi, 4) Persentase Balita Stunting, 5) Persentase Peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang dapat mengakses pelayanan kesehatan, 6) Cakupan Desa *Open Defecation Free*. Target dan capaian indikator urusan bidang kesehatan tahun 2021 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2- 37 Capaian Indikator Urusan Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK)
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2021**

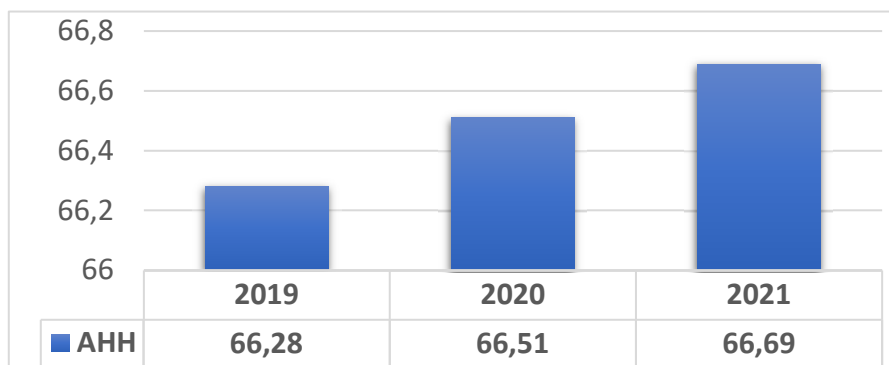
No	Indikator Bidang Urusan	Tahun 2021	
		Target	Realisasi
1	Angka Harapan Hidup (tahun)	66,78	66,69
	Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)	87,00	146,69
	Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)	8,00	8,26
2	Persentase Balita Stunting (persen)	31,49	19,23
3	Persentase Peserta JKN yang dapat mengakses pelayanan kesehatan (persen)	100	100
4	Cakupan Desa <i>Open Defecation Free</i> /ODF (persen)	72,12	82,06

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2021

• Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup di Provinsi NTB dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2019 sebesar 66,28, pada tahun 2020 meningkat menjadi 66,51 tahun, dan tahun 2021 menjadi 66,69. Berdasarkan data resmi BPS disebutkan bahwa sejak tahun 2010 rata-rata peningkatan AHH yakni sebesar 0,27 persen atau meningkat 0,18 tahun.

Gambar 2- 16 Angka Harapan Hidup di Provinsi NTB Tahun 2019-2021



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2021

Kabupaten/Kota dengan AHH tertinggi yaitu Kota Mataram sebesar 71,88 tahun dan terendah yaitu di Kabupaten Lombok Timur sebesar 66,16 tahun. AHH per kabupaten dan kota dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2- 38 Angka Harapan Hidup Per Kabupaten/Kota Tahun 2019-2021

NO	Kabupaten/ Kota	Angka Harapan Hidup (Tahun)		
		2019	2020	2021
1.	Mataram	71,59	71,76	71,88
2.	Lombok Barat	66,64	66,94	67,19
3.	Lombok Utara	66,92	67,17	67,36
4.	Lombok Tengah	65,99	66,21	66,38
5.	Lombok Timur	65,74	65,90	66,16
6.	Sumbawa Barat	67,80	68,07	68,31
7.	Sumbawa	67,31	67,54	67,73
8.	Dompu	66,60	66,62	66,99
9.	Bima	66,11	66,33	66,50

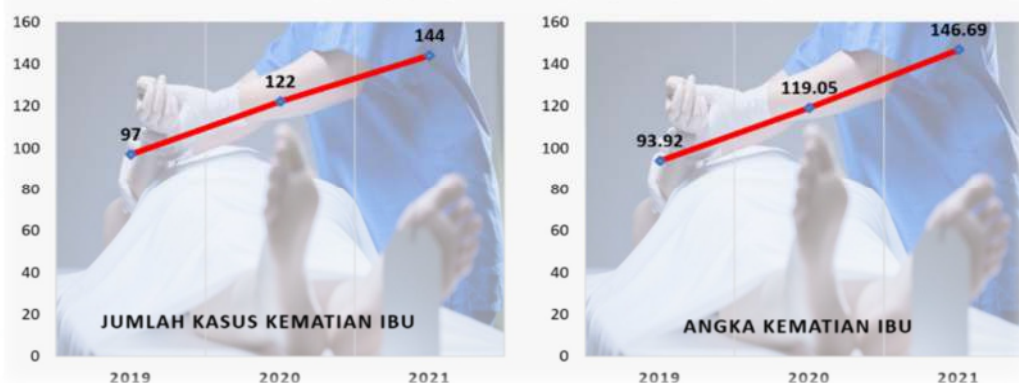
10.	Kota Bima	70,20	70.38	70,50
	NTB	66,28	66.51	66,69

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2021,

• Angka Kematian Ibu

Jumlah kasus kematian ibu melahirkan berturut dari tahun 2019-2021 adalah 97 kasus, 122 kasus, dan 144 kasus. Jika dikonversi menjadi angka kematian ibu yaitu dibagi dengan jumlah kelahiran hidup, maka angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup yakni berturut-turut selama 2019-2021 adalah 93,92, 119,05 dan 146,69. Namun pada tahun 2021 jumlah kelahiran hidup tidak mencapai 100.000 kelahiran. Kasus jumlah kematian ibu dan angka kematian ibu pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Gambar 2- 17 Jumlah Kasus Kematian Ibu dan Angka Kematian Ibu di Provinsi NTB Tahun 2019-2021



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2021

Kasus kematian ibu terbanyak pada tahun 2021 terjadi di Kabupaten Lombok Timur dengan 45 kasus terendah di Kabupaten Sumbawa Barat dengan 2 kasus. Jumlah kematian ibu dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup per kabupaten/kota tahun 2019-2021 menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

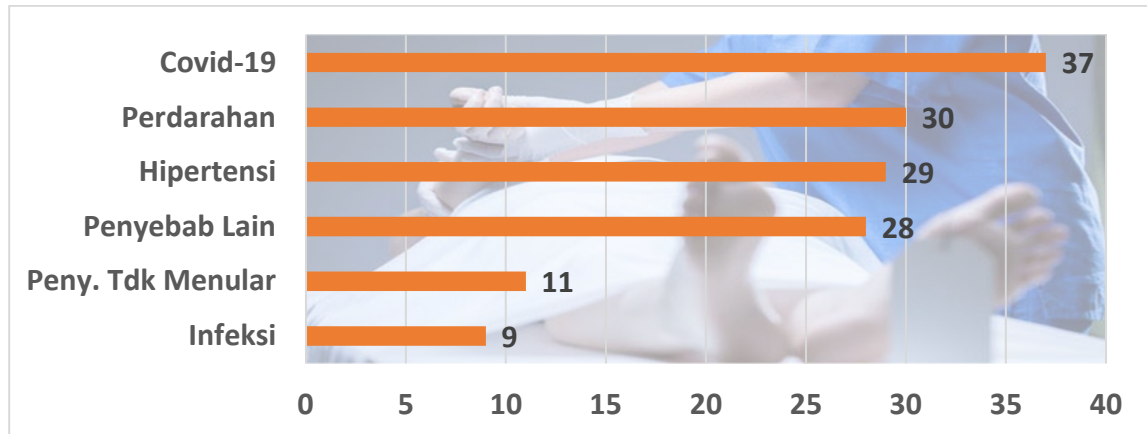
Tabel 2- 39 Jumlah Kematian Ibu Per Kabupaten/Kota Tahun 2019-2021

NO	KABUPATEN/ KOTA	2019			2020			2021		
		KASUS KEMATIAN IBU	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP	AKI (per 100.000 KH)	KASUS KEMATIAN IBU	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP	AKI (per 100.000 KH)	KASUS KEMATIAN IBU	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP	AKI (per 100.000 KH)
1	Mataram	6	7.761	77,31	7	8.842	79,17	15	8.564	175,15
2	Lombok Barat	5	13.708	36,48	14	13.663	102,47	12	13.148	91,27
3	Lombok Utara	4	4.670	85,65	3	4.443	67,52	3	4.244	70,69
4	Lombok Tengah	30	19.577	153,24	29	19.145	151,48	33	18.234	180,98
5	Lombok Timur	29	27.047	107,22	43	24.651	174,44	45	23.508	191,42
6	Sumbawa Barat	2	2.821	70,90	1	3.495	28,61	2	3.393	58,94
7	Sumbawa	6	8.701	68,96	11	9.052	121,52	9	8.613	104,49
8	Dompu	4	5.570	71,81	1	5.763	17,35	7	5.571	125,65
9	Bima	5	10.149	49,27	10	10.084	99,17	12	9.655	124,29
10	Kota Bima	6	3.270	183,49	3	3.339	89,85	6	3.235	185,47
NTB		97	103.170	93,92	122	102.477	119,05	144	98.165	146,69

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2021

Penyebab kematian ibu tertinggi disebabkan oleh covid 19. Untuk detailnya Jumlah kematian ibu pada tahun 2021 berdasarkan penyebabnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2- 18 Jumlah Kematian Ibu pada tahun 2021 berdasarkan Penyebabnya.

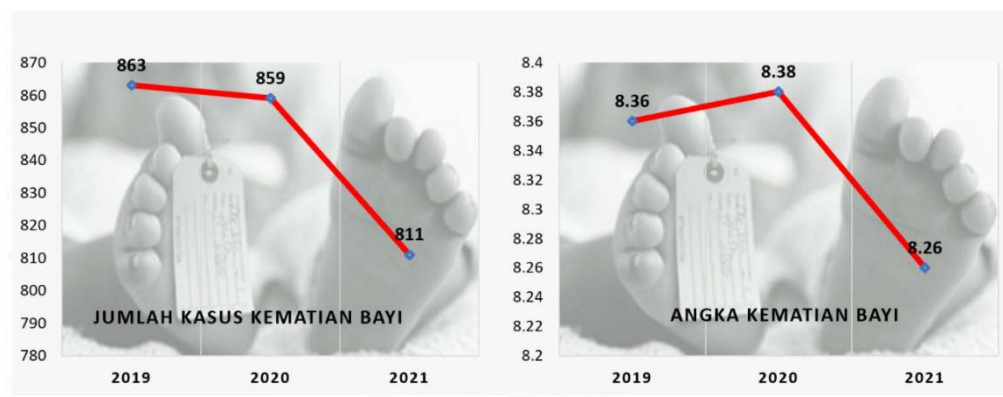


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2021

Penyebab kematian ibu paling tinggi yaitu Covid-19 yang saat ini merupakan pandemi yang terjadi secara global. Faktor pendarahan dan hipertensi dalam kehamilan (HDK) juga menjadi penyebab kematian ibu sebesar 30 dan 29 kasus kematian. Terdapat beberapa faktor lain yg juga menyebabkan kematian ibu yaitu penyakit tidak menular dan infeksi dengan 11 dan 9 kasus kematian.

- **Angka Kematian Bayi**

Gambar 2- 19 Jumlah Kasus Kematian Bayi dan Angka Kematian Bayi di Provinsi NTB Tahun 2019-2021



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2021

Kasus kematian bayi pada tahun 2019 sebanyak 863 kasus, pada tahun 2020 kasus kematian bayi mengalami penurunan menjadi 859 kasus, sedangkan pada tahun 2021 juga mengalami penurunan menjadi 811 kasus. Untuk angka kematian bayi yang merupakan angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup dari tahun 2019-2021 berturut-turut

yaitu 8,36, 8,38 dan 8,26, selengkapnya per kabupaten/kota se-NTB, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2- 40 Jumlah Kasus Kematian Bayi Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi NTB Tahun 2019 – 2021

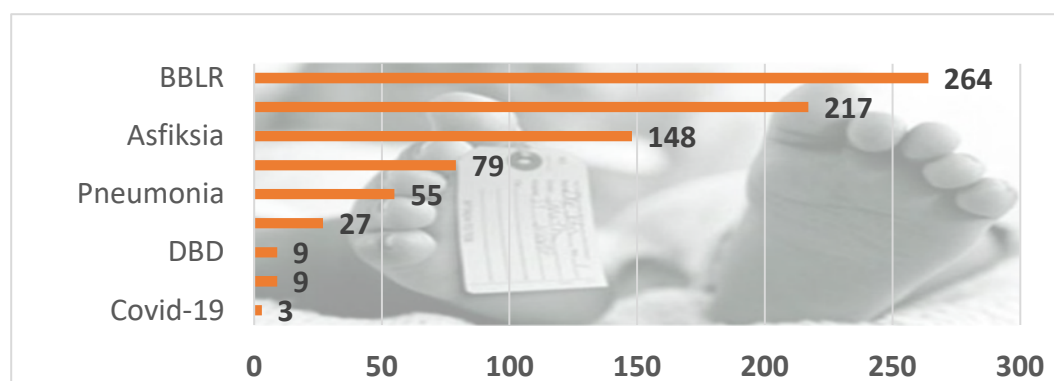
NO	Kabupaten/ Kota	2019			2020			2021		
		Jumlah Kematian Bayi	Jumlah Kelahiran Hidup	AKB (per 1000 KH)	Jumlah Kematian Bayi	Jumlah Kelahiran Hidup	AKB (per 1000 KH)	Jumlah Kematian Bayi	Jumlah Kelahiran Hidup	AKB (per 1000 KH)
1.	Mataram	36	7.761	4,64	37	8.842	4,18	56	8.564	6,54
2.	Lombok Barat	54	13.708	3,94	42	13.663	3,07	46	13.148	3,50
3.	Lombok Utara	76	4.670	16,27	69	4.443	15,53	60	4.244	14,14
4.	Lombok Tengah	204	19.577	10,42	194	19.145	10,13	189	18.234	10,37
5.	Lombok Timur	288	27.047	10,65	297	24.651	12,05	238	23.508	10,08
6.	Sumbawa Barat	18	2.821	6,38	13	3.495	3,72	13	3.393	3,83
7.	Sumbawa	59	8.701	6,78	76	9.052	8,40	64	8.613	7,43
8.	Dompu	21	5.570	3,77	36	5.763	6,25	44	5.571	7,90
9.	Bima	79	10.149	7,78	81	10.084	8,03	89	9.655	8,60
10.	Kota Bima	28	3.270	8,56	14	3.339	4,19	19	3.235	5,87
	NTB	863	103.274	8,36	859	102.477	8,38	818	98.165	8,26

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2021

Berdasarkan tabel di atas Kasus kematian bayi tahun 2019 tertinggi terjadi di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 288 kasus sedangkan Kasus kematian bayi terendah terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 18 kasus. Pada Tahun 2020 kasus kematian bayi tertinggi di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 297 kasus, sedangkan kasus kematian bayi terendah terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 13 kasus. Pada tahun 2021 kasus kematian tertinggi juga terjadi di kabupaten Lombok Timur sebanyak 238 kasus sedangkan kasus kematian bayi terendah juga terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 13 kasus.

Ada beberapa faktor penyebab kematian bayi yaitu berat bayi lahir rendah (BBLR), asfiksia, Pneumonia, demam berdarah (DBD), diare, Covid-19 dan penyebab lainnya. Besarnya jumlah kematian bayi berdasarkan penyebabnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2- 20 Jumlah Kematian Bayi Tahun 2021 berdasarkan Penyebabnya



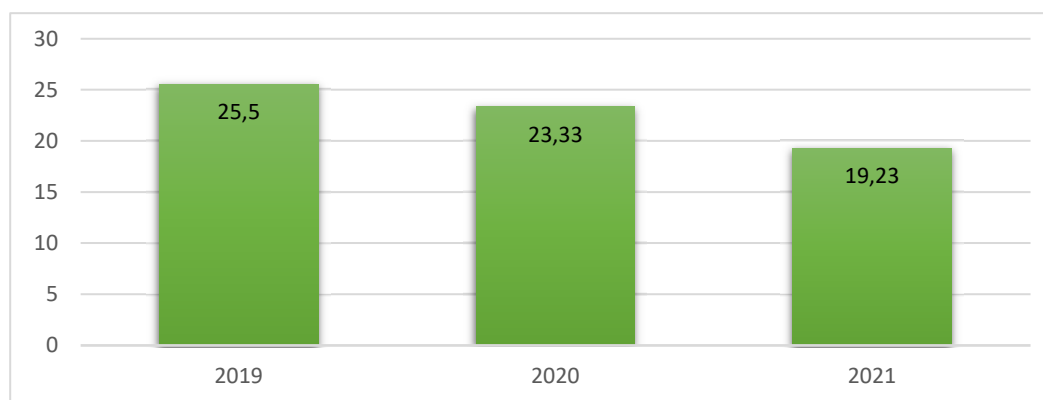
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2021

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kesehatan dalam rangka menurunkan jumlah kasus kematian ibu dan bayi diukur dengan indikator antara lain: Pelayanan Antenatal (ANC) K1 s/d K4, Pertolongan Persalinan, Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas, Pelayanan Kesehatan Neonatus, Deteksi Dini Faktor Risiko dan Komplikasi, Penanganan Komplikasi Kebidanan, Pelayanan Neonatus dengan Komplikasi, Pelayanan Kesehatan Bayi, Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan kualitas KB.

- **Balita Stunting**

Persentase balita Stunting di Provinsi NTB selama 3 tahun terakhir mengalami penurunan dari 25,5 persen di tahun 2019 menjadi 23,33 persen di tahun 2020 dan 19,23 persen di tahun 2021. Data persentase Balita Stunting diperoleh dari hasil pengukuran di tingkat posyandu dan dilaporkan melalui aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPBGM). Untuk indikator persentase Stunting dapat dilihat perkembangannya dalam 3 (tiga) tahun terakhir pada grafik berikut.

Gambar 2- 21 Persentase Stunting NTB Tahun 2019-2021



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2021

Persentase balita stunting tertinggi pada tahun 2021 terjadi di kabupaten Lombok utara yaitu 28,31 persen dan persentase balita stunting terendah terjadi di kabupaten Sumbawa yaitu 8,39 persen. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2- 41 Persentase Stunting Per Kabupaten/Kota Tahun 2019-2021

NO	Kabupaten/ Kota	Persentase Stunting		
		2019	2020	2021
1.	Mataram	33,65	25,81	19,64
2.	Lombok Barat	11,45	31,11	22,71
3.	Lombok Utara	32,78	39,98	28,31
4.	Lombok Tengah	30,11	27,90	23,03
5.	Lombok Timur	29,05	22,38	18,13
6.	Sumbawa Barat	23,31	19,27	14,45
7.	Sumbawa	16,60	11,82	8,39
8.	Dompu	29,85	23,88	14,3
9.	Bima	14,90	22,79	18,2
10.	Kota Bima	8,89	17,06	17,56
	NTB	25,50	23,33	19,23

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2021

Determinan stunting di provinsi NTB yaitu pernikahan usia dini, adanya anggota keluarga yang merokok, pola asuh keluarga balita/pemberian makan bayi balita yang tidak tepat, konsumsi gizi seimbang dan tablet tambah darah Ibu hamil serta remaja putri masih rendah

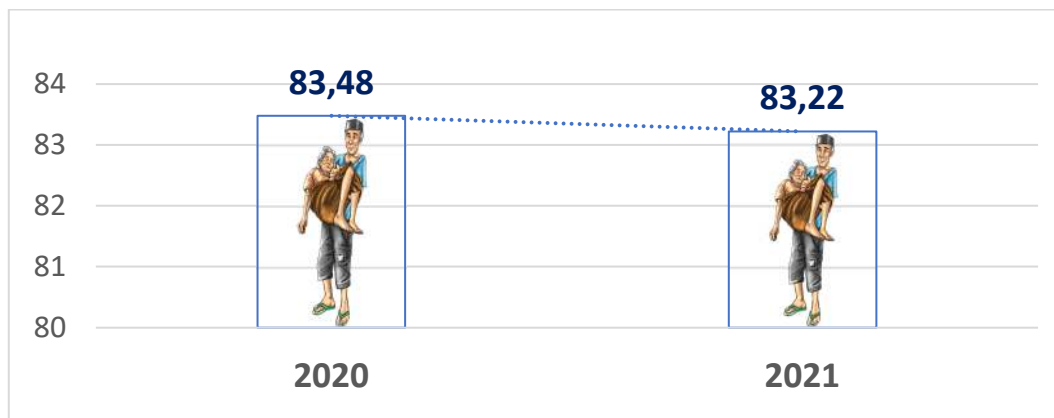
Adapun upaya yang telah dilakukan pemerintah Provinsi NTB untuk menurunkan persentase balita Stunting antara lain melalui:

- a. Memperkuat standar pelayanan (SOP) di Posyandu dengan menerapkan protokol kesehatan 5M: Menggunakan Masker, Menjaga Jarak, Mencuci Tangan dengan Air dan Sabun
- b. Melakukan sosialisasi Pemberian ASI Eksklusif dan PMBA (Pemberian Makan Bayi dan Anak)
- c. Pembinaan Keluarga Sehat dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan hidup sehat bagi keluarga binaan. Sasarannya adalah kelompok rentan terhadap masalah kurang gizi seperti ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita dengan melibatkan peran serta tokoh agama, tokoh masyarakat dan keluarga dalam penanggulangan masalah gizi;
- d. Peningkatan Kapasitas/Pelatihan Petugas Kesehatan dan Kader Posyandu terkait Pemberian Makan Bayi dan Anak. Kegiatan ini dilakukan di seluruh kabupaten/kota dengan melibatkan petugas gizi dan bidan di Puskesmas, bidan desa dan kader posyandu;
- e. Koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor terkait seperti TP PPK, DP3AP2KB, DPMPD Dukcapil, Perguruan Tinggi Kesehatan se-NTB, Organisasi Profesi (PERSAGI, IDI, IBI dll), TOMA, TOGA, Forum Peduli ASI (FPA), dan lainnya dalam pembinaan keluarga sasaran, dan pendampingan pada sasaran prioritas seperti pengasuh balita yang mempunyai masalah gizi, ibu hamil anemia/KEK, dan ibu menyusui.
- f. Distribusi Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil KEK dan Balita kurus di semua kabupaten/kota dengan prinsip dasar pemberian makanan tambahan anak balita adalah untuk memenuhi kecukupan gizi agar mencapai berat badan sesuai umur, sedangkan pada ibu hamil KEK untuk memenuhi kecukupan gizi ibu hamil.

- **Jaminan Kesehatan Nasional**

Cakupan Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2020 yaitu 83,48 persen. Pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,26 persen menjadi 83,22 persen. Hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah.

Gambar 2- 22 Nilai UHC di Provinsi NTB pada tahun 2020-2021



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2021

Pada tahun 2020, nilai Cakupan UHC tertinggi yaitu Dompu dan nilai Cakupan UHC terendah yaitu Lombok Tengah. Sedangkan pada tahun 2021, nilai cakupan UHC tertinggi yaitu di Kabupaten Sumbawa Barat dan yang terendah di kabupaten Lombok Tengah. Berubahnya tarif dalam waktu yang singkat akibat terbitnya Perpres No. 64 Tahun 2020 menjadi kendala yang dihadapi dalam meningkatkan cakupan UHC. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2- 42 Gambaran Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN Provinsi NTB Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	PBI APBN	PBI NTB	PBI Kab/Kota	Total
1.	Kota Mataram	145.109	7.978	17.699	170.786
2.	Kabupaten Lombok Barat	391.392	18.605	18.354	428.351
3.	Kabupaten Lombok Utara	134.256	48.600	9.970	192.826
4.	Kabupaten Lombok Tengah	569.634	21.069	49.311	640.014
5.	Kabupetan Lombok Timur	869.915	19.403	60.248	949.566
6.	Kota Bima	64.658	17.910	12.595	95.163
7.	Kabupaten Bima	319.012	6.705	25.721	351.438
8.	Kabupaten Dompu	135.256	2.447	49.015	186.718
9.	Kabupaten Sumbawa	231.442	3.732	58.967	294.141
10.	Kabupaten Sumbawa Barat	56.572	1.139	43.804	101.515
	TOTAL PROV NTB	2.917.226	147.588	345.684	3.410.518

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2021

Kuota peserta JKN NTB 2021 yaitu Peserta awal JKN NTB dan di luar kuota JKN Pusat sejumlah 150.482 jiwa (PBI NTB) terdiri dari peserta awal tahun 2021 sejumlah 147.588, selanjutnya terdapat peserta tambahan dari Kabupaten Sumbawa sebanyak 1.190 jiwa dan Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 1.704 jiwa.

Tabel 2- 43 Gambaran Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN Provinsi NTB Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	PBI APBN	PBI NTB	PBI Kab/Kota	Total
1.	Kota Mataram	148.846	7.419	15.426	171.691
2.	Kabupaten Lombok Barat	384.595	16.620	20.503	421.718
3.	Kabupaten Lombok Utara	169.329	21.967	25.059	216.355
4.	Kabupaten Lombok Tengah	557.786	19.277	49.459	626.522
5.	Kabupetan Lombok Timur	860.135		59.971	920.106
6.	Kota Bima	63.697	16.816	11.916	92.429
7.	Kabupaten Bima	314.561	5.898	33.459	353.918
8.	Kabupaten Dompu	146.208	2.283	26.102	174.593
9.	Kabupaten Sumbawa	256.207	3.403	26.212	285.822
10.	Kabupaten Sumbawa Barat	71.998	2.401	26.040	100.439
	TOTAL PROV NTB	2.973.362	96.084	345.684	3.415.130

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020; Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2021

Rincian peserta Jaminan Kesehatan Nasional secara keseluruhan di Provinsi NTB baik PBI, Non PBI maupun Non JKN sampai 31 Desember 2021 sebagai berikut.

Tabel 2- 44 Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi NTB Tahun 2021

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK	NON PBI	PBI
1.	Kota Mataram	441.561	206.944	171.691
2.	Kabupaten Lombok Barat	724.875	154.867	421.718
3.	Kabupaten Lombok Utara	252.949	30.811	216.355
4.	Kabupaten Lombok Tengah	1.059.042	176.511	626.522
5.	Kabupetan Lombok Timur	1.334.499	190.715	920.106
6.	Kota Bima	155.140	56.885	92.429
7.	Kabupaten Bima	532.789	98.249	353.918
8.	Kabupaten Dompu	241.836	55.728	174.593
9.	Kabupaten Sumbawa	519.061	122.155	285.822
10.	Kabupaten Sumbawa Barat	143.633	42.168	100.439
	PROVINSI NTB	5.405.385	1.135.033	3.415.130

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk NTB yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional sebanyak 5.405.385 jiwa atau 84.18% dari jumlah penduduk NTB (Non PBI + PBI). Besar dana yang telah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi NTB sebesar Rp. 33.488.059.200 untuk masyarakat miskin diluar JKN Pusat.

Tabel 2- 45 Dana Sharing Jamkesmas Provinsi Tahun 2021

NO	KABUPATEN / KOTA	TARGET DANA SHARING	REALISASI DANA SHARING YG SUDAH DITRANSFER KE BKSPJK	%	KET
1.	Provinsi	37.000.152.000	33.488.059.200	90	Sharing APBD Murni 2021

NO	KABUPATEN / KOTA	TARGET DANA SHARING	REALISASI DANA SHARING YG SUDAH DITRANSFER KE BKSPJK	%	KET
2.	Kota Mataram	1.809.410.400	1.809.410.400	100	
3.	Lombok Barat	4.219.614.000	4.063.332.000	96	
4.	Lombok Tengah	4.778.449.200	4.778.449.200	100	
5.	Lombok Timur	0	0	0	Tidak ada kerja sama
6.	Lombok Utara	3.675.067.200	3.675.067.200	100	
7.	Sumbawa Barat	580.381.200	580.381.200	100	
8.	Sumbawa	1.116.309.600	848.154.800	76	
9.	Dompu	554.979.600	554.979.600	100	
10.	Bima	1.520.694.000	1.520.694.000	100	
11.	Kota Bima	4.061.988.000	4.061.988.000	100	
JUMLAH		59.317.045.200	55.380.515.600	93	

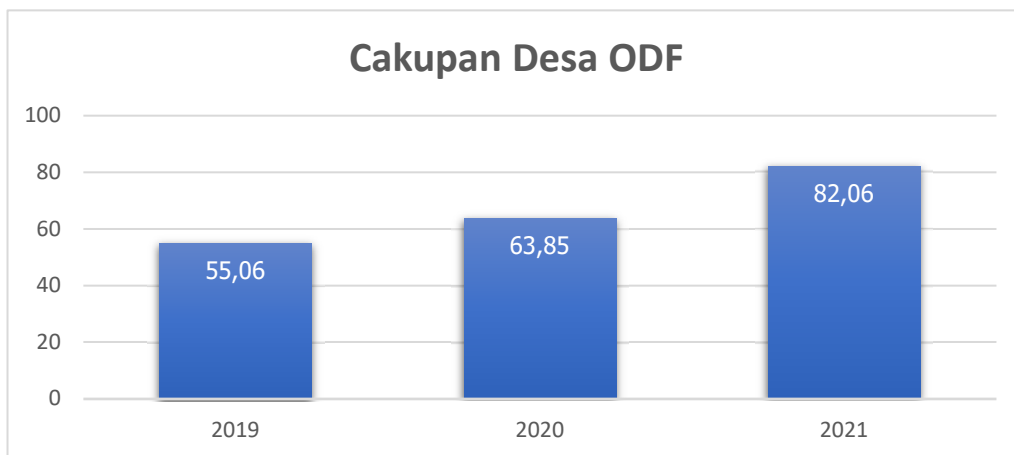
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2021

Realisasi dana sharing provinsi dan kabupaten/kota yang sudah ditransfer ke BKSPJK adalah Rp.55.380.515.600,- dari target sebesar Rp.59.317.045.200,-. Kabupaten Lombok Timur tidak memberikan dana sharing pada tahun 2021 karena kabupaten tersebut tidak ada kerja sama. Total iuran peserta PBI NTB yang dibayarkan ke BPJS Kesehatan sampai 31 Desember 2021 sebesar Rp.68.258.635.200,- dengan jumlah kepesertaan 150.482 jiwa.

- **Cakupan Desa Open Defecation Free (ODF)**

Cakupan Desa ODF dalam tiga tahun terakhir meningkat dari 55,06 persen pada tahun 2019 menjadi 63,85 di tahun 2020. Pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan sebesar 18,21 persen sehingga capainnya menjadi 82,06 persen.

Gambar 2- 23 Cakupan Desa ODF di Provinsi NTB Tahun 2019 – 2021



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2021

Terdapat 4 Kabupaten/kota yang sudah mencapai ODF di tahun 2021 yaitu Sumbawa Barat, Kota Mataram Lombok tengah dan Lombok Barat. Kabupaten Sumbawa Barat menjadi kabupaten yang pertama di Indonesia mencapai Akses STBM 5 Pilar di Tahun 2021. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2- 46 Cakupan Desa ODF Per Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB Tahun 2019-2021

NO	KABUPATEN / KOTA	CAKUPAN DESA ODF (%)		
		2019	2020	2021
1.	Kota Mataram	82	78	100
2.	Kab. Lombok Barat	92,62	77,05	100
3.	Kab. Lombok Tengah	50,36	61,87	100
4.	Kab. Lombok Timur	37,40	46,06	91,34
5.	Kab. Lombok Utara	9,09	27,27	66,67
6.	Kab. Sumbawa Barat	100	100	100
7.	Kab. Sumbawa	42,17	55,42	66,87
8.	Kab. Dompu	60,87	39,24	72,46
9.	Kab. Bima	63,87	72,25	63,87
10.	Kota Bima	45,45	39,47	60,61
	NTB	55,06	63,85	82,06

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2021

Secara kuantitas, perkembangan jumlah Posyandu keluarga di NTB cukup signifikan, karena terjadi penambahan jumlah posyandu setiap tahun, pada tahun 2019 sebanyak 1050, pada tahun 2020 sebanyak 2223 dan pada tahun 2021 sebanyak 7.581. Namun bila ditinjau dari aspek kualitas, masih perlu ditingkatkan baik kualitas pelayanan maupun integrasi program.

Tabel 2- 47 Jumlah Posyandu berdasarkan jenis Posyandu di Provinsi NTB Tahun 2021

NO	Kabupaten / Kota	Jumlah Posyandu	Jumlah Posyandu Keluarga	Jumlah Posyandu Integrasi Bank Sampah	Jumlah Posyandu Integrasi PAUD	Jumlah Posbindu PTM	POSY Remaja	POSY Lansia
1.	Kota Mataram	357	357	2	98	89	22	114
2.	Kab. Lombok Barat	939	939	35	153	344	68	129
3.	Kab. Lombok Tengah	1.697	1697	28	10	114	114	162
4.	Kab. Lombok Timur	1.936	1936	50	312	350	266	753
5.	Kab. Lombok Utara	412	412	60	33	66	11	91
6.	Kab. Sumbawa Barat	225	225	12	16	105	104	105
7.	Kab. Sumbawa	737	737	3	237	189	35	105
8.	Kab. Dompu	441	441	42	97	366	433	433
9.	Kab. Bima	665	665	4	49	323	188	133
10.	Kota Bima	172	172	3	12	124	38	118
	NTB	7.581	7.581	239	1.017	2.070	1.279	2.143

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2021

Upaya ini membutuhkan keterlibatan banyak pihak, baik pemerintah maupun komponen masyarakat. Karena itu, mengingat sumberdaya yang terbatas, maka penyelenggaraan Revitalisasi Posyandu dirancang sebagai suatu kolaborasi dan sinergi yang sistematis antar sektor terkait, para mitra pembangunan (NGO), swasta serta koordinasi yang harmonis antara pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten / Kota bahkan sampai pemerintah Desa.

Adapun capaian pelayanan yang dilaksanakan pada unit-unit pelaksana teknis daerah di Dinas Kesehatan Provinsi NTB tahun 2021 antara lain:

1) Rumah Sakit Mata NTB

Capaian indikator kinerja bidang kesehatan pada Rumah Sakit Mata NTB tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2- 48 Indikator Kinerja Urusan Bidang Kesehatan Pada Rumah Sakit Mata NTB Tahun 2021

NO	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	Capaian per tahun		
			2019	2020	2021
1.	Sterilisasi kultur peralatan medis dan ruangan	Kali	2	2	2
2.	Cakupan <i>screening</i> penyakit mata	Orang	1.500	22.975	30.181
3.	Cakupan operasi katarak	Orang	1.251	1.179	2.019
4.	Cakupan kunjungan	Orang	24.826	22.975	30.181
5.	Cakupan Operasi pterygium dan operasi lainnya	Orang	420	248	288

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2021

Capaian kinerja Rumah Sakit Mata NTB pada tahun 2019-2021 untuk indikator cakupan *screening* penyakit mata mengalami peningkatan setiap tahunnya. Untuk indikator cakupan operasi katarak pada tahun 2019 sebesar 1.251, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 1.179 dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 2.019. Indikator cakupan kunjungan juga sempat mengalami penurunan di tahun 2020, dari 24.826 kunjungan di tahun 2019 menjadi 22.975 kunjungan di tahun 2020, tetapi pada tahun 2021 mengalami peningkatan kunjungan dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 30.181 kunjungan. Sementara indikator cakupan operasi pterygium dan operasi lainnya menurun pada tahun 2020 yaitu 248 orang dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 288 orang.

2) Balai Laboratorium Kesehatan, Pengujian dan Kalibrasi (BLKPK)

Kunjungan pasien ke BLKPK pada tahun 2021 adalah sebanyak 39.053 orang, terus mengalami peningkatan dan adanya perbaikan serta peningkatan pelayanan. Meningkatnya jumlah kunjungan tersebut disebabkan tingginya peran bersama petugas dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tingginya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas laboratorium dan mengharuskan masyarakat yang melakukan perjalanan untuk melakukan uji tes laboratorium untuk meningkatkan kualitas kesehatan serta pada situasi pandemic covid 19. Untuk Pemeriksaan Medis dan Pelayanan Kalibrasi Alat jumlah yang dapat dilayani oleh BLKPK terus mengalami peningkatan, sedangkan untuk pelayanan radiologi mengalami naik turun. Capaian indikator kinerja program pada BLKPK Tahun 2019-2021, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2- 49 Capaian Kinerja Indikator Program BLKKPM Tahun 2019-2021

NO	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	CAPAIAN PER TAHUN			
			2019	2020	2021	
			REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI
1.	Kunjungan pasien	Orang	4.101	16.124	17.736	39.053
2.	Pemeriksaan Medis	Orang	3.420	659	725	1.201
3.	Pelayanan radiologi	Orang	216	623	685	548
4.	Pelayanan Kalibrasi Alat	Unit	1.732	1.625	1.775	2.983

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2021

Pelayanan Laboratorium Berdasarkan Jumlah Parameter yang diperiksa Masing-masing Bidang Pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh BLKKPM pada periode Tahun 2019-2021, dapat disampaikan pada tabel berikut.

Tabel 2- 50 Jumlah Pelayanan Laboratorium Berdasarkan Jumlah Parameter yang diperiksa Masing-masing Bidang Pemeriksaan pada BLKKPM Tahun 2019-2021

No	Bidang Pemeriksaan	Satuan	Capaian per tahun			
			2019	2020	2021	
					Target	Realisasi
1.	Hematologi	Parameter	2.829	3.909	4.300	5.362
2.	Kimia Klinik	Parameter	12.215	12.441	13.685	14.501
3.	Mikrobiologi Lingkungan	Parameter	2.517	1.337	1.471	3.801
4.	Mikrobiologi Klinik	Parameter	2.227	1.682	1.850	3.455
5.	Imunoserologi	Parameter	3.513	12.309	13.540	34.004
6.	Toksikologi	Parameter	1.245	3.254	3.579	1.704
7.	Kimia Kesehatan	Parameter	12.293	12.950	14.245	15.112
8.	Pengabdian Masyarakat	Parameter	771			86
9.	Pemeriksaan Mobil Keliling	Parameter		682	750	
10.	Media Reagen		547.190	433.035	476.339	595.359
11.	Sampling		3.341	15.317	16.849	37.411
Jumlah			588.141	496.916	546.608	710.099

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2021

b. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi

Penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi sebagaimana tertuang dalam RPJMD NTB 2019-2023 khususnya misi ketiga “NTB Sehat dan Cerdas”. Keberhasilan pembangunan bidang Kesehatan yang diselenggarakan oleh RSUD Daerah Provinsi NTB diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu: Angka Harapan Hidup (AHH) dan Status Akreditasi Rumah Sakit. Adapun capaian indikator kinerja tersebut 2020-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2- 51 Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Urusan Kesehatan pada RSUD Daerah Provinsi NTB Tahun 2020-2021

NO	INDIKATOR BIDANG URUSAN (SATUAN)	TAHUN 2019		TAHUN 2020	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Angka Harapan Hidup (tahun)	66,48	66,51	66,78	66,69
2	Status Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna

Sumber: BPS NTB, RSUD Provinsi NTB, 2021

Angka Harapan Hidup NTB tahun 2021 meningkat dibandingkan tahun 2020. Pencapaian ini bukanlah semata kinerja dari RSUD Provinsi NTB saja melainkan merupakan akumulasi kinerja dari berbagai sektor. Berbagai pelayanan yang bersifat kuratif dilakukan oleh RSUD Provinsi NTB untuk berkontribusi dalam meningkatkan AHH NTB.

Kemudian Kualitas layanan RSUD Provinsi NTB kepada masyarakat diukur dengan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Wabah Covid-19 yang terjadi sejak pada awal tahun 2020 menyebabkan kegiatan re-asesment akreditasi RS versi 2012 yang dilakukan oleh tim Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) tidak bisa terlaksana. Hasil re-asesment akreditasi RS versi 2012 yang dilakukan oleh tim Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) pada tahun 2021 masih menjadi acuan predikat akreditasi Rumah Sakit dimana RSUD Provinsi NTB mampu mempertahankan predikat PARIPURNA.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, RSUD Daerah Provinsi NTB melakukan pelayanan medis baik mencakup rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat. Cakupan layanan medis berdasarkan cara pembayaran di RSUD Provinsi NTB tahun 2019-2021 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2- 52 Cakupan Layanan Rawat Jalan, Rawat Inap dan IGD Berdasarkan Cara Pembayaran di RSUD Provinsi NTB Tahun 2019-2021

NO.	CARA PEMBAYARAN	2019				2020				2021			
		RAWAT JALAN	RAWAT INAP	IGD	JUMLAH	RAWAT JALAN	RAWAT INAP	IGD	JUMLAH	RAWAT JALAN	RAWAT INAP	IGD	JUMLAH
1	Askes (Non PBI)	81.511	9.842	7.042	98.395	53524	6476	4324	64324	70,880	7,689	5,297	83,866
2	Umum	18.292	1.483	5.048	24.823	10374	842	2867	14083	10,790	572	2,735	14,097
3	Jamkesmas (PBI)	39.048	6.637	4.555	50.24	30786	4627	3028	38441	42,014	5,916	3,261	51,191
4	Asuransi Lain	2.09	714	380	3.184	1226	2103	1404	4733	1,848	340	2,465	4,653
5	Dana Bencana Alam (DBA)/Covid-19	150	47	0	197	12	0	0	12	-	2,142	-	2,142
Jumlah		141.091	18.723	17.025	176.839	95.922	14.048	11.623	121.593	125,532	16,659	13,758	155,949

Sumber: RSUD Provinsi NTB, 2021

Pada tahun 2021, dibanding dengan tahun 2020, terjadi peningkatan kunjungan pasien sebanyak 34.356 pasien, baik rawat jalan, rawat inap dan IGD, menjadi sebanyak 155.949 pasien. Hal ini sebagai akibat terjadinya lonjakan kasus Pandemi Covid-19 dan kedudukan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Rumah sakit rujukan tertinggi di

Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pengembangan pelayanan dan upaya peningkatan pelayanan secara optimal di RSUD Provinsi NTB terus berusaha ditingkatkan, terutama setelah terjadinya gelombang kedua pandemi Covid-19 tahun 2021 antara lain: merubah fungsi ruang perawatan pasien untuk Ruang Isolasi pasien Covid-19 (Ruang Sendang Gile, Gili Trawangan, Otak Kokok dan Segara Anak) dan untuk mengantisipasi lonjakan pasien Covid-19, RSUD Provinsi NTB membuka layanan Rumah Sakit Darurat Covid Namira, yang berlokasi di asrama haji, jalan lingkaran selatan kota Mataram.

RSUD Provinsi NTB memiliki layanan unggulan yaitu layanan Onkologi Terpadu meliputi layanan Kemoterapi dan Radioterapi. Layanan Kemoterapi dan Radioterapi merupakan layanan yang diperuntukkan bagi pasien kanker. Layanan Kemoterapi pada tahun 2021 sebanyak 4.801 kasus, adapun layanan untuk radioterapi di tahun 2021 sebanyak 12.162 kunjungan dengan jumlah tindakan radiasi sebanyak 10.682 tindakan.

Pada tahun 2021 terdapat 3 (tiga) jenis penyakit yang paling banyak di instalasi rawat jalan yaitu Calculus of kidney, Epilepsy, unspecified dan Malignant neoplasm of Breast, unspecified. Adapun 10 jenis penyakit terbanyak yang dirawat di instalasi rawat jalan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2- 53 Sepuluh Penyakit Terbanyak Kunjungan Pasien Rawat Jalan di RSUD Provinsi NTB Tahun 2021

NO	ICD	Diagnosa	Kasus Baru		Jumlah Kasus Baru	Jumlah Kunjungan
			L	P		
1	N20.0	<i>Calculus of kidney</i>	182	104	286	1963
2	G40.9	<i>Epilepsy, unspecified</i>	146	89	235	2447
3	C50.9	<i>Malignant neoplasm of Breast, unspecified</i>	0	214	214	11268
4	I25.1	<i>Atherosclerotic heart disease</i>	109	63	172	5074
5	D24	<i>Benign neoplasm of breast</i>	2	150	152	921
6	M54.5	<i>Low back pain</i>	67	72	139	1608
7	N40	<i>Hyperplasia of prostate</i>	129	0	129	1219
8	D21.0	<i>Benign neoplasm of Connective and other soft tissue of head, face and neck</i>	65	51	116	789
9	K04.1	<i>Necrosis of pulp</i>	39	54	93	975
10	D36.7	<i>Benign neoplasm of Other specified sites</i>	43	48	91	572

Sumber: RSUD Provinsi NTB, 2021

Kemudian pada pelayanan di instalasi rawat inap, ada 3 (tiga) penyakit paling banyak yang dirawat tahun 2020 yaitu malignant neoplasm of breast_unspecified, Coronavirus infection, unspecified, Chronic kidney disease, stage 5. Adapun 10 jenis penyakit terbanyak yang dirawat di instalasi rawat inap tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 2- 54 Sepuluh Penyakit Terbanyak Pasien Rawat Inap di RSUD Provinsi NTB Tahun 2021

No. Urut	Diagnosa		Pasien Keluar Hidup		Pasien Keluar Mati		TOTAL
	Kode	Nama Penyakit	L	P	L	P	
1	C50.9	<i>Malignant neoplasm of breast, unspecified</i>	0	2676	0	40	2716
2	B34.2 + U07.2	<i>Coronavirus infection, unspecified</i>	1086	833	214	174	2307
3	N18.5	<i>Chronic kidney disease, stage 5</i>	280	270	72	34	656

No. Urut	Diagnosa		Pasien Keluar Hidup		Pasien Keluar Mati		TOTAL
	Kode	Nama Penyakit	L	P	L	P	
4	D64.9	<i>Anaemia, unspecified</i>	279	261	62	44	646
5	D63.0	<i>Anaemia in neoplastic disease (C00-D48+)</i>	156	359	30	36	581
6	J18.9	<i>Pneumonia, unspecified</i>	144	135	134	99	512
7	E11.9	<i>Non-insulin-dependent diabetes mellitus without complications</i>	197	182	71	54	504
8	C11.9	<i>Malignant neoplasm of nasopharynx, unspecified</i>	254	162	10	6	432
9	J80	<i>Adult respiratory distress syndrome</i>	70	44	158	111	383
10	C20	<i>Malignant neoplasm of rectum</i>	230	129	6	5	370

Sumber: RSUD Provinsi NTB, 2021

Selanjutnya pada Pelayanan Instalasi Gawat Darurat terdapat beberapa penyakit terbanyak yang ditangani yaitu Fever-unspecified, Gastro-oesophageal reflux disease without oesophagitis, Coronavirus infection. Adapun 10 jenis penyakit terbanyak yang dirawat di instalasi rawat Darurat tahun 2021 adalah sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2- 55 Sepuluh Penyakit Terbanyak di Instalasi Gawat Darurat RSUD Provinsi NTB Tahun 2021

No	ICD	Nama Diagnosa	Kasus Baru		Jumlah Kasus Baru	Jumlah Kunjungan
			L	P		
1	R50.9	<i>Fever, unspecified</i>	90	63	153	360
2	K21.9	<i>Gastro-oesophageal reflux disease without oesophagitis</i>	64	73	137	426
3	B34.2	<i>Coronavirus infection, unspecified</i>	55	68	123	242
4	T14.0	<i>Superficial injury of unspecified body region</i>	82	37	119	158
5	R10.4	<i>Other and unspecified abdominal pain</i>	49	39	88	247
6	T14.1	<i>Open wound of unspecified body region</i>	51	36	87	141
7	J06.9	<i>Acute upper respiratory infection, unspecified</i>	34	38	72	171
8	S06.0	<i>Concussion</i>	39	32	71	85
9	I10	<i>Essential (primary) hypertension</i>	31	38	69	208
10	K30	<i>Dyspepsia</i>	25	38	63	160

Sumber: RSUD Provinsi NTB, 2021

Dalam rangka menunjang pelayanan RSUD Daerah Provinsi NTB, Melalui dana DAK dan DBHCHT, RSUD Provinsi NTB tahun 2021 membeli alat kebutuhan instalasi/unit sehingga total pengadaan alat yang dibeli sebanyak 408 unit. Kemudian tahun 2021 RSUD Daerah Provinsi NTB mendapatkan Dana BTT yang digunakan untuk penanggulangan Covid-19 dipeuntukkan Belanja Insentif tenaga kesehatan Vaksinator dan belanja insentif tenaga kesehatan penanganan covid-19.

Tahun 2021 dilaksanakan juga kegiatan pendidikan dan pelatihan formal untuk meningkatkan kualitas SDM tenaga kesehatan. Sementara untuk kegiatan pelatihan, RSUD Provinsi NTB telah melaksanakan kegiatan pelatihan baik berupa pelatihan lebih dari 20 jam pelatihan maupun pelatihan yang kurang dari 20 jam (berupa workshop, symposium dan lain-lain). Adapun SDM yang mengikuti kegiatan pelatihan yang lebih dari 20 jam pelatihan sebanyak 336 orang, SDM yang mengikuti pelatihan kurang dari 20 jam sebanyak 66 orang. Pada tahun 2021 RSUD Provinsi NTB telah melaksanakan On Job Training/magang sebanyak 229 orang dan beberapa diantaranya dari luar Provinsi NTB

antara lain Akademi Teknik (Atro Bali) 5 orang, Poltekkes Semarang 4 orang, ITEKES Bali 2 orang FIK Universitas Muhammadiyah Malang 10 orang dll.

Sebagai rumah sakit tipe B Pendidikan, RSUD Provinsi NTB telah melaksanakan kegiatan kepaniteraan klinik pada co-asisten melalui kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Mataram sampai bulan Desember 2021 sebanyak 150 orang dan pelayanan kegiatan praktik siswa/mahasiswa non kedokteran sebanyak 197 orang dari berbagai institusi pendidikan kesehatan (Keperawatan, Kebidanan, Gizi dan Ners) di wilayah Provinsi NTB (STIKES HAMZAR 26 orang, STIKES YARSI 145 orang, Poltekkes 14 orang, FIK UNW 12 orang).

Selain itu untuk melihat kinerja penyelenggaraan urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB, ditetapkan Indikator Kinerja Pelayanan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2- 56 Capaian Indikator Kinerja Pelayanan RSUD Provinsi NTB tahun 2021

NO	ASPEK/INDIKATOR KINERJA RSUD PROVINSI NTB	SAT	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN
			2021	2021	
1	Kepuasan Pelanggan (Indeks)	%	90	86,71	96,34
2	BOR (Tingkat pemanfaatan tempat tidur RS)	%	60-80	43,7	100
3	ALS (Tingkat efisiensi dan mutu pelayanan RS)	Hari	4-6	6	100
4	BTO (Frekuensi penggunaan TT)	Orang	40-50	32	76,19
5	TOI (Interval TT tdk terisi sampai terisi kembali RS)	Hari	1-3	6,7	279
6	NDR (Angka kematian > 48 jam)	Permil	< 25	42.5	100
7	GDR (Angka kematian umum)	Permil	<45	70.7	100
8	Angka Kematian Ibu di RS				
	Akibat Pendarahan	%	≤1	1	100
	Preklamsia	%	≤30	3	100
	Sepsis	%	≤0,2	0	100
9	Angka Infeksi Nosokomial	%	1,5	1,52	100
10	Jumlah pasien yang dilayani :				
	Rawat Inap	Orang	19.718	16.659	75,03
	Rawat Jalan	Orang	151.773	125.532	67,98
	Gawat Darurat	Orang	20.437	13.758	68,27
11	Prosentase Baku Mutu limbah cair				
	BOD	mg/lt	30	1.54	100
	COD	mg/lt	80	35,6	100
	TSS	mg/lt	30	19	100
	PH	%	6-9	6,94	100
12	Jumlah Dokter Spesialis ke Sub Spesialis	Orang	0	0	0
13	Jumlah Dokter Umum ke Spesialis	Orang	3	0	0
14	Jumlah pelatihan dan pengembangan SDM RS	Orang	303	405	199
15	Jumlah Dokumen Perencanaan RS yang tersusun	Jenis	7	7	100
16	Jumlah Naskah Kerjasama	Jenis	75	90	120
17	Jumlah laporan capaian kinerja	Jenis	5	5	100

Sumber: RSUD Provinsi NTB, 2021

Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit pada tahun 2021 mencapai 86,71 persen, artinya mutu pelayanan dalam kategori “Baik” (76,61–88,30), ini berdasarkan survei yang dilakukan untuk mengetahui kepuasan pelanggan. Selama kurun waktu tahun 2021, RSUD Provinsi NTB telah berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu beberapa inovasi telah dilakukan oleh RSUD Provinsi NTB antara lain:

1. Vaksin *On the road*

Adalah salah satu inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan capaian vaksinasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang mana tim vaksin RSUD Prov NTB akan datang ke daerah atau lokasi-lokasi untuk melaksanakan vaksinasi ditempat tersebut, sehingga cakupan vaksinasi dapat ditingkatkan dan tercapai *herd immunity*

2. *Province Command Centre (PCC) 119*: adalah layanan kegawat daruratan yang dikembangkan oleh Rumah Sakit umum Daerah Provinsi NTB, diawali dengan mendownload aplikasi tsb pada playstore, dan ketika masyarakat memerlukan layanan PCC, dapat menekan tombol kuning pada aplikasi selama 3 detik dan tim PCC akan menghubungi anda kembali atau menghubungi call center bebas pulsa +62800 1111 119

- a. *Pre Hospital* adalah layanan yang dilakukan diluar Rumah Sakit, sebelum pasien dibawa ke RS untuk perawatan medis lanjutan
- b. *Home Care* yaitu layanan perawatan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional kepada individu atau keluarga di rumah. Kendati dilakukan di rumah, pelayanan tetap sesuai dengan standar yang berlaku layaknya di rumah sakit. Layanan ini tidak bersifat darurat, Masyarakat dapat menghubungi layanan *Home Care* dengan nomor bebas pulsa 087718588887
- c. Telekonsultasi Covid-19 adalah layanan konsultasi via *Whatsapp* ke nomer 08170001919, dimana masyarakat dapat menghubungi untuk bertanya/konsultasi seputar covid-19 yang akan dijawab oleh tim dokter RSUD Prov NTB

3. Graha Gemilang layanan poliklinik eksekutif & rawat inap eksekutif

Salah satu layanan yang dikembangkan untuk menjawab banyaknya permintaan masyarakat akan layanan kesehatan dengan fasilitas dan pelayanan Ekskutif, dengan melibatkan tenaga Profesional yang terlatih serta alat penunjang yang mumpuni.

4. Pendaftaran online rawat jalan

Pendaftaran online RSUD Provinsi NTB memudahkan pasien dalam mendaftar ke Poli tujuan dan tidak perlu mangantre di loket karena pendaftaran dapat dilakukan dirumah melalui website resmi RSUDP NTB dengan sarat dan ketentuan hanya untuk pasien lama yang sebelumnya pernah berkunjung.

Dengan adanya Inovasi ini dapat memperlancar proses kesiapan berkas pada Rekam Medis, efektif dan efisien kepada pengunjung yang rutin berkunjung ke RSUDP NTB karena pada saat berkunjung langsung ke loket khusus tanpa antrian untuk proses registrasi.

c. Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi

RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB, pada tahun 2021 menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan pembangunan bidang Kesehatan dalam rangka mendukung pencapaian misi ketiga RPJMD NTB 2019-2023 “NTB Sehat dan Cerdas” dengan salah satu indikatornya adalah Angka Harapan Hidup (AHH). Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan selain untuk mencapai target Angka Harapan Hidup, juga untuk mencapai target kinerja RSJ Mutiara Sukma dengan indikator: Status Akreditasi Rumah Sakit dengan

target Paripurna. Pada tahun 2021 target dan capaian kinerja RSJ Mutiara Sukma tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2- 57 Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Urusan Kesehatan pada RSJ Mutiara Sukma Tahun 2020-2021

NO	INDIKATOR (SATUAN)	TAHUN 2019		TAHUN 2020	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
	Kesehatan (RSJ Mutiara Sukma)				
1	Angka Harapan Hidup (tahun)	66,48	66,51	66,78	66,69
2	Status Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna

Sumber: RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB, 2021

Dalam rangka meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH), RSJ Mutiara Sukma memberikan pelayanan utama pada bidang kesehatan jiwa secara komprehensif dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup pasien gangguan jiwa, untuk itu Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma melaksanakan pelayanan intramural (dalam gedung) dan ektramural (diluar gedung). Pelayanan intramural yang diberikan kepada masyarakat adalah pelayanan kesehatan jiwa baik meliputi rawat jalan maupun rawat inap. Pelayanan pasien rawat jalan tahun 2021 sebanyak 37.428 orang, sedangkan pasien rawat inap sebanyak 1.431 orang sehingga total pasien sebanyak 38.859 orang. Peningkatan jumlah pasien yang dilayani pada tahun 2021 disebabkan keberhasilan instalasi PKRS dalam mensosialisasikan jenis layanan yang ada di RSJ Mutiara Sukma dan mekanisme rujukan ke RSJ tanpa melalui sistem rujukan yang berjenjang, selain itu pelayanan vaksinasi covid-19 yang diberikan RSJ Mutiara Sukma kepada ASN dan masyarakat umum.

Tahun 2021, pasien layanan kesehatan jiwa baik rawat jalan maupun rawat inap lebih banyak menggunakan BPJS Kesehatan sebagai cara pembayaran, yang mencapai 72,12 persen atau sebanyak 28,026 orang. Sementara pasien yang menggunakan layanan umum (non BPJS Kesehatan) sebesar 25,62 persen atau sebanyak 9.958 orang. Metode pembayaran tidak saja melalui mekanisme layanan BPJS Kesehatan dan Non BPJS Kesehatan, tetapi juga melalui mekanisme bantuan sosial sebanyak 2,25 persen atau 875 orang.

Tabel 2- 58 Jumlah Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap di RSJ Mutiara Sukma Provinsi berdasarkan Cara Bayar Tahun 2020-2021

NO	CARA PEMBAYARAN	2020			2021		
		RAWAT JALAN	RAWAT INAP	JUMLAH	RAWAT JALAN	RAWAT INAP	JUMLAH
1	Umum	7.962	96	8.058	9.881	77	9.958
2	BPJS	23.198	1.044	24.242	26.970	1056	28.026
3	Bansos	439	201	640	577	298	875
Jumlah		31.599	1.341	32.940	37.428	1.431	38.859

Sumber : RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB, 2021

Pasien IGD Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma tahun 2021 sebanyak 1.668 orang, meningkat dibandingkan tahun 2019 sebanyak 1.517. Jika melihat cara pembayaran untuk pasien IGD, sebagian besar menggunakan layanan BPJS Kesehatan sebesar 75,66 persen atau sebanyak 1.262 orang. Pasien IGD yang menggunakan layanan umum sebanyak 130 orang dan pasien IGD yang menggunakan bantuan sosial sebanyak 276 orang.

Tabel 2- 59 Jumlah Pasien IGD di RSJ Mutiara Sukma Provinsi Berdasarkan Cara Bayar Tahun 2020-2021

NO	CARA PEMBAYARAN	2020	PERSENTASE	2021	PERSENTASE
1	Umum	192	12,66	130	7.79
2	BPJS	1.111	73,24	1262	75.66
3	Bansos	214	14,11	276	16.55
Jumlah		1.517	100,00	1.668	100,00

Sumber : RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB, 2021

RSJ Mutiara Sukma memiliki instalasi khusus rehabilitasi penyalahgunaan napza (instalasi rehabilitasi napza) sebagai salah satu institusi pelayanan yang ditunjuk sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) bagi Orang Dengan Penyalahgunaan Napza (ODPGN). Sepanjang tahun 2021, sebanyak 179 pasien penyalahgunaan napza telah ditangani oleh instalasi ini.

Tabel 2- 60 Cakupan Pelayanan Pasien Napza Tahun 2020-2021

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	JUMLAH YANG DIREHABILITASI DI RSJ
2020	100	100	239
2021	100	100	179

Sumber : RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB, 2021

Dalam melaksanakan tugasnya melayani pasien penyalahgunaan napza, RSJ Mutiara Sukma bekerjasama dengan BNN Provinsi dan BNN Kota Mataram dalam bentuk Tim Assessment Terpadu (TAT), Rehabilitasi Ketergantungan Napza, Rumah Damping Pasca Rehabilitasi, Pemetaan Wilayah, serta Pendampingan dan Penjangkauan Bagi Penyalahgunaan Napza. Selain melayani rehabilitasi Napza, RSJ Mutiara Sukma juga memberikan pelayanan konseling dan test HIV/AIDS yang tidak hanya berupa pelayanan intramural di RSJ Mutiara Sukma, tapi juga melakukan pelayanan ektramural yaitu kunjungan ke Lapas Mataram dengan jumlah total klien di tahun 2021 sebanyak 1291 orang.

Instalasi Kesehatan Jiwa Masyarakat (Keswamas) pada RSJ Mutiara Sukma memberikan pelayanan ektramural dimana salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan home visite yaitu kunjungan petugas kesehatan ke rumah pasien yang pernah dirawat di RSJ Mutiara Sukma. Pada tahun 2021 tim Keswamas hanya melakukan 29 kali kunjungan rumah.

Selain kegiatan home visite, tim Keswamas juga melakukan kegiatan dropping. Kegiatan dropping pasien adalah upaya RSJ Mutiara Sukma untuk mengembalikan pasien ke keluarganya setelah selesai menjalani perawatan. Kegiatan dropping ini dilakukan oleh RSJ Mutiara Sukma sebagai bentuk tanggungjawab atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Kondisi saat ini banyak keluarga pasien yang enggan untuk menjemput kembali pasien yang sudah di rawat inap di RSJ Mutiara Sukma yang dinyatakan sudah boleh pulang. Selain itu juga ada beberapa pasien yang tidak mampu dijemput kembali oleh keluarganya. Tanggungjawab untuk mengembalikan pasien yang sudah di rawat kepada keluarganya sesungguhnya bukanlah kewajiban RSJ Mutiara Sukma, namun karena kurangnya kepedulian dan pemahaman keluarga dan masyarakat di lingkungan tempat tinggal pasien serta untuk kelancaran operasional pelayanan, RSJ Mutiara Sukma berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat NTB sehingga kegiatan dropping pasien dibebankan pada APBD dan BLUD RSJ Mutiara Sukma. Kedepannya diharapkan RSJ Mutiara Sukma dapat bersinergi dengan Dinas Kesehatan Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota untuk dapat bersama-sama memberi pemahaman pada keluarga dan masyarakat akan pentingnya keterlibatan keluarga dalam proses penyembuhan pasien. Selama tahun 2021 Pelayanan ektramural RSJ Mutiara Sukma jumlah pasien yang dropping sebanyak 52 orang.

Kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Keswamas adalah kegiatan ACT (Assertive Community Therapy) atau terapi komunitas adalah bentuk terapi yang berusaha memanipulasi lingkungan untuk keuntungan pasien di lingkungan sosialnya. ACT didesain untuk menurunkan hospitalisasi, meningkatkan kemandirian, fungsi dan produktivitas individu serta memberi support pada keluarga. Dalam pelaksanaannya terapi ini membutuhkan tim yang terdiri dari multidisiplin ilmu seperti psikiater, dokter, perawat dan seorang koordinator. Bentuk layanan yang diberikan adalah:

1. Layanan ACT statis: dilakukan di poliklinik maupun ruang rawat inap RSJ Mutiara Sukma, dengan sasaran pasien yang kriterianya ditentukan oleh profesional pemberi asuhan;
2. Layanan ACT *mobile* : dengan kunjungan pada pasien, keluarga dan masyarakat sekitarnya pada kasus-kasus tertentu yang membutuhkan dukungan tim Keswamas.

Tabel 2- 61 Lokasi dan Jumlah Klien Kegiatan ACT Tahun 2020-2021

NO	BENTUK KEGIATAN ACT	2020		2021	
		LOKASI	JUMLAH KLIEN	Lokasi	JUMLAH KLIEN
1	ACT Statis	RSJ Mutiara Sukma	1830 orang	RSJ Mutiara Sukma	959 orang
2	ACT Mobile	-	-	-	-
TOTAL		1 lokasi	1830 orang	1 Lokasi	959 orang

Sumber : RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB, 2021

Instalasi keswamas juga melakukan berbagai kegiatan ekstramural seperti kegiatan integrasi kesehatan jiwa yang dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan petugas kesehatan tentang masalah kesehatan jiwa dan penanganannya, serta mampu berperan aktif mendorong pemberdayaan masyarakat dalam penanganan kesehatan jiwa.

Sasaran kegiatan ini adalah dokter dan petugas kesehatan dengan bentuk kegiatan berupa penyuluhan dan bimbingan tentang pelayanan kesehatan jiwa. Berikut adalah rincian kegiatan integrasi kesehatan jiwa tahun 2020-2021:

Tabel 2- 62 Lokasi dan Frekuensi Kegiatan Integrasi Kesehatan Jiwa tahun 2020-2021

No	Kabupaten/Kota	Frekuensi Tahun 2020	Frekuensi Tahun 2021
1.	Mataram	1	0
2.	Lombok Barat	1	1
3.	Lombok Tengah	1	1
4.	Lombok Utara	1	1
5.	Lombok Timur	1	0
6.	Sumbawa	1	0
7.	Sumbawa Barat	1	2
8.	Dompu	1	2
9.	Bima	1	2
10.	Kota Bima	1	2
11.	Panti Sosial Bina Laras "Mutmainnah" Selebung	0	2
	JUMLAH	10 kali	13 kali

Sumber : RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB, 2021

Tim Keswamas juga melakukan kegiatan mobile clinic yang merupakan kegiatan layanan pengobatan dan konsultasi tentang masalah kesehatan jiwa yang dilakukan langsung ke masyarakat. Berikut adalah rincian kegiatan mobile clinic tahun 2020-2021:

Tabel 2- 63 Lokasi dan Frekuensi Kegiatan Mobile Clinic Tahun 2020-2021

No	Kabupaten/Kota	2020		2021	
		Frekuensi	Jumlah klien	Frekuensi	Jumlah klien
1	Lombok Barat	1	15 orang	1	15 orang
2	Lombok Tengah	1	13 orang	1	14 orang
3	Lombok Utara	1	3 orang	1	34 orang
4	Lombok Timur	1	12 orang	0	0
5	Sumbawa	1	34 orang	0	0
6	Sumbawa Barat	1	22 orang	2	50 orang
7	Dompu	1	22 orang	2	60 orang
8	Bima	1	46 orang	2	98 orang
9	Kota Bima	1	58 orang	2	70 orang
10	Panti Sosial Bina Laras "Mutmainnah" Selebung	0	0	2	180 orang
	JUMLAH	9 kali	225 orang	13 kali	521 orang

Sumber : RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB, 2021

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan RSJ Mutiara Sukma tahun 2021 mencapai 82,48 persen. Adapun unsur-unsur dalam survey kepuasan masyarakat antara lain persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan serta sarana dan prasarana. Nilai IKM 82,48 persen menunjukkan kinerja pelayanan di RSJ Mutiara Sukma sudah tergolong baik. Selain itu, upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit telah dilakukan melalui akreditasi rumah sakit.

RSJ Mutiara Sukma telah melaksanakan proses penilaian akreditasi Rumah Sakit oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) Versi SNARS Edisi 1 dan mendapat predikat Paripurna tahun 2019. Namun pada tahun 2021 karena adanya pandemi covid-19 menyebabkan KARS menerbitkan surat edaran bahwa resurvey akreditasi tidak dapat dilakukan secara langsung sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Untuk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu rumah sakit, tim akreditasi internal (Surveyor Internal) rumah sakit melakukan Assessment Akreditasi internal di masing-masing rumah sakit, sehingga RSJ Mutiara Sukma melakukan Assessment internal oleh tim akreditasi (surveyor internal) untuk menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan selaras dengan mempertahankan akreditasi paripurna seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor: Hk.02.01/Menkes/455/2020 Tahun 2020 tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan Penetapan Rumah Sakit Pendidikan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

d. Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir

Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir sebagai lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pelayanan dasar bidang kesehatan khususnya di Pulau Sumbawa. Indikator kinerja yang dirumuskan adalah Meningkatnya kualitas layanan kesehatan. Adapun target dan capaiannya di tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2- 64 Capaian Indikator Urusan Bidang Kesehatan pada Rumah Sakit H.L. Manambai bdulkadir Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	Indikator Bidang	Urusan Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama

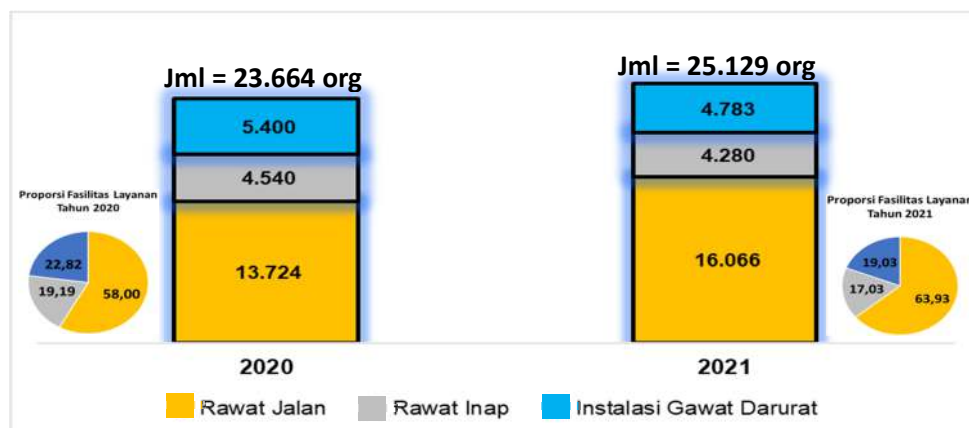
Sumber : Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir Provinsi NTB, 2021

Pengukuran indikator kinerja Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit. H.L. Manambai Abdulkadir dilakukan dengan survey verifikasi untuk akreditasi. Pada tahun 2020, capaian indikator kinerja Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir yaitu meningkatnya kualitas layanan kesehatan yang diukur dengan survey akreditasi berada pada kategori "Utama". Sedangkan di tahun 2021, tidak dilaksanakan survey verifikasi untuk akreditasi sebagai unsur dalam penilaian kualitas layanan kesehatan pada Rumah

Sakit H.L. Manambai Abdulkadir dikarenakan adanya pandemi Covid-19 sehingga capaian status akreditasi rumah sakit sama dengan capaian tahun sebelumnya yakni kategori “Utama”, dengan demikian pencapaian target indikator kinerja di tahun 2021 telah mencapai 100%.

Dalam penyelenggaraan urusan bidang kesehatan, Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir memberikan fasilitas penyediaan prasarana kesehatan bagi masyarakat Provinsi NTB terutama di Pulau Sumbawa. Fasilitas layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat diantaranya: Pelayanan Rawat Jalan; Pelayanan Rawat Inap; dan Pelayanan Gawat Darurat. Secara keseluruhan, total masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir di tahun 2021 sebanyak 25.129 orang, meningkat sebanyak 1.465 orang atau 6,19% dari tahun 2020 yang menangani pelayanan kesehatan kepada masyarakat total sebanyak 23.664 orang. Berdasarkan fasilitas layanan kesehatan, jumlah masyarakat yang dilayani dapat dilihat pada gambar berikut.

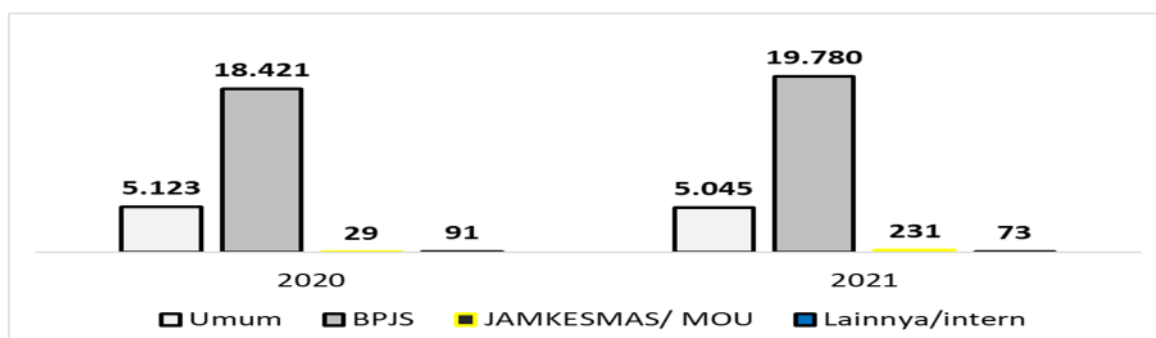
Gambar 2- 24 Jumlah Masyarakat Yang Dilayani Menurut Fasilitas Layanan Kesehatan Tahun 2020 – 2021



Sumber : Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir Provinsi NTB, 2021

Fasilitas layanan kesehatan yang banyak dilakukan oleh masyarakat pada Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir adalah Rawat Jalan di tahun 2021 yaitu sebanyak 16.066 orang (63,93%) yang diikuti oleh Instalasi Gawat Darurat sebanyak 4.783 orang (19,03%), sedangkan layanan Rawat Inap sebanyak 4.280 orang (17,03%). Selanjutnya untuk cara pembayaran yang banyak dilakukan masyarakat dalam mengakses fasilitas layanan kesehatan di Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir dari tahun 2020 – 2021 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2- 25 Cara Pembayaran Masyarakat Dalam Mengakses Fasilitas Layanan Kesehatan Tahun 2020 – 2021



Sumber : Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir Provinsi NTB, 2021

Cara pembayaran yang banyak dilakukan masyarakat dalam mengakses fasilitas layanan kesehatan adalah pasien BPJS dengan jumlah sebanyak 19.780 orang (78,71%) meningkat dari tahun 2020 dan yang terkecil adalah melalui cara pembayaran Lainnya/Intern sebanyak 73 orang (0,29%) menurun dari tahun 2020. Adapun jumlah pasien yang mengakses fasilitas kesehatan dan cara pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat pada Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir dari tahun 2020 sampai dengan 2021 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2- 65 Cakupan Rawat Jalan, Rawat Inap dan IGD Berdasarkan Cara Bayar Tahun 2020 – 2021

NO	Cara Pembayaran	2020				2021			
		Rawat Jalan	Rawat Inap	Instalasi Gawat Darurat	Jml	Rawat Jalan	Rawat Inap	Instalasi Gawat Darurat	Jml
1.	Umum	3.153	541	1.429	5.123	3.652	289	1.104	5.045
2.	BPJS	10.562	3.994	3.865	18.421	12.319	3.984	3.477	19.780
3.	JAMKESMAS/ MOU	9	5	15	29	95	7	129	231
4.	Lainnya/intern	0	0	91	91	0	0	73	73
Jumlah		13.724	4.540	5.400	23.664	16.066	4.280	4.783	25.129

Sumber : Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir Provinsi NTB, 2021

Pada tahun 2019 Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir telah Terakreditasi UTAMA (Bintang Empat) oleh Komisi Akreditasi Nasional (KARS) dengan Nomor : KARS-SERT/120/XII/2018, artinya Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir telah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Komisi Akreditasi Nasional dalam melayani masyarakat.

Selanjutnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Kesehatan, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019. SPM Bidang Kesehatan terdiri atas SPM Kesehatan Daerah Provinsi dan SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Provinsi terdiri atas: (1) pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi

bencana provinsi; dan (2) pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

Adapun target dan capaian pelaksanaan pelayanan dasar SPM Provinsi Bidang Kesehatan Tahun 2021 di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 2- 66 Pencapaian SPM Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target Pencapaian SPM		Realisasi SPM Tahun 2021	
		Orang	%	Orang	%
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.	330.436	100	330.436	100
2	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi	2.800	100	2.800	100

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2022

3. Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB dan 5 (lima) Balai/UPTD yang berada di bawah koordinasi dinas PUPR yaitu: Balai Pemeliharaan Jalan Lombok, Balai Pemeliharaan Jalan P. Sumbawa, Balai PSDA P. Lombok, Balai PSDA P. Sumbawa dan Balai Pengujian.

Sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menetapkan Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP dengan sasaran strategis yaitu Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar dengan indikator kinerja Meningkatnya Kemantapan Jalan dan Meningkatnya Kemantapan Sistem Irigasi. Pada Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI dengan sasaran Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin dengan Indikator Kinerja Cakupan Air Minum.

Indikator Kinerja Utama Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

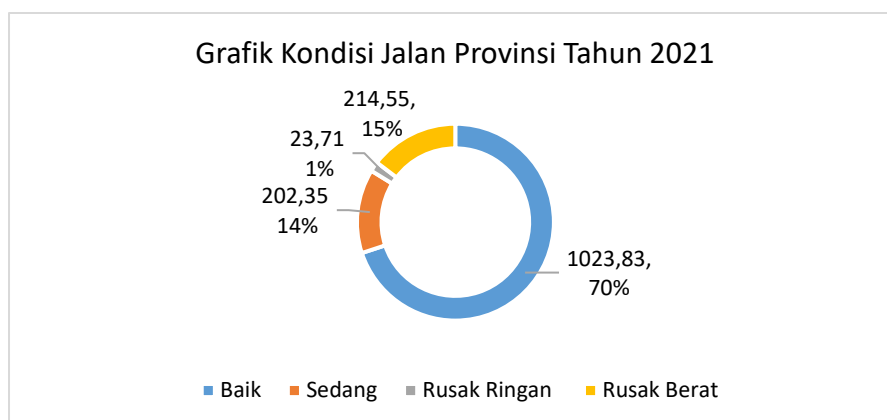
Tabel 2- 67 Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019-2021

No	INDIKATOR BIDANG URUSAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase Kemantapan jalan	80,28	80,28	80,76	80,05	83,95	84,01
2	Cakupan Air Minum	72,59	72,59	75,74	74,88	76,48	78,76
3	Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	50,76	50,76	48,11	48,11	50,04	50,88
4	Persentase Penyusunan Regulasi Rencana Tata Ruang (RTR)	0	0	0	0	9,09	9,09

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB, 2021

Panjang Jalan di Provinsi NTB sebesar 8.026,25 Km yang dibedakan berdasarkan status Jalan Nasional 934,55 Km, jalan Provinsi 1.484,43 Km dan Jalan Kabupaten/Kota 5.621,81 Km. Penanganan jalan provinsi dilakukan melalui sumber dana dari APBD, dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dari sasaran strategis ini ditentukan indikator kinerja adalah Persentase Jalan mantap.

Gambar 2- 26 Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2021



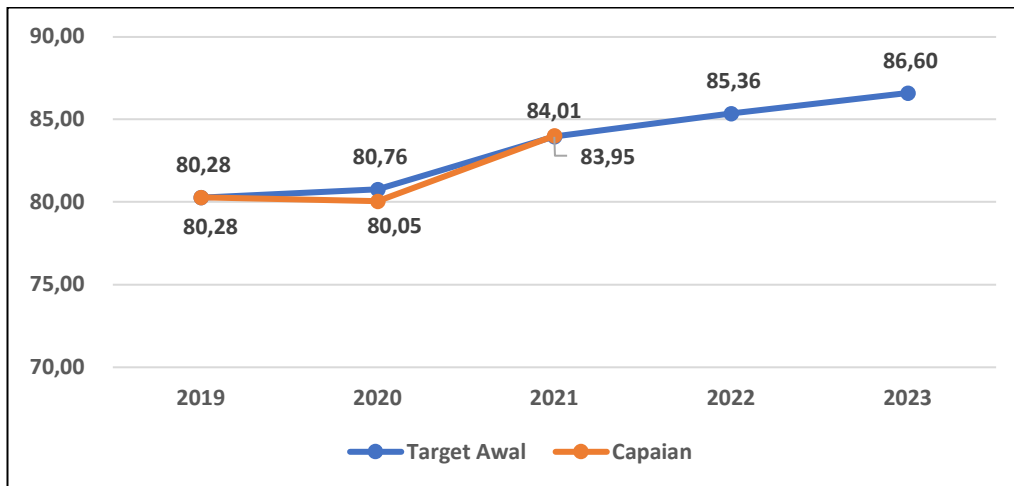
Kemantapan Jalan provinsi tahun 2021 mencapai 84,01% dari rencana 83,95% target RPJMD setara dengan 1.247,0 km dalam keadaan mantap dari total jalan provinsi sepanjang 1.484,43 km. Adapun kemantapan jalan nasional tahun 2021 mencapai 98,16 atau setara dengan 917,35 Km, dari total jalan nasional sepanjang 934,55 Km. Tercapainya target kemantapan jalan ini dikarenakan adanya dukungan penanganan jalan melalui Program Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak Tahun 2020 - 2022 (yang dibiayai melalui sumber dana APBD Murni dan dana pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional/PEN) serta penanganan jalan dengan pembiayaan Dana Alokasi Khusus (DAK). Jenis pekerjaan penanganan jalan yang dilakukan meliputi kegiatan pembangunan jalan, rehabilitasi jalan, dan pemeliharaan jalan yang dilaksanakan oleh Bidang Binamarga maupun Balai Pemeliharaan Jalan (BPJP) Pulau Lombok dan Balai Pemeliharaan Jalan (BPJP) Pulau Sumbawa.

Tabel 2- 68 Kondisi Jalan di Provinsi NTB (kondisi 31 Desember 2021)

Status Jalan	Panjang Jalan(Km)	Satuan	Mantap	Tidak Mantap
Jalan Nasional	934,55	Km	904.464	30.086
		%	96,429	3,571
Jalan Provinsi	1.484,43	Km	1.188,26	296,17
		%	80,05	19,95
Jalan Kab. / Kota	5.621,81	Km	-	
		%		
Total	8.040,79			

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB, 2021

Gambar 2- 27 Capaian Kinerja Kemantapan Jalan di Provinsi NTB



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB, 2021

Keseimbangan aksesibilitas antar wilayah dan antar sektor harus dijaga sehingga mewujudkan pemerataan tingkat kemantapan infrastruktur jalan antar wilayah dan antar sektor. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan di Provinsi NTB pada tahun 2021, sebagai berikut:

1) Program Percepatan Jalan;

- Paket 1 : Masbagik - Pancor, Kruak - Pancor, Jembatan Maronggek
- Paket 2 : Kruak - Lb. Haji, Jembatan Korleko
- Paket 3 : Batunyala - Sengkol, Kediri - Praya, Bengkel - Kediri
- Paket 4 : Rembiga - Pemenang
- Paket 5 : Jln. Yos Sudarso (Mataram), Jln. Langko (Mataram), Jln. Pejanggik (Mataram), Jln. Selaparang (Mataram),
- Paket 6 : Jl. Ade Irma Suryani (Mataram), Jln. Prabu Rangka Sari (Mataram), Jl. Brawijaya (Mataram), Simpang 4 Tanah Aji
- Paket 7 : Jl. Catur Warga (Mataram), Jl. Pendidikan (Mataram), Jembatan Kr. Sukun
- Paket 8 : Sejongong - Tetar - Bts KSB, Benete - Sejongong, Tetar - Lunyuk, Jembatan Sampar Goal, Jembatan Kokar Singko, Jembatan Mone II dan Jembatan Tatar, Jembatan Aik Keru III
- Paket 9 : Pal IV - Lenangguar, Lenangguar - Lunyuk, Lenangguar - Batu Rotok
- Paket 10 : Sumbawa Besar - Semongkat - Batu Dulang, Jembatan Kokar Labangka, Jembatan Brang Lepu I, Jembatan Brang Lepu II
- Paket 11 : Sp. Kempo - Sp. Kore, Jembatan Boro I, Jembatan Boro II, Jembatan Oi Mori II, Jembatan Oi Mori III, Jembatan Oi Mori VI
- Paket 12 : Sila - Bajo, Jembatan Oi Katupa III, Jembatan Oi Katupa V, Jembatan Oi Katupa VI, Jembatan Piong III, Jembatan Piong IV, Jembatan Piong V, Jembatan Piong VI
- Paket 13 : Kiwu - Sampungu, Jembatan Sori Kari`i, Jembatan Kiwu, Jembatan Sori

Sowa

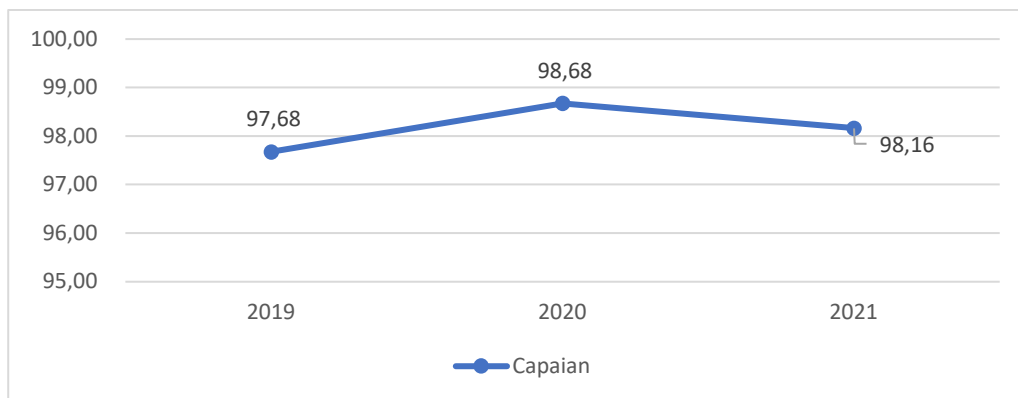
- Paket 14 : Karumbu - Sape, Talabiu - Simpasai, Simpasai - Wilamaci, Jembatan Lere III, Jembatan Lere V
 - Paket 15 : Jl. Gajah Mada (Bima), Jl. Datuk Dibanta (Bima), Jembatan Salo
 - Paket 16 : Bima - Tawali, Tawali - Sape
- 2) Program DAK yaitu:
- Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Penujak - Tanah Awu dan Penujak - Mt. Ajan
 - Peningkatan Jalan Kawinda To'i - Piong
- 3) Penanganan Bencana Alam
- Rehabilitasi Jalan Pelangan – Pengantap
 - Rehabilitasi Jalan Simpasai - Parado
 - Rehabilitasi Jalan Sp. Pengantap - Mt. Ajan – Kuta
 - Penggantian Jembatan Sori Bura dan Gorong-gorong ruas jalan Lb. Kenanga - Kawinda To'i
- 4) Pemeliharaan rutin jalan
- Jalan Provinsi Wil. Pulau Lombok
 - Jalan Provinsi Wil. Pulau Sumbawa

Selain penanganan jalan Provinsi, dilaksanakan pula penanganan ruas-ruas jalan strategis nasional sumber pendanaannya berasal dari APBN pada tahun 2021, sebagai berikut:

- a. Pembangunan Jalan dan Jembatan Strategis Nasional
 - 1. Pembangunan Jalan Bypass Bandara Internasional Lombok (BIL)-Mandalika
 - 2. Pembangunan Jalan SAMOTA
 - 3. Pembangunan Jembatan Gantung Desa Jeruk Manis
- b. Pembangunan Jalan dan Jembatan Nasional
 - 1. Duplikasi Jembatan Pelempit (Myc)
- c. Preservasi Jalan dan Jembatan Nasional
 - 1. Preservasi Jalan Dan Jembatan Dalam Kota Mataram
 - 2. Padat Karya Rutin Jalan Dan Jembatan Dalam Kota Mataram
 - 3. Preservasi Jalan Mataram - Gerung; Kopang - Praya - Sp. Penujak
 - 4. Preservasi Jalan Ampenan - Pemenang - Bayan – Sembalun
 - 5. Preservasi Jalan Cakranegara - Mantang - Kopang - Lb.Lombok; Mataram - Gerung – Lembar
 - 6. Padat Karya Rutin Jalan Dan Jembatan Mataram - Gerung; Kopang - Praya - Sp. Penujak
 - 7. Padat Karya Rutin Jalan Dan Jembatan Ampenan - Pemenang - Bayan – Sembalun
 - 8. Padat Karya Rutin Jalan Dan Jembatan Cakranegara - Mantang - Kopang - Lb. Lombok; Mataram - Gerung – Lembar
 - 9. Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam Tanah Longsor Jalan Ampenan – Pemenang
 - 10. Penanganan Longsoran Jalan Mataram - Gerung - Kopang - Praya - Sp.Penujak
 - 11. Penanganan Longsoran Ruas Jalan Bayan Sembalun

12. Penanganan Banjir Ruas Jalan Mataram Gerung (Mavilla)
 13. Penanganan Longsor Ruas Jalan Ampenan Pemenang (Batu Layar)
 14. Penanganan Longsor Ruas Jalan Pemenang Bayan (Jembatan Koloh Penjagalan)
 15. Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs (MYC)
 16. Penggantian Jembatan Ngeledak Cs (MYC)
 17. Penggantian Jembatan Longken Cs
 18. Preservasi Jalan Pl. Tano - Simpang Negara - Taliwang - Jereweh – Benete
 19. Preservasi Jalan Simpang Negara - Bts. Kota Sumbawa Besar
 20. Preservasi Jalan Pal Iv - Km. 70 - Bts. Kab. Dompu; Jalan Samota
 21. Padat Karya Rutin Jalan Dan Jembatan Pal Iv - Km. 70 - Bts. Kab. Dompu; Jalan Samota
 22. Padat Karya Rutin Jalan Dan Jembatan Pl. Tano - Simpang Negara - Taliwang - Jereweh – Benete
 23. Padat Karya Rutin Jalan Dan Jembatan Simpang Negara - Bts. Kota Sumbawa Besar
 24. Penanganan Longsor Bahu Jalan Ruas Sp. Negara - Bts. Kota Sumbawa Besar
 25. Penanganan Longsor Bahu Jalan Akses Jalan Samota
 26. Proteksi Abutmet Jembatan Kanar I
 27. Penggantian Jembatan Bako Ii Cs (Myc)
 28. Preservasi Jalan Balibunga - Madaprama - Bts. Kab. Dompu - Dompu – Huu
 29. Preseservasi Jalan Sp. Banggo - Kempo - Kesi - Hodo - Doropeti - Lb. Kenanga
 30. Preservasi Jalan Sila - Bts. Kota Bima - Raba – Sape
 31. Padat Karya Rutin Jalan Dan Jembatan Balibunga - Madaprama - Bts. Kab. Dompu - Dompu – Huu
 32. Padat Karya Rutin Jalan Dan Jembatan Sp. Banggo - Kempo - Kesi - Hodo - Doropati - Lb. Kenanga
 33. Padat Karya Rutin Jalan Dan Jembatan Sila - Bts. Kota Bima - Raba – Sape
 34. Penanganan Longsor Bts. Kab. Dompu (Km 130) – Banggo
 35. Penanganan Longsor Moti Toi Kempo - Kesi - Hodo
- d. Dukungan Teknis
1. Pengadaan Cold Paving Hot Mix Asbuton (CPHMA)

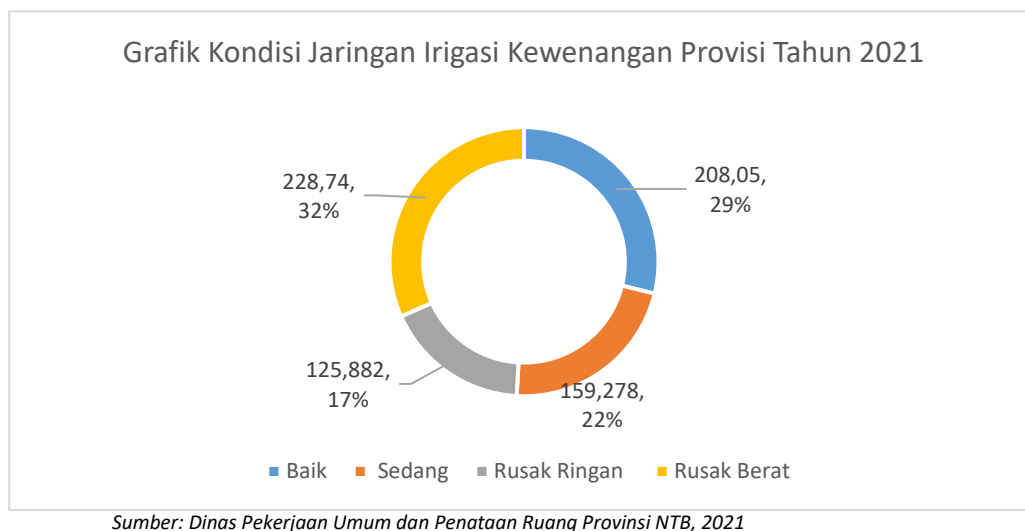
Gambar 2- 28 Capaian Kinerja Kemantapan Jalan Nasional



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB, 2021

Indikator kinerja selanjutnya adalah Persentase Kemantapan Sistem Irigasi. Pada Tahun 2021, Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kewenangan sesuai Permen PUPR No. 14 Tahun 2015 untuk mengelola 35 Daerah Irigasi dengan luasan 1.000 Ha – 3.000 Ha. Secara keseluruhan terdapat 58.105 Ha luasan kewenangan daerah irigasi yang dikelola. Adapun Panjang saluran dari 35 Daerah Irigasi tersebut adalah 721,95 kilometer dengan saluran dalam kondisi baik sepanjang 208,05 Km (29 %), sedang 159,28 km (22%), rusak ringan 125,88 km (17%) dan rusak berat 228,74 km (32%). Capaian Persentase Kemantapan Sistem Irigasi Provinsi NTB pada tahun 2021 adalah 50,88 persen melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 50,04 persen.

Gambar 2- 29 Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi Tahun 2021



Capaian realisasi indikator kinerja Cakupan Areal layanan Jaringan Irigasi mencapai 75,52% mendekati targetnya (76,12%) dengan tingkat capaian 99,12%, hal ini dikarenakan beberapa hal diantaranya (a) alih fungsi lahan produktif menjadi perdagangan dan industri, serta alih fungsi kawasan penyangga tangkapan air menyebabkan tingginya sedimentasi pada jaringan irigasi; (b) kerusakan jaringan irigasi yang berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan air irigasi; (c) pemanfaatan air irigasi yang bukan peruntukannya sebagai perikanan menyebabkan terhambatnya pemenuhan kebutuhan air lahan; dan (d) inventarisasi data tanam dan produktivas yang belum dapat terpenuhi.

Pada tahun 2021 Dinas PUPR melaksanakan rehabilitasi untuk 6 Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi melalui pendanaan DAK yaitu: DI Parung, DI Bisok Bokah, DI Sesaot, DI Marente, DI Elang Desa dan DI Ncangkai Ncoha. Rehabilitasi DI tersebut sepanjang ± 34.947 m, dengan luasan 5.344 Ha. Adapun rehabilitasi jaringan irigasi melalui pendanaan IPDIMP antara lain: DI Renggung, DI Sakra, DI Gde Bongoh, DI Sambelia, DI Latonda Pekat, DI Madapangga II dan DI Sumi Sape. Rehabilitasi DI tersebut sepanjang ± 64.671 m, dengan luasan 12.259 Ha.

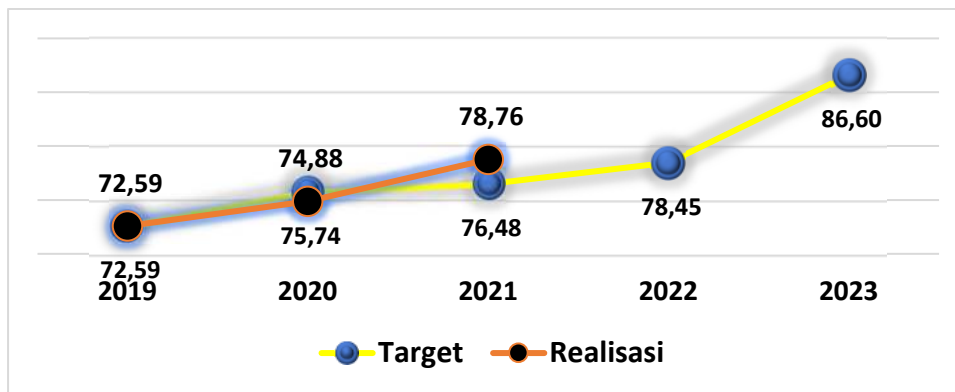
Di samping itu juga dilaksanakan Rehabilitasi saluran irigasi sebanyak 11 paket pekerjaan sepanjang ± 2.200 km/137,5 Ha, pemasangan talud/ bronjong irigasi 32 paket

sepanjang 11.140 m. Pembangunan Sumur Bor Untuk Air Baku sebanyak 31, Adapun pembangunan dan rehabilitasi embung sebanyak 40 unit untuk kapasitas tampung $\pm$ 112.000 m³. Sedangkan pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air dengan sumber pembiayaan APBN tahun 2021 sebagai berikut:

1. Pembangunan Saluran Pengendali Banjir KEK Mandalika;
2. Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai/Brang Rea di Kabupaten Sumbawa Barat; 0.5 km; 1 hektar; F; K; SYC;
3. Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Pulau ShopiaLousia/Sepatang di Kabupaten Lombok Barat; 0 Dokumen; 0 Dokumen; NF; K; SYC;
4. Pembangunan Jaringan Irigasi Rababaka Kompleks (Areal Irigasi Tanju Kanan) di Kabupaten Dompu (Lanjutan); 1.4000 km; 320;
5. Pembangunan Jaringan Irigasi Rababaka Kompleks (Areal Irigasi Tanju Kiri) di Kabupaten Dompu (Lanjutan); 1.4000 km; 320 hektar;
6. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Baku Bintang Bano di Kabupaten Sumbawa Barat (Lanjutan); 2 km; 0 m³/detik; F; K; SYC;
7. Pembangunan Jaringan Sumur Eksplorasi/Produksi dan Fasilitas Lainnya di Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok;
8. Rehabilitasi JIAT serta Prasarana Pendukung Lainnya Tersebar di Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu;
9. Rehabilitasi JIAT serta Prasarana Pendukung Lainnya Tersebar di Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu
10. Penyempurnaan Pembangunan Embung Samada di Kabupaten Dompu;
11. Penanganan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
12. Penanganan Akibat Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.
13. Supervisi Penanganan Akibat Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Indikator kinerja dengan sasaran strategis Cakupan Air Minum pada tahun 2021 mencapai 78,76 % melebihi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra sebesar 76,48 %, dengan tingkat capaian 103 %. Tercapainya target cakupan air minum ini dikarenakan adanya dukungan penanganan dan pembiayaan secara bersinergi yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Sumber pembiayaan tersebut meliputi program/kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) lintas kabupaten.

Gambar 2- 30 Capaian Cakupan Air Minum Tahun 2019-2021 dan Rencana Capaian Tahun 2022-2023



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB, 2021

Adapun pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum di Provinsi NTB pada tahun 2021 sumber dana APBD, sebagai berikut:

1. Pembangunan Perpipaan Air Minum Desa Pungenjek Kec. Jonggat Loteng, Kab. Lombok Tengah, Jonggat, Pungenjek.
2. Pembangunan Perpipaan Air Minum Desa Sukarema, Kab. Lombok Timur, Lenek, Sukarema.
3. Pembangunan Perpipaan Air Minum Dusun Benteng Utara Desa Lendang Nangka Utara Kecamatan Masbagik, Kab. Lombok Timur, Masbagik, Lendang Nangka Utara.
4. Pembangunan Perpipaan Air Minum Dusun Dasan Tapen, Kab. Lombok Timur, Lenek, Lenek Pesiraman..
5. Pembangunan Perpipaan Air Minum Dusun Leong, Kab. Lombok Utara, Tanjung, Tegal Maja.
6. Pembangunan Perpipaan Air Minum Dusun Omba, Kab. Lombok Timur, Wanasaba. Mamben Daye
7. Pembangunan Perpipaan Air Minum Dusun Pada Angen, Kab. Dompu, Pekat, Sori Nomo.
8. Pembangunan Perpipaan Air Minum Lendang Nangka Utara, Kab. Lombok Timur, Masbagik, Lendang Nangka Utara..
9. Pembangunan Perpipaan Air Minum Pengurus Masjid Nurul Huda Al Yaqubi Dusun Jontak, Kab. Lombok Timur, Masbagik, Danger..
10. Pembangunan Perpipaan Air Minum Taer-Aer, Kab. Lombok Timur, Montong Gading, Prian.
11. Pipanisasi Air Bersih Kelompok Masyarakat Desa Paruga Kec. Rasanae Barat Kab. Kota Bima.-
12. SPAM Desa Sabedo Kec. Utan Kab. Sumbawa.
13. Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Ranggagata Kec. Praya Barat Daya Kab. Lombok Tengah.
14. Pembangunan Perpipaan Dusun Batu Tinggang, Desa Labulia, Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah.

15. Pembangunan Perpipaan Dusun Penjor, Desa Genggeling, Kec. Gangga Kab. Lombok Utara.
16. Pembangunan SPAM Luk, Rhee, Kabupaten Sumbawa.

Tabel 2- 69 Proporsional Jumlah Penduduk Pengguna Layanan Air Bersih Tahun 2021

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Yang Mendapat Akses Air Minum	Ratio (%)
1.	Lombok Barat	721.481	599.913	83,50
2.	Lombok Tengah	1.034.859	856.096	82,76
3.	Lombok Timur	1.325.240	961.752	72,57
4.	Sumbawa	509.753	453.680	89,88
5.	Dompu	236.665	148.471	62,73
6.	Bima	514.105	433.109	84,25
7.	Sumbawa Barat	145.798	123.407	84,64
8.	Lombok Utara	247.400	113.529	45,89
9.	Kota Mataram	429.651	386.158	89,88
10.	Kota Bima	155.140	114.055	73,52
Jumlah		5.320.092	4.190.170	78,76

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB, 2021

Indikator Sasaran strategis Persentase Penyusunan Regulasi Rencana Tata Ruang (RTR) capaian realisasinya pada tahun 2021 mencapai 9,09 persen sesuai dengan capaian targetnya (9,09 persen) yang tertuang dalam RPJMD 2019-2023.

Tabel 2- 70 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang Terhadap Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam RPJMD

Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2021		Realisasi Capaian Tahun 2021	
		%		%	
Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam RPJMD					
Persentase Penyusunan Regulasi Rencana Tata Ruang (RTR)	%	9,09 %		9,09 %	
Indikator Kinerja RENSTRA					
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	89,07 %		76,38 %	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB, 2021

Untuk mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang di provinsi NTB yang meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang serta mengacu pada Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan peraturan teknis turunannya, Perda No 3 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi NTB 2009-2029 dan Perda No. 12 Tahun 2017 tentang RZWP3K Provinsi NTB 2017-2037 maka dalam pelaksanaan Penataan Ruang baik dari sisi Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan

Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada tahun 2021 terjadi perubahan nomenklatur sesuai Permendagri NO 90/2019 tentang SIPD yang semula terdiri dari Program Perencanaan Tata Ruang, Program Pemanfaatan Ruang dan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang menjadi Program Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang yang merupakan gabungan dari 3 program tersebut diatas. Perubahan nomenklatur dan regulasi serta tingginya dinamika pembangunan dan investasi di daerah maka dilakukan revisi terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi NTB yang prosesnya masih berjalan.

Sesuai amanat Undang-Undang Cipta Kerja dalam penyederhanaan regulasi maka Revisi RTRW juga memuat materi pemanfaatan ruang untuk kawasan pesisir, sehingga materi RZWP3K diintegrasikan dalam RTRW Provinsi. Progres akhir tahun 2021 masih memperbaiki materi teknis muatan kawasan pesisir. Pelaksanaan Revisi RTRW Provinsi NTB ini dikoordinir oleh BAPPEDA Provinsi NTB dan Dinas PUPR Provinsi NTB selaku pelaksana urusan Penataan Ruang berperan aktif dalam proses Revisi RTRW Provinsi NTB. Pengaturan terkait RTR KSP sebagai turunan dari RTRW provinsi dihapuskan sehingga kegiatan penyusunan RTR KSP yang sudah dilaksanakan di beberapa KSP pada tahun 2021 tidak dilanjutkan.

Selanjutnya untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Urusan Pekerjaan Umum, Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018, disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai jenis mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, dan secara langsung menunjang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Jenis pelayanan dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum pada Pemerintah Provinsi terdiri atas:

- a. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota,
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2021 sesuai Rencana Strategis Dinas PUPR dapat disampaikan bahwa target akses air minum sebesar 77,55 % sedangkan akses terhadap pengolahan air limbah sebesar 70,31%.

Sesuai dengan lampiran Permendagri No. 100 Tahun 2018 bahwa target untuk masing-masing layanan SPM pertahunnya yaitu sebesar 100%, hal ini sudah sesuai dengan target program dan kegiatan untuk pemenuhan SPM yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 dan Revisi Rencana Strategis Dinas Perumahan & Permukiman Tahun 2019-2023 yaitu :

Tabel 2- 71 Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Provinsi NTB 2021

	Indikator Layanan	Target
		2021
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	230.447
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi	-

4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dalam rangka mewujudkan visi untuk membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengemban 1 (satu) misi dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 -2023 yaitu Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian/agribisnis, pariwisata dan industrialisasi dengan sasaran pembangunan terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin dengan indikator sasaran cakupan Rumah Layak Huni (RLH).

Sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yaitu (1) Meningkatnya kualitas rumah tidak layak huni dengan indikator kinerja persentase rumah yang layak huni dan (2) Meningkatnya kualitas prasarana, sarana dan utilitas umum di kawasan permukiman dengan indikator kinerja persentase kawasan permukiman dengan prasarana sarana utilitas umum dalam kondisi baik.

Berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja dengan target sebagaimana dituangkan dalam perjanjian kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB dan capaian kinerjanya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2- 72 Capaian Indikator Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB Tahun 2021

No	Indikator (satuan)	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase rumah korban gempa yang telah direhabilitasi & direkonstruksi (%)	75	59,80	100	90,60		
2	Cakupan RLH di Provinsi NTB (%)	92,37	92,02	92,74	92,09		
3	Persentase rumah yang layak huni (%)					62,65	63,47
4	Persentase kawasan permukiman dengan prasarana, sarana dan utilitas umum dalam kondisi baik (%)					93,91	91,40

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB, 2021

Persentase rumah layak huni pada tahun 2021 telah melampaui target sebesar 0,82% dengan capaian 63,47% dari target 62,65%. Pada tahun 2021 direncanakan sebanyak 1.770 unit (100%) untuk pembangunan rumah layak huni kemudian berubah menjadi 199 unit dengan pola peningkatan kualitas sebesar 143 unit dan pembangunan baru 55 serta 1 unit homestay.

Pada tahun 2021 penanganan Rumah Tidak Layak Huni yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB diprioritaskan untuk menangani rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang sangat miskin dengan kriteria dan persyaratan yang sudah ditentukan seperti kelengkapan administrasi, kondisi rumah yang dilihat dari kondisi atap, lantai dan dinding (aladin) sedangkan untuk penanganan rumah akibat bencana alam/sosial dengan kriteria rumah rusak berat dan harus sudah masuk dalam basis data terpadu (BDT). Untuk tahun 2021 capaian penanganan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 199 unit dari target 1.770 unit. Data penanganan RTLH yang bersumber dari APBD provinsi kurun waktu tahun 2018-2021 di kabupaten/kota se NTB sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2- 73 Data Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi NTB Tahun 2018 – 2021

No.	Kabupaten/Kota	Satuan	2018	2019	2020	2021	
						Target	Realisasi
1	Kota Mataram	Unit	110	-	66	2	2
2	Lombok Barat	Unit	291	25	105	18	18
3	Lombok Tengah	Unit	444	15	137	6	6
4	Lombok Utara	Unit	108	12	2	30	30
5	Lombok Timur	Unit	651	98	321	76	76
6	Sumbawa Barat	Unit	61	-	91	9	9
7	Sumbawa	Unit	156	52	150	49	49
8	Dompu	Unit	81	-	38	5	5
9	Kabupaten Bima	Unit	176	10	45	1	1
10	Kota Bima	Unit	93	-	11	2	2
Jumlah		Unit	2.171	212	966	199	199

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB, 2021

Urusan pembangunan perumahan diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat dan berkelanjutan. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni yang menjadi indikator utama dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019 – 2023. Pada tahun 2021 melalui Dinas Perumahan dan Permukiman dilaksanakan dengan 3 (tiga) jenis penanganan yaitu pembangunan baru (PB), peningkatan kualitas (PK) dan rehabilitasi homestay (RHS) yang diprioritaskan untuk menangani rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang sangat miskin dengan kriteria dan persyaratan yang sudah ditentukan. Terdapat 50 (lima puluh) paket pekerjaan yang tersebar di 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota se-NTB. Capaian penanganan rumah tidak layak huni tahun 2021 seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2- 74 Data Penanganan RTLH Berdasarkan Jenis Penanganannya di Provinsi NTB Tahun 2021

No.	Kabupaten/Kota	Satuan	Jenis Penanganan			
			PB	PK	RHS	Jumlah
1	Kota Mataram	Unit		2		2
2	Kab. Lombok Barat	Unit	1	17		18
3	Kab. Lombok Utara	Unit	6			6
4	Kab. Lombok Tengah	Unit	1	29		30
5	Kab. Lombok Timur	Unit	40	36		76
6	Kab. Sumbawa Barat	Unit	1	8		9
7	Kab. Sumbawa	Unit	1	48	1	50
8	Kab. Dompu	Unit	5			5
9	Kab. Bima	Unit		1		1
10	Kota Bima	Unit		2		2
Jumlah		Unit	55	143	1	199

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB, 2021

Keterangan :

PB : Pembangunan Baru

PK : Peningkatan Kualitas

RHS : Rehabilitasi Homestay

Indikator kinerja kedua adalah persentase kawasan permukiman dengan prasarana, sarana dan utilitas umum dalam kondisi baik direncanakan sebanyak 1600 paket (target 93,91%) dan yang terlaksana 1055 paket (91,40%) yang tersebar di kabupaten/kota se-Provinsi NTB.

Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian sedangkan Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sehingga dirasakan perlu dilakukan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman dan dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat.

Peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh didahului dengan penetapan lokasi. Penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh melalui proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat selanjutnya penetapan lokasi ditetapkan oleh bupati/walikota.

Luas kawasan kumuh di NTB berdasarkan SK Bupati/walikota se-NTB adalah 620,414 Ha yang tersebar di 10 kabupaten/kota sedangkan capaian penataan kawasan kumuh tahun 2021 baru seluas 95,31 Ha di seluruh kawasan kumuh kabupaten/kota se NTB sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2- 75 Luas Kawasan Kumuh Dan Capaian Kawasan Kumuh yang Tertangani Tahun 2021

No	Kab / Kota	Target Penanganan Kawasan (Ha)	Kawasan Yang Tertangani (Ha)
1	Lombok Barat	89.46	8.27
2	Lombok Utara	78.07	1.94
3	Lombok Tengah	29.19	34.79
4	Lombok Timur	51.38	25.73
5	Sumbawa Barat	10.44	1.39
6	Sumbawa	165	10.67
7	Dompu	58.43	1.29
8	Bima	78.114	5.82
9	Kota Mataram	23.99	3.86
10	Kota Bima	8.4	1.55
	Total	620.414	95.31

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB, 2021

5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, menjadi urusan wajib pelayanan dasar yang diselenggarakan bertujuan memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan kehidupan yang tentram, tertib sesuai dengan norma dan ketentuan bermasyarakat untuk menuju kehidupan yang aman, tentram dan sejahtera. Urusan wajib pelayanan dasar bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat diselenggarakan oleh 3 (tiga) perangkat daerah, yakni Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

a. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri

Keberhasilan penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB 2019-2023 diukur dengan indikator Cakupan Mediator Bale mediasi yang dilatih, indikator Partisipasi politik masyarakat, indikator Cakupan Komunitas “Sekolah Perjumpaan” yang terbentuk dalam rangka pendidikan karakter. Indikator persentase penurunan konflik sosial dan indikator persentase keterlibatan masyarakat dalam politik, yang menjadi indikator kinerja daerah.

Capaian indikator kinerja yang diselenggarakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri disajikan tabel berikut.

Tabel 2- 76 Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Perangkat Daerah Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2021

NO.	INDIKATOR	2019		2020		2021	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Partisipasi Politik Masyarakat	82,80	Tidak ada pelaksanaan	82,80	81,00	83,74	Tidak ada pelaksanaan

			Pemilu/Pemilukada				Pemilu/Pemilukada
2	Cakupan Komunitas "Sekolah Perjumpaan" yang terbentuk dalam rangka Pendidikan Karakter (%)	10,00	10,00 (60 komunitas)	20,00	-	30,00	
3	Persentase penurunan konflik sosial	10,00	14 kasus	14,29 (7 kasus)	57,14 (3 kasus)	16,67 (5 kasus)	- 25 (4 kasus)
4	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	0,60	-	0,70	0,64	0,80	0,61
5	Cakupan mediator bale mediasi yang dilatih (%)	2,06	-	1,86	-	4,48	

Sumber: Bakesbangpoldagri Provinsi NTB, 2021

Indikator Partisipasi Politik Masyarakat di Nusa Tenggara Barat tahun 2021 belum terdapat realisasi karena tidak ada pelaksanaan pemilihan umum maupun pilkada yang dilaksanakan. Indikator Cakupan Komunitas Sekolah Perjumpaan yang terbentuk dalam rangka Pendidikan Karakter juga belum dapat terealisasi karena pada tahun 2021 tidak ada pembentukan komunitas sekolah perjumpaan. Indikator Persentase Penurunan konflik sosial yang dengan target penuruna sebanyak 5 kasus dan terealisasi sebanyak 4 kasus yang terjadi pada tahun 2021. Ketepatan dan kecepatan langkah deteksi dini dan cegah dini yang berhasil dilakukan sehingga dapat menekan potensi konflik tersebut untuk tidak muncul sebagai konflik sosial yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan hidup sosial masyarakat. Indikator Persentase Keterlibatan masyarakat dalam politik sebesar 0,61 persen, ini dapat diartikan bahwa terdapat 16.847 orang masyarakat NTB yang terlibat langsung dalam Kepengurusan Organisasi atau sebesar 0,61 persen dari jumlah penduduk NTB usia 25 – 59 tahun. Capaian Indikator Cakupan mediator Bale Mediasi yang dilatih target 4,48 persen belum terdapat realisasi di tahun 2021 karena kondisi pandemic yang masih terjadi dan dengan adanya ketentuan yang mengamankan larangan berkerumun, Peraturan Daerah Nomor : 7 tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular yang membatasi mobilitas dan berkumpul.

b. Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan Perubahan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 telah ditetapkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Bidang Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB yaitu: 1) Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah; 2) Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; 3) Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah. Berikut adalah capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB berdasarkan indikator RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023:

Tabel 2- 77Capaian Indikator Kinerja Satpol PP Provinsi NTB berdasarkan RPJMD Tahun 2019-2023

NO	INDIKATOR BIDANG URUSAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	5.13	53.82	5.41	-33.33
2	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	100	100	100	100
3	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	100	100	100	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian tahun 2020 untuk indikator Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah jauh melampaui target hingga 1.094,04%. Hal ini dikarenakan jumlah penanganan kasus yang dilaksanakan kurang dari target akibat fokus penanganan kasus pengendalian terhadap pandemi Covid-19 yaitu penegakan Peraturan Daerah NTB Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular dan Peraturan Gubernur NTB Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan. Termasuk dalam rangka pengendalian pandemi juga telah dilakukan refocusing anggaran sehingga capaian jumlah kasus yang ditangani untuk gangguan tibutranmas adalah 9 kasus dari target 18 kasus dan pelanggaran perda/perkada adalah 9 kasus dari target 19 kasus. Selisih pengurangan yang tinggi dengan capaian tahun sebelumnya yakni 19 kasus untuk gangguan tibumtranmas dan 20 kasus untuk pelanggaran perda/perkada menyebabkan angka persentase penurunan berdasarkan indikator menjadi jauh melampaui target.

Selanjutnya capaian indikator Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah tahun 2021 juga menjadi tidak memenuhi target karena capaian tahun sebelumnya (tahun 2020) sebagai pembanding tahun berkenaan tidak sesuai target. Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung menyebabkan efisiensi anggaran dan tetap fokus penanganan kasus pelanggaran protokol kesehatan. Kendati demikian, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB tetap berusaha memaksimalkan target jumlah kasus hingga mencapai 13 kasus gangguan tibumtranmas dari target 17 kasus dan 11 kasus pelanggaran perda/perkada dari target 18 kasus. Upaya melaksanakan target jumlah kasus yang telah ditetapkan menghasilkan capaian indikator penurunan yaitu -33,33% (capaian negatif) yang mengartikan terjadinya peningkatan. Peningkatan yang terjadi dikarenakan jumlah kasus yang rendah pada tahun sebelumnya.

Capaian indikator “Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat” dan “Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah” pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 memenuhi target 100%. Semua kasus gangguan tibumtranmas dan pelanggaran perda/perkada ditangani seluruhnya setiap tahun. Pada tahun 2021 jumlah kasus dan jumlah penanganan gangguan

tibumtranmas sebanyak 13 kasus, kemudian jumlah kasus dan jumlah penanganan pelanggaran perda/perkada sebanyak 11 kasus.

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang diselenggarakan pada Satuan Polisi Pamong Praja, dengan indikator bidang urusan berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah : 1) Persentase perda/perkada yang dilanggar; 2) Persentase wilayah bebas gangguan tibumtranmas; dan 3) Persentase peningkatan Anggota Satlinmas dengan nilai evaluasi $\geq$ Baik. Target dan capaian indikator Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2- 78 Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2021	CAPAIAN 2021
Menurunnya perda/ perkada yang dilanggar oleh masyarakat	Persentase perda/perkada yang dilanggar	%	20.00	18.92
Terwujudnya wilayah bebas gangguan tibumtranmas	Persentase wilayah bebas gangguan tibumtranmas	%	60.68	53.85
Meningkatnya kemampuan dan keterampilan Anggota Satlinmas	Persentase peningkatan Anggota Satlinmas dengan nilai evaluasi $\geq$ Baik	%	2.56	2.56

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB, 2021

c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pada tahun 2021, target dan capaian kinerja Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2- 79 Capaian Indikator Urusan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2019-2021

NO	INDIKATOR BIDANG URUSAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks Kapasitas Daerah	0,57	0,57	0,59	0,57	0,61	0,63

Sumber: BPBD Provinsi NTB, 2021 , *Angka Sementara

IKD dihitung secara nasional dan terkoneksi ke InaRISK (*on-line*). Sementara IKD tahun 2021 menurut hasil perhitungan secara mandiri sudah mencapai 0,63 atau sudah melampaui target tahun 2021 sebesar 0,61. Meskipun IRB belum diterbitkan oleh Pusat, namun dapat diperkirakan menurun karena IKD cukup signifikan peningkatannya. Namun IRB NTB juga dapat menurun jika memperhatikan KRB Provinsi NTB Tahun 2020. Pada KRB NTB Tahun 2020 menunjukkan jumlah jenis bencana yang terjadi di Provinsi NTB mengalami peningkatan dari 11 jenis menjadi 13 jenis dengan tambahan Likuefaksi

dan Pandemi Covid 19. Dengan bertambahnya jenis tersebut boleh jadi menambah jumlah ancaman dan kerentanan di Provinsi NTB karena Covid 19 cukup signifikan pengaruhnya terhadap seluruh sektor pembangunan. Penanganan Covid 19 hingga tahun 2021 masih menjadi perhatian utama pemerintah dengan kebijakan pembatasan aktifitas guna mencegah dan memutus mata rantai penyebarannya. Kondisi ini mengakibatkan sejumlah kegiatan lainnya tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Upaya Pemerintah Provinsi NTB dalam penanganan Covid 19 cukup signifikan dalam menekan angka penyebaran Covid-19 di wilayah Provinsi NTB. Bahkan upaya ini telah mengantarkan NTB sebagai Nominator Provinsi yang akan mendapatkan Penghargaan Tangguh Adiwirasa oleh Pemerintah Pusat. Dengan keberhasilan, ada secercah harapan bahwa IRB NTB tahun 2021 dapat diturunkan.

Untuk meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencana, terdapat beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2021 yaitu meningkatkan pelayanan pencegahan kesiapsiagaan terhadap bencana, meningkatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta meningkatkan penataan sistem dasar penanggulangan bencana. Sampai dengan tahun 2021, Persentase perangkat daerah di provinsi NTB yang telah menerapkan kegiatan penanggulangan bencana sudah mencapai 100%, serta tetap meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencana di lingkup perangkat daerah provinsi dan Badan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kota. Sedangkan Desa Tangguh Bencana (Destana) hingga tahun 2021 telah mencapai 223 atau 51,38 % dari target 434 desa pada tahun 2023. Fasilitasi Pembentukan Destana Tahun 2021 sebanyak 10 desa, namun terkoreksi menjadi 4 desa yaitu Desa Sepit Kec. Keruak Kab. Lombok Timur, Desa Pringgasea Timur, Kec. Pringgasea Kab. Lombok Timur, Desa Bengkaung, Kec. Gunungsari, dan Desa Lembahsari Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat. Tidak dilaksanakannya 6 desa lainnya disebabkan oleh adanya COVID-19.

Kejadian bencana di NTB sepanjang tahun 2021 sebagaimana gambar berikut.

Gambar 2- 31 Kejadian Bencana di Provinsi NTB Tahun 2021



Sumber: BPBD Provinsi NTB, 2021

Pada periode 1 Januari – 31 Desember 2021 telah terjadi bencana alam sebanyak 150 kejadian. Dari jumlah tersebut, bencana yang paling sering terjadi yaitu bencana banjir dan banjir bandang dengan 89 kejadian, kemudian tanah longsor 25 kejadian, angin puting beliung 17 kejadian, banjir rob 10 kejadian dan 9 kekeringan di Kabupaten/Kota.

Kabupaten sumbawa menjadi wilayah yang paling sering dilanda bencana selama periode Januari – Desember dengan 20 kejadian, Kabupaten Dompu 19 kejadian, Kabupaten Bima 19 kejadian, Lombok Tengah 14 kejadian, Lombok Timur 12 kejadian, Lombok Barat 10 kejadian, Kota Mataram 7 Kejadian dan Lombok Utara 6 kejadian bencana.

Dari kejadian bencana tersebut mengakibatkan 199.952 jiwa terdampak, 22 orang luka-luka dan 10 meninggal dunia serta mengakibatkan 7.501 rumah rusak dengan rincian 600 rusak berat, 3.007 rusak sedang, dan 3.894 rusak ringan. Selain itu, kejadian bencana ini juga berdampak terhadap 92 fasilitas antara lain 59 fasilitas Pendidikan, 19 fasilitas Kesehatan, 14 fasilitas peribadatan, 40 jembatan, 17 titik ruas jalan, 3 titik bendungan dan 35 titik tanggul.

Kejadian bencana non alam di Provinsi NTB sepanjang tahun 2021 sebagaimana gambar berikut:

Tabel 2- 80 Kejadian Bencana Non Alam di Provinsi NTB Tahun 2021

KEWASPADAAN COVID-19 BERDASARKAN KAB/KOTA DI PROV. NTB

(UPDATE : 24 DESEMBER 2021, JAM 17.00 WITA)

NO	KABUPATEN	PELAKU PERJALANAN			KONTAK ERAT			KASUS SUSPEK					KONFIRMASI			
		MASIH KARANTINA	DISCARDED	JUMLAH	MASIH KARANTINA	DISCARDED	JUMLAH	MASIH ISOLASI	PROBABLE		DISCARDED	JUMLAH	MASIH ISOLASI	SEMBUH	MENINGGAL	JUMLAH
									JUMLAH	MENINGGAL						
1	Kota Mataram	-	2,639	2,639	127	28,895	29,022	-	3	-	3,287	3,290	9	6,829	253	7,091
2	Kab. Lombok Barat	-	5,351	5,351	-	27,440	27,440	-	-	-	4,856	4,856	1	3,289	156	3,446
3	Kab. Lombok Tengah	-	13,157	13,157	185	9,312	9,497	13	2	-	2,620	2,635	-	2,927	116	3,043
4	Kab. Lombok Utara	-	1,084	1,084	-	1,344	1,344	-	-	-	1,136	1,136	-	575	17	592
5	Kab. Lombok Timur	13	19,638	19,651	-	28,779	28,779	-	1	-	6,609	6,610	-	3,032	48	3,080
6	Kab. Sumbawa Barat	-	15,516	15,516	-	5,341	5,341	-	-	-	543	543	-	1,285	34	1,319
7	Kab. Sumbawa	-	10,699	10,699	-	6,534	6,534	-	-	-	2,396	2,396	-	3,150	146	3,296
8	Kab. Dompu	-	23,832	23,832	-	4,844	4,844	-	-	-	1,388	1,388	3	1,555	35	1,593
9	Kab. Bima	-	13,159	13,159	-	8,213	8,213	-	-	-	1,410	1,410	-	1,448	41	1,489
10	Kota Bima	-	3,443	3,443	36	9,898	9,934	-	-	-	368	368	-	1,871	57	1,928
11	WNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	16	-	10	-	10
12	Luar Provinsi	-	10,368	10,368	-	-	-	-	-	-	1	1	-	874	12	886
	JUMLAH	13	118,886	118,899	348	130,600	130,948	13	6	-	24,630	24,649	13	26,845	915	27,773

Sumber: BPBD Provinsi NTB, 2021

Update Data COVID-19 di Provinsi NTB per 24 Desember 2021 di laporkan bahwa tidak ada pasien dalam perawatan dinyatakan sembuh dari Covid-19. Jumlah pasien sembuh sampai saat ini mencapai 26.845 orang. Kemudian berdasarkan hasil test swab didapat tambahan 2 orang kasus baru positif Covid-19, yakni berasal dari Kabupaten Dompu. Dengan adanya penambah 2 kasus baru positif dan tidak ada kasus kematian baru, maka historis jumlah pasien positif Covid-19 di NTB sebanyak 27.773 orang, dengan perincian, 26.845 orang sudah sembuh, 915 orang meninggal dunia, 13 orang konfirmasi masih isolasi.

Upaya yang telah dilakukan BPBD dalam mengurangi risiko bencana selama tahun 2021 adalah :

1. Upaya penegakan hukum untuk menciptakan kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan COVID-19.
2. Pembentukan satuan tugas COVID-19.
3. Pendistribusian dan pembagian masker kepada OPD yang membutuhkan dan masyarakat.
4. Pendistribusian Alat Pelindung Diri (APD) dan Handsanitizer kepada OPD yang membutuhkan.

5. Penyemprotan Desinfektan di berbagai lokasi.
6. Terciptanya koordinasi dan komunikasi yang efektif antara daerah Kab/Kota, Provinsi, dan Pusat.

Pemerintah Provinsi NTB pada tahun 2021 telah melakukan upaya-upaya untuk mengantisipasi terjadinya bencana antara lain :

1. Menerapkan Rencana Aksi Daerah - Pengurangan Resiko Bencana (RAD-PRB) gempa bumi di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yang terdampak, yang merupakan prioritas kegiatan Pengurangan Resiko Bencana dan masuk dalam misi 1 RPJMD 2019-2023;
2. Penyebaran brosur dan leaflet serta pemasangan papan informasi/baliho tentang tata cara evakuasi dan perlindungan dari bahaya bencana;
3. Simulasi penyelamatan dan evakuasi diri dari terjangan tsunami di daerah sepanjang pesisir selatan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dengan melibatkan partisipasi masyarakat, pihak Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia;
4. Pemetaan lokasi evakuasi pada daerah rawan bencana;
5. Penyebarluasan informasi bencana geologi dan prosedur mitigasinya, berupa baliho dan papan informasi di lokasi rawan bencana gunung berapi, lokasi rawan gempa dan berpotensi tsunami dan beberapa lokasi yang teridentifikasi rawan bencana gerakan tanah;
6. Monitoring dan Evaluasi Rawan Bencana;
7. Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, dan perdagangan perempuan dan anak;
8. Pengendalian dampak perubahan iklim;
9. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA;
10. Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi;
11. Perlindungan mata air dengan vegetasi/civil teknis;
12. Sosialisasi dan mitigasi bencana alam geologi di kabupaten/kota se-NTB;
13. Pendataan daerah berpotensi terkena landasan tsunami 21 lokasi di Pulau Lombok dan 32 lokasi di Pulau Sumbawa;
14. Pemasangan baliho/papan informasi cara menyelamatkan dan mengevakuasi diri dari:
 - Bahaya letusan gunung berapi di 3 lokasi.
 - Bahaya gempa bumi di 7 lokasi
 - Bahaya tanah longsor di 3 lokasi.
15. Memperbanyak iklan layanan masyarakat pada berbagai masmedia tentang tata cara menghadapi bencana, terutama antisipasi dan evakuasi diri;
16. Dana siap pakai penyelamatan (on call);
17. Belanja Tidak Terduga (BTT);
18. Pembentukan Desa Tangguh Bencana;
19. Pembentukan Sekolah Aman Bencana (SAB);
20. Penyiapan bupperstock pada gudang bencana kabupaten/kota;

21. Pembangunan Kolam Tandon Air (KTA) di Kabupaten Bima dan kota Bima di 36 lokasi;
22. Pembuatan sumur bor untuk penanggulangan bencana kekeringan sebanyak 15 titik di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa;
23. Penyebarluasan informasi potensi dan mitigasi bencana melalui <http://www.bpbdbntb.info/>.

Berdasarkan catatan yang ada bencana alam dan non alam yang melanda Provinsi NTB dan menimbulkan korban jiwa serta kerusakan sarana dan prasarana umum adalah bencana banjir bandang, puting beliung, cuaca buruk/gelombang pasang/rob, kekeringan, gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, kebakaran pemukiman, epidemi dan wabah penyakit, kecelakaan transportasi darat, laut, udara dan konflik sosial.

Target pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, yaitu Standar Pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada kepada warga negara di Provinsi dengan sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel 2- 81 Target Standar Pelayanan Minimal yang terkena dampak gangguan Tramtibum akibat Penegakan Perda/Perkada Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran dan indikator	Persentase
1.	Pelayanan Kerugian Materil	1.1 Pemenuhan Kerugian materil ringan < 2,5%	100 %
		1.2 Pemenuhan Kerugian materil ringan $\geq$ 2,5%	100 %
2.	Pelayanan Pengobatan	Pertolongan Pertama Untuk Cidera Fisik Ringan	100 %

6. Bidang Sosial

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial Tahun 2021 diselenggarakan oleh Dinas Sosial Provinsi NTB, dengan indikator bidang urusan berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah 1) Cakupan Penduduk Miskin Yang Mendapatkan Jaminan Sosial, dan 2) Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Ditangani.

Tabel 2- 82Capaian Indikator Urusan Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB Tahun 2021

NO	INDIKATOR BIDANG URUSAN	TAHUN 2021	
		TARGET	REALISASI
1	Cakupan Penduduk Miskin Yang Mendapatkan Jaminan Sosial	100	100
	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Ditangani	4,87	48,58

Sumber: Dinas Sosial Provinsi NTB, 2021

Indikator Cakupan Penduduk Miskin yang mendapatkan Jaminan Sosial diintervensi melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Rastra, Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) dan Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacatan Berat (ASODKB) telah mencapai target yang telah ditetapkan, dimana pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk miskin pada tahun 2021 telah direalisasikan secara keseluruhan, termasuk pemberian bantuan tambahan untuk membantu masyarakat miskin pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ketika varian delta covid 19 merebak di Indonesia termasuk di NTB. Sementara untuk indikator Prosentase PMKS yang tertangani Dinas Sosial Provinsi NTB melaksanakan Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS lainnya, Program Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan Sosial dan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial juga telah melampaui target yang telah ditetapkan untuk tahun 2021.

Penanganan PMKS dilakukan melalui 2 (dua) sistem yaitu sistem dalam panti dan sistem luar panti. Sistem dalam panti dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yaitu Panti Sosial, dimana UPTD Dinas Sosial ada 8 (delapan) Panti Sosial milik pemerintah daerah yang menangani permasalahan anak, permasalahan lansia dan permasalahan penyakit sosial lainnya seperti tuna sosial, gelandangan pengemis dan eks psikotik. Sistem dalam panti ini didukung oleh anggaran APBD Provinsi. Selain itu ada juga yang dilaksanakan oleh panti milik masyarakat yaitu Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang ikut bekerjasama didalam menangani permasalahan sosial di Nusa Tenggara Barat.

Kemudian Penanganan PMKS melalui sistem luar panti, dilakukan Dinas Sosial Prov. NTB melalui program dan kegiatan pelatihan keterampilan, bimbingan teknis manajemen usaha dan pemberian bantuan sosial. Sistem luar panti ini didukung oleh anggaran Dekonsentrasi, APBN Pusat dan Tugas Perbantuan. Dalam penanganan PMKS Dinas Sosial Prov. NTB tidak bergerak sendiri tapi bekerjasama dan didukung oleh Lembaga mitra seperti Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).

Adapun jenis dan jumlah PMKS yang dapat ditangani selama tahun 2021 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2- 83 Data Prosentase PMKS Yang Ditangani Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021

NO	JENIS PMKS	DATA PMKS	MELALUI APBD	MELALUI DEKON	MELALUI KAB/KOTA	MELALUI LEMBAGA MITRA	TOTAL CAPAIAN
1	Anak Balita Terlantar	2,308	-	-	-	-	-
2	Anak Terlantar	90,333	4.340	268	1.941	-	6.551
3	Anak Nakal/Anak Berhadapan dengan Hukum	859	-	-	-	-	-
4	Anak Jalanan	3,286	-	-	-	-	-

NO	JENIS PMKS	DATA PMKS	MELALUI APBD	MELALUI DEKON	MELALUI KAB/KOTA	MELALUI LEMBAGA MITRA	TOTAL CAPAIAN
5	Anak Dengan Kedisabilitas	4,830	-	-	-	-	-
6	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan	471	-	-	-	-	-
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan khusus Lanjut Usia Terlantar	-	-	109	-	-	109
8	Penyandang Disabilitas	49.260	130	35.272	13.675	-	49.077
9	Tuna Susila	27.705	360	4.515	1.530	-	6.405
10	Gelandangan	-	-	-	-	-	-
11	Pengemis	194	27	-	69	-	96
12	Pemulung	-	-	-	-	-	-
13	Kelompok Minoritas	310	-	-	-	-	-
14	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	55	-	-	-	-	-
15	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	6,427	-	-	-	-	-
16	Korban Penyalahgunaan Napza	212	-	-	-	-	-
17	Korban Trafficking	551	-	-	-	-	-
18	Korban Tindak Kekerasan	-	264	-	-	264	264
19	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	-	329	-	-	329	329
20	Korban Bencana Alam	-	229	-	-	229	229
21	Korban Bencana Sosial	-	4.906	26.583	47.040	10.985	89.514
22	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	-	-	-	-	-	-
23	Keluarga Fakir Miskin	10.375	60	-	-	-	60
24	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	901.725	682	-	-	-	682
25	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	-	-	-	-	-	-
26		2,446	-	135	-	-	135
JUMLAH		1.101.347	11.327	66.882	64.225	11.087	153.451

Sumber: Dinas Sosial Provinsi NTB, 2021

Tabel 2- 84 Data Cakupan Penduduk Miskin yang Mendapatkan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021

NO	JENIS PMKS	JUMLAH		YANG SDH DIBERIKAN PELAYANAN		%
1	Keluarga Fakir Miskin	901,725	KK	930,116	KK	100
	JUMLAH	901.725	KK	930,116	KK	100

Sumber : Dinas Sosial Provinsi NTB, 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, terdapat 5 (Lima) target pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2- 85 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2021

No	SASARAN INDIKATOR	TARGET 2020
1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 Jiwa
2.	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	224 Jiwa
3.	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	130 Jiwa
4.	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	27 Jiwa
5.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Sesuai Kejadian Bencana

Sumber : Dinas Sosial Provinsi NTB Tahun 2022

B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. Bidang Tenaga Kerja

Sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan urusan tenaga kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB menetapkan sasaran strategis sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021 seperti pada tabel berikut.

Tabel 2- 86 Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Urusan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021

NO	Indikator (Satuan)	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,30	3,01	109,63
2	Persentase penyerapan angkatan kerja (%)	96,70	96,99	100,30
3	Persentase perusahaan yang harmonis/kondusif (%)	98,77	98,97	100,20

Sumber: BPS NTB, Disnakertrans Provinsi NTB, 2021

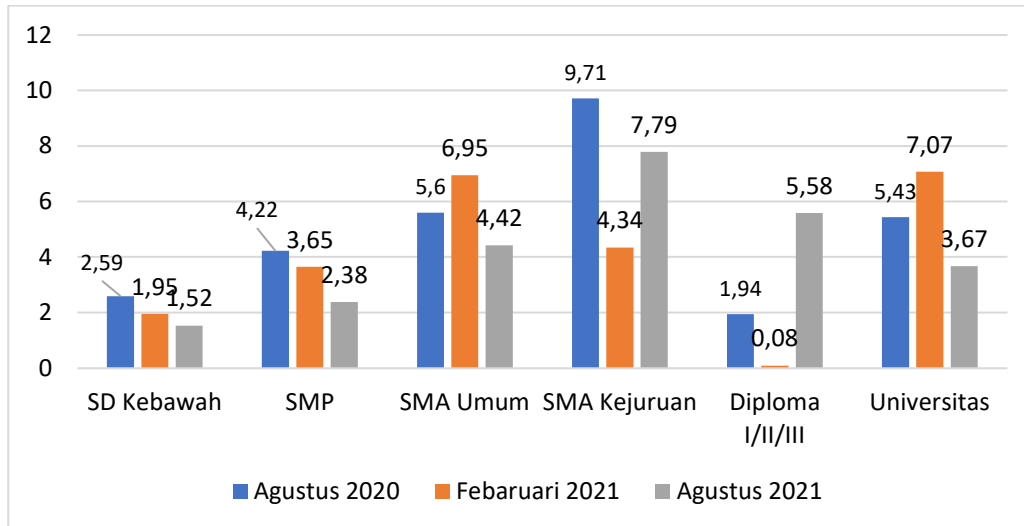
Sesuai RPJMD Provinsi NTB 2019-2023, Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTB mampu urusan tenaga kerja dengan indikator kinerja daerah “Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)”. Capaian TPT dari tahun 2019 sampai 2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 TPT meningkat signifikan sebagai dampak pandemic covid-19 dimana pada saat itu banyak pekerja yang dirumahkan (sementara) karena banyaknya perusahaan yang mengalami kolaps. Namun demikian karena intervensi pemerintah dalam bidang Kesehatan dan pemulihan ekonomi sehingga tahun 2021 TPT mengalami penurunan tajam dibandingkan tahun 2020. Capaian TPT tahun 2019-2021 sebagaimana table berikut.

Tabel 2- 87 Capaian Tingkat pengangguran Terbuka (TPP) Bidang Urusan Tenaga Kerja Tahun 2019 -2021

NO	INDIKATOR (SATUAN)	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,39	3,28	3,26	4,22	3,30	3,01

Sumber: BPS NTB, Disnakertrans Provinsi NTB, 2021

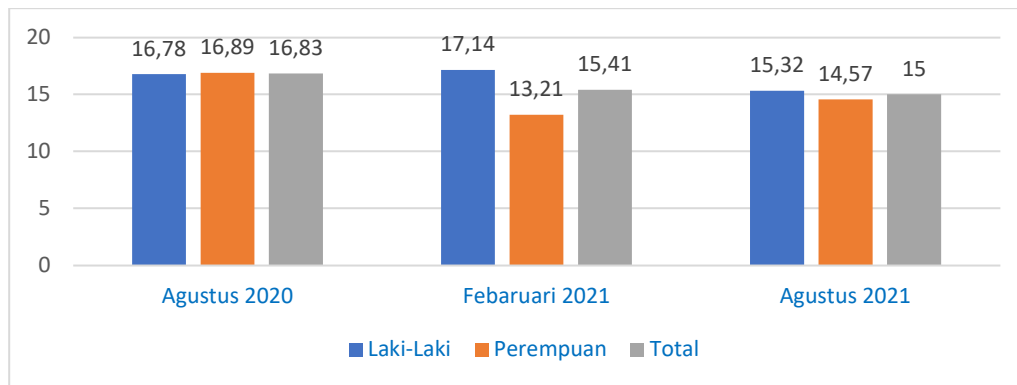
Gambar 2- 32 TPT menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan



Sumber: BPS NTB, BRS Agustus 2021

Dilihat dari tingkat pendidikan, pada Agustus 2021, TPT dari tamatan SMA Kejuruan merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 7,79 persen. Sementara TPT yang paling rendah adalah mereka dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah yaitu sebesar 1,52 persen. Dibandingkan Agustus 2020, hampir semua kategori pendidikan mengalami penurunan TPT kecuali untuk tamatan Diploma I/II/III yang naik sebesar 3,64 persen poin. Sementara, pada Februari 2021 yang mengalami peningkatan TPT adalah tamatan SMA Kejuruan dan Diploma I/II/III. Peningkatan TPT terbesar adalah pada tamatan Diploma I/II/III yaitu sebesar 5,50 persen poin.

Gambar 2- 33 Setengah Pengangguran Menurut Jenis Kelamin

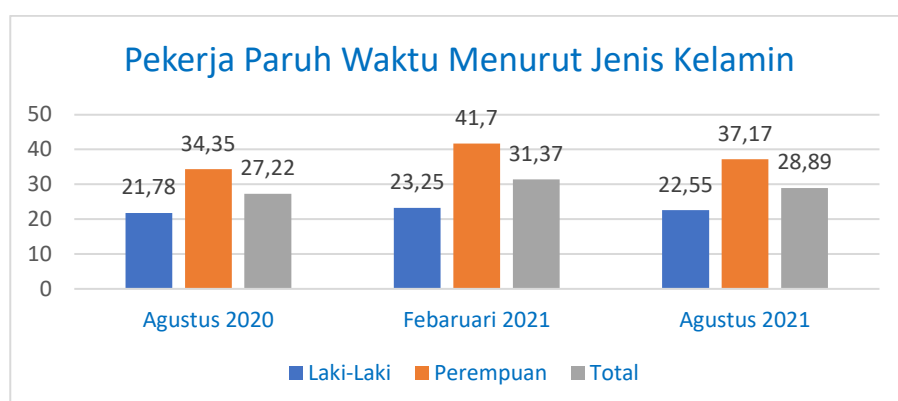


Sumber: BPS NTB, BRS Agustus 2021

Pengangguran terdiri dari setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu. Setengah pengangguran adalah mereka yang jam kerjanya di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam per minggu), dan masih mencari pekerjaan atau bersedia menerima pekerjaan lain. Tingkat setengah pengangguran pada Agustus 2021 adalah sebesar 15,00 persen. Hal ini berarti dari 100 penduduk bekerja terdapat sekitar 15 orang yang jam kerjanya di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam per minggu), dan masih mencari pekerjaan atau bersedia menerima pekerjaan lain. Dibandingkan Agustus 2020, tingkat setengah pengangguran mengalami penurunan sebesar 1,83 persen poin dan mengalami penurunan sebesar 0,41 persen poin dibandingkan dengan Februari 2021.

Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2021, tingkat setengah pengangguran laki-laki sebesar 15,32 persen, sedangkan tingkat setengah pengangguran perempuan sebesar 14,57 persen. Dibandingkan Agustus 2020, tingkat setengah pengangguran baik laki-laki maupun perempuan mengalami penurunan, masing-masing 1,46 persen poin dan 2,32 persen poin. Sementara itu, jika dibandingkan Februari 2021, tingkat setengah pengangguran laki-laki mengalami penurunan sebesar 1,81 persen poin sedangkan tingkat setengah pengangguran perempuan mengalami peningkatan 1,36 persen poin.

Gambar 2- 34 Pekerja waktu menurut jenis kelamin



Sumber: BPS NTB, BRS Agustus 2021

Pekerja paruh waktu adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Tingkat

pekerja paruh waktu di NTB pada Agustus 2021 sebesar 28,89 persen, yang berarti dari 100 orang penduduk bekerja terdapat sekitar 28 sampai 29 orang pekerja paruh waktu. Dibandingkan Agustus 2020, tingkat pekerja paruh waktu mengalami peningkatan sebesar 1,67 persen poin dan dibandingkan Februari 2021 mengalami penurunan sebesar 2,48 persen poin.

Berdasarkan jenis kelamin, tingkat pekerja paruh waktu perempuan cenderung lebih tinggi dibanding tingkat pekerja paruh waktu laki-laki. Pada Agustus 2021, tingkat pekerja paruh waktu perempuan (37,17 persen) lebih tinggi dibanding pekerja paruh waktu laki-laki (22,55 persen). Tingkat pekerja paruh waktu laki-laki dan perempuan memiliki pola yang sama, yaitu terjadi peningkatan jika dibandingkan Agustus 2020 dan penurunan jika dibandingkan dengan Februari 2021. Dibandingkan Agustus 2020, terdapat peningkatan sebesar 0,77 persen poin untuk laki-laki dan 2,82 persen poin untuk perempuan. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Februari 2021, terjadi penurunan sebesar 0,69 persen poin untuk laki-laki dan 4,54 persen poin untuk perempuan.

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, pada tahun 2021 menetapkan target kinerja untuk indikator persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi sebesar 20 persen namun baru terealisasi sebesar 16,77 persen (tingkat capaian 83,85%). Tahun 2021, jumlah pencari kerja bersertifikat kompetensi melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BLK/LLK, LPKS, pemagangan dalam negeri dan pemagangan luar negeri (program magang ke Jepang) sebanyak 13.705 tenaga kerja dari total pencari kerja terdaftar sebanyak 81.689 orang.

Tabel 2- 88 Jumlah Pencari Kerja Terdaftar dan Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021

NO	KABUPATEN / KOTA	PENCARI KERJA			SERTIFIKASI KOMPETENSI		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1	Kota Mataram	725	469	1.194	1.305	1.254	2.559
2	Lombok Barat	7.996	2.463	10.459	564	379	943
3	Lombok Utara	11.714	3.224	14.938	154	186	340
4	Lombok Tengah	20.915	3.994	24.909	1.300	697	1.997
5	Lombok Timur	7.412	3.680	11.092	2.520	2.419	4.939
6	Sumbawa Barat	535	729	1.264	176	125	301
7	Sumbawa	598	577	1.175	350	150	500
8	Dompu	2.189	4.176	6.365	750	452	1.202
9	Kota Bima	1.685	4.114	5.799	250	158	408
10	Bima	2.787	1.707	4.494	306	210	516
	JUMLAH	56.556	25.133	81.689	7.675	6.030	13.705

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Tahun 2021

Pada tahun 2021, jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi di BLK/LLK sebanyak 2.528 orang, sebagaimana table berikut.

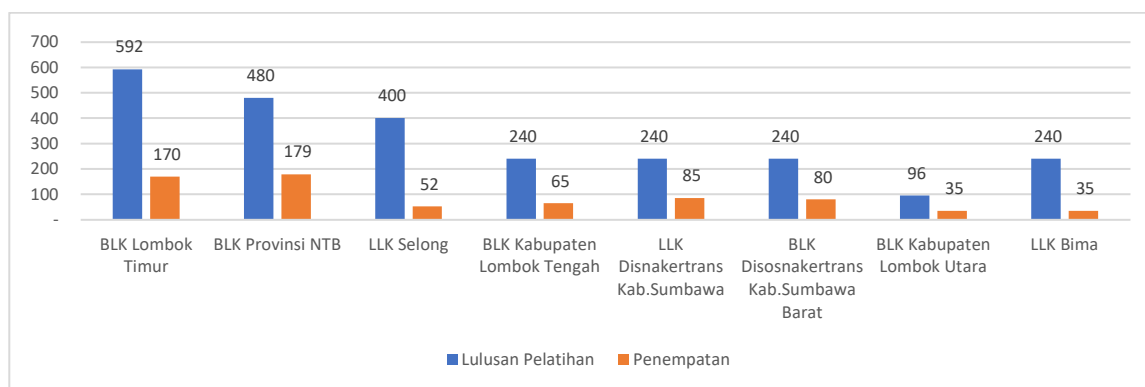
Tabel 2- 89 Jumlah Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan Keterampilan Berbasis Kompetensi di BLK/LLK tahun 2019-2021

No.	BLK / LLK	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Total
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi
	PBK UPTP dan UPTD	7.840	7.840	2.400	2.400	2.528	2.528	12.768
1	BLK Lombok Timur	1.856	1.856	720	720	592	592	3.168
2	BLK Provinsi NTB	1.408	1.408	592	592	480	480	2.480
3	LLK Selong	1.840	1.840	320	320	400	400	2.560
4	BLK Kabupaten Lombok Tengah	736	736	160	160	240	240	1.136
5	LLK Disnakertrans Kab.Sumbawa	624	624	192	192	240	240	1.056
6	BLK Disosnakertrans Kab.Sumbawa Barat	288	288	144	144	240	240	672
7	BLK Kabupaten Lombok Utara	240	240	96	96	96	96	432
8	LLK Bima	848	848	176	176	240	240	1.264

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, 2021

Dari 2.528 orang yang dilatih di tahun 2021, hanya 27,73 persen (701 orang) yang ditempatkan di DUDI. Tidak terserapnya semua lulusan pelatihan disebabkan terbatasnya kesempatan kerja di sector formal.

Gambar 2- 35 Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB



Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, 2021

Selain itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan pula akreditasi Lembaga pelatihan kerja agar Lembaga pelatihan yang menyelenggarakan pelatihan keterampilan benar-benar Lembaga pelatihan yang sudah terakreditasi. Sampai dengan tahun 2021.

Tabel 2- 90 Upgrading Instruktur Pada Lembaga Pelatihan Kerja Milik Pemerintah (BLK/LLK) 2021

No.	Unit Kerja	Program Kejuruan	Jumlah Instruktur
1	BLK NTB		10
		a) Otomotif Tek. Kendaraan Ringan (R4)	1
		b) TIK	2
		c) Teknik Pendingin	1
		d) Otomotif Sepeda Motor	1
		e) Perhotelan	2
		f) Bisnis dan Manajemen	1
		g) Las	1
		h) Menjahit	1
2	LLK Bima		7
		a) Servis Sepeda Motor	1
		b) Menjahit Pakaian Dasar	2
		c) Operator Komputer	1
		d) Telekomunikasi	2
		e) Bisnis dan Manajemen	1
3	LLK Sumbawa		5
		a) Otomotif	2
		b) TIK	1
		c) Teknik Las	1
		d) Teknik Listrik	1
4	LLK Sumbawa Barat		5
		a) PROGRAM OTOMOTIF	1
		b) PROGRAM LISTRIK	1
		c) PROGRAM MENJAHIT	1
		d) PROGRAM LAS SMAW 3G	1
		e) PROGRAM AC	1
5	LLK Lombok Tengah		7
		a) Listrik	2
		b) Teknik Las	1
		c) Teknologi Informasi dan Komunikasi	1
		d) Bangunan	1
		e) Menjahit	1
		f) Otomotif	1
6	LLK Selong		12
		a) Bangunan	1
		b) Teknologi Informasi dan Komunikasi	4
		c) Elektronika	1
		d) Bisnis dan manajemen	1
		e) Otomotif	2
		f) Garmen apareal	1
		g) Tata rias	1
		h) Teknik mekanik	1
7	UPTD LLK Lombok Utara		2
		a) Perhotelan	1
		b) Pengolahan hasil pertanian	1
Total instruktur			48

Sampai dengan tahun 2021, ada sebanyak 319 Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS), dan sebanyak 142 lembaga yang sudah terakreditasi dan 177 belum terakreditasi serta 59 sudah verifikasi internal. Adapun jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi oleh LPKS sebanyak 10.807 orang, sebagaimana table berikut.

Tabel 2- 91 Jumlah Total LPKS, Instruktur, Hasil Pelatihan dan LPKS Yang Sudah Diakreditasi/Belum Diakreditasi

NO	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH LPKS	JUMLAH INSTRUKTUR	HASIL PELATIHAN	SUDAH AKREDITASI	BELUM AKREDITASI	SUDAH VIN
1	Provinsi NTB	-	-	-	-	-	1
2	Kota Mataram	42	289	2.326	23	19	10
3	Lombok Barat	37	119	1.366	18	19	6
4	Lombok Utara	20	27	200	2	18	-
5	Lombok Tengah	65	242	1.980	45	20	21
6	Lombok Timur	77	179	1.221	31	46	15
7	Sumbawa Barat	9	38	318	4	5	2
8	Sumbawa	33	72	499	5	28	2
9	Dompus	12	52	1.838	5	7	-
10	Kota Bima	12	44	499	6	6	2
11	Bima	12	33	560	3	9	-
	JUMLAH	319	1.095	10.807	142	177	59

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Tahun 2021

Tahun 2021, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga menyelenggarakan pelayanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota, meskipun kesempatan kerja di sector formal masih terbatas karena adanya pandemic covid-19. Selain itu dalam rangka penempatan tenaga kerja, pemerintah Provinsi NTB juga mengelola informasi pasar kerja dengan tujuan agar pencari kerja memperoleh informasi seluas-luasnya terkait kesempatan kerja yang tersedia. Kesempatan kerja yang diinformasikan tidak saja di dalam daerah/negeri saja melainkan kesempatan kerja di luar negeri pun diinformasikan.

Tahun 2021, sebanyak 37.701 lowongan kerja terdaftar untuk penempatan tenaga kerja dalam negeri dan didominasi oleh sector informal. Sementara kesempatan kerja untuk penempatan luar negeri sebanyak 581 lowongan untuk sector formal.

Tabel 2- 92 Pencari Kerja Terdaftar Dan Lowongan Kerja Terdaftar (Dalam Negeri) Tahun 2021

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Pencari Kerja Terdaftar Registered Job Applicants			Lowongan Kerja Terdaftar Register Job Vacancies		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	Male	Female	Total	Male	Female	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lombok Barat	7.996	2.463	10.459	600	400	1.000
Lombok Tengah	11.714	3.224	14.938	2.580	2.005	4.585
Lombok Timur	20.915	3.994	24.909	3.750	2.700	6.450
Sumbawa	7.412	3.680	11.092	6.386	3.850	10.236
Dompus	598	577	1.175	3.176	550	3.726

Bima	2.189	4.176	6.365	300	455	755
Sumbawa Barat	535	729	1.264	549	550	1.099
Lombok Utara	2.787	1.707	4.494	2.050	1.750	3.800
Kota Mataram	725	469	1.194	1.500	2.000	3.500
Kota Bima	1.685	4.114	5.799	1.750	800	2.550
Jumlah Total	56.556	25.133	81.689	22.641	15.060	37.701

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Tahun 2021

Tabel 2- 93 Pencari Kerja Terdaftar Dan Lowongan Kerja Terdaftar Tahun 2021

NO	NEGARA PENEMPATAN	KEBUTUHAN TENAGA KERJA (LOWONGAN)		
		L	P	JUMLAH
1	MALAYSIA	517	17	534
2	UEA	2	0	2
3	TAIWAN	0	0	0
4	HONGKONG	0	3	3
5	SINGAPURA	0	0	0
6	OMAN	0	0	0
7	QATAR	2	1	3
8	KUWAIT	1	0	1
9	BRUNAI DARUSSALAM	0	0	0
10	SAUDI ARABIA	8	3	11
11	MAKAU	0	0	0
12	JEPANG	13	0	13
13	POLANDIA	0	0	0
14	PAPUA NEW GUINEA	14	0	14
15	KOREA SELATAN	0	0	0
JUMLAH		557	24	581

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Tahun 2021

Penempatan PMI di luar negeri memberikan dampak ekonomi yaitu adanya penerimaan remittance oleh pemerintah Provinsi NTB yang dikirim melalui Bank Indonesia maupun Kantor Pos. Perkembangan penerimaan remittance yang diterima pemerintah Provinsi NTB tahun 2018-2021 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2- 94 Penerimaan Remittance Oleh Pemerintah Provinsi NTB yang Dikirim Melalui Bank Indonesia maupun Kantor Pos

SUMBER DATA	NEGARA TUJUAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
BANK INDONESIA	SAUDI ARABIA	162.564.489.112,44	184.969.186.516,59	124.167.424.285,09	162.808.726.668,89	103.659.862.699,12
	UNI EMIRAT ARAB	15.147.508.917,72	14.805.711.657,17	21.104.482.040,33	40.663.498.125,94	42.984.863.060,83
	KUWAIT	3.668.137.314,00	3.716.042.542	55.790.375,00	133.412.619,00	34.111.782,00
	QATAR	3.876.703.245,53	2.939.069.983,01	1.657.694.756,00	1.013.758.732,00	1.557.439.624,00
	JORDAN	-	-	-	-	-
	KOREA	143.556.838,43	487.346.325,54	240.223.316,00	1.645.846.917,00	171.827.119,00
	MALAYSIA	15.718.422.386,38	11.083.680.795,15	5.334.555.024,56	5.108.644.133,06	2.699.099.611,07
	BRUNEI	23.326.290,00	-	-	-	108.907.524,50
	FILIPINA	6.451.070,00	20.570.680,00	3.246.720,00	-	16.115.551,00
	HONGKONG	747.358.751,75	686.556.546,61	408.474.047,00	11.012.259.545,00	1.515.759.254,85
	JEPANG / TOKYO	3.814.397.565,25	5.113.238.030,29	10.547.303.650,47	7.477.700.631,11	3.018.055.571,45
	SINGAPURA	856.817.845,77	1.489.231.574,98	1.300.535.087,67	1.409.556.583,16	768.628.411,03

SUMBER DATA	NEGARA TUJUAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
	NEGARA LAIN	132.986.012.240,94	121.765.071.537,34	97.348.777.348,87	105.484.188.461,09	93.291.306.715,40
JUMLAH DATA REMITANSI DARI BI		339.553.181.578,21	347.075.706.188,68	262.168.506.650,99	336.757.592.396,25	249.825.976.924,25
BPS	Data transaksi remitansi bayar TKI melalui (Western Union, Kantor Pos & Pegadaian)	1.216.589.361.955,00	967.094.108.462,00	956.205.800.760,00	-	-
JUMLAH		1.556.142.543.533,21	1.314.169.814.650,68	1.218.374.307.410,99	336.757.592.396,25	249.825.976.924,25

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Tahun 2021

Dalam upaya menekan penempatan PMI secara illegal, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB telah melakukan pendataan dan pembinaan rutin kepada Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang ada di NTB. Perkembangan jumlah PPTKIS di Provinsi NTB tahun 2019-2021 menurut kabupaten/kota adalah sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2- 95 Perkembangan Jumlah PPTKIS di Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2021

NO	KAB/KOTA	PUSAT				CABANG			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1.	Kota Mataram	9	9	7	1	22	32	32	14
2.	Lombok Barat	2	2	2	1	4	6	4	2
3.	Lombok Utara	0	0	0	0	1	1	1	0
4.	Lombok Tengah	1	1	1	0	13	14	11	9
5.	Lombok Timur	0	1	1	0	10	11	12	9
6.	Sumbawa	0	0	0	0	29	26	19	3
7.	Sumbawa Barat	0	0	0	0	0	0	2	0
8.	Dompu	0	0	0	0	1	2	1	0
9.	Bima	0	0	0	0	5	1	2	5
10.	Kota Bima	0	0	0	0	1	8	5	1
JUMLAH		13	12	11	2	121	86	89	45

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, 2021

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB telah menangani sebanyak 1.008 orang PMI bermasalah pada tahun 2021, jika dibandingkan dengan tahun 2020, jumlah PMI bermasalah yang ditangani tahun 2021, mengalami penurunan.

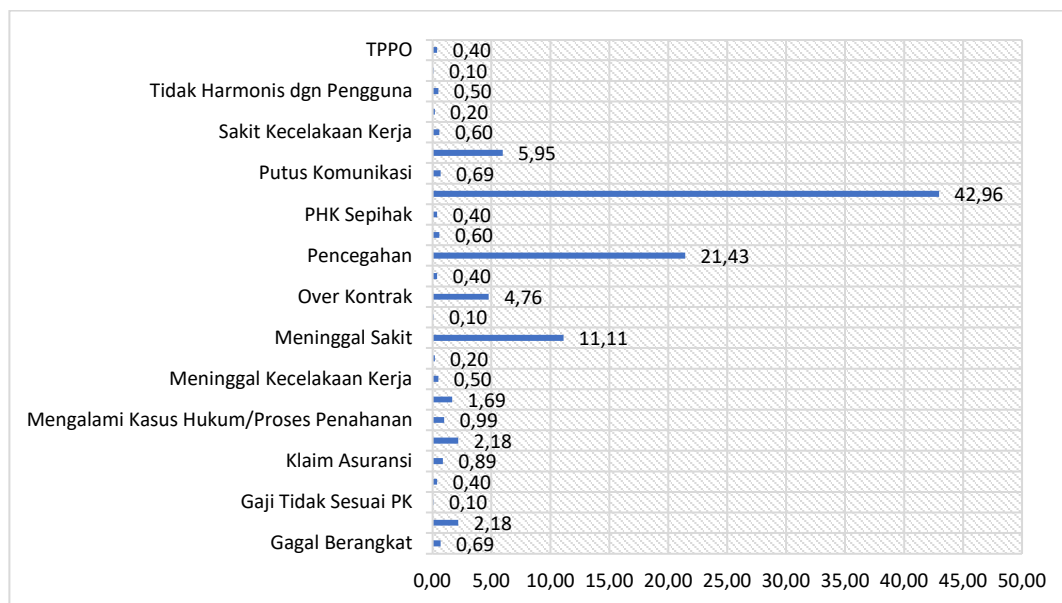
Tabel 2- 96 Perkembangan Penanganan PMI Bermasalah di Provinsi NTB 2021 Menurut Kabupaten/Kota

NO.	KABUPATEN/KOTA	KASUS	SELESAI	BELUM	JUMLAH
1.	BIMA	48	40	8	48
2.	KOTA BIMA	10	10	-	10
3.	DOMPU	28	22	6	28
4.	LOMBOK BARAT	107	93	14	107
5.	LOMBOK TENGAH	245	225	20	245
6.	LOMBOK TIMUR	376	353	23	376
7.	LOMBOK UTARA	27	21	6	27
8.	MATARAM	18	13	5	18
9.	SUMBAWA	120	84	36	120
10.	SUMBAWA BARAT	28	21	7	28
11.	LAIN - LAIN	1	1	-	1
TOTAL		1.008	883	125	1.008

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, 2021

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB telah menangani sebanyak 1.008 orang PMI bermasalah pada tahun 2021, jika dibandingkan dengan tahun 2020, jumlah PMI bermasalah yang ditangani tahun 2021, mengalami penurunan. Sebagian besar Kasus/permasalahan Penanganan PMI Bermasalah di Provinsi NTB yaitu 42,96 persen PMI bermasalah, pencegahan pemberangkatan PMI 41,23 persen dan PMI meninggal karena sakit sebesar 11,11 persen.

Gambar 2- 36 Jenis Kasus/Permasalahan Penanganan PMI Bermasalah Di Provinsi NTB Tahun 2021



Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, 2021

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB tahun 2021, mengukur meningkatnya kesempatan kerja masyarakat melalui indikator persentase penyerapan angkatan kerja. Dari target 96,70 persen, realisasi persentase penyerapan angkatan kerja tahun 2021 sebesar 96,99 persen (capaian 100,30 persen). Sebanyak 37.701 pencari kerja terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTB yang telah ditempatkan pada tahun 2021, seperti pada tabel berikut.

Tabel 2- 97 Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan Tahun 2021

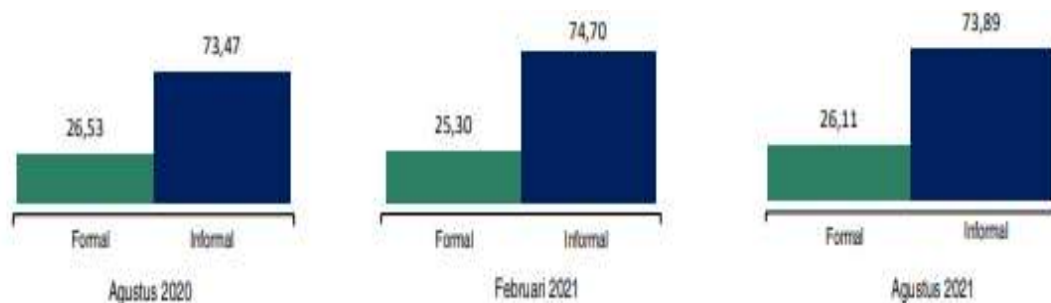
No	Kab/Kota Daerah Asal Pencari Kerja	Pencari Kerja			Pencari Kerja Yang Ditempatkan			Pencari Kerja Yang Belum Ditempatkan / Masih Menganggur		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	Kota Mataram	725	469	1.194	600	400	1.000	125	69	194
2	Lombok Barat	7.996	2.463	10.459	2.580	2.005	4.585	5.416	458	5.874
3	Lombok Tengah	11.714	3.224	14.938	3.750	2.700	6.450	7.964	524	8.488
4	Lombok Timur	20.915	3.994	24.909	6.386	3.850	10.236	14.529	144	14.673
5	Sumbawa	7.412	3.680	11.092	3.176	550	3.726	4.236	3.130	7.366
6	Ksb	535	729	1.264	300	455	755	235	274	509
7	Dompu	598	577	1.175	549	550	1.099	49	27	76

No	Kab/Kota Daerah Asal Pencari Kerja	Pencari Kerja			Pencari Kerja Yang Ditempatkan			Pencari Kerja Yang Belum Ditempatkan / Masih Menganggur		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
8	Kabupaten Bima	2.189	4.176	6.365	2.050	1.750	3.800	139	2.426	2.565
9	Kota Bima	1.685	4.114	5.799	1.500	2.000	3.500	185	2.114	2.299
10	Klu	2.787	1.707	4.494	1.750	800	2.550	1.037	907	1.944
	Jumlah	56.556	25.133	81.689	22.641	15.060	37.701	33.915	10.073	43.988

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, 2021

Berdasarkan Berita Resmi Statistik, BPS NTB Agustus 2021, penempatan tenaga kerja terjadi pada sektor formal dan informal. Pada tahun 2021, penduduk yang bekerja di sektor informal sebanyak 1,96 juta orang (73,89 persen), sedangkan yang bekerja di sektor formal sebanyak 693,75 ribu orang (26,11 persen). Penduduk bekerja di sektor informal pada Agustus 2021 naik sebesar 0,43 persen poin jika dibandingkan Agustus 2020, tetapi apabila dibandingkan Februari 2021 pekerja informal turun sebesar 0,80 persen poin.

Gambar 2- 37 Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Formal dan Informal Tahun 2020-2021



Sumber: BPS NTB, BRS Agustus 2021

Pelayanan perizinan Tenaga Kerja Asing (TKA) pada tahun 2021 ditargetkan sebanyak 300 orang namun realisasi sebanyak 91 orang, hal ini disebabkan karena proses izin perpanjangan tenaga kerja asing sudah diambil alih oleh pemerintah pusat, sehingga peran pengawasan pemerintah provinsi menjadi tidak optimal. Adapun jumlah TKA yang ada di NTB tahun 2021 menurut kewarganegaraannya adalah sebagai berikut.

Tabel 2- 98 Jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) di Provinsi NTB Menurut Kewarganegaraan Tahun 2021

No.	Asal Negara WNA	Jenis Kelamin		
		L	P	JUMLAH
1	Australia	15	3	18
2	Amerika	4	3	7
3	Jerman	2	2	4
4	Italia	0	2	2
5	Inggris	10	8	18

No.	Asal Negara WNA	Jenis Kelamin		
		L	P	JUMLAH
6	Prancis	5	1	6
7	Polandia	0	0	0
8	Selandia Baru	0	0	0
9	Belanda	0	4	4
10	Netherland Antiles	0	0	0
11	Finlandia	1	1	2
12	Afrika Selatan	3	0	3
13	Belgia	0	0	0
14	Korea Selatan	2	1	3
15	Malaysia	0	0	0
16	Spanyol	1	0	1
17	Swetzerland	0	0	0
18	Swedia	2	3	5
19	New Zaeland	1	2	3
20	Netherland Antiles	0	0	0
21	Canada	0	1	1
22	Jepang	1	0	1
23	Irladia	1	1	2
24	Norwegia	1	0	1
25	Brasil	0	0	0
26	YAMAN REPUBLIK	1	0	1
27	Filipina	2	1	3
28	Belarusia	0	0	0
29	Slovakia	0	0	0
30	India	2	0	2
31	Peru	1	0	1
32	Tunisia	1	0	1
33	Rusian Federatin	1	0	1
34	Republik Rakyat Cina	0	1	1
Jumlah		57	34	91

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, 2021

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB pada tahun 2021 telah melakukan upaya pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam bentuk sosialisasi kepada perusahaan, melakukan pembinaan kepada Lembaga Kerjasama bipartite di perusahaan, menetapkan upah minimum provinsi dan kab/kota sebagai jaring pengaman bagi pekerja untuk mendapatkan pendapatan yang layak, mendorong pengusaha agar memberi jaminan kepada pekerjanya yaitu jaminan social ketenagakerjaan. Selain itu untuk menjaga norma ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB pada tahun 2021 melalui fungsional pengawas ketenagakerjaan telah melakukan pengawasan penerapan norma ketenagakerjaan dan K3 kepada perusahaan serta kepatuhan perusahaan terhadap peraturan ketenagakerjaan.

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis "hubungan industrial yang harmonis/kondusif" dengan indikator persentase perusahaan yang harmonis/kondusif, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB tahun 2021 telah menetapkan target sebesar 98,77 persen, terealisasi 98,97 persen (capaian 100,20%). Capaian melampaui target yang ditetapkan disebabkan meningkatnya perusahaan yang menjalankan peraturan ketenagakerjaan sehingga konflik atau kasus hubungan industrial dapat ditekan untuk menjaga hubungan harmonis antara pekerja dan pengusaha. Selain itu disebabkan oleh meningkatnya perusahaan yang melaksanakan norma kerja dan K3 sehingga kepastian hak-hak pekerja dalam pemenuhan standar hidup serta keselamatan dan kesehatan kerja dapat terjamin.

Pada tahun 2021, kasus perselisihan hubungan industrial yang sudah diselesaikan sebanyak 49 kasus dengan melibatkan 49 perusahaan dan tenaga kerja sebanyak 207 orang. Jumlah kasus yang diselesaikan secara Bipartit sebanyak 16 kasus, diselesaikan melalui Perjanjian Bersama sebanyak 19 kasus, diselesaikan melalui anjuran sebanyak 6 kasus dan 7 kasus sisanya masih dalam proses penyelesaian di kabupaten/kota. Dari data tersebut, persentase perusahaan yang berselisih hanya 1,03 persen dari total perusahaan di NTB sebanyak 4.779 perusahaan.

Tabel 2- 99 Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Tahun 2021

KABUPATEN/KOTA	PERSELISIHAN HAK		PERSELISIHAN PHK	
	KASUS	TK	KASUS	TK
Kota Mataram	-	-	32	60
Lombok Barat	1	7	3	3
Lombok Tengah	-	-	-	-
Lombok Timur	1	40	2	2
Lombok Utara	-	-	9	45
Sumbawa Barat	-	-	-	-
Sumbawa	-	-	-	-
Dompu	-	-	-	-
Kab. Bima	1	50	-	-
Kota Bima	-	-	-	-
Total	3	97	46	110

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, 2021

Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB dalam menekan jumlah perselisihan antara perusahaan dengan pekerja adalah melalui bertambahnya Lembaga bipartite di perusahaan dalam rangka membangun hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat. Pada tahun 2021 sebanyak 240 perusahaan yang sudah mempunyai LKS Bipartit dari total perusahaan yang sudah terdaftar wajib lapor ketenagakerjaan sebagaimana table berikut.

Tabel 2- 100 LKS Bipartit di Perusahaan Tahun 2021

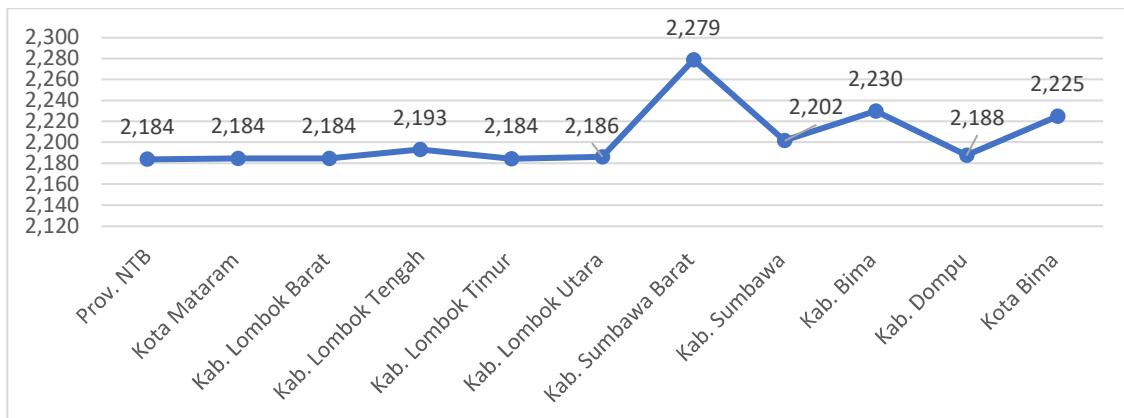
No.	Kab/ Kota	Jumlah Perusahaan
1	KOTA MATARAM	74
2	KABUPATEN LOMBOK BARAT	43
3	KABUPATEN LOMBOK UTARA	34

No.	Kab/ Kota	Jumlah Perusahaan
4	KABUPATEN LOMBOK TENGAH	11
5	KABUPATEN LOMBOK TIMUR	26
6	KABUPATEN SUMBAWA BARAT	20
7	KABUPATEN SUMBAWA	11
8	KABUPATEN DOMPU	5
9	KOTA BIMA	7
10	KABUPATEN BIMA	9
	Jumlah	240

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, 2021

Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB Tahun 2021 berlaku 1 Januari 2021 s.d 31 Desember 2021, ditetapkan berdasar Surat Keputusan Gubernur NTB No. 561-772 tahun 2020, tanggal 27 Oktober 2020. Sebelum ditetapkan, telah berlangsung sidang untuk merumuskan dan membahas usulan Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB yang melibatkan unsur Dewan Pengupahan Provinsi NTB, yaitu: unsur APINDO, Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serta unsur Pemerintah. Upah Minimum Provinsi untuk tahun 2021 telah ditetapkan sebesar Rp.2.183.000,-, jumlah ini sama dengan tahun 2020 karena memperhatikan banyaknya perusahaan yang terdampak akibat pandemic covid-19

Gambar 2- 38 Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTBTahun 2021



Sumber: BPS NTB, BRS Agustus 2021

Dalam memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada para pekerja, pemerintah membentuk BPJS Ketenagakerjaan. Pemberi pekerjaan wajib untuk mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Untuk manfaatnya, dapat dinikmati baik saat masih bekerja ataupun saat purna kerja. Manfaat BPJS Ketenagakerjaan untuk karyawan terbagi dalam empat program yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua dan jaminan kematian. Manfaat-manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan dapat dinikmati pekerja Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri. Sampai dengan tahun 2021 jumlah pekerja yang terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 266.508 orang terdiri dari pekerja formal 229.836 orang dan pekerja informal sebanyak 36.672 orang.

Tabel 2- 101 Jumlah Tenaga Kerja Di NTB Yang Terdaftar Sebagai Anggota BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2021

No.	Tenaga Kerja	Peserta Aktif	Jumlah tenaga Kerja	%
1	Formal	229.836	588.367	39,06
	- Penerima upah	84.927		
	- Non ASN	38.724		
	- PMI	4.013		
	- Jasa Konstruksi	102.172		
2	Informal	36.672	1.892.440	
	- Bukan Penerima upah	36.672	1.892.440	1,94
	TOTAL >>>	266.508	2.480.807	10,74

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Tahun 2021

Pada tahun 2021 sebanyak 1.027 perusahaan yang sudah menerapkan norma ketenagakerjaan dan norma K3 baik itu di perusahaan besar, menengah dan kecil dan sebanyak 3.683 perusahaan yang sudah melakukan wajib lapor ketenagakerjaan. Pengawasan ketenagakerjaan merupakan salah satu cara untuk melaksanakan dan memastikan pelaksanaan peraturan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai peraturan atau hukum yang berlaku.

Tabel 2- 102 Perusahaan Yang Sudah Melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Tahun 2021

Provinsi/Kabupaten/ Kota	Jumlah Perusahaan Wajib Lapor	Jumlah Tenaga Kerja			Klasifikasi Perusahaan				
		Pria	Wanita	Jumlah	Besar	Menengah	Kecil	Mikro	Jumlah
Kota Mataram	1.138	16.200	7.987	24.187	41	159	153	785	1.138
Kota Bima	269	946	576	1.522	4	15	22	228	269
Sumbawa Barat	96	4.153	303	4.456	6	14	11	65	96
Sumbawa	485	1.771	342	2.113	2	36	49	398	485
Lombok Utara	334	2.927	1.080	4.007	3	68	82	181	334
Lombok Timur	245	2.287	587	2.874	7	32	39	167	245
Lombok Tengah	459	4.453	1.392	5.845	7	70	87	295	459
Lombok Barat	518	3.323	979	4.302	9	52	61	396	518
Dompu	92	888	112	1.000	1	-	15	76	92
Bima	47	221	46	267		6	5	36	47
Jumlah	3.683	37.169	13.404	50.573	80	452	524	2.627	3.683

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Tahun 2021

Peningkatan pelayanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di perusahaan merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja/penyakit akibat kelalaian kerja yang mengakibatkan menurunnya produktivitas kerja. Di tahun 2021, sebanyak 415 perusahaan yang sudah melaksanakan pengujian K3 dengan rincian pesawat uap 17 perusahaan, bejana tekan 42 perusahaan, kesehatan kerja 57 perusahaan dan lingkungan kerja 93 perusahaan.

Tabel 2- 103 Jumlah dan Jenis Pengujian K3 di Perusahaan Tahun 2021

Kabupaten / Kota	Jenis Pengujian					Jumlah
	Pesawat Uap	Bejana Tekanan	Pencegah Kebakaran	Kesehatan Kerja	Lingkungan Kerja	
Kabupaten Bima	1	1	12	2	5	19
Kabupaten Dompu	1	5	13	4	4	27
Kabupaten Lombok Barat	4	4	20	4	14	46
Kabupaten Lombok Tengah	3	6	22	5	8	44
Kabupaten Lombok Timur	1	2	21	2	9	35
Kabupaten Lombok Utara	2	7	15	12	6	42
Kabupaten Sumbawa	3	5	15	5	17	37
Kabupaten Sumbawa Barat	1	6	17	6	5	34
Kota Bima	0	2	11	2	5	20
Kota Mataram	1	4	60	15	20	100
Total	17	42	206	57	93	415

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Tahun 2021

Pada tahun 2021, terjadi sebanyak 19 kasus kecelakaan kerja dengan jumlah korban kecekaan (ringan) 16 kasus, cacat 2 kasus dan meninggal 1 kasus.

Tabel 2- 104 Kecelakaan Kerja Tahun 2021

Kab/Kota	Jumlah Kecelakaan	Jumlah Korban			
		Kecelakaan	cacat	Meninggal	Jumlah
Kab Bima	0	0	0	0	0
Kab Dompu	1	0	1	0	1
Kab Lobar	3	3	0	0	3
Kab Loteng	2	2	0	0	2
Kab Lotim	0	0	0	0	0
Kab Lombok Utara	6	5	1	0	6
Kab Sumbawa	1	1	0	0	1
Kab Sumbawa Barat	0	0	0	0	0
Kota Bima	0	0	0	0	0
Kota Mataram	6	5	0	1	6

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Tahun 2021

Pembinaan Lingkungan Sosial dan Pengujian Kesehatan Kerja. Telah dilaksanakan terhadap 400 orang tenaga kerja UMKM/petani tembakau di Kabupaten Lombok Timur meliputi Pemeriksaan Fisik, Pemeriksaan Gizi Kerja, Pemeriksaan Kelelahan Kerja, Pemeriksaan Urine dan Darah serta Pengujian Parameter Debu di 9 titik lingkungan kerja. Kegiatan ini berjalan dengan baik, lancar dan sesuai persetujuan Satgas Covid-19 di masing-masing wilayah. Tenaga kerja sangat antusias untuk mengikuti kegiatan ini dan sangat berharap akan diadakan kegiatan-kegiatan lainnya yang mendukung mereka dalam meningkatkan produktivitas kerja pada tahun-tahun mendatang.

2. Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pada tahun 2021, target dan capaian kinerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2- 105 Capaian Indikator Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019-2021

No	Indikator (satuan)	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (poin)	91,08	90,40	90,43	90,45	90,46	90,50
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (poin)	60,43	51,91	57,81	51,96	59,81	52,01*
3	Persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan (%)	18,60	26,50	19,27	26,87	19,94	27,24*
4	Cakupan kabupaten/kota yang mendapatkan predikat kabupaten/kota layak anak (%)	40,0	40,0	40,0	40,0	60	50
5	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan (%)	56,74	100	62,41	100	68,15	100

Sumber: DP3AP2KB Provinsi NTB, 2021

* Angka Sementara

Pada tahun 2019, angka IPG NTB mencapai 90,40, meningkat menjadi 90,45 pada tahun 2020 sedangkan pada tahun 2021 diperkirakan meningkat menjadi 90,50. Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa pembangunan perempuan hampir sama pembangunan laki-laki di Provinsi NTB.

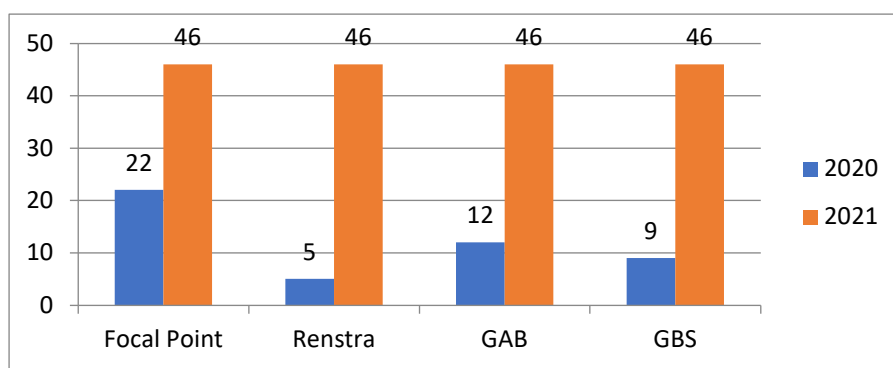
Angka IDG Provinsi NTB pada tahun 2019 sebesar 51,91 dan meningkat menjadi 51,96 pada tahun 2020 dan diperkirakan akan meningkat menjadi 52,01 pada tahun 2021. Bila dibandingkan dengan Nilai IDG nasional yang telah mencapai 75,57, maka pemberdayaan gender di Provinsi NTB jauh dibawah rata-rata nasional. Rendahnya IDG Provinsi NTB dipengaruhi oleh rendahnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan yang mencakup keterlibatan perempuan di parlemen yang hanya sebesar 1,56%, perempuan sebagai tenaga profesional sebesar 45,95%, serta sumbangan pendapatan perempuan dalam perekonomian keluarga sebesar 33,11%. Sedangkan Tingkat Proporsi perempuan yang berada di posisi manajerial di Provinsi NTB mencapai 32,45%.

Sementara itu, capaian indikator cakupan kabupaten/kota yang mendapatkan predikat kabupaten/kota layak anak sampai dengan tahun 2021 mencapai 50 persen (5 Kabupaten/Kota), sedangkan cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan tahun 2021 sebesar 100 persen, melampaui target 2021 (68,15%), hal ini disebabkan karena jumlah laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak melampaui target dan semua laporan tersebut telah tertangani.

Untuk mendorong kesetaraan gender dan peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, terdapat beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 yaitu mendorong penerapan Pengarusutamaan gender (PUG) yang mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan

pembangunan. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) direfleksikan dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan dan penggaran yang responsif gender (PPRG). Sampai dengan tahun 2021, persentase perangkat daerah di provinsi NTB yang telah menerapkan PPRG mencapai 100 persen atau melampaui target sebesar 39,13 persen, serta mendorong tersedianya rencana PPRG di setiap perangkat daerah Provinsi dan Dinas Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten/Kota.

Gambar 2- 39 Penerapan PPRG di OPD lingkup Pemprov NTB tahun 2020 - 2021



Sumber: DP3AP2KB Provinsi NTB, 2021

Dalam upaya mendorong peningkatan perlindungan perempuan dan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB memberikan advokasi dan memfasilitasi pemerintah Kabupaten/Kota se provinsi NTB untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), dimana sampai tahun 2021 telah terbentuk 5 Kabupaten/Kota layak anak di NTB.

Tabel 2- 106 Perkembangan Capaian dan Target predikat KLA Tahun 2017 - 2023

No	Kab / Kota	Pencapaian				Target		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Mataram	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya		
2	L o b a r			Pratama	Pratama	Madya		
3	L o t e n g						Pratama	
4	L o t i m						Pratama	
5	K L U							Pratama
6	K S B							Pratama
7	Sumbawa						Pratama	
8	D o m p u			Pratama	Pratama	Madya		
9	Kota Bima					Pratama		
10	Kab. Bima			Pratama	Pratama	Pratama		

Sumber: DP3AP2KB Provinsi NTB, 2021

Capaian indikator cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan tahun 2021 adalah 100 persen dengan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan sebanyak 1060 kasus. Jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak tahun 2021 sedikit mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebanyak 845 kasus. Adapun perkembangan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di NTB dengan perincian sebagai berikut:

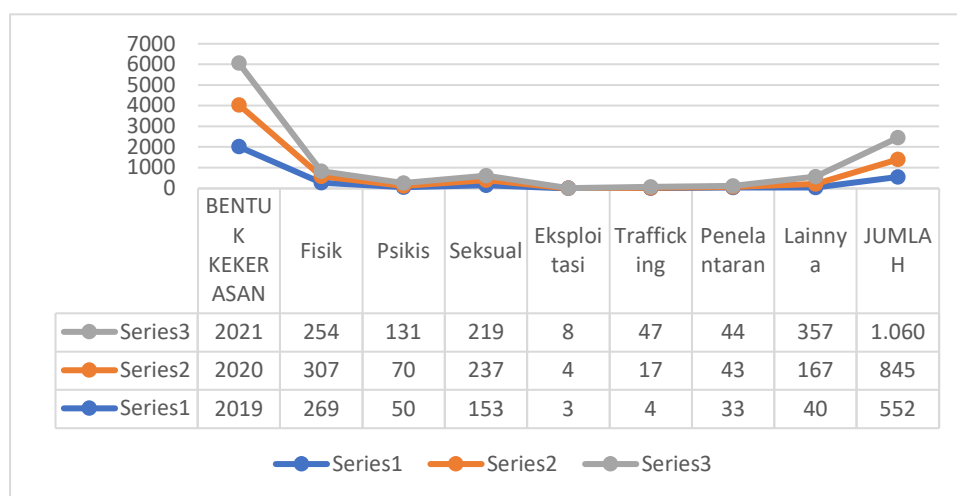
Tabel 2- 107 Data Kasus Kekerasan Perempuan Dewasa Dan Anak Provinsi NTB Tahun 2019 -2021

NO	DATA KASUS	2019	2020	2021
1	Perempuan Dewasa	258	363	462
2	Anak	294	482	598
	JUMLAH	552	845	1.060

Sumber: DP3AP2KB Provinsi NTB, 2021

Data kekerasan berdasarkan bentuk kekerasan yang di alami korban tahun 2019-2021 adalah sebagai berikut:

Gambar 2- 40 Kekerasan berdasarkan bentuk kekerasan yang di alami korban Tahun 2019-2021

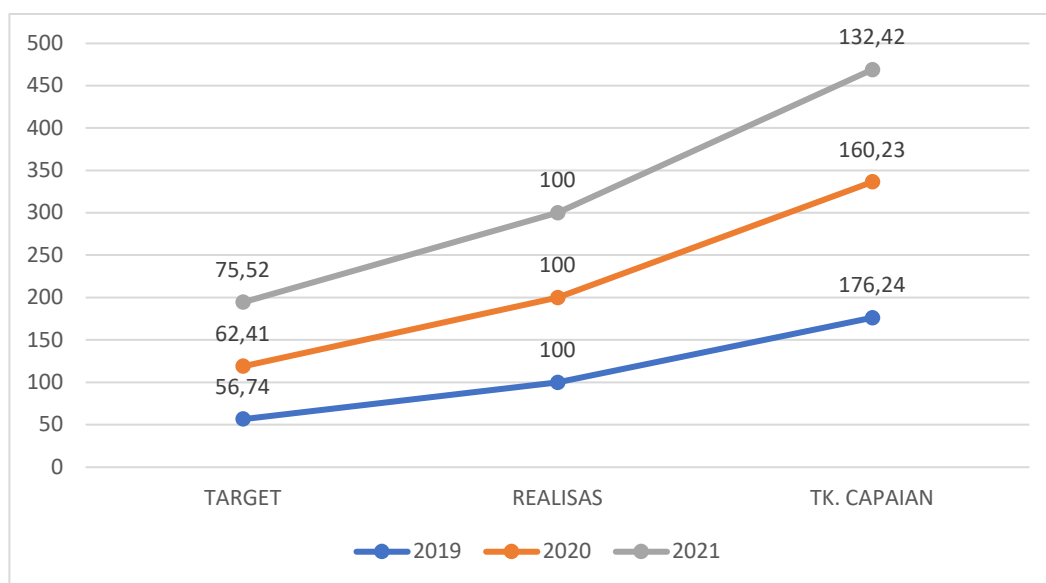


Sumber: DP3AP2KB Provinsi NTB, 2021

Dari grafik diatas, terlihat bahwa sepanjang 2 (dua) tahun terakhir ada kecenderungan peningkatan yang signifikan. Kasus kekerasan psikis, trafficking dan kekerasan lainnya mengalami peningkatan yg signifikan, hal ini terjadi karena pengaruh media sosial dan polah asuh dalam keluarga yang lemah, namun semua kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan dapat tertangani.

Cakupan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2019-2021 dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2- 41 Cakupan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak Tahun 2019-2021



Sumber: DP3AP2KB Provinsi NTB, 2021

Dengan dukungan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) yang telah dibentuk pada tahun 2019 melalui Peraturan Gubernur NTB Nomor 90 tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana teknis Dinas Lingkup Provinsi NTB, yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang dirujuk dari kabupaten/kota. Selain itu, telah dilakukan fasilitasi dan pendampingan pendirian UPTD dan shalter/rumah aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten 9 Kabupaten/Kota kecuali Kota Mataram yang belum memiliki. Hal tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah Provinsi NTB dalam upaya mencegah, menangani dan menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk menurunkan jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak telah dilakukan koordinasi dengan Kab/Kota, Aparat Penegak Hukum, perangkat daerah terkait, UPTPPA, Desa/kelurahan, lembaga swadaya masyarakat dan pihak lainnya.

3. Bidang Pangan

Situasi konsumsi pangan penduduk diukur dari kondisi kecukupan konsumsi energi dan kecukupan konsumsi protein. Situasi Kecukupan Konsumsi Pangan Penduduk Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2- 108 Situasi Kecukupan Konsumsi Energi dan Protein Penduduk NTB Tahun 2021

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan (gram/ kap/ hari)	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)						
			Energi (kkal/kap/ hari)	% AKE	Protein (Gram)	% AKP	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Riil
1.	Padi-padian	392,2	1,578.7	73,4	36,5	64,0	32,3	36,7	25,0
2.	Umbi-umbian	34,7	41.7	1,9	0,4	0,6	0,9	1,0	1,0

3.	Pangan Hewani	127,7	273.2	12,7	23,8	41,7	22,4	25,4	24,0
4.	Minyak dan Lemak	23,3	208.6	9,7	0,0	0,1	4,3	4,9	4,9
5.	Buah/biji Berminyak	3,7	20.0	0,9	0,2	0,4	0,4	0,5	0,5
6.	Kacang-Kacangan	22,9	63.1	2,9	5,9	10,4	5,2	5,9	5,9
7.	Gula	17,0	64.2	3,0	0,1	0,1	1,3	1,5	1,5
8.	Sayur dan buah	276,9	119.1	5,5	5,0	8,8	24,4	27,7	27,7
9.	Lain-Lain	149,3	73.3	3,4	2,1	3,7	-	-	-
Jumlah			2.441,9	113,6	74	129,8	91,1	103,5	90,4
Standar Konsumsi			2.150	100					
Proporsi (%) protein					57	100			

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2021

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa Konsumsi energi penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021 adalah sebesar 2.441,9 kkal/kap/hari atau 113,6% lebih tinggi dari Angka Kecukupan Energi (AKE) yang dianjurkan sebesar 2.150 kkal/kap/hari. Jika dibandingkan angka ketersediaan energi berdasarkan analisis NBM tahun 2020 yaitu 4.779 kkal/kap/hari, maka ketersediaan energi untuk dikonsumsi lebih besar 2337,1 kkal/kap/hari (48,9 %) dari total energi yang tersedia.

Sedangkan Konsumsi protein penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021 adalah sebesar 74 gram/kap/hari atau 129,8% lebih tinggi dari Angka Kecukupan Protein (AKP) yang dianjurkan yaitu sebesar 57 gram/kap/hari. Jika dibandingkan antara protein yang tersedia dari analisis NBM yaitu 175,741 gram/kap/hari, maka ketersediaan protein untuk dikonsumsi penduduk Provinsi NTB tahun 2021 lebih besar 101,741 gram/kap/hari (57,89 %) dari total protein yang tersedia.

Perkembangan skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Penduduk NTB dari tahun 2019 s.d 2021 dapat dilihat pada Grafik dan tabel berikut:

Gambar 2- 42 Target dan Capaian Skor PPH Konsumsi Tahun 2019-2023



Sedangkan perkembangan kualitas konsumsi pangan penduduk Nusa Tenggara Barat berdasarkan kelompok bahan pangan dari tahun 2019 s.d 2021 dapat dilihat pada Grafik dan tabel berikut:

Tabel 2- 109 Perkembangan Ketersediaan Energi dan Protein di Nusa Tenggara Barat Tahun 2016-2020

No.	Kelompok Pangan	Konsumsi Ideal (gr/kap/hari)	Konsumsi Aktual (gr/kap/hari)			Skor PPH		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Padi-padian	275	387.7	397.6	392,2	25.0	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	100	29.5	31.2	34,7	0.8	0,9	1,0
3	Pangan Hewani	150	110.4	124.9	127,7	18.7	23,8	24,0
4	Minyak dan Lemak	20	22.2	22.9	23,3	4.6	4,8	4,9
5	Buah/biji berminyak	10	3.2	3.4	3,7	0.4	0,4	0,5
6	Kacang-kacangan	35	26.5	22.6	22,9	7.0	5,9	5,9
7	Gula	30	16.8	15.9	17,0	1.5	1,4	1,5
8	Sayuran dan buah	250	275.5	280.4	276,9	27.4	29,1	27,7
9	Lain-lain	0	120.3	149.7	149,3	0.0	-	-
	Jumlah					85.3	91,3	90,4

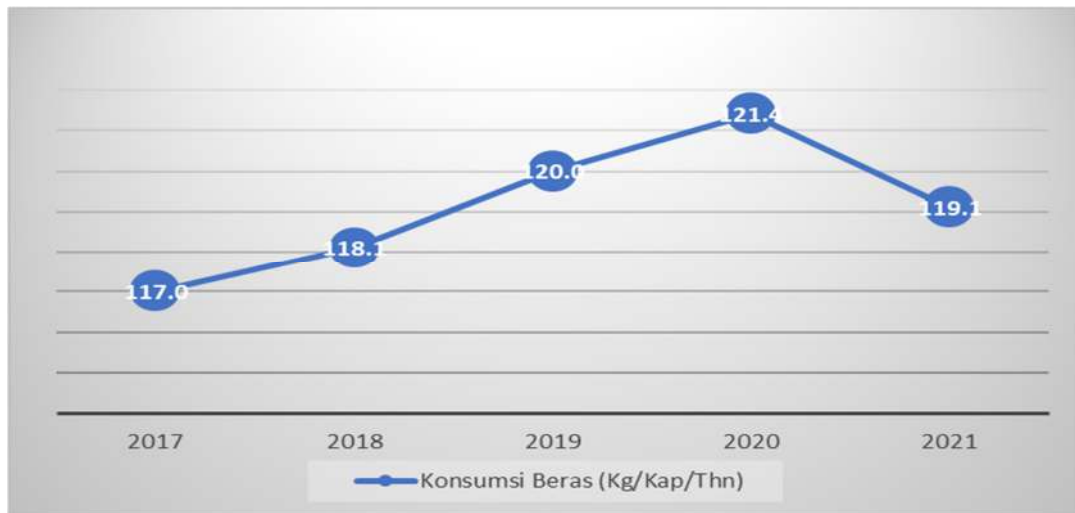
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2021

Berdasarkan grafik dan tabel di atas terlihat bahwa skor PPH Konsumsi Penduduk NTB Tahun 2021 sebesar 90,4 point mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 91,3 point, hal ini disebabkan karena penurunan konsumsi kelompok pangan sayur dan buah, sedangkan konsumsi kelompok pangan yang lain ada yang mengalami peningkatan seperti kelompok pangan umbi-umbian, minyak dan lemak, buah/biji berminyak dan gula.

Meskipun Skor PPH Konsumsi Tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan skor PPH Konsumsi tahun 2020 tetapi capaian ini masih melebihi target yang ditetapkan bahkan masih melampaui target akhir RPJMD pada tahun 2023 sebesar 87,20 Point. Namun capaian ini masih lebih rendah dari skor ideal yang dipersyaratkan sebesar 100 point.

Permasalahan yang masih dihadapi adalah tingginya konsumsi padi-padian khususnya beras yang dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain : a) perilaku masyarakat yang merasa belum makan jika belum makan nasi; b) masih rendahnya daya beli masyarakat; c) rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pola pangan beragam dan bergizi seimbang dan masih adanya keterbatasan aksesibilitas terhadap pangan; d) kurang berkembangnya teknologi untuk memproduksi maupun mengolah bahan pangan terutama pangan lokal non beras dan non terigu. Tingkat konsumsi beras penduduk NTB Tahun 2021 sebesar 119,1 Kg/Kap/Tahun. Capaian ini masih sangat tinggi jika dibandingkan dengan standar ideal yang dipersyaratkan sebesar 100,4 Kg/Kap/Tahun. Namun capaian tahun 2021 ini mengalami penurunan dibandingkan dengan konsumsi beras tahun 2020 sebesar 121,4 Kg/Kap/Tahun. Perkembangan tingkat konsumsi beras penduduk NTB Tahun 2017 s.d 2021 dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2- 43 Perkembangan Konsumsi Beras Penduduk NTB Periode Tahun 2017-2021

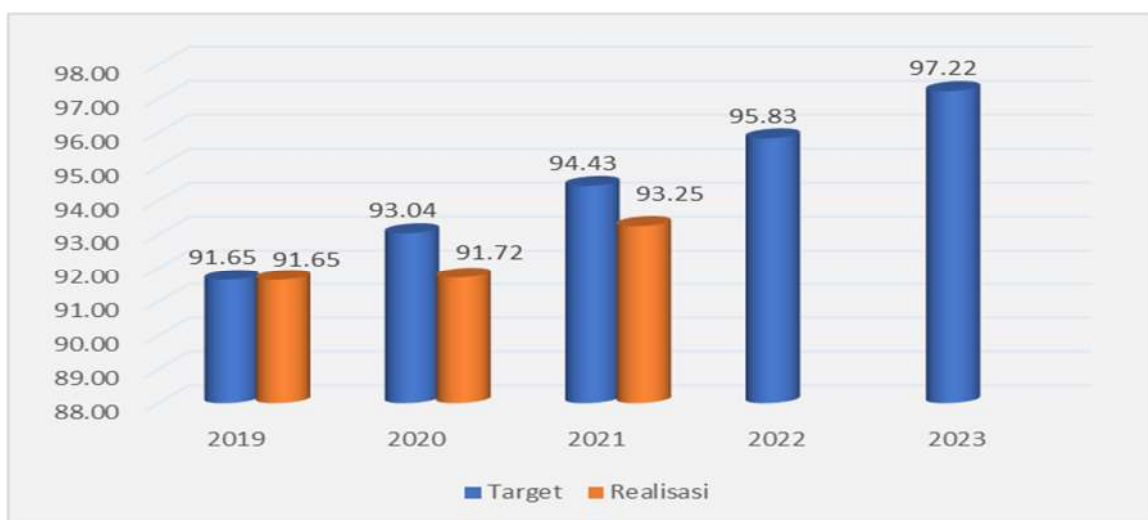


Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2021

Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan adalah alat ukur yang dijadikan sebagai Indikator pencapaian Tujuan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu “terwujudnya ketersediaan pangan yang beragam”. Indikator ini menggambarkan keberagaman ketersediaan pangan yang dinilai dari kecukupan gizinya dalam bentuk energi, protein dan lemak. Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 sebesar 93,25 Point atau 95,83% dari target sebesar 94,43 point. Capaian ini termasuk dalam kriteria Berhasil walaupun masih di bawah target yang ditetapkan.

Perkembangan Skor PPH Ketersediaan berdasarkan target dan capaian Renstra Periode tahun 2019 s.d 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 2- 44 Target dan Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan NTB Tahun 2019 s.d 2023



Jika dibandingkan dengan skor PPH Ketersediaan tahun 2020, maka capaian tahun 2021 sebesar 93,25 point mengalami peningkatan sebesar 1,67% dari capaian tahun 2020 sebesar 91,72 point. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan skor pada klompok bahan pangan seperti umbi-umbian, gula, serta sayur dan buah. Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa penyebab tidak tercapainya PPH Ketersediaan sesuai dengan target yang ditetapkan karena rendahnya skor aktual pada kelompok bahan pangan: 1) umbi-umbian capaian hanya 1,1 point dari 2,5 point skor maksimal yang ditetapkan; 2) minyak dan lemak capaian hanya 4,4 point dari 5,0 point skor maksimal yang ditetapkan; 3) Sayuran dan buah dengan capaian 25,2 point dari 30 point skor maksimal yang ditetapkan.

Jika dilihat trend perkembangan selama periode 5 (lima) tahun dari tahun 2017 s.d 2021 maka skor PPH ketersediaan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan trend peningkatan sebesar 2,90 %. Perkembangan Capaian Skor Perkembangan PPH Ketersediaan menurut kelompok bahan pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 sd 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2- 110 Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Provinsi NTB Tahun 2017 s.d 2021

No	Kelompok Bahan Pangan	Skor Maks	PPH Ketersediaan					Rata-Rata Pertumbuhan
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Padi-padian	25,0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	0.00
2	Umbi-umbian	2,5	0.8	0.7	0.6	1.0	1.1	11.89
3	Pangan Hewani	24,0	24.0	24.0	24	24.0	24.0	0.00
4	Minyak dan Lemak	5,0	1.3	1.3	4.6	4.7	4.4	62.67
5	Buah/biji berminyak	1,0	1.0	1.0	1	1.0	1.0	0.00
6	Kacang-kacangan	10,0	10.0	10.0	10	10.0	10.0	0.00
7	Gula	2,5	0.7	0.9	0.8	1.2	2.5	43.95
8	Sayuran dan buah	30,0	20.5	27.0	25.6	24.7	25.2	6.29
9	Lain-lain	-	-	-	-	-	-	0.00
	Jumlah	100,0	83.3	89.9	91.65	91.72	93.25	2.90

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2021

Rasio ketersediaan terhadap kebutuhan pangan merupakan alat ukur untuk mengetahui ketersediaan pangan strategis. Untuk menghitung rasio ketersediaan terhadap kebutuhan pangan, dibutuhkan data-data seperti produksi, benih, pakan, tercecer, penggunaan industri non pangan, ekspor, impor, jumlah penduduk, konsumsi rumah tangga dan konsumsi non rumah tangga. Berdasarkan hasil penghitungan, rasio ketersediaan terhadap kebutuhan komoditas pangan strategis tahun 2021 di Nusa Tenggara Barat mencapai 457,78% kategori sangat berhasil dan melebihi target tahun 2021 sebesar 100%. Perkembangan rasio ketersediaan

terhadap kebutuhan komoditas pangan strategis tahun 2017 s.d 2021 di Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2- 111 Perkembangan Rasio Ketersediaan terhadap Kebutuhan Pangan Strategis Provinsi NTB Tahun 2017-2021

No	Jenis Komoditas	2017			2018			2019			2020			2021 (Kondisi Desember 21)		
		Ketersediaan (Ton)	Kebutuhan (Ton)	Rasio	Ketersediaan (Ton)	Kebutuhan (Ton)	Rasio	Ketersediaan (Ton)	Kebutuhan (Ton)	Rasio	Ketersediaan (Ton)	Kebutuhan (Ton)	Rasio	Ketersediaan (Ton)	Kebutuhan (Ton)	Rasio
1	Beras	1,358,760	588,009	2.31	1,471,418	593,321	2.48	1,409,105	599,559	2.35	1,245,619	615,075	2.03	822,184	642,804	1.28
2	Jagung	1,918,367	7,896	242.95	687,200	7,977	86.15	851,386	1,259,243	0.68	1,225,130	418,375	2.93	280,268	21,059	13.31
3	Daging Sapi	15,806	8,175	1.93	26,483	10,525	2.52	27,729	19,544	1.42	20,628	19,990	1.03	22,295	20,762	1.07
4	Daging Ayam	28,582	12,811	2.23	37,793	17,333	2.18	47,057	24,603	1.91	65,352	16,607	3.94	67,306	19,589	3.44
5	Telur Ayam	78,717	40,728	1.93	53,341	40,728	1.31	30,256	29,349	1.03	71,124	27,678	2.57	73,256	29,232	2.51
6	Minyak Goreng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,782	2,932	3.34	9,609	3,497	2.75
7	Gula Pasir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,612	35,184	1.89	9,794	2,807	3.49
8	Cabe Rawit	173,634	146,921	1.18	71,580	11,011	6.50	155,623	15,230	10.22	95,308	11,635	8.19	59,375	12,245	4.85
9	Cabe Keriting	33,897	665	50.97	11,078	2,127	5.21	17,517	2,132	8.22	20,701	3,075	6.73	15,981	3,508	4.55
10	Bawang Merah	197,713	12,400	15.94	191,161	13,684	13.97	169,817	18,554	9.15	166,909	17,008	9.81	203,398	19,037	10.68
11	Bawang Putih	-	-	-	11,197	7,955	1.41	27,834	7,615	3.66	22,493	8,801	2.56	22,493	9,266	2.43
				39.93			13.52			3.51			4.09			4.58

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2021

Tingkat ketersediaan pangan selain dihitung dari sisi produksi, juga perlu diketahui tingkat ketersediaan pangan dalam bentuk energi. Ketersediaan energi berdasarkan hasil perhitungan Neraca Bahan Makanan (NBM) Tahun 2020, secara umum tingkat ketersediaan energi untuk konsumsi masyarakat Nusa Tenggara Barat adalah sebesar 4.778,99 kkal/kapita/hari atau 199,13% lebih tinggi dari Angka Kecukupan Gizi/Energi yang dianjurkan yaitu sebesar 2.400 Kkal/kapita/hari. Ketersediaan kalori menurut sumbernya didominasi oleh bahan pangan yang berasal dari nabati. Besarnya sumbangan kalori yang bersumber dari nabati terhadap penyediaan energi sebesar 3.139,393 Kalori atau 66 % dan sisanya 1.639,517 Kalori atau 34 % bersumber dari pangan hewani.

Tabel 2- 112 Perkembangan Ketersediaan Energi dan Protein di Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun					Rata-rata	Persen Pertumbuhan
		2017	2018	2019	2020	2021		
1	Ketersediaan energi (kkal/kapita/hari)	5,310.97	7,116.96	7,281.05	6,108.44	4,779.47	6,119.38	-0.39
2	Tingkat Ketersediaan Energi (% dari 2.400 kkal/kap/hari)	221.29	296.54	303.38	254.52	199.14	254.97	
3	Ketersediaan protein (gr/kapita/hari)	137.52	173.73	171.62	140.76	175.745	159.88	8.00
4	Tingkat ketersediaan protein (% dari 63 gr/kapita/hari)	218.28	275.76	272.41	223.42	278.961	253.77	

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2021

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa, terlihat bahwa pada Tahun 2021 terjadi penurunan ketersediaan energi untuk dikonsumsi masyarakat sebesar 21,76 %, yaitu dari 6.108,440 KKal/Kap/Hari pada tahun 2020 menjadi 4.778,991 KKal/Kap/Hari pada tahun 2021. Bila dilihat secara keseluruhan, total energi dari nabati dan hewani, terjadi penurunan pada tahun 2021. Penurunan energi yang bersumber dari kelompok nabati sebesar 27,59% yaitu dari 4.335,493 KKal/Kap/Hari pada Tahun 2020 menjadi 3.139.393 KKal/Kap/Hari pada Tahun 2021.

Sedangkan Energi yang bersumber dari Hewani mengalami penurunan sebesar 7,53%, yaitu dari 1.772,946 KKal/Kap/Hari pada Tahun 2020 menjadi 1.639,517 KKal/Kap/Hari pada Tahun 2021. Dibandingkan dengan Angka Kecukupan Energi (AKE) per orang per hari yang dianjurkan dari hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi yang diadakan pada Tahun 2018 yang menetapkan AKE sebesar 2.400 Kalori, maka persen Tingkat Ketersediaan Energi Provinsi NTB tahun 2021 sebesar 199,14 %.

Kontribusi kalori terbesar bersumber dari kelompok bahan makanan padi-padian sebesar 2.402,564 Kalori perkapita per hari (50,27%), ikan sebesar 1.539,159 Kalori perkapita per hari (32,21%), minyak dan lemak sebesar 209,184 Kalori perkapita per hari (4,38%), buah biji berminyak sebesar 181,347 kalori per kapita per hari (3,79%), gula sebesar 171,942 kalori per kapita per hari (3,60%) sayur-sayuran sebesar 77,710 kalori per kapita per hari (1,62%), buah-buahan sebesar 65,104 Kalori perkapita per hari (1,36%), telur sebesar 48,320 kalori per kapita per hari (1,01%), daging sebesar 47,309 Kalori perkapita per hari (0,99%), makanan berpati sebesar 31,542 kalori per kapita per hari (0,66%), dan susu sebesar 0,385 kalori per kapita per hari (0,008%).

Berbagai ikhtiar kegiatan pada tahun 2021 telah dilakukan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka mendukung peningkatan Tingkat ketersediaan Energi Masyarakat NTB adalah dengan memberikan hasil kajian berupa penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM), Penyusunan Prognosa Ketersediaan Pangan Strategis dan pemantauan ketersediaan pangan di pinggiran.

4. Bidang Pertanian

Penyelenggaraan sub bidang urusan pertanian dilaksanakan secara sinergis antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun capaian yang telah dilakukan di tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 2- 113 Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pertanian Tahun 2021

NO	INDIKATOR	TAHUN 2021	
		TARGET	REALISASI
1	Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi	100%	100%

Sumber : Biro Pemerintahan & Otda Setda Provinsi NTB, 2021

Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanah terindikasi terlantar sesuai jenis Hak Guna Usaha (HGU) di Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Barat seluas 166.027.457 Ha. Semuanya telah masuk dalam kegiatan penertiban dan sudah diberi peringatan. Sebagian diusulkan menjadi

tanah bermasalah, berlokasi di Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat seluas 1.607.377 Ha, termasuk di dalamnya badan usaha yang diberi kesempatan, dan ada yang sudah keluar dari database dapat dipergunakan oleh negara. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2- 114 Rekapitulasi Tanah Terindikasi Terlantar Berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU) s.d Tahun 2021

NO.	KABUPATEN	NAMA PERUSAHAAN	JENIS HAK NO.TGL	LOKASI DESA, KECAMATAN	LUAS TANAH (Ha)	PERUNTUKAN	PENGUNAAN TANAH SAAT INI	LUAS TANAH TERINDIKASI TERLANTAR	KET
1.	Lombok Tengah	PT. Trisno Kenangan	a. Konversi Hak erfacth No.333/1966 b. 14 Des 1966 c. HGU	a. Batukliang b. Lantan dan Karang Sidemen	355,1000	Perkebunan	Bangunan, Kolam Renang, Kebun Kopi, Tanaman Berkayu Keras	355,100	Kegiatan Penertiban 2013
2.	Lombok Timur	PT.Kosambi factory Lac Lien darto Wirawan Jl.Kerta Jaya No. 79A Surabaya	a. 31/HGU/BPN/1990 b. 20 Desember 1990 c. HGU	a.Sembalun b.Sajang	99,4160	Perkebunan Kosambi, dan Penuluran Kutu Lac	Hutan, Rumput, campur, Tambak udang	99,4160	Kegiatan Penertiban 2010, diusulkan sebagai TANAH TERLANTAR
		3.PT.Tanjung Kenanga Yahya Surya Buana,SE Jl.Panca Usaha No.1 Mataram	a. 80/HGU/DA/1988 b. 01 Januari 1988	a. Sambelia b. Belanting	38,5000	Perkebunan	Kebun, Pemukima, Tambak	38,5000	Kegiatan Penertiban 2013, pemberian PERINGATAN
		4.PT.Bumi Padak Goar	a. 540.3/01/1/HGU/62/2005 b. 13 Juli 2005 c. HGB	a.Sambelia b.Labu Pandan	85,1890	Tambak	Tambak Udang, Ladang	45,1890	Masuk dalam kegiatan Penertiban Tahun 2011, dengan keputusan diberi PERINGATAN
3.	Sumbawa Barat	1.PT.Hutan Mente Indonesia Surabaya	a.Pemecahan HGU 1 Senayan	a.Seteluk b.Senayan	1,9845	Perkebunan Jambu Merah	Ditanami Palawija oleh masyarakat sekitar	1,9845	
		2.PT Hutan Mente Indonesia Surabaya	a.HGU	a.Seteluk b.Senayan	93,4110	Perkebunan Jambu Merah	Ditanami Palawija oleh masyarakat sekita	93,4110	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2011, dengan keputusan diberi PERINGATAN
		3.PT Hutan Mente Indonesia Surabaya	a. 72/HGU/BPN/1994 b. 27 oktober 2000 c. HGU	a.Seteluk b.Senayan	156,0600	Perkebunan Jambu Merah	Ditanami Palawija oleh masyarakat sekitar	156,0600	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2011, dengan keputusan diberi PERINGATAN
		4.Pt.Sekar Abadi Jaya Surabaya	a. 540.3/01/1/01/HGU/62/2000 b. 16 oktober 2000 c. HGU	a.Seteluk b.Senayan	170,332	Tambak	Semak Belukar	170,332	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2011,dengan keputusan diberi PERINGATANI
		5.Pt.Sekar Abadi Jaya Surabaya	a.540.3/01/1/01/HGU/62/2000 b.5 Juli 2001 c.HGU	a.Seteluk b.Senayan	70,1410	Tambak	Semak Belukar	70,1410	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2011,dengan keputusan diberi PERINGATAN

NO.	KABUPATEN	NAMA PERUSAHAAN	JENIS HAK NO.TGL	LOKASI DESA, KECAMATAN	LUAS TANAH (Ha)	PERUNTUKAN	PENGUNAAN TANAH SAAT INI	LUAS TANAH TERINDIKASI TERLANTAR	KET
4.	Sumbawa	1.Pt.Alam Hijau Heny Firmansyah Desa Empang Bawah Kec.Empang Kab.Sumbawa	a.13/HGU/1987 b.15 oktober 1987 c.HGU	a.Empang b.Boal	650,0000	Tambak Udang	Bekas tambak, Tegalan, sawah, padak, usaha perikanan/ tambak udang	650,0000	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2011,dengan keputusan diberi PERINGATAN
		2.Pt.Multimina Mertasari kusnadi said Desa Rhee,Kec.Rhee,Kab.Sumbawa	a.07/HGU/02-BKPM/1989 b.24 oktober 1989 c.HGU	a.Rhee b.Rhee	79,0739	Tambak Udang	Bekas Tambak, semak belukar	79,0739	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2011,dengan keputusan diberi PERINGATAN
		3.PT.Peterta	a.30.a/HGU/DA/80 b.28 februari 1980 c.HGU	a.Lape-Lapok b.Lab.Kuris	1.885,0000	peternakan	Semak belukar, padang rumput	1.885,0000	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2011,dengan keputusan diberi PERINGATAN
		4.PT.MINA AQUA CULTURA Yala Agra Pratama Inc	a.01/HGU/02-BKPM/87 b.10 agustus 1987 c.HGU	a.Alas b.Gontar	98,0000	Tambak	Bekas Tambak	98,0000	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2011,dengan keputusan diberi PERINGATAN
		5.PT.Dinaco Widjaja Kusuma	a.01/HGU/02-BKPM/90 b.20-06-1990 c.HGU	a.Moyo Hilir b.Penyaring	32,8178		Tambak	32,8178	
		6.PT.Dani Tama Land	a.25/HGU/BPN/2004 b.04 juli 2004 c.HGU	a. Moyo Hilir b.Penyaring	276,9101	Perkebunan jeruk dan agrowisata	Perkebunan jeruk	100,9101	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2011,dengan keputusan diberi PERINGATAN
5.	Kab.Dompu	1.PT.BALI ANACARDIA Toriquillie Jl.Sebandaran Timur 383 Blok E Semarang telp.024-3547156;024-3547367	a.52/HGU/BPN/1997 b.27 juni 1997 c.HGU	a.pekat b.Doropeti	1650,9000	Perkebunan jambu merah	Perkebunan jambu mente, perkampungan , masjid, SD dan Semak/ rumput	1650,9000	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2010,dengan keputusan dialihkan haknya kepada PT.sukses Mantap Sejahtera sesuai surat kepala BPN RI tgl 27-12-2012 No.4684/14.3/XII/2012
		2.Pt.Bali Anacardia Toriquillie Jl.Sebandaran Timur 383 Blok E Semarang telp.024-3547156;024-3547367	a.52/HGU/BPN/1997 b.27 juni 1997 c.HGU	a.pekat b.Doropeti	3.889,5900	Perkebunan jambu merah	Perkebunan jambu mente, perkampungan , basecamp	3.889,5900	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2011,dgn keputusan dialihkan haknya kepada PT.sukses Mantap Sejahtera sesuai surat kepala BPN RI tgl 27-12-2012

NO.	KABUPATEN	NAMA PERUSAHAAN	JENIS HAK NO.TGL	LOKASI DESA, KECAMATAN	LUAS TANAH (Ha)	PERUNTUKAN	PENGUNAAN TANAH SAAT INI	LUAS TANAH TERINDIKASI TERLAMBAT	KET
									No.4684/14.3/XII/2012
		3.Pt.Tugu Vanila Jaya Edi Toet Hendratno,SH Jl.Pejaten Mas V-B 16 Jakarta	a.19/HGU/BPN/1999 b.01 Maret 1999 c.HGU	a.peat b.Doropeti	1.043,2400	Peternakan	Basecamp, pemagaran kandang, pemagaran hijau makanan ternak, semak rumput & sapi 150 ekor	388,5000	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2011,dengan keputusan diberi PERINGATAN
		4.PT.Lawata Permai H.idrus Usman,BSC Jl.Belimbing-Bima	a.06/HGU/BPN/1987 b.19/05/1987 c.HGU	a.peat b.Doropeti	200,0000	Peternakan	Semak rumput	200,0000	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2010
		5.PT.Asia Tunggal Inti M.Budiman Hasta Centre Blok 16 Lt.I Kav.9 Jl.S.Parman,Jakarta	a.05/HGU/1993 b.05 maret 1993 c.HGU a.540.3/03/1/03/52/62/1994 b.29 desember 1994 c.HGU	a.peat b.peat a.peat b.Tolokalo	999,6 143,18	Pengembalaan ternak sapi Pengembalaan ternak sapi	Kandang dan barak, bak air minum hewan dekat mata air, sapi 100 ekor dan semak/ rumput	999,6 143,18	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2011,dengan keputusan diberi PERINGATAN Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2011,dengan keputusan diberi PERINGATAN
		6.Pt.Putra Purna Yudha Jl.AI Inabah No.22 Pancoran Jakarta Selatan	a.11/HGU/BPN/1989 b.17 oktober 1989 c.HGU	a.Pekat b.Doropeti	200,0000	peternakan	Semak/ rumput	200,0000	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2010
6.	Kab.Bima	1.Pt.Sondi Bima Sakti Dr.Sanusi H.Ibrahim Jl.Angrek No.2 Kelapa Dua Kebun Jeruk Jak	a.540.3/02/1/62/1994 b.07 Juli 1994 c.HGU	a.Tawah b.Wera	112,0000	Peternakan sapi potong	Semak dan padang rumput	112,0000	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2011,dengan keputusan diberi PERINGATAN
		2.Pt.Sanggar Agro Karya Persada I Drs.H.Anas Moezakir,MBA Jl.Rajawali No. 11/5 kawasan Industri Pulogadung,Jakarta	a.60/HGU/BPN/1996 b.14 desember 1996 c.HGU	a.Sanggar b.Piong	598,8000	Peternakan sapi	Peternakan,rumah jaga dan satu kandang paksa		Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2011,dengan keputusan diberi PERINGATAN
		3.PT.SANGGAR AGRO KARYA PERSADA I Drs.H.Anas Moezakir,MBA Jl.Rajawali No. 11/5 kawasan Industri Pulogadung,Jakarta	a.22/hgu/bpn/1999 b.11 maret 1999 c.HGU	a.Sanggar b.Piong	3962,0000	perkebunan	Sudah tidak digunakan oleh pemegang hak, seluas 477 Ha telah dimanfaatkan oleh masyarakat 159 kk, sebagai lahan perkebunan mente, tegalan, serta pemukiman, fasilitas umum	3962,0000	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2011,dengan keputusan diberi PERINGATAN

NO.	KABUPATEN	NAMA PERUSAHAAN	JENIS HAK NO.TGL	LOKASI DESA, KECAMATAN	LUAS TANAH (Ha)	PERUNTUKAN	PENGUNAAN TANAH SAAT INI	LUAS TANAH TERINDIKASI TERLANTAR	KET
		4.PT.TERNAK LESTARI H.Jakariah H.Majid Jl.Tongkol,Pasar raya kota Bima	a.540.3/01/1/01/6 2/1994 b.19/04/1994 c.HGU	a.Wera b.Nunggi	100,0000	peternakan	Semak dan rumput	100,0000	Masuk dalam kegiatan penerbitan tahun 2011, dengan keputusan dibeberipri PERINGATAN
	Jumlah				169.912.457			166.027.457	

Biro Pemerintahan & Otda Setda Provinsi NTB, 2021

5. Bidang Lingkungan Hidup

Pelaksanaan urusan bidang lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan Misi ke-4 yaitu NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan urusan lingkungan hidup, Dinas LHK Provinsi NTB menetapkan sasaran strategis dan indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 2- 115 Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2019 s.d 2021

NO	INDIKATOR BIDANG URUSAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
	Lingkungan Hidup						
1	Indeks Kualitas Air	22,75	40,23	42,73	50,98	42,83	45,10
2	Indeks Kualitas Udara	88,45	87,4	87,5	88,63	87,53	88,52
2	Indeks Kualitas Air Laut	-	68,14	69,69	67,49	70,29	80,22
4	Neraca Pengelolaan Persampahan	41,71	41,71	55	44,82	70	49,02

Sumber : 1 sd 3 Website Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK (ppkl.menlhk.go.id)

3. Dinas LHK Provinsi NTB , 2021

Indeks kualitas air, udara, dan air laut pada tahun 2021 melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena sudah dilakukan proses edukasi dan sosialisasi dalam pengelolaan persampahan, adanya reward dan punishment dalam pengelolaan lingkungan dalam bentuk regulasi pengelolaan lingkungan. Indikator lainnya yang belum mencapai target ialah neraca pengelolaan sampah. Hal ini diakibatkan selama 2 (dua) tahun masa pandemi covid-19 alokasi penganggaran untuk pengelolaan persampahan mengalami penyesuaian untuk penanganan covid-19, sehingga dukungan untuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung persampahan sangat terbatas. Capaian indikator kinerja utama pada Dinas LHK Provinsi NTB dirincikan sebagai berikut.

a. Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2021 dihitung mempertimbangkan segmen hulu, tengah, dan hilir Daerah Aliran Sungai (DAS). Untuk mendapatkan data IKA, sampel diambil di beberapa sungai di wilayah NTB yaitu Tojang, Sari, Babak, Ancar,

Segara, Dodokan, Brang Rea, Brang Biji, Rabalaju, dan Padolo. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian terhadap sample air yang diambil. Data IKA NTB 2021 belum secara resmi dipublikasikan melalui buku IKLH seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2021, Kementerian LHK melalui Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sudah melakukan upaya percepatan rilis data melalui website resminya yaitu sebesar 45,10 poin.

b. Indeks Kualitas Air Laut

Dengan ditetapkannya Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) sebagai pembentuk nilai IKLH, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mula melaksanakan pemantauan kualitas air laut sejak tahun 2019 dan hasilnya dijadikan sebagai baseline data dalam perhitungan IKAL. Untuk pendampingan pemantauan kualitas air laut tahun 2021, dilakukan 2 (dua) kali sampling yang dilakukan pada Bulan Juli. Dinas LHK NTB dilibatkan dalam hal pendampingan sampling yang dilakukan pada 15 titik lokasi.

Adapun lokasi titik pantau yang dimaksud antara lain :

1. Belakang Pelabuhan Ampenan Lama (Belakang Pertamina TBBM Ampenan
2. Area Sekitar Muara Meninting
3. Area Batu Layar (Belakang Hotel Jayakarta)
4. Area Belakang Pura Batu Bolong
5. Area Belakang Sheraton Hotel - Rejavilla Resort
6. Belakang Hotel Katamaran
7. Pantai Malimbu
8. Pemukiman Penduduk Teluk Awang
9. Muara Teluk Awang
10. Tambak Udang Kampung Bali.
11. Tambak Udang 2.
12. Pelabuhan Tano.
13. DAS Sungai Moyo 1.
14. DAS Sungai Moyo 2.
15. DAS Sungai Moyo 3.

Hasil uji lab kualitas air laut ini akan digunakan untuk menghitung IKAL (Indeks Kualitas Air Laut) yang selanjutnya juga secara komposit untuk menghitung nilai IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup). IKLH ini merupakan nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup sebagai indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah. Capaian nilai IKAL tahun 2021 adalah sebesar 80,22 (Kategori Baik) dari target 70,29.

c. Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas udara adalah parameter yang menunjukkan kondisi kualitas udara di sebuah tempat. Indeks ini dibuat untuk memudahkan masyarakat mengetahui

kondisi kualitas udara dengan cara yang sederhana dan satuan-satuan yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Pemantauan dilaksanakan menggunakan metode passive sampler pada 4 lokasi sampling yaitu Transportasi, Industri, Pemukiman dan Perkantoran dengan parameter yang diuji adalah SO₂ dan NO₂. Indeks kualitas udara NTB masuk dalam kategori “Baik” karena adanya upaya dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap beberapa pelaku usaha melalui kegiatan PROPER.

d. Persentase Penanganan Sampah dan Persentase Pengurangan Sampah

Capaian per Desember 2021 untuk penanganan sampah adalah sebesar 39,68% dan pengurangan sampah sebesar 9,34%. Angka tersebut belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD karena adanya beberapa kendala terkait minimnya sarpras pengangkutan sampah, reaktivasi TPS 3R, dan pembangunan serta pengembangan pusat-pusat pengolahan sampah skala desa, belum optimalnya pencatatan data pengurangan sampah di sebagian besar Kab/Kota dan masih banyaknya timbunan sampah illegal di sungai, pantai, hutan dll akibat rendahnya perhatian dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas LHK Provinsi NTB melalui implementasi 8 pilar zero waste, antara lain :

1. Membangun regulasi, berupa 10 perda pengelolaan sampah kab/kota, 1 perda pengelolaan sampah Provinsi NTB, 1 pergub, 5 surat edaran Gubernur, dan Peraturan Desa Pengelolaan Sampah
2. Penyediaan dan pengembangan sarpras, berupa 8 unit TPA dan 1 unit TPA Regional, 3 unit TPST dan 1 unit TPST Regional, 45 unit TPS3R dan 1 PDU, 24 unit BSF Mandiri, angkutan sampah desa, biopori, composter bag, biogas, dan sumur biopori
3. Revitalisasi gotong royong, melibatkan 11.437 peserta
4. Sosialisasi pilah olah sampah dari sumbernya, dilaksanakan sebanyak 108 kali sosialisasi dengan melibatkan 4.810 peserta
5. Diversifikasi usaha bank sampah, sudah terbentuk 483 bank sampah di NTB dan didorong agar ikut mengolah sampah organik
6. Edukasi dan kampanye, sebanyak 850 kali edukasi dan kampanye online dan offline dengan melibatkan 741.106 orang
7. Pelibatan para pihak, melalui perjanjian kerjasama dengan universitas, NGO, dan Komunitas, CSR BUMN, dan pelibatan UPT Kementerian terkait
8. Industrialisasi pengelolaan sampah, melalui penyediaan TPST RDF/SRF, Pyrolisis, Eco Brick/Block, Insinerator Limbah B3 Fasyankes, dan BSF

Tabel 2- 116 Capaian Kinerja Dan Indikator Nilai Indeks Kualitas Air Laut Tahun 2019-2021

No	INDIKATOR BIDANG URUSAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	LINGKUNGAN HIDUP						
1	Neraca Pengelolaan Persampahan	41,71	41,71	55	44,82	70	49,02

Sumber : Dinas LHK NTB, 2021

6. Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB, dengan indikator bidang urusan berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah Persentase Kepemilikan dokumen Kependudukan dan Persentase OPD/Badan Hukum yang memanfaatkan data Administrasi Kependudukan (Adminduk), data adminduk ini meliputi e-KTP, Akta Kelahiran, Akte Kematian, Akta Perkawinan, dan KIA. Target dan capaian indikator bidang urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2- 117 Capaian Indikator Urusan Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB Tahun 2021

No	Indikator Bidang Urusan	Tahun 2021	
		Target	Realisasi
1	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	97,60	99,60
2	Persentase OPD/Badan Hukum yang memanfaatkan data Adminduk	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB, 2021

Selama Tahun 2021, penduduk NTB yang wajib KTP berjumlah 3,760,038 orang, dari jumlah tersebut penduduk yang telah melakukan perekaman sebanyak 3,760,343 orang atau rata – rata persentase perekaman di 10 kabupaten/kota se – NTB sebesar 100%, masih terdapat 90,021 orang penduduk yang belum melakukan perekaman e-KTP. Sedangkan dari 3,760,343 orang yang telah melakukan perekaman, 4.056.612 orang atau 108% yang telah dilakukan pencetakan e-KTP. Meskipun target dapat terlampaui, namun evaluasi tetap dilakukan untuk terus dapat meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat terkait kebutuhan dokumen kependudukan. Beberapa hal yang menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti adalah meningkatkan kualitas SDM petugas ASN tersebut. Disamping itu juga diharapkan kabupaten/kota dapat menambah peralatan adminduk dalam bentuk mobil keliling dari dana APBD kabupaten/kota.

Tabel 2- 118 Rekapitulasi Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota Se-NTB Sampai Dengan Desember 2021

NO	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH (DKB SEM I THN 2021)	WAJIB KTP (DKB SEM I THN 2021)	PEREKAMAN		PERCETAKAN	
				S.D BULAN BERJALAN (DES')	%	S.D BULAN BERJALAN (DES')	%
1	2	3	4	7	8	11	12
1	Lombok Barat	724.875	509.675	510.876	100,24	540.401	106,0
2	Lombok Tengah	1.059.042	737.155	765.779	103,88	943.463	128,0
3	Lombok Timur	1.334.499	899.579	916.256	101,85	892.883	99,3
4	Sumbawa	519.061	377.669	367.423	97,29	369.990	98,0
5	Dompu	241.836	171.146	164.949	96,38	159.186	93,0
6	Bima	532.789	377.933	337.427	89,28	310.117	82,1
7	Sumbawa Barat	143.633	96.619	97.941	101,37	98.019	101,4
8	Lombok Utara	252.949	174.694	177.933	101,85	301.822	172,8
9	Kota Mataram	441.561	308.430	310.628	100,71	321.612	104,3
10	Kota Bima	155.140	107.138	111.131	103,73	119.119	111,2
TOTAL		5.405.385	3.760.038	3.760.343	100	4.056.612	108

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB, 2021

7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB, dengan indikator bidang urusan berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah Persentase Status Desa Berkembang dan Maju, target dan capaian indikator bidang urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2- 119 Capaian Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR BIDANG URUSAN	TAHUN 2021	
			TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya Status Desa	Persentase Status Desa Berkembang dan Maju	90	92,74%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB, 2021

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) bertanggung jawab untuk menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan indikator kinerja RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023, "Cakupan desa pesisir, dan lingkaran hutan yang diberdayakan". Secara keseluruhan desa pesisir dan lingkaran hutan berjumlah 439 desa. Sampai dengan tahun 2021 desa pesisir dan lingkaran hutan yang diberdayakan ditargetkan mencapai 127 desa atau 29,01% dari seluruh desa pesisir dan lingkaran hutan, dengan pencapaian sebanyak 191 desa yang telah diberdayakan atau 43,44% dari seluruh desa pesisir dan lingkaran hutan.

a. Penurunan Jumlah Desa Tertinggal

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan komposit dari Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekonomi serta Ketahanan Ekologi Desa yang dikembangkan lebih lanjut melalui 22 variabel dan 52 indikator. IDM ditujukan untuk mengetahui tingkat kemajuan dan kemandirian desa serta informasi tentang pembangunan desa. IDM mengklasifikasikan desa dalam 5 status yaitu Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri.

Pada tahun 2019 jumlah desa dengan status Sangat Tertinggal sebanyak 5 desa, sedangkan desa dengan status Tertinggal sebanyak 108 desa. Pada tahun 2021, jumlah desa dengan status Sangat Tertinggal tidak ada atau menurun 2 desa bila dibandingkan dengan tahun 2020, sedangkan jumlah desa dengan status Tertinggal sebanyak 73 desa atau menurun sebanyak 7 desa.

Tabel 2- 120 Rincian Status Desa tahun 2019 – 2021

KABUPATEN	JUMLAH DESA	SANGAT TERTINGGAL			TERTINGGAL			BERKEMBANG			MAJU			MANDIRI		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Lombok Barat	119	0	0	0	2	0	0	92	87	71	25	28	71	0	4	6
Lombok Tengah	127	0	0	0	2	0	0	80	50	42	43	67	42	2	10	15
Lombok Timur	239	0	0	0	6	0	0	160	136	91	72	96	129	1	7	19
Lombok Utara	43	0	0	0	4	0	0	21	16	20	8	15	17	0	2	6
Sumbawa Barat	57	0	0	0	2	0	0	38	28	17	16	25	35	1	4	5
Sumbawa	157	1	0	0	23	11	10	104	101	98	29	45	49	0	0	0
Dompu	72	0	0	0	5	0	0	60	57	54	7	15	18	0	0	0
Bima	191	4	2	0	64	69	63	104	97	104	18	22	23	1	1	1
Jumlah	1005	5	2	0	108	80	73	659	572	497	218	313	384	5	28	52

Sumber: IDM Kementerian Desa Tahun 2021

b. Lembaga Adat

Lembaga Adat yang terbentuk dan aktif adalah salah satu indikator program prioritas yang digunakan untuk mengukur kinerja DPMPD Dukcapil Provinsi NTB. Lembaga Adat merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Berdasarkan pencapaian sampai dengan akhir Desember 2021, jumlah lembaga adat yang telah terbentuk sebanyak 786 lembaga adat dari 1.150 desa/kelurahan di NTB (68,34%) sementara target pembentukan lembaga adat sampai akhir tahun 2020 sesuai RPJMD 2019-2023 adalah 779 lembaga adat atau 66,74% dari jumlah desa/kelurahan di NTB. Dengan pencapaian 68,34%, indikator ini telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 66,74% pada tahun 2021.

Tabel 2- 121 Rekapitulasi Jumlah Lembaga Adat di Provinsi NTB Tahun 2019-2021

No	Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Lembaga Adat		
				2019	2020	2021
1	Lombok Barat	10	122	45	49	50
2	Lombok Tengah	12	139	129	130	131
3	Lombok Timur	21	254	230	232	232

No	Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Lembaga Adat		
				2019	2020	2021
4	Lombok Utara	5	43	32	32	32
5	Sumbawa Barat	8	64	64	64	64
6	Sumbawa	24	165	149	150	151
7	Dompu	8	81	21	21	23
8	Bima	18	191	65	66	66
9	Kota Mataram	6	50	27	27	29
10	Kota Bima	5	41	6	8	8
Jumlah		117	1.150	768	779	786

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB, 2021

Meskipun target pembentukan sudah terlampaui namun legalitas dan penyiapan perangkat kelembagaannya belum sepenuhnya terpenuhi. Upaya legalisasi dan penyiapan perangkat lembaga adat sudah dan sedang berproses sampai dengan saat ini. Pembentukan lembaga adat juga akan menghidupkan kembali nilai-nilai luhur adat/budaya lokal atau local wisdom sebagai landasan utama kehidupan bermasyarakat termasuk dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai program pembangunan yang dimulai dari desa dengan masyarakat sebagai subyek pembangunannya.

c. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek)

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa, Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) merupakan lembaga pelayanan Teknologi Tepat Guna (TTG) antar desa yang berkedudukan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG. Tahun 2021 ditargetkan 47,86% Posyantek sudah terbentuk dan aktif, yang tercapai baru 75 Kecamatan sebesar 64,10% dari 117 jumlah Kecamatan. Terdapat 2 Kabupaten yang belum ada terbentuk Posyantek yaitu:

- Kabupaten Lombok Tengah
- Kabupaten Dompu

Tahun 2021, dibentuk 29 (dua puluh sembilan) Posyantek baru, 8 (delapan) di Kabupaten Bima dan 21 (dua puluh satu) di Kabupaten Lombok Timur. Secara keseluruhan sampai dengan tahun 2021 telah didirikan 75 Posyantek pada 8 (delapan) Kabupaten/Kota, berikut adalah data posyantek yang sudah terbentuk:

Tabel 2- 122 Posyantek yang telah terbentuk di Provinsi NTB

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Posyantek	Kecamatan	No. / Tanggal SK
1.	Kota Mataram	6 Posyantek	Cakranegara, Ampenan, Selaparang, Sekarbela, Sandubaya, Mataram	Keputusan Walikota Mataram Nomor: 157 / II / 2018, Tanggal: 2 Pebruari 2018
2.	Kabupaten Lombok Utara	5 Posyantek	Bayan, Pemenang, Tanjung, Gangga, Kayangan	Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 74/05/DP2KBPM/2017, Tanggal: 1 Pebruari 2017
3.	Kabupaten Sumbawa Barat	8 Posyantek	Jereweh, Maluk, Sekongkang, Brang Rea, Brang Ene, Seteluk, Poto Tano, Taliwang	Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor: 4012 tahun 2017 Tanggal: 23 November 2017

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Posyantek	Kecamatan	No. / Tanggal SK
4.	Kabupaten Lombok Barat	1 Posyantek	Kecamatan Labuapi	Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 414.3/52/DPMPD/2010; Tanggal: 6 mei 2010
5	Kabupaten Sumbawa	24 Posyantek	Empang, Torano, Plampang, Labangka, Maronge, Lape, Moyo Hilir, Unter Iwes, Utan, Alas, Alas Barat	Keputusan Bupati Sumbawa Nomor: 51 Tahun 2011 Tanggal: 31 Januari 2011
			Sumbawa, Ropang, Lunyuk, Orong Telu, Moyo Hulu, Moyo Utara	Keputusan Bupati Sumbawa Nomor: 1254 Tahun 2011, Tanggal: 17 Oktober 2011
			Buer, Labuan Badas, Lopak, Batu Lanteh, Lenangguar, Lantung, Rhee	Keputusan Bupati Sumbawa Nomor: 1130 Januari 2012, Tanggal: 10 September 2012
6	Kabupaten Bima	9 Posyantek	Soromandi, Palibelo, Langgudu, Wera, Ambalawi, Sanggar, Lambitu, Madapangga, Bolo	Keputusan Bupati Bima Nomor: 188.45/276/06.16/tahun2021 Tanggal: 2 Oktober 2021
7	Kota Bima	1 Posyantek	Mpunda	Keputusan Walikota Bima Nomor: 188.45/183/050/II/2020 Tanggal: 21 Februari 2020
8	Kabupaten Lombok timur	21 Posyantek	Keruak, Sakra, Terara, Sikur, Masbagik, Sukamulia, Selong, Pringgabaya, Aikmel, Sembalun, Sambalia, Montong Gading, Pringgasela, Suralaga, Wanasaba, Suela, Labuhan Haji, Sakra Barat, Sakra Timur, Jerowaru, Lenek	Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/64/PMD/2021 Tanggal: 22 Januari 2021
	Total	75 Posyantek		

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB, 2021

d. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, DPMPD Dukcapil Provinsi NTB berperan melalui program Pemberdayaan BUMDes dimana program ini merupakan salah satu prioritasnya. Program ini dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan modal. BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes dimaksudkan untuk menampung seluruh kegiatan masyarakat di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan atau kerjasama antar desa.

Dari 1.005 desa yang ada di NTB, sampai tahun 2021 telah terbentuk 988 BUMDes aktif, dari target 984 BUMdes Aktif pada akhir 2020 sesuai RPJMD 2019-2023. Terlampauinya target ini, salah satunya disebabkan adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah desa, dimana salah satu kebijakannya adalah penggunaan Dana Desa untuk membentuk dan mengembangkan BUMDes.

Tabel 2- 123 Rekapitulasi Perkembangan BUMDes Aktif di NTB 2019-2021

No	Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah BUMDes		
				2019	2020	2021
1	Lombok Timur	21	239	181	239	239
2	Lombok Tengah	12	127	125	127	127
3	Lombok Barat	10	119	118	116	116

4	Lombok Utara	5	43	28	33	33
5	Sumbawa	24	157	157	154	157
6	Dompu	8	72	72	72	72
7	Bima	18	191	148	189	189
8	Sumbawa Barat	8	57	41	54	55
JUMLAH		106	1005	870	984	988

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB, 2021

Dalam pengembangan BUMDes, selain penggunaan Dana Desa, Pemerintah Provinsi NTB juga memperkuat kelembagaan BUMDes dengan menyalurkan bantuan guna memperkuat permodalan BUMDes sebesar Rp. 14,282,500,000.- dengan rincian Rp. 3,1 milyar disalurkan pada tahun 2017 untuk 28 BUMDes dan Rp. 10 milyar disalurkan pada tahun 2019 untuk 100 BUMDes dan Rp.1,182,500,000,- untuk 23 BUMDes pada tahun 2020, serta Rp. 3.817.865.300,- pada tahun 2021 untuk 101 BUMDes.

Bantuan penguatan modal yang disalurkan tahun 2019, diarahkan untuk membantu Bank Sampah guna menyelesaikan Program Prioritas Pemerintah Provinsi “Zero Waste”, kemudian pada tahun 2020 bantuan yang diberikan berupa Mesin Pengolah Sampah, Motor Listrik Delivery dan Gerobak Warung Pintar, serta pada tahun 2021 bantuan diberikan berupa mesin pengolah sampah berupa mesin the maggot, the doro, the plastic, dan mesin Komoditi unggulan Desa berupa Mesin perajang porang, pencabut bulu unggas, pemipil mete, kupas kopi kering, roaster kopi, pembubuk kopi. Rincian BUMDes per kabupaten yang telah mendapatkan bantuan guna penguatan permodalan ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2- 124 BUMDes Yang Mendapatkan Bantuan Penguatan Modal Tahun 2019-2021

No	KABUPATEN	JUMLAH BUMDes YANG MENDAPAT BANTUAN			Jumlah
		2019	2020	2021	
1	Lombok Barat	9	8	12	29
2	Lombok Tengah	8	2	22	32
3	Lombok Timur	46	5	28	79
4	Lombok Utara	6	1	8	15
5	Sumbawa	8	2	6	16
6	Sumbawa Barat	7	1	14	22
7	Dompu	7	2	5	14
8	Bima	9	2	6	17
Jumlah		100	23	101	224

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB, 2021

8. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pada tahun 2021, target dan capaian kinerja Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2- 125 Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019-2021

NO	INDIKATOR BIDANG URUSAN (SATUAN)	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Pertumbuhan penduduk (%)	1,13	1,13	1,10	1,82	1,07	1,82*
2	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan (tahun)	20,42	20,21	20,50	20,35	20,70	20,40*

Sumber: BPS NTB, DP3AP2KB Provinsi NTB, 2021

*Data Proyeksi sementara

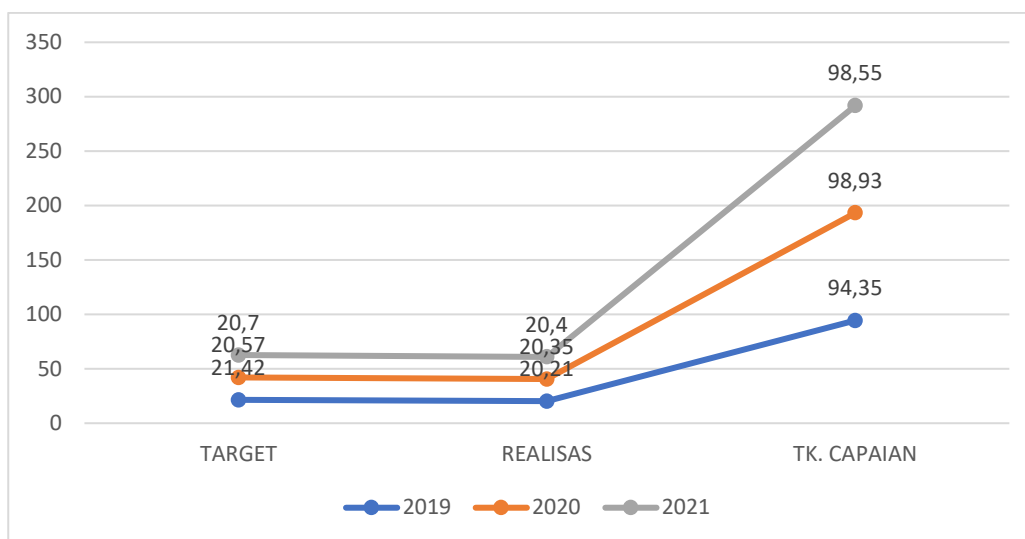
Pertumbuhan penduduk tahun 2020 sebesar 1,82 persen, belum mencapai target yang ditetapkan dan persentase pertumbuhannya melampaui realisasi tahun 2019. Sedangkan untuk rata-rata usia kawin pertama perempuan, tahun 2021 diproyeksikan mencapai 20,40 tahun, belum mencapai target yang ditetapkan (20,50 tahun), namun melampaui capaian 2019 (20,21 tahun).

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilakukan dalam rangka rangka untuk mengatur kuantitas penduduk, antara lain jumlah, struktur dan komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk, dan persebaran penduduk, serta meningkatkan kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan dan angka kematian, tingkat pendidikan, dan angka kemiskinan. Pertumbuhan penduduk di NTB pada tahun 2021 sebesar 1,82 persen, masuk kategori pertumbuhan penduduk sedang. Meskipun masuk kategori pertumbuhan penduduk sedang, namun apabila pertumbuhan penduduk ini tidak dikendalikan maka akan memberikan dampak bagi pembangunan. Pertambahan jumlah penduduk yang tinggi jika tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas ekonomi maka akan menurunkan kesejahteraan penduduk. Dampak ledakan penduduk antara lain semakin tingginya angka pengangguran, kriminalitas, dan memburuknya kondisi sosial lainnya. Upaya pengendalian penduduk dan pelaksanaan KB yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB melalui DP3AP2KB pada tahun 2021 antara lain Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)

Pemerintah Provinsi NTB telah memiliki keberpihakan terhadap pengendalian penduduk dan KB dengan menerbitkan regulasi terkait Pendewasaan Usia Perkawinan melalui SE Gubernur NTB Nomor 180/1153/Kum tentang Pendewasaan Usia Perkawinan di tahun 2014, dan surat edaran tersebut masih relevan untuk diberlakukan sampai saat ini dalam rangka pengendalian penduduk dan peningkatan rata-rata usia perkawinan pertama bagi perempuan. Rata-rata usia kawin pertama perempuan di provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020 yaitu 20,35 tahun. Terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya, dimana tahun 2019 rata-rata usia kawin pertama perempuan 20,21 tahun. Persentase perempuan pernah kawin diatas umur 20 tahun, tahun 2020 sebesar 52,18

persen, terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya, tahun 2019 sebanyak 50,58 persen. Pada tahun 2021 di prediksi mengalami kenaikan dari 20,35 menjadi 20,40 atau 0,50 poin. Harapannya dengan adanya Peraturan Daerah tersebut, kasus-kasus perkawinan anak yang marak terjadi dapat diminimalisir.

Gambar 2- 45 Rata rata Usia Kawin Pertama Tahun 2019-2021



Sumber: DP3AP2KB Provinsi NTB, 2021

9. Bidang Perhubungan

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan Tahun 2021 diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan dengan indikator bidang urusan berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah 1) Presentase Rute Angkutan Darat 2) Persentase Rute Angkutan Laut 3) Rasio Kecelakaan Transportasi. Target dan capaian indikator kinerja bidang urusan perhubungan tahun 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2- 126 Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Urusan Perhubungan Tahun 2021

No	Indikator Bidang Urusan	Tahun 2021	
		Target	Realisasi
1	Persentase Rute Angkutan Darat	92.50%	96.67%
2	Persentase Rute Angkutan Laut	57.69%	80.77%
3	Rasio Kecelakaan Transportasi	4.02	3.59

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi NTB, 2021

Indikator presentase rute angkutan darat adalah indikator untuk mengukur jumlah rute angkutan darat yang tersedia di Nusa Tenggara Barat dengan target rute angkutan darat sampai dengan tahun 2023 sejumlah 120 rute angkutan. Pada tahun 2021, rute angkutan darat di NTB sudah terpenuhi sejumlah 116 rute dengan penambahan 1 rute angkutan KSPN Pusat Kota Mataram (via Epicentrum Mall) – Sirkuit Mandalika Kabupaten Lombok Tengah. Secara persentase, pada tahun 2021

capaian rute angkutan darat sebesar 96,67% dari target 92,50% dengan tingkat capaian sebesar 104,50%.

Indikator presentase rute angkutan laut adalah indikator untuk mengukur jumlah rute angkutan laut dan penyeberangan yang tersedia di Nusa Tenggara Barat dengan target rute angkutan laut sampai dengan tahun 2023 sejumlah 26 rute angkutan. Pada tahun 2021, rute angkutan darat di NTB sudah terpenuhi sejumlah 21 rute dengan penambahan 2 rute angkutan Kayangan – Pototano (Dermaga F3) dan LDF Bima – Surabaya – Labuhan Bajo. Secara persentase, pada tahun 2021 capaian rute angkutan laut sebesar 80,77% dari target 57,69 % dengan tingkat capaian sebesar 140%.

Penambahan jumlah rute angkutan laut dari tahun ke tahun diharapkan mampu menambah konektivitas penumpang dan barang di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Semenjak adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada mobilitas manusia akibat kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mempengaruhi jumlah penumpang angkutan laut. Penurunan jumlah penumpang terbesar terdapat pada Pelabuhan Pemenang, sedangkan di pelabuhan lainnya terlihat meningkat. Hal ini terjadi karena Pelabuhan Pemenang merupakan pintu masuk dan keluar wisatawan di Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan penumpang angkutan laut yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 2- 127 Perkembangan Jumlah Penumpang Angkutan Laut Tahun 2020-2021

Bulan	Tahun 2020				Tahun 2021			
	Kayangan - Poto Tano	Pemenang	Lembar	Bima	Kayangan - Poto Tano	Pemenang	Lembar	Bima
Januari	5,442	75,108	13,816	8,767	3,965	3,617	5,250	3,996
Februari	4,582	68,170	10,016	4,602	2,757	2,385	3,960	2,718
Maret	4,684	38,189	7,704	3,265	3,823	4,092	4,695	2,197
April	1,377	-	1,855	3,107	3,103	2,601	5,035	2,996
Mei	754	-	93	2,107	4,064	2,264	5,864	4,182
Juni	1,297	-	1,199	-	4,533	3,029	10,917	6,418
Juli	1,441	573	2,145	19,741	2,568	1,721	5,217	6,489
Agustus	1,873	2,116	2,663	3,216	2,516	1,298	4,933	5,054
September	2,163	-	-	-	2,361	1,244	7,703	11,543
Oktober	2,195	-	-	-	2,615	2,107	9,874	4,725
November	2,195	-	-	-	2,319	-	9,159	5,838
Desember	2,228	-	-	-	2,529	-	10,419	5,763
Total	30,231	184,156	39,491	44,805	37,153	24,358	83,026	61,919

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi NTB, 2021

Indikator rasio kecelakaan transportasi adalah indikator untuk mengukur rasio kecelakaan transportasi darat dan penyeberangan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Target rasio kecelakaan transportasi pada tahun 2021 adalah 4,02. Pada tahun 2021 capaian realisasi rasio kecelakaan transportasi di Nusa Tenggara Barat sebesar 3,58 dengan tingkat capaian sebesar 112,3%. Adapun data Kecelakaan di Nusa Tenggara

Barat baik pada transportasi darat dan penyeberangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2- 128 Kecelakaan Transportasi Penyeberangan Pelabuhan Kayangan – Pototano

Bulan	Black Out	Kapal Kandas	Lepas Lashing
Januari	1		4
Februari	2	1	2
Maret	2		4
April	1		2
Mei	1		3
Juni	1		3
Juli	2	1	2
Agustus	1		1
September	2		1
Oktober	1	1	2
November		1	1
Desember	1		2
Jumlah	15	4	27
		46	

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi NTB, 2021

Tabel 2- 129 Kecelakaan Kendaraan Bermotor Pada Tahun 2021

Bulan	2021		
	Kecelakaan	Meninggal Dunia	Total
Januari	99	37	136
Februari	90	22	112
Maret	107	24	131
April	113	32	145
Mei	148	56	204
Juni	105	35	140
Juli	115	34	149
Agustus	103	31	134
September	113	32	145
Oktober	148	29	177
November	118	25	143
Desember	117	18	135
Jumlah	1,376	375	1,751

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi NTB, 2021 *Rute Angkutan Laut Baru Tahun 2021

10. Bidang Komunikasi dan Informatika

Pelaksanaan urusan Bidang Komunikasi Dan Informatika dalam rangka mewujudkan Misi ke 2, NTB BERSIH DAN MELAYANI, melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi dengan sasaran pembangunan meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan urusan Bidang Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi NTB menetapkan sasaran strategis yaitu Meningkatkan Perangkat Daerah Yg Informatif Dengan Indikator Kinerja Persentase

Perangkat Daerah yang Informatif, dan Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Kualifikasi Layanan Perangkat Daerah.

Pada tahun 2021, target dan capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB urusan Bidang Komunikasi dan Informatika dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2- 130 Capaian Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021	
			Target Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja
1	Persentase Badan Publik Pemerintah Provinsi Yang Informatif	%	4%	7%	5%	23%	35%	60,71
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Point	3.2	3.30	3.5	3.30	2,9	2,94
3	Kualifikasi Layanan Perangkat Daerah	Kualifikasi	Informatif	Informatif	Interaktif	Informatif	Interaktif	Transaksi
4	Persentase Perangkat Daerah yang Informatif	%	5%	5%	15%	32.61%	50%	59,09

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, 2021

Pada tahun 2021, Dinas Kominfotik selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama bekerjasama dengan Komisi Informasi NTB telah melakukan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kepada Lembaga Publik Informatif di Provinsi NTB. Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian, 26 OPD meraih predikat Informatif, 7 OPD berpredikat Menuju Informatif dan 8 OPD berpredikat Cukup Informatif. Selain itu, ada 2 OPD kurang informatif dan 1 yang tidak informatif. Untuk hasil penilaian PPID Kabupaten/Kotase NTB, dari 10 Kabupaten Kota, 7 mendapat predikat Informatif, 2 Menuju Informatif dan 1 yang Kurang Informatif. Hasil penilaian juga menetapkan satu BUMND dan satu lembaga dalam kategori Tidak Informatif. Adapun Badan Publik Informatif sebagai berikut:

- a. Kategori Badan Publik Kabuapten/ Kota
 1. Kabupaten Lombok Tengah
 2. Kota Mataram
 3. Kabupaten Lombok Timur
 4. Kabupaten Lombok barat
 5. Kota Bima
 6. Kabupaten Sumbawa
 7. Kabupaten Sumbawa Barat

b. Kategori Badan Publik BUMD Provinsi NTB

1. PT. Jamkrida NTB Bersaing

c. Kategori Badan Publik OPD Provinsi NTB

1. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB
2. Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB
3. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB
4. Dinas Perdagangan Provinsi NTB
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB
7. Dinas Perindustrian Provinsi NTB
8. Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir Provinsi NTB
9. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB
10. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTB
11. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
12. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB
13. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB
14. Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTB
15. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB
16. Dinas Sosial Provinsi NTB
17. Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB
18. Dinas Kesehatan Provinsi NTB
19. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB
20. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB
21. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi NTB
22. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
23. Sekretariat DPRD Provinsi NTB
24. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi NTB
25. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB
26. Inspektorat Provinsi NTB

Untuk mewujudkan kualitas pelayanan, Dinas Kominfotik Provinsi NTB melaksanakan program pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Pada tahun 2021 telah terlaksana 15 (lima belas) kali kegiatan bincang gemilang dengan beragam topik. Kinerja OPD pada tahun 2021 terhitung baik dibuktikan dengan meningkatnya OPD yang informatif sebanyak 26 OPD dibandingkan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 15 OPD. Layanan hubungan media berupa kerjasama dengan lembaga/pers dalam penyebarluasan informasi. Ada 5 (lembaga) yang menjadi mitra kerjasama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB dalam menyebarkan informasi yaitu: AMSI, SMSI, JMSI, MIO, FORMASI.

Sementara itu, untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, dilakukan melalui Program pengelolaan aplikasi informatika. Adapun bentuk kegiatannya

berupa penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, kegiatan ini berkaitan dengan regulasi atau penginventarian layanan pemerintah daerah juga evaluasi pelaksanaan e-government dari PAN-RB. tahun 2021, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB melalui bidang PTIK melakukan register terhadap layanan-layanan yang ada pada pemerintah daerah, hanya saja OPD masih belum memberikan data terkait layanan berbasis TIK yang ada pada opd tersebut. Untuk evaluasi pelaksanaan e-government dari PAN-RB mendapat capaian sebesar 2.94 skor (termasuk dalam kategori baik)

Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah adalah pemanfaatan layanan yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB seperti layanan hosting, VPS, cloud storage, collocation server. Diantara beberapa layanan tersebut hanya layanan hosting yang dimanfaatkan oleh seluruh OPD. Oleh sebab itu, kedepannya agar setiap OPD dapat memanfaatkan seluruh layanan yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB. Sedangkan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintahan Daerah adalah penyediaan simpul jaringan perangkat daerah yang terkoneksi. Sudah ada 18 OPD yang memiliki simpul jaringan yang terkoneksi yaitu: BKD, BPBD, BAPPENDA, BAPPEDA, Biro Administrasi Pemerintahan, Biro Humas, Biro Umum, DMPD Dukcapil, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, DPMPTSP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Sosial, RSJ Mutiara Sukma, RSUD Provinsi NTB.

Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik, adalah pengembangan suatu aplikasi oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, pada tahun 2021 aplikasi yang dikembangkan adalah <https://layanan.diskominfotik.ntbprov.go.id/> suatu aplikasi untuk pendataan layanan yang ada di seluruh OPD.

Jumlah kunjungan Sistem Infomasi secara Online PPID Provinsi NTB mengalami penurunan yang sangat signifikan selama tahun 2021 yaitu 188.918 kali kunjungan dibandingkan dengan kunjungan tahun 2020 yaitu 330.972 kali kunjungan. Sedangkan jumlah yang mengunduh Daftar Informasi Publik (DIP) per bulan Desember 2021 sebanyak 69.739 unduhan mengalami peningkatan dari tahun 2020 dengan total unduhan sebanyak 6.510 kali unduhan dan untuk Permohonan Informasi yang masuk selama tahun 2021 sejumlah 26 permohonan mengalami penurunan dari tahun 2020 dengan total permohonan sebanyak 52 orang pemohon.

SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

Adalah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang lebih dikenal E-Government adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Berdasarkan Penilaian Kementerian PAN RB hasil evaluasi yang diperoleh Provinsi NTB adalah 2,94 (Kategori BAIK). Ada 47 indikator dalam penilaian system pemerintahan berbasis elektronik, ke-47 indikator tersebut terbagi ke dalam 4 (empat) domain penilaian:

1. Domain kebijakan SPBE
2. Domain tata kelola SPBE
3. Domain Manajemen SPBE
4. Domain Layanan SPBE

Dari semua domain tersebut, hanya domain manajemen spbe yang belum terpenuhi atau masih berada pada indeks 1 (rendah). Penyebab dari domain manajemen SPBE belum terpenuhi karena aspek pada domain tersebut belum bisa dilaksanakan oleh pemerintah provinsi NTB.

NTB Care

NTB Care telah menangani ratusan pengaduan, sejak dilaunching pada akhir Oktober 2018 lalu, admin NTB Care pada Dinas Kominfo Provinsi NTB mencatat Jumlah masyarakat yang melakukan pengaduan dan keluhan pada perangkat daerah yang berada di provinsi, kabupaten maupun kota di NTB sampai dengan bulan desember 2020 dengan jumlah aduan masuk sebanyak 372 aduan dan sebagian besar dari pengaduan tersebut, sudah direspon dan ditindaklanjuti (disetujui) oleh Perangkat Daerah sebanyak 324 aduan, 37 aduan masih proses dan 4 aduan ditolak. Adapun jumlah aduan pada tahun 2021 sebanyak 784 aduan dengan rincian, 258 aduan via aplikasi ntb care, 526 aduan via akun facebook NTB Care. Aduan yang sudah ditindak lanjuti sebanyak 456 aduan dengan rincian, 211 aduan ditindak lanjuti via aplikasi ntb care dan 245 aduan ditindaklanjuti via akun facebook ntb care. Sedangkan aduan yang belum ditindak lanjuti sebanyak 328 aduan dengan rincian, 47 aduan dari aplikasi ntb care dan 281 aduan via akun facebook ntb care.

Fitur lain yang ada dalam aplikasi NTB care adalah masyarakat dapat pula melaporkan dugaan pelanggaran yang berdimensi hukum (Whistle Blowing System). Fitur ini memungkinkan masyarakat untuk melaporkan tindakan melawan hukum, perbuatan tidak etis yang disampaikan secara rahasia. Untuk penanganan pengaduan yang bersifat khusus ini dibutuhkan koordinasi yang massif antara perangkat daerah terkait. Admin yang ada harus aktif betul dan diawasi oleh perangkat daerah yang bersangkutan.

11. Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang diselenggarakan pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi NTB, pada tahun 2021 menyelenggarakan program dan kegiatan untuk mendukung

capaian indikator sesuai Perjanjian Kinerja dan indikator kinerja daerah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2- 131 Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Urusan Koperasi Tahun 2021

No	Indikator	Tahun 2021	
		Target	Realisasi
1	Persentase Koperasi Aktif	65%	58,37%
2	Pertumbuhan Koperasi Modern	3 Koperasi	3 Koperasi
3	Persentase pertumbuhan KSP/USP yang menerapkan pola syariah	12,65%	13,92%
4	Jumlah Usaha Kecil Menjadi Usaha Menengah	30 UKM	3 UKM

Sumber: Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB, 2021

Jumlah koperasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan 31 Desember 2021 sebanyak 4.363 koperasi. Dibanding dengan periode yang sama di tahun 2020, jumlah koperasi sebanyak 4.218 koperasi, hal ini menunjukkan terjadi peningkatan jumlah koperasi sebanyak 145 koperasi (3,32 persen). Persentase koperasi aktif tahun 2021 sebanyak 58,37 persen dari target 65 persen. Perkembangan koperasi Aktif Provinsi NTB tahun 2021, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2- 132 Perkembangan Koperasi Aktif Provinsi NTB Tahun 2018-2021

NO	KABUPATEN/ KOTA	2018	2019	TAHUN 2020 (UNIT)			TAHUN 2021 (UNIT)		
				Aktif	Tidak Aktif	Jml	Aktif	Tidak Aktif	Jml
1	Mataram	504	397	398	107	505	401	107	508
2	Lombok Barat	503	151	163	357	520	356	168	524
3	Lombok Utara	154	119	123	42	165	130	42	172
4	Lombok Tengah	617	299	315	318	633	260	395	655
5	Lombok Timur	507	215	241	303	544	279	298	577
6	Sumbawa Barat	501	329	316	64	380	320	64	384
7	Sumbawa	307	224	224	86	310	230	86	316
8	Dompu	308	150	150	180	330	150	189	339
9	Bima	278	238	238	50	288	216	84	300
10	Kota Bima	185	95	108	100	208	110	103	213
11	Provinsi	246	223	223	90	335	255	120	375
Jumlah		4.110	2.440	2.499	1.697	4.218	2.707	1.656	4.363

Sumber: Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB, 2021

Pemerintah Provinsi NTB, dalam pemberdayaan UMKM terdampak Covid-19 yang mengakibatkan pelemahan usaha UMKM untuk kembali menggerakkan pelaku UMKM telah melaksanakan kebijakan stimulus ekonomi berupa pemberdayaan produk lokal UMKM/IKM di NTB sebagai bagian dari JPS Gemilang berupa produk UMKM (minyak kelapa, ikan kering/ikan teri, garam, abon, susu kedelai, gula aren, kopi, serbat, teh kelor. Jumlah UMKM binaan Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2- 133 Jumlah UMKM Binaan Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB Per 31 Desember 2021

NO	KAB/KOTA	KLASIFIKASI USAHA			JUMLAH
		MIKRO	KECIL	MENENGAH	
1	Mataram	15.746	6.194	533	22.473
2	Lombok Barat	16.635	0	0	16.635
3	Lombok Utara	4.820	173	5	4.998
4	Lombok Tengah	309	11	3	323
5	Lombok Timur	14.356	6.390	284	21.030
6	Sumbawa Barat	7.780	49	0	7.829
7	Sumbawa	5.501	4	3	5.508
8	Dompu	2.261	5	4	2.270
9	Bima	11.610	0	0	11.610
10	Kota Bima	7.904	2.293	411	10.608
Jumlah		86.922	15.119	1.243	103.284

Sumber: Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB, 2021

Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi Dan Nasional

Penilaian “Koperasi Berprestasi” setiap tahun dilaksanakan dengan maksud untuk memberikan penghargaan atas sumbangsih dan dharma baktinya yang besar terhadap pertumbuhan koperasi. Pedoman penilaian Koperasi Berprestasi sesuai Permenkop dan UKM RI Nomor : 06/Per/M.KUKM/V/2006 tanggal : 1 Mei 2006 dan surat Deputi Kelembagaan Kemenkop Nomor : 128/Dep.1/XII/2019 tanggal. 4 Des 2019 perihal, Penilaian Koperasi Berprestasi. Penilaian dilihat dari pencapaian kinerja yaitu aspek organisasi, tatalaksana, produktivitas, manfaat dan dampak dari koperasi. Penilaian dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM Provinsi/Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat, yang mana penghargaan dan hadiah diberikan kepada Koperasi Berprestasi baik di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun tingkat Nasional pada setiap Peringatan Hari Koperasi. Pada tahun 2019 dan 2020, jumlah Koperasi Berprestasi sebanyak 5 unit dan 6 unit.

Pada tahun 2021, berdasarkan SE Deputi Bidang Perkoperasian RI, Kemenkop Nomor : 15 Tahun 2021 tanggal 25 mei 2021 tentang Koperasi modern/berprestasi dan sesuai surat Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB Nomor : 700/168/Diskop UKM/IV/2021 tanggal : 7 juni 2021 perihal : Usulan Koperasi Modern/berprestasi Provinsi NTB tahun 2021 sebagaimana table dibawah ini. Usulan Koperasi Modern/Berprestasi Provinsi NTB Tahun 2021 menunggu Surat Keputusan Penetapan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI.

Tabel 2- 134 Usulan Koperasi Berprestasi/ Modern Tahun 2021

NO	NAMA KOPERASI / NOMOR BADAN HUKUM	ALAMAT	KET
1.	Koperasi Katala Batu Hijau No. 32/BH/ KWK23/VI/1995, tgl,12 Juni 1995	Komplek 2100 buliding, 620 Townsite Kelurahan Sekongkang Atas Kec. Sekongkang Kab. Sumbawa Barat	Perdagangan barang dan jasa, Unit Usaha Simpan Pinjam

NO	NAMA KOPERASI / NOMOR BADAN HUKUM	ALAMAT	KET
2.	KSU Syariah BMT Al-Hidayah Umat Sejahtera, No. 231/BH/DKP.08.5 /XII/ 2006, tgl, 26 Desember 2006	Jln. Jurusan Kotaraja, Tete Batu, Kotaraja Kec.Sikur, Kab.Lombok Timur	Unit Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
3.	KUD Karya Batur No. 716/BH/PAD/ KWK.23/ VI/1995. Tgl, 20 Juni 1995	Desa Sukarara Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah	Usaha Simpan Pinjam, Usaha Mini market/Waserda, Usaha Pembayaran Online, RMU, Pengadaan Pangan

Sumber: Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB, 2021

Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah

Salah satu Program unggulan Dinas Koperasi UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 s/d 2023 sesuai yang tertuang pada RPJMD Tahun 2018 – 2023 adalah terbentuknya sebanyak 15 Koperasi Kawasan Bebas Riba, selain Program unggulan yang menjadi prioritas Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB juga tetap melaksanakan program penumbuhan dan pengembangan Koperasi syari'ah.

Target penumbuhan Koperasi Syariah Kawasan bebas Riba dan Data jumlah Koperasi syariah di Provinsi NTB per-31 Desember 2021 dapat terlihat dalam table berikut ini.

Tabel 2- 135 Target dan Realiasi Program Penumbuhan Koperasi Syariah Kawasan Bebas Riba di Provinsi NTB Tahun 2019 -2021

No	Wilayah	Penumbuhan Koperasi Syariah Kawasan Bebas Riba					
		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Provinsi NTB	3	3	3	3	3	3

Sumber: Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB, 2021

Penumbuhan Koperasi Syariah Kawasan bebas Riba Tahun 2021 telah memenuhi target capaian RPJMD dengan penumbuhan sebanyak 3 Koperasi Syariah Kawasan Bebas Riba. Sampai dengan tahun 2021 Jumlah Koperasi syariah kawasan bebas riba berjumlah 12 Koperasi Syariah tersebar di 6 (enam) Kabupaten/Kota Se-NTB.

Penerima Penghargaan Kopsyah Pengembangan Kawasan bebas Riba:

1. Koperasi Serba Usaha Syari'ah "Karya Maburur Bersama" (Akta Notaris: Nomor 47 Tanggal 28 Agustus 2019). Alamat Marong Jamak Selatan, Kelurahan Karang Baru, Kec. Selaparang - Kota Mataram
2. Koperasi Syariah Amanah Mekar Mandiri (Akta Notaris: Nomor 85 Tanggal 31 Juli 2018). Alamat Jalan Pendidikan Pasar Baru Kec. Jereweh Kab. Sumbawa Barat
3. Koperasi Serba Usaha Syariah BMT Insan Samawa. (Akta Notaris : Nomor 24 Tanggal 27 April 2021/ Akta Perubahan). Alamat Jalan Setia Budi No. 12 A Kelurahan Seketeng Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa

Tabel 2- 136 Program Penumbuhan Koperasi Syariah Provinsi NTB Tahun 2019 s/d 2021

No	Program Kegiatan	Program Tahun 2019 - 2023						Jumlah
		2019		2020		2021		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Penumbuhan Koperasi Syariah Provinsi NTB	5	5	7	7	10	11	57

Sumber: Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB, 2021

Target Terbentuknya Koperasi Syariah pada tahun 2016 sebanyak 500 Koperasi syariah, Jumlah Koperasi Syariah sampai dengan tahun 2021 terbentuk sebanyak 413 Koperasi Syariah Kab/Kota Se-NTB. Untuk Penumbuhan Koperasi syariah Wilayah Kerja Propinsi tahun 2021 target RPJM tahun 2021 sebanyak 10 Koperasi Syariah Binaan provinsi, Pencapaian realisasi berjumlah 11 Kopsyah artinya melampaui jumlah yang ditargetkan, Total Jumlah Koperasi Syariah Wilayah kerja Provinsi Per-Desember Tahun 2021 sebanyak 90 Koperasi Syariah.

Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM)

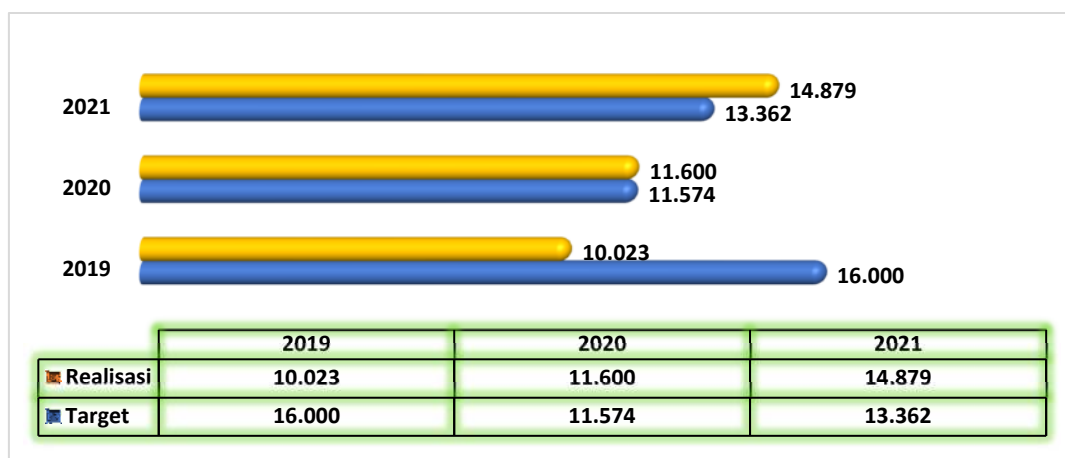
Sebagai Pusat Layanan berarti PLUT-KUMKM merupakan sebuah lembaga yang senantiasa memberikan layanan kepada Koperasi dan para pengusaha mikro, kecil, dan menengah dalam satu atap yang mampu memberikan solusi bagi pelaku KUMKM secara komprehensif dan efektif sehingga mampu mengembangkan potensi unggulan daerah untuk menjadi produk dan komoditas unggulan. Adapun capaian kinerja yang telah dilakukan di tahun 2021 diantaranya:

1. Jumlah UMK dan wirausaha yang dilayani : 990 UMK
2. Jumlah Koperasi yang dilayani : 32 Koperasi
3. Jumlah Koperasi yang mendapat sertifikat NIK : 0 Koperasi
4. Jumlah Koperassi UMK dan wirausaha yang didampingi memperoleh perijinan : 5 Koperasi dan 200 UMK
5. Jumlah Koperassi UMK dan wirausaha yang didampingi memperoleh akses Pemasaran Online ;30 UMK
6. Jumlah Koperassi UMK dan wirausaha yang didampingi memperoleh Akses Pembiayaan dan Termasuk KUR : 80 UMK
7. Jumlah Koperassi,UMK dan wirausaha yang didampingi meningkat omsetnya : 10 KUMKM
8. Jumlah Pelayanan PLUT : 7 Bidang Pelayanan
9. Target Kualitas Layanan PLUT : Efisien dan Efektif

12. Bidang Penanaman Modal

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi NTB. Investasi menjadi pendorong roda perekonomian daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penciptaan iklim usaha yang kondusif merupakan elemen utama dalam peningkatan investasi. Indikator bidang urusan berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah Nilai Realisasi Investasi yaitu besaran nilai realisasi investasi yang berasal dari dalam negeri dan asing. Target dan capaian indikator bidang urusan bidang penanaman modal tahun 2019-2021 disajikan pada tabel berikut.

Gambar 2- 46 Indikator Urusan Bidang Penanaman Modal Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019-2021 Nilai Realisasi Investasi (Milyar)



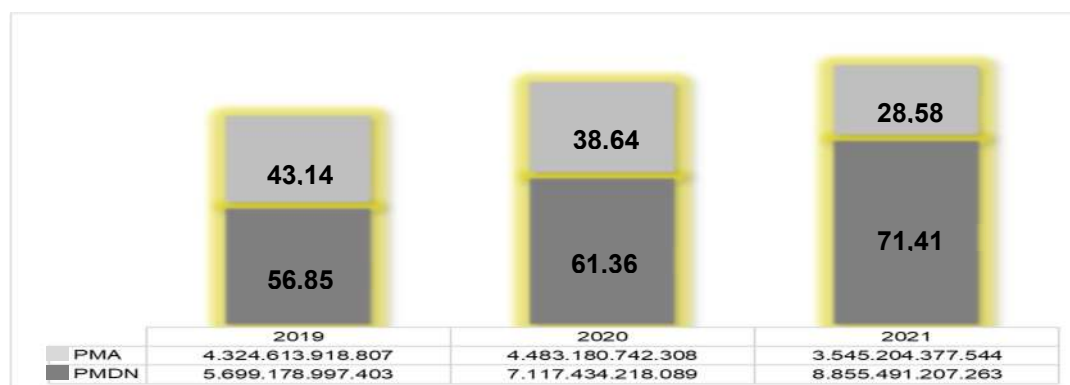
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2021.

Pada tahun 2019, capaian Nilai Realisasi Investasi Provinsi NTB tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan karena dampak bencana gempa yang terjadi di akhir tahun 2018. Selanjutnya di tahun 2020, capaian Nilai Realisasi Investasi meningkat 15,73% dari tahun 2019 dari 10.023 milyar rupiah menjadi 11.600 milyar rupiah. Tahun 2021 kembali terjadi peningkatan capaian Nilai Realisasi Investasi jika dibandingkan dengan tahun 2020 walaupun ditengah terjadinya pandemi Covid-19 yaitu: sebesar 28,27%. Hal ini terjadi karena adanya penambahan investasi salah satunya oleh ITDC sebesar Rp.2.478.578.079.088,24 belum LKPM, sehingga total sementara sebesar Rp.14.879.279.663.896.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, terdapat 2 (dua) status permodalan yaitu; (a) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri; dan (b) Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya, maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Perkembangan nilai investasi PMDN dan PMA Provinsi NTB tahun 2019-2021 secara umum menunjukkan peningkatan terutama untuk PMDN. Proporsi nilai PMDN juga selalu lebih besar dari PMA. Adapun perkembangan nilai investasi PMDN dan PMA di Provinsi NTB selama tahun 2019 - 2021 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2- 47 Perkembangan dan Proporsi PMDN dan PMA di Provinsi NTB Tahun 2019 - 2021



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2021.

Pada tahun 2020, capaian Nilai Realisasi Investasi kategori PMDN mengalami peningkatan nilai dari tahun 2019 yang sebesar Rp.5.699.178.997.403 menjadi Rp.7.117.434.218.089 dan juga mengalami peningkatan proporsi (56,85% menjadi 61,36%) dari nilai total investasi, sedangkan untuk kategori PMA, capaian Nilai Realisasi Investasi di tahun 2019 sebesar Rp.4.324.613.918.807 menjadi Rp.4.483.180.742.308 di tahun 2020 dan secara proporsi mengalami penurunan (43,14% menjadi 38,64%). Kemudian di tahun 2020, capaian Nilai Realisasi Investasi pada PMDN meningkat dari sebesar Rp.7.117.434.218.089 menjadi Rp.8.885.491.207.263 di tahun 2021 dan proporsi dari 61,36% menjadi 71,41% sedangkan pada PMA mengalami penurunan dari sebesar Rp.4.483.180.742.308 di tahun 2020 menjadi Rp.3.545.204.377.544 di tahun 2021 dengan proporsi (38,64% menjadi 28,58%) dengan nilai realisasi investasi secara keseluruhan PMDN/PMA sebesar Rp.12.400.695.584.807. Sedangkan penambahan investasi oleh ITDC sebesar Rp.2.478.578.079.088,24 belum LKPM, sehingga total sementara sebesar Rp.14.879.279.663.896.

Pada kategori PMA selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2021, secara total nilai realisasi investasi mengalami peningkatan. Sektor yang menjadi penyumbang terbesar terhadap nilai realisasi investasi adalah pertambangan/ESDM dengan besaran Rp.2.056.691.339.186 (47,56%) di tahun 2019 dan di tahun 2021 meningkat menjadi Rp.2.574.011.901.192 (72,61%). Untuk lebih jelasnya berikut disajikan perkembangan nilai realisasi investasi PMA menurut sektor kurun waktu tahun 2019 – 2021.

Tabel 2- 137 Realisasi Investasi PMA Menurut Sektor Periode Tahun 2019 – 2021

NO	SEKTOR	Realisasi PMA					
		2019	%	2020	%	2021	%
1	Pariwisata & Ekonomi Kreatif	1.840.003.268.613	42,55	769.024.365.885	17,16	652.896.873.144	18,42

NO	SEKTOR	Realisasi PMA					
		2019	%	2020	%	2021	%
2	Perhubungan Transportasi	229.963.976	0,01	60.571.335.000	1,35	-	0,00
3	Perdagangan	9.325.219.798	0,22	6.486.775.216	0,14	4.487.505.844	0,13
4	Pertanian/Perkebunan & peternakan	148.251.201	0,00	-	-	1.333.600.000	0,04
5	Perkebunan	-	-	-	-	-	0,00
6	Ketenagalistrikan	144.451.529.588	3,34	10.171.996.063	0,23	-	0,00
7	PUPR	167.386.456.266	3,87	90.563.822.100	2,02	231.271.777.967	6,52
8	Kesehatan, Obat dan Makanan	6.385.000	0,00	335.165.517	0,01	2.962.733.347	0,08
9	Lingk. Hidup & Kehutanan	-	-	-	-	1.208.523.999	0,03
10	Kelautan & Perikanan	21.408.413.400	0,50	20.201.006.000	0,45	2.572.568.666	0,07
11	Peternakan	-	-	-	-	-	0,00
12	Pertambangan, Energi (ESDM)	2.056.691.339.186	47,56	3.475.551.047.647	77,53	2.574.011.901.192	72,61
13	Industri/ Perindustrian	20.438.693.816	0,47	4.662.096.377	0,10	1.474.000.000	0,04
14	Pos Telekomunikasi sistem dan transaksi elektronik	-	-	-	-	72.984.893.385	2,06
15	Ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	0,00
16	Jasa Lainnya	64.524.397.963	1,49	45.047.798.696	1,00	-	0,00
17	Pendidikan	-	-	-	-	-	0,00
18	Kuangan	-	-	-	-	-	0,00
	Jumlah	4.324.613.918.807	100,00	4.483.180.742.308	100,00	3.545.204.377.544	100,00

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2021.

Realisasi investasi PMA menurut kabupaten/kota selama tahun 2019 – 2021 juga mengalami fluktuasi, secara umum mengalami penurunan. Pada tahun 2019, daerah yang nilai realisasi investasinya tertinggi adalah Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp.1.245.816.725.156 atau 28,51% dan yang terendah adalah Kota Bima sebesar Rp.9.506.200 atau 0,0002%. Di tahun 2021, nilai realisasi investasi PMA tertinggi berada di Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp.1.521.475.035.708 atau 42,92%, sedangkan yang terendah berada di Kabupaten Bima sebesar Rp.168.292.087 atau 0,004%.

Tabel 2- 138 Realisasi Investasi PMA Menurut Kabupaten/Kota Periode Tahun 2019- 2021

NO	Kabupaten/ Kota	Realiasi PMA					
		2019	%	2020	%	2021	%
1	Kota Mataram	136.132.503.268	3,12	21.027.090.873	0,47	99.950.475.623	2,82
2	Lombok Utara	396.632.183.942	9,08	166.619.510.182	3,72	221.598.732.590	6,25
3	Lombok Barat	527.269.394.644	12,07	343.751.660.411	7,67	244.792.935.564	6,90
4	Lombok Tengah	801.752.724.553	18,35	330.088.229.673	7,36	330.809.588.846	9,33
5	Lombok Timur	294.168.108.036	6,73	62.979.229.182	1,40	11.713.993.826	0,33
6	Sumbawa Barat	1.245.816.725.156	28,51	1.448.493.803.855	32,31	1.521.475.035.708	42,92
7	Sumbawa	517.498.848.008	11,84	45.896.880.438	1,02	30.017.194.987	0,85

8	Dompu	447.763.925.000	10,25	2.061.398.739.600	45,98	1.083.382.078.616	30,56
9	Bima	2.570.000.000	0,06	2.566.968.858	0,06	168.292.087	0,00
10	Kota Bima	9.506.200	0,00	358.629.236	0,01	1.296.049.697	0,04
Jumlah		4.324.613.918.807	100,00	4.483.180.742.308	100,00	3.545.204.377.544	100,00

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2021.

Untuk kategori PMDN, sektor perhubungan transportasi merupakan penyumbang terbesar dari capaian nilai realisasi investasi di tahun 2019 dengan besaran Rp.1.908.976.176.462 (33,50%). Pada tahun 2020, sektor ketenagalistrikan meningkat tajam yang sebelumnya sebesar Rp.297.411.502.724 (5,22%) di tahun 2019 menjadi Rp.2.550.285.364.959 (35,83%). Sedangkan di tahun 2021, sektor Pertambangan, Energi (ESDM) kembali memberikan kontribusi terbesar dengan besaran Rp.2.851.273.829.390 (25,16%).

Untuk sektor PUPR di tahun 2021, terjadi peningkatan nilai realisasi investasi sebagai dampak dari pembangunan infrastruktur pada kawasan ITDC dan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif juga mengalami peningkatan. Ketiga sektor ini merupakan penyumbang terbesar terhadap peningkatan nilai realisasi investasi walaupun di tahun-tahun sebelumnya tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian nilai realisasi investasi. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi pertambangan energi (ESDM), Infrastruktur (PUPR) dan pariwisata ekonomi kreatif menjadi sektor yang masih menjadi potensi dan unggulan di Provinsi NTB.

Tabel 2- 139 Realisasi Investasi PMDN Menurut Sektor Periode Tahun 2019 - 2021

NO	Sektor	Realisasi PMDN					
		2019	%	2020	%	2021	%
1	Pariwisata & ekonomi kreatif	1.088.214.867.228	19,09	694.145.315.315	9,75	2.361.030.370.153	20,83
2	Perhubungan Transportasi	1.908.976.176.462	33,50	1.486.915.009.167	20,89	2.263.446.554.370	19,97
3	Perdagangan	164.661.911.369	2,89	248.356.777.217	3,49	702.687.757.693	6,20
4	Pertanian/perkebunan dan peternakan	7.447.830.070	0,13	2.860.309.150	0,04	134.164.106.288	1,18
5	Perkebunan	-	-	-	-	-	-
6	Kehutanan dan Ling. Hidup	-	-	-	-	895.000.000	0,01
7	Perikanan & perikanan	89.202.137.477	1,57	85.169.482.914	1,20	160.121.623.460	1,41
8	Peternakan	100.460.006.445	1,76	36.237.161.722	0,51	-	-
9	Ketenagalistrikan	297.411.502.724	5,22	2.550.285.364.959	35,83	-	-
10	PUPR	15.734.008.218	0,28	46.909.694.246	0,66	2.602.788.875.013	22,96
11	Kesehatan, Obat & Makanan	199.575.549.331	3,50	43.824.159.039	0,62	48.244.587.322	0,43
12	Pertambangan, Energi (ESDM)	1.542.019.015.485	27,06	1.348.596.392.901	18,95	2.851.273.829.390	25,16
13	Industri/Perindustrian	267.430.297.032	4,69	544.776.583.769	7,65	189.096.308.958	1,67
14	Jasa Lainnya	15.148.685.063	0,27	29.087.967.699	0,41	-	-
15	Ketenagakerjaan	-	-	-	-	14.814.950.922	0,13

NO	Sektor	Realisasi PMDN					
		2019	%	2020	%	2021	%
16	Pos Telekomunikasi, sistem dan transaksi elektronik	-	-	-	-	4.493.320.762	0,04
17	Pendidikan	-	-	-	-	962.002.020	0,01
18	Keuangan	2.897.010.499	0,05	270.000.000	0,00	50.000.000	0,00
	Jumlah	5.699.178.997.403	100,00	7.117.434.218.098	100,00	11.334.069.286.351	100,00

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2021.

Perkembangan positif dari Nilai Realisasi Investasi tidak lepas dari komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk terus melakukan berbagai terobosan diantaranya penetapan NTB sebagai daerah Ramah Investasi sebagai salah satu program unggulan dalam RPJMD NTB tahun 2019-2023. Program ini diwujudkan dalam bentuk pemberian insentif dan berbagai kemudahan penanaman modal dan fasilitas investasi hingga pemasaran. Dimulai regulasi terkait insentif/kemudahan penanaman modal sampai kebijakan penyederhanaan prosedur dan regulasi perizinan, kemudahan persyaratan, waktu pemberian izin hingga penyediaan fasilitas lainnya.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTB khususnya di Layanan Perizinan, sejak tahun 2017 sampai dengan 2019 telah menggunakan aplikasi dan terus dikembangkan baik yang merupakan produk dari OPD daerah maupun dari pusat, dimana saat ini aplikasi yang digunakan adalah OSS (online single Submission). Aplikasi ini lebih memberikan kemudahan kepada pengusaha/investor untuk membuat izin usaha investasinya di daerah. Dengan sistem tersebut pengusaha diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang (registrasi) perusahaannya pada aplikasi OSS dengan membuat NIB (Nomor Induk Berusaha). Kelebihan aplikasi ini adalah mampu memberikan kepastian waktu proses penyelesaian setiap jenis perizinan yang ada pada OSS yang dilaksanakan sesuai dengan standar perizinan. Jenis perizinan dan waktu penyelesaiannya yang diberikan pada tahun 2019, setelah NIB dikeluarkan namun belum berlaku efektif jika belum memenuhi komitmen artinya bahwa perusahaan diharuskan untuk mengurus izin dan izin operasional/komersial yang dilaksanakan di kabupaten/kota. Pada tahun 2021 terjadi perubahan proses perizinan dengan menggunakan aplikasi OSS RBA yang pada prinsipnya pelaksanaan perizinan melalui aplikasi OSS RBA ini sama tetapi ada perbedaan dalam penentuan tingkat resiko izin usaha yang diajukan oleh pelaku usaha.

Tabel 2- 140 Jumlah Bidang Perizinan (Izin dan Non Izin) yang Diterbitkan Tahun 2019-2021

NO	BIDANG PERIZINAN	2019	2020	2021	NON IZIN	2021	JUMLAH
1.	Penanaman Modal	0	0	0	Penanaman Modal	0	0
2.	Perikanan Dan Kelautan	640	636	610	Perikanan Dan Kelautan	0	610
3.	Pertanian &Perkebunan (2021)	3	3	3	Pertanian	0	3

NO	BIDANG PERIZINAN	2019	2020	2021	NON IZIN	2021	JUMLAH
4.	Koperasi & Umkm	3	11	1	Koperasi & Umkm	0	1
5.	Pekerjaan Umum	20	15	36	Pekerjaan Umum	0	36
6.	Kehutanan	7	10	11	Kehutanan	2	13
7.	Lingkungan Hidup & Penelitian	37	46	51	Lingkungan Hidup & Penelitian	0	51
8.	Perindustrian	0	0	0	Perindustrian	0	0
9.	Perdagangan	1	2	1	Perdagangan	3	1
10.	Perkebunan	1	0	0	Perkebunan	0	0
11.	Hubkominfo	45	59	59	Hubkominfo	0	59
12.	Pertambangan/ ESDM (2021)	539	328	195	Pertambangan/ESDM (2021)	0	195
13.	Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	0	Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0
14.	Kesehatan	14	29	16	Kesehatan	0	16
15.	Pariwisata	0	1	0	Pariwisata	0	0
16.	Pertanahan	0	0	0	Pertanahan	0	0
17.	Peternakan	2212	2.685	2.612	Peternakan	0	2.612
18.	Sosial	4	1	4	Sosial	16	20
	Pendidikan (2021)			0	Pendidikan (2021)	0	0
TOTAL		3.664	3.826	3.599		21	3.620

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2021.

13. Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB, pada RPJMD 2019-2023 mengemban tugas untuk mencapai 3 (tiga) indikator kinerja daerah, yakni Prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional, Prestasi Pemuda di tingkat nasional dan internasional, dan Proporsi wirausaha muda. Pencapaian satu indikator kinerja daerah ini pada tahun 2021 telah melampaui target, dan dua target tidak tercapai yaitu prestasi pemuda di tingkat nasional dan internasional dan proporsi wirausaha muda dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi COVID 19, sehingga kegiatan jambore pemuda Indonesia dan pelatihan kewirausahaan tahun 2021 tidak dapat dilaksanakan. Target dan capaian indikator bidang urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2- 141 Capaian Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR BIDANG URUSAN	TAHUN 2020	
			TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga berprestasi	Prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional	35	42
2	Meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga berprestasi	Prestasi Pemuda di tingkat nasional dan internasional	15	6
3	Meningkatnya Wirausaha Pemuda Mandiri	Proporsi wirausaha muda	68,18	68,07

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB, 2021

Indikator prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional pencapaiannya sebanyak 42 medali dari target 35 medali yang sudah ditentukan dalam RPJMD tahun 2019 – 2023. Pencapaian ini merupakan hasil dari kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event. Pada ajang PON XX di Papua telah diraih Emas sebanyak 15 medali, Perak sebanyak 11 medali, dan Perunggu sebanyak 12 medali. Sedangkan di ajang PEPARNAS di Papua telah diraih Emas sebanyak 1 medali dan Perunggu sebanyak 3 medali.

Pembinaan olah raga prestasi juga tetap terus dilakukan pada tahun 2021 melalui program PPLP dan PPLPD agar performa para atlet tetap terjaga sehingga siap dalam menghadapi kompetisi kapanpun dibutuhkan serta mencegah terjadinya penurunan kemampuan serta performa atlet. Program kegiatan ini bertitik fokus pada pembinaan atlet pelajar yang dipusatkan pada Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar PPLP (46) orang dan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD) 12 orang. Jumlah keseluruhan 58 atlet yang berasal dari kabupaten/kota se-NTB melalui sistem seleksi dan pencarian bakat.

Tabel 2- 142 Atlet yang dibina pada Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD) Tahun 2021

No	Nama / Cabang Olahraga	L/P	Tempat Sekolah	Cabor
1	Sovia Indri Andini Y (Lotim)	P	SMPN 13 Mataram	Atletik
2	Rahmaniah (Lotim)	P	SDN 16 Mataram	Atletik
3	Siti Nurhaliza Delina P (Lobar)	L	SMPN 13 Mataram	Atletik
4	Julian Lestari (KLU)	P	SMPN 13 Mataram	Atletik
5	Eli Fitriani (Lotim)	P	SMPN 13 Mataram	Atletik
6	Torik Kulyadit (Mataram)	L	SMPN 13 Mataram	Atletik
7	Rafael Febriano (Mataram)	L	SMPN 13 Mataram	Karate
8	Sandi Ardian Putra (Mataram)	P	SMAN 2 Mataram	Karate
9	Bq Daiva Nur Rizki (Lotim)	P	SMPN 13 Mataram	Karate
10	Gian Muhamad Rasya (Sbw)	L	SMPN 13 Mataram	Karate
11	Komang Rangga (Mtr)	L	SMPN 13 Mataram	Karate
12	Larissa Lakeisha (Mataram)	L	SMAN 2 Mataram	Karate

Sumber: Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi NTB, 2021

Indikator Prestasi Pemuda di tingkat nasional pencapaiannya sebanyak 6 orang, yang merupakan hasil seleksi di tingkat provinsi, untuk mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat di tingkat Nasional. Indikator ini merupakan gabungan dari pemuda yang menerima penghargaan sebagai pemuda pelopor tingkat nasional, Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Nasional dan Pertukaran Pemuda Antar Negara.

Tabel 2- 143 Pemuda Berprestasi di Tingkat Nasional Tahun 2021

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1.	Roza Damayanti Al masus P	Kab. Bima	Pertukaran Pemuda Antar Negara ke Korea
2.	Muhammad Panatagama Syahid	Kab. Lombok Timur	Pertukaran Pemuda Antar Negara ke Singapura

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
3.	Bi Asma Taroa Kasipahua	Kota Mataram	Pertukaran Pemuda Antar Negara ke Jepang
4.	Yasser Ramahdani	Kota Bima	Paskibraka Nasional
5.	Mery Agustina	Kab. Sumbawa Barat	Paskibraka Nasional
6.	Fadillah Ahmad Nur	Kab. Sumbawa	Pemuda Pelopor Tingkat Nasional

Sumber: Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi NTB, 2021

Adapun hasil seleksi Pemuda Pelopor dari Kabupaten/Kota sesuai bidang kepeloporannya pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2- 144 Pemuda Berprestasi di Tingkat Nasional Tahun 2021

No	Nama	Asal Kabupaten/Kota	Peringkat
A. Bidang Pendidikan			
1.	FADILLAH AHMAD NUR	Kab. Sumbawa	I
2.	RANDA ANGGARISTA, M.Pd	Kab. Lombok Tengah	II
3.	ABDUL KHAER	Kab.Lombok Timur	III
B. Bidang Agama, Sosial dan Budaya			
1.	AHMAD HULAEFI, LC	Kab.Lombok Timur	I
2.	LALU AJI SASMI	Kab.Lombok Barat	II
3	SAMSUN AMRI	Kab.Sumbawa	III
C. Bidang Pengelolaan SDA, Lingkungan dan Pariwisata			
1.	HABIBURRAHMAN	Kab.Lombok Barat	I
2.	M. WAHYU NUR ISKANDAR	Kab.Lombok Timur	II
3.	ISRO SUJAIN BILLAH	Kab.Sumbawa	III
D. Bidang Pangan			
1.	MILA NOVIANA,S.Pd	Kab.Lombok Tengah	I
2.	LALU MUHAMMAD IQBAL S.Ak.	Kab.Lombok Barat	II
3.	AMIR SOFYAN	Kota Bima	III
E. Bidang Inovasi Teknologi			
1.	A. RAHMAN, S.Kom	Kab.Sumbawa	I
2.	IRSADUL ASROR,S.Kom	Kab.Lombok Timur	II

Sumber: Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi NTB, 2021

Prestasi seleksi Pemuda Pelopor di Tingkat Nasional, Provinsi NTB pada tahun 2021 berhasil memenangkan Juara I Nasional Bidang Pendidikan, yaitu: Fadillah Ahmad Nur berasal kabupaten Sumbawa. Penghargaan ini diberikan karena peran aktifnya dalam pembangunan yang menjadi penggerak dan pelopor bagi pemuda lain di daerahnya dalam meningkatkan mutu dan kualitas Pendidikan di NTB dan mewujudkan Amanah UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Seleksi Paskibraka merupakan rangkaian pemilihan anggota secara berjenjang mulai dari seleksi tingkat sekolah, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman seleksi yang dikeluarkan oleh PPI pusat. Peserta yang diseleksi yaitu siswa siswi yang berasal dari kabupaten/kota se NTB sebanyak 100 orang, yang kemudian diseleksi menjadi 24 orang untuk paskibraka provinsi dan 2 orang terbaik untuk paskibraka

nasional yang bertugas pengibaran bendera di istana merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus 2021.

14. Bidang Statistik

Pelaksanaan urusan bidang statistik dalam rangka mewujudkan Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi dengan sasaran pembangunan meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan urusan bidang statistik, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi NTB menetapkan sasaran strategis yaitu Meningkatnya kualitas data perangkat daerah dengan indikator kinerja Persentase Data Prioritas Berkualitas yang dimiliki Perangkat Daerah.

Tabel 2- 145 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		Tahun 2021	
			Target Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja
1	Persentase Data Prioritas Berkualitas yang dimiliki Perangkat Daerah	%	n/a	n/a	n/a	n/a	30	98,32

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, 2021

Indikator Persentase Data Prioritas Berkualitas yang dimiliki Perangkat Daerah dengan target kinerja sebesar 30%, capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 98,32%, diperoleh dengan beberapa terobosan yang telah dilakukan Dinas Kominfo yaitu dengan melaksanakan kegiatan rapat klinis statistik, dan melakukan kunjungan ke OPD untuk menjemput data. Dengan adanya rapat klinis, Dinas Kominfo selaku wali data serta OPD sebagai penyedia data lebih leluasa membedah data yang ada pada masing-masing OPD. Data prioritas yang dimaksud disini adalah data statistik sektoral dengan beberapa kriteria tertentu seperti mendukung prioritas pembangunan dalam RPJMD dan telah disepakati bersama dalam forum data NTB. Sedangkan Data Berkualitas adalah data yang telah dilengkapi dengan standard data dan metadata (Perpres no. 39 tahun 2019). Data Prioritas Berkualitas merupakan data prioritas yang telah dilengkapi dengan standard data dan metadata.

Dengan terwujudnya Satu Data NTB diharapkan data statistik sektoral yang ada di tiap OPD mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup pemerintah provinsi NTB telah terkumpul sejumlah 956 jenis data. Persentase tersebut sudah mencapai angka 100 % dari target pengumpulan data sejumlah 550 jenis data. Dari jumlah tersebut, 98.74 % sudah terpublikasi pada Portal Satu Data NTB (<https://data.ntbprov.go.id/>), dan sebesar 1.26 % data belum dipublikasikan karena masih dalam proses verifikasi oleh walidata dalam hal ini dinas kominfo provinsi NTB.

15. Bidang Persandian

Pelaksanaan urusan bidang statistik dalam rangka mewujudkan Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi dengan sasaran pembangunan meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan urusan bidang Persandian, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi NTB menetapkan sasaran strategis yaitu Meningkatkan indeks keamanan informasi dengan indikator kinerja Indeks Kematangan Keamanan Informasi.

Berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja dengan target sebagaimana dituangkan dalam perjanjian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB dan capaian kinerjanya pada urusan bidang Persandian disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2- 146 Capaian Indikator Kinerja Urusan Bidang Persandian Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		Tahun 2021	
			Target Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja
1	Indeks Keamanan Informasi	Level	I+	I+	II	III	II+ (2,5)	II (2,04)

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, 2021

Mengantisipasi terus meningkatnya serangan terhadap system informasi yang digunakan Pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi NTB membentuk NTB-Computer Security Incident Response Team (NTB-CSIRT). CSIRT atau tim yang melakukan identifikasi dan merespons serangan siber dalam system aplikasi atau jaringan computer pemerintah telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No.555 Tahun 2020. CSIRT Provinsi NTB memiliki 16 anggota, dengan didukung oleh sejumlah tenaga fungsional pranata komputer yang tersebar di sejumlah OPD. Selama tahun 2021, terdapat sekitar 15 insiden siber yang ditangani oleh Diskominfotik. Saat ini terdapat 160 aplikasi terdaftar yang digunakan oleh seluruh badan public lingkup Pemprov NTB yang digunakan untuk mendukung pelayanan publik, baik internal maupun eksternal yang harus terjamin keamanannya.

BSSN menunjuk NTB sebagai salah satu provinsi di Indonesia untuk menjadi pilot project penerapan CSIRT. BSSN telah menetapkan 10 provinsi, dan juga kementerian/lembaga sebagai pilot project CSIRT sesuai surat keputusan Kepala BSSN tentang penunjukan instansi pemerintah sebagai pilot project pembentukan CSIRT. NTB terpilih menjadi salah satu provinsi yang dinilai telah memiliki pedoman tata kelola, komitmen dan potensi SDM yang cukup tersedia. Penilaian dari Badan Siber Sandi Negara (BSSN) untuk tahun 2021, menempatkan Provinsi NTB berada pada Level II dari target Level II+. Meski demikian, skor tersebut masih tergolong bagus dalam tingkat keamanan informasi.

Kolaborasi juga dilakukan dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berupa percepatan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di

dua provinsi nusa tenggara, yakni Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Untuk wilayah NTB, BAKTI telah melakukan survey untuk persiapan pembangunan 35 BTS yang pembangunannya ditargetkan selesai pada akhir 2022.

Pemerintah Pusat telah menetapkan Mandalika di NTB dan Labuan Bajo di NTT sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yang harus didukung infrastruktur TIK yang optimal. BAKTI Kominfo juga membangun 9 BTS di wilayah Lombok untuk mendukung persiapan Mandalika yang akan menggelar MotoGP 2022.

Bidang Persandian dan Keamanan Informasi sebagai bagian dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB berupaya meningkatkan Indeks Keamanan Informasi. Melalui program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, bidang persandian mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah NTB agar menggunakan sistem otentikasi dokumen berupa sertifikat elektronik/ tanda tangan digital. Jumlah OPD yang menggunakan tanda tangan elektronik mencapai 32,61% atau 15 OPD.

Selain pemanfaatan tanda tangan elektronik, bidang persandian juga melaksanakan kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi, yaitu melalui pemanfaatan email sanapati. Email sanapati adalah email khusus dengan user tertentu dengan enkripsi yang lebih kompleks sehingga mempunyai tingkat keamanan yang tinggi dan memiliki beberapa kelebihan, yakni proteksi terhadap fake email, spam email, phishing link, dan email bombing. User email sanapati di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di kelola oleh Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik melalui Bidang Persandian Dan Keamanan Informasi. Pada tahun 2021 sebanyak 52,78% atau 19 OPD lingkup pemprov NTB telah memanfaatkan jaring komunikasi sandi melalui email sanapati. OPD tersebut adalah:

1. Sekretariat Daerah;
2. Inspektorat;
3. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan,
4. Dinas Kesehatan,
5. Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang,
6. Dinas Sosial,
7. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi,
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Kependudukan Dan Catatan Sipil,
9. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan,
10. Dinas Komunikasi Dan Informatika,
11. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
12. Dinas Kelautan Dan Perikanan,
13. Dinas Perdagangan,
14. Satuan Polisi Pamong Praja,
15. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah,
16. Badan Kepegawaian Daerah,
17. Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
18. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri,

19. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

16. Bidang Kebudayaan

Capaian kinerja pembangunan daerah urusan bidang kebudayaan diukur dengan indikator Cakupan Cagar Budaya yang direvitalisasi, yang menjadi indikator kinerja daerah dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 untuk bidang kebudayaan. Capaian kinerja ditampilkan pada table dibawah ini.

Tabel 2- 147 Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Urusan Kebudayaan Tahun 2020 – 2021

No	Indikator Bidang Urusan (Satuan)	Tahun 2020		Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
	KEBUDAYAAN				
1	Cakupan cagar budaya yang direvitalisasi (%)	20 %	17,74 %	28,63%	37,47%
2	Indikator PK				
	Bidang Kebudayaan				
	Persentase Cagar Budaya yang dimanfaatkan	20%	17,74%	28,63%	37,47%
	Persentase Sanggar Seni Sekolah yang aktif menyelenggarakan pertunjukan	0	0	20%	52,93%
	Persentase Sekolah yang melaksanakan permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional	0	0	50%	42,55%
	Persentase Sekolah yang diinisiasi untuk membentuk komunitas sejarah	0	0	25%	34,04%
	Persentase Cagar Budaya yang dipugar	5,21%	2,08%	5,21%	1,04%
	PK Taman Budaya				
	Persentase Jangkauan Pengelolaan Kebudayaan			100%	100%
	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan			50%	50%
	Persentase pertunjukan seni yang dilaksanakan			100%	100%
	Persentase eksperimental seni yang dikembangkan			20%	20%
	Persentase olah seni yang dikembangkan			70%	70%
	PK Museum				
	Persentase warisan budaya (koleksi museum) yang dirawat dan dikaji	0	0	25,98 %	47,63 %
	Persentase peningkatan kunjungan Museum			33,33 %	72,209%
	Persentase peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan teknis	0	0	100%	88,95%
	Persentase Penerapan budaya literasi melalui program publik	0	0	36,36%	36,36%

Sumber: Dinas Dikbud, Bidang Kebudayaan, Museum dan Taman Budaya, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian Indikator Kinerja Daerah Cakupan cagar budaya yang direvitalisasi (%) mengalami peningkatan sebesar 130,87 % dari target sebesar 28,63% dan realisasi mencapai 37,47% dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu 17,74% realisasi tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 19,73 %.

Adapun nama dan lokasi situs yang telah direvitalisasi tahun 2021 sebagaimana yang terdapat dalam tabel berikut :

Tabel 2- 148 Cagar Budaya (Situs) yang telah direvitalisasi di Kabupaten / Kota se NTB Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Nama Cagar Budaya (Situs)	Kegiatan Revitalisasi
1.	Mataram		
2.	Lombok Tengah		
3.	Lombok Timur	Makam Segara Muncar	Pemagaran

No	Kabupaten/Kota	Nama Cagar Budaya (Situs)	Kegiatan Revitalisasi
4.	Lombok Barat	Masjid Kuno Karang Bayan	Pemagaran
5.	Lombok Utara		
6.	Sumbawa		
7.	Sumbawa Barat		
8.	Dompu		
9.	Bima		
10.	Kota Bima		

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2021

Pada tahun 2021, UPT Taman Budaya Provinsi NTB menyelenggarakan beberapa event bagi wisatawan mancanegara maupun domestik. Nilai-nilai seni budaya diperkenalkan kepada masyarakat melalui pertunjukan dan pameran tetap, apresiasi film nasional, gelar seni pelajar, pertunjukan musik kreatif dan beberapa event-event lain yang telah diselenggarakan, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2- 149 Kalender kegiatan UPT Taman Budaya Tahun 2021

No	Nama Kegiatan	Tempat Acara	Tanggal/Bulan Pelaksanaan	Jumlah Pengunjung
1.	Pentas Musik Islami	Taman Budaya Ntb	10 April 2021	Undangan 50 Orang Dan Live Streaming
2.	Pentas Tari Tradisi	Taman Budaya Ntb	14 Juni 2021	Undangan 50 Orang Dan Live Streaming
3.	Pentas Musik Religi	Taman Budaya Ntb	16 Juni 2021	Undangan 50 Orang Dan Live Streaming
4.	Pentas Sastra Tradisi	Taman Budaya Ntb	16 Agustus 2021	Undangan 50 Orang Dan Live Streaming
5.	Pentas Musik Tradisi	Taman Budaya Ntb	19 Agustus 2021	Undangan 50 Orang Dan Live Streaming
6.	Pentas Evaluasi Olah Seni I	Taman Budaya Ntb	22 Agustus 2021	Undangan 50 Orang Dan Live Streaming
7.	Pentas Teater Modern	Taman Budaya Ntb	23-24 Agustus 2021	Undangan 50 Orang Dan Live Streaming
8.	Pentas Teater Tradisi	Taman Budaya Ntb	25-26 Agustus 2021	Undangan 50 Orang Dan Live Streaming
9.	Gebyar Seni Pelajar	Taman Budaya Ntb	8-11 September 2021	Undangan 50 Orang Dan Live Streaming
10.	Pentas Seni Tradisi	Taman Budaya Ntb	21-23 September 2021	Undangan 50 Orang Dan Live Streaming
11.	Eksperimentasi Seni Tradisi	Taman Budaya Ntb	25 September 2021	Undangan 50 Orang Dan Live Streaming
12.	Wayang Sasak	Taman Budaya Ntb	28 September 2021	Undangan 50 Orang Dan Live Streaming
13.	Pentas Seni Slb	Taman Budaya Ntb	6 Oktober 2021	Undangan 50 Orang Dan Live Streaming
14.	Festival Musik Anak-Anak	Taman Budaya Ntb	25-27 Oktober 2021	Undangan 50 Orang Dan Live Streaming
15.	Pentas Sastra Modern	Taman Budaya Ntb	12 November 2021	Undangan 50 Orang Dan Live Streaming
16.	Koreografer Muda	Taman Budaya Ntb	13 November 2021	Undangan 50 Orang Dan Live Streaming
17.	Pentas Evaluasi Olah Seni Ii	Taman Budaya Ntb	14 November 2021	Undangan 50 Orang Dan Live Streaming
18.	Festival Tari Tradisi Dewasa	Taman Budaya Ntb	16-18 November 2021	Undangan 50 Orang Dan Live Streaming
19.	Pameran Seni Rupa	Taman Budaya Ntb	22-28 November 2021	Undangan 50 Orang Dan Live Streaming

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2021

Kunjungan masyarakat dan wisatawan ke Museum Negeri NTB pada tahun 2021 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019. Penurunan jumlah pengunjung ini disebabkan karena adanya pandemic covid 19 dimana pemerintah menerbitkan aturan protocol Kesehatan untuk menjauhi/menghindari dan mencegah menciptakan kerumunan. Jumlah pengunjung Museum Negeri Provinsi NTB tahun 2016-2021 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2- 150 Pengunjung Museum Negeri Provinsi NTB Tahun 2017-2021

NO	JENIS PENGUNJUNG	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	TK	11.438	15.196	19.398	2.199	3.166
2	SD	22.772	19.885	19.983	1.652	2.817
3	SLTP	16.398	11.675	11.022	711	1.443
4	SLTA	10.041	8.449	5.360	789	2.273
5	Mahasiswa	3.666	1.107	1.071	348	1.062
6	Peneliti	6	12	2	11	7
7	WTA (Wisatawan Asing)	1.667	1.323	1.562	391	25
8	RTD (Rombongan Tamu Daerah)	92	25	0	25	41
9	RTN (Rombongan Tamu Negara)	15	4	0	0	0
10	Pengunjung Umum	21.960	25.120	32.135	3.262	4.672
JUMLAH		88.055	82.796	90.533	9.388	15.506

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2021

Jumlah pengunjung museum untuk tahun 2021 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 15.506 (Lima belas ribu lima ratus enam) orang pengunjung atau meningkat sebanyak 65,16% jika dibandingkan dengan jumlah pengunjung tahun lalu yaitu sebanyak 9.388 Orang hal ini disebabkan karena berbagai upaya yang dilakukan oleh museum negeri untuk meningkatkan jumlah pengunjungnya diantaranya dengan melakukan event atau agenda kegiatan sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2- 151 Kalender Kegiatan Museum Negeri Provinsi NTB Tahun 2021

No	Kegiatan	Tempat	Waktu
1.	Konservasi Koleksi	Museum	Januari – Desember
2.	Inventarisasi Koleksi	Museum	19 s/d 20 April 2021 1 s/d 2 September 2021
3.	Diskusi Museum	Museum	27 Juli s/d 1 Oktober 2021
4.	Pengkajian Koleksi Wayang Sasak dan Tembe Songke	Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Barat, Kota Bima	24 Mei s/d 27 November 2021
5.	Sosialisasi Museum	Sembalun, Ganggadan Marong Lombok Tengah	29 Juni 2021, 09 September 2021, 16 September 2021
6.	Revitalisasi Museum	Museum	30 Agustus s/d 29 November 2021
7.	Katalogisasi iKoleksi	Museum	24 Agustus 2021 dan 20 Desember 2021
8.	Pemutahiran Data Koleksi	Museum	Januari – Desember
9.	Sekolah Filologika	Museum	27 April s/d 21 Oktober 2021
10.	Ahli Aksara dan Alih Bahasa	Museum	21 Mei dan 19 Agustus 2021

No	Kegiatan	Tempat	Waktu
11.	Buletin Museum	Museum	April dan Oktober
12.	Aplikasi Koleksi Ruang Pameran	Museum	April
13.	Aplikasi Sistem Informasi Koleksi Museum	Museum	Maret
14.	Pameran Keliling	Pancorden Praya	21 s/d 25 Juni 2021, 12 s/d 16 Oktober 2021
15.	Pameran Temporer (Wastra dan Naskah)	Museum	08 s/d 14 November 2021 07 s/d 12 Desember 2021
16.	Museum Keiling	SMPN 03 Kuripan, SMPN 1 Praya, SMPN 1 Sakra, MTSN 02 Lombok Barat, SD- SMPN 13 Satap Pujut	08 Juli s/d 16 Desember 2021
17.	Pepaosan	Museum	27 September 2021
18.	Cerdas Cermat Museum	Museum	12 s/d 14 Agustus 2021
19.	Lomba Melukis Ritual Budaya	Museum	24 Juni 2021
20.	Museum untuk Disabilitas	Museum	03 Desember 2021
21.	Olimpiade Cagar Budaya	Museum	10 November 2021
22.	Belajar Bersama Di Museum	Museum	29 Oktober 2021
23.	Kuliah di Museum	Museum	30 April s/d 28 Oktober 2021
24.	Bincang – bincang Museum	Museum	29 s/d 30 September, 09 November, 22 s/d 24 November 2021
25.	Pentas Seni Pelajar	Museum	28 Juni s/d 26 November 2021
26.	Renovasi Tata Pameran	Museum	April s/d Oktober

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2021

Sepanjang tahun 2021 museum negeri telah melakukan sekitar 26 kegiatan baik secara langsung maupun melalui metode daring untuk menarik minat pengunjung ke Museum dan hal ini berbuah manis yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kunjungan sebanyak 65,41% dari jumlah kunjungan tahun 2020.

17. Bidang Perpustakaan

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan Tahun 2021 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan indikator bidang urusan berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah Peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Provinsi NTB. Target dan capaian indikator bidang urusan bidang perpustakaan tahun 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2- 152 Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Urusan Perpustakaan Tahun 2019-2021

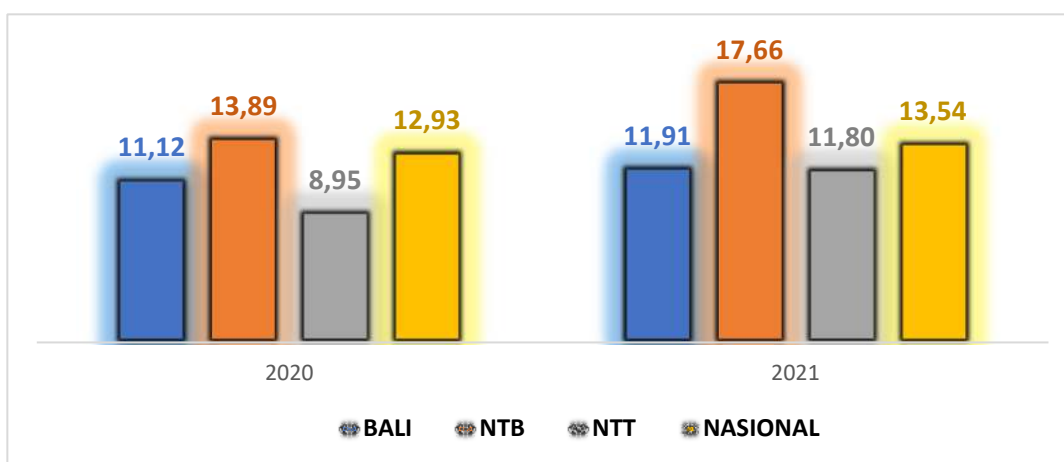
NO	INDIKATOR BIDANG URUSAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Provinsi NTB	13,89	13,89	13,95	17,66

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, 2021

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota)

dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Indeks ini dirilis oleh Perpustakaan Nasional RI sebagai Instansi Pembina Perpustakaan di seluruh Indonesia. Dari rilis Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk Hasil Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi NTB tahun 2021 adalah 17,66 meningkat 3,77 poin dari tahun 2020 yang sebesar 13,89. Secara Nasional, Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi NTB tahun 2021 berada pada urutan 10 besar, naik 4 peringkat dibandingkan pada tahun 2020 pada posisi 14. Jika dibandingkan hasil IPLM untuk Provinsi NTB, NTT, Bali dan Nasional hasil yang dicapai oleh Provinsi NTB adalah yang paling baik. Lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2- 48 Perkembangan IPLM Provinsi NTB, NTT, Bali dan Nasional Tahun 2020 - 2021



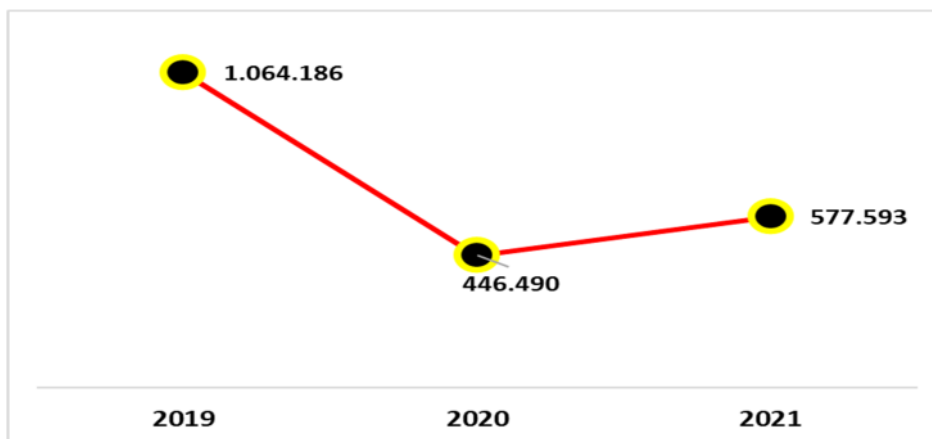
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, 2021

Perkembangan teknologi informasi memiliki dampak yang cukup signifikan di segala bidang kehidupan, tak terkecuali di bidang pustaka. Pada saat ini banyak dijumpai Perpustakaan Digital yang merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan perpustakaan untuk meningkatkan layanan perpustakaannya. Inovasi-inovasi yang dihasilkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terkait pemanfaatan teknologi informasi antara lain dengan diluncurkannya aplikasi perpustakaan digital yang di branding dengan nama NTBelib, yang menyediakan koleksi-koleksi buku digital yang dapat diakses secara online oleh pemustaka dengan terlebih dahulu mengunduh aplikasi tersebut yang telah tersedia di Playstore. Selain itu juga terdapat aplikasi iDepositNTB, yang menyediakan buku-buku digital konten lokal NTB. Selain itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB meluncurkan Mobil Kafe Literasi Keliling, yaitu Mobil Perpustakaan Keliling yang dikemas dan di branding secara lebih milenial, untuk menarik minat generasi muda untuk membaca buku di Mobil Perpustakaan keliling yang menyediakan minuman panas gratis bagi pemustaka yang datang berkunjung.

Berbagai kegiatan dilakukan dalam rangka menarik minat dan budaya baca masyarakat, hal ini terlihat dari angka kunjungan ke Perpustakaan yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2021 terjadi peningkatan angka kunjungan

karena layanan sudah berjalan normal dibandingkan pada tahun 2020 dimana pandemi COVID-19 masih masif yang berakibat pelayanan untuk perpustakaan sempat ditutup selama hampir 6 bulan. Perkembangan jumlah pengunjung ke perpustakaan disajikan pada grafik berikut.

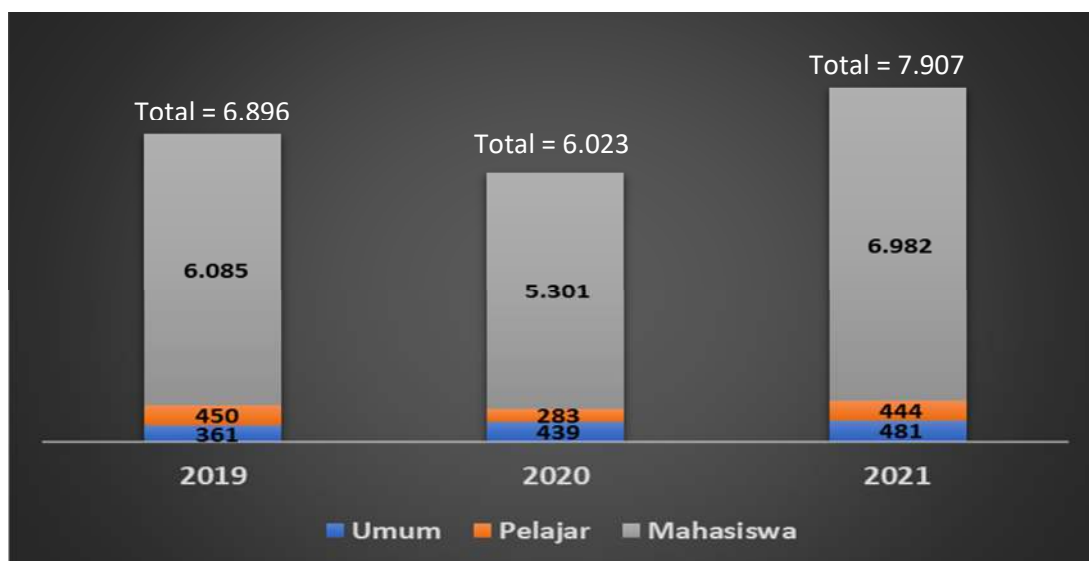
Gambar 2- 49 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Provinsi NTB Tahun 2019 - 2021



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, 2021

Sedangkan untuk jumlah anggota perpustakaan tiap tahunnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 jumlah anggota yang terdaftar sebanyak 6.896 orang, selanjutnya pada tahun 2020 menurun menjadi 6.023 orang. Sedangkan pada tahun 2021, jumlah anggota perpustakaan meningkat menjadi 7.907 orang. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan perkembangan jumlah anggota perpustakaan selama tahun 2019 sampai dengan 2021.

Gambar 2- 50 Jumlah Anggota Perpustakaan Tahun 2019- 2021



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, 2021

Untuk menumbuhkembangkan minat baca, peran berbagai pihak sangat dibutuhkan salah satunya ialah upaya dari pihak pengelola perpustakaan untuk menarik minat masyarakat untuk lebih gemar membaca. Salah satunya ialah dengan menambah koleksi dan keanekaragaman jenis buku bacaan maupun buku ilmiah dengan berbagai sumber. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyediakan berbagai judul dan jumlah koleksi buku sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2- 153 Judul dan Jumlah Koleksi Buku di Perpustakaan Provinsi NTB Tahun 2019 - 2021

NO	URAIAN	2019	2020	2021
1	Judul Buku	100.250	101.433	103.658
2	Eksemplar	328.355	328.651	331.800

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, 2021

18. Bidang Kearsipan

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan Tahun 2021 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan indikator bidang urusan berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah Persentase Pengolahan Arsip yang Terselamatkan. Target dan capaian indikator bidang urusan bidang kearsipan tahun 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2- 154 Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Urusan Kearsipan Tahun 2021

NO	INDIKATOR BIDANG URUSAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Persentase Pengolahan Arsip yang terselamatkan	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, 2021

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB menetapkan indikator urusan bidang kearsipan yaitu Persentase Pengolahan Arsip yang terselamatkan dengan target sebesar 100 persen. Secara umum capaian realisasi kinerja mencapai target yang ditentukan yaitu 100%, dokumen-dokumen yang merupakan arsip daerah dilakukan dengan pengelolaan secara baik dan sesuai standar yang ditetapkan. Upaya yang telah dilakukan dalam pengelolaan arsip di Provinsi NTB disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2- 155 Upaya Pengelolaan Arsip Tahun 2019 - 2021

NO	URAIAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1.	Peningkatan Khasanah arsip statis (berkas)	26.000	26.100	-	-	-	-
2.	Jumlah Arsip Perangkat Daerah/Lembaga (berkas)	14.400	14.400	15.000	15.000	20.000	20.000
3.	Pengembangan Arsip Desa / Kelurahan (Desa)	1.000	12	-	-	-	-
4.	Record centre (Perangkat Daerah)	15	15	21	21	21	21

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, 2021

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB memfasilitasi perangkat daerah untuk melaksanakan penataan arsip secara baku/record centre yang dilaksanakan secara bertahap dari tahun 2016. Secara total Perangkat Daerah yang telah melaksanakan penataan arsip secara baku/record centre sampai dengan tahun 2021 sebanyak 21 Perangkat Daerah sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2- 156 Daftar Nama OPD yang Telah Memiliki Record Center sampai dengan Tahun 2021

No	OPD	KETERANGAN
1.	Dinas Perdagangan Provinsi NTB	
2.	Dinas Perhubungan Provinsi NTB	
3.	Inspektorat Provinsi NTB	
4.	Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB	
5.	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTB	
6.	Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi NTB	
7.	Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi NTB	
8.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB	
9.	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB	
10.	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB	
11.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTB	
12.	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi NTB	
13.	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB	
14.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB	
15.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB	
16.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTB	
17.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB	
18.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi NTB	
19.	Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTB	
20.	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB	
21.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB	

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, 2021

C. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

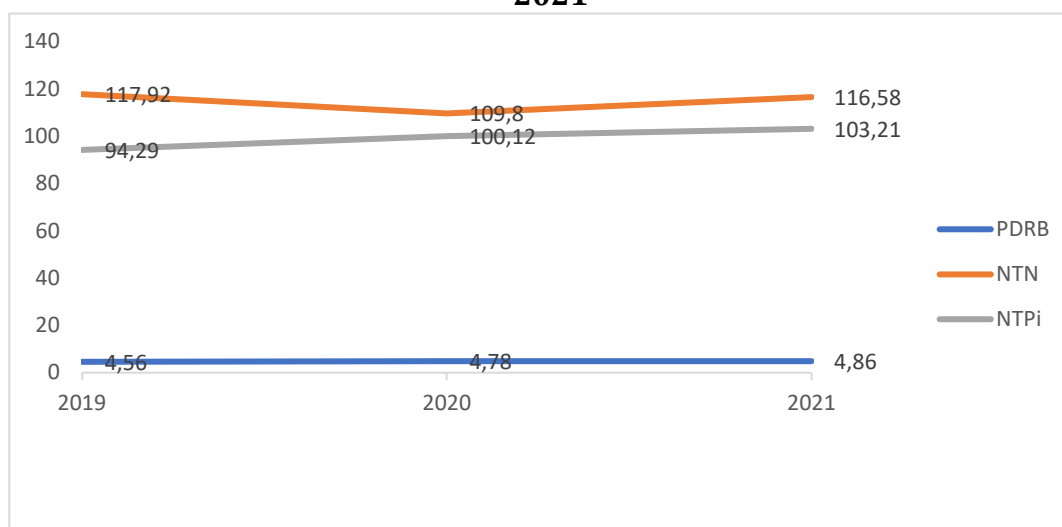
Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah. Urusan pemerintahan pilihan terdiri dari kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, dan perindustrian.

1. Bidang Kelautan Dan Perikanan

Pada tahun 2021 Kontribusi PDRB sektor perikanan ditargetkan sebesar 4,77% dan tercapai sebesar 4,86%. Selain capaian PDRB, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB dalam Dokumen RPJMD Provinsi NTB 2019 – 2023, juga mengemban indikator kinerja untuk peningkatan Nilai Tukar Nelayan (NTN), yang pada tahun 2021 sebagaimana data rilis BPS pada bulan Januari 2022 yang merilis angka NTN per bulan Desember 2021 mencapai angka 116,58 point dan untuk Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) sebesar 103,21 point.

Perkembangan capaian kinerja PDRB, NTN dan NTPi tahun 2019 – 2021 disajikan pada grafik di bawah ini:

Gambar 2- 51 Perkembangan capaian kinerja PDRB, NTN dan NTPi tahun 2019 – 2021



Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 2021

Sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan urusan Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yaitu (1) Meningkatnya produksi perikanan dengan indikator kinerja Produksi perikanan (ton) dan Persentase peningkatan produksi perikanan (%); (2) meningkatnya konsumsi ikan masyarakat dengan indikator kinerja Angka Konsumsi Ikan (kg/kap/thn) dan Persentase peningkatan angka konsumsi ikan (%). Adapun target dan capaian kinerja pada Bidang Kelautan dan Perikanan pada tahun 2021 diuraikan sebagai berikut.

1. Capaian Kinerja Utama Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB

Berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja dengan target sebagaimana dituangkan dalam perjanjian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB dan capaian kerjanya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2- 157 Capaian Indikator Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	INDIKATOR KINERJA	2019		2020		2021	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Produksi perikanan (ton)	1.376.657	1.373.820,47	1.406.469	1.136.253,86	1.436.947	1.175.476,43*
	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan (%)	1,69	7,06	2,56	(17,29)	2,23	3,44
2	Angka Konsumsi Ikan (kg/kap/thn)	49,52	49,52	51,00	50,21	52,00	51,12 *
	Persentase Peningkatan Angka Konsumsi Ikan (%)	29,63	29,63	2,98	1,39	1,96	1,81

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 2021

* Angka Sementara

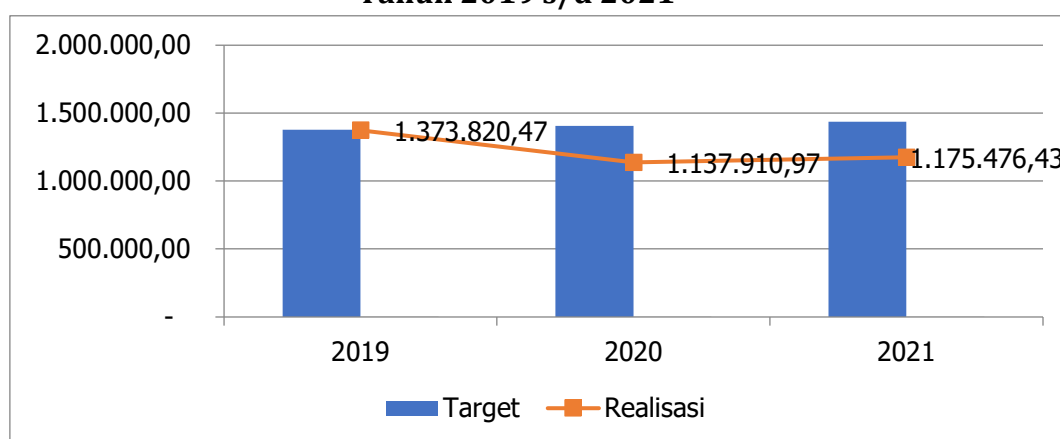
1.a. Capaian Produksi Perikanan

Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2021 dimana capaian PDRB sector perikanan diperkirakan tercapai sebesar 4,78%,

capaian kinerja sasaran pembangunan kelautan dan perikanan mencatat angka capaian produksi perikanan sebesar 1.175.476,43 ton. Angka ini merupakan angka sementara yang dirilis, karena penetapan angka hasil validasi belum dilakukan. Kinerja produksi perikanan merupakan variabel pembentuk PDRB sector perikanan secara langsung. Jika melihat angka pada tabel diatas, produksi perikanan selama kurun waktu 3 tahun terakhir ini mengalami fluktuasi. Produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya yang menjadi variable pembentuk produksi perikanan memperlihatkan trend yang sama, yaitu sama-sama memperlihatkan trend penurunan produksi pada tahun 2020, dan kemudian meningkat juga produksinya secara bersamaan pada tahun 2021. Berdasarkan angka sementara, capaian produksi perikanan pada tahun 2021 tercapai sebesar 81,42 % dari target 1.436.947 ton. jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, produksi Tahun 2021 ini meningkat sebesar 3,44% dari target peningkatan persentase produksi yang ditargetkan sebesar 2,23%. Capaian produksi tahun 2020 turun sebesar 17,29% dari realisasi produksi tahun 2019 yang mencatat angka produksi sebesar 1.373.820,47 Ton.

Berikut Perkembangan Capaian Produksi Perikanan Terhadap Target Tahun 2019 s/d 2021.

Gambar 2- 52 Perkembangan Capaian Produksi Perikanan Tahun 2019 s/d 2021

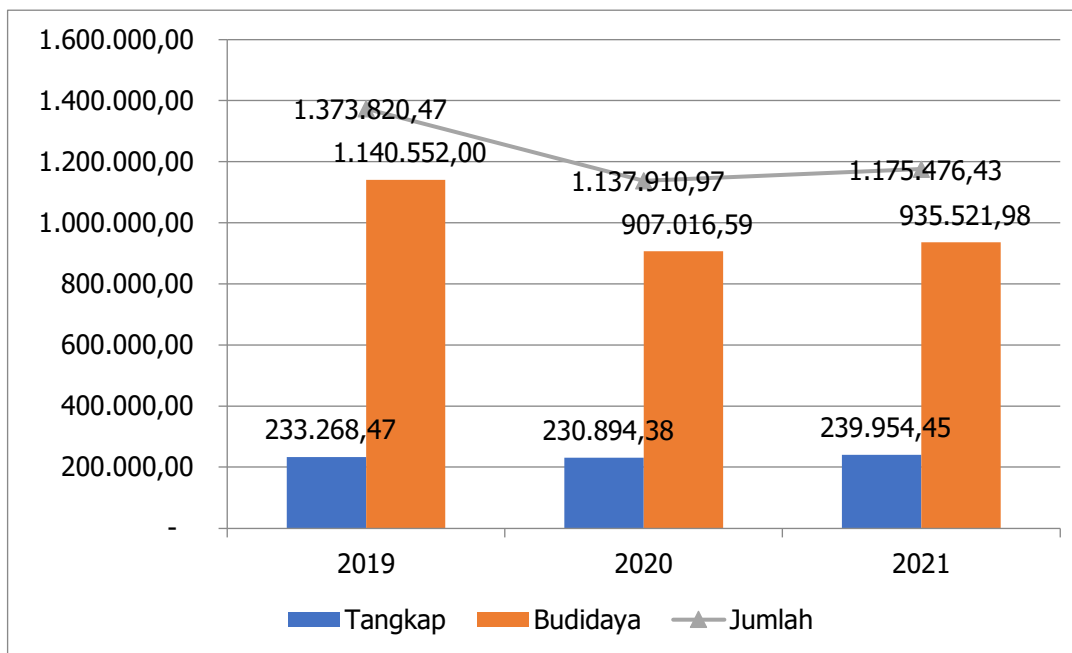


Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 2021

Perkembangan data produksi perikanan berdasarkan variabel data pembentuknya tahun 2019 s/d 2021 disajikan pada grafik di bawah ini :

Gambar 2- 53 Perkembangan Produksi Perikanan berdasarkan capaian produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya di Provinsi NTB Tahun 2019 – 2021

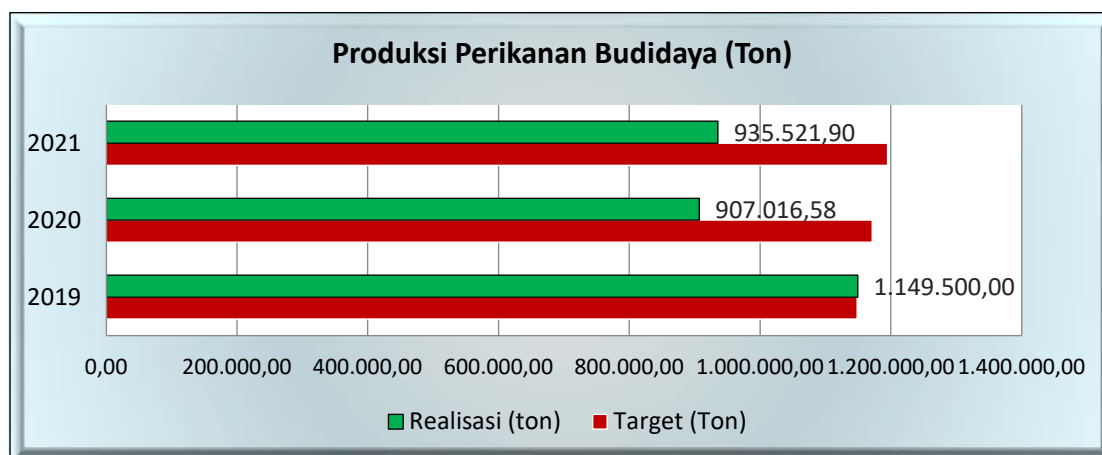
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 2021



1.a.1. Produksi Perikanan Budidaya

Produksi perikanan budidaya tahun 2021 diperkirakan sebesar 935.521,98 ton atau tercapai 78,28 % dari target sebesar 1.195.104 ton, dan meningkat sebesar 3,14 % dibanding dengan produksi tahun 2020, yang mencapai produksi sebesar 907.016,59 ton, serta menurun sebesar 17,98 % dibanding dengan produksi tahun 2019, yang mencatat produksi sebesar 1.140.552 ton. Berikut perkembangan produksi perikanan budidaya tahun 2019 s/d 2021 dilihat dari targetnya:

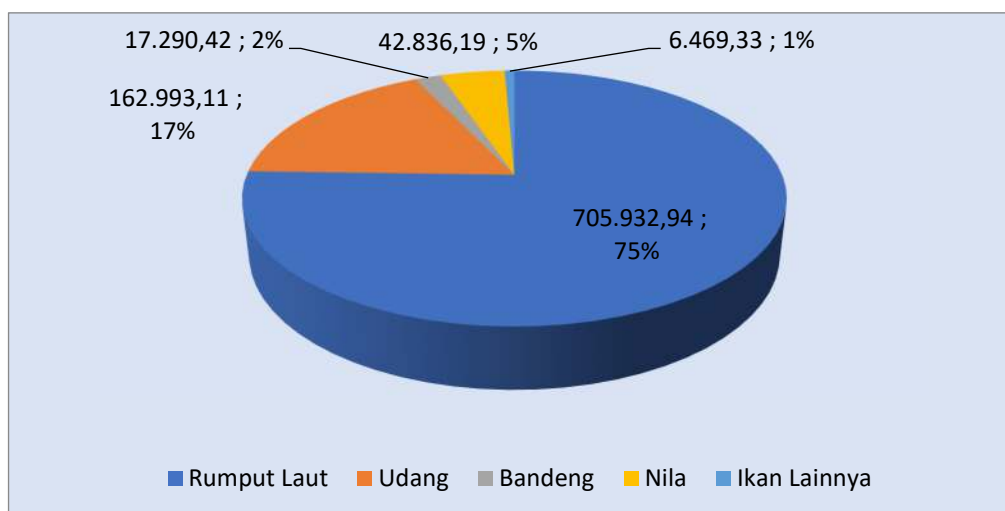
Gambar 2- 54 Capaian Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Target Tahun 2019 s/d 2021



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 2021

Berikut grafik proporsi per jenis komoditas penting dan paling dominan pada produksi perikanan budidaya tahun 2021

Gambar 2- 55 Proporsi per jenis komoditas penting dan paling dominan pada produksi perikanan budidaya tahun 2021



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 2021

Walaupun dari sisi pencapaian targetnya belum tercapai tetapi terlihat peningkatan produksi sebesar 3,14% dibandingkan dengan sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas budidaya diakibatkan oleh meningkatnya produktivitas produksi khususnya pada komoditas rumput laut, udang dan lobster.

Tabel 2- 158 Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya Per Komoditas Tahun 2019 – 2021

No.	Jenis Ikan	Produksi Jenis Ikan Perikanan Budidaya (Ton)		
		2019	2020	2021*
1	Rumput Laut	896,760.37	677,110.76	705,932.94
2	Lobster	-	68.01	137.72
3	Kerapu	751.15	488.11	386.90
4	Udang	156,046.29	159,013.10	162,993.11
5	Bandeng	23,106.69	17,577.67	17,290.42
6	Nila	51,233.26	44,075.59	42,836.19
7	Lele	5,842.48	3,703.57	2,470.03
8	Mas	3,371.51	3,435.18	1,987.43
9	Gurame	228.87	115.26	109.67
10	Ikan Lainnya	3,211.50	1,429.36	1,377.61
	Jumlah	1,140,552.11	907,016.59	935,521.98
Catatan : * Angka Sementara belum di Validasi				

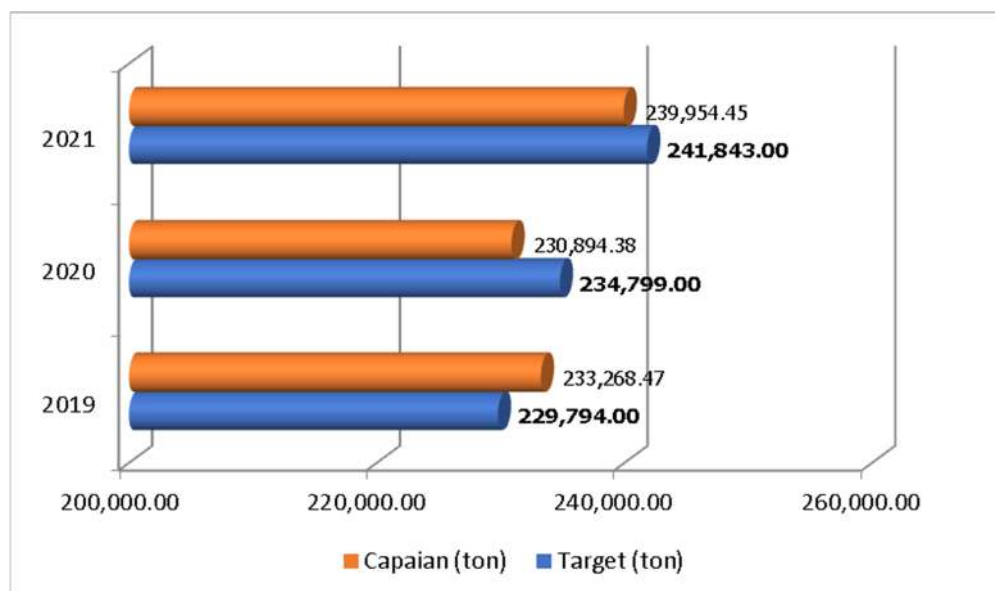
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 2021

1.a.2. Produksi Perikanan Tangkap

Perkembangan produksi perikanan tangkap pada tahun 2021, meningkat sebesar 3,92% dibandingkan dengan produksi tahun 2020, dimana tahun 2020 produksi perikanan tangkap sempat menurun pada angka minus 1,02 % dibandingkan tahun 2019. Capaian produksi perikanan tangkap tahun 2021 sebesar 99,22% dari target atau tercapai sebesar 239.954,45 ton dari target

sebesar 241.843 ton. Perkembangan capaian produksi perikanan tangkap berdasarkan target tahun 2019 s/d 2021 disampaikan sebagai berikut:

Gambar 2- 56 Perkembangan Capaian Produksi Perikanan Tangkap Dibandingkan dengan Target Tahun 2019 - 2021



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 2021

Peningkatan produksi untuk jenis ikan-ikan tersebut memperlihatkan trend positif terhadap perkembangan kegiatan penangkapan ikan pada tahun 2021 pasca menurunnya produksinya tahun 2020 akibat dari pembatasan aktivitas penangkapan dan permintaan ikan saat pandemic covid-19 melanda dunia pada akhir tahun 2019 lalu. Berikut perkembangan data produksi perikanan tangkap Berdasarkan Jenis Usaha dan jenis Komoditas dan Usaha tahun 2019 s/d 2021

Tabel 2- 159 Perkembangan data produksi perikanan tangkap Berdasarkan Jenis Usaha dan jenis Komoditas dan Usaha tahun 2019 s/d 2021

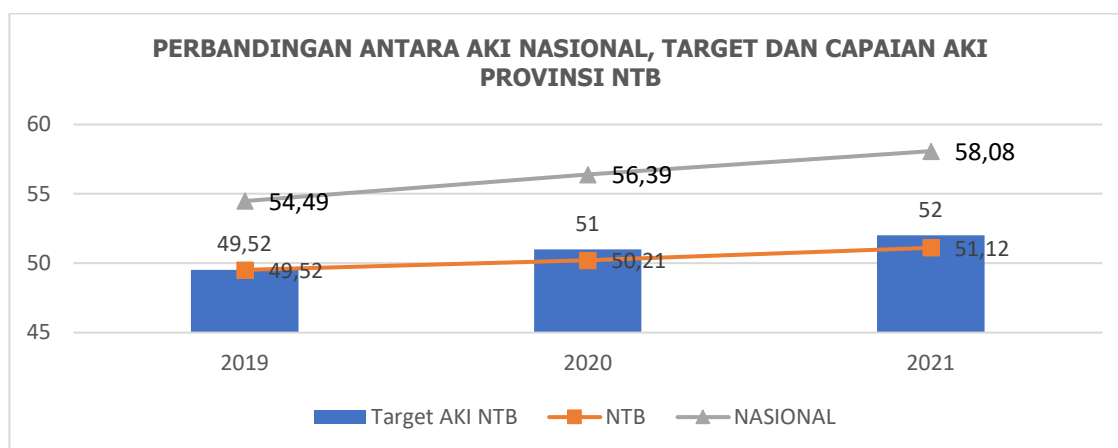
URAIAN/NAMA IKAN	PRODUKSI TAHUN (Ton)		
	2019	2020	2021
Cakalang	14,459.77	7,818.28	12,617.03
Tongkol	38,888.28	30,027.18	21,908.62
Tuna	10,482.62	6,761.73	7,320.46
Udang	3,257.88	2,908.64	2,800.39
Rumput Laut	47,903.86	60,044.88	55,870.06
Ikan Lainnya	114,254.88	119,715.68	135,529.13
Produksi Tangkap Laut	229,247.29	227,276.39	236,045.69
Produksi Perairan Umum Daratan	4,021.18	3,617.99	3,908.76
Total Produksi PT	233,268.47	230,894.38	239,954.45

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 2021

1.b. Kinerja Angka Konsumsi Ikan

Pada Tahun 2021 Angka konsumsi ikan diperkirakan tercapai sebesar 51,12 Kg/Kap/Tahun dari target sebesar 52,00 Kg/Kap/Tahun yang diperoleh berdasarkan hasil estimasi produksi perikanan dan raw data hasil susenas BPS Tahun 2021. Angka ini meningkat 1,81% dibanding dengan AKI 2020 sebesar 50,21 Kg/Kap/Tahun dan meningkat 3,23% dibandingkan tahun 2019 sebesar 49,52 Kg/Kap/Tahun. Capaian kinerja AKI 51,12 Kg/Kap/Tahun masih rendah jika dibandingkan dengan capaian angka konsumsi ikan nasional yang mencapai angka 56,39 Kg/Kap/Tahun.

Gambar 2- 57 Perkembangan Angka Konsumsi Ikan Nasional, Target dan Capaian AKI Provinsi NTB Tahun 2019 – 2021



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 2021

Selain kegiatan-kegiatan reguler yang dilaksanakan dalam pencapaian kinerja produksi, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB melalui program pengelolaan perikanan budidaya juga melaksanakan program unggulan yaitu Budidaya Lobster. Dimana pada tahun 2021 produksi Lobster mencatat angka produksi sebesar 137,72 ton yang berasal dari 2 kabupaten yaitu Kabupaten Sumbawa dan Lombok Timur. Angka produksi ini meningkat 102,48% dibandingkan produksi tahun 2020 yang mencatat angka produksi sebesar 68,01 ton. Pengembangan program unggulan ini lebih banyak didukung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI melalui APBN Murni yang dimulai pada tahun 2020, pasca dicabutnya PermenKP no. 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berikut perkembangan produksi Lobster di Provinsi NTB Tahun 2019 -2021.

Tabel 2- 160 Data Produksi Lobster (Ton) di Provinsi NTB Tahun 2019 s/d 2021

Wilayah	2019	2020	2021
Lombok Timur	-	68,01	128,902
Lombok Tengah	-	-	8,795
Sumbawa	-	-	0,025
Nusa Tenggara Barat	-	68,01	137,722

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 2021

Produksi Lobster ini diharapkan akan terus meningkat dengan dicanangkannya Kabupaten Lombok Timur sebagai salah satu lokasi pengembangan produksi Lobster di Indonesia, mengingat besarnya potensi dan ketersediaan benih yang berlimpah di sepanjang perairan Nusa Tenggara Barat. Tercatat 107 kelompok pembudidaya Lobster yang tersebar di Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah, Sumbawa, dan Bima.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB dalam pelaksanaan Program unggulan Industrialisasi Garam sebagai salah satu sentra garam nasional mendukung upaya pemerintah dalam swasembada garam. Walaupun pada kenyataannya sekarang, sebagian besar stok garam hasil produksi belum terserap pasar yang diakibatkan oleh rendahnya kualitas dan mutu garam. Banyak factor teknis dalam pengelolaan produksi garam yang perlu dibenahi sehingga kedepannya kualitas produksi bisa ditingkatkan lebih baik dengan kuota yang lebih banyak dari kuota dengan kualitas rendah.

Tabel 2- 161 Perkembangan Capaian Produksi Garam Provinsi NTB Tahun 2019-2021

Sasaran	Indikator Kinerja	2019			2020			2021		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Produksi Garam	Jumlah Produksi Garam (Ton)	180.000	169.092,37	86,51	190.000	162.987,15	85,78	175.000	108.803,66*)	62,41

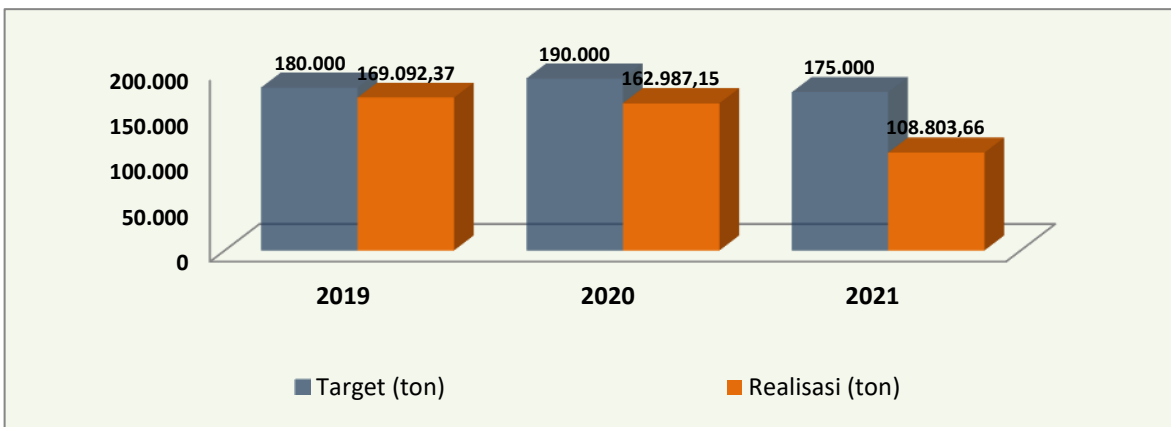
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 2021

Pada Tahun 2021 terdapat 6 kelompok petambak garam yang diberikan pembinaan dan sarana prasarana usaha garam antara lain:

- Kelompok So Ompu Hima Kab. Bima berupa rumah tunnel garam
- Kelompok Nanga Bangka Kab Sumbawa berupa rumah tunnel garam
- Kelompok Koperasi Syariah Bina Laut Kab. Lombok Barat. berupa Pembangunan Gudang Garam ukuran 1.000 ton
- Kelompok Bertong Bangkit Kab Lobar, berupa revitalisasi gudang garam rakyat ukuran <100 ton
- Kelompok Nanga Bangka Kab Sumbawa berupa integrasi pergaraman 8-15 Ha
- Kelompok So Lato Palina'e Kab. Bima berupa integrasi pergaraman 8-15 Ha

Pada tahun 2021 luas lahan potensial untuk Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di NTB seluas 3.725 Ha, yang sudah dimanfaatkan seluas 2.331 Ha yang tersebar di 6 (enam) Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan jumlah kelompok usaha garam rakyat sampai dengan tahun 2021 sebanyak ± 578 kelompok dengan jumlah anggota ± 5.263 orang.

Gambar 2- 58 Perkembangan Capaian Produksi Garam Tahun 2019 s/d 2021



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 2021

Berdasarkan grafik diatas, capaian produksi garam 2019-2021, terjadi trend penurunan produksi garam. Tahun 2021 upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB dalam pengembangan usaha garam ini tidak hanya berupaya untuk meningkatkan jumlah/kuota produksi garam saja, akan tetapi juga lebih kepada peningkatan kualitas hasil produksi garam yang mana produksi terbaik dengan kualitas K1 masih 10% dari total produksi tahun 2021. Kualitas yang masih belum standar yang menyebabkan lemahnya akses pemasarannya. Oleh karena itu upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan produksi dan kualitas produksi garam adalah: perbaikan infrastruktur, rumah tunnel dan bantuan plastik geoisolator untuk meningkatkan sarana dan prasarana usaha petambak garam dan peningkatan kapasitas SDM Petambak Garam.

Tabel 2- 162 Proporsi kontribusi terhadap total produksi garam Provinsi NTB Tahun 2020 - 2021

No.	Kabupaten/Kota	2020		2021	
		Realisasi produksi (Ton)	Proporsi terhadap total produksi (%)	Realisasi produksi (Ton)	Proporsi terhadap total produksi (%)
1.	Bima	138.392,45	84,91	102.813,85	94,50
2.	Lombok Tengah	3.376,76	2,07	3.487,80	3,21
3.	Lombok Timur	14.801,41	9,08	597,08	0,005
4.	Sumbawa	5.567,00	3,42	1.540,00	1,42
5.	Lombok Barat	828,92	0,51	116,24	0,11
6.	Kota Bima	20,61	0,01	248,69	0,23
Jumlah		162.987,15	100	108.803,66	100

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 2021

Perkembangan usaha garam di Provinsi NTB sebagian besar didukung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut melalui Program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) yang alokasi anggarannya bersumber dari Dana Tugas Pembantuan (TP) yang diberikan kepada Kabupaten sentra garam. Pada tahun 2021 KKP memberikan alokasi anggaran pada 3 (tiga) Kabupaten melalui Satker TP sebesar Rp.

7.949.620.000,- untuk pengadaan Geoisolator, pembangunan saluran/jalan produksi, peningkatan jalan produksi lahan integrasi, revitalisasi gudang garam. Dukungan KKP melalui anggaran Tugas Pembantuan ini sangat membantu pengembangan usaha garam di Provinsi NTB dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas usaha garam.

Selain anomali cuaca terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan usaha garam di Provinsi NTB antara lain:

1. Terbatasnya kemitraan usaha garam dan akses pemasaran, hal ini disebabkan oleh kurangnya promosi, packaging dan rendahnya kualitas garam.
2. Sebagian besar produksi garam masih menggunakan teknologi tradisional, hal ini yang menyebabkan masih rendahnya produktivitas dan kualitas hasil produksi, meskipun di beberapa tempat menerapkan teknologi semi intensif.
3. Minimnya kualitas SDM petambak garam yang menyebabkan kurangnya kreatifitas dalam upaya diversifikasi produk olahan garam.
4. Keterbatasan dalam akses permodalan dari lembaga keuangan.

Mengatasi berbagai persoalan terkait dengan menurunnya produksi garam, maka strategi yang telah dilakukan:

1. Mengadakan Temu Lapang Petambak Garam untuk menjalin kemitraan antara petambak garam dengan pemerintah, stakeholder dan lembaga swasta.
2. Rehabilitasi sarana dan prasarana melalui Intensifikasi usaha garam rakyat dan revitalisasi melalui dukungan sarana dan prasarana usaha dengan perbaikan infrastruktur pembangunan rumah tunnel dan revitalisasi gudang garam serta penerapan teknologi geoisolator (penggunaan plastik geomembran).
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang inovatif dan ramah lingkungan.
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dengan membentuk koperasi dan BUMdes (Badan Usaha Milik Desa) garam.
5. Meningkatkan akses permodalan dengan pihak perbankan dan Lembaga Keuangan lainnya.
6. Ekstensifikasi lahan yang belum dimanfaatkan dan intensifikasi lahan yang tersedia dengan pertimbangan tren kebutuhan garam industri yang mayoritas dibeli dari luar negeri (impor).

2. Bidang Pariwisata

Pelaksanaan urusan bidang pariwisata dalam rangka mewujudkan Misi 5 RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023 yaitu NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui

penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi dengan sasaran pembangunan meningkatnya daya saing pariwisata. Pada tahun 2021, target dan capaian kinerja Dinas Pariwisata Provinsi NTB dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Capaian Indikator Kinerja Daerah Provinsi NTB

Sasaran utama Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat “Meningkatnya Daya Saing Pariwisata” dengan Indikator Pertambahan Nilai PDRB Sektor terkait Kepariwisata (Penyediaan Akomodasi dan makan Minum) dengan capaian kinerja pada tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2- 163 Capaian Indikator Kinerja Daerah Provinsi NTB

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Pertambahan Nilai PDRB Sektor terkait Kepariwisata (Penyediaan Akomodasi dan makan Minum)	Rp. Milyar	117.21	1.574,6	116.04	1.130,0	122.71	1.145,2

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi NTB, 2021

Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan mengalami peningkatan Tahun 2021 dari tahun 2020 dimasa pandemi covid-19, sebagai dampak pelonggaran pemberlakuan PPKM serta adanya beberapa event nasional dan internasional yang diselenggarakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat seperti ACT dan WSBK di Mandalika International Street Circuit.

2. Capaian Kinerja Utama Pada Dinas Pariwisata Provinsi NTB

Berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja dengan target sebagaimana dituangkan dalam perjanjian kinerja Dinas Pariwisata Provinsi NTB dan capaian kinerjanya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2- 164 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2019-2021

NO	INDIKATOR BIDANG URUSAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	2,552,634	3,706,352	4,000,000	400,595	1,000,000	964.036
2	Peningkatan Persentase Destinasi Pariwisata Yang Minimal Berkembang	25.25%	25.25%	45.45%	45.45%	65.66%	67.68%
3	Prosentase Pertumbuhan Jumlah Industri Pariwisata Yang Kredibel	0	0	0	0	10%	15.71%
4	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Telah memiliki HaKI	0	0	0	0	30.21%	30.43%
5	Persentase SDM Penunjang Layanan	20%	23%	40%	45%	60%	60.50%

NO	INDIKATOR BIDANG URUSAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
	Pariwisata Yang tersertifikasi						

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi NTB, 2021

2.1. Jumlah kunjungan wisatawan yang datang berkunjung ke NTB

Pandemi covid-19 yang telah terjadi sejak awal tahun 2020 hingga saat ini terus berlangsung ikut mempengaruhi terhadap aktivitas masyarakat akibat adanya pembatasan interaksi dan aktivitas termasuk untuk mengunjungi tempat-tempat wisata. Sepanjang tahun 2020, telah terjadi beberapa kali penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang tidak hanya berlaku di Provinsi NTB tetapi seluruh wilayah di Indonesia yang mengakibatkan adanya pembatasan perjalanan baik perjalanan dalam dan luar negeri sehingga berdampak pada angka kunjungan wisatawan ke Nusa Tenggara Barat jauh dari target yaitu sebesar 400,595 dari target optimisme sebelum pandemi covid-19 sebesar 4.000.000 Kunjungan Wisatawan.

Tabel 2- 165 Angka Kunjungan Wisatawan Tahun 2019-2021

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD 2019	2019	2020	2021	
				TARGET	REALISASI
Kunjungan Wisatawan	3,706,352	3,706,352	400,595	1,000,000	964,036
Nusantara	2,155,561	2,155,561	360,613	900.200	952,146
Mancanegara	1,550,791	1,550,791	39,982	99.800	11,890

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi NTB, 2021

Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2021, disebabkan karena mulai melandainya kondisi pandemic Covid-19 di triwulan IV tahun 2021, serta adanya event internasional yaitu penyelenggaraan Idemetsu Asia Talent Cup (IATC) dan World Superbike (WSBK) yang digelar di Sirkuit Mandalika, Lombok, NTB, yang secara tidak langsung dapat mendongkrak angka kunjungan wisatawan ke NTB. Hal dapat diketahui dari jumlah wisatawan yang berkunjung ke NTB pada tahun 2020 hanya tercatat sebesar 400.595 orang (360.613 wisatawan nusantara dan 39,982 wisatawan mancanegara) dan meningkat menjadi 964.036 orang (952.146 wisatawan nusantara dan 11.890 wisatawan mancanegara) pada tahun 2021, meskipun masih jauh dari angka kunjungan sebelum Covid-19 pada tahun 2019 yang mencapai sebesar 3.076.352 orang.

Optimalisasi dampak jumlah kunjungan pariwisata terhadap pengembangan pariwisata dapat juga dilihat dari Rata-rata lama menginap yang dihitung dari hasil bagi antara banyaknya malam tempat tidur yang terpakai dengan banyaknya tamu yang menginap di hotel dan akomodasi lainnya. Pada tahun 2021 ditargetkan rata-rata lama menginap wisatawan di NTB 3,10 hari dengan capaian 2,23 hari pada hotel bintang dan 1,43 hari pada hotel non bintang atau mengalami peningkatan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan rata-rata lama menginap tahun 2020 selama 1,88 hari pada

hotel bintang dan 1,32 hari pada hotel non bintang walaupun tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Peningkatan rata-rata lama menginap diindikasikan dengan meningkatnya Tingkat Penghunian Kamar (TPK) tahun 2021 untuk Hotel Bintang dengan rata-rata 33,62% dan Non Bintang 14,37% dengan jumlah tamu yang menginap mencapai 964.036 orang, sedangkan TPK tahun 2020 untuk Hotel Bintang mencapai 25,01% Sedangkan non Bintang 15.13%.

Tabel 2- 166 Tingkat Penghunian Kamar Dan Lama Menginap Di Provinsi NTB Tahun 2019-2021

NO	TAHUN	HOTEL BINTANG				HOTEL NON BINTANG			
		UNIT	KAMAR	TPK (%)	LAMA MENGINAP (HARI)	UNIT	KAMAR	TPK (%)	LAMA MENGINAP (HARI)
1	2019	93	4,537	58.25	3.25	1,278	8,984	57.8	3.15
2	2020	90	4,986	25.01	1.88	1,109	13,841	15.13	1.32
3	2021	88	7,675	33.62	2.23	1,244	11,678	14.37	1.43

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi NTB, 2021

2.2. Peningkatan Persentase Destinasi Pariwisata Yang Minimal Berkembang

Dalam upaya membangun dan mengembangkan destinasi pariwisata yang baru, Pemerintah provinsi NTB melalui Dinas Pariwisata mengembangkan desa wisata sebagai program unggulan pariwisata andalan. Desa wisata adalah suatu daerah tujuan wisata, di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas penunjang dan kemudahan akses, yang semuanya disajikan menyatu dengan tata cara dan tradisi warga desa. Untuk mewujudkan komitmen pembentukan dan pengembangan Desa Wisata, telah ditetapkan Surat Keputusan (SK) Gubernur NTB Nomor 050.13-366 tahun 2019 tanggal 29 April 2019 tentang Penetapan 99 lokasi Desa Wisata di Provinsi NTB tahun 2019 – 2023 sebagai dasar pengembangan Desa Wisata di Provinsi NTB selama 5 tahun dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Desa Wisata.

Pada tahun 2021, Dinas Pariwisata Prov. NTB melakukan pengembangan 22 Desa Wisata yaitu Desa Wisata Rembitan (Kecamatan Pujut-Lombok Tengah), Desa Wisata Tete Batu (Kecamatan Sikur-Lombok Timur), Leneng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, Kekalik Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, Desa Wisata Senteluk (Kecamatan Gunung Sari-Lombok Barat), Desa Wisata Pungka (Kecamatan Unter Iwes, Pungka-Sumbawa), Desa Wisata D'Odeng Gubug Alang (Kecamatan Kopang-Lombok Tengah) dan Desa Wisata Tete Batu Selatan (Kecamatan Sikur-Lombok Timur, Desa Wisata Loyok (Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur) yang di intervensi langsung dalam bentuk penataan amenitas oleh Dinas Pariwisata Provinsi NTB serta adanya 14 Penataan Desa Wisata yang merupakan pencapaian kinerja secara crooscatting dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan Catatan Sipil NTB , Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dan beberapa OPD terkait pengembangan Desa Wisata serta beberapa Lembaga dan Perguruan Tinggi yang ikut serta memberikan perhatian terhadap pengembangan desa wisata seperti Poltekpar Lombok, STP Mataram, dan pendampingan desa wisata oleh Badan Promosi Pariwisata

daerah (BPBD) Provinsi NTB, Masyarakat Sadar Wisata (MASATA) NTB. Sehingga sampai dengan saat ini, jumlah desa wisata yang berhasil dikembangkan menjadi 67 desa/kelurahan antara lain: Desa Kawinta to'I (Bima), Desa Pancasila (Dompu), Desa Pusuk Lestari (Lombok Barat), Desa Bonjeruk (Lombok Tengah), Desa Sepakek (Lombok Tengah), Desa Aiq Berik (Lombok Tengah), Desa Sengkol (Lombok Tengah), Desa Tete Batu (Lombok Timur), Desa Sembalun Bumbung (Lombok Timur), Desa Kembang Kuning (Lombok Timur), Desa Tanjung Luar (Lombok Timur), Desa Sembalun (Lombok Timur), Desa Senaru (Lombok Utara), Desa Kerujuk (Lombok Utara), Desa Gili Indah (Lombok Utara), Desa Pemenang Barat (Lombok Utara), Desa Lantung (Sumbawa), Desa Lapade (Sumbawa), Desa Mantar (Sumbawa Barat), Desa Mas-Mas (Lombok Tengah), Desa Bilebante (Lombok Tengah), Desa Sesaot (Lombok Barat), Desa Buwun Mas (Lombok Barat), Desa Hu'u (Dompu), Desa Soro (Bima), Desa Risa (Bima), Desa Malaju (Dompu), Desa Nangamiro (Dompu), Desa Banyumulek (Lombok Barat), Desa Lingsar (Lombok Barat), Desa Gili Indah (Lombok Barat), Desa Mertak (Lombok Tengah), Desa Lantan (Lombok Tengah), Desa Kuta (Lombok Tengah), Desa Blebante (Lombok Tengah), Desa labuhan Pandan (Lombok Timur), Desa Sugian (Lombok Timur), Desa Senanggalih (Lombok Timur), Desa Genggelang (Lombok Utara), Desa Labuan Aji (Sumbawa), Desa Labuan Jambu (Sumbawa), Desa Poto Tano (Sumbawa Barat), Desa Labuhan Kertasari (Sumbawa Barat), Desa beru (Sumbawa Barat), Desa Rembitan (Lombok Tengah), Desa Tete Batu (Lombok Timur), Desa Senaru (Lombok Utara), Desa Senteluk (Lombok Barat), Desa Pungka (Sumbawa), Desa D'Odes Gubug Alang (Lombok Tengah) dan Desa Tete Batu Selatan (Lombok Timur), Leneng Kecamatan Praya (Lombok Tengah), Kekalik Kecamatan Sekarbela (Kota Mataram), Desa Wisata Loyok (Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur)

2.3. Prosentase Pertumbuhan Jumlah Industri Pariwisata Yang Kredibel

Pertumbuhan industri pariwisata pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 15,71 % bila dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2020 sebesar 4.062 Industri Pariwisata menjadi 4819 pada tahun 2021. Faktor yang mendorong pertumbuhan industri pariwisata adalah dengan semakin masifnya pengembangan amenitas di kawasan KEK Mandalika dan beberapa kawasan pendukung lainnya seperti di Sekotong, Jerowaru, dan Sembalun untuk beberapa kawasan di Pulau Lombok.

2.4. Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang telah Memiliki HaKI

Target Pemenuhan sertifikasi HaKI bagi pelaku ekonomi kreatif pada tahun 2021 adalah 30,21% dari jumlah pelaku ekonomi kreatif yang terdaftar. Sedangkan realisasinya mencapai 30,43 % atau sebanyak 163 Hak Kekayaan Intelektual. HAKI yang dimiliki oleh pelaku ekonomi kreatif adalah Hak Merk sebanyak 157 Hak Merk dan 6 Hak Kekayaan Intelektual Komunal yang terdiri dari Madu Sumbawa, Kangkung Lombok, Susu Kuda Liar, Kopi Tambora, Sate Tanjung dan Tari Rudat. Pencapaian pemenuhan sertifikasi HaKI adalah merupakan bentuk sinergitas dengan berbagai pihak dalam memberikan

perlindungan bagi pelaku ekonomi kreatif melalui fasilitasi HaKI oleh OPD Pembina Pelaku EKonomi Kreatif.

2.5. Persentase SDM Penunjang Layanan Pariwisata Yang Tersertifikasi

Pada tahun 2021, jumlah SDM Pariwisata yang telah tersertifikasi bidang pariwisata sebanyak sebanyak 4.610 orang dengan persentase pencapaian sebesar 60.50 % dari target tahun 2021 sebesar 60 % dari Jumlah SDM penunjang layanan pariwisata yang terdata. Peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun 2021 lebih diarahkan untuk mempersiapkan SDM Pariwisata Nusa Tenggara Barat dalam menghadapi berbagai event-event nasional dan internasional khususnya event MotoGP dan WSBK.

2.6. Pemasaran Pariwisata

Pencapaian angka kunjungan wisatawan yang meningkat dari tahun sebelumnya tidak lepas dari efektifitas promosi dan pemasaran wisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata melalui kegiatan sebagai berikut:

- Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri melalui kerjasama dengan 11 media sebagai berikut: Travel.Tempo.co, kabarberita.net., Lombokinsider.com, Lomboktribunnews.com, Lensamandalika.com, Pagilombok.com, Lomboktoday.co.id, Balelombok.com, Beritanasional.id, Kanalone.co.id, dan Garismerah.com.
- Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri melalui penyelenggaraan event pariwisata dimana pada tahun 2021 terlaksana sebanyak 20 event dari 21 event yang ditargetkan. Efektifitas pelaksanaan event terkendala karena adanya kebijakan pembatasan/pemberlakuan PPKM dimasa pandemic Covid-19 oleh Pemerintah. Adapun 20 event yang terlaksana adalah sebagai berikut:

Tabel 2- 167 Event Yang Terlaksana Di Tahun 2021

NO	NAMA	TEMPAT PELAKSANAAN	TANGGAL PELAKSANAAN
1	Launching Calender Event	Taman Budaya	17 Desember 2021
2	Lombok Sumbawa Great Sale	Sistem Online	22 April - 1 Mei 2021
3	Virtual Event Istana Negara	Istana Negara (Virtual)	17 Agustus 2021
4	Event Festival Pesona Bau Nyale	Novotel Lombok / Pantai Seger Mandalika	3 - 4 Maret 2021
5	Pesona Khazanah Ramadhan	Islamic Center NTB	22 April - 1 Mei 2021
6	Rinjani International Gravity Enduro	Sembalun	5-7 November 2021
7	Event World Super Bike	Mandalika	19-21 November 2021
8	Lombok Sharia Festival-Hijaber	Lombok Epicentrum Mall	8-10 Oktober 2021
9	Pemilihan Duta Wisata Indonesia 2021 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat	Hotel Montana	25-26 Oktober 2021
10	Pemilihan Duta Wisata Indonesia 2021 Tingkat Nasional	Taman Budaya	3-7 November 2021

NO	NAMA	TEMPAT PELAKSANAAN	TANGGAL PELAKSANAAN
11	Putri Indonesia - NTB	Ballroom Prime Park Hotel Mataram	23 Oktober 2021
12	Pameran Seni Lukis dan Keris	Taman Budaya	17 Desember 2021
13	Photography dan Film Pendek Coaching	Islamic Center NTB	15 Desember 2021
14	Festival Ekraf dan Budaya NTB	Mandalika Super Fest Dalam Rangka WSBK (Di Beach Park Kuta Mandalika)	19-20 November 2021
		-HUT NTB (Taman Budaya, Kota Mataram)	17 Desember 2021
15	Jumpa Ekraf	Taman Budaya	17-18 Desember 2021
16	Pentas Seni Dalam Daerah	- Kunjungan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI (Di BIZAM)	03 November 2021
		- Atraksi HK Enduro Challenge (Kuta Mandalika)	17 Oktober 2021
		- Dukungan Atraksi Kesenian dan Fashion Show Kegiatan Deskranasda NTB dan Kementrian Koperasi RI (Di Mandalika)	26 Oktober 2021
		- Atraksi Mandalika Super Fest (Di Beach Park Kuta Mandalika)	19-20 November 2021
		- Atraksi Pemilihan Duta Wisata Nasional (Di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB)	03 November 2021
17	Penyelenggaraan Garage Musik	- Garage Music (Akustik, Peluncuran e-bulletin & Aplikasi Pariwisata) - (Di Dinas Pariwisata Provinsi NTB)	27 Agustus 2021
		- Touring Roud MotoGP (Dinas Pariwisata Provinsi NTB)	06 November 2021
		- Atraksi Musik Hadrah HUT NTB (Di Taman Budaya), dalam rangkaian Acara "Gemilang Fest HUT NTB" 17-18 Desember 2021	17 Desember 2021
		- Musik Akustik HUT NTB (Di Taman Budaya), dalam rangkaian Acara "Gemilang Fest HUT NTB" 17-18 Desember 2021	17 Desember 2021
		- Dukungan Atraksi Musik Pada Lombok Sumbawa Tenun Festival (Di Prime Park Hotel)	11 Desember 2021
18	Pacuan Kuda	Arena Pacuan Kuda Angin Laut Biru Sumbawa - Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa	I. 10-11 April 2021
			II. 14-17 Juli 2021
			III. 22-26 September 2021
			IV. 2-8 Januari 2022
19	Mandalika Super Fest	Mandalika Beach Park Kuta - Lombok	19 November 2021
20	Festival Pesona Tambora	Halaman Kantor Bupati Dompu	11 April 2021

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi NTB, 2021

2.7. Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual merupakan program yang bertujuan untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif. Indikator pencapaian kinerja dilihat dari Persentase HaKI yang telah memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi kreatif dengan target tahun 2021 sebesar 30.21%. Pencapaian pelaku ekonomi kreatif yang telah memiliki HaKI sebesar 30,43% dari seluruh pelaku ekonomi kreatif yang terdaftar. Pencapaian target ini diwujudkan melalui program kegiatan penyediaan sarana dan parasarana kota kreatif. Adapun pencapaian fasilitasi HaKI bagi pelaku ekonomi kreatif terdiri dari 163 Hak Kekayaan Intelektual berupa hak merek dan 6 HaKI berupa Hak Kekayaan Komunal yang terdiri dari (HaKI Komunal Madu Sumbawa, Kangkung Lombok, Susu Kuda Liar, Kopi Tambora, Sate Tanjung dan Tari Rudat).

3. Bidang Pertanian

Urusan Pilihan Bidang Pertanian diselenggarakan oleh 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu Dinas Pertanian dan Perkebunan, dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB dengan uraian sebagai berikut.

a. Dinas Pertanian Dan Perkebunan

Urusan Pilihan Bidang Sektor Pertanian yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan Indikator urusan berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2- 168 Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Urusan Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Tahun 2021

NO	INDIKATOR (SATUAN)	TAHUN 2021		CAPAIAN (%)	KET.
		TARGET	REALISASI		
1	Jumlah Produksi Padi (Gabah Kering Giling)	1.319.166 Ton	1.427.437 Ton	108,21	Data Prediksi 2021
2	Jumlah Produksi Jagung (Pipilan Kering)	1.735.213 Ton	1.811.121 Ton	104,37	Data Prediksi 2021
3	Jumlah Produksi Kedelai (Biji Kering)	32.496 Ton	16.716 Ton	51,44	Data Prediksi 2021
4	Jumlah Produksi Cabe (Buah Segar)	119.380 Ton	78.836 Ton	66,04	Asem 2021
5	Jml Produksi Bawang Merah (Umbi Kering)	189.684 Ton	222.550 Ton	117,33	Asem 2021
6	Jumlah Produksi Manggis (Buah Segar)	20.695 Ton	24.874 Ton	120,19	Asem 2021
7	Jumlah Produksi Kopi (Berasan)	5.630 Ton	7.042 Ton	125,08	Asem 2021
8	Jumlah Produksi Kakao (Berasan)	2.572 Ton	2.538 Ton	98,65	Asem 2021
9	Jumlah Produksi Jambu Mete (Biji Kering)	11.341 Ton	8.708 Ton	76,78	Asem 2021
10	Jumlah Produksi Kelapa eq. (Kopra)	47.765 Ton	48.450 Ton	93,74	Asem 2021
11	Jumlah Produksi Tembakau (daun kering)	57.251 Ton	44.772 Ton	93,74	Asem 2021

NO	INDIKATOR (SATUAN)	TAHUN 2021		CAPAIAN (%)	KET.
		TARGET	REALISASI		
12	Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (Poin)	105,83	107,74	101,80	BPS NTB (Des 2021)
13	Nilai Tukar Petani Hortikultura (Poin)	95,44	105,64	110,69	BPS NTB (Des 2021)
14	Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (Poin)	92,59	93,35	100,82	BPS NTB (Des 2021)

Sumber: Data potensi produksi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, 2021
Nilai Tukar Petani BPS Januari 2022

Indikator kinerja pembangunan daerah berdasarkan dokumen RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023, tahun 2021 adalah Kontribusi PDRB sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan, dengan target 23,52 persen dan indikator Nilai Tukar Petani target 105, menjadi alat ukur capaian Sektor pertanian yang meliputi sub sektor tanaman pangan, sub sektor hortikultura, sub sektor perikanan, sub sektor peternakan, dan sub sektor kehutanan. Nilai PDRB Pertanian Kehutanan dan Perikanan tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2019 nilai PDRB yang tercapai sebesar Rp.21.555.357,77 juta, pada tahun 2020 tercapai senilai Rp.21.466.096,88 juta rupiah, sedangkan tahun 2021 tercapai senilai Rp.21.711.165,63 juta rupiah. Pertumbuhan ekonomi pada kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2- 169 Capaian Pertambahan Nilai PDRB sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan 201-2021

URAIAN	TAHUN					
	2019 (Juta Rp.)	%	2020 *) (Juta Rp.)	%	2021 **) (Juta Rp.)	%
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan :						
- Pertanian. Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	17.502.210,28	19,32	17.343.646,75	19,23	17.502.387,93	18,98
- Kehutanan dan Penebangan Kayu	88.838,48	0,9	85.002,65	0,09	87.210,40	0,09
- Perikanan	3.969.309,01	4,38	4.037.447,48	4,48	4.121.756,30	4,47
Jumlah	21.555.357,77	23,80	21.466.096,88	23,81	21.711.165,63	23,54

Sumber : BPS data diolah
Keterangan : *) Data Sementara

Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani adalah merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani. Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan pada 8 kabupaten di Provinsi NTB, terjadi NTP yang berfluktuasi setiap bulannya, pada bulan Desember 2021 Nilai Tukar Petani gabungan tercatat sebesar 106,88 persen

mengalami kenaikan sebesar (1,08) dibandingkan NTP pada bulan November 2021 sebesar 105,73 persen. Dengan demikian Target nilai tukar petani Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021 sebesar >105 berada di atas 100 (tercatat 106,88) yang berarti petani mengalami peningkatan daya beli, karena kenaikan harga produksi relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan harga input produksi dan kebutuhan konsumsi rumah tangganya, data selengkapnya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2- 170 Nilai Tukar Petani (NTP) di NTB Tahun 2019 – 2021

No	NTP	2019	2020	2021
1.	Januari	110,79	107,18	109,34
2.	Februari	110,32	107,96	109,01
3.	Maret	110,46	107,52	107,01
4.	April	109,36	105,88	105,75
5.	Mei	109,26	105,91	106,76
6.	Juni	110,82	105,70	107,73
7.	Juli	124,81	106,50	107,93
8.	Agustus	125,18	106,99	106,84
9.	September	115,04	107,10	106,58
10.	Oktober	115,27	108,38	106,19
11.	November	115,81	109,19	105,73
12.	Desember	115,35	109,22	106,88

Sumber : BPS data diolah

Komoditi yang masih menjadi andalan produksi pertanian dan banyak diminati oleh para petani adalah padi dan jagung dengan produksi padi mencapai 1.427.437,00 ton Gabah Kering Giling (GKG) dan jagung pipilan kering sebesar 1.811.121 ton, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2- 171 Produksi Komoditas Strategis Tanaman Pangan di Provinsi NTB Tahun 2019 – 2021

NO	JENIS TANAMAN	PRODUKSI (Ton)			
		2018	2019	2020	
				TARGET	REALISASI *)
1.	Padi (GKG)	2.436.349	1.317.190	1.319.166	1.427.437
2.	Jagung (Pipilan Kering)	2.003.267	1.726.580	1.735.213	1.811.121
3.	Kedelai (Biji Kering)	80.925	32.415	32.496	16.716

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, 2022

*) Potensi Data Produksi Tanaman Pangan 2021

Data produksi tanaman pangan, produksi padi mencapai 1.427.437 ton Gabah Kering Giling/GKG berdasarkan Data Prediksi Produksi Tanaman Pangan tahun 2021, jika dibandingkan dengan produksi tahun 2020. Hal tersebut disebabkan karena meningkatnya luas panen dan produktivitas padi selama tahun 2021. Disamping itu, menurut data UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PERTANIAN bahwa persentase luas pertanaman yang aman dari serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) adalah sebesar 96,99 persen dari target sebesar 95,5% aman dari gangguan OPT dan DPI.

Produksi Jagung

Komoditas jagung telah terbukti memberikan andil yang besar terhadap ketahanan pangan dan perekonomian daerah. Komoditi jagung dapat menjadi penggerak perekonomian rakyat, dan mampu sebagai salah satu program strategis dalam penurunan angka kemiskinan di Provinsi NTB. Capaian produksi jagung tahun 2021 sebesar 1.811.121 ton pipilan kering (Data potensi produksi tanaman pangan Distanbun tahun 2021), naik sebesar 4,90 persen dari capaian tahun 2020 sebesar 84.541 ton pipilan kering. Angka produksi jagung tahun 2021 meningkat disebabkan karena naiknya luas panen dan produktivitas tahun 2021 dibandingkan tahun 2020.

Tabel 2- 172 Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Jagung Tahun 2020-2021

No	INDIKATOR	SATUAN	2020	2021
1.	Luas Tanam	Ha	389.819	344.098
2.	Luas Panen	Ha	282.893	288.769
3.	Produksi	Ton	1.730.459	1.811.119
4.	Produktivitas	Kw/Ha	61,17	62,72

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Angka potensi 2021*)

Produksi Kedelai

Komoditi kedelai merupakan komoditi tanaman pangan utama ketiga setelah padi dan jagung, baik di tingkat provinsi maupun ditingkat nasional. Kedelai masih menjadi komoditas impor dikarenakan banyaknya permintaan akan komoditi tersebut sebagai olahan pangan. Capaian produksi kedelai sebesar 16.716 ton biji kering (Data Prediksi Produksi Tanaman Pangan Distanbun NTB tahun 2021).

Produksi Tanaman Hortikultura

Cabai dan bawang merah merupakan komoditas unggulan hortikultura di Provinsi NTB dengan bentuk produksi untuk tanaman Cabai adalah buah segar dan bawang merah dalam bentuk umbi basah. Tahun 2021 produksi buah cabai segar mencapai 78.836 ton, dibandingkan produksi tahun 2020 yaitu 119.082 ton menurun 33,80 persen atau 40.246 ton.

Tabel 2- 173 Produksi Komoditas Strategis Tanaman Hortikultura di Provinsi NTB Tahun 2019-2021

NO	JENIS TANAMAN	2019	2020	PRODUKSI (Ton)	
				2021	
				TARGET	REALISASI *)
1.	Cabai (buah segar)	119.926	119.082	119.380	78.836
2.	Bawang merah (umbi basah)	161.411	188.740	189.684	222.550
3	Manggis (buah segar)	11.556	20.644	20.695	24.871

Sumber : Angka Sementara Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, 2021 *)

Peningkatan produksi, produktifitas pertanian/perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB telah memberikan alat dan mesin pertanian bagi petani. Adapun bantuan alat dan mesin pertanian sebagaimana tabel berikut;

Tabel 2- 174 Alat dan Mesin Pertanian Tanaman Pangan, Kelembagaan Petani, Kelompok Penangkar Benih dan Regu Pengendali Hama Tahun 2018-2021

NO	URAIAN	JUMLAH (Unit)			
		2018	2019	2020	2021*
	Alat dan Mesin Pertanian				
1	Hand Traktor Roda Dua	15.326	16.443	16.434	14.553
2	Hand Traktor Roda Empat	120	162	232	223
3	Transplanter (Alat Tanam Padi)	250	267	278	253
4	Seeder (Alat Tanam Biji-bijian)	4.341	5.745	7.826	7.845
5	Hand Sprayer dan Power Sprayer (Penyemprot)	85.378	82.358	94.755	73.114
6	Swing Fog (Pengabut Pestisida)	587	114	118	68
7	Emposan Tikus	140	140	130	891
8	Pembersih Gulma	2.993	3.418	3.328	3.519
9	Pompa Air	39.617	32.192	15.038	10.014
	a. <4 inci	6.067	8.120	7.231	
	b. 4 inci	4.177	5.039	5.028	
	c. >4 inci	29.373	19.033	2.778	
10	Sabit Bergerigi	832.814	857.052	1.045.694	891.601
11	Reaper (Pemotong Padi Tipe Gunting)	130.709	82.408	6.767	9.439
12	Paddy Mower (Pemotong Padi Tipe Gendong)	807	804	753	752
13	Stripper (Pemotong Padi Sistem Sisir)	225	262	63	266
14	Rice Combine Harvester	477	569	608	472
	a. Combine Harvester Kecil	162	208	198	
	b. Combine Harvester Menengah	178	181	225	
	c. Combine Harvester Besar	137	180	185	
15	Corn Combine Harvester	34	41	47	34
16	Pengungkit Ubi Kayu/Ubi Jalar	1	63	49	63
17	Paddy Thresher	16.452	12.533	12.523	11.269
18	Corn Sheller	1.104	1.229	1.341	1.357
19	Power Thresher Multiguna (Padi, Jagung, Kedelai)	1.049	1.134	1.187	740
20	Perajang Mekanis	9	23	13	189
21	Winower	53	56	53	52
22	Flat Bed Dryer	57	77	85	74
23	Continuous Dryer	34	54	39	9
24	Small Rice Mill	1.065	974	1.015	914
25	Medium Rice Mill	662	591	582	578
26	Large Rice Mill	200	246	284	123
27	Silo	42	31	85	28
28	Alat Pembuat Pupuk Organik	158	178	193	220
	Kelembagaan Petani, Kelompok Penangkar Benih dan Regu Pengendali Hama				
29	Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)	1.221	1.474	1.523	1.042
30	Kelompok Tani (POKTAN)	14.229	14.995	18.100	15.670
31	Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN)	1.647	1.211	1.059	982
32	Koperasi Unit Desa (KUD)	127	150	165	91
33	Kios Sarana Produksi Pertanian (SAPROTAN)	1.193	1.251	1.279	1.192
34	Kelompok Penangkar Benih	178	154	157	122
35	Regu Pengendali Hama	0	0	0	67

Sumber : Data SP Alsintan dan Kelembagaan Pertanian, BPS

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, 2022.

Keterangan : Data Alsintan 2018 – 2021 (Dalam Keadaan Baik dan Rusak Ringan)

*) Berdasarkan Data SP-ALSINTAN dan Kelembagaan Petani 2021, merupakan data sementara, belum dilakukan validasi dan kabupaten bima belum menyampaikan laporan.

Dalam menyukseskan program swasembada pangan di NTB. Pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan memfasilitasi ketersediaan pupuk yang memadai diharapkan dapat menunjang dan menentukan keberhasilan produksi pertanian para petani. Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi tahun 2021 ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020. Alokasi dan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2- 175 Alokasi dan Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Provinsi NTBTahun 2017-2021

NO	JENIS PUPUK	TAHUN	ALOKASI (Ton)	REALISASI	
				(Ton)	(%)
1	UREA	2017	165.330,00	164.246,45	99,34
		2018	179.815,00	179.726,00	99,95
		2019	161.234,00	161.029,35	99,87
		2020	189.553,00	189.087,20	99,75
		2021	188.547,00	172.890,46	91,70
2	SP-36	2017	17.069,00	17.069,00	100,00
		2018	19.350,00	18.722,55	96,76
		2019	19.280,00	19.060,05	98,86
		2020	17.547,00	17.099,65	97,45
		2021	12.179,00	7.482,44	61,44
3	ZA	2017	18.047,00	18.046,50	100,00
		2018	19.181,00	18.637,93	97,17
		2019	18.640,00	18.122,05	97,22
		2020	20.112,00	19.574,63	97,33
		2021	19.745,00	18.901,44	97,05
4	NPK	2017	59.160,00	54.122,00	91,48
		2018	54.850,00	52.289,03	95,33
		2019	47.620,00	47.571,35	99,90
		2020	53.135,00	52.716,62	99,21
		2021	56.868,00	55.812,59	98,14
5	ORGANIK	2017	7.927,00	7.765,00	97,96
		2018	7.500,00	7.434,99	99,13
		2019	11.010,00	7.511,20	68,22
		2020	8.400,00	6.817,24	81,16
		2021	21.624,00	6.144,20	28,41

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, 2021

Faktor utama dalam meningkatkan produksi tanaman pangan, adalah ketersediaan benih unggul bersertifikat yang tepat jumlah dan waktunya menjadi prioritas Dinas Pertanian dan Perkebunan untuk meningkatkan produksi pertanian di NTB. Hasil sertifikasi luas lulus lapangan tanaman pangan (padi, jagung dan kedelai) yang dilakukan oleh UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pertanian (BPSB-P) sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2- 176 Hasil Sertifikasi Luas Lulus Lapangan Tanaman Pangan Padi, Jagung dan Kedelai Tahun 2018-2021

NO	KOMODITI	LUAS LULUS LAPANGAN (Ha)			
		2018	2019	2020	2021
1.	Padi	5.836,94	3.932,85	4.975,88	5.250,42

2.	Jagung	21,00	95,63	329,90	186,18
3.	Kedelai	4.777,60	3.403,41	1.663,10	866,02

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, 2021

Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) Balai Perlindungan Tanaman Pertanian (BPT-P) Provinsi NTB mengambil peran penting dalam perlindungan tanaman terhadap gangguan organisme pengganggu Tanaman. UPTD BPTP terus berupaya melakukan pencegahan dan pengendalian serangan berbagai OPT serta mengantisipasi dampak perubahan iklim yang saat ini mulai memperlihatkan siklus yang kurang bersahabat untuk petani. Pada tahun 2021 komoditi padi mengalami serangan OPT tertinggi, Luas serangan OPT pada tanaman pangan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2- 177 Luas Serangan OPT Tanaman Padi, Jagung dan Kedelai Tahun 2018-2021

NO	KOMODITI	LUAS SERANGAN OPT (Ha)				
		2018	2019	2020	2021	Peningkatan/ (Penurunan) (Ha)
1.	Padi	4.206,98	3.294,93	9.228,67	11.530,10	2.301,43
2.	Jagung	475,40	1.328,92	13.093,90	5.316,05	(-7.777,85)
3.	Kedelai	183,75	187,85	238,80	311,50	72,70

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, 2021

UPTD Balai Benih Induk Pertanian (BBI-P) Provinsi NTB, selaku unit penyediaan benih unggul bermutu yang bersertifikat bertugas memproduksi benih padi untuk penangkar. Jumlah perbanyakan benih padi seluas 15 ha pada tahun 2021 yaitu 40.610 Kg. Hasil perbanyakan benih padi, UPT BBI-P, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2- 178 Perbanyakan Benih Sumber Padi, Jagung dan Kedelai Tahun 2019-2021

NO	KOMODITI	JUMLAH PRODUKSI (KG)			KETERANGAN
		2019	2020	2021	
1.	Padi	83.700	4.550	40.610	Akibat rasionalisasi hanya 2 ha yang bisa digunakan untuk perbanyakan benih padi dari BS-FS
2.	Jagung	Tidak diprogramkan	Tidak diprogramkan	Tidak diprogramkan	
3.	Kedelai	Tidak diprogramkan	Tidak diprogramkan	Tidak diprogramkan	

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, 2021

Produksi Tanaman Perkebunan

Komoditi unggulan Provinsi NTB di bidang perkebunan adalah jambu mete, kopi, tembakau, kakao, dan kelapa. Produksi perkebunan tersebar di kabupaten/kota. Adapun produksi komoditi perkebunan sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 2- 179 Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan di Provinsi NTB
Tahun 2019-2021**

NO	KOMODITI	PRODUKSI (TON)		PRODUKSI (TON)	
				2021	
		2019	2020	TARGET	REALISASI *)
1	Kopi	6.566,36	5.616	5.630	7.042
2	Kelapa	48.766,08	47.646	47.765	44.772
3	Kakao	2.219,35	2.566	2.572	2.568
4	Jambu Mete	10.410,72	11.313	11.341	8.708
5	Tembakau	43.068,47	57.065	57.251	48.541

*Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, 2022 *) ASEM (Angka Sementara) tahun 2022*

Peningkatan/penurunan beberapa komoditi perkebunan disebabkan antara lain yaitu :

1. Peningkatan produksi kopi meningkat karena adanya intensifikasi tanaman yang dilakukan dengan dana yang bersumber dari anggaran APBD kabupaten dan swadaya yang dilakukan petani, disamping itu cuaca yang mendukung juga salah satu faktor yang mendukung produksi kopi tahun 2021;
2. Produksi kelapa mengalami penurunan disebabkan karena kurangnya pemeliharaan yang mengakibatkan serangan hama, curah hujan rendah dan panen muda karena harga jualnya lebih tinggi terutama di bulan puasa.
3. Produksi kakao mengalami penurunan terutama karena meningkatnya serangan hama Jamur Akar Coklat (JAC) dan iklim rendah (curah hujan kurang).
4. Produksi jambu mete mengalami penurunan karena kurangnya pemeliharaan oleh petani yang mengakibatkan tanaman jambu mete lebih mudah terserang OPT, iklim yang kurang mendukung dan banyaknya tanaman yang tua dan rusak.

Komoditas Tembakau

Tembakau Virginia dan tembakau rakyat merupakan jenis tembakau yang diproduksi petani di NTB. Provinsi NTB saat ini terkenal dengan tembakau virginia karena merupakan salah satu daerah penghasil terbesar di Indonesia. Adapun Luas areal, produksi dan jumlah petani tembakau di Provinsi NTB tahun 2019-2021 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2- 180 Luas Areal, Produksi dan Jumlah Petani Pada Komoditi Tembakau
Tahun 2019 - 2021**

KOMODITI	2019			2020			2021*)		
	LUAS AREAL	PRODUKSI	JUMLAH PETANI	LUAS AREAL	PRODUKSI	JUMLAH PETANI	LUAS AREAL	PRODUKSI	JUMLAH PETANI
	(HA)	(TON)	(KK)	(HA)	(TON)	(KK)	(HA)	(TON)	(KK)
Tembakau Virginia	27.521,25	51.381,31	34.048	25.577,29	43.923,99	27.162	19.355,77	33.521,70	1.731,87
Tembakau Rakyat	8.660,05	11.377,25	16.292	9.236,44	13.140,92	17.218	10.366,03	15.019,22	1.488,89

Sumber : BPS Provinsi NTB, 2018-2019 angka tetap

Dinas Pertanian Provinsi NTB Produksi 2021 berdasarkan Angka Sementara Tahun 2021

Produksi tembakau virginia pada tahun 2021 sebesar 48.541 ton mengalami penurunan sebesar 10.402 ton dibandingkan produksi tahun 2020, sedangkan tembakau rakyat mengalami peningkatan dari 1.878,30 ton di tahun 2021 dibandingkan produksi tahun 2020. Penurunan produksi tembakau Virginia disebabkan karena iklim yang tidak mendukung dimana tingginya curah hujan mengakibatkan gagal panen di Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah.

Dalam rangka mempertahankan produksi tanaman pertanian di Provinsi NTB, ada beberapa upaya yang telah dilakukan yaitu:

1. Optimalisasi lahan pertanian,
2. Pembangunan embung serta pengembangan jaringan irigasi;
3. Peningkatan produktivitas melalui penyediaan alat dan mesin pertanian, penggunaan benih bermutu dan varietas unggul, pemupukan berimbang serta penggunaan pupuk organik;
4. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan pengembangan antisipasi dampak perubahan iklim;
5. Penguatan kelembagaan kelompok tani dan pembiayaan.

b. Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Urusan Pilihan Bidang Sektor Pertanian yang diselenggarakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Indikator urusan berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2- 181 Capaian Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Urusan Pertanian pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2021

NO	INDIKATOR (SATUAN)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1	Persentase Ketersediaan Produksi Hasil Peternakan :				
	- Daging	3	6,96	232	
	- Telur	8	35,0	438	
	Nilai Tukar Peternakan (Point)	110,00	108,61	98,74.	

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB 2021

Indikator kinerja daerah yang telah dituangkan dalam RPJMD Provinsi NTB 2019-2023, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat mendukung capaian Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan dan kehutanan, target 23,52 persen dengan realisasi hasil capaian sebesar 22,88 persen atau tingkat capaian sebesar 97,28 persen. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi ternak daging dan telur sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2- 182 Data Ketersediaan Produksi Daging dan Telur Tahun 2021

No	Uraian	Ketersediaan Produksi (Ton) Tahun		
		2020	2021	Naik/Turun (%)
A.	Ketersediaan Produksi Daging			

No	Uraian	Ketersediaan Produksi (Ton) Tahun		
		2020	2021	Naik/Turun (%)
	- Sapi	13.801,0	14.242,6	3,20
	- Kerbau	1.426,0	1.451,7	1,80
	- Kuda	606,0	647,8	6,90
	- Kambing	663,0	696,2	5,01
	- Domba	28,0	29,0	3,57
	- Babi	144,0	147,9	3,57
	- Ayam Ras	46.281,9	48.942,3	5,75
	- Ayam Buras	10.565,0	12.308,2	16,50
	- Itik	762,0	979,9	28,60
	Jumlah	74.278,86	79,445,58	6,96
B.	Ketersediaan Produksi Telur			
	- Ayam Ras	43.374,1	64.986,9	49,83
	- Ayam Buras	32.330,9	37.673,3	16,52
	- Itik	7.192,6	9.251,2	28,62
	Jumlah	82.897,6	111.911,4	35,00

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, 2021

Sub kategori peternakan mempunyai peranan penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan hewani asal ternak dengan ketersediaan daging, susu dan telur sebagai salah satu komoditas bahan pangan pokok. Pada tahun 2021 capaian ketersediaan produksi daging sebesar 79.445,58 ton atau meningkat sebanyak 5.166,72 ton dari tahun 2020 yaitu sebesar 74.276,68 ton, produksi daging tahun 2021 meningkat karena masuk DOC unggas ekor dari luar NTB.

Dalam meningkatkan Nilai Tukar Petani pada sub sektor peternakan perlu dilakukan peningkatan nilai tambah produk peternakan, pengaturan regulasi dan transaksi perdagangan ternak antar pulau. NTPT dalam tahun 2019-2021 menurut analisis BPS dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2- 183 Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) di NTB Tahun 2019 - 2021

NO	NTPT	2019	2020	2021
1.	Januari	127,02	106,53	106,89
2.	Februari	126,62	106,71	106,61
3.	Maret	126,79	105,91	105,65
4.	April	126,15	105,11	106,90
5.	Mei	126,49	105,58	108,21
6.	Juni	128,83	108,00	108,85
7.	Juli	130,82	108,84	111,30
8.	Agustus	133,58	107,47	111,10
9.	September	136,24	107,64	110,79
10.	Oktober	135,90	108,36	110,19
11.	November	137,12	107,02	108,64
12.	Desember	136,25	107,33	108,38

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2021

1. Populasi Ternak

Capaian kinerja Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian adalah Populasi Ternak yang dikembangkan di Nusa Tenggara Barat disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2- 184 Populasi Ternak di Provinsi NTB Tahun 2019 - 2021

NO	TERNAK	POPULASI TERNAK (EKOR)		
		2019	2020	2021
1	Sapi	1.234.357	1.285.746	1.320.551
2	Kerbau	121.572	115.151	120.110
3	Kuda	47.292	43.705	41.715
4	Kambing	622.039	709.768	641.186
5	Domba	21.862	23.058	23.044
6	Babi	60.066	69.518	64.777
7	Ayam Ras Petelur	1.246.699	1.438.497	1.490.090
8	Ayam Ras Pedaging	15.187.650	15.787.388	13.257.299
9	Ayam Buras	7.870.476	7.697.844	9.201.252
10	Itik	1.169.034	737.703	778.858

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, Data Sementara 2021

Kegiatan ketiga yang mendukung populasi ternak adalah Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi, outputnya jumlah produksi semen beku pada UPTD Balai Inseminasi Buatan sebanyak 100.000 dosis/Straw. Berikut disajikan data hasil produksi semenbeku pada Balai Inseminasi Buatan Tahun 2021 sebagaimana tersaji dalam table berikut.

Tabel 2- 185 Produksi Semen Beku Balai Inseminasi Buatan Tahun 2021

No	Nama Bull	Tahun 2021												Jumlah
		Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Haemsa		902	807	614	604	307							3.234
2	Suriad	552	1.164	1.637	1.277	1.552	1.041		447	987	762	1.700	1.113	1.2232
3	Rider	619	1.073	1.290	1.621	1.492	849		298	1.013	652	1.501	1.867	1.2275
4	Rintam	1.594	887	1.696	2.092	1.742	1.479		327	1.492				11.309
5	Baros		1.604	2.158	2.444	1.769	1.220		358	1.257	520	1.670	2.352	15.352
6	Summaros	172	771	1.222	1.336	1.097	752		204	774	475	1.175	1.354	9.302
7	Pancardin	652	650	1296	1297	1104	852		96	802	300	879	1211	9139
8	Bima			100										100
	Jumlah	3.589	7.051	10.206	10.681	9.360	6.500		1.730	6.295	2.709	6.925	7.897	72.943

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, Data Sementara 2021

Dalam memenuhi kebutuhan daging di Provinsi NTB mengandalkan beberapa komoditas antara lain sapi, kerbau, kambing, domba, kuda dan babi pada tahun 2019 sampai dengan 2021 Produksi daging dari ternak ruminansia maupun ternak unggas, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2- 186 Produksi Daging di Provinsi NTB Tahun 2019-2021

NO	TERNAK	PRODUKSI DAGING (Ton)		
		2019	2020	2021
1	Kuda	70,8	391,0	611
2	Sapi	10.627	22.684,0	11.088
3	Kerbau	1.071	1.502,9	1.440
4	Kambing	2.900,3	1.319,7	667
5	Domba	10,6	140,1	28,0
6	Babi	87,5	115,9	144

NO	TERNAK	PRODUKSI DAGING (Ton)		
		2019	2020	2021
7	Ayam Ras	66.406,4	65.430,8	24.407
8	Ayam Buras	11.225,8	8.236,6	10.671
9	Itik	1.167,2	1.036	769

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Data Sementara Tahun 2021

Data permintaan ternak bibit dan ternak potong dari beberapa Provinsi di Indonesia yang dapat dipenuhi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 Pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan antara lain DKI, Banten, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan daerah lainnya, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB menyiapkan data sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2- 187 Ternak Bibit dan Ternak Potong ke Luar dari Provinsi NTB Tahun 2019-2021

NO	JENIS TERNAK	TERNAK BIBIT KELUAR(EKOR)			TERNAK POTONG KELUAR(EKOR)			JUMLAH(EKOR)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Sapi	685	318	1.101	11.835	9.222	13.601	12.520	9.540	14.702
2	Kerbau	-	-	-	1.969	1.431	2.440	1.969	1.431	2.440
3	Kuda	-	-	-	1.584	1.620	2.365	1.584	1.620	2.365
4	Kambing	-	-	-	20	-	100	20	-	100
5	Babi	-	-	-	1.135	150	970	1.135	150	970

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Data Sementara Tahun 2021

Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) pada Unit Usaha Pangan Asal Hewan merupakan salah satu jaminan untuk penyediaan produk pangan asal hewan yang ASUH. Sertifikasi NKV merupakan kegiatan penilai pemenuhan persyaratan kelayakan dasar sistem jaminan keamanan pangan dalam aspek higiene-sanitasi pada unit usaha pangan asal hewan. Tujuan sertifikasi NKV adalah: Memberi jaminan dan perlindungan kepada masyarakat bahwa pangan asal hewan yang dibeli/dikonsumsi adalah Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) dan berasal dari sarana usaha yang telah memenuhi persyaratan kesmavet yang diawasi pemerintah, Mendukung terwujudnya ketenteraman batin masyarakat dan Meningkatkan daya saing produk pangan asal hewan Indonesia di pasar Internasional.

Tabel 2- 188 Unit Usaha yang telah memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) tahun 2021

No.	Nama Unit Usaha	Kab/Kota	Nomor NKV	Tanggal Terbit
1	CV. Ading Walet Al. Buntaran	Lombok Tengah	UCSBW 520205-001	22 april 2021
2	PT. Mitra Nasional Kualitas	Lombok Barat	CS-520114-003	28 september 2021
3	PT. Samawa Gemilang Perkasa	Sumbawa	BUP-520410-001	11 november 2021
4	CV.Agung Raya Lestari	Sumbawa	CS-520422-002	17 november 2021
5	CV.88 Aurora	Lombok Tengah	CS-520202-002	

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Data Sementara Tahun 2021

Untuk mengendalikan pemotongan betina produktif melalui kegiatan kesejahteraan hewan, di Rumah Potong Hewan (RPH) dan Tempat Pemotongan Hewan (TPH) sebesar 1 persen dari total betina yang dipotong di RPH/TPH. Provinsi NTB telah memiliki sejumlah Rumah Potong Hewan dan Tempat Potong Hewan (RPH/TPH) yang tersebar disepuluh Kabupaten/Kota sudah memenuhi standar tempat pemotongan hewan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2- 189 Data RPH / TPH Tahun 2021

NO	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH RPH / TPH		
		RPH	TPH	JUMLAH
1.	RPH Banyumulek (RPH Prov.)	1	-	1
2.	Mataram	2	-	2
3.	Lombok Barat	4	2	6
4.	Lombok Utara	1	2	3
5.	Lombok Tengah	4	9	13
6.	Lombok Timur	6	14	20
7.	Sumbawa	7	5	12
8.	Sumbawa Barat	4	-	4
9.	Dompu	2	1	3
10.	Kota Bima	1	1	2
11.	Kabupaten Bima	3	1	4
Jumlah		35	35	70

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB 2021

Pelaksanaan Program Penyuluhan Pertanian, Sasaran yang dicapai dalam program ini adalah terbentuknya dan terbina kelembagaan kelompok tani berbasis korporasi dan terlaksananya informasi pemasaran produk peternakan seperti produk olahan abon, kerupuk kulit, telur asin, olahan sarang burung walet dan lain-lainnya produk hasil olahan UMKM.

2. Pasar Ternak

Fungsi dari pasar ternak diharapkan dapat memantau transaksi jual beli ternak dengan tertib, ramah lingkungan dan sekaligus dapat menjadi salah satu sumber pemasukan pendapatan bagi pemerintah daerah, yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota, data pasar ternak disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2- 190 Pasar Hewan Kabupaten/Kota Prov.NTB Tahun 2021

NO	NAMA	ALAMAT
1.	Pasar Hewan Tanjung	Sokong Kec.Tanjung Kab.Lombok Utara
2.	Pasar Hewan Selagalas	Selagalas, Kec. Sandubaya Kota Matara
3.	Pasar Hewan Narmada	Merce Kec.Lingsar Kab.Lombok Barat
4.	Pasar Hewan Praya	Praya Kab.Lombok Tengah
5.	Pasar Hewan Barabali	Desa Barabali Kab.Lombok Tengah
6.	Pasar Hewan Masbagik	Masbagik Selatan Kec.Masbagik Kab.Lombok Timur
7.	Pasar Hewan Pototano	Poto Tano Kec.Poto Tano Kab.Sumbawa Barat
8.	Pasar Hewan Bangkong	Karang Dima Kec.Badas Kab.Sumbawa

NO	NAMA	ALAMAT
9.	Pasar Hewan Manggalewa	Doromelo Kec.Manggalewa Kab.Dompu
10.	Pasar Hewan Woja	Kelurahan Simpasari Kec.Woja Kab.Dompu

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB 2021

4. Bidang Kehutanan

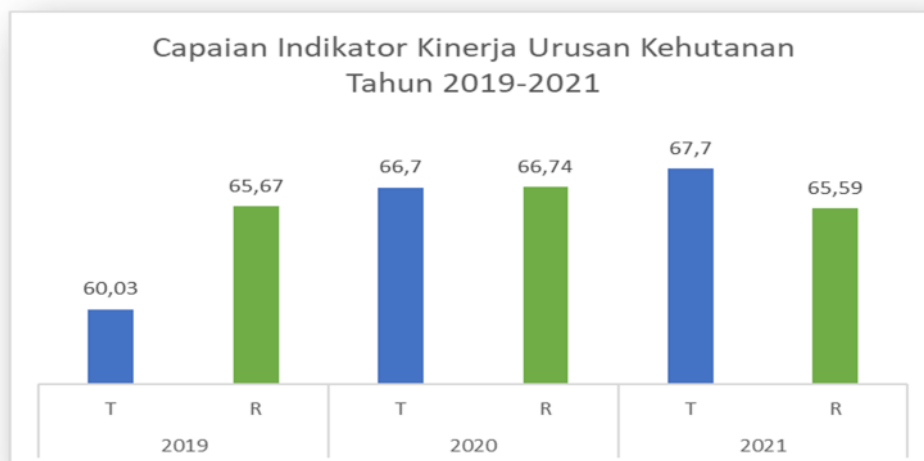
Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Kehutanan yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dengan capaian indikator kinerja utama urusan kehutanan diukur melalui pengukuran nilai indeks kualitas tutupan lahan dan disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2- 191 Capaian Kinerja Dan Indikator Bidang Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2019-2021

No	INDIKATOR BIDANG URUSAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
	KEHUTANAN						
1	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	60,03	65,67	66,7	66,74	67,7	65,59

Sumber : Website Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK (ppkl.menlhk.go.id)

Gambar 2- 59 Indikator Kinerja Urusan Kehutanan Tahun 2019-2021



a. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks kualitas tutupan lahan sebagai satu-satunya indikator yang mewakili isu hijau, mencapai nilai 65,59 poin di tahun 2021. Nilai ini didapat dari perhitungan oleh Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian LHK. Metode perhitungan sudah menambahkan tutupan semak belukar dan belukar rawa yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai, danau dan pantai, lereng >25% (0,6 dari tutupan hutan), ruang terbuka hijau (RTH), Kebun Raya dan Taman Keanekaragaman Hayati (0,6 dari tutupan hutan). Capaian di tahun 2021 masih belum memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMD akibat

masih maraknya gangguan keamanan hutan dan keterbatasan anggaran untuk penanaman lahan kritis.

Namun Dinas LHK Provinsi NTB tetap berupaya melalui penanaman luar dan dalam kawasan hutan seluas 10.270,5 ha yang didukung oleh APBD, APBN BPDASHL Dodokan Moyosari, dana swasta (kewajiban atas ijin pinjam pakai kawasan hutan), penghijauan, dan dana aspirasi anggota DPRD. Kegiatan rehabilitasi juga dilakukan melalui penyusunan dokumen perencanaan bangunan Konservasi Tanah dan Air yang berfungsi untuk mempertahankan tanah dan air di sekitar daerah tangkapan melalui pengendalian erosi, sedimentasi dan banjir, sehingga lahan dan air dapat dimanfaatkan secara optimal. Tahun 2021, telah dibangun 270 unit bangunan Gully Plug yang tersebar di wilayah Balai KPH Brang Rea Pucak Ngengas, KPH Ampang Plampang, KPH Toffo Pajo Soromandi, dan KPH Tambora.

Sementara itu upaya dari sisi legalitas, Gubernur NTB mengeluarkan Instruksi Gubernur NTB Nomor 188.4.5-75 Tahun 2020 perihal Moratorium Penebangan dan Peredaran Hasil Hutan Kayu di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan adanya Instruksi Gubernur NTB di atas, diharapkan dapat Mengatasi kondisi darurat illegal logging, menertibkan peredaran hasil hutan kayu, memutus mata rantai peredaran kayu illegal antar pulau, serta memberikan jeda bagi pemulihan kerusakan ekosistem hutan dan sumber daya yang ada di dalamnya. Selain instruksi Gubernur, pengelolaan hutan NTB diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Hutan sebagai upaya untuk : 1) mewujudkan kawasan hutan yang mampu menciptakan ketahanan ekonomi, ekologi, dan sosial, 2) mengoptimalkan kelembagaan pengelolaan hutan di tingkat tapak secara efektif dan efisien, 3) Memberikan landasan hukum bagi pengelolaan hutan berbasis karakteristik wilayah dengan memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat secara partisipatif dan kolaboratif, dan 4) Menjamin kelestarian fungsi hutan sebagai sistem penyangga kehidupan serta mencegah kerusakan kawasan hutan.

Upaya untuk menurunkan lahan kritis di Provinsi NTB telah dilaksanakan melalui kegiatan penanaman di luar dan dalam kawasan hutan dengan reboisasi dan penghijauan. Reboisasi atau rehabilitasi hutan bertujuan untuk menghutankan kembali kawasan hutan yang kritis yang dilaksanakan bersama masyarakat secara partisipatif. Sedangkan penghijauan adalah penanaman pada lahan kosong diluar kawasan hutan. Pada tahun 2021, luasan lahan kritis Provinsi NTB yang dirilis oleh BPDASHL Dodokan Moyosari mencapai 501.178 ha. Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) melalui penanaman di dalam dan luar kawasan hutan seluas 12.463,5 ha melalui dana APBN dan APBD, serta pihak lainnya. Berikut rincian luas areal kegiatan RHL tahun 2021 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2- 192 Rekapitulasi Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2021

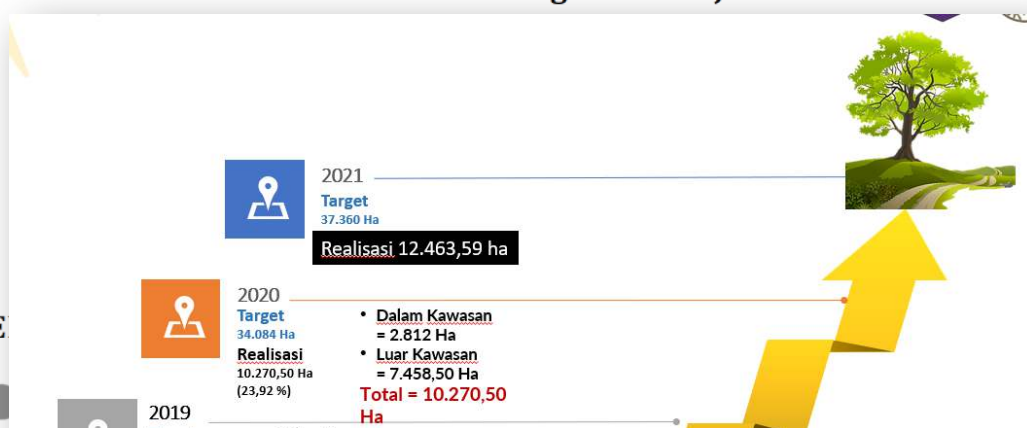
No	Pelaksana	Luas (Ha)	Kegiatan
1	Dinas LHK (APBD Provinsi NTB)	1465 1185 58 48 20	- Hutan Rakyat - Kebun Bibit Rakyat - Bubidaya HHBK - Penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial - Rehabilitasi daerah tangkapan air
2	BPDAS Dodokan Moyosari (APBN)	1385	Rehabilitasi Hutan dan Lahan
3	Pihak Lainnya :		
	PT. Indotan Lobar bangkit	100	Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Reboisasi)
	IPPKH. Sumbawa Jutaraya	602	IPPKH Rehab DAS
	IPPKH Bupati SumbawaBarat untuk bendungan Bintang Bango	208	IPPKH Rehab DAS
	PT. Amman Mineral, Tambang Emas	2682	IPPKH Rehab DAS
4	Dana Aspirasi	6,63 19,5 18,75 5 16,5	Aspirasi Anggota DPR Komisi IV Aspirasi Anggota DPR Komisi IV Aspirasi Anggota DPR Komisi IV Aspirasi Anggota DPR Komisi IV Aspirasi Anggota DPR Komisi IV
5	Dana Hibah	1,25 2,5	Penanaman secara swadaya Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah kab. Loteng (DISLHK) Penanaman Dalam rangka Kunjungan Presiden RI (BP. Ir. Joko Widodo)
JUMLAH		12.463,5	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2021

NTB Hijau merupakan salah satu program Pemerintah Nusa Tenggara Barat khususnya pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB melalui pelibatan para pihak dalam upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Pada tahun 2021 telah dilaksanakan rehabilitasi vegetatif seluas 12.463 ha melalui beberapa kegiatan antara lain:

- Pembibitan tanaman produktif sekitar desa perbatasan kawasan hutan
- Rehabilitasi diluar kawasan hutan dari APBD
- Rehabilitasi dari Sumber APBN Kementerian LHK
- Rehabilitasi dari sumber Proposal (DAK)
- Rehabilitasi dari Pemegang IPPKH
- Rehabilitasi dari organisasi massa, siswa dan swasta

Gambar 2- 60 Perkembangan NTB Hijau 2019-2021



5. Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang ESDM untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi 5 Gubernur yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi, dengan sasaran terpenuhinya pelayanan bagi penduduk miskin melalui indikator sasaran Rasio Elektrifikasi yang juga menjadi Indikator Kinerja Utama.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator sasaran strategis tahun 2021 disajikan dalam Pengukuran Kinerja pada tabel di bawah.

Tabel 2- 193Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik	99,77%	99,98%	110,21%
Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi	15,76%	13,04%	82,74%
Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	Persentase pemanfaatan air tanah di kab/kota Provinsi NTB yang berkelanjutan	100%	100%	100%
Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara	Persentase wilayah izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (<i>good mining practices</i>) (%)	9%	11,90%	132,18%
Rata-rata capaian kinerja				103,78

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB Tahun 2021

6. Bidang Perdagangan

Urusan Pilihan Bidang Perdagangan yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan Provinsi NTB dilaksanakan melalui 6 (enam) program prioritas, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2- 194Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Urusan Perdagangan Tahun 2021

No	Indikator Bidang Urusan	Tahun 2021	
		Target	Realisasi
1	Pengeluaran Perkapita	11.273.000	10.377.000
2	Inflasi	3-4%	2,12%
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	1%	2,30%

4	Inflasi Pangan Bergejolak	3-4%	3,17%
5	Persentase Pertumbuhan Ekspor Non Tambang	1%	-8,7%
6	Nilai Pertambahan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	600.000 (Juta Rupiah)	632.660 (Juta Rupiah)
7	Indeks Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	50 Point	50,26 Point

Sumber : Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2021

1. Pengeluaran Perkapita

Tingkat Pengeluaran Perkapita yang terjaga menjamin penduduk mampu untuk memenuhi kebutuhannya meskipun masih dalam tingkat minimum. Peningkatan nilai tambah dari berbagai sektor usaha yang dilakukan masyarakat juga dapat memicu meningkatnya pengeluaran per kapita. Badan Pusat Statistik Provinsi NTB menghitung dan mempublikasikan Pengeluaran Perkapita NTB secara rutin setiap tahunnya. Pengeluaran Perkapita NTB pada tahun 2020 tercatat Rp.10,377 juta/tahun naik dibandingkan dengan tahun 2020 dengan nilai Rp.10,350 juta/tahun sebesar 27 ribu rupiah. Resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19 menyebabkan pendapatan masyarakat NTB meningkat lambat namun masih dibawah target RPJMD sebesar Rp.11,273 juta/tahun.

Tabel 2- 195 Capaian Indikator Kinerja Pengeluaran Perkapita Tahun 2021

INDIKATOR	SATUAN	2019	TARGET	REALISASI
Pengeluaran Perkapita	Rp. (000)	11.273,00	10,377,00	92%

Sumber : BPS Provinsi NTB & Kajian Ekonomi dan Regional (BI) *) Tahun 2021

2. Inflasi

Berdasarkan hasil pemantauan, perkembangan harga berbagai komoditas secara umum menunjukkan peningkatan. Pada Bulan Desember 2021, inflasi Gabungan Dua Kota (Kota Mataram dan Kota Bima) sebesar 0,63 persen, atau terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,31 pada bulan November 2021 menjadi 105,97 pada bulan Desember 2021. Dengan angka inflasi tersebut, maka laju inflasi Gabungan tahun kalender (Desember 2021 terhadap Desember 2020) sebesar 2,12 persen dan laju inflasi 'tahun ke tahun' (Desember 2021 terhadap Desember 2020) sebesar 2,12 persen.

Tabel 2- 196 Capaian Indikator Kinerja Pengeluaran Perkapita Tahun 2021

INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALSASI	PERSENTASE
Inflasi	%	3-4%	2,12%	141%

Sumber : Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2021

3. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor Perdagangan

Ekonomi Nusa Tenggara Barat tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 (c-to-c) mengalami pertumbuhan sebesar 2,30 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha kecuali lapangan usaha pertambangan dan penggalan. Lapangan

usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Konstruksi sebesar 8,94 persen, diikuti Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,87 persen. Selanjutnya, Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas tumbuh 7,73 persen; Informasi dan Komunikasi tumbuh 4,98; dan Jasa Keuangan dan Asuransi tumbuh 4,39 persen. Sementara itu, lapangan usaha yang mengalami kontraksi yaitu pertambangan dan penggalan sebesar 0,15 persen. Struktur PDRB Nusa Tenggara Barat menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan IV tahun 2021 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian NTB masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 19,95 persen; diikuti oleh Pertambangan dan Penggalan sebesar 18,69 persen; Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,82 persen; dan Konstruksi sebesar 10,76 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian NTB mencapai 62,82 persen.

4. Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Tambang

Persentase Pertumbuhan Ekspor Non Tambang yang datanya merupakan hasil dari rilis ataupun hasil dari olahan BPS Provinsi NTB dan Dinas Perdagangan Provinsi NTB, indikator tersebut masuk dalam tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Perdagangan 2019-2023 dan merupakan turunan dari RPJMD Provinsi NTB 2019-2023.

Berdasarkan rilis/publikasi dari BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 2 Februari 2022, nilai ekspor Provinsi Nusa Tenggara Barat Bulan Desember 2021 sebesar US\$ 58.472.552 mengalami penurunan sebesar 48,83 persen jika dibandingkan dengan ekspor Bulan November 2021 yang bernilai US\$ 114.262.116. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020, Nilai Ekspor Provinsi Nusa Tenggara Barat Bulan Desember 2021 mengalami penurunan sebesar 56,49 persen. Dimana tercatat Nilai ekspor Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Bulan Desember 2020 sebesar US\$ 134.387.173. Nilai ekspor Provinsi Nusa Tenggara Barat Bulan Desember 2021 menurut negara tujuan menunjukkan Jepang menjadi negara tujuan dengan nilai ekspor terbesar yaitu US\$ 57.672.515 atau sekitar 98,63 persen. Negara kedua dengan nilai ekspor Provinsi NTB Bulan Desember 2021 tertinggi adalah Belarus dengan nilai US\$ 208.440 atau sekitar 0,36 persen kemudian disusul Vietnam yaitu sebesar US\$ 193.064 atau sekitar 0,33 persen. Nilai ekspor Provinsi Nusa Tenggara Barat Bulan Desember 2021 tertinggi keempat ditujukan ke Uni Emirat Arab dengan nilai US\$ 191.070 atau sekitar 0,33 persen dan kelima ditujukan ke Cina dengan nilai US\$ 71.148 atau sekitar 0,12 persen. Nilai ekspor Provinsi Nusa Tenggara Barat ke Negara lain hanya mencapai 0,23 persen dari total ekspor Bulan Desember 2021. Untuk pertumbuhan ekspor Tahun 2021 bila dibandingkan Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 8,70%.

Kelompok komoditas ekspor Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terbesar pada Bulan Desember 2021 adalah Barang Galian/Tambang Non Migas sebesar US\$ 573.132.871 (97,71 persen), Perhiasan/Permata sebesar US\$ 539.180 (0,92 persen), Tembakau sebesar US\$ 339.510 (0,68 persen), Garam, Kapur, Belerang sebesar US\$ 135.616 (0,23 persen), Buah-buahan sebesar US\$ 128.123 (0,22 persen), serta Biji-bijian Berminyak sebesar US\$ 82.274 (0,14 persen). Sedangkan kelompok komoditas ekspor Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terbesar pada Bulan November 2021 adalah Barang Galian/Tambang Non Migas sebesar US\$ 112.785.826 (98,71 persen), Garam, Kapur, Belerang sebesar US\$ 458.761 (0,40 persen), Buah-buahan sebesar US\$ 282.947 (0,25 persen), Perhiasan/Permata sebesar US\$ 273.296 (0,24 persen), Daging dan Ikan Olahan sebesar US\$ 115.540 (0,10 persen), serta Ikan dan Udang sebesar US\$ 102.569 (0,09 persen). Negara tujuan ekspor kelompok komoditas Barang Galian/Tambang Non Migas pada Bulan November 2021 adalah Jepang. Untuk ekspor kelompok komoditas Perhiasan/Permata ditujukan ke Jepang dan Singapura, ekspor Kelompok Tembakau ditujukan ke Belarus dan Uni Emirat Arab. Sedangkan kelompok komoditas Garam, Kapur, Belerang ditujukan ke Korea Selatan, Vietnam, Thailand, dan Cina, serta kelompok komoditas Buah-buahan ditujukan ke Vietnam.

Pertumbuhan ekspor non tambang berdasarkan perhitungan data SKA yang diterbitkan oleh Dinas Perdagangan terhitung akhir tahun 2021 adalah peningkatan sebesar 1,93 persen atau sekitar 193 persen dari target 1 persen. Hal tersebut menunjukkan capaian pertumbuhan ekspor non tambang tahun 2021 melampaui target sekitar 93 persen. Namun jika dibandingkan dengan capaian kinerja ekspor non tambang tahun 2021 menurun signifikan sebesar 4,34 persen atau sekitar 84,05 persen dari pertumbuhan nilai ekspor non tambang tahun 2020 yang nilainya sebesar 6,27 persen.

7. Bidang Perindustrian

Urusan Pilihan Bidang Perindustrian yang diselenggarakan pada Dinas Perindustrian Provinsi NTB dilaksanakan melalui 3 (tiga) program prioritas, 3 (tiga) kegiatan utama dan 11 (sebelas) sub kegiatan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2- 197 Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Urusan Perindustrian Tahun 2021

No.	Indikator Bidang Urusan	Tahun 2021	
		Target	Realisasi
1.	Persentase Pertumbuhan IKM	6,50%	6,75%
2.	Persentase IKM Industri yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	20%	60%
3.	Meningkatnya Nilai Investasi Pelaku Industri	166,39 Milyar	171,02 Milyar
4.	Cakupan Produk Terstandarisasi	30%	81,82%

5.	Cakupan Penggunaan Teknologi dalam Proses Produksi	10%	91,43%

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB, 2021

Indikator Kinerja Daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas Perindustrian adalah sebagai berikut:

Tabel 2- 198 Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Perindustrian Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	2018	2019	2020	2021	
		Target	Target	Target	Target	Realisasi
Pertambahan nilai PDRB Sektor Industri	Rp. Juta	67.344,90	164.565,72	168.395.360	-	-
Persentase industri kecil yang meningkat menjadi industri menengah	%	1,13	1,68	2,2%	-	-
Pertumbuhan industry	%	2,68	3,20	4,04%	-	-
Persentase pertumbuhan IKM	-	-	-	-	6,50%	6,75%
Persentase IKM Industri yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	-	-	-	-	20%	60%
Meningkatnya Nilai Investasi Pelaku Industri	-	-	-	-	166,39 Milyar	171,02 Milyar
Cakupan Produk Terstandarisasi	-	-	-	-	30%	81,82%
Cakupan Penggunaan Teknologi dalam Proses Produksi	-	-	-	-	10%	91,43%

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB, 2021

Program industrialisasi adalah program yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah pada produk unggulan yang ada di NTB yang pada akhirnya dapat memberikan peningkatan ekonomi bagi masyarakat. Saat ini program industrialisasi masih pada tahap pendataan produk unggulan yang akan dikembangkan, penguatan dan peningkatan kapasitas IKM yang ada, serta melakukan kerjasama dengan pihak terkait seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Balai Latihan Kerja (BLK), perguruan tinggi dan asosiasi yang ada dalam rangka memperkuat industrialisasi. Penguatan berupa amati, tiru dan modifikasi mesin-mesin yang mampu diproduksi oleh anak NTB, harapannya dapat dimanfaatkan guna mendukung pencapaian produksi hulu. Program industrialisasi diharapkan dapat memanfaatkan sumberdaya potensial terlatih yang dihasilkan oleh SMK maupun BLK sehingga dapat meningkatkan partisipasi angkatan kerja dan mengurangi pengangguran. Selain itu STIP berfungsi sebagai kawasan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan inovasi IPTEK serta sebagai agroeduwisata secara berkelanjutan, melalui upaya peningkatan produksi menjadi produk komersil skala besar/industry sehingga kemanfaatannya dapat lebih dirasakan oleh masyarakat.

Terkait pemasaran produk industrialisasi yang telah dihasilkan, Dinas Perindustrian Provinsi NTB melakukan kegiatan pameran pada event-event yang berskala local dan nasional, bekerjasama dengan Dekranasda Provinsi NTB dan Asosiasi

IKM yang ada di NTB. Sedangkan untuk akses permodalan, Dinas Perindustrian Provinsi NTB mendorong IKM memiliki ijin usaha yang merupakan syarat dalam memperoleh permodalan dari perbankan. Pada beberapa kegiatan, Dinas Perindustrian selalu menggandeng Perbankan untuk ikut andil dalam pengembangan industrialisasi di NTB.

Balai Kemasan dan STIP pada Dinas Perindustrian Provinsi NTB berfungsi sebagai pendukung industrialisasi dalam penguatan desain dan mutu kemasan produk olahan yang dihasilkan IKM baik berupa desain kemasan maupun desain produk. Keberadaan Balai Kemasan dihatatkan menjadi penggerak industri kecil dan menengah (IKM) dalam mendapatkan kemasan dengan harga murah dan berkualitas. Pendampingan-pendampingan telah dilakukan secara intensif oleh Dinas Perindustrian dan terus menggali potensi-potensi teknologi dan industry yang dikembangkan oleh para pelaku IKM, sehingga pada tahun 2021 telah diresmikan beberapa rumah produksi, diantaranya kuliner legend dalam kemasan steril dan rumah produksi kosmetik, sedangkan dalam pendampingan teknologi permesinan yaitu adanya pengembangan kendaraan listrik (cidomo listrik, e boat listrik dan sepeda listrik).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Capaian kinerja pembangunan daerah urusan pilihan bidang perindustrian diukur melalui indikator kinerja jumlah pendaftaran HaKi karya seni budaya daerah dengan capaian sebagaimana pada tabel berikut.

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia yang merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HaKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Adapun nama-nama capaian HAKi merek IMK sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2- 199 Daftar IKM yang Mendaftar HaKi Merek Daerah Tahun 2021

No.	Nama Ikm / Perusahaan	Nama Pemilik	Produk	Nama Merek	Alamat
1	Dapur Khanssa	Nurnanida	Catering	Dapur Khanssa	Jl. Danau Jempang No. 4 Pagutan Permai
2	Dae Aji	Armini	Jus Jagung	Dae Aji	Jl. Hosokro Aminoto Gg Bhineka No. 6 Kamasan Monjok, Kec. Selaparang Kota Mataram
3	Kupi Jebag Gawah Senaru Lombok	Hadianto	Kopi	Kupi Jebag Gawah Senaru Lombok	Jl. Gaharu No. 3 Komplek Kehutanan Pagesangan Mataram
4	Go Grill House	Ismi Isti Wahida Isya, St	Restoran Masakan Panggangan Daging , Ayam, Ikan	Go Grill House	Jl. Gunung Merapi No. 158 A Dasan Agung Baru Kec. Selaparang Mataram

No.	Nama Ikm / Perusahaan	Nama Pemilik	Produk	Nama Merek	Alamat
5	Rengik	Andro Meda Teqy	Keripik Buah-Buahan	Rengik	Jl. Reban No. 17 Karang Sukun
6	Anugerah Desain	Biang Gianto	Madu Herbal Dan Kerajinan	Anugerah Desain	Jl. Industri No. 15 Ampenan Mataram
7	Mulen Meres	Suparlan	Jamu Dalam Bentuk Cair	Mulen Meres	Jl. Adi Sucipto Batu Raja Ampenan Utara Gang Garuda Rt. 07 Mataram
8	Aliyya & Alyssa	Heny Lismawati	Pizza, Bolen	Aliyya & Alyssa	Jl. Pejanggal Gg 1 No. 10 Pajang Barat Mataram
9	Mayang Kencak	Ermayani	Sambal Tahu Mercon, Warung Nasi, Jajan Tarek, Keripik Talas	Mayang Kencak	Jl. Masjid Al-Muttaqin Banjar Dasan Agung
10	Hawo Coffee	Reni Nursafitri	Biji Dan Bubuk Kopi	Hawo Coffee	Jl. Jatiluhur V Blok K 27 Btn Kekalik Baru
11	Ogura_Ku	Surya Ulfa	Cake / Kue	Ogura_Ku	Jl. Gili Trawangan No. 24 Taman Karang Baru Mataram
12	Kepiting Gibung	Desy Kurniawati	Restoran Seafood, Ayam Dll	Kepiting Gibung	Jl. Majapahit No. 90 Mataram
13	Cemal Cemil Lombok	Rindy Antika	Jasa Penyediaan Makanan Dan Minuman, Angkringan	Cemal Cemil Lombok	Jl. Taman Sejahtera li No. 3 Ampenan
14	Nasi Kuning Legen Ampenan	Ang Lie Fang	Nasi Kuning / Wrung Makan Tradisional	Nasi Kuning Legen Ampenan	Jl. Rajawali, Komp. Pertokoan Rajawali Blok A No. 2 Cakranegara
15	My Jahe	Hulwaturro'yi	Minuman Jahe	My Jahe	Jl. Sultan Kaharudin No. 23 Karang Pule Kec. Sekarbela Mataram
16	Kedai Makpruull	Dara Ayu Sasongko	Jasa Penyediaan Makanan Dan Minuman, Angkringan	Kedai Makpruull	Jl. Panji Tilar Negara No. 11 Mataram
17	Sere	Vera Elizabeth Hutasoit	Perhiasan Mutiara	Sere	Perum Riverside Park Residence Blok A19, Rt. 002 Rw. 163 Mayura Cakranegara
18	Sf Goat Dairy	Wawan Setiawan	Olahan Susu Kambing	Sf Goat Dairy	Jl. Kesra Vii/77 Perumnas Tanjung Karang Permai Mataram
19	Naturadic	Mahacita Andanalusia	Kosmetik	Naturadic	Jl. Panji Wangko No 14 Kekalik Mataram
20	Batasari	Yani Andriyani	Madu Dan Olahannya	Batasari	Jl. Semangka No. 5 Karang Taliwang Cakranegara Mataram
21	Jamur Sasak	Wirasandi	Jamur Tiram Yang Diolah	Jamur Sasak	Jl. Bung Karno Rt. 03 Petemon Pagutan Timur Mataram
22	Lasingan	Iskandar Zulkarnain	Kacang Mede, Kopi, Vanili, Gula Aren Coklat	Lasingan	Jl. Ade Irma Suryani Gg Panda 1 Blok B No 39 Monjok Perluasan
23	Urban Farming	Narita Amni Rosadi	Pertanian Terkait Dengan Praktik Agrikultur Dan Pertanian	Urban Farming	Jl. Banda No. 194 Karang Ujung Ampenan Mataram
24	Rumah Kaos Lombok	Lina Aryati	Kaos, Jaket, Kaos Polo, T-Shirt Bordir	Rumah Kaos Lombok	Jl. Chairil Anwar No. 1 Karang Kelebut Cakranegara
25	Cv.Putra Jaya Kencana	I Nyoman Putra Astawan	Minyak Goreng	Vapora	Jl. Pantai Sire No. 18 Abian Tubuh Selatan Rt/Rw 003/144 Cakranegara Mataram
26	Gunung Sasak	Dedi Setiadi	Madu	Gunung Sasak	Jl. Abdul Kadir Munsyi Punia Saba Rt 002 / Rw 087 Mataram
27	Gilia Lombok Pearl	Amalia Mangivera	Perhiasan	Gilia Lombok Pearl	Puri Penghulu Agung Blok B No. 18 Ampenan Mataram
28	Niat Baik Bakery	Novita Dewi Aryani	Roty Dan Bakery	Niat Baik Bakery	Jl. Sriwijaya 307 Mataram
29	Rempah Ajaib Istimewa	Ernawati	Bumbu Masakan Dan Sambal	Rempah Ajaib Istimewa	Jl. Panji Wangko No 12 Kekalik Mataram

No.	Nama Ikm / Perusahaan	Nama Pemilik	Produk	Nama Merek	Alamat
30	Hsm Hj. Salmah Moerad	Ahmad Moerad	Ayam Taliwang	Hsm Hj. Salmah Moerad	Jl. Ade Irma Suryani Gg Unggas 2 No. 1 Karang Taliwang Cakranegara Kota Mataram
31	Aba Harits	Endro Yuwono	Madu	Aba Harits	Jl. Sembada Indah Iii No. 7 Kekalik Jaya Sekarbela Mataram
32	CV. Organik Lombok	Septia Erianty	Karya Seni Kertas, Kertas Pembungkus, Kardus	lwrap	Jl. Nuraksa No. 10 Lingk. Anyar Taman Pltd Pagesangan Timur Mataram
33	CV. Organik Lombok	Septia Erianty	Kosmetik	Marine Botanicals	Jl. Nuraksa No. 10 Lingk. Anyar Taman Pltd Pagesangan Timur Mataram
34	Sekardiu	Baiq Henda Apriani	Fashion / Apparel / Atelier	Sekardiu	Jl. Melati Iii No. 128-129 Perum Asri Permai Rembiga Selaparang Mataram
35	Dapur Kika	Dina Larasati	Aneka Kue	Dapur Kika	Puri Penghulu Agung Blok B No. 6 Ampenan Mataram
36	Mor & Mor Pearls	Moria Pangaribuan	Perhiasan Mutiara	Mor & Mor Pearls	Green Boulevard, Bendega Kel. Tanjung Karang Kec. Sekarbela Kota Mataram
37	Cemilane Maeh	Maesarah	Keripik Usus Ayam	Cemilane Maeh	Jl. Sultan Kaharudin Rt. 3 Peringgahan Pagesangan Kec. Sekarbela Mataram
38	Gaia	Desi Irawati	Mutiara	Gaia	Puri Penghulu Agung Blok B 17 Jl. Penghulu Agung Ampenan Mataram
39	D'rey Sweet	Ni Made Dewi Rahayu Paranita	Aneka Puding, Bouquet	D'rey Sweet	Jl. Batu Bolong Btn Pagutan Regency Tahap Ii/19 Pagutan Mataram
40	Ocean Nori	M. Putra Sahban	Biskuit Rumput Laut	Innanori	Jl. Energi, Gg. Layur Kav 2 Ampenan, Mataram
41	Bigboos	Lintang Anggraini Kusuma Dewi	Martabak Dan Terang Bulan	Bigboos	Jl. Gili Trawangan No. 3 Taman Karang Baru Mataram
42	Bebuak	Sumiati	Aneka Kripik Dan Camilan	Bebuak	Jl. Kh Mansyur Iv Kebun Sari, Mataram
43	Lallo.Id	Rahman	Transportasi Laut, Platform Digital	Lallo.Id	Jl. Catur Warga No. 29 Mataram
44	Lumpia Gajah Mada	Rachmat,A.Md	Aneka Lumpia	Lumpia Gajah Mada	Jl. Walisongo Blok S No.4 Kodya Asri, Jempong Baru, Mataram
45	Mapan Ntb	Koprasi Konsumen Syariah Bmt Al-Iqtishady	Pakan Ternak Unggas	Mapan Ntb	Jl. Gajah Mada No.08 Lingk. Pagesangan Barat Kelurahan Pagesangan, Mataram
46	Kembanginges	Miranda Putri Anjani	Kue Kering & Makanan	Kembanginges	Jl. Ragi Genap Gg Angrek No.1 Banjar Ampenan, Mataram
47	Begawe	Aisyah Andriani	Kue Kering & Kacang	Begawe	Jl. Cilinaya Indah Btn Taman Anggrek B.55 Kekalik, Mataram
48	Smara	Db.Dewi Suprihatin	Abon & Kopi	Smara	Btn. Taman Indah Jl. Karawang B 59 Pagesangan Timur Mataram
49	Rumah Kue Florin	Helda Hurniyanti	Aneka Kue	Rumah Kue Florin	Jl. Bunga Matahari No.2 Gomong Lama, Mataram
50	Ntb Mal.Com	Pt. Ntb Mall Gemilang	Jasa Jual Beli Barang	Ntb Mal.Com	Jl. Langko No. 61, Kelurahan Dasan Agung Baru, Selaparang, Mataram
51	Risol Mamiyo	Yuana Trisnasari	Kue Basah	Risol Mamiyo	Jl. Pariwisata No. 46 Lingkungan Kebon Raja, Mataram
52	Afifa	Indah Lestari	Aneka Camilan	Afifa	Karang Jangkong, Jl. Merpati, Gg. Mawar, Mataram
53	Zhafira Food	Pilia Wati	Abon Ikan & Peyek	Zhafira Food	Jl. Ade Irma Suryani, Gg. Cempaka No. 2, Monjok Timur, Mataram
54	Gandeq	Lian Aldiano	Kerajinan Tas	Gandeq	Jl. Halmahera 9 No. 4 Rembiga
55	Natural Pearl	Lian Aldiano	Kerajinan Tas	Natural Pearl	Jl. Halmahera 9 No. 4 Rembiga

No.	Nama Ikm / Perusahaan	Nama Pemilik	Produk	Nama Merek	Alamat
56	Pawon Bale	Mimin Sundari	Lalapan Bakar	Pawon Bale	Jl. Bunga Matahari, Gg.3 No.3 Gomong Lama, Mataram
57	Lina Macrame	Maulina Hidayati	Rajut	Lina Macrame	Jl. Energi Gang Cumi-Cumi Gatep Ampenan, Mataram
58	Henida Food	Arida Prihayati	Kue Kering	Henida Food	Jl.Kenari 8 Babakan Permai, Mataram
59	Vey Kitchen	Henny Setiawati	Roti Dan Kue	Vey Kitchen	Jl.Bung Karno Ruko No.5 Pagutan, Mataram
60	Kopi Rinbo	M. Huzaini Areka	Kopi	Kopi Rinbo	Jl.Industri No.26 A Taman Kapitan, Ampenan Kota Mataram
61	Masya'allah	Baiq. Rostiani	Kue Kering	Masya'allah	Jl.Ragi Genap Gg Anggrek No 1 Banjar, Ampenan, Mataram
62	Inaq Almah	Almah	Dendeng Dan Abon Ikan	Inaq Almah	Jl.Patuh Patut Pacu, Lingkungan Gatep, Mataram
63	Frydey	Yusrin Hafizan	Bumbu Dan Rempah	Frydey	Jl.Ade Irma Suryani, Gang Unggas 2 No 1 Cakranegara, Mataram
64	Najwa Catering	Suardi Nuradi	Catering	Najwa Catering	Jl.Hasanudin, Gg.Jaya Ii, Pandansalas,Mayura Cakranegara
65	Ermi Pearl	Ermi Febrina Hidayat	Mutiara	Ermi Pearl	Jl.Lingkar Selatan, Kr.Genteng, Pagutan, Mataram
66	Mabrooq Coffee	Muntasar	Kopi	Mabrooq Coffee	Gang Manalagi 12, Lingkungan Moncok, Telaga Mas, Ampenan, Mataram
67	Pawon Inak-Inak	Mulida	Abon Ikan Laut, Dendeng Ikan	Pawon Inak-Inak	Dusun Peresak, Meninting Kec. Batulayar Lombok Barat
68	Greenjani Hydrofarm	Hamzah	Sayur Segar	Greenjani Hydrofarm	Jl. Penanggak Dusun Belencong Bagek Desa Midang Lombok Barat
69	D'zlicius	Amita Rosadiyati	Rice Bowl, Aneka Kue	D'zlicius	Puri Citra Asri Blok A No. 14 Sandik Batulayar Lombok Barat
70	Deleena	Denny Marsial	Dompot, Tas	Deleena	Perum Lingkar Muslim Jl. Cordova Blok D No. 8 Desa Bajur Labuapi Lombok Barat
71	Dapoer Bunda Makiyah	Makiyah	Aneka Keripik	Dapoer Bunda Makiyah	Jl. Krakatau Dsn Gegutu Telaga, Desa Midang Kec. Gunungsari Lombok Barat
72	Ma'me	Syaiful Hardi	Kosmetik	Ma'me	Jl. Gunung Pengsonh Dusun Paok Kembar Rt. 05 Desa Telagawaru Lombok Barat
73	Tawlin	Lilin Udianti	Madu Dan Olahannya	Tawlin	Jl. Krakatau Perumahan Gegutu Indah No. 9 Desa Kekeru Kec. Gunung Sari
74	Bale Bahari	Anita Puji Lestari	Olahan Ikan, Unggas, Daging	Bale Bahari	Jl. Permata Bc 18 Btn Bumi Selaparang Asri Lombok Barat
75	Asyraf Coffee	Maryati	Kopi Bubuk / Kopi Roasted Bean	Asyraf Coffee	Jl. Raya Kekeru No. 8 Gegutu Raban Dasan Geria Lombok Barat
76	Bengkel Oke Las	Saiful Haq	Perbengkelan Dan Rekayasa Logam	Oke Las	Dusun Tegal Desa Meninting Kecamatan Batulayar
77	Pawon Pengsong	Nur Aida	Kopi Serbat Jahe	Pawon Pengsong	Jl Raya Pengsong Perumahan Griya Perembun Asri Blok L 05 Perampuan Kec. Labuapi Lombok Barat
78	Uniq	Sri Wahyuni	Fashion Dan Kriya (Rajutan)	Uniq's	Jl. Taruna Gg Keadilan No. 2 Sedayu Tengah Kediri Selatan Lombok Barat
79	Pempek Catur Warga	Shinta Wulan Sari	Pempek	Pempek Catur Warga	Jl. Anggur 4 No. 10 Perum Lingkar Asri Terongtawah Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat
80	Trigosa	Ahyar Rasidi	Madu	Trigosa	Dusun Teloke Lauk, Batu Layar, Lombok Barat
81	Mataram Teknik	Nazar Susan, St	Mesin Pertanian, Pengolah Sampah, Alat Inovasi	Mataram Teknik	Dusun Lembar Desa Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lombok Barat

No.	Nama Ikm / Perusahaan	Nama Pemilik	Produk	Nama Merek	Alamat
82	Al-Wurqoni	Makiyah	Minyak Kelapa	Al-Wurqoni	Jl. Krakatau. Dsn. Gegutu Telaga, Ds.Midang, Kec. Gunung Sari, Lombok Barat
83	Berkah Alam Coffee	Lalu Thoriq	Kopi	Berkah Alam Coffee	Jl. Menggaris li Blok Ai, No.20 Dasan Gres Gerung, Lombok Barat
84	Maskot (Madu Sekotong)	Zul Hadi,S.Pd.Sd	Madu	Maskot (Madu Sekotong)	Dusun Labuhan Poh Timur, Desa Batu Putih, Kec. Sekotong, Lombok Barat
85	Prapti Mutiara Lombok	Sri Prapti Astuti	Perhiasan Mutiara, Perak	Prapti Mutiara Lombok	Jl. Soeharto No.31 Salut, Desa Selat Kec. Narmada, Lombok Barat
86	Puntiiq	Ihsan Wirawan	Keripik Pisang	Puntiiq	Gubuk Baru, Kel. Banyumulek, Kec. Kediri, Kab Lombok Barat
87	Temy Gift	Bq. Septemi Abdiana	Kue Kering	Temy Gift	Jl. Tgh Ibrahim Kholidy, Dsn Pelowok Timur Desa Kediri, Lombok Barat
88	Khagen Gorengan	Arifa Dwi Rahmawati	Aneka Gorengan	Khagen Gorengan	Perum Grand Muslim, Jl. Grand Muslim Raya Blok D No.5 Terong Tawah ,Labuapi, Lombok Barat
89	Demen Dimadu	Rusdi Amir	Madu	Demen Dimadu	Dusun Kalimantaning, Desa Suranadi, Kec.Narmada, Lombook Barat
90	Ika 3 Dara	Ika Ariani	Kue Kering	Ika 3 Dara	Dusun Barat Kuburan, Rt 02 Desa Sesele Kec. Gunung Sari
91	Palmaren	Herlambang Wisnu Wardana	Gula Aren	Palmaren	Perumahan Bukit Hiau Kekait, Dusun Wadon, Desa Kekait, Kec.Gunung Sari
92	Moik Bakery	Hj.Dewi Herawati	Donat	Moik Bakery	Banyumulek Timur, Desa Banyumulek, Kec.Kediri, Lombok Barat
93	Goanter	Sapriadi, S.Pd	Transportasi, Pengemasan Dan Penyimpanan Barang	Goanter	Jl.By Pass 2 Blok Marbella 14 Btn Granada Residence Desa Mesanggok, Kec. Gerung
94	Alatani	Sapriadi, S.Pd	Transportasi, Pengemasan Dan Penyimpanan Barang	Alatani	Jl.By Pass 2 Blok Marbella 14 Btn Granada Residence Desa Mesanggok, Kec. Gerung
95	Alamart	Sapriadi, S.Pd	Transportasi, Pengemasan Dan Penyimpanan Barang	Alamart	Jl.By Pass 2 Blok Marbella 14 Btn Granada Residence Desa Mesanggok, Kec. Gerung
96	Dende Sakra	Baiq.Hasruniati	Minuman Olahan	Dende Sakra	Btn Reyan Baru, Lingkungan Tanjung Gunung, Kel. Gerung Selatan, Kec. Gerung
97	Supiakram Fashion	Supiani	Perhiasan Mutiara	Supiakram Fashion	Kerangkeng Barat, Desa Banyumulek, Kec.Kediri, Lombok Barat
98	Makah	Aprianto	Madu	Makah	Dusun Apitaik, Desa Guntur Macan, Kec. Gunung Sari, Lombok Barat
99	Madu Hasanah	Allaily Zulfa Hidayati	Madu	Madu Hasanah	Jl.Ahmad Yani,Dusun Karang Anyar Desa Gerung Utara, Kec. Gerung, Lombok Barat
100	Al-Rajihi	Hj. Baiq Nurhaeni	Kopi	Al-Rajihi	Palempat Rt 02/07 Meninting, Batu Layar, Lombok Tengah
101	Cerobok	H.Badrun Tammam, A.Ma	Garam Beryodium	Cerobok	Jl.Raya Empol Sekotong, Lombok Barat
102	Bibociy	Nining Aningsih	Olahan Ubi	Bibociy	Dusun Aik Are Rt/Rw 04/00 Desa Ubung Kec. Jonggat Lombok Tengah
103	Berugak Selaparang	H. Andi Purna Henderi	Garam Konsumsi Beryodium	Berugak Selaparang	Desa Pijot Kec. Keruak Lombok Tengah
104	Potgro	Imran Rosadi	Pupuk Organik / Media Tanam	Potgro	Kuiq, Desa Pengangat Kec. Pujut Lombok Tengah
105	Tenun Sumber Rezeki	Mukminah	Kain Tenun	Bun Mudrak	Jl. Baypass Bill Km 11 Dusun Bunmudrak Desa Sukarara Kec. Jonggat Lombok Tengah
106	Bulan Anggrek Dhy Dhan Songket	Meleke	Kain Tenun	Dhy Dhan	Dusun Keloka Desa Batujai Kec. Praya Barat Lombok Tengah
107	Fatih Carft	Sapriadi	Rotan Dan Ketak	Fatih Carft	Pajangan Dusun Ponggong Desa Dasan Baru Kopang Lombok Tengah

No.	Nama Ikm / Perusahaan	Nama Pemilik	Produk	Nama Merek	Alamat
108	Ud. Jihan	Sri Sofiati Solehaton	The Pala Minuman Herbal	Ye Ga Tea	Kampung Pedalaman Desa Kopang Rembiga Kec. Kopang Kab. Lombok Tengah
109	Seni Kreatif	Senirawati	Kain Tenun Tradisional Lombok Dan Produk Turunannya	Jai Stone	Jl. Lintas Bendungan Dusun Mengkilok Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Lombok Tengah
110	Neng Peyek	Atning Suari	Rempeyek, Kue Basah, Kue Kering	Neng Peyek	Serengat Selatan Praya Lombok Tengah
111	Athea Cake And Cookie	Bq. Kurnia Wati	Makanan & Masakan Olahan	Athea Cake And Cookie	Jl. Srigangga Kampung Tiwugalih, Kelurahan Tiwugalih, Praya, Lombok Tengah, Ntb
112	Prima Budaya Jamur	Andi Hertanto	Aneka Kripik & Olahan Jamur	Prima Budaya Jamur	Dusun Kebun Sirih, Desa Pemepek Kec. Pringgarata, Lombok Tengah
113	Pawon Mey	Ernawati	Kuliner Makanan	Pawon Mey	Dusun Bara Bali, Kec. Batukliang, Lombok Tengah
114	Dian Palma	Dianawati	Gula Aren	Arenaren	Dusun Keselet, Desa Pringga Jurang Utara Kec. Montong Gading Lombok Timur
115	Jajelacious	Ariyanti Rahayu Wijayanti	Aneka Kue Basah, Kue Kering, Minuman Dingin Dan Puding	Jajelacious	Gubuk Timuk Desa Pohgading Kec. Pringgabaya Lombok Timur
116	Ayam Laos Lombok	Renni	Ayam Goreng, Kue Burnt Chees	Ayam Laos Lombok	Jl. Tgkh M Zainuddin Abdul Majid No. 3 Pancor Kec. Selong Lombok Timur
117	Terasi Lombok Kismayadi	Kisma Maulana	Terasi	Terasi Lombok Kismayadi	Kp. Baru Desa Labuhan Lombok Kec. Pringgabaya Lombok Timur
118	Moeda	Rizal Iswandi	Saos	Moeda	Genjer, Desa Sukadana Kec. Terara Lombok Timr
119	Cv. Refito Madani	Sutarlan	Minyak Vco, Kerajinan Tas	Ijo Cetik	Jl. Pahlawan No. 83 Selong Lombok Timur
120	The Siong Kete Coffee	Husnayani	Kopi	The Siong Kete Coffee	Gotong Royong Kelurahan Bagik Payung Selatan, Suralaga Lombok Timur
121	Kedatuk	Saudah	Tenun Dan Kue Basah Kue Kering	Kedatuk	Kembang Kerang Daya Dusun Cempaka Putih, Jl. Segara Anak Kec. Aikmel Lombok Timur
122	CV. Sagara Jaya Teknik	Abdul Hafiz	Mesin Pertanian	Sagara	Jl. Pesiraman, Desa Lenek Pesiraman Kec. Lenek Kab. Lombok Timur
123	Rinjani Food Lombok	Nurul Umy Isroiyyah	Aneka Sambal	Sambal Mancing	Jl. Mekar Indah, Selong, Lombok Timur
124	Santausa Sasak Tenun	M. Maliki	Kain Tenun	Tuturan	Jl. Veteran Rw Adil Desa Pringgasela Lombok Timur
125	Pelecing Maknyus	Awaludin	Ayam Rarang	Pelecing Maknyus	Jl. Raya Rarang, Terara, Lotim
126	Suwenda Project	Admiatun Suwendatanti	Perkakas Rumah	Suwenda Project	Bagek Lawang, Rt/Rw 002/010, Desa Pohgading Timur, Kec. Pringgabaya, Lotim
127	Putri Selatan	Budi Sulistiaratna Hadiani S.Pd	Camilan Rumput Laut	Putri Selatan	Desa Seriwu Kec. Jerowaru,
128	Mamaobi	Sahrul Wati	Kue Kering	Mamaobi	Gb. Dapur, Desa Kalijaga, Kec. Aikmel, Lombok Timur
129	Budinten	Budinten	Aneka Kue Kering Dan Olahan Ikan	Budinten	Dusun Kandang Kaoq Desa Tanjung Kec. Tanjung Lombok Utara
130	Mb Madu Bayan	Saptahandi	Madu Dan Bibit	Mb Madu Bayan	Dusun Sukadana Desa Sukadana Kec. Bayan Lombok Utara
131	Karya Lombok	Antoni	Kerajinan Bambu Dan Kayu	Humble Jungle	Jl. H. Mansur Rt. 01 Dusun Koloh Berora Desa Menggala Kec. Pemenang Lombok Utara

No.	Nama Ikm / Perusahaan	Nama Pemilik	Produk	Nama Merek	Alamat
132	Desa Cahaya Rangsot	Agus Faesal Tanjung	Kacang Mete, Madu, Kerajinan	Desa Cahaya Rangsot	Dusun Rangsot Barat, Desa Sigar Penjalin. Kec. Tanjung Lombok Utara
133	Hanis Chips	Hanisah,S.Ag	Aneka Kerupuk	Hanis Chips	Dusun Magling, Desa Senaru, Kec Bayan, Lombok Utara
134	Baian Tradisi	Risdiani	Madu	Baian Tradisi	Dusun Srimenganti, Desa Anyar, Kec. Bayan, Lombok Utara
135	Pengampeng Jaya	Rudi Rusdiana	Madu	Pengampeng Jaya	Jl. Meleko, Desa Samaguna, Kec. Tanjung, Lombok Utara
136	Sambik Elen	Rusli	Kacang Mete	Sambik Elen	Dusun Sambik Elen 2 Desa Sambik Elen Kec. Bayan , Lombok Utara
137	Afiqa Catering	Tina Aprilia Anggraini	Aneka Jajanan, Snack Box, Nasi, Tumpeng	Afiqa Catering	Dusun Majalangu, Rt. 01, Rw. 00 Gubuk Baru Desa Sokong Kec. Tanjung, Lombok Utara
138	Dian Craft	Bq. Dian Rahmaningsih	Kerajinan Tangan	Dian Craft	Lekok Tenggara, Rt. 002 Desa Gondang, Kec Gangga, Lombok Utara
139	Fanbin	Irfan Fadhili	Madu	Fanbin	Kp.Bangsar, Ketapang, Dusun Karang Amor, Desa Gondang, Kec. Gangga, Klu
140	Andana Vco	Muharrar Muslim	Minyak Kelapa Murni	Andana Vco	Dusun Karang Kates, Desa Gondang, Kec. Gangga, Lombok Utara
141	Balenta Trigona	Lalu Masni	Madu	Balenta Trigona	Rangsot Timur, Lombok Utara
142	Jirori	Sarinah	Bumbu Rujak Bumbu	Jirori	Dusun Sambik Elen, 2 Desa Sambik, Elen, Kec. Bayan, Lombok Utara
143	W&A	Syaifuddin Azis Husain	Makanan Olahan Ikan	W&A	Dsn. Wara B Rt.001/Rw 001 Ds. Lab. Lalar, Sumbawa Barat
144	Tapir Barokah	Peti Puspita Sari	Permen Susu	Tapir Barokah	Ds. Tapir Kec. Seteluk Sumbawa Barat, Rt.08, Rw. 04
145	Sinar Pagi	Nurjaming	Rumput Laut Bubuk	Sinar Pagi	Dsn. Kertasari, Rt 002 Rw.001 Ds. Lab. Kertasari Kec. Taliwang, Sumbawa Barat
146	Cibet	Citra Betrika Sudrajat	Olahan Ikan	Cibet	Gang Loka Dame No.39 Rt.007 Rw.003 Ds.Maluk Loka,Ds. Maluk, Sumbawa Barat
147	Dewitha	Ekayanti	Kopi	Dewitha	Lingk. Kuang Rt.002/003 Kelurahan Kuang Kec. Taliwang Sumbawa Barat
148	Bu Las	Welasasih	Olahan Tempe	Bu Las	Dsn. Maluk Loka, Rt. 008 Rw.003 Kec. Maluk , Sumbawa Barat
149	Kopi Eyak Like	Eli Kumala Sari	Kopi	Kopi Eyak Like	Lingkungan Kota Baru Rt.03 Rw.05 Kel. Dalam Taliwang, Sumbawa Barat
150	Wilkoff	Arischa Silviana	Kopi	Wilkoff	Rt.01 Rw.05, Kelurahan Kuang, Kec. Taliwang, Sumbawa Barat
151	Syarifah Kembar	Suaeb Husain	Olahan Daging	Syarifah Kembar	Dsn. Tapir Luar, Rt. 013/Rw.004 Desa Tapir, Kec. Taliwang, Sumbawa Barat
152	Cap Lala	Khairuddin	Minyak Kelapa Murni	Cap Lala	Jl. Sultan Syahrir, Rt 04/Rw 02 Kel.Bugis Kec. Taliwang, Sumbawa Barat
153	Kabar Bumi	Marni Sulastri	Olahan Makanan Dari Kedelai	Kabar Bumi	Rt 01/06 Lingkungan Besok, Kelurahan Menala, Kec. Taliwang
154	Bale Annas Maluk	Aris Setyowati	Makanan Ringan	Bale Annas Maluk	Gang Loka Dame No.39, Rt.007 Rw.003 Dsn.Maluk Loka, Ds Maluk,Sumbawa Barat
155	Elirediwak Bakery	Elisiati	Aneka Kue	Elirediwak Bakery	Rt 01/01 No. 35,Dsn Besi Sora,Dsn Beru, Kec.Jereweh Sumbawa Barat
156	Narafa	Nurhayati	Olahan Daging Dan Unggas	Narafa	Rt 01 Rw 01 Lingk.Menala,Taliwang, Sumbawa Barat
157	Ud.Irlifa	Ermurniati	Kripik Pisang, Rumput Laut,Jahe	Ud.Irlifa	Lingk.Ktc 01 Rw 07, Kel.Menala, Kec. Taliwang, Sumbawa Barat

No.	Nama Ikm / Perusahaan	Nama Pemilik	Produk	Nama Merek	Alamat
158	Kawa Rama	Yuspitawati	Kopi	Kawa Rama	Dusun Rarak, Rt/Rw 006/002 Desa Rarak Ronges Kec.Brang Rea, Kab.Sumbawa Barat
159	Virica	Susilawati	Olahan Singkong	Virica	Dsn Jereweh, Rt.001 Rw 001, Dsn.Benete, Kec. Maluk,Sumbawa Barat
160	Rimba	Abdul Najib Bafadal	Minyak Sumbawa, Minyak Tradisional, Minyak Gosok	Rimba	Lingk. Arab Kel. Arab Kenangan Kec. Taliwang Sumbawa Barat
161	Pt. Olat Maras	Ahmad Jaya	Sepeda Listrik	Ngebut	Komplek Universitas Teknologi Sumbawa
162	Mori Taho Electric	Budiman Saputra	Sepeda Listrik	Mori Taho Electric	Jl. Lintas Saneo Dusun Saleko Atas Desa Sorisakolo
163	Kakila	Yuliana	Aneka Kue	Kakila	Dapur Yuli, Desa Rato Kec. Bolo Kabupaten Bima
164	Usrah Cake	Rusmiati	Kue Tart Brownies	Usrah Cake	Desa Kananga Rt 10 Rw 05 Kabupaten Bima
165	Syahidna	Syahidah Amaniah	Baju Busana Muslim, Desain Pakaian	Syahidna	Jl. Jenderal Sudirman Rt. 008 Rw. 005 Kel. Samili Kec. Woha Kab. Bima
166	Tenun Hajrah Renda	Hajrah	Kain Tenun	Tenun Hajrah Renda	Dusun Telaga Renda, Desa Renda, Kec. Belo, Kab.Bima
167	Qiyami	Rahmat Subhan	Kopi Bubuk	Qiyami	Rt, 01, Rw 01, Desa Kenanga, Kec. Bolo,Kab.Bima
168	Kawangge	Putra Jaya	Kopi	Kawangge	Jl.Lantas Bima,Sape, Desa Nori, Kec. Wawo, Kab. Bima
169	Dhisa Bakery	Armining	Aneka Kue	Dhisa Bakery	Dusun Lia, Rt 005 Rw 009,Desa Punt, Kec. Soromandi, Bima
170	Mbachoo Teri Sambal	Nurul Istiqomah	Teri Sambal	Mbachoo Teri Sambal	Gang Santigi, Rt 003 Rw 003 Desa Naru, Kec. Sape, Bima
171	Ka'owaku Lambitu	Anjar Imam Ihlasul Amal	Bubuk Kunyit, Bawang Putih, Temulawak	Ka'owaku Lambitu	Dusun Oi Wau, Rt 002 Rw 001 Desa Kaowa, Kec. Lambitu, Bima
172	Anasanggini	Sri Wahyuni	Dompot, Tas	Anasanggini	Penjahit Wahyuni Rt. 08 Rw. 02 Desa Roka Kec. Belo Kab. Bima
173	Oi Do'a	Taufik, Sh	Amdk	Oi Do'a	Dorokobo, Kempo, Kab Dompu
174	Capi Pete	Tustiani	Dendeng Sapi, Dendeng Paru	Capi Pete	Lingk. Bada Rt.003 Rw.006 Kel. Bada, Kec. Bada, Kabupaten Dompu
175	Rakhanza	Imran	Tas, Dompot, Sepatu Aksesoris	Rakhanza	Jl. Multazam Rt. 08 Rw. 03 Kel. Rabangodu Selatan Kota Bima
176	Marimpa	Muhammad Salmin	Beras Jawaet Dan Olahannya	Marimpa	Gang Belis Bloc C1 No. 4 Perumnas Sambina'e Kota Bima
177	Wedang Teta	Arif Munandar	Bubuk Wedang Jahe Instan	Wedang Teta	Jl. Ir.Sutami, Rt/Rw 007/002, Kota Bima
178	La Nina	Nina Hendrawati	Abon Dendeng, Bawang Goreng	La Nina	Jl. Mujahirin 1 Rt. 001 Rw.01 Kel. Rabangodu Utara, Kec. Raba Kota Bima

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB, 2021

Label halal merupakan sebuah kewajiban dalam usaha makanan maupun usaha kosmetik. Melalui label halal dapat membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap suatu produk. Produk yang bersertifikat halal memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan produk yang tidak mencantumkan label halal tersebut.

Tabel 2- 200 Sertifikasi Halal Produk Olahan Pangan Industri Kecil Menengah (IKM) Tahun 2021

No.	Nama Usaha	Tempat usaha		Nama pemilik usaha	Nomor Sertifikat/ Ketetapan Halal	Bidang Usaha
		Alamat	Kab/Kota			
1	MBOJO HONEY	Jl. Jambu No. 4B Waki RT05/RW02 Kel. Manggemaci Kec. Mpunda, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, 84115, Indonesia	BIMA	FITRIANI	ID52110000169021121	Madu Murni
2	KEDAI KURCACI	Gang jambu, No. 1 RT09/RW03 Kel. Penaraga, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, 84115, Indonesia	BIMA	ELISA SYIFA AINI	ID52110000169001121	Aneka Roti & Kue
3	MARIMPA	Gang Belis Blok C1 No. 4 Perumnas Sambina'e, Kota Bima, NTB, 84119, Indonesia	BIMA	MUHAMMAD SALMIN	ID52110000168981121	Olahan Tepung Sorgum
4	MUFIDAH CAKE	Jl. Lumba-Lumba RT04/RW03 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, 84119, Indonesia	BIMA	MUFIDAH	ID52110000168931121	Roti & Kue
5	ANUGERAH FOOD	BTN Tambana Jl. Bidara 4 No. 09 RT25/RW09 Kel. Jatiwangi Kec. Asakota, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, 84119, Indonesia	BIMA	SITI SUNARSIAH	ID52110000168991121	Serbat Jahe, Bawang Goreng
6	JAYA BARU	Timu II Desa Timu Kec. Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, 84161, Indonesia	KAB BIMA	ALFIDA RUBIAH	ID52110000168971121	Minyak Kelapa
7	IKM ARISHA STORE	Dusun Tolonggeru Desa Mbawa Kecamatan Donggo, Bima, NTB, 84162, Indonesia	KAB BIMA	ARIFUDIN	ID52110000170171121	Madu
8	JELAMBA COFFE	Jalan Lintas Bima, Sape Desa Maria, Kec Wawo, Bima NTB, 84148, Indonesia	KAB BIMA	IHWANUL MUSLIMIN	ID52110000169011121	Kopi
9	DAPUR BU JAENAB	Gang Santigi RT 003 RW 002, Bima, Nusa Tenggara Barat, 84182, Indonesia	KAB BIMA	NURUL ISTIQOMAH	ID52110000170341121	Sambal Teri (Mbachoo)
10	PUTRI TUNGGAL	Dusun Sumbawa RT 006 RW 003, BIMA, NTB, 84161, INDONESIA	KAB BIMA	ASNI HANDAYANI	ID52110000169031121	MADU
11	RAKA LA RANGGA	JLN. LINTAS DORO TAREI RT. 06 RW. 02 LINGK. BALI BUNGA KEL. KANDAI DUA, DOMPU, NTB, 84218, INDONESIA	DOMPU	SRI JAUHARI	ID52110000170251121	Makanan Ringan Bawang Goreng
12	KELUARGA SEJAHTERA MANDIRI	Lingkungan Bukit Larema RT. 23 RW. 08, Domp, Nusa Tenggara Barat, 84213, Indonesia	DOMPU	TUSTIANI	ID52110000170821121	Dendeng
13	NEW IDOLA	Lingkungan Ginte Rt 06/03, Domp, Nusa Tenggara Barat, 84211, Indonesia	DOMPU	RAODAH	ID52110000168871121	Madu
14	DELIZIO HOUSE	Lingkungan Jado, Domp, Nusa Tenggara Barat 84212, Indonesia	DOMPU	YENI	ID52110000168881121	Restaurant
15	NDAWI NDAI	Lingkungan Larema Kelurahan Simpasai, Domp, NTB, 84216, Indonesia	DOMPU	SITI ASIA	ID52110000170861121	Stik Herbal
16	UD. TINA TINI	Jl. Tongkol no.15, Sumbawa Besar, NTB, 82315, Indonesia	SUMBAWA	NURLELA	ID52110000168511121	Abon Ayam
17	TIU RAMATA	Dusun Tarusa Atas RT.001 RW.002 Desa Tarusa Kecamatan Buer, Sumbawa, NTB, 84353, Indonesia	SUMBAWA	RAHMAWATI	ID52110000168401121	Minuman Raja
18	UD. YUSPITAWATI	RT 05/RW 02 Dusun Rarak Ronges, Kab Sumbawa Barat, 84458, Indonesia	KSB	YUSPITAWATI	ID52110000168431121	Kopi Minuman dan Bahan Minuman

No.	Nama Usaha	Tempat usaha		Nama pemilik usaha	Nomor Sertifikat/ Ketetapan Halal	Bidang Usaha
		Alamat	Kab/Kota			
19	UD. BALE ANNAS MALUK	Maluk Loka RT.007/RW.003, Maluk, Maluk, Sumbawa Barat, NTB, 84459, Indonesia	KSB	ARIS SETYOWATI	ID52110000168461121	Makanan dari Kedelai, kacang-kacangan lainnya bukan Kecap
20	CV. SYARIAH KEMBAR	Tapir, 01/05 Tapir Seteluk KSB	KSB	SUAEB HUSAIN	ID52120000168441121	Olahan Daging
21	UD. KABAR BUMI	Ling. Bosok Menala Taliwang KSB	KSB	MARNI SULASTRI	ID52110000168491121	Makanan dari Kedelai, kacang-kacangan lainnya bukan Kecap
22	UD TAPIR BAROKAH	Dusun Tapir Liar Kecamatan Seteluk, Kab. Sumbawa Barat	KSB	PETI PUSPITA SARI	ID52110000168451121	Olahan Susu (Permen Susu)
23	UD. NARAFAT STRONG	RT. 01, RW. 01 Kel.Menala, Kec Taliwang KSB	KSB	NURHAYATI	ID52110000168421121	Olahan Daging
24	UD.IBU LAS	Dsn. Maluk Loka, RT.008 RW.003, Kec. Maluk, KSB	KSB	WELASIH	ID52110000168411121	Olahan Tempe
25	UD. NASEL	Dusun Sukadama, Desa Santong, Kec. Kayangan, Kab Lombok Utara, NTB, 83353	KLU	MULHAYATI	ID52110000170291121	Kerupuk, Keripik, Peyek
26	KOPI MENTARI	Dusun Busur Barat, Desa Rempek Darussalam, Kec. Gangga, Lombok Utara, NTB, 83353, Indonesia	KLU	IDA SUSIWANTI	ID52110000170911121	Kopi
27	UD.BUNDA SMART	Dusun Kandang Kaok, Desa Tanjung, Kec Tanjung, KLU, NTB, 83353, Indonesia	KLU	BUDINTEN	ID52110000170311121	Sate Ikan Tanjung
28	UD.BUNDA SMART	Dusun Kandang Kaok, Desa Tanjung, Kec Tanjung, KLU, NTB, 83353, Indonesia	KLU	BUDINTEN	ID52110000168891121	Kue Kering
29	KOPRASI BINA LAUT	Dusun Empol, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, 83365, WNI	LOBAR	H. BADRUN	ID52110000167231121	Garam Rempah, Bumbu dan Kondimen
30	UM. JASMIN	Dasangeria Kecamatan Lingsar Lombok Barat	LOBAR	MARYATI	ID52110000168481121	Kopi
31	PT. CRYSTAL PRIMA INDONESIA	Jln Raya Tanjung Km 2 No 1, Wadon, Gunung Sari - NTB, Lombok barat, NTB, 83351, Indonesia	LOBAR	NABILA HASYIMIE	ID00110000168371121	Minuman dan Bahan Minuman
32	SASAK MAIQ	Batu Layar, Kab. Lombok Barat	LOBAR	B. ROSTIANI	ID52110000168361121	Kopi
33	MAJU BERSAMA	Kekait Daya, Kec. Gunung Sari Lombok Barat	LOBAR	BURHANUDI N	ID52110000168501121	Gula Aren
34	CV. LOMBOK RESOURCES	Jl Raya Mataram - Tanjung, Dusun Wadon, Desa Kekait, Gunungsari, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, 83351, Indonesia	LOBAR	HERLAMBAN G WISNU WARDANA	ID52110000168351121	Gula Aren
35	SUMBER ALAM SEJAHTERA	Desa Sukadana Terara, Lotim	LOTIM	L. RAHMATUL ALIFIN	ID52110000170881121	Saos Cabe & Tomat
36	IKM DAPUR SANDY CAKE	Perumahan masbagik asri C/4 Masbagik Selatan, Lombok Timur NTB, 83661, Indonesia	LOTIM	ARTINAH	ID52110000168951121	Roti & Kue
37	BKR MASA DEPAN	Dsun Punik Jaya Desa Lendang Nangka Kec. Masbagik	LOTIM	REZA APRIANI	ID52110000168961121	Minyak, Lemak dan Produk Olahannya

No.	Nama Usaha	Tempat usaha		Nama pemilik usaha	Nomor Sertifikat/ Ketetapan Halal	Bidang Usaha
		Alamat	Kab/Kota			
38	CV. RINJANI SUKSES GEMILANG	BTN GRIYA INDAH, RT/RW /, TANJUNG, LABUHAN HAJI, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, 83611, Indonesia	LOTIM	TURKI	ID52110000168941121	Kopi
39	KUUP PUTRI SELATAN	Desa Serewe, Kec. Jerowaru Lombok Timur	LOTIM	BUDI SULISTIARAT NA	ID52110000168921121	Olahan Rumput Laut
40	UD. BAHAGIA	Gubuk Petakawan Desa Kalijaga Kec. Aikmel	LOTIM	SAHRUL WATI	ID52110000170841121	Aneka Jajan Kering
41	AMMAR SASAMBO	Serenget Selatan Prapen Praya Kab. Loteng	LOTENG	LALU BUNTARAN	ID52110000168381121	Olahan Walet
42	UD. ATNING SUARI	serengat selatan, praya, nusa tenggara barat, 85311, indonesia	LOTENG	ATNING SUARI	ID52110000168391121	Kue Kering
43	UD. LASINGAN	Jln. Ade Irma Suryani, Gg Panda I Blok B No.39 Monjok Perluasan, Kec Selaparang, Kota Mataram, NTB 83122	MATARAM	ISKANDAR ZULQARNAIN ,B.,ST	ID52110000168901121	Kopi
44	OGURAKU	Jln. Gili Trawangan No. 24 Taman Karang Baru, Selaparang, Mataram, NTB	MATARAM	SURYA ULFAH	ID52110000168861121	Kue Basah
45	RAISSA BROWNIES	Perumahan Griya Lingkar mandiri no 10 mataram, mataram, ntb, 83116, indonesia	MATARAM	ZULISTIYANIN GSIH	ID52110000170351121	Roti & Kue
46	ORIGIN LOMBOK SPICE	jl ade irma suryani, gang unggas 2, no 1., Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83238, Indonesia	MATARAM	YUSRIN HAFIZAN	ID52110000170921121	Rempah, Bumbu dan Kondimen
47	PT. MOERAD BERSAUDARA SEJAHTERA	Jl ade Irma Sryani, Gang Unggas 2, No 1, MATARAM, NUSA TENGGARA BARAT, 83238, INDONESIA	MATARAM	AHMAD MOERAD	ID52110000170931121	Daging dan Produk Daging Olahan
48	CV ORGANIC LOMBOK	Jln. Nuraksa No. 10 Ling Karang Anyar Mataram	MATARAM	SEPTIA ERIANTY	ID52210000170271121	Body Lotion (Kosmetik)
49	CV ORGANIC LOMBOK	Jln. Nuraksa No. 10 Ling Karang Anyar Mataram	MATARAM	SEPTIA ERIANTY	ID52210000170811121	Shower Gel (Kosmetik)
50	AZZAHRA PIZZA & PASTRIES	Jl. Pejanggih GG I No. 10 Pajang Barat Mataram	MATARAM	HENY LISMAWATI	ID52110000168911121	Roti & Kue

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB, 2021

Era revolusi industri 4.0 memudahkan arus barang dan jasa masuk dari negara satu ke negara lainnya. Untuk itu Standar Nasional Indonesia (SNI) harus dimiliki oleh sebuah Industri guna menjamin mutu dan standar international, hal ini tentunya berkaitan dengan peningkatan pasar yang lebih luas.

Tabel 2- 201 Daftar IKM yang di Fasilitas SNI Tahun 2021

NO	NAMA USAHA	TEMPAT USAHA				NAMA PEMILIK USAHA/KETUA
		ALAMAT	KEC	KAB/KOTA	PROVINSI	
1	KOPERASI BINA LAUT	Dusun Empol, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, 83365, WNI	Sekotong	LOBAR	Nusa Tenggara Barat	H. BADRUN

2	CV. EMBUN	Dusun Selat Barat, Desa Selat, Kec. Narmada, Lombok Barat	Narmada	LOBAR	Nusa Tenggara Barat	AZIS IRWANDI
3	CV. PUTRA JAYA KENCANA	Jl. Pantai Sire no. 18 Abian Tubuh Selatan RT.003 RW.144 Kel. Cakranegara Selatan Baru	Cakranegara	MATARAM	Nusa Tenggara Barat	I Nyoman Putra Astawan

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB, 2021

Dinas Perindustrian Provinsi NTB bekerjasama dengan Balai Besar Pertanian Kementerian Pertanian telah melakukan uji report mesin pertanian yang merupakan syarat dalam Standar Nasional Indonesia. Dari beberapa mesin yang telah dilakukan uji report 13 diantaranya lulus uji dan selanjutnya dapat diusulkan memperoleh SNI, berikut nama-nama mesin yang telah lulus uji report :

Tabel 2- 202 Nama-Nama Mesin Yang Telah Uji Report Tahun 2021

No	Nama IKM	Nama Alisintan Yang Diuji	Alamat
1	CV. RODA TANI (Setyo Susilo)	1. Tungku Gasifikasi	Jln. Ali Napiah No. 2 Babakan, Sandubaya – Mataram
2	UD. RESTU IBU TEHNIK (L.Surya Darma)	1. Mesin Mixer Pakan Ternak	Dusun Keroak Desa Lenek Kecamatan Aikmel Kab. Lombok Timur
3	CV. SINAR AGRO TEKNIK (Samsul Hakim)	1. Mesin Perajang Tembakau	Dusun Marung, Desa Bunut Baok, Kec. Praya, Lombok Tengah NTB
		2. Mesin Press Tembakau	Dusun Marung, Desa Bunut Baok, Kec. Praya, Lombok Tengah NTB
4	CV. SAGARA JAYA TEKNIK (Abdul Hafiz)	1. Mesin Penepung Pakan Multifungsi	Jl. Pesiraman Dusun Gubuk Bagek Desa Lenek Pesiraman Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB
		2. Mesin Tepung Multifungsi	Jl. Pesiraman Dusun Gubuk Bagek Desa Lenek Pesiraman Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB
		3. Mesin pencacah/ penggiling daging	Jl. Pesiraman Dusun Gubuk Bagek Desa Lenek Pesiraman Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB
		4. Pengolahan Kelor	Jl. Pesiraman Dusun Gubuk Bagek Desa Lenek Pesiraman Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB
5	UD. OKE LAS (Saiful Haq)	1. Mesin Cacah Sampah	Dusun Tegal Desa Meninting Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat NTB
6	ILHAM JAYA TEKNIK (Kamisum)	1. Mesin Hammermil Jagung	Jln. Hasanudin Gunung Timba Denggen Timur Selong Lombok Timur NTB
		2. Mesin Copper Pakan Ternak	Jln. Hasanudin Gunung Timba Denggen Timur Selong Lombok Timur NTB
7	UD ISTANA KOPI LOMBOK (Dody Ari W)	1. CRL Coffee Roaster	Jl. Maluku No.12 BTN Gunungsari Indah Lombok Barat
8	CV. MATARAM TEKNIK (Nazar Susan)	1. Mesin Spinner Madu	Dusun Lembar Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB, 2021

8. Bidang Transmigrasi

Dalam melaksanakan pembangunan bidang urusan transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB pada tahun 2021 menetapkan sasaran strategis “meningkatkan transmigran yang ditempatkan” dengan indikator persentase transmigran yang ditempatkan. Program Transmigrasi merupakan bagian dari Program Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Transmigran jauh lebih baik daripada ketika mereka masih di daerah asalnya. Disamping itu juga penyelenggaraan program transmigrasi dalam rangka pemerataan pembangunan daerah, serta untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Adapun capaian persentase transmigran yang ditempatkan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2- 203 Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Urusan Transmigrasi Tahun 2021

NO	Indikator (Satuan)	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	Persentase transmigran yang ditempatkan (%)	100	97,57	97,57

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, 2021

Jumlah transmigran di Provinsi NTB sebanyak 10.700 KK dan transmigran yang sudah ditempatkan dan dibina sebanyak 10.440 KK. Provinsi NTB memiliki 4 kawasan transmigrasi dan 1 kawasan masih dalam proses pembinaan dan ditargetkan pada akhir RPJMD pada tahun 2023 sudah selesai dibina. Pada tahun 2021, realisasi transmigran yang ditempatkan dan dibina sebesar 97,57 persen dari total transmigran di NTB, realisasi ini belum mencapai target karena masih ada transmigran yang masih dibina.

Dalam kurun waktu tahun 1973 sampai dengan 2021 Provinsi NTB telah Penempatan transmigran ke berbagai daerah penempatan di seluruh Indonesia sebanyak 47.286 KK = 188.213 jiwa dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2- 204 Penempatan Transmigran Ke Berbagai Daerah Penempatan Di Seluruh Indonesia

Provinsi	1973 - 2015		2016		2017		2018		2019		Total	
	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
Sumatra Selatan	10	41									10	41
Kalimantan Barat	2.253	9.089	19	75							2.272	9.164
Kalimantan Tengah	3.014	12.990									3.014	12.990
Kalimantan Selatan	3.970	16.122									3.970	16.122
Kalimantan Timur	5.960	21.755									5.960	21.755
Sulawesi Tengah	7.341	28.517									7.341	28.517
Sulawesi Utara	411	1.593	25	95							436	1.688
Sulawesi Selatan	6.375	24.327									6.375	24.327
Sulawesi Tenggara	4.049	14.816	17	57	5	19			10	39	4.081	14.931

Provinsi	1973 - 2015		2016		2017		2018		2019		Total	
	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
Sulawesi Barat	25	106			5	18					30	124
Irian Jaya	2.268	7.069					5	18			2.273	7.087
Maluku	494	1.588									494	1.588
Maluku Utara	288	801									288	801
Gorontalo	27	91	10	35			5	18			42	144
Lokal/NTB	10.700	48.934									10.700	48.934
Jumlah	47.185	187.839	71	262	10	37	10	36	10	39	47.286	188.213

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, 2021

*) tahun 2020 dan 2021 : penempatan transmigrasi ditiadakan akibat pandemic

D. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Urusan pemerintah fungsi penunjang merupakan urusan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah antara lain administrasi pemerintahan, pengawasan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan pendidikan pelatihan. Pada tahun 2018, urusan pemerintah fungsi penunjang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi NTB diuraikan sebagai berikut.

1. Bidang Administrasi Pemerintahan

a. Sekretrariat Daerah

Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi diuraikan dalam 2 program pokok dan 9 kegiatan, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2- 205 Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Urusan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan pada Biro Organisasi Tahun 2020

NO	INDIKATOR BIDANG URUSAN	TAHUN 2021	
		TARGET	REALISASI
1	Persentase jumlah perangkat daerah yang tertata sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	100%
2	Persentase Perangkat Daerah yang disederhanakan Struktur Organisasi (%)	100%	100%
3	Nilai SAKIP	BB	BB
4	Persentase Peta Proses Bisnis PD yang sesuai ketentuan (%).	100 %	40 %

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi NTB, 2021.

Hasil Evaluasi SAKIP merupakan upaya meningkatkan capaian kinerja instansi pemerintah melalui berbagai upaya pengelolaan organisasi. Rekomendasi hasil evaluasi digunakan dalam perbaikan pada periode yang akan datang. Dengan memadukan rekomendasi hasil evaluasi dan menerapkan upaya peningkatan capaian evaluasi diharapkan laporan kinerja yang dihasilkan akan lebih baik dan bermanfaat dalam mewujudkan capaian kinerja instansi yang ditetapkan. Target nilai SAKIP kategori BB

atau skor (73,01 - 76,00) capaian nilai pada tahun 2021 adalah B tingkat capaian 87,24 persen.

Biro Organisasi sebagai perangkat daerah yang mengawal salah satu indikator dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023, Indeks Reformasi Birokrasi adalah indikator yang merupakan aspek daya saing daerah menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. dengan capaian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2- 206 Hasil Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Tahun 2019-2021

Indikator	Satuan	2019			2020			2021		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indek Reformasi Birokrasi	%	B	B	100	B	B	100	B	B	100

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi NTB, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2021 kategori B. Nilai ini masih estimasi sambil menunggu hasil LHE dari Kemenpan RB Tahun 2021. Nilai Reformasi Birokrasi kategori “B” menunjukkan kelola pemerintahan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien, bersih dari KKN.

Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi NTB meraih predikat BB tahun 2019, Biro Organisasi telah melakukan upaya peningkatan kualitas pada tahun 2020, namun nilai hasil evaluasi mendapat predikat penilaian B, dari lima komponen yang dinilai terdapat dua komponen yang mengalami penurunan yaitu pada pengukuran kinerja dan capaian kinerja sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2- 207 Hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi Tahun 2019-2021

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	2019		2020		2021	
		BOBOT	NILAI	BOBOT	NILAI	BOBOT	NILAI
a	Perencanaan Kinerja	30	23,57	30	23,67	30	24,69
b	Pengkuran Kinerja	25	17,34	25	16,99	25	17,67
c	Pelaporan Kinerja	15	11,48	15	11,48	15	11,67
d	Evaluasi Internal	10	6,33	10	6,48	10	6,62
e	Capaian Kinerja	20	11,32	20	9,76	20	9,94
	Nilai Hasil Evaluasi	100	70,05	100	68,53	100	70,59
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB		B		BB

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi NTB, 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2019 sampai dengan 2021 nilai hasil evaluasi LKjIP Provinsi NTB menunjukkan fluktuatif dengan nilai 70,05 point tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 68,53 point tahun 2020, dan tahun 2021 sebesar 70,59.

Pada aspek Hukum, perkembangan produk hukum dari Tahun 2019 -2021, jumlah Perda/Perbup/Perwal yang difasilitasi dan dievaluasi pada tahun 2019-2021 serta penyelesaian sengketa hukum (perkara) Provinsi NTB Tahun 2021 disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2- 208 Target dan Realisasi Legislasi Daerah Tahun 2019-2021

NO.	PRODUK HUKUM	SATUAN	2019	2020	2021	
					TARGET	REALISASI
1.	Peraturan Daerah	Perda	14	11	10	16
2.	Peraturan Gubernur	Perkada	65	88	30	56
3.	Keputusan Gubernur	Keputusan Gubernur	992	941	700	828
Jumlah			1.071	1.040	740	900

Sumber : Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTB, 2021

Sedangkan untuk jumlah Peraturan Daerah / Peraturan Bupati / Peraturan Walikota yang dievaluasi dan difasilitasi pada tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2- 209 Jumlah Perda/Perbup/Perwal yang Difasilitasi dan Dievaluasi Pada Tahun 2019-2021

No	Kab./ Kota	Difasilitasi									Dievaluasi								
		Raperda/Perda			Raperbup/Perbup			Raperwal/Perwal			Raperda/Perda			Raperbup/Perbup			Raperwal/Perwa		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1.	Mataram	12	4	1	-	-	5	23	5	4	1	3	3	-	-	-	-	3	-
2.	Lobar	8	6	1	3	-	-	-	-	-	-	4	3	-	3	3	-	-	-
3.	Loteng	18	-	2	3	2	37	-	-	-	2	3	3	-	3	4	-	-	-
4.	Lotim	4	5	2	42	42	42	-	-	-	-	3	3	-	3	9	-	-	-
5.	Lombok Utara	9	3	10	5	1	5	-	-	-	-	3	4	-	3	3	-	-	-
6.	Sumbawa Barat	15	7	13	37	21	31	-	-	-	3	4	3	-	3	3	-	-	-
7.	Sumbawa	12	2	9	2	1	15	-	-	-	-	3	3	-	3	5	-	-	-
8.	Dompu	14	9	2	4	4	10	-	-	-	4	3	2	-	3	3	-	-	-
9.	Kota Bima	8	7	5	-	-	-	4	-	7	4	3	3	-	-	-	-	3	-
10	Bima	5	-	5	5	4	-	-	-	-	-	3	3	-	3	3	-	-	-
Jumlah		105	43	50	101	75	145	27	5	11	14	32	30	-	24	33	-	6	-

Sumber : Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTB, 2021

Pada Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Biro Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi NTB dalam rangka mewujudkan Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi dengan sasaran pembangunan meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan urusan Administrasi Pemerintahan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Prov. NTB menetapkan sasaran strategis yaitu Terwujudnya layanan pengadaan yang transparan,

efektif, efisien dan akuntabel dengan indikator kinerja Tingkat Konsistensi Perencanaan dengan Standar Satuan Harga dan Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPB). Pada tahun 2021, target dan capaian kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Prov. NTB dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2- 210 Capaian Indikator Urusan Bidang Urusan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan Perjanjian Kinerja (Kepala Biro dengan Gubernur) Tahun 2021

NO	INDIKATOR BIDANG URUSAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPB)	Level 2	Level 2 (5/9)	Level 3	Level 3 (7 dari 9 ponit)	Level 3	Level 3 (8/9)

Sumber: Biro PJP Setda Provinsi NTB, 2021

Sampai tahun 2021, Tingkat kematangan UKPB Provinsi NTB menuju level 3: Proaktif, yang saat ini masih dalam posisi 8/9 point. Untuk menuju level 3 pasisi 9/9 point saat ini sedang dalam proses pemenuhan persyaratan yang diperlukan oleh LKPP dan semua persyaratan sudah dilengkapi. Dan saat ini sedang menunggu penetapan UKPB level 3 (9/9 point) dari LKPP.

Kegiatan tender di UKPB Provinsi NTB dari tahun 2019 s.d tahun 2021 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2- 211 Realisasi Kegiatan tender UKPB Sumber dana APBD Provinsi NTB Tahun 2019 sd 2021

NO	KEGIATAN	2019		2020		2021	
		JUMLH PAKET KEGIATAN	BESAR ANGGARAN (Rp)	JUMLH PAKET KEGIATAN	BESAR ANGGARAN (Rp)	JUMLH PAKET KEGIATAN	BESAR ANGGARAN (Rp)
1.	Jumlah Paket yang dilelang	152	315.070.785.176	127	1.024.976.036.510	149	377.395.754.037
	Terdiri dari :						
	Jasa Konsultansi	18	7.449.685.000	25	35.167.496.090	19	9.703.466.300
	Jasa Konstruksi	57	167.382.539.820	46	912.064.975.720	84	294.440.529.903
	Pengadaan Barang	70	112.477.266.000	54	75.353.364.700	22	70.481.003.834
	Jasa Lainnya	7	4.874.266.000	2	4.390.000.000	2	2.770.754.000
2.	Jumlah Kontrak dari paket lelang adalah sebesar	282.379.232.658		1.002.481.123.746.69		337.240.831.097	
3.	Efisiensi dari paket kegiatan yang di lelang	32.691.552.518,42		22.494.912.763		40.154.922.940	
4.	Persentase Efisiensi thd total dana yang dilelang	10,37 %		2,19%			10,64%

Sumber: Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTB, 2021

Catatan: terdapat 1 paket yang masih dalam proses tender yaitu tender Konstruksi (esain And Buil) Pembangunan Gedung IGD Terpadu dan Perawatan dengan nilai Rp. 270.000.000.000,. Tender Pengadaan Barang dan Jasa yang bersumber dari dana APBN, yang dilaksanakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTB, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2- 212 Realisasi Kegiatan Tender UKPBJ Provinsi NTB Tahun 2019 sd 2021
Sumber dana APBN Provinsi NTB

NO	KEGIATAN	2019		2020		2021	
		JUMLH PAKET KEGIATAN	BESAR ANGGARAN (Rp)	JUMLH PAKET KEGIATAN	BESAR ANGGARAN (Rp)	JUMLH PAKET KEGIATAN	BESAR ANGGARAN (Rp)
1.	Jumlah Paket yang dilelang Tahun	38	50.899.089.560	32	42.417.533.500	0	0
	Terdiri dari :						
	a. Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	0
	b. Jasa Konstruksi	2	760.000.000	0	0	0	0
	c. Pengadaan Barang	30	47.673.359.060	32	42.417.533.500	0	0
	d. Jasa Lainnya	6	2.465.730.500	0	0	0	0
2.	Jumlah Kontrak dari paket lelang adalah sebesar	47.337.433.200		39.904.217.250		0	
3.	Efisiensi dari paket kegiatan yang di lelang	3.561.656.360		2.513.316.250		0	0
4.	Persentase Efisiensi terhadap total dana yang dilelang	7,00 %		5,92%		0	0

Sumber: Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTB, 2021

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) NTB sebagai UKPBJ percontohan di Indonesia yang ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP). Tahun 2018 UKPBJ NTB mendapatkan penghargaan dari pemerintah berupa Nasional Procurement Award 2018 dengan kategori UKPBJ sebagai Pusat Keunggulan (Center of Excellence) Pengadaan Baran/Jasa.

Dalam meningkatkan pelayanan UKPBJ didukung dengan tenaga pelaksana sebanyak 24 orang terdiri dari 18 orang tenaga pelaksana yang sudah memiliki sertifikat, dan 9 orang di bagian sekretariat, dimana sebanyak 15 orang sudah menjadi fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa. UKPBJ di Provinsi NTB merupakan salah satu dari 29 UKPBJ percontohan di Indonesia, dan menerima beberapa kunjungan dari Provinsi tidak ada disebabkan karena kondisi Negara Indonesia sedang menghadapi Pandemi Covid-19.

b. Sekretariat DPRD

Pelaksanaan fungsi penunjang yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD dalam rangka mendukung pencapaian misi ke-2 RPJMD Provinsi NTB yaitu “NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi” dengan sasaran pembangunan meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan unsur penunjang pemerintahan, Sekretariat DPRD Provinsi NTB menetapkan sasaran strategis yaitu: “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD” dengan indikator kinerja adalah Tingkat kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD. Target dan capaian indikator kinerja tersebut pada tahun 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2- 213 Capaian Indikator Urusan Bidang Administasi Pemerintahan pada Sekretariat DPRD Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

NO	INDIKATOR BIDANG URUSAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Tingkat kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi NTB, 2021

Untuk mengukur capaian kinerja Tingkat kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD menggunakan survei kepada seluruh anggota DPRD Provinsi NTB dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei dilakukan pada akhir tahun 2021, dengan menggunakan kuisioner yang dibagikan ke semua anggota DPRD yang berjumlah 63 orang.

Pada tahun 2021, sebagai bagian dari Pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB, Dari target 12 Peraturan Daerah (Perda), berdasarkan hasil pembahasan antara Legislatif dan Eksekutif, sampai dengan bulan Desember 2021 telah ditetapkan 16 Perda, yaitu:

1. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
2. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023
3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2021 Tentang PT Gerbang NTB Emas (PERSERODA).
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika.
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak.
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemakaian Jalan Untuk Kepentingan Masyarakat.
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penjaminan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan.

9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Desa Wisata.
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 – 2041.
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman.
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pemajuan Kebudayaan
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Salah satu tugas DPRD adalah mengajukan rancangan peraturan daerah, selama tahun 2021, DPRD Provinsi NTB telah menginisiasi pembentukan Peraturan Daerah yang berhubungan dengan pelayanan, pemberdayaan, dan perlindungan masyarakat. Adapun Peraturan Daerah inisiasi DPRD Provinsi dengan tujuan/masalah yang diselesaikan sebagai berikut:

Tabel 2- 214 Peraturan Daerah inisiasi DPRD Provinsi dengantujuan/masalah yang diselesaikan

NO	NAMA PERDA	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak.	Pencegahan Terhadap Perkawinan Anak
2	Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemakaian Jalan Untuk Kepentingan Masyarakat.	Memajukan Kesejahteraan Umum Masyarakat

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi NTB, 2021

2. Badan Penghubung Daerah

Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan dilaksanakan oleh Badan Penghubung Daerah, dengan Target dan capaian indikator berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2- 215 Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Urusan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan Pada Badan Penghubung Daerah Tahun 2021

NO	INDIKATOR (SATUAN)	TAHUN 2021		CAPAIAN (%)
		TARGET	REALISASI	
1	Tingkat kepuasan pelayanan penghubung	75 %	75 %	100 %
2	Jumlah dokumen perangkat daerah	13 dokumen	13 dokumen	100 %
3	Jumlah pelayanan yang terlaksanakan	175	175	100 %

Sumber : Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB, 2021

Capaian Kinerja Tahun 2021 Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB, sasaran ramah investasi, 75 persen indikator kinerja tingkat kepuasan pelayanan penghubung, 13 dokumen yang telah disusun dan pelayanan yang telah dilaksanakan sebanyak 175 kali. Berdasarkan tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang dan fungsinya: melaksanakan koordinasi dan konsultasi hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Lembaga Pemerintah non Departemen dan Swasta di Jakarta. Pengkoordinasian dan pembinaan masyarakat daerah di Jakarta, Pelaksanaan kegiatan promosi daerah yang meliputi ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata. Pengelolaan Anjungan Daerah NTB di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya, Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur NTB sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Promosi budaya dan mengenalkan potensi pariwisata NTB di Anjungan TMII dapat dilihat dari jumlah pengunjung dari tahun 2019 sampai dengan 2021 yang terdiri dari wisatawan mancanegara, wisatawan Nusantara dan pelajar / mahasiswa disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2- 216 Jumlah pengunjung di Anjungan NTB TMII 2019-2021

URAIAN	SATUAN	2019	2020	2021
Angka Kunjungan ke Anjungan TMII :				
➤ Wisatawan Mancanegara	Orang	800	167	27
➤ Wisatawan Nusantara	Orang	39.299	15.162	4.607
➤ Pelajar/Mahasiswa	Orang	9.253	1.322	193
JUMLAH		47.863	49.352	16.651

Sumber: Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB, 2021

3. Bidang Pengawasan

Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi NTB, dengan Target dan capaian indikator berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2- 217 Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Urusan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan Pada Inspektorat Provinsi NTB Tahun 2021

NO	INDIKATOR (SATUAN)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET.
1	Persentase Penurunan Nilai kerugian Negara/Daerah	4 %	13,34 %	334	
2	Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pengawasan	74 %	74 %	100 %	
3	OPINI BPK	WTP	WTP	100 %	
4	Persentase OPD yang bebas temuan keuangan Materiil	100 %	100 %	100 %	
5	Tingkat Maturitas SPIP	Level III	Level III	100 %	
6	Tingkat Kapabilitas APIP	Level III	Level III	100 %	
7	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai Implementasi SAKIP Predikat BB-AA	90,0 %	83 %	92,22 %	

Sumber: Inspektorat Provinsi NTB, 2021

Inspektorat Provinsi NTB telah menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaraan keuangan negara/daerah dari tahun 2019 sampai dengan 2021, dengan hasil audit sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2- 218 Hasil Audit penyelenggaraan keuangan negara/daerah tahun 2019-2021

TAHUN	JUMLAH	KEMBALI	%	SALDO	%
2019	178.791.282.847,35	149.730.174.916,01	83,75	29.061.107.931,34	16,25
2020	151.260.511.609,21	117.017.350.654,33	77,36	34.243.160.954,88	22,64
2021	257.096.942.705,82	212.207.981.661,23	82,54	44.888.961.044,59	17,46
TOTAL	587.148.737.162,38	478.955.507.231,57	81,57	108.193.229.930,81	18,43

Sumber: Inspektorat Provinsi NTB, 2021

Rincian hasil pemeriksaan selama tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), APIP dan Itjen Kemendagri, terdapat temuan kerugian negara/daerah yang perlu ditindaklanjuti, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2- 219 Progres Penyelesaian Tindaklanjuti Temuan Hasil Pemeriksaan penyelenggaraan keuangan negara/daerah tahun 2021

Pemeriksaan	Temuan (Rp.)	Tindak lanjut Jumlah disetor	Persentase (%)	Saldo	Persentase (%)
BPK	94.234.701.590,45	80.890.849.732,45	85,84	13.343.851.858,0	14,16
APIP	126.509.814.604,37	94.964.705.417,78	75,07	31.545.109.186,59	24,93
Itjen Kemendagri	36.352.426.511,0	36.352.426.511,0	100	NIHIL	00
JUMLAH	257.096.942.705,82	212.207.981.661,23	82,54	44.888.961.044,59	17,46

Sumber: Inspektorat Provinsi NTB, 2021

4. Bidang Perencanaan

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan melaksanakan Urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan tahun 2021,

dengan sasaran meningkatnya dokumen perencanaan yang berkualitas, indikator Penetapan Kinerjanya adalah Persentase Konsistensi Antar Program Perencanaan, target dan capaian indikator disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2- 220 Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Urusan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan Pembangunan Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2021		
			TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
1	Meningkatnya Dokumen Perencanaan Yang Berkualitas	Persentase Konsistensi Antar Program Perencanaan (%)	100	100	100
		Persentase Renstra Organisasi Perangkat Daerah Yang Berkualitas (%)	100	100	100
		Persentase RPJMD Kabupaten/Kota Yang Berkualitas (%)	100	100	100
		Tingkat Capaian Program Strategis (%)	100	78,77	78,77
		Tingkat Capaian Program Unggulan (%)	100	76,28	76,28
		Tingkat Capaian Indikator Kinerja Daerah(%)	100	NA	NA

Sumber : Bappeda Provinsi NTB, Tahun 2021

Urusan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021 dengan indikator kinerja daerah adalah persentase Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan dan Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (Lokus NTB).

Tabel 2- 221 Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021

No.	Indikator Bidang Urusan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan (%)	100	95,09	100	95,56	100	100
2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (Lokus NTB)	18	21	21	23,33	24	100

Sumber : Bappeda Provinsi NTB, Tahun 2021

Capaian kinerja daerah bidang perencanaan yang menjadi tanggungjawab Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021, persentase Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan mencapai target 100 persen, dengan upaya penyelarasan antar dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari RPJMD, Renstra perangkat daerah, RKPd dan Renja perangkat daerah, sudah memiliki konsistensi yang selaras dan sesuai dengan dokumen perencanaan diatasnya.

Capaian kinerja daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan tahun 2021 realisasi 24 persen secara keseluruhan telah dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan sehingga capaiannya mencapai 100 persen.

5. Bidang Keuangan

Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Bidang Keuangan diselenggarakan oleh 2 (dua) Perangkat Daerah, yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA). Adapun capaian dari penyelenggaraan urusan dari kedua Perangkat Daerah tersebut, dapat dirincikan sebagai berikut.

a. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD)

Adapun indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang merupakan indikator wujud kinerja BPKAD Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah sebagai berikut:

Tabel 2- 222 Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah Sesuai RPJMD Tahun 2019-2023

Misi Ke RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
NTB Bersih dan Melayani melalui Transformasi Birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset, Berdasarkan Indikator Kinerja RPJMD	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPKAD Provinsi NTB, 2021

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Provinsi NTB telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI pada tahun 2021. Prestasi tersebut adalah yang ke-10 secara berturut-turut dari tahun 2011-2020. Opini WTP ini menggambarkan bahwa Pemerintah Provinsi NTB telah melakukan best practice dalam pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 2- 223 Opini BPK RI dalam 10 (sepuluh) tahun 2011-2020

TAHUN	OPINI
2011	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2012	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2013	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2014	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber : BPKAD Provinsi NTB, 2021

Adapun Capaian Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Bidang Keuangan Tahun 2019-2020 diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 2- 224 Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Urusan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019-2020

No	INDIKATOR BIDANG URUSAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Ketepatan waktu penyusunan APBD	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
2	Deviasi penerimaan dikurangi pengeluaran	Deviasi positif	Deviasi positif	Deviasi positif	Deviasi positif
3	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Persentase evaluasi rancangan Perda dan Perkada tentang APBD dan pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%
5	Ketepatan waktu penyusunan RKBMD	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
6	Persentase tindak lanjut penghapusan BMD	86%	86%	100%	89%
7	Persentase aset daerah yang termanfaatkan	70%	70%	70%	66.39%

Sumber : BPKAD Provinsi NTB, 2021

Untuk mempertahankan Opini WTP dari BPK, sasaran BPKAD Provinsi NTB melalui Rencana Strategis Tahun 2019-2023 yakni “ Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah” melalui 4 indikator sasaran. Adapun Capaian Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Bidang Keuangan Tahun 2021 diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan indikator urusannya berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2- 225 Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Urusan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021

No	INDIKATOR BIDANG URUSAN	TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	%
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan Akuntansi Berbasis Akrua	100%	100%	100%
2	Persentase Tindak Lanjut Penghapusan Aset Daerah	100%	100%	100%
3	Persentase Aset Tetap Tanah dan Bangunan yang termanfaatkan	70%	69.45%	99%
4	Persentase Aset Tetap Tanah dan Bangunan yang terlegalkan	82%	81.07%	98,86%

Sumber : BPKAD Provinsi NTB, 2021

Penghapusan BMD selama tahun 2021 dilaksanakan dengan menetapkan 10 SK penghapusan dengan total nilai penghapusan sebesar Rp.40.942.496.461 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2- 226 Data Penghapusan BMD yang telah dilaksanakan oleh BPKAD pada Tahun 2021

NO.	No./tanggal SK	Nama OPD/OPTD	Jenis Penghapusan	Nilai Penghapusan (Rp)
1	SK Nomor 032-386 Tahun 2021, tanggal 7 juli 2021	UPTD Balai Pelatihan Tenaga Kesehatan Provinsi NTB	Peralatan dan mesin	67.305.250
		Badan Kepegawaian Daerah Provinsi ntb	Peralatan dan mesin	491.414.650
2	SK Nomor 032-524 tahun 2021, tanggal 21 september 2021	DinasKelautan dan Perikanan Provinsi NTB	Peralatan dan mesin	35.745.100
3	SK Nomor 032-462 tahun 2021, tanggal 24 agustus 2021	Dinas Kesehatan Provinsi NTB	Peralatan dan mesin	615.499.000
4	SK Nomor 032-404 tahun 2021 tanggal 19 juli 2021	Dinas Perindustrian Provinsi NTB	Bangunan	1.436.843.230
5	SK Nomor 032-419 tahun 2021, tanggal 27 juli 2021	bpkad Provinsi NTB	Bangunan	12.579.496.691
		Dinas Perhubungan Provinsi NTB	Bangunan	98.395.000
6	SK Nomor 032-656 tahun 2021, tanggal 11 november 2021	RSUD Provinsi NTB	Peralatan dan mesin	17.605.929.744
7	SK Nomor 032-626 tahun 2021, tanggal 4 november 2021	SMKN 2 Mataram	Bangunan	50.000.000
	Total Nilai Penghapusan			32.980.628.665

Sumber : BPKAD Provinsi NTB, 2021

Berdasarkan tabel diatas, penghapusan BMD selama tahun 2021 dilaksanakan dengan menetapkan 10 SK penghapusan. Faktor-faktor penunjang keberhasilan dalam mencapai indikator ini antara lain;

- kesiapan tim dalam melakukan tahapan-tahapan untuk melakukan penghapusan BMD;
- tersedianya SDM yang kompeten khususnya yang menangani penatausahaan aset;
- tersedianya tim penilai asset yang bertugas melakukan penilaian terhadap aset yang akan dihapus.

Selama 3 dari 2019 ke 2020 Belanja BPKAD Provinsi mengalami Pengurangan 16 persen, atau berkurang sebesar Rp. (31,326,196,120.66). dari Belanja BPKAD Tahun 2019 Rp. 1,791,606,873,318.52 dan Tahun 2020 Rp. 1,760,280,677,197.86

Tabel 2- 227 Perkembangan Anggaran Belanja Daerah Dalam BPKAD Provinsi NTB Selaku SKPD Tahun 2019-2020

URAIAN	2019	2020	Bertambah/ Berkurang (%)
BelanjaTidak Langsung SKPKD	1.740.690.391.626	1.715.200.962.340,86	-1.5
Belanja Langsung	37.968.772.492.52	31.358.278.149,00	-21
Belanja Tidak Langsung SKPD	12.947.709.200	13.721.436.708	6
Total Belanja	1,791,606,873,318.52	1,760,280,677,197.86	0.02

Sumber : BPKAD Provinsi NTB, 2021

Pada Tahun 2021 Belanja Daerah terdiri Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, Adapun Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Rp. 2.920.615.020.537 sebagai berikut:

Tabel 2- 228 Anggaran Belanja Daerah Dalam BPKAD Provinsi NTB Selaku SKPKD dan SKPD Tahun 2021

URAIAN	2021
Belanja Operasi	1.715.200.962.340,86
Belanja Modal	452.436.900
Belanja Tidak Terduga	58.606.843.539
Belanja Transfer	758.584.178.135

Sumber : BPKAD Provinsi NTB, 2021

Tabel 2- 229 Perkembangan Anggaran Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021

URAIAN	2019	2020	Bertambah/Berkurang (%)	2021	Bertambah
Belanja	1,791,606,873,318.52	1,760,280,677,197.86	0.02	2.920.615.020.537	65%

Sumber : BPKAD Provinsi NTB, 2021

Adapun Perkembangan anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dalam APBD dituangkan dalam tabel berikut.

Tabel 2- 230 Perkembangan Belanja Daerah Dalam APBD Provinsi NTB Tahun 2019-2020

URAIAN	2019	2020	PENINGKATAN/ PENURUNAN (%)
Belanja Tidak Langsung	3.219.248.730.182,43	3.283.995.497.539,77	2,01
Belanja Langsung	2.280.506.035.946,06	2.194.137.726.642,88	(3,79)
Jumlah	5.499.754.766.128,49	5.478.133.244.182,65	(0,39)

Sumber : BPKAD Provinsi NTB, 2021

Tabel 2- 231 Perkembangan Belanja Daerah Dalam APBD Provinsi NTB Tahun 2021

URAIAN	TAHUN 2021
Belanja Operasi	4.315.298.315.161
Belanja Modal	1.247.827.460.776
Belanja Tidak Terduga	58.606.843.539
Belanja Transfer	758,584,178,435.00
Jumlah Belanja	6.380.316.797.911

Sumber : BPKAD Provinsi NTB, 2021

Tabel 2- 232 Perkembangan Anggaran Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021

URAIAN	2019	2020	Bertambah/Berkurang (%)	2021	Bertambah
Belanja	5.499.754.766.128,491,	5.478.133.244.182,65	0.02	6.380.316.797.911	1.16%

Sumber : BPKAD Provinsi NTB, 2021

Kebijakan anggaran pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan selama 2 tahun, pada tahun 2019

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk belanja tidak langsung (BTL) sebesar Rp. 3.219.248.730.182,43 dan alokasi untuk belanja langsung (BL) sebesar Rp. 2.280.506.035.946,06, Perkembangan alokasi anggaran BTL meningkat dari tahun 2019 ke 2020 mengalami perkembangan positif 2,01 persen atau sebesar Rp. 64.746.767.357,34. Sedangkan alokasi belanja langsung (BL) dari tahun 2019 tahun 2020 juga negatif 3,79 persen atau sebesar Rp. 86.368.309.303,18. Secara keseluruhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2019 sampai 2020 negatif 0,39 persen. Sedangkan Total Belanja APBD dari Tahun 2020 ke Tahun 2021 dengan Peningkatan Sebesar 65% dengan Rp. 902,183,553,728.35

b. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA)

Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Bidang Keuangan Tahun 2021 diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan indikator bidang urusan berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah 1) Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD; dan 2) Jumlah Penerimaan Pendapatan Daerah. Target dan capaian indikator bidang urusan bidang keuangan tahun 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2- 233 Capaian Indikator Urusan Bidang Keuangan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	Indikator Bidang Urusan	Tahun 2020		Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD (Persen)	34,06	35,09	39,34	35,38
	Jumlah Penerimaan Pendapatan Daerah	5.405,18	5.174,59	5.739,96	5.320,91
	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	0,525	0,508	0,423	0,406

Sumber: BAPPENDA Provinsi NTB, 2021

Tujuan OPD	Indikator Kinerja (Outcome)	Sat	Target M	Target P	Realisasi	Tk. Capaian
Terwujudnya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang makin transparan dan akuntabel	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	Persen	35,41	39,34	35,38	89,92
	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks	0,458	0,423	0,406	88,71
	Kategori IKFD	Kategori	Rendah	Rendah	Rendah	
Sasaran Strategis						
Meningkatkan Kontribusi PAD terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	Penerimaan Pendapatan Daerah	Milyar IDR	5.549,14	5.739,96	5.320,91	92,70
	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Persen	55,17	64,86	54,75	84,40
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	Nilai Persepsi Masyarakat atas kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Nilai	88,50	88,50	82,15	92,82

yang semakin kuat dan responsif

Sumber: BAPPENDA Provinsi NTB, 2021

1. Pendapatan Daerah

Pengelolaan pendapatan daerah bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan cara menerapkan pelayanan prima pada unit perangkat daerah pengelola sumber pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah serta berupaya untuk menggali dan mengembangkan potensi sumber penerimaan daerah.

Dengan meningkatnya penerimaan daerah maka ketergantungan pada dana transfer pemerintah pusat akan lebih kecil, kualitas potensi ekonomi wilayah menjadi lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kemandirian dan daya saing dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Peningkatan penerimaan daerah juga berdampak pada meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik serta peningkatan sumber daya manusia yang mempertimbangkan sensitivitas gender dan pranata sosial.

Pendapatan Daerah provinsi NTB dari tahun 2018 s.d 2021 terus menunjukkan peningkatan, dimana Pendapatan Daerah tahun 2021 dapat direalisasikan sebesar Rp.5.320.905.635.350,- bertumbuh 2,38% dari realisasi Pendapatan Daerah tahun 2020 sebesar Rp.5.174.591.478.460,-. Berikut adalah realisasi per jenis komponen pendapatan daerah tahun 2018 sampai dengan 2021

Tabel 2- 234 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi NTB Tahun 2018 -2021

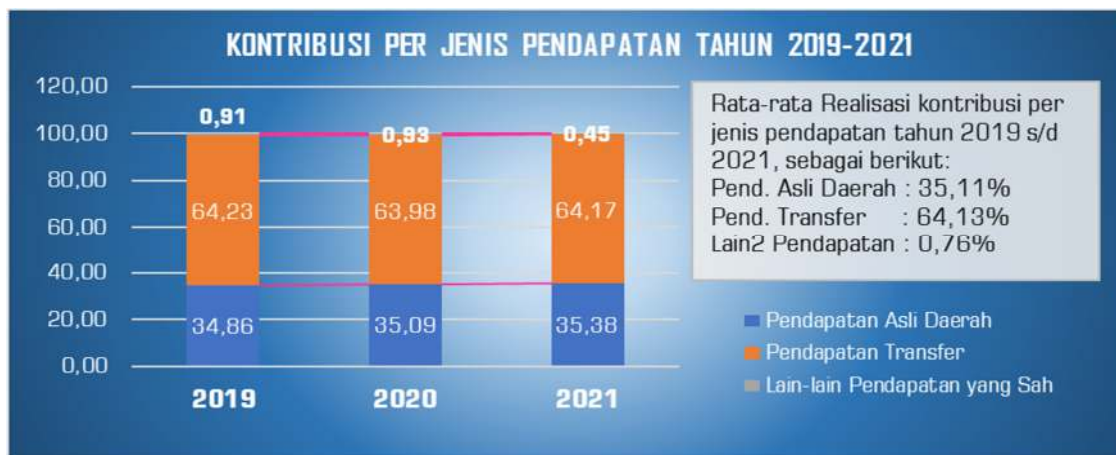
No	Tahun	Realisasi (Rp)			
		PAD	Dana Perimbangan	Lain-Lain Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah
1	2018	1.660.417.707.373	3.212.386.689.010	68.442.578.246	4.941.246.974.629
2	2019	1.807.482.745.855	3.342.865.637.337	47.379.105.050	5.197.727.488.242
3	2020	1.815.808.348.901	3.310.766.841.031	48.016.288.528	5.174.591.478.460
4	2021	1.882.429.130.742	3.414.313.104.250	24.163.400.358	5.320.905.635.350
	Jumlah	7.166.137.932.871	13.280.332.271.628	188.001.372.182	20.634.471.576.681

Sumber : BAPPENDA Provinsi NTB, 2021 (unaudited)

Total Pendapatan Daerah sejak tahun 2018 sampai dengan 2021 telah terealisasi sebesar Rp.20.634.471.576.681,- atau 94,24% dari total target

pendapatan daerah dalam APBD sebesar Rp.21.895.300.166.176,-. Realisasi Pendapatan daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer termasuk didalamnya Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan kontribusi masing-masing komponen dapat dilihat dalam diagram sebagai berikut:

Gambar 2- 61 Kontribusi Komponen Pendapatan Tahun 2019-2021



Sumber: BAPPENDA Provinsi NTB, 2021

Diagram di atas menggambarkan struktur pendapatan daerah Provinsi NTB masih sangat tergantung kepada dana yang bersumber dari Pendapatan Transfer. Kontribusi pos PAD masih berkisar pada angka 34,86-35,38% dari total pendapatan daerah. Kontribusi PAD tahun 2019 sebesar 34,86% meningkat menjadi 35,09% di tahun 2020, serta 35,38% tahun 2021. Adapun komponen pembentuk pendapatan daerah selama tiga tahun periode RPJMD dan Renstra OPD Tahun 2019-2023, dimana tahun 2019 ke 2021 diperoleh PAD rata-rata 35,11%; Pendapatan Transfer rata-rata 64,13%; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 0,76%.

Berikut gambaran kondisi pos-pos pendapatan daerah Provinsi NTB tahun 2021:

- **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Target PAD tahun 2021 yang semula sebesar Rp.1.954.341.221.233,- bertambah dalam anggaran perubahan menjadi Rp.2.258.283.418.223,-. Target PAD tersebut merupakan 39,34% dari keseluruhan target Pendapatan Daerah Provinsi NTB sebesar Rp.5.739.963.964.315,-. Sampai akhir tahun anggaran 2021, realisasi penerimaan PAD telah mencapai Rp. 1.882.429.130.742 (83,36%) dari target perubahan pendapatan tahun 2021 sebesar Rp. 2.258.283.418.223,-.

Tabel 2- 235 Target dan Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2021

Uraian	Realisasi 2020	Tahun 2021		Capaian (%)	Growth (%)
		Target Perubahan	Realisasi		
Pajak Daerah	1.328.307.081.373	1.601.353.821.000	1.417.882.133.696	88,54	6,74
Retribusi Daerah	16.454.253.859	47.219.957.500	9.792.712.028	20,74	-40,49
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	61.121.457.472	46.263.633.123	46.263.633.608	100,00	-24,31
Lain-lain PAD yang Sah	409.925.556.197	563.446.006.600	408.490.651.410	72,50	-0,35
Jumlah Total	1.815.808.348.901	2.258.283.418.223	1.882.429.130.742	83,36	3,67

Sumber: BAPPENDA Provinsi NTB, 2021

• Pendapatan Transfer

Rincian penerimaan dari masing-masing komponen PAD adalah sebagai berikut:

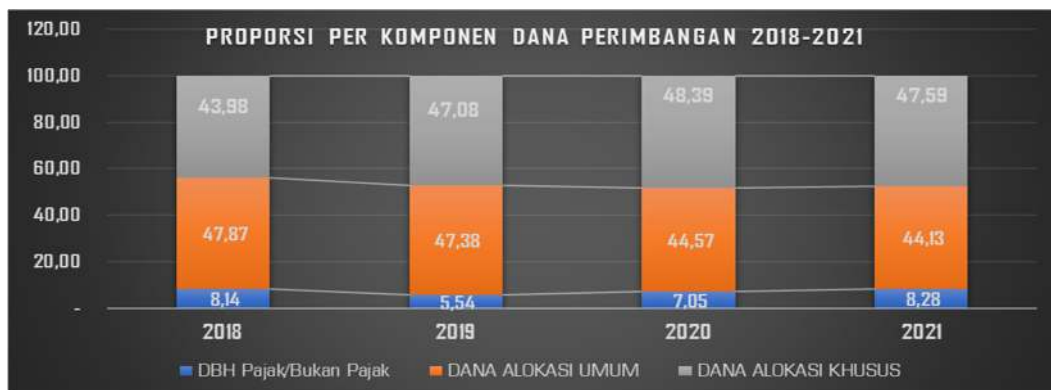
Tabel 2- 236 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2021

No	URAIAN	REALISASI 2020	TAHUN 2021		CAPAIAN (%)	GROWTH (%)
			TARGET PERUBAHAN	REALISASI		
	PENDAPATAN TRANSFER	3.310.766.841.031	3.426.899.642.148	3.414.313.104.250	99,63	3,13
A.	Transfer Pemerintah Pusat	3.310.766.841.031	3.425.156.711.263	3.412.475.468.388	99,63	3,07
a.	Dana Perimbangan	3.310.766.841.031	3.356.634.464.263	3.343.953.221.388	99,62	1,00
	1) Dana Transfer Umum	1.708.800.353.715	1.722.449.284.263	1.752.565.068.058	101,75	2,56
	a) Dana Bagi Hasil	233.260.247.715	246.773.431.263	276.889.215.058		
	b) Dana Alokasi Umum	1.475.540.106.000	1.475.675.853.000	1.475.675.853.000		
	2) Dana Transfer Khusus	1.601.966.487.316	1.634.185.180.000	1.591.388.153.330	97,38	-0,66
	a) DAK Fisik	355.203.497.834	393.373.318.000	346.452.123.817		
	b) DAK Non Fisik	1.246.762.989.482	1.240.811.862.000	1.244.936.029.513		
b.	Dana Insentif Daerah	-	68.522.247.000	68.522.247.000	100,00	0,00
B.	Transfer Antar Daerah	-	1.742.930.885	1.837.635.862	105,43	0,00
	Bantuan Keuangan		1.742.930.885	1.837.635.862		

Sumber: BAPPENDA Provinsi NTB, 2021

Dalam tahun 2020-2021 kontribusi paling besar berasal dari pos Dana Alokasi Umum (DAU), namun kontribusi DAU terhadap total dana perimbangan berangsur-angsur menurun. Pada tahun 2020, porsi DAU terhadap dana perimbangan sebesar 44,57% kemudian menurun hingga mencapai 44,13% pada tahun 2021. Kontribusi DBH pajak dan DAK Non Fisik terhadap Dana Perimbangan menunjukkan tren yang terus meningkat, sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut:

Gambar 2- 62 Kontribusi Komponen Dana Perimbangan Tahun 2018-2021



Sumber: BAPPENDA Provinsi NTB, 2021

Penerimaan Pendapatan Transfer tahun 2021 terealisasi 99,63% atau sebesar Rp.3.414.313.104.250,- dari target perubahan yang ditetapkan sebesar Rp.3.426.899.642.148,-. Tidak tercapainya target penerimaan Dana Transfer tahun 2021 disebabkan faktor arah perekonomian dunia berubah drastis hingga mengarah pada kondisi resesi dengan ketidakpastian yang tinggi yang berimbas pada Perlambatan ekonomi dan kebutuhan penanganan dampak Covid-19 serta pemulihan ekonomi membawa konsekuensi perubahan signifikan terhadap APBN. Perubahan postur APBN tahun 2021 diatur melalui Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2020 dilakukan sebagai bentuk kebijakan countercyclical untuk menghadapi dampak pandemi Covid-19, varian Delta dan Omikron.

- **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari : 1) Pendapatan Hibah dan 2) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Penerimaan daerah dari pos lain-lain pendapatan daerah yang sah secara tren menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2020 realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp.48,02 milyar dengan kontribusi sebesar 0,93%, sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp.24,16 milyar dengan kontribusi 0,45%.

6. Bidang Kepegawaian

Untuk mengukur tercapainya Indeks Profesionalisme ASN, pedoman yang diacu adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalisme ASN dan secara teknis diatur lebih lanjut didalam Peraturan Kepala BKN Nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalisme ASN. Ada 4 (empat) kriteria pengukuran tingkat profesionalitas ASN melalui dimensi **Kompetensi; Kualifikasi; Kinerja; Disiplin**.

Kriteria Indeks Profesionalitas ASN dikelompokkan menjadi lima kategori yaitu : 1) 0,91-1 (Sangat Tinggi); 2) 0,81-0,9 (Tinggi); 3) 0,71-0,8 (sedang); 4) 0,61-0,7 (Rendah); dan 5) 0,6 kebawah (Sangat Rendah). Capaian Indeks Profesionalisme ASN Provinsi NTB dari tahun 2019 s.d. 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2- 237 Indeks Profesionalisme ASN Provinsi NTB Tahun 2019-2021

NO	Dimensi IPA	Tahun						Target Akhir RPJMD
		2019		2020		2021		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Kualifikasi	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,14
2	Kompetensi	0,23	0,16	0,24	0,16	0,25	0,255	0,28
3	Kinerja	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
4	Disiplin	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Nilai IPA		0,65	0,58	0,67	0,59	0,68	0,685	0,72

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB, 2021

Nilai Indeks Profesionalisme ASN Provinsi NTB tahun 2019 berada pada nilai indeks 0,58 atau kategori sangat rendah dan pada tahun 2021 nilai indeks profesionalisme ASN menjadi 0,685 namun masih dalam kategori Rendah. Nilai Indeks Profesionalisme ASN Provinsi NTB yang masih dalam kategori Rendah diantaranya disebabkan Oleh :

1. Masih rendahnya tingkat kompetensi masing-masing ASN, karena belum diberikannya peningkatan kapasitas ASN secara rutin melalui Diklat, Workshop, Seminar serta *mentoring* dan *coacing*.
2. Tingkat kualifikasi pendidikan ASN yang masih didominasi pada jenjang DIII ke bawah sehingga menyebabkan dimensi kualifikasi ASN belum maksimal.
3. Belum Optimalnya capaian kinerja individu ASN akibat belum memaksimalkan teknologi informasi dalam Penilaian Kinerja ASN.

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah, dengan indikator bidang urusan berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah 1) Nilai aspek perencanaan kebutuhan, pengadaan dan sistem informasi, 2) Nilai aspek promosi dan mutasi, 3) Nilai aspek pengembangan karir, perlindungan dan pelayanan, 4) Nilai aspek manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, dan 5) Persentase laporan LHKPN yang tepat waktu. Pengukuran keberhasilan penerapan sistem merit dilakukan melalui penilaian mandiri sistem merit menggunakan aplikasi SIPINTER, untuk memudahkan instansi pemerintah dalam melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Provinsi NTB dan kabupaten/kota. Target dan capaian indikator bidang urusan kepegawaian tahun 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2- 238 Capaian Indikator Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB Tahun 2019 s.d. 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021	
			Target	Realisasi	Target	Ralisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pegawai dan Sistem Informasi Kepegawaian yang Terintegrasi	Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan dan Sistem Informasi	81	81	90	90	96	96

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021	
			Target	Realisasi	Target	Ralisasi	Target	Realisasi
2	Meningkatnya Kualitas Mutasi dan Promosi Pegawai sesuai dengan Kompetensinya	Nilai Aspek Promosi dan Mutasi	20	20	25	25	32,5	32,5
3	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Kompetensi Pegawai	Nilai Aspek Pengembangan karir	25	25	37,5	37,5	55	55
4	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, Disiplin serta Perlindungan dan Pelayanan	Nilai Aspek manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin, Perlindungan dan pelayanan	111,5	111,5	126,5	126,5	131,5	131,5
Total Nilai Penerapan Sistem Merit			237,5	237,5	279,0	279,0	315,0	315,0

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB, 2021

Kriteria Penilaian :

1. Kategori IV, Nilai 325-400, dengan indeks 0,81-1, sebutan Sangat Baik;
2. Kategori III, Nilai 250-324, dengan indeks 0,61-0,8, sebutan Baik;
3. Kategori II, Nilai 175-249, dengan indeks 0,41-0,6, sebutan Kurang;
4. Kategori I, Nilai 100-174, dengan indeks 0,2-0,4, sebutan Buruk

Disamping itu dikembangkan juga sistem aplikasi e-SIPJA (Sistem Informasi Penilaian Kinerja ASN) yang bertujuan membantu dalam penilaian kinerja secara individu. e-SIPJA ini nantinya selain dapat mengukur tingkat kinerja masing-masing ASN juga terintegrasi dengan sistem kehadiran berbasis online sehingga dapat menjadi alat untuk memonitoring dan mengevaluasi tingkat disiplin ASN. Lebih lanjut, e-SIPJA juga akan terintegrasi dengan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang berbasis kinerja, sehingga diharapkan kesejahteraan pegawai dapat diwujudkan.

7. Bidang Pendidikan Dan Pelatihan

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTB melaksanakan urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang pendidikan dan pelatihan, menetapkan sasaran strategis sesuai Penetapan Kinerja Tahun 2021 yaitu "Meningkatnya Kompetensi ASN" dengan indikator "Persentase ASN yang Bersertifikat Kompetensi". Capaian indikator kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2- 239 Capaian Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Urusan Fungsi Penunjang Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TAHUN 2020	
			TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Bersertifikat Kompetensi	0,25	0.25

Sumber : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTB, 2021

Dimensi Kompetensi diperhitungkan sebesar 40 persen dari keseluruhan pengukuran Indeks Profesionalisme ASN terdiri dari pengembangan kompetensi manajerial, pengembangan kompetensi fungsional, dan pengembangan kompetensi

teknis yang dilaksanakan oleh BPSDMD Provinsi NTB, serta pengembangan kompetensi ASN diluar diklat seperti bimtek, workshop, seminar dan lain sebagainya.

Profesionalisme ASN adalah bagian dari Reformasi Birokrasi. Dalam rangka meningkatkan Indeks Profesionalisme ASN, BPSDMD Provinsi NTB melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana table capaian kinerja diatas. Indeks Profesionalisme ASN (IPA) terdiri dari empat (4) dimensi yaitu :

1. Dimensi Kompetensi : 40%
2. Dimensi Kinerja : 30%
3. Dimensi Kualifikasi : 25%
4. Dimensi Disiplin : 5%

Empat (4) dimensi Indeks Profesionalisme ASN diampu oleh 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu BPSDMD Provinsi NTB mengampu Dimensi Kompetensi dan BKD Provinsi NTB mengampu Dimensi Kinerja, Dimensi Kualifikasi dan Dimensi Disiplin. Untuk dimensi kompetensi mengambil porsi 40% dari total nilai IPA sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Dimensi kompetensi terdiri dari riwayat Pengembangan Kompetensi yaitu:

1. Diklat Kepemimpinan/Manajerial;
2. Diklat Fungsional;
3. Diklat Teknis; dan
4. Seminar/Workshop/Magang/Kursus/Sejenisnya.

Riwayat Pengembangan Kompetensi yang terhitung sebagai Dimensi Kompetensi yang diselenggarakan oleh BPSDMD Provinsi NTB adalah pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN lingkup Pemerintah Provinsi NTB. Perhitungan 40% Pengembangan Kompetensi ASN dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2- 240 Perhitungan 40% Pengembangan Kompetensi ASN Tahun 2021

Jenis Pengembangan Kompetensi	Jenis Jabatan		
	Struktural	Fungsional Tertentu	Fungsional Umum
Diklat Kepemimpinan/Manajerial	15	-	-
Diklat Fungsional	-	15	-
Diklat Teknis	15	15	22,5
Seminar/Workshop/ Magang/Kursus/ Sejenisnya.	10	10	17,5
Diklat Kepemimpinan/Manajerial	40	40	40

Sumber : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTB, 2021

Tabel 2- 241 Masa Perhitungan Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Jenis Pengembangan dan Jenis Jabatan

Jenis Jabatan	Jenis Pengembangan Kompetensi			
	Diklat Kepemimpinan /Manajerial	Struktural	Fungsional Tertentu	Fungsional Umum
Struktural	Dalam jabatan yang tengah diduduki saat ini	-	2 Tahun Terakhir	2 Tahun Terakhir
Fungsional Tertentu		2 Tahun Terakhir	2 Tahun Terakhir	2 Tahun Terakhir
Fungsional Tertentu		-	1 Tahun Terakhir	1 Tahun Terakhir

Seminar/Workshop/ Magang/Kursus/ Sejenisnya.		-	10	17,5
Diklat Kepemimpinan/ Manajerial		40	40	40

Sumber : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTB, 2021

Dalam rangka efektifitas dan efisiensi, maka pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia dilaksanakan secara terintegrasi dan terpusat melalui kebijakan Pengembangan Kompetensi Satu Pintu pada BPSDMD Provinsi NTB. BPSDMD Provinsi NTB telah menyusun Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020 tentang Sistem Pengelolaan Kompetensi Sumber Daya Manusia Provinsi NTB. Selain itu, diatur juga mengenai pelaksanaan Pengembangan Kompetensi secara Klasikal (Tatap Muka), Blended Learning (Campuran) dan Distance Learning/e-Learning (Jarak Jauh). Pola pembelajaran Blended Learning (Campuran) dan Distance Learning/e-Learning (Jarak Jauh) sangat bermanfaat pada kondisi Pandemi Covid-19. Dengan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020 tentang Sistem Pengelolaan Kompetensi Sumber Daya Manusia Provinsi NTB, pencapaian kinerja BPSDMD Provinsi NTB Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2- 242 Capaian IPA Dimensi Kompetensi Tahun Anggaran 2021

Program	Indikator	Target	Capaian	%
Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial	0.09	0.0857	95,22
	2. Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Fungsional	0.03	0.1500	500
	3. Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Teknis	0.13	0.0208	16
	Jumlah	0,25	0,256	102,4
	4. Persentase Fungsional yang Tersertifikasi	0.55	1.29	234,54

Sumber : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTB, 2021

Capaian Pengembangan Kompetensi menurut Jenis Kompetensi dan Jenis Jabatan Tahun 2021 serta pelaksanaan Seminar/Workshop/ Magang/Kursus/ Sejenisnya dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2- 243 Capaian Pengembangan Kompetensi menurut Jenis Kompetensi dan Jenis Jabatan Tahun 2021

Jenis Jabatan	Capaian Jenis Pengembangan Kompetensi			
	Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan /Manajerial	Pengembangan Kompetensi Fungsional	Pengembangan Kompetensi Teknis	
			Diklat Teknis	Seminar/Workshop/ Magang/Kursus/ Sejenisnya
Struktural	0,0857	-	0,07667	0,000079
Fungsional Tertentu	-	0,15000	0,0017	-
Fungsional Umum / Pelaksana	-	-	0,01122	0,00011
Jumlah	0,0857	0,15000	0,0208	

Sumber : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTB, 2021

8. Bidang Penelitian Dan Pengembangan

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun 2021 melaksanakan fungsi penunjang, bidang Penelitian dan Pengembangan berdasarkan dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021, sasaran kedua meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian kebijakan perencanaan dengan indikator Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam kebijakan perencanaan. Sasaran ketiga meningkatnya kualitas inovasi daerah dengan indikator Indeks inovasi daerah.

Pelaksanaan program bidang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021, dengan Target dan capaian disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2- 244 Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Urusan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2021	
			TARGET	REALISASI
2.	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian kebijakan perencanaan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam kebijakan perencanaan (%)	34,78	100 %
3.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	Sangat Inovatif

Sumber : Bappeda Provinsi NTB, Tahun 2021

Pemerintah Provinsi NTB memiliki 45 Perangkat Daerah yang menginput inovasi sejumlah 38 Perangkat Daerah sisanya tidak menginput inovasi, Skor Indeks Inovasi Daerah (IID) Prov NTB 86,23 artinya masuk dalam kategori Sangat Inovatif.

Jumlah skor kematangan 11.234 itu merupakan skor diatas rata rata merupakan pengusulan dalam mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) dengan skor diatas rata rata merupakan dasar Kemendagri dalam mengusulkan Provinsi NTB dalam menerima DID tersebut. Sampai dengan penerimaan penganugerahan IGA thn 2021 dalam setelah verifikasi hasil inovasi dari beberapa tim penilai pusat, SK Kemendagri Nomor 002.6-5848 Tahun 2021 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2021 Menteri Dalam Negeri memutuskan: Provinsi NTB berada di Peringkat ke 2 dari 34 Provinsi se Indonesia setelah provinsi Sumatra Selatan Kategori Tingkat Provinsi dengan skor Indeks 75.67 dengan predikat SANGAT INOVATIF.

Provinsi NTB memiliki 10 Kabupaten/Kota Kategori Kabupaten:

- 1) Kab. Sumbawa Barat, berada direngking 157 dari 415 Kabupaten se Indonesia dengan skor indeks : 43.68 dengan Predikat INOVATIF.
- 2) Kab. Sumbawa, berada direngking 163 dari 415 Kab se Indonesia dengan skor indeks 42.96 dengan predikat INOVATIF
- 3) Kab Loteng, berada di rengking 202 dari 415 Kab se Indonesia dengan skor indeks 37.77 dengan predikat INOVATIF.
- 4) Kab. Lotim, berada di rengking 223 dari 415 Kbupaten se Indonesia dgn skor indeks 35.28 dengan predikat INOVATIF.
- 5) Kab Lombok Utara, berada di rengking 238 dari 415 Kabupaten se Indonesia dengan skor indeks 32.56 dengan predikat INOVATIF

- 6) Kab Dompu, berada direngking 251 dari 514 Kabupten se Indonesia dengan skor indeks 30.05 dengan predikat INOVATIF.
- 7) Kab. Lobar, berada direngking 324 dari 415 Kabupten se Indonesia dengan skor indeks 12.61 dengan predikat KURANG INOVATIF

Kategori Kota :

- 8) Kota Mataram, berada direngking 30 dari 93 Kota se Indonesia dengan skor indeks 53.17 dengan kategori INOVATIF
- 9) Kota Bima, berada direngking 45 dari 93 Kota seIndonesia dengan skor indeks 48.37 dengan predikat INOVATIF.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2021 dan Realisasi Capaian RPJMD 2019-2023 Sampai Tahun 2021

2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2021

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 sebagaimana telah dilakukan perubahan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021. Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 mencapai 158 program yang terdiri atas 1 program penunjang urusan, 120 program prioritas yang tidak hanya mendukung pencapaian visi RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 tetapi juga mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 37 program hanya mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan. Sedangkan jumlah kegiatan mencapai 313 kegiatan dengan 962 sub kegiatan. Keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dilaksanakan oleh 46 perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi NTB, dengan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 6.380.316.797.911,00. Capaian program dan kegiatan prioritas berdasarkan sasaran pembangunan daerah pada tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dari 120 program prioritas pembangunan daerah tersebut, rata-rata capaian kinerja sebesar 30,73% dengan capaian keuangan sebesar 21,14%. Rendahnya capaian ini disebabkan sebagian besar belum dapat diukur sampai triwulan II, adanya penghentian sementara pelaksanaan kegiatan akibat refocusing anggaran serta pelaksanaan kegiatan diagendakan pada triwulan III dan IV.
2. Dari 281 Kegiatan, terdapat 214 kegiatan yang sudah dapat dihitung realisasi keuangan dan kinerjanya. Dari 281 kegiatan tersebut kemudian diturunkan lagi menjadi sub kegiatan sebanyak 839 sub kegiatan. Sebanyak 557 diantaranya sudah dapat dihitung realisasi kinerja dan keuangannya. Rata-rata capaian kinerja sebesar 39,21% dan realisasi keuangan sebesar 29,49%

Adapun rekapitulasi hasil capaian kinerja dan keuangan menurut pemetaan sasaran pembangunan sebagai berikut.

Tabel 2- 245 Capaian Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Tahun 2021

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Tahun 2021						
				RPJMD/Renstra		APBD	Kinerja		Keuangan	
				Target	Rp. (Juta)	Rp.	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Tingkat Capaian Keuangan
Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah										
Tujuan 1: Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	Point	129,02	123,11	6.605.666.83 0	7.982.926.96 7	122,33	100,63	6.723.316.417	84,22
Sasaran: Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Point	0,57	0,61	6.605.666.83 0	7.982.926.96 7	0,63	103,28	6.723.316.417	84,22
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase terbentuknya DESTANA dan SMAB	%		25,48	4.159.298.73 0	6.800.276.96 7	24,08	94,51	5.769.603.917	84,84
	Persentase terlaksananya Renkon, Respon Cepat PDB, Pencarian Pertolongan Evakuasi Korban, Jitupasna	%		44,69	-		37,87	84,74		
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan Penanganan Bencana Daerah Provinsi	%		100	2.446.368.10 0	1.182.650.00 0			953.712.500	80,64
Tujuan 2: Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan	Indeks Aksesibilitas	Point	76,02	78,56	0,00		78,81	100,32		
Sasaran 1: Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar	Persentase Kemantapan jalan	%	80,28	83,95	255.582.020. 288	503.799.056. 579	84,01	100,07	375.321.466.6 89	74,50
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Jaringan jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	%	80,28	83,95	255.582.020. 288	503.799.056. 579	83,95	100,00	375.321.466.6 89	74,50
Sasaran 1: Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar	Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	50,76	50,04	172.161.187. 075	195.482.429. 489	50,88	101,68	151.465.706.8 67	77,48
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Kenaikan Areal Layanan Irigasi	%	74,15	74,55	172.161.187. 075	195.482.429. 489			151.465.706.8 67	77,48
	Cakupan Pelayanan Areal Irigasi			76,12			75,52	99,21		
Sasaran 2: Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase konektivitas transportasi publik	%	78,64	81,71	4.999.444.62 0	2.955.199.59 0	88,00	107,70	2.621.650.740	88,71
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana transportasi darat dalam kondisi baik	%	70,24	50,83	4.435.624.62 0	2.698.060.09 0	26,69	52,51	2.391.305.456	88,63
	Persentase Prasarana transportasi darat dalam kondisi baik	%	92,31	94,37	-		97,50	103,32		
	Persentase Prasarana terminal dalam kondisi baik	%	0	30	-		30	100,00		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Tahun 2021						
				RPJMD/Renstra		APBD	Kinerja		Keuangan	
				Target	Rp. (Juta)	Rp.	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Tingkat Capaian Keuangan
	Persentase tersedianya Fasilitas Keselamatan Jalan dalam kondisi baik	%	0	46,2	-		48,84	105,71		
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Sarana dan prasarana transportasi Laut dalam kondisi baik	%	0	59,39	563.820.000	257.139.500	0	0,00	230.345.284	89,58
Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi										
Tujuan 1: Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	B	B			B	100		
Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini BPK	Status	WTP	WTP	719.662.584.004	833.729.049.394	WTP	100	702.456.317.403	84,25
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	%		100	711.669.242.304	827.611.862.457	100	100,00	696.783.667.013	84,19
	Persentase ketepatan waktu Evaluasi APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	%		100	1.050.000.000		100	100,00		
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase pengelolaan BMD pada PD yang akurat dan akuntabel	%		60	1.777.298.800	2.483.655.200	60	100,00	2.226.259.531	89,64
PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAWASAN	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada PD	%		80	1.078.974.400	2.155.663.379	38,2	47,75	2.056.781.662	95,41
	Persentase Penurunan Nilai Kerugian Perangkat Daerah	%		40	2.119.203.000		0	0,00		
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Peningkatan Nilai Unsur Pembentuk SPIP	%		55,33	397.356.000	1.427.868.358	60,87	110,01	1.339.609.198	93,82
	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat tepat waktu	%		95	1.570.509.500	50.000.000	55,17	58,07	50.000.000	100,00
Sasaran 2: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	34,77	35,41	15.135.970.000	13.886.486.100	35,45	100,11	11.274.715.156	81,19
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Derajat Desentralisasi Fiskal	%		39,34	527.520.000	424.920.800	35,38	89,93	357.749.673	84,19
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	%		55	14.608.450.000	13.461.565.300	50,47	91,76	10.916.965.483	81,10

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Tahun 2021						
				RPJMD/Renstra		APBD	Kinerja		Keuangan	
				Target	Rp. (Juta)	Rp.	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Tingkat Capaian Keuangan
Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Kategori	BB	BB (73,01 - 76,00)	20.847.306.1 00	16.115.345.2 63	BB	100	14.485.508.45 0	89,89
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Hasil Evaluasi yang dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan	%		100	4.233.604.00 0	2.517.806.00 0	100	100,00	2.305.303.963	91,56
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	%		100	11.088.793.1 00	10.488.880.8 00	100	100,00	9.181.963.391	87,54
PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAWASAN	Persentase PD yang Meningkatkan Nilai Implementasi SAKIP-nya	%		84,44	826.621.500	557.166.621	0	0,00	531.609.016	95,41
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase PD yang menerapkan ZI menuju WBK/WBBM	%		17,77	716.725.400	520.050.542	0	0,00	487.905.265	93,82
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase SAKIP Perangkat Daerah yang Baik Meningkat	%		80	1.147.912.10 0	786.600.400			736.421.708	93,62
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase penyelesaian kebijakan administrasi pemerintahan umum dan pengembangan otonomi daerah	%		100	2.833.650.00 0	1.244.840.90 0	100	100,00	1.242.305.106	99,80
Sasaran 4: Meningkatnya Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN	Point	0,54	0,68	22.946.056.3 00	8.330.656.23 4	0,69	100,88	6.503.116.712	78,06
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Aspek Sistem Informasi	Nilai		16	6.500.000.00 0	1.464.434.76 4	15	93,75	1.448.667.765	98,92
	Nilai Aspek Perencanaan dan Pengadaan	Nilai		80	-		75	93,75		
	Nilai Aspek Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi	Nilai		88	-		62,5	71,02		
	Nilai Aspek Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, Disiplin serta Perlindungan dan Pelayanan	Nilai		132	-		112,5	85,23		
Program PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial	%		0,04	16.446.056.3 00	6.866.221.47 0			5.054.448.947	73,61
	Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Fungsional	%		0,05	-		0,01	20,00		
	Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Tekhnis	%		0,16	-		0,02	12,50		
	Persentase Pejabat Fungsional Yang Tersertifikasi	%		0,16	-		0,13	81,25		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Tahun 2021						
				RPJMD/Renstra		APBD	Kinerja		Keuangan	
				Target	Rp. (Juta)	Rp.	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Tingkat Capaian Keuangan
Sasaran 5: Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	Point	3,63	4,23	9.763.214.80 0	10.628.677.9 00	3,70	87,47	10.058.647.39 0	94,64
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki KTP-el per-satuan penduduk	%		98,7	243.082.000	243.082.000	107,88	109,30	242.821.200	99,89
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan Bidang Catatan Sipil	%		100	180.700.000	180.699.600	100	100,00	180.369.600	99,82
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan tingkat kab/kota	%		100	871.406.000	871.405.600	100	100,00	840.689.900	96,48
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase realisasi Kerjasama Antar Desa pada kawasan kawasan lingkar hutan dan pesisir	%		15	47.500.000	116.622.900	17,85	119,00	108.578.400	93,10
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik (%)	%	40	60	4.644.327.70 0	5.847.185.60 0	100	166,67	5.578.395.810	95,40
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Berbasis TIK (%)	%	25	45	1.707.159.00 0	1.484.404.00 0	61,76	137,24	1.287.761.893	86,75
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan Ketersediaan Data yang Terintegrasi (%)	%	NA	20	419.500.000	408.000.000	98,74	493,70	380.448.200	93,25
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah (%)	%	NA	30	409.000.000	310.170.000	32,61	108,70	291.127.987	93,86
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kab/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%		63	84.705.400	46.616.300	63	100	36.361.400	78,00
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Jumlah Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	%		100	976.769.200	1.037.249.00 0	100	100	1.028.850.100	99,19
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Peningkatan Jumlah Pelestarian Kckr Dan Naskah Kuno Milik Daerah	%		100	179.065.500	4.675.400	100	100	4.675.400	100,00
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Angka kunjungan wisatawan pada Anjungan NTB TMII (orang)	Orang		39.000	-	78.567.500	4.827	12	78.567.500	100,00
Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah										

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Tahun 2021						
				RPJMD/Renstra		APBD	Kinerja		Keuangan	
				Target	Rp. (Juta)	Rp.	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Tingkat Capaian Keuangan
Tujuan 1: Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Kesehatan	Point	71,20	71,97			71,83	99,81		
Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	66,28	66,78	247.823.303. 924	831.347.506. 455	66,69	99,86522911	497.901.511.7 74	59,89
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	%		85	150.429.928. 842	600.581.059. 426			303.239.187.1 54	50,49
	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	%		97	-					
	Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	%		65	-	57.486.337.6 76			44.512.539.49 6	77,43
	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB	%		100	-					
	Persentase kab/kota melaksanakan layanan penyakit menular dan tidak menular sesuai standar minimal 80%	%		80	-	156.113.950. 753	80	100	1,348E+11	86,37
	Persentase Kualitas Lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar	%		94	-					
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan obat rasional	%		90	-		100	111,11		
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	%		2	760.915.500	17.133.977.4 00	11,4	570,00	15.311.274.30 0	89,36
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana kefarmasian dan alat kesehatan yang memenuhi syarat (Persen)	%		30	32.181.200	32.181.200			6.150.000	19,11
	Persentase Sarana kefarmasian dan alat kesehatan yang memenuhi syarat (Persen)	%		90			100	111,11		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase SPM yang mencapai target	%		83	52.457.840.8 08		80,59	97,10		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Tahun 2021						
				RPJMD/Renstra		APBD	Kinerja		Keuangan	
				Target	Rp. (Juta)	Rp.	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Tingkat Capaian Keuangan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase SPM yang mencapai target	%	71,43	73,81	7.478.712.574		81,82	110,8521881		
	Persentase Capaian elemen akreditasi sesuai standar	%	80	80	-		80	100		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase SPM yang mencapai target	%	70,00	83,00	36.663.725.000		80,59	97,10		
Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Persentase Balita Stunting	%	25,50	31,49	1.228.024.250	63.999.000	19,23	138,93	62.200.000	97,19
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase balita Wasting	%	14,41	12,41	-		5,59	45,04		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Germas (Persen)	%		50	1.228.024.250	63.999.000	60	120,00	62.200.000	97,19
Tujuan 2: Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Pendidikan	Point	61,68	62,39	0,00		63,21	101,32		
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,57	13,68	553.283.712.177	585.905.420.608	13,9	101,61	518.513.862.713	88,50
	Rata rata Lama Sekolah	Tahun	7,27	7,01	0,00		7,38	105,28		
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	%		99,15	473.402.998.477	481.803.279.988	106,63	107,54	402.518.724.746	83,54
	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%		93,4	-		96,65	103,48		
	Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	%		96,68	-			0,00		
	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	%		69,4	-		85,57	123,30		
	Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah	%		1,01	-		1,01	100,00		
	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	%		1:8	-		1:11	104,41		
	Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB,	%		1:14	-		1:5	80		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Tahun 2021						
				RPJMD/Renstra		APBD	Kinerja		Keuangan	
				Target	Rp. (Juta)	Rp.	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Tingkat Capaian Keuangan
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pengembangan Kurikulum	%		100	567.849.300	148.351.200			120.573.900	81,28
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru SMA/SMALB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	%		100	66.960.761.3 00	78.443.059.1 00			77.945.752.70 0	99,37
	Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	%		99,55	-					
	Persentase Kepala Sekolah bersertifikat	%		70	-					
	Persentase Pengawas Sekolah bersertifikat	%		50	-					
	Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG)			5,5	-					
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Pengendalian Perizinan Pendidikan	%		100	60.769.000	30.898.000			20.531.000	66,45
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase bahasa dan sastra yang dikembangkan	%		100	200.000.000	113.371.900	33,33	33,33	107.375.000	94,71
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Presentase Pembinaan Pemuda Berprestasi	%		100	3.245.457.00 0	2.126.595.77 0			1.994.608.977	93,79
	Persentase Pemuda Peserta Pelatihan Yang Bersertifikat	%		100	-					
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Presentase Pembinaan Atlet Berprestasi	%		100	8.845.877.10 0	23.239.864.6 50			35.806.296.39 0	154,07
Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan										
Tujuan 1: Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Point	64,56	67,98			69,89	102,81		
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Point	40,23	42,83	1.809.772.59 9	5.500.731.29 9	45,10	105,30	5.192.072.259	94,39
	Indeks Kualitas Udara	Point	87,40	87,53	-	-	88,52	101,13		
	Indeks Kualitas Air Laut	Point	-	70,29	-	-	80,22	114,13		
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	%		51,52	318.975.200	273.975.200	45,45	88,23	258.541.125	94,37
	Persentase dokumen kajian lingkungan hidup yang telah diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan	%		100,00		273.975.200	100,00	100,00	258.541.125	94,37

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Tahun 2021						
				RPJMD/Renstra		APBD	Kinerja		Keuangan	
				Target	Rp. (Juta)	Rp.	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Tingkat Capaian Keuangan
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemaran dan kerusakannya	lokasi		10	882.411.299	3.186.818.79 9	10	100,00	2.997.200.202	94,05
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan taman kehati Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa	lokasi		1	23.583.400	23.583.400	-		23.507.400	99,68
	Persentase taman kehati yang terkelola	%		100	23.583.400	23.583.400	0	0,00	23.507.400	99,68
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah unit usaha yang dikendalikan pengelolaan B3 dan limbah B3 nya	unit		210	0	23.083.400			22.843.091	98,96
	Persentase Unit Usaha Penghasil Limbah B3 yang tertib aturan	%		80	0		93,33	116,66		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan	usaha/ kegiatan		20	188.369.500	1.142.444.50 0			1.082.404.621	94,74
	Persentase pelaku usaha yang menindaklanjuti hasil pengawasan ketaatan ijin lingkungan			100	-		44,23	44,23		
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas sekolah peduli lingkungan	%		10	196.834.200	196.834.200	3,7	37,00	195.605.980	99,38
	Persentase sekolah yang mampu memenuhi syarat adiwijaya tingkat nasional	%		10	196.834.200	196.834.200	3,75	37,50	195.605.980	99,38
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas kelompok masyarakat	kelompo k		0	-					
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Pengadu an		20	199.599.000	159.599.000	18	90,00	134.315.335	84,16
	Persentase pengaduan yang terselesaikan	%		100	-		100	100,00		
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	65,67	67,70	25.882.707.4 26	23.040.479.3 16	65,59	96,88	21.577.613.53 0	93,65

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Tahun 2021						
				RPJMD/Renstra		APBD	Kinerja		Keuangan	
				Target	Rp. (Juta)	Rp.	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Tingkat Capaian Keuangan
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	%		67	19.206.000.6 06	16.301.618.3 06	39,45	59,11	15.207.712.73 9	93,29
	Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola	%		10,00	-		8,67	86,70		
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi	ha		30.503	884.905.820	786.436.310	35.002	114,75	728.461.375	92,63
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%		4,95	661.428.500	2.224.282.70 0	13,29	268,44	2.068.611.166	93,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS prioritas	DAS		8	4.449.374.50 0	3.430.124.50 0	5,00	62,50	3.303.514.393	96,31
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	88	89,07	680.998.000	298.017.500	0,00	0,00	269.313.857	90,37
					-					
Tujuan 1 : Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan	Neraca pengelolaan sampah (%)	%	41,71	70,00	0,00		49,02	70,03		
Sasaran 2: Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	%	34,91	50,00	0,00		39,68	79,36		
	Persentase Pengurangan Sampah	%	35,91	20,00	4823290800, 00	8.098.129.45 0	9,34	46,70	6.982.656.139	86,23
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	%		70	4.823.290.80 0	8.098.129.45 0	49,02	70,03	6.982.656.139	86,23
Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi										
Tujuan 1: Terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas	Indeks Daya Beli (Point)	%	72,03	73,80			71,27	96,57		
Sasaran 1: Meningkatnya Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	10023,7 9	13362,0 0	2.591.059.90 0	1.037.973.90 0	14879,27	111,36	998.198.239	96,17
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor	Persen		3	493.277.000	204.909.000			196.304.333	95,80
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Cakupan Promosi Penanaman Modal	Persen		40	714.948.000	55.229.700	72,00	180,00	54.859.700	99,33
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Capaian Layanan Perizinan dan Non Perizinan	Persen		87	531.292.100	155.322.600			149.232.306	96,08
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN	Rasio Realisasi Investasi dengan Target Daerah	Persen		50	735.092.800	598.712.600			577.341.200	96,43

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Tahun 2021						
				RPJMD/Renstra		APBD	Kinerja		Keuangan	
				Target	Rp. (Juta)	Rp.	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Tingkat Capaian Keuangan
PENANAMAN MODAL										
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Cakupan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi	Persen		100	116.450.000	23.800.000			20.460.700	85,97
Sasaran 2: Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	33,29	29,01	203.142.648.467	227.520.452.936	43,44	149,74	170.240.593.696	74,82
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pertumbuhan Populasi Ternak	%		9	44.457.563.187	81.116.562.000	6	66,67	61.620.533.200	75,97
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Produksi Hasil Ternak yang dipasarkan	%		100	560.650.200	121.031.840.302	76	76,00	88.205.789.350	72,88
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PERSENTASE PENURUNAN TERNAK YANG TERINFEKSI PHMS	%		< 1	2.778.593.340	740.088.034	0,06	100,00	436.744.550	59,01
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Ternak Berbasis Korporasi	%		100	419.833.040	5.343.477.400	83	83,00	3.996.991.669	74,80
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitasi Sarana Pertanian	%		11,51	20.209.054.200		0	0,00		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian	%	100	34	104.378.790.100		58	170,59		
	Pengembangan industrialisasi pertanian	Unit/paket	1	2	-		2	100,00		
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Pertanaman Yang Aman dari serangan OPT dan DPI	%	95	95,5	360.656.500	360.656.500	96,99	101,56	360.656.500	100,00
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang meningkat skor kelas kelompok	%		5	5.431.885.000		10	200,00		
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola	%		10	-		8,672	86,72		
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Luas Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	%	2,06	8,53	4.867.861.900	5.154.706.000	101,33	1187,92	4.452.003.267	86,37
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	229.794	241.843	6.336.155.300	6.220.179.000	239.954	99,22	4.843.194.546	77,86
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1.140.552	1.195.104	3.022.814.500	2.450.315.700	935.522	78,28	2.203.712.434	89,94

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Tahun 2021						
				RPJMD/Renstra		APBD	Kinerja		Keuangan	
				Target	Rp. (Juta)	Rp.	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Tingkat Capaian Keuangan
PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang- undangan	%	70,00	99,91	4.851.624.00 0	4.822.624.00 0		0,00	3.858.685.280	80,01
	Persentase penurunan pelanggaran tindak pidana sektor kelautan dan perikanan			10	4.851.624.00 0		22	220,00		
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi olahan hasil perikanan	Ton	0,55	213130	615.543.200	280.004.000	214698	100,74	262.282.900	93,67
Sasaran 3: Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan Sosial dan Kesehatan (%)	%	100,00	100,00	30.172.957.4 10	28.396.264.3 90	100,00	100,00	23.004.541.45 2	81,01
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	%		75	-		99,33	132,44		
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase PMB (pekerja migran bermasalah) dan Korban Tindak Kekerasan tertangani	%		100	764.118.500	978.877.500			793.239.660	81,04
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	%		2,5	17.317.366.8 10	13.144.064.1 90			11.342.210.71 7	86,29
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%		100	12.091.472.1 00	14.273.322.7 00			10.869.091.07 5	76,15
Sasaran 4: Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	85,30	86,20	4.629.826.68 0	3.041.586.39 9	90,40	104,87	2.965.101.148	97,49
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Lumbung Pangan yang termanfaatkan	%		71,97	215.000.000	7.515.000	89,30	124,08	6.410.000	85,30
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Pasokan Pangan Pokok Strategis	%	2331,4	100	3.517.365.78 0	2.578.113.90 0	100	100,00	2.537.054.635	98,41
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishmen t/PoU)	%		5,77	358.435.000	252.757.000	2,97	51,47	232.574.582	92,02
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	%		80,00	539.025.900	203.200.499	100,00	125,00	189.061.931	93,04

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Tahun 2021						
				RPJMD/Renstra		APBD	Kinerja		Keuangan	
				Target	Rp. (Juta)	Rp.	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Tingkat Capaian Keuangan
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Cakupan Air Minum	%	72,59	76,48	2.936.368.000	3.123.387.600	78,76	102,98	2.823.737.600	90,41
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan air minum	%	74,69	76,48	2.936.368.000	3.123.387.600	78,76	102,98	2.823.737.600	90,41
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	78,80	80,10	256.812.896.004	309.475.917.154	87,78	109,59	229.177.627.423	74,05
PROGRAM PENUHUPAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kualitas lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar	%		75,00	0		74,50	99,33		
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Luas kawasan permukiman yang berkualitas	Ha			256.812.896.004	309.475.917.154			229.177.627.423	74,05
	Luasan Prasarana dalam kondisi baik	Ha		85	-		95,31	112,13		
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Rasio Elektrifikasi	%	99,55	99,77	2.108.878.220	1.339.199.980	99,98	100,21	1.087.629.900	81,21
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Prosentase Energi Terbarukan Dalam Pembangkit Listrik	%		5,96	557.222.820	128.544.580	6,70	112,42	114.408.500	89,00
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	%	99,55	99,77	1.551.655.400	1.210.655.400	99,98	100,21	973.221.400	80,39
	Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (Rumah Tangga)			800	-		700	87,50		
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	56,35	62,65	1.943.219.300	1.011.015.400	63,47	101,31	422.188.100	41,76
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah terdampak bencana dan direlokasi yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi	%		100	1.943.219.300	1.011.015.400	63,47	63,47	422.188.100	41,76
	Rumah tangga menempati hunian layak	%		62,65	-		63,57	64,34		
Sasaran 6: Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	Inflasi	%	1,87	3,0 - 4,0	16.519.587.900	9.759.303.500	2,12	129,33	9.006.031.912	92,28
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Cakupan Pengawas an Legalitas/ Perizinan Bahan Berbahaya, Minuman Beralkohol dan Barang Pokok Penting	%		60	280.000.000	104.508.200	60	100,00	86.148.330	82,43
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	%		4	1.658.499.800	1.771.971.200	3,88	97,00	1.643.883.214	92,77

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Tahun 2021						
				RPJMD/Renstra		APBD	Kinerja		Keuangan	
				Target	Rp. (Juta)	Rp.	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Tingkat Capaian Keuangan
DAN BARANG PENTING										
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Tambang	%		1	1.303.456.90 0	513.793.200	1,93	193,00	459.172.518	89,37
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan Penyelesaian Sengketa	%		80	1.253.499.60 0	570.554.300	81	101,25	519.199.900	91,00
PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemasaran Kelompok UKM	%		100	12.024.131.6 00	6.798.476.60 0	20	20,00	6.297.627.950	92,63
Sasaran 7: Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup	Pengeluaran per kapita (Rp.000)	Rp.000	10640,0 0	11273,0 2	3.703.875.00 0	4.566.571.20 0	10377,00	92,05	1.056.085.326	23,13
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan Fasilitasi Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	%		100	3.703.875.00 0	4.566.571.20 0	100	100,00	1.056.085.326	23,13
Tujuan 2: Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan	Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) dalam PDRB (%)	%	-0,08	1,50	-		1,35	90,00		
Sasaran 1: Meningkatnya daya saing pariwisata	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) (Rp. Miliar)	Rp. Milyar	117,21	122,71	8.460.169.70 2	7.890.209.10 0	15,20	12,39	6.404.672.181	81,17
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase desa wisata yang dikembangkan	%		65,66	4.992.741.80 2	4.008.091.88 0			2.786.331.833	69,52
	Persentase Geosite yang tertata	%		37,5	-					
	Jumlah Daya Tarik Destinasi Pariwisata Minimal Berkembang			20			22	110,00		
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Efektifitas promosi di dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan	orang		4.650.0 00	2.240.149.90 0	2.929.861.70 0			2.833.201.177	96,70
	Jumlah Kunjungan Wisatawan	orang		1.000.0 00			964.036	96,40		
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase HaKI yang telah memberikan kontribusi dalam pertambahan nilai ekonomi kreatif	%		30,21	164.700.000	374.799.900	30,43	100,72	316.988.266	84,58
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM penunjang layanan pariwisata yang memenuhi standar	%		60	1.062.578.00 0	577.455.620			468.150.905	81,07

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Tahun 2021						
				RPJMD/Renstra		APBD	Kinerja		Keuangan	
				Target	Rp. (Juta)	Rp.	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Tingkat Capaian Keuangan
	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Berkompeten			60			60,5	100,83		
Tujuan 3: Terwujudnya perindustrian yang unggul	Pertumbuhan Industri (%)	%	4,57	6,50	-		6,75	103,85		
Sasaran 1: Meningkatnya daya saing industri	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan (Rp. Miliar)	Rp. Milyar	164,96	166,39	35.057.051.7 11	19.046.504.7 52	94,66	56,89	14.220.121.03 1	74,66
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Industri Provinsi	%		100	27.070.135.8 11	13.171.036.4 82			9.116.274.410	69,21
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang Meningkatkan dari Kecil ke Menengah	%		2,69	798.525.000	622.904.000			534.281.452	85,77
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Cakupan Database IKM Se-NTB dalam Sistem Informasi Industri Nasional	%		1	540.498.000	419.309.000			202.144.334	48,21
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Proporsi usaha kecil yang diperkuat menjadi wirausaha	%		5,99	1.280.297.50 0	1.232.568.60 0			940.146.158	76,28
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Proporsi usaha kecil yang Ditingkatkan manajemen dan kapasitas usahanya	%		50,32	2.122.138.40 0	1.474.090.90 0			1.432.665.700	97,19
	Jumlah SDM pengelola koperasi dan pelaku UKM yang dilatih	orang		849,00						849,00
	Jumlah SDM pengelola koperasi dan pelaku UKM yang dibina	orang		849,00						849,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pembinaan Pemuda Berprestasi	%		100	3.245.457.00 0	2.126.595.77 0			1.994.608.977	93,79
	Persentase Pemuda Peserta Pelatihan Yang Bersertifikat	%		100	-					
Sasaran 2: Menurunnya pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,42	3,30	3.135.528.03 0	2.122.967.73 0	3,01	108,79	1.859.138.500	87,57
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi	%		20	829.654.400	464.055.900	16,77	83,85	340.123.600	73,29
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	%		91,74	991.936.430	696.946.230	46,15	50,31	614.163.200	88,12
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang memiliki perangkat	%		21	299.995.600	192.995.600			186.002.400	96,38

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Tahun 2021						
				RPJMD/Renstra		APBD	Kinerja		Keuangan	
				Target	Rp. (Juta)	Rp.	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Tingkat Capaian Keuangan
	hubungan industrial									
	Persentase perusahaan yang melaksanakan Peraturan Perusahaan			21	299.995.600		15,53	73,95		
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3	%		21	1.013.941.600	768.970.000	21,49	102,33	718.849.300	93,48
Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan										
Tujuan 1: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani	Indeks Kriminalitas	Point	12,71	14,85			10,67	128,15		
Sasaran 1: Meningkatnya Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat	Persentase penurunan konflik sosial	%	46,15	16,67	100.539.460.100	94.019.783.800	25,00	149,97	86.435.935.505	91,93
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pembinaan ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa pada daerah rawan konflik	%	20	10	457.500.000	145.550.000	10	100	142.880.000	98,17
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Cakupan mediasi potensi konflik sosial pada daerah rawan konflik	%	5,83	10	3.328.089.000	4.692.861.000	18,86	188,6	4.276.063.000	91,12
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kesejahteraan Rakyat dari Segi Mental Spiritual, Kebutuhan Dasar dan Non Kebutuhan Dasar	%		100	87.426.891.700	81.039.126.600	100	100	74.058.855.710	91,39
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Adat Aktif	%		60	6.798.099.800	6.012.392.100	77,51	129,18	5.981.725.595	99,49
	Persentase Bumdes Berprestasi	%		14,43	-		49,55	343,38		
	Persentase Pokja Posyandu aktif	%		60	-		79,22	132,03		
	Persentase Posyantek yang aktif	%		47,86	-		57,26	119,64		
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	%		63,64	1.975.050.900	1.859.641.000			1.746.748.100	93,93
PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	%		100	389.516.700	166.023.100	70	70,00	125.642.600	75,68
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan pembinaan sejarah	%		100	164.312.000	104.190.000			104.020.500	99,84

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Tahun 2021						
				RPJMD/Renstra		APBD	Kinerja		Keuangan	
				Target	Rp. (Juta)	Rp.	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Tingkat Capaian Keuangan
Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas & Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	4,88	5,41	5.305.567.70 0	3.942.573.40 0	31,21	576,89	3.433.918.812	87,10
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	100,00	100,00	2.864.180.60 0	2.630.701.70 0	100,00	100,00	2.165.979.550	82,33
	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	100,00	100,00	-		100,00	100,00		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba)	%	17,24	51,72	730.272.000	424.760.000	41,67	80,57	418.098.100	98,43
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi yang terbentuk	%		100	1.711.115.10 0	887.111.700	100	100,00	849.841.162	95,80
	Persentase Produk Hukum Daerah Kab./Kota yang Terfasilitasi	%		100	-		100	100,00		
	Persentase Produk Hukum Daerah yang terevaluasi	%		100	-		100	100,00		
	Persentase Produk Hukum yang Tersosialisasi kepada masyarakat	%		100	-		100	100,00		
	Persentase MoU dan perjanjian kerjasama yang tersusun	%		100	-		100	100,00		
	Persentase Penanganan Masalah Hukum Litigasi	%		100	-		100	100,00		
	Persentase Penanganan Masalah Hukum Non Litigasi dan HAM	%		100	-		100	100,00		
Tujuan 1: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani	Partisipasi Politik Masyarakat (%)	%	82,80	83,74	0,00		0,00	0,00		
Sasaran 3: Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	0,60	0,80	5.142.453.00 0	4.592.706.00 0	0,61	76,25	4.592.294.700	99,99
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	50	80	4.653.634.00 0	4.168.341.00 0	100	125	4.168.299.700	100,00

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Tahun 2021						
				RPJMD/Renstra		APBD	Kinerja		Keuangan	
				Target	Rp. (Juta)	Rp.	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Tingkat Capaian Keuangan
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang aktif	%	83,33	79,66	488.819.000	424.365.000	82,08	103,04	423.995.000	99,91
Tujuan 1: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	55,81	59,81	-		52,01	86,95870256		
Sasaran 4: Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	18,60	18,60	-		27,24	146,45		
	Cakupan Kabupaten/ Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/ Kota Layak Anak	%	40,00	60,00	3.868.693.40 0	3.297.268.90 0	50,00	83,33	2.432.079.226	73,76
PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase PD yang menerapkan PPRG	%	13,04	39,13	1.769.040.90 0	1.485.864.20 0	100,00	255,56	1.326.000.000	89,24
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif	%		75,52	805.507.900	791.516.700			522.412.108	66,00
	Persentase lembaga layanan perlindungan perempuan			100,00			90,00	90,00		
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Ketahanan Keluarga	%	4	4	380.653.000	368.163.000	NA	NA	221.313.118	60,11
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dokumen Gender			1	34.997.400	34.997.400	1	100,00	30.397.400	86,86
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak	%	20,00	60	360.562.500	182.267.500			40.627.500	22,29
	Persentase Kabupaten/Kota dengan Peringkat KLA	%		60,00	-		50,00	83,33		
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	%	1,00	68,15	517.931.700	434.460.100	100,00	146,74	291.329.100	67,06
	Cakupan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus			68,15	0		100,00	146,74		
	Persentase lembaga layanan perlindungan anak	%		90	0		90	100		

Sumber : Bappeda NTB, 2021

2.2.2 Realisasi Capaian RPJMD 2019-2023 Sampai Tahun 2021

Dalam RPJMD Provinsi NTB 2019-2023, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja dan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan, telah ditetapkan sebanyak 103 Indikator Kinerja Daerah (IKD) tersebut sampai dengan tahun 2021 dapat dideskripsikan sebagai berikut:

2.2.2.1 Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah. Sebagaimana yang telah ditetapkan RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja utama yang dijadikan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Pada tahun 2021 tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2- 246 Target Pembangunan Berdasarkan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2021
1	Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah	Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana			Point	123.11
				Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Point	0.61
		Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan	Indeks Aksesibilitas			Point	78.56
				Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah	Persentase Kemantapan jalan	%	83.95
					Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	50.04
				Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase konektivitas transportasi publik	%	81.71
2	Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi			Point	B
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini BPK	Status	WTP
				Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	35.41
				Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Kategori	BB (73,01 - 76,00)

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2021
				Meningkatnya Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN	Point	0.68
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	Point	4.23
3	Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah	Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Kesehatan			Point	71.97
				Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	66.78
					Persentase Balita <i>Stunting</i>	%	31.49
		Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Pendidikan			Point	62.39
				Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.68
					Rata rata Lama Sekolah	Tahun	7.01
4	Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan	Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			Point	67.72
				Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Point	42.83
					Indeks Kualitas Udara	Point	87.53
					Indeks Kualitas Air Laut	Point	87.60
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	67.70
			Neraca pengelolaan sampah			%	70.00
				Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	%	50.00
					Persentase Pengurangan Sampah	%	20.00
5	Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi	Terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas	Indeks Daya Beli			Point	73.80
				Meningkatnya Investasi (kerjasama pemerintah dan badan usaha)	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	13,362
				Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	23.52
				Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan	%	100
				Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	86.20
				Terpenuhi pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Cakupan Air Minum	%	76.48
					Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	80.1
					Rasio Elektrifikasi	%	99.77
					Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	62.65
				Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	Inflasi	%	3,0 - 4,0

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2021
		Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan	Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup	Pengeluaran per kapita	Rp.000	11,273
				Meningkatnya daya saing pariwisata	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Rp. Miliar	122.71
		Terwujudnya perindustrian yang unggul	Pertumbuhan Industri			%	1.50
				Meningkatnya daya saing industri	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan	Rp. Miliar	166.39
				Menurunnya pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.30
						%	6.50
6	Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berakhlak dan penegakan hukum yang berkeadilan	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani (Bahagia)	Indeks Kriminalitas			Point	14.85
				Meningkatnya Nilai Sosial Budaya dan Toleransi Masyarakat	Persentase penurunan konflik sosial	%	16.67
				Meningkatnya Kualitas dan Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	5.41
			Partisipasi politik masyarakat			%	83.74
				Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	0.80
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			Point	59.81
				Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	18.60
					Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	%	60

Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2021

Sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Gubernur Nusa Tenggara Barat pada tahun 2021, 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja berdasarkan tabel diatas ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur pada tahun 2021. Adapun tingkat capaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap Misi dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2- 247 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Indikator	Satuan	2021		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAN melalui Nenguatan mitigasi bencana dan Pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah					

No	Indikator	Satuan	2021		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
1	Indeks Kapasitas Daerah	Point	0,61	0,63	103,28
2	Persentase Kemantapan jalan	%	83,95	84,01	100,07
3	Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	50,04	50,88	101,68
4	Persentase konektivitas transportasi publik	%	81,71	88,00	107,70
Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi					
5	Opini BPK	Status	WTP	WTP	100,00
6	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	35,41	35,46	100,14
7	Nilai SAKIP	Kategori	BB	BB	100,00
8	Indeks Profesionalisme ASN	Point	0,68	0,69	100,88
9	Indeks Pelayanan Publik	Point	4,23	3,54	83,69
Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah					
10	Angka Harapan Hidup	Tahun	66,78	66,69	99,87
11	Persentase Balita Stunting	%	31,49	19,23	138,93
12	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,68	13,90	101,61
13	Rata rata Lama Sekolah	Tahun	7,01	7,38	105,28
Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan					
14	Indeks Kualitas Air	Point	42,83	45,10	105,30
15	Indeks Kualitas Udara	Point	87,53	88,52	101,13
16	Indeks Kualitas Air Laut	Point	70,29	80,22	114,13
17	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	67,70	65,59	96,88
18	Persentase Penanganan Sampah	%	50,00	39,68	79,36
19	Persentase Pengurangan Sampah	%	20,00	9,34	46,70
Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi					
20	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Miliar	13.362	14.879	111,36
21	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	23,52	26,40	112,24
22	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan	%	100,00	100,00	100,00
23	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	SKor	86,20	90,40	104,87
24	Cakupan Air Minum	%	76,48	78,76	102,98
25	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	80,10	87,78	109,59
26	Rasio Elektrifikasi	%	99,77	99,98	100,21
27	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	62,65	63,47	101,31
28	Inflasi	%	3,0 - 4,0	2,12	129,33

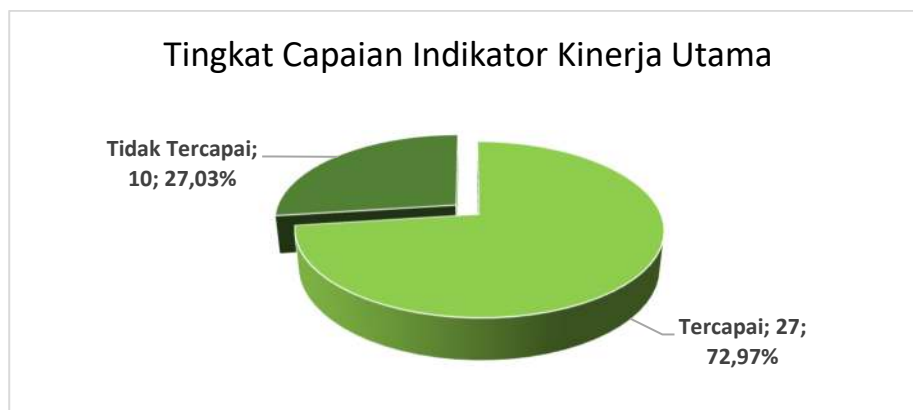
No	Indikator	Satuan	2021		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
29	Pengeluaran per kapita	Rp. 000	11.273,02	10.377,00	92,05
30	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Rp. Miliar	122,71	15,20	12,39
31	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan	Rp. Miliar	166,39	94,66	56,89
32	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,30	3,01	108,79
Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan					
33	Persentase penurunan konflik sosial	%	16,67	25,00	149,97
34	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	5,41	31,21	576,89
35	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	0,80	0,61	76,25
36	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	18,60	27,24	146,45
37	Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	%	60,00	50,00	83,33

Sumber: Kemen-LHK, KemenPAN RB, BPS dan Perangkat Daerah Provinsi NTB

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 37 Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi NTB, terdapat 27 indikator atau 72,97% telah sesuai bahkan melampaui target tahun 2021, sedangkan 10 indikator atau 27,03% belum mencapai target. Beberapa indikator yang sudah sesuai bahkan melampaui target diantaranya adalah Indeks Kapasitas Daerah, Persentase Kemantapan jalan, Persentase Kemantapan Sistem Irigasi, Persentase konektivitas transportasi public, Opini BPK, Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD, Nilai SAKIP, Indeks Profesionalisme ASN, Persentase Balita Stunting, Harapan Lama Sekolah, Rata rata Lama Sekolah, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air Laut, Nilai Realisasi Investasi, Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan, Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi, Cakupan Air Minum, Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak, Rasio Elektrifikasi, Cakupan Rumah Layak Huni (RLH), Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Persentase penurunan konflik sosial, Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah, dan Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan. Sedangkan indikator kinerja yang belum memenuhi target antara lain: Angka Harapan Hidup, Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan, Indeks Kualitas Tutupan Lahan, Persentase Penanganan Sampah, Persentase Pengurangan Sampah, Indeks Pelayanan Publik, Pengeluaran per kapita, Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum), Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan, Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah, Persentase Partisipasi Perempuan dalam

Pembangunan, dan Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak.

Tabel 2- 248 Proporsi tingkat capaian Indikator Kinerja Utama



Sumber: data diolah, Bappeda NTB 2022

2.2.2.2 Indikator Kinerja Daerah

Salah satu parameter keberhasilan pembangunan yang menunjukkan gambaran pencapaian pembangunan Daerah dan sebagai tolok ukur sejauh mana program-program yang digulirkan Pemerintah dapat mencapai sasaran-sasaran atau tujuan pembangunan, dapat diukur melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD). IKD juga sebagai dasar dalam melakukan evaluasi atau menilai keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi NTB dari kondisi awal sampai akhir periode RPJMD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Noor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Indikator Kinerja Daerah meliputi 3 (tiga) aspek kinerja yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; serta aspek daya saing daerah. Sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023, terdapat 103 indikator untuk mendeskripsikan ukuran kinerja daerah yang telah dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) aspek kinerja yaitu :

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat diukur dengan 5 indikator kinerja meliputi indikator Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pertambangan Bijih Logam, Inflasi, Tingkat Kemiskinan, Gini Ratio dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

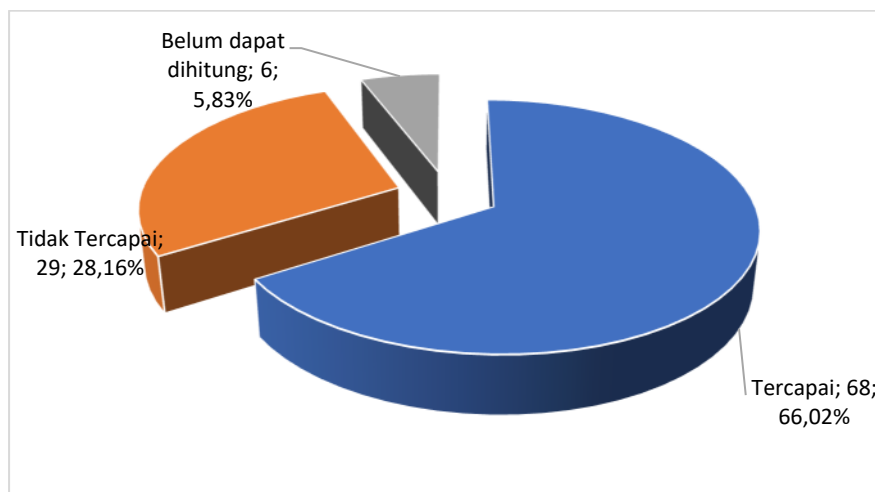
2. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah diukur dengan 7 indikator kinerja meliputi indikator Indeks Kriminalitas, Indeks Aksesibilitas, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana, Indeks Risiko Bencana, Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Pelayanan Publik; dan

3. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum diukur dengan 91 indikator kinerja yang terdiri dari urusan wajib terkait pelayanan dasar sebanyak 21 indikator yang tersebar pada 6 urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib terkait pelayanan dasar sebanyak 32 indikator yang tersebar pada 18 urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan 20 indikator yang tersebar pada 8 urusan pilihan, serta fungsi penunjang urusan sebanyak 18 indikator yang tersebar 7 fungsi penunjang urusan.

Gambar 2- 63 Proporsi tingkat capaian IKD Provinsi NTB



Sumber: data diolah

Capaian terhadap 103 Indikator Kinerja Daerah Pemerintahan Provinsi NTB tahun 2021 secara keseluruhan terdapat 68 indikator atau 66,02 persen tercapai sesuai target bahkan melampaui, 29 indikator belum memenuhi target dan masih terdapat 6 indikator belum tersedia (*Not Available/NA*) karena belum dapat dihitung dan atau menunggu Rilis Resmi dari lembaga terkait. Deskripsi capaian indikator kinerja daerah berdasarkan aspek dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Adapun capaian indikator kinerja daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang disajikan dalam tabel berikut:

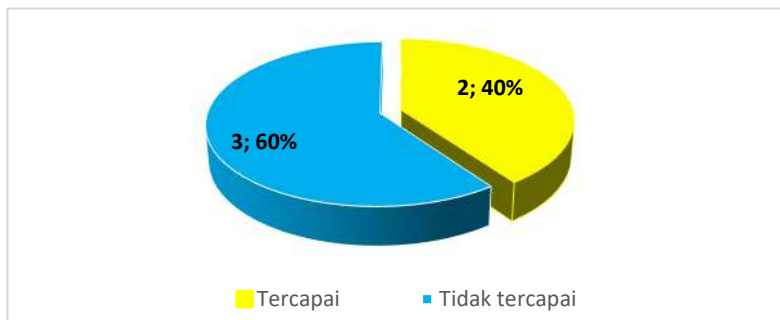
Tabel 2- 249 Capaian Indikator pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1	Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pertambangan Bijih Logam	%	2,5-3,5	4,09	155,81
2	Inflasi	%	3,0 - 4,0	2,12	129,33
3	Tingkat Kemiskinan	%	13,42	13,83	96,94
4	Gini Ratio	Point	0,353	0,384	91,34
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	68,84	68,65	99,72

Sumber : BPS Provinsi NTB, 2021

Dari 5 indikator untuk mengukur aspek kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi NTB sudah semakin membaik yang ditandai dengan pertumbuhan positif mencapai 2,30 persen termasuk tambang dan 4,09 persen tanpa tambang, jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 5,19 persen. Kondisi tersebut disebabkan adanya pandemi global covid-19 sejak tahun 2020 hingga saat ini yang membuat ekonomi global, nasional, dan regional tertekan.

Gambar 2- 64 Capaian Aspek Kesejahteraan Masyarakat



Sumber: Bappeda NTB, 2021 data diolah

Adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berkali-kali di tahun 2021 memberikan dampak terhadap terutama pada sektor perekonomian, seperti tingkat konsumsi masyarakat yang melambat, hal ini dikarenakan pekerja bekerja dari rumah, pusat pembelanjaan tutup, restoran hanya buka untuk pesan antar dan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Pemerintah mengizinkan supermarket, pasar, toko kelontong untuk beroperasi hingga pukul 20.00 WIB. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga mengalami tekanan akibat tidak melakukan kegiatan usaha sehingga terganggunya kemampuan untuk memenuhi kewajiban kredit. Penghasilan yang tidak menentu menyebabkan kesulitan untuk membayar pegawai serta perekonomian rumah tangga. Sektor lain juga yang terdampak adalah industri pariwisata, dimana terdapat sektor yang terkait kepariwisataan seperti akomodasi wisata atau perhotelan, transportasi, dan makan minum. Dengan diterapkannya pembatasan sosial membuat kegiatan masyarakat menjadi sangat terbatas dimulai dari penutupan jalan keluar kota, dilarangnya berkumpul dalam jumlah besar yang menyebabkan banyak calon wisatawan baik itu dalam negeri maupun luar negeri membatalkan kunjungan ke Objek Daya Tarik Wisata (ODTW). Bagi Provinsi NTB, sektor kepariwisataan sangat berperan dalam mengembangkan perekonomian daerah, hal ini terlihat dari angka kunjungan wisatawan dari lebih 3 juta orang sebelum pandemi Covid-19, menurun drastis menjadi dibawah 500 ribu orang di saat pandemi. Begitu juga dengan sektor-sektor lain yang terdampak seperti sektor perdagangan dan industri manufaktur mengalami penurunan hebat akibat meluasnya penularan Covid-19. Melemahnya ekonomi karena kondisi berkepanjangan dan ketidakpastian tentu akan menciptakan kelesuan ekonomi dan bisnis, sehingga berdampak pada perekonomian daerah mengalami kontraksi sebesar 5,19 persen.

Penyelenggaraan *event* internasional Idemitsu Asia *Talent Cup* (IATC) dan *World Superbike* (WSBK) di Sirkuit Mandalika pada tahun 2021, telah memberikan dampak ekonomi di NTB. Hal ini tandai dengan meningkatnya angka kunjungan wisatawan di NTB yang mencapai 100% jika dibandingkan dengan tahun 2020, adanya peningkatan okupansi hotel yang tadinya hanya 15 persen menjadi 95 persen, meningkatnya omzet bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) local, serta adanya penyerapan tenaga kerja dengan merekrut 1.475 tenaga kerja dari NTB, termasuk penduduk dari enam desa penyangga di sekitar Mandalika. Berbagai terobosan juga telah dilakukan pemerintah provinsi NTB untuk pemulihan ekonomi ditengah pandemi covid-19, diantaranya dengan mendorong optimalisasi pengembangan komoditas/produk/jenis usaha unggulan daerah melalui industrialisasi produk unggulan daerah serta mendorong IKM dan UMKM menjadi sektor lokomotif ekonomi daerah melalui pengembangan produk, pengembangan SDM, pengembangan IKM dan UMKM, dan pengembangan Kawasan. Mengembangkan industri pariwisata melalui dengan terus mengembangkan desa wisata. Disamping itu, juga dilakukan peningkatan infrastruktur strategis untuk membangkitkan perekonomian di NTB, diantaranya infrastruktur untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB sebagai sentral rumah sakit rujukan kesehatan bagi masyarakat NTB serta mampu menghadirkan rumah sakit yang memiliki pelayanan standar internasional serta pembangunan infrastruktur jalan yang memiliki potensial terhadap sentral produksi pangan, kawasan industri smelter, kawasan menuju geopark Tambora, kawasan terisolir, potensial ketahanan pangan seperti komoditas kopi dan lain-lain serta kawasan menuju destinasi pariwisata.

2. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah menunjukkan kemampuan suatu daerah menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Aspek daya saing Provinsi NTB diukur menggunakan pendekatan 8 indikator sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

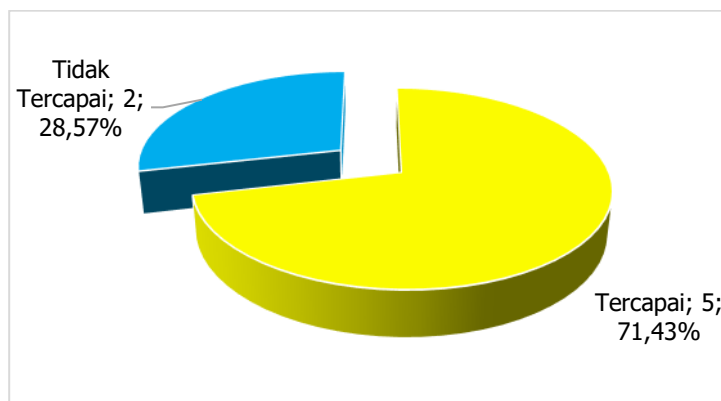
Tabel 2- 250 Capaian Indikator pada Aspek Daya Saing Daerah

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
B	ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1	Indeks Kriminalitas	Point	14,85	10,67	128,15
2	Indeks Aksesibilitas	Point	78,56	78,81	100,32
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Point	67,98	69,89	102,81
4	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana	%	89,03	76,38	85,79
5	Indeks Risiko Bencana	Point	123,11	122,33	100,63
6	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	B	B	100
7	Indeks Pelayanan Publik	Point	4,23	3,54	83,69

Sumber: Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2021

Dari 7 indikator untuk mengukur aspek daya saing daerah, terdapat 5 (lima) indikator tercapai atau memenuhi target yaitu Indeks Kriminalitas, Indeks Aksesabilitas, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Indeks Resiko Bencana dan Indeks Reformasi Birokrasi, sedangkan 2 (dua) indikator yang belum memenuhi target yaitu Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana, dan Indeks Pelayanan Publik.

Gambar 2- 65 Proporsi tingkat capaian Aspek Daya Saing



Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2021

Aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan mewujudkan kondusifitas daerah, menyiapkan infrastruktur daerah yang memadai, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, menyiapkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta mewujudkan pelayanan publik yang paripurna.

Dalam mewujudkan kondusifitas daerah, kondisi keamanan di NTB semakin kondusif, hal ini ditandai dengan semakin menurunnya kasus kriminalitas dari 7.015 kasus pada tahun 2020 menurun menjadi 5.635 kasus pada tahun 2021 atau mengalami penurunan sebanyak 1380 kasus atau 20%. Penurunan kasus kriminalitas berimplikasi pada penurunan indeks kriminalitas dari 13,09 poin pada tahun 2020 menurun menjadi 10,67 poin pada tahun 2021. Menurunnya indeks kriminalitas ini mengindikasikan bahwa NTB semakin kondusif dan menjadi tolok ukur keberhasilan masyarakat bersama aparat yang bergotong-royong menjaga wilayah. Adanya sinergitas antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat (HARKAMTIBMAS) yang mantap. Sebagai wujud keberhasilan itu, bahkan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) menerima Promoter Reward. Penghargaan diberikan atas peran aktif Gubernur NTB dan bersinergi dengan TNI bersama Polda NTB dalam memberikan rasa aman, yang merupakan implementasi penguatan program kapolri dalam mewujudkan pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat (HARKAMTIBMAS) yang mantap.

Dalam menyiapkan infrastruktur daerah yang memadai, pemerintah provinsi NTB terus mendorong untuk meningkatkan kemantapan jalan terutama yang memiliki potensial terhadap sentral produksi pangan, kawasan industri smelter, kawasan menuju

geopark Tambora, kawasan terisolir, potensial ketahanan pangan seperti komoditas kopi dan lain-lain serta kawasan menuju destinasi pariwisata, mewujudkan konektivitas transportasi publik, mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi, membangun perumahan yang layak dan aman, menguatkan sistem irigasi yang mantap untuk meningkatkan produksi pangan, serta meningkatkan aksesibilitas terhadap air minum bagi masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Keberhasilan dalam mewujudkan infrastruktur daerah yang memadai ditandai dengan terus meningkatnya indeks aksesibilitas di NTB 77,77 poin pada tahun 2020 meningkat menjadi 78,81 poin pada tahun 2021 atau meningkat sebesar 1,34%.

Aspek lain sebagai bagian dalam menggambarkan daya saing daerah adalah kualitas lingkungan hidup yang diukur dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks kualitas lingkungan hidup adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan suatu wilayah yang merupakan nilai komposit dari indeks kualitas air, udara, lahan dan air laut. Berdasarkan metode perhitungan yang baru dengan menambah komponen kualitas air laut, IKLH Provinsi NTB pada tahun 2021 mencapai 69,89 poin atau melampaui target sebesar 67,98 poin. Tingginya angka IKLH Provinsi NTB menunjukkan semakin baiknya kualitas kualitas air, udara, lahan dan air laut di Provinsi NTB.

Untuk meningkatkan daya saing daerah, juga perlu didukung oleh birokrasi lebih adaptif, cepat melayani, dan cepat mengambil keputusan dengan melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur. Pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025. Peningkatan kualitas birokrasi dilakukan dengan dua cara, yakni penyederhanaan birokrasi serta digitalisasi birokrasi. Untuk melakukan hal tersebut, tentunya juga perlu didukung oleh peningkatan kualitas aparatur sipil negara sebagai SDM pemerintah.

Salah satu langkah dalam mereformasi birokrasi adalah dengan penyederhanaan birokrasi dengan melakukan penyederhanaan struktur organisasi pada instansi pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan PermenPANRB No. 17/2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan PermenPANRB No. 25/2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Sebagai tindak lanjut penyederhanaan birokrasi, pemerintah provinsi NTB telah mengalihkan pejabat pengawas dan administrator menjadi pejabat fungsional, dimana sebanyak 742 orang pejabat fungsional di lingkup Pemprov NTB, terdiri dari pejabat eselon III pengawas dan eselon IV administrator yang telah dialihkan menjadi pejabat fungsional. Penyederhanaan ini dilakukan untuk menghadirkan sosok ASN yang secara kelembagaan kecil, lincah dan produktif dengan memperbanyak, memperkaya jabatan – jabatan fungsional yang harus diisi oleh ASN – ASN yang kompeten dan profesional kedepannya.

Sementara itu, dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, Kementerian PANRB mendorong penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pembangunan Zona Integritas (ZI). Penerapan akuntabilitas kinerja yang konsisten di instansi daerah mencegah potensi pemborosan dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Disamping itu, Kemajuan teknologi yang begitu cepat juga menuntut birokrasi beradaptasi dengan cepat pula. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus sudah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). SPBE ke depannya akan diterapkan dalam berbagai layanan publik dan administrasi digital pemerintah yang terintegrasi. SPBE juga akan dimanfaatkan dalam transaksi elektronik pada setiap aspek layanan, termasuk penggunaan *big data* pemerintah dan kecerdasan artifisial sebagai bagian dari transformasi digital nasional. Sedangkan dalam meningkatkan pelayanan publik, dilakukan pengukuran kualitas pelayanan publik melalui Indeks Pelayanan Publik (IPP). Untuk provinsi, kualitas pelayanan publik yang dinilai dan dievaluasi adalah DPMPTSP dan Samsat. Sampai dengan tahun 2021, Nilai SAKIP Provinsi NTB telah mencapai level BB, sedangkan indeks SPBE telah mencapai 2,94 poin. Adapun IPP menuju level 3,7 (kategori baik).

Dengan capaian berbagai komponen yang mejadi bagian reformasi birokrasi, maka penilaian keberhasilan Reformasi Birokrasi pada suatu instansi pemerintah diukur melalui suatu indeks yang disebut dengan Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB). Pada tahun 2021, Indeks Reformasi Birokrasi telah mencapai level B.

3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Aspek Pelayanan Umum merupakan bagian dari pelayanan publik baik dalam bentuk barang maupun jasa yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab atau urusan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Terdapat 91 indikator kinerja untuk mengukur pelayanan umum yang terdiri dari urusan wajib terkait pelayanan dasar sebanyak 21 indikator yang tersebar pada 6 urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib terkait pelayanan dasar sebanyak 32 indikator yang tersebar pada 18 urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan 20 indikator yang tersebar pada 8 urusan pilihan, serta fungsi penunjang urusan sebanyak 18 indikator yang tersebar 7 fungsi penunjang urusan. Adapun tingkat capaian indikator-indikator tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2- 251 Capaian Indikator pada Aspek Pelayanan Umum

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
C	ASPEK PELAYANAN UMUM				
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				
1.01	Pendidikan				
1	Indeks Pendidikan	Point	62,39	63,21	101,32
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,68	13,9	101,61

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
3	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,01	7,38	105,28
1.02	Kesehatan				
1	Indeks Kesehatan	Point	71,97	71,83	99,81
2	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	%	77,00	83,22	108,08
3	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	80,10	87,78	109,59
4	Angka Harapan Hidup	Tahun	66,78	66,69	99,87
5	Persentase Balita <i>Stunting</i>	%	31,49	19,23	138,93
6	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan	%	100	100	100
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1	Persentase Kemantapan jalan	%	83,95	84,01	100,07
2	Cakupan Air Minum	%	76,48	78,76	102,98
3	Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	50,04	50,88	101,68
4	Persentase Penyusunan Regulasi Rencana Tata Ruang (RTR)	%	9,09	9,09	100,00
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				
1	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	62,65	63,47	101,31
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				
1	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	5,41	31,21	576,89
2	Tingkat Penanganan Pelanggaran Gangguan Trantibmas	%	100,00	100,00	100,00
3	Tingkat Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	100,00	100,00	100,00
4	Cakupan Desa Tangguh Bencana (434 Desa Rawan Bencana)	%	20,97	51,38	245,04
5	Indeks Kapasitas Daerah	%	0,61	0,63	103,28
1.06	Sosial				
1	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial	%	100,00	100,00	100,00
2	Persentase PMKS yang tertangani	%	4,87	13,21	271,25
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				
2.01	Tenaga Kerja				
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,30	3,01	108,79
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	59,81	52,01	86,96
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Point	90,46	90,5	100,04
3	Rata-rata Usia Perkawinan Pertama Perempuan	Tahun	20,70	20,20	97,58

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
4	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	18,60	27,24	146,45
5	Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	%	60,00	50,00	83,33
2.03	Pangan				
1	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	86,20	90,40	104,87
2.04	Lingkungan Hidup				
1	Indeks Kualitas Air	Point	42,83	45,10	105,30
2	Indeks Kualitas Udara	Point	87,53	88,52	101,13
3	Indeks Kualitas Air Laut	Point	70,29	80,22	114,13
4	Neraca Pengelolaan Sampah (%)	%	70,00	49,02	70,03
5	Persentase Penanganan Sampah	%	50,00	39,68	79,36
6	Persentase Pengurangan Sampah	%	20,00	9,34	46,7
2.05	Pertanahan				
1	Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi	%	100,00	100,00	100
2.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
1	Rasio Penduduk BerKTP Persatuan Penduduk	rasio	0,84	1,08	128,57
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa				
1	Cakupan desa pesisir, dan lingkaran hutan yang diberdayakan	%	29,01	43,44	149,74
2	Persentase Desa dengan status berkembang, maju, dan mandiri	%	86,00	92,74	107,84
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
1	Pertumbuhan Penduduk	%	1,04	1,39	66,35
2.09	Perhubungan				
1	Persentase konektivitas transportasi publik	%	81,71	88	107,70
2.10	Komunikasi dan Informatika				
1	Kualifikasi Layanan Perangkat Daerah	Kualifikasi	Interaktif	Transaksi	101,38
2	Persentase Perangkat Daerah yang Informatif	%	50	59,09	118,18
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
1	Persentase Koperasi Aktif	%	65,00	76,12	117,11
2.12	Penanaman Modal				
1	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	13.362	14.879,3	111,36
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga				
1	Prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional	Medali	35	41	117,14
2	Prestasi Pemuda di tingkat nasional dan internasional	orang	15	6	40,00
3	Proporsi wirasusaha muda	%	68,18	68,07	99,84
2.14	Statistik				
1	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Data yang Berkualitas	%	30,00	98,74	329,13

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
2.15	Persandian				
1	Indeks Kematangan Keamanan Informasi	Level	II+	II	81,6
2.16	Kebudayaan				
1	Cakupan Cagar Budaya yang direvitalisasi	%	24,35	20,00	82,14
2.17	Perpustakaan				
1	Cakupan Komunitas Literasi yang terbina (59 Komunitas)	%	100,00	100,00	100,00
1	Persentase Digitalisasi Koleksi Deposit (7527 Judul)	%	31,89	32,76	102,74
2.18	Kearsipan				
1	Persentase Arsip yang Terselamatkan	%	66,67	67,45	101,18
3	URUSAN PILIHAN				
3.01	Kelautan dan Perikanan				
1	Kontribusi sektor Perikanan terhadap PDRB	%	4,75	4,78	100,62
2	Produksi Perikanan	Ton	1.436.947	1.175.295	81,79
3	Nilai Tukar Nelayan	%	>110	116,58	105,98
3.02	Pariwisata				
1	Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	%	1,50	1,35	90,00
2	Persentase Desa Wisata yang dikembangkan	%	60,00	67,68	112,80
3	Rata-rata Lama Menginap	hari	3,10	2,23	71,94
4	Angka kunjungan wisatawan	orang	4.650.000	964.036	20,73
5	Persentase Geosites yang Tertata	%	25,00	100,00	400,00
6	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Rp. Milyar	122,71	15,20	12,39
3.03	Pertanian				
1	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	23,52	26,40	112,24
2	Nilai Tukar Petani	Point	>105	105,73	100,70
3.04	Kehutanan				
1	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	67,70	65,59	96,88
2	Cakupan Luas Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Lainnya	%	10,08	7,29	72,32
3.05	Energi dan Sumberdaya Mineral				
1	Rasio Elektrifikasi	%	99,77	99,98	100,21
3.06	Perdagangan				
1	Indeks Daya Beli	Point	73,80	71,27	96,57
2	Pengeluaran per kapita	Rp.000	11.273	10.377	92,05
3.07	Perindustrian				
1	Pertumbuhan Industri	%	6,50	6,75	103,85
2	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan	Rp. Milyar	166,39	94,66	56,89

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
3	Persentase Industri kecil yang meningkat menjadi industri menengah	%	2,69	NA	NA
3.08	Transmigrasi				
1	Cakupan Penempatan Transmigran	%	90	97,57	108,41
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
4.01	Administrasi Pemerintahan				
1	Ranking Nasional LPPD	Ranking	7	NA	NA
2	Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berkualitas	%	100,00	100,00	100,00
3	Persentase Fasilitasi Pelayanan Keagamaan	%	100,00	100,00	100,00
4	Persentase unit pelayanan publik perangkat daerah yang menerapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	%	28,00	NA	NA
5	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	Level	3	3	100,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
5.01	Perencanaan				
1	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan	%	100,00	100,00	100
5.02	Kuangan				
1	Opini BPK	Status	WTP	WTP	100
2	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Point	0,50	0,51	101,00
3	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	35,41	35,46	100,14
5.03	Kepegawaian				
1	Indeks Profesionalisme ASN	Point	0,68	0,69	100,88
5.04	Pendidikan dan Pelatihan				
1	Indeks Profesionalisme ASN Dimensi Kompetensi	Point	0,25	0,25	100,00
5.05	Penelitian dan Pengembangan				
1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (lokus NTB)	%	24,00	100,00	416,67
5.06	Penghubung				
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
6.01	Pengawasan				
1	Nilai SAKIP	Kategori	BB	BB	100,00
7	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
7.01	Kesatuan Bangsa dan Politik				
1	Cakupan mediator bale mediasi yang dilatih	%	4,46	NA	NA
2	Partisipasi Politik Masyarakat	%	83,74	NA	NA
3	Cakupan Komunitas "Sekolah Perjumpaan" yang terbentuk dalam rangka Pendidikan Karakter	%	30,00	NA	NA
4	Persentase penurunan konflik sosial	%	16,67	25,00	149,97

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
5	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	0,80	0,61	76,25

Sumber: BPS Provinsi NTB, OPD Penanggungjawab Indikator, 2021

Ket. NA= Not Available

Dari 91 indikator untuk mengukur aspek pelayanan umum, terdapat 61 indikator (67,03%) tercapai atau memenuhi target bahkan melampaui target, sedangkan 24 indikator (24,37%) belum memenuhi target, namun 8 indikator diantaranya dengan tingkat capaiannya sangat tinggi mencapai diatas 90%. Dan masih terdapat 8 indikator belum tersedia (*Not Available*) karena belum dapat dihitung atau menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Beberapa indikator yang tercapai antara lain: Harapan Lama Sekolah, Kualifikasi Layanan Perangkat Daerah, Indeks Pendidikan, Cakupan Rumah Layak Huni (RLH), Persentase Arsip yang Terselamatkan, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Profesionalisme ASN, Nilai Tukar Petani, Kontribusi sektor Perikanan terhadap PDRB, Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah, Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (lokus NTB), Persentase Geosites yang Tertata, Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Data yang Berkualitas, Persentase PMKS yang tertangani, Cakupan Desa Tangguh Bencana (434 Desa Rawan Bencana), Persentase penurunan konflik social, Cakupan desa pesisir, dan lingkaran hutan yang diberdayakan, Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan, Persentase Balita Stunting, Rasio Penduduk BerKTP Persatuan Penduduk, Persentase Perangkat Daerah yang Informatif, Prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional, Persentase Koperasi Aktif, Indeks Kualitas Air Laut, Persentase Desa Wisata yang dikembangkan, Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan, Nilai Realisasi Investasi, Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak, Tingkat Pengangguran Terbuka, Cakupan Penempatan Transmigran, Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional, Persentase Desa dengan status berkembang, maju, dan mandiri, Persentase konektivitas transportasi public, Nilai Tukar Nelayan, Indeks Kualitas Air, Rata-rata Lama Sekolah, Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi, Pertumbuhan Industri, Indeks Kapasitas Daerah, Cakupan Air Minum, Persentase Digitalisasi Koleksi Deposit (7527 Judul), Persentase Kemantapan Sistem Irigasi, Rasio Elektrifikasi, Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD, Persentase Kemantapan jalan, Indeks Pembangunan Gender (IPG), Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan, Persentase Penyusunan Regulasi Rencana Tata Ruang (RTR), Tingkat Penanganan Pelanggaran Gangguan Trantibmas, Tingkat Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah, Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan social, Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi, Cakupan Komunitas Literasi yang terbina (59 Komunitas), Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berkualitas, Persentase Fasilitas Pelayanan Keagamaan, Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan, Opini BPK, Indeks Profesionalisme ASN Dimensi Kompetensi, dan Nilai SAKIP

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari sumber daya yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan gambaran kondisi umum daerah dan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya maka dapat dirumuskan beberapa hal yang menjadi permasalahan pembangunan di NTB sebagai berikut :

2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Tahun 2021 dapat diketahui bahwa terdapat 26 sasaran pembangunan daerah, namun masih terdapat 9 sasaran dengan 10 indikator yang belum tercapai. Adapun permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang diindikasikan dengan indikator sasaran indeks pelayanan publik yang baru mencapai 3,54 point dari target 4,23 point pada tahun 2021;
2. Belum maksimalnya peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat yang diindikasikan dengan angka harapan hidup sampai dengan tahun 2021 masih diangka 66,69 tahun dari target 66,78 tahun;
3. Belum maksimalnya peningkatan kualitas, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang diindikasikan dengan indeks kualitas tutupan lahan yang baru mencapai 66,69 point dari target 67,70 point pada tahun 2021;
4. Masih rendahnya tingkat pengelolaan persampahan yang diindikasikan dengan indikator persentase penanganan sampah yang baru mencapai 39,68% dan presentase persentase pengurangan sampah sebesar 9,34% dari target masing-masing indikator 50% dan 20% pada tahun 2021;
5. Belum maksimalnya peningkatan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan indikator pengeluaran per kapita yang baru mencapai Rp. 10.377 dari target Rp. 11,273 pada tahun 2021;
6. Masih rendahnya tingkat daya saing masyarakat dengan indikator Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) yang hanya mencapai Rp. 15.20 Milliar dari target Rp. 122,71 Milliar pada tahun 2021;
7. Masih rendahnya tingkat daya saing industri yang diindikasikan dengan indikator Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan yang baru mencapai Rp. 94,66 Milliar dari target Rp. 166,39 Milliar pada tahun 2021;
8. Masih rendahnya tingkat kesadaran politik masyarakat yang diindikasikan dengan indikator Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik yang baru mencapai 0,61% dari target 0,80% pada tahun 2021; dan
9. Masih rendahnya tingkat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diindikasikan dengan indikator cakupan Kabupaten/Kota yang mendapat Predikat

Kabupaten/Kota Layak Anak yang baru mencapai 50% dari target 60 % pada tahun 2021.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan disetiap urusan aspek pelayanan umum yang teridentifikasi pada masing-masing organisasi perangkat daerah. Adapun permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2- 252 Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

No	Perangkat Daerah	Permasalahan
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB	Rendahnya Harapan Lama Sekolah yang baru mencapai 13,9 tahun. Meskipun angka capaian sudah melampaui target dan di atas rata-rata nasional 13,08 tahun, namun harus ditingkatkan agar rata-rata anak usia 7 tahun keatas memiliki peluang untuk bersekolah hingga Strata I untuk meningkatkan daya saing SDM.
		Rendahnya Rata-rata Lama Sekolah di NTB (7,38 Tahun) yang masih dibawah rata-rata nasional (8,54 Tahun)
		Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Belum maksimal. Hal ini diindikasikan dengan kondisi ketersediaan Ruang Kelas pendidikan tingkat menengah masih rasion 1:0,92, artinya masih ada ruang kelas yg digunakan oleh lebih dari satu rombongan belajar dengan cara bergantian (kelas pagi / kelas siang)
		Kualitas dan Kuantitas SDM tenaga pendidik masih kurang yang diindikasikan dengan rata-rata hasil UKG Prov,NTB masih pada angka 52,58 dibawah standar 55
2.	Dinas Kesehatan Provinsi NTB	Usia Harapan Hidup (UHH) masih rendah pada usia 66,69 tahun di bawah UHH nasional dengan usia 73,5 Tahun
		NTB belum <i>Universal Health Coverage</i> , bahkan capaian pada tahun ini (83,22%) menurun dari tahun sebelumnya (83,48%)
		Masih Tingginya angka stunting. Meskipun prevalensi NTB (19,23%) sudah berada dibawah Nasional 2,4% maupun standar WHO 20%, masih ada 3 Kabupaten yang masih beresiko diatas 20%
		Belum Optimalnya Proporsi Rumah Tangga ke Sanitasi Layak
		Pencapaian Standar Pelayanan Minimal untuk layanan dasar masih rendah yang ditandai dengan capaian SPM kesehatan baik itu RSUD Prov.NTB, RSJ Mutiara Sukmda dan RSUP Manambai masih dibawah 90% dengan skor masing masing 80,59%,81%, dan 75%

No	Perangkat Daerah	Permasalahan
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	Kinerja layanan jalan masih belum optimal dalam mendukung sektor unggulan dan kawasan strategis. Kemantapan jalan provinsi pada tahun 2021 masih di bawah 90%.
		Terdapat ketimpangan Keterpaduan Infrastruktur permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
		Rendahnya tenaga konstruksi yang memenuhi standar nasional dan lemahnya pengawasan pada kegiatan jasa konstruksi
		Menurunnya kapasitas dan kualitas pelayanan sumberdaya air untuk memenuhi kebutuhan penyediaan air irigasi dan air baku yang mengakibatkan turunnya produktivitas pertanian akibat tidak optimalnya pengelolaan irigasi
		Inkonsistensi dalam penyelenggaraan penataan ruang dan meningkatnya permintaan investasi di daerah yg mengakibatkan perlunya penyesuaian fungsi ruang dalam RTRW Provinsi
		Pelayanan air minum belum optimal dengan capaian 78,76 dan masih rendahnya kualitas lingkungan permukiman dalam pengelolaan persampahan
		Pembangunannfrastruktur persampahan: Kapasitas pengelolaan sampah, makin besarnya timbulan sampah, rendah nya kualitas dan tingkat pengelolaan persampahan serta keterbatasan lahan TPA
4.	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB	Penyediaan lahan untuk relokasi Perumahan belum disediakan Pemerintah
		Persentase dukungan anggaran Pemerintah Daerah untuk menangani Rumah terdampak bencana dan Rumah Layak Huni kurang memadai
		Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau dengan cakupan rumah layak huni 62,53%
		Hanya sebagian rumah subsidi yang dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
5.	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB	Gangguan Tibumtranmas Dan Konflik Sosial Ditengah Masyarakat Masih Terjadi. Pada tahun 2021 terjadi 13 kasus dengan 1.122 pelanggar
		Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah masih terjadi dan penurunan pelanggaran terjadi hanya 18%, belum mencapai target kinerja 20%
		Pelindungan Masyarakat Belum Optimal
		Pembinaan masyarakat belum optimal
		Layanan Administrasi Perkantoran Baik Perencanaan, Umum Dan Kepegawaian Maupun Keuangan Belum Terselenggara Optimal

No	Perangkat Daerah	Permasalahan
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB	Masih kurangnya logistik untuk kebencanaan
		Perlu penganggaran yang bersumber di luar APBD
		Pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan belum memiliki kajian analisis risiko bencana
		Perlu akselerasi dan upgrading terhadap DESTANA baik dalam kuantitatif maupun kualitatif
		Aplikasi SI-AGA sebagai Pusat Data dan Pelaporan BPBD belum bersinergi dengan aplikasi NTB satu Data pada Dinas Kominfo
		Ketangguhan bencana untuk pariwisata aman bencana, dimana BPBD sebagai software dan dinas terknis terkait sebagai hardwarenya
7.	Dinas Sosial Provinsi NTB	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan social Bagi Korban Bencana
		Belum Optimalnya Penerapan SPM Bidang Sosial dengan capaian 72,31%
		Penanganan dan pemberdayaan FM melalui kelompok dan bantuan social lainnya belum optimal
		Belum Optimalnya Pelaksanaan verivali Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
		Belum optimalnya Peningkatan Kapasitas PKKS
8.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Masih tingginya pekerja setengah penganggur dan pekerja paruh waktu pada angka 28,89%, di atas angka nasional 26,99%
		Perlindungan terhadap tenaga kerja belum optimal. Prosentase tenaga kerja NTB yang terdaftar sebagai anggota BPJS ketenagakerjaan hanya 10,74%
		Pengelolaan kawasan transmigrasi belum optimal
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Provinsi NTB	Belum optimalnya partisipasi perempuan dalam pembangunan yang baru mencapai 27,24%
		Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan an. Tiga tahun terakhir kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus terjadi peningkatan mencapai 1.060 kasus pada 2021.
		Pembangunan kependudukan belum menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan
		Rata-rata usia kawin pertama yang masih rendah (20, 35 tahun)
10.	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB	Masih adanya daerah (desa) rawan/rentan pangan dan gizi
		Tingginya tuntutan pasar global dan internasional dalam penerapan standar mutu dan keamanan pangan segar
		Pola konsumsi pangan masyarakat belum sesuai harapan. Contohnya, peningkatan konsumsi protein masih didominasi oleh sumber pangan nabati terutama padi-padian karena perilaku masyarakat

No	Perangkat Daerah	Permasalahan
		yang masih merasa belum makan jika belum makan nasi dan masih rendahnya daya beli masyarakat
11.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB	Maraknya okupasi lahan untuk penanaman tanaman semusim
		Masih banyak lahan kritis yang belum direhabilitasi
		Penanganan sampah di Prov. NTB baru mencapai 39,68 % dari target 50%. Perlu dukungan Kab Kota untuk <u>percepatan penanganan sampah</u>
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB	Belum optimalnya Kerjasama antar desa dalam <u>pengembangan potensi kawasan dengan 17,85%</u>
		Kurang berperannya kelembagaan masyarakat di desa dan kurangnya pengembangan kapasitas informasi di desa karena presentase aparatur desa yang mampu melaksanakan tupoksinya dengan baik hanya 77,72%.
		Kurang optimalnya tata Kelola pemerintahan desa berbasis gender
		Kurang optimalnya pemanfaatan data kependudukan dan catatan sipil untuk <u>perencanaan pembangunan</u>
13.	Dinas Perhubungan Provinsi NTB	Rendahnya pelayanan sarana dan prasarana transportasi darat dan laut. Persentase Sarana transportasi darat dalam kondisi baik hanya 26,69%.
		Belum optimalnya penyediaan fasilitas khusus kaum difabel pada sarana dan prasarana angkutan umum
		Kurangnya fasilitas keselamatan jalan. Persentase tersedianya Fasilitas Keselamatan Jalan dalam kondisi baik masih dibawah 50%
		Belum optimalnya pembatasan kualitas emisi gas buang angkutan umum
		Belum adanya rute evakuasi bencana alam
		Konektivitas jaringan transportasi belum terbangun dengan baik
14.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provnsi NTB	Belum optimalnya penataan sistem informasi pada OPD Lingkup Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang akuntabel, transparan, up to date dan komunikatif. Persentase Badan Publik Pemerintah Provinsi Yang Informatif masih 60,71% dan Persentase Perangkat Daerah yang Informatif baru mencapai 59,09%.
		Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam penyelenggaraan pemerintahan belum optimal dan terintegrasi. Persentase Layanan Berbasis TIK baru mencapai 61,76%
		Data statistik sektoral lingkup OPD provinsi, belum terintegrasi dengan Kab/Kota, serta arsitektur data belum terbangun

No	Perangkat Daerah	Permasalahan
15.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTB	Masih banyak pelaku UMKM yang belum menguasai IT/Pasar Digital
		Adanya perubahan regulasi tentang kriteria UKM
		Kurangnya dukungan kebijakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi pelaku wirausaha
		Koperasi sulit mengakses permodalan ke Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) karena regulasi yg sulit /kredit bermasalah
		Pelaku UMKM belum menjalankan manajemen berdasarkan prinsip wirausaha
		Sosialisasi kawasan bebas riba belum dilakukan di semua kab/kota
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB	Dampak gempa (2018) dan pandemi covid-19, banyak perusahaan yang tutup dan menghentikan sementara aktivitasnya
		Adanya Perubahan regulasi terkait investasi
		Kurangnya pemahaman pelaku usaha terkait perizinan secara online (OSS) dan penyampaian LKPM
17.	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB	Kurangnya pembinaan dan fasilitasi untuk pengembangan kapasitas kepemudaan untuk bersaing di tingkat Nasional, dan Internasional
		Kurangnya pembinaan dan fasilitasi bagi kewirausahaan pemuda untuk menjadi pemuda yang mandiri yang berakibat tidak tercapainya target proporsi wirausaha muda yang baru mencapai 68,07%
18.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB	Masih rendahnya aktivitas literasi membaca
		Belum optimal tertib arsip di semua Perangkat Daerah
		Belum terwujud aplikasi atau sistim pemanfaatan layanan koleksi digital
		Belum maksimal pembinaan pengelolaan arsip digital
19.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB	Potensi sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil belum dikelola secara optimal
		Degradasi kualitas lingkungan dan ekosistem laut dan pesisir
		Masih terjadinya penangkapan secara merusak lingkungan dan penangkapan secara ilegal, tidak dilaporkan dan tidak sesuai regulasi
		Tingginya harga pakan dan terbatasnya ketersediaan benih unggul dan bermutu tinggi dalam pengembangan perikanan budidaya
		Penangkapan ikan melebihi kapasitas
		Masih rendahnya pengolahan nilai tambah produk sektor kelautan dan perikanan
20.	Dinas Pariwisata Provinsi NTB	Rendahnya dukungan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja

No	Perangkat Daerah	Permasalahan
		Intervensi anggaran pokok yg tidak berorientasi pada fokus pencapaian target kinerja
		Pandemi covid-19 dgn segala pembatasan berdampak pada penurunan sektor pariwisata
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD mengalami penurunan
		Belum meratanya pengembangan pariwisata antara pulau Lombok dan pulau Sumbawa
21.	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB	Lahan potensial (lahan kering) belum dimanfaatkan secara optimal
		Pertanian/agribisnis dan investasi tumbuh lambat
		Meningkatnya luas tanam komoditas jagung menyebabkan beberapa bencana daerah
22.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB	Produktivitas usaha peternakan masih rendah
		Masih rendahnya pemanfaatan teknologi inseminasi buatan dan masih terjadi kasus inbreeding sehingga berpengaruh terhadap kualitas produktivitas ternak
		Masih rendah ketersediaan bibit unggul dalam daerah
		Masih rendahnya pemanfaatan teknologi
		Ketersediaan bahan baku pakan ternak masih di datangkan dari luar daerah
		Produk hasil peternakan belum mampu bersaing dengan produk luar daerah
23.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB	Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan belum dikelola dengan optimal pada daerah yang memiliki potensi energi pembangkit listrik
		Update data rumah tangga yang belum berlistrik belum optimal
		Masih terdapat 34 dusun yg belum dialiri listrik PLN (7 dusun di Kab. Bima, 11 dusun di Dompu dan 16 dusun di Kab. Sumbawa)
24.	Dinas Perdagangan Provinsi NTB	Tidak stabilnya harga beberapa komoditi yang diakibatkan oleh faktor alam seperti cabai dan bawang
		Kenaikan harga komoditi yang pasokannya bersifat nasional seperti minyak goreng
		Kelangkaan kontainer ekspor dengan kapasitas besar
		Kurangnya akses permodalan dari pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya
25.	Dinas Perindustrian Provinsi NTB	Rendahnya Kompetensi SDM IKM dalam menerapkan proses produksi
		Banyaknya kemasan produk IKM yang belum terstandar
		Kurangnya modal IKM dalam melakukan restrukturisasi mesin produksi

No	Perangkat Daerah	Permasalahan
		Akses perbankan dalam membantu permodalan yang masih lemah
26.	Biro Hukum Setda NTB	Belum optimalnya koordinasi, sinergitas antar instansi dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyusunan produk hukum daerah (Provinsi, Kab/Kota Se NTB) Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antar instansi, perangkat daerah dalam penyusunan produk hukum daerah Belum optimalnya koordinasi dengan instansi, perangkat daerah dalam penyiapan data/ dokumen terhadap permasalahan hukum daerah baik litigasi dan non litigasi dan HAM serta Kerjasama Perjanjian/JDIH
27.	Biro Organisasi Setda NTB	Masih Terbatasnya SDM Aparatur Pengelola SAKIP Pada Perangkat Daerah Masih rendahnya kualitas SAKIP perangkat daerah yang berdampak pada kualitas SAKIP pemerintah Provinsi NTB Masih kurangnya <i>crosscutting/collaborative</i> dengan pihak lainnya untuk mencapai kinerja atas nama Pemda Pengelola SAKIP pada perangkat daerah sering terjadi pergantian Kurangnya penerapan <i>logical framework</i>/pohon kinerja dalam penyusunan dokumen perencanaan SAKIP
28.	Biro Pemerintahan dan OTDA Setda NTB	Belum optimalnya koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota Belum optimalnya administrasi pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Belum optimalnya dukungan pendanaan dan anggaran Belum optimalnya Kerjasama antar instansi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Belum optimalnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP)
29.	Biro Kesejahteraan Rakyat Setda NTB	Adanya Refokusing Anggaran Menyebabkan Beberapa Kegiatan Yang Mendukung Program Prioritas Dan Unggulan Tidak Dapat Dilaksanakan Adanya Pandemi Covid-19 Menyebabkan Pembatasan Kegiatan Yang Bersipat Keramaian
30.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB	Masih rendahnya Profesionalisme dan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD Provinsi NTB untuk memenuhi semakin tingginya Standar kinerja dan Pelayanan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD

No	Perangkat Daerah	Permasalahan
		Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga Perwakilan Rakyat
		Belum optimalnya proses monitoring dan evaluasi kinerja secara baik antar bagian maupun internal lingkup Sekretariat DPRD
		Belum maksimalnya koordinasi antar bagian dan Sub bagian pada internal OPD yang menyebabkan belum termanfaatkannya informasi kinerja dan pengukuran kinerja
		Belum optimalnya pemanfaatan informasi kinerja serta tingginya dinamika kegiatan di Sekretariat DPRD menjadi tantangan dalam menindaklanjuti rekomendasi perbaikan dalam langkah-langkah nyata
31.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTB	Keselarasan perencanaan pembangunan daerah antar sektor dan antar tingkat pemerintahan
		Konsistensi antar dokumen perencanaan serta konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
		Optimalisasi implementasi hasil kajian kelitbang dalam perencanaan pembangunan
		Optimalisasi implementasi hasil monitoring dan evaluasi untuk kebijakan perencanaan dan pengendalian pembangunan
		Ketersediaan sumber daya aparatur dalam bidang perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dioptimalkan
32.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB	Pengelolaan aset Pemprov oleh masyarakat belum optimal
		Keterlambatan LKPD akibat keterlambatan rekonsiliasi aset
		SIPD belum terintegrasi dengan SIMDA sehingga mempengaruhi proses penatausahaan dan pelaporan keuangan
		Perubahan regulasi terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah
		Keterbatasan anggaran untuk sertifikasi aset
33.	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB	Kapasitas fiskal daerah relatif rendah
		Pertumbuhan PAD relative rendah
		PAD yang bersumber dari retribusi daerah belum optimal
34.	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB	Perencanaan Kebutuhan Pegawai Belum berdasarkan analisis rencana kebutuhan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta belum memiliki rencana kebutuhan pegawai jangka menengah 5 (tahun)

No	Perangkat Daerah	Permasalahan
		Prasangka Pengadaan CPNS/PPPK berbau Kolusi, Korupsi dan Nepotisme masih terasa didalam masyarakat Pembinaan dan pengembangan karir belum seutuhnya menerapkan <i>Merit System</i> Penempatan belum berdasarkan kualifikasi dan kompetensi Penilaian kinerja belum dijadikan acuan dalam proses pengembangan karir ASN Masih adanya pelanggaran Disiplin dan Kode Etik ASN Sistem Informasi Kepegawaian belum terintegrasi dengan Sistem Penilaian Kinerja dan Sistem Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai
35.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTB	Belum tersedianya Lembaga dan Tenaga Terakreditasi dalam Pengembangan Kompetensi Teknis dan Jabatan fungsional Perubahan Pola Kediklatan Adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang Penghentian Kegiatan yang menyebabkan Perubahan Jadwal Kegiatan dan Pembatalan Kegiatan
36.	Bakesbangpoldagri Provinsi NTB	Kondisi masyarakat yang rentan terhadap berbagai isu perpecahan yang berkembang, terutama perubahan kondisi masyarakat sebagai dampak Covid-19 Maraknya perkelahian antar warga/kelompok yang memicu konflik sosial Makin melemahnya integrasi bangsa secara nasional dengan penerapan sistem penyelenggaraan pemerintahan Kesenjangan multidimensi mendorong munculnya kelompok sektarian yang berpotensi memecah belah kesatuan bangsa Peran Pemerintah sebagai fasilitator dan mediator dalam penyelesaian konflik belum efektif Jumlah sumber daya/Mitra Kesbangpol sebagai informan di lapangan tidak sebanding dengan luas wilayah Kurangnya pendampingan pasca konflik pada wilayah rawan konflik Pemerintah belum transparan dan belum melibatkan masyarakat dalam menentukan kebijakan publik Lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah, dan masyarakat dalam menciptakan situasi damai menyebabkan kurang efektifnya penyelesaian konflik

No	Perangkat Daerah	Permasalahan
		Lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah, dan masyarakat dalam menciptakan situasi damai menyebabkan kurang efektifnya penyelesaian konflik

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kondisi perekonomian Provinsi NTB sangat dipengaruhi oleh isu-isu yang berkembang baik nasional maupun regional. Isu pemulihan perekonomian di masa Pandemi Covid 19 masih menjadi pusat perhatian dan daerah dituntut untuk terus berinovasi dalam rangka mensejahterakan masyarakat melalui pencapaian indikator-indikator makro perekonomian daerah. Program-program pemulihan ekonomi yang diluncurkan oleh pusat meliputi bidang kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM serta program prioritas akan terus diakselerasi oleh pemerintah daerah dengan dukungan berbagai pihak termasuk masyarakat dan dunia usaha, sehingga pemulihan ekonomi Provinsi NTB sebagaimana yang ditargetkan di tahun 2023 dapat tercapai.

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran arah kebijakan perekonomian, proyeksi kondisi ekonomi makro yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang memberikan pengaruh signifikan, antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Kerangka pendanaan daerah menjadi bagian yang sangat penting dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan. Analisis kerangka pendanaan memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2023. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2021, Awal Tahun 2022 dan Proyeksi Tahun 2023

Kondisi perekonomian daerah digambarkan melalui kinerja indikator ekonomi yang terdiri dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Inflasi, Ketenagakerjaan, Ketimpangan Pendapatan, Tingkat Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perekonomian NTB pada tahun 2021 tumbuh 2,30 persen dan tahun 2022 perekonomian NTB ditargetkan memasuki masa pemulihan antara lain ditunjukkan oleh : (1) mobilitas masyarakat yang mulai meningkat ke retail, tempat rekreasi dan perkantoran; (2) penjualan eceran yang menunjukkan tren peningkatan untuk makanan, minuman, tembakau dan perlengkapan rumah tangga lainnya; (3) keyakinan konsumen yang menunjukkan angka lebih tinggi dari indeks ekspektasi konsumen (>135). Indikasi ini diperkuat dengan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2021 sebesar 3,69 persen (yoy) dan diperkirakan meningkat ke kisaran 4,7-5,5 persen pada 2022 sejalan dengan akselerasi konsumsi pemerintah dan ekspor, meski risiko kenaikan kasus Covid-19 perlu terus diwaspadai. Perkiraan tersebut juga didukung oleh mobilitas yang terus meningkat sejalan dengan akselerasi vaksinasi, pembukaan ekonomi yang semakin luas dan stimulus

kebijakan yang berlanjut. Kinerja lapangan usaha utama, seperti industri pengolahan, perdagangan, konstruksi dan pertanian tumbuh meningkat.

Pada tahun 2023 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang karena merupakan titik awal akselerasi pertumbuhan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Upaya peningkatan produktivitas di semua sektor ekonomi melalui transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,3-5,9 persen di tahun 2023. Hal yang sama juga dilakukan oleh pemerintah Provinsi NTB melalui berbagai upaya akselerasi agar pertumbuhan ekonomi NTB dapat mencapai 5,53-5,59 persen di tahun 2023.

Tabel 3- 1 Realisasi dan Target Pembangunan Daerah Tahun 2021-2023

Indikator	Nasional			Target Nasional untuk NTB Tahun 2023	Daerah		
	Realisasi 2021	Target 2022	Target 2023		Realisasi 2021	Target 2022	Target 2023
Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,7	5,0-5,5	5,3 – 5,9	4,9 – 5,5	2,30	3,5-4,5	4,5 – 5,5
Inflasi	1,87	3,0	3±1	-	2,12	3,0-4,0	2,0 – 3,0
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,49	5,5-6,3	5,3 – 6,0	2,54 – 2,90	3,01	3,01	2,54 – 2,90
Rasio Gini (Indeks)	0,381	0,376-0,378	0,375 – 0,378	-	0,331	0,329	0,378 – 0,379
Angka Kemiskinan (%)	9,71	8,5-9,0	7,5 – 8,5	11,85 – 13,00	13,83	12,77	11,85 – 13,00
Pengeluaran Per Kapita (Rp. Ribu)					10.377,00	11.603,52	11.943,70
Nilai Realisasi Investasi (Rp. Milyar)					5.996,70	15.428,00	17.814,00

Sumber : Rancangan RKP 2023 dan RPJMD 2019-2023

3.1.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi NTB

Perekonomian Nusa Tenggara Barat pada tahun 2021 terus mengalami pemulihan dan secara kumulatif mampu tumbuh sebesar 2,30 persen. Keberhasilan pengendalian pandemic Covid-19, partisipasi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, vaksinasi, aktivitas ekonomi pasca pelonggaran PPKM, kinerja lapangan usaha pertanian, konstruksi dan jasa kesehatan dan sosial menjadi faktor utama terjadinya keberlanjutan pemulihan ekonomi NTB. Sementara pertumbuhan lebih lanjut relative tertahan oleh perlambatan kinerja lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Sementara itu PDRB NTB mengalami peningkatan sebesar 1,67 persen dengan nilai mencapai Rp 95.436,85 milyar di tahun 2021.

Dari sisi PDRB pengeluaran, berhasilnya pengendalian pandemi Covid 19 mendorong peningkatan konsumsi masyarakat yang diikuti dengan peningkatan aktivitas pada sektor investasi. Secara keseluruhan tahun 2021, konsumsi rumah tangga mampu tumbuh sebesar 3,97 persen. sementara itu, aktivitas investasi yang sempat tertahan Kembali meningkat yang ditunjukkan oleh pertumbuhan Pembentukan Modal tetap Bruto (PMTB) sebesar 2,66 persen pada 2021. Sementara itu, Konsumsi Pemerintah juga mampu tumbuh mencapai 0,18 persen sejalan dengan peningkatan realiasi belanja negara, khususnya terkait akselerasi program vaksinasi, keberlanjutan program perlindungan sosial dan pelaksanaan layanan publik pemerintah.

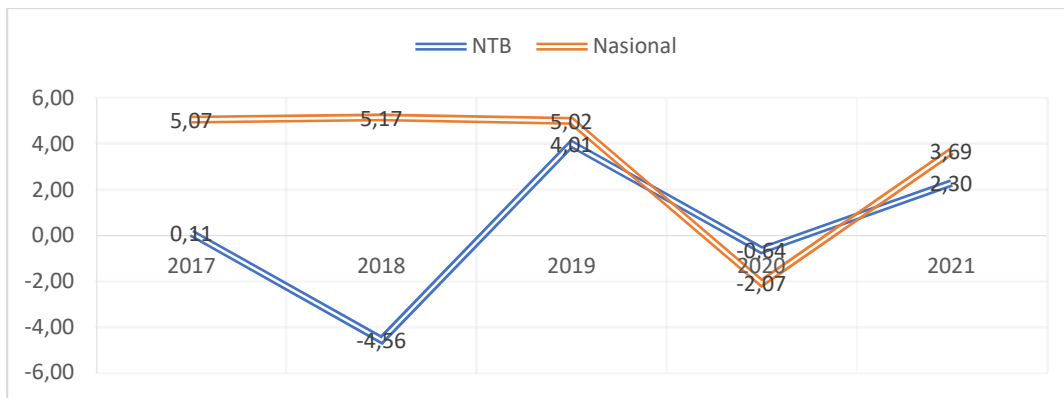
Pada tahun 2021, ekspor luar negeri mencapai USD 1,14 miliar dibandingkan dengan tahun 2020 yang tercatat USD 643 juta. Artinya terjadi peningkatan ekspor dari 44,29 persen di tahun 2020 menjadi 67,60 persen di tahun 2021. Peningkatan utamanya terjadi pada komoditas konsentrat tembaga. Sementara itu, komponen impor luar negeri yang menjadi pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran mengalami kontraksi sebesar 43,22 persen.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi NTB pada tahun 2022 diperkirakan meningkat pada kisaran 5.53-5.93% (yoy), sejalan dengan capaian vaksinasi yang semakin tinggi sehingga menciptakan *herd immunity* untuk mendorong pemulihan ekonomi semakin cepat. Selain itu berbagai event internasional yang akan diselenggarakan di NTB serta ekspektasi perbaikan *recovery rate* konsentrat tembaga turut menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi NTB. Optimism ekonomi tahun 2022 didorong oleh aktivitas ekonomi yang terus meningkat sehingga pada triwulan I 2022 ekonomi NTB tumbuh 7,76 persen dengan seluruh lapangan usaha tumbuh positif. Konsumsi masyarakat diperkirakan meningkat dimana pada triwulan I 2022 konsumsi rumah tangga tumbuh 4,06 persen. Kinerja ekspor luar negeri tetap menjadi sumber pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 dimana pada Maret 2022 mengalami kenaikan sebesar 39,40 persen dibandingkan Februari 2022. Investasi pada tahun 2022 diperkirakan akan meningkat, dimana Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada Maret 2022 mengalami kenaikan sebesar 2,09 persen. konsumsi pemerintah diperkirakan berkontraksi yang dipicu oleh berkurangnya belanja penanganan pandemi dan program stimulus.

Kinerja perekonomian NTB yang semakin membaik diharapkan akan berlanjut hingga tahun 2023. Tahun 2023 diarahkan untuk mengatasi dampak pasca pandemi Covid 19 serta mengatasi permasalahan-permasalahan timbul akibat pandemi Covid 19. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 diharapkan akan mampu tumbuh 5,53-5,59 persen. Investasi dan ekspor diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi NTB. Pada tahun 2023 tren investasi hijau dalam rangka pembangunan rendah karbon akan semakin menguat seiring dengan adanya komitmen global. Berdasarkan kebijakan global tersebut , investasi diperkirakan tumbuh dengan menerapkan strategi melalui peningkatan investasi yang menyerap banyak tenaga kerja,

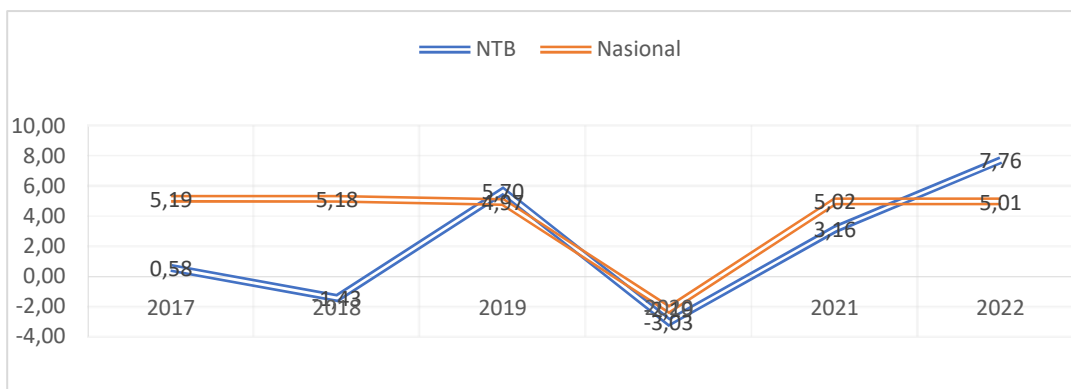
peningkatan investasi pada sektor industry pengolahan dan implementasi system perizinan melalui sistem *One Single Submission* (OSS) di daerah.

Gambar 3- 1 Pertumbuhan Ekonomi NTB Tahun 2021 (c-to-c)



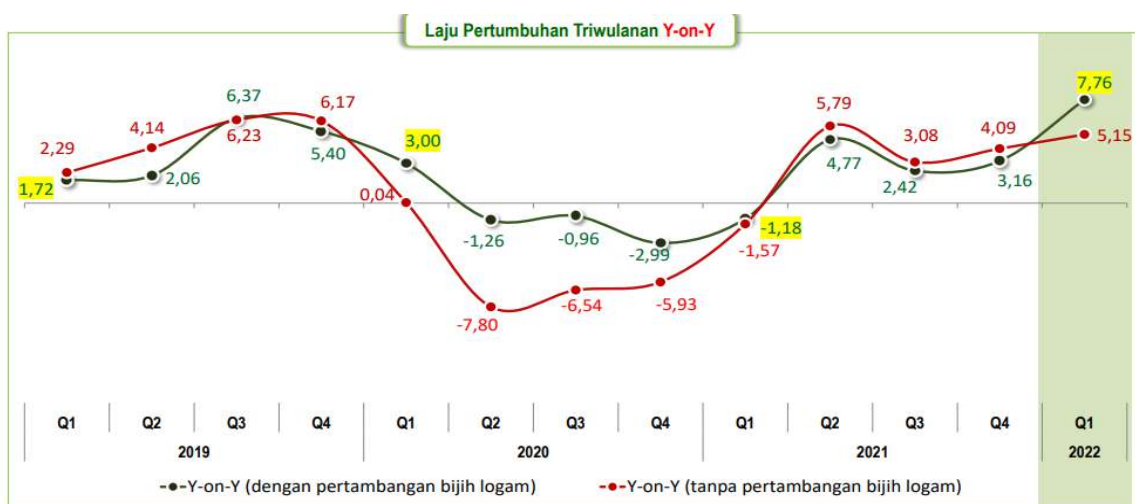
Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022 diolah

Gambar 3- 2 Pertumbuhan Ekonomi NTB Tahun 2022 (y-on-y)



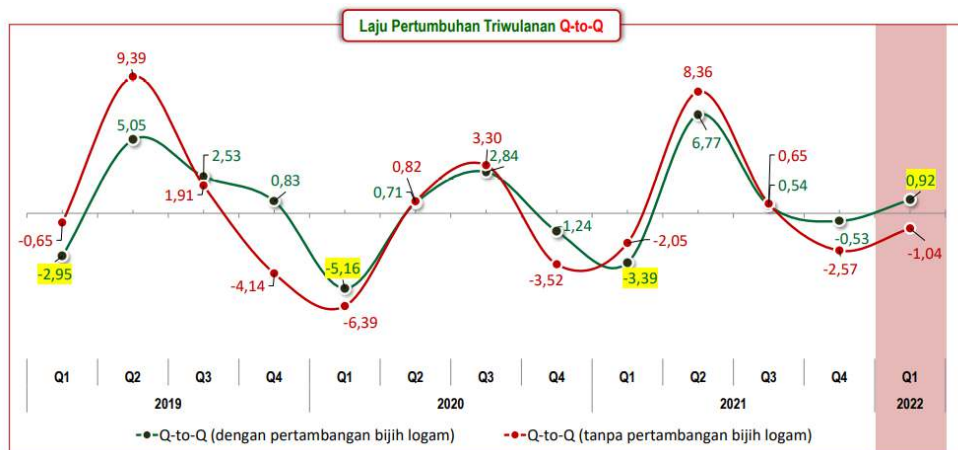
Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022 diolah

Gambar 3- 3 Laju Pertumbuhan Ekonomi NTB, Triwulanan 2022 (y on y)



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022

Gambar 3- 4 Laju Pertumbuhan Ekonomi NTB, Triwulanan 2022 (q on q)



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022

Gambar 3- 5 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi NTB Tahun 2022



Sumber: Bank Indonesia, 2022

1. Pertanian, Kehutanan, Perikanan

Pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian NTB dibandingkan sektor lainnya, yaitu 19,55 persen dari total PDRB pada tahun 2021. Kontribusi ini meningkat menjadi 21,91 persen pada triwulan I 2022. Lingkup lapangan usaha ini meliputi : Pertanian, Peternakan, perburuan dan Jasa Pertanian; Kehutanan dan Penebangan Kayu, Perikanan. Pertanian, peternakan, perburuan dan Jasa Pertanian dikelompokkan menjadi 5 (lima) yaitu tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, jasa pertanian dan perburuan. Dari lima kelompok tersebut tanaman pangan memberikan kontribusi terbesar yaitu 9,82 persen untuk sektor lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Sektor ini memiliki potensi untuk dikembangkan melalui pemanfaatan teknologi tepat guna, intensifikasi dan modernisasi pertanian.

2. Pertambangan dan Penggalian

Sektor pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi terbesar nomor dua setelah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu sebesar 18,69 persen dari total PDRB pada tahun 2021 dan kontribusi ini meningkat menjadi 20,07 persen pada triwulan I 2022. Lapangan usaha ini meliputi : Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi; Pertambangan Batubara dan Lignit; Pertambangan Bijih Logam; serta Pertambangan dan Penggalian Lainnya. Pertambangan Bijih Logam memberikan kontribusi terbesar yaitu 14,17 persen.

3. Perdagangan

Kegiatan ekonomi pada lapangan usaha perdagangan memberikan kontribusi 13,82 persen dari total PDRB pada tahun 2021 dan kontribusi ini menurun menjadi 13,54 persen pada triwulan I 2022. Lapangan usaha ini meliputi : Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya serta Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor. Andil terbesar dari Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,11 persen.

4. Konstruksi

Lapangan usaha konstruksi memberikan andil 10,76 persen pada total PDRB tahun 2021 dan kontribusi ini menurun pada triwulan I 2022 seiring dengan selesainya beberapa pembangunan proyek strategis nasional di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Kegiatan ekonomi utama pada lapangan usaha ini mencakup konstruksi pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian bangunan atau struktur di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara.

5. Transportasi dan Pergudangan

Kontribusi sektor transportasi dan pergudangan terhadap PDRB mencapai 5,30 persen dari total PDRB pada tahun 2021 dan kontribusi ini meningkat menjadi 5,66 persen pada triwulan I 2022. Lingkup lapangan usaha transportasi dan pergudangan meliputi : angkutan darat; angkutan laut; angkutan sungai, danau dan penyeberangan; angkutan udara; pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir. Dari lima kelompok tersebut angkutan darat memberikan kontribusi terbesar yaitu 2,48 persen untuk sektor lapangan usaha transportasi dan pergudangan.

6. Industri Pengolahan

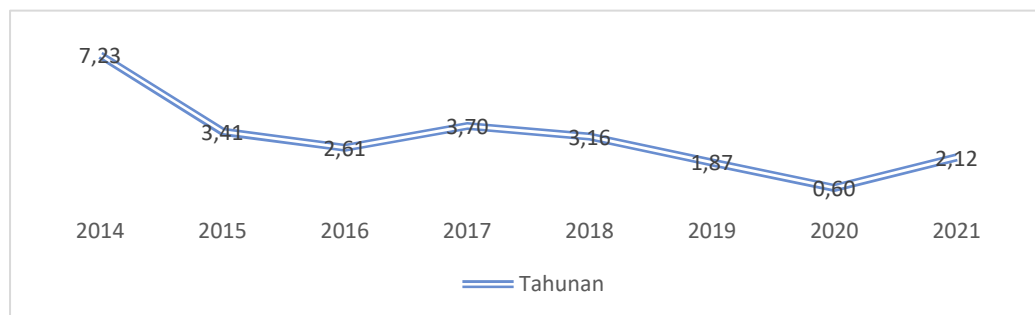
Sektor industri pengolahan memberikan kontribusi 4,11 persen dari total PDRB pada tahun 2021 dan kontribusi ini menurun pada triwulan I 2022 menjadi 3,35 persen. Penurunan ini dikarenakan belum masuk masa panen sehingga bahan baku yang berasal dari sektor pertanian yang akan diolah menjadi makanan dan minuman masih belum banyak.

3.1.1.2 Inflasi

Inflasi merupakan salah satu variabel kinerja ekonomi sehingga perlu menjadi perhatian pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat baik dari aspek sosial maupun ekonomi. Salah satu implikasinya adalah dapat memperburuk kondisi kemiskinan dan ketimpangan yang pada akhirnya makin memperberat upaya peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi NTB melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah meningkatkan koordinasi dengan Bank Indonesia agar dapat mengendalikan inflasi.

Perkembangan perubahan harga-harga produk barang dan jasa secara agregat pada tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan 3 tahun terakhir namun masih relatif stabil dan dinamis dibanding kondisi sebelum pandemi Covid 19. Selama kurun waktu 2019 – 2020 kondisi NTB cenderung mengalami deflasi yang disebabkan oleh penurunan sisi permintaan, khususnya kelompok penyediaan makanan, minuman dan restoran yang disebabkan oleh pemberlakuan PPKM dalam rangka pengendalian pandemi COVID-19. Perkembangan inflasi tahunan di Provinsi NTB periode tahun 2014-2021 adalah sebagai berikut.

Gambar 3- 6 Inflasi Tahun 2014-2021



Sumber: BPS Provinsi NTB 2022

Inflasi yang terjadi pada tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan tahun 2020, hal ini terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan dengan kenaikan indeks pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 1,38 persen; Kelompok Transportasi sebesar 1,11 persen; Kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,22 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,18 persen; Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,18 persen; Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 0,14 persen; Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,11 persen; Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 0,10 persen; dan Kelompok Pendidikan sebesar 0,00 persen. Sedangkan penurunan indeks terjadi pada Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,18 persen dan Kelompok Kesehatan sebesar 0,01 persen.

Pada triwulan I 2022, inflasi tahunan (y-on-y) Januari-Maret secara berturut-turut mencapai 2,14 persen, 1,82 persen dan 2,49 persen. inflasi berada dalam rentang target daerah yaitu 2,0 – 3,0 persen (y-on-y) pada 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa

kenaikan inflasi dipengaruhi oleh kenaikan harga sejumlah komoditas dan mobilitas masyarakat.

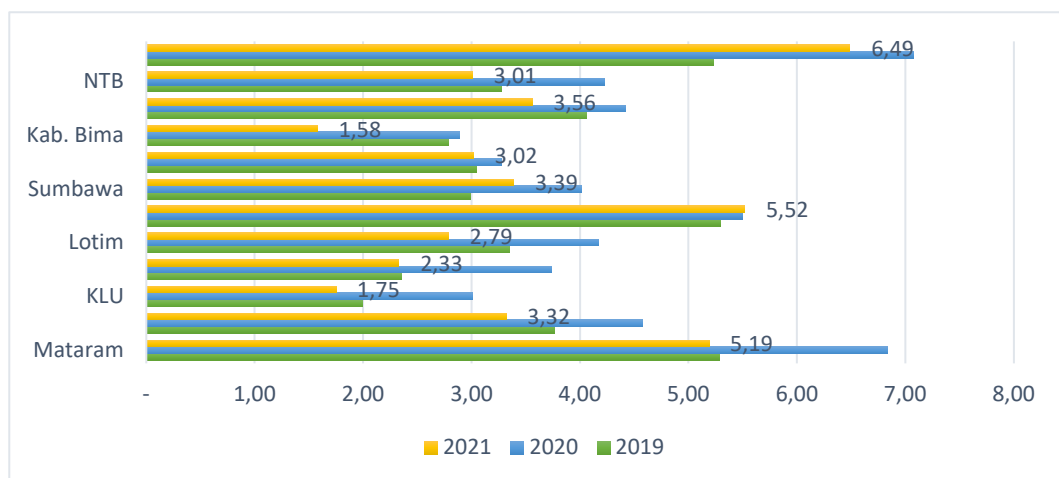
Inflasi tahun 2022 seiring dengan pembukaan kegiatan ekonomi yang lebih luas dan adanya penambahan PPN dari 10 persen menjadi 11 persen, faktor cuaca dan permasalahan struktural inflasi seperti pola tanam, logistik, pengelolaan pasca panen dan lain-lain. Dengan pertimbangan faktor-faktor tersebut, pada tahun 2022 inflasi diperkirakan lebih tinggi dari tahun 2021, namun masih terkendali pada kisaran 2,0 – 3,0 persen (y-on-y) sebagaimana yang ditetapkan dan diharapkan akan tetap dipertahankan hingga tahun 2023.

3.1.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pandemi Covid 19 masih berdampak pada pasar kerja tahun 2021 dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 3,01 persen. Walaupun TPT mengalami penurunan sebesar 1,21 persen poin dibandingkan keadaan tahun sebelumnya sebesar 4,22 persen, namun orang yang bekerja tetap terkena imbasnya dalam bentuk pengurangan jam kerja. Hal ini menimbulkan jumlah setengah menganggur dan perolehan upah yang lebih rendah.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2022 sebesar 3,92 persen, turun 0,05 persen poin dibandingkan dengan Februari 2021. Penduduk yang bekerja sebanyak 2,67 juta orang, meningkat sebanyak 33,85 ribu orang dari Februari 2021. Dari jumlah penduduk yang bekerja tersebut sebanyak 2,02 juta orang (975,67 persen) bekerja pada kegiatan informal. Terdapat 211,82 ribu orang (5,35 persen penduduk usia kerja) yang terdampak Covid-19, terdiri dari pengangguran karena Covid-19 (32,86 ribu orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 (20,86 ribu orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (8,86 ribu orang). Sementara penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 sebanyak 149,25 ribu orang. Sampai akhir tahun 2022 diharapkan TPT dapat ditekan menjadi 3,01 persen.

Gambar 3- 7 Perkembangan TPT Nasional, dan Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2019 - 2021



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022

Untuk lebih jelasnya mengenai Penduduk Usia Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi NTB berdasarkan jenis kelamin tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

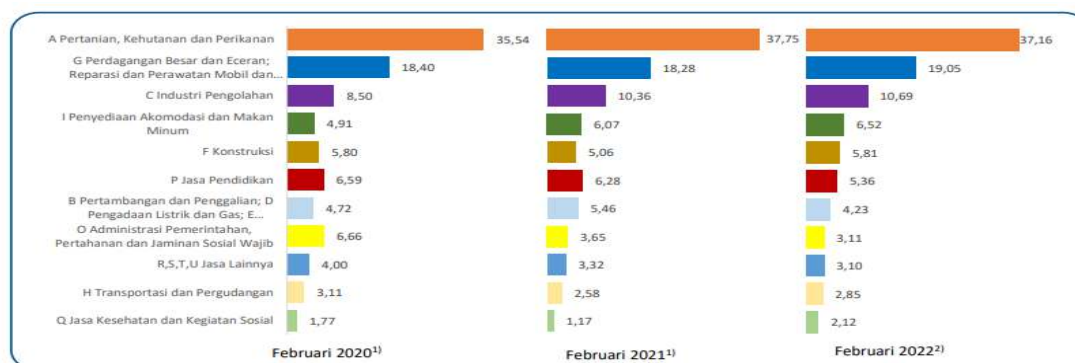
Tabel 3- 2 Angkatan Kerja dan Pengangguran Tahun 2021 – 2023

No	Status Keadaan Ketenagakerjaan	2019	2020	2021	Feb 2022
1	Penduduk Usia Kerja (ribu orang)	3.600,43	3.817,70	3.882,46	3.959,15
	Angkatan Kerja	2.471,55	2.689,39	2.739,89	2.781,38
	- Bekerja	2.387,04	2.575,96	2.657,40	2.672,31
	- Pengangguran	84,52	113,43	82,50	109,08
	Bukan Angkatan Kerja	1.128,88	1.128,31	1.142,57	1.177,77
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,42	4,22	3,01	3,92
	- Perkotaan	4,05	5,04	3,85	4,51
	- Perdesaan	2,84	3,44	2,18	3,41
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	68,65	70,45	70,57	70,25
	- Laki-Laki	82,09	82,94	82,58	84,36
	- Perempuan	56,46	58,66	59,18	56,34

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022

Kondisi ketenagakerjaan baik menyangkut tingkat pengangguran dan penduduk yang bekerja tidak terlepas dari kinerja sektor-sektor perekonomian yang ada. Jumlah penduduk yang bekerja pada tiap sektor menunjukkan kemampuan sektor tersebut dalam penyerapan tenaga kerja. Selama 3 tahun terakhir serapan tenaga kerja di NTB terus mengalami peningkatan walaupun masih dalam kondisi pandemi yakni meningkat sebanyak 81,43 ribu orang dari Agustus 2020 yang didominasi oleh pekerja penuh waktu (56,11 persen). Tiga kategori lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja terbesar jika dibandingkan dengan Agustus 2020 adalah Industri Pengolahan (0,96 persen poin); Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (0,89 persen poin); dan Pertambangan dan Penggalian (0,35 persen poin). Apabila dibandingkan dengan Februari 2021, tiga lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja adalah Jasa Kesehatan (0,95 persen poin); Perdagangan Besar dan Eceran (0,77 persen poin); dan Konstruksi (0,75 persen poin). Sementara tiga lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja paling besar adalah Jasa Pendidikan (0,92 persen poin); Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (0,59 persen poin); dan Administrasi Pemerintahan (0,54 persen poin)

Gambar 3- 8 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2020 - 2021



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022

Pandemi Covid-19 berdampak terhadap kondisi ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk di NTB. Berdasarkan hasil Sakernas, penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu: (1) pengangguran karena Covid-19; (2) bukan angkatan kerja (BAK) karena Covid-19; (3) sementara tidak bekerja karena Covid-19; dan (4) penduduk bekerja mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19. Kondisi (1) dan (2) merupakan dampak pandemi Covid-19 pada mereka yang berhenti bekerja, sedangkan kondisi (3) dan (4) merupakan dampak pandemi Covid-19 yang dirasakan oleh mereka yang masih bekerja

Selama Februari 2021 – Februari 2022, lapangan usaha perdagangan mampu menyerap tambahan tenaga kerja sebanyak 26,82 ribu orang, sementara lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan konstruksi masing-masing menyerap sebanyak 25,84 ribu dan 21,64 ribu tenaga kerja.

Tabel 3- 3 Dampak COVID-19 terhadap Penduduk Usia Kerja, Februari 2021 – Februari 2022

Komponen	Februari 2021 ¹⁾	Februari 2022 ²⁾	Perubahan (Feb 2021-Feb 2022)	
	ribu orang	ribu orang	ribu orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengangguran ³⁾ karena COVID-19	23,08	32,86	9,78	42,35
2. BAK ⁴⁾ karena COVID-19	10,70	20,86	10,16	94,99
3. Sementara tidak bekerja ⁵⁾ karena COVID-19	16,61	8,86	-7,75	-46,67
4. Penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19	247,46	149,25	-98,22	-39,69
Total	297,85	211,82	-86,03	-28,88
Penduduk Usia Kerja (PUK)	3.852,13	3.959,15	107,02	2,78
	persen	persen	persen poin	
Persentase terhadap PUK	7,73	5,35	-2,38	

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022

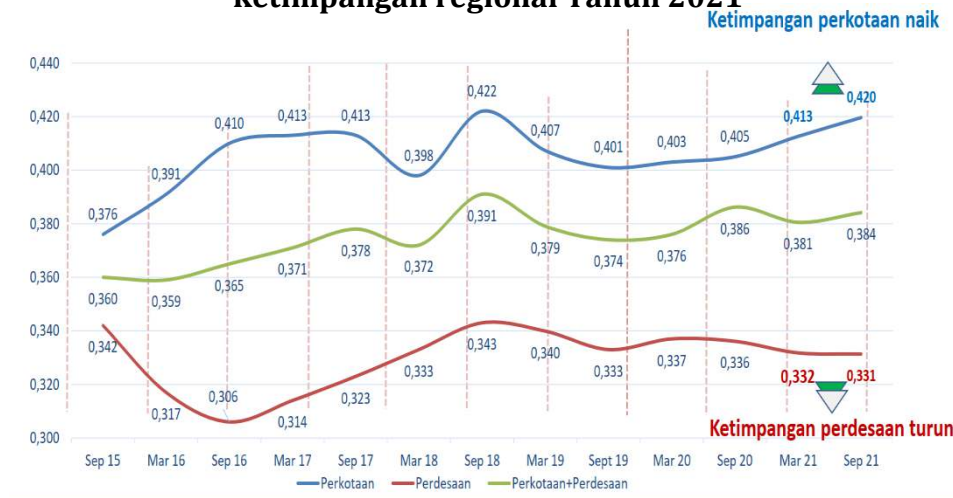
Adanya pandemi Covid 19 menyebabkan sektor usaha memberlakukan kebijakan pembatasan jumlah pekerja sebagai dampak dari jam kerja usaha yang oleh pemerintah daerah juga melakukan pembatasan pembukaan usaha atau pengurangan jam kerja. Jumlah peningkatan pengangguran yang terjadi di perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan, berdasarkan data terdapat 17.060 orang yang menjadi pengangguran di perdesaan, sementara di perkotaan terdapat 15.800 orang. Kebijakan lain selain merumahkan pekerja sebagai akibat dari pandemi Covid-19 adalah dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja, Hal ini pula yang menyebabkan adanya peningkatan pengangguran pada sektor usaha. Pada tahun 2023, TPT diharapkan turun menjadi 3,0 persen dengan strategi dengan memberikan stimulus bagi dunia usaha, termasuk usaha ultra mikro dan UMKM.

3.1.1.4 Indeks Gini

Indeks Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan

yang sempurna). Bila nilai Indeks Gini mendekati nol menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah dan bila nilai Indeks Gini mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi.

Gambar 3- 9 Ketimpangan antar kelompok pendapatan (rasio gini) dan ketimpangan regional Tahun 2021



Pada prakteknya, angka ketimpangan untuk daerah-daerah yang ketimpangan distribusi pendapatannya tajam berkisar antara 0,50 hingga 0,70. Sedangkan untuk daerah-daerah yang distribusi pendapatannya relatif paling merata berkisar antara 0,20 sampai 0,35. Secara umum nilai Gini Rasio Provinsi NTB mengalami penurunan (Perkotaan dan Perdesaan) dari 0,386 pada September 2020 menjadi 0,384 pada September 2021, jika dibandingkan dengan capaian Gini Rasio Nasional maka NTB masih cukup baik. Sementara itu untuk Gini Rasio di Perdesaan mengalami penurunan dari 0,336 pada September 2020 menjadi 0,331 pada September 2021. Capaian NTB masih dalam rentang moderat yang artinya pendapatan per kapita masyarakat NTB masih pada tahap rata-rata dengan kondisi pemerataan pendapatan penduduk masih cukup baik, penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran menjadi salah satu penyebab terjadinya penurunan gini rasio. Keadaan ini diharapkan akan terus terjaga hingga tahun 2023 agar gini ratio dapat mencapai target 0,297.

3.1.1.5 Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat pada September 2021 tercatat sebesar 735,30 ribu orang (13,83 persen). Nilai ini lebih rendah dibandingkan kondisi Maret 2021, dimana jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat sebesar 746,66 ribu orang (14,14 persen). Terlihat adanya penurunan persentase penduduk miskin (P0) selama periode Maret 2021 – September 2021 yaitu sebesar 10,3 persen poin. Pada September 2021, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan tercatat sebesar 387,67 ribu orang atau 14,54 persen, sedangkan penduduk miskin di daerah perdesaan sebesar 347,64 ribu orang atau 13,12 persen.

Kemiskinan di NTB masih didominasi oleh komoditas makanan baik di perkotaan maupun di perdesaan dimana garis kemiskinan antara perkotaan dan perdesaan tidak jauh berbeda dengan sumbangan garis kemiskinan makanan pada kisaran 74 persen. Dari sisi pengeluaran jika melihat Indeks Kedalaman Kemiskinan, penduduk miskin di NTB baik di perkotaan dan perdesaan pada tahun 2021 cenderung menjauh dari Garis Kemiskinan akan tetapi masih terdapat kesenjangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Perkembangan kemiskinan di NTB pada tahun 2015 – 2021 sebagaimana disajikan pada grafik dan gambar sebagai berikut.

Gambar 3- 10 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi NTB Tahun 2015 – 2021



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023

Melihat perkembangan perekonomian di NTB selama kurun waktu Tahun 2019 – 2021 memberikan harapan yang lebih baik lagi baik pada tahun 2022 ini dan tahun 2023 yang akan datang. Dengan telah dilakukannya vaksinasi yang menjangkau seluruh masyarakat maka pertumbuhan ekonomi NTB di tahun 2022 diharapkan akan semakin meningkat. Tantangan yang dihadapi setelah menurunnya kasus pandemi Covid 19 adalah pemulihan pada sektor – sektor penggerak perekonomian seperti IKM, UMKM dan pariwisata yang terdampak, beberapa sektor telah menunjukkan eksistensinya dengan dimulainya kebiasaan baru dalam menjalankan protokol kesehatan.

Beberapa tantangan yang dihadapi NTB diantaranya masih rendahnya nilai PDRB per kapita jika dibandingkan dengan Provinsi terdekat lainnya, tingkat disparitas sosial ekonomi yang memerlukan intervensi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Akselerasi pembangunan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu dilakukan melalui pendekatan pembangunan wilayah yang komprehensif dan integratif, agar seluruh infrastruktur yang telah dibangun dapat memberikan dampak yang optimal terhadap aktivitas perekonomian, serta dapat mendukung pemerataan ekonomi di seluruh wilayah.

Tantangan perekonomian yang dihadapi NTB pada tahun 2023 meliputi :

1. Penormalan perekonomian
2. Akselerasi produktivitas sektor kunci penyusun PDRB Nusa Tenggara Barat
3. Kinerja Pertumbuhan perekonomian Nusa Tenggara Barat kembali mencapai angka di atas rata-rata nasional.

Secara sektoral, tantangan di atas digambarkan sebagai berikut:

1. Tantangan pada sektor investasi:
 - a. Implementasi OSS-RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) pada seluruh sektor perizinan
 - b. Pembangunan infrastruktur dalam menarik investasi
 - c. Memperkuat fungsi kelembagaan dalam promosi, *business matching*, *market sounding*, dsb
 - d. Realisasi investasi baik asing maupun dalam negeri
2. Tantangan pada sektor industri:
 - a. Memperkuat dan mendorong tumbuhnya industri-industri pengolahan
 - b. Ketersediaan dan Substitusi bahan baku impor
3. Tantangan pada sektor UMKM:
 - a. Memantapkan ekosistem digital UMKM
 - b. Meningkatkan kontribusi sektor UMKM dalam perekonomian melalui wirausaha baru dan UMKM naik kelas
4. Tantangan pada sektor pariwisata:
 - a. Operasionalisasi destinasi wisata yang telah dibangun
 - b. Promosi destinasi pariwisata baru
 - c. Pengembangan Desa wisata
5. Tantangan pada sektor perdagangan:
 - a. Meningkatkan volume perdagangan berorientasi ekspor
 - b. Standarisasi pasar ber-SNI
 - c. Stabilisasi ketersediaan komoditas dan harga-harga bahan pokok melalui Pusat Distribusi Provinsi
 - d. Perlindungan harga di tingkat produsen
6. Tantangan pada sektor pangan:
 - a. Ketersediaan pangan yang terjangkau
 - b. Pangan berkualitas
7. Tantangan pada sektor ketenagakerjaan:
 - a. Kompetensi calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
 - b. Penempatan calon tenaga kerja Nusa Tenggara Barat
 - c. Memperluas pelayanan balai pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja

Prospek perekonomian pada tahun 2022 diperkirakan akan mengalami peningkatan signifikan dengan menurunnya jumlah kasus Covid-19, semakin luasnya vaksinasi yang dilakukan hingga tahap ke-3 sehingga munculnya *herd immunity* atau kekebalan secara populasi, sehingga dapat menekan jumlah kasus pandemi Covid 19 meskipun muncul varian baru dan adanya beberapa event bertaraf internasional pada

Kawasan Ekonomi Khusus maupun daerah lainnya di NTB. Secara umum kinerja perdagangan luar negeri maupun dalam negeri pada tahun 2022 membaik, sebagaimana ditunjukkan melalui data BPS bahwa pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan yang baik sebagai dampak dari meningkatnya konsumsi pada komponen ekspor luar negeri. Beberapa proyek infrastruktur strategis baik pusat maupun daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 diantaranya percepatan pembangunan jalan, pembangunan Rumah Sakit dan fasilitas – fasilitas umum seperti taman, destinasi kawasan dan objek pariwisata dan sebagainya serta pembangunan infrastruktur melalui padat karya diharapkan semakin mendorong NTB menjadi lebih baik lagi sehingga berdampak pada perbaikan dan pemantapan ekonomi. Ekonomi yang diproyeksikan akan tumbuh positif di tahun 2022 diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya PDRB per kapita di Nusa Tenggara Barat.

Secara umum, pada tahun 2023, perekonomian sudah mulai pulih dan semakin mendekati kondisi di tahun 2019, oleh karena itu pembangunan perekonomian NTB difokuskan untuk memulihkan daya beli masyarakat dan sektor usaha melalui diversifikasi ekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor yang terkena dampak besar dari Covid-19 dan mendorong sektor lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat.

Beberapa strategi yang dilakukan untuk menjaga perekonomian daerah tahun 2022 tetap positif bahkan meningkat, serta mampu memulihkan ekonomi masyarakat antara lain:

- 1) Percepatan penanganan pandemi Covid-19 di sektor kesehatan dengan mempercepat penuntasan program vaksinasi bagi seluruh masyarakat;
- 2) Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat terutama untuk membantu masyarakat yang masih belum sepenuhnya kembali bekerja dan mengalami penurunan pendapatan dalam upaya menjaga daya beli masyarakat;
- 3) Peningkatan pemulihan ekonomi bagi UMKM melalui fasilitasi kemudahan pembiayaan, permodalan, pemasaran, penguatan digitalisasi pemasaran produk dan pelayanan, dan pemberian bantuan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik UMKM;
- 4) Pemulihan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan NTB secara bertahap dengan fokus pada wisatawan domestik dan pengembangan wisata yang adaptif terhadap pandemi Covid-19;
- 5) Meningkatkan pelayanan perizinan untuk menarik investasi masuk ke NTB;
- 6) Pembangunan infrastruktur guna memperluas akses dan distribusi barang jasa perekonomian yang diarahkan secara padat karya, dimana selain membantu menggerakkan ekonomi masyarakat, juga dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi pengangguran.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan dalam rangka penggalan dan pemanfaatan potensi daerah yang bertujuan untuk memberikan manfaat untuk masyarakat secara keseluruhan, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan

pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Pedoman dalam hal pengelolaan keuangan daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2018 - 2023.

Pengelolaan keuangan daerah adalah berbasis money follow program dalam rangka memenuhi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas jika dilihat dari penerimaan fiskal daerah maka pengelolaan aset daerah dilakukan secara profesional pada posisi yang potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (non-APBD) antara lain pendanaan melalui APBN; kolaborasi APBD kabupaten/kota; PHLN; Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU; swadaya masyarakat; serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR).

3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, perumusan kebijakan pendapatan daerah merupakan hal yang sangat penting sehingga apa yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Kebijakan pendapatan daerah Provinsi NTB merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, serta dana perimbangan dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah.

Kondisi perekonomian daerah sangat mempengaruhi kinerja pendapatan daerah terutama terkait pendapatan asli daerah dan kebijakan fiskal nasional terkait dengan dana transfer pusat dan daerah. Kinerja pendapatan daerah NTB dalam kurun waktu 2020 – 2021, target 2022 serta proyeksi tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 3- 4 Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah NTB Tahun 2020 - 2023

Kode	Uraian	Realisasi		Target	Perubahan RPJMD	Ranhir RKPD
		2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	9
4	Pendapatan	5.174.293.221.665,00	5.326.932.790.703,59	5.399.077.280.000,00	6.073.974.442.021,11	5.910.429.192.261,00
4.1	Pendapatan Asli Daerah	1.815.690.092.106,00	1.888.456.286.095,59	2.571.637.450.300,00	2.347.637.227.782,60	2.347.637.227.782,61
4.1.1	Pajak Daerah	1.328.307.081.373,00	1.418.222.758.510,50	1.726.235.525.000,00	1.838.441.660.456,40	1.838.441.660.456,40
4.1.2	Retribusi Daerah	16.474.033.077,00	10.448.164.349,00	44.103.870.600,00	48.782.900.000,00	48.782.900.000,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	61.121.457.472,00	46.263.633.608,19	60.349.184.000,00	63.626.648.991,69	63.626.648.991,69
4.1.4	Lain-Lain PAD Yang Sah	409.787.520.184,00	413.521.729.627,90	740.948.870.700,00	396.786.018.334,52	396.786.018.334,52
4.2	Pendapatan Transfer	3.351.385.124.044,00	3.414.313.104.250,00	2.819.427.922.100,00	3.679.097.812.418,17	3.515.552.562.658,06
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.349.721.895.031,00	3.412.475.468.388,00	2.817.765.836.100,00	3.677.370.425.315,46	3.513.732.570.658,06
4.2.1.1	Dana Perimbangan	3.310.586.841.031,00	3.343.953.221.388,00	2.807.831.943.100,00	3.606.156.042.959,20	3.442.518.188.301,79
4.2.1.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	233.260.247.715,00	276.889.215.058,00	248.456.218.100,00	274.156.105.210,39	274.156.105.210,39
4.2.1.1.2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.475.540.106.000,00	1.475.675.853.000,00	1.478.509.073.000,00	1.584.396.964.244,35	1.584.396.964.244,35
4.2.1.1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	441.974.853.538,00	346.452.123.817,00	488.637.833.000,00	434.064.275.901,13	434.064.275.901,13
4.2.1.1.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	1.159.811.633.778,00	1.244.936.029.513,00	592.228.819.000,00	1.313.538.697.603,33	1.149.900.842.945,92
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	39.135.054.000,00	68.522.247.000,00	9.933.893.000,00	71.214.382.356,27	71.214.382.356,27
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	1.663.229.013,00	1.837.635.862,00	1.662.086.000,00	1.727.387.102,71	1.819.992.000,00
4.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	1.663.229.013,00	1.837.635.862,00	1.662.086.000,00	1.727.387.102,71	1.819.992.000,00
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	7.218.005.515,00	24.163.400.358,00	8.011.907.600,00	47.239.401.820,33	47.239.401.820,33
4.3.1	Pendapatan Hibah	7.218.005.515,00	24.163.400.358,00	8.011.907.600,00	47.239.401.820,33	47.239.401.820,33

Sumber: TAPD NTB 2022

Tahun 2020 merupakan tahun awal pandemi Covid-19 dimana PAD mengalami peningkatan sebesar 0,45% sementara Pendapatan Daerah mengalami kontraksi hingga 0,45% akibat penurunan penerimaan Dana Perimbangan pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan PAD mampu bertahan dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Selama tiga tahun terakhir kontribusi PA terhadap Pendapatan Daerah terus meningkat meskipun gejolak perekonomian dan social masyarakat belum stabil pasca gempa dan Pandemi Covid-19 dengan rata-rata sebesar 35,10%. Secara nominal PAD juga mengalami peningkatan penerimaan dengan rata-rata sebesar 4,43%.

Kontribusi PAD tahun 2020 mengalami peningkatan 0,90% dibanding kontribusi tahun sebelumnya. Penerimaan PAD tahun 2020 sebesar Rp1.815.690.092.106,- terdiri dari Pajak Daerah sebesar 73,15%, Retribusi Daerah sebesar 0,90%, Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah sebesar 3,37% dan Lain-Lain PAD Yang Sah sebesar 22,57%. Penerimaan PAD tersebut mencapai 93,71% dari target PAD sebesar Rp1.979.279.325.434,-

Melihat capaian tahun 2021, bahwa pandemi Covid-19 masih belum menghilang walaupun kalau melihat perkembangannya sudah mulai menunjukkan penurunan, di sisi lain pergerakan masyarakat yang sudah berangsur normal, namun dari sisi Pendapatan Daerah tahun 2021 masih belum sesuai dengan yang diharapkan, hal ini artinya Pemerintah Daerah harus tetap bekerja keras agar pendapatan daerah di tahun-tahun mendatang dapat meningkat secara signifikan. Sementara itu untuk penyusunan proyeksi pendapatan daerah Provinsi NTB tahun 2023 tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi makro yang diproyeksikan mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2022 walaupun peningkatannya tidak signifikan. Hal ini terkait dengan pandemi Covid-19 diharapkan sudah melandai pada akhir tahun 2022 dan potensi yang dimiliki, kebijakan pemerintah yang mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah, serta upaya intensifikasi akan dilakukan.

Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023, diarahkan kepada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan berbagai upaya dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah sebagai berikut:

1. Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan pemutakhiran data potensi pajak dan retribusi daerah secara kontinu.
 - b. Meningkatkan kerjasama dengan mitra samsat yaitu kepolisian dan jasa raharja.
 - c. Melaksanakan Operasi Gabungan (OPGAB) untuk menjaring kendaraan luar daerah dan kendaraan yang menunggak pajak kendaraan bermotor (PKB) bekerjasama dengan Pihak Kepolisian dan Dinas Perhubungan.
 - d. Melakukan sosialisasi dan penagihan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak/Masyarakat bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota.
 - e. Memberikan insentif atau rasionalisasi pajak/retribusi daerah.
 - f. Melakukan pendataan dan pemutakhiran terhadap potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - g. Melakukan inventarisasi terhadap aset-aset daerah yang potensial untuk dijadikan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Optimalisasi pelaksanaan perda yang berkaitan dengan retribusi dan Lain Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang penerimaannya dikelola oleh masing-masing OPD penghasil retribusi dan Lain Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah lingkup Pemerintah Provinsi NTB.
 - h. Melaksanakan rapat koordinasi/evaluasi realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dengan OPD pemungut Pendapatan Daerah setiap triwulan dan semester.

2. Upaya Meningkatkan Pendapatan Transfer, termasuk didalamnya Dana Perimbangan sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi penerimaan yang bersumber dari Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat, dengan terus memperhatikan penegasan variable/komponen yang berpengaruh terhadap perhitungan jumlah DAU dan DAK;
 - b. Pencapaian target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat diupayakan melalui penyempurnaan kuantitas dan kualitas koordinasi dan sinergitas dengan Kementerian/Lembaga/Instansi yang menjadi sumber/pengelola pendapatan transfer seperti: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak), Kementerian ESDM, BPKAD, DLHK, Dinas ESDM, dan PT. Bank NTB Syariah;
 - c. Pencapaian target Pendapatan Transfer Antar Daerah diupayakan melalui pemantapan koordinasi dan jalinan Kerjasama antar Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota agar pendapatan transfer antar daerah tetap aman dan produktif; dan
 - d. Meningkatkan penggalan sumber pendapatan potensial seperti Cukai Tembakau.

3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah serta berpedoman pada KUA – PPAS yang didasarkan pada RKPD.

Belanja Daerah sesuai ketentuan pada Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Sedangkan, Urusan Pemerintahan Pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan capaian kerja setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, tentunya tetap mempertimbangkan dampak adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19. Belanja diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan sosial dasar, pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis produk unggulan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup, serta pembangunan

infrastruktur wilayah guna mendukung pembangunan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Kinerja Belanja daerah NTB dalam kurun waktu 2020 – 2021, target 2022 serta proyeksi tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 3- 5 Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Daerah NTB Tahun 2020 – 2023

Kode	Uraian	Realisasi		Target	Perubahan RPJMD	Ranhir RKPD
		2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	9
5	Belanja	5.199.504.575.008,00	5.545.143.797.894,91	5.961.577.280.000,00	6.083.974.442.021,11	5.920.429.192.261,00
5.1	Belanja Operasi	3.640.079.368.674,00	4.083.390.493.557,81	3.963.568.056.204,00	4.288.681.888.845,12	4.143.316.647.085,29
5.1.1	Belanja Pegawai	1.394.575.008.135,00	1.507.538.794.099,25	1.861.978.585.842,00	1.662.679.672.556,20	1.662.679.672.556,20
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.080.977.858.050,00	1.388.499.647.798,56	1.875.426.552.652,00	1.694.332.499.985,75	1.484.119.656.785,92
5.1.3	Belanja Bunga	0	1.387.500.000,00	53.334.762.864,00	0	67.847.601.440,00
5.1.4	Belanja Subsidi	308.091.627,00	392.732.190,00	207.370.800,00	3.000.000.000,00	0,00
5.1.5	Belanja Hibah	1.151.239.535.162,00	1.177.818.830.870,00	163.274.384.046,00	909.596.166.303,17	909.596.166.303,17
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	12.978.875.700,00	7.752.988.600,00	9.346.400.000,00	19.073.550.000,00	19.073.550.000,00
5.2	Belanja Modal	608.297.481.636,00	771.280.939.990,10	1.166.222.468.796,00	932.332.884.607,71	932.332.884.607,71
5.3	Belanja Tidak Terduga	311.110.985.117,00	33.364.840.102,00	4.000.000.000,00	15.000.000.000,00	10.000.000.000,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	311.110.985.117,00	33.364.840.102,00	4.000.000.000,00	15.000.000.000,00	10.000.000.000,00
5.4	Belanja Transfer	640.016.739.581,00	657.107.524.245,00	827.786.755.000,00	847.959.668.568,29	834.779.660.568,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	639.658.652.081,00	655.804.671.445,00	822.328.667.500,00	832.959.668.568,29	832.959.668.568,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	358.087.500,00	1.302.852.800,00	5.458.087.500,00	15.000.000.000,00	1.819.992.000,00

Sumber: TAPD NTB 2022

Secara umum terdapat peningkatan jumlah belanja dari tahun 2020 – 2021 atau meningkat sebesar 5,61 persen. Terdapat peningkatan yang cukup signifikan pada komponen Belanja Bantuan Keuangan yakni sebesar 263,84 persen, hal ini terjadi karena terdapat peningkatan belanja bantuan ke Partai Politik. Terdapat penurunan Belanja Bantuan Sosial yang signifikan pada tahun 2020-2021 sebesar 40,26 persen, hal ini disebabkan adanya pembatasan pemberian bantuan social terutama dalam bentuk bantuan dana. Selain itu terdapat penurunan juga pada komponen Belanja Tak terduga sebesar 89,28 persen yang disebabkan pada tahun 2021 tidak ada lagi pelaksanaan refocusing dalam rangka penanganan Covid 19 sesuai arahan pemerintah pusat.

Berpijak pada kondisi pembangunan di NTB saat ini, serta belajar dari dampak pandemi Covid-19, pemerintah harus fokus pada penyeimbangan struktur fundamental perekonomian NTB antara pariwisata, pertanian, perikanan, koperasi dan industri. Arah pembangunan yang berfokus pada penyeimbangan antar sektor ini akan sangat membutuhkan penyeimbangan kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran dalam implementasi Belanja Daerah serta penjabarannya secara terintegrasi serta mampu mempertajam penjabaran visi misi daerah kedalam perumusan program pembangunan

secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah dan terpadu berdasarkan skala prioritas dengan sasaran dan outcome yang jelas serta terukur dalam implementasinya benar-benar menyentuh dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, pemenuhan belanja rutin perkantoran (fixed cost), belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah yang pada tahun 2023. Dengan menggunakan indikator ruang fiskal (ketersediaan dana dalam APBD yang dapat digunakan secara bebas oleh daerah) dan ruang fiskal daerah NTB menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara umum Pengelolaan Belanja Daerah Provinsi NTB diperuntukkan dan fokus pada program-program prioritas yang akan dicapai, antara lain :

1. Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata;
2. Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur;
3. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta pengentasan Kemiskinan;
4. Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai – Nilai Budaya Lokal;
5. Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi;
6. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat.

Kebijakan belanja daerah Tahun 2023 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif, adapun Kebijakan belanja daerah untuk Tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Pengelolaan belanja daerah yang bersifat wajib untuk bidang kesehatan dan pendidikan, penggunaan dana fungsi pendidikan sebesar minimal 20% dari total belanja daerah dan penggunaan dana fungsi kesehatan sebesar minimal 10% dari total belanja daerah diluar belanja gaji dan tunjangan serta penggunaan untuk moda transportasi sebesar 10% dari target pendapatan pajak kendaraan bermotor, serta belanja bagi hasil pajak daerah kepada Kabupaten/Kota atas target pendapatan pajak daerah;
- b. Belanja daerah untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, Tambahan Penghasilan PNS, dan tunjangan PNSD dengan memperhitungkan kenaikan gaji dan kebutuhan pengangkatan CPNSD sesuai formasi pegawai, belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
- c. Kebutuhan *belanja fixedcost*, *regularcost*, dan *variablecost* secara terukur dan terarah, yaitu Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional perangkat daerah dan Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI Perangkat Daerah, yang meliputi kegiatan koordinasi,

fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian & evaluasi;

- d. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan sosial dasar, pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis produk unggulan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup, serta pembangunan infrastruktur wilayah guna mendukung pembangunan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat
- e. Belanja daerah memenuhi program dan kegiatan yang diarahkan penggunaannya berdasarkan sumber dana (DAK, DBHCHT, Pajak Rokok, belanja untuk OPD yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah PPK-BLUD) serta untuk pemenuhan standar pelayanan minimal urusan pemerintahan dan operasional berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan kewenangan Pemerintah Provinsi dan fasilitas bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non kewenangan Pemerintah Provinsi dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku;
- g. Penguatan kapasitas fiskal kabupaten/kota melalui belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota/desa. Selain itu, sebagai wujud dukungan pada implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, maka bantuan keuangan pada pemerintah desa diarahkan untuk memperkuat kelembagaan dan kualitas aparatur desa;
- h. Belanja untuk penanganan dan pemulihan dampak pandemi COVID-19, baik penanganan di bidang kesehatan maupun untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan daya beli masyarakat;
- i. Belanja pembangunan infrastruktur baik jalan, irigasi, komunikasi, perumahan dan pertanian serta program-program strategis dan unggulan lainnya serta program/kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi NTB (*committed budget*);
- j. Pemenuhan Pelaksanaan SPM;
- k. Alokasi Belanja Tidak Terduga yang diarahkan pada keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, termasuk pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta sebagai mitigasi terhadap resiko dan sensitivitas makrofiskal.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD yang disebut sebagai penerimaan pembiayaan dan atau untuk memanfaatkan surplus APBD yang disebut sebagai penerimaan pembiayaan, sedang pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut pengeluaran pembiayaan.

Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan – permasalahan Pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut diantaranya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pada pengelolaan SiLPA dan pinjaman daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Sementara itu, kebijakan pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo.

Kinerja Belanja daerah NTB dalam kurun waktu 2020 – 2021, target 2022 serta proyeksi tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 3- 6 Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah NTB Tahun 2020 – 2023

Kode	Uraian	Realisasi		Target	Perubahan RPJMD	Ranhir RKPD
		2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	9
6	Pembiayaan					
6.1	Penerimaan Pembiayaan	145.073.790.629,63	307.367.513.687,05	562.500.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	5.000.000.000,00			
	Pembiayaan Netto	145.073.790.629,63	302.367.513.687,05	562.500.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	119.862.437.286,63	84.156.506.495,73	0,00	0,00	0,00

Sumber: TAPD NTB 2022

Selama tahun 2020 – 2021 penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan Pinjaman Daerah sementara pengeluaran pembiayaan bersumber dari penyertaan modal daerah akan tetapi pada tahun 2020 tidak ada pengeluaran pembiayaan karena alokasi anggaran lebih difokuskan untuk penanganan Covid 19. Nilai SiLPA yang tersisa tertinggi terjadi pada tahun 2021 yakni meningkat sebesar 14,77 persen. Untuk tahun 2022 penerimaan pembiayaan ditargetkan bersumber dari penerimaan pinjaman daerah yakni Pinjaman Daerah yang dalam rangka Pemulihan Ekonomi untuk pembangunan infrastruktur strategis di NTB.

3.2.4 Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya

Guna penyelesaian permasalahan pembangunan dan sebagai upaya untuk mendukung pencapaian target sasaran pembangunan daerah, kebijakan pembiayaan daerah juga diarahkan untuk mendorong pendanaan alternatif Non APBD. Pendanaan alternatif non APBD ditempuh diantaranya dengan mendorong pengembangan kerjasama Pemerintah dengan badan usaha, peningkatan peran swasta dan BUMN – BUMD serta bentuk partisipasi swadaya masyarakat lainnya.

Besarnya kebutuhan dana untuk pembangunan di Provinsi NTB dan terbatasnya sumber-sumber penerimaan konvensional mendorong Pemerintah Daerah Provinsi NTB untuk mencari alternatif pembiayaan anggaran dalam membangun NTB. Sumber – sumber pendanaan pembangunan non-APBD yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan serta memperkuat integrasi sumber pendanaan pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kolaborasi APBD Kabupaten/Kota, Pinjaman Daerah, dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

3.2.4.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pembangunan dalam suatu daerah membutuhkan banyak sumber pendanaan, selain bersumber dari APBD Provinsi NTB, dukungan pendanaan juga diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh Perangkat Daerah Provinsi. Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Menjadi Kunci Menghadapi Keterbatasan Fiskal dalam APBD pada Masa Pandemi Covid-19. APBN sebagai suatu rencana keuangan, mengandung arti bahwa pemerintah mempunyai perencanaan terhadap pengeluaran dan penerimaan untuk untuk membiayai kepentingan negara atau pengelolaan pemerintahan. Dalam perencanaan keuangan, bisa saja pengeluaran direncanakan setinggitingginya, atau serendah-rendahnya. Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh Perangkat Daerah di kabupaten/kota maupun Perangkat Daerah Provinsi.

3.2.4.2 Kolaborasi APBD Kabupaten/Kota

Keterbatasan sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah melalui APBD Provinsi NTB dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan melalui kolaborasi pembiayaan dengan APBD kabupaten/kota. Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam penuntasan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan provinsi sejalan dan sinergis dengan program dan kegiatan pemerintah kabupaten/kota, sehingga antara provinsi dan kabupaten/kota dapat bekerja sama di dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan sharing pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya.

Keterbatasan sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah melalui APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan melalui kolaborasi pembiayaan dengan APBD kabupaten/kota. Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam menuntaskan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan provinsi sejalan dan sinergis dengan program dan kegiatan pemerintah kabupaten/kota, sehingga antara provinsi dan kabupaten/kota dapat bekerjasama didalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan sharing pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya.

3.2.4.3 Pinjaman Daerah

Dalam pelaksanaan pembangunan, pinjaman daerah dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan pembangunan. Konsep dasar pinjaman daerah dalam PP 54/2005 dan PP 30/2011 pada prinsipnya diturunkan dari UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman. Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai resiko seperti resiko kesinambungan fiskal, resiko tingkat bunga, resiko pembiayaan kembali, resiko kurs, dan resiko operasional, maka Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional menetapkan batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah.

Beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dari pinjaman daerah di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah.
2. Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah.
3. Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan kas.
4. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.
5. Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan terhadap pinjaman pihak lain.
6. Pinjaman daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan Pemerintah Daerah sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman.
7. Pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah.

8. Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.
9. Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pinjaman daerah dicantumkan dalam APBD.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah, diantaranya bersumber dari:

1. Pemerintah Pusat, berasal dari APBN termasuk dana investasi Pemerintah, penerusan pinjaman dalam negeri, dan/atau penerusan pinjaman luar negeri;
2. Pemerintah Daerah lain;
3. Lembaga Keuangan Bank, yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Lembaga Keuangan Bukan Bank, yaitu lembaga pembiayaan yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Masyarakat, berupa Obligasi Daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri.

Pemerintah Daerah dapat menggunakan hasil dari Pinjaman Daerah sebagaimana jenis pinjamannya, yaitu:

1. Pinjaman Jangka Pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.
2. Pinjaman Jangka Menengah dipergunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan.
3. Pinjaman Jangka Panjang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang (i) menghasilkan penerimaan langsung, (ii) menghasilkan penerimaan tidak langsung, (iii) memberikan manfaat ekonomi dan sosial.
4. Khusus pinjaman jangka panjang dalam bentuk obligasi daerah digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut.

3.2.4.4 Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha.

Kerjasama pemerintah dengan badan usaha dilakukan dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. Kerjasama tersebut mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Penanggung jawab Proyek Kerjasama (PJPK), yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak. Skema pendanaan KPBU dimaksudkan untuk pembangunan prasarana dasar yang tidak

layak secara finansial namun layak secara ekonomis dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kerjasama pemerintah dan badan usaha menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi.

Karakteristik proyek KPBU meliputi:

1. Proyek KPBU merupakan proyek infrastruktur yang penyediaannya dilakukan Pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha
2. Skema diwujudkan melalui ikatan perjanjian (kontrak) kerjasama yang melibatkan pemerintah sebagai PJP dan suatu badan usaha.
3. Dalam perjanjian kerjasama proyek, pihak badan usaha dapat bertanggungjawab atas desain, kontribusi, pembiayaan dan operasi proyek KPBU.
4. Perjanjian kerjasama skema KPBU biasanya memiliki jangka waktu relatif panjang (lebih dari 15 tahun) untuk memungkinkan pengembalian investasi bagi pihak badan usaha.
5. Basis dan perjanjian kerjasama proyek KPBU tersebut adalah pembagian alokasi risiko antara pemerintah melalui PJP dan badan usaha.

KPBU di Indonesia sudah dibuka untuk 19 sektor baik KPBU ekonomi maupun sosial yang mempunyai kelayakan finansial tinggi (*full cost recovery*) atau kelayakan marjinal, 19 jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha yaitu: 1) infrastruktur transportasi; 2) infrastruktur jalan; 3) infrastruktur sumber daya air dan irigasi; 4) infrastruktur air minum; 5) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat; 6) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat; 7) infrastruktur sistem pengelolaan persampahan; 8) infrastruktur telekomunikasi dan informatika; 9) infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, termasuk infrastruktur energi terbarukan; 10) infrastruktur konservasi energi; 11) infrastruktur ekonomi fasilitas perkotaan; 12) infrastruktur kawasan; 13) infrastruktur pariwisata, antara lain pusat informasi pariwisata (*tourism information center*); 14) infrastruktur fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan; 15) infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenian dan budaya; 16) infrastruktur kesehatan; 17) infrastruktur pemasyarakatan; 18) infrastruktur perumahan rakyat; 19) infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenian dan budaya.

Pengelompokan 19 (sembilan belas) jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha melalui skema pendanaan KPBU dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok terdiri kelompok pertama 7 (tujuh) jenis infrastruktur konektivitas (transportasi, jalan, ketenagalistrikan, migas dan energi baru dan terbarukan (EBT), konservasi energi, telekomunikasi dan informatika), kelompok kedua 7 (tujuh) jenis infrastruktur fasilitas perkotaan (air minum, pengelolaan limbah setempat, pengelolaan limbah terpusat, pengelolaan sampah, SDA dan irigasi, pasar tradisional, perumahan rakyat, dan kelompok ketiga 6 jenis infrastruktur fasilitas sosial (pariwisata, pendidikan, lembaga pemasyarakatan, sarana olahraga dan budaya, kawasan/technopark, kesehatan).

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023

Arahan Presiden dalam melaksanakan misi Nawacita dan upaya pencapaian Visi Indonesia 2045 mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Sebagai wujud operasionalisasi RPJMN Tahun 2020–2024 yang disusun berlandaskan RPJPN Tahun 2005–2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden, ditetapkan tujuh agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020–2024 yang meliputi (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Lima arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2020-2024 dideskripsikan sebagai berikut:

1. **Pembangunan Sumber Daya Manusia:** Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. **Pembangunan Infrastruktur:** Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. **Penyederhanaan Regulasi:** Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (dua) undang-undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
4. **Penyederhanaan Birokrasi:** Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. **Transformasi Ekonomi:** Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan Sumber Daya Alam (SDA) menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan Indonesia ke depan, sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, melalui:
 - 1) Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT).
 - 2) Peningkatan kuantitas/ ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
 - 3) Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan.
 - 4) Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan.

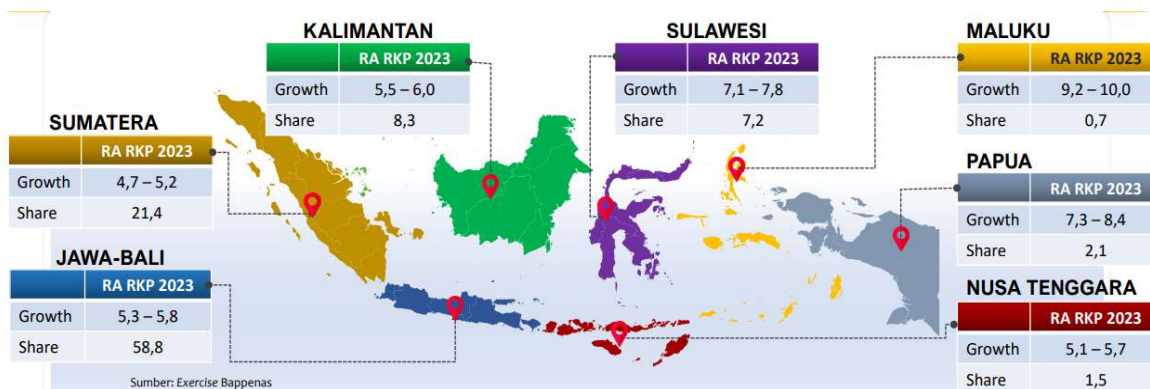
- b. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian, melalui:
 - 1) Penguatan kewirausahaan dan (UMKM), dan koperasi.
 - 2) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi.
 - 3) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
 - 4) Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.
2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dengan sasaran: Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI), yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera.
3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan sasaran:
 - a. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan.
 - b. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk.
 - c. Terpenuhiya layanan dasar.
 - d. Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda.
 - e. Terwujudnya pengentasan kemiskinan.
 - f. Meningkatnya produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dengan sasaran:
 - a. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya.
 - b. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan.
 - c. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial.
 - d. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat.
 - e. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar.
 - b. Meningkatnya konektivitas wilayah.
 - c. Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan.
 - d. Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien.
 - e. Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dengan sasaran:

- a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, yang mencakup: 1) Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 2) Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 3) Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 4) Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
 - b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim, yang mencakup: 1) Penanggulangan Bencana; 2) Peningkatan Ketahanan Iklim.
 - c. Pembangunan Rendah Karbon, yang mencakup: 1) Pembangunan Energi Berkelanjutan; 2) Pemulihan Lahan Berkelanjutan; 3) Pengelolaan Limbah; 4) Pengembangan Industri Hijau; 5) Rendah Karbon Pesisir dan Laut.
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik, dengan sasaran: Menguatnya Stabilitas Polhukhankam dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik melalui: a). Konsolidasi Demokrasi; b). Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri; c). Penegakan Hukum Nasional yang Mantap; d). Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; e. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Adapun sasaran ekonomi makro tahun 2020-2024 dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkat rata-rata 5,7-6,0 % per tahun, melalui peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, dan peningkatan kualitas SDM. Penetapan target pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan dapat dicapai dengan kondisi Gross National Income (GNI) per kapita (Atlas Method) yang meningkat menjadi USD5.810-6.000 per kapita pada tahun 2024. Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga tetap menjadi prioritas. Sasaran inflasi tahun 2020-2024 dijaga stabil dengan tren menurun, menjadi sekitar 2,7 % pada tahun 2024. Pencapaian sasaran tersebut diupayakan melalui penyelesaian permasalahan struktural, pengelolaan ekspektasi, dan penguatan koordinasi.

Sasaran pertumbuhan ekonomi untuk wilayah Nusa Tenggara sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Pusat Tahun 2023 diharapkan tumbuh sebesar 5,1-5,7 %.

Gambar 4- 1 Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2023



4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023

Tahun 2023 merupakan tahun terakhir dalam pelaksanaan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun Visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan RPJMD tahun 2019-2023 adalah **“Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang”**, Dalam rangka mewujudkan visi untuk membangun Nusa Tenggara Barat yang gemilang, ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019 -2023 sebagai berikut:

1. Misi 1 “NTB TANGGUH DAN MANTAP” melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah
2. Misi 2 “NTB BERSIH DAN MELAYANI” melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi.
3. Misi 3 “NTB SEHAT DAN CERDAS” melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah.
4. Misi 4 “NTB ASRI DAN LESTARI” melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.
5. Misi 5 “NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI” melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi.
6. Misi 6 “NTB AMAN DAN BERKAH” melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Keenam Misi RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 dijabarkan kedalam 10 (sepuluh) tujuan dan 26 (dua puluh enam) sasaran pembangunan daerah. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 sebagai berikut:

1. Terwujudnya ketangguhan menghadapi resiko bencana, dengan sasaran : Meningkatkan Kapasitas dalam Penanggulangan Bencana.
2. Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk pengembangan sektor unggulan, dengan sasaran : (1) Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah, (2) Meningkatkan Konektivitas Antar Wilayah.
3. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel, dengan sasaran : (1) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah, (2) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, (3) Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, (4) Meningkatkan Profesionalisme ASN, dan (5) Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat.
4. Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing, dengan sasaran : Meningkatkan Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat.
5. Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing, dengan sasaran : Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Layanan Pendidikan.
6. Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan, dengan sasaran : (1) Meningkatkan Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, dan (2) Meningkatkan Pengelolaan Persampahan.

7. Terwujudnya pertumbuhan pertanian/agribisnis dan investasi yang berkualitas, dengan sasaran : (1) Meningkatnya Investasi (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), (2) Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas, (3) Meningkatnya Jaminan Kesehatan dan Sosial bagi Penduduk Miskin, (4) Meningkatnya Ketahanan dan Keragaman Konsumsi Pangan, (5) Terpenuhinya Pelayanan Dasar bagi Penduduk Miskin, (6) Terjaganya Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok, dan (7) Meningkatnya Kemampuan Masyarakat Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup.
8. Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan, dengan sasaran : Meningkatnya Daya Saing Pariwisata.
9. Terwujudnya perindustrian yang unggul, dengan sasaran : (1) Meningkatnya Daya Saing Industri, dan (2) Menurunnya Pengangguran Terbuka.
10. Terwujudnya kehidupan masyarakat NTB yang madani (Bahagia), dengan sasaran : (1) Meningkatnya Nilai Sosial Budaya dan Toleransi Masyarakat, (2) Meningkatnya Kualitas dan Penegakan Produk Hukum Daerah, (3) Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat, dan (4) Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tabel 4- 1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2017-2021					Target Capaian		Penyesuaian Target Capaian	
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2022	2023
1	Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah	Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana (Point)			Point	142,90	139,4	129,02	128,05	122,33	119,41	115,83	119,41	115,83
				Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Point	0,53	0,55	0,57	0,63	0,63	0,63	0,65	0,64	0,65
		Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan	Indeks Aksesibilitas			Point	73,69	74,6	76,02	77,77	78,81	79,84	81,17	79,84	81,17
				Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah	Persentase Kemantapan jalan	%	77,16	83,65	80,28	80,05	84,01	85,36	86,60	85,36	86,60
					Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	50,54	50,63	50,76	57,07	50,88	52,17	54,50	52,17	54,50
				Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase konektivitas transportasi public	%	73,72	74,76	78,64	90,29	88,00	86,86	89,14	88,88	89,14
2	Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi			Point	CC	CC	B	B	B	BB	BB	BB	BB
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini BPK	Status	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	32,15	33,77	34,77	35,09	35,46	36,97	38,65	36,97	38,65
				Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Kategori	B (>60 - 70)	B (62,53)	BB	B	BB	BB (76,01 - 80,00)	A (80,01 - 90,00)	BB	A
				Meningkatnya Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN	Point	0,57	0,60	0,54	0,59	0,69	0,70	0,72	0,70	0,72
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	Point	3,42	4,56	3,63	3,56	3,54	4,53	4,55	3,57	3,60

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2017-2021					Target Capaian		Penyesuaian Target Capaian	
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2022	2023
3	Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah	Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Kesehatan			Point	70,08	70,57	71,20	71,55	71,83	72,43	73,05	72,43	73,05
				Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	65,55	65,75	66,28	66,51	66,69	67,08	67,48	67,08	67,48
					Persentase Balita <i>Stunting</i>	%	37,20	33,49	25,50	23,33	19,23	30,99	30,49	18,99	18,76
		Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Pendidikan			Point	60,39	60,85	61,68	62,42	63,21	62,74	63,10	63,25	63,29
				Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,46	13,51	13,57	13,7	13,90	13,73	13,79	13,95	14,00
					Rata rata Lama Sekolah	Tahun	6,90	6,93	7,27	7,31	7,38	7,04	7,07	7,42	7,46
4	Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan	Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			Point	56,99	75,16	64,56	70,83	69,89	68,22	68,46	70,39	70,69
				Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Point	20,25	74,63	40,23	50,98	45,10	42,93	43,03	45,60	45,90
					Indeks Kualitas Udara	Point	88,02	87,17	87,40	88,63	88,52	87,56	87,59	89,02	89,32
					Indeks Kualitas Air Laut	Point	-	-	-	67,49	80,22	70,89	71,48	80,72	81,02
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	61,27	66,56	65,67	44,82	65,59	68,70	69,70	68,70	69,70
			Neraca pengelolaan sampah			%	-	-	41,71	44,82	49,02	85,00	100,00	50,92	52,82
				Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	%	-	-	34,91	37,63	39,68	60,00	70,00	40,68	41,58
					Persentase Pengurangan Sampah	%	-	-	6,80	7,19	9,34	25,00	30,00	10,24	11,24
5	Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan,	Terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas	Indeks Daya Beli			Point	69,76	70,99	72,03	71,19	71,27	74,68	75,56	71,35	71,43
				Meningkatnya Investasi (kerjasama pemerintah dan badan usaha)	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	11.280	14.000	10.024	11.600	14.879	15.428	17.814	15.428	17.814

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2017-2021					Target Capaian		Penyesuaian Target Capaian	
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2022	2023
	mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi			Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	22,03	23,51	23,06	23,2294	26,4	23,71	23,88	23,71	23,88
				Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	77,80	78,30	85,30	91,30	90,40	86,70	87,20	90,50	90,55
				Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Cakupan Air Minum	%	-	70,48	72,59	74,88	78,76	78,45	80,59	78,86	78,91
					Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	69,25	69,53	78,8	91,36	87,78	80,91	82,46	87,88	87,98
					Rasio Elektrifikasi	%	85,10	93,83	99,55	99,98	99,98	99,88	99,99	99,98	99,99
					Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	53,04	56,75	56,35	62,53	63,47	65,80	68,95	64,47	65,47
				Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	Inflasi	%	3,70	3,16	1,87	0,68	2,12	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	2-3	2-3
				Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup	Pengeluaran per kapita	Rp.000	9.877	9.917	10.640	10.351	10.377	11.604	11.944	10.477	10.577
		Terwujudnya pariwisata	Pertumbuhan sektor			%	7,27	-4,59	-0,08	-28,24	1,35	3,00	4,50	3,00	4,50

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2017-2021					Target Capaian		Penyesuaian Target Capaian	
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2022	2023
		yang dapat diandalkan	kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Meningkatnya daya saing pariwisata	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Rp. Miliar	112,36	76,13	117,21	-444,54	15,20	129,78	137,24	45,20	85,20
		Terwujudnya perindustrian yang unggul	Pertumbuhan Industri			%	2,00	2,00	4,57	7,08	6,75	7,50	9,00	6,80	6,85
				Meningkatnya daya saing industri	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan	Rp. Miliar	240,99	56,28	164,96	-110,55	94,66	173,02	179,91	104,66	114,66
				Menurunnya pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,32	3,72	3,42	4,22	3,01	3,19	3,17	3,01	3,00
6	Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkeadilan dan penegakan hukum yang berkeadilan	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani (Bahagia)	Indeks Kriminalitas			Point	18,05	17,25	12,71	13,09	10,67	14,05	13,25	10,62	10,57
				Meningkatnya Nilai Sosial Budaya dan Toleransi Masyarakat	Persentase penurunan konflik social	%	8,70	38,10	46,15	57,14	25	20,00	0,00	20,00	0,00
				Meningkatnya Kualitas dan Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	4,45	4,65	4,88	52,78	31,21	5,72	6,07	5,72	6,07
			Partisipasi politik masyarakat			%	78,44	77,50	82,80	80	NA	84,57	85,2	-	-
				Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	0,40	0,50	0,60	0,65	0,61	0,90	1,00	0,62	0,63
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			Point	59,95	60,06	55,81	51,96	52,01	61,16	61,40	52,06	52,11
				Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	17,79	17,93	18,60	26,87	27,24	19,27	20,47	27,27	27,30

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2017-2021					Target Capaian		Penyesuaian Target Capaian	
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2022	2023
					Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	%	0	10	40	40	50	80	100	80	100

Sumber : RPJMD Provinsi NTB 2019-2023

Dua puluh enam sasaran pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023 dilaksanakan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun selama periode RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023. Dalam pelaksanaannya, sasaran pembangunan tersebut juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan sasaran utama pembangunan nasional tahun 2023 yang sudah ditetapkan pemerintah pusat. Dukungan tersebut dilaksanakan melalui sinergi dan kolaborasi dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada, baik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun dari dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Nusa Tenggara Barat, serta dengan mendorong partisipasi masyarakat, dunia usaha, media dan akademisi.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

4.2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023

Tema pembangunan RKP Tahun 2023 adalah **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Tema ini menekankan pentingnya peningkatan produktivitas melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas. Upaya transformasi ekonomi yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang antara lain meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Selanjutnya, arah pembangunan berkelanjutan difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan perubahan iklim. Hal tersebut dilaksanakan dalam koridor pengembangan wilayah dan desa.

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2023, ditetapkan 8 (delapan) arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2023 yakni: (1) percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan, (3) penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, (4) mendorong pemulihan dunia usaha, (5) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (6) pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respons terhadap perubahan iklim), (7) percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi, dan (8) pembangunan Ibu Kota Nusantara

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2023 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah, sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional 1

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, dengan program prioritas:

- a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT).
- b. Peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
- c. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan.
- d. Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dan koperasi.
- e. Peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi.
- f. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).
- g. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

2. Prioritas Nasional 2

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dengan program prioritas:

- a. Pengembangan wilayah pulau sumatera.
- b. Pembangunan wilayah pulau jawa-bali.
- c. Pembangunan wilayah kepulauan nusa tenggara
- d. Pembangunan wilayah pulau kalimantan
- e. Pembangunan wilayah pulau sulawesi
- f. Pembangunan wilayah pulau maluku
- g. Pembangunan wilayah pulau papua.

Untuk mendukung strategi tersebut maka kegiatan prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan kawasan strategis
- b. Pengembangan sektor unggulan
- c. Pengembangan kawasan perkotaan
- d. Pemenuhan pelayanan dasar
- e. Pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pedesaan dan transmigrasi.
- f. Kelembagaan dan keuangan daerah.

3. Prioritas Nasional 3

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan program prioritas:

- a. Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan
- b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial
- c. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
- d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas
- e. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda
- f. Pengentasan kemiskinan

- g. Peningkatan produktivitas dan daya saing
- 4. **Prioritas Nasional 4**
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dengan program prioritas:
 - a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila.
 - b. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan.
 - c. Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial.
 - d. Peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas.
- 5. **Prioritas Nasional 5**
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dengan program prioritas:
 - a. Infrastruktur pelayanan dasar.
 - b. Infrastruktur ekonomi.
 - c. Infrastruktur perkotaan.
 - d. Energi dan ketenagalistrikan.
 - e. Transformasi digital.
- 6. **Prioritas Nasional 6**
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dengan program prioritas:
 - a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.
 - b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim.
 - c. Pembangunan rendah karbon.
- 7. **Prioritas Nasional 7**
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dengan program prioritas:
 - a. Konsolidasi demokrasi
 - b. Optimalisasi kebijakan luar negeri.
 - c. Penegakan hukum nasional.
 - d. Reformasi birokrasi dan tata kelola
 - e. Menjaga stabilitas keamanan nasional.

Kebijakan pembangunan wilayah yang tertuang dalam RPJMN 2020 – 2024 diarahkan untuk menyelesaikan isu ketimpangan antar wilayah. Oleh karena itu diperlukan rumusan arah kebijakan dan sasaran pembangunan wilayah tahun 2023 serta strategi pendekatan pengembangan wilayah seperti berikut:

Tabel 4- 2 Sasaran dan Strategi Pengembangan

No	Sasaran	Strategi dan Pendekatan Pengembangan Wilayah	
		Koridor Pertumbuhan	Koridor Pemerataan
1	Meningkatnya pemerataan antarwilayah (KBI-KTI, Jawa-luar Jawa);	Memacu pertumbuhan ekonomi nasional melalui	Meningkatkan pelayanan dasar yang lebih merata

No	Sasaran	Strategi dan Pendekatan Pengembangan Wilayah	
		Koridor Pertumbuhan	Koridor Pemerataan
2	meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah	percepatan pengembangan kawasankawasan	melalui pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah
3	meningkatkan kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian	pertumbuhan, meliputi PKN, PKW, KEK, KI, dan KSPN, serta kawasan aglomerasi perkotaan pada kabupaten/kota yang terletak pada koridor pertumbuhan”	dan Pusat Kegiatan Lokal sehingga terbentuk pusat-pusat pelayanan dasar baru yang menjangkau daerah pelayanan yang lebih luas terutama kabupaten/kota dalam koridor pemerataan.
4	meningkatkan sinergi anfa pemanfaatan ruang wilayah		

Sumber : Kick Off Meeting RKP 2023 Nasional, 2022

Selanjutnya Arah kebijakan nasional, strategi pertumbuhan dan strategi pemerataan dalam pengembangan wilayah di wilayah Nusa Tenggara yang meliputi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 meliputi:

1. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara, meliputi :
 - a. Mengoptimalkan keunggulan wilayah khususnya sektor perikanan, perkebunan, peternakan, pertambangan dan pariwisata dengan mengutamakan pendekatan gugus pulau.
 - b. Mendorong transformasi perekonomian daerah dengan memperkuat peran wilayah sebagai gerbang wisata alam dan budaya melalui pengembangan industri Meeting, Incentive, Conveticion, Exhibition (MICE).
 - c. Mendorong pengembangan industri kreatif berbasis budaya, industri pengolahan produk pertanian, perikanan dan pertambangan.
 - d. Menuntaskan pemulihan pascabencana di Nusa Tenggara.
2. Strategi Pertumbuhan Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara, meliputi :
 - a. Menyelenggarakan perhelatan internasional dalam rangka pengembangan pariwisata di Nusa Tenggara khususnya DPP Lombok-Mandalika/KEK Mandalika, DPP Labuan Bajo, serta mengembangkan kawasan pariwisata lainnya sesuai rencana induk (masterplan) yang telah disusun;
 - b. Meningkatkan pembangunan infrastruktur konektivitas intra dan antar wilayah kepulauan serta memperkuat koneksi transportasi dengan hub pariwisata internasional utama Bali;
 - c. Meningkatkan produktivitas usaha kelautan dan perikanan khususnya pada SKPT Sumba Timur dan Rote Ndao, peternakan, perkebunan, pertambangan, dan budidaya tanaman pangan termasuk food estate serta mengembangkan pusat perdagangan berbasis sektor strategis;
 - d. Mendorong pengembangan ekonomi kreatif bernilai tinggi;
 - e. Mengembangkan pendidikan keterampilan & vokasi untuk penyiapan sumber daya manusia dalam mendukung pengembangan pusat-pusat ekonomi berbasis potensi wilayah;
 - f. Mendorong pemenuhan energi melalui pengembangan Energi Baru Terbarukan;

- g. Meningkatkan pembangunan kawasan perkotaan pendukung sektor industri dan pariwisata termasuk meningkatkan penyediaan perumahan, akses pada energi, air minum, sanitasi, persampahan yang aman, serta drainase dan transportasi umum perkotaan;
 - h. Meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperkuat forum kerja sama, pengembangan sumber pembiayaan alternatif serta investasi di daerah, serta penataan regulasi daerah dan harmonisasi regulasi pusat-daerah regional Wilayah Nusa Tenggara;
 - i. Meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertifikat hak atas tanah; dan
 - j. Mempercepat proses penyusunan dan penetapan RTRW maupun RDTR melalui pemberian bantuan teknis kepada pemerintah daerah.
3. Strategi Pemerataan Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara, meliputi :
- a. Mempercepat pembangunan perdesaan, daerah tertinggal, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, dan pulau-pulau terluar secara simultan dengan pembangunan kota sedang;
 - b. Mengembangkan ekonomi kawasan perbatasan khususnya PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu untuk memperkuat kedaulatan nasional dan memfasilitasi perdagangan lintas negara;
 - c. Menuntaskan pemulihan sosial ekonomi dampak bencana di Nusa Tenggara;
 - d. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan terutama pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas;
 - e. Mempercepat penerapan SPM dan infrastruktur dasar termasuk sanitasi dan air minum yang aman, pengelolaan sampah dan limbah, penyediaan perumahan, serta social;
 - f. Meningkatkan tata kelola dan kapasitas (aparatur, kelembagaan dan keuangan) melalui penyelarasan kualitas dan kuantitas ASN dengan sektor unggulan kewilayahan Nusa Tenggara, serta penguatan fungsi dan peran GWPP guna mendorong peningkatan daya saing daerah, serta meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan desa dalam mengelola keuangan daerah dan dana desa.

4.2.2 Penelaahan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan bagian dari saran dan masukan DPRD dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang diperoleh dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan Reses yang menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan fokus dan prioritas pembangunan daerah, antara lain:

a. Permasalahan Kesehatan

- 1. Peningkatan sarana prasarana kesehatan, seperti pembangunan MCK, pengadaan Ambulan Desa, serta permohonan hibah uang dalam penyediaan fasilitas Kesehatan yang masih dibutuhkan masyarakat.
- 2. Penguatan sarana dan prasarana posyandu di berbagai daerah berupa penyediaan alat serta pelatihan kader bagi kader posyandu agar bisa lebih produktif.

b. Permasalahan Pendidikan

1. Permohonan pembangunan dan rehab baik Sekolah, lingkungan sekolah seperti paving blok, pagar sekolah dan utilitas sekolah lainnya maupun Ruang Kelas baru (RKB). Ruang Praktik Sekolah dan sarana prasarana penunjang lainnya bagi pendidikan formal di berbagai tingkatan, baik swasta maupun negeri.
2. Permohonan bantuan terhadap pendidikan informal seperti pondok pesantren, MDTA, RA, TK, PAUD, agar dilakukan secara merata di berbagai daerah.
3. Permohonan pemberian Beasiswa bagi masyarakat miskin yang berprestasi.

c. Permasalahan Ekonomi dan Sumber Daya Alam

1. Peningkatan kontribusi sektor ekonomi pada bidang perikanan dan kelautan dalam bentuk Pengadaan bibit ikan, pengadaan alat dan mesin melaut, pengadaan pakan ikan, pengadaan alat tangkap ikan serta penyediaan sarana budidaya perikanan.
2. Peningkatan daya saing industri di bidang koperasi yang dilakukan dengan pemberian modal usaha pada Koperasi, pemberian bantuan alat usaha seperti Mesin, Etalase Dagang dan sebagainya.
3. Bantuan pengadaan bibit ayam petelur, bibit tanaman sayur dan bibit tanaman hortikultura serta pengadaan alat-alat pengolahan pangan yang diharapkan dapat menjadi solusi peningkatan ketahanan dan keragaman konsumsi pangan.
4. Pengembangan pariwisata berbasis desa dengan peningkatan sarana dan prasarana tempat wisata seperti pembangunan Tempat Ibadah, dukungan bagi Kelompok Sadar Wisata, pembangunan spot swafoto, pembangunan gapura identitas serta bantuan pengembangan wisata kesenian dengan membangun Bale Pertunjukan.
5. Pengadaan bantuan untuk sektor perdagangan yang terdampak pandemic covid 19 berupa bantuan modal kepada usaha atau perorangan pedagang, bantuan alat usaha berupa Gerobak Dagang, Terop dan Lapak Dagang.
6. Dalam mendorong sektor perindustrian beberapa bantuan yang diusulkan adalah berupa Bantuan mesin usaha seperti mesin konveksi, mesin digital printing, mesin jahit, mesin obras, mesin penggilingan, Peralatan multimedia utk industri desain grafis dan sebagainya.
7. Penguatan dukungan di sektor pertanian melalui peningkatan bantuan sarana pertanian dan infrastruktur seperti pembangunan Jalan Usaha Tani, pembangunan Embung Rakyat, jaringan irigasi tersier, Bantuan Hand Traktor, bantuan bibit pertanian, alat perajang tembakau, bantuan alat-alat pertanian, menangani kelangkaan pupuk bersubsidi dengan pemberian bantuan Pupuk, dan pemberian bantuan uang berupa hibah bagi kelompok – kelompok petani.
8. Penguatan bantuan modal usaha peternak baik kelompok maupun perorangan, pemberdayaan bagi kelompok tani, pengembangan ayam petelur, pembuatan sarana dan prasarana burung walet
9. Penguatan bantuan modal untuk kelompok ternak, pengadaan bibit ternak, pengembangan budidaya/perbibitan/penggemukan ternak, bantuan kandang ternak, harga pakan ternak yang terjangkau, peningkatan kapasitas peternak

dengan pendampingan dan pelatihan terhadap kelompok untuk pengolahan produk hasil peternakan dan fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan hasil peternakan dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat.

d. Permasalahan Sosial dan Budaya

1. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk kegiatan olah raga seperti lapangan olahraga, alat-alat olahraga, bantuan seragam olahraga bagi kelompok pemuda atau klub olahraga.
2. Peningkatan bantuan modal usaha bagi para wirausaha muda dan masyarakat secara umum, bantuan peralatan usaha bagi wirausaha muda seperti peralatan sablon, peralatan usaha studio Rekaman, Alat-alat Laundry, pemberdayaan ekonomi di kalangan anak muda maupun anggota kelompok masyarakat dalam bentuk kemudahan akses dan pendampingan seperti pemberian bantuan sarana prasarana berupa Laptop, Sound System, Drone, Kamera, dan media lainnya. Fasilitasi terciptanya ekosistem ekonomi kreatif bagi masyarakat khususnya pemuda seperti bantuan seragam organisasi kepemudaan dan Hibah uang kepada badan/organisasi kemasyarakatan/lembaga Bidang Kepemudaan serta Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda - Pelatihan Wirausaha muda.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana kesenian/kebudayaan seperti bantuan Pakaian Adat, Sound System, Alat-alat kesenian dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya nilai sosial dan budaya.
4. Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat berupa pemberian bantuan kendaraan operasional untuk patrol, pembangunan pos jaga dan penyediaan alat – alat komunikasi. Selain itu dalam rangka peningkatan ketentraman masyarakat juga terdapat usulan bantuan penanganan bencana berupa pengadaan kendaraan tangka dan kendaraan roda 3 (tiga).
5. Fasilitasi dalam meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan berupa Pelatihan Keterampilan Bagi Ibu PKK.
6. Peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat berupa pemberian Hibah Uang, pengadaan Berugaq Pintar dan Pengadaan Buku dan Rak Buku.
7. Fasilitasi kegiatan keagamaan berupa pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi tempat ibadah berupa sound system, alat qasidah, alat banjar, sajadah, karpet, dan wireless. Selain terdapat bantuan berupa dana pembangunan bagi tempat – tempat ibadah, pemberian hewan kurban dan bantuan penembokan tempat ibadah.
8. Peningkatan jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin dalam bentuk bantuan alat usaha, kursi plastic, pembelian sarung, wireless portable, pemberian paket sembako, Bansos dan hibah uang bagi badan/organisasi. Selain itu juga penyediaan kendaraan – kendaraan operasional baik kendaraan khusus seperti tangki air, dan kendaraan roda 3 (tiga).

e. Permasalahan Infrastruktur dan Lainnya

1. Pemasangan listrik murah dan hemat bagi masyarakat miskin.
2. Pengembangan jasa Wisata Alam dalam KPH (flying fox, home stay, rumah pohon, pondok budaya), Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Pembuatan Bibit Penyimpan Air) dan Pembuatan DAM Penahan.
3. Pengadaan alat komunikasi dan informatika, Pembangunan Infrastruktur IT seperti Pembuatan web aplikasi, Pengadaan CCTV, dan Pemasangan Internet Gratis/Wifi.
4. Penanganan lingkungan hidup dengan pemberian bantuan sarana dan prasarana persampahan seperti seperti bak sampah, kendaraan persampahan, Mesin Pengolah Sampah, Mesin Pencacah Sampah Daur Ulang, Pengadaan Mesin Press Hidrolik Sampah Plastik serta Pembentukan dan Pengembangan Bank Sampah.
5. Peningkatan infrastruktur layanan dasar berupa pembangunan sumur bor, perpipaan air minum, Pengembangan SPAM berbasis masyarakat, pembangunan sumur bor, penanganan banjir dengan melakukan normalisasi sungai, Pembangunan Drainase air limbah, perkotaan dan sarana pendukungnya, Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Rehabilitasi Embung.
6. Bantuan Pembangunan Gedung serbaguna
7. Pembangunan jembatan sebagai jalan penghubung antar kabupaten/kota, antar kecamatan, dan antar desa, khususnya di daerah-daerah pelosok.
8. Pembangunan rumah layak huni.
9. Perbaikan dan pelebaran melalui rabat beton, perbaikan jalan lingkungan permukiman.
10. Penataan Kawasan Kumuh.
11. Pengadaan sarana penerangan jalan umum.
12. Permohonan perbaikan rumah tidak layak huni.
13. Penembokan Taman Pemakaman Umum.

4.2.3 Isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis akan sangat unik dan mungkin akan berbeda dengan daerah lain, tidak semua permasalahan masuk dalam isu strategis. Oleh karena itu, dalam proses penyusunan isu strategis provinsi, perlu ada tahap selanjutnya yaitu proses pembobotan permasalahan menjadi isu strategis. Setelah diidentifikasi isu strategis yang ada kemudian masing-masing isu dibobot. Dalam menentukan pembobotan dilakukan FGD untuk memahami usulan dan masukan tentang berbagai isu strategis. Pembobotan dilakukan untuk menentukan mana isu strategis yang paling prioritas dan akan dijadikan dasar bagi Menyusun strategi dan arah kebijakan.

Berdasarkan permasalahan baik yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah maupun permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan hasil analisis isu strategis global, nasional dan regional, serta mempertimbangkan potensi dan permasalahan pembangunan kekinian di Provinsi NTB, maka isu strategis pembangunan Provinsi NTB tahun 2023 sebagai berikut:

1. Penanganan Daerah Rawan Bencana belum optimal, yang ditandai dengan:
 - a. Upaya mitigasi bencana belum maksimal.
 - b. Sumber daya untuk Keadaan Darurat Bencana serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana masih terbatas.
2. Penataan Ruang, Konektivitas, dan Ketersediaan Infrastruktur Wilayah belum optimal, yang ditandai dengan:
 - a. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang belum optimal.
 - b. Tingkat kemantapan jalan yang tinggi belum diimbangi dengan tingkat kenyamanan dan standar pelayanan memadai.
 - c. Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan transportasi belum optimal.
 - d. Sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informasi belum merata
 - e. Potensi energi baru dan terbarukan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri belum dikelola secara optimal.
 - f. Ketersediaan sarana dan prasarana sumber daya air yang mendukung ketahanan pangan belum merata.
 - g. Ketersediaan dan sistem pengelolaan air minum regional belum terintegrasi.
3. Tata kelola pemerintahan yang baik belum berjalan optimal, yang ditandai dengan:
 - a. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil belum optimal.
 - b. Kemandirian keuangan daerah masih rendah.
 - c. Penataan dan pengembangan SDM aparatur belum optimal.
 - d. Indeks kepuasan masyarakat masih relatif rendah.
 - e. Level maturitas pengendalian internal pemerintah belum baik.
 - f. Penerapan *Good Governance* yang didukung teknologi informasi belum optimal.
 - g. Pemutakhiran data dan informasi dalam pembangunan belum optimal.
 - h. Proses fasilitasi pengurusan perizinan belum optimal.
4. Derajat kesehatan masyarakat relatif rendah, yang ditandai dengan:
 - a. Angka harapan hidup saat lahir masih relatif rendah.
 - b. Angka kematian ibu, bayi dan balita relatif masih tinggi.
 - c. Prevalensi kurang gizi dan *stunting* masih tinggi.
 - d. Fasilitas kesehatan yang terakreditasi dan terstandar belum merata.
 - e. SDM kesehatan antar daerah belum merata.
 - f. Akses terhadap layanan kesehatan belum optimal.
 - g. Upaya promotif dan preventif masalah kesehatan belum optimal.
 - h. Usia kawin pertama perempuan kurang dari 21 tahun masih relatif banyak.

5. Mutu dan daya saing proses dan hasil pendidikan belum optimal, yang ditandai dengan:
 - a. Rata-rata lama sekolah masih rendah.
 - b. Sekolah dan lembaga pendidikan yang terakreditasi C atau belum terakreditasi masih cukup banyak.
 - c. Pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia usaha dunia industri belum sesuai.
 - d. Nilai evaluasi atas mutu guru yang ditunjukkan nilai UKG, dan mutu lulusan melalui nilai UN relatif rendah.
 - e. Penyebaran tenaga pendidikan belum merata, sehingga rasio guru murid tidak merata antar daerah.
 - f. Angka buta huruf dewasa cukup tinggi.
 - g. Akses Pendidikan yang belum merata.
 - h. Fasilitas aksesibilitas ke pendidikan tinggi dalam dan luar negeri masih rendah.
6. Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan belum optimal, yang ditandai dengan:
 - a. Indeks kualitas lingkungan hidup semakin menurun.
 - b. Penanganan sampah dan limbah (partisipasi publik, cakupan, dan penegakan hukum) belum optimal.
 - c. Terjadinya degradasi ekosistem hutan, danau, dataran rendah, serta pesisir dan laut.
 - d. Penegakan hukum terhadap eksploitasi ilegal sumberdaya alam (*illegal logging, illegal fishing, illegal mining*) masih lemah.
7. Pertumbuhan pertanian/agribisnis dan investasi relatif lambat, yang ditandai dengan:
 - a. Pertumbuhan ekonomi masih tergantung kepada sektor pertambangan.
 - b. Rendahnya realisasi investasi diluar sektor pertambangan dan pariwisata.
 - c. Nilai perdagangan, impor masih lebih tinggi dari nilai ekspor masih defisit.
 - d. Peranan koperasi, koperasi syariah, BUMDes dalam perekonomian relatif rendah.
 - e. Wirausaha yang produktif dan inovatif masih kurang.
 - f. Akses terhadap sumber daya ekonomi yang murah dan berkelanjutan masih terbatas.
 - g. Penanganan sektor pertanian secara komprehensif belum optimal.
 - h. Lahan potensial yang belum dimanfaatkan secara optimal.
 - i. Potensi pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil belum dikelola secara optimal.
8. Pembangunan Pariwisata melambat karena dampak Pandemi Covid-19, yang ditandai dengan:
 - a. Pengaruh sektor pariwisata belum signifikan terhadap perekonomian masyarakat.
 - b. Potensi pariwisata belum dikelola secara optimal terutama pada kawasan strategis dan desa.
 - c. Adanya penurunan secara signifikan kontribusi sektor-sektor yang terkait kepariwisataan akibat gempa bumi dan pandemi Covid-19.
9. Industrialisasi produk unggulan daerah belum optimal, yang ditandai dengan:

- a. Penciptaan nilai tambah ekonomi komoditas belum optimal.
 - b. Konektivitas sektor hulu (produksi) dan sektor hilir (pengolahan dan perdagangan) belum optimal.
 - c. Pengembangan dan pemberdayaan pelaku industri kreatif belum optimal.
 - d. Industri pengolahan dan industri pendukung komoditas masih kurang.
 - e. Fasilitasi dan pemanfaatan hasil karya industri lokal belum optimal.
 - f. Infrastruktur, perizinan dan investasi industri belum difasilitasi secara khusus dan optimal.
10. Belum terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan damai secara optimal, yang ditandai dengan:
- a. Indeks Demokrasi masih rendah.
 - b. Beberapa daerah masih masuk dalam kawasan rawan konflik sosial.
 - c. Nilai agama, budaya dan kearifan lokal belum diimplementasikan secara optimal dalam kehidupan.
 - d. Angka kriminalitas dan penyalahgunaan NAPZA masih tinggi.

Berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan analisis permasalahan berbasis kewilayahan di seluruh kabupaten/kota, maka isu strategis pembangunan kabupaten/kota berbasis kewilayahan, untuk Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa sebagai berikut:

Tabel Tabel 4- 3 Isu strategis pembangunan kabupaten/kota berbasis kewilayahan

Pulau Lombok	Pulau Sumbawa
1. Daerah Rawan Menghadapi Resiko Bencana 2. Penataan Ruang, Konektivitas dan Ketersediaan Infrastruktur Wilayah belum optimal 3. Masih banyaknya rumah tidak layak huni (RTLH) 4. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik belum berjalan optimal 5. Derajat Kesehatan Masyarakat masih rendah 6. Mutu dan Daya Saing Luaran Pendidikan belum optimal 7. Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan belum optimal 8. Pertumbuhan Pertanian/Agribisnis dan Investasi relatif lambat 9. Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata 10. Daya Saing Produk Unggulan Daerah belum optimal 11. Kehidupan Masyarakat yang aman dan damai belum tercipta secara optimal	1. Mitigasi bencana 2. Cakupan air bersih dan sanitasi perdesaan 3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah 4. Peningkatan capaian target reformasi birokrasi 5. Peningkatan Kualitas layanan Kesehatan dan Pendidikan 6. Percepatan penurunan stunting 7. Optimalisasi daya dukung Lingkungan Hidup 8. Peningkatan PAD dan Realisasi Investasi 9. Peningkatan nilai tambah hasil pertanian dan perikanan untuk pengembangan industrialisasi pertanian, garam, dan berbagai potensi daerah lainnya 10. Kondusifitas keamanan wilayah belum optimal

Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2022 (Hasil Musrenbang RKPD NTB Tahun 2023)

Berdasarkan 10 (sepuluh) isu strategis, serta tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023 yang telah diuraikan sebelumnya, perlu ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023 mengacu kepada strategi dan arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023. Adapun arah kebijakan yang dipilih untuk pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2023 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 4- 4 Keselarasan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023

Arah Kebijakan RKP 2023	Isu Nasional	Isu Strategis RPJMD 2019-2023	Permasalahan Pembangunan Tahun 2023	Sasaran Prioritas Pembangunan Tahun 2023	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023
1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem 2. peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan 3. penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job 4. mendorong pemulihan dunia usaha 5. revitalisasi industri dan penguatan riset terapan 6. pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respons terhadap perubahan iklim) 7. percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi 8. pembangunan Ibu Kota Nusantara	1. Varian Covid-19 2. Devisit APBN 3. Investasi 4. Rantai Nilai 5. Inflasi dan 6. Daya Beli	Pertanian/Agribisnis dan Investasi Tumbuh Lamban	1. Lahan potensial (lahan kering) belum dimanfaatkan secara optimal 2. Pertanian/agribisnis dan investasi tumbuh lambat 3. Meningkatnya luas tanam komoditas jagung menyebabkan beberapa bencana daerah 4. Produktivitas usaha peternakan masih rendah 5. Masih rendahnya pemanfaatan teknologi inseminasi buatan dan masih terjadi kasus inbreeding sehingga berpengaruh terhadap kualitas produktivitas ternak 6. Masih rendah ketersediaan bibit unggul dalam daerah 7. Masih rendahnya pemanfaatan teknologi 8. Ketersediaan bahan baku pakan ternak masih di datangkan dari luar daerah	1. Mendisiplinkan Penerapan Protokol Kesehatan 2. Meningkatkan cakupan Vaksinasi 3. Optimalisasi Keunggulan Daerah (Komparatif dan Kompetitif) 4. Meningkatkan Rantai Produksi dan Rantai Nilai 5. Meningkatkan Multiplier Effect Kawasan-Kawasan Strategis (KEK Mandalika) dan berbagai event lainnya 6. Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata	Penanganan Covid Dan Pemulihan Ekonomi Daerah

Arah Kebijakan RKP 2023	Isu Nasional	Isu Strategis RPJMD 2019-2023	Permasalahan Pembangunan Tahun 2023	Sasaran Prioritas Pembangunan Tahun 2023	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023
			9. Produk hasil peternakan belum mampu bersaing dengan produk luar daerah		
		Derajat Kesehatan Masyarakat Relatif Rendah, Mutu dan Saing Pendidikan Relatif Rendah	1. Rendahnya Harapan Lama Sekolah yang baru mencapai 13,9 tahun. Meskipun angka capaian sudah melampaui target dan di atas rata-rata nasional 13,08 tahun, namun harus ditingkatkan agar rata-rata anak usia 7 tahun keatas memiliki peluang untuk bersekolah hingga Strata I untuk meningkatkan daya saing SDM. 2. Rendahnya Rata-rata Lama Sekolah di NTB (7,38 Tahun) yang masih dibawah rata-rata nasional (8,54 Tahun) 3. Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Belum maksimal. Hal ini diindikasikan dengan kondisi ketersediaan Ruang Kelas pendidikan tingkat menengah masih rendah 1:0,92, artinya masih	1. Penurunan Angka Kematian Bayi 2. Penurunan Angka Kematian Ibu 3. Persentase Balita Stunting 4. Persentase Peserta JKN dapat Mengakses Pelayanan Kesehatan 5. Cakupan Desa Open Defecation (ODF) 6. Penilaian Akreditasi Rumah Sakit 7. Peningkatan Usia Harapan Hidup 8. Peningkatan Harapan Lama Sekolah 9. Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah 10. Peningkatan Literasi (Bebas Buta Huruf) 11. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Peningkatan Kualitas SDM

Arah Kebijakan RKP 2023	Isu Nasional	Isu Strategis RPJMD 2019-2023	Permasalahan Pembangunan Tahun 2023	Sasaran Prioritas Pembangunan Tahun 2023	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023
			ada ruang kelas yg digunakan oleh lebih dari satu rombel dengan cara bergantian (kelas pagi / kelas siang) 4. Kualitas dan Kuantitas SDM tenaga pendidik masih kurang yang diindikasikan dengan rata-rata hasil UKG Prov,NTB masih pada angka 52,58 dibawah standar 55 5. Usia Harapan Hidup (UHH) masih rendah pada usia 66,69 tahun di bawah UHH nasional dengan usia 73,5 Tahun 6. NTB belum <i>Universal Health Coverage</i>, bahkan capain pada tahun ini (83,22%) menurun dari tahun sebelumnya (83,48%) 7. Masih Tingginya angka stunting. Meskipun prevelensi NTB (19,23%) sudah berada dibawah Nasional 2,4% maupun standar WHO 20%, masih	12. Peningkatan Pendapatan per Kapita	

Arah Kebijakan RKP 2023	Isu Nasional	Isu Strategis RPJMD 2019-2023	Permasalahan Pembangunan Tahun 2023	Sasaran Prioritas Pembangunan Tahun 2023	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023
			ada 3 Kabupaten yang masih beresiko diatas 20% 8. Belum Optimalnya Proporsi Rumah Tangga ke Sanitasi Layak 9. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal untuk layanan dasar masih rendah yang ditandai dengan capaian SPM kesehatan baik itu RSUD Prov.NTB, RSJ Mutiara Sukmda dan RSUP Manambai masih dibawah 90% dengan skor masing masing 80,59%,81%, dan 75% 10. Belum optimalnya partisipasi perempuan dalam pembangunan yang baru mencapai 27,24% 11. Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan an. Tiga tahun terakhir kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus terjadi peningkatan		

Arah Kebijakan RKP 2023	Isu Nasional	Isu Strategis RPJMD 2019-2023	Permasalahan Pembangunan Tahun 2023	Sasaran Prioritas Pembangunan Tahun 2023	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023
			mencapai 1.060 kasus pada 2021. 12. Rata-rata usia kawin pertama yang masih rendah (20, 35 tahun) 13. Kurangnya pembinaan dan fasilitasi untuk pengembangan kapasitas kepemudaan untuk bersaing di tingkat Nasional, dan Internasional 14. Kurangnya pembinaan dan fasilitasi bagi kewirausahaan pemuda untuk menjadi pemuda yang mandiri yang berakibat tidak tercapainya target proporsi wirausaha muda yang baru mencapai 68,07% 15. Masih rendahnya aktivitas literasi membaca		
		Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal	1. Keselarasan perencanaan pembangunan daerah antar sektor dan antar tingkat pemerintahan	1. Kepatuhan Wajib Pajak 2. Pelayanan Retribusi 3. Keuntungan BUMD 4. Subsidi kepada BLUD Menurun	Peningkatan PAD Dan Pelayanan Publik

Arah Kebijakan RKP 2023	Isu Nasional	Isu Strategis RPJMD 2019-2023	Permasalahan Pembangunan Tahun 2023	Sasaran Prioritas Pembangunan Tahun 2023	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023
			2. Konsistensi antar dokumen perencanaan serta konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 3. Pengelolaan aset pemprov oleh masyarakat belum optimal 4. Keterlambatan LKPD akibat keterlambatan rekonsiliasi asset 5. Keterbatasan anggaran untuk sertifikasi asset 6. Kapasitas fiskal daerah relatif rendah 7. PAD yang bersumber dari retribusi daerah belum optimal 8. Perencanaan Kebutuhan Pegawai Belum berdasarkan analisis rencana kebutuhan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta belum memiliki rencana kebutuhan pegawai jangka menengah 5 (tahun)	5. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Lain-Lain PAD yang Sah 6. Kepercayaan dan Kepuasan Publik 7. Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah 8. Penurunan Temuan 9. Peningkatan Realisasi Pengembalian Kerugian Daerah 10. Peningkatan Kualitas Perencanaan 11. Profesionalisme ASN 12. NTB Care	

Arah Kebijakan RKP 2023	Isu Nasional	Isu Strategis RPJMD 2019-2023	Permasalahan Pembangunan Tahun 2023	Sasaran Prioritas Pembangunan Tahun 2023	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023
			9. Pembinaan dan pengembangan karir belum seutuhnya menerapkan <i>Merit System</i> 10. Penempatan belum berdasarkan kualifikasi dan kompetensi 11. Penilaian kinerja belum dijadikan acuan dalam proses pengembangan karir ASN 12. Masih adanya pelanggaran Disiplin dan Kode Etik ASN 13. Belum tersedianya Lembaga dan Tenaga Terakreditasi dalam Pengembangan Kompetensi Teknis dan Jabatan fungsional		
		Industrialisasi Produk Unggulan Belum Optimal	1. Data statistik sektoral lingkup OPD provinsi, belum terintegrasi dengan Kab/Kota, serta arsitektur data belum terbangun 2. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam penyelenggaraan	1. Kawasan Industri 2. Sentra Industri 3. Pelaku Industri Kecil dan Menengah 4. Data/Informasi 5. Manajemen Produksi 6. Badan Usaha/Lembaga 7. Manajemen Keuangan 8. Manajemen Pemasaran	Peningkatan Industrialisasi Sektor Unggulan

Arah Kebijakan RKP 2023	Isu Nasional	Isu Strategis RPJMD 2019-2023	Permasalahan Pembangunan Tahun 2023	Sasaran Prioritas Pembangunan Tahun 2023	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023
			pemerintahan belum optimal dan terintegrasi. Persentase Layanan Berbasis TIK baru mencapai 61,76% 3. Masih banyak pelaku UMKM yang belum menguasai IT/Pasar Digital 4. Koperasi sulit mengakses permodalan ke Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) karena regulasi yg sulit /kredit bermasalah 5. Pelaku UMKM belum menjalankan manajemen berdasarkan prinsip wirausaha 6. Rendahnya Kompetensi SDM IKM dalam menerapkan proses produksi 7. Banyaknya kemasan produk IKM yang belum terstandar 8. Kurangnya modal IKM dalam melakukan restrukturisasi mesin produksi	9. Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan 10. Inovasi 11. Kualitas Produk: Brand/Merek, Sertifikat Halal, Kemasan, HAKI, SNI, ISO, dll 12. Permodalan 13. Harga dan Pendapatan 14. Peralatan/Mesin 15. Pelanggan/Konsumens 16. Terimplementasinya Rekomendasi Hasil Kelitbangan dan Inovasi Dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	

Arah Kebijakan RKP 2023	Isu Nasional	Isu Strategis RPJMD 2019-2023	Permasalahan Pembangunan Tahun 2023	Sasaran Prioritas Pembangunan Tahun 2023	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023
			9. Akses perbankan dalam membantu permodalan yang masih lemah 10. Tidak stabilnya harga beberapa komoditi yang diakibatkan oleh faktor alam seperti cabai dan bawang 11. Kenaikan harga komoditi yang pasokannya bersifat nasional seperti minyak goreng 12. Kelangkaan kontainer ekspor dengan kapasitas besar 13. Kurangnya akses permodalan dari pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya		
		Daerah Rawan Bencana dan Ketersediaan Infrastruktur, konektivitas dan Penataan Ruang Belum Optimal serta Kualitas dan Daya	1. Kinerja layanan jalan masih belum optimal dalam mendukung sektor unggulan dan kawasan strategis. Kemantapan jalan provinsi pada tahun 2021 masih di bawah 90%. 2. Terdapat ketimpangan Keterpaduan Infrastruktur	1. Pembangunan Jalan dan Jembatan 2. Pembangunan Irigasi/Drainase 3. Pembangunan Jaringan Air Minum 4. Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pembangunan Infrastruktur Layanan dasar dan kualitas lingkungan

Arah Kebijakan RKP 2023	Isu Nasional	Isu Strategis RPJMD 2019-2023	Permasalahan Pembangunan Tahun 2023	Sasaran Prioritas Pembangunan Tahun 2023	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023
		Dukung Lingkungan Belum Optimal	permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi 3. Rendahnya tenaga konstruksi yang memenuhi standar nasional dan lemahnya pengawasan pada kegiatan jasa konstruksi 4. Menurunnya kapasitas dan kualitas pelayanan sumberdaya air untuk memenuhi kebutuhan penyediaan air irigasi dan air baku yang mengakibatkan turunnya produktivitas pertanian akibat tidak optimalnya pengelolaan irigasi 5. Inkonsistensi dalam penyelenggaraan penataan ruang dan meningkatnya permintaan investasi di daerah yg mengakibatkan perlunya penyesuaian fungsi ruang dalam RTRW Provinsi 6. Pelayanan air minum belum optimal dengan capaian 78,76 dan masih rendahnya	5. Pembangunan Perumahan dan Permukiman 6. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan 7. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan 8. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 9. Pembangunan Sarana dan Prasarana Komunikasi 10. Pembangunan Sarana dan Prasarana Religi 11. Pencegahan dan Kesiapsiagaan Dalam Penanganan Bencana 12. Pengelolaan Persampahan 13. Kualitas Lingkungan 14. Pembangunan Berkelanjutan	

Arah Kebijakan RKP 2023	Isu Nasional	Isu Strategis RPJMD 2019-2023	Permasalahan Pembangunan Tahun 2023	Sasaran Prioritas Pembangunan Tahun 2023	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023
			kualitas lingkungan permukiman dalam pengelolaan persampahan 7. Pembangunan infrastruktur persampahan: Kapasitas pengelolaan sampah, makin besarnya timbulan sampah, rendahnya kualitas dan tingkat pengelolaan persampahan serta keterbatasan lahan TPA 8. Penyediaan lahan untuk relokasi Perumahan belum disediakan Pemerintah 9. Persentase dukungan anggaran Pemerintah Daerah untuk menangani Rumah terdampak bencana dan Rumah Layak Huni kurang memadai 10. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau dengan cakupan rumah layak huni 62,53% 11. Rendahnya pelayanan sarana dan prasarana		

Arah Kebijakan RKP 2023	Isu Nasional	Isu Strategis RPJMD 2019-2023	Permasalahan Pembangunan Tahun 2023	Sasaran Prioritas Pembangunan Tahun 2023	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023
			transportasi darat dan laut. Persentase Sarana transportasi darat dalam kondisi baik hanya 26,69%. 12. Belum optimalnya penyediaan fasilitas khusus kaum difabel pada sarana dan prasarana angkutan umum 13. Kurangnya fasilitas keselamatan jalan. Persentase tersedianya Fasilitas Keselamatan Jalan dalam kondisi baik masih dibawah 50% 14. Belum optimalnya pembatasan kualitas emisi gas buang angkutan umum 15. Konektivitas jaringan transportasi belum terbangun dengan baik 16. Belum optimalnya penataan sistem informasi pada OPD Lingkup Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang akuntabel, transparan, up		

Arah Kebijakan RKP 2023	Isu Nasional	Isu Strategis RPJMD 2019-2023	Permasalahan Pembangunan Tahun 2023	Sasaran Prioritas Pembangunan Tahun 2023	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023
			to date dan komunikatif. Persentase Badan Publik Pemerintah Provinsi Yang Informatif masih 60,71% dan Persentase Perangkat Daerah yang Informatif baru mencapai 59,09%. 17. Pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan belum memiliki kajian analisis risiko bencana 18. Perlu akselerasi dan upgrading terhadap DESTANA baik dalam kuantitatif maupun kualitatif 19. Aplikasi SI-AGA sebagai Pusat Data dan Pelaporan BPBD belum bersinergi dengan aplikasi NTB satu Data pada Dinas Kominfo 20. Ketangguhan bencana untuk pariwisata aman bencana, dimana BPBD sebagai software dan dinas terknis terkait sebagai hardwarenya		

Arah Kebijakan RKP 2023	Isu Nasional	Isu Strategis RPJMD 2019-2023	Permasalahan Pembangunan Tahun 2023	Sasaran Prioritas Pembangunan Tahun 2023	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023
			21. Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan belum dikelola dengan optimal pada daerah yang memiliki potensi energi pembangkit listrik 22. Update data rumah tangga yang belum berlistrik belum optimal 23. Maraknya okupasi lahan untuk penanaman tanaman semusim 24. Masih banyak lahan kritis yang belum direhabilitasi 25. Penanganan sampah di Prov. NTB baru mencapai 39,68 % dari target 50%. Perlu dukungan Kab Kota untuk percepatan penanganan sampah		
		Pembangunan Pariwisata Melemah dan Melambat	1. Masih tingginya pekerja setengah penganggur dan pekerja paruh waktu pada angka 28,89%, di atas angka nasional 26,99% 2. Perlindungan terhadap tenaga kerja belum optimal.	1. Meningkatkan Diversifikasi Ekonomi 2. Meningkatkan Padat Karya 3. Meningkatkan Investasi Swasta	Perluasan Lapangan Kerja

Arah Kebijakan RKP 2023	Isu Nasional	Isu Strategis RPJMD 2019-2023	Permasalahan Pembangunan Tahun 2023	Sasaran Prioritas Pembangunan Tahun 2023	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023
			Prosentase tenaga kerja NTB yang terdaftar sebagai anggota BPJS ketenagakerjaan hanya 10,74% 3. Pengelolaan kawasan transmigrasi belum optimal 4. Kurangnya dukungan kebijakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi pelaku wirausaha 5. Rendahnya dukungan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja 6. Intervensi anggaran pokir yg tidak berorientasi pada fokus pencapaian target kinerja 7. Pandemi covid-19 dgn segala pembatasan berdampak pada penurunan sektor pariwisata 8. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD mengalami penurunan 9. Belum meratanya pengembangan pariwisata	4. Membangun Kemitraan dengan Dunia Usaha melalui Pasar Lelang Komoditas 5. Membangun Kemitraan dengan Dunia Usaha dan Peningkatan Investasi melalui Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah serta UKM dengan NTB mall sebagai Lokomotif 6. Membangun Kemitraan dengan Dunia Usaha dan Peningkatan Investasi melalui Misi Dagang bagi Pelaku Ekspor Unggulan 7. Percepatan Realisasi APBN/APBD 8. Pertumbuhan Kawasan Strategis 9. Infrastruktur dan Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB)	

Arah Kebijakan RKP 2023	Isu Nasional	Isu Strategis RPJMD 2019-2023	Permasalahan Pembangunan Tahun 2023	Sasaran Prioritas Pembangunan Tahun 2023	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023
			antara pulau Lombok dan pulau Sumbawa 10. Adanya Perubahan regulasi terkait investasi 11. Kurangnya pemahaman pelaku usaha terkait perizinan secara online (OSS) dan penyampaian LKPM		
		Kehidupan Aman dan Damai Belum Sepenuhnya Terwujud	1. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan social Bagi Korban Bencana 2. Belum Optimalnya Penerapan SPM Bidang Sosial dengan capaian 72,31% 3. Penanganan dan pemberdayaan FM melalui kelompok dan bantuan social lainnya belum optimal 4. Belum Optimalnya Pelaksanaan verivali Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 5. Belum optimalnya Peningkatan Kapasitas PKKS	1. Kemiskinan Ekstrem 2. Stunting 3. Gerakan Masyarakat Penanggulangan Kemiskinan 4. Pemberdayaan Masyarakat 5. Pembangunan Karakter 6. Ekonomi Hijau-Biru-Sirkular 7. Mitra Pembangunan 8. Pengendalian Inflasi	Percepatan Penurunan Kemiskinan

Arah Kebijakan RKP 2023	Isu Nasional	Isu Strategis RPJMD 2019-2023	Permasalahan Pembangunan Tahun 2023	Sasaran Prioritas Pembangunan Tahun 2023	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023
			6. Pelindungan Masyarakat Belum Optimal 7. Pembinaan masyarakat belum optimal 8. Masih adanya daerah (desa) rawan/rentan pangan dan gizi 9. Tingginya tuntutan pasar global dan internasional dalam penerapan standar mutu dan keamanan pangan segar 10. Pola konsumsi pangan masyarakat belum sesuai harapan. Contohnya, peningkatan konsumsi protein masih didominasi oleh sumber pangan nabati terutama padi-padian karena perilaku masyarakat yang masih merasa belum makan jika belum makan nasi dan masih rendahnya daya beli masyarakat		

Tabel 4- 5 Keterkaitan Arah Kebijakan Nasional, Arah Kebijakan RPJMD 2019-2023 dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2023

Arah Kebijakan Nasional Tahun 2023	Arah Kebijakan RPJMD 2019-2023 Provinsi NTB	Arah Kebijakan Provinsi NTB Tahun 2023
1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem	1. Meningkatkan kapasitas prasarana air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 2. Adopsi teknologi budidaya untuk meningkatkan produksi pertanian dan Pengembangan produk pertanian 3. Meningkatkan perlindungan, jaminan sosial dan kesehatan bagi masyarakat miskin 4. Diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan	Percepatan Penurunan Kemiskinan
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan	1. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi ibu hamil dan melahirkan, bayi, balita, anak sekolah, remaja, dan lansia 2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan tenaga kesehatan dalam pencegahan, dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan 3. Meningkatkan kapasitas Tim Kesehatan dan sarana prasarana penanggulangan bencana dan masalah Kesehatan 4. Meningkatkan layanan Posyandu yang unggul dan berkualitas 5. Meningkatkan Akses pendidikan yang berkeadilan dan terjangkau 6. Mewujudkan pemerataan penyebaran, ketercukupan dan peningkatan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga kebudayaan 7. Mendorong penggunaan Teknologi Informasi dalam pendidikan	Peningkatan Kualitas SDM
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan <i>decent job</i>	1. Mendorong pembentukan desa wisata sesuai potensi wilayah 2. Mengembangkan daerah wisata dengan memenuhi standar wisata halal	Perluasan Lapangan Kerja

	3. Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan Obyek Daya Tarik 4. Wisata serta promosi dan pemasaran pariwisata 5. Meningkatkan kualitas atraksi pariwisata 6. Meningkatkan sertifikasi dan standarisasi kompetensi tenaga kerja dan calon tenaga kerja 7. Meningkatkan efektivitas dan kontinuitas penempatan tenaga kerja 8. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan pengembangan kesejahteraan tenaga kerja	
4. Mendorong pemulihan dunia usaha	1. Meningkatkan Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan 2. Mengembangkan budidaya perikanan potensial yang memberikan nilai tambah 3. Meningkatkan kapasitas SDM pertanian 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas komoditas peternakan 5. Mengembangkan budidaya perikanan potensial yang memberikan nilai tambah 6. Mengembangkan potensi sumber daya hutan berbasis industrialisasi	Penanganan Covid Dan Pemulihan Ekonomi Daerah
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan	1. Pengujian dan sertifikasi alat produksi 2. Mengelola taman edukasi dan inkubator bisnis 3. Mendorong pengembangan industri olahan, industri kreatif dan industri permesinan 4. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan UKM 5. Meningkatkan akses pasar produk Industri Kecil Menengah	Peningkatan Industrialisasi Sektor Unggulan
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respons terhadap perubahan iklim)	1. Menurunkan beban polusi udara dan pencemaran air pada sektor industri, transportasi, masyarakat dan pemerintahan 2. Meningkatkan kinerja pengurangan dan penanganan sampah	Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Dan Kualitas Lingkungan

	3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi	1. Meningkatkan, memelihara dan membangun jaringan irigasi serta cetak sawah pertanian modern 2. Meningkatkan, memelihara dan membangun infrastruktur air baku 3. Mendorong integrasi Konektivitas dalam wilayah dan koneksi antar wilayah	
8. Pembangunan ibu kota nusantara	1. Meningkatkan Tata kelola keuangan daerah, Asistensi Laporang Keuangan Daerah, koordinasi unsur pendukung pengelolaan keuangan dan Menjamin penyusunan LKPD tepat waktu 2. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui optimalisasi potensi sumber-sumber Pendapatan 3. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan tata laksana Pemerintahan 4. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur	Peningkatan Pad Dan Pelayanan Publik

Sumber : Data olahan Bappeda NTB, 2022

4.2.4 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 yang merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD 2019-2023 disusun berdasarkan isu strategis, visi dan misi pimpinan daerah yang tertuang dalam prioritas pembangunan dan arah kebijakan RPJMD Tahun 2019-2023, sehingga keterkaitan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2023 dengan arah kebijakan RPJMD untuk Tahun 2023 sangat erat. Terdapat 10 (sepuluh) prioritas pembangunan daerah pada RPJMD Tahun 2019-2023. Dimana pada tahun 2020 terdapat kejadian luar biasa yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu pandemi COVID-19, dimana sampai tahun 2022 ini pandemic COVID-19 masih melanda Provinsi Nusa Tenggara Barat dan diprediksi akan terus berdampak sampai Tahun 2023. Berdasarkan isu strategis tahun 2023, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat fokus menangani pandemi COVID-19 dan memasukkan kedalam prioritas pembangunan daerah tahun 2023. Perumusan prioritas pembangunan disajikan dengan tetap menjaga keterkaitan antara prioritas pembangunan daerah dengan arah kebijakan, isu strategis, dan pokok-pokok pikiran tahunan DPRD. Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Pembangunan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah dengan fokus Pengelolaan Kesehatan untuk Daya Saing SDM dengan fokus Pengelolaan Pendidikan untuk Daya Saing SDM dengan fokus Pengelolaan Lingkungan Bersih dan Berkelanjutan dengan fokus Pertanian/Agribisnis dan Investasi Progresif dengan fokus Pariwisata Andalan dengan fokus Industrialisasi Unggul dengan fokus Meraih Masyarakat Madani (Bahagia) dengan fokus Guna mencapai target indikator kinerja sasaran pembangunan, maka dilakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik dan berkesinambungan. Hasil pengendalian dan evaluasi memberikan gambaran riil mengenai kondisi capaian pembangunan di wilayah Nusa Tenggara Barat. Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan dijadikan salah satu input bagi pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain berbagai pertimbangan lainnya seperti kebijakan pembangunan nasional tahun 2023, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, peningkatan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup, meningkatkan bencana dan perubahan iklim dan memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik.

Perumusan prioritas pembangunan disajikan dengan tetap menjaga keterkaitan antara prioritas pembangunan daerah dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4- 6 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Arah Kebijakan

Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2023	Arah Kebijakan Pembangunan RKPD Tahun 2023
Memperkuat Mitigasi dan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana	Pembangunan Infrastruktur Layanan dasar dan kualitas lingkungan
Membangun Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah untuk Mendukung Pelayanan Dasar dan Pengembangan Sektor Unggulan	Pembangunan Infrastruktur Layanan dasar dan kualitas lingkungan
Reformasi Birokrasi dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan PAD Dan Pelayanan Publik
Meningkatkan Kualitas Kesehatan SDM	Peningkatan Kualitas SDM
Meningkatkan Kualitas Pendidikan SDM	Peningkatan Kualitas SDM
Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Persampahan	Pembangunan Infrastruktur Layanan dasar dan kualitas lingkungan
Memperkuat Integrasi Hulu-Hilir Sistem Agribisnis dalam Mendukung Investasi	Penanganan Covid Dan Pemulihan Ekonomi Daerah
Mengoptimalkan Pengelolaan Pariwisata untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Perluasan Lapangan Kerja
Industrialisasi Produk Unggulan	Peningkatan Industrialisasi Sektor Unggulan
Penguatan Stabilitas Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Percepatan Penurunan Kemiskinan

Sumber : Data olahan Bappeda NTB, 2022

Tabel 4- 7 Keselarasan Tema, Prioritas Nasional (PN) dan Prioritas Daerah (PD) Tahun 2023

Tema Nasional	Tema Daerah
<i>"Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"</i>	<i>"Peningkatan Produktivitas Industri dan Diversifikasi Ekonomi yang Inklusif Untuk Mewujudkan Kegemilangan NTB yang Berkelanjutan"</i>
Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah (PD)
PN 1	PD 1
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan (PD-7, PD-8, PD-9)	Memperkuat Mitigasi dan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana (PN-6)
PN 2	PD 2
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PD-2)	Membangun Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah untuk Mendukung Pelayanan Dasar dan Pengembangan Sektor Unggulan (PN-2, PN-5)
PN 3	PD 3
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PD-4, PD-5)	Reformasi Birokrasi dan Transformasi Pelayanan Publik (PN-7)
PN 4	PD 4
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PD-10)	Meningkatkan Kualitas Kesehatan SDM (PN-3)
PN 5	PD 5
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PD-2)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan SDM (PN-3)
PN 6	PD 6
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim (PD-1, PD-6)	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Persampahan (PN-6)

PN 7	PD 7
Memperkuat Stabilitas Politik Hukum Pertahanan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PD-3)	Memperkuat Integrasi Hulu-Hilir Sistem Agribisnis dalam Mendukung Investasi (PN-1)
	PD 8
	Mengoptimalkan Pengelolaan Pariwisata untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi (PN-1)
	PD 9
	Industrialisasi Produk Unggulan (PN-1)
	PD 10
	Penguatan Stabilitas Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat (PN-4)

Sumber : Data olahan Bappeda NTB, 2022

Keterkaitan Prioritas Pembangunan, Program Unggulan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 4- 8 Prioritas Pembangunan dan Program Unggulan Provinsi NTB

NO	MISI/PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
I	(Misi I) NTB TANGGUH DAN MANTAP					
PRIORITAS PEMBANGUNAN I: Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana dengan fokus M						
1	Desa Tangguh Bencana (DESTANA)	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
						Penanganan Pasca bencana Provinsi
						Penyusunan Rencana Kontijensi
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan
						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
2	Sekolah Aman Bencana	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah

NO	MISI/PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
						Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
3	Sistem Informasi Aman Gangguan Bencana (SIAGA)	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
			Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
PRIORITAS PEMBANGUNAN 2: Pembangunan Konektivitas dan Akseibilitas Wilayah dengan fokus						
1	NTB Terkoneksi	Dinas Perhubungan		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi
						Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi
					Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
						Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi
					Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi
					Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
				Program Pengelolaan Pelayaran	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah

NO	MISI/PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
						Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
					Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
					Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas
					Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
			Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
						Pengelolaan Media Komunikasi Publik
	2	Percepatan Jalan Mantap	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
						Survey Kondisi Jalan/Jembatan
						Pembangunan Jalan
						Rehabilitasi Jalan
						Pemeliharaan Berkala Jalan
						Pemeliharaan Rutin Jalan
						Rehabilitasi Jembatan
						Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
			Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
	3	Air Bersih/Air Minum untuk Semua	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
						Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan
			Dinas Kesehatan	Program Pemberdayaan	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

NO	MISI/PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
				Masyarakat Bidang Kesehatan	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	
	4	Irigasi Cukup	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
						Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi
						Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
						Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
						Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya
						Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
						Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
						Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi
						Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
					Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
						Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
						Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
						Rehabilitasi Bendung Irigasi
						Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
						Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
						Operasional Unit Pengelola Irigasi
			Dinas Pertanian dan Perkebunan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani
	5	Nusa Terang Benderang	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi

NO	MISI/PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
					Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	
						Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi
					Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
						Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
					Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
						Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
	6	SPAM Regional	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
						Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan
			Dinas Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
2		(Misi II) NTB BERSIH DAN MELAYANI				
PRIORITAS PEMBANGUNAN 3: dengan fokus						
	1	SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
						Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
						Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
						Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
	2	eNTeBe Plan/SIPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	MISI/PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
				Pembangunan Daerah		
						Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
						Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
			Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
			Biro Administrasi Pembangunan	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD
						Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN
						Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
3	NTB SDG's Center	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
4	Research Based Policy	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Pengelolaan Data Kelitbitan dan Peraturan
						Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
						Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
						Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
						Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
						Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
						Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
						Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbitan
5	NTB Satu Peta	Badan Perencanaan		Program Penelitian dan	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan

NO	MISI/PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
		Pembangunan Daerah		Pengembangan Daerah		Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
						Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-
			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi
						Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi
6	NTB Satu Data	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
						Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
						Membangun Metadata Statistik Sektoral
						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
						Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
7	NTB Care	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
8	e-Pendapatan	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
						Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
9	NTB WTP	Inspektorat		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
						Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
						Reviu Laporan Kinerja
						Reviu Laporan Keuangan
						Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota
						Kerjasama Pengawasan Internal
						Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
					Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
						Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
						Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja,

NO		MISI/PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			UTAMA	PENDUKUNG			
							Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban
							Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
							Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
							Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi
							Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
							Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
							Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
							Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi
							Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi
					Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Standar Harga
							Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
							Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
							Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
							Penatausahaan Barang Milik Daerah
							Inventarisasi Barang Milik Daerah
							Pengamanan Barang Milik Daerah
							Penilaian Barang Milik Daerah
							Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
							Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

NO		MISI/PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			UTAMA	PENDUKUNG			
							Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
							Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
							Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
							Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
							Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
	10	SAKIP Level A	Inspektorat		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
							Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
							Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
							Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
							Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
							Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
						Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
							Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
							Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi

NO	MISI/PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
						Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
					Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
				Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
					Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi
		Biro Organisasi		Program Penataan Organisasi	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
						Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
			Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-
11	Agen Perubahan	Badan Kepegawaian Daerah		Program Kepegawaian Daerah	Pengembangan Kompetensi ASN	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
						Pengelolaan Assessment Center
						Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
						Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

NO		MISI/PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			UTAMA	PENDUKUNG			
							Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat
							Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN
							Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN
							Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional
							Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN
							Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
							Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
							Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional
				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
							Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
							Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
							Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
						Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan

NO		MISI/PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			UTAMA	PENDUKUNG			
							Prajabatan, Sertajabatan Fungsional
							Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi
							Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
							Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
							Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga
							Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional
							Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
							Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan
	12	Manajemen Talenta	Badan Kepegawaian Daerah		Program Kepegawaian Daerah	Pengembangan Kompetensi ASN	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
			Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah				Pengelolaan Assessment Center
							Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
							Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
							Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat
							Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN
							Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN
							Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional
							Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN
							Pembinaan Jabatan Fungsional ASN

NO		MISI/PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			UTAMA	PENDUKUNG			
							Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
							Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional
				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
							Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
							Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
							Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
						Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional
							Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi
							Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
							Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar

NO	MISI/PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
						Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga
						Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional
						Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
						Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan
3		(Misi III) NTB SEHAT DAN CERDAS				
PRIORITAS PEMBANGUNAN 4: Pengelolaan Kesehatan untuk Daya Saing SDM dengan fokus						
	1	Revitalisasi Posyandu	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus
						Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/	2.13.05.1.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
			Biro AKesejahteraan Rakyat	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

NO	MISI/PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
2	NTB Berolahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga		Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi
					Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi
						Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
					Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pengembangan Organisasi Keolahragaan
			Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
3	Generasi Emas NTB	Dinas Kesehatan		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah
						Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
4	Jamban Keluarga/Stop BABS	Dinas Kesehatan		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

NO		MISI/PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			UTAMA	PENDUKUNG			
					Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
							Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya
	5	Rumah Layak Huni	Dinas Perumahan dan Permukiman		Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
PRIORITAS PEMBANGUNAN 5: Pengelolaan Pendidikan untuk Daya Saing SDM dengan fokus							
	1	1000 Cendikia/Beasiswa	Biro Kesejahteraan Rakyat/Brida		Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	
	2	Re-Engineering SMK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
							Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
							Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
					Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah
							Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
				Dinas Perindustrian	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
	3	PAUD Holistik Integratif	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
	4	Literasi Digital	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Program Pembinaan Perpustakaan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat

NO	MISI/PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
						Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
5	Rumah Bahasa	Biro Kesejahteraan Rakyat/Brida		Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan
			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi
6	NTB Juara	Dinas Pemuda dan Olahraga		Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi
					Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi
						Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
					Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pengembangan Organisasi Keolahragaan
			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
					Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
7	Ayo Bercita - Cita	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
					Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Pembinaan Perpustakaan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
4	(Misi IV) NTB ASRI DAN LESTARI					
PRIORITAS PEMBANGUNAN 6: Pengelolaan Lingkungan Bersih dan Berkelanjutan dengan fokus						
1	NTB Hijau	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi
						Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi

NO		MISI/PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			UTAMA	PENDUKUNG			
					Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
							Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
					Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Dinas Pertanian dan Perkebunan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
	2	NTB Zero Waste/Pengolahan Sampah/Bank Sampah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Program Pengelolaan Persampahan	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional
							Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus
							Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
							Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
				Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
							Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
							Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
				Dinas Perumahan dan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	-	-
				Biro Administrasi Pimpinan	-	-	-

NO		MISI/PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			UTAMA	PENDUKUNG			
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah
							Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
						Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
							Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
				Dinas Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
	3	Taman Asri/Indah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi
							Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan
	4	Tata Ruang Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan
					Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang
						Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
							Sistem Informasi Penataan Ruang
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan

NO	MISI/PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
					Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Hukum Bidang Penataan Ruang
			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
			Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Fasilitasi Penataan Wilayah
5	(Misi V) NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI					
PRIORITAS PEMBANGUNAN 7: Pertanian/Agribisnis dan Investasi Progresif dengan fokus						
1	Pertanian Lestari/Modern	Dinas Pertanian dan Perkebunan		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
						Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi
					Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
			Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan			
			Dinas Kelautan dan Perikanan			
2	BUMDES Maju/Mahadesa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat,		Program Pemberdayaan Lembaga	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan

NO		MISI/PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			UTAMA	PENDUKUNG			
			Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/	Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
							Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
				Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah			
	3	Melawan Kemiskinan dari Desa/Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
							Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
							Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
							Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
							Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
							Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen

NO	MISI/PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
						Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
			Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	1.06.02.1.02.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi
						1.06.02.1.02.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi
						1.06.02.1.02.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi
						1.06.02.1.02.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
4	Kampung Unggas	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
5	Budidaya Lobster	Dinas Kelautan dan Perikanan		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut
						Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
6	Kawasan Rumah Pangan Lestari/Pekarangan Pangan Lestari (KRPL/P2L)	Dinas Ketahanan Pangan		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
			Dinas Pertanian dan Perkebunan	Program Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
						Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
			Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan			
			Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		
7	Mall Investasi dan Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
						Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
					Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi
						Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi

NO		MISI/PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			UTAMA	PENDUKUNG			
					Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
							Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
					Program Pelayanan Penanaman Modal	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
						Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
							Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
							Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
					Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
				Biro Administrasi Perekonomian	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
							Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
						Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
				Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Program Pemerintahan	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah

NO	MISI/PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
				dan Otonomi Daerah		
						Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta
						Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
8	Ramah Investasi/Online Services	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
			Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah
						Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta
						Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
			Badan Penghubung Daerah			
9	Revitalisasi BLK	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
					Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja
					Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
PRIORITAS PEMBANGUNAN 8: Pariwisata Andalan dengan fokus						
1	KEK Mandalika	Dinas Pariwisata		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
					Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
					Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi
						Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, an RKPD) Bidang Perekonomian
			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan
			Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

NO	MISI/PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
						Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
2	Penataan 3 Gili KLU dan Pulau-Pulau Kecil	Dinas Pariwisata		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
					Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
					Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi
						Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
			Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3	Wisata Halal dan Sehat	Dinas Pariwisata		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
					Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
					Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi
						Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
			Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
						Pengembangan Rumah Sakit
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
						Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
						Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan
						Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan
						Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
						Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)
						Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan
						Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
						Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya

NO	MISI/PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
4	Penataan 99 Desa Wisata	Dinas Pariwisata		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
					Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
					Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi
						Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
5	Geopark-Cagar Biosfer Rinjani dan Tambora	Dinas Pariwisata		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
					Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
					Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi
						Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi
						Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi
						Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi
						Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi
						Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi
						Perencanaan Pengelolaan TAHURA
					Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES

NO	MISI/PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
					Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	
					Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
						Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
						Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
						Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
	6	Kawasan Samota	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
						Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
PRIORITAS PEMBANGUNAN 9: Industrialisasi Unggul dengan fokus						
	1	Industri Peralatan dan Permesinan	Dinas Perindustrian	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
	2	Industri Peternakan/ Pakan Ternak	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
			Dinas Pertanian dan Perkebunan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		
			Dinas Perindustrian	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

NO	MISI/PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
3	Industri Motor Listrik	Dinas Perindustrian		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
4	Industri Pangan dan Holtikultura	Dinas Pertanian dan Perkebunan		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
						Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura
						Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan
			Dinas Perindustrian	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
5	Industri Perkebunan	Dinas Pertanian dan Perkebunan		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
						Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan
			Dinas Perindustrian	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
6	Industri Kehutanan: Hasil Hutan Kayu, HHBK Unggul	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Program Pengelolaan Hutan	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati
						Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya
					Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
			Dinas Perindustrian	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
7	Industri Perikanan: Garam, Tepung Ikan	Dinas Kelautan dan Perikanan		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
					Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing

NO	MISI/PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
					Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
			Dinas Perindustrian	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
	8	Industri Pertambangan (Smelter) dan Industri Turunannya	Dinas Perindustrian	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
						Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk
			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
	9	Rumah Kemas	Dinas Perindustrian	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
			Dinas Perdagangan	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
	10	Industri Pakaian: Busana Muslim, Tenun Ikat	Dinas Perindustrian	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

NO	MISI/PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
	11	Science Technology and Industrial Park (STIPark)	Dinas Perindustrian		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
						Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
	12	Koperasi Berprestasi	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
						Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
	13	UMKM Bersaing	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
				Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
			Dinas Perindustrian	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
	14	Bela Beli Produk Lokal/NTB Mall	Dinas Perdagangan	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
			Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
			Dinas Perindustrian	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
6		(Misi VI) NTB AMAN DAN BERKAH				
PRIORITAS PEMBANGUNAN 10: Meraih Masyarakat Madani (Bahagia) dengan fokus						
	1	Kampung Madani dan Sehat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan

NO		MISI/PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			UTAMA	PENDUKUNG			
					Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
							Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
							Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
	2	Mawar Emas (Melawan Rentenir Berbasis Masjid)	Biro Administrasi Perekonomian		Program Perekonomian dan Pembangunan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
	3	Bale Mediasi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
				Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
				Biro Hukum	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM
	4	Desa Bersinar	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

NO	MISI/PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
			Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA
			Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
	5	Kampung Digital	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
	6	Kota Layak Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
	7	Ramah Difabel	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Pant	Penyediaan Permakanan
						Penyediaan Alat Bantu
						Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Pant
						Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
						Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar
			Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
	8	Revitalisasi Islamic Center	Dinas Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi

NO		MISI/PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			UTAMA	PENDUKUNG			
				Biro Kesejahteraan Rakyat	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
							Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
	9	Sekolah Perjumpaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan

Sumber: RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023, diolah

4.3 Kerja Sama Pembangunan Daerah Antar Provinsi

Dalam upaya mencapai tujuan-tujuan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dilakukan langkah-langkah strategis salah satunya melalui pelaksanaan kerja sama daerah. Kerja sama daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan (Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah). Hal ini didasarkan atas beberapa pertimbangan yang rasional untuk kemajuan bersama dan karena masing-masing daerah memiliki keterbatasan sumber daya daerah (sumber daya manusia, sumber daya alam, finansial), sehingga berakibat pada tidak optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat. Isu strategis yang selama ini berpotensi untuk dikerjasamakan antar daerah mencakup bidang ekonomi khususnya perdagangan. Pelaku kerjasama antar daerah dimaknai dengan arti luas, tidak hanya terbatas pada antara pemerintah dengan pemerintah (G to G) tetapi dapat juga antara swasta dengan swasta (B to B) dan bahkan pemerintah dengan swasta (G to B) atau sebaliknya. Kerjasama antar daerah bisa diterapkan untuk berbagai isu strategis dan urgen yang ada di daerah dengan kemungkinan bentuk kerjasama yang bersifat formal dan tidak formal. Pada tahun 2023 kerjasama antar daerah direncanakan dengan perusahaan Jawa Timur, Bali dan NTT.

4.3.1 Kerja Sama dengan Provinsi Jawa Timur

Hubungan kerjasama Provinsi NTB dengan Provinsi Jawa Timur telah dilakukan sejak tahun 2016, hubungan perdagangan dari sisi bongkar (masuk ke Jawa Timur) nilainya telah mencapai Rp.6,23 triliun dengan jenis komoditi yang potensial yakni jagung, minyak sawit, kulit kayu dan lainnya. Sedangkan nilai perdagangam antar pulau dari sisi muat (keluar dari Jawa Timur) pada periode yang sama yakni senilai Rp.16,10 triliun dengan jenis komoditi potensial berupa beras, tiang pancang, barite, pupuk alam maupun urea. Selanjutnya di tahun 2019, pertemuan misi dagang kembali dilakukan dengan harapan, komunitas antar pelaku usaha di NTB dan Jawa Timur menjadi produktif dan lebih menguntungkan terutama untuk komoditas jagung, dimana produksi jagung di NTB cukup besar dan dibutuhkan Jawa Timur sebagai pakan mengingat daerah tersebut sebagai penghasil ayam dan telur. Pengembangan Kerjasama diberbagai sector pada tahun 2023 dan tahun berikutnya.

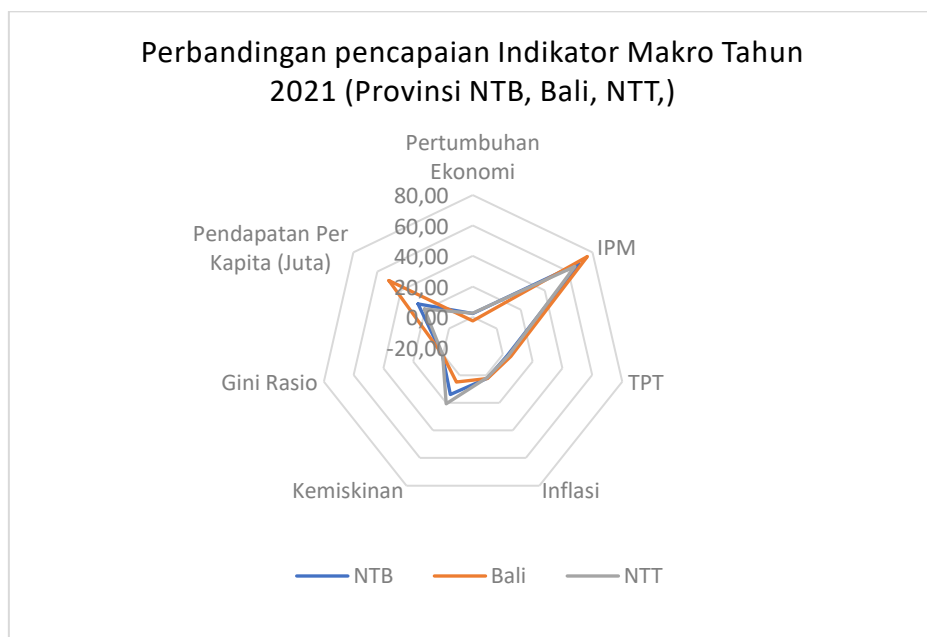
4.3.2 Kerja Sama Regional antar Provinsi Bali, Nusa Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur

Kerjasama pada saat beberapa daerah memiliki perbatasan langsung yang menghubungkan antar daerah disebut sebagai kerjasama regional. Kerjasama potensial terjadi karena adanya persamaan karakteristik antar wilayah, sehingga permintaan (kebutuhan) dan penawaran (penyedia) dapat saling melengkapi. Secara kewilayahan NTB, Bali dan NTT ini memiliki karakteristik yang hampir sama, berada di wilayah Indonesia Bagian Tengah. Karakteristik kewilayahan yang hampir sama menyebabkan

daerah ini memiliki potensi yang hampir sama, terutama sektor pertanian, pariwisata, maupun industri.

Pencapaian pembangunan di daerah ini digambarkan dengan pencapaian 7 (tujuh) indikator makro yang merupakan indikator utama dalam mengukur pencapaian pembangunan suatu wilayah. Indikator tersebut antara lain, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Inflasi, Angka Kemiskinan, Gini Rasio, dan Pendapatan Per Kapita.

Gambar 4- 2 Perbandingan pencapaian Indikator Makro Tahun 2021 wilayah regional NTB, Bali, dan NTT



Sumber: BPS, Tahun 202 diolah

Berdasarkan gambar di pencapaian pembangunan ke tiga daerah ini pada tahun 2021. Dari sisi Pertumbuhan Ekonomi, yang perlu soroti adalah Provinsi Bali mengalami kontraksi lumayan dalam, ini terjadi karena pembangunan di Provinsi Bali didominasi sektor tersier, yaitu sektor pariwisata. Angka Kemiskinan dan Pendapatan Per Kapita, wilayah Nusa Tenggara (NTB dan NTT) masih jauh dari tertinggal dari Provinsi Bali. Meskipun tingkat ketimpangan pendapatan yang ditunjukkan dengan angka Gini Rasio cenderung masih berada dalam kategori ketimpangan sedang, Provinsi NTB menjadi yang paling timpang.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Bali, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) harus menyatukan persepsi dalam berbagai sektor pembangunan. Sebagai provinsi tetangga maka kedua daerah ini tidak harus bersaing tapi saling bersinergi dan bekerjasama. Sehingga setiap daerah harus diuntungkan dalam kerja sama regional ini. Kerja sama antar daerah ini harus mampu mendongkrak pendapatan per kapita Provinsi NTB dan NTT, sebagai daerah dengan pendapatan per kapita terendah di wilayah ini. Penciptaan nilai tambah merupakan kata kunci, baik itu pada sektor pariwisata, industri, maupun

pertanian, karakteristik wilayah maupun budaya yang hampir sama sehingga dibutuhkan kerjasama dalam mengoptimalkan dan memanfaatkan sumber ke daya yang dimiliki dalam menjawab isu-isu strategis dan tantangan-tantangan bersama ke depannya.

Gubernur Bali, Wayan Koster bersama Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah pada tanggal 31 Maret 2021 yang lalu menandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tentang Kerjasama Pembangunan Daerah di Gedung Gajah, Jayasabha, Denpasar, Rabu (Buda, Umanis Julungwangi). Ada 6 bidang yang menjadi kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah NTB, meliputi Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi UKM, Perhubungan, Kelautan dan Perikanan serta Pertanian dan Ketahanan Pangan. Pemerintah NTB perlu belajar banyak tentang pembangunan dan pengelolaan pariwisata pada Pemerintah Bali, karena sektor ini banyak memberikan efek multiplier ke sektor lainnya seperti sektor industri terutama subsektor makanan dan minuman.

Provinsi NTB juga telah memulai kerjasama dengan Provinsi NTT, terutama dalam pengembangan Kawasan LA SAKOSA (Lambu, Sape, Komodo, dan Sangiang). La SAKOSA merupakan kawasan terintegrasi, yang mencakup Sape, Lambu, Teluk Waworada, Pulau Sangiang, Wera, Ambalawi di Kabupaten Bima, Asakota di Kota Bima, serta Pulau Komodo Nusa Tenggara Timur. Hubungan dari tiga wilayah besar (Kabupaten Bima, Kota Bima dan Pulau Komodo NTT), terkoneksi pada segala aspek transportasi/perhubungan, perdagangan, pariwisata, perikanan, pertanian, dan lain-lain.

Melalui kerjasama regional ini pada tahun 2023 diharapkan akan terjadi peningkatan dalam perekonomian di Nusa Tenggara Barat. Yang paling diharapkan adalah peningkatan produksi dalam daerah, yang pada akhirnya akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan pendapatan per kapita penduduk Nusa Tenggara Barat. Peningkatan produksi industri olahan harus dipacu lebih baik lagi, tentu dengan tetap memacu produksi sektor pertanian dan perkebunan sebagai sektor hulu, walaupun saat ini struktur ekonomi Nusa Tenggara Barat masih didominasi sektor ini.

4.3.3 Kerja Sama dengan Provinsi Sulawesi Selatan

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan gerbang pembangunan di Kawasan Indonesia Timur yang memiliki kekuatan dalam bidang pertanian (jagung, padi, bawang, talas Satoimo), perkebunan (coklat, kopi, lada, cengkeh, pala), peternakan (sapi, ayam, kambing, kuda, kerbau), perikanan dan kelautan (budidaya ikan, budidaya udang), dan kehutanan (KPH, ekowisata). Rincian potensi SDA di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

1. Peternakan dan Perikanan: sapi (produksi 1,04), tuna (301,8 ribu ton), mackerel (produksi 150,9 ribu ton), udang (produksi 452,7 ribu ton), rumput laut (produksi 3,6 juta ton)
2. Pertanian dan Perkebunan: padi (produksi 6,01 juta ton), jagung (produksi 2,23 juta ton), kakao (produksi 134 ribu ton), kopi arabika (produksi 20 ribu ton), kopi robusta (9 ribu ton)
3. Pariwisata: Tana Toraja, pantai Tanjung Bira, Taman Nasional Takabinerate

Arah pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan potens daerah adalah:

1. Kawasan Parepare dan Sekitarnya diarahkan pada pengembangan komoditas perkebunan, peternakan, pengembangan komoditas perikanan budidaya, dan pengembangan pusat pengolahan
2. Kawasan Makassar dan Sekitarnya diarahkan pada pengembangan komoditas perkebunan, pengembangan komoditas perikanan budidaya yang didukung oleh pusat pengolahan serta pengembangan pusat perdagangan barang dan jasa
3. Kawasan Palopo dan Sekitarnya diarahkan pengembangan komoditas perkebunan, dan pertanian tanaman pangan, peningkatan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap, pengembangan komoditas peternakan, pengembangan pusat pengolahan dan pengembangan kawasan pariwisata
4. Kawasan Watampone dan Sekitarnya diarahkan pada pengembangan komoditas perkebunan, peningkatan produktifitas perikanan tangkap dan perikanan budidaya
5. Kawasan Bulukumba dan Sekitarnya diarahkan pada pengembangan komoditas perkebunan, dan perikanan tangkap, pengembangan kawasan pariwisata, serta pengembangan pusat pengolahan

Pada tahun 2023 kerjasama Bali, NTB dan Sulawesi Selatan dengan dukungan Poros Bima-Sulawesi Selatan dalam sektor pariwisata dan budaya, hasil-hasil sumber daya alam, industri pengolahan, distribusi barang dan jasa, dan peningkatan kualitas SDM.

4.4 Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon dan Ekonomi Hijau, Biru dan Sirkular

Kemajuan suatu daerah hanya dapat dicapai dengan melaksanakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan merupakan proses pengolahan sumber daya alam dan pendayagunaan sumber daya manusia dengan memanfaatkan teknologi. Dalam pola pembangunan tersebut, perlu memperhatikan fungsi sumber daya lama dan sumber daya manusia agar dapat terus-menerus menunjang kegiatan atau proses pembangunan yang berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan memberikan implikasi adanya batas yang ditentukan oleh tingkat masyarakat dan organisasi social mengenai sumber daya alam, serta kemampuan biosfer dalam menyerap berbagai pengaruh aktivitas manusia. Proses pembangunan berlangsung secara berlanjut dan didukung sumber alam yang ada dengan kualitas lingkungan dan manusia yang semakin berkembang dalam batas daya dukung lingkungannya. Pembangunan akan memungkinkan generasi sekarang meningkatkan kesejahteraannya, tanpa mengurangi kemungkinan bagi generasi masa depan untuk meningkatkan kesejahteraannya (Prinsip-Prinsip Dasar Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan, Aca Sugandhy dan Rustam Hakim, 2009). Perencanaan pembangunan rendah karbon dan pengembangan ekonomi hijau, ekonomi biru dan ekonomi sirkular bertujuan untuk mengoptimalkan capaian kinerja pembangunan berkelanjutan tersebut. Kementerian PPN/Bappenas menyiapkan tiga strategi utama Pembangunan Rendah Karbon (PRK) sebagai bagian penting dari implementasi Ekonomi Hijau. Strategi tersebut adalah kebijakan *net zero emissions* untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, stimulus hijau untuk pemulihan ekonomi, serta

implementasi kebijakan PRK untuk memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Untuk mencapai target *net zero emission* pada 2060, Indonesia membutuhkan total investasi sebesar Rp 77.000 triliun hingga 2060 atau setara 5 kali lipat dari PDB Indonesia di 2020. “tentunya implementasi *net zero emission* melalui PRK dapat didorong bersama dengan prinsip *no one left behind*. Dalam transisi yang lumayan panjang dan tentunya mengarah ke ekonomi hijau yang tangguh dan inklusif, yang didukung kualitas lingkungan yang baik.

Dengan penerapan intervensi kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024, potensi kehilangan ekonomi tersebut dapat turun hingga 50,4 % menjadi Rp 57 triliun pada 2024. PRK menekankan prioritas pada lima sektor, yaitu penanganan limbah dan ekonomi sirkular, pengembangan industri hijau, pembangunan energi berkelanjutan, rendah karbon laut dan pesisir, serta pemulihan lahan berkelanjutan. Sementara pembangunan berketahanan iklim berfokus pada 4 (empat) prioritas utama yang telah memiliki sebaran lokasi prioritas di seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari implementasi PRK, Kementerian PPN/Bappenas juga melakukan studi penerapan Ekonomi Sirkular dan studi *Food Loss and Waste* yang menunjukkan pendekatan tersebut menghasilkan peluang peningkatan PDB sebesar Rp 593 triliun hingga Rp 638 triliun, penciptaan 4,4 juta lapangan kerja, pengurangan limbah sebesar 18-52 %, serta penurunan emisi GRK sebesar 126 juta ton karbondioksida. Secara regulasi, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional. Karbon merupakan indikator universal dalam mengukur kinerja upaya pengendalian perubahan iklim yang direfleksikan dalam kontribusi yang ditetapkan secara nasional. Karbon memiliki nilai ekonomi yang penting dan memiliki dimensi internasional utamanya berupa manfaat ekonomi bagi masyarakat sebagai refleksi prinsip pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan sesuai amanat Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai ekonomi karbon merupakan salah satu instrumen dalam mewujudkan kewajiban pemerintah dalam kontribusi pengurangan emisi gas rumah kaca, melalui pemilihan aksi mitigasi dan adaptasi yang paling efisien, efektif, dan berkeadilan.

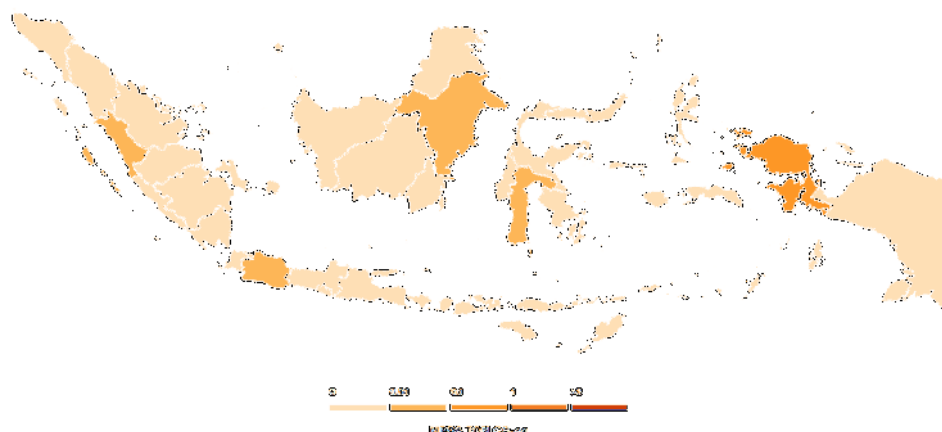
Perencanaan pembangunan rendah karbon didefinisikan sebagai perencanaan pembangunan yang mengintegrasikan upaya mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Strategi pengurangan emisi GRK dilakukan dengan upaya mitigasi dan adaptasi pada proses perencanaan pembangunan daerah. Secara nasional, pembangunan rendah karbon merupakan Prioritas Nasional (PN) 6 yaitu membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. PN 6 ini diwujudkan dalam 3 Prioritas Pembangunan (PP) yaitu 1). peningkatan kualitas lingkungan hidup, 2). peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dan 3). pembangunan rendah karbon.

Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen untuk mengintegrasikan prinsip pembangunan rendah karbon sebagai upaya antisipasi dampak perubahan iklim. Pembangunan rendah karbon ini bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan

ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan dengan emisi gas rumah kaca rendah dan penggunaan sumber daya alam yang efisien. Perencanaan pembangunan rendah karbon akan fokus pada upaya menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, dan penurunan emisi gas rumah kaca atau karbon. Hal ini sangat terkait erat dengan upaya untuk mencapai 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau SDGs. Paris Agreement yang merupakan hasil pembahasan COP 21 di Paris tahun 2015 bertujuan untuk meningkatkan kerjasama bilateral dan multilateral untuk aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement ini dan ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement atas konvensi PBB mengenai Perubahan Iklim.

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk Menyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Pemerintah Provinsi NTB telah menindaklanjuti Peraturan Presiden ini melalui penetapan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Disamping itu, Provinsi NTB juga telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi NTB. Bappenas juga telah menyiapkan platform AKSARA untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan penurunan emisi GRK. Data dan informasi ini terkait dengan penurunan emisi dan penurunan intensitas emisi. Pemerintah Indonesia telah menetapkan target NDC yaitu kebijakan dan langkah serta implementasi kegiatan sesuai komitmen Pemerintah berupa pengurangan emisi GRK 29% sampai dengan 41% pada tahun 2030 dibandingkan dengan baseline emisi GRK. Ketahanan nasional, kewilayahan, dan masyarakat dari berbagai risiko atas kondisi perubahan iklim atau ketahanan iklim. Proporsi emisi karbon dioksida (CO₂eq) untuk tahun 2021 berdasarkan Provinsi, dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 4- 3 Proporsi Emisi Karbon Dioksida (CO₂eq) Tahun 2021



Untuk penurunan intensitas emisi di Provinsi NTB, total 7.93 Ton CO₂eq per milyar rupiah berdasarkan data tahun 2021 (Aksara-Bappenas, 2021).

Gambar 4- 4 Peta Penurunan Intensitas Emisi di Indonesia Tahun 2021



Sumber: Aksara, Bappenas, 2022

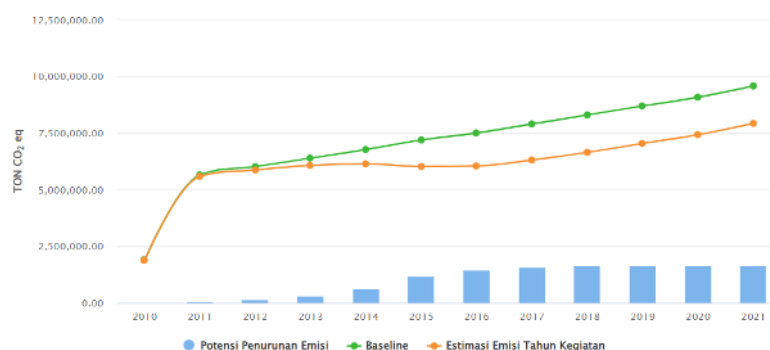
Strategi utama dalam penurunan emisi gas rumah kaca adalah melalui upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Untuk mitigasi perubahan iklim, sektor kehutanan, pertanian, energi, transportasi dan pengelolaan limbah domestik merupakan sektor yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Untuk adaptasi perubahan iklim, perbaikan infrastruktur dan peningkatan kapasitas masyarakat pada sektor-sektor terdampak.

Data emisi GRK di Provinsi NTB untuk menunjukkan bahwa terdapat 761 total kegiatan aksi pembangunan rendah karbon yang telah dilaksanakan, 1.655 Juta ton CO₂eq total potensi penurunan emisi kumulatif, 4.13 ton CO₂eq/Milyar Rupiah intensitas emisi (Aksara - Bappenas, 2022). Data 1.655 Juta ton CO₂eq merupakan penurunan emisi tahunan (2021), sedangkan Penurunan Emisi Kumulatif dari tahun 2010-2021 adalah sebesar 12.025.081,92 Juta ton CO₂eq. Kebijakan pembangunan rendah karbon Provinsi NTB akan dilaksanakan pada 3 (tiga) basis bidang yang terbagi atas 5 (lima) sektor yaitu:

- Bidang berbasis lahan, meliputi sektor kehutanan dan pertanian
- Bidang berbasis energi, meliputi sektor energi dan transportasi
- Bidang berbasis pengelolaan limbah, meliputi sampah dan air limbah domestik

Kebijakan pembangunan rendah karbon ini ditetapkan dengan target kontribusi penurunan emisi yang tergambar pada capaian kumulatif terkait pembangunan rendah karbon di NTB sebagai berikut:

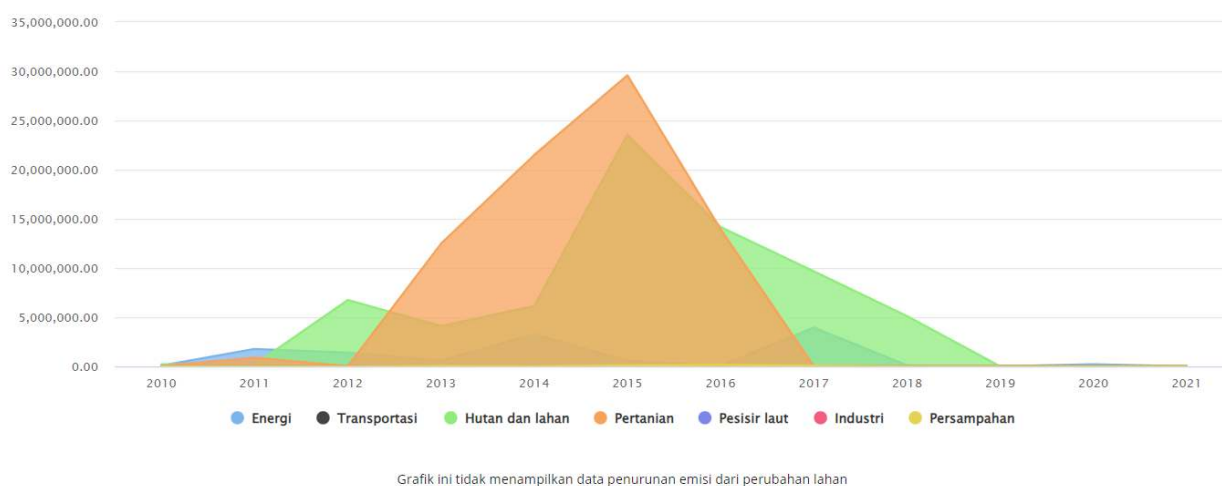
Gambar 4- 5 Total Pencapaian Penurunan Emisi dan Intensitas Emisi Provinsi



Sumber: Aksara - Bappenas, 2022

Pada tahun 2017, intensitas emisi di Provinsi NTB mencapai 2.76 ton CO₂eq per milyar rupiah, dengan capaian penurunan emisi sebesar 20.14% (1.592.198,20 ton CO₂eq). Pada tahun 2020, intensitas emisi mencapai 4.13 ton CO₂eq per milyar rupiah dan capaian penurunan emisi sebesar 18.22% (1.655.133,68 ton CO₂eq). Kontribusi penurunan emisi berdasarkan sektor merupakan proporsi penurunan emisi bersih berdasarkan pelaporan Rencana Aksi Daerah dari semua sektor pembangunan utama. Untuk Provinsi NTB, sektor pertanian mendominasi penurunan emisi, yang diikuti oleh sektor hutan dan lahan.

Gambar 4- 6 Grafik Penurunan Emisi Semua Sektor



Grafik ini tidak menampilkan data penurunan emisi dari perubahan lahan

Sumber: Aksara, Bappenas, 2022

Untuk sektor energi, aktifitas yang mendukung penurunan emisi adalah pembangunan PLTS dan PLTM. Kegiatan lain yang mendukung penurunan emisi adalah pemanfaatan biogas untuk rumah tangga, meningkatkan perhubungan antar wilayah yang berkualitas, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan, peningkatan pelayanan angkutan, pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, peningkatan dan pengamanan lalu lintas.

Untuk penurunan emisi pada sektor kehutanan, terutama terkait rehabilitasi hutan dan lahan, aksi yang dilakukan mengembalikan 30% hutan lahan kering sekunder dan penggunaan lain ke hutan lahan kering primer. Program unggulan NTB Hijau telah diimplementasikan untuk pemanfaatan kawasan hutan optimal. Percepatan rehabilitasi hutan dan lahan dengan Green School, program Newtrees. Luas kawasan hutan tetap seluas 1.069.997,78 Ha. Pembentukan dan operasionalisasi dari Kesatuan Pengelolaan Hutan turut berkontribusi dalam Program unggulan NTB Hijau. Aksi lainnya adalah mengembalikan 30% lahan penggunaan lain ke hutan lahan kering sekunder, mengembalikan 30% lahan penggunaan lain ke pertanian lahan kering campuran, penggunaan lain ke agroforestry.

Kegiatan yang penting untuk menurunkan emisi pada sektor kehutanan adalah peningkatan pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan dan konservasi sumber

daya alam dan ekosistem, reboisasi sumber daya hutan, pengembangan pembenihan tanaman hutan, penyediaan bibit tanaman kehutanan. Untuk sektor pertanian, kegiatan terkait penurunan emisi GRK adalah pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO), pengembangan pertanian organik, pengembangan teknologi biogas dan pakan untuk mengurangi emisi GRK dari ternak. Upaya yang mendukung pembangunan rendah karbon Provinsi NTB dilakukan melalui:

1. Kehutanan, meliputi penanaman, rehabilitasi hutan dan lahan, serta perlindungan hutan
2. Pertanian, meliputi peningkatan produktivitas padi melalui penggunaan teknologi budidaya System Rice Intensification (SRI) dan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT), serta pembangunan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)
3. Energi meliputi pengembangan energi baru terbarukan melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) serta substitusi bahan bakar fosil ke biogas dan efisiensi energi.
4. Transportasi, meliputi pengembangan transportasi ramah lingkungan, pengembangan Kota Ramah Sepeda, pelaksanaan Car Free Day (CFD), penerapan manajemen parkir
5. Pengelolaan sampah dan air limbah domestik, meliputi pembangunan dan operasional TPA Kebon Kongok, TPS Terpadu 3R (composting dan daur ulang sampah), pembangunan IPAL.

Untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan sasaran untuk meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat. Strategi untuk mengembangkan implementasi pembangunan rendah karbon dengan arah kebijakan untuk meningkatkan upaya mitigasi perubahan iklim melalui penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, pertanian, energi, transportasi, dan pengelolaan limbah domestik. Arah kebijakannya untuk meningkatkan upaya adaptasi perubahan iklim melalui perbaikan infrastruktur dan peningkatan kapasitas masyarakat pada sektor-sektor terdampak.

4.4.1 Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon

Inisiasi pembangunan rendah karbon bertujuan untuk mengintegrasikan aksi perubahan iklim dalam agenda pembangunan daerah. Tujuan utamanya adalah mengurangi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam kebijakan perencanaan pembangunan sejalan dengan upaya restorasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Inisiasi kebijakan pembangunan rendah karbon juga bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, dan mewujudkan target pembangunan sektoral. Kebijakan pembangunan rendah karbon berupaya untuk mewujudkan visi Indonesia 2045. Dampak lingkungan saat ini adalah polusi air dan udara, kerusakan hutan dan lahan, urbanisasi, permasalahan pada perikanan kelautan, sumber daya air dan keanekaragaman hayati, telah mulai tampak saat ini.

Implementasi pembangunan rendah karbon menjadi Prioritas Nasional (6.3) dengan lima sasaran, yaitu pembangunan energi berkelanjutan, pemulihan lahan berkelanjutan,

pengembangan industri hijau, rendah karbon pesisir dan laut, penanganan limbah dan penerapan ekonomi sirkular. Target sasaran tahun 2024 untuk pembangunan energi berkelanjutan yaitu 19.5% porsi EBT dalam bauran energi nasional, 0,8 SBM/M Rp penurunan intensitas energi final dan 133,8 SBM/M Rp intensitas energi primer. Untuk pemulihan lahan berkelanjutan, target sasaran tahun 2024 adalah 1.6 juta ha luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan, 2,1 juta ha luas tutupan hutan yang ditingkatkan secara nasional, dan 100% luas LP2B terhadap kebutuhan lahan pertanian. Rendah karbon pesisir dan laut menargetkan 50.000 ha luas lahan rehabilitasi mangrove. Penanganan limbah dan penerapan ekonomi sirkular menargetkan 69,8 juta ton jumlah sampah terkelola secara nasional, 409.078 jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R, 494.152 jumlah rumah tangga yang terlayani TPST, dan 3.885.755 jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan Standar Sanitary Landfill (Kepala Keluarga).

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18/2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, untuk pembangunan rendah karbon, arah kebijakan yang telah ditetapkan yaitu kebijakan untuk penurunan emisi dan intensitas emisi di bidang prioritas (energi, transportasi, lahan, limbah, industri, dan kelautan). Arah kebijakan ini berupaya merespon isu strategis terkait degradasi kualitas lingkungan hidup, peningkatan potensi dampak dan bahaya perubahan iklim. Untuk itu, penanganan perubahan iklim yang lebih holistic bisa diupayakan melalui pembangunan rendah karbon. Untuk bidang prioritas energi, transisi ke energi baru terbarukan (EBT) di Provinsi NTB telah menjadi fokus pemerintah provinsi NTB. Untuk bidang prioritas transportasi, inisiasi Kota Ramah Sepeda berupaya mengurangi peningkatan polusi udara melalui pengalihan penggunaan kendaraan bermotor ke sepeda, sebagai alat transportasi ramah lingkungan. Untuk bidang lahan, rehabilitasi hutan dan lahan, akan membantu mengurangi dampak perubahan iklim pada alam dan manusia. Untuk limbah, penerapan ekonomi sirkular, diharapkan mampu mengubah sampah menjadi berkah, yang menghasilkan pendapatan untuk masyarakat. Untuk industri, penggunaan energi listrik dari energi baru terbarukan, diharapkan dapat mendukung produktivitas industri di Provinsi NTB. Untuk bidang kelautan, menjaga ekosistem biru yaitu upaya mempertahankan kondisi ekosistem laut, seperti mangrove, karang/koral, dan lamun sebagai sumber ekonomi biru. Implementasi pembangunan rendah karbon didukung oleh ketersediaan regulasi, kelembagaan, tata kelola, sinergi pelaksanaan, SDM, dan anggaran yang memadai untuk mencapai tujuan.

Pembangunan rendah karbon dan berketahanan bencana di Provinsi NTB diharapkan dapat mendorong upaya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan secara berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Provinsi NTB diwujudkan melalui peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi melalui produktivitas industri (revitalisasi industri dan penguatan riset terapan) dan diversifikasi ekonomi yang inklusif. Transformasi ekonomi ini didukung oleh SDM berdaya saing, produktivitas sektor ekonomi, ekonomi hijau-biru-sirkular, transformasi digital yang mendukung sektor ekonomi, dan pembangunan infrastruktur digital, konektivitas, dan infrastruktur dasar (air bersih dan sanitasi). Implementasi prinsip

pembangunan berkelanjutan diarahkan dengan pembangunan rendah karbon dan transisi energi sebagai respons terhadap perubahan iklim.

4.4.2 Perencanaan Pembangunan Ekonomi Hijau

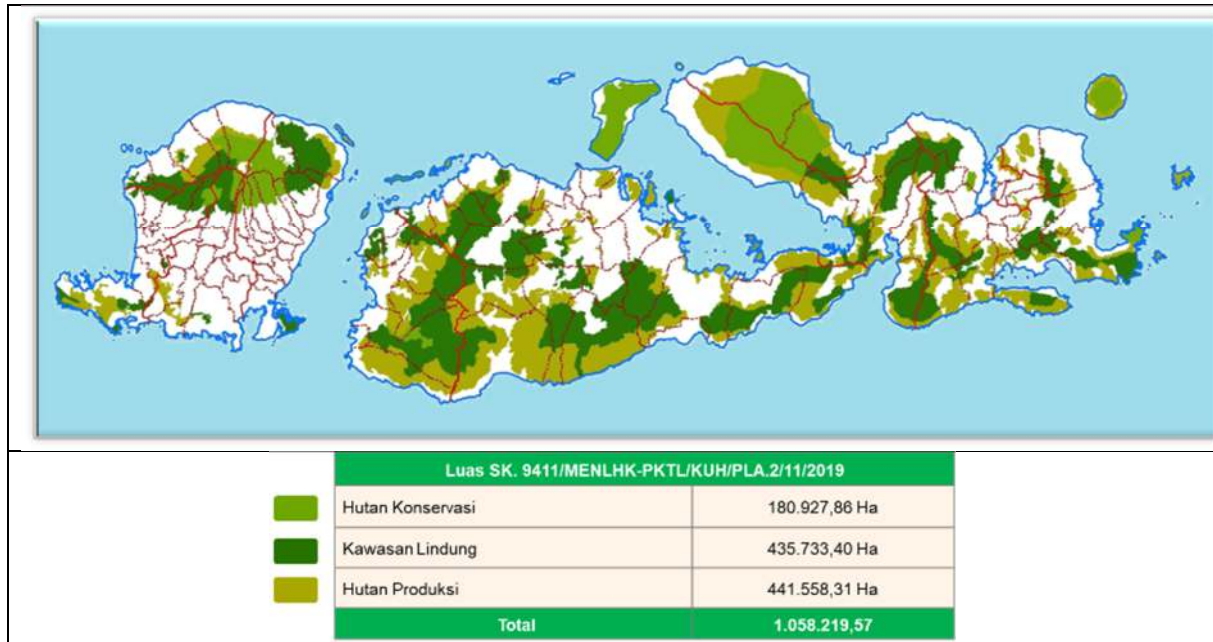
Perencanaan pembangunan ekonomi hijau bertujuan untuk menciptakan transformasi ekonomi dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk pertumbuhan ekonomi dan menjaga kualitas lingkungan secara berkelanjutan. Ekonomi hijau adalah suatu model pembangunan yang mampu membangun sinergi antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Konsep ekonomi hijau ini dapat menyediakan suatu alat untuk membantu pemerintah dalam merencanakan upaya transformasi kegiatan ekonomi produktif yang lebih ramah lingkungan dan inklusif.

Implementasi konsep ekonomi hijau bermanfaat untuk meningkatkan ekonomi dan mata pencaharian masyarakat dalam jangka pendek. Untuk jangka panjang, penerapan ekonomi hijau akan sangat bermanfaat untuk melindungi kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung transformasi ekonomi di NTB, manfaat ekonomi hijau adalah untuk menciptakan peluang kerja baru (green jobs) dan investasi baru (green investment), mendorong pertumbuhan ekonomi yang rendah karbon. Penerapan ekonomi hijau juga dapat meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup. Untuk itu, implementasi ekonomi hijau menjadi salah satu fokus transformasi ekonomi di Provinsi NTB.

Pemerintah Provinsi NTB telah menetapkan program unggulan NTB Hijau, Zero Waste, dan Program Sekolah LISAN, sebagai bagian dari penerapan ekonomi hijau. Program unggulan NTB Hijau bertujuan untuk mengembalikan kondisi hutan dan lahan melalui berbagai upaya rehabilitasi hutan dan lahan. Program unggulan Zero Waste bertujuan untuk mengelola sampah berbasis pengurangan jumlah sampah, daur ulang sampah, penggunaan kembali sampah atau yang dikenal dengan konsep 3R. Pengelolaan sampah ini juga terkait erat dengan konsep ekonomi sirkular, yaitu mengolah sampah sebagai suatu sumber pendapatan baru yang dimanfaatkan kembali dalam proses produksi. Program Sekolah Lingkungan Dengan Sampah Nihil (LISAN) menuju NTB Zero Waste merupakan program pendukung untuk mengelola sampah menjadi lebih bermanfaat. Program ini berupaya untuk melibatkan masyarakat secara langsung dengan perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah yang ada.

Pengembangan sektor pariwisata menjadi andalan untuk pertumbuhan ekonomi NTB, melalui pengembangan ekonomi hijau agar terwujud pariwisata yang berkelanjutan. Daya Tarik pariwisata NTB teretal pada alam dan ekosistem, kekayaan biodiversitas yang unik dan spesifik. Wisata alam dan hutan ini didukung oleh program unggulan NTB Hijau. Untuk itu, rehabilitasi hutan dan lahan dan konservasi berbagai sumber daya yang mendukung wisata alam perlu dilaksanakan. Pola pengelolaan kekayaan alam untuk wisata ekologi, wisata geologi, dan wisata keanekaragaman hayati. Peta sebaran kawasan hutan konservasi, kawasan lindung, dan hutan produksi dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 4- 7 Peta sebaran kawasan hutan Provinsi NTB Tahun 2019



Sumber: RTRW Provinsi NTB, 2019

Dalam Prioritas Nasional 6.3. untuk pembangunan rendah karbon, sasaran pembangunan yaitu pengembangan industri hijau ditargetkan 10% perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH). SIH telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 51/M-IND/PER/6/2015 sebagai acuan para pelaku industri dalam menyusun secara konsensus terkait dengan bahan baku, bahan penolong, energi, proses produksi, produk, manajemen perusahaan, pengelolaan limbah dan aspek lain yang bertujuan untuk mewujudkan industri hijau. Kebijakan nasional di bidang standarisasi, perkembangan industri di dalam dan luar negeri, perjanjian internasional, dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Prinsip transparansi dan keterbukaan, konsensus dan tidak memihak, efektif, relevan, koheren. Untuk mendukung industri hijau, perusahaan industri menengah besar yang ada di NTB didominasi oleh industri smelter di Kawasan Industri (KI) yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat.

Penanganan luas lahan kritis 96.238,24 Ha, yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota di NTB dengan rincian berikut ini:

Tabel 4- 9 Sebaran Luas Lahan Kritis di Provinsi NTB Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Luas Lahan Kritis
1	Sumbawa	30.291,48
2	Sumbawa Barat	53,05
3	Dompu	16.690,26
4	Bima	15.790,38
5	Kota Bima	1.093,37
6	Lombok Timur	9.002,99
7	Lombok Tengah	6.686,95
8	Lombok Utara	4.299,67

9	Lombok Barat	12.330,09
	TOTAL	96.238,24

Penanganan luas lahan kritis akan membantu industrialisasi produk kehutanan (HHBK) untuk meningkatkan nilai tambah produk HHBK dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Hal ini didukung oleh kemitraan kehutanan di NTB dengan total luas 24.272, 76 Ha dengan total anggota sebanyak 7.038 orang. Luasan perhutanan sosial di NTB yaitu 51.950 Ha yang mensasar sekitar 32.534 Kepala Keluarga.

Komoditas kehutanan yang tersebar di 15 KPH yaitu minyak kayu putih, minyak sereh wangi, minyak nilam, bambu konstruksi dan laminasi, umbi porang/olahan, madu hutan dan budidaya, kemiri, kopi, dan tanaman buah lainnya. Mengembangkan dan meningkatkan nilai ekonomi, ekologi, dan sosial masyarakat dalam pengelolaan integrasi kayu dan HHBK yang berkelanjutan. Manajemen yang mendukung peningkatan pendapatan di tingkat rumah tangga yang berasal dari optimalisasi kayu dan sistem produksi HHBK, didukung oleh rantai nilai biaya yang efektif. Pelaksanaan pengelolaan terpadu antara kayu dan HHBK akan meningkatkan fungsi ekologi lanskap / bentang alam. Seluruh proses harus difasilitasi oleh kerangka kebijakan dan regulasi yang efektif dan menguntungkan bagi ekologi dan ekonomi

4.4.3 Perencanaan Pembangunan Ekonomi Biru

Perencanaan pembangunan ekonomi biru bertujuan untuk mengoptimalkan potensi perikanan dan kelautan yang ada di Provinsi NTB, dengan mempertahankan kondisi lingkungan ekosistem laut. Ekosistem pesisir yang penting adalah mangrove, padang lamun dan terumbu karang. Hutan mangrove penting sebagai suatu sistem yang menjaga keberlanjutan wilayah pesisir. Mangrove menyediakan habitat penting untuk ribuan spesies, menjadi tempat pengembangbiakan ikan, udang, kepiting, kerrang, menstabilkan garis pantai, mencegah erosi, melindungi tanah, dan penduduk di kawasan pesisir dari ancaman gelombang dan badai. Mangrove menjadi penting karena merupakan lokasi yang memiliki kandungan karbon terpadat yang sangat mendukung penanganan dampak perubahan iklim. Padang lamun berfungsi untuk menyediakan penghalang lebih lanjut terhadap lanau dan lumpur yang dapat menutupi terumbu karang. Terumbu karang melindungi padang lamun dan hutan mangrove dari gelombang laut yang kuat. Hutan mangrove menjadi bagian utama dari ekosistem yang sangat produktif untuk keberlanjutan ketersediaan ikan dan berbagai potensi laut yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir.

Ekonomi biru bertujuan untuk mengembangkan potensi sumber daya alam kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Roadmap ekonomi biru dengan 3 program terobosan yaitu penangkapan terukur, budidaya berorientasi ekspor, dan kampung budidaya berbasis kearifan lokal. Potensi kelautan dan perikanan seperti udang, lobster, kepiting, rumput laut perlu ditingkatkan nilai tambah untuk industrialisasi pangan. Untuk mendukung sektor pariwisata, laut dan pantai yang bersih untuk mendukung wisata laut, wisata bawah laut dan wisata olahraga air. Dalam Prioritas Nasional 6.3. untuk pembangunan rendah karbon, sasaran pembangunan yaitu jumlah luas rehabilitasi hutan mangrove 50.000 Ha.

Sasaran pembangunan ekonomi biru yaitu rendah karbon pesisir dan laut dengan merehabilitasi hutan mangrove yang ada di Provinsi NTB. Panjang ekosistem hutan mangrove di Provinsi NTB mencapai 522.182 m yang tersebar di pesisir (318.767 m) dan di pulau-pulau kecil (203.415 m). Panjang ekosistem mangrove daerah pesisir di Pulau Lombok adalah 71.790 m dan di Pulau Sumbawa adalah 246.977 m. WP3K Kabupaten Sumbawa memiliki ekosistem hutan mangrove terpanjang sebesar 53,04%. Ini berarti lebih dari separuh panjang hutan mangrove Provinsi NTB hidup di WP3K Kabupaten Sumbawa (Tabel 2.10).

Ekosistem mangrove di Pulau Sumbawa yang terpanjang terdapat di Kabupaten Sumbawa (134.095 m), sedangkan yang terpendek terdapat di Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat (254 m). Adapun ekosistem mangrove di Pulau Lombok yang terpanjang berada Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur memiliki (41.963 m), sedangkan yang terpendek berada di Kabupaten Lombok Tengah (1.591 meter). Sementara itu pesisir Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Utara tidak memiliki ekosistem hutan mangrove.

Ekosistem mangrove ditemui juga di daerah pasang surut PPK sepanjang 31.109 m. Mangrove di PPK sekitar Pulau Lombok memiliki panjang 172.306 m, sedangkan di Pulau Sumbawa sepanjang 203.415 m. Ekosistem mangrove tersebut hanya hidup di 15 pulau kecil dari 278 PPK yang ada. PPK di Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa memiliki ekosistem hutan mangrove paling panjang, yaitu 60.724 m atau 49,40% dari panjang total ekosistem hutan mangrove di PPK Kabupaten Sumbawa atau 29,85% dari panjang total ekosistem hutan mangrove di PPK Provinsi NTB.

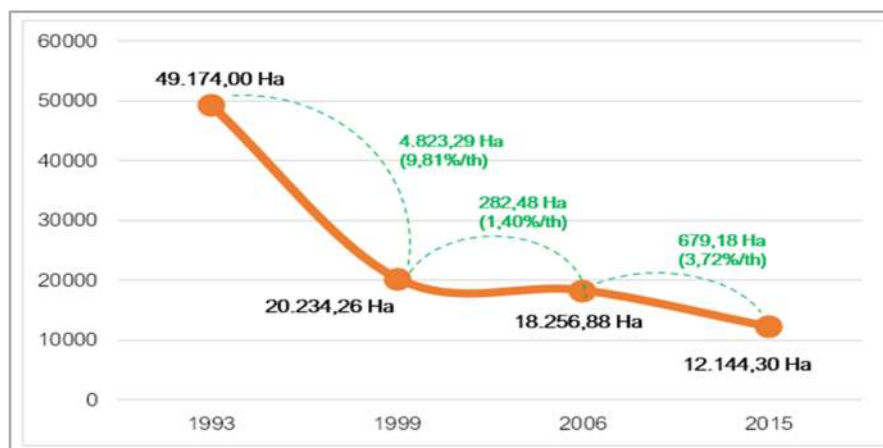
Ekosistem hutan mangrove tersebar di seluruh WP3K Provinsi NTB, selain di WP3K Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Utara. Ekosistem hutan mangrove tersebut terus tergerus luasnya selama kurun waktu 1993 - 2015. Berdasarkan data dari BPDAS Dodokan Moyosari tahun 2011, luas hutan mangrove di Provinsi NTB tahun 2013 sebesar 49.174 ha (Hayashi dan Chaniago, 1994). Enam tahun kemudian (1999), hutan mangrove di Provinsi NTB mengalami degradasi hingga tersisa seluas 20.234,26 Ha. Di tahun 2006, Dinas Kehutanan Provinsi NTB melaporkan bahwa luas hutan mangrove di Provinsi NTB berkurang menjadi 18.256,88 ha.

Sedangkan menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB (2015) berdasarkan hasil analisis peta citra menunjukkan bahwa luas hutan mangrove saat ini disetimasi seluas 12.144,3 ha (Tabel 2.12). Jika dibandingkan dengan Tahun 1993 dimana luas hutan mangrove masih 49.174 Ha, berarti telah terjadi degradasi hutan mangrove seluas 37.029,7 Ha. Ekosistem hutan mangrove tersebut tersebar pada perairan pasang surut mulai dari Selat Lombok hingga Selat Sape, Laut Flores, Samudera Hindia, perairan teluk, dan pulau-pulau kecil. Hutan mangrove dengan kepadatan tinggi di wilayah pesisir terdapat antara lain di Teluk Lembar, Teluk Sepi, Teluk Bumbang, Teluk Ekas, Teluk Serewe, Teluk Jor, Teluk Saleh, Teluk Sape, Teluk Waworada, dan Teluk Cempi. Sedangkan di PPK, hutan mangrove masih tumbuh lebat diantaranya di Gili Gede, Gili Sulat, Gili

Lawang, Gili Petagan, Gili Belang, Gili Namo, Gili Kalong, Pulau Panjang, Pulau Saring, Pulau Temudong, Pulau Kramat, Pulau Medang, dan Pulau Rea.

Ekosistem hutan mangrove di Provinsi NTB sebagian besar dalam kondisi baik dengan kepadatan vegetasi mangrove berkisar antara 1.200 individu/ha (sedang) di kawasan Kuta-Awang dan sekitarnya hingga 16.267 individu/ha (sangat padat) di kawasan Labuhan Kertasari- Maluk dan sekitarnya. Sedangkan penutupan mencapai 15,16% (jarang) sampai 95,50% (sangat padat) di kawasan Kuta-Awang.

Gambar 4- 8 Perubahan Luas Ekosistem Mangrove Provinsi NTB Tahun 1993 - 2015



Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi NTB (1994 dan 2007); BPDAS Dodokan Moyosari (2011); Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTB (2015), data diolah.

Pengurangan ekosistem mangrove pada periode 1993 – 1999 sebesar 9,81% per tahun. Dari gambar di atas terlihat bahwa perubahan luas ekosistem hutan mangrove periode 1999 - 2006 meningkat sebesar 1,40% tahun dari rasio perubahan pada periode 1993-1999. Eskalasi kerusakan ekosistem hutan mangrove selama periode 2006-2015 mencapai 3,72%/tahun yang lebih cenderung diakibatkan oleh pemanfaatan areanya untuk usaha pertambakan.

4.4.4 Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sirkular

Perencanaan pembangunan ekonomi sirkular bertujuan untuk mengolah sampah menjadi materi yang bernilai tambah dan sebagai input untuk kegiatan lanjutan yang mempunyai nilai ekonomi dan menjadi pendapatan bagi masyarakat. Dalam Prioritas Nasional 6.3. untuk pembangunan rendah karbon, sasaran pembangunan yang terkait dengan implementasi ekonomi sirkular yaitu penanganan limbah dan penerapan ekonomi sirkular yaitu jumlah sampah yang dikelola dan jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R, TPST, dan TPA dengan standar sanitary landfill. Ekonomi sirkular bagian dari pembangunan rendah karbon yang menerapkan prinsip -produksi, gunakan, buang-. Optimalisasi sumber daya dan memperpanjang umur suatu material, dari desain, digunakan kembali, di daur ulang, dan kembali masuk ke dalam sistem produksi. Hal ini akan bermanfaat untuk menekan jumlah material yang dipakai dan jumlah limbah yang tidak dipakai kembali. Untuk sektor pariwisata, konsep ekonomi sirkular ini sangat

mendukung Program Unggulan Zero Waste terutama mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan. Tabel berikut ini menunjukkan realisasi pengurangan sampah di NTB Tahun 2019-2020:

Tabel 4- 10 Realisasi pengurangan sampah tahun 2019-2020

No.	KEGIATAN PENGURANGAN	TAHUN 2019				TAHUN 2020			
		JUMLAH (ton/hari)	KELOMPOK/SARPRAS (Unit)	PENGURANGAN	%	JUMLAH (ton/hari)	KELOMPOK/SARPRAS (Unit)	PENGURANGAN	%
1	Timbulan Sampah	2.567,74				2.605,23			
2	Bank Sampah		256	51,20	1,99		372	27,85	1,07
3	Lubang Biopori		0	0	0		574	0,17	0,01
4	Sumur Biopori		0	0	0		100	0,65	0,02
5	Komposter (bag/tong)		1,127	1,58	0,06		6,012	8,12	0,31
6	TPS3R		20	39,40	1,53		26	51,22	1,97
7	BSF Mandiri		8	2,40	0,09		11	3,30	0,13
8	Pengelolaan SRT (Lantana Garden		0	0	0		1	0,50	0,02
9	Sekolah Adiwiyata		1	1,20	0,05		1	1,20	0,05
10	Dusun Kekait Gunungsari Lobar		1	0,30	0,01		1	0,30	0,01
11	Pengelola Sampah Mandiri		26	78,52	3,06		36	94,01	3,61
PENGURANGAN				174,60	6,8			187,32	7,19

Sumber: Dinas LHK Provinsi NTB, 2021

4.5 Inovasi

Inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi NTB memanfaatkan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah. Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, inovasi daerah dapat berbentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Inovasi tata kelola pemerintahan daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas manajemen pemerintah daerah. Inovasi pelayanan publik bertujuan untuk penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik. Inovasi daerah lainnya terkait kewenangan pemerintah daerah. Inovasi daerah ini dapat bersifat pembaharuan seluruh atau sebagian dari unsur inovasi, memberikan manfaat untuk daerah dan masyarakat, tidak membebani dan membatasi masyarakat, menjadi kewenangan daerah dan dapat direplikasi. Pemerintah Provinsi NTB telah memiliki total 80 inovasi yang telah menyesuaikan dengan nomenklatur Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

Untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah di Provinsi NTB, Pemerintah Provinsi NTB telah menetapkan kebijakan penting untuk pembangunan berbasis bukti dan berbasis desa. Peningkatan kualitas perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah ini bertujuan untuk percepatan penanganan kemiskinan daerah dari 13,83% tahun 2021 menjadi satu digit pada tahun 2023. Untuk itu, inovasi yang dilaksanakan meliputi:

1. Gerakan Multi Pihak – Penanggulangan Kemiskinan (GMP-PK)

Berdasarkan Peraturan Gubernur NTB Nomor 29 tahun 2021 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Gerakan Multi Pihak – Penanggulangan Kemiskinan atau disingkat menjadi GMP-PK bertujuan untuk membangun kolaborasi dan aksi nyata berbagai pihak, agar mampu mendorong percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin. Hal ini merupakan upaya untuk mencapai 1-digit penurunan kemiskinan dari target 11.92% pada akhir tahun 2023, sesuai RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023. GMP-PK ini dilaksanakan melalui aksi kolaborasi multi-pihak pada berbagai tingkat pemerintahan. Deklarasi Komitmen GMP-PK telah dilaksanakan pada Pondok Pesantren Nurul Haramain NWDI Narmada, Lombok Barat pada tanggal 15 Desember 2021. GMP-PK ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah, berkolaborasi dengan perguruan tinggi, pengusaha/swasta, tokoh agama, tokoh masyarakat, donor/NGO/LSM, lembaga keagamaan, kelompok masyarakat peduli lingkungan, media, dan berbagai unsur terkait lainnya. Dalam Deklarasi GMP-PK ini, para pihak sepakat untuk bergerak nyata sebagai aksi kolektif, sistematis, dan masif melalui transformasi sosial yang memberi ruang bagi semua pihak untuk penanggulangan kemiskinan dengan validitas kebenaran, kejujuran dan normatif. Para pihak melakukan intervensi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, pada aspek ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan infrastruktur. Gerakan ini berupaya membangun sinergi melalui pendekatan multi sektor yang didukung dengan integrasi program dan kegiatan yang bersifat lintas sektor. GMP-PK mendorong pembentukan komunitas kreatif yang mampu melakukan berbagai inovasi, mendorong produktifitas perekonomian dan sosial budaya, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk percepatan perubahan masif dan transformatif. GMP-PK juga memperhatikan penerapan prinsip religiusitas, kesetaraan, inklusif, dan nilai-nilai sosial budaya dengan sasaran intervensi pada klaster rumah tangga, kelompok masyarakat, dunia usah/UMKM, dan berbasis desa/wilayah/masjid.

2. Inovasi Desa Gemilang

Inovasi Desa Gemilang merupakan upaya untuk mewujudkan visi NTB Gemilang berbasis pembangunan perdesaan. Desa Gemilang adalah desa yang telah mampu mengoptimalkan keunggulan potensi dan daya saing yang ada di desa. Keunggulan ini bermakna setiap desa telah mengimplementasikan berbagai program unggulan berbasis desa dan dusun. Daya-saing bermakna setiap desa telah mengoptimalkan potensinya untuk berkembang dan mampu akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa Gemilang menjadi target sasaran Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan berbasis desa. Kelompok penerima manfaat dari setiap program/kegiatan tepat sasaran. Hal ini mendukung percepatan keberhasilan pelaksanaan program unggulan dan strategis Pemerintah Provinsi NTB. Komponen program unggulan dan strategis ini meliputi keberhasilan pelaksanaan Posyandu Keluarga (Posga), Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Desa Wisata dan Ekonomi Kreatif, Desa bersih dari narkoba (Bersinar), Desa yang juga telah menerapkan program penghijauan di sekitar kawasan hutan, mengoptimalkan potensi sumber daya perikanan dan kelautan, bebas dari sampah melalui pengelolaan dan penanganan sampah terpadu, zero unprocedural migran atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu, Desa Gemilang juga telah mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi atau digitalisasi desa, agar memiliki daya saing. Inovasi Desa

Gemilang ini didukung oleh upaya menguatkan basis perencanaan pembangunan dengan program lintas sektor untuk kolaborasi, yaitu kolaborasi vertikal dan horizontal, membangun sinergi lintas pemerintahan, meningkatkan jejaring kerjasama dengan mitra pembangunan, melakukan aksi nyata dengan pelibatan pelaku usaha. Inovasi Desa Gemilang hadir untuk mengatasi permasalahan pembangunan desa, terutama terkait kenaikan indeks kedalaman kemiskinan sebesar 0,263 poin selama Maret 2021-September 2021 (BPS NTB, 2022). Peningkatan indeks ini lebih tinggi dari daerah perkotaan sebesar, 0,082 poin. Disamping itu, indeks keparahan kemiskinan di perdesaan juga mengalami peningkatan sebesar 0,137 poin selama Maret 2021-September 2021. Nilai ini lebih tinggi dari peningkatan indeks keparahan kemiskinan di perkotaan sebesar 0,026 poin (BPS NTB, 2022). Inovasi Desa Gemilang berupaya mengoptimalkan semua peluang pengembangan usaha ekonomi produktif pada level desa berdasarkan potensi unggulan yang ada di desa untuk menggerakkan seluruh komponen masyarakat secara terstruktur, sistematis, dan terarah. Untuk itu, upaya membangun Desa Gemilang dilaksanakan dengan strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang fokus pada pembangunan perdesaan.

3. Sistem Informasi Desa (SID)

Sistem Informasi Desa (SID) bertujuan untuk membangun basis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa berbasis bukti dan data yang telah dimutakhirkan. Hal ini penting dilakukan untuk ketepatan sasaran pembangunan desa bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan pelayanan dasar. Sistem Informasi Desa dimanfaatkan untuk mengetahui jumlah individu yang membutuhkan pelayanan dasar terkait pendidikan, kesehatan, penyediaan air minum dan sanitasi, kesiapsiagaan kebencanaan, infrastruktur dasar, dan lainnya. Saat ini telah diinisiasi penyusunan peta jalan Sistem informasi Desa sesuai amanat Peraturan Gubernur NTB Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Instruksi Gubernur NTB Nomor 047/2021 Tentang Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) sebagai Basis Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Peningkatan kualitas data dan informasi di level desa menjadi kunci sukses untuk keberhasilan implementasi penanggulangan kemiskinan berbasis perdesaan. Tujuh strategi kunci untuk implementasi SID sebagai basis perencanaan adalah memperkuat tatakelola program di tingkat provinsi, memperkuat komitmen, dukungan dan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan SID, memperkuat kapasitas dan dukungan pemerintah kab/kota dalam perluasan penerapan SID, memfasilitasi integrasi data sid di provinsi, kab/kota & kecamatan, meningkatkan kapasitas personil di provinsi/kab/kota tentang pemanfaatan data SID untuk mendukung pengelolaan pembangunan daerah, memfasilitasi pemkab/kota dalam meningkatkan kapasitas pemerintah desa tentang pemanfaatan data SID untuk mendukung pengelolaan pembangunan desa, memperkuat kemitraan dengan pemkab/kota dan pemdes dalam penyediaan anggaran dan sarana prasarana pendukung perluasan dan pemanfaatan SID.

Sistem Informasi Desa (SID) dapat mendukung kebutuhan data dan informasi berbagai program prioritas (program unggulan) berbasis desa yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Data set SID memuat berbagai data dan informasi penduduk yang tinggal di desa dan

keberadaannya telah dipadupadankan dan di validasi oleh Pemerintah Desa dengan Dinas Dukcapil. Fitur-fitur yang ada di platform SID juga terus berkembang secara dinamis, sesuai dengan perubahan kebijakan/regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah ataupun pemerintah desa. Sehingga data set maupun fitur yang ada dapat dimanfaatkan, dihubungkan dan diselaraskan dengan berbagai platform aplikasi provinsi NTB seperti NTB satu peta, Sistem Informasi Posyandu, SDG's Center, NTB Care, Desa Tangguh Bencana.

Selain itu juga penggunaan Sistem Informasi Desa (SID) sangat membantu desa dalam proses verifikasi dan validasi data dalam pengolahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ada di desa sehingga manfaat dengan adanya SID ini dapat menjadi media pendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan sosial BLT-Dana Desa dan JPS yang tepat sasaran.

Sistem informasi Desa (SID) juga dapat menyediakan informasi data dasar pelayanan publik serta kondisi sosial, ekonomi maupun potensinya sampai ditingkat keluarga/rumah tangga. Melalui data SID profil rumah tangga selanjutnya dapat dianalisis kondisi akses pelayanan baik dibidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, akses air bersih, sanitasi serta berbagai intervensi program lainnya. Sehingga berdasarkan data tersebut dapat dianalisis dan diketahui capaian Standar Pelayanan Minimal disetiap bidang di seluruh tingkat pemerintahan baik di Desa, kecamatan maupun kabupaten/kota. Dengan profil capaian SPM tersebut, maka pemerintah kabupaten maupun provinsi dapat memanfaatkannya untuk perumusan perencanaan pembangunan serta membuat kebijakan afirmatif untuk mendukung desa maupun kabupaten dalam memenuhi layanan SPM di wilayahnya.

4. Optimalisasi Pemanfaatan Lahan kritis di NTB

Lahan kritis dapat didefinisikan sebagai lahan yang berada pada wilayah dengan keterbatasan sumber daya air, namun memiliki potensi pengembangan jenis tanaman yang membutuhkan sedikit air. Secara umum degradasi lahan kritis/lahan kering di NTB terjadi sangat massif dan sangat mengkhawatirkan dan sudah melampaui batas wajar untuk pengembangan pangan. Lokasi lahan kritis di pulau Lombok berada di Kabupaten Lombok Utara yang tingkat kemiskinannya cukup tinggi, yaitu 29%. Sumbangan garis kemiskinan dari faktor makanan sebesar 74,42% dibandingkan dengan faktor non-makanan sebesar 25,58% pada tahun 2021. Pada bulan September 2021, garis kemiskinan total di Provinsi NTB yaitu Rp. 441.711 per kapita per bulan, yaitu Rp. 328.699 dari makanan dan Rp. 113.012 dari bukan makanan. Banyak terdapat lahan kritis/lahan kering di Kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah dan Kabupaten-kabupaten di pulau Sumbawa yang belum dioptimalkan. Pemerintah Provinsi NTB bekerjasama dengan perguruan tinggi dan mitra pembangunan daerah telah menginisiasi optimalisasi pemanfaatan lahan kritis untuk meningkatkan produksi pertanian. Ada beberapa inisiatif yang inovatif yang dikembangkan di NTB, dimana salah satunya yaitu pemanfaatan teknologi irigasi tetes untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya air yang terbatas. Beberapa pangalaman lapangan menunjukkan mengembangkan *integrated dryland farming systems* telah membuktikan adanya peningkatan pendapatan petani yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan melalui integrasi komoditi pangan

dengan komoditi non pangan berdasarkan potensi wilayah di NTB. Mengembangkan tanaman pangan seperti jagung sebagai monokultur pada lahan lahan yang miring dan kering tidak menjamin keberhasilan dan kesejahteraan dalam jangka panjang, namun justru akan menyebabkan kemiskinan dan masalah lingkungan yang lain. Alternatif yang lain adalah pengembangan budidaya Jamur Tiram yang dapat dijadikan sebagai alternative komoditas yang dapat dikembangkan di lahan kering dengan melalui pengenalan pemberdayaan masyarakat sebagai alternatif non tanaman pangan yang tidak membutuhkan air yang cukup banyak. Optimalisasi lahan kering ini diharapkan dapat menyediakan kebutuhan makanan pokok yang mampu mengurangi persentase penduduk miskin dari faktor makanan.

5. Kerja sama Pemerintah Provinsi NTB melalui Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah/Lembaga Negara Lain

Pemerintah Provinsi NTB melalui Kementerian/Lembaga melakukan kerja sama dengan kementerian/lembaga pemerintah maupun non pemerintah Negara lain sebagai upaya untuk mempercepat tujuan-tujuan pembangunan daerah, sebagai berikut:

- a. Kerja sama Pemerintah Provinsi NTB sebagai Mitra Penerima Manfaat Lainnya dari Kerja Sama Program Kemitraan Energi Indonesia Denmark (INDODEPP) pada tahun 2019 (diperbaharui pada 23 November 2021)

Merupakan kerja sama dalam percepatan dekarbonisasi penuh pada sistem energi untuk mencapai net zero emissions di tahun 2050 melalui pengembangan energi terbarukan, dengan bidang kerja sama energi dan ketenagalistrikan. Manfaat dari proyek ini adalah pemberdayaan BUMD PT.GNE dalam mengelola proyek EBT berskala komersil, menciptakan peluang usaha bagi petani, kelompok masyarakat atau lembaga d tingkat desa yang ingin menjual limbah pertanian padi dan jagung, penerapan ekonomi sirkular, meningkatkan bauran energi terbarukan serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Kerja sama ini akan berlangsung selama 3 tahun.

- b. Penjajakan kerja sama Antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Republik Indonesia Dan Pemerintah Northern Territory Persemakmuran Australia

Sudah dilakukan penandatanganan pernyataan kehendak (letter of intent) antara Gubernur NTB dengan Pemerintah Northern Territory Persemakmuran Australia pada tanggal 28 Maret 2022 dalam bidang pariwisata, pengembangan ekonomi, pengembangan sector peternakan, dan peningkatan kapasitas SDM. Saat ini sedang dalam tahap pembentukan Kelompok Kerja.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KOTA

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB Tahun 2023 merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB. Pada level pemerintah daerah, arah kebijakan pembangunan di tingkat provinsi selaras dan sinergi dengan arah kebijakan di tingkat Kabupaten/Kota. Keselarasan dan sinergitas ini merupakan upaya strategis untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan, yaitu masyarakat NTB yang sejahtera. Untuk itu, kerjasama dan koordinasi pada berbagai tingkatan pemerintahan, dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci sukses pencapaian target-target pembangunan nasional dan daerah. RKPD Provinsi NTB Tahun 2023 merupakan pedoman bagi pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota disusun berdasarkan perencanaan dan penganggaran berbasis program (*Money follows program*) dan pendekatan *Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial* (THIS). Pendekatan ini diharapkan dapat menjawab berbagai isu strategis pembangunan kabupaten/kota yang telah diselaraskan dengan isu strategies pembangunan provinsi. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan, pembangunan kabupaten/kota dijabarkan dalam kebijakan umum arah pembangunan kabupaten/kota, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), realisasi dan target indikator makro kabupaten/kota, analisis indikator penyelenggaraan pemerintah kabupaten/kota, dan sinergitas pembangunan provinsi dan kabupaten/kota.

5.1 Kebijakan Umum Arah Pembangunan Kabupaten/Kota

Kebijakan umum arah pengembangan wilayah berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTB sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010, yang sedang dalam proses revisi. RTRW ini memuat rencana besar pengembangan wilayah NTB pada 3 (tiga) sektor kunci, yaitu pariwisata, industrialisasi, dan pertanian. RTRW mencakup Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi dan Pengembangan Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi. Arah pengembangan wilayah untuk Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa disusun berdasarkan keunggulan dan potensi daerah. Hal ini bertujuan untuk mendorong percepatan, perluasan pembangunan, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Strategi pengembangan ruang mengatur hubungan yang harmonis antara sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia.

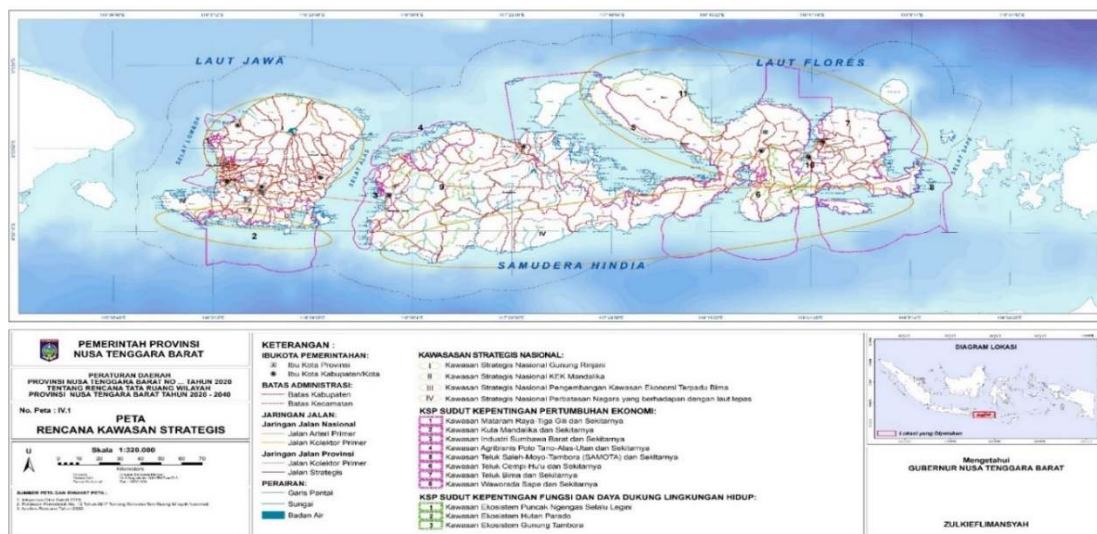
RTRW Provinsi NTB menggunakan pendekatan pengembangan wilayah berbasis Pulau. Pulau Lombok menggunakan arah pengembangan *Lombok Eco City & Resilient Island*, atau dikenal dengan istilah LECI. LECI merupakan pulau kota berkelanjutan dan Tangguh berbasis sistem satu pulau. Penataan dan pemulihan melalui pengaturan secara selektif bagi peruntukan dan memaksimalkan fungsi-fungsi konservasi kawasan lindung. Pulau Sumbawa menggunakan arah pengembangan *Sumbawa Sustainable Economic Zone* atau dikenal dengan istilah SUEZ. Fokus pengembangan wilayah adalah mengembangkan konektivitas wilayah untuk pemerataan, pengurangan risiko bencana, pemulihan dan

pelestarian kawasan lindung, pemanfaatan kegiatan budidaya ramah lingkungan, koordinasi dan kerjasama antar-wilayah dan antar-tingkatan pemerintahan. Strategi untuk pengembangan wilayah dilaksanakan melalui revitalisasi sektor unggulan dan prioritas, akselerasi kawasan strategis, akselerasi pengembangan infrastruktur, pemulihan dan perlindungan kawasan lindung di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa sebagai Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) untuk pusat pertumbuhan sedang berkembang.

Dalam dokumen Rancangan Perubahan RTRW Provinsi NTB Tahun 2020-2040, terdapat 8 Kawasan Strategis Provinsi yang didorong pertumbuhannya. 2 di Pulau Lombok dan 6 di Pulau Sumbawa. Kriteria yang digunakan untuk penilaian Kawasan Strategis Provinsi ini adalah:

- memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh
- memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota
- memiliki potensi ekspor
- memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah
- didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi
- ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal

Gambar 5- 1 Rencana Kawasan Strategis



Sumber : Rancangan Perubahan RTRW Prov NTB 2020-2040

5.1.1 Arah Pembangunan Wilayah Pulau Lombok

Arah pembangunan wilayah Pulau Lombok mengacu pada konsep LECI. Untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi terdampak pandemic Covid-19, pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) merupakan strategi untuk mengakselerasi pembangunan wilayah dan pusat pertumbuhan strategis. Secara geografis, Provinsi NTB memiliki posisi strategis yang diapit dua Alur Pelayaran Internasional (API), yang melintasi Selat Lombok dan Selat Timor, wilayah "Segi tiga emas tujuan wisata dunia "Bali-Komodo-Tana Toraja".

Arahan pengembangan wilayah nasional, Lombok sebagai WPS 16 adalah pusat pertumbuhan wisata dengan hinterland berada di Tanjung, Mataram, dan Mandalika. Secara hirarki, Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berada di Kota Mataram, Pusat Kegiatan Wilayan (PKW) berada di PKW Praya. Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) meliputi KSPN Gili Tramena, KSPN dan KSN Rinjani dsb dan sekitarnya, dan KSPN Pantai Selatan Lombok. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang berada di Mandalika, Lombok Tengah.

Gambar 5- 2 Rencana Pengembangan Wilayah – Pulau Lombok



Sumber : Rancangan Perubahan RTRW Prov NTB 2020-2040

Untuk Pulau Lombok, rencana pengembangan KSP meliputi KSP Mataram Raya dan Tiga Gili dan sekitarnya, dan KSP Kuta Mandalika dan sekitarnya.

Gambar 5- 3 Rencana Pengembangan KSP – Pulau Lombok



Sumber : Rancangan Perubahan RTRW Prov NTB 2020-2040

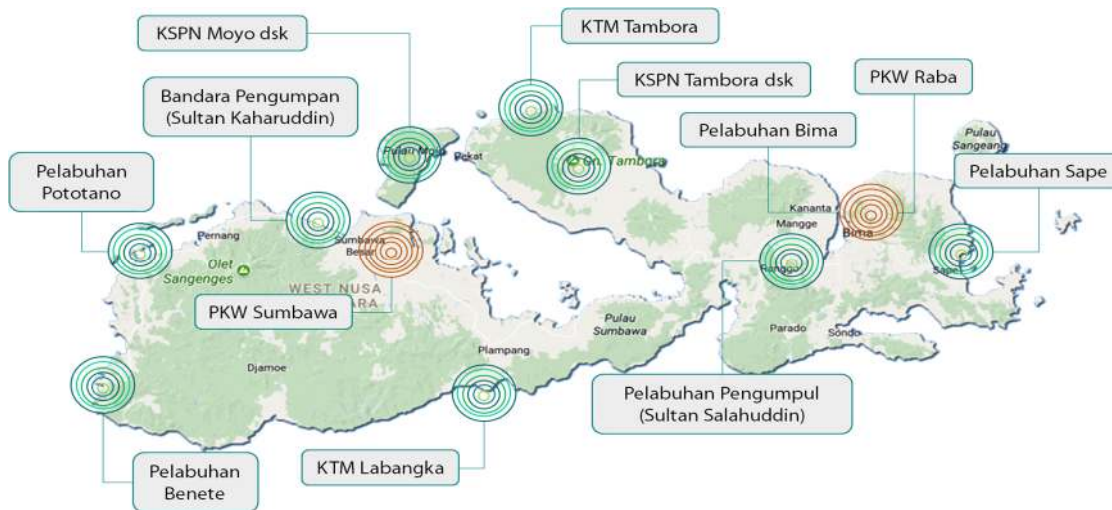
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika merupakan satu diantara 10 Destinasi Pariwisata Super Prioritas Nasional, berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah, dengan lahan seluas 1,250 ha. Kawasan ini merupakan daerah pantai berpasir putih sepanjang 7.5 km menghadap ke Samudera Hindia. Lintasan balap atau yang dikenal dengan Pertamina Mandalika International Street Circuit telah sukses melaksanakan gelaran World Super Bike (WSBK) tahun 2021 dan event internasional MotoGP pada tahun 2022. Event internasional ini menjadi penggerak percepatan pemulihan ekonomi daerah yang terdampak pandemi Covid-19. Beberapa fasilitas yang telah dibangun yaitu jalan akses dari Bandara Internasional Lombok menuju Mandalika, masjid, Kuta Beach Park, dan kawasan Bazaar Mandalika yang meliputi 538 lot dan kios untuk usaha mikro, kecil, dan menengah.

Geopark Rinjani juga merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) sekaligus sebagai Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN). Pembangunan KSPN diharapkan dapat meningkatkan konektivitas, aksesibilitas, dan mobilitas serta dapat mendukung pertumbuhan kepariwisataan dan ekonomi, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Geopark Rinjani Lombok diinisiasi kedalam program Geopark sejak 2008, dalam perkembangannya diakui sebagai Geopark Nasional pada 7 Oktober 2013, dan pada tahun 2016 diusulkan menjadi Unesco Global Geopark (UGG). Tahun 2017 mendapat pengakuan sebagai bagian dari UGG. Geopark Rinjani Lombok memiliki 22 situs Geologi (*Geo Heritage*), 8 Situs Biologi (*Bio Heritage*), dan 17 situs budaya (*Cultural Heritage*). Persebarannya meliputi wilayah Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, dan Kota Mataram. Pesona unggulan Geopark Rinjani adalah Danau Segara Anak yang berada pada ketinggian 2.010 meter dari permukaan laut, Kaldera Samalas memiliki ukuran sekitar 6 km x 8,5 km dan tinggi 800 meter yang dihasilkan dari letusan gunung berapi Samalas pada 1257.

5.1.2 Arah Pembangunan Wilayah Pulau Sumbawa

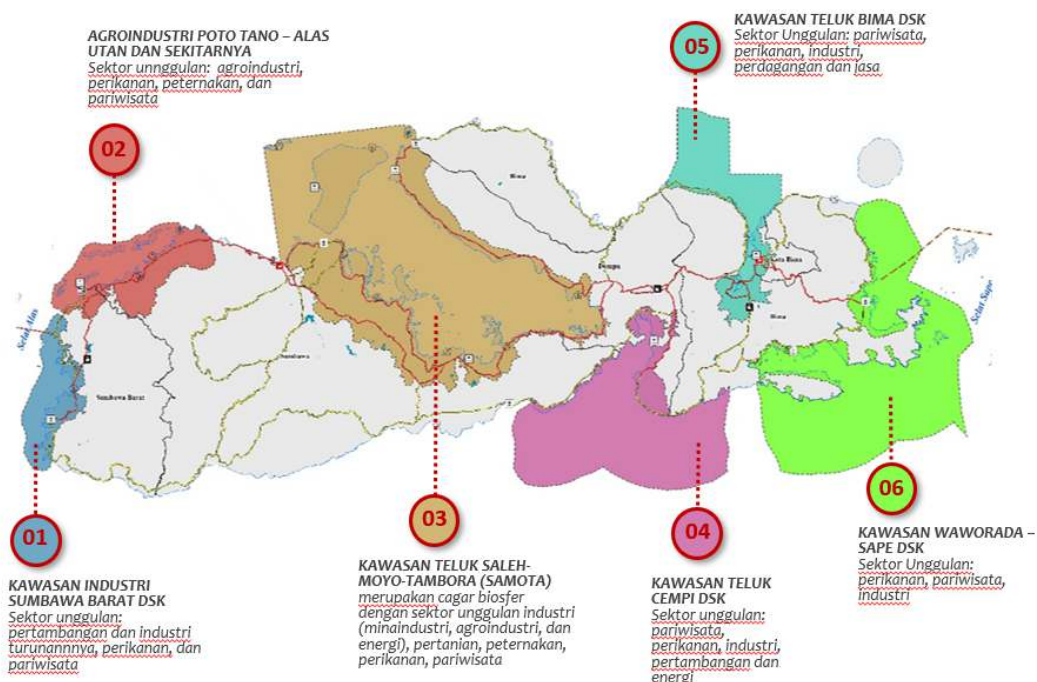
Untuk Pulau Sumbawa, arah pembangunan wilayah sesuai dengan konsep Sumbawa Sustainable Eco Zone (SUEZ). Sumbawa sebagai Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 17 dengan konsep pusat pertumbuhan wisata dengan hinterland Sumbawa Besar, Dompu, dan Bima. Kawasan Sumbawa dan sekitarnya, sektor unggulan yang akan dikembangkan adalah pertanian, pariwisata, industri, pertambangan, dan perikanan. Kawasan Bima memiliki sektor unggulan pertanian, pariwisata, perikanan, industri, pertambangan, dan panas bumi. Rencana pengembangan ini diharapkan dapat berkontribusi pada percepatan pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan hidup di Pulau Sumbawa.

Gambar 5- 4 Rencana Pengembangan Wilayah – Pulau Sumbawa



Secara spasial, Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berada di Sumbawa dan Raba. Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) berada di Labangka, Kabupaten Sumbawa, dan Tambora, Kabupaten Bima. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) berada di Moyo dan sekitarnya, Tambora dan sekitarnya. Pengembangan Pulau Sumbawa didukung oleh ketersediaan infrastruktur transportasi seperti Pelabuhan, bandar udara, jalan dan jembatan. Diharapkan pengembangan Kawasan Sumbawa dan sekitarnya, Kawasan Bima dan sekitarnya bisa mendorong sektor unggulan pertanian, pariwisata, perikanan, industri, pertambangan.

Gambar 5- 5 Rencana Pengembangan KSP – Pulau Sumbawa



Pulau Sumbawa memiliki potensi unggulan daerah dari hasil pertanian, pariwisata, perikanan, industri, pertambangan, dan panas bumi. Kabupaten Sumbawa Barat memiliki Kawasan Industri Sumbawa Barat (Smelter dan industri turunannya). Smelter memiliki kapasitas 2 juta konsentrat per tahun, produksi 500.000 ton per tahun, dan berada pada areal seluas 850 hektar. Pekerjaan konstruksi untuk pembangunan pabrik industri dan perumahan karyawan, serta sarana prasarana lainnya ditargetkan selesai akhir 2022. Direncanakan pengembangan kawasan industri smelter dan turunannya ini dapat beroperasi pada tahun 2023. Pengembangan kawasan industri smelter ini akan berdampak pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pada kawasan ini juga akan dibangun industri pendukung seperti industri pupuk, industri semen dan lainnya. Hal ini akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja lokal sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran di Provinsi NTB.

Selanjutnya, pengembangan Kawasan Teluk Saleh-Moyo-Tambora (Samota) memiliki sumber daya alam potensial dan prospektif untuk dikelola secara berkelanjutan. Potensi ini meliputi Taman Buru, Taman Wisata Alam Laut, Taman Nasional Gunung Tambora, Kelautan dan Perikanan, Agroindustri dan Agrowisata. Teluk Saleh merupakan “Akuarium Terbesar di Dunia”, diapit Pulau Moyo dan Gunung Tambora, dengan 49 pulau kecil yang mengitarinya. Dengan luas 2.132 km², sangat potensial dikembangkan menjadi kawasan ekonomi maritim unggulan. Pulau Moyo tempat berlibur Putri Diana, Mick Jagger, Maria Sharapova hingga Ronaldo, menunjukkan kelas Moyo sebagai destinasi pariwisata dunia, dengan luas 350 km². Bentangan Gunung Tambora menyimpan keanekaragaman hayati yang unik dan sangat cocok bagi pengembangan agro industri pertanian, perkebunan dan pariwisata.

Kawasan Lambu Sape, dan Sangiang (LaSaSa) merupakan konsep pengembangan wilayah terintegrasi yaitu wilayah Sape, Lambu, Sangiang dan Teluk Waworada, termasuk pulau-pulau kecil disekitarnya, seperti Pulau Gilibanta, Pulau Kelapa, dan lainnya. LaSaSa memiliki nilai strategis karena terkoneksi dengan pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Labuan Bajo, NTT. Sinergitas yang dibangun adalah mendorong kerjasama antar daerah pada sektor perdagangan, pariwisata, perikanan, pertanian, perhubungan, dan sektor strategis lainnya.

Kawasan LaSaSa merupakan bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) Komodo. Sebagai wilayah yang menjadi *core* pertumbuhan dan kegiatan bagi sebagian besar masyarakat di Kabupaten Bima dan Kota Bima, Kawasan Sape-Sangiang dan sekitarnya menyimpan potensi sangat besar. Sebagai salah satu simpul pergerakan utama laut, orientasi utama masyarakat dan keragaman potensi yang ada, kawasan ini diprediksi akan menjadi pusat pertumbuhan baru yang akan menyeimbangkan tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB.

5.2 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (3), Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Implementasi SPM berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat NTB berupa barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh individu untuk hidup secara layak. Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh warga negara secara minimal. Implementasi SPM mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM.

Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen untuk mendorong percepatan pencapaian target SPM dengan menetapkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penyelenggaraan SPM ini menjadi tanggung jawab Bersama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. Urusan Pemerintahan Wajib ini berkaitan dengan 6 (enam) jenis pelayanan dasar yang meliputi: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Pembagian peran Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5- 1 Pembagian peran pemerintah daerah dalam implementasi SPM

Urusan SPM	Pemerintah Provinsi NTB	Pemerintah Kabupaten/kota
Pendidikan	1. Pendidikan menengah 2. Pendidikan khusus	1. Pendidikan anak usia dini 2. Pendidikan dasar 3. Pendidikan kesetaraan
Kesehatan	1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi 2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	1. Pelayanan kesehatan ibu hamil 2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin 3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 4. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota 2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari 2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman	1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota

Urusan SPM	Pemerintah Provinsi NTB	Pemerintah Kabupaten/kota
	2. Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	2. Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi	1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum 2. Pelayanan informasi rawan bencana 3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban
Sosial	1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti 2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti 3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti 4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti 5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti 2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti 3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti 4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti 5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota

Arah kebijakan implementasi SPM Kabupaten/Kota mengacu pada hasil evaluasi Sekretariat Bersama SPM Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut:

Gambar 5- 6 Capaian SPM Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2021

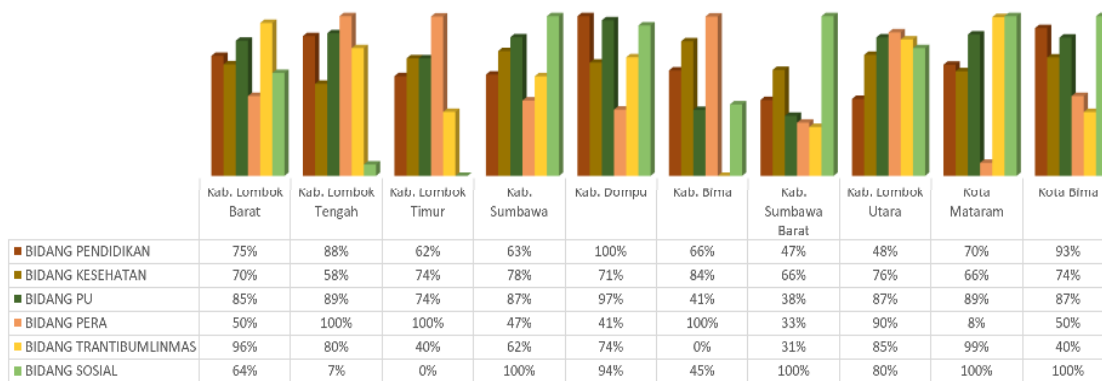


Sumber: Sekber SPM Ditjen Bina Bangsa Kemendagri, 2022

Angka rata-rata capaian SPM pada wilayah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat secara keseluruhan tergolong cukup baik, yaitu semua SPM Bidang angka capaiannya berada diatas 50%. Hasil capaian tertinggi yaitu pada SPM Bidang Pekerjaan

Umum dengan angka capaian rata-rata sebesar 77,25%, sedangkan capaian terendah yaitu pada SPM Bidang Trantibumlinmas dengan angka capaian rata-rata sebesar 60,80%.

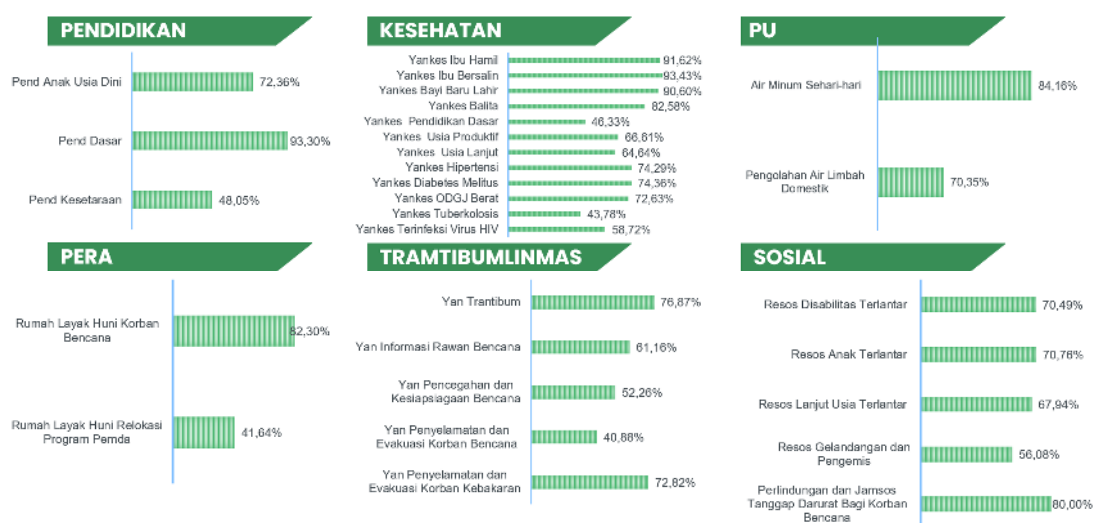
Gambar 5- 7 Capaian SPM Seluruh Bidang Berdasarkan Kabupaten/Kota – Provinsi NTB Tahun 2021



Sumber: Sekber SPM Ditjen Bina Bangsa Kemendagri, 2022

Capaian SPM Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2021 secara keseluruhan masih perlu ditingkatkan pada tahun 2023. Hanya capaian SPM Bidang Kesehatan yang angka capaiannya berada diatas 50% pada setiap Kabupaten/Kota. Sementara capaian SPM Bidang lainnya masih berada di bawah 50%, terdapat angka capaiannya sebesar 0% yaitu pada Kabupaten Lombok Timur untuk capaian SPM Bidang Sosial dan Kabupaten Bima untuk capaian SPM Bidang Trantibumlinmas. Kabupaten Lombok Barat merupakan satu-satunya wilayah di Provinsi NTB yang angka capaian SPM setiap bidangnya tidak ada yang berada di bawah 50%.

Gambar 5- 8 Capaian SPM Kabupaten/Kota berdasarkan 6 Bidang SPM - Provinsi NTB Tahun 2021



Sumber: Sekber SPM Ditjen Bina Bangsa Kemendagri, 2022

Arah kebijakan Pemerintah Provinsi NTB untuk implementasi SPM berupaya menjawab tantangan belum optimalnya penerapan SPM sebagai prioritas daerah untuk

mendukung peningkatan IPM NTB. Hal ini disebabkan kurangnya kebijakan SPM yang belum disusun berbasis bukti, karena data target layanan dasar SPM tidak tersedia. Arah kebijakan ini perlu didorong dengan membangun komitmen pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas perencanaan dan mengalokasikan penganggaran program dan kegiatan terkait langsung dengan SPM sesuai dengan kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pengembangan kapasitas kelembagaan, termasuk penguatan Sekretariat Bersama SPM di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, pengembangan kapasitas SDM Pengelola SPM pada masing-masing perangkat daerah perlu diperkuat dengan pembinaan, sosialisasi, bimbingan teknis untuk pengumpulan data, penetapan target, penghitungan capaian, dan pelaksanaan aksi implementasi SPM. Strategi percepatan implementasi SPM untuk 10 Kabupaten/Kota di Provinsi NTB diupayakan melalui penguatan regulasi, kelembagaan dan SDM pengelola SPM di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, penyusunan petunjuk pelaksanaan SPM, dan mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan SPM.

5.2. 1 Percepatan Penurunan dan Penanggulangan Kemiskinan

Pandemi Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional berdampak cukup signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan, tak terkecuali terhadap perekonomian di seluruh wilayah Indonesia tak terkecuali di Provinsi NTB yang turut terkena imbasnya. Di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini, banyak sekali masyarakat yang mengalami masa-masa sulit dan membuat banyak orang harus berusaha keras untuk tetap bertahan hidup, mengalami penurunan pendapatan, bahkan harus kehilangan mata pencahariannya, kondisi ini diperkirakan berpotensi menambah jumlah penduduk miskin.

Ketahanan pangan selama masa pandemi Covid-19 menjadi salah satu isu krusial. Keterjangkauan akses pangan yang menjadi bagian dari ketahanan pangan mesti dipastikan pemerintah, sebab tanpa ada jaminan akses pangan yang mudah, maka semakin banyak masyarakat yang akan mengalami kelaparan yang akan menyebabkan jumlah penduduk miskin yang selama ini ditekan oleh pemerintah bisa semakin bertambah, terlebih mereka yang masuk dalam kategori miskin maupun rentan miskin. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjamin dua kelompok itu untuk mendapatkan akses pangan dengan mudah dan menjamin ketersediaan pangan masyarakat dan berbagai program bantuan sosial.

Pemerintah perlu mengantisipasi potensi peningkatan kemiskinan yang disebabkan akses pangan, khususnya akibat dari kehilangan pekerjaan. Jika tidak, maka angka kemiskinan akan terus bertambah di tengah mewabahnya Covid-19 ini. Beberapa potret kemiskinan yang terjadi akibat dampak dari badai Covid-19 yang terus menerjang kehidupan kita semua seperti kematian akibat kelaparan, pencurian makanan atau bahkan PHK oleh perusahaan menunjukkan bahwa dampak Covid-19 benar-benar menghantam kondisi perekonomian masyarakat.

Pengembangan wilayah akan ditujukan pada pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk percepatan penurunan angka kemiskinan. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sehingga target di Provinsi

NTB juga akan dilakukan penyesuaian walaupun masih pada kisaran 5 persen. penyesuaian target pertumbuhan perekonomian akan berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Untuk itu, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 akan didorong pada pemulihan struktur perekonomian dan peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif, serta pemantapan infrastruktur strategis untuk mendukung peningkatan investasi, ketahanan pangan dan pariwisata. Dari sisi pemerataan pembangunan di Provinsi NTB, kebijakan pembangunan daerah diarahkan untuk pengurangan kesenjangan antar wilayah terutama untuk pembangunan di pulau Lombok dan pulau Sumbawa.

Untuk mendorong pencapaian target pembangunan Provinsi NTB dari percepatan penurunan angka kemiskinan telah ditindak lanjuti melalui nota kesepahaman bersama (MOU) antara pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan tujuan Mendorong inovasi Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin sesuai dengan pengelompokan 4 (empat) Program Penanggulangan Kemiskinan yaitu :

- Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial yang terdiri atas program-program yang berujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat.
- Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang terdiri atas program-program yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang berdasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.
- Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro kecil dan menengah terdiri atas program-program yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
- Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis kewilayahan yang bertujuan meningkatkan kegiatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mendorong percepatan penurunan angka kemiskinan, maka perlu didukung oleh ketersediaan anggaran yang cukup. Untuk itu, penganggaran penanggulangan kemiskinan perlu memanfaatkan potensi anggaran yang tidak hanya dari pemerintah pusat, tetapi dapat dikolaborasikan dengan penganggaraan dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, desa, dan bahkan *stakeholders* lainnya.

Pola penanggulangan kemiskinan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan serta memanfaatkan Basis Data Terpadu (BDT) dengan pendekatan spasial. Adapun 13 Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan hasil kesepakatan (MoU) Pemerintah provinsi NTB dengan Pemerintah Kabupaten Kota yaitu : (1) Pengembangan Bumdes, (2) Jamban Keluarga, (3) Rumah Layah Huni , (4) Kelompok Usaha Bersama (KUBE), (5) Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), (6) Pengelolaan Sampah (Bank Sampah), (7)

Pembangunan Sarana Air Bersih, (8) Pengembangan Desa Wisata, (9) Pengembangan Pertanian Konservasi, (10) Sambungan Listrik Murah dan Hemat, (11) Desa Berdaya, (12) Motorisasi nelayan atau budidaya udang panani, (13) Ketahanan keluarga berbasis Pendidikan dan Revitalisasi POSYANDU.

Selain itu, untuk mencapai target pembangunan Provinsi NTB, sektor pariwisata sebagai penggerak perekonomian masyarakat diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan berbasis komunitas, dibutuhkan upaya pengembangan Desa Wisata yang bisa berkontribusi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, memperluas lapangan kerja, pelestarian seni budaya, dan ramah lingkungan. 99 Desa Wisata yang diinisiasi Pemerintah Provinsi NTB dapat optimal mendukung pariwisata berkelanjutan yang mampu meningkatkan pekenomian masyarakat lokal.

5.3 Indikator Makro Kabupaten/kota

Indikator makro ekonomi pada tingkat pemerintah kabupaten/kota merupakan instrumen untuk mengetahui kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Data indikator makro ini dapat digunakan untuk memprediksi perkembangan ekonomi di masa mendatang, dengan mempertimbangkan faktor kunci keberhasilan dan kegagalan. Indikator makro pembangunan terdiri atas Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Persentase Penduduk Miskin, dan Pengeluaran Penduduk Per Kapita. Arah kebijakan pembangunan seluruh kabupaten dan kota di Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat diharapkan dapat mendukung pencapaian 5 (lima) indikator kinerja makro Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel 5- 2 Target Indikator Makro Sasaran Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota se-NTB Tahun 2023

No	Indikator Makro	Sasaran Provinsi Tahun 2023 (Dalam Rankhir RKPD NTB)	Sasaran Akhir RKPD Provinsi NTB Tahun 2023 Berdasarkan Kabupaten/Kota									
			Kab. Lobar	Kab. Loteng	Kab. Lotim	Kab. Sumbawa	Kab. Dompu	Kab. Bima	KSB	KLU	Kota Bima	Kota Mataram
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,55 - 5,50	4,0 - 5,0	5,0 - 5,5	4,0 - 5,0	4,0 - 5,0	4,0 - 5,0	4,0 - 5,0	3,5-4,5	4,0 - 5,0	4,5- 5,5	4,5- 5,5
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,54 - 2,90	2,98	2,19	2,58	3,24	2,97	1,56	5,06	1,63	2,98	5,15
3	Tingkat Kemiskinan (%)	11,85 - 13,00	13,48	12,51	13,93	13,21	12,19	14,77	12,33	24,53	8,69	8,20
4	Indeks Pembangunan Manusia	69,56 - 69,59	69,17	67,31	67,23	68,55	68,98	67,07	72,29	65,20	76,55	79,47
5	Rasio Gini	0,378 - 0,379	0,375	0,324	0,266	0,398	0,346	0,367	0,383	0,303	0,399	0,415

Sumber : Bappeda NTB 2022 (Data diolah)

5.3.1 Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju pertumbuhan ekonomi untuk kabupaten/kota di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa mendukung laju pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi. Pertumbuhan

ekonomi pada 10 (sepuluh) Kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat, selama 5 (lima) tahun terakhir, rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 1,63 persen setiap tahunnya, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

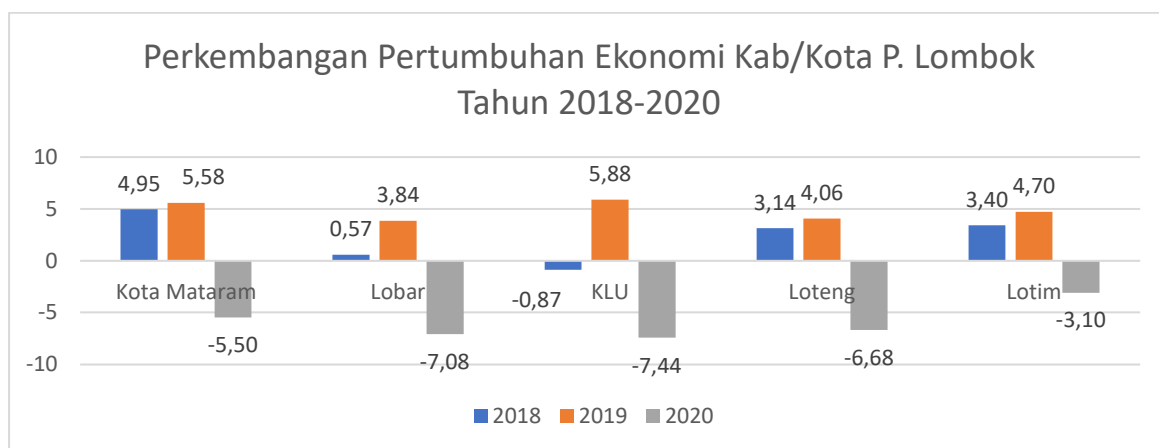
Tabel 5- 3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2021

No.	Kabupaten/Kota	ADHK 2010					Rata-rata Pertumbuhan
		2017	2018	2019	2020*	2021**	
1	Kabupaten Lombok Barat	6,54	0,57	3,84	-7,03	3,40	1,46
2	Kabupaten Lombok Tengah	6,43	3,14	4,04	-6,67	4,03	2,20
3	Kabupaten Lombok Timur	6,25	3,40	4,70	-3,12	3,12	2,87
4	Kabupaten Sumbawa	6,86	4,16	4,86	-4,18	1,87	2,71
5	Kabupaten Dompu	6,75	4,38	4,46	-3,21	1,69	2,81
6	Kabupaten Bima	6,27	4,04	4,26	-3,53	1,79	2,57
7	Kabupaten Sumbawa Barat	-19,41	-34,57	-1,15	28,79	-0,33	-5,33
8	Kabupaten Lombok Utara	6,14	-0,86	5,86	-7,46	1,38	1,01
9	Kota Mataram	8,07	4,95	5,58	-5,52	3,27	3,27
10	Kota Bima	6,65	4,70	5,15	-4,95	2,08	2,73
Rata-rata Pertumbuhan		4,05	-0,61	4,16	-1,69	2,23	1,63

Sumber : BPS NTB, 2022 (data diolah Bappeda NTB, 2022)

Untuk Kabupaten/Kota di Pulau Lombok, pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 menurun terutama di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara. Lapangan usaha yang mendominasi adalah Pertanian, Peternakan dan Perikanan, kecuali Kota Mataram. Sektor Industri Pengolahan cukup berjalan baik, rata-rata diatas Provinsi NTB, berdasarkan nilai kontribusi Industri Pengolahan NTB sebesar 4,66% dari PDRB, kecuali untuk Kabupaten Lombok Utara nilai kontribusinya hanya mencapai sebesar 1,56%. Rata-rata Pengeluaran per Kapita (per bulan) tahun 2020, sebagian di bawah Provinsi (Rp.1089.764) kecuali Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat. Perkembangan pertumbuhan ekonomi di Pulau Lombok digambarkan sebagai berikut:

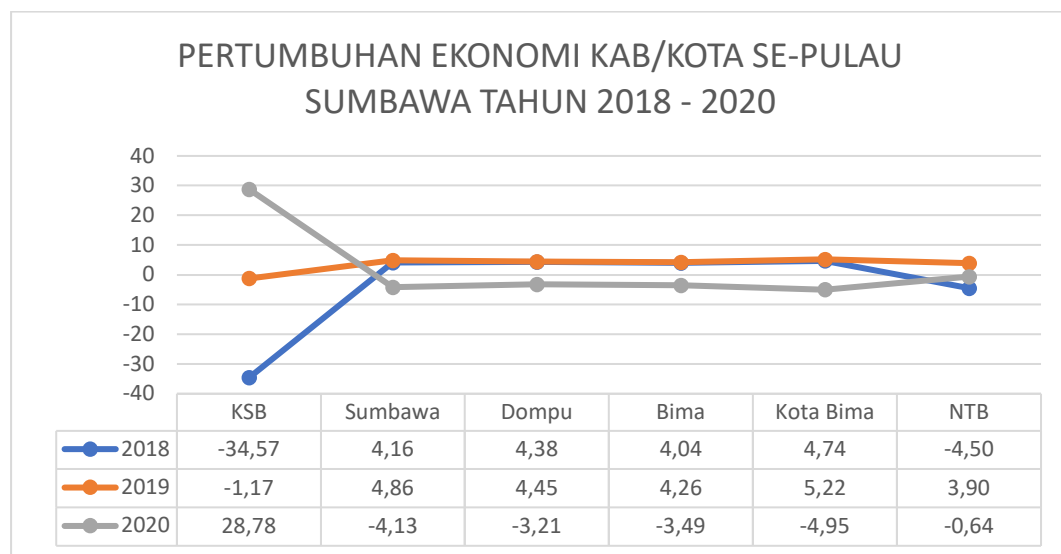
Gambar 5- 9 Perkembangan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Pulau Lombok Tahun 2018-2020



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022

Untuk Kabupaten/Kota di Pulau Sumbawa, pertumbuhan ekonomi cenderung meningkat, struktur ekonomi di kabupaten lebih didominasi sektor pertanian dan perdagangan; di kota cenderung perdagangan. Sektor industri (Industri Pengolahan) rata-rata 2% dibawah Provinsi. Sektor Pariwisata (Penyediaan Akomodasi Makan Minum) sebagian besar dibawah Provinsi (kecuali Kota Bima). Pengeluaran penduduk masih didominasi untuk kelompok Makanan (salah satu indikator kesejahteraan adalah pengeluaran Makanan lebih kecil dari Non-Makanan). Perkembangan pertumbuhan ekonomi di Pulau sumbawa digambarkan sebagai berikut:

Gambar 5- 10 Perkembangan Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Pulau Sumbawa Tahun 2018-2020



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022

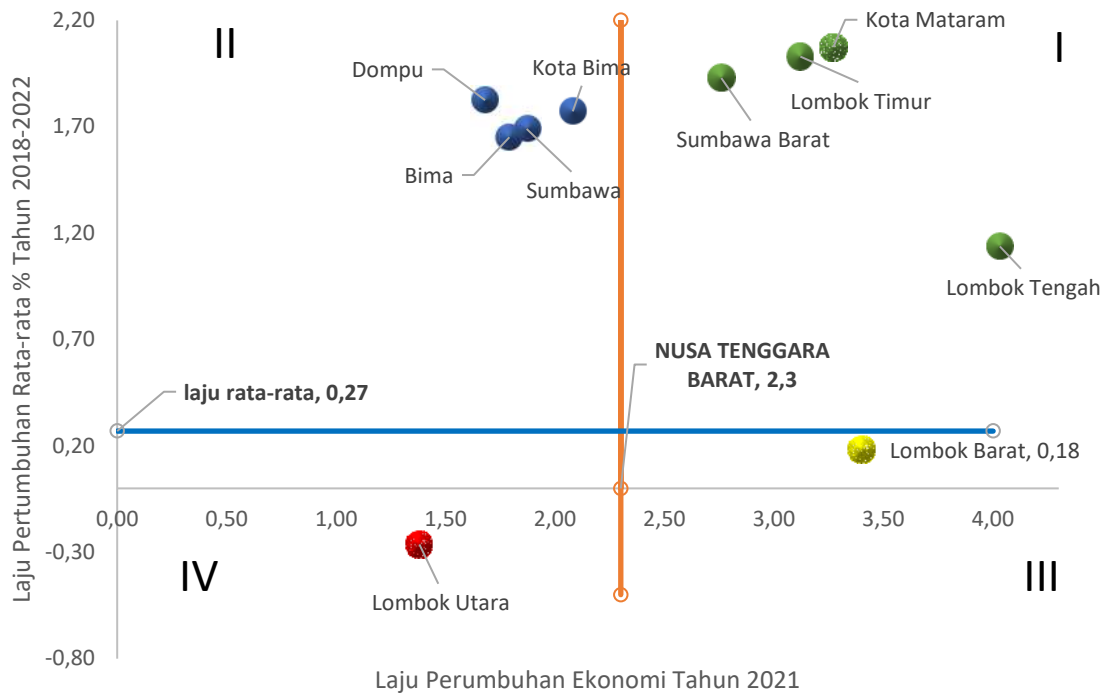
Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian LPE kabupaten/kota tahun 2021, maka capaian LPE kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 5- 4 Kategori Capaian Laju Pertumbuhan Kabupaten/kota Tahun 2021

Kuadran	Interpretasi
I	Kelompok kabupaten/kota dengan capaian LPE LEBIH RENDAH dari capaian Provinsi dan Rata-rata LPE LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi
II	Kelompok kabupaten/kota dengan capaian LPE dan Rata-rata LPE LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi
III	Kelompok kabupaten/kota dengan capaian LPE LEBIH TINGGI dari capaian Provinsi dan Rata-rata LPE LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi
IV	Kelompok kabupaten/kota dengan capaian LPE dan Rata-rata LPE LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi

Sumber : Diolah Bappeda NTB, 2022.

Gambar 5. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Persen) Tahun 2021



Sumber : BPS NTB, 2022. Diolah Bappeda NTB, 2022.

- **Kuadran I.** Pada kelompok ini terdapat 4 (empat) kabupaten/kota dengan capaian LPE LEBIH RENDAH dari capaian Provinsi dan Rata-rata LPE LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa Barat.
- **Kuadran II.** Pada kelompok ini terdapat 4 (empat) kabupaten/kota dengan capaian LPE dan Rata-rata LPE LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima.
- **Kuadran III.** Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kabupaten/kota dengan capaian LPE LEBIH TINGGI dari capaian Provinsi dan Rata-rata LPE LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Lombok Barat.
- **Kuadran IV.** Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kabupaten/kota dengan capaian LPE dan Rata-rata LPE LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Lombok Utara.

5.3.2 Persentase Penduduk Miskin

Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian Persentase Penduduk Miskin kabupaten/kota tahun 2021 dibandingkan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2021, maka capaian Persentase Penduduk Miskin kabupaten/kota se-Nusa Tenggara

Barat dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 5- 5 Kategori Capaian Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/kota Tahun 2021

Kuadran	Interpretasi
I	Kelompok kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin LEBIH RENDAH dan Laju Penurunan LEBIH TINGGI dibanding capaian Provinsi
II	Kelompok kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin dan Laju Penurunan LEBIH TINGGI dibanding capaian Provinsi
III	Kelompok kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin dan Laju Penurunan LEBIH RENDAH dibanding capaian Provinsi
IV	Kelompok kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin LEBIH TINGGI dan Laju Penurunan LEBIH RENDAH dibanding capaian Provinsi

Sumber : Diolah Bappeda NTB, 2022.

- **Kuadran I.** Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin lebih rendah dan Laju Penurunan lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Bima.
- **Kuadran II.** Pada kelompok ini terdapat 6 (enam) kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin dan Laju Penurunan lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut Kabupaten Lombok Tengah, Kota Mataram, Sumbawa Barat, Dompu dan Kota Bima.
- **Kuadran III.** Pada kelompok ini tidak terdapat kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin dan Laju Penurunan lebih rendah dibanding capaian provinsi.
- **Kuadran IV.** Pada kelompok ini terdapat 2 kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin lebih tinggi dan Laju Penurunan lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara.

Gambar 5. 2 Analisis Kuadran Persentase Penduduk Miskin dan Laju Pertumbuhan Kabupaten/kota Tahun 2021



Sumber : BPS NTB, 2022. Diolah Bappeda NTB, 2022.

Selanjutnya jumlah penduduk miskin Kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Barat pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin yang paling banyak terdapat di Kabupaten Lombok Timur dengan jumlah sebesar 190,84 ribu orang (15,38 persen) dan yang paling rendah adalah di Kota Bima tercatat sebesar 16,22 ribu orang (8,88 persen), sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 5- 6 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 - 2021

Kabupaten/Kota	2019		2020		2021	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
Lombok Barat	105,04	15,17	100,25	14,28	105,24	14,47
Lombok Tengah	128,82	13,63	128,1	13,44	131,94	13,44
Lombok Timur	193,56	16,15	183,84	15,24	190,84	15,38
Sumbawa	63,49	13,90	62,88	13,65	66,00	13,91
Dompu	30,81	12,25	30,97	12,16	33,26	12,6
Bima	71,95	14,76	71,32	14,49	75,49	14,88
Sumbawa Barat	20,45	13,85	20,2	13,34	21,51	13,54
Lombok Utara	63,84	29,03	59,86	26,99	61,70	27,04
Kota Mataram	43,19	8,92	41,8	8,47	44,45	8,65
Kota Bima	14,80	8,60	14,66	8,35	16,22	8,88
NTB	735,96	14,56	713,89	13,97	746,66	14,14

Sumber : BPS NTB, 2022. Diolah Bappeda NTB, 2022.

Jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat pada September 2021 tercatat sebesar 735,30 ribu orang (13,83 persen). Nilai ini lebih rendah dibandingkan kondisi Maret 2021, dimana jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat sebesar 746,66 ribu orang (14,14 persen). Terlihat adanya penurunan persentase penduduk miskin selama periode Maret 2021 - September 2021 yaitu sebesar 0,31 persen poin. Selain itu, nilai ini juga lebih rendah dibandingkan dengan September 2020 yang tercatat sebesar 746,04 ribu orang (14,23 persen). Namun secara keseluruhan pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun 2020 karena adanya pandemi Covid-19 yang melanda secara Nasional dan sampai ke daerah.

Untuk itu Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat fokus mengurangi tingkat kemiskinan melalui program-program peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat. Selain itu Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus berupaya mengoptimalkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar perencanaan program penanggulangan kemiskinan.

5.3.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah Angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

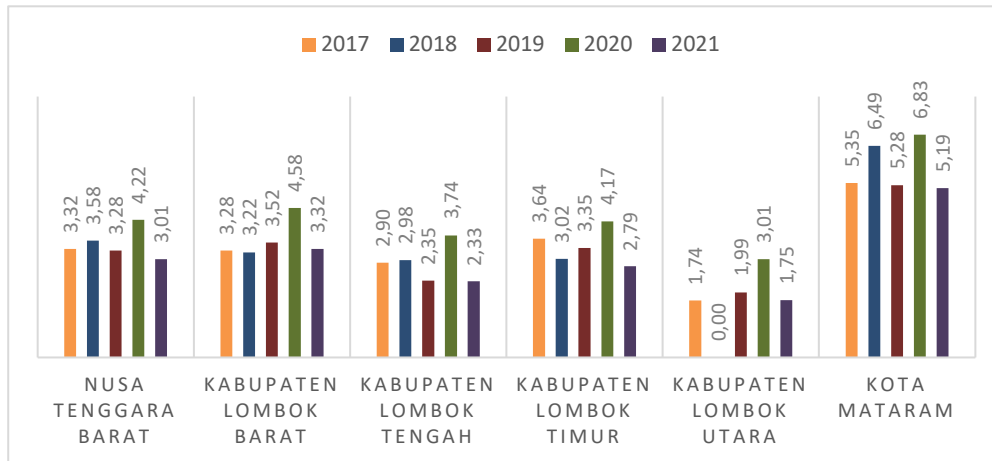
Jumlah angkatan kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Agustus 2021 sebanyak 2,74 juta orang, mengalami peningkatan sebanyak 50,50 ribu orang dibanding Agustus 2020. Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga naik sebesar 0,13 persen poin. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2021 sebesar 3,01 persen, turun 1,21 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2020. Jika dibandingkan dengan Februari 2021 juga mengalami penurunan 0,96 persen poin.

Penduduk yang bekerja sebanyak 2,66 juta orang, meningkat sebanyak 81,43 ribu orang dari Agustus 2020. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase penduduk bekerja adalah Sektor Industri Pengolahan (0,96 persen poin), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (0,89 persen poin), Pertambangan dan Penggalian (0,35 persen poin), Konstruksi (0,29 persen poin), dan Perdagangan Besar dan Eceran (0,24 persen poin). Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Pertanian (2,07 persen poin). Pada Agustus 2021, sebanyak 1,96 juta orang (73,89 persen) bekerja pada kegiatan informal, naik 0,43 persen poin dibanding Agustus 2020 dan turun 0,80 persen poin dibanding Februari 2021. Sebagian besar penduduk yang

bekerja merupakan pekerja penuh (56,11 persen). Sementara pekerja paruh waktu sebesar 28,89 persen dan setengah penganggur 15,00 persen.

Untuk Pulau Lombok, perkembangan TPT berdasarkan kabupaten/kota dalam kurun waktu 2017-2021 dapat dilihat pada Gambar berikut ini:

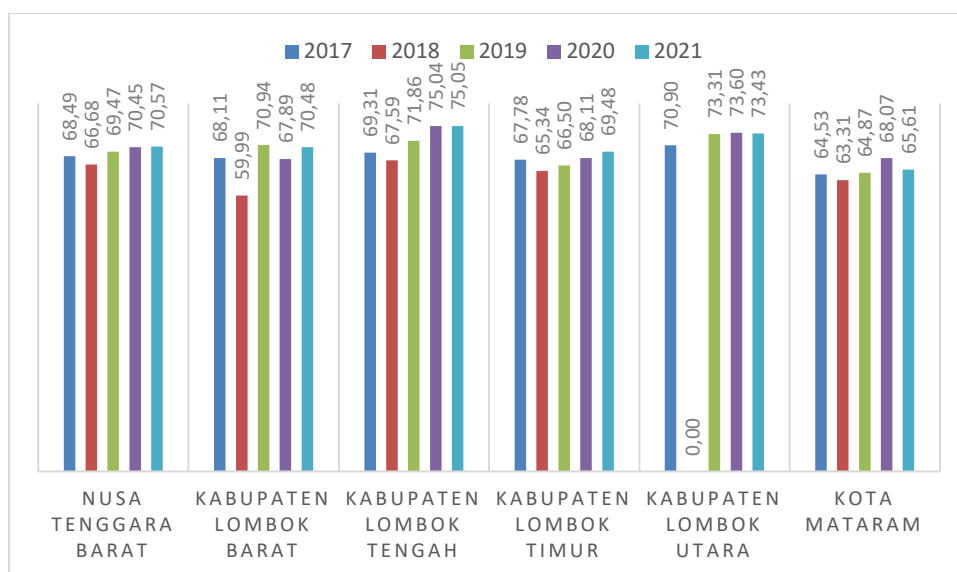
Gambar 5-13 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pulau Lombok tahun 2017-2021



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022

Secara umum, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi NTB setiap tahunnya cenderung meningkat. TPAK ini menggambarkan tingkat keikutsertaan penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi dalam bentuk bekerja dan mencari pekerjaan. Peningkatan TPAK disebabkan oleh pertumbuhan positif dari perekonomian daerah. Untuk Pulau Lombok, TPAK tertinggi di Kabupaten Lombok Tengah mencapai 75.05 pada tahun 2021.

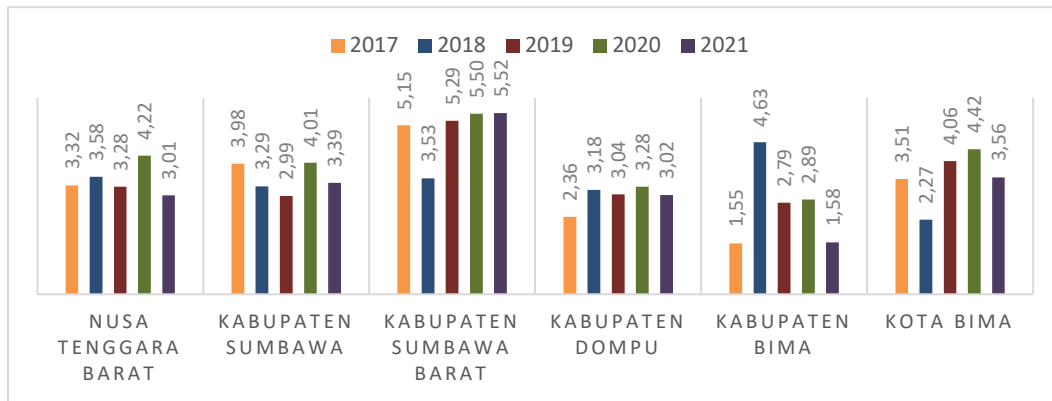
Gambar 5.14 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Pulau Lombok tahun 2017-2021



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022

Untuk Pulau Sumbawa, perkembangan TPT berdasarkan kabupaten/kota dalam kurun waktu 2017-2021, TPT tertinggi di Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 5,52 pada tahun 2021. Kabupaten Bima terendah 1,58% pada tahun 2021. Secara umum, TPT Pulau Sumbawa dapat dilihat pada Gambar berikut ini:

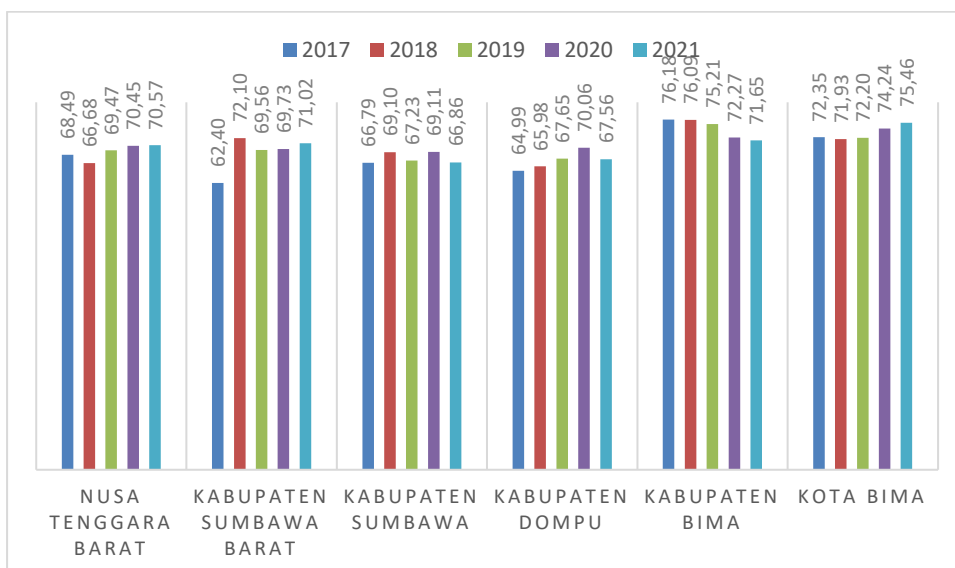
Gambar 5.15 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pulau Sumbawa tahun 2017-2021



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022

Untuk Pulau Sumbawa, TPAK ini menggambarkan tingkat keikutsertaan penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi dalam bentuk bekerja dan mencari pekerjaan. Peningkatan TPAK disebabkan oleh pertumbuhan positif dari perekonomian daerah. Untuk Pulau Sumbawa, TPAK tertinggi di Kota Bima mencapai 75,46 pada tahun 2021.

Gambar 5.16 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Pulau Sumbawa tahun 2017-2021



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022

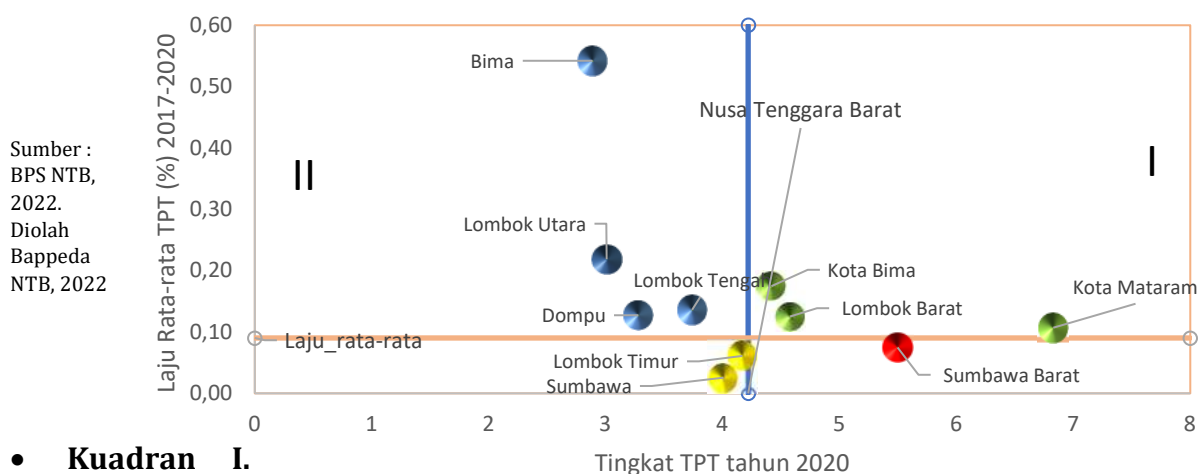
Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian TPT kabupaten/kota tahun 2021, maka capaian kinerja TPT kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 5- 7 Kategori Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Barat Tahun 2021

Kuadran	Interpretasi
I	Kelompok /kota dengan capaian TPT LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi dan Laju Perubahan TPT DIATAS capaian provinsi
II	Kelompok kabupaten/kota dengan capaian TPT LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi dan Laju Perubahan TPT DIATAS capaian provinsi
III	Kelompok /kota dengan capaian TPT LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi dan Laju Perubahan TPT DIBAWAH capaian provinsi
IV	Kelompok kabupaten/kota dengan Kelompok /kota dengan capaian TPT LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi dan Laju Perubahan TPT DIBAWAH capaian provinsi

Sumber : Bappeda NTB, 2022 (Data diolah)

Gambar 5. 3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi NTB Menurut Kab/Kota (Persen) Tahun 2020



- Kuadran I.** Pada kuadran ini terdapat 3 (tiga) kabupaten/kota dengan capaian TPT LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi dan Laju Perubahan TPT DIATAS capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram dan Kota Bima.
- Kuadran II.** Pada kuadran ini terdapat 4 (empat) kabupaten/kota dengan capaian TPT LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi dan Laju Perubahan TPT DIATAS

capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima.

- **Kuadran III.** Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten/kota dengan capaian TPT LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi dan Laju Perubahan TPT DIBAWAH capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa.
- **Kuadran IV.** Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kabupaten/kota dengan capaian TPT LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi dan Laju Perubahan TPT DIBAWAH capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Sumbawa Barat.

5.3.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan umur harapan hidup. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pendidikan digunakan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator pendapatan per kapita, untuk mengetahui kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok. Rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk standar hidup layak.

Tabel 5- 8 Perkembangan Indikator Pembangunan Manusia (IPM) Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Lombok Barat	66.37	67.18	68.03	68.20	68.61
Lombok Tengah	64.36	65.36	66.36	66.43	66.72
Lombok Timur	64.37	65.35	66.23	66.30	66.66
Sumbawa	65.84	66.77	67.60	67.61	68.01
Dompu	66.33	66.97	67.83	67.84	68.45
Bima	65.01	65.62	66.37	66.30	66.66
Sumbawa Barat	70.08	70.71	71.52	71.63	71.85
Lombok Utara	63.04	63.83	64.49	64.42	64.77
Kota Mataram	77.84	78.63	79.10	78.91	79.14
Kota Bima	73.67	75.04	75.80	75.81	76.11
NTB	66.58	67.30	68.14	68.25	68.65
Nasional	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022

Data perkembangan IPM berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi NTB pada kurun waktu 2017-2021 cenderung melambat, rata-rata dibawah 1 poin. Nilai IPM tertinggi adalah Kota Mataram dengan nilai sebesar 79,14, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Lombok Utara dengan nilai IPM sebesar 64,77. Nilai IPM Kabupaten/Kota yang berada diatas Provinsi (68, 65) adalah Kabupaten Sumbawa Barat (71,85), Kota Mataram (79,14), dan Kota Bima (76,11). Sedangkan nilai IPM yang berada diatas rata-rata Nasional adalah Kota Mataram dan Kota Bima.

5.4 Sinergitas Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/kota

Pemerintah Provinsi NTB berupaya mewujudkan sinergitas perencanaan pembangunan daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini dilaksanakan dengan mengoptimalkan sumber daya manusia, alokasi pendanaan pembangunan, dan teknologi informasi dan komunikasi. Perencanaan program dan kegiatan sektoral dan lintas sektor dilaksanakan secara terpadu, sesuai kewenangan masing-masing. Sinergitas pembangunan ini meliputi sinergitas antar wilayah, antar subsektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan. Keterpaduan dari sisi sasaran, program/kegiatan, dan kelembagaan dilaksanakan dengan penguatan pemberdayaan kelompok masyarakat di Provinsi NTB.

Selanjutnya, sinergitas arah kebijakan pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/kota, dapat dilihat dari penyusunan tema RKPD Provinsi NTB dan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023. Keselarasan arah kebijakan pembangunan daerah berdasarkan isu strategis dan permasalahan pokok pembangunan Provinsi NTB dan hasil pemetaan isu strategis Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 5- 9 Sinergitas arah kebijakan Provinsi NTB dan Kabupaten-Kota di Provinsi NTB

Provinsi NTB	Peningkatan Produktivitas Industri dan Diversifikasi Ekonomi yang Inklusif Untuk Mewujudkan Kegemilangan NTB yang Berkelanjutan				
Pulau Lombok	Kota Mataram	Kab. Lombok Barat	Kab. Lombok Tengah	Kab. Lombok Utara	Kab. Lombok Timur
	Peningkatan Produktivitas melalui Ekonomi Kreatif dan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	<i>Rurung Lempek Gumi Paer</i> Untuk Pemulihan Ekonomi	Pemulihan Ekonomi Untuk Lombok Utara Bangkit	Meningkatkan Petumbuhan Ekonomi, Melalui Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif
Pulau Sumbawa	Kota Bima	Kab. Bima	Kab. Dompu	Kab. Sumbawa	Kab. Sumbawa Barat
	Membangun Ketangguhan Untuk Meningkatkan Produktifitas dan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan	Penguatan Sumber Daya Manusia Dan Kawasan Strategis Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan	Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan infrastruktur dasar yang berkualitas dan optimalisasi pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi, Pembangunan Berkelanjutan, dan Peningkatan Daya Saing Daerah Pasca Covid -19	Memantapkan Daya Saing Sumberdaya Manusia Yang Berakhlak Mulia dan perlindungan Sosial Yang Menyeluruh

Dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2023, sinergitas arah kebijakan pembangunan daerah memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional sebagai bahan penyelarasan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan perspektif sasaran pembangunan daerah, pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 5- 10 Sinergitas Sasaran Pembangunan Daerah dengan Kabupaten/Kota Tahun 2023

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Sinergitas Target Pembangunan Daerah Tahun 2023										
			Provinsi NTB	Kab. Lombok Barat	Kab. Lombok Tengah	Kab. Lombok Timur	Kab. Lombok Utara	Kota Mataram	Kab. Sumbawa Barat	Kab. Sumbawa	Kab. Dompu	Kab. Bima	Kota Bima
Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Point	0,65	0,67			0,66						
Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah	Persentase Kemantapan Jalan	%	86,60	74,87	79,88		73,00		74,40		60,2	59,00	
	Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	54,50	63,33	63,6			80,33	74,2			49,00	
Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase konektivitas transportasi publik	%	89,14									20,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini BPK	Status	WTP	WTP		WTP		WTP	WTP		WTP	WTP	WTP
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	38,65	14,02		16,68					10,4	8,05	6,02
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Kategori	A	A	B	BB		68	B		69	B	A

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Sinergitas Target Pembangunan Daerah Tahun 2023										
			Provinsi NTB	Kab. Lombok Barat	Kab. Lombok Tengah	Kab. Lombok Timur	Kab. Lombok Utara	Kota Mataram	Kab. Sumbawa Barat	Kab. Sumbawa	Kab. Dompu	Kab. Bima	Kota Bima
Meningkatnya Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN	Point	0,72			61-70						75	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	Point	3,60									70,00	
Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	67,05	67,92		67,41	68,16	72,62	68,73		68,1	67,5	70,35
	Persentase Balita <i>Stunting</i>	%	18,76	17	25,29		31,9	15,03			17,1	20,5	
Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,00	13,90		14,13	12,93	15,51	13,80		13,37	13,34	15,20
	Rata rata Lama Sekolah	Tahun	7,46	7,00		7,30	6,30	9,86	9,25		8,49		11,00
Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Point	45,90	42,50			43,03				42,93		
	Indeks Kualitas Udara	Point	89,32	88,12			91,81				86,20		
	Indeks Kualitas Air Laut	Point	81,02										
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	69,70										
Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	%	41,58		31,30		58,29	72,00	45,00		67,12	38,52	72,00
	Persentase Pengurangan Sampah	%	11,24		19,00			15,00					

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Sinergitas Target Pembangunan Daerah Tahun 2023										
			Provinsi NTB	Kab. Lombok Barat	Kab. Lombok Tengah	Kab. Lombok Timur	Kab. Lombok Utara	Kota Mataram	Kab. Sumbawa Barat	Kab. Sumbawa	Kab. Dompu	Kab. Bima	Kota Bima
Meningkatnya Investasi (kerjasama pemerintah dan badan usaha)	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	17.814	867,45			69,03	82	10			76,684,159,778	Rp. 143.521.006.828
Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	23,88		1,26					2,30		41,00	
Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan	%	100										
Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	90,55	87,50					85,00		82,00	83,56	
Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Cakupan Air Minum	%	78,91	83,82	81,92		24,15	72,71	86		90,72	88	100
	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	87,98	87,65	100				62		78,81	97,9	100
	Rasio Elektrifikasi	%	99,99										

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Sinergitas Target Pembangunan Daerah Tahun 2023										
			Provinsi NTB	Kab. Lombok Barat	Kab. Lombok Tengah	Kab. Lombok Timur	Kab. Lombok Utara	Kota Mataram	Kab. Sumbawa Barat	Kab. Sumbawa	Kab. Dompu	Kab. Bima	Kota Bima
	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	65,47	98,09			81,86	99,49	90,00	83,35	72,00	35,87	
Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	Inflasi	%	2-3					3 ± 1	3-3,5			2,30	
Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup	Pengeluaran per kapita	Rp.000	10.577										
Meningkatnya daya saing pariwisata	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Rp. Miliar	85,20						2,05	2,30			
Meningkatnya daya saing industri	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan	Rp. Miliar	114,66		2,53								
Menurunnya pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,00	2,80	2,66	3,03	2,37	6,30	5,17	3,41	3,00	4,30	2,40

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Sinergitas Target Pembangunan Daerah Tahun 2023										
			Provinsi NTB	Kab. Lombok Barat	Kab. Lombok Tengah	Kab. Lombok Timur	Kab. Lombok Utara	Kota Mataram	Kab. Sumbawa Barat	Kab. Sumbawa	Kab. Dompu	Kab. Bima	Kota Bima
Meningkatnya Nilai Sosial Budaya dan Toleransi Masyarakat	Persentase penurunan konflik sosial	%	0,00		100,00	100,00							
Meningkatnya Kualitas dan Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	6,07									90	
Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	0,63										
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	27,30			48,00			57			36	55,52
	Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	%	100	60,00	Utama							86	

Sumber: Bappeda NTB, 2022 (Data diolah)

Sinergitas pembangunan provinsi dan kabupaten/kota memerlukan dukungan dari kerjasama antar daerah dalam Provinsi NTB. Kerjasama antar daerah ini akan menguatkan arah kebijakan untuk produktifitas ekonomi daerah. Efektifitas kerjasama antar daerah ini bisa terbentuk dengan tumbuhnya kesadaran bersama dari 10 kabupaten/kota di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Tujuan utama kerjasama antar daerah ini adalah untuk mewujudkan percepatan kesejahteraan rakyat. Inisiasi kerjasama antar daerah ini dapat difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi NTB sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Kerjasama antar daerah disusun berdasarkan kesamaan isu, kesamaan kebutuhan, dan kesamaan permasalahan.

Kerjasama antar daerah ini memiliki manfaat yaitu manajemen konflik antar daerah, peran kerjasama antar daerah sebagai forum komunikasi dan dialog antar aktor utama daerah. Forum kerjasama antar daerah dapat meningkatkan pemahaman dan toleransi sehingga konflik antar daerah dapat diantisipasi. Efisiensi dan standarisasi pelayanan, yaitu dengan kerjasama antar daerah dapat dimanfaatkan daerah-daerah untuk membangun aksi bersama untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Pengembangan ekonomi bisa terwujud melalui kerjasama daerah, terutama dalam meningkatkan daya saing kawasan. Pengelolaan lingkungan akan lebih baik dalam konteks kerjasama antar daerah dan menguatkan sinergitas antar wilayah yang berdekatan. Pengelolaan lingkungan yang baik merupakan upaya pengurangan risiko bencana.

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan program dan kegiatan daerah tahun 2023 merupakan turunan dari perencanaan jangka menengah yang termuat dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023. Juga memperhatikan keterkaitannya dengan prioritas pembangunan nasional pada RKP Tahun 2023, serta harus mempunyai keberpihakan terhadap penyelesaian permasalahan pembangunan yang terjadi di Kabupaten/Kota serta mensinkronkan dari hasil pembahasan substansi substansi program dan kegiatan yang dilakukan melalui proses perencanaan seperti Konsultasi Publik, Forum OPD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Sebagai implementasi pendekatan bawah-atas (*bottom-up*) yang membahas rencana program dan kegiatan prioritas dengan pemangku kepentingan yang terdiri dari pihak akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, daerah diminta untuk menggunakan aplikasi SIPD dalam melakukan perencanaan, penganggaran dan penatausahaan. Oleh karena itu dalam penyusunan RKPD Provinsi NTB Tahun 2023 disusun melalui sistem SIPD (<https://ntbprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah>) pada tahapan proses perencanaan. Rancangan awal Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah yang akan disusun melalui SIPD dirangkum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.

6.1 Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari APBN Tahun 2023

Prinsip penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangannya di daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan, karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Disamping itu, sebagai konsekuensi negara kesatuan memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan sekalipun kepada daerah.

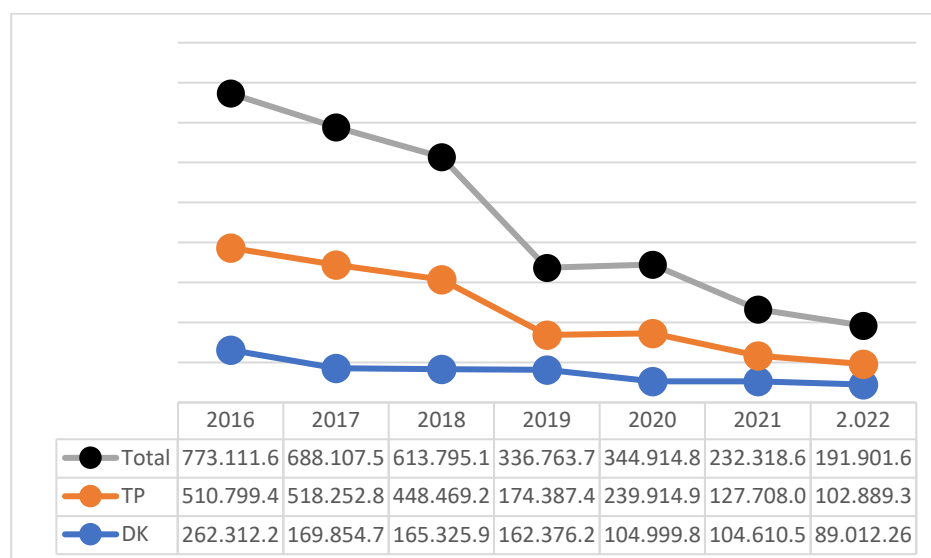
Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula selaku wakil Pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota. Pendanaan dekonsentrasi hanya diperuntukkan untuk mendukung penguatan dan pemberdayaan peran Gubernur selaku wakil pemerintah pusat dan kegiatannya bersifat non-fisik.

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi

kepada kabupaten/kota dan/ atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi penugasan. Pendanaan tugas pembantuan hanya membiayai kegiatan yang bersifat fisik dan ditujukan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala daerah otonom.

Kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan seluruhnya adalah kewenangan pusat dengan pendanaan dari APBN Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) dan Prioritas Nasional dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran nasional. Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan pada dilakukan oleh Satuan Kerja (Satker) yang terdapat di Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi. Selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2022, jumlah anggaran baik dekonsentrasi dan tugas yang diberikan cenderung menurun seperti yang tergambar pada gambar berikut ini.

Gambar 6- 1 Perkembangan APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) Pada Satuan Kerja Lingkup Pemerintah Provinsi



Sumber: Bappeda, 2022 (data diolah)

Kecenderungan menurunnya pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuannya disebabkan adanya alasan strategis pengalihan secara bertahap pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK) diantaranya:

- Amanat pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 108 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pasal 76-77. Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara/lembaga yang digunakan untuk melaksanakan urusan

yang menurut peraturan perundang-undangan menjadi urusan daerah, secara bertahap dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK);

- b. Rekomendasi BPK dan Panja DPR. Rekomendasi dan temuan BPK yaitu masih ada dana pusat yang membiayai urusan daerah melalui dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dan adanya tindak lanjut Panja Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer Daerah dimana pemerintah menerbitkan kebijakan Road Map rencana pengalihan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang masih membiayai urusan daerah ke Dana Alokasi Khusus (DAK).

Melihat adanya tren penurunan dan alasan strategis yang telah diungkapkan diatas, maka untuk pendanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di lingkup Pemerintah Provinsi NTB pada tahun 2023 diproyeksikan akan menurun namun tidak terlalu signifikan sebagaimana table berikut.

Tabel 6- 1 Proyeksi Pendanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2023

JENIS DANA	2016 (ribu)	2017 (ribu)	2018 (Ribu)	2019 (ribu)	2020 (ribu)	2021 (ribu)	2022 (ribu)	2023* (ribu)
Dekonsentrasi	262.312.242	169.854.710	165.325.950	162.376.278	104.999.897	104.610.576	89.012.266	81.018.450.500
Tugas Pembantuan	510.799.405	518.252.829	448.469.242	174.387.434	239.914.974	127.708.036	102.889.357	79.056.664.667
Total	773.111.647	688.107.539	613.795.192	336.763.712	344.914.871	232.318.612	191.901.623	160.075.115.167

Sumber : Data diolah, Bappeda NTB 2022

Oleh karena itu Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mendukung prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah, telah menyusun rencana kegiatan yang didanai dari APBN yang terdiri dari rencana program dan kegiatan yang diusulkan menjadi Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (K/L) maupun yang diusulkan untuk didanai oleh Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan serta Dana Alokasi Khusus (DAK). Berikut ini akan disajikan usulan rencana program dan kegiatan Tahun 2023 yang akan menjadi Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, sebagai berikut.

Tabel 6- 2 Rencana Program Dan Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Dana APBN (Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan) Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kementerian/Lembaga	Sumber Dana	OPD Pelaksana
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Kementerian Pertanian	Tugas Pembantuan	Dinas Petanian Dan Perkebunan
	"Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan"			
	Sertifikasi Produk			
	Koordinasi			
	Data dan informasi publik			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kementerian/Lembaga	Sumber Dana	OPD Pelaksana
	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
2	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Kementerian Pertanian	Tugas Pembantuan	Dinas Petanian Dan Perkebunan
	Koordinasi			
	Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan			
	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
	Sarana Pengembangan Kawasan			
3	Program Dukungan Manajemen	Kementerian Pertanian	Tugas Pembantuan	Dinas Petanian Dan Perkebunan
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan			
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal			
	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal			
4	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Kementerian Pertanian	Tugas Pembantuan	Dinas Petanian Dan Perkebunan
	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura			
	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
5	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Kementerian Pertanian	Tugas Pembantuan	Dinas Petanian Dan Perkebunan
	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat			
	Sarana Pengembangan Kawasan			
	Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura			
	Sarana Pengembangan Kawasan			
6	Program Dukungan Manajemen	Kementerian Pertanian	Tugas Pembantuan	Dinas Petanian Dan Perkebunan
	Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura			
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kementerian/Lembaga	Sumber Dana	OPD Pelaksana
7	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Kementerian Pertanian	Tugas Pembantuan	Dinas Petanian Dan Perkebunan
	Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar			
	Koordinasi			
	Penguatan Perlindungan Perkebunan			
	Sertifikasi Produk			
	Penguatan Perlindungan Perkebunan			
	Sarana Pengembangan Kawasan			
	Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah			
	Sarana Pengembangan Kawasan			
	"Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan"			
	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
	Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan			
	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan			
	Koordinasi			
	Sarana Pengembangan Kawasan			
8	Program Dukungan Manajemen	Kementerian Pertanian	Tugas Pembantuan	Dinas Petanian Dan Perkebunan
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan			
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal			
9	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Kementerian Pertanian	Tugas Pembantuan	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak			
	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga			
	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kementerian/Lembaga	Sumber Dana	OPD Pelaksana
	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
10	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Kementerian Pertanian	Tugas Pembantuan	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
	Peningkatan Produksi Pakan Ternak			
	Penyidikan dan Pengujian Produk			
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan			
	Pelayanan Publik Lainnya			
	Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak			
	Bantuan Kelompok Masyarakat			
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner			
	Sertifikasi Lembaga			
	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat			
	Penyidikan dan Pengujian Produk			
11	Program Dukungan Manajemen	Kementerian Pertanian	Tugas Pembantuan	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal			
	Layanan Data dan Informasi			
	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal			
12	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Kementerian Pertanian	Tugas Pembantuan	Dinas Petanian Dan Perkebunan
	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian			
	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat			
	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
	OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
	Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian			
	Prasarana Pengembangan Kawasan			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kementerian/Lembaga	Sumber Dana	OPD Pelaksana
	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian			
	Koordinasi			
	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida			
	Pelayanan Publik kepada masyarakat			
	Pelayanan Publik Lainnya			
	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian			
	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
13	Program Dukungan Manajemen	Kementerian Pertanian	Tugas Pembantuan	Dinas Petanian Dan Perkebunan
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian			
	Layanan Perkantoran			
14	Program Infrastruktur Konektivitas	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	Tugas Pembantuan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional			
	Dukungan Teknis			
	OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)			
	OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)			
15	Program Dukungan Manajemen	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	Tugas Pembantuan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
	Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga			
	Layanan Umum			
16	Program Ketahanan Sumber Daya Air	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	Tugas Pembantuan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
	Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana			
	OM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air			
17	Program Dukungan Manajemen	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	Tugas Pembantuan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
	Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kementerian/Lembaga	Sumber Dana	OPD Pelaksana
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal			
18	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Kementerian Ketenagakerjaan	Tugas Pembantuan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi			
	Perkara Hukum Kelompok Masyarakat			
	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat			
	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga			
	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat			
	Sarana Pengembangan Kawasan			
19	Program Dukungan Manajemen	Kementerian Ketenagakerjaan	Tugas Pembantuan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi			
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal			
20	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	Kementerian Dalam Negeri	Dekonsentrasi	Sekretariat Daerah
	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah			
	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan			
21	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	Kementerian Dalam Negeri	Dekonsentrasi	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah			
	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan			
22	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	Kementerian Dalam Negeri	Dekonsentrasi	Bappeda

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kementerian/Lembaga	Sumber Dana	OPD Pelaksana
	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah			
	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan			
23	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	Kementerian Dalam Negeri	Dekonsentrasi	Inspektorat
	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah	Tugas		
	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan			
24	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Kementerian Pertanian	Dekonsentrasi	Dinas Pertanian Dan Perkebunan
	Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan			
	Sertifikasi Produk			
	Pemantauan produk			
	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
	Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan			
	Koordinasi			
	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria			
	Sarana Pengembangan Kawasan			
25	Program Dukungan Manajemen	Kementerian Pertanian	Dekonsentrasi	Dinas Pertanian Dan Perkebunan
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan			
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal			
26	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Kementerian Pertanian	Dekonsentrasi	Dinas Pertanian Dan Perkebunan
	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura			
	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat			
	Data dan Informasi Publik			
27	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Kementerian Pertanian	Dekonsentrasi	Dinas Pertanian Dan Perkebunan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kementerian/Lembaga	Sumber Dana	OPD Pelaksana
	Perlindungan Hortikultura			
	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat			
	Sarana Pengembangan Kawasan			
	Pemantauan produk			
	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
	Sarana Pengembangan Kawasan			
	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
	Sertifikasi Produk			
28	Program Dukungan Manajemen	Kementerian Pertanian	Dekonsentrasi	Dinas Pertanian Dan Perkebunan
	Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura			
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal			
29	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Kementerian Pertanian	Dekonsentrasi	Dinas Pertanian Dan Perkebunan
	Penguatan Perlindungan Perkebunan			
	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
30	Program Dukungan Manajemen	Kementerian Pertanian	Dekonsentrasi	Dinas Pertanian Dan Perkebunan
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan			
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal			
31	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Kementerian Pertanian	Dekonsentrasi	Dinas Pertanian Dan Perkebunan
	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian			
	Koordinasi			
	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan			
	Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian			
	Koordinasi			
	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kementerian/Lembaga	Sumber Dana	OPD Pelaksana
	Pelayanan Publik kepada masyarakat			
	Pelayanan Publik Lainnya			
	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian			
	Koordinasi			
	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
32	Program Dukungan Manajemen	Kementerian Pertanian	Dekonsentrasi	Dinas Pertanian Dan Perkebunan
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian			
	Layanan Perkantoran			
33	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Kementerian Pertanian	Dekonsentrasi	Dinas Pertanian Dan Perkebunan
	Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian			
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah			
	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat			
	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat			
34	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Kementerian Pertanian	Dekonsentrasi	Dinas Pertanian Dan Perkebunan
	Pemantapan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan			
	Koordinasi			
	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat			
	Data dan Informasi Publik			
	Pemantapan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan			
	Data dan Informasi Publik			
	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat			
	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan			
	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat			
	Pengawasan dan Pengendalian Produk			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kementerian/Lembaga	Sumber Dana	OPD Pelaksana
	Data dan Informasi Publik			
	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat			
35	Program Dukungan Manajemen	Kementerian Pertanian	Dekonsentrasi	Dinas Pertanian Dan Perkebunan
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan			
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah			
36	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Kementerian Perindustrian	Dekonsentrasi	Dinas Kesehatan
	"Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka"	Industri		
	Fasilitasi dan Pembinaan Industri			
37	Program Dukungan Manajemen	Kementerian Kesehatan	Dekonsentrasi	Dinas Kesehatan
	Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara			
	Pengelolaan Keuangan Negara			
	Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan			
	Perencanaan dan Penganggaran			
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan			
	Layanan Data dan Informasi			
	Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji			
	Pelayanan Publik Lainnya			
38	Program Kesehatan Masyarakat	Kementerian Kesehatan	Dekonsentrasi	Dinas Kesehatan
	Pembinaan Gizi Masyarakat			
	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat			
	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga			
	Sosialisasi dan Diseminasi			
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah			
	Pembinaan Kesehatan Keluarga			
	Pelatihan Bidang Pendidikan			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kementerian/Lembaga	Sumber Dana	OPD Pelaksana
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan			
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah			
	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat			
	Kemitraan			
	Koordinasi			
	Promosi			
	Penyehatan Lingkungan			
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah			
39	Program Dukungan Manajemen	Kementerian Kesehatan	Dekonsentrasi	Dinas Kesehatan
	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kesehatan Masyarakat			
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal			
40	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	Kementerian Kesehatan	Dekonsentrasi	Dinas Kesehatan
	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer			
	Pelayanan Publik Lainnya			
41	Program Dukungan Manajemen	Kementerian Kesehatan	Dekonsentrasi	Dinas Kesehatan
	Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan			
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah			
42	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Kementerian Kesehatan	Dekonsentrasi	Dinas Kesehatan
	Surveilans dan Karantina Kesehatan			
	Koordinasi			
	Pelayanan Publik Lainnya			
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah			
	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik			
	Pelayanan Publik Lainnya			
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah			
	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kementerian/Lembaga	Sumber Dana	OPD Pelaksana
	Koordinasi			
	Sosialisasi dan Diseminasi			
	Pelayanan Publik Lainnya			
	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal			
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah			
	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular			
	Koordinasi			
	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal			
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah			
	Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA			
	Sosialisasi dan Diseminasi			
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah			
43	Program Dukungan Manajemen	Kementerian Kesehatan	Dekonsentrasi	Dinas Kesehatan
	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			
	Koordinasi			
44	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	Kementerian Kesehatan	Dekonsentrasi	Dinas Kesehatan
	Peningkatan Pelayanan Kefarmasian			
	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga			
	Peningkatan Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan			
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah			
	Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian			
	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha			
	Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)			
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah			
45	Program Dukungan Manajemen	Kementerian Kesehatan	Dekonsentrasi	Dinas Kesehatan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kementerian/Lembaga	Sumber Dana	OPD Pelaksana
	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan			
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah			
45	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	Kementerian Kesehatan	Dekonsentrasi	Dinas Kesehatan
	Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan			
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah			
46	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Kementerian Kesehatan	Dekonsentrasi	Dinas Kesehatan
	Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan			
	Pelatihan Bidang Sosial			
47	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Kementerian Kesehatan	Dekonsentrasi	Dinas Kesehatan
	Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan			
	Pelatihan Bidang Sosial			
48	Program Dukungan Manajemen	Kementerian Kesehatan	Dekonsentrasi	Dinas Kesehatan
	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan			
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah			
49	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	Kementerian Ketenagakerjaan	Dekonsentrasi	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja			
	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha			
50	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	Kementerian Ketenagakerjaan	Dekonsentrasi	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja			
	Layanan Perkantoran			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kementerian/Lembaga	Sumber Dana	OPD Pelaksana
51	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Kementerian Ketenagakerjaan	Dekonsentrasi	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Binalatvotas			
	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga			
	Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas			
	Pelatihan Bidang Industri			
	Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Binalavotas			
	Kerja sama			
	Pelatihan Bidang Industri			
51	Program Dukungan Manajemen	Kementerian Sosial	Dekonsentrasi	Dinas Sosial
	"Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum"			
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal			
	"Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum"			
	Layanan Umum			
	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal			
52	Program Perlindungan Sosial	Kementerian Sosial	Dekonsentrasi	Dinas Sosial
	Pemberdayaan dan Pelayanan Perizinan			
	Perizinan Lembaga			
	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat			
	OM Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan			
	Penyelenggaraan Layanan dan Pendampingan Terpadu			
	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga			
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah			
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Ekonomi			
	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kementerian/Lembaga	Sumber Dana	OPD Pelaksana
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Komunitas Adat			
	Bantuan Keluarga			
53	Program Perlindungan Sosial	Kementerian Sosial	Dekonsentrasi	Dinas Sosial
	Pencegahan dan Perlindungan Korban Bencana			
	Bantuan Kebencanaan			
	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat			
	Penyelenggaraan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan			
	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat			
54	Program Perlindungan Sosial	Kementerian Sosial	Dekonsentrasi	Dinas Sosial
	Penyelenggaraan Program Sembako			
	Bantuan Keluarga			
55	Program Perlindungan Sosial	Kementerian Sosial	Dekonsentrasi	Dinas Sosial
	Pembinaan Lembaga dan SDM Kesejahteraan Sosial			
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa			
56	Program Dukungan Manajemen	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Dekonsentrasi	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	"Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN"			
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal			
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan			
	Pengelolaan Data dan Informasi			
	Layanan Data dan Informasi			
57	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Dekonsentrasi	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	"Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kementerian/Lembaga	Sumber Dana	OPD Pelaksana
	Pengawasan Kapal Perikanan"			
	Pelayanan Publik Lainnya			
	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan			
	Pelayanan Publik Lainnya			
	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi			
	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan			
	Bantuan Masyarakat			
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah			
	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat			
	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat			
	Pengelolaan Sumber Daya Ikan			
	Pemantauan produk			
58	Program Dukungan Manajemen	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Dekonsentrasi	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap			
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal			
	Layanan Data dan Informasi			
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan			
59	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Dekonsentrasi	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan			
	Penyidikan dan Pengujian Penyakit			
	Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan			
	Pelayanan Publik kepada lembaga			
	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat			
60	Program Dukungan Manajemen	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Dekonsentrasi	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kementerian/Lembaga	Sumber Dana	OPD Pelaksana
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal			
	Layanan Data dan Informasi			
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan			
61	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Dekonsentrasi	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	"Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan"			
	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat			
62	Program Dukungan Manajemen	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Dekonsentrasi	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal			
	Layanan Umum			
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan			
63	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Dekonsentrasi	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan			
	Promosi			
	Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan			
	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan			
64	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Dekonsentrasi	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan			
	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM			
65	Program Dukungan Manajemen	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Dekonsentrasi	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan			
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kementerian/Lembaga	Sumber Dana	OPD Pelaksana
66	Program Kualitas Lingkungan Hidup	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Dekonsentrasi	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut			
	Kemitraan			
	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem			
67	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Dekonsentrasi	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan			
	Sarana Pengembangan Kawasan			
68	Program Dukungan Manajemen	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Dekonsentrasi	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut			
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal			
	Layanan Umum			
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan			
69	Program Kewirausahaan, Usaha Miro, Kecil Menengah, dan Koperasi	Kementerian Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Dekonsentrasi	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah			
	Promosi			
	Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi			
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal			
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah			
70	Program Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Dekonsentrasi	Bappeda
	Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang			
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kementerian/Lembaga	Sumber Dana	OPD Pelaksana
71	Program Perpustakaan dan Literasi	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Dekonsentrasi	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus			
	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga			
72	Program Penanaman Modal	Badan Koordinasi Penanaman Modal	Dekonsentrasi	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV			
	Bantuan Lembaga			
73	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	Dekonsentrasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Pembangunan Desa dan Perdesaan			
	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat			
74	Program Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan	Dekonsentrasi	Dinas Perdagangan
	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah			
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah			
75	Program Perdagangan Luar Negeri	Kementerian Perdagangan	Dekonsentrasi	Dinas Perdagangan
	Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah			
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah			
76	Program Dukungan Manajemen			
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perdagangan Luar Negeri			
	Layanan Perkantoran			
77	Program Keolahragaan	Kementerian Pemuda Dan Olah Raga	Dekonsentrasi	Dinas Pemuda Dan Olah Raga

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kementerian/Lembaga	Sumber Dana	OPD Pelaksana
	Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga			
	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat			

Sumber : Data Olahan Bappeda NTB, 2022

6.2 Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023

Program dan kegiatan yang tertuang di dalam RKPD ini dilaksanakan secara terpadu berdasarkan urusan/kewenangan baik urusan wajib maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang dan fungsi lainnya, dengan dukungan pendanaan bersifat indikatif. Dalam perumusannya juga mengakomodir aspirasi masyarakat melalui Pokok-Pokok Pikiran DPRD. Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan bagian dari saran dan masukan DPRD dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang diperoleh dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan Reses yang menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan fokus dan prioritas pembangunan daerah, antara lain:

a. Bidang Kesehatan

3. Peningkatan sarana prasarana kesehatan, seperti pembangunan MCK, pengadaan Ambulan Desa, serta permohonan hibah uang dalam penyediaan fasilitas Kesehatan yang masih dibutuhkan masyarakat.
4. Penguatan sarana dan prasarana posyandu di berbagai daerah berupa penyediaan alat serta pelatihan kader bagi kader posyandu agar bisa lebih produktif.

b. Bidang Pendidikan

4. Permohonan pembangunan dan rehab baik Sekolah, lingkungan sekolah seperti paving blok, pagar sekolah dan utilitas sekolah lainnya maupun Ruang Kelas baru (RKB). Ruang Praktik Sekolah dan sarana prasarana penunjang lainnya bagi pendidikan formal di berbagai tingkatan, baik swasta maupun negeri.
5. Permohonan bantuan terhadap pendidikan informal seperti pondok pesantren, MDTA, RA, TK, PAUD, agar dilakukan secara merata di berbagai daerah.
6. Permohonan pemberian Beasiswa bagi masyarakat miskin yang berprestasi.

c. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

10. Peningkatan kontribusi sektor ekonomi pada bidang perikanan dan kelautan dalam bentuk Pengadaan bibit ikan, pengadaan alat dan mesin melaut, pengadaan pakan ikan, pengadaan alat tangkap ikan serta penyediaan sarana budidaya perikanan.

11. Peningkatan daya saing industri di bidang koperasi yang dilakukan dengan pemberian modal usaha pada Koperasi, pemberian bantuan alat usaha seperti Mesin, Etalase Dagang dan sebagainya.
12. Bantuan pengadaan bibit ayam petelur, bibit tanaman sayur dan bibit tanaman hortikultura serta pengadaan alat-alat pengolahan pangan yang diharapkan dapat menjadi solusi peningkatan ketahanan dan keragaman konsumsi pangan.
13. Pengembangan pariwisata berbasis desa dengan peningkatan sarana dan prasarana tempat wisata seperti pembangunan Tempat Ibadah, dukungan bagi Kelompok Sadar Wisata, pembangunan spot swafoto, pembangunan gapura identitas serta bantuan pengembangan wisata kesenian dengan membangun Bale Pertunjukan.
14. Pengadaan bantuan untuk sektor perdagangan yang terdampak pandemic covid 19 berupa bantuan modal kepada usaha atau perorangan pedagang, bantuan alat usaha berupa Gerobak Dagang, Terop dan Lapak Dagang.
15. Dalam mendorong sektor perindustrian beberapa bantuan yang diusulkan adalah berupa Bantuan mesin usaha seperti mesin konveksi, mesin digital printing, mesin jahit, mesin obras, mesin penggilingan, Peralatan multimedia utk industri desain grafis dan sebagainya.
16. Penguatan dukungan di sektor pertanian melalui peningkatan bantuan sarana pertanian dan infrastruktur seperti pembangunan Jalan Usaha Tani, pembangunan Embung Rakyat, jaringan irigasi tersier, Bantuan Hand Traktor, bantuan bibit pertanian, alat perajang tembakau, bantuan alat-alat pertanian, menangani kelangkaan pupuk bersubsidi dengan pemberian bantuan Pupuk, dan pemberian bantuan uang berupa hibah bagi kelompok – kelompok petani.
17. Penguatan bantuan modal usaha peternak baik kelompok maupun perorangan, pemberdayaan bagi kelompok tani, pengembangan ayam petelur, pembuatan sarana dan prasarana burung walet
18. Penguatan bantuan modal untuk kelompok ternak, pengadaan bibit ternak, pengembangan budidaya/perbibitan/penggemukan ternak, bantuan kandang ternak, harga pakan ternak yang terjangkau, peningkatan kapasitas peternak dengan pendampingan dan pelatihan terhadap kelompok untuk pengolahan produk hasil peternakan dan fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan hasil peternakan dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat.

d. Bidang Sosial dan Budaya

9. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk kegiatan olah raga seperti lapangan olahraga, alat-alat olahraga, bantuan seragam olahraga bagi kelompok pemuda atau klub olahraga.
10. Peningkatan bantuan modal usaha bagi para wirausaha muda dan masyarakat secara umum, bantuan peralatan usaha bagi wirausaha muda seperti peralatan sablon, peralatan usaha studio Rekaman, Alat-alat Laundry, pemberdayaan ekonomi di kalangan anak muda maupun anggota kelompok masyarakat dalam bentuk kemudahan akses dan pendampingan seperti pemberian bantuan sarana

prasarana berupa Laptop, Sound System, Drone, Kamera, dan media lainnya. Fasilitasi terciptanya ekosistem ekonomi kreatif bagi masyarakat khususnya pemuda seperti bantuan seragam organisasi kepemudaan dan Hibah uang kepada badan/organisasi kemasyarakatan/lembaga Bidang Kepemudaan serta Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda - Pelatihan Wirausaha muda.

11. Meningkatkan sarana dan prasarana kesenian/kebudayaan seperti bantuan Pakaian Adat, Sound System, Alat-alat kesenian dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya nilai sosial dan budaya.
12. Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat berupa pemberian bantuan kendaraan operasional untuk patrol, pembangunan pos jaga dan penyediaan alat – alat komunikasi. Selain itu dalam rangka peningkatan ketentraman masyarakat juga terdapat usulan bantuan penanganan bencana berupa pengadaan kendaraan tangka dan kendaraan roda 3 (tiga).
13. Fasilitasi dalam meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan berupa Pelatihan Keterampilan Bagi Ibu PKK.
14. Peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat berupa pemberian Hibah Uang, pengadaan Beruqaq Pintar dan Pengadaan Buku dan Rak Buku.
15. Fasilitasi kegiatan keagamaan berupa pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi tempat ibadah berupa sound system, alat qasidah, alat banjar, sajadah, karpet, dan wireless. Selain terdapat bantuan berupa dana pembangunan bagi tempat – tempat ibadah, pemberian hewan kurban dan bantuan penembokan tempat ibadah.
16. Peningkatan jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin dalam bentuk bantuan alat usaha, kursi plastic, pembelian sarung, wireless portable, pemberian paket sembako, Bansos dan hibah uang bagi badan/organisasi. Selain itu juga penyediaan kendaraan – kendaraan operasional baik kendaraan khusus seperti tangki air, dan kendaraan roda 3 (tiga).

e. Bidang Infrastruktur dan Lainnya

14. Pemasangan listrik murah dan hemat bagi masyarakat miskin.
15. Pengembangan jasa Wisata Alam dalam KPH (flying fox, home stay, rumah pohon, pondok budaya), Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Pembuatan Bibit Penyimpan Air) dan Pembuatan DAM Penahan.
16. Pengadaan alat komunikasi dan informatika, Pembangunan Infrastruktur IT seperti Pembuatan web aplikasi, Pengadaan CCTV, dan Pemasangan Internet Gratis/Wifi.
17. Penanganan lingkungan hidup dengan pemberian bantuan sarana dan prasarana persampahan seperti seperti bak sampah, kendaraan persampahan, Mesin Pengolah Sampah, Mesin Pencacah Sampah Daur Ulang, Pengadaan Mesin Press Hidrolik Sampah Plastik serta Pembentukan dan Pengembangan Bank Sampah.
18. Peningkatan infrastruktur layanan dasar berupa pembangunan sumur bor, perpipaan air minum, Pengembangan SPAM berbasis masyarakat, pembangunan sumur bor, penanganan banjir dengan melakukan normalisasi sungai,

Pembangunan Drainase air limbah, perkotaan dan sarana pendukungnya, Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Rehabilitasi Embung.

19. Bantuan Pembangunan Gedung serbaguna
20. Pembangunan jembatan sebagai jalan penghubung antar kabupaten/kota, antar kecamatan, dan antar desa, khususnya di daerah-daerah pelosok.
21. Pembangunan rumah layak huni.
22. Perbaikan dan pelebaran melalui rabat beton, perbaikan jalan lingkungan permukiman.
23. Penataan Kawasan Kumuh.
24. Pengadaan sarana penerangan jalan umum.
25. Permohonan perbaikan rumah tidak layak huni.
26. Penembokan Taman Pemakaman Umum.

Tabel 6- 3 Rekapitulasi Alokasi Anggaran Indikatif Perangkat Daerah Provinsi NTB Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Alokasi Anggaran Urusan Penunjang (Rp.)	Alokasi Anggaran Pelaksanaan Urusan (Rp.)	Total (Rp.)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.304.467.907.673	601.620.290.685	1.906.088.198.358
2	Dinas Kesehatan	36.231.354.540	174.518.960.542	210.750.315.082
3	RSUD Provinsi NTB	21.961.993.226	8.494.111.038	30.456.104.264
4	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma NTB	2.402.941.405	69.947.521.772	72.350.463.177
5	RS. H. Lalu Manambai	289.773.798.316	41.990.306.333	331.764.104.649
6	RS. Mandalika	44.477.095.071	19.478.665.310	63.955.760.381
7	RS. Mata	50.304.932.945	27.395.635.062	77.700.568.007
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	63.707.205.467	336.267.355.871	399.974.561.338
9	Dinas Perumahan dan Permukiman	10.737.141.335	93.630.001.390	104.367.142.725
10	Satuan Polisi Pamong Praja	21.022.198.802	6.459.321.532	27.481.520.334
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.615.673.712	6.908.747.000	14.524.420.712
12	Dinas Sosial	36.241.744.874	36.619.449.401	72.861.194.275
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	29.662.904.612	7.000.000.000	36.662.904.612
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.973.603.705	6.500.000.000	16.473.603.705
15	Dinas Ketahanan Pangan	10.079.514.316	17.335.000.000	27.414.514.316
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	96.591.704.244	46.835.724.340	143.427.428.584

No	Perangkat Daerah	Alokasi Anggaran Urusan Penunjang (Rp.)	Alokasi Anggaran Pelaksanaan Urusan (Rp.)	Total (Rp.)
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12.108.483.719	6.000.000.000	18.108.483.719
18	Dinas Perhubungan	11.396.531.742	2.920.196.600	14.316.728.342
19	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	12.355.097.339	7.749.088.750	20.104.186.089
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	14.304.448.836	27.351.894.149	41.656.342.985
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.707.803.471	3.323.282.510	13.031.085.981
22	Dinas Pemuda dan Olahraga	9.181.441.715	8.000.000.000	17.181.441.715
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	16.216.440.954	20.284.539.740	36.500.980.694
24	Dinas Kelautan dan Perikanan	30.352.513.424	33.706.606.774	64.059.120.198
25	Dinas Pariwisata	16.670.441.511	18.685.854.459	35.356.295.970
26	Dinas Pertanian dan Perkebunan	53.073.067.387	176.779.482.442	229.852.549.829
27	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	24.235.924.776	85.795.421.895	110.031.346.671
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	11.148.775.183	2.100.000.000	13.248.775.183
29	Dinas Perdagangan	11.801.209.058	21.830.739.350	33.631.948.408
30	Dinas Perindustrian	14.752.262.055	19.474.249.600	34.226.511.655
31	Sekretariat Daerah			
	Biro Umum	153.134.331.792	-	153.134.331.792
	Biro Organisasi	564.434.644	1.506.560.900	2.070.995.544
	Biro Administrasi Pimpinan	6.779.328.000	-	6.779.328.000
	Biro Hukum	668.558.561	849.765.395	1.518.323.956
	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	561.016.516	1.487.684.500	2.048.701.016
	Biro Kesejahteraan Rakyat	769.895.902	70.940.023.289	71.709.919.191
	Biro Perekonomian	477.953.269	2.609.669.294	3.087.622.563
	Biro Administrasi Pembangunan	312.119.408	459.903.200	772.022.608
	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	478.309.961	1.595.490.311	2.073.800.272

No	Perangkat Daerah	Alokasi Anggaran Urusan Penunjang (Rp.)	Alokasi Anggaran Pelaksanaan Urusan (Rp.)	Total (Rp.)
32	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	73.257.870.581	27.067.910.930	100.325.781.511
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	62.250.110.621	16.515.466.200	78.765.576.821
34	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	46.461.489.519	925.807.270.008	972.268.759.527
35	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	114.748.212.190	14.693.377.260	129.441.589.450
36	Badan Kepegawaian Daerah	14.207.614.575	3.890.558.995	18.098.173.570
37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	19.797.212.257	15.449.991.000	35.247.203.257
38	Badan Riset dan Inovasi Daerah	8.843.469.081	63.256.196.120	72.099.665.201
39	Badan Penghubung Daerah	10.648.508.826	523.350.000	11.171.858.826
40	Inspektorat	22.302.080.490	2.860.369.637	25.162.450.127
41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	7.621.684.452	9.472.802.620	17.094.487.072
TOTAL		2.826.440.356.058	3.093.988.836.204	5.920.429.192.262

Sumber : Data Olahan Bappeda NTB, 2022

Tabel di atas menggambarkan bahwa dukungan anggaran pada tahun 2023 sebesar RP. 5.920.429.192.262,- yang tersebar pada masing-masing Perangkat Daerah lingkup Provinsi NTB untuk mendukung program kegiatan dalam pencapaian visi dan misi sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD 2019-2023.

6.3 Rencana Program dan Kegiatan yang Mendukung Prioritas Daerah (PD)

Program dan kegiatan yang tertuang di dalam RKPD ini dilaksanakan untuk mendukung pembangunan Prioritas Daerah NTB. Berikut data nama OPD, Program dan jumlah dukungan anggaran untuk masing-masing Prioritas Daerah yang disingkat PD.

Tabel 6- 4 Program Kegiatan yang mendukung Prioritas Daerah

PD	OPD	Program	Anggaran
PD 1	BPBD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	8,644,420,422.00
		Program Penanggulangan Bencana	5,836,720,974.00
	Dinas Perkim	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	7,403,295,890.00

PD	OPD	Program	Anggaran
		Program Pengembangan Perumahan	11,531,202,593.00
		Program Peningkatan Prasarana,Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	18,934,498,483.00
PD 2	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	3,187,024.00
	Dinas PUPR	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	30,468,888,100.00
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	8,147,351,000.00
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	10,845,489,000.00
		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	13,037,309,515.00
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	125,000,000.00
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	9,550,000,000.00
		Program Pengembangan Permukiman	41,705,149,515.00
		Program Penataan Bangunan Gedung	1,552,834,000.00
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	14,200,000,000.00
		Program Penyelenggaraan Jalan	120,947,500,000.00
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	178,405,483,515.00
		Program Penyelenggaraan Jalan	80,139,639,120.00
	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	100,000,000.00
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	150,000,000.00
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	100,000,000.00
	Dinas LHK	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	647,899,000.00
	Dinas ESDM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	10,928,530,261.00
		Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	327,000,000.00
		Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	210,000,000.00

PD	OPD	Program	Anggaran
		Program Pengelolaan Energi Terbarukan	417,000,000.00
		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	1,053,678,600.00
		Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	22,000,000.00
		Program Pengelolaan Mineral Dan	30,000,000.00
		Program Pengelolaan Energi	16,321,400.00
		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	24,000,000.00
	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	4,698,055,500.00
		Program Pengelolaan Pelayaran	682,448,950.00
	Dinas Sosial	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	37,353,088,714.00
		Program Pemberdayaan Sosial	6,213,619,000.00
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban	600,000,000.00
		Program Rehabilitasi Sosial	15,184,840,400.00
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	8,467,000,000.00
		Program Penanganan Bencana	2,013,080,825.00
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	350,000,000.00
PD 3	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	2,686,880,222.00
	Dinas PUPR	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	7,940,889,220.00
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	21,659,742,477.00
		Program Penyelenggaraan Jalan	841,518,600.00
	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	29,712,904,612.00

PD	OPD	Program	Anggaran
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	250,000,000.00
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	950,000,000.00
		Program Penempatan Tenaga Kerja	1,200,000,000.00
		Program Hubungan Industrial	275,000,000.00
		Program Pengawasan Ketenagakerjaan	275,000,000.00
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1,325,000,000.00
		Program Pengawasan Ketenagakerjaan	800,000,000.00
		Program Pengawasan Ketenagakerjaan	300,000,000.00
	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	159,740,845,923.00
		Program Penataan Organisasi	1,640,490,420.00
		Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	1,487,684,500.00
		Program Kesejahteraan Rakyat	286,068,800.00
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	534,598,145.00
		Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	498,507,250.00
		Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	20,197,289.00
	BRIDA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	458,112,672.00
	BAPPEDA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	62,250,110,621.00
		Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3,483,552,600.00
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	12,123,948,900.00
	BAPPENDA	Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	94,439,515,950.00
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	5,186,214,500.00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	178,460,159,782.00
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	8,135,767,300.00

PD	OPD	Program	Anggaran
	BKD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	15,727,485,897.00
		Program Kepegawaian Daerah	2,339,774,173.00
	BPSDM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	18,555,514,088.00
		Program Pengembangan Sumber Daya	16,691,689,169.00
	Dinas Kominfotik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12,126,885,487.00
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	5,594,235,225.00
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1,490,079,473.00
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	490,688,597.00
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	400,568,285.00
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan	Program Pendaftaran Penduduk	246,000,000.00
		Program Pencatatan Sipil	90,000,000.00
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	609,000,000.00
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	55,000,000.00
	Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	22,559,650,827.00
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	1,683,819,300.00
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	918,980,000.00
	Sekretariat DPRD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	72,533,541,311.00
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	27,792,240,200.00
PD 4	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	52,088,971,889.00
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	146,662,924,952.00
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	100,229,387.00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	613,576,970.00

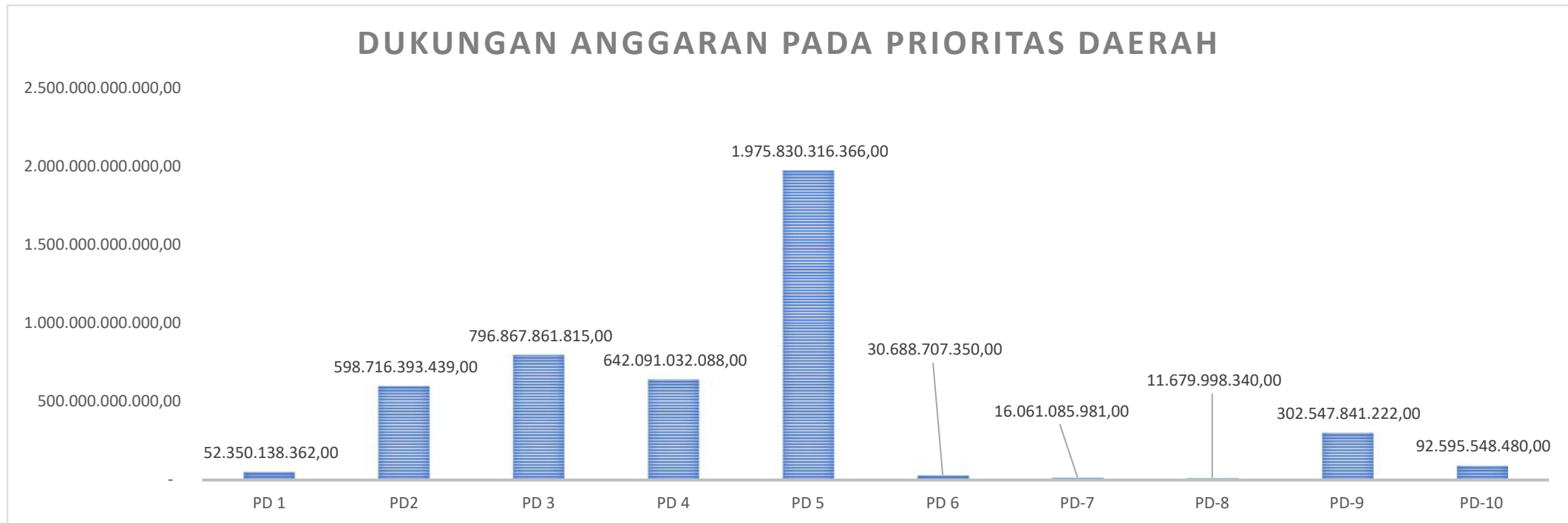
PD	OPD	Program	Anggaran
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	9,954,741,000.00
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	107,773,000.00
	RSUD Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	307,225,878,749.00
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	24,538,225,900.00
	RS Mandalika	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	10,490,158,868.00
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	59,852,447,109.00
	RS Mata	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	21,961,993,226.00
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	8,494,111,038.00
PD 5	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1,296,924,314,989.00
		Program Pengelolaan Pendidikan	493,972,237,945.00
		Program Pengembangan Kurikulum	1,134,609,723.00
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	91,396,831,921.00
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	98,984,633.00
		Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	804,006,888.00
		Program Pengembangan Kebudayaan	21,310,344.00
		Program Pengelolaan Pendidikan	7,151,041,723.00
	Sekretariat Daerah	Program Kesejahteraan Rakyat	34,365,750,100.00
	BRIDA	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	49,939,069,500.00
	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	22,158,600.00
PD 6	Dinas LHK	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	300,000,000.00
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	650,000,000.00

PD	OPD	Program	Anggaran
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	150,000,000.00
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	75,000,000.00
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	200,000,000.00
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	700,000,000.00
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100,000,000.00
		Program Pengelolaan Persampahan	8,482,481,649.00
		Program Pengelolaan Hutan	18,040,970,726.00
		Program Konservasi Sumber Daya Alam	150,000,000.00
		Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	300,000,000.00
		Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	653,545,300.00
		Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	100,000,000.00
		Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	785,967,916.00
	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	741,759.00
PD 7	Dinas Ketahanan Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	3,025,000,000.00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	5,000,000.00
	Dinas Penanaman Modal	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	10,152,073,507.00
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	444,821,900.00
		Program Promosi Penanaman Modal	800,921,600.00
		Program Pelayanan Penanaman Modal	636,346,900.00

PD	OPD	Program	Anggaran
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	923,698,474.00
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	73,223,600.00
PD 8	Dinas Perindustrian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	563,870,000.00
	Badan Penghubung	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	10,402,778,340.00
		Program Pelayanan Penghubung	713,350,000.00
PD 9	Dinas Koperasi Ukm	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	14,184,449,085.00
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	2,000,000,000.00
		Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	6,000,000,000.00
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	6,000,000,000.00
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukm)	5,500,000,000.00
		Program Pengembangan Ukm	545,762,000.00
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	4,926,131,900.00
	Dinas Perdagangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	11,488,309,027.00
		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	326,000,000.00
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	8,680,000,000.00
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	430,000,000.00
		Program Pengembangan Ekspor	1,800,000,000.00
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	2,550,000,000.00
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	8,264,639,381.00
	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	51,663,067,378.00
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	47,749,215,951.00
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	124,640,475,800.00
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1,113,045,600.00

PD	OPD	Program	Anggaran
		Program Penyuluhan Pertanian	4,686,745,100.00
PD 10	Sekretariat Daerah	Program Kesejahteraan Rakyat	34,939,380,489.00
	BRIDA	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1,141,647,200.00
	Dikbud	Program Pengembangan Kebudayaan	579,722,742.00
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	749,840,459.00
		Program Pembinaan Sejarah	365,684,220.00
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	1,022,277,801.00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	4,496,457,577.00
		Program Pengembangan Kebudayaan	2,750,506,610.00
		Program Pengelolaan Permuseuman	1,573,235,676.00
	Bangkesbangpoldagri	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	7,685,523,184.00
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	639,374,924.00
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	4,408,142,524.00
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	689,599,924.00
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	865,219,530.00
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	2,806,626,986.00
	Dinas Pemberdayaan Perempuan	Program Perlindungan Perempuan	329,824,000.00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	39,583,000.00
		Program Perlindungan Perempuan	164,348,000.00
		Program Perlindungan Khusus Anak	30,180,000.00
	Satpol PP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	20,996,447,102.00
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	6,321,926,532.00

Gambar 6- 2 Dukungan Anggaran Pada Prioritas Daerah



Sumber : Data diolah, Bappeda NTB 2022

Jika dibandingkan jumlah anggaran untuk setiap program prioritas daerah. Grafik diatas memperlihatkan bahwa dukungan anggaran paling besar terdapat pada Prioritas Daerah kelima yaitu, Meningkatkan kualitas pendidikan.

6.4 Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha. Saat ini banyak pemerintah daerah yang menyadari pentingnya kontribusi dari pihak swasta dalam mendorong pembangunan.

Berdasarkan fakta, pihak swasta dapat membawa keahlian, ilmu, teknologi, efisiensi dan permodalan yang sangat dibutuhkan sektor publik sehingga apabila dikombinasikan dengan sumber daya publik yang tepat dapat menjadi kontribusi yang lebih besar untuk pembangunan berkelanjutan. Namun pihak swasta membutuhkan lingkungan yang stabil, dukungan peraturan dan kerangka regulasi yang kuat, persiapan kelembagaan yang jelas dan faktor lainnya yang penting untuk “menciptakan pangsa pasar”.

Salah satu persoalan yang dihadapi Pemerintah Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak mampu sepenuhnya membiayai pembangunan infrastruktur yang diinginkan atau diharapkan. Artinya, masih banyak bidang-bidang lain seperti Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan, Sosial dan Agama yang juga membutuhkan penyerapan anggaran dari APBD. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan. Pada kondisi ini, skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dapat menjadi solusi dengan prinsip gotong royong. Melalui skema pembiayaan KPBU, pemerintah, BUMN/BUMD, serta swasta bekerja sama untuk membiayai pengakselerasian pembangunan.

Melalui skema KPBU, Pemerintah Provinsi NTB memiliki 4 proyek akselerasi infrasturktur yang memungkinkan untuk dikerjasamakan dengan pihak swasta antara lain: Pembangunan kota Kreatif dan Berbudaya, NTB Industrial Park, pengembangan agrowisata & cagar biosfer Samota dan holding RSUP Pulau Sumbawa.

Samota (Saleh-Moyo-Tambora) merupakan Kawasan sentra pengembangan ekonomi maritim dan pariwisata. Membentang pada tiga kabupaten di Pulau Sumbawa menawarkan potensi sumber daya laut dan darat. Juga merupakan lokasi strategis karena diapit oleh Daerah Tujuan Wisata (DTW) Internasional Bali dan Lombok di Bagian Barat dan Pulau Komodo di Bagian Timur. Selain itu, Samota juga berhimpitan langsung dengan jalan nasional Banda Aceh – Kupang. Setiap titik lokasi memiliki keunikan dan potensinya masing masing. Teluk Saleh misalnya, merupakan salah satu akuarium terbesar dunia denngan kekayaan flora dan fauna seperti 59 jenis karang, Dugong, Lumba lumba dan 405 jenis ikan karang. Teluk saleh sangat berpotensi untuk dijadikan sentra budidaya perikanan tangkap dengan proyeksi 4.450 ton/tahun, Budidaya air payau dan budidaya laut. Keindahan alam teluk salah juga dapat dijadikan destinasi wisata dengan 49 pulau kecil dengan panjang garis pantai 209,1 km dikelompokkan pulau berpasir dan pulau tebing serta mangrove. Di titik lokasi selanjutnya, Moyo merupakan Pulau indah dengan

potensi pariwisata yang sudah melegenda sebagai tempat berlibur pesohor dunia seperti Putri Diana, Mick Jagger, Maria Sharapova hingga Ronaldo. Tidak kalah dengan dua lokasi sebelumnya, Tambora sebagai Geopark nasional memiliki potensi lengkap dari flora dan fauna hingga peternakan. Kedepan SAMOTA diskenariokan menjadi Kawasan agrowisata dan cagar biosfer kelas dunia. Sebuah Kawasan yang digerakkan oleh masyarakat berbasis pada pengembangan sumber daya local pada sector pariwisata, pertanian dalam arti luas, serta kelautan perikanan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Proyeksi kebutuhan pembiayaan program pengembangan agrowisata & cagar biosfer dunia “samota” dibutuhkan total anggaran Rp.550.000.000.000,-. Kerjasama dengan swasta kedepan diharapkan dapat mengakselerasi pembangunan kawasan Samota baik untuk pembangaunan infrastruktur utama maupun infrastruktur penunjang.

Sementara itu untuk NTB Industrial Park. Sektor industri NTB bisa tumbuh lebih cepat karena potensi sumberdaya alam yang melimpah. Pembangunan Industri berbasis kawasan diperlukan untuk dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam. NTB Industrial Park merupakan kawasan industri yang terintegrasi dengan mengoptimalkan potensi kewilayahan. NTB Industrial Park terdiri dari 3 (sektor) fokus utama dengan sebagai berikut: 1)Kawasan Industri Tumpak; 2) Kawasan Mini Smelter Sekotong; dan 3) Mahadesa TDC. Kawasan Industri Tumpak merupakan kawasan Industri Halal (KIH) di wilayah Rembitan, Lombok Tengah yang didesain dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sebagai bentuk dukungan pengembangan industri wisata. KIH tumpak akan berfokus pada industri pengolahan pangan yang dihasilkan daerah lingkakr KEK Mandalika. Selanjutnya, Kawasan Mini Smelter Sekotong adalah satu kawasan terpadu dan terintegrasi untuk pertambangan rakyat dan industri turunannya. Proyek strategis ini bertujuan agar penambang rakyat yang saat ini sedang melakukan eksplorasi maupun yang akan melakukan aman dalam hal kesehatan, keselamatan dan lingkungan. Dengan penerapan prinsip good mining practices, diharapkan mampu mengakselerasi kesejahteraan masyarakat lokal, tidak hanya melalui aktivitas penambangan, namun juga melalui kegiatan industri turunan dari hasil pemurnian konsentrat. Mini smelter ini juga bertujuan untuk melakukan pengelolaan dan revitalisasi sedimen residu yang ramah lingkungan agar lebih efektif, efisien dan optimal serta memiliki nilai tambah bagi masyarakat dan pemerintah. Kawasan terakhir, Mahadesa TDC (Trade & Distribution Center) merupakan Pusat Perdagangan dan Distribusi di wilayah Desa yang berfungsi sebagai Distributor untuk seluruh produk-produk yang dimiliki oleh Mahadesa TDC dari berbagai macam pabrikan di Indonesia. TDC Desa mengelola dan mensupply kebutuhan barang dan jasa market Desa serta berfungsi sebagai pintu masuk bagi produk lokal yang akan dipasarkan di seluruh jaringan market yang dibangun dari infrastruktur ekonomi tersebut. Total Rencana Anggaran Biaya ketiga kawasan tersebut adalah Rp 500,000,000,000. Anggaran tersebut diperuntukan untuk tahapan persiapan, pembangunan infrastruktur, pengelolaan dan operasional kawasan. Industrialisasi adalah salah satu cara memperbaiki masa depan NTB yang lebih cerah karena industrialisasi bermanfaat meningkatkan pendapatan daerah, standar hidup yang lebih tinggi, stabilitas ekonomi, peningkatan neraca pembayaran, menstimulasi kemajuan sektor lain, peningkatan peluang kerja, dan menambah spesialisasi pekerja lebih besar.

Pembangunan Kota Kreatif Berbudaya dan Kota Pusaka, yang berlokasi di Kota Bima dan Kabupaten Sumbawa. Mengusung konsep membangun kota yang nyaman bagi warga

dan berkelanjutan. Juga membangun kota yang tenteram, aman dengan berbasis budaya lokal. Sangat potensial, karena sejarah panjang kesultanan yang masih eksisting hingga saat ini di kedua wilayah tersebut. Proyek akselesari yang juga diajukan ada di sektor kesehatan. Jauhnya jarak, minimnya jumlah ketersediaan tempat tidur dibandingkan jumlah pasien, dan masih kurangnya rumah sakit yang dapat memberikan pelayanan sub spesialis, maka perlu adanya pemabngunan Rumah Sakit kelas B di Pulau Sumbawa di Wilayah Bima. Berikut data terkait empat proyek akselerasi tersebut.

Tabel 6- 5 Proyek Akselerasi Infrasturktur yang Memungkinkan Untuk Dikerjasamakan (KPBU)

PROYEK AKSELERASI	ANGGARAN
PEMBANGUNAN KOTA KREATIF BERBUDAYA	4,000,000,000
PENGEMBANGAN AGROWISATA DAN CAGAR BIOSFER DUNIA "SAMOTA"	5,500,000,000
NTB INDUSTRIAL PARK	5,000,000,000
HOLDING RUMAH SAKIT NTB	5,500,000,000
TOTAL	2,000,000,000,000

Sumber : Bappeda NTB, 2022

6.5 Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari Mitra Pembangunan.

Gerakan multi pihak adalah kunci keberhasilan dalam usaha mempercepat pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara. Gerakan ini berupaya membangun sinergi melalui pendekatan multi sektor yang didukung dengan integrasi program dan kegiatan yang bersifat lintas sektor. Salah satunya dengan mitra pembangunan. Bergerak dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, lingkungan, dan lain-lain. Peran mitra pembangunan sangat krusial dalam pembangunan di Nusa Tenggara Barat. Berikut disajikan data program, lokasi, dan sumber dana dari berbagai mitra pembangunan yang bergerak di Nusa Tenggara Barat dalam rentang waktu 2021 hingga 2022;

Tabel 6- 6 Data Program, Lokasi, Dan Sumber Dana Dari Berbagai Mitra Pembangunan Yang Bergerak di Nusa Tenggara Barat

Program								Lokasi	Jumlah Dana
Ekonomi	Sosial Budaya	Kesehatan	Bantuan Langsung	Kelembagaan	Lingkungan	Pendidikan	Hukum		
GEMA ALAM NTB									
Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin	Indonesian Women In Leadership				Perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam			Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Utara	2,400,000,000
INSPIRASI NTB									
		ELIMINASI TB						Kab. Lombok Barat, Kota Mataram	449,776,966
ISLAMIC RELIEF INDONESIA									
Alternative Livelihood for Orphans (ALO)	Prosperous Community through Social Enterprise (PROSCSE)		Ramadan Package 2021	One to One Sponsorship Program (OTOSP)	Building Community Resilience Against Climate Change			Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Utara, Kab. Lombok Timur, Kota Bima, Kab.Bima, Kab.Dompu,	39,319,632,043
			Eid al Fitr Gift 2021	Fostering Multistakeholder Alliance For Pro-Poor And Gender Sensitive Low Carbon Development And Climate Resilience – IR CANADA	Climate Change Adaptation Phase 2				

Program								Lokasi	Jumlah Dana
Ekonomi	Sosial Budaya	Kesehatan	Bantuan Langsung	Kelembagaan	Lingkungan	Pendidikan	Hukum		
			Qurbany Program 2021						
			Hunger Prevention for COVID19 affected Poor Population						
JONI MITRA 2021									
		penguatan Kapasitas Pokja PPAS dan PKP untuk pencapaian akses sanitasi yang layak dan aman.			pendampingan pengelolaan sampah di destinasi wisata Bahari Selong Belanak -KEK Mandalika			Provinsi, Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa Barat, Kab.Lombok Tengah, Kab.Dompu, Kab. Sumbawa Barat, Kab.Lombok Utara	11,400,600,003
		Case Studi GESI WASH di tempat kerja dan masyarakat lokasi destinasi wisata KEK Mandalika			Penyusunan Roadmap FPRB				
		Penguatan Kapasitas Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota untuk peningkatan akses			Destana dalam menyikapi bencana non alam				

Program								Lokasi	Jumlah Dana
Ekonomi	Sosial Budaya	Kesehatan	Bantuan Langsung	Kelembagaan	Lingkungan	Pendidikan	Hukum		
		sanitasi layak dan aman							
LBH APIK									
	Program Konsorsium ADARA NTB (fasilitasi PERDES Pencegahan Perkawinan anak di 6 Desa			Kerjasama dengan lembaga layanan untuk mempermudah system rujukan dalam penanganan kasus seperti (UPTD PPA, Peksos Dinas Sosial, Paramita RPTC serta dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak)			Penanganan kasus secara litigasi dan non litigasi dengan pendekatan BHGS	Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur	2,450,000,003
				Membentuk posko pengaduan			Membentuk paralegal baru dan memberikan pelatihan keparalegalan untuk 9 desa		

Program								Lokasi	Jumlah Dana
Ekonomi	Sosial Budaya	Kesehatan	Bantuan Langsung	Kelembagaan	Lingkungan	Pendidikan	Hukum		
							Pelatihan anggaran responsif gender bagi perangkat desa, pelatihan paralegal, advokasi		
							Bantuan Hukum Cuma-cuma bagi perempuan miskin		
LONTAR NTB									
	Institusi Sosial: Perannya Dalam Pencegahan Perkawinan Usia Anak		Mitra Program Hunger Prevention for Covid 19 Affected Poor Population	Mitra Risk Communication and Community Engagemen				Kab. Lombok Barat, Kota Mataram	71,000,000
LPA NTB									
	Penguatan Lingkungan Aman dan Ramah Anak			Pelembagaan Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa			Penerapan Restoratif Justice dalam Penyelesaian Sengketa	10 Kabupaten / Kota se NTB	2,520,000,000

Program								Lokasi	Jumlah Dana
Ekonomi	Sosial Budaya	Kesehatan	Bantuan Langsung	Kelembagaan	Lingkungan	Pendidikan	Hukum		
							Berbasis Masyarakat		
	Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak						Pendampingan Hukum dan Psikologi bagi Anak Berhadapan dengan Hukum		
							Penjangkauan dan penanganan kasus tindak kekerasan terhadap anak		
							Pendampingan Hukum dan Psikologi gratis bagi Anak Berhadapan dengan Hukum		
LPSDM NTB									

Program								Lokasi	Jumlah Dana
Ekonomi	Sosial Budaya	Kesehatan	Bantuan Langsung	Kelembagaan	Lingkungan	Pendidikan	Hukum		
Penguatan kapasitas melalui Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan Reponsif Gender dan Penguatan Kewirausahaan Perempuan Berperspektif gender	Program ACTION (Active Citizens Building Solidarity and Resitience in Response to COVID-19)	Program AIPTIS.		Program ToGETHER(Toward Greater Effectiveness and Timeline in Humanitarian Emergency Respons	Program Adaptasi Perubahan Iklim	Sekolah Perempuan		Provinsi, Kab.Lombok Timur, Kab.Lombok Utara, Kab.Lombok Timur,	8,633,939,552
PKBI NTB									
	Pemberdayaan remaja dalam pengambilan keputusan proses dan untuk meningkatkan dan memperkuat RCCE untuk COVID-19 respon di NTB	Program Eliminasi TB		Responding with Essential SRHR Provision and New Delivery Mechanisms (RESPOND)				Kota Mataram, Kota Bima, Kabupaten Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Provinsi,	6,046,880,462
RUTGERS INDONAESIA									
	Program Power to Youth							Kabupaten Lombok Timur, Kab.Lombok Tengah	1,786,358,000
SANTAI NTB									

Program								Lokasi	Jumlah Dana
Ekonomi	Sosial Budaya	Kesehatan	Bantuan Langsung	Kelembagaan	Lingkungan	Pendidikan	Hukum		
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Perkawinan Anak						Perlindungan Anak Pekerja Migran (APM)	Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Utara, Kab.Lombok Tengah, Kab.Lombok Timur,	8,303,739,490
	Penanggulangan Pekerja Anak di Sektor Pertanian								
	Penanggulangan pekerja anak di Sektor Pertanian								
SOBAT NTB									
		Malnutrisi Anak Usia Dini (Stunting)						Provinsi dan seluruh Kab/Kota	596,078,800
		Tata Laksana Gizi Kurang dan Gizi Buruk (Wasting)							
		Gizi Ibu Hamil dan Remaja							
		Gizi Bencana							
UNDP NTB / PETRA									

Program								Lokasi	Jumlah Dana
Ekonomi	Sosial Budaya	Kesehatan	Bantuan Langsung	Kelembagaan	Lingkungan	Pendidikan	Hukum		
Pembangunan 8 Infrastruktur Ekonomi Masyarakat	Pengembangan Penghidupan Masyarakat	Pembangunan 9 Fasilitas Kesehatan		Pembiayaan Innovative bagi UKM	Pengelolaan Tambang Emas Skala Kecil Ramah Lingkungan	Pembangunan 4 Fasilitas Pendidikan		Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Utara, Provinsi,	89,748,368,968
		Survey RT terdampak COVID-19		JITUPASNA dan Penyusunan Dok R3P COVID-19	Pengelolaan Sampah Terpadu				
TOTAL									173,726,374,287

Sumber : kuesioner yang dibuat dan disebarluaskan oleh Bappeda Provinsi NTB kepada para mitra pembangunan dalam rentang waktu 2021 hingga 2022.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Lebih lanjut data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (*early warning*) terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir tahun perencanaan. Berdasarkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019-2023 telah ditetapkan sebanyak 33 Indikator Kinerja Utama yang menjadi acuan dalam menetapkan target capaian kinerja dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2023. Adapun yang menjadi target kinerja utama pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Utama Provinsi NTB 2019-2023

No	Indikator	Kondisi 2019	Target Tahun			
			2020	2021	2022	2023
Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah						
1	Indeks Kapasitas Daerah	0,57	0,59	0,61	0,63	0,65
2	Persentase Kemantapan jalan	80,28	80,76	83,95	85,36	86,6
3	Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	50,76	48,11	50,04	52,17	54,50
4	Persentase konektivitas transportasi publik	78,64	79,43	81,71	86,86	89,14
Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi						
5	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	34,77	34,06	35,41	36,97	38,65
7	Nilai SAKIP	BB	BB (70,05-73,00)	BB (73,01 - 76,00)	BB (76,01 - 80,00)	A (80,01 - 90,00)
8	Indeks Profesionalisme ASN	0,54	0,66	0,68	0,70	0,72
9	Indeks Pelayanan Publik	3,63	3,93	4,23	4,53	4,55
Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah						
10	Angka Harapan Hidup	66,28	66,48	66,78	67,08	67,48
11	Persentase Balita Stunting	25,50	31,99	31,49	30,99	30,49
12	Harapan Lama Sekolah	13,57	13,62	13,68	13,73	13,79
13	Rata rata Lama Sekolah	7,27	6,98	7,01	7,04	7,07

No	Indikator	Kondisi 2019	Target Tahun			
			2020	2021	2022	2023
Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan						
14	Indeks Kualitas Air	40,23	42,73	42,83	42,93	43,03
15	Indeks Kualitas Udara	87,40	87,50	87,53	87,56	87,59
16	Indeks Kualitas Air Laut	-	69,69	70,29	70,89	71,48
17	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	65,67	66,70	67,70	68,70	69,70
18	Persentase Penanganan Sampah	34,91	40,00	50,00	60,00	70,00
19	Persentase Pengurangan Sampah	6,80	15,00	20,00	25,00	30,00
Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi						
20	Nilai Realisasi Investasi	10.024	11.574	13.362	15.428	17.814
21	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	23,06	23,29	23,52	23,71	23,88
22	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
23	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	85,30	85,80	86,20	86,70	87,20
24	Cakupan Air Minum	72,59	75,74	76,48	78,45	80,59
25	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	78,80	79,36	80,10	80,91	82,46
26	Rasio Elektrifikasi	99,55	99,66	99,77	99,88	99,99
27	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	56,35	59,50	62,65	65,80	68,95
28	Inflasi	1,87	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0
29	Pengeluaran per kapita	10.640,00	10.951,94	11.273,02	11.603,52	11.943,70
30	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	117,21	116,04	122,71	129,78	137,24
31	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan	164,96	160,02	166,39	173,02	179,91
32	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,42	3,35	3,30	3,19	3,17
Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkeadilan dan penegakan hukum yang berkeadilan						
33	Persentase penurunan konflik sosial	46,15	14,29	16,67	20,00	0,00
34	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	4,88	5,13	5,41	5,72	6,07
35	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00
36	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	18,60	17,93	18,60	19,27	20,47
37	Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	40,00	40,00	60,00	80,00	100,00

Sumber: Perubahan RPJMD Prov. NTB 2019-2023

Selain Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga digunakan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebanyak 105. Adapun indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang penting dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

**Tabel 7. 2 Indikator Kinerja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2019-2023**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1	Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pertambangan Bijih Logam	%	1,5-2,5	2,5-3,5	3,5-4,5	4,5-5,5	4,5-5,5
2	Inflasi	%	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0
3	Tingkat Kemiskinan	%	13,88	13,42	12,77	11,92	11,92
4	Gini Ratio	Point	0,379	0,353	0,329	0,297	0,297
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	68,44	68,84	69,39	70,09	70,09
B	ASPEK DAYA SAING DAERAH						
6	Indeks Kriminalitas	Point	15,65	14,85	14,05	13,25	13,25
7	Indeks Aksesibilitas	Point	77,14	78,56	79,84	81,17	81,17
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Point	67,74	67,98	68,22	68,46	68,46
9	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana	%	88,45	89,03	89,69	90,31	90,31
10	Indeks Risiko Bencana	Point	126,91	123,11	119,41	115,83	115,83
11	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	B	B	BB	BB	BB
12	Indeks Pelayanan Publik	Point	3,93	4,23	4,53	4,55	4,55
C	ASPEK PELAYANAN UMUM						
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR						
1.01	Pendidikan						
13	Indeks Pendidikan	Point	62,03	62,39	62,74	63,1	63,1
14	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,62	13,68	13,73	13,79	13,79
15	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,98	7,01	7,04	7,07	7,07
1.02	Kesehatan						
16	Indeks Kesehatan	Point	71,51	71,97	72,43	73,05	73,05
17	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	%	75	77	80	83	83
18	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	79,36	80,1	80,91	82,46	82,46

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	
19	Angka Harapan Hidup	Tahun	66,48	66,78	67,08	67,48	67,48
20	Persentase Balita <i>Stunting</i>	%	31,99	31,49	30,99	30,49	30,49
21	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan	%	100	100	100	100	100
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
22	Persentase Kemantapan jalan	%	80,76	83,95	85,36	86,6	86,6
23	Cakupan Air Minum	%	75,74	76,48	78,45	80,59	80,59
24	Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	48,11	50,04	52,17	54,5	54,5
25	Persentase Penyusunan Regulasi Rencana Tata Ruang (RTR)	%	0	9,09	18,18	27,2	27,2
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman						
26	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	59,5	62,65	65,8	68,95	68,95
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat						
27	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	5,13	5,41	5,72	6,07	6,07
28	Tingkat Penanganan Pelanggaran Gangguan Trantibmas	%	100	100	100	100	100
29	Tingkat Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	100	100	100	100	100
30	Cakupan Desa Tangguh Bencana (434 Desa Rawan Bencana)	%	16,36	20,97	25,58	30,18	30,18
31	Indeks Kapasitas Daerah	%	0,59	0,61	0,63	0,65	0,65
1.06	Sosial						
32	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial	%	100	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	
33	Persentase PMKS yang tertangani	%	4,64	4,87	5,12	5,37	5,37
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR						
2.01	Tenaga Kerja						
34	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,35	3,3	3,19	3,17	3,17
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
35	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	57,81	59,81	61,16	61,4	61,4
36	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Point	90,43	90,46	90,49	90,52	90,52
37	Rata-rata Usia Perkawinan Pertama Perempuan	Tahun	20,5	20,7	20,9	21	21
38	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	17,93	18,6	19,27	20,47	20,47
39	Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	%	40	60	80	100	100
2.03	Pangan						
40	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	85,8	86,2	86,7	87,2	87,2
2.04	Lingkungan Hidup						
41	Indeks Kualitas Air	Point	42,73	42,83	42,93	43,03	43,03
42	Indeks Kualitas Udara	Point	87,5	87,53	87,56	87,59	87,59
43	Indeks Kualitas Air Laut	Point	69,69	70,29	70,89	71,48	71,48
44	Neraca Pengelolaan Sampah (%)	%	55	70	85	100	100
45	Persentase Penanganan Sampah	%	40	50	60	70	70
46	Persentase Pengurangan Sampah	%	15	20	25	30	30
2.05	Pertanahan						
47	Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	
2.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
48	Rasio Penduduk BerKTP Persatuan Penduduk	rasio	0,82	0,84	0,86	0,88	0,88
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa						
49	Cakupan desa pesisir, dan lingkaran hutan yang diberdayakan	%	26,74	29,01	31,28	33,69	33,69
50	Persentase Desa dengan status berkembang, maju, dan mandiri	%	84	86	88	91	91
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
51	Pertumbuhan Penduduk	%	1,08	1,04	1	0,95	0,95
2.09	Perhubungan						
52	Persentase konektivitas transportasi publik	%	79,43	81,71	86,86	89,14	89,14
2.10	Komunikasi dan Informatika						
53	Kualifikasi Layanan Perangkat Daerah	Kualifikasi	Interaktif	Interaktif	Transaksi	Kolaborasi	Kolaborasi
54	Persentase Perangkat Daerah yang Informatif	%	15	50	65	75	75
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
55	Persentase Koperasi Aktif	%	63	65	67	70	70
2.12	Penanaman Modal						
56	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	11.574	13.362	15.428	17.814	68.202
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga						
57	Prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional	Medali	30	35	40	45	210
58	Prestasi Pemuda di tingkat nasional dan internasional	orang	15	15	15	15	15
59	Proporsi wirausaha muda	%	68,07	68,18	68,28	68,39	68,39
2.14	Statistik						
60	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Data yang Berkualitas	%	15	30	50	65	65

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	
2.15	Persandian						
61	Indeks Kematangan Keamanan Informasi	Level	II	II+	III	III+	III+
2.16	Kebudayaan						
62	Cakupan Cagar Budaya yang direvitalisasi	%	20	24,35	28,7	33,04	33,04
2.17	Perpustakaan						
63	Cakupan Komunitas Literasi yang terbina (59 Komunitas)	%	100	100	100	100	100
64	Persentase Digitalisasi Koleksi Deposit (7527 Judul)	%	27,9	31,89	35,87	39,86	39,86
2.18	Kearsipan						
65	Persentase Arsip yang Terselamatkan	%	50	66,67	83,33	100	100
3	URUSAN PILIHAN						
3.01	Kelautan dan Perikanan						
66	Kontribusi sektor Perikanan terhadap PDRB	%	4,76	4,75	4,75	4,74	4,74
67	Produksi Perikanan	Ton	1.405.469	1.436.947	1.468.104	1.499.957	1.499.957
68	Nilai Tukar Nelayan	%	>110	>110	>110	>110	>110
3.02	Pariwisata						
69	Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	%	-0,1	1,5	3	4,5	4,5
70	Persentase Desa Wisata yang dikembangkan	%	40	60	80	100	100
71	Rata-rata Lama Menginap	hari	2,95	3,1	3,25	3,35	3,35
72	Angka kunjungan wisatawan	orang	4.400.000	4.650.000	4.850.000	5.200.000	23.100.000
73	Persentase Geosites yang Tertata	%	12,5	25	37,5	50	50

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	
74	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Rp. Milyar	116,04	122,71	129,78	137,24	137,24
3.03	Pertanian						
75	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	23,29	23,52	23,71	23,88	23,88
76	Nilai Tukar Petani	Point	>105	>105	>105	>105	>105
3.04	Kehutanan						
77	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	66,7	67,7	68,7	69,7	69,7
78	Cakupan Luas Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Lainnya	%	5,08	10,08	15,08	20,08	20,08
3.05	Energi dan Sumberdaya Mineral						
79	Rasio Elektrifikasi	%	99,66	99,77	99,88	99,99	99,99
3.06	Perdagangan						
80	Indeks Daya Beli	Point	72,91	73,8	74,68	75,56	75,56
81	Pengeluaran per kapita	Rp.000	10.952	11.273	11.604	11.944	11.944
3.07	Perindustrian						
82	Pertumbuhan Industri	%	5,5	6,5	7,5	9	9
83	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan	Rp. Milyar	160,02	166,39	173,02	179,91	179,91
84	Persentase Industri kecil yang meningkat menjadi industri menengah	%	2,2	2,69	3,14	3,55	3,55
3.08	Transmigrasi						
85	Cakupan Penempatan Transmigran	%	85	90	95	100	100
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
4.01	Administrasi Pemerintahan						
86	Ranking Nasional LPPD	Ranking	4	7	5	3	3,0747

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	
87	Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berkualitas	%	100	100	100	100	100
88	Persentase Fasilitasi Pelayanan Keagamaan	%	100	100	100	100	100
89	Persentase unit pelayan publik perangkat daerah yang menerapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	%	28	28	34	45	45
90	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	Level	2	3	3	4	4
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
5.01	Perencanaan						
91	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan	%	100	100	100	100	100
5.02	Keuangan						
92	Opini BPK	Status	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
93	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Point	0,48	0,5	0,52	0,54	0,54
94	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	34,06	35,41	36,97	38,65	38,65
5.03	Kepegawaian						
95	Indeks Profesionalisme ASN	Point	0,66	0,68	0,7	0,72	0,72
5.04	Pendidikan dan Pelatihan						
96	Indeks Profesionalisme ASN Dimensi Kompetensi	Point	0,24	0,25	0,27	0,28	0,28
5.05	Penelitian dan Pengembangan						
97	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (lokus NTB)	%	21	24	27	30	30
5.06	Penghubung						
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	
6.01	Pengawasan						
98	Nilai SAKIP	Kategori	BB (70,05-73,00)	BB (73,01 - 76,00)	BB (76,01 - 80,00)	A (80,01 - 90,00)	A (80,01 - 90,00)
7	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						
7.01	Kesatuan Bangsa dan Politik						
99	Cakupan mediator bale mediasi yang dilatih	%	7,05	4,46	4,67	4,89	4,89
100	Partisipasi Politik Masyarakat	%	82,8	83,74	84,57	85,2	85,2
101	Cakupan Komunitas "Sekolah Perjumpaan" yang terbentuk dalam rangka Pendidikan Karakter	%	20	30	40	50	50
102	Persentase penurunan konflik sosial	%	14,29	16,67	20	0	0
103	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	0,7	0,8	0,9	1	1

Sumber: Perubahan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019 – 2023

BAB VIII PENUTUP

Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran”, mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu Organisasi Perangkat Daerah dan antar Organisasi Perangkat Daerah, tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang.

Perencanaan Tahun 2023 merupakan tahapan yang sangat strategis dimana merupakan perencanaan pembangunan tahun terakhir dari pelaksanaan Visi Misi Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 5 (lima) tahun periode 2019-2023. Untuk mewujudkan keterpaduan, sinkronisasi pelaksanaan kegiatan dan penjangkauan aspirasi masyarakat, maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 ini dilaksanakan melalui proses teknokratik, politik dan partisipatif melalui musyawarah antar pelaku pembangunan dalam bentuk forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang secara berjenjang.

Dalam pelaksanaannya, RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2023 memerlukan kaidah dan prinsip pelaksanaan yang harus menjadi komitmen bagi seluruh pemangku kebijakan yang berperan baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kaidah dan prinsip tersebut adalah :

1. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui forum penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat.
2. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan.
3. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat serta seluruh pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan dengan sebaik-baiknya.
4. Dokumen RKPD digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD. Untuk itu, RKPD dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Dalam upaya sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan prioritas dan sasaran pembangunan yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD/APBN dan sumber lainnya, setiap Perangkat

Daerah harus memuat Rencana Kerja (Renja) yang dapat menggambarkan sinergitas program/kegiatan sesuai dengan sumber anggaran.

6. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
7. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
8. Pada akhir tahun anggaran 2022, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan Evaluasi Kinerja pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan Tahun 2022.
9. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi dari Kepala Perangkat Daerah, dan hasil evaluasi ini menjadi bahan bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
10. Seluruh Perangkat Daerah melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan proporsional sehingga semua program pembangunan dapat berjalan secara efisien, efektif, akuntabel dan tepat sasaran.

Dengan kaidah dan prinsip seperti disebutkan di atas, diharapkan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat berjalan dengan baik, lancar dan transparan. Selanjutnya, tujuan inti pembangunan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan/merata dapat terwujud secara efisien dan efektif.

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						1,874,873,327,553						1,522,777,687,869				
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip	Nilai		Nilai	BB Nilai	1,287,466,656,443						BB Nilai	938,367,568,421			
1	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	1,198,642,748						10 Dokumen	1,246,588,455			
1	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	438,971,661	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Dinas Dikbud Provinsi NTB	2 Dokumen	456,530,527	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	76,808,789	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Dinas Dikbud Provinsi NTB	1 Dokumen	79,881,140	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	76,808,789	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Dinas Dikbud Provinsi NTB	1 Dokumen	79,881,140	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	86,228,632	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Dinas Dikbud Provinsi NTB	1 Dokumen	89,677,777	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	76,808,789	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Dinas Dikbud Provinsi NTB	1 Dokumen	79,881,140	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	147,664,761	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Dinas Dikbud Provinsi NTB	2 Laporan	153,571,351	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	295,351,327	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Dinas Dikbud Provinsi NTB	2 Laporan	307,165,380	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	31 Dokumen	1,275,135,403,819						31 Dokumen	925,545,590,738			
1	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				99722 Orang/ Bulan	1,273,368,669,733	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Dinas Dikbud Provinsi NTB	99722 Orang/ Bulan	923,707,727,287	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1,594,715,312	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Dinas Dikbud Provinsi NTB	1 Dokumen	1,658,503,925	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1500 Dokumen	23,050,923	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Dinas Dikbud Provinsi NTB	1500 Dokumen	23,972,959	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Dinas Dikbud Provinsi NTB	1 Dokumen	1,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	29,388,492	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Dinas Dikbud Provinsi NTB	1 Laporan	30,564,033	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	67,088,143	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Dinas Dikbud Provinsi NTB	1 Dokumen	69,771,669	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				4 Laporan	26,893,870	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Dinas Dikbud Provinsi NTB	4 Laporan	27,969,624	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	24,597,346	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Dinas Dikbud Provinsi NTB	1 Dokumen	25,581,241	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	546 Dokumen	651,821,409						546 Dokumen	677,894,264	
1 01 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	69,731,260	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Dinas Dikbud Provinsi NTB	1 Dokumen	72,520,510	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	233,975,817	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Dinas Dikbud Provinsi NTB	2 Laporan	243,334,849	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	348,114,332	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Dinas Dikbud Provinsi NTB	1 Laporan	362,038,905	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Pendapatan Daerah yang disusun	Dokumen		Dokumen	492 Dokumen	81,479,242						492 Dokumen	84,738,413	
1 01 01 1.04 05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				1 Laporan	61,041,454	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sumber PAD lingkup Dinas Dikbud Provinsi NTB	1 Laporan	63,483,113	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	20,437,788	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sumber PAD lingkup Dinas Dikbud Provinsi NTB	1 Laporan	21,255,300	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen lapoaran pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	1,414,088,949						5 Dokumen	1,470,652,506	
1 01 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	40,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pegawai ASN lingkup Dinas Dikbud Provinsi NTB	1 Unit	41,600,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	362,046,858	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pegawai ASN lingkup Dinas Dikbud Provinsi NTB	1 Dokumen	376,528,732	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	135,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pegawai ASN lingkup Dinas Dikbud Provinsi NTB	1 Dokumen	140,400,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	78,989,308	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pegawai ASN lingkup Dinas Dikbud Provinsi NTB	1 Dokumen	82,148,880	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				50 Orang	532,636,823	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pegawai ASN lingkup Dlnas Dikbud Provinsi NTB	50 Orang	553,942,296	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				813 Orang	265,415,960	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pegawai ASN lingkup Dinas Dikbud Provinsi NTB	813 Orang	276,032,598	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum	Paket		Paket	6 Paket	2,438,875,323						6 Paket	2,536,430,333	
1 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	12,209,163	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Dlnas Dikbud Provinsi NTB	10 Paket	12,697,529	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				18 Paket	35,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Dlnas Dikbud Provinsi NTB	18 Paket	36,400,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				13 Paket	23,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Dlnas Dikbud Provinsi NTB	13 Paket	23,920,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	1,190,738,236	Semua Kab/Kota, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Dlnas Dikbud Provinsi NTB	2 Paket	1,238,367,765	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kecamatan, Semua Kelurahan		Berkualitas Dan Berdaya Saing					
1 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	97,689,441	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Dlnas Dikbud Provinsi NTB	2 Paket	101,597,018	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				336 Dokumen	149,540,007	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Dlnas Dikbud Provinsi NTB	336 Dokumen	155,521,607	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				10 Paket	71,553,737	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Dlnas Dikbud Provinsi NTB	10 Paket	74,415,887	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	151,764,137	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Dlnas Dikbud Provinsi NTB	1 Laporan	157,834,702	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	578,913,587	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Dlnas Dikbud Provinsi NTB	2 Laporan	602,070,130	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				250 Dokumen	43,467,015	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Dlnas Dikbud Provinsi NTB	250 Dokumen	45,205,695	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	85,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Dlnas Dikbud Provinsi NTB	1 Dokumen	88,400,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diterima/ Diadakan	unit		unit	20 unit	1,927,273,426						20 unit	2,004,364,364	
1 01 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	372,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Dinas Dikbud PProvinsi NTB	1 Unit	386,880,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	372,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Dinas Dikbud PProvinsi NTB	1 Unit	386,880,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Paket	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Dinas Dikbud PProvinsi NTB	50 Paket	52,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	248,273,426	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Dinas Dikbud PProvinsi NTB	20 Unit	258,204,364	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				3 Unit	135,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Dinas Dikbud PProvinsi NTB	3 Unit	140,400,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	350,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Dinas Dikbud PProvinsi NTB	1 Unit	364,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Dinas Dikbud PProvinsi NTB	1 Unit	208,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Dinas Dikbud PProvinsi NTB	1 Unit	208,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pelaksanaan jasa Layanan Administrasi Umum OPD	Laporan		Laporan	4 Laporan	2,531,344,147						4 Laporan	2,632,597,914	
1 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	35,264,010	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Dinas Dikbud Provinsi NTB	12 Laporan	36,674,571	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				25 Laporan	387,517,513	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Dinas Dikbud Provinsi NTB	25 Laporan	403,018,214	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Laporan	45,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Dinas Dikbud Provinsi NTB	6 Laporan	46,800,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2,063,562,624	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Dinas Dikbud Provinsi NTB	1 Laporan	2,146,105,129	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	unit		unit	102 unit	1,887,727,380						102 unit	1,960,711,434	
1 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				40 Unit	734,004,058	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasarana yang ada di lingkup Dinas Dikbud PProvinsi NTB	40 Unit	763,364,220	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				10 Unit	29,000,000	Semua Kab/Kota,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya	Meningkatkan kualitas pendidikan	Sarana dan Prasarana yang	10 Unit	30,160,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya						Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SDM (PD-5)	ada di lingkup Dinas Dikbud PProvinsi NTB			
1 01 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				50 Unit	23,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasarana yang ada di lingkup Dinas Dikbud PProvinsi NTB	50 Unit	23,920,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 60 Unit	63,126,031	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasarana yang ada di lingkup Dinas Dikbud PProvinsi NTB	0 Unit 60 Unit	63,126,031	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	55,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasarana yang ada di lingkup Dinas Dikbud PProvinsi NTB	1 Unit	57,200,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	418,051,921	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasarana yang ada di lingkup Dinas Dikbud PProvinsi NTB	2 Unit	434,773,998	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	300,545,370	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasarana yang ada di lingkup Dinas Dikbud PProvinsi NTB	2 Unit	312,567,185	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	265,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasarana yang ada di lingkup Dinas Dikbud PProvinsi NTB	1 Unit	275,600,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	200,000,000						1 Dokumen	208,000,000	
1 01 01 1.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				13 Unit Kerja	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	BLUD lingkup Dinas Dikbud Provinsi NTB	13 Unit Kerja	208,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah	% % % % Rasio Rasio Rasio		% % % % Rasio Rasio Rasio	70.60 % 98.02 % 100 % 95.28 % 1:10 Rasio 1:1 Rasio 1:8 Rasio	493,972,237,945						70.60 % 98.02 % 100 % 95.28 % 1:10 Rasio 1:1 Rasio 1:8 Rasio	508,870,216,989	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Akreditasi SMA minimal B Persentase Angka Drop Out (DO) SMA Persentase Angka Melanjutkan SMA	% % %		% % %	77.61 % 0.24 % 70 %	202,738,505,818						77.61 % 0.24 % 70 %	211,627,815,402	
1 01 02 1.01 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				2 Ruang	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	2 Ruang	400,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				3 Ruang	615,840,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	3 Ruang	715,840,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 04	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun				2 Ruang	382,720,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	2 Ruang	482,720,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 05	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang Telah Dibangun				3 Ruang	432,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	3 Ruang	532,400,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Dibangun				5 Ruang	759,067,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	5 Ruang	759,067,200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun				5 Ruang	761,880,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	5 Ruang	761,880,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 08	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Ruang Laboratorium Bahasa yang Telah Dibangun				4 Ruang	625,693,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	4 Ruang	725,693,600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 09	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	Jumlah Ruang Laboratorium IPA yang Telah Dibangun				2 Ruang	643,970,398	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	2 Ruang	643,970,398	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				4 Ruang	744,539,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	4 Ruang	844,539,200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				3 Ruang	828,144,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	3 Ruang	861,269,760	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 12	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				1 Ruang	291,600,000	Semua Kab/Kota, Semua	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	1 Ruang	303,264,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kecamatan, Semua Kelurahan		Berdaya Saing					
1 01 02 1.01 13	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	269,438,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	1 Unit	280,215,936	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				3 Unit	453,380,531	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	3 Unit	553,380,531	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 15	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun				1 Unit	268,272,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	1 Unit	279,002,880	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 16	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	244,944,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	1 Unit	254,741,760	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 17	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	256,608,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	1 Unit	266,872,320	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 18	Pembangunan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Dibangun				1 Ruang	233,280,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	1 Ruang	242,611,200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	4 Ruang	600,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	306,368,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	2 Ruang	406,368,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	323,864,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	2 Ruang	423,864,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	311,033,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	2 Ruang	411,033,600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang 6 Ruang	1,335,528,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	0 Ruang 6 Ruang	1,388,949,120	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 1.01 24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang 2 Ruang	335,528,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	0 Ruang 2 Ruang	335,528,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	168,078,240	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	1 Ruang	174,801,369	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 26	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA	Jumlah Laboratorium IPA yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	186,740,640	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	1 Ruang	194,210,265	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 27	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	184,407,840	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	1 Ruang	191,784,153	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	232,188,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	1 Ruang	232,188,800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 29	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	204,469,920	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	1 Ruang	212,648,716	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 30	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi				1 Unit	250,776,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	1 Unit	260,807,040	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi				2 Unit	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	2 Unit	350,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 32	Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi				1 Unit	227,716,272	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	1 Unit	236,824,922	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 33	Rehabilitasi Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi				1 Unit	158,187,168	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	1 Unit	164,514,654	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 34	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi				1 Unit	169,396,272	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	1 Unit	176,172,122	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 35	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	146,149,920	Semua Kab/Kota, Semua	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	1 Ruang	151,995,917	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kecamatan, Semua Kelurahan		Berdaya Saing					
1 01 02 1.01 36	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				37 Paket	434,123,310	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	37 Paket	451,488,243	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 37	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				2 Paket	146,188,761	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	2 Paket	152,036,312	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	145,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	1 Paket	151,632,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				13507 Paket	1,105,108,446	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	13507 Paket	1,149,312,784	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 40	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia				1 Unit	408,240,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	1 Unit	424,569,600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 41	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				2 Paket	178,459,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	2 Paket	185,597,568	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 42	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				2 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	2 Unit	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 43	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				2 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	2 Unit	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 44	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	1 Unit	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				50 Peserta didik	583,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	50 Peserta didik	606,528,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 46	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				20 Paket	7,875,684,432	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	20 Paket	8,190,711,809	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 1.01 47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar dan Ujian				1 Satuan Pendidikan	139,968,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	1 Satuan Pendidikan	145,566,720	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Atas yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				1 Satuan Pendidikan	54,338,411	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	1 Satuan Pendidikan	56,511,947	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				2050 Peserta Didik	398,504,151	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	2050 Peserta Didik	414,444,317	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				100 Orang	177,292,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5) Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	100 Orang	187,292,800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				0 Orang 100 Orang	215,784,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	0 Orang 100 Orang	224,415,360	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				30 Satuan Pendidikan	181,958,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	30 Satuan Pendidikan	189,236,736	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS				344 Satuan Pendidikan	177,109,633,738	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	344 Satuan Pendidikan	184,194,019,088	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas				2 Dokumen	82,012,168	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	2 Dokumen	85,292,655	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Akreditasi SMK minimal B Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap	% % %		% % %	75 % 0.57 % 37 %	267,372,616,761						75 % 0.57 % 37 %	275,178,356,636	
1 01 02 1.02 02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				20 Ruang	4,056,267,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	20 Ruang	4,056,267,800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 1.02 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				0 Ruang 3 Ruang	540,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	0 Ruang 3 Ruang	561,600,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun				40 Ruang	50,636,669,922	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	40 Ruang	50,767,222,636	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 05	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				1 Ruang	291,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	1 Ruang	303,264,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 06	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	298,598,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	1 Ruang	310,542,336	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	283,026,960	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	1 Ruang	294,348,038	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 08	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				1 Ruang	282,268,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	1 Ruang	293,559,552	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 09	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	274,361,774	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	1 Unit	285,336,245	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	275,853,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	1 Unit	286,887,744	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 11	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun				1 Unit	283,026,960	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	1 Unit	294,348,038	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 12	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun				2 Unit	282,268,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	2 Unit	293,559,552	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 13	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	274,361,774	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	1 Unit	285,336,245	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 14	Pembangunan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Dibangun				1 Ruang	275,853,600	Semua Kab/Kota, Semua	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	1 Ruang	286,887,744	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kecamatan, Semua Kelurahan		Berdaya Saing					
1 01 02 1.02 15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi				100 Ruang	20,800,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	100 Ruang	20,800,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 16	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi				2 Ruang	282,268,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	2 Ruang	293,559,552	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 17	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi				2 Ruang	274,361,774	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	2 Ruang	285,336,245	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 18	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi				2 Ruang	275,853,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	2 Ruang	286,887,744	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 19	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi				2 Ruang	298,598,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	2 Ruang	310,542,336	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 20	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi				2 Ruang	283,026,960	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	2 Ruang	294,348,038	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 21	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi				2 Ruang	282,268,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	2 Ruang	293,559,552	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 22	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi				2 Unit	298,598,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	2 Unit	310,542,336	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi				2 Unit	283,026,960	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	2 Unit	294,348,038	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 24	Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi				2 Unit	274,361,774	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	2 Unit	285,336,245	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 25	Rehabilitasi Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi				3 Unit	275,853,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	3 Unit	286,887,744	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 1.02 26	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi				2 Unit	283,026,960	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	2 Unit	294,348,038	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 27	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Direhabilitasi				2 Ruang	282,268,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	2 Ruang	293,559,552	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 28	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				8 Paket	651,579,158	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	8 Paket	677,642,325	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 29	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				0 Paket	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	0 Paket	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 30	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	274,361,774	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	1 Paket	285,336,245	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				0 Paket	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	0 Paket	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 32	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia				1 Unit	379,080,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	1 Unit	394,243,200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 33	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	134,136,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	1 Paket	139,501,440	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 34	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				0 Unit	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	0 Unit	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				0 Unit	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	0 Unit	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 36	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				0 Unit	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	0 Unit	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				2 Peserta didik	179,625,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	2 Peserta didik	186,810,624	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 1.02 38	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				43 Paket	38,000,409,467	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	43 Paket	39,520,425,846	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar dan Ujian				1 Satuan Pendidikan	184,291,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	1 Satuan Pendidikan	191,662,848	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				2 Satuan Pendidikan	54,338,411	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	2 Satuan Pendidikan	56,511,947	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				1010 Peserta Didik	216,912,209	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	1010 Peserta Didik	225,588,697	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				100 Orang	75,499,583	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	100 Orang	78,519,567	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				0 Orang 100 Orang	207,436,570	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	0 Orang 100 Orang	215,734,033	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 44	Pembangunan Bengkel/Unit Produksi	Jumlah Bengkel/Unit Produksi yang Telah Dibangun				1 Unit	408,240,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	1 Unit	424,569,600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				9 Satuan Pendidikan	695,957,874	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	9 Satuan Pendidikan	723,796,189	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS				337 Satuan Pendidikan	143,582,617,251	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	337 Satuan Pendidikan	149,325,921,941	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan				2 Orang	80,458,446	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Provinsi NTB	2 Orang	83,676,784	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1 01 02 1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Akreditasi SLB minimal B	%		%	40 %	23,861,115,366						40 %	22,064,044,951		
1 01 02 1.03 01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				0 Unit	2,449,440,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	0 Unit	3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.03 02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah				1 Ruang	625,190,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	1 Ruang	650,198,016	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.03 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	497,504,592	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	1 Ruang	517,404,776	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.03 04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	274,360,608	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	1 Ruang	285,335,032	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.03 05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	273,520,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	1 Ruang	284,461,632	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.03 06	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				1 Ruang	251,009,280	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	1 Ruang	261,049,651	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.03 07	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	274,360,608	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	1 Unit	285,335,032	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.03 08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	227,471,328	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	1 Unit	236,570,181	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.03 09	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun				1 Unit	177,292,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	1 Unit	184,384,512	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.03 10	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	216,017,280	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	1 Unit	224,657,971	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.03 11	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	274,360,608	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	1 Unit	285,335,032	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 1.03 12	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				1 Ruang	273,520,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	1 Ruang	284,461,632	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 13	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Dibangun				1 Ruang	251,009,280	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	1 Ruang	261,049,651	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 14	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun				1 Ruang	274,360,608	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	1 Ruang	285,335,032	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 15	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun				1 Ruang	251,009,280	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	1 Ruang	261,049,651	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 16	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun				1 Ruang	274,360,608	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	1 Ruang	285,335,032	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 17	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun				1 Ruang	251,009,280	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	1 Ruang	261,049,651	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi				7 Ruang	2,043,882,720	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	7 Ruang	2,125,638,028	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 19	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	179,182,368	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	1 Ruang	186,349,663	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 20	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	212,868,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	1 Ruang	221,382,720	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 21	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	177,642,720	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	1 Ruang	184,748,429	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 22	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	179,182,368	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	1 Ruang	186,349,663	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 23	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi				1 Unit	212,868,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	1 Unit	221,382,720	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan		Berdaya Saing					
1 01 02 1.03 24	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi				1 Unit	196,247,033	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	1 Unit	204	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 25	Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi				1 Unit	184,874,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	1 Unit	192,269,376	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 26	Rehabilitasi Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi				1 Unit	216,063,936	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	1 Unit	224,706,493	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 27	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi				0 Unit	212,868,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	0 Unit	221,382,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 28	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	196,247,033	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	1 Ruang	204,096,915	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 29	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	184,874,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	1 Ruang	192,269,376	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 30	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	216,063,936	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	1 Ruang	224,706,493	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 31	Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	196,247,033	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	1 Ruang	204,096,915	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 32	Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	184,874,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	1 Ruang	192,269,376	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 33	Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	216,063,936	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	1 Ruang	224,706,493	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 34	Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	212,868,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	1 Ruang	221,382,720	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 1.03 35	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	106,142,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	1 Paket	110,388,096	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 36	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga yang Tersedia				0 Paket	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	0 Paket	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 37	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	104,976,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	1 Paket	109,175,040	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				0 Paket	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	0 Paket	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 39	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia				1 Unit	373,248,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	1 Unit	388,177,920	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 40	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	157,697,280	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	1 Paket	164,005,171	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 41	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				0 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	0 Unit	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 42	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				0 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	0 Unit	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 43	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	1 Unit	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				50 Peserta Didik	583,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	50 Peserta Didik	606,528,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 45	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				1 Paket	105,209,280	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	1 Paket	109,417,651	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				18 Satuan Pendidikan	114,307,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	18 Satuan Pendidikan	118,879,488	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan							
1 01 02 1.03 47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				18 Satuan Pendidikan	130,636,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	18 Satuan Pendidikan	135,862,272	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				200 Peserta Didik	116,640,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	200 Peserta Didik	121,305,600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus				50 Orang	99,144,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5) Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	50 Orang	103,109,760	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				50 Orang	87,713,280	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	50 Orang	91,221,811	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				30 Satuan Pendidikan	58,320,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	30 Satuan Pendidikan	60,652,800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS				30 Satuan Pendidikan	9,471,168,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	30 Satuan Pendidikan	9,850,014,720	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus				60 Orang	13,996,683	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi NTB	60 Orang	14,556,551	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pengembangan Kurikulum Persentase Sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	% %		% %	100 % 100 %	1,134,609,723						100 % 100 %	1,179,994,110	
1 01 03 1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Persentase Sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Persentase sekolah yang telah menyusun modul dan bahan ajar bahasa daerah	% %		% %	100 % 100 %	786,750,735						100 % 100 %	818,220,763	
1 01 03 1.01 01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun				3 Dokumen	89,456,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kurikulum Muatan Lokal lingkup Pendidikan Menengah	3 Dokumen	93,034,656	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 03 1.01 02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun				3 Dokumen	163,120,231	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kurikulum Muatan Lokal lingkup Pendidikan Menengah	3 Dokumen	169,645,040	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 03 1.01 03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersedia				50 Buku	95,277,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kurikulum Muatan Lokal lingkup Pendidikan Menengah	50 Buku	99,088,704	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 03 1.01 04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkat Kompetensinya				0 Orang	438,896,504	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kurikulum Muatan Lokal lingkup Pendidikan Menengah	0 Orang	456,452,363	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 03 1.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus Persentase Sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	% %		% %	100 % 100 %	347,858,988						100 % 100 %	361,773,347	
1 01 03 1.02 01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun				1 Dokumen	89,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kurikulum Muatan Lokal lingkup Pendidikan Khsus (SLB)	1 Dokumen	92,664,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 03 1.02 02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun				1 Dokumen	77,220,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kurikulum Muatan Lokal lingkup Pendidikan Khsus (SLB)	1 Dokumen	80,308,800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 03 1.02 03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersedia				50 Buku	60,588,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kurikulum Muatan Lokal lingkup Pendidikan Khsus (SLB)	50 Buku	63,011,520	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 03 1.02 04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkat Kompetensinya				50 Orang	120,950,988	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kurikulum Muatan Lokal lingkup Pendidikan Khsus (SLB)	50 Orang	125,789,027	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) Persentase Guru SMA/SMALB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Kepala Sekolah bersertifikat Persentase Pengawas Sekolah bersertifikat	nilai % nilai %		nilai % nilai %	6.5 nilai 100 % 100 % 6.5 nilai 100 %	91,396,831,921						6.5 nilai 100 % 100 % 6.5 nilai 100 %	73,420,797,168	
1 01 04 1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	91,396,831,921						10 Dokumen	73,420,797,168	
1 01 04 1.01 01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				10 Dokumen	88,904,896,921	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Khusus di Provinsi NTB	10 Dokumen	70,829,184,768	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 04 1.01 02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan				9 Laporan	2,491,935,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan	9 Laporan	2,591,612,400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Pendidikan Khusus	Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus						Semua Kelurahan		Berdaya Saing		Khusus di Provinsi NTB			
1 01 05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Pengendalian Perizinan Pendidikan	%		%	100 %	98,984,633						100 %	102,944,017	
1 01 05 1.01	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase verifikasi dan evaluasi kelayakan penyelenggaraan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat	%		%	100 %	51,464,633						100 %	53,523,217	
1 01 05 1.01 01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				5 Dokumen	37,120,113	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sekolah Swasta jenjang Pendidikan Menengah di Provinsi NTB	5 Dokumen	38,604,917	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 05 1.01 02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				5 Dokumen	14,344,520	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sekolah Swasta jenjang Pendidikan Menengah di Provinsi NTB	5 Dokumen	14,918,300	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 05 1.02	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase verifikasi dan evaluasi kelayakan penyelenggaraan pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat Persentase verifikasi dan evaluasi kelayakan penyelenggaraan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat	% %		% %	100 % 100 %	47,520,000						100 % 100 %	49,420,800	
1 01 05 1.02 01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	4,158,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sekolah Swasta Pendidikan Khusus di PProvinsi NTB	1 Dokumen	4,324,320	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 05 1.02 02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	13,662,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sekolah Swasta Pendidikan Khusus di PProvinsi NTB	1 Dokumen	14,208,480	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 05 1.02 03	Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	29,700,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sekolah Swasta Pendidikan Khusus di PProvinsi NTB	1 Dokumen	30,888,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase bahasa dan sastra yang dikembangkan Persentase pembinaan, pengembangan dan perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah	% %		% %	35 % 30 %	804,006,888						35 % 30 %	836,167,164	
1 01 06 1.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase pembinaan, pengembangan dan perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	804,006,888						3 Dokumen	836,167,164	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 06 1.01 01	Koordinasi Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Provinsi	Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun				1 Dokumen	100,980,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Bahasa dan Sastra Daerah di Provinsi NTB	1 Dokumen	105,019,200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 06 1.01 02	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi Kewenangan Provinsi				2 dokumen	77,457,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Bahasa dan Sastra Daerah di Provinsi NTB	2 dokumen	80,555,904	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 06 1.01 03	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi				1 Publikasi	76,032,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Bahasa dan Sastra Daerah di Provinsi NTB	1 Publikasi	79,073,280	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 06 1.01 04	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi yang Mendapat Penghargaan				5 Orang	77,220,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Bahasa dan Sastra Daerah di Provinsi NTB	5 Orang	80,308,800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 06 1.01 05	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi yang Tersedia dan Terdistribusi				100 Buku	60,588,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Bahasa dan Sastra Daerah di Provinsi NTB	100 Buku	63,011,520	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 06 1.01 06	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi				100 Peserta Didik	89,812,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Bahasa dan Sastra Daerah di Provinsi NTB	100 Peserta Didik	93,405,312	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 06 1.01 07	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang Tersusun				6 Dokumen	321,916,488	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Bahasa dan Sastra Daerah di Provinsi NTB	6 Dokumen	334,793,148	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						2,738,835,566							2,840,463,402	
2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	%		%	100 %	601,033,086						100 %	625,074,408	
2 22 02 1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase jangkauan pengelolaan kebudayaan	%		%	100 %	333,806,742						100 %	347,159,011	
2 22 02 1.01 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan				2 Obyek	169,928,835	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Ada di Provinsi NTB	2 Obyek	176,725,988	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 02 1.01 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				1200 Orang	163,877,907	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Ada di Provinsi NTB	1200 Orang	170,433,023	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 02 1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pranata Kebudayaan yang mendapatkan Pembinaan	%		%	27.43 %	267,226,344						27.43 %	277,915,397	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 22 02 1.03 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				2 Objek	21,310,344	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lembaga Adat di Provinsi NTB	2 Objek	22,162,757	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 02 1.03 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				50 Orang	65,340,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Lembaga Adat di Provinsi NTB	50 Orang	67,953,600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 02 1.03 03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				20 Unit	180,576,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Lembaga Adat di Provinsi NTB	20 Unit	187,799,040	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	%		%	100 %	749,840,459						100 %	779,834,077	
2 22 03 1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sanggar sekolah / sanggar masyarakat yang dibina	%		%	100 %	749,840,459						100 %	779,834,077	
2 22 03 1.01 01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				1000 Orang	559,760,459	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Sanggar Seni Sekolah danmasyarakat di Provinsi NTB	1000 Orang	582,150,877	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 03 1.01 02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi				10 Sertifikat	89,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Sanggar Seni Sekolah danmasyarakat di Provinsi NTB	10 Sertifikat	92,664,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 03 1.01 03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				15 Lembaga	100,980,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Sanggar Seni Sekolah danmasyarakat di Provinsi NTB	15 Lembaga	105,019,200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan pembinaan sejarah	%		%	100 %	365,684,220						100 %	380,311,587	
2 22 04 1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Persentase sekolah yang diinisiasi untuk membentuk Komunitas Sejarah di Satuan Pendidikan	%		%	40 %	365,684,220						40 %	380,311,587	
2 22 04 1.01 01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				100 Orang	21,310,344	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Komoniitas sejarah pada satuan pendidikan Dikmen dan Diskus di Provinsi NTB	100 Orang	22,162,757	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 04 1.01 02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah				2 Unit	138,252,312	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Komoniitas sejarah pada satuan pendidikan Dikmen dan Diskus di Provinsi NTB	2 Unit	143,782,404	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 04 1.01 03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat				2 Dokumen	96,231,564	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Komoniitas sejarah pada satuan pendidikan Dikmen dan Diskus di Provinsi NTB	2 Dokumen	100,080,826	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 04 1.01 04	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	Jumlah Penulisan Sejarah LokalJumlah Dokumen				3 Dokumen	109,890,000	Semua Kab/Kota,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan	Penguatan stabilitas ketenteraman,	Komoniitas sejarah pada	3 Dokumen	114,285,600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Hasil Penulisan Sejarah Lokal						Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Kebudayaan	ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	satuan pendidikan Dikmen dan Diksus di Provinsi NTB			
2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Cakupan pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	%		%	100 %	1,022,277,801						100 %	1,055,243,330	
2 22 05 1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Persentase Penetapan Cagar Budaya Tk. Provinsi	%		%	100 %	226,908,000						100 %	236,469,920	
2 22 05 1.01 01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				3 Objek	112,860,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Objek Cagar Budaya di Provinsi NTB	3 Objek	117,860,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 05 1.01 02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				3 Objek	114,048,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Objek Cagar Budaya di Provinsi NTB	3 Objek	118,609,920	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 05 1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Persentase Cagar Budaya yang dikelola	%		%	100 %	589,248,237						100 %	608,256,246	
2 22 05 1.02 01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi				10 Objek	190,080,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Cagar Budaya di Provinsi NTB	10 Objek	197,683,200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 05 1.02 02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				10 Objek	202,591,303	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Cagar Budaya di Provinsi NTB	10 Objek	210,694,955	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 05 1.02 03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan				3 Objek	114,048,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Cagar Budaya di Provinsi NTB	3 Objek	114,048,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 05 1.02 04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				20 Orang	82,528,934	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Cagar Budaya di Provinsi NTB	20 Orang	85,830,091	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 05 1.03	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Persentase Izin membawa CB yang diterbitkan	%		%	100 %	206,121,564						100 %	210,517,164	
2 22 05 1.03 01	Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi				1 Objek	109,890,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Cagar Budaya di Provinsi NTB	1 Objek	114,285,600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 05 1.03 02	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi				3 Laporan	96,231,564	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Cagar Budaya di Provinsi NTB	3 Laporan	96,231,564	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						1,410,701,079							1,467,068,703	
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip	Nilai		Nilai	BB Nilai	493,899,954						BB Nilai	513,595,536	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	60,145,325						6 Dokumen	62,551,133	
1 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	29,507,155	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Cabang Dinas Dikbud Lobar Mataram	1 Dokumen	30,687,441	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	8,398,621	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Cabang Dinas Dikbud Lobar Mataram	1 Dokumen	8,734,565	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	5,599,081	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Cabang Dinas Dikbud Lobar Mataram	1 Dokumen	5,823,043	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	5,599,081	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Cabang Dinas Dikbud Lobar Mataram	1 Dokumen	5,823,043	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	4,042,536	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Cabang Dinas Dikbud Lobar Mataram	1 Laporan	4,204,237	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	6,998,851	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Cabang Dinas Dikbud Lobar Mataram	1 Laporan	7,278,804	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	13 Dokumen	25,338,840						13 Dokumen	26,352,392	
1 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	14,081,012	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Administrasi Keuangan lingkup Cabang Dinas Dikbud Lobar Mataram	1 Dokumen	14,644,252	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kecamatan, Semua Kelurahan							
1 01 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1,815,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Administrasi Keuangan lingkup Cabang Dinas Dikbud Lobar Mataram	1 Dokumen	1,887,600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1,754,500	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Administrasi Keuangan lingkup Cabang Dinas Dikbud Lobar Mataram	1 Dokumen	1,824,680	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1,759,340	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Administrasi Keuangan lingkup Cabang Dinas Dikbud Lobar Mataram	1 Laporan	1,829,713	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1,209,746	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Administrasi Keuangan lingkup Cabang Dinas Dikbud Lobar Mataram	1 Dokumen	1,258,135	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				4 Laporan	2,904,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Administrasi Keuangan lingkup Cabang Dinas Dikbud Lobar Mataram	4 Laporan	3,020,160	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Dokumen	1,815,242	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Administrasi Keuangan lingkup Cabang Dinas Dikbud Lobar Mataram	12 Dokumen	1,887,852	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	18 Dokumen	9,238,483						18 Dokumen	9,608,021	
1 01 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	1,679,724	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Administrasi Barang Milik Daerah Cabang Dinas Dikbud	12 Dokumen	1,746,913	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Lobar Mataram			
1 01 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	3,359,448	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Administrasi Barang Milik Daerah Cabang Dinas Dikbud Lobar Mataram	2 Laporan	3,493,826	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4,199,311	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Administrasi Barang Milik Daerah Cabang Dinas Dikbud Lobar Mataram	4 Laporan	4,367,282	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	66,550,000						3 Dokumen	69,212,000	
1 01 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	6,050,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pegawai ASN lingkup Cabang Dinas Dikbud Lobar mataram	1 Unit	6,292,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	18,150,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pegawai ASN lingkup Cabang Dinas Dikbud Lobar mataram	1 Dokumen	18,876,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	14,520,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pegawai ASN lingkup Cabang Dinas Dikbud Lobar mataram	1 Dokumen	15,100,800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	27,830,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pegawai ASN lingkup Cabang Dinas Dikbud Lobar mataram	2 Dokumen	28,943,200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum	Paket		Paket	5 Paket	151,423,877						5 Paket	157,480,829	
1 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3,323,144	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cabang Dinas Dikbud Lobar Mataram	1 Paket	3,456,069	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	31,454,071	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cabang Dinas Dikbud Lobar Mataram	1 Paket	32,712,233	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1,769,020	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cabang Dinas Dikbud Lobar Mataram	1 Paket	1,839,780	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	12,390,400	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cabang Dinas Dikbud Lobar Mataram	1 Paket	12,886,016	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	9,385,002	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cabang Dinas Dikbud Lobar Mataram	1 Paket	9,760,402	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2,976,600	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cabang Dinas Dikbud Lobar Mataram	1 Dokumen	3,095,664	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1,452,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cabang Dinas Dikbud Lobar Mataram	1 Paket	1,510,080	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan							
1 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	4,216,850	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cabang Dinas Dikbud Lobar Mataram	1 Laporan	4,385,524	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	81,480,190	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cabang Dinas Dikbud Lobar Mataram	3 Laporan	84,739,397	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	2,976,600	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cabang Dinas Dikbud Lobar Mataram	1 Dokumen	3,095,664	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diterima/ Diadakan	unit		unit	20 unit	48,848,668						20 unit	50,802,614	
1 01 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	6,050,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cabang Dinas Dikbud Lobar Mataram	1 Paket	6,292,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	25,858,668	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cabang Dinas Dikbud Lobar Mataram	5 Unit	26,893,014	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	16,940,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cabang Dinas Dikbud Lobar Mataram	1 Unit	17,617,600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pelaksanaan jasa Layanan Administrasi Umum	Laporan		Laporan	4 Laporan	89,992,661						4 Laporan	93,531,963	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1,899,700	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Cabang Dinas Dikbud Lobar Mataram	12 Laporan	1,975,688	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	10,985,590	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Cabang Dinas Dikbud Lobar Mataram	12 Laporan	11,425,013	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1,510,080	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Cabang Dinas Dikbud Lobar Mataram	1 Laporan	1,510,080	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	75,597,291	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Cabang Dinas Dikbud Lobar Mataram	12 Laporan	78,621,182	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	unit		unit	4 unit	42,362,100						4 unit	44,056,584	
1 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	35,682,900	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasana Cabang Dinas Lobar Mataram	4 Unit	37,110,216	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit 10 Unit	3,170,200	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasana Cabang Dinas Lobar Mataram	0 Unit 10 Unit	3,297,008	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 10 Unit	3,509,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasana Cabang Dinas Lobar Mataram	0 Unit 10 Unit	3,649,360	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB, Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	% % % Rasio Rasio Rasio Rasio		% % % Rasio Rasio Rasio Rasio	70.60 % 98.02 % 100 % 95.28 % 1:10 Rasio 1:12 Rasio 1:1 Rasio 1:18 Rasio	916,801,125						70.60 % 98.02 % 100 % 95.28 % 1:10 Rasio 1:12 Rasio 1:1 Rasio 1:18 Rasio	953,473,167	
1 01 02 1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Akreditasi SMA minimal B Persentase Angka Drop Out (DO) SMA Persentase Angka Melanjutkan SMA	% % %		% % %	77.61 % 0.24 % 70 %	507,223,506						77.61 % 0.24 % 70 %	527,512,445	
1 01 02 1.01 48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Atas yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				60 Satuan Pendidikan	194,884,415	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta Di Kabupaten Lombok Barat dan Kota mataram	60 Satuan Pendidikan	202,679,791	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				125 Peserta Didik	193,648,860	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta Di Kabupaten Lombok Barat dan Kota mataram	125 Peserta Didik	201,394,814	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				0 Orang 120 Orang	27,940,231	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta Di Kabupaten Lombok Barat dan Kota mataram	0 Orang 120 Orang	29,057,840	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 1.01 52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				60 Satuan Pendidikan	90,750,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta Di Kabupaten Lombok Barat dan Kota mataram	60 Satuan Pendidikan	94,380,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Akreditasi SMK minimal B Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap	% % %		% % %	74.46 % 0.57 % 35 %	354,157,078						74.46 % 0.57 % 35 %	368,323,360	
1 01 02 1.02 40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				60 Satuan Pendidikan	146,649,338	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram	60 Satuan Pendidikan	152,515,311	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				125 Peserta Didik	137,843,563	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram	125 Peserta Didik	143,357,305	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				120 Orang	27,919,177	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram	120 Orang	29,035,944	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				60 Satuan Pendidikan	41,745,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram	60 Satuan Pendidikan	43,414,800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Akreditasi SLB minimal B	%		%	40 %	55,420,541						40 %	57,637,362	
1 01 02 1.03 47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				10 Satuan Pendidikan	22,990,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram	10 Satuan Pendidikan	23,909,600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				200 Peserta Didik	9,075,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram	200 Peserta Didik	9,438,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
								Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
1 01 02 1.03 50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				12 Orang	8,835,541	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram	12 Orang	9,188,962	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.03 51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				10 Satuan Pendidikan	14,520,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram	10 Satuan Pendidikan	15,100,800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					2,724,294,734					2,832,647,718				
1 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip	Nilai		Nilai	BB Nilai	1,939,635,890						BB Nilai	2,016,602,522	
1 01 01 1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan da Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	38,855,696						6 Dokumen	40,409,924	
1 01 01 1.01 02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	7,863,279	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Cab. Dinas Lombok Tengah	1 Dokumen	8,177,810	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	4,684,705	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Cab. Dinas Lombok Tengah	1 Dokumen	4,872,093	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2,895,367	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Cab. Dinas Lombok Tengah	1 Dokumen	3,011,182	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2,854,967	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Cab. Dinas Lombok Tengah	1 Dokumen	2,969,166	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	10,679,462	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Cab. Dinas Lombok Tengah	1 Laporan	11,106,640	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	9,877,916	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Cab. Dinas Lombok Tengah	4 Laporan	10,273,033	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	48,732,923						4 Dokumen	50,682,239	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	24,907,567	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Keuangan di Cab. Dinas Dikbud Lombok Tengah	12 Dokumen	25,903,869	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10 Dokumen	1,598,625	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Keuangan di Cab. Dinas Dikbud Lombok Tengah	10 Dokumen	1,662,570	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1,653,750	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Keuangan di Cab. Dinas Dikbud Lombok Tengah	1 Dokumen	1,719,900	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3,714,433	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Keuangan di Cab. Dinas Dikbud Lombok Tengah	1 Laporan	3,863,010	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1,598,625	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Keuangan di Cab. Dinas Dikbud Lombok Tengah	1 Dokumen	1,662,570	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				4 Laporan	12,613,923	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Keuangan di Cab. Dinas Dikbud Lombok Tengah	4 Laporan	13,118,480	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen 12 Dokumen	2,646,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Keuangan di Cab. Dinas Dikbud Lombok Tengah	0 Dokumen 12 Dokumen	2,751,840	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	427,269,272						2 Dokumen	444,360,043	
1 01 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	69,731,260	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Administrasi Barang Milik Daerah pada Cab. Dinas Dikbud Lombok Tengah	1 Dokumen	72,520,510	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	9,423,680	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Administrasi Barang Milik Daerah pada Cab. Dinas Dikbud Lombok Tengah	2 Laporan	9,800,628	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	348,114,332	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Administrasi Barang Milik Daerah pada Cab. Dinas Dikbud Lombok Tengah	1 Laporan	362,038,905	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	13 Dokumen	63,666,067						13 Dokumen	66,212,710	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	5,512,500	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pegawai ASN Lingkup Cabang Dinas Lombok Tengah	1 Unit	5,733,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	6,381,821	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pegawai ASN Lingkup Cabang Dinas Lombok Tengah	1 Dokumen	6,637,094	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	13,230,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pegawai ASN Lingkup Cabang Dinas Lombok Tengah	1 Dokumen	13,759,200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	38,541,746	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pegawai ASN Lingkup Cabang Dinas Lombok Tengah	1 Dokumen	40,083,416	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum	Paket		Paket	5 Paket	39,770,484						5 Paket	41,361,301	
1 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	3,027,906	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Tengah	10 Paket	3,149,022	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Paket	6,387,885	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Tengah	25 Paket	6,643,400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	1,611,855	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Tengah	10 Paket	1,676,329	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				500 Paket	6,391,193	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Tengah	500 Paket	6,646,840	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2000 Paket	2,395,071	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Tengah	2000 Paket	2,490,874	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				336 Dokumen	8,551,211	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Tengah	336 Dokumen	8,893,259	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				10 Paket	2,712,150	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Tengah	10 Paket	2,820,636	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2000 Laporan	3,528,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Tengah	2000 Laporan	3,669,120	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	3,842,213	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Tengah	2 Laporan	3,995,901	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				15 Dokumen	1,323,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Lingkup Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Tengah	15 Dokumen	1,375,920	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diterima/ Diadakan	unit		unit	4 unit	630,663,075						4 unit	655,270,798	
1 01 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Paket	4,410,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Tengah	4 Paket	4,586,400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	26,493,075	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Tengah	6 Unit	27,552,798	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	17,640,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Tengah	1 Unit	18,345,600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	231,525,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Tengah	1 Unit	240,786,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	181,912,500	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Tengah	1 Unit	189,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	168,682,500	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Tengah	1 Unit	175,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan jasa Layanan Administrasi Umum	Laporan		Laporan	4 Laporan	319,187,927						4 Laporan	331,955,444	
1 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				160 Laporan	1,723,754	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Tengah	160 Laporan	1,792,704	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	51,712,609	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Tengah	12 Laporan	53,781,114	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1,471,850	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Tengah	1 Laporan	1,530,724	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	264,279,714	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Tengah	12 Laporan	274,850,902	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	unit		unit	9 unit	371,490,446						9 unit	386,350,063	
1 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				4 Unit	39,632,867	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasarana Cab. Dinas Dikbud Lombok Tengah	4 Unit	41,218,182	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit 10 Unit	2,888,550	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasarana Cab. Dinas Dikbud Lombok Tengah	0 Unit 10 Unit	3,004,092	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 5 Unit	2,733,766	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasarana Cab. Dinas Dikbud Lombok Tengah	0 Unit 5 Unit	2,843,116	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	133,264,688	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasarana Cab. Dinas Dikbud Lombok Tengah	1 Unit	138,595,275	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	99,225,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasarana Cab. Dinas Dikbud Lombok Tengah	1 Unit	103,194,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	93,745,575	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasarana Cab. Dinas Dikbud Lombok Tengah	1 Unit	97,495,398	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah	% % % % Rasio Rasio Rasio		% % % % Rasio Rasio Rasio	70.60 % 98.02 % 100 % 95.28 % 1:10 Rasio 1:1 Rasio 1:18 Rasio	784,658,844						70.60 % 98.02 % 100 % 95.28 % 1:10 Rasio 1:1 Rasio 1:18 Rasio	816,045,196	
1 01 02 1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Akreditasi SMA minimal B Persentase Angka Drop Out (DO) SMA Persentase Angka Melanjutkan SMA	% % %		% % %	77.5 % 0.24 % 70 %	413,725,253						77.5 % 0.24 % 70 %	430,274,263	
1 01 02 1.01 48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Atas yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				54 Satuan Pendidikan	171,990,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta Pada Kabupaten Lombok Tengah	54 Satuan Pendidikan	178,869,600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				500 Peserta Didik	177,640,092	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta Pada Kabupaten Lombok Tengah	500 Peserta Didik	184,745,696	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				100 Orang	25,507,661	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta Pada Kabupaten Lombok Tengah	100 Orang	26,527,967	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				54 Satuan Pendidikan	38,587,500	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta Pada Kabupaten Lombok Tengah	54 Satuan Pendidikan	40,131,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Akreditasi SMK minimal B Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap	% % %		% % %	75 % 0.57 % 37 %	302,556,320						75 % 0.57 % 37 %	314,658,572	
1 01 02 1.02 40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				65 Satuan Pendidikan	123,483,308	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Lombok Tengah	65 Satuan Pendidikan	128,422,640	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba				200 Peserta Didik	127,569,724	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Lombok Tengah	200 Peserta Didik	132,672,513	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Akademik dan Non Akademik						Semua Kelurahan							
1 01 02 1.02 43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				0 Orang 100 Orang	17,325,788	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Lombok Tengah	0 Orang 100 Orang	18,018,819	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				30 Satuan Pendidikan	34,177,500	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Lombok Tengah	30 Satuan Pendidikan	35,544,600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Akreditasi SLB minimal B	%		%	40 %	68,377,271						40 %	71,112,361	
1 01 02 1.03 47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				4 Satuan Pendidikan	33,075,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB NEgeri dan Swasta di KAbupaten Lombok Tengah	4 Satuan Pendidikan	34,398,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				200 Peserta Didik	8,379,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB NEgeri dan Swasta di KAbupaten Lombok Tengah	200 Peserta Didik	8,714,160	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				20 Orang	12,590,771	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB NEgeri dan Swasta di KAbupaten Lombok Tengah	20 Orang	13,094,401	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				6 Satuan Pendidikan	14,332,500	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB NEgeri dan Swasta di KAbupaten Lombok Tengah	6 Satuan Pendidikan	14,905,800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						2,342,141,231							2,435,813,492	
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip	Nilai		Nilai	BB Nilai	1,586,326,327						BB Nilai	1,649,765,993	
1 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan da Penganggaran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen		Dokumen	9 Dokumen	66,324,196						9 Dokumen	68,977,163	
1 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	22,999,026	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Cab. Dinas Lombok Timur	1 Dokumen	23,918,987	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	3,483,379	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Cab. Dinas	1 Dokumen	3,622,714	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
												Lombok Timur			
1 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	5,774,450	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Cab. Dinas Lombok Timur	1 Dokumen	6,005,429	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	20,638,614	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Cab. Dinas Lombok Timur	1 Dokumen	21,464,158	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	8,135,517	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Cab. Dinas Lombok Timur	1 Laporan	8,460,937	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	5,293,210	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Cab. Dinas Lombok Timur	4 Laporan	5,504,938	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	102 Dokumen	38,900,388						102 Dokumen	40,392,459	
1 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	11,822,658	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Keuangan pada Cab. Dinas Dikbud Lombok Timur	1 Dokumen	12,295,565	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				100 Dokumen	1,598,625	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Keuangan pada Cab. Dinas Dikbud Lombok Timur	100 Dokumen	1,598,625	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	3,858,750	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Keuangan pada Cab. Dinas Dikbud Lombok Timur	1 Dokumen	4,013,100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3,714,432	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Keuangan pada Cab. Dinas Dikbud Lombok Timur	1 Laporan	3,863,010	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	2,646,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Keuangan pada Cab. Dinas Dikbud Lombok Timur	1 Dokumen	2,751,840	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				4 Laporan	12,613,923	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Keuangan pada Cab. Dinas Dikbud Lombok Timur	4 Laporan	13,118,479	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	2,646,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Keuangan pada Cab. Dinas Dikbud Lombok Timur	1 Dokumen	2,751,840	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	11,856,681						7 Dokumen	12,330,948	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Daerah													
1 01 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	2,861,604	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Cab. Dinas Dikbud Lombok Timur	1 Dokumen	2,976,068	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	4,775,337	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Cab. Dinas Dikbud Lombok Timur	2 Laporan	4,966,350	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4,219,740	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Cab. Dinas Dikbud Lombok Timur	4 Laporan	4,388,530	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	38,173,764						3 Dokumen	39,700,714	
1 01 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	5,000,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pegawai ASN lingkup Cabang Dinas Dikbud Lmbok Timur	1 Unit	5,200,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5 Dokumen	18,012,397	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pegawai ASN lingkup Cabang Dinas Dikbud Lmbok Timur	5 Dokumen	18,732,892	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	7,734,737	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pegawai ASN lingkup Cabang Dinas Dikbud Lmbok Timur	1 Dokumen	8,044,127	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	7,426,630	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pegawai ASN lingkup Cabang Dinas Dikbud Lmbok Timur	12 Dokumen	7,723,695	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum	Paket		Paket	5 Paket	87,018,742						5 Paket	90,561,624	
1 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				25 Paket	2,936,178	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Umum pada Cab. Dinas Dikbud Lombok Timur	25 Paket	3,053,625	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				80 Paket	20,981,937	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Umum pada Cab. Dinas Dikbud Lombok Timur	80 Paket	21,821,214	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	1,611,855	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Umum pada Cab. Dinas Dikbud Lombok Timur	10 Paket	1,676,329	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				360 Paket	6,672,388	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Umum pada Cab. Dinas Dikbud Lombok Timur	360 Paket	6,939,284	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				47936 Paket	13,936,556	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Umum pada Cab. Dinas Dikbud	47936 Paket	14,494,018	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan		Berdaya Saing		Lombok Timur			
1 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				300 Dokumen	9,223,596	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Umum pada Cab. Dinas Dikbud Lombok Timur	300 Dokumen	9,592,540	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				10 Paket	4,906,168	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Umum pada Cab. Dinas Dikbud Lombok Timur	10 Paket	5,102,414	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	5,364,077	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Umum pada Cab. Dinas Dikbud Lombok Timur	12 Laporan	5,640,774	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	15,438,730	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Umum pada Cab. Dinas Dikbud Lombok Timur	1 Laporan	16,056,279	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				15 Dokumen	5,947,257	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Umum pada Cab. Dinas Dikbud Lombok Timur	15 Dokumen	6,185,147	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diterima/ Diadakan	unit		unit	9 unit	633,772,444						9 unit	659,123,342	
1 01 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Paket	4,720,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Timur	10 Paket	4,908,800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	37,009,944	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Timur	9 Unit	38,490,342	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	16,537,500	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Timur	1 Unit	17,199,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	226,012,500	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Timur	1 Unit	235,053,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	183,015,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Timur	1 Unit	190,335,600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	166,477,500	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Timur	1 Unit	173,136,600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Lapaoran Pelaksanaan jasa Layanan Administrasi Umum	Laporan		Laporan	4 Laporan	249,282,054						4 Laporan	259,241,763	
1 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500 Laporan	3,717,785	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Timur	500 Laporan	3,866,496	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	56,849,485	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Timur	12 Laporan	59,123,465	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	2,789,325	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Timur	4 Laporan	2,889,325	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				23 Laporan	185,925,459	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Timur	23 Laporan	193,362,477	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	unit		unit	23 unit	460,998,058						23 unit	479,437,980	
1 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				7 Unit	48,701,896	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasarana pada Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Timur	7 Unit	50,649,972	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit 10 Unit	2,888,550	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasarana pada Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Timur	0 Unit 10 Unit	3,004,092	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	13,279,362	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasarana pada Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Timur	16 Unit	13,810,536	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	167,910,750	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasarana pada Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Timur	1 Unit	174,627,180	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	123,480,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasarana pada Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Timur	1 Unit	128,419,200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	104,737,500	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasarana pada Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Timur	1 Unit	108,927,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah	% % % % Rasio Rasio Rasio		% % % % Rasio Rasio Rasio	70.60 % 98.02 % 100 % 95.28 % 1:10 Rasio 1:1 Rasio 1:18 Rasio	755,814,904						70.60 % 98.02 % 100 % 95.28 % 1:10 Rasio 1:1 Rasio 1:18 Rasio	786,047,499	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah													
1 01 02 1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Akreditasi SMA minimal B Persentase Angka Drop Out (DO) SMA Persentase Angka Melanjutkan SMA	% % %		% % %	77.5 % 0.24 % 70 %	336,881,002						77.5 % 0.24 % 70 %	350,356,241	
1 01 02 1.01 48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Atas yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				67 Satuan Pendidikan	128,460,874	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Kabupaten Lombok Timur	67 Satuan Pendidikan	133,599,309	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				500 Peserta Didik	144,182,745	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Kabupaten Lombok Timur	500 Peserta Didik	149,950,054	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				492 Orang	14,624,883	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Kabupaten Lombok Timur	492 Orang	15,209,878	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				67 Satuan Pendidikan	49,612,500	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Kabupaten Lombok Timur	67 Satuan Pendidikan	51,597,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Akreditasi SMK minimal B Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap	% % %		% % %	75 % 0.57 % 37 %	294,811,365						75 % 0.57 % 37 %	306,603,820	
1 01 02 1.02 40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				94 Satuan Pendidikan	138,930,655	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Lombok Timur	94 Satuan Pendidikan	144,487,881	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				600 Peserta Didik	107,095,747	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Lombok Timur	600 Peserta Didik	111,379,577	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				300 Orang	14,607,463	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Lombok Timur	300 Orang	15,191,762	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				94 Satuan Pendidikan	34,177,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Lombok Timur	94 Satuan Pendidikan	35,544,600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Akreditasi SLB minimal B	%		%	40 %	124,122,537						40 %	129,087,438	
1 01 02 1.03 47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan				7 Satuan Pendidikan	27,893,250	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta di Kabupaten Lombok Timur	7 Satuan Pendidikan	29,008,980	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Rekomendasi						Kelurahan							
1 01 02 1.03 48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				100 Peserta Didik	76,163,787	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta di Kabupaten Lombok Timur	100 Peserta Didik	79,210,338	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				10 Orang	5,733,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta di Kabupaten Lombok Timur	10 Orang	5,962,320	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				7 Satuan Pendidikan	14,332,500	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta di Kabupaten Lombok Timur	7 Satuan Pendidikan	14,905,800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						2,004,248,289							2,105,452,891	
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip	Nilai		Nilai	BB Nilai	1,435,573,325						BB Nilai	1,514,030,929	
1 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan da Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen		Dokumen	18 Dokumen	57,486,876						18 Dokumen	67,044,026	
1 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	6,058,100	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Cab. Dinas Dikbud Lombok Utara	1 Dokumen	13,558,100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	10,237,686	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Cab. Dinas Dikbud Lombok Utara	1 Dokumen	10,647,193	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	9,429,355	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Cab. Dinas Dikbud Lombok Utara	1 Dokumen	9,806,529	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	9,429,355	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Cab. Dinas Dikbud Lombok Utara	1 Dokumen	9,806,529	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	10,179,852	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Cab. Dinas Dikbud Lombok Utara	12 Laporan	10,587,046	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	12,152,528	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Cab. Dinas Dikbud Lombok Utara	2 Laporan	12,638,629	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun	Dokumen		Dokumen	18 Dokumen	40,008,440						18 Dokumen	41,608,775	
1 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi				12 Dokumen	5,835,177	Kab. Lombok Utara, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Keuangan pada	12 Dokumen	6,068,584	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Pelaksanaan Tugas ASN						Kecamatan, Semua Kelurahan		Berkualitas Dan Berdaya Saing		Cab. Dinas Dikbud Lombok Utara			
1 01 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				100 Dokumen	1,671,939	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Keuangan pada Cab. Dinas Dikbud Lombok Utara	100 Dokumen	1,738,816	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1,598,625	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Keuangan pada Cab. Dinas Dikbud Lombok Utara	1 Dokumen	1,662,570	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	11,984,809	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Keuangan pada Cab. Dinas Dikbud Lombok Utara	1 Laporan	12,464,201	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	4,480,114	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Keuangan pada Cab. Dinas Dikbud Lombok Utara	1 Dokumen	4,659,318	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				4 Laporan	8,236,362	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Keuangan pada Cab. Dinas Dikbud Lombok Utara	4 Laporan	8,565,816	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Dokumen	6,201,414	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Keuangan pada Cab. Dinas Dikbud Lombok Utara	12 Dokumen	6,449,470	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	16,926,786						4 Dokumen	17,603,858	
1 01 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	3,366,070	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Cab. Dinas Dikbud Lombok Utara	1 Dokumen	3,500,713	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	11,144,199	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Cab. Dinas Dikbud Lombok Utara	2 Laporan	11,589,967	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2,416,517	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Cab. Dinas Dikbud Lombok Utara	1 Laporan	2,513,178	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	27,361,734						3 Dokumen	28,456,204	
1 01 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	5,512,500	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pegawai ASN lingkup Cab. Dinas Lombok Utara	1 Unit	5,733,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	2,753,934	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pegawai ASN lingkup Cab. Dinas Lombok Utara	12 Dokumen	2,864,092	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan		Berkualitas Dan Berdaya Saing					
1 01 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	12,127,500	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pegawai ASN lingkup Cab. Dinas Lombok Utara	1 Dokumen	12,612,600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	6,967,800	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pegawai ASN lingkup Cab. Dinas Lombok Utara	12 Dokumen	7,246,512	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum	Paket		Paket	5 Paket	96,631,664						5 Paket	100,496,931	
1 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				75 Paket	4,743,065	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan administrasi Umum pada Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Utara	75 Paket	4,932,787	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				300 Paket	16,326,404	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan administrasi Umum pada Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Utara	300 Paket	16,979,460	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	1,611,855	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan administrasi Umum pada Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Utara	10 Paket	1,676,329	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				300 Paket	8,345,925	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan administrasi Umum pada Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Utara	300 Paket	8,679,762	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	6,217,162	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan administrasi Umum pada Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Utara	2 Paket	6,465,849	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				720 Dokumen	5,733,000	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan administrasi Umum pada Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Utara	720 Dokumen	5,962,320	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				28 Paket	3,318,525	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan administrasi Umum pada Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Utara	28 Paket	3,451,266	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				100 Laporan	4,972,275	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan administrasi Umum pada Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Utara	100 Laporan	5,171,166	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	43,048,203	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan administrasi Umum pada Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Utara	12 Laporan	44,770,132	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				15 Dokumen	2,315,250	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan administrasi Umum pada Kantor Cab. Dinas	15 Dokumen	2,407,860	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan		Berdaya Saing		Dikbud Lombok Utara			
1 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diterima/ Diadakan	unit		unit	20 unit	653,558,472						20 unit	679,700,810	
1 01 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Paket	3,858,750	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Utara	10 Paket	4,013,100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	35,607,222	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Utara	9 Unit	37,031,510	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	16,537,500	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Utara	1 Unit	17,199,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	226,012,500	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Utara	1 Unit	235,053,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	194,040,000	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Utara	1 Unit	201,801,600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	177,502,500	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Utara	1 Unit	184,602,600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan jasa Layanan Administrasi Umum	Laporan		Laporan	4 Laporan	230,801,814						4 Laporan	237,868,084	
1 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4,277,022	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Utara	12 Laporan	4,448,103	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	53,664,530	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Utara	12 Laporan	53,645,309	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	1,471,850	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Utara	5 Laporan	1,530,724	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				48 Laporan	171,388,412	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Lombok Utara	48 Laporan	178,243,948	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	unit		unit	15 unit	312,797,539						15 unit	341,252,241	
1 01 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	2,888,550	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasarana Pada Cabang Dinas Dikbud Lombok Utara	10 Unit	3,004,092	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	8,595,739	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasarana Pada Cabang Dinas Dikbud Lombok Utara	9 Unit	8,939,569	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	122,708,250	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasarana Pada Cabang Dinas Dikbud Lombok Utara	1 Unit	127,616,580	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	101,430,000	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasarana Pada Cabang Dinas Dikbud Lombok Utara	1 Unit	121,430,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	77,175,000	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasarana Pada Cabang Dinas Dikbud Lombok Utara	1 Unit	80,262,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah	% % % % Rasio Rasio Rasio	% % % % Rasio Rasio Rasio		70.60 % 98.02 % 100 % 95.28 % 1:10 Rasio 1:1 Rasio 1:18 Rasio	568,674,964						70.60 % 98.02 % 100 % 95.28 % 1:10 Rasio 1:1 Rasio 1:18 Rasio	591,421,962	
1 01 02 1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Akreditasi SMA minimal B Persentase Angka Drop Out (DO) SMA Persentase Angka Melanjutkan SMA	% % %	% % %		77.5 % 0.24 % 70 %	293,711,787						77.5 % 0.24 % 70 %	305,460,258	
1 01 02 1.01 48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Atas yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				6 Satuan Pendidikan	82,908,000	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Kabupaten Lombok Utara	6 Satuan Pendidikan	86,224,320	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				400 Peserta Didik	140,175,973	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Kabupaten Lombok Utara	400 Peserta Didik	145,783,012	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				50 Orang	26,041,943	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Kabupaten Lombok Utara	50 Orang	27,083,620	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				6 Satuan Pendidikan	44,585,871	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Kabupaten Lombok Utara	6 Satuan Pendidikan	46,369,306	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Akreditasi SMK minimal B Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap	% % %		% % %	75 % 0.57 % 37 %	234,318,854						75 % 0.57 % 37 %	243,691,608	
1 01 02 1.02 40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				6 Satuan Pendidikan	49,833,000	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Lombok Utara	6 Satuan Pendidikan	51,826,320	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				400 Peserta Didik	113,474,117	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Lombok Utara	400 Peserta Didik	118,013,082	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				50 Orang	25,435,336	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Lombok Utara	50 Orang	26,452,749	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				6 Satuan Pendidikan	45,576,401	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Lombok Utara	6 Satuan Pendidikan	47,399,457	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Akreditasi SLB minimal B	%		%	40 %	40,644,323						40 %	42,270,096	
1 01 02 1.03 47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				2 Satuan Pendidikan	13,560,750	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta di Kab. Lombok Utara	2 Satuan Pendidikan	14,103,180	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				25 Peserta Didik	14,257,309	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta di Kab. Lombok Utara	25 Peserta Didik	14,827,601	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				20 Orang	5,766,075	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta di Kab. Lombok Utara	20 Orang	5,996,718	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				2 Satuan Pendidikan	7,060,189	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta di Kab. Lombok Utara	2 Satuan Pendidikan	7,342,597	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						2,820,873,413						2,590,243,629		
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip	Nilai		Nilai	BB Nilai	1,936,375,661						BB Nilai	1,670,548,106	
1 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan da Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	70,890,750						6 Dokumen	73,726,380	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	14,994,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja pada Cab. Dinas Dikbud Sumbawa Barat	1 Dokumen	15,593,760	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	14,994,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja pada Cab. Dinas Dikbud Sumbawa Barat	1 Dokumen	15,593,760	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	14,442,750	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja pada Cab. Dinas Dikbud Sumbawa Barat	1 Dokumen	15,020,460	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	14,663,250	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja pada Cab. Dinas Dikbud Sumbawa Barat	1 Dokumen	15,249,780	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	10,032,750	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja pada Cab. Dinas Dikbud Sumbawa Barat	1 Laporan	10,434,060	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1,764,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja pada Cab. Dinas Dikbud Sumbawa Barat	1 Laporan	1,834,560	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	38 Dokumen	23,400,129						38 Dokumen	24,336,135	
1 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	6,838,272	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan ADministrasi Keuangan pada Cab. Dinsa Sumbawa Barat	12 Dokumen	7,111,803	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				60 Dokumen	1,076,893	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan ADministrasi Keuangan pada Cab. Dinsa Sumbawa Barat	60 Dokumen	1,119,969	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	2,789,325	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan ADministrasi Keuangan pada Cab. Dinsa Sumbawa Barat	1 Dokumen	2,900,898	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3,365,291	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan ADministrasi Keuangan pada Cab. Dinsa Sumbawa Barat	1 Laporan	3,499,903	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	2,019,174	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan ADministrasi Keuangan pada Cab. Dinsa Sumbawa Barat	1 Dokumen	2,099,941	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				12 Laporan	5,292,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Keuangan pada Cab. Dinsa Sumbawa Barat	12 Laporan	5,503,680	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Dokumen	2,019,174	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Keuangan pada Cab. Dinsa Sumbawa Barat	12 Dokumen	2,099,941	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	347,862,877						3 Dokumen	361,306,274	
1 01 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	7,516,977	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Cab. Dinas Dikbud Sumbawa Barat	1 Dokumen	7,807,476	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	5,184,122	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Cab. Dinas Dikbud Sumbawa Barat	2 Laporan	5,384,466	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	335,161,778	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Cab. Dinas Dikbud Sumbawa Barat	1 Laporan	348,114,332	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	340,929,113						3 Dokumen	5,990,218	
1 01 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0 Unit	335,161,778	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pegawai ASN lingkup Cab. Dinas Dikbud Sumbawa Barat	0 Unit	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	1,684,839	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pegawai ASN lingkup Cab. Dinas Dikbud Sumbawa Barat	2 Dokumen	1,749,951	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1,490,435	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pegawai ASN lingkup Cab. Dinas Dikbud Sumbawa Barat	1 Dokumen	1,548,034	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				13 Dokumen	2,592,061	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pegawai ASN lingkup Cab. Dinas Dikbud Sumbawa Barat	13 Dokumen	2,692,233	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum	Paket		Paket	5 Paket	130,949,237						5 Paket	134,527,920	
1 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	5,443,328	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Umum pada Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa Barat	10 Paket	5,653,689	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	13,100,018	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan,		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Umum pada	10 Paket	13,606,277	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan		Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa Barat			
1 01 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1,611,855	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Umum pada Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa Barat	1 Paket		2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				966 Paket	8,618,603	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Umum pada Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa Barat	966 Paket	8,951,675	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	7,549,378	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Umum pada Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa Barat	2 Paket	7,841,129	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				350 Dokumen	9,331,420	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Umum pada Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa Barat	350 Dokumen	9,692,039	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1,477,474	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Umum pada Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa Barat	1 Paket	1,534,572	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	6,376,470	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Umum pada Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa Barat	12 Laporan	6,622,893	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	74,651,366	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Umum pada Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa Barat	50 Laporan	77,536,319	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				15 Dokumen	2,789,325	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Umum pada Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa Barat	15 Dokumen	3,089,325	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diterima/ Diadakan	unit		unit	2 unit	611,282,591						2 unit	642,040,034	
1 01 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Paket	4,230,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa Barat	5 Paket	4,720,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	7,502,591	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa Barat	2 Unit	7,792,534	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	15,750,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa Barat	1 Unit	16,537,500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	225,750,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa Barat	1 Unit	237,037,500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	184,800,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa Barat	1 Unit	194,040,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	173,250,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa Barat	1 Unit	181,912,500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan jasa Layanan Administrasi Umum	Laporan		Laporan	4 Laporan	214,883,270						4 Laporan	223,217,743	
1 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4,218,579	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa Barat	12 Laporan	4,381,609	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	22,504,276	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa Barat	3 Laporan	23,373,969	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	2,656,500	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa Barat	5 Laporan	2,789,325	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	185,503,915	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa Barat	12 Laporan	192,672,840	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	unit		unit	13 unit	196,177,694						13 unit	205,403,402	
1 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				3 Unit	33,204,305	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasarana Cab. Dinas Dikbud Sumbawa Barat	3 Unit	34,487,508	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit 10 Unit	2,751,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasarana Cab. Dinas Dikbud Sumbawa Barat	0 Unit 10 Unit	2,888,550	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	11,677,236	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasarana Cab. Dinas Dikbud Sumbawa Barat	5 Unit	12,128,511	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	79,065,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasarana Cab. Dinas Dikbud Sumbawa Barat	1 Unit	83,018,250	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	63,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasarana Cab. Dinas Dikbud Sumbawa Barat	1 Unit	66,150,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1 01 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	6,480,153	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasarana Cab. Dinas Dikbud Sumbawa Barat	5 Unit	6,730,583	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB														
		Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah														
		Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	%		%	70.60 %								70.60 %		
		Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%		%	98.02 %								98.02 %		
		Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%		%	100 %								100 %		
		Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB,	%		%	95.28 %								95.28 %		
		Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Rasio		Rasio	1:10 Rasio								1:10 Rasio		
		Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	Rasio		Rasio	1:1 Rasio								1:1 Rasio		
						1:18 Rasio								1:18 Rasio		
1 01 02 1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Akreditasi SMA minimal B	%		%	77.5 %							77.5 %			
		Persentase Angka Drop Out (DO) SMA	%		%	0.24 %							0.24 %		547,377,512	
		Persentase Angka Melanjutkan SMA	%		%	70 %							70 %			
1 01 02 1.01 48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Atas yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				6 Satuan Pendidikan	171,336,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA NEgeri dan Swasta di Kab. Sumbawa Barat	6 Satuan Pendidikan	177,957,395	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.01 49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				525 Peserta Didik	281,152,895	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA NEgeri dan Swasta di Kab. Sumbawa Barat	525 Peserta Didik	292,018,239	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.01 51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				60 Orang	41,616,096	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA NEgeri dan Swasta di Kab. Sumbawa Barat	60 Orang	43,224,378	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.01 52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				6 Satuan Pendidikan	32,550,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA NEgeri dan Swasta di Kab. Sumbawa Barat	6 Satuan Pendidikan	34,177,500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Akreditasi SMK minimal B	%		%	75 %							75 %			
		Persentase Angka Drop Out (DO) SMK	%		%	0.57 %							0.57 %		305,727,066	
		Persentase Lulusan SMK yang terserap	%		%	37 %							37 %			
1 01 02 1.02 40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				5 Satuan Pendidikan	119,356,061	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Kab. Sumbawa Barat	5 Satuan Pendidikan	123,968,657	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.02 41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba				140 Peserta Didik	139,599,880	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Kab. Sumbawa Barat	140 Peserta Didik	144,994,812	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Akademik dan Non Akademik						Semua Kelurahan		Berdaya Saing					
1 01 02 1.02 43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				32 Orang	2,489,874	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di KAB. Sumbawa Barat	32 Orang	2,586,097	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				5 Satuan Pendidikan	32,550,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di KAB. Sumbawa Barat	5 Satuan Pendidikan	34,177,500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Akreditasi SLB minimal B	%		%	40 %	63,846,946						40 %	66,590,945	
1 01 02 1.03 47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				2 Satuan Pendidikan	37,495,103	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB negeri Swasta di Kab. Sumbawa BARat	2 Satuan Pendidikan	38,944,126	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				25 Peserta Didik	10,710,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB negeri Swasta di Kab. Sumbawa BARat	25 Peserta Didik	11,245,500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				5 Orang	1,991,843	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB negeri Swasta di Kab. Sumbawa BARat	5 Orang	2,068,819	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				2 Satuan Pendidikan	13,650,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB negeri Swasta di Kab. Sumbawa BARat	2 Satuan Pendidikan	14,332,500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						2,430,893,496							2,529,159,876	
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip	Nilai		Nilai	BB Nilai	1,432,216,727						BB Nilai	1,498,727,634	
1 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan da Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	55,263,526						6 Dokumen	57,399,222	
1 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	22,773,100	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja pada Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	1 Dokumen	23,653,182	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	22,773,100	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja pada Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	1 Dokumen	23,653,182	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2,618,985	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja pada Cab. Dinas Dikbud	1 Dokumen	2,720,197	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
												Sumbawa			
1 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2,618,985	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja pada Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	1 Dokumen	2,720,197	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	3,820,149	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja pada Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	1 Laporan	3,967,781	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	659,207	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja pada Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	1 Laporan	684,683	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	25,255,225						6 Dokumen	26,272,957	
1 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	5,192,833	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Keuangan pada Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	12 Dokumen	5,393,514	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				70 Dokumen	572,502	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Keuangan pada Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	70 Dokumen	594,627	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	3,675,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Keuangan pada Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	1 Dokumen	3,858,750	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	4,038,380	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelaksanaan Administrasi Keuangan pada Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	1 Laporan	4,194,446	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	638,213	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Keuangan pada Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	1 Dokumen	662,877	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				4 Laporan	10,193,363	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Keuangan pada Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	4 Laporan	10,587,292	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				4 Dokumen	944,934	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Keuangan pada Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	4 Dokumen	981,451	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	15,359,114						3 Dokumen	15,952,676	
1 01 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1,382,446	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Barang Milik	1 Dokumen	1,435,871	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan				Daerah Cab. Dinas Dikbud Sumbawa			
1 01 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	5,159,243	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	2 Laporan	5,358,625	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	8,817,425	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	1 Laporan	9,158,180	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	7,474,966						3 Dokumen	7,570,612	
1 01 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	5,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pegawai ASN lingkup Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	1 Unit	5,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrtasi Kepegawaian				1 Dokumen	547,940	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pegawai ASN lingkup Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	1 Dokumen	569,115	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	544,580	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai ASN lingkup Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	1 Dokumen	565,626	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	1,382,446	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pegawai ASN lingkup Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	12 Dokumen	1,435,871	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum	Paket		Paket	5 Paket	128,563,728						5 Paket	133,549,589	
1 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				25 Paket	1,902,674	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	25 Paket	1,976,204	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3,670,568	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	1 Paket	3,812,419	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	1,535,100	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	10 Paket	1,611,855	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				500 Paket	8,922,394	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	500 Paket	9,267,206	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2,519,264	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	2 Paket	2,616,623	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	2,046,902	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	12 Dokumen	2,126,006	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	1,102,703	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	12 Paket	1,145,317	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				150 Laporan	2,676,718	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	150 Laporan	2,780,161	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	102,675,768	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	1 Laporan	106,643,743	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				15 Dokumen	1,511,637	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	15 Dokumen	1,570,055	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diterima/ Diadakan	unit		unit	20 unit	597,480,000						20 unit	627,632,500	
1 01 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Paket	4,230,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	5 Paket	4,720,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	47,250,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	20 Unit	49,612,500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	15,750,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	1 Unit	16,537,500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	207,900,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	1 Unit	218,295,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	174,300,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	1 Unit	183,015,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	148,050,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	1 Unit	155,452,500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan jasa Layanan Administrasi Umum	Laporan		Laporan	4 Laporan	203,072,021						4 Laporan	210,919,877	
1 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2,960,135	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelayanan Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	12 Laporan	3,074,532	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	40,675,622	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelayanan Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	3 Laporan	42,247,559	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	1,417,086	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelayanan Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	5 Laporan	1,471,850	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				60 Laporan	158,019,178	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelayanan Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	60 Laporan	164,125,936	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	unit		unit	5 unit	399,748,147						5 unit	419,430,201	
1 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit	26,893,147	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasarana Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	5 Unit	27,932,451	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	2,751,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasarana Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	10 Unit	2,888,550	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	13,839,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasarana Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	16 Unit	14,530,950	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	149,415,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasarana Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	1 Unit	156,885,750	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	107,100,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasarana Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	1 Unit	112,455,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	99,750,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasarana Kantor Cab. Dinas Dikbud Sumbawa	1 Unit	104,737,500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB, Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah	0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0	70.60 0 98.02 0 100 0 95.28 0 1:10 0 1:1 0 1:18 0	998,676,769						70.60 0 98.02 0 100 0 95.28 0 1:10 0 1:1 0 1:18 0	1,030,432,242	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah													
1 01 02 1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Akreditasi SMA minimal B Persentase Angka Drop Out (DO) SMA Persentase Angka Melanjutkan SMA	% % %		% % %	77.5 % 0.24 % 70 %	652,424,451						77.5 % 0.24 % 70 %	677,637,837	
1 01 02 1.01 48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Atas yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				28 Satuan Pendidikan	276,825,261	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Kabupaten Sumbawa	28 Satuan Pendidikan	287,523,361	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				500 Peserta Didik	312,732,719	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Kabupaten Sumbawa	500 Peserta Didik	324,818,487	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				80 Orang	55,874,228	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Kabupaten Sumbawa	80 Orang	58,033,526	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				28 Satuan Pendidikan	6,992,243	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Kabupaten Sumbawa	28 Satuan Pendidikan	7,262,463	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Akreditasi SMK minimal B Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap	% % %		% % %	75 % 0.57 % 37 %	253,259,763						75 % 0.57 % 37 %	263,937,633	
1 01 02 1.02 40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				19 Satuan Pendidikan	184,172,100	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Sumbawa	19 Satuan Pendidikan	191,289,556	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				300 Peserta Didik	56,946,318	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Sumbawa	300 Peserta Didik	59,946,318	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				32 Orang	8,032,500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Sumbawa	32 Orang	8,434,125	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				19 Satuan Pendidikan	4,108,845	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Sumbawa	19 Satuan Pendidikan	4,267,634	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Akreditasi SLB minimal B	%		%	40 %	92,992,555						40 %	88,856,772	
1 01 02 1.03 47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				2 Satuan Pendidikan	25,947,643	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta di Cab. Dinas Dibud Sumbawa	2 Satuan Pendidikan	26,950,408	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1 01 02 1.03 48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				300 Peserta Didik	54,827,473	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta di Cab. Dinas Dibud Sumbawa	300 Peserta Didik	56,946,318	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.03 50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				5 Orang	9,936,420	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta di Cab. Dinas Dibud Sumbawa	5 Orang	2,590,875	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.03 51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				2 Satuan Pendidikan	2,281,019	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta di Cab. Dinas Dibud Sumbawa	2 Satuan Pendidikan	2,369,171	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						2,257,887,768						2,348,203,269			
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip	Nilai		Nilai	BB Nilai	1,677,353,291						BB Nilai	1,744,447,414		
1 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan da Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	29,599,809						6 Dokumen	30,783,801		
1 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2,325,723	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja pada Cab. Dinas Dikbud Dompu	1 Dokumen	2,418,752	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	3,522,488	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja pada Cab. Dinas Dikbud Dompu	1 Dokumen	3,663,387	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	5,839,281	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja pada Cab. Dinas Dikbud Dompu	1 Dokumen	6,072,852	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	6,537,825	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja pada Cab. Dinas Dikbud Dompu	1 Dokumen	6,799,338	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	6,021,855	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja pada Cab. Dinas Dikbud Dompu	1 Laporan	6,262,729	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	5,352,637	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja pada Cab. Dinas Dikbud Dompu	4 Laporan	5,566,743	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	13 Dokumen	43,284,481						13 Dokumen	45,015,860	
1 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	16,206,750	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Keuangan pada Cab. Dinas Dikbud Dompu	12 Dokumen	16,855,020	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Semua Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				36 Dokumen	1,598,625	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Keuangan pada Cab. Dinas Dikbud Dompu	36 Dokumen	1,662,570	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	3,858,750	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Keuangan pada Cab. Dinas Dikbud Dompu	1 Dokumen	4,013,100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3,714,433	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Keuangan pada Cab. Dinas Dikbud Dompu	1 Laporan	3,863,010	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	2,646,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Keuangan pada Cab. Dinas Dikbud Dompu	1 Dokumen	2,751,840	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				4 Laporan	12,613,923	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Keuangan pada Cab. Dinas Dikbud Dompu	4 Laporan	13,118,480	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	2,646,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Keuangan pada Cab. Dinas Dikbud Dompu	1 Dokumen	2,751,840	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	21,329,294						5 Dokumen	22,182,464	
1 01 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1,753,683	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Cab. Dinas Dikbud Dompu	1 Dokumen	1,823,829	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	4,775,337	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Cab. Dinas Dikbud Dompu	2 Laporan	4,966,350	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	14,800,274	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Cab. Dinas Dikbud Dompu	2 Laporan	15,392,285	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	32,012,489						3 Dokumen	33,292,988	
1 01 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	5,000,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pegawai ASN lingkup Cab. Dinas Dikbud Dompu	1 Unit	5,200,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan		Berdaya Saing					
1 01 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	11,851,121	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pegawai ASN lingkup Cab. Dinas Dikbud Dompu	1 Dokumen	12,325,166	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	7,734,738	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pegawai ASN lingkup Cab. Dinas Dikbud Dompu	1 Dokumen	8,044,127	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	7,426,630	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pegawai ASN lingkup Cab. Dinas Dikbud Dompu	1 Dokumen	7,723,695	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum	Paket		Paket	5 Paket	321,936,938						5 Paket	334,814,412	
1 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	11,000,174	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Dompu	1 Paket	11,440,181	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	26,434,652	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Dompu	1 Paket	27,492,038	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1,611,855	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Dompu	1 Paket	1,676,329	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	15,645,225	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Dompu	1 Paket	16,271,034	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10,902,596	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Dompu	1 Paket	11,338,699	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	9,223,596	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Dompu	12 Dokumen	9,592,540	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	6,105,454	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Dompu	1 Paket	6,349,671	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	17,880,258	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Dompu	1 Laporan	18,595,467	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	220,603,128	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Dompu	12 Laporan	229,427,253	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				15 Dokumen	2,530,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Dompu	15 Dokumen	2,631,200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan		Berdaya Saing					
1 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diterima/ Diadakan	unit		unit	1 unit	640,226,765						1 unit	665,835,836	
1 01 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	4,720,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Dompu	1 Paket	4,908,800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	17,640,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Dompu	1 Unit	18,345,600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	20,500,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Dompu	1 Unit	29,320,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	234,117,500	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Dompu	1 Unit	241,482,200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	194,427,500	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Dompu	1 Unit	200,204,600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	168,821,765	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Dompu	1 Unit	171,574,636	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan jasa Layanan Administrasi Umum OPD	Laporan		Laporan	4 Laporan	177,969,513						4 Laporan	185,088,292	
1 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	13,137,628	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Pelayanan Kantor Cab. Dinas Dikbud Dompu	12 Laporan	13,663,133	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	47,753,371	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Pelayanan Kantor Cab. Dinas Dikbud Dompu	12 Laporan	49,663,505	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2,789,325	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Pelayanan Kantor Cab. Dinas Dikbud Dompu	1 Laporan	2,900,898	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	114,289,189	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Pelayanan Kantor Cab. Dinas Dikbud Dompu	12 Laporan	118,860,756	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	unit		unit	9 unit	410,994,002						9 unit	427,433,761	
1 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				4 Unit	32,086,340	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasarana pada Kantor Cab. Dinas Dikbud Dompu	4 Unit	33,369,793	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	2,888,550	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasarana pada Kantor Cab. Dinas Dikbud Dompu	10 Unit	3,004,092	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	10,760,862	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasarana pada Kantor Cab. Dinas Dikbud Dompu	5 Unit	11,191,296	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	156,885,750	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasarana pada Kantor Cab. Dinas Dikbud Dompu	1 Unit	163,161,180	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	112,455,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasarana pada Kantor Cab. Dinas Dikbud Dompu	1 Unit	116,953,200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	95,917,500	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasarana pada Kantor Cab. Dinas Dikbud Dompu	1 Unit	99,754,200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	% % % % Rasio Rasio Rasio	% % % % Rasio Rasio Rasio	% % % % Rasio Rasio Rasio	70.60 % 98.02 % 100 % 95.28 % 1:10 Rasio 1:1 Rasio 1:18 Rasio	580,534,477						70.60 % 98.02 % 100 % 95.28 % 1:10 Rasio 1:1 Rasio 1:18 Rasio	603,755,855	
1 01 02 1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Akreditasi SMA minimal B Persentase Angka Drop Out (DO) SMA Persentase Angka Melanjutkan SMA	% % %	% % %	% % %	77.5 % 0.24 % 70 %	345,809,048						77.5 % 0.24 % 70 %	359,641,409	
1 01 02 1.01 48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Atas yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				28 Satuan Pendidikan	194,304,600	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Kabupaten Dompu	28 Satuan Pendidikan	202,076,784	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				200 Peserta Didik	64,026,034	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Kabupaten Dompu	200 Peserta Didik	66,587,075	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				50 Orang	37,865,914	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Kabupaten Dompu	50 Orang	39,380,550	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1 01 02 1.01 52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Yelembagaan dan Manajemen				28 Satuan Pendidikan	49,612,500	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Kabupaten Dompu	28 Satuan Pendidikan	51,597,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Akreditasi SMK minimal B Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap	% % %		% % %	75 % 0.57 % 37 %	158,122,755						75 % 0.57 % 37 %	164,447,665		
1 01 02 1.02 40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				13 Satuan Pendidikan	105,740,775	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta Di Kab. Dompu	13 Satuan Pendidikan	109,970,406	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.02 41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				200 Peserta Didik	12,583,384	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta Di Kab. Dompu	200 Peserta Didik	13,086,719	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.02 43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				50 Orang	5,621,096	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta Di Kab. Dompu	50 Orang	5,845,940	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.02 45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				13 Satuan Pendidikan	34,177,500	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta Di Kab. Dompu	13 Satuan Pendidikan	35,544,600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Akreditasi SLB minimal B	%		%	40 %	76,602,674						40 %	79,666,781		
1 01 02 1.03 47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				4 Satuan Pendidikan	48,910,495	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta Cab. Dinas Dikbud Dompu	4 Satuan Pendidikan	50,866,915	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.03 48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				50 Peserta Didik	8,809,276	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta Cab. Dinas Dikbud Dompu	50 Peserta Didik	9,161,647	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.03 50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				10 Orang	4,550,403	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta Cab. Dinas Dikbud Dompu	10 Orang	4,732,419	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.03 51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				4 Satuan Pendidikan	14,332,500	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta Cab. Dinas Dikbud Dompu	4 Satuan Pendidikan	14,905,800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						2,183,310,843								2,325,618,567	
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip	Nilai		Nilai	BB Nilai	1,454,897,251						BB Nilai	1,511,663,015		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan da Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen		Dokumen	9 Dokumen	4,450,554						9 Dokumen	4,628,569	
1 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	741,759	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja pada Cab. Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	1 Dokumen	771,428	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	741,759	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja pada Cab. Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	1 Dokumen	771,429	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	741,759	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja pada Cab. Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	1 Dokumen	771,428	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	741,759	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja pada Cab. Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	1 Dokumen	771,428	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	741,759	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja pada Cab. Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	1 Laporan	771,428	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	741,759	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja pada Cab. Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	1 Laporan	771,428	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	53,175,800						10 Dokumen	55,302,829	
1 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	5,217,035	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Keuangan pada Cab. Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	12 Dokumen	5,425,716	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan							
1 01 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				30 Dokumen	741,758	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Keuangan pada Cab. Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	30 Dokumen	771,428	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	3,858,750	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Keuangan pada Cab. Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	1 Dokumen	4,013,100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	20,215,391	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Keuangan pada Cab. Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	1 Laporan	21,024,007	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	494,506	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Keuangan pada Cab. Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	1 Dokumen	514,285	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				4 Laporan	19,978,029	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Keuangan pada Cab. Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	4 Laporan	20,777,150	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				4 Dokumen	2,670,331	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Keuangan pada Cab. Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	4 Dokumen	2,777,143	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	23,024,184						3 Dokumen	23,068,886	
1 01 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	667,583	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Cab. Dinas Dikbud Bima	1 Dokumen	694,285	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				dan Kota Bima			
1 01 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	21,906,601	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Cab. Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	2 Laporan	21,906,601	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	450,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Cab. Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	12 Laporan	468,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	47,540,014						3 Dokumen	48,887,769	
1 01 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	5,600,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pegawai ASN lingkup Cab. Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	1 Unit	5,824,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	19,923,757	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pegawai ASN lingkup Cab. Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	1 Dokumen	20,166,861	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	6,686,582	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pegawai ASN lingkup Cab. Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	1 Dokumen	6,954,045	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	15,329,675	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pegawai ASN lingkup Cab. Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	12 Dokumen	15,942,863	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Paket		Paket	5 Paket	142,396,776						5 Paket	148,092,645	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Paket Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum													
1 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,674,643	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	1 Paket	1,741,629	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	24,875,490	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	1 Paket	25,870,509	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1,611,855	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	1 Paket	1,676,329	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	18,692,314	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	1 Paket	19,440,006	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	9,679,948	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	1 Paket	10,067,146	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	6,675,827	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kantor Cab. Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	12 Dokumen	6,942,859	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	3,956,045	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	1 Paket	4,114,287	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan							
1 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	15,206,049	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	12 Laporan	15,814,291	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	58,454,550	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	12 Laporan	60,792,732	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				15 Dokumen	1,570,055	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	15 Dokumen	1,632,857	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diterima/ Diadakan	unit		unit	2 unit	601,845,538						2 unit	625,919,360	
1 01 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Paket	4,720,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	10 Paket	4,908,800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	46,978,038	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	5 Unit	48,857,160	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	13,230,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	1 Unit	13,759,200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	220,500,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	1 Unit	229,320,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
1 01 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	171,990,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	1 Unit	178,869,600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	144,427,500	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kantor Cab. Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	1 Unit	150,204,600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan jasa Layanan Administrasi Umum	Laporan		Laporan	4 Laporan	345,902,083						4 Laporan	359,738,165	
1 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4,870,881	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	kantor Cab. Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	12 Laporan	5,065,716	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	66,758,265	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	kantor Cab. Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	12 Laporan	69,428,595	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2,789,325	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	kantor Cab. Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	1 Laporan	2,900,898	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	271,483,612	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	kantor Cab. Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	12 Laporan	282,342,956	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	unit		unit	22 unit	236,562,302						22 unit	246,024,792	
1 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				4 Unit	36,383,254	Kab. Bima, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasarana pada Cab. Dinas Dikbud	4 Unit	37,838,584	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya						Semua Kelurahan		Berkualitas Dan Berdaya Saing		Bima dan Kota Bima			
1 01 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	1,236,264	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasarana pada Cab. Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	5 Unit	1,285,714	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	9,840,663	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasarana pada Cab. Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	4 Unit	10,234,289	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	16,009,621	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasarana pada Cab. Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	1 Unit	16,650,005	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	101,430,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasarana pada Cab. Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	1 Unit	105,487,200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	71,662,500	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan Prasarana pada Cab. Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	1 Unit	74,529,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	% % % % Rasio Rasio Rasio	% % % % Rasio Rasio Rasio		70.60 % 98.02 % 100 % 95.28 % 1:10 Rasio 1:1 Rasio 1:18 Rasio	728,413,592						70.60 % 98.02 % 100 % 95.28 % 1:10 Rasio 1:1 Rasio 1:18 Rasio	813,955,552	
1 01 02 1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Akreditasi SMA minimal B Persentase Angka Drop Out (DO) SMA Persentase Angka Melanjutkan SMA	% % %	% % %		77.5 % 0.24 % 70 %	475,464,150						77.5 % 0.24 % 70 %	494,482,716
1 01 02 1.01 48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Atas yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				74 Satuan Pendidikan	275,845,500	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Kabupaten Bima dan Kota Bima	74 Satuan Pendidikan	286,879,320	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 1.01 49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				900 Peserta Didik	160,182,225	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Kabupaten Bima dan Kota Bima	900 Peserta Didik	166,589,514	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				125 Orang	38,774,925	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Kabupaten Bima dan Kota Bima	125 Orang	40,325,922	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				74 Satuan Pendidikan	661,500	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri dan Swasta di Kabupaten Bima dan Kota Bima	74 Satuan Pendidikan	687,960	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Akreditasi SMK minimal B Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap	% % %		% % %	75 % 0.57 % 37 %	180,650,138						75 % 0.57 % 37 %	245,659,050	
1 01 02 1.02 40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				40 Satuan Pendidikan	115,983,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Bima dan Kota Bima	40 Satuan Pendidikan	120,622,320	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				300 Peserta Didik	59,783,063	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Bima dan Kota Bima	300 Peserta Didik	62,174,385	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				10 Orang	4,222,575	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Bima dan Kota Bima	10 Orang	62,174,385	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				40 Satuan Pendidikan	661,500	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Bima dan Kota Bima	40 Satuan Pendidikan	687,960	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
1 01 02 1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Akreditasi SLB minimal B	%		%	40 %	72,299,304						40 %	73,813,786	
1 01 02 1.03 47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				19 Satuan Pendidikan	33,295,500	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta di Kabupaten Bima dan Kota Bima	19 Satuan Pendidikan	34,627,320	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				100 Peserta Didik	34,437,249	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta di Kabupaten Bima dan Kota Bima	100 Peserta Didik	34,437,249	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				10 Orang	3,905,055	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta di Kabupaten Bima dan Kota Bima	10 Orang	4,061,257	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				19 Satuan Pendidikan	661,500	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB Negeri dan Swasta di Kabupaten Bima dan Kota Bima	19 Satuan Pendidikan	687,960	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						1,481,484,523							1,555,110,427	
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip	Nilai		Nilai	BB Nilai	548,515,227						BB Nilai	582,955,959	
1 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	9,342,601						6 Dokumen	9,716,307	
1 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2,196,047	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	1 Dokumen	2,283,889	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2,133,368	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	1 Dokumen	2,218,703	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2,157,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	1 Dokumen	2,243,592	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2,186,930	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	1 Dokumen	2,274,408	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	323,652	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	1 Laporan	336,598	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	345,304	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	4 Laporan	359,117	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	84,582,266						1 Dokumen	87,965,556	
1 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	73,213,470	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	12 Dokumen	76,142,008	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10 Dokumen	1,815,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	10 Dokumen	1,887,600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1,754,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	1 Dokumen	1,824,680	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2,051,796	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	1 Laporan	2,133,868	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2,178,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	2 Dokumen	2,265,120	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				4 Laporan	1,815,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	4 Laporan	1,887,600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen 1 Dokumen	1,754,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	0 Dokumen 1 Dokumen	1,824,680	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						Kelurahan							
1 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	2,621,688						3 Dokumen	2,726,555	
1 01 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1,028,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	1 Dokumen	1,069,640	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	814,828	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	2 Laporan	847,421	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	778,360	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	1 Laporan	809,494	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum	Paket		Paket	6 Paket	124,293,748						6 Paket	129,265,499	
1 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	1,960,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	10 Paket	2,038,608	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	1,887,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	15 Paket	1,963,104	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	1,769,020	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	10 Paket	1,839,781	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				32 Paket	21,350,667	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	32 Paket	22,204,693	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	14,769,475	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	4 Paket	15,360,254	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				360 Dokumen	8,205,264	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	360 Dokumen	8,533,475	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				40 Paket	1,367,544	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	40 Paket	1,422,246	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				63 Laporan	2,943,638	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	63 Laporan	3,061,384	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				16 Laporan	64,958,340	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	16 Laporan	67,556,674	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				100 Dokumen	2,783,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	100 Dokumen	2,894,320	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	2,299,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	1 Dokumen	2,390,960	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang Diterima/ Diadakan	unit		unit	1 unit	61,512,691						1 unit	63,973,199	
1 01 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	13,310,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	1 Paket	13,842,400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	30,052,691	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	1 Unit	31,254,799	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	18,150,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	1 Unit	18,876,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pelaksanaan jasa Layanan Administrasi Umum	Laporan		Laporan	3 Laporan	211,207,515						3 Laporan	219,655,816	
1 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	7,806,397	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkupBalai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	1 Laporan	8,118,653	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	1,471,850	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkupBalai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	5 Laporan	1,530,724	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan				1 Laporan	201,929,268	Semua Kab/Kota,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkupBalai Pengembangan Teknologi	1 Laporan	210,006,439	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Umum Kantor yang Disediakan						Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Informasi dan Data Pendidikan			
1 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	unit		unit	12 unit	54,954,718						12 unit	69,653,027	
1 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				6 Unit	33,539,016	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	6 Unit	47,380,696	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit 10 Unit	3,025,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	0 Unit 10 Unit	3,146,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 2 Unit	1,390,336	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	0 Unit 2 Unit	1,445,950	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 6 Unit	4,900,366	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	0 Unit 6 Unit	5,096,381	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				0 Unit 1 Unit	12,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	0 Unit 1 Unit	12,584,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Persen Angka Patisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB Rasio Rasio Rasio Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah	% % % % Rasio Rasio Rasio	% % % % Rasio Rasio Rasio		70.60 % 98.02 % 100 % 95.28 % 1:10 Rasio 1:1 Rasio 1:18 Rasio	932,969,296					70.60 % 98.02 % 100 % 95.28 % 1:10 Rasio 1:1 Rasio 1:18 Rasio	972,154,468		
1 01 02 1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Akreditasi SMA minimal B Persentase Angka Drop Out (DO) SMA Persentase Angka Melanjutkan SMA	% % %	% % %		77.61 % 0.24 % 70 %	345,239,191						77.61 % 0.24 % 70 %	371,048,759	
1 01 02 1.01 38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				16 Paket	7,759,276	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	16 Paket	8,069,647	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
								Kelurahan								
1 01 02 1.01 47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				10 Satuan Pendidikan	1,289,689	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	10 Satuan Pendidikan	1,341,277	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.01 49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				400 Peserta Didik	125,485,324	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	400 Peserta Didik	130,504,737	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.01 51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				0 Orang 150 Orang	210,704,902	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	0 Orang 150 Orang	219,133,098	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.01 58	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				2 Konten Digital	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	2 Konten Digital	12,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Akreditasi SMK minimal B Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap	% % %		% % %	75 % 0.57 % 37 %	515,457,749						75 % 0.57 % 37 %	525,942,459		
1 01 02 1.02 30	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				16 Paket	253,340,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Beberapa SMK di Nusa Tenggara Barat	16 Paket	253,340,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.02 39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				10 Satuan Pendidikan	784,833	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Beberapa SMK di Nusa Tenggara Barat	10 Satuan Pendidikan	816,226	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.02 41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				400 Peserta Didik	71,208,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Beberapa SMK di Nusa Tenggara Barat	400 Peserta Didik	74,056,736	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.02 43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas				0 Orang 150 Orang	190,124,516	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Beberapa SMK di Nusa Tenggara Barat	0 Orang 150 Orang	197,729,497	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
		Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi														
1 01 02 1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Akreditasi SLB minimal B	%		%	40 %	72,272,356						40 %	75,163,250		
1 01 02 1.03 37	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				10 Paket	4,235,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB di Nusa Tenggara Barat	10 Paket	4,404,400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.03 46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				18 Satuan Pendidikan	901,450	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB di Nusa Tenggara Barat	18 Satuan Pendidikan	937,508	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.03 48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				100 Peserta Didik	18,150,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB di Nusa Tenggara Barat	100 Peserta Didik	18,876,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.03 50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				20 Orang	48,985,906	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SLB di Nusa Tenggara Barat	20 Orang	50,945,342	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						5,164,397,003								4,338,549,477	
2 22 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip	Nilai		Nilai	BB Nilai	2,413,890,393						BB Nilai	2,518,022,603		
2 22 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan da Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	9,743,580						6 Dokumen	10,717,938		
2 22 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1,815,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Lingkup Taman Budaya Provinsi NTB	1 Dokumen	1,996,500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1,694,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Lingkup Taman Budaya Provinsi NTB	1 Dokumen	1,863,400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1,258,290	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Lingkup Taman Budaya Provinsi NTB	1 Dokumen	1,384,119	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1,258,290	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Lingkup Taman Budaya Provinsi NTB	1 Dokumen	1,384,119	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar				1 Laporan	2,002,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Lingkup Taman Budaya Provinsi NTB	1 Laporan	2,202,200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Realisasi Kinerja SKPD													
2 22 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1,716,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Lingkup Taman Budaya Provinsi NTB	1 Laporan	1,887,600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	31 Dokumen	20,564,014						31 Dokumen	21,993,128	
2 22 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	10,224,014	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	lingkup Taman Budaya	12 Dokumen	10,619,128	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10 Dokumen	1,650,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	lingkup Taman Budaya	10 Dokumen	1,815,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1,595,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	lingkup Taman Budaya	1 Dokumen	1,754,500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1,870,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	lingkup Taman Budaya	1 Laporan	2,057,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	1,980,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	lingkup Taman Budaya	2 Dokumen	2,178,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				4 Laporan	1,650,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	lingkup Taman Budaya	4 Laporan	1,815,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1,595,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	lingkup Taman Budaya	1 Dokumen	1,754,500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	2,472,800						4 Dokumen	2,720,080	
2 22 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	935,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	lingkup Taman Budaya	1 Dokumen	1,028,500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	786,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	lingkup Taman Budaya	2 Laporan	865,150	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	751,300	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	lingkup Taman Budaya	1 Laporan	826,430	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 22 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Pendapatan Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	92 Dokumen	7,092,341						92 Dokumen	7,801,575	
2 22 01 1.04 05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				80 Laporan	3,047,263	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	lingkup Taman Budaya	80 Laporan	3,351,989	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Laporan	4,045,078	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	lingkup Taman Budaya	12 Laporan	4,449,586	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum	Paket		Paket	6 Paket	96,858,630						6 Paket	106,544,493	
2 22 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	16,811,300	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	lingkup Taman Budaya	10 Paket	18,492,430	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	14,309,350	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	lingkup Taman Budaya	15 Paket	15,740,285	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	3,872,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	lingkup Taman Budaya	10 Paket	4,259,200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				32 Paket	3,861,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	lingkup Taman Budaya	32 Paket	4,247,100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	6,424,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	lingkup Taman Budaya	2 Paket	7,066,400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				720 Dokumen	9,306,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	lingkup Taman Budaya	720 Dokumen	10,236,600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				40 Paket	1,320,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	lingkup Taman Budaya	40 Paket	1,452,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				400 Laporan	13,530,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	lingkup Taman Budaya	400 Laporan	14,883,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	24,894,980	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	lingkup Taman Budaya	3 Laporan	27,384,478	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				100 Dokumen	2,530,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	lingkup Taman Budaya	100 Dokumen	2,783,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 22 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang Diterima/ Diadakan	unit		unit	7 unit	351,500,000						7 unit	365,560,000	
2 22 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	1,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Lingkup Taman Budaya	2 Paket	1,560,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Lingkup Taman Budaya	5 Unit	15,600,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.07 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Lingkup Taman Budaya	1 Unit	15,600,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Lingkup Taman Budaya	1 Unit	156,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	90,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Lingkup Taman Budaya	1 Unit	93,600,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	80,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Lingkup Taman Budaya	1 Unit	83,200,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pelaksanaan jasa Layanan Administrasi Umum	Laporan		Laporan	4 Laporan	1,198,110,679						4 Laporan	1,246,035,106	
2 22 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				250 Laporan	2,710,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Lingkup Taman Budaya	250 Laporan	2,818,816	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	242,481,580	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Lingkup Taman Budaya	4 Laporan	252,180,843	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	1,452,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Lingkup Taman Budaya	5 Laporan	1,510,080	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				324 Laporan	951,466,699	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Lingkup Taman Budaya	324 Laporan	989,525,367	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	unit		unit	15 unit	727,548,349						15 unit	756,650,283	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Daerah	Pemerintahan Daerah yang terpelihara													
2 22 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				3 Unit	27,932,451	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Lingkup Taman Budaya	3 Unit	29,049,749	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit 10 Unit	2,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Lingkup Taman Budaya	0 Unit 10 Unit	2,600,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 5 Unit	92,802,898	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Lingkup Taman Budaya	0 Unit 5 Unit	96,515,014	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.09 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				0 Unit 1 Unit	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Lingkup Taman Budaya	0 Unit 1 Unit	5,200,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	280,720,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Lingkup Taman Budaya	1 Unit	291,948,800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	185,130,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Lingkup Taman Budaya	7 Unit	192,535,200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	133,463,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Lingkup Taman Budaya	1 Unit	138,801,520	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	02.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%		%	100 %	2,750,506,610						100 %	1,820,526,874	
2 22 02 1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase jangkauan pengelolaan kebudayaan	%		%	100 %	1,438,116,531						100 %	455,641,192	
2 22 02 1.01 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan				5 Objek	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Lembaga dan pranata kebudayaan se NTB	5 Objek	78,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 02 1.01 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				100 Orang	363,116,531	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Lembaga dan pranata kebudayaan se NTB	100 Orang	377,641,192	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 02 1.01 03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara				6 Unit	1,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Lembaga dan pranata kebudayaan se NTB	6 Unit	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
2 22 02 1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Persentase sekolah yang dibina	%		%	100 %	1,312,390,079						100 %	1,364,885,682		
2 22 02 1.02 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				25 Objek	1,167,190,079	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Sekolah pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan pendidikan khusus di Nusa Tenggara Barat	25 Objek	1,213,877,682	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 02 1.02 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				2 Laporan	145,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Sekolah pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan pendidikan khusus di Nusa Tenggara Barat	2 Laporan	151,008,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						3,655,802,860						3,835,803,454			
2 22 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip	Nilai		Nilai	BB Nilai	2,082,567,184						BB Nilai	2,201,769,021		
2 22 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan da Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen		Dokumen	9 Dokumen	8,918,613						9 Dokumen	9,263,279		
2 22 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1,574,645	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja lingkup Museum Negeri	1 Dokumen	1,635,498	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1,574,330	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja lingkup Museum Negeri	1 Dokumen	1,635,171	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1,574,330	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja lingkup Museum Negeri	1 Dokumen	1,635,171	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1,574,330	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja lingkup Museum Negeri	1 Dokumen	1,635,171	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1,582,937	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja lingkup Museum Negeri	1 Laporan	1,644,111	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	1,038,041	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja lingkup Museum Negeri	4 Laporan	1,078,157	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	30 Dokumen	27,887,789						30 Dokumen	30,422,446		
2 22 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	20,500,920	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Laporan Keuangan lingkup Museum Negeri	1 Dokumen	22,551,012	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan				10 Dokumen	1,650,000	Kota Mataram, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan	Laporan Keuangan lingkup Museum Negeri	10 Dokumen	1,815,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Keuangan SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						Kecamatan, Semua Kelurahan			perlindungan masyarakat (PD-10)				
2 22 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1,595,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Laporan Keuangan lingkup Museum Negeri	1 Dokumen	1,754,500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1,049,473	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Laporan Keuangan lingkup Museum Negeri	1 Dokumen	1,090,030	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				1 Laporan	1,517,646	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Laporan Keuangan lingkup Museum Negeri	1 Laporan	1,576,297	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen 12 Dokumen	1,574,750	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Laporan Keuangan lingkup Museum Negeri	0 Dokumen 12 Dokumen	1,635,607	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	18 Dokumen	2,608,266						18 Dokumen	2,709,065	
2 22 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	523,639	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Museum Negeri	2 Dokumen	543,876	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	1,046,470	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Museum Negeri	4 Laporan	1,086,912	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	1,038,157	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Museum Negeri	12 Laporan	1,078,277	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Pendapatan Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	12 Laporan	2,996,851						12 Laporan	3,232,139	
2 22 01 1.04 05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				80 Laporan	1,947,263	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Sumber yang menghasilkan PAD di Museum Negeri	80 Laporan	2,141,989	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Laporan	1,049,588	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Sumber yang menghasilkan PAD di Museum Negeri	12 Laporan	1,090,150	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum	Paket		Paket	6 Paket	225,967,847						6 Paket	235,275,882	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 22 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	17,042,613	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	lingkup Kantor Museum Negeri	3 Paket	17,701,236	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				612 Paket	17,122,663	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	lingkup Kantor Museum Negeri	612 Paket	17,784,380	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	1,608,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	lingkup Kantor Museum Negeri	10 Paket	1,769,020	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				770 Paket	5,246,368	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	lingkup Kantor Museum Negeri	770 Paket	5,449,117	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	62,213,653	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	lingkup Kantor Museum Negeri	2 Paket	64,617,942	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				53 Dokumen	5,290,455	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	lingkup Kantor Museum Negeri	53 Dokumen	5,494,908	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				150 Paket	39,349,550	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	lingkup Kantor Museum Negeri	150 Paket	41,063,468	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	10,492,736	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	lingkup Kantor Museum Negeri	12 Laporan	10,898,235	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				18 Laporan	62,981,609	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	lingkup Kantor Museum Negeri	18 Laporan	65,415,576	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				100 Dokumen	2,530,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	lingkup Kantor Museum Negeri	100 Dokumen	2,783,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	2,090,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	lingkup Kantor Museum Negeri	1 Dokumen	2,299,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diterima/ Diadakan	unit		unit	28 unit	440,082,529						28 unit	479,219,797	
2 22 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				11 Paket	1,650,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Lingkup Kantor Museum Negeri	11 Paket	1,815,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 22 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14 Unit	16,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Lingkup Kantor Museum Negeri	14 Unit	18,150,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				11 Unit	23,100,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Lingkup Kantor Museum Negeri	11 Unit	25,410,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.07 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				3 Unit	46,832,529	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Lingkup Kantor Museum Negeri	3 Unit	54,144,797	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	165,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Lingkup Kantor Museum Negeri	1 Unit	174,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	99,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Lingkup Kantor Museum Negeri	1 Unit	108,900,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	88,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Lingkup Kantor Museum Negeri	1 Unit	96,800,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pelaksanaan jasa Layanan Administrasi Umum	Laporan		Laporan	4 Laporan	1,038,672,988						4 Laporan	1,078,894,197	
2 22 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3,606,746	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Lingkup Kantor Museum Negeri	12 Laporan	3,746,132	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	171,467,431	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Lingkup Kantor Museum Negeri	5 Laporan	178,093,906	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	1,320,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Lingkup Kantor Museum Negeri	5 Laporan	1,452,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				356 Laporan	862,278,811	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Lingkup Kantor Museum Negeri	356 Laporan	895,602,159	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	unit		unit	85 unit	335,432,301						85 unit	362,752,216	
2 22 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				7 Unit	42,750,556	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Sarana dan Prasarana Kantor Museum Negeri	7 Unit	46,595,909	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				55 Unit	4,329,985	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Sarana dan Prasarana Kantor Museum Negeri	55 Unit	4,497,320	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Nasional					Daerah	
2 22 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	34,618,891	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Sarana dan Prasarana Kantor Museum Negeri	9 Unit	35,956,761	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				220 Unit	2,076,713	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Sarana dan Prasarana Kantor Museum Negeri	220 Unit	2,156,969	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 01 1.09 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				3 Unit	5,720,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Sarana dan Prasarana Kantor Museum Negeri	3 Unit	6,292,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	53,403,156	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Sarana dan Prasarana Kantor Museum Negeri	8 Unit	55,466,957	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	99,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Sarana dan Prasarana Kantor Museum Negeri	5 Unit	108,900,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	93,533,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Sarana dan Prasarana Kantor Museum Negeri	1 Unit	102,886,300	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pengelolaan Permuseuman Provinsi	%		%	28.57 %	1,573,235,676						28.57 %	1,634,034,433		
2 22 06 1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	Persentase Koleksi museum yang dikelola	%		%	50 %	1,573,235,676						50 %	1,634,034,433		
2 22 06 1.01 01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan				2000 Unit	582,080,443	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Koleksi Museum NTB	2000 Unit	604,575,336	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 06 1.01 02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya				15 Orang	41,517,057	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Koleksi Museum NTB	15 Orang	43,121,511	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 06 1.01 03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum				30 Unit	853,517,744	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Koleksi Museum NTB	30 Unit	886,502,515	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 06 1.01 04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia				9 Unit	64,661,119	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Koleksi Museum NTB	9 Unit	67,159,991	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 06 1.01 05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi				11 Unit	31,459,313	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Koleksi Museum NTB	11 Unit	32,675,080	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
TOTAL							1,906,088,198,358								1,553,981,822,773	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
														Nasional	Daerah							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						178,786,620,500								178,786,620,500			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Tekniss Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	30,826,216,207						100 Persen	30,826,216,207				
1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	808,388,000						7 Dokumen	808,388,000				
1	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	274,919,470	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	Dana Insentif Daerah		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Penyusun Dokumen Perencanaan, Anggaraan dan Pelaporan Dinas Kesehatan Provinsi NTB	1 Dokumen	274,919,470	Dinas Kesehatan			
1	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	17,583,500	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	Dana Insentif Daerah		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Penyusun Dokumen Perencanaan, Anggaraan dan Pelaporan Dinas Kesehatan Provinsi NTB	1 Dokumen	17,583,500	Dinas Kesehatan			
1	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	10,890,400	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	Dana Insentif Daerah		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Penyusun Dokumen Perencanaan, Anggaraan dan Pelaporan Dinas Kesehatan Provinsi NTB	1 Dokumen	10,890,400	Dinas Kesehatan			
1	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	10,058,600	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	Dana Insentif Daerah		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Penyusun Dokumen Perencanaan, Anggaraan dan Pelaporan Dinas Kesehatan Provinsi NTB	1 Dokumen	10,058,600	Dinas Kesehatan			
1	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	14,951,200	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	Dana Insentif Daerah		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Penyusun Dokumen Perencanaan, Anggaraan dan Pelaporan Dinas Kesehatan Provinsi NTB	1 Dokumen	14,951,200	Dinas Kesehatan			
1	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi				1 Dokumen	22,158,600	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	Dana Insentif Daerah		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Penyusun Dokumen Perencanaan, Anggaraan dan Pelaporan Dinas Kesehatan Provinsi NTB	1 Dokumen	22,158,600	Dinas Kesehatan			
1	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Dokumen	457,826,230	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	Dana Insentif Daerah		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Penyusun Dokumen Perencanaan, Anggaraan dan Pelaporan Dinas Kesehatan Provinsi NTB	1 Dokumen	457,826,230	Dinas Kesehatan			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi keuangan	Jenis		Jenis	3 Jenis	24,608,487,460						3 Jenis	24,608,487,460	
1 02 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				350 Orang	24,153,328,166	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pengelola Administrasi Keuangan Dinas Kehatan Provinsi NTB	350 Orang	24,153,328,166	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	447,534,494	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pengelola Administrasi Keuangan Dinas Kehatan Provinsi NTB	1 Dokumen	447,534,494	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Dokumen	7,624,800	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pengelola Administrasi Keuangan Dinas Kehatan Provinsi NTB	1 Dokumen	7,624,800	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis pelayanan administrasi Barang Milik Daerah	Jenis		Jenis	1 Jenis	85,041,700						1 Jenis	85,041,700	
1 02 01 1.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Dokumen	85,041,700	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pengelola Barang Milik Daerah Dinas Kesehatan Provinsi NTB	1 Dokumen	85,041,700	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi Umum	Jenis		Jenis	6 Jenis	1,340,219,506						6 Jenis	1,340,219,506	
1 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	99,451,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pengelola Administrasi Umum Dinas Kesehatan Provinsi NTB	12 Paket	99,451,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	697,480,096	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pengelola Administrasi Umum Dinas Kesehatan Provinsi NTB	15 Paket	697,480,096	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	81,250,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pengelola Administrasi Umum Dinas Kesehatan Provinsi NTB	12 Paket	81,250,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	52,415,210	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pengelola Administrasi Umum Dinas Kesehatan Provinsi NTB	2 Paket	52,415,210	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	7,879,200	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pengelola Administrasi Umum Dinas Kesehatan Provinsi NTB	1 Dokumen	7,879,200	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	401,744,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pengelola Administrasi Umum Dinas Kesehatan Provinsi NTB	6 Laporan	401,744,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Mebel yang diadakan	Paket		Paket	7 Paket	64,200,000						7 Paket	64,200,000	
1 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				7 Paket	64,200,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pengelola BMD Dinas Kesehatan Provinsi NTB	7 Paket	64,200,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis		Jenis	3 Jenis	2,868,804,641						3 Jenis	2,868,804,641	
1 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5,149,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pengelola Jasa Penunjang Urusan Dinas Kesehatan Provinsi NTB	1 Laporan	5,149,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	734,620,521	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pengelola Jasa Penunjang Urusan Dinas Kesehatan Provinsi NTB	3 Laporan	734,620,521	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	2,129,035,120	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pengelola Jasa Penunjang Urusan Dinas Kesehatan Provinsi NTB	4 Laporan	2,129,035,120	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan BMD	Jenis		Jenis	3 Jenis	1,051,074,900						3 Jenis	1,051,074,900	
1 02 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				25 Unit	336,840,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pengelola Pemeliharaan BMD Dinas Kesehatan Kesehatan	25 Unit	336,840,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	75,810,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pengelola Pemeliharaan BMD Dinas Kesehatan Kesehatan	10 Unit	75,810,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	638,424,900	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pengelola Pemeliharaan BMD Dinas Kesehatan Kesehatan	2 Unit	638,424,900	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMEMUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan	Persen Persen Persen		Persen Persen Persen	85 Persen 100 Persen 97 Persen	146,662,924,952						85 Persen 100 Persen 97 Persen	146,662,924,952	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		obat rasional Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan													
1 02 02 1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Jenis Obat Program Yang Diaakan	Jenis		Jenis	20 Jenis	2,929,765,250						20 Jenis	2,929,765,250	
1 02 02 1.01 21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	171,624,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Pengelola Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kab / Kota, Puskemas	1 Dokumen	171,624,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.01 22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan				3 Jenis	2,758,141,250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Pengelola Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kab / Kota, Puskemas	3 Jenis	2,758,141,250	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab / Kota yang mendapat pembinaan pendampingan dan Monev / investigasi kegiatan UKP RujukanUKM danUKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota	10 Kabupaten/Kota	143,123,189,058						10 Kabupaten/Kota	143,123,189,058	
1 02 02 1.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar				27707 Orang	6,117,261,412	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Pengelola Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Dinas Kesehatan Kab / Kota, Puskemas, Rumah Sakit	27707 Orang	6,117,261,412	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4200 Orang	1,059,008,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Pengelola Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Dinas Kesehatan Kab / Kota, Puskemas, Rumah Sakit	4200 Orang	1,059,008,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				50 Dokumen	3,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Pengelola Layanan Kesehatan untuk	50 Dokumen	3,000,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK			UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Dinas Kesehatan Kab / Kota, Puskemas, Rumah Sakit			
1 02 02 1.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif				50 Dokumen	111,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Pengelola Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Dinas Kesehatan Kab / Kota, Puskemas, Rumah Sakit	50 Dokumen	111,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut				40 Dokumen	189,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Pengelola Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Dinas Kesehatan Kab / Kota, Puskemas, Rumah Sakit	40 Dokumen	189,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				10 Dokumen	16,291,570,588	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting DAK Non Fisik-BOKKB- BOK		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Pengelola Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Dinas Kesehatan Kab / Kota, Puskemas, Rumah Sakit	10 Dokumen	16,291,570,588	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				4 Dokumen	293,906,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB- BOK		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Pengelola Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Dinas Kesehatan Kab / Kota, Puskemas, Rumah Sakit	4 Dokumen	293,906,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				10 Dokumen	6,303,775,999	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB- BOK Dana Insentif Daerah		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Pengelola Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Dinas Kesehatan Kab / Kota, Puskemas, Rumah Sakit	10 Dokumen	6,303,775,999	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				383 Dokumen	1,027,764,324	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK Dana Insentif Daerah		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Pengelola Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Dinas Kesehatan Kab / Kota, Puskemas,	383 Dokumen	1,027,764,324	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
												Rumah Sakit			
1 02 02 1.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				10 Dokumen	1,233,743,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Pengelola Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Dinas Kesehatan Kab / Kota, Puskemas, Rumah Sakit	10 Dokumen	1,233,743,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				10 Dokumen	50,316,240	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Pengelola Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Dinas Kesehatan Kab / Kota, Puskemas, Rumah Sakit	10 Dokumen	50,316,240	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				171 Dokumen	260,853,194	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Pengelola Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Dinas Kesehatan Kab / Kota, Puskemas, Rumah Sakit	171 Dokumen	260,853,194	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis				0 Orang	155,319,562	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Pengelola Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Dinas Kesehatan Kab / Kota, Puskemas, Rumah Sakit	0 Orang	155,319,562	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				11 Dokumen	750,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Pengelola Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Dinas Kesehatan Kab / Kota, Puskemas, Rumah Sakit	11 Dokumen	750,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				10 Dokumen	105,172,040,501	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok- Pembayaran Iuran JKN DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Pengelola Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Dinas Kesehatan Kab / Kota, Puskemas, Rumah Sakit	10 Dokumen	105,172,040,501	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				10 Dokumen	23,250,000	Semua Kab/Kota, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Pengelola Layanan	10 Dokumen	23,250,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kecamatan, Semua Kelurahan				Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Dinas Kesehatan Kab / Kota, Puskemas, Rumah Sakit			
1 02 02 1.02 18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota				10 Dokumen	101,612,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Pengelola Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Dinas Kesehatan Kab / Kota, Puskemas, Rumah Sakit	10 Dokumen	101,612,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				10 Dokumen	640,530,024	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB- BOK		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Pengelola Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Dinas Kesehatan Kab / Kota, Puskemas, Rumah Sakit	10 Dokumen	640,530,024	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 20	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas				10 Kabupaten / Kota	64,059,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Pengelola Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Dinas Kesehatan Kab / Kota, Puskemas, Rumah Sakit	10 Kabupaten / Kota	64,059,500	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota				10 Dokumen	80,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Pengelola Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Dinas Kesehatan Kab / Kota, Puskemas, Rumah Sakit	10 Dokumen	80,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				10 Unit	72,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Pengelola Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Dinas Kesehatan Kab / Kota, Puskemas, Rumah Sakit	10 Unit	72,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 24	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				10 Dokumen	54,716,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Pengelola Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Dinas Kesehatan Kab /	10 Dokumen	54,716,500	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
												Kota, Puskesmas, Rumah Sakit			
1 02 02 1.02 25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				20 Paket	9,712,204	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Pengelola Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Dinas Kesehatan Kab / Kota, Puskesmas, Rumah Sakit	20 Paket	9,712,204	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 26	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan				10 Dokumen	61,750,010	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Pengelola Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Dinas Kesehatan Kab / Kota, Puskesmas, Rumah Sakit	10 Dokumen	61,750,010	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Profil Kesehatan Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	408,571,089						1 Dokumen	408,571,089	
1 02 02 1.03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				1 Dokumen	370,571,089	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pengelola Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	370,571,089	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.03 03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Tersedia				3 Unit	38,000,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	Dana Insentif Daerah		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pengelola Sistem Informasi Kesehatan	3 Unit	38,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah RS yang dibina tentang tata kelola Rumah Sakit	Unit		Unit	45 Unit	201,399,555						45 Unit	201,399,555	
1 02 02 1.04 02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan				45 Unit	109,126,655	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Pengelola Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	45 Unit	109,126,655	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan				0 Unit	92,272,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Pengelola Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0 Unit	92,272,900	Dinas Kesehatan
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Persen		Persen	2,5 Persen	583,672,984						2,5 Persen	583,672,984	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 03 1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	Orang		Orang	500 Orang	89,943,700						500 Orang	89,943,700	
1 02 03 1.01 01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				112 Orang	29,983,700	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Pengelola SDM Kesehatan	112 Orang	29,983,700	Dinas Kesehatan
1 02 03 1.01 02	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi				112 Orang	59,960,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Pengelola SDM Kesehatan	112 Orang	59,960,000	Dinas Kesehatan
1 02 03 1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah dokumen rencana pemenuhan Minimal 9 Tenaga Kesehatan di puskesmas Provinsi NTB	Dokumen		Dokumen	11 Dokumen	493,729,284						11 Dokumen	493,729,284	
1 02 03 1.02 01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				500 Orang	454,249,284	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, SDM Kesehatan	500 Orang	454,249,284	Dinas Kesehatan
1 02 03 1.02 02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan				1 Dokumen	39,480,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, SDM Kesehatan	1 Dokumen	39,480,000	Dinas Kesehatan
1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana kefarmasian dan alat kesehatan yang memenuhi syarat	Persen		Persen	95 Persen	100,229,387						95 Persen	100,229,387	
1 02 04 1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Jumlah Sarana PBF Cabang dan Cabang PAK yang dibina dan diawasi	Sarana		Sarana	18 Sarana	96,200,887						18 Sarana	96,200,887	
1 02 04 1.01 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan				18 Sarana	96,200,887	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakaat, Pedagang Besar Farmasi, Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan	18 Sarana	96,200,887	Dinas Kesehatan
1 02 04 1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang dibina dan diawasi	Sarana		Sarana	3 Sarana	4,028,500						3 Sarana	4,028,500	
1 02 04 1.02 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan				3 Sarana	4,028,500		Dana Insentif Daerah		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Usaha Kecil Obat Tradisional	3 Sarana	4,028,500	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Kecil Obat Tradisional	Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional													
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Germas (Persen)	%		%	100 %	613,576,970						100 %	613,576,970	
1 02 05 1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi penyusunan Regulasi Kebijakan Germas	Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota	7 Kabupaten/Kota	350,000,000						7 Kabupaten/Kota	350,000,000	
1 02 05 1.01 01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				10 Dokumen	350,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Lintas Sektor	10 Dokumen	350,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 05 1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Saluran Media yang digunakan dalam penyebarluasan informasi Kesehatan	Jenis		Jenis	7 Jenis	103,576,970						7 Jenis	103,576,970	
1 02 05 1.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				7 Dokumen	103,576,970	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Pengelola Program Komunikasi Informasi dan Edukasi	7 Dokumen	103,576,970	Dinas Kesehatan
1 02 05 1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Puskesmas yang Dibina Germas dan PHBS	Puskesmas		Puskesmas	40 Puskesmas	160,000,000						40 Puskesmas	160,000,000	
1 02 05 1.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM				40 Dokumen	160,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Pengelola Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	40 Dokumen	160,000,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						31,963,694,582							31,963,694,582	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Tekniss Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	21,901,180,582						100 Persen	21,901,180,582	
1 02 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1,324,000						1 Dokumen	1,324,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1,324,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Penyusun Dokumen Perencanaan dan pelaporan	1 Laporan	1,324,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi keuangan	Jenis		Jenis	6 Jenis	3,835,274,000						6 Jenis	3,835,274,000	
1 02 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				63 Orang/ Bulan	3,775,000,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	ASN Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi	63 Orang/ Bulan	3,775,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	59,047,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	ASN Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi	1 Dokumen	59,047,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1,227,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	ASN Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi	1 Laporan	1,227,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Pelayanan Adminstras Umum	Jenis		Jenis	7 Jenis	148,613,000						7 Jenis	148,613,000	
1 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				60 Paket	7,164,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pengelola Administrasi	60 Paket	7,164,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah PaketJumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				11 Paket	22,023,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pengelola Administrasi	11 Paket	22,023,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				250 Paket	13,683,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pengelola Administrasi	250 Paket	13,683,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				60 Paket	58,289,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pengelola Administrasi	60 Paket	58,289,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	9,342,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pengelola Administrasi	1 Dokumen	9,342,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	16,526,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pengelola Administrasi	1 Paket	16,526,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	21,586,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pengelola Administrasi	8 Laporan	21,586,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang diadakan	Jenis		Jenis	4 Jenis	8,828,299,840						4 Jenis	8,828,299,840	
1 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Paket	7,968,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pengelola BMD	6 Paket	7,968,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	7,926,118,840	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	Dana Insentif Daerah		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pengelola BMD	15 Unit	7,926,118,840	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	894,213,000		Dana Insentif Daerah		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pengelola BMD	4 Unit	894,213,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Balabkes & Kalibrasi)	Jenis		Jenis	3 Jenis	1,409,490,998						3 Jenis	1,409,490,998	
1 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5,948,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pengelola Jasa Penunjang Urusan Pemerintag Daerah	1 Laporan	5,948,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	629,587,998	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pengelola Jasa Penunjang Urusan Pemerintag Daerah	3 Laporan	629,587,998	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	773,955,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pengelola Jasa Penunjang Urusan Pemerintag Daerah	1 Laporan	773,955,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan BMD	Jenis		Jenis	3 Jenis	110,609,000						3 Jenis	110,609,000	
1 02 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				7 Unit	65,000,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pengelola Pemeliharaan BMD	7 Unit	65,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	24,005,000	Kota Mataram, Mataram, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pengelola Pemeliharaan BMD	30 Unit	24,005,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan							
1 02 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	21,604,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pengelola Pemeliharaan BMD	3 Unit	21,604,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Meningkatnya Mutu Pelayanan BLUD	Tahun		Tahun	1 Tahun	7,567,569,744						1 Tahun	7,567,569,744	
1 02 01 1.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Palayanan				1 Unit Kerja	7,567,569,744	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pengelola BLUD	1 Unit Kerja	7,567,569,744	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	Persen		Persen	85 Persen	9,954,741,000						85 Persen	9,954,741,000	
1 02 02 1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah sarana prasarana dan alat kesehatan yang disediakan	Paket		Paket	4 Paket	9,599,157,000						4 Paket	9,599,157,000	
1 02 02 1.01 02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				1 Unit	8,134,743,170	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat dan Pengelola Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	1 Unit	8,134,743,170	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.01 08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan				1 Unit	280,197,830	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat dan Pengelola Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	1 Unit	280,197,830	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.01 13	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara				30 Unit	88,175,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat dan Pengelola Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	30 Unit	88,175,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.01 14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan				300 Paket	988,990,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat dan Pengelola Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	300 Paket	988,990,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.01 15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan				50 Unit	107,051,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat dan Pengelola Fasilitas Pelayanan, Sarana,	50 Unit	107,051,000	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
										Nasional	Daerah					
		Dipelihara									Prasarana dan Alat Kesehatan					
1 02 02 1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab / Kota yang mendapat pembinaan pendampingan dan Monev / investigasi kegiatan UKP RujukanUKM dan UKMR ujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota	10 Kabupaten/Kota	12,085,000					10 Kabupaten/Kota	12,085,000			
1 02 02 1.02 19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				10 Dokumen	12,085,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat dan Pengelola Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan	10 Dokumen	12,085,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah RS yang dibina	RS		RS	45 RS	343,499,000						45 RS	343,499,000		
1 02 02 1.04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				10 Dokumen	343,499,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Pengelola Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan	10 Dokumen	343,499,000	Dinas Kesehatan	
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Persen		Persen	3 Persen	107,773,000						3 Persen	107,773,000		
1 02 03 1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah ASN yang ikut pelatihan/Magang	Orang		Orang	10 Orang	107,773,000						10 Orang	107,773,000		
1 02 03 1.02 01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				10 Orang	107,773,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	ASN SDM Kesehatan	10 Orang	107,773,000	Dinas Kesehatan	
TOTAL						210,750,315,082								210,750,315,082		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						331,764,104,649							0	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip	0		0	82,5 0	307,225,878,749						82,5 0	0	
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan waktu pembayaran	%		%	100 %	95,769,036,926						100 %	0	
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ketepatan waktu pembayaran gaji				100 %	95,769,036,926	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	RSUD Provinsi NTB	100 %	0	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase karyawan yang mengikuti pelatihan formal/pendidikan formal/tes kebugaran/MCU	%		%	60 %	325,736,000						60 %	0	
1	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase karyawan yang melanjutkan pendidikan formal				100 %	325,736,000	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	PNS RSUD Provinsi NTB	100 %	0	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ketepatan waktu pembayaran jasa	%		%	100 %	1,985,797,823						100 %	0	
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ketepatan waktu pembayaran jasa sumber daya listrik dan air				100 %	1,800,997,823	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pelayanan RSUD Prov. NTB dan Tenaga Honor Daerah	100 %	0	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ketepatan waktu pembayaran gaji tenaga honor daerah				100 %	184,800,000	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pelayanan RSUD Prov. NTB dan Tenaga Honor Daerah	100 %	0	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase capaian target pendapatan BLUD	%		%	100 %	209,145,308,000						100 %	0	
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase capaian target pendapatan BLUD				100 %	209,145,308,000	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Pendapatan dari BLUD		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	RSUD Provinsi NTB	100 %	0	Dinas Kesehatan
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase SPM yang mencapai target Persentase SPM yang mencapai target	% %		% %	88 % 90 %	24,538,225,900						88 % 90 %	0	
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat	Persentase kelengkapan Sarana, Prasarana dan alkes (Data ASPAK)	% %		% %	90 % 90 %	19,831,561,700						90 % 90 %	0	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
	Daerah Provinsi	Persentase kelengkapan sarpras dan alat kesehatan (data ASPAK)														
1 02 02 1.01 03	Pengembangan Rumah Sakit						0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	RSUD Provinsi NTB		0	Dinas Kesehatan	
1 02 02 1.01 10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase kelengkapan alat kesehatan (Data ASPAK)				90 %	12,283,642,133	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4) Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	RSUD Provinsi NTB	90 %	0	Dinas Kesehatan	
1 02 02 1.01 17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase alat kesehatan yang terpelihara				100 %	7,547,919,567	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	RSUD Provinsi NTB	100 %	0	Dinas Kesehatan	
1 02 02 1.01 18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara				22 unit	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	RSUD Provinsi NTB	22 unit	0	Dinas Kesehatan	
1 02 02 1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%		%	100 %	3,206,664,200						100 %	0		
1 02 02 1.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase ODHA yang mendapatkan pemeriksaan CD4/viral load dan meso ARV				90 %	206,664,200	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Layanan VCT (HIV-AIDs) dan pasien maskin	90 %	0	Dinas Kesehatan	
1 02 02 1.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Persentase masyarakat miskin, terlantar dan masalah sosial lainnya yang mendapatkan layanan mobil ambulans / mobil jenazah Persentase masyarakat miskin, terlantar dan masalah sosial lainnya yang mendapatkan pelayanan kesehatan				100 % 100 %	3,000,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Layanan VCT (HIV-AIDs) dan pasien maskin	100 % 100 %	0	Dinas Kesehatan	
1 02 02 1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase capaian nilai akreditasi	%		%	80 %	1,500,000,000						80 %	0		
1 02 02 1.04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Persentase capaian nilai akreditasi				80 %	1,500,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	RSUD Prov. NTB	80 %	0	Dinas Kesehatan	
TOTAL							331,764,104,649								0	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						63,955,760,381								0		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	nilai sakip	nilai		nilai	81 nilai	45,222,646,794						81 nilai	0			
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang		orang	280 orang	24,447,702,669						280 orang	0			
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				280 Orang/ Bulan	24,447,702,669	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	280 Orang/ Bulan	0	Dinas Kesehatan		
1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	terpenuhinya standar pelayanan minimal	persen		persen	60 persen	250,000,000						60 persen	0			
1	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah orang				291 Orang	250,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		pegawai	291 Orang	0	Dinas Kesehatan		
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase kegiatan yang dilaporkan	tahun persen		tahun persen	1 tahun 100 persen	250,000,000						1 tahun 100 persen	0			
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah mebeler				1 tahun	100,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN dan Non ASN	1 tahun	0	Dinas Kesehatan		
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah laporan				12 laporan	100,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN dan Non ASN	12 laporan	0	Dinas Kesehatan		
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan				2 Laporan	50,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN dan Non ASN	2 Laporan	0	Dinas Kesehatan		
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah jenis sumber daya persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	jenis persen		jenis persen	3 jenis 100 persen	500,000,000						3 jenis 100 persen	0			
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis Sumber Daya				3 jenis	500,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			operasional rumah sakit	3 jenis	0	Dinas Kesehatan		
1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	persentase realisasi pendapatan BLUD	persen		persen	100 persen	19,774,944,125						100 persen	0			
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah pendapatan BLUD				19774944125 rupiah	19,774,944,125	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Pendapatan dari BLUD			operasional rumah sakit	19774944125 rupiah	0	Dinas Kesehatan		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Persentase Capaian elemen akreditasi	% persen		% persen	80 % 76.19 persen	11,755,113,587						80 % 76.19 persen	0			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	sesuai standar persentase SPM yang mencapai target Persentase SPM yang mencapai target	%		%	76.19 %							76.19 %		
1 02 02 1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	persentase ketersediaan fasilitas pelayanan sarana,prasarana dan alat kesehatan	persen		persen	93 persen	10,217,563,587						93 persen	0	
1 02 02 1.01 09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	jumlah unit gedung				1 tahun	3,682,695,487	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			fasilitas sarana,prasarana dan alat kesehatan	1 tahun	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.01 10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	jumlah unit alat kesehatan				96 Unit	2,000,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			fasilitas sarana,prasarana dan alat kesehatan	96 Unit	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.01 12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	jumlah unit				85 Unit	107,574,073	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			fasilitas sarana,prasarana dan alat kesehatan	85 Unit	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.01 16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah unit				1 Unit	341,684,027	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			fasilitas sarana,prasarana dan alat kesehatan	1 Unit	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.01 22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah jenis				13 jenis	4,085,610,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			fasilitas sarana,prasarana dan alat kesehatan	13 jenis	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	persentase masyarakat yang terlayani	persen		persen	100 persen	1,239,240,000						100 persen	0	
1 02 02 1.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah orang yang terlayani				4363 Orang	100,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			masyarakat	4363 Orang	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah orang yang terlayani				1 tahun	50,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			masyarakat	1 tahun	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah orang yang terlayani				36020 orang	614,240,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			masyarakat	36020 orang	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah orang yang terlayani				350 Orang	50,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			masyarakat	350 Orang	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah orang yang terlayani				80 orang	400,000,000	Kota Mataram,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			masyarakat	80 orang	0	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
								Sandubaya, Selagalas								
1 02 02 1.02 22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah orang yang terlayani				550 orang	25,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			masyarakat	550 orang		0 Dinas Kesehatan	
1 02 02 1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	persentase elemen akreditasi yang terpenuhi	persen		persen	80 persen	298,310,000						80 persen	0		
1 02 02 1.04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	jumlah dokumen elemen akriditasi yang terpenuhi				2 dokumen	298,310,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			Rumah Sakit	2 dokumen		0 Dinas Kesehatan	
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Presentase kapasitas sumber daya manusia kesehatan yang mencapai target	persen		persen	100 persen	6,978,000,000						100 persen	0		
1 02 03 1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	orang		orang	155 orang	6,978,000,000						155 orang	0		
1 02 03 1.01 01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	jumlah pegawai Non PNS				155 Orang	6,978,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai Non PNS	155 Orang		0 Dinas Kesehatan	
TOTAL							63,955,760,381								0	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						77,700,568,006							500,000,000			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	angka		angka	68 angka	50,304,932,944						68 angka	0			
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jenis %		Jenis %	1 Jenis 100 %	14,135,204,656						1 Jenis 100 %	0			
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				150 Orang/ Bulan	14,135,204,656	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN	150 Orang/ Bulan	0	Dinas Kesehatan		
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	3,555,999,302						100 %	0			
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Jenis	1,029,999,302	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	3 Jenis	0	Dinas Kesehatan		
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Orang				54 Orang	2,526,000,000	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	54 Orang	0	Dinas Kesehatan		
1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan BLUD Persentase Pendapatan BLUD	Tahun %		Tahun %	1 Tahun 100 %	32,613,728,986						1 Tahun 100 %	0			
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pendapatan BLUD				32613728986 Rupiah	32,613,728,986	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	32613728986 Rupiah	0	Dinas Kesehatan		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase SPM yang mencapai target	%		%	100 %	10,395,635,062						100 %	500,000,000			
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang diadakan	Paket		Paket	4 Paket	9,735,635,062						4 Paket	0			
1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				200 Unit	2,235,635,062	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik			Masyarakat	200 Unit	0	Dinas Kesehatan		
1	02	02	1.01	11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Jenis Obat- Obatan dan BMHP yang diadakan				12 Jenis	6,000,000,000	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			Masyarakat	12 Jenis	0	Dinas Kesehatan		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 1.01 17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				10 Unit	1,000,000,000	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	10 Unit	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.01 19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Unit Gedung yang Terpelihara				5 Unit	500,000,000	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			Masyarakat	5 Unit	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang		Orang	100 Orang	500,000,000						100 Orang	0	
1 02 02 1.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah Masyarakat Miskin, Terlantar dan Masalah Sosial Lainnya yang Tertangani				100 Dokumen	500,000,000	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			Masyarakat miskin, terlantar dan masalah sosial lainnya	100 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Elemen Akreditasi sesuai standar	Elemen		Elemen	15 Elemen	160,000,000						15 Elemen	500,000,000	
1 02 02 1.04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Dokumen yang Tersusun Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan				1 Dokumen 1 Unit	160,000,000	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	1 Dokumen 1 Unit	500,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Kesehatan yang berkualitas	Orang		Orang	350 Orang	17,000,000,000						350 Orang	0	
1 02 03 1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan	Orang		Orang	320 Orang	17,000,000,000						320 Orang	0	
1 02 03 1.01 01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				320 Orang	17,000,000,000	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	320 Orang	0	Dinas Kesehatan
TOTAL							77,700,568,006							500,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						72,350,463,177								0		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Tekniss Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	10,490,158,868						100 Persen	0			
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi keuangan	Jenis		Jenis	1 Jenis	125,160,388						1 Jenis	0			
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				200 Orang	125,160,388	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Rumah Sakit Mandalika	200 Orang	0	Dinas Kesehatan		
1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jenis		Jenis	1 Jenis	0						1 Jenis	0			
1	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang 200 Orang	0	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Rumah Saki Mandalika	0 Orang 200 Orang	0	Dinas Kesehatan		
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis		Jenis	2 Jenis	7,362,078,480						2 Jenis	0			
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	1,417,892,400	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Rumah Sakit Mandalika	3 Laporan	0	Dinas Kesehatan		
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	5,944,186,080	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Rumah Sakit Mandalika	4 Laporan	0	Dinas Kesehatan		
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang	Jenis		Jenis	1 Jenis	2,178,920,000						1 Jenis	0			
1	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				6 Unit	2,178,920,000	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Rumah Sakit Mandalika	6 Unit	0	Dinas Kesehatan		
1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Meningkatnya Mutu Pelayanan BLUD	Tahun		Tahun	1 Tahun	824,000,000						1 Tahun	0			
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	824,000,000	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Rumah Sakit Mandalika	1 Unit Kerja	0	Dinas Kesehatan		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	Persen Persen		Persen Persen	85 Persen 80 Persen	61,860,304,309						85 Persen 80 Persen	0	
1 02 02 1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Jenis Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jenis		Jenis	4 Jenis	59,852,447,109						4 Jenis	0	
1 02 02 1.01 03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	27,206,045,910	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Rumah Sakit Mandalika	1 Unit	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.01 10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				104 Unit	19,350,463,494	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Rumah Sakit Mandalika	104 Unit	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.01 16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan				40 Unit	9,961,510,855	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Rumah Sakit Mandalika	40 Unit	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.01 22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan				3 Paket	3,334,426,850	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Rumah Sakit Mandalika	3 Paket	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kebutuhan Operasional Rumah Sakit Yang Terpenuhi	Tahun		Tahun	1 Tahun	1,007,857,200						1 Tahun	0	
1 02 02 1.02 22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1,007,857,200	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Rumah Sakit Mandalika	1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Capaian Elemen Akreditasi Sesuai Standar	Tahun		Tahun	1 Tahun	1,000,000,000						1 Tahun	0	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1 02 02 1.04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Dokumen Elemen Akreditasi yang Terpenuhi				2 Dokumen	1,000,000,000	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Rumah Sakit Mandalika	2 Dokumen	0	Dinas Kesehatan	
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Persen		Persen	3 Persen	0						3 Persen	0		
1 02 03 1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah Kebutuhan SDM Kesehatan	Orang		Orang	200 Orang	0						200 Orang	0		
1 02 03 1.01 01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				200 Orang	0	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Rumah Sakit Mandalika	200 Orang	0	Dinas Kesehatan	
TOTAL							72,350,463,177								0	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																				
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
													Nasional	Daerah						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						30,456,104,264								0	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Tekniss Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	21,961,993,226						100 Persen	0		
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi keuangan	Jenis		Jenis	1 Jenis	9,980,211,537						1 Jenis	0		
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				110 Orang	9,980,211,537	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pegawai RS Mata NTB	110 Orang	0	Dinas Kesehatan	
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Pelayanan Adminstras Umum	Jenis		Jenis	2 Jenis	0						2 Jenis	0		
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket 0 Paket	0	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	ASN RS Mata NTB	1 Paket 0 Paket	0	Dinas Kesehatan	
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	0	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	ASN RS Mata NTB	1 Laporan	0	Dinas Kesehatan	
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana yang diadakan	Jenis		Jenis	1 Jenis	0						1 Jenis	0		
1	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit 0 Unit	0	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	RS MATA NTB	4 Unit 0 Unit	0	Dinas Kesehatan	
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pelayanan Adminstras Umum	Jenis		Jenis	2 Jenis	2,756,414,260						2 Jenis	0		
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan 0 Laporan	417,914,260	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	0	3 Laporan 0 Laporan	0	Dinas Kesehatan	
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan				1 Laporan 0 Laporan	2,338,500,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4) Meningkatkan kualitas kesehatan	0	1 Laporan 0 Laporan	0	Dinas Kesehatan	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan									SDM (PD-4)				
1 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis		Jenis	1 Jenis	0						1 Jenis	0	
1 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /ehabilitasi				0 Unit 2 Unit	0	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	0	0 Unit 2 Unit	0	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Meningkatnya Mutu Pelayanan BLUD	Tahun		Tahun	1 Tahun	9,225,367,429						1 Tahun	0	
1 02 01 1.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Palayanan				1 Unit Kerja	9,225,367,429	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4) Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	0	1 Unit Kerja	0	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMEMUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	Persen		Persen	80 Persen	8,494,111,038						80 Persen	0	
1 02 02 1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Jenis Prasarana Fasilitas Layanan kesehatan yang diadakan	Jenis		Jenis	4 Jenis	8,494,111,038						4 Jenis	0	
1 02 02 1.01 03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				0 Unit 1 Unit	500,000,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat NTB pada umumnya RS Mata NTB pada khususnya	0 Unit 1 Unit	0	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1 02 02 1.01 10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	2,000,000,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4) Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4) Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat NTB pada umumnya RS Mata NTB pada khususnya	1 Unit	0	Dinas Kesehatan	
1 02 02 1.01 12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	719,874,651	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4) Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4) Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat NTB pada umumnya RS Mata NTB pada khususnya	1 Unit	0	Dinas Kesehatan	
1 02 02 1.01 22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan				75 Paket	5,274,236,387	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat NTB pada umumnya RS Mata NTB pada khususnya	75 Paket	0	Dinas Kesehatan	
TOTAL							30,456,104,264								0	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						253,229,962,831								329,087,295,000	
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						58,141,704,549							129,639,037,500		
1	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						827,362,280							329,683,000		
1	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun				0 Dokumen 2 Dokumen	272,160,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		0 Dokumen 2 Dokumen	272,160,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	03	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						57,523,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)			57,523,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	03	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah dokumen Rencana Anggaran perubahan yang tersusun				0 Dokumen 2 Dokumen	41,825,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		0 Dokumen 2 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	03	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Anggaran yang tersusun Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen 0 Dokumen	40,265,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		1 Dokumen 0 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	03	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Anggaran perubahan yang tersusun Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 dokumen 0 Dokumen	50,514,280		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		1 dokumen 0 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Kinerja SKPD yang tersusun Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Dokumen/ 0 Laporan	50,303,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		2 Dokumen/ 0 Laporan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja yang tersusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Dokumen/ 0 Laporan	314,772,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		4 Dokumen/ 0 Laporan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						48,019,218,340							129,229,214,000	
1 03 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/ Bulan	47,521,011,340		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		12 Orang/ Bulan	127,828,230,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Dokumen/ 12 Orang/ Bulan	66,994,000				Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		1 Dokumen/ 12 Orang/ Bulan	173,421,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	117,310,000				Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		12 Dokumen	327,152,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	50,035,000				Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		1 Dokumen	139,537,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	66,827,000				Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		1 Laporan	211,367,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	55,613,000				Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		1 Dokumen	155,093,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				12 Laporan	66,173,000				Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		12 Laporan	184,543,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen 1 Dokumen	75,255,000				Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		0 Dokumen 1 Dokumen	209,871,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						80,140,500							80,140,500	
1 03 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	34,224,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Dokumen	34,224,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	11,193,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Laporan	11,193,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	32,350,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Laporan	32,350,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	2,373,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Dokumen	2,373,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						63,249,000							0	
1 03 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan-nya ASN yang disediakan				1 set	37,173,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		1 set	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang 7 Orang	26,076,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		0 Orang 7 Orang	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2,310,970,500							0	
1 03 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 bulan	212,083,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		12 bulan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 bulan	1,358,238,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		12 bulan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 bulan	42,321,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		12 bulan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 bulan	34,586,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan		12 bulan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
											(PD-2)				
1 03 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1.08 Eksemplar	1,080,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		1.08 Eksemplar	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1000 orang	69,872,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		1000 orang	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				83 OT	592,790,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2) Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		83 OT	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1,926,759,000							0	
1 03 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				10 Unit	1,829,876,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		10 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	96,883,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		1 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3,521,473,929							0	
1 03 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2500 surat	5,017,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		2500 surat	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 jenis	591,127,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		3 jenis	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 jenis	36,519,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		5 jenis	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				32 orang	2,888,810,929		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		32 orang	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,392,531,000							0	
1 03 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				45 Unit	823,181,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		45 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	27,923,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan		40 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
											pengembangan sektor unggulan (PD-2)				
1 03 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	434,895,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		5 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	67,082,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		20 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	39,450,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		20 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase kenaikan Areal Layanan Irigasi	%		%	76.28 %	21,316,310,100						76.28 %	21,316,310,100	
1 03 02 1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan SDA pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola	Unit		Unit	20 Unit	7,801,037,000						20 Unit	7,801,037,000	
1 03 02 1.01 01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				1 Dokumen	56,389,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat	1 Dokumen	56,389,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 1.01 04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun				1 Dokumen	37,144,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat	1 Dokumen	37,144,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 1.01 07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun				9 Lokasi	1,894,422,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan		Masyarakat	9 Lokasi	1,894,422,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
										Pelayanan Dasar					
1 03 02 1.01 10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				1320 meter	2,063,181,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Masyarakat	1320 meter	2,063,181,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 1.01 21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi				16 Unit	3,224,782,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Masyarakat	16 Unit	3,224,782,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 1.01 63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Lembaga	525,119,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Masyarakat	2 Lembaga	525,119,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota						13,515,273,100							13,515,273,100	
1 03 02 1.02 01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun				5 Dokumen	444,493,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		5 Dokumen	444,493,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 1.02 08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Daerah Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				3 DI	11,306,004,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				3 DI	11,306,004,100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 1.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Daerah Irigasi Yang Direhabilitasi				8 DI	1,764,776,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan		8 DI	1,764,776,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
											sektor unggulan (PD-2)				
1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan Air Minum	%		%	80.59 %	10,845,489,000						80.59 %	0	
1 03 03 1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah SPAM yang dikelola dan dikembangkan	SR		SR	240 SR	10,845,489,000						240 SR	0	
1 03 03 1.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM				4 Dokumen	545,489,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Masyarakat	4 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 03 1.01 03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas Pembangunan SPAM Regional				240 SR	10,300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Masyarakat	240 SR	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase pengelolaan sampah	%		%	70 %	13,037,309,515						70 %	0	
1 03 04 1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah peserta Rapat Koordinasi dan konsultasi Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Orang		Orang	100 Orang	13,037,309,515						100 Orang	0	
1 03 04 1.01 07	Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota				5 Dokumen 52 kegiatan	13,037,309,515		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Masyarakat	5 Dokumen 52 kegiatan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Prosentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%		%	82.96 %	125,000,000						82.96 %	0	
1 03 05 1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah peserta Rapat koordinasi dan konsultasi Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang		Orang	100 Orang	125,000,000						100 Orang	0	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Lintas Kab/Kota													
1 03 05 1.01 08	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota				1 Dokumen	125,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Masyarakat	1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Luas Layanan Drainase	Km		Km	594.93 Km	9,550,000,000						594.93 Km	0	
1 03 06 1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah lokasi sistem drainase yang dibangun	Lokasi		Lokasi	11 Lokasi	9,550,000,000						11 Lokasi	0	
1 03 06 1.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan				5 Dokumen	450,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Masyarakat	5 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 06 1.01 05	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukung Lainnya yang Disediakan				50 Paket	9,100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Masyarakat	50 Paket	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Terpadunya Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman	Kawasan		Kawasan	2 Kawasan	1,626,227,800						2 Kawasan	1,875,000,000	
1 03 07 1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah dan jenis infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah provinsi yang dikelola/ diselenggarakan	Kawasan		Kawasan	2 Kawasan	1,626,227,800						2 Kawasan	1,875,000,000	
1 03 07 1.01 01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun dan Dikembangkan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi				5 Sistem Jaringan	700,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan	Masyarakat	5 Sistem Jaringan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 09 1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan dan lingkungannya di kawasan strategis daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota yang di tata.	Unit		Unit	1 Unit	14,200,000,000						1 Unit	0	
1 03 09 1.01 03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				15 Kawasan	14,200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Masyarakat	15 Kawasan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Mantap	%		%	86.6 %	120,947,500,000						86.6 %	173,862,250,000	
1 03 10 1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan dan dipelihara	km		km	22.5 km	120,947,500,000						22.5 km	173,862,250,000	
1 03 10 1.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan				0 Dokumen 2 Dokumen	1,719,049,500			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2) Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Masyarakat	0 Dokumen 2 Dokumen	1,890,954,450	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 1.01 03	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang dikelola Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan				1 Dokumen 0 Dokumen	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Masyarakat	1 Dokumen 0 Dokumen	1,320,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 1.01 04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan Jumlah Dokumen Database Jalan dan Jembatan				0 Dokumen 1 Dokumen	620,780,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Masyarakat	0 Dokumen 1 Dokumen	682,858,550	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 10 1.01 05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun				5 KM	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Masyarakat	5 KM	22,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 1.01 06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar Panjang Jalan yang dilebarkan menuju standar				0 KM 3.8 KM	17,682,750,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Masyarakat	0 KM 3.8 KM	19,451,025,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 1.01 07	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Dengan Menambah Lajur Panjang jalan yang dilebarkan dengan menambah jalur				0 KM 0 KM	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Masyarakat	0 KM 0 KM	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 1.01 08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan Panjang jalan yang direkonstruksi				0 KM 0 KM	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Masyarakat	0 KM 0 KM	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 1.01 09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi				7.3 KM	26,544,420,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Masyarakat	7.3 KM	29,198,862,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 1.01 10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala Panjang jalan yang dipelihara secara berkala				0 KM 12.4 KM	40,810,750,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Masyarakat	0 KM 12.4 KM	44,891,825,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 1.01 12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun				30 M	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung	Masyarakat	30 M	12,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
										Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)				
1 03 10 1.01 16	Penggantian Jembatan	Panjang jembatan yang diganti Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian				79 M 0 M	33,569,750,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Masyarakat	79 M 0 M	36,926,725,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 1.01 18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi Panjang jembatan yang direhabilitasi				270 M 270 M	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Masyarakat	270 M 270 M	5,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 1.01 22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan				0 Dokumen	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Masyarakat	0 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Daya serap jasa konstruksi bersertifikat Daya serap jasa kontruksi bersertifikat	% %		% %	7 % 7 %	989,518,467						7 % 7 %	296,628,000	
1 03 11 1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga ahli konstruksi yang mendapat sertifikasi	Orang		Orang	90 Orang	692,890,467						90 Orang	0	
1 03 11 1.01 03	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli				0 Dokumen 1 Dokumen	95,341,467		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Masyarakat	0 Dokumen 1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 11 1.01 06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Tersertifikasi				90 Orang	493,361,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Masyarakat	90 Orang	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 11 1.01 08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli				10 Lembaga	104,188,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Masyarakat	10 Lembaga	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 11 1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi						296,628,000							296,628,000	
1 03 11 1.02 05	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Infomasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi				1 Dokumen	296,628,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		1 Dokumen	296,628,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Peresentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%		%	90.31 %	898,069,400						90.31 %	2,098,069,400	
1 03 12 1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Jumlah PERDA RTR yang telah ditetapkan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	153,175,400						1 Dokumen	253,175,400	
1 03 12 1.01 04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang				1 Dokumen	153,175,400			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		OPD Kabupaten/Kota dan Masyarakat	1 Dokumen	253,175,400	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 12 1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah dokumen materi teknis dan Ranperda RTR Provinsi NTB yang tersusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	227,250,000						1 Dokumen	756,314,000	
1 03 12 1.02 03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	95,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Masyarakat	1 Dokumen	524,064,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 12 1.02 04	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat				1 Laporan	132,250,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Masyarakat	1 Laporan	232,250,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 12 1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Terwujudnya sistem informasi/database pemanfaatan ruang (kawasan)	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	370,000,000						2 Dokumen	788,580,000	
1 03 12 1.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang				1 Dokumen	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan		OPD Kabupaten/Kota dan Masyarakat	1 Dokumen	447,795,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Pembangunan Daerah	untuk Investasi dan Pembangunan Daerah								Menjamin Pemerataan					
1 03 12 1.03 02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang				1 Dokumen	170,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		OPD Kabupaten/Kota dan Masyarakat	1 Dokumen	340,785,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 12 1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Tersedianya Bahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	147,644,000						2 Dokumen	300,000,000	
1 03 12 1.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang				1 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		OPD Kabupaten/Kota dan Masyarakat	1 Dokumen	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 12 1.04 03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang				0 Kasus	47,644,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		OPD Kabupaten/Kota dan Masyarakat	0 Kasus	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						35,674,605,280						48,013,671,927		
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%		%	100 %	1,602,274,000						100 %	843,410,007	
1 03 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Anggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun	Dokumen		Dokumen	14 Dokumen	92,436,000						14 Dokumen	0	
1 03 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun				1 Dokumen 1 Dokumen	92,436,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN	1 Dokumen 1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan							
1 03 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						135,986,000							0	
1 03 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen 0 Dokumen	135,986,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		1 Dokumen 0 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						295,590,000							0	
1 03 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket 12 Bulan	5,208,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		0 Paket 12 Bulan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket 12 Bulan	119,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		0 Paket 12 Bulan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	14,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		0 Paket	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	13,412,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		0 Paket	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	143,469,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		0 Laporan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						37,696,000							38,960,007	
1 03 01 1.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				12 Bulan 0 Unit	37,696,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		12 Bulan 0 Unit	38,960,007	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						256,716,000							0	
1 03 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0 Laporan	78,300,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk		0 Laporan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		yang Disediakan								mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)					
1 03 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	19,080,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		0 Laporan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor dan Pendukung yang Disediakan				0 Laporan 4 Orang	159,336,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		0 Laporan 4 Orang	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						783,850,000						804,450,000		
1 03 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				12 Bulan 0 Unit	368,850,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		12 Bulan 0 Unit	378,850,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan							
1 03 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Secara Rutin/Berkala				0 Unit 12 Bulan	415,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		0 Unit 12 Bulan	425,600,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Jaringan jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	%		%	86.6 %	34,072,331,280						86.6 %	47,170,261,920	
1 03 10 1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan dan dipelihara	Km		Km	540.56 Km	34,072,331,280						540.56 Km	47,170,261,920	
1 03 10 1.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara Secara Rutin Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				75 KM 0 KM	34,072,331,280	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Masyarakat	75 KM 0 KM	46,450,261,920	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 1.01 19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara Secara Rutin Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				0 Meter 0 M	0	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Masyarakat	0 Meter 0 M	720,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						49,027,217,240							50,953,854,510	
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%		%	100 %	3,039,101,700						100 %	4,102,008,220	
1 03 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Anggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun	Dok		Dok	1 Dok	81,170,400						1 Dok	97,850,000	
1 03 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun				0 Dokumen 1 Dokumen	81,170,400	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	ASN	0 Dokumen 1 Dokumen	97,850,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						117,218,000							147,083,000	
1 03 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksana Tugas ASN yang Tersusun Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen 0 Dokumen	117,218,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan,			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan		1 Dokumen 0 Dokumen	147,083,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			(PD-2)				
1 03 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						51,267,000							53,000,000	
1 03 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang Tersusun				0 Laporan 1 Dokumen	51,267,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		0 Laporan 1 Dokumen	53,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						417,389,900							529,231,620	
1 03 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Bulan 0 Paket	8,714,000				Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		12 Bulan 0 Paket	54,002,740	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket 12 Bulan	5,061,300	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan		0 Paket 12 Bulan	25,901,380	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			pengembangan sektor unggulan (PD-2)				
1 03 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan Jenis Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Bulan 0 Paket	2,040,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	12 Bulan 0 Paket	19,712,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Bulan 0 Paket	4,800,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan,			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	12 Bulan 0 Paket	30,558,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
1 03 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan (Surat Kabar/ Majalah) untuk Perpustakaan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				12 Bulan 0 Dokumen	6,780,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		12 Bulan 0 Dokumen	6,800,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Tamu yang Berkunjung				0 Laporan 12 Bulan	7,370,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		0 Laporan 12 Bulan	9,257,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dan Keluar Daerah yang Dilaksanakan				0 Laporan 12 Bulan	382,624,600	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	0 Laporan 12 Bulan	383,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,124,806,300							1,963,858,200	
1 03 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Beban Jasa Komunikasi , Sumber Daya Listrik dan Air yang Digunakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan 0 Laporan	85,000,500	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	12 Bulan 0 Laporan	343,845,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	19,805,800				Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung		0 Laporan	60,013,200	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
											pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)				
1 03 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor dan Pendukung yang Disediakan				0 Laporan 34 Orang	1,020,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		0 Laporan 34 Orang	1,560,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,247,250,100							1,310,985,400	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				12 Bulan 0 Unit	835,198,200	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		12 Bulan 0 Unit	849,346,150	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehab secara Rutin/Berkala Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Bulan 0 Unit	412,051,900	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		12 Bulan 0 Unit	461,639,250	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Jaringan jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap Persentase Jalan Mantap	% %		% %	86.6 % 86,6 %	45,988,115,540						86.6 % 86,6 %	46,851,846,290	
1 03 10 1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Jaringan jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	km Km		km Km	3 km 10 Km	45,988,115,540						3 km 10 Km	46,851,846,290	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Perangkat Daerah														
1 03 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun				0 Dokumen 1 Dokumen	35,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Dokumen 1 Dokumen	35,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						14,717,000							14,717,000	
1 03 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang tersusun Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen 0 Dokumen	14,717,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Dokumen 0 Dokumen	14,717,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						173,617,000							173,617,000	
1 03 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan yang disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Bulan 0 Paket	16,648,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		12 Bulan 0 Paket	16,648,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah peralatan & perlengkapan kantor yang disediakan				2 Jenis 12 Bulan	99,071,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		2 Jenis 12 Bulan	99,071,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Bulan 0 Paket	14,400,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		12 Bulan 0 Paket	14,400,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah tamu yang berkunjung				0 Laporan 12 Bulan	12,849,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Laporan 12 Bulan	12,849,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dlam daerah dan ke luar daerah yang dilaksanakan				0 Laporan 12 Bulan	30,649,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Laporan 12 Bulan	30,649,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1,150,000,000							1,150,000,000	
1 03 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit excavator lainnya Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 unit 0 Unit 3 Unit	1,150,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 unit 0 Unit 3 Unit	1,150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2,155,236,000							2,155,236,000	
1 03 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah beban jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air yang digunakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan 0 Laporan	34,418,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		12 Bulan 0 Laporan	34,418,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor				0 Laporan 12 Bulan	15,818,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Laporan 12 Bulan	15,818,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah tenaga Pelayanan Umum Kantor dan pendukungnya yang disediakan Tersedianya jasa pelayanan umum kantor				0 Laporan 70 Orang 4 Jenis	2,105,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Laporan 70 Orang 4 Jenis	2,105,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						396,667,000							396,667,000	
1 03 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				0 Unit 12 BULan	109,084,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Unit 12 BULan	109,084,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /operasional													
1 03 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor atau bangunan lainnya				0 Unit 12 Bulan	200,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Unit 12 Bulan	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya				0 Unit 12 Bulan	87,583,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Unit 12 Bulan	87,583,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Cakupan Pelayanan Areal Irigasi	%		%	77,83 %	31,808,202,190						77,83 %	31,808,202,190	
1 03 02 1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Embung dan Penampungan Air Lainnya yang dipelihara Jumlah SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola Luas areal layanan irigasi kewenangan provinsi yang dikelola	buah Lokasi DI		buah Lokasi DI	200 buah 90 Lokasi 16 DI	17,300,000,000						200 buah 90 Lokasi 16 DI	17,300,000,000	
1 03 02 1.01 49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara Jumlah Embung dan penampung Air lainnya yang terpelihara Jumlah Embung dan Penampungan Air Lainnya yang dipelihara				0 Unit 78 Embung 200 Paket	16,800,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2) Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Masyarakat	0 Unit 78 Embung 200 Paket	16,800,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 02 1.01 53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Jumlah Tanggul dan Tebing sungai yang dibangun dan dipelihara Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara				90 Lokasi 0 KM	500,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Masyarakat	90 Lokasi 0 KM	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota						14,508,202,190							14,508,202,190	
1 03 02 1.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Daerah Irigasi yang direhab Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				18 Km 0 KM	14,013,300,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		18 Km 0 KM	14,013,300,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 1.02 15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi Jumlah Bendung yang direhab				0 Bendung 6500 Ha	0	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		0 Bendung 6500 Ha	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
1 03 02 1.02 22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara Jumlah Bendung yang dipelihara				0 Bendung 6500 Ha	0	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2) Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		0 Bendung 6500 Ha	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 1.02 27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Kelembagaan Pengelola Irigasi yang beroperasi Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Difungsikan				16 DI 0 Unit	494,902,190	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		16 DI 0 Unit	494,902,190	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						23,809,336,797							0	
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						3,114,648,600							0	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0							0	
1 03 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						117,000,000							0	
1 03 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	117,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						349,505,600							0	
1 03 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Bulan 0 Paket	10,192,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		12 Bulan 0 Paket	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Peralatan & Perlengkapan kantor yang disediakan				0 Paket 12 Bulan	283,717,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Paket 12 Bulan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Bulan 0 Paket	11,900,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		12 Bulan 0 Paket	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah tamu yang berkunjung				0 Laporan 12 Bulan	7,196,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Laporan 12 Bulan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan keluar daerah yang dilaksanakan				0 Laporan 12 Bulan	36,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Laporan 12 Bulan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2,085,443,000							0	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah beban jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air yang digunakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan 0 Laporan	78,843,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		12 Bulan 0 Laporan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Bulan 0 Laporan	26,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		12 Bulan 0 Laporan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah tenaga pelayanan umum kantor dan pendukungnya yang disediakan				0 Laporan 6 Orang	1,980,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Laporan 6 Orang	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						562,700,000							0	
1 03 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				12 Bulan 0 Unit	562,700,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		12 Bulan 0 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab secara rutin/berkala				0 Unit 12 Bulan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Unit 12 Bulan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						20,694,688,197							0	
1 03 02 1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota						6,702,578,217							0	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 02 1.01 49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara Jumlah embung dan penampung air lainnya yang dipelihara				44 Unit 100 Buah	4,592,578,217		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		44 Unit 100 Buah	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 1.01 53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Jumlah tanggul dan tebing sungai yang dibangun dan dipelihara Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara				116 Lokasi 0 KM	2,110,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		116 Lokasi 0 KM	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota						13,992,109,980							0	
1 03 02 1.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah daerah irigasi yang direhab Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				30 Km 0 KM	10,778,669,980		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		30 Km 0 KM	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 1.02 15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi Jumlah bendung yang direhab				0 Bendung 1200 Ha	2,750,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Bendung 1200 Ha	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 1.02 22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara Jumlah bendung yang dipelihara				0 Bendung 1200 Ha	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Bendung 1200 Ha	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 1.02 27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah kelembagaan pengelola irigasi yang beroperasi Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Difungsikan				19 DI 0 Unit	463,440,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		19 DI 0 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						2,500,000,000						2,488,810,500		
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						693,427,120							682,237,620	
1 03 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						58,292,200							58,292,200	
1 03 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	58,292,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Dokumen	58,292,200	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						6,780,000							6,780,000	
1 03 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang 0 Orang	6,780,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Orang 0 Orang	6,780,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						155,490,920							149,051,420	
1 03 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 bulan 0 Paket	100,336,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		12 bulan 0 Paket	100,336,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 bulan	6,439,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		12 bulan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 bulan 0 Paket	1,055,400		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		12 bulan 0 Paket	1,055,400	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dlam daerah dan ke luar daerah yang dilaksanakan				0 Laporan 12 bulan	47,660,020		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Laporan 12 bulan	47,660,020	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						416,874,000							416,874,000	
1 03 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah beban jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air yang digunakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 bulan 0 Laporan	56,050,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		12 bulan 0 Laporan	56,050,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan 12 Orang	360,824,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Laporan 12 Orang	360,824,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Jumlah tenaga Pelayanan Umum Kantor dan pendukungnya yang disediakan													
1 03 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						55,990,000						51,240,000		
1 03 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				12 bulan 0 Unit	51,240,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		12 bulan 0 Unit	51,240,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab secara rutin/berkala				12 bulan	4,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		12 bulan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						965,054,280							965,054,280	
1 03 02 1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota						965,054,280							965,054,280	
1 03 02 1.01 60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi Jumlah Laporan Hasil Pengujian Kualitas Air yang tersusun				0 Dokumen 60 Dokumen	965,054,280		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Dokumen 60 Dokumen	965,054,280	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						841,518,600							841,518,600	
1 03 10 1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi						841,518,600							841,518,600	
1 03 10 1.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian Jumlah Laporan Hasil Pengujian Tanah dan Bahan Bangunan/Material Konstruksi yang Tersusun				0 Dokumen 80 Dokumen	841,518,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Dokumen 80 Dokumen	841,518,600	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TOTAL							399,974,561,338						466,277,071,127		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
														Nasional	Daerah							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						104,367,142,725								104,367,142,725			
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	10,737,141,335						100 %	10,737,141,335				
1	04	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan pelaksanaan kegiatan	Dokumen		Dokumen	15 Dokumen	194,913,540						15 Dokumen	194,913,540				
1	04	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen 0 Dokumen	78,623,740	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Dinas Perumahan dan Permukiman Prov. NTB	3 Dokumen 0 Dokumen	78,623,740	Dinas Perumahan dan Permukiman			
1	04	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen RKA Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen 0 Dokumen	18,099,700	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Dinas Perumahan dan Permukiman Prov. NTB	2 Dokumen 0 Dokumen	18,099,700	Dinas Perumahan dan Permukiman			
1	04	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen perubahan RKA Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen 0 Dokumen	21,211,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Dinas Perumahan dan Permukiman Prov. NTB	2 Dokumen 0 Dokumen	21,211,200	Dinas Perumahan dan Permukiman			
1	04	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen 0 Dokumen	19,234,400	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Dinas Perumahan dan Permukiman Prov. NTB	2 Dokumen 0 Dokumen	19,234,400	Dinas Perumahan dan Permukiman			
1	04	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dokumen perubahan DPA Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen 0 Dokumen	20,058,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Dinas Perumahan dan Permukiman Prov. NTB	1 Dokumen 0 Dokumen	20,058,400	Dinas Perumahan dan Permukiman			
1	04	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD LAKIP, LKPJ, LPPD, Laporan Tahunan &				0 Laporan 5 Dokumen/Laporan	37,686,100	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Dinas Perumahan dan Permukiman Prov. NTB	0 Laporan 5 Dokumen/Laporan	37,686,100	Dinas Perumahan dan Permukiman			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Laporan Realisasi Bulanan													
1 04 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan administrasi keuangan	Laporan		Laporan	4 Laporan	7,208,382,350						4 Laporan	7,208,382,350	
1 04 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Dokumen 0 Orang/ Bulan	6,997,971,250	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Dinas Perumahan dan Permukiman Prov. NTB	1 Dokumen 0 Orang/ Bulan	6,997,971,250	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen dministrasi keuangan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen 0 Dokumen	157,062,700	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Dinas Perumahan dan Permukiman Prov. NTB	1 Dokumen 0 Dokumen	157,062,700	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan Keuangan				0 Laporan 1 Laporan	24,839,400	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Dinas Perumahan dan Permukiman Prov. NTB	0 Laporan 1 Laporan	24,839,400	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD Laporan Keuangan				0 Laporan 1 Laporan	28,509,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Dinas Perumahan dan Permukiman Prov. NTB	0 Laporan 1 Laporan	28,509,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Barang milik daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	21,867,500						1 Laporan	21,867,500	
1 04 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	21,867,500	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perumahan dan Permukiman Prov. NTB	1 Laporan	21,867,500	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi kepegawaian	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	107,291,895						3 Dokumen	107,291,895	
1 04 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	2,530,700	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perumahan dan Permukiman Prov. NTB	1 Dokumen	2,530,700	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	104,761,195	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perumahan dan Permukiman Prov. NTB	2 Orang	104,761,195	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi umum	%		%	100 %	924,086,350						100 %	924,086,350	
1 04 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan				9 Jenis	18,396,000					Dinas Perumahan dan Permukiman	9 Jenis	18,396,000	Dinas Perumahan dan Permukiman

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan										Prov. NTB			
1 04 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Unit	150,482,240	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perumahan dan Permukiman Prov. NTB	7 Unit	150,482,240	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Jenis Belanja	29,110,800	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perumahan dan Permukiman Prov. NTB	2 Jenis Belanja	29,110,800	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 eksemplar	23,737,520	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perumahan dan Permukiman Prov. NTB	2 eksemplar	23,737,520	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Jenis Belanja	146,015,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perumahan dan Permukiman Prov. NTB	2 Jenis Belanja	146,015,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Kali	556,344,790	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perumahan dan Permukiman Prov. NTB	10 Kali	556,344,790	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Buah mebel	Buah		Buah	4 Buah	19,719,700						4 Buah	19,719,700	
1 04 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Buah	19,719,700	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perumahan dan Permukiman Prov. NTB	4 Buah	19,719,700	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis belanja	%		%	100 %	1,495,639,820						100 %	1,495,639,820	
1 04 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Jenis	3,680,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perumahan dan Permukiman Prov. NTB	2 Jenis	3,680,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Jenis	328,881,420	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perumahan dan Permukiman Prov. NTB	4 Jenis	328,881,420	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				37 Orang	1,163,078,400	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perumahan dan Permukiman Prov. NTB	37 Orang	1,163,078,400	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit Kendaraan	Unit		Unit	19 Unit	765,240,180						19 Unit	765,240,180	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 04 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				19 Unit	358,720,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perumahan dan Permukiman Prov. NTB	19 Unit	358,720,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				48 Unit	37,330,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perumahan dan Permukiman Prov. NTB	48 Unit	37,330,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Paket	369,190,180	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perumahan dan Permukiman Prov. NTB	2 Paket	369,190,180	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah tangga menempati hunian layak Persentase rumah terdampak bencana dan direlokasi yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi	% %		% %	98.91 % 100 %	2,594,555,557						98.91 % 100 %	2,594,555,557	
1 04 02 1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Data rumah terdampak bencana yang valid	%		%	100 %	450,843,879						100 %	450,843,879	
1 04 02 1.01 04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah dokumen permdataan rumah terdampak bencana				1 Dokumen	227,874,005	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kabupaten/Kota	1 Dokumen	227,874,005	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 02 1.01 05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Persentase penerima bantuan rumah terdampak bencana yang terverifikasi				100 %	222,969,874	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kabupaten/Kota	100 %	222,969,874	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 02 1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Data rumah terdampak bencana yang valid	%		%	100 %	366,502,968						100 %	366,502,968	
1 04 02 1.02 01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi rehabilitasi rumah terdampak bencana				70 OK	156,158,462	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Kabupaten/Kota	70 OK	156,158,462	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 02 1.02 03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisame Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi mengenai program perumahan				80 OK	210,344,506	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi	Kabupaten/Kota	80 OK	210,344,506	Dinas Perumahan dan Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatorif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
										Nasional	Daerah					
								Semua Kelurahan			bencana (PD-1)					
1 04 02 1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah yang terbangun sesuai data verifikasi dan validasi	%		%	100 %	1,777,208,710						100 %	1,777,208,710		
1 04 02 1.03 01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Persentase rumah yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana dan relokasi permukiman				60 Unit	1,777,208,710	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Kabupaten/Kota	60 Unit	1,777,208,710	Dinas Perumahan dan Permukiman	
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase rumah tangga dengan hunian layak pada kawasan permukiman	%		%	68,95 %	9,387,490,915						68,95 %	9,387,490,915		
1 04 03 1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah rumah tangga yang di tingkatkan hyuniannya	Unit		Unit	552 Unit	9,387,490,915						552 Unit	9,387,490,915		
1 04 03 1.02 03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Rumah tangga yang ditangani				1770 Unit	9,387,490,915	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Kabupaten/Kota	1770 Unit	9,387,490,915	Dinas Perumahan dan Permukiman	
1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Luas kawasan permukiman yang berkualitas	Ha		Ha	84511 Ha	81,647,954,918						84511 Ha	81,647,954,918		
1 04 05 1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan PSU & penanganan PSU Permukiman	%		%	100 %	81,647,954,918						100 %	81,647,954,918		
1 04 05 1.01 01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman Jumlah dokumen perencanaan PSU Permukiman				0 Dokumen 1 Dokumen	296,259,477	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Kabupaten/Kota	0 Dokumen 1 Dokumen	296,259,477	Dinas Perumahan dan Permukiman	
1 04 05 1.01 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah penanganan PSU permukiman				836 Paket	81,351,695,441	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Kabupaten/Kota	836 Paket	81,351,695,441	Dinas Perumahan dan Permukiman	
TOTAL							104,367,142,725								104,367,142,725	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
														Nasional	Daerah							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						27,481,520,334								30,229,672,367			
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP PD	Nilai		Nilai	BB Nilai	21,022,198,802						BB Nilai	23,124,418,682				
1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Dokumen		Dokumen	11 Dokumen	520,123,300						11 Dokumen	572,135,630				
1	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	180,879,000			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	2 Dokumen	198,966,900	Satuan Polisi Pamong Praja		
1	05	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	50,000,000			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	1 Dokumen	55,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja		
1	05	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	50,000,000			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	1 Dokumen	55,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja		
1	05	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	5,509,300			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	1 Dokumen	6,060,230	Satuan Polisi Pamong Praja		
1	05	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	5,509,300			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	1 Dokumen	6,060,230	Satuan Polisi Pamong Praja		
1	05	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	70,000,000			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	3 Laporan	77,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja		
1	05	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	158,225,700			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	2 Laporan	174,048,270	Satuan Polisi Pamong Praja		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Dokumen		Dokumen	15 Dokumen	17,010,243,412						15 Dokumen	18,711,267,753	
1 05 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				200 Orang/ Bulan	16,820,956,212		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	200 Orang/ Bulan	18,503,051,833	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	35,092,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	1 Dokumen	38,601,200	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	29,747,900		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	1 Laporan	32,722,690	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				4 Laporan	124,447,300		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	4 Laporan	136,892,030	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	25,751,700						2 Dokumen	28,326,870	
1 05 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	25,751,700		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN	2 Laporan	28,326,870	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Anggota Satpol PP yang Memenuhi Standar Administrasi	Orang		Orang	200 Orang	342,900,000						200 Orang	377,190,000	
1 05 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				600 Paket	300,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		600 Paket	330,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				60 Orang	42,900,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		60 Orang	47,190,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia	Jenis		Jenis	8 Jenis	705,710,390						8 Jenis	776,281,429	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	38,281,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	5 Paket	42,109,980	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				14 Paket	175,310,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	14 Paket	192,841,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	6,574,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	5 Paket	7,232,390	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				30 Paket	46,143,690		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	30 Paket	50,758,059	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				9 Paket	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	9 Paket	44,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	14,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	12 Dokumen	15,840,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	70,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	12 Laporan	77,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				11 Laporan	315,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	11 Laporan	346,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang Tersedia	Unit		Unit	83 Unit	757,670,000						83 Unit	833,437,000	
1 05 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang				1 Unit	575,875,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan stabilitas ketenteraman,	ASN	1 Unit	633,462,500	Satuan Polisi Pamong Praja

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Disediakan									ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)				
1 05 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				82 Paket	181,795,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	82 Paket	199,974,500	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	Orang		Orang	9 Orang	729,500,000						9 Orang	802,450,000	
1 05 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		2 Laporan	2,750,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	151,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		3 Laporan	166,100,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	576,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		1 Laporan	633,600,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang Terpelihara	Unit		Unit	208 Unit	930,300,000						208 Unit	1,023,330,000	
1 05 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				6 Unit	213,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		6 Unit	234,850,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				50 Unit	465,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		50 Unit	511,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				95 Unit	51,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		95 Unit	56,980,000	Satuan Polisi Pamong Praja

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		1 Unit	220,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	% %		% %	100 % 100 %	6,459,321,532						100 % 100 %	7,105,253,685	
1 05 02 1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penanganan Pelanggaran Trantibum	Kasus		Kasus	11 Kasus	2,168,557,535						11 Kasus	2,385,413,288	
1 05 02 1.01 01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan				3 Kasus	748,820,424	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		3 Kasus	823,702,466	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02 1.01 02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				15 Kasus	229,449,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		15 Kasus	252,393,900	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02 1.01 03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi				4 Dokumen	62,908,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		4 Dokumen	69,198,800	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02 1.01 04	Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				2 Dokumen	325,368,211	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		2 Dokumen	357,905,032	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02 1.01 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan				805 Orang	516,909,100	Semua Kab/Kota,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman,		805 Orang	568,600,010	Satuan Polisi Pamong Praja

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya						Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)				
1 05 02 1.01 06	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				1 Dokumen	81,024,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	1 Dokumen	89,127,280	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 05 02 1.01 07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				182 Unit	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	182 Unit	55,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 05 02 1.01 08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				5 Dokumen	69,683,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	5 Dokumen	76,651,300	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 05 02 1.01 09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				1 Laporan	84,395,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporan	92,834,500	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 05 02 1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Kasus		Kasus	10 Kasus	4,151,763,997					10 Kasus	4,566,940,397		
1 05 02 1.02 01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				4 Laporan	1,206,685,932	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	4 Laporan	1,327,354,525	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 05 02 1.02 02	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				2 Laporan	228,345,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	2 Laporan	251,179,500	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 05 02 1.02 03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP				1 Laporan	2,716,733,065		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	1 Laporan	2,988,406,372	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 05 02 1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah PPNS Yang Dibina	Orang		Orang	45 Orang	139,000,000					45 Orang	152,900,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
										Nasional	Daerah					
1 05 02 1.03 01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda				2 Laporan	86,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		2 Laporan	94,600,000	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 05 02 1.03 02	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Jumlah Dokumen Pemberkasan Administrasi Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang dapat disidangkan di tempat, dan penerapan secara aktif operasional Sekretariat Bersama PPNS oleh Dinas Satpol PP				1 Dokumen	53,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	58,300,000	Satuan Polisi Pamong Praja	
TOTAL						27,481,520,334								30,229,672,367		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						14,524,420,712						14,524,602,147				
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	ingkat Kapasitas Penanggulanga n Bencana Tingkat Kapasitas Penanggulangan Bencana	% %		% %	0,65 % 0,65 %	8,687,699,738						0,65 % 0,65 %	8,687,881,173			
1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan yang dibutuhkan	%		%	100 %	167,804,085						100 %	167,985,520			
1	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	14,915,030	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Kantor BPBD Provinsi NTB	1 Dokumen	14,915,030	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1	05	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah dokumen RKA yang tersusun				0 Dokumen 1 dokumen	43,460,751	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Kantor BPBD Provinsi NTB	0 Dokumen 1 dokumen	43,460,751	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1	05	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- Perubahan yang tersusun				1 Dokumen	43,279,316		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor BPBD Provinsi NTB	1 Dokumen	43,460,751	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1	05	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKJIP) yang tersusun				1 Dokumen	37,933,060	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Kantor BPBD Provinsi NTB	1 Dokumen	37,933,060	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1	05	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan 1 Laporan	28,215,928		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Kantor BPBD Provinsi NTB	0 Laporan 1 Laporan	28,215,928	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan selama satu tahun	%		%	100 %	5,438,334,318						100 %	5,438,334,318			
1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	umlah kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN setiap bulan dalam satu tahun				12 Bulan	5,384,838,481	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Pegawai/Aparat BPBD Provinsi NTB	12 Bulan	5,384,838,481	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1	05	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi keuangan				10 Orang	30,214,148	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Pegawai/Aparat BPBD Provinsi NTB	10 Orang	30,214,148	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen yang disusun				4 Dokumen	1,297,864	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Pegawai/Aparat BPBD Provinsi NTB	4 Dokumen	1,297,864	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan triwulanan SKPD yang disusun				4 Laporan	21,983,825	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Pegawai/Aparat BPBD Provinsi NTB	4 Laporan	21,983,825	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada BPBD yang terinventarisir	%		%	100 %	25,446,394						100 %	25,446,394	
1 05 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang yang disusun				3 Dokumen	25,446,394	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Kantor BPBD Provinsi NTB	3 Dokumen	25,446,394	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan fasilitas administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	699,449,065						100 %	699,449,065	
1 05 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan				10 Jenis	6,477,341	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Pegawai BPBD Provinsi NTB	10 Jenis	6,477,341	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang				50 Jenis	94,215,632	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Pegawai BPBD Provinsi NTB	50 Jenis	94,215,632	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan				20 Jenis	949,504	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Pegawai BPBD Provinsi NTB	20 Jenis	949,504	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis dokumen yang dicetak dan digandakan				30 Jenis	16,509,633	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Pegawai BPBD Provinsi NTB	30 Jenis	16,509,633	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangundangan yang disediakan				3300 Bahan bacaan	9,584,229	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Pegawai BPBD Provinsi NTB	3300 Bahan bacaan	9,584,229	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan hasil rakor dan konsultasi keluar daerah				10 Laporan 0 Laporan	571,712,726	Semua Kab/Kota, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan	Pegawai BPBD Provinsi NTB	10 Laporan 0 Laporan	571,712,726	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Kecamatan, Semua Kelurahan			dalam menghadapi bencana (PD-1)				
1 05 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang	%		%	100 %	281,880,158						100 %	281,880,158	
1 05 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas yang diadakan				1 Unit	22,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Kantor BPBD Provinsi NTB	1 Unit	22,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan operasional yang diadakan				5 Unit	180,228,580	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Kantor BPBD Provinsi NTB	5 Unit	180,228,580	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Perlengkapan Mebel yang Diadakan				2 Jenis	9,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Kantor BPBD Provinsi NTB	2 Jenis	9,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin yang diadakan untuk mendukung penanggulangan bencana				5 Jenis	15,651,578	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Kantor BPBD Provinsi NTB	5 Jenis	15,651,578	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Kantor BPBD Provinsi NTB	0 Unit	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung penunjang penanggulanga n bencana yang dibangun				1 Unit	55,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Kantor BPBD Provinsi NTB	1 Unit	55,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Kantor BPBD Provinsi NTB	0 Unit	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit 0 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Kantor BPBD Provinsi NTB	0 Unit 0 Unit	0	Badan Penanggulan Bencana Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dibutuhkan	%		%	100 %	1,143,964,241						100 %	1,143,964,241	
1 05 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar yang dibuat				1500 eksemplar	15,035,259	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Kantor BPBD Provinsi NTB	1500 eksemplar	15,035,259	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening listrik, telepon, internet dan air per bulan dalam satu tahun				5 Jenis	323,467,725	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Kantor BPBD Provinsi NTB	5 Jenis	323,467,725	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				12 Jenis	59,089,433		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Kantor BPBD Provinsi NTB	12 Jenis	59,089,433	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga jasa pelayanan umum kantor				18 Orang	746,371,824	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Kantor BPBD Provinsi NTB	18 Orang	746,371,824	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	%		%	100 %	930,821,477						100 %	930,821,477	
1 05 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah unit kendaraan dinas jabatan yang dipelihara				0 Unit 24 Unit	208,044,324	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Kantor BPBD Provinsi NTB	0 Unit 24 Unit	208,044,324	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas Operasional yang dipelihara				21 Unit	607,877,152		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Kantor BPBD Provinsi NTB	21 Unit	607,877,152	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah jenis mebel yang dipelihara				3 Jenis	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Kantor BPBD Provinsi NTB	3 Jenis	5,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin yang dipelihara				10 Jenis	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi	Kantor BPBD Provinsi NTB	10 Jenis	10,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
								Kelurahan			bencana (PD-1)					
1 05 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset tetap lainnya yang dipelihara Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 0 Unit		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Kantor BPBD Provinsi NTB	0 Unit 0 Unit		0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah gedung kantor yang dipelihara/ direhabilitasi				0 Unit 5 Unit	99,900,001	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Kantor BPBD Provinsi NTB	0 Unit 5 Unit	99,900,001		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/ direhabilitasi				0 Unit		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Kantor BPBD Provinsi NTB	0 Unit		0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara/ direhabilitasi				0 Unit 0 Unit		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Kantor BPBD Provinsi NTB	0 Unit 0 Unit		0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase terbentuknya DESTANA dan SMAB Persentase terlaksananya Renkon, Respon Cepat PDB, Pencarian Pertolongan Evakuasi Korban, Jitupasna	% %		% %	40,09 % 92,5 %	5,836,720,974						40,09 % 92,5 %	5,836,720,974		
1 05 03 1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah dokumen perencanaan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana yang ditanggulangi	Dokumen		Dokumen	420 Dokumen	1,527,445,520						420 Dokumen	1,527,445,520		
1 05 03 1.02 06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Dokumen Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Fasilitasi Destana Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				30 Dokumen 0 Kawasan	853,307,397	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Lembaga Pemerintah dan Swasta, dan Masyarakat NTB	30 Dokumen 0 Kawasan	853,307,397		Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Nasional	Daerah				
1 05 03 1.02 07	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah dokumen Jitupasna yang disusun				0 4 Dokumen	354,723,830	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Lembaga Pemerintah dan Swasta, dan Masyarakat NTB	0 4 Dokumen	354,723,830	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 1 05 03 1.02 09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen Renkon penanggulangan bencana yang disusun				5 Dokumen	319,414,293	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Lembaga Pemerintah dan Swasta, dan Masyarakat NTB	5 Dokumen	319,414,293	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Kejadian Bencana Yang Tertangani	%		%	100 %	4,179,305,283						100 %	4,179,305,283	
1 05 03 1.03 02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana Persentase Penanganan Darurat Bencana				0 Laporan 100 %	124,207,684	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Lembaga Pemerintah dan Masyarakat NTB	0 Laporan 100 %	124,207,684	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 1.03 03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Persentase Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana				0 Laporan 100 %	1,586,446,729	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Lembaga Pemerintah dan Masyarakat NTB	0 Laporan 100 %	1,586,446,729	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 1.03 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Persentase Pendistribusian Logistik				0 Orang 100 %	2,468,650,870	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Lembaga Pemerintah dan Masyarakat NTB	0 Orang 100 %	2,468,650,870	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang dapat dikelola	%		%	100 %	129,970,171						100 %	129,970,171	
1 05 03 1.04 03	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah kerjasama yang dikelola				2 Kerjasama	70,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Lembaga Pemerintah, Swasta dan Masyarakat NTB	2 Kerjasama	70,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 1.04 04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Kebencanaan yang dikelola				1 Aplikasi	59,970,171	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Lembaga Pemerintah, Swasta dan Masyarakat NTB	1 Aplikasi	59,970,171	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
TOTAL							14,524,420,712							14,524,602,147	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						56,333,701,651						73,418,628,748		
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	A Nilai	32,339,047,826						A Nilai	36,041,645,249	
1	06	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	499,851,412						5 Dokumen	366,000,000	
1	06	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	45,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Dinas Sosial Provinsi, UPTD, Dinas Sosial Kab/Kota dan NGO	1 Dokumen	115,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	45,383,412	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Dinas Sosial Provinsi, UPTD, Dinas Sosial Kab/Kota dan NGO	1 Dokumen	60,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	40,834,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Dinas Sosial Provinsi, UPTD, Dinas Sosial Kab/Kota dan NGO	1 Dokumen	62,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	368,634,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Dinas Sosial Provinsi, UPTD, Dinas Sosial Kab/Kota dan NGO	3 Laporan	129,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
1 06 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	24,391,653,362						100 %	28,100,250,000	
1 06 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				320 Orang	24,236,378,152	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai/ASN pada Dinas Sosial Provinsi NTB	320 Orang	27,870,250,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	105,275,210	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai/ASN pada Dinas Sosial Provinsi NTB	1 Dokumen	175,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	50,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan	Pegawai/ASN pada Dinas Sosial Provinsi NTB	1 Laporan	55,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
											pengembangan sektor unggulan (PD-2)				
1 06 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						15,000,000							20,000,000	
1 06 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	15,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		2 Laporan	20,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi umum	Jenis		Jenis	8 Jenis	628,543,052						8 Jenis	698,395,249	
1 06 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				45 Paket	12,715,149		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai/ ASN Dinsos Prov. NTB	45 Paket	15,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	28,869,986		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai/ ASN Dinsos Prov. NTB	4 Paket	29,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				50 Paket	35,327,652		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai/ ASN Dinsos Prov. NTB	50 Paket	40,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				30 Paket	35,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai/ ASN Dinsos Prov. NTB	30 Paket	37,800,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				2000 Dokumen	44,851,766		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar	Pegawai/ ASN Dinsos Prov. NTB	2000 Dokumen	47,890,000	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
										dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)					
1 06 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				41 Paket	11,705,249		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai/ ASN Dinsos Prov. NTB	41 Paket	13,705,249	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				50 Laporan	40,073,250		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai/ ASN Dinsos Prov. NTB	50 Laporan	45,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	420,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai/ ASN Dinsos Prov. NTB	60 Laporan	470,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis administrasi barang milik daerah	Jenis		Jenis	4 Jenis	360,000,000						4 Jenis	315,000,000	
1 06 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	BMD Perangkat Daerah	2 Unit	65,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	BMD Perangkat Daerah	1 Unit	50,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	100,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar	BMD Perangkat Daerah	2 Paket	100,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
											dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)				
1 06 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	160,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	BMD Perangkat Daerah	8 Unit	100,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis layanan penunjang perangkat daerah	Jenis		Jenis	4 Jenis	1,024,000,000						4 Jenis	1,072,000,000	
1 06 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				150 Laporan	9,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Dinas Sosial dan instansi terkait	150 Laporan	10,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				72 Laporan	340,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Dinas Sosial dan instansi terkait	72 Laporan	352,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Laporan	25,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Dinas Sosial dan instansi terkait	20 Laporan	30,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				20 Laporan	650,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Dinas Sosial dan instansi terkait	20 Laporan	680,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan BMD perangkat daerah	Jenis		Jenis	3 Jenis	5,420,000,000						3 Jenis	5,470,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				35 Unit	395,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Perangkat daerah dan pelaku usaha	35 Unit	440,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 15 Unit	25,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Perangkat daerah dan pelaku usaha	0 Unit 15 Unit	30,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	5,000,000,000	Kab. Lombok Barat, Narmada, Selat Kab. Lombok Barat, Labuapi, Bengkel Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Selebung Kab. Lombok Timur, Aikmel, Lenek Kota Mataram, Mataram, Pejanggik Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Perangkat daerah dan pelaku usaha	20 Unit	5,000,000,000	Dinas Sosial
1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial Porsentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial	% %		% %	100 % 100 %	6,213,619,000						100 % 100 %	12,564,678,211	
1 06 02 1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah penerbitan rekomendasi/izin UGB dan PUB lintas kab/kota	Rekomendasi		Rekomendasi	30 Rekomendasi	30,000,000						30 Rekomendasi	32,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 02 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				35 Dokumen	30,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pihak Swasta, BUMN dan BUMD	35 Dokumen	32,000,000	Dinas Sosial
1 06 02 1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah PSKS kelembagaan dan perorangan yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Orang, Lembaga		Orang, Lembaga	550 Orang, Lembaga	6,183,619,000						550 Orang, Lembaga	12,532,678,211	
1 06 02 1.02 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi				100 Orang	80,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	PSKS kelembagaan dan perorangan	100 Orang	112,000,000	Dinas Sosial
1 06 02 1.02 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya				117 Orang	75,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	PSKS kelembagaan dan perorangan	117 Orang	100,000,000	Dinas Sosial
1 06 02 1.02 03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi				35 Keluarga	50,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	PSKS kelembagaan dan perorangan	35 Keluarga	75,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 02 1.02 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan provinsi				100 Lembaga	5,978,619,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	PSKS kelembagaan dan perorangan	100 Lembaga	12,245,678,211	Dinas Sosial
1 06 03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase PMB,KPO,KTK (Korban Tindak Kekerasan) dan OT yang tertangani Persentase PMB (pekerja migran bermasalah) dan korban tindak kekerasan tertangani	% %		% %	100 % 100 %	600,000,000						100 % 100 %	650,000,000	
1 06 03 1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah PMI bermasalah, KTK dan KPO) yang mendapatkan penanganan kesos	Orang		Orang	400 Orang	600,000,000						400 Orang	650,000,000	
1 06 03 1.01 01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota				300 Orang	600,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	PPKS (PMI bermasalah, korban tindak kekerasan, korban perdagangan orang dan OT)	300 Orang	650,000,000	Dinas Sosial
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	%		%	4.50 %	6,150,954,000						4.50 %	7,100,954,460	
1 06 04 1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang diberikan layanan kesos	Orang		Orang	400 Orang	900,954,000						400 Orang	1,250,954,460	
1 06 04 1.01 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				100 Orang	150,954,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (disabilitas terlantar) dalam pemerintah dan LKS	100 Orang	385,954,460	Dinas Sosial
1 06 04 1.01 04	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				500 Orang	650,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (disabilitas terlantar) dalam pemerintah dan	500 Orang	700,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
											pengembangan sektor unggulan (PD-2)	LKS			
1 06 04 1.01 12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				1 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (disabilitas terlantar) dalam pemerintah dan LKS	1 Dokumen	165,000,000	Dinas Sosial
1 06 04 1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang dipenuhi kebutuhan dasarnya	Orang		Orang	5000 Orang	5,000,000,000						5000 Orang	5,500,000,000	
1 06 04 1.02 13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Anak Terlantar dalam Panti Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				5000 Anak 1 Dokumen	5,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (anak terlantar) dalam panti/LKS baik pemerintah maupun swasta	5000 Anak 1 Dokumen	5,500,000,000	Dinas Sosial
1 06 04 1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah PPKS diluar HIV AIDS dan NAPZA yang di berdayakan	Jiwa		Jiwa	60 Jiwa	250,000,000						60 Jiwa	350,000,000	
1 06 04 1.05 11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diberikan pembedayaan				1 Dokumen 50 Orang	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	WRSE, Eks Buruh Migran, Eks BWBLP, KTK dan Trafficking dan PPKS Lainnya	1 Dokumen 50 Orang	350,000,000	Dinas Sosial
1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%		%	100 %	8,467,000,000						100 %	14,455,002,000	
1 06 05 1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah pengangkatan anak oleh orang tua tunggal	Orang		Orang	3 Orang	47,000,000						3 Orang	104,995,000	
1 06 05 1.01 01	Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku				3 Orang	12,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar	WNI	3 Orang	35,245,000	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Kewenangan Provinsi								Pelayanan Dasar	dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)				
1 06 05 1.01 02	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi				3 Orang	35,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	WNI	3 Orang	69,750,000	Dinas Sosial
1 06 05 1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Data fakir miskin terverifikasi dan tervalidasi	%		%	100 %	8,420,000,000						100 %	14,350,007,000	
1 06 05 1.02 01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi				150 Keluarga	320,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Fakri Miskin yang terdata di DTKS dan Non DTKS	150 Keluarga	350,000,000	Dinas Sosial
1 06 05 1.02 02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota				1000 Keluarga	5,100,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Fakri Miskin yang terdata di DTKS dan Non DTKS	1000 Keluarga	10,500,007,000	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
1 06 05 1.02 03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi				150 Orang	3,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Fakri Miskin yang terdata di DTKS dan Non DTKS	150 Orang	3,500,000,000	Dinas Sosial
1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan Penanganan Bencana Daerah Provinsi	%		%	100 %	2,013,080,825						100 %	2,298,169,940	
1 06 06 1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang tertangani	%		%	100 %	2,013,080,825						100 %	2,298,169,940	
1 06 06 1.01 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi				1000 Orang	450,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Korban bencana alam dan bencana sosial	1000 Orang	488,000,000	Dinas Sosial
1 06 06 1.01 02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi				1000 Orang	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Korban bencana alam dan bencana sosial	1000 Orang	350,000,000	Dinas Sosial
1 06 06 1.01 03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi				1000 Unit	350,255,560	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Korban bencana alam dan bencana sosial	1000 Unit	380,255,500	Dinas Sosial
1 06 06 1.01 04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus				1000 Orang	450,255,560	Semua Kab/Kota, Semua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk	Korban bencana alam dan bencana sosial	1000 Orang	480,344,650	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi						Kecamatan, Semua Kelurahan		Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)				
1 06 06 1.01 05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi				1000 Orang	512,569,705	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Korban bencana alam dan bencana sosial	1000 Orang	599,569,790	Dinas Sosial
1 06 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN)/Makam Pahlawan Nasional (MPN)	%		%	100 %	550,000,000						100 %	308,178,888	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 07 1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah TPM yang di tingkatkan pengelolaan sarana dan prasarana	Unit		Unit	1 Unit	550,000,000						1 Unit	308,178,888	
1 06 07 1.01 01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				2 Dokumen	250,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	TPMN kewenangan provinsi	2 Dokumen	0	Dinas Sosial
1 06 07 1.01 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				2 Makam	100,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	TPMN kewenangan provinsi	2 Makam	102,500,000	Dinas Sosial
1 06 07 1.01 03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				1 Laporan	200,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			TPMN kewenangan provinsi	1 Laporan	205,678,888	Dinas Sosial
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						2,000,580,000							2,377,250,000	
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	A Nilai	630,830,000						A Nilai	715,000,000	
1 06 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan unit pelaksana teknis dinas	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	6,500,000						1 Dokumen	7,500,000	
1 06 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	6,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai pada unit pelaksana teknis dinas	1 Dokumen	7,500,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi keuangan	Jenis		Jenis	1 Jenis	25,560,000						1 Jenis	35,000,000	
1 06 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	25,560,000	Kab. Lombok Barat, Labuapi, Bengkel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan	Pegawai pada unti pelaksana teknis dinas	12 Dokumen	35,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
											(PD-2)				
1 06 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi umum	Jenis		Jenis	8 Jenis	78,900,000						8 Jenis	56,500,000	
1 06 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12,000,000	Kab. Lombok Barat, Labuapi, Bengkel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai pada unti pelaksana teknis dinas dan pihak swasta	12 Paket	15,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai pada unti pelaksana teknis dinas dan pihak swasta	12 Paket	0	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Lembar barang cetakan dan penggandaan				1200 lembar	4,500,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai pada unti pelaksana teknis dinas dan pihak swasta	1200 lembar	0	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 eksamplar	5,400,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai pada unti pelaksana teknis dinas dan pihak swasta	24 eksamplar	6,500,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				20 Paket	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai pada unti pelaksana teknis dinas dan pihak swasta	20 Paket	0	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	25,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai pada unti pelaksana teknis dinas dan pihak swasta	10 Laporan	35,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan BMD unit pelaksana teknis dinas	Unit		Unit	10 Unit	50,000,000						10 Unit	65,000,000	
1 06 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Paket	50,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2) Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait dan pihak swasta	6 Paket	65,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis layanan penunjang perangkat daerah	Jenis		Jenis	3 Jenis	340,300,000						3 Jenis	360,500,000	
1 06 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait, BUMN, BUMD dan pihak swasta	10 Laporan	6,500,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	65,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait, BUMN, BUMD dan pihak swasta	36 Laporan	76,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				36 Laporan	270,300,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait, BUMN, BUMD dan pihak swasta	36 Laporan	278,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan BMD unit pelaksana teknis dinas	Unit		Unit	10 Unit	129,570,000						10 Unit	190,500,000	
1 06 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau				7 Unit	70,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar	BMD unit pelaksana teknis dinas	7 Unit	80,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya						Kecamatan, Semua Kelurahan		Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)				
1 06 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	9,570,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	BMD unit pelaksana teknis dinas	12 Unit	10,500,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	BMD unit pelaksana teknis dinas	1 Unit	100,000,000	Dinas Sosial
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase peningkatan kualitas penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	%		%	4,50 %	1,369,750,000						4,50 %	1,662,250,000	
1 06 04 1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang dipenuhi kebutuhan dasarnya	Orang		Orang	120 Orang	1,369,750,000						120 Orang	1,662,250,000	
1 06 04 1.02 02	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				120 Orang	800,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	PPKS (anak terlantar korban drop out sekolah/tamatan sekolah menengah)	120 Orang	800,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
1 06 04 1.02 03	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				120 Orang	78,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	PPKS (anak terlantar korban drop out sekolah/tamatan sekolah menengah)	120 Orang	89,000,000	Dinas Sosial
1 06 04 1.02 04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				120 Orang	69,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	PPKS (anak terlantar korban drop out sekolah/tamatan sekolah menengah)	120 Orang	69,250,000	Dinas Sosial
1 06 04 1.02 05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				120 Orang	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	PPKS (anak terlantar korban drop out sekolah/tamatan sekolah menengah)	120 Orang	11,500,000	Dinas Sosial
1 06 04 1.02 06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				120 Orang	292,500,000	Kab. Lombok Barat, Labuapi, Bengkel	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	PPKS (anak terlantar korban drop out sekolah/tamatan sekolah menengah)	120 Orang	492,500,000	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 04 1.02 13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				50 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	PPKS (anak terlantar korban drop out sekolah/tamatan sekolah menengah)	50 Dokumen	200,000,000	Dinas Sosial
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						1,710,960,000							1,800,210,000	
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	A Nilai	603,360,000						A Nilai	630,610,000	
1 06 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan unit pelaksana teknis dinas	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	6,000,000						1 Dokumen	10,000,000	
1 06 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	6,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai pada unit pelaksana teknis dinas	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi keuangan	Jenis		Jenis	1 Jenis	60,000,000						1 Jenis	60,000,000	
1 06 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				36 Dokumen	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai unit pelaksana teknis dinas	36 Dokumen	60,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen BMD unit pelaksana teknis dinas	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	2,500,000						1 Dokumen	2,500,000	
1 06 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	2,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai pada unit pelaksana teknis dinas	12 Laporan	2,500,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi umum	Jenis		Jenis	6 Jenis	67,440,000						6 Jenis	77,440,000	
1 06 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan				10 Paket	10,500,000	Semua Kab/Kota, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar	Instansi terkait, BUMN, BUMD dan pihak	10 Paket	10,500,000	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan						Kecamatan, Semua Kelurahan			wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	swasta			
1 06 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait, BUMN, BUMD dan pihak swasta	12 Paket	15,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	6,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait, BUMN, BUMD dan pihak swasta	12 Paket	8,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	3,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait, BUMN, BUMD dan pihak swasta	24 Dokumen	3,600,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				20 Paket	10,340,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait, BUMN, BUMD dan pihak swasta	20 Paket	10,340,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait, BUMN, BUMD dan pihak swasta	10 Laporan	30,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan BMD unit pelaksana teknis dinas	Unit		Unit	10 Unit	60,000,000						10 Unit	80,000,000	
1 06 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Paket	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar	BMD unit pelaksana teknis dinas	5 Paket	80,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kecamatan, Semua Kelurahan			wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)				
1 06 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis layanan penunjang perangkat daerah	Jenis		Jenis	3 Jenis	302,400,000						3 Jenis	302,400,000	
1 06 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait dan penyedia layanan	12 Laporan	3,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis				4 Jenis	29,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait dan penyedia layanan	4 Jenis	29,400,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	270,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait dan penyedia layanan	12 Laporan	270,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan BMD unit pelaksana teknis dinas	Jenis		Jenis	10 Jenis	105,020,000						10 Jenis	98,270,000	
1 06 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit	47,520,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	BMD unit pelaksana teknis dinas	5 Unit	47,520,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	7,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	BMD unit pelaksana teknis dinas	5 Unit	750,000	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	BMD unit pelaksana teknis dinas	2 Unit	50,000,000	Dinas Sosial
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase peningkatan kualitas penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	%		%	4,50 %	1,107,600,000						4,50 %	1,169,600,000	
1 06 04 1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah PPKS (Wanita Rawan Sosial Ekonomi) dan korban tindak kekerasan yang dipenuhi kebutuhan dasarnya	Orang		Orang	80 Orang	1,107,600,000						80 Orang	1,169,600,000	
1 06 04 1.05 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				80 Orang	555,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (WRSE)	80 Orang	545,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
1 06 04 1.05 02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				80 Orang	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (WRSE)	80 Orang	80,000,000	Dinas Sosial
1 06 04 1.05 03	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi				80 Orang	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (WRSE)	80 Orang	50,000,000	Dinas Sosial
1 06 04 1.05 04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				40 Orang	11,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (WRSE)	40 Orang	11,000,000	Dinas Sosial
1 06 04 1.05 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				80 Orang	48,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembaku (CHT)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (WRSE)	80 Orang	50,000,000	Dinas Sosial
1 06 04 1.05 06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				80 Orang	3,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (WRSE)	80 Orang	3,600,000	Dinas Sosial

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
										Nasional	Daerah					
											sektor unggulan (PD-2)					
1 06 04 1.05 07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi				80 Orang	300,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (WRSE)	80 Orang	350,000,000	Dinas Sosial	
1 06 04 1.05 10	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal				80 Orang	80,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (WRSE)	80 Orang	80,000,000	Dinas Sosial	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					2,408,100,000							2,930,336,299		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	A Nilai	959,100,000						A Nilai	1,112,940,000	
1 06 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi keuangan	Jenis		Jenis	1 Jenis	60,000,000						1 Jenis	60,000,000	
1 06 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai pada unit pelaksana teknis dinas	12 Dokumen	60,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi umum	Jenis		Jenis	6 Jenis	63,400,000						6 Jenis	100,400,000	
1 06 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai pada unit pelaksana teknis dinas	12 Paket	12,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	10,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai pada unit pelaksana teknis dinas	12 Paket	17,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12000 Paket	6,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai pada unit pelaksana teknis dinas	12000 Paket	6,500,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	5,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai pada unit pelaksana teknis dinas	24 Dokumen	5,400,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				25 Paket	9,500,000	Semua Kab/Kota, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar	Pegawai pada unit pelaksana teknis dinas	25 Paket	9,500,000	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kecamatan, Semua Kelurahan			wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)				
1 06 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai pada unit pelaksana teknis dinas	2 Laporan	50,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah	Unit		Unit	2 Unit	260,000,000						2 Unit	220,000,000	
1 06 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	250,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	BMD pada unit pelaksana teknis dinas	1 Unit	200,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	10,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	BMD pada unit pelaksana teknis dinas	1 Unit	20,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis layanan penunjang perangkat daerah	Jenis		Jenis	4 Jenis	475,700,000						4 Jenis	544,540,000	
1 06 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				120 Laporan	1,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai UPTD dan penyedia layanan	120 Laporan	1,200,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	100,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai UPTD dan penyedia layanan	12 Laporan	113,840,000	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				48 Laporan	9,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai UPTD dan penyedia layanan	48 Laporan	9,500,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	365,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai UPTD dan penyedia layanan	1 Laporan	420,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan BMD unit pelaksana teknis dinas	Unit		Unit	10 Unit	100,000,000						10 Unit	188,000,000	
1 06 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				8 Unit	80,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	BMD pada unit pelaksana teknis dinas	8 Unit	88,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	BMD pada unit pelaksana teknis dinas	1 Unit	100,000,000	Dinas Sosial
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase peningkatan kualitas penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	%		%	4,50 %	1,449,000,000						4,50 %	1,817,396,299	
1 06 04 1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah PPKS (lansia/jompo terlantar) yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar	Orang		Orang	80 Orang	1,449,000,000						80 Orang	1,817,396,299	
1 06 04 1.03 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				80 Orang	1,100,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (lansia/jompo terlantar)	80 Orang	1,350,396,299	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
											(PD-2)				
1 06 04 1.03 02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				80 Orang	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (lansia/jompo terlantar)	80 Orang	75,000,000	Dinas Sosial
1 06 04 1.03 03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				80 Orang	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (lansia/jompo terlantar)	80 Orang	100,000,000	Dinas Sosial
1 06 04 1.03 05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				80 Orang	70,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (lansia/jompo terlantar)	80 Orang	88,000,000	Dinas Sosial
1 06 04 1.03 06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				80 Orang	50,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (lansia/jompo terlantar)	80 Orang	70,000,000	Dinas Sosial
1 06 04 1.03 07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				80 Orang	4,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (lansia/jompo terlantar)	80 Orang	4,000,000	Dinas Sosial
1 06 04 1.03 11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				80 Orang	30,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (lansia/jompo terlantar)	80 Orang	100,000,000	Dinas Sosial
1 06 04 1.03 12	Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi				80 Orang	20,000,000	Kota Mataram, Sekarbela,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan	80 Orang	30,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kekalik Jaya		wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Sosial (lansia/jompo terlarant)				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						1,700,621,790						1,815,558,290		
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	A Nilai	557,166,290						A Nilai	598,543,290	
1 06 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan unit pelaksana teknis dinas	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	6,000,000						1 Dokumen	7,000,000	
1 06 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	6,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai pada unit pelaksana teknis dinas	1 Dokumen	7,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi keuangan	Jenis		Jenis	1 Jenis	92,637,500						1 Jenis	92,637,500	
1 06 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN				3 Orang	92,637,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai pada unit pelaksana teknis dinas	3 Orang	92,637,500	Dinas Sosial
1 06 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen BMD unit pelaksana teknis dinas	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1,787,900						1 Dokumen	1,787,900	
1 06 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD				1 Laporan	1,787,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	BMD unit pelaksana teknis dinas	1 Laporan	1,787,900	Dinas Sosial
1 06 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi umum	Jenis		Jenis	6 Jenis	70,904,890						6 Jenis	86,281,890	
1 06 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12 Jenis	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar	Instansi terkait dan pihak penyedi layanan	12 Jenis	12,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah				
										dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)					
1 06 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				40 Jenis	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait dan pihak penyedi layanan	40 Jenis	12,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait dan pihak penyedi layanan	12 Paket	13,351,500	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				12 exemplar	7,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait dan pihak penyedi layanan	12 exemplar	7,200,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/meterial yang disediakan				20 Jenis	8,704,890	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait dan pihak penyedi layanan	20 Jenis	8,704,890	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinas dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan 0 Laporan	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait dan pihak penyedi layanan	10 Laporan 0 Laporan	33,025,500	Dinas Sosial
1 06 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan BMD unit pelaksana teknis dinas	Unit		Unit	30 Unit	60,200,000						30 Unit	60,200,000	
1 06 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel				3 Jenis	60,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar	BMD unit pelaksana teknis dinas	3 Jenis	60,200,000	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
										dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)					
1 06 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis layanan penunjang perangkat daerah	Jenis		Jenis	4 Jenis	235,826,000					4 Jenis	235,826,000		
1 06 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat				350 lembar	3,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait dan pihak penyedia layanan	350 lembar	3,500,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 layanan 0 Laporan	76,008,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait dan pihak penyedia layanan	3 layanan 0 Laporan	76,008,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				1 jenis	1,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait dan pihak penyedia layanan	1 jenis	1,500,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum				5 org	154,818,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait dan pihak penyedia layanan	5 org	154,818,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan BMD unit pelaksana teknis dinas	Unit		Unit	10 Unit	89,810,000					10 Unit	114,810,000		
1 06 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit	59,810,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	BMD unit pelaksana teknis dinas	5 Unit	69,810,000	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	BMD unit pelaksana teknis dinas	1 Unit	45,000,000	Dinas Sosial
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase peningkatan kualitas penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	%		%	4,50 %	1,143,455,500						4,50 %	1,217,015,000	
1 06 04 1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang dipenuhi kebutuhan dasarnya	Orang		Orang	360 Orang	1,143,455,500						360 Orang	1,217,015,000	
1 06 04 1.02 02	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				480 Orang	600,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	PPKS (anak terlantar)	480 Orang	638,090,000	Dinas Sosial
1 06 04 1.02 03	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				540 Orang	70,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	PPKS (anak terlantar)	540 Orang	90,000,000	Dinas Sosial
1 06 04 1.02 04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				540 Orang	24,954,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	PPKS (anak terlantar)	540 Orang	24,954,000	Dinas Sosial
1 06 04 1.02 05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				540 Orang	57,001,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	PPKS (anak terlantar)	540 Orang	57,001,500	Dinas Sosial
1 06 04 1.02 06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				480 Orang	250,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung	PPKS (anak terlantar)	480 Orang	314,520,000	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan		pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)					
1 06 04 1.02 11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				480 Orang	61,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	PPKS (anak terlantar)	480 Orang	80,000,000	Dinas Sosial
1 06 04 1.02 13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				12 Laporan	80,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	PPKS (anak terlantar)	12 Laporan	12,449,500	Dinas Sosial
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						2,408,024,021						3,177,456,012		
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	Ni		Ni	A Ni	588,008,021						A Ni	730,688,117	
1 06 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	7,000,000						1 Dokumen	12,000,000	
1 06 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	7,000,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	UPTD perangkat daerah	1 Dokumen	12,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi keuangan	Jenis		Jenis	1 Jenis	30,000,000						1 Jenis	57,000,000	
1 06 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	30,000,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	ASN UPTD	1 Dokumen	57,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi umum	Jenis		Jenis	6 Jenis	63,584,000						6 Jenis	98,384,088	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	8,000,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Perangkat dearah terkait dan pihak swasta	10 Paket	12,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				35 Paket	10,900,000				Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Perangkat dearah terkait dan pihak swasta	35 Paket	12,800,088	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				15 Paket	7,034,000				Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Perangkat dearah terkait dan pihak swasta	15 Paket	7,234,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				20 Dokumen	2,650,000				Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Perangkat dearah terkait dan pihak swasta	20 Dokumen	2,950,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				20 Paket	10,000,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Perangkat dearah terkait dan pihak swasta	20 Paket	13,400,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	25,000,000				Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Perangkat dearah terkait dan pihak swasta	10 Laporan	50,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah	Jenis		Jenis	2 Jenis	85,000,000						2 Jenis	75,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Paket	75,000,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	BMD perangkat daerah	5 Paket	35,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	10,000,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BMD perangkat daerah	2 Unit	40,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis layanan penunjang perangkat daerah	Jenis		Jenis	3 Jenis	312,424,021						3 Jenis	363,004,029	
1 06 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	2,000,000					Pegawai/ASN pada UPTD, pihak swasta, BUMN dan BUMD	10 Laporan	2,500,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	106,400,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai/ASN pada UPTD, pihak swasta, BUMN dan BUMD	5 Laporan	104,480,008	Dinas Sosial
1 06 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	204,024,021					Pegawai/ASN pada UPTD, pihak swasta, BUMN dan BUMD	12 Laporan	256,024,021	Dinas Sosial
1 06 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan BMD unit pelaksana teknis dinas	Jenis		Jenis	3 Jenis	90,000,000						3 Jenis	125,300,000	
1 06 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit	40,000,000				Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	BMD unit pelaksana teknis dinas	5 Unit	48,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10,000,000				Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	BMD unit pelaksana teknis dinas	10 Unit	12,300,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	40,000,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BMD unit pelaksana teknis dinas	1 Unit	65,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase peningkatan kualitas penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	%		%	4,50 %	1,820,016,000						4,50 %	2,446,767,895	
1 06 04 1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumah Anak Terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti	Orang		Orang	80 Orang	1,820,016,000						80 Orang	2,446,767,895	
1 06 04 1.02 01	Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi				80 Orang	90,082,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	PPKS (anak yatim terlantar, piatu terlantar, yatim piatu terlantar dan anak terlantar)	80 Orang	98,082,737	Dinas Sosial
1 06 04 1.02 02	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				80 Orang	1,059,000,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	PPKS (anak yatim terlantar, piatu terlantar, yatim piatu terlantar dan anak terlantar)	80 Orang	1,358,476,136	Dinas Sosial
1 06 04 1.02 04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				80 Orang	50,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	PPKS (anak yatim terlantar, piatu terlantar, yatim piatu terlantar dan anak terlantar)	80 Orang	78,825,349	Dinas Sosial
1 06 04 1.02 05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				80 Orang	12,500,000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		PPKS (anak yatim terlantar, piatu terlantar, yatim piatu terlantar dan anak terlantar)	80 Orang	14,500,000	Dinas Sosial
1 06 04 1.02 06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				80 Orang	200,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		PPKS (anak yatim terlantar, piatu terlantar, yatim piatu terlantar dan anak terlantar)	80 Orang	322,448,868	Dinas Sosial
1 06 04 1.02 09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				80 Orang	318,434,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		PPKS (anak yatim terlantar, piatu terlantar, yatim piatu terlantar dan anak terlantar)	80 Orang	454,434,805	Dinas Sosial
1 06 04 1.02 13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi				5 Dokumen	90,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk		PPKS (anak yatim terlantar, piatu terlantar,	5 Dokumen	120,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti						Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		yatim piatu terlantar dan anak terlantar)			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						2,307,613,577							2,409,917,577	
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	A Nilai	813,817,577						A Nilai	918,917,577	
1 06 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan unit pelaksana teknis dinas	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	6,000,000						1 Dokumen	7,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	6,000,000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai unit pelaksanaan teknis dinas	1 Dokumen	7,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi keuangan	Jenis		Jenis	1 Jenis	60,000,000						1 Jenis	70,000,000	
1 06 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	60,000,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai unit pelaksana teknis dinas	1 Dokumen	70,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi umum	Jenis		Jenis	8 Jenis	114,000,000						8 Jenis	137,100,000	
1 06 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	10,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait, BUMN, BUMD dan pihak swasta	12 Paket	12,500,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	8,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait, BUMN, BUMD dan pihak swasta	7 Paket	10,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait, BUMN, BUMD dan pihak swasta	12 Paket	12,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	6,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan	Instansi terkait, BUMN, BUMD dan pihak swasta	12 Paket	7,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	4,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		(PD-2) Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait, BUMN, BUMD dan pihak swasta	24 Dokumen	5,600,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait, BUMN, BUMD dan pihak swasta	12 Paket	60,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	25,000,000					Instansi terkait, BUMN, BUMD dan pihak swasta	2 Laporan	30,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan BMD unit pelaksana teknis dinas	Unit		Unit	50 Unit	50,000,000						50 Unit	100,000,000	
1 06 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	50,000,000	Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Selebung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	BMD unit pelaksanaan teknis dinas	2 Paket	100,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis layanan penunjang perangkat daerah	Jenis		Jenis	3 Jenis	471,817,577						3 Jenis	474,817,577	
1 06 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai pada unit pelaksana teknis dinas	12 Laporan	4,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	108,817,577	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai pada unit pelaksana teknis dinas	12 Laporan	110,817,577	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	360,000,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai pada unit pelaksana teknis dinas	1 Laporan	360,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan BMD unit pelaksana teknis dinas	Unit		Unit	3 Unit	112,000,000						3 Unit	130,000,000	
1 06 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit	52,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	BMD unit pelaksana teknis dinas	5 Unit	60,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	60,000,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	BMD unit pelaksana teknis dinas	2 Unit	70,000,000	Dinas Sosial
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase peningkatan kualitas penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	%		%	4,50 %	1,493,796,000						4,50 %	1,491,000,000	
1 06 04 1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah disabilitas mental (eks psikotik) yang dipenuhi kebutuhan dasarnya	Orang		Orang	100 Orang	1,493,796,000						100 Orang	1,491,000,000	
1 06 04 1.01 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				100 Orang	1,230,000,000	Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Selebung			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (disabilitas mental)	100 Orang	1,300,000,000	Dinas Sosial
1 06 04 1.01 02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				100 Orang	52,000,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (disabilitas mental)	100 Orang	10,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 04 1.01 03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				0 Orang 100 Orang	66,796,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (disabilitas mental)	0 Orang 100 Orang	6,000,000	Dinas Sosial
1 06 04 1.01 05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				100 Orang	80,000,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (disabilitas mental)	100 Orang	90,000,000	Dinas Sosial
1 06 04 1.01 06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				100 Orang	50,000,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (disabilitas mental)	100 Orang	55,000,000	Dinas Sosial
1 06 04 1.01 07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				100 Orang	15,000,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (disabilitas mental)	100 Orang	30,000,000	Dinas Sosial
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						1,991,500,000						2,431,000,000		
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	A Nilai	641,000,000						A Nilai	727,000,000	
1 06 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	6,000,000						1 Dokumen	7,000,000	
1 06 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	6,000,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai unit pelaksanaan teknis	1 Dokumen	7,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi keuangan	Jenis		Jenis	1 Jenis	40,000,000						1 Jenis	50,000,000	
1 06 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai unit pelaksana teknis dinas	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi umum	Jenis		Jenis	5 Jenis	54,000,000						5 Jenis	60,000,000	
1 06 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	8,000,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai, instansi terkait, BUMN, BUMD dan pihak swasta	12 Paket	10,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai, instansi terkait, BUMN, BUMD dan pihak swasta	12 Paket	12,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	6,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai, instansi terkait, BUMN, BUMD dan pihak swasta	12 Paket	7,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai, instansi terkait, BUMN, BUMD dan pihak swasta	12 Dokumen	6,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai, instansi terkait, BUMN, BUMD dan pihak swasta	2 Laporan	25,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis layanan penunjang perangkat daerah	Jenis		Jenis	3 Jenis	433,000,000						3 Jenis	469,000,000	
1 06 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai instansi terkait, BUMN, BUMD dan pihak swasta	12 Laporan	4,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	40,000,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai instansi terkait, BUMN, BUMD dan pihak swasta	12 Laporan	65,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	390,000,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai instansi terkait, BUMN, BUMD dan pihak swasta	12 Laporan	400,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan BMD unit pelaksana teknis dinas	Jenis		Jenis	3 Jenis	108,000,000						3 Jenis	141,000,000	
1 06 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara				5 Unit	65,000,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BMD unit pelaksanaan teknis dinas	5 Unit	70,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dan Dibayarkan Pajaknya						Kelurahan							
1 06 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	8,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BMD unit pelaksanaan teknis dinas	5 Unit	11,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	35,000,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	BMD unit pelaksanaan teknis dinas	1 Unit	60,000,000	Dinas Sosial
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase peningkatan kualitas penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	%		%	4,50 %	1,350,500,000						4,50 %	1,704,000,000	
1 06 04 1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah gepeng dan keluarga bermasalah sosial psikologis yang dipenuhi kebutuhan dasarnya	Orang		Orang	75 Orang	1,350,500,000						75 Orang	1,704,000,000	
1 06 04 1.04 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				75 Orang	900,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		PPKS gepeng dan Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	75 Orang	1,200,000,000	Dinas Sosial
1 06 04 1.04 02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				75 Orang	40,000,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		PPKS gepeng dan Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	75 Orang	50,000,000	Dinas Sosial
1 06 04 1.04 03	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi				75 Orang	10,000,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		PPKS gepeng dan Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	75 Orang	12,000,000	Dinas Sosial
1 06 04 1.04 04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				75 Orang	10,000,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		PPKS gepeng dan Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	75 Orang	12,000,000	Dinas Sosial
1 06 04 1.04 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				75 Orang	50,000,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		PPKS gepeng dan Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	75 Orang	60,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1 06 04 1.04 07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi				75 Orang	300,000,000	Kab. Lombok Timur, Aikmel, Lenek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	PPKS gepeng dan Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	75 Orang	320,000,000	Dinas Sosial	
1 06 04 1.04 11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti				5 Dokumen	40,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		PPKS gepeng dan Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	5 Dokumen	50,000,000	Dinas Sosial	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						2,000,093,236							2,137,339,610		
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	A Nilai	948,890,336						A Nilai	969,735,380		
1 06 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan unit pelaksana teknis dinas	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	6,000,000						1 Dokumen	5,800,000		
1 06 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	6,000,000				Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai pada unit pelaksana teknis dinas	1 Dokumen	5,800,000	Dinas Sosial	
1 06 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi keuangan	Jenis		Jenis	1 Jenis	32,000,000						1 Jenis	32,000,000		
1 06 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	32,000,000				Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pegawai pada unit pelaksana teknis dinas	12 Dokumen	32,000,000	Dinas Sosial	
1 06 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi umum	Jenis		Jenis	6 Jenis	129,759,000						6 Jenis	143,304,002		
1 06 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				30 Paket	6,349,000				Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan	Instansi terkait dan pihak penyedia layanan	30 Paket	6,349,000	Dinas Sosial	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
											(PD-2)				
1 06 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	20,000,000				Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait dan pihak penyedia layanan	2 Paket	22,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				35 Paket	10,000,000				Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait dan pihak penyedia layanan	35 Paket	11,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				20 Paket	8,205,000				Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait dan pihak penyedia layanan	20 Paket	8,450,002	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	5,205,000				Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait dan pihak penyedia layanan	12 Dokumen	5,505,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	80,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait dan pihak penyedia layanan	12 Laporan	90,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis layanan penunjang perangkat daerah	Jenis		Jenis	4 Jenis	594,000,000						4 Jenis	597,500,000	
1 06 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				50 Laporan	4,000,000				Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan	Instansi terkait dan pihak penyedia layanan	50 Laporan	4,500,000	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
											sektor unggulan (PD-2)				
1 06 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	50,000,000				Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait dan pihak penyedia layanan	4 Laporan	53,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				17 Laporan	540,000,000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Instansi terkait dan pihak penyedia layanan	17 Laporan	540,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan BMD unit pelaksana teknis dinas	Unit		Unit	10 Unit	187,131,336						10 Unit	191,131,378	
1 06 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit	79,631,336	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			BMD unit pelaksana teknis dinas	5 Unit	83,631,378	Dinas Sosial
1 06 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	7,500,000					BMD unit pelaksana teknis dinas	5 Unit	7,500,000	Dinas Sosial
1 06 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	100,000,000				Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	BMD unit pelaksana teknis dinas	2 Unit	100,000,000	Dinas Sosial
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase peningkatan kualitas penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	%		%	4,50 %	1,051,202,900						4,50 %	1,167,604,230	
1 06 04 1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah PPKS (lansia/ jomplo terlantar) yang dipenuhi kebutuhan dasarnya	Orang		Orang	50 Orang	1,051,202,900						50 Orang	1,167,604,230	
1 06 04 1.03 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				50 Orang	665,500,000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan	PPKS (Lansia/ Jomplo Terlantar)	50 Orang	738,932,745	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
											pengembangan sektor unggulan (PD-2)				
1 06 04 1.03 02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				50 Orang	58,000,000	Kota Bima, Asakota, Jatiwangi	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	PPKS (Lansia/ Jompo Terlantar)	50 Orang	60,172,153	Dinas Sosial
1 06 04 1.03 03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				50 Orang	80,500,000	Kota Bima, Asakota, Jatiwangi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	PPKS (Lansia/ Jompo Terlantar)	50 Orang	90,500,000	Dinas Sosial
1 06 04 1.03 05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				50 Orang	90,494,000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	PPKS (Lansia/ Jompo Terlantar)	50 Orang	109,494,999	Dinas Sosial
1 06 04 1.03 06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				50 Orang	80,000,000	Kota Bima, Asakota, Jatiwangi	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			PPKS (Lansia/ Jompo Terlantar)	50 Orang	85,255,428	Dinas Sosial
1 06 04 1.03 07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				50 Orang	10,000,000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	PPKS (Lansia/ Jompo Terlantar)	50 Orang	12,540,000	Dinas Sosial
1 06 04 1.03 11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				50 Orang	56,708,900				Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	PPKS (Lansia/ Jompo Terlantar)	50 Orang	58,708,900	Dinas Sosial
1 06 04 1.03 12	Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi				50 Orang	10,000,000				Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar	PPKS (Lansia/ Jompo Terlantar)	50 Orang	12,000,005	Dinas Sosial

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Capaian RKPD Tahun 2021	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
										Nasional	Daerah					
											dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)					
TOTAL						72,861,194,275								92,497,696,536		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusai/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif				
														Nasional	Daerah							
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						27,857,736,406							29,705,000,000				
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip OPD	Indeks		Indeks	85 Indeks	24,207,736,406						85 Indeks	25,430,000,000				
2	07	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	23 Dokumen	306,538,000						23 Dokumen	350,000,000				
2	07	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen 0 Dokumen	135,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Dokumen 0 Dokumen	150,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
2	07	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen 0 Dokumen	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Dokumen 0 Dokumen	25,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
2	07	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen				1 Dokumen	20,538,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Dokumen	25,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
2	07	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen 0 Dokumen	13,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Dokumen 0 Dokumen	15,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
2	07	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	0 Dokumen	15,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
2	07	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Dokumen 0 Laporan	17,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	5 Dokumen 0 Laporan	20,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
2	07	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Dokumen 0 Laporan	90,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Dokumen 0 Laporan	100,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
2	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Keuangan	Dokumen		Dokumen	9 Dokumen	20,324,198,406						9 Dokumen	21,155,000,000				

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 07 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				215 Orang 0 Orang/ Bulan	20,177,698,406	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	215 Orang 0 Orang/ Bulan	21,000,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Tenaga Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen 2 Orang	120,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	0 Dokumen 2 Orang	125,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen 0 Dokumen	17,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	2 Dokumen 0 Dokumen	20,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Dokumen 0 Laporan	9,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	1 Dokumen 0 Laporan	10,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Barang Milik Daerah	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	27,500,000						4 Dokumen	30,000,000	
2 07 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah BMD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan 0 Laporan	27,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	1 Laporan 0 Laporan	30,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat pelatihan	Orang		Orang	182 Orang	42,500,000						182 Orang	50,000,000	
2 07 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah ASN yang di diklat Formal Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				177 Orang 0 Dokumen	42,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	177 Orang 0 Dokumen	50,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	laporan administrasi umum	Dokumen		Dokumen	28 Dokumen	937,500,000						28 Dokumen	1,032,500,000	
2 07 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi Listrik Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				11 Dokumen 0 Paket	7,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	11 Dokumen 0 Paket	10,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Peralatan Kantor				0 Paket 8 Jenis	700,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	0 Paket 8 Jenis	710,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 07 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis ATK Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				30 Jenis 0 Paket	60,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	30 Jenis 0 Paket	75,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Eksemplar 0 Paket	15,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	7 Eksemplar 0 Paket	20,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah eksemplar				0 Dokumen 7 Eksemplar	15,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	0 Dokumen 7 Eksemplar	17,500,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Orang				0 Laporan 263 Orang	40,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	0 Laporan 263 Orang	50,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat				0 Laporan 15 Orang/Tahun	100,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	0 Laporan 15 Orang/Tahun	150,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor	Unit		Unit	1 Unit	1,000,000,000						1 Unit	1,100,000,000	
2 07 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit 0 Unit	1,000,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	1 Unit 0 Unit	1,100,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Orang		Orang	62 Orang	1,367,000,000						62 Orang	1,477,500,000	
2 07 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Keluar				0 Laporan 139 Surat	2,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	0 Laporan 139 Surat	2,500,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Rekening				0 Laporan 4 Rekening	365,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	0 Laporan 4 Rekening	375,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 07 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Tenaga Jasa pelayanan Umum Kantor				0 Laporan 38 Orang	1,000,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	0 Laporan 38 Orang	1,100,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	Unit		Unit	69 Unit	202,500,000						69 Unit	235,000,000	
2 07 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				11 Unit 0 Unit	97,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	11 Unit 0 Unit	100,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit 0 Unit	55,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	1 Unit 0 Unit	75,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				11 Unit 0 Unit	50,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	11 Unit 0 Unit	60,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kab/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%		%	90 %	250,000,000						90 %	200,000,000	
2 07 02 1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang di hasilkan Jumlah Perda Ketenagakerjaan yang dihasilkan	dokumen dokumen		dokumen dokumen	1 dokumen 1 dokumen	250,000,000						1 dokumen 1 dokumen	200,000,000	
2 07 02 1.01 01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	200,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Seluruh Disnakertrans Kab/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Dokumen	125,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 02 1.01 02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang Mengikuti Pelatihan Penyusunan RTK Mikro				40 Orang	50,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Seluruh Disnakertrans Kab/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat	40 Orang	75,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi	%		%	18 %	950,000,000						18 %	1,150,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 07 03 1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Kebutuhan Pelatihan dan pemagangan Jumlah Pencari Kerja Yang Mengikuti Pemagangan Luar Negeri	dokumen orang		dokumen orang	2 dokumen 300 orang	875,000,000						2 dokumen 300 orang	1,050,000,000	
2 07 03 1.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n				300 Orang	600,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pencari Kerja	300 Orang	750,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 03 1.01 02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				18 Lembaga	275,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pencari Kerja	18 Lembaga	300,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 03 1.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah LPK Yang Disurvei dan dinilai	Lembaga		Lembaga	40 Lembaga	75,000,000						40 Lembaga	100,000,000	
2 07 03 1.02 01	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi				40 LPK	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Seluruh LPK/LLK Kab/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat	40 LPK	100,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	%		%	57,48 %	1,200,000,000						57,48 %	1,400,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 07 04 1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui mekanisme AKAD/ AKL	Orang		Orang	160 Orang	375,000,000						160 Orang	400,000,000	
2 07 04 1.01 04	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL				160 Orang	375,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pencari Kerja (Pencaker)	160 Orang	400,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 04 1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui job fair	Orang		Orang	2000 Orang	200,000,000						2000 Orang	225,000,000	
2 07 04 1.03 03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				2000 Orang	200,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pencari Kerja (Pencaker)	2000 Orang	225,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 04 1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Jumlah PMI/Pencaker Yang Ditempatkan, Dilindungi Dan Diberdayakan.	Orang		Orang	29240 Orang	575,000,000						29240 Orang	700,000,000	
2 07 04 1.04 01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				1600 Orang	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pekerja Migran Indonesia/Penca ker	1600 Orang	350,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 04 1.04 03	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA				27500 Orang	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pekerja Migran Indonesia/Penca ker	27500 Orang	150,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 04 1.04 04	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan				140 Orang	175,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pekerja Migran Indonesia/Penca ker	140 Orang	200,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2 07 04 1.05	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						50,000,000							75,000,000	
2 07 04 1.05 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA				95 Orang	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		95 Orang	75,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang melaksnakan Peraturan Perusahaan	%		%	23 %	800,000,000						23 %	975,000,000	
2 07 05 1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase perusahaan yang memiliki perangkat hubungan industrial	%		%	23 %	275,000,000						23 %	375,000,000	
2 07 05 1.02 01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah				100 Perkara	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Perusahaan Kab/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat	100 Perkara	175,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 05 1.02 04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				11 Lembaga	125,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Perusahaan Kab/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat	11 Lembaga	200,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 05 1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota	Jumlah UMP / UMK Yang Disahkan	dokumen		dokumen	11 dokumen	525,000,000						11 dokumen	600,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	(UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)														
2 07 05 1.03 01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah jumlah tenaga kerja rentan yang mendapat jaminan sosial ketenagakerjaan Jumlah Penetapan UMP				10000 orang 11 Surat Keputusan	525,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat	10000 orang 11 Surat Keputusan	600,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3	%		%	23 %	450,000,000						23 %	550,000,000	
2 07 06 1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan Yang Dibina Pelaksanaan Norma K3- nya	perusahaan		perusahaan	90 perusahaan	450,000,000						90 perusahaan	550,000,000	
2 07 06 1.01 01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)				90 Perusahaan	125,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Perusahaan di Kab/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat	90 Perusahaan	150,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 06 1.01 02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan				75 Kasus	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Perusahaan di Kab/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat	75 Kasus	200,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 06 1.01 03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3				90 Perusahaan	175,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perusahaan di Kab/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat	90 Perusahaan	200,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						450,000,000						550,000,000		
3 32 02	PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	persentase transmigran yang ditempatkan	%		%	100 %	200,000,000						100 %	250,000,000	
3 32 02 1.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen NKSAD.	dokumen		dokumen	1 dokumen	200,000,000						1 dokumen	250,000,000	
3 32 02 1.01 02	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Dokumen NKSAD Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi				0 Dokumen 1 Kawasan Transmigrasi	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Calon Transmigran dan Lokasi Daerah tujuan Transmigrasi	0 Dokumen 1 Kawasan Transmigrasi	125,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3 32 02 1.01 03	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi				5 Hektar	100,000,000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Calon Transmigran dan Lokasi Daerah tujuan Transmigrasi	5 Hektar	125,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 32 03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	persentase lahan usaha yang sudah dikelola	%		%	100 %	150,000,000						100 %	175,000,000	
3 32 03 1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	transmigran yang ditempatkan dalam 1 provinsi	KK		KK	20 KK	150,000,000						20 KK	175,000,000	
3 32 03 1.01 04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan				20 Kepala Keluarga	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Calon Transmigran dan Lokasi Daerah tujuan Transmigrasi	20 Kepala Keluarga	175,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3 32 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Opersentase satuan permukiman yang mandiri	%		%	100 %	100,000,000						100 %	125,000,000	
3 32 04 1.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Jumlah peserta Bimtek	orang		orang	20 orang	100,000,000						20 orang	125,000,000	
3 32 04 1.01 01	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina				20 Kepala Keluarga	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Calon Transmigran dan Lokasi Daerah tujuan Transmigrasi	20 Kepala Keluarga	125,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						2,932,750,000							3,486,000,000	
2 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Lakip OPD	indeks		indeks	85 indeks	1,607,750,000						85 indeks	1,886,000,000	
2 07 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen		dokumen	23 dokumen	60,000,000						23 dokumen	75,000,000	
2 07 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen 0 Dokumen	15,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTD Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri NTB	1 Dokumen 0 Dokumen	20,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 07 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen 0 Dokumen	15,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTD Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri NTB	1 Dokumen 0 Dokumen	20,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen 0 Dokumen	15,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTD Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri NTB	1 Dokumen 0 Dokumen	17,500,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen 0 Dokumen	15,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTD Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri NTB	1 Dokumen 0 Dokumen	17,500,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	laporan administrasi umum	dokumen		dokumen	28 dokumen	60,000,000						28 dokumen	90,000,000	
2 07 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Laporan				0 Dokumen 1 Dokumen	50,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTD Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri NTB	0 Dokumen 1 Dokumen	75,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Dokumen 0 Laporan	10,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTD Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri NTB	1 Dokumen 0 Laporan	15,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Barang Milik Daerah	dokumen		dokumen	4 dokumen	15,000,000						4 dokumen	20,000,000	
2 07 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah BMD				1 Laporan	15,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTD Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri NTB	1 Laporan	20,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat pelatihan	orang		orang	182 orang	10,000,000						182 orang	15,000,000	
2 07 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang di diklat Formal Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang 0 Orang	10,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTD Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri NTB	5 Orang 0 Orang	15,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	laporan administrasi umum	dokumen		dokumen	28 dokumen	285,000,000						28 dokumen	382,500,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 07 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi Listrik Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				25 Jenis 0 Paket	25,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTD Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri NTB	25 Jenis 0 Paket	27,500,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah peralatan kantor				0 Paket 15 Jenis	100,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTD Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri NTB	0 Paket 15 Jenis	150,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis ATK Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 Jenis 0 Paket	30,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTD Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri NTB	15 Jenis 0 Paket	35,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Eksemplar 0 Paket	20,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTD Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri NTB	5 Eksemplar 0 Paket	25,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Eksemplar				0 Dokumen 6 Eksemplar	20,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTD Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri NTB	0 Dokumen 6 Eksemplar	25,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Orang				0 Laporan 250 Orang	40,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTD Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri NTB	0 Laporan 250 Orang	45,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat				0 Laporan 20 Orang/Tahun	50,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTD Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri NTB	0 Laporan 20 Orang/Tahun	75,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan administrasi umum	dokumen		dokumen	28 dokumen	877,750,000						28 dokumen	928,500,000	
2 07 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Keluar				0 Laporan 146 Surat	2,750,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTD Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri NTB	0 Laporan 146 Surat	3,500,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Rekening				0 Laporan 6 Rekening	150,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTD Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri NTB	0 Laporan 6 Rekening	175,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 07 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Tenaga Jasa pelayanan Umum Kantor				0 Laporan 13 Orang	725,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTD Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri NTB	0 Laporan 13 Orang	750,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	Unit		Unit	69 Unit	300,000,000						69 Unit	375,000,000	
2 07 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit 0 Unit	125,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTD Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri NTB	5 Unit 0 Unit	150,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Gedung 0 Unit	125,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTD Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri NTB	1 Gedung 0 Unit	150,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				23 Unit 0 Unit	50,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTD Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri NTB	23 Unit 0 Unit	75,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi	%		%	18 %	1,325,000,000						18 %	1,600,000,000	
2 07 03 1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	orang		orang	160 orang	1,250,000,000						160 orang	1,500,000,000	
2 07 03 1.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n				160 Orang 0 Orang	1,250,000,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pencari Kerja (Pencaker) di Provinsi Nusa Tenggara Barat	160 Orang 0 Orang	1,500,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2 07 03 1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah peserta monev yang telah mendapat pekerjaan (formal/ informal)	OT		OT	20 OT	75,000,000						20 OT	100,000,000	
2 07 03 1.04 01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah				20 Dokumen	75,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	LPK/LLk di Provinsi Nusa Tenggara Barat	20 Dokumen	100,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						3,073,000,000							3,677,500,000	
2 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Lakip OPD	indeks		indeks	85 indeks	2,273,000,000						85 indeks	2,627,500,000	
2 07 01 1.01	Perencanaan, Penggaggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Perencanaan, Penggaggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen		dokumen	23 dokumen	33,000,000						23 dokumen	50,000,000	
2 07 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen 0 Dokumen	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Dokumen 0 Dokumen	15,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen				1 Dokumen	3,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen 0 Dokumen	10,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Dokumen 0 Dokumen	15,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen				1 Dokumen 0 Dokumen	10,000,000	Kota Mataram, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik	0	1 Dokumen 0 Dokumen	15,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD						Kecamatan, Semua Kelurahan			(PD-3)				
2 07 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	laporan administrasi umum	dokumen		dokumen	28 dokumen	25,000,000						28 dokumen	35,000,000	
2 07 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Laporan				0 Dokumen 1 Dokumen	15,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	0 Dokumen 1 Dokumen	20,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Dokumen 0 Laporan	10,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Dokumen 0 Laporan	15,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Barang Milik Daerah	dokumen		dokumen	4 dokumen	10,000,000						4 dokumen	15,000,000	
2 07 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah BMD				1 Laporan	10,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Laporan	15,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat pelatihan	orang		orang	182 orang	250,000,000						182 orang	250,000,000	
2 07 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang di diklat Formal Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				9 Orang 0 Orang	250,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	9 Orang 0 Orang	250,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	laporan administrasi umum	dokumen		dokumen	28 dokumen	1,185,000,000						28 dokumen	1,350,000,000	
2 07 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi Listrik Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Jenis 0 Paket	7,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	5 Jenis 0 Paket	10,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah peralatan kantor				0 Paket 5 Jenis	1,000,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	0 Paket 5 Jenis	1,100,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis ATK				10 Jenis 0 Paket	50,000,000	Kota Mataram, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik	0	10 Jenis 0 Paket	75,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						Kecamatan, Semua Kelurahan			(PD-3)				
2 07 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Eksemplar 0 Paket	17,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Eksemplar 0 Paket	25,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Eksemplar				0 Dokumen 6 Eksemplar	17,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	0 Dokumen 6 Eksemplar	20,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Orang				0 Laporan 150 Orang	17,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	0 Laporan 150 Orang	20,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat				0 Laporan 2 Orang/Tahun	75,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	0 Laporan 2 Orang/Tahun	100,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						355,000,000							432,500,000	
2 07 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Keluar				0 Laporan 96 Surat	5,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Laporan 96 Surat	7,500,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Rekening				0 Laporan 3 Rekening	50,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Laporan 3 Rekening	75,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Tenaga Jasa pelayanan Umum Kantor				0 Laporan 6 Orang	300,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Laporan 6 Orang	350,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						415,000,000							495,000,000	
2 07 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara				3 Unit 0 Unit	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		3 Unit 0 Unit	75,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Jabatan	dan Dibayarkan Pajaknya						Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2 07 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Gedung 0 Unit	250,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Gedung 0 Unit	300,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit 0 Unit	115,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		10 Unit 0 Unit	120,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3	%		%	23 %	800,000,000						23 %	1,050,000,000	
2 07 06 1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan dan tenaga kerja Yang diperiksa Keselamatan Dan Kesehatan Kerjanya	orang		orang	500 orang	800,000,000						500 orang	1,050,000,000	
2 07 06 1.01 01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan Yang Diperiksa Pelaksanaan Norma Kerjanya Di Pulau Lombok Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)				150 Perusahaan 0 Perusahaan	200,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok	150 Perusahaan 0 Perusahaan	350,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 06 1.01 03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan dan tenaga kerja Yang diperiksa Keselamatan Dan Kesehatan Kerjanya Di Pulau Lombok				800 Perusahaan 0 Perusahaan	600,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok	800 Perusahaan 0 Perusahaan	700,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3						Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						2,349,418,206							2,805,000,000	
2 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Lakip OPD	indeks		indeks	85 indeks	2,049,418,206						85 indeks	2,355,000,000	
2 07 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen		dokumen	23 dokumen	25,000,000						23 dokumen	37,500,000	
2 07 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen 0 Dokumen	10,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Dokumen 0 Dokumen	15,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen				1 Dokumen	3,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen				1 Dokumen	6,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						6,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0		7,500,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	laporan administrasi umum	dokumen		dokumen	28 dokumen	10,000,000						28 dokumen	15,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 07 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Laporan				0 Dokumen 1 Dokumen	10,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	0 Dokumen 1 Dokumen	15,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Barang Milik Daerah	dokumen		dokumen	4 dokumen	15,000,000						4 dokumen	20,000,000	
2 07 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah BMD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan 0 Laporan	15,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Laporan 0 Laporan	20,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	laporan administrasi umum	dokumen		dokumen	28 dokumen	1,492,972,496						28 dokumen	1,670,000,000	
2 07 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi Listrik Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Jenis 0 Paket	7,500,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	5 Jenis 0 Paket	10,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah peralatan kantor				0 Paket 5 Jenis	1,412,826,496	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	0 Paket 5 Jenis	1,500,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis ATK Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				18 Jenis 0 Paket	15,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	18 Jenis 0 Paket	17,500,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan				3 Eksemplar	5,346,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	3 Eksemplar	7,500,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Eksemplar				1 Eksemplar	8,800,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Eksemplar	10,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Orang				200 Orang	6,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	200 Orang	75,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 07 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat				4 Orang/Tahun	37,500,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	4 Orang/Tahun	50,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						75,000,000							100,000,000	
2 07 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit 0 Unit	75,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		3 Unit 0 Unit	100,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						330,000,000							382,500,000	
2 07 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Keluar				0 Laporan 96 Surat	5,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Laporan 96 Surat	7,500,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Rekening				0 Laporan 3 Rekening	50,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Laporan 3 Rekening	75,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Tenaga Jasa pelayanan Umum Kantor				0 Laporan 3 Orang	275,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Laporan 3 Orang	300,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						101,445,710							130,000,000	
2 07 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan				4 Unit	48,945,710	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		4 Unit	50,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor				1 Gedung	27,500,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Gedung	30,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor				2 Unit 0 Unit	25,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		2 Unit 0 Unit	50,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						Semua Kelurahan							
2 07 06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	persentase Perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3	%		%	23 %	300,000,000						23 %	450,000,000	
2 07 06 1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan dan tenaga kerja Yang diperiksa Keselamatan Dan Kesehatan Kerjanya Jumlah Perusahaan perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan K3	perusahaan perusahaan		perusahaan perusahaan	120 perusahaan 1115 perusahaan	300,000,000						120 perusahaan 1115 perusahaan	450,000,000	
2 07 06 1.01 01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan Yang diperiksa Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan Di Tempat Kerjanya Di Pulau Sumbawa Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)				100 Perusahaan 0 Perusahaan	100,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	100 Perusahaan 0 Perusahaan	150,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 06 1.01 02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan Jumlah Perusahaan Yang diperiksa Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan Di Tempat Kerjanya Di Pulau Sumbawa				0 Kasus 75 Perusahaan	100,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	0 Kasus 75 Perusahaan	150,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
										Nasional	Daerah					
								Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
2 07 06 1.01 03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan dan tenaga kerja Yang diperiksa Keselamatan Dan Kesehatan Kerjanya Di Pulau Sumbawa Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3				100 Perusahaan 0 Perusahaan	100,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	100 Perusahaan 0 Perusahaan	150,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
TOTAL							36,662,904,612							40,223,500,000		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
														Nasional	Daerah							
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						14,540,778,605								0			
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	nilai sakip	nilai		nilai	BB nilai	10,424,475,605						BB nilai	0				
2	08	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan	dokumen		dokumen	7 dokumen	294,470,600						7 dokumen	0				
2	08	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
2	08	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	20,891,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
2	08	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	21,312,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
2	08	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	5,825,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
2	08	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	4,925,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
2	08	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	13,166,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
2	08	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	78,348,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
2	08	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Jumlah Orang	dokumen orang		dokumen orang	1 dokumen 61 orang	8,356,655,546						1 dokumen 61 orang	0				

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/ Bulan	8,328,564,946	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN	65 Orang/ Bulan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	17,783,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	10,306,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan	dokumen		dokumen	1 dokumen	3,387,200						1 dokumen	0	
2 08 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	3,387,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan	dokumen		dokumen	1 dokumen	260,771,659						1 dokumen	0	
2 08 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	8,200,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN dan Tenaga Kontrak	5 Paket	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	30,434,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN dan Tenaga Kontrak	1 Paket	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	49,289,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN dan Tenaga Kontrak	1 Paket	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	26,467,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN dan Tenaga Kontrak	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	51,171,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN dan Tenaga Kontrak	1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	95,208,359	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN dan Tenaga Kontrak	1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan	dokumen		dokumen	1 dokumen	362,919,200						1 dokumen	0	
2 08 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1 Unit	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	62,919,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	6 Unit	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan	dokumen		dokumen	1 dokumen	715,345,200						1 dokumen	0	
2 08 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3,650,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	125,366,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	45,365,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	540,963,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan	dokumen		dokumen	1 dokumen	430,926,200						1 dokumen	0	
2 08 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				30 Unit	294,348,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	30 Unit	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	35,597,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	15 Unit		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	100,980,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Unit		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase PD yang menerapkan PPRG	%		%	65.28 %	728,727,000						65.28 %	0	
2 08 02 1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah				45	652,987,000						45	0	
2 08 02 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	472,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD Prov. NTB	1 Dokumen		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 02 1.01 03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi				47 Perangkat Daerah	180,587,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD Prov. NTB	47 Perangkat Daerah		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 02 1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	Proporsi kader perempuan di partai politik				39.2	75,740,000						39.2	0	
2 08 02 1.02 01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	75,740,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perempuan di Parpol	1 Dokumen		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase lembaga layanan perlindungan perempuan	%		%	3 %	900,596,000						3 %	0	
2 08 03 1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang	jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan	kasus		kasus	237 kasus	432,446,300						237 kasus	0	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
2 08 03 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	432,446,300	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 03 1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	orang		orang	30 orang	468,149,700						30 orang	0	
2 08 03 1.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM penyelenggara lembaga perlindungan perempuan (satgas, gugus tugas, forum layanan) yang mendapatkan pelatihan				30 orang	329,824,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	0	30 orang	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2 08 03 1.03 03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik				40 Orang	138,325,700	Kab. Bima, Belo, Renda Kab. Lombok Tengah, Pujut, Kuta Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	40 Orang		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Index Ketahanan Keluarga	%		%	5,5 %	569,860,000						5,5 %	0	
2 08 04 1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Desa Model Ketahanan Keluarga				3	569,860,000						3	0	
2 08 04 1.02 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				40 Orang	212,880,000	Kab. Bima, Bolo, Tambe Kab. Dompu, Hu'u, Cempi Jaya Kab. Lombok Timur, Aikmel, Kembang Kerang Daya Kab. Sumbawa, Alas, Juran Alas Kab. Sumbawa Barat, Seteluk,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kader di 5 Desa Model	40 Orang		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Seteluk Atas							
2 08 04 1.02 03	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	356,980,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kader di 5 Desa Model	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dokumen Gender	-		-	1 -	82,000,000						1 -	0	
2 08 05 1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Data Gender dan Anak	dokumen		dokumen	1 dokumen	82,000,000						1 dokumen	0	
2 08 05 1.01 01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia				1 Dokumen	82,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase PD yang menerapkan Pengarusutamaan Hak Anak	%		%	42 %	935,133,000						42 %	0	
2 08 06 1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak	organisasi		organisasi	50 organisasi	935,133,000						50 organisasi	0	
2 08 06 1.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				50 Organisasi	409,754,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	50 Organisasi	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 06 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi				10 Dokumen	525,379,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	10 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	%		%	1 %	899,987,000						1 %	0	
2 08 07 1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi	dokumen		dokumen	10 dokumen	105,000,000						10 dokumen	0	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi													
2 08 07 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Meingkatnya pemahaman masyarakat terhadap perda dan pergub perlindungan anak				75 %	105,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	75 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 07 1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah DokumenKomunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan khusus	dokumen		dokumen	10 dokumen	201,788,000						10 dokumen	0	
2 08 07 1.02 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap perlindungan anak melalui publikasi dan edukasi				75 %	201,788,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	75 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 07 1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan Anak yang mendapat peningkatan kapasitas	orang		orang	36 orang	593,199,000						36 orang	0	
2 08 07 1.03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kemampuan aktivis PATBM dalam upaya perlindungan anak dari kekerasan sebanyak 36 orang Meningkatnya kemampuan kapasitas sumberdaya lembaga dalam upaya perlindungan anak				80 % 80 %	422,930,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	80 % 80 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 07 1.03 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Pemahaman masyarakat terhadap perlindungan khusus anak melalui seminar, sosialisasi, edukasi Meningkatnya Pemahaman Penyalahgunaan Napza dan PMS sebanyak 300 anak				70 % 70 %	170,269,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	70 % 70 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						1,100,384,000							0	
2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Poin tahun		Poin tahun	2,44 Poin 21 tahun	399,458,000						2,44 Poin 21 tahun	0	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Pendewasaan Usia Perkawinan													
2 14 02 1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Pesentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persen		Persen	80 Persen	331,315,000						80 Persen	0	
2 14 02 1.01 03	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK				1 Laporan	90,975,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 02 1.01 07	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat				10 Dokumen	240,340,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	10 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 02 1.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	dokumen		dokumen	1 dokumen	68,143,000						1 dokumen	0	
2 14 02 1.02 04	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan				1 Dokumen	68,143,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Kelahiran remaja (Perempuan usia 15-19 tahun) Per 1000 Perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Nee)	% %		% %	37 % 11.68 %	330,755,000						37 % 11.68 %	0	
2 14 03 1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Design Program KIE KKBPK Yang dihasilkan				8	193,562,000						8	0	
2 14 03 1.01 05	Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders				1 Dokumen	193,562,000	Semua Kab/Kota, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPk	dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)						Kecamatan, Semua Kelurahan							Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 03 1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi Masyarakat yang diberdayakan dlm pembinaan kesertaan ber KB	organisasi		organisasi	10 organisasi	137,193,000						10 organisasi	0	
2 14 03 1.02 02	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				10 Organisasi	137,193,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		10 Organisasi	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	PIK remaja dan BKR yang mendapatkan pembinaan genre	%		%	100 %	370,171,000						100 %	0	
2 14 04 1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase keluarga anak usia 0-5 tahun yang menggunakan KKA dan KMS	Persen		Persen	80 Persen	197,096,000						80 Persen	0	
2 14 04 1.01 08	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling- Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling- Remaja (PIK-R) di Kampung KB				10 Organisasi	151,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		10 Organisasi	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 04 1.01 14	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK				10 Dokumen	46,096,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		10 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 04 1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan	Persentase Keluarga Balita dan Anak yang Ikut BKB	Persen		Persen	80 Persen	173,075,000						80 Persen	0	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Kesejahteraan Keluarga														
2 14 04 1.02 04	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi KeMasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi KeMasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga				10 Dokumen	173,075,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	10 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						832,441,100							0	
2 08 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	nilai sakip	nilai		nilai	BB nilai	422,233,000						BB nilai	0	
2 08 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan	dokumen		dokumen	1 dokumen	48,000,000						1 dokumen	0	
2 08 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN	1 Paket	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	43,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN	1 Paket	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan	dokumen		dokumen	1 dokumen	39,583,000						1 dokumen	0	
2 08 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 unit	39,583,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	6 unit	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan	dokumen		dokumen	1 dokumen	334,650,000						1 dokumen	0	
2 08 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	34,650,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pelayanan Umum Kantor				9 Orang	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	9 Orang	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Kantor yang Disediakan						Kecamatan, Semua Kelurahan							Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase lembaga layanan perlindungan perempuan	%		%	3 %	349,848,000						3 %	0	
2 08 03 1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	layanan		layanan	50 layanan	349,848,000						50 layanan	0	
2 08 03 1.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat				50 Orang	164,348,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Perempuan dan anak	50 Orang	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 03 1.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				50 Layanan	185,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Perempuan dan anak	50 Layanan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	cakupan anak perlindungan khusus yang mendapatkan penanganan	persen		persen	80.00 persen	60,360,100						80.00 persen	0	
2 08 07 1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah DokumenKomunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan khusus	dokumen		dokumen	10 dokumen	60,360,100						10 dokumen	0	
2 08 07 1.02 01	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan layanan pengaduan				70 Orang	30,180,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	anak	70 Orang	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 07 1.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				70 Layanan	30,180,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			anak	70 Layanan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
TOTAL							16,473,603,705							0	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
														Nasional	Daerah							
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						26,542,839,316								28,311,635,005			
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP PD	Point		Point	> 70-80 Point	9,682,839,316						> 70-80 Point	10,757,135,000				
2	09	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keselarasn Dokumen Perencanaan OPD dengan RPJMD	Jenis		Jenis	7 Jenis	480,000,000						7 Jenis	550,000,000				
2	09	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	75,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN	1 Dokumen	85,000,000	Dinas Ketahanan Pangan			
2	09	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD				1 Dokumen	45,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Ketahanan Pangan			
2	09	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	45,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Ketahanan Pangan			
2	09	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	45,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Ketahanan Pangan			
2	09	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	45,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN	1 Dokumen	55,000,000	Dinas Ketahanan Pangan			
2	09	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi				4 Dokumen	75,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN	4 Dokumen	85,000,000	Dinas Ketahanan Pangan			
2	09	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				29 Laporan	150,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN	29 Laporan	175,000,000	Dinas Ketahanan Pangan			
2	09	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan Akhir Tahun Persentase Serapan Anggaran	Dokumen Persen		Dokumen Persen	1 Dokumen 95 Persen	7,606,144,316						1 Dokumen 95 Persen	8,350,000,000				

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 09 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				62 Orang/ Bulan	7,563,144,316	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	62 Orang/ Bulan	8,300,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan				0 Dokumen 1 Orang	20,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	0 Dokumen 1 Orang	20,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	15,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1 Laporan	20,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				12 Laporan	8,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	12 Laporan	10,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Jumlah dokumen laporan aset	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	10,000,000						1 Dokumen 1 Dokumen	15,000,000	
2 09 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	10,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1 Laporan	15,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah Ketersediaan Sarana dan prasarana yang baik dan fungsional	Jenis Persen		Jenis Persen	6 Jenis 100 Persen	363,500,000						6 Jenis 100 Persen	410,190,000	
2 09 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	9,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	0 Paket	9,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1 Paket	17,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	7,500,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1 Paket	8,160,000	Dinas Ketahanan Pangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 09 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	7,500,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1 Paket	7,500,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	29,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	3 Dokumen	29,370,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Jenis makanan dan minuman tamu				1 Jenis	28,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1 Jenis	29,160,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi				0 Laporan 12 Kali	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	0 Laporan 12 Kali	225,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	7,500,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	60,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1 Dokumen	75,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ketersediaan sarana dan Prasarana yang baik dan fungsional	Jenis		Jenis	2 Jenis	207,500,000						2 Jenis	272,000,000	
2 09 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	65,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1 Paket	75,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	100,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	5 Unit	150,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	30,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	4 Unit	32,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	12,500,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	2 Unit	15,000,000	Dinas Ketahanan Pangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 09 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan administrasi perangkat daerah Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran	Jenis Persen		Jenis Persen	4 Jenis 100 Persen	761,250,000						4 Jenis 100 Persen	778,000,000	
2 09 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	10,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1 Laporan	10,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	165,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	0 Laporan	165,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	20,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1 Laporan	23,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	566,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1 Laporan	580,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara Ketersediaan sarana dan prasarana yang baik dan fungsional	Unit Persen		Unit Persen	44 Unit 100 Persen	254,445,000						44 Unit 100 Persen	381,945,000	
2 09 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				0 Unit	178,720,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	0 Unit	178,720,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	10,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	8 Unit	12,500,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1 Unit	175,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	15,725,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	0 Unit	15,725,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK	Persentase Lumbung Pangan yang dimanfaatkan	Persen		Persen	86.62 Persen	3,185,000,000						86.62 Persen	3,445,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN														
2 09 02 1.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Infrastruktur lumbung pangan dan sarana pendukungnya	Unit		Unit	4 Unit	3,185,000,000						4 Unit	3,445,000,000	
2 09 02 1.01 01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia				20 Unit	3,025,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Kelompok Tani	20 Unit	3,025,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 02 1.01 02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang dibangun				3 Unit	115,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani	3 Unit	120,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 02 1.01 03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Lantai Jemur yang dibangun				1 Unit	45,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Tani	1 Unit	300,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Pasokan Pangan Pokok Strategis	%		%	100 %	8,170,000,000						100 %	8,539,000,005	
2 09 03 1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Jenis Komoditas Pangan yang disalurkan Jumlah Laporan Ketersediaan Pangan	Dokumen Jenis		Dokumen Jenis	2 Dokumen 2 Jenis	440,000,000						2 Dokumen 2 Jenis	484,000,000	
2 09 03 1.01 01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Jenis Laporan Analisis Ketersediaan Pangan				2 Dokumen	110,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan ASN	2 Dokumen	121,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 03 1.01 02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Stok Cadangan Masyarakat (CPM)				15 Ton	130,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan ASN	15 Ton	143,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 03 1.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Jenis Laporan Analisis Distribusi Pangan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan				2 Dokumen 0 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan ASN	2 Dokumen 0 Dokumen	110,000,000	Dinas Ketahanan Pangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 09 03 1.01 05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan Jumlah LDPM/PUPM /Pasar Mintra Tani yang dibina				0 Unit 1 Unit	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan ASN	0 Unit 1 Unit	110,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 03 1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase Stok Cadangan Pangan Pemerintah Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah	PERSEN Ton		PERSEN Ton	22.69 PERSEN 15 Ton	405,000,000						22.69 PERSEN 15 Ton	445,000,005	
2 09 03 1.02 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Provinsi Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi				30 Ton 0 Laporan	405,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Daerah dan Masyarakat terkategori rentan rawan Pangan	30 Ton 0 Laporan	445,000,005	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 03 1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Jumlah Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang ditumbuh kembangkan Persentase Ketersediaan Pasokan Pangan Pokok Strategis Rasio konsumsi sayur dan buah terhadap konsumsi ideal	Kelompok % PERSEN		Kelompok % PERSEN	107 Kelompok 100 % 90 PERSEN	7,325,000,000						107 Kelompok 100 % 90 PERSEN	7,610,000,000	
2 09 03 1.04 01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Event Promosi yang diikuti				1 Event	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat, KWT, ASN	1 Event	110,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 03 1.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) Jumlah KRPL/P2L yang dikembangkan				0 Laporan 107 P2L	7,225,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat, KWT, ASN	0 Laporan 107 P2L	7,500,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)	%		%	4,77 %	5,350,000,000						4,77 %	5,400,000,000	
2 09 04 1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Daerah Rentan Rawan Pangan yang difasilitasi Persentse Jumlah Masyarakat yang terlibat aktif	Desa Persen		Desa Persen	14 Desa 0.6 Persen	5,350,000,000						14 Desa 0.6 Persen	5,400,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 09 04 1.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Kelompok/sekolah yang ditumbuhkan dalam rangka penanganan kerawanan pangan Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi				10 Kelompok/ Sekolah 0 Dokumen	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat terkategori rentan rawan pangan, Pelajar, ASN	10 Kelompok/ Sekolah 0 Dokumen	450,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 04 1.02 02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah penduduk rentan rawan pangan yang difasilitasi bantuan hibah pangan Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				30000 Orang 0 Dokumen	4,950,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat terkategori rentan rawan pangan, Pelajar, ASN	30000 Orang 0 Dokumen	4,950,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan	Persen		Persen	90 Persen	155,000,000						90 Persen	170,500,000	
2 09 05 1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diawasi Tingkat akurasi pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Komoditi Persen		Komoditi Persen	20 Komoditi 80 Persen	155,000,000						20 Komoditi 80 Persen	170,500,000	
2 09 05 1.01 03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Frekwensi Bimwas Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)				4 Kali	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelaku Pangan Segar Asal Tumbuhan, ASN	4 Kali	82,500,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 05 1.01 05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diuji Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu Dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan				20 Komoditi 0 Dokumen	80,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelaku Pangan Segar Asal Tumbuhan, ASN	20 Komoditi 0 Dokumen	88,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						871,675,000						910,890,000		
2 09 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP PD	Point		Point	> 70-80 Point	396,675,000						> 70-80 Point	435,890,000	
2 09 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran	Persen		Persen	95 Persen	12,500,000						95 Persen	15,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 09 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan ASN				1 Orang	5,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Karang Pule	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	ASN	1 Orang	5,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	7,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1 Laporan	10,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	5,000,000						1 Dokumen	10,000,000	
2 09 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	5,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN	1 Laporan	10,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor yang baik dan fungsional	Persen		Persen	100 Persen	11,000,000						100 Persen	11,000,000	
2 09 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis peralatan listrik dan penerangan				12 Jenis	3,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	12 Jenis	3,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Alat tulis kantor				24 Jenis	8,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	24 Jenis	8,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis Barang yang tersedia Ketersediaan Sarana dan Prasarana kantor yang baik dan fungsioanl	Jenis Jenis		Jenis Jenis	2 Jenis 2 Jenis	30,000,000						2 Jenis 2 Jenis	45,000,000	
2 09 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	10,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1 Paket	15,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	20,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Karang Pule	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	5 Unit	30,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah Tingkat Kelancaran Administrasi	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	322,250,000						100 Persen 100 Persen	333,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Perkantoran													
2 09 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar				100 Surat	3,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN	100 Surat	3,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa jasa komunikasi, air dan listrik				6 Jenis	55,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Karang Pule	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN	6 Jenis	55,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	264,250,000	Kota Mataram, Sekarbela, Karang Pule	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN	1 Laporan	275,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang baik dan fungsioanal	Unit Persen		Unit Persen	7 Unit 100 Persen	15,925,000						7 Unit 100 Persen	21,890,000	
2 09 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	3,500,000	Kota Mataram, Sekarbela, Karang Pule	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	4 Unit	4,290,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Karang Pule	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1 Unit	15,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2,425,000	Kota Mataram, Sekarbela, Karang Pule	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1 Unit	2,600,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	%		%	90 %	475,000,000						90 %	475,000,000	
2 09 05 1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diawasi Jumlah Pelaku usaha dan masyarakat yang memahami Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	KOMODITI Orang		KOMODITI Orang	70 KOMODITI 50 Orang	475,000,000						70 KOMODITI 50 Orang	475,000,000	
2 09 05 1.01 01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Jumlah Petugas, Pelaku Usaha serta Masyarakat yang memahami Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)				50 Orang	125,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan dan ASN	50 Orang	125,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 05 1.01 02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang disertifikasi dan diawasi				70 Sertifikat	350,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan dan ASN	70 Sertifikat	350,000,000	Dinas Ketahanan Pangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan							
TOTAL						27,414,514,316							29,222,525,005		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							97,254,302,334								250,000,000	
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	91,742,593,934						BB Nilai	0			
2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	1,150,000,000						100 %	0			
2	11	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	150,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
2	11	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	150,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
2	11	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	150,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	150,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
2	11	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	150,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
2	11	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	150,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
2	11	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	250,000,000	Kota Mataram, Sekarbela,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kekalik Jaya			dan persampahan (PD-6)	Kehutanan			
2 11 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	58,584,426,703						100 %	0	
2 11 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				462 Orang/ Bulan	58,184,426,703	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	462 Orang/ Bulan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	150,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	150,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				1 Laporan	100,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	526,736,231						100 %	0	
2 11 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	51,736,231	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	100,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	150,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	100,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	25,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	100,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	%		%	100 %	10,431,000						100 %	0	
2 11 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	10,431,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%		%	100 %	715,000,000						100 %	0	
2 11 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	35,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	100,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.05 08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan				1 Orang	150,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Orang	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	350,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	30 Orang	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	80,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Orang	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	654,000,000						100 %	0	
2 11 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	80,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
											pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)				
2 11 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	30,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	54,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	50,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	40,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	50,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	100,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	250,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	1,000,000,000						100 %	0	
2 11 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	300,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	200,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	150,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	8 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang				5 Unit	350,000,000	Kota Mataram, Sekarbela,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan	5 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Disediakan						Kekalik Jaya			dan persampahan (PD-6)	Kehutanan			
2 11 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	28,002,000,000						100 %	0	
2 11 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	50,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	160,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	27,792,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	1,100,000,000						100 %	0	
2 11 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				24 Unit	400,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	24 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				90 Unit	100,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	90 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.09 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	100,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	500,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	%		%	24.24 %	936,708,400						24.24 %	0	
2 11 02 1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Jumlah Dokumen RPPLH, IKPLHD, dan IKLH yang disusun	dokumen		dokumen	2 dokumen	441,318,400						2 dokumen	0	
2 11 02 1.01 01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang Disusun				1 Dokumen	265,699,200	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 02 1.01 02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi				1 Dokumen	175,619,200	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 02 1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah KLHS yang disusun dan divalidasi	dokumen		dokumen	7 dokumen	495,390,000						7 dokumen	0	
2 11 02 1.02 01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun				6 Dokumen	432,050,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 02 1.02 02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun				8 Dokumen	41,600,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	8 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 02 1.02 04	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Provinsi yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun				1 Dokumen	21,740,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemaran dan kerusakannya	lokasi		lokasi	10 lokasi	350,000,000						10 lokasi	0	
2 11 03 1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Jumlah unit usaha yang dilakukan pembinaan terhadap pencegahan pencemaran lingkungan hidup	unit usaha		unit usaha	30 unit usaha	250,000,000						30 unit usaha	0	
2 11 03 1.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	150,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 03 1.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan				1 Dokumen	100,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 03 1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi pencemaran lingkungan yang diatasi	lokasi		lokasi	3 lokasi	100,000,000						3 lokasi	0	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 11 03 1.02 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				1 Laporan	100,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	pengelolaan taman kehati Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa	lokasi		lokasi	1 lokasi	150,000,000						1 lokasi	0	
2 11 04 1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah lokasi pengelolaan taman kehati	lokasi		lokasi	1 lokasi	150,000,000						1 lokasi	0	
2 11 04 1.01 01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				1 Dokumen	150,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah unit usaha yang dikendalikan pengelolaan B3 dan limbah B3 nya	unit		unit	210 unit	75,000,000						210 unit	0	
2 11 05 1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah usaha/kegiatan yang dibina dalam pengelolaan LB3	unit usaha		unit usaha	30 unit usaha	75,000,000						30 unit usaha	0	
2 11 05 1.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				5 persetujuan/izin	75,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5 persetujuan/izin	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan	usaha/kegiatan		usaha/kegiatan	30 usaha/kegiatan	200,000,000						30 usaha/kegiatan	200,000,000	
2 11 06 1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha/kegiatan pemegang izin lingkungan yang dibina dan diawasi	usaha/kegiatan		usaha/kegiatan	60 usaha/kegiatan	200,000,000						60 usaha/kegiatan	200,000,000	
2 11 06 1.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan				1 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan	Meningkatkan pengelolaan	0	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan						Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)				
2 11 06 1.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi				1 Laporan	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	0	1 Laporan	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas sekolah peduli lingkungan	%		%	10.00 %	700,000,000						10.00 %	0	
2 11 08 1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah sekolah yang mampu memenuhi syarat adiwiyata tingkat provinsi	sekolah		sekolah	10 sekolah	700,000,000						10 sekolah	0	
2 11 08 1.01 02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	700,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	0	0		0	0 0	0						0 0	0	
2 11 09 1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas		Entitas	5 Entitas	0						5 Entitas	0	
2 11 09 1.01 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				9 Entitas	0	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	9 Entitas	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	pengaduan		pengaduan	20 pengaduan	100,000,000						20 pengaduan	50,000,000	
2 11 10 1.01	Penyelesaian Pengaduan	Jumlah pengaduan masyarakat yang	pengaduan		pengaduan	20 pengaduan	100,000,000						20 pengaduan	50,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	ditangani													
2 11 10 1.01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/Ditangani				15 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	0	15 Dokumen	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 10 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan				5 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	0	5 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	%		%	100 %	3,000,000,000						100 %	0	
2 11 11 1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase penanganan sampah	%		%	70 %	3,000,000,000						70 %	0	
2 11 11 1.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus				1 Dokumen	3,000,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						3,459,940,533						3,095,476,100		
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola Prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	% %		% %	10 % 100 %	2,645,827,333						10 % 100 %	1,775,000,000	
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Panjang keliling Blok/Petak Pengelolaan Hutan	km		km	10 km	150,000,000						10 km	600,000,000	
3 28 03 1.01 02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				9 Unit	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	9 Unit	400,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.01 03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun				15 Unit	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	15 Unit	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPD yang tersusun	%		%	100 %	75,000,000						100 %	175,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Hutan Konservasi (KPHK)														
3 28 03 1.02 01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				5 Dokumen	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5 Dokumen	175,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah data dan Informasi pemanfaaaatan kawasan hutan yang tersedia	dokumen		dokumen	1 dokumen	260,000,000						1 dokumen	600,000,000	
3 28 03 1.03 01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Dokumen	150,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.03 03	Pelayanan Perizinan Usaha/Kerja Sama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani	Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)				5 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5 Dokumen	350,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.03 06	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan				1 Dokumen	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan kritis yang di rehabilitasi	ha		ha	2919 ha	400,000,000						2919 ha	400,000,000	
3 28 03 1.04 01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)				1 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.04 02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				4541.44 Ha	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4541.44 Ha	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.04 08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				1 Laporan	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Laporan	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	%		%	39.45 %	1,549,258,100						39.45 %	0	
3 28 03 1.05 03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan				10 Operasi	514,188,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	10 Operasi	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.05 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	950,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.05 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggu langan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	85,069,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah unit pengolahan HHBK di tingkat tapak	unit		unit	12 unit	46,486,088						12 unit	0	
3 28 03 1.06 02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani				5 unit managemen	46,486,088	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	5 unit managemen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah industri HHK yang dibina dan diawasi	industri		industri	11 industri	165,083,145						11 industri	0	
3 28 03 1.07 02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayudan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil danMenengah yang menjadi Kewenangan Provinsi				0 Dokumen 1 Dokumen	165,083,145	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	0 Dokumen 1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang	ha		ha	30503 ha	314,113,200						30503 ha	0	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	terlindungi													
3 28 04 1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah penangkar TSL non appendix yang tertib aturan	penangkar		penangkar	24 penangkar	100,000,000						24 penangkar	0	
3 28 04 1.02 01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				1 Laporan	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 04 1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Jumlah KEE, Cagar Biosfer dan Geopark yang dikelola	kelompok		kelompok	8 kelompok	214,113,200						8 kelompok	0	
3 28 04 1.03 05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan				16 Orang	64,113,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	16 Orang	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 04 1.03 06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola				100 Ha	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%		%	17.70 %	300,000,000						17.70 %	574,367,700	
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya	kelompok		kelompok	10 kelompok	300,000,000						10 kelompok	574,367,700	
3 28 05 1.01 01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				67 Orang	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	67 Orang	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 05 1.01 02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan				30 kelompok	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	30 kelompok	128,459,700	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Pendampingan Kelembagaan						Semua Kelurahan			(PD-6)				
3 28 05 1.01 03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial				1000 Ha	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1000 Ha	345,908,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS prioritas	DAS		DAS	4 DAS	200,000,000						4 DAS	746,108,400	
3 28 06 1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dipelihara dan dipulihkan fungsinya	DAS		DAS	32 DAS	200,000,000						32 DAS	746,108,400	
3 28 06 1.01 01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan				1 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Dokumen	47,769,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 06 1.01 02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS				1 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Dokumen	459,664,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 06 1.01 03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat				4 Unit	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4 Unit	238,675,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						1,625,769,929						350,000,000		
2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	1,325,769,929						BB Nilai	0	
2 11 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	35,911,613						100 %	0	
2 11 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 dokumen	11,559,408	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan				1 dokumen	5,779,704	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan	Balai Laboratorium Lingkungan	1 dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Dokumen Perubahan RKA-SKPD						Semua Kelurahan		Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	(PD-6)				
2 11 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 dokumen	10,480,915	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 dokumen	8,091,586	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	12,437,924						100 %	0	
2 11 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	6,218,962	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	6,218,962	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	9,247,527						100 %	0	
2 11 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 dokumen	2,311,882	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2,311,882	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	4,623,763	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	%		%	100 %	3,467,822						100 %	0	
2 11 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi				1 Laporan	3,467,822	Semua Kab/Kota,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan	Balai Laboratorium	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Daerah						Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Lingkungan			
2 11 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%		%	100 %	5,150,410						100 %	0	
2 11 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	3,416,499	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1,733,911	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Orang	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	63,496,600						100 %	0	
2 11 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,782,016	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7,657,299	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	35,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3,467,822	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	11,589,463	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	852,016,649						100 %	0	
2 11 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					1 Unit	350,765,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan						Semua Kelurahan			(PD-6)				
2 11 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	31,015,626	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	106,722,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	63,513,423	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	5 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	164,513,924						100 %	0	
2 11 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3,438,924	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	156,075,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	179,527,460						100 %	0	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	59,230,408	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit 10 Unit	4,125,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	0 Unit 10 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 31 Unit	73,402,242	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	0 Unit 31 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	42,769,810	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemaran dan kerusakannya	lokasi		lokasi	10 lokasi	300,000,000						10 lokasi	350,000,000	
2 11 03 1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Jumlah titik sampel dilakukan pengawasan pencemaran lingkungan hidup	titik sampel		titik sampel	282 titik sampel	300,000,000						282 titik sampel	350,000,000	
2 11 03 1.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Dokumen	350,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 03 1.01 03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan				1 Dokumen	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						2,136,449,500							5,388,098,000	
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	773,851,800						BB Nilai	3,153,366,300	
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	30,988,800						100 %	31,503,300	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	10,057,100	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	1 Dokumen	10,571,600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5,285,800	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	1 Dokumen	5,285,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	8,245,900	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	1 Dokumen	8,245,900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	7,400,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	1 Dokumen	7,400,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	35,676,900						100 %	35,676,900	
3 28 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	22,145,400	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	1 Dokumen	22,145,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil				1 Laporan	8,245,800	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	1 Laporan	8,245,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3 28 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				1 Laporan	5,285,700	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	1 Laporan	5,285,700	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	6,976,700						100 %	6,976,700	
3 28 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	5,285,700	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	1 Laporan	5,285,700	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1,691,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	1 Laporan	1,691,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	%		%	100 %	3,171,500						100 %	3,171,500	
3 28 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	3,171,500	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	1 Laporan	3,171,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%		%	100 %	6,361,500						100 %	6,361,500	
3 28 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	3,171,500	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	1 Dokumen	3,171,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	3,190,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	1 Orang	3,190,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	35,741,800						100 %	49,741,800	
3 28 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,285,500	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	1 Paket	5,285,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,285,800	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	1 Paket	5,285,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5,285,500	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	1 Paket	5,285,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	6,600,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	1 Paket	20,600,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3,171,500	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	1 Paket	3,171,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	10,113,500	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	1 Laporan	10,113,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	578,664,000						100 %	1,978,664,000	
3 28 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	37,500,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	1 Unit	37,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	34,104,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	1 Paket	34,104,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				5 Unit	507,060,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	5 Unit	1,907,060,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	37,432,000						100 %	1,002,432,000	
3 28 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3,171,500	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	1 Laporan	3,171,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	29,260,500	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	1 Laporan	29,260,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	5,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	1 Laporan	970,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	38,838,600						100 %	38,838,600	
3 28 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				3 Unit	29,430,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	3 Unit	29,430,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan							
3 28 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	9,408,600	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	5 Unit	9,408,600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola Prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	% %		% %	10 % 100 %	337,000,000						10 % 100 %	187,000,000	
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	luas lahan kritis yang di rehabilitasi	ha		ha	100 ha	337,000,000						100 ha	187,000,000	
3 28 03 1.04 02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				100 Ha	187,000,000	Kab. Lombok Barat, Narmada, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Masyarakat di Wilayah Kerja Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	100 Ha	187,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.04 04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				50 Ha	150,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Kelompok Masyarakat di Wilayah Kerja Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	50 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi	ha		ha	30503 ha	894,597,700						30503 ha	934,597,700	
3 28 04 1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Jumlah Taman Hutan Raya yang dikelola	unit		unit	1 unit	894,597,700						1 unit	934,597,700	
3 28 04 1.01 02	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi				3 Operasi	180,750,800	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	3 Operasi	220,750,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan							
3 28 04 1.01 03	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi				1200 Ha	115,592,500	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	1200 Ha	115,592,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 04 1.01 05	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem				122 Ha	46,237,500	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	122 Ha	46,237,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 04 1.01 06	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di Tahura yang Ditindak Lanjuti				1 Permohonan	300,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	1 Permohonan	300,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 04 1.01 08	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif				1 Desa	52,016,900	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	1 Desa	52,016,900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 04 1.01 11	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan				1 Dokumen	200,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	1 Dokumen	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%		%	17.70 %	85,000,000						17.70 %	647,534,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN														
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya	kelompok		kelompok	1 kelompok	85,000,000						1 kelompok	647,534,000	
3 28 05 1.01 02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				10 Kelompok	50,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	10 Kelompok	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 05 1.01 03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial				100 Ha	35,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	100 Ha	647,534,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS prioritas	DAS		DAS	4 DAS	46,000,000						4 DAS	465,600,000	
3 28 06 1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dipelihara dan dipulihkan fungsinya	DAS		DAS	1 DAS	46,000,000						1 DAS	465,600,000	
3 28 06 1.01 03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat				0 4 Unit	46,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	0 4 Unit	465,600,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						1,924,281,700							0	
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Nilai Nilai		Nilai Nilai	BB Nilai BB Nilai	870,819,900						BB Nilai BB Nilai	0	
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	24,434,700						100 %	0	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2,705,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Balai KPH Rinjani Barat	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5,374,900	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Rinjani Barat	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	10,567,800	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Rinjani Barat	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	5,787,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Rinjani Barat	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan							
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	30,527,200						100 %	0	
3 28 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	21,543,200	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Rinjani Barat	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3,713,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Rinjani Barat	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				1 Laporan	5,271,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Rinjani Barat	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	30,640,400						100 %	0	
3 28 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	20,613,800	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Rinjani Barat	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3 28 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	5,284,500	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Rinjani Barat	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	4,742,100	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Rinjani Barat	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	%		%	100 %	3,167,900						100 %	0	
3 28 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	3,167,900	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Rinjani Barat	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan							
3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%		%	100 %	6,336,000						100 %	0	
3 28 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	3,170,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Rinjani Barat	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	3,166,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Rinjani Barat	1 Orang	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	41,530,000						100 %	0	
3 28 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,284,600	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Rinjani Barat	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3,165,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Rinjani Barat	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3 28 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	10,278,900	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Rinjani Barat	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2,400,500	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Rinjani Barat	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3,060,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Rinjani Barat	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan				1 Laporan	4,950,000	Kab. Lombok Barat, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup	Balai KPH Rinjani Barat	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Tamu						Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			dan persampahan (PD-6)				
3 28 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	12,391,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Rinjani Barat	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	397,760,800						100 %	0	
3 28 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	135,760,800	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Rinjani Barat	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	62,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Rinjani Barat	4 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3 28 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	200,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Rinjani Barat	1 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	133,552,900						100 %	0	
3 28 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3,152,900	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Rinjani Barat	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	125,400,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Rinjani Barat	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	5,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Rinjani Barat	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	202,870,000						100 %	0	
3 28 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	84,770,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Rinjani Barat	3 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 6 Unit	18,100,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Rinjani Barat	0 Unit 6 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	100,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Rinjani Barat	2 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 03 1.05 02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				0 Ha 37000 Ha	250,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Rinjani Barat	0 Ha 37000 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.05 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat KoordinasiSinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				0 Dokumen 1 Dokumen	109,420,600	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Rinjani Barat	0 Dokumen 1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah unit pengolahan HHBK di tingkat tapak	unit		unit	3 unit	230,343,300						3 unit	0	
3 28 03 1.06 01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Jumlah unit pengolahan HHBK yang difasilitasi				0 3 Unit	100,387,200	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Kelompok Tani Hutan (KTH) di Wilayah Kerja Balai KPH Rinjani Barat	0 3 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.06 03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi				0 Unit Managemen 3 Unit Managemen	129,956,100	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Kelompok Tani Hutan (KTH) di Wilayah Kerja Balai KPH Rinjani Barat	0 Unit Managemen 3 Unit Managemen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%		%	17.70 %	50,000,000						17.70 %	0	
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya	kelompok		kelompok	10 kelompok	50,000,000						10 kelompok	0	
3 28 05 1.01 02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan				10 Kelompok	50,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan	KTH diwilayah kerja BKPH Rinjani Barat	10 Kelompok	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Pendampingan Kelembagaan						Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			(PD-6)				
3 28 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS prioritas	DAS		DAS	4 DAS	46,960,900						4 DAS	0	
3 28 06 1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dipelihara dan dipulihkan fungsinya	DAS		DAS	1 DAS	46,960,900						1 DAS	0	
3 28 06 1.01 03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat				0 10 Unit	46,960,900	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Rinjani Barat	0 10 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						2,551,406,961							0	
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	803,406,961						BB Nilai	0	
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	6,957,600						100 %	0	
3 28 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2,886,600	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Riwo	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1,071,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Riwo	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1,500,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Riwo	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1,500,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Riwo	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	23,267,400						100 %	0	
3 28 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1,500,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Riwo	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	8,767,400	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Riwo	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				1 Laporan	13,000,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Riwo	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	12,133,000						100 %	0	
3 28 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	832,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Riwo	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	6,500,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Riwo	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	4,801,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Riwo	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	92,327,700						100 %	0	
3 28 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	534,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Riwo	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5,586,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Riwo	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	10,717,600	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Riwo	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3,790,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Riwo	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	4,715,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Riwo	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	66,985,100	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Riwo	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	583,901,261						100 %	0	
3 28 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				27 Unit	25,500,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Riwo	27 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				57 Paket	25,000,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Riwo	57 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	424,701,261	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Riwo	1 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	108,700,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Riwo	5 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	24,700,000						100 %	0	
3 28 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3,500,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Riwo	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	16,200,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Riwo	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	5,000,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Riwo	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	60,120,000						100 %	0	
3 28 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				127 Unit	43,620,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Riwo	127 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 90 Unit	5,500,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Riwo	0 Unit 90 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	11,000,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Riwo	2 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola Prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	% %		% %	10 % 100 %	1,668,000,000						10 % 100 %	0	
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah data dan Informasi pemanfaatan kawasan hutan yang tersedia	dokumen		dokumen	1 dokumen	100,000,000						1 dokumen	0	
3 28 03 1.03 09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah unit Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan yang dikembangkan				5 unit	100,000,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Kelompok Tani Hutan di wilayah kerja Balai KPH Ampang Riwo	5 unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	luas lahan kritis yang di rehabilitasi	ha		ha	600 ha	1,318,000,000						600 ha	0	
3 28 03 1.04 02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				600 Ha	1,122,000,000	Kab. Dompu, Woja, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Manggalewa, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Kelompok Masyarakat di wilayah kerja Balai KPH Ampang Riwo	600 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan Kab. Sumbawa, Tarano, Semua Kelurahan							
3 28 03 1.04 04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				50 Ha	150,000,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Kelompok Masyarakat di wilayah kerja Balai KPH Ampang Riwo	50 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.04 05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun				6 Unit	46,000,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Kelompok Masyarakat di wilayah kerja Balai KPH Ampang Riwo	6 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	%		%	44.7 %	250,000,000						44.7 %	0	
3 28 03 1.05 02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				112500 Ha	250,000,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Riwo	112500 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%		%	17.70 %	80,000,000						17.70 %	0	
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya	kelompok		kelompok	1 kelompok	80,000,000						1 kelompok	0	
3 28 05 1.01 02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				10 Kelompok	50,000,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Riwo	10 Kelompok	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 05 1.01 03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial				200 Ha	30,000,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Riwo	200 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						3,612,173,696						152,467,796,925		
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	1,226,376,771						BB Nilai	0	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	40,457,929						100 %	0	
3 28 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	11,559,409	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Tambora	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5,779,704	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Tambora	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	11,559,408	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Tambora	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	11,559,408	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Tambora	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	39,787,483						100 %	0	
3 28 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	22,448,371	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Tambora	0 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	11,559,408	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Tambora	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				1 Laporan	5,779,704	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Tambora	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	25,430,698						100 %	0	
3 28 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	2,311,882	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Tambora	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	11,559,408	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Tambora	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	11,559,408	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Tambora	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	%		%	100 %	3,467,822						100 %	0	
3 28 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	3,467,822	Kab. Bima, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Tambora	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%		%	100 %	6,935,644						100 %	0	
3 28 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	3,467,822	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Tambora	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	3,467,822	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Tambora	1 Orang	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	50,967,978						100 %	0	
3 28 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,779,710	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Tambora	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,779,704	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Tambora	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3,467,909	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Tambora	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kecamatan, Semua Kelurahan							
3 28 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,287,958	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Tambora	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3,199,310	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Tambora	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3,467,822	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Tambora	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	5,490,512	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Tambora	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	18,495,053	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Tambora	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	1,000,000,000						100 %	0	
3 28 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang				1 Unit	50,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Tambora	1 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Disediakan						Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3 28 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Paket	50,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Tambora	3 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	200,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Tambora	1 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	400,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Tambora	1 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	150,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Tambora	1 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	150,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Tambora	1 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	33,898,520						100 %	0	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3,467,822	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Tambora	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	25,430,698	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Tambora	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	5,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Tambora	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	25,430,697						100 %	0	
3 28 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	20,806,935	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Tambora	2 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	4,623,762	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Tambora	5 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola Prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	% %		% %	10 % 100 %	2,200,796,925						10 % 100 %	152,167,796,925	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Panjang keliling Blok/Petak Pengelolaan Hutan	km		km	37 km	50,000,000						37 km	150,000,000,000	
3 28 03 1.01 02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				2 Unit	50,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Tambora	2 Unit	150,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	%		%	100 %	50,000,000						100 %	50,000,000	
3 28 03 1.02 01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	50,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Tambora	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah data dan Informasi pemanfaatan kawasan hutan yang tersedia	dokumen		dokumen	1 dokumen	150,000,000						1 dokumen	150,000,000	
3 28 03 1.03 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				1 Dokumen	150,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KTH di Wilayah Kerja Balai KPH Tambora	1 Dokumen	150,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	luas lahan kritis yang di rehabilitasi	ha		ha	500 ha	1,293,000,000						500 ha	1,300,000,000	
3 28 03 1.04 02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				0 Ha 1200 Ha	1,097,000,000	Kab. Bima, Sanggar, Semua Kelurahan Kab. Bima, Tambora, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Kempo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Kelompok Masyarakat di Wilayah Kerja Balai KPH Tambora	0 Ha 1200 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kab. Dompu, Pekat, Semua Kelurahan							
3 28 03 1.04 04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				50 Ha	150,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Kelompok Masyarakat di Wilayah Kerja Balai KPH Tambora	50 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.04 05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun				4 Unit	46,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Masyarakat di Wilayah Kerja Balai KPH Tambora	4 Unit	1,300,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	%		%	41.97 %	600,000,000						41.97 %	600,000,000	
3 28 03 1.05 02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				24000 Ha	250,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Tambora	24000 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.05 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat KoordinasiSinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	250,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Tambora	1 Dokumen	500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.05 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggu langan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	100,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Tambora	1 Laporan	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Jumlah unit pengolahan HHBK di tingkat tapak	unit		unit	2 unit	57,796,925						2 unit	67,796,925	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	(HHBK)														
3 28 03 1.06 03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi				0 Unit Managemen 1 Unit Managemen	57,796,925	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KTH di Wilayah Kerja Balai KPH Tambora	0 Unit Managemen 1 Unit Managemen	67,796,925	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%		%	17.70 %	85,000,000						17.70 %	50,000,000	
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya	kelompok		kelompok	1 kelompok	85,000,000						1 kelompok	50,000,000	
3 28 05 1.01 02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				10 Kelompok	50,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Tambora	10 Kelompok	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 05 1.01 03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial				200 Ha	35,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Tambora	200 Ha	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS prioritas	DAS		DAS	4 DAS	100,000,000						4 DAS	250,000,000	
3 28 06 1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dipelihara dan dipulihkan fungsinya	DAS		DAS	1 DAS	100,000,000						1 DAS	250,000,000	
3 28 06 1.01 03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat				0 5 Unit	50,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Tambora	0 5 Unit	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3 28 06 1.01 06	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Jumlah laporan hasil peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan DAS				0 1 Laporan	50,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Tambora	0 1 Laporan	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						2,550,384,000							0	
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	441,184,000						BB Nilai	0	
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	61,104,000						100 %	0	
3 28 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	15,610,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Maria Donggomasa	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	10,275,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Maria Donggomasa	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	17,644,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Maria Donggomasa	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan				1 Dokumen	17,575,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan	Balai KPH Maria Donggomasa	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Dokumen Perubahan DPA-SKPD						Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	(PD-6)				
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	20,000,000						100 %	0	
3 28 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	20,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Maria Donggomasa	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	29,500,000						100 %	0	
3 28 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Maria Donggomasa	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	12,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Maria Donggomasa	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	12,500,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Maria Donggomasa	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%		%	100 %	7,500,000						100 %	0	
3 28 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	7,500,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Maria Donggomasa	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	57,800,000						100 %	0	
3 28 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	8,500,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Maria Donggomasa	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	11,500,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Maria Donggomasa	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	8,300,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Maria Donggomasa	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3,500,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Maria Donggomasa	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	6,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Maria Donggomasa	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	20,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Maria Donggomasa	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	42,000,000						100 %	0	
3 28 01 1.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				6 Unit	42,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Maria Donggomasa	6 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	64,800,000						100 %	0	
3 28 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				400 Laporan	6,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Maria Donggomasa	400 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	53,800,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Maria Donggomasa	3 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				52 Laporan	5,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Maria Donggomasa	52 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	158,480,000						100 %	0	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Pemerintahan Daerah														
3 28 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit 0 Unit	58,480,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Maria Donggomasa	5 Unit 0 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	100,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Maria Donggomasa	4 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola Prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	% %		% %	10 % 100 %	2,013,200,000						10 % 100 %	0	
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	%		%	100 %	75,000,000						100 %	0	
3 28 03 1.02 01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan				1 Dokumen	75,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Maria Donggomasa	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah data dan Informasi pemanfaatan kawasan hutan yang tersedia	dokumen		dokumen	1 dokumen	85,000,000						1 dokumen	0	
3 28 03 1.03 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				1 Dokumen	45,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Maria Donggomasa	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 03 1.03 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung				1 Dokumen	40,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Maria Donggomasa	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan kritis yang di rehabilitasi	ha		ha	95 ha	1,365,500,000						95 ha	0	
3 28 03 1.04 02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				650 Ha	1,215,500,000	Kab. Bima, Wawo, Semua Kelurahan Kab. Bima, Sape, Semua Kelurahan Kab. Bima, Wera, Semua Kelurahan Kab. Bima, Ambalawi, Semua Kelurahan Kab. Bima, Langgudu, Semua Kelurahan Kab. Bima, Lambu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Kelompok masyarakat di wilayah kerja Balai KPH Maria Donggomasa	650 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.04 04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				50 Ha	150,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Kelompok masyarakat di wilayah kerja Balai KPH Maria Donggomasa	50 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	%		%	43.17 %	405,000,000						43.17 %	0	
3 28 03 1.05 02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patrol Pengamanan Hutan				30500 Ha	250,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Maria Donggomasa	30500 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 03 1.05 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat KoordinasiSinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	155,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Maria Donggomasa	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah unit pengolahan HHBK di tingkat tapak	Unit		Unit	1 Unit	82,700,000						1 Unit	0	
3 28 03 1.06 01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Jumlah unit pengolahan HHBK yang difasilitasi				1 Unit	82,700,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KTH di wilayah kerja Balai KPH Maria Donggomasa	1 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%		%	17.70 %	50,000,000						17.70 %	0	
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya	kelompok		kelompok	10 kelompok	50,000,000						10 kelompok	0	
3 28 05 1.01 02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				10 Kelompok	50,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KTH diwilayah kerja BKP Maria Donggomasa	10 Kelompok	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS prioritas	DAS		DAS	4 DAS	46,000,000						4 DAS	0	
3 28 06 1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dipelihara dan dipulihkan fungsinya	DAS		DAS	1 DAS	46,000,000						1 DAS	0	
3 28 06 1.01 03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan				4 Unit	46,000,000	Kab. Bima, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup	Balai KPH Maria Donggomasa	4 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Air yang dibuat						Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			dan persampahan (PD-6)				
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						2,466,055,140							0	
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	802,683,040						BB Nilai	0	
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	18,140,000						100 %	0	
3 28 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	10,320,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Balai KPH Rinjani Timur	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	7,820,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Rinjani Timur	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	24,000,000						100 %	0	
3 28 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	7,840,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Rinjani Timur	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				1 Laporan	16,160,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Rinjani Timur	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	12,400,000						100 %	0	
3 28 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	12,400,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Rinjani Timur	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	73,480,000						100 %	0	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,748,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Balai KPH Rinjani Timur	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	25,156,500	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Balai KPH Rinjani Timur	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5,050,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Balai KPH Rinjani Timur	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4,297,500	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Balai KPH Rinjani Timur	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	13,228,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Balai KPH Rinjani Timur	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Perjalanan untuk Konsultasi, Sinkronisasi dan Koordinasi ke Luar Daerah				0 Laporan 3 OT	20,000,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Balai KPH Rinjani Timur	0 Laporan 3 OT	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	541,208,000						100 %	0	
3 28 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	50,101,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Rinjani Timur	2 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	46,585,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Rinjani Timur	2 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	6,210,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Rinjani Timur	2 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				8 Unit	15,890,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Rinjani Timur	8 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	422,422,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Rinjani Timur	5 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	33,075,000						100 %	0	
3 28 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,525,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Rinjani Timur	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	26,550,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Rinjani Timur	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	5,000,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Rinjani Timur	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	100,380,040						100 %	0	
3 28 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	39,050,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Rinjani Timur	5 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 8 Unit	6,210,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Rinjani Timur	0 Unit 8 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 9 Unit	15,890,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Rinjani Timur	0 Unit 9 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang				8 Unit	39,230,040	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan,	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)			Balai KPH Rinjani Timur	8 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Dipelihara/Direhabilitasi						Semua Kelurahan							
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola Prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	% %		% %	10 % 100 %	1,532,372,100						10 % 100 %	0	
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Panjang keliling Blok/Petak Pengelolaan Hutan	km		km	6 km	50,748,500						6 km	0	
3 28 03 1.01 02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				1 Unit	50,748,500	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Balai KPH Rinjani Timur	1 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJpd yang tersusun	%		%	100 %	68,300,000						100 %	0	
3 28 03 1.02 01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	68,300,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Balai KPH Rinjani Timur	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah data dan Informasi pemanfaaaatan kawasan hutan yang tersedia	dokumen		dokumen	1 dokumen	177,513,600						1 dokumen	0	
3 28 03 1.03 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung				1 Dokumen 0 Dokumen	17,513,600	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KTH di Wilayah Kerja Balai KPH Rinjani Timur	1 Dokumen 0 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.03 09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan				0 1 Unit	160,000,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KTH di Wilayah Kerja Balai KPH Rinjani Timur	0 1 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	luas lahan kritis yang di rehabilitasi	ha		ha	10 ha	374,400,000						10 ha	0	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 03 1.04 02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				120 Ha	224,400,000	Kab. Lombok Timur, Aikmel, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Sambelia, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Pringgasela, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Sembalun, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Suwela, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Kelompok Masyarakat di Wilayah Kerja Balai KPH Rinjani Timur	120 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.04 04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				50 Ha	150,000,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Kelompok Masyarakat di Wilayah Kerja Balai KPH Rinjani Timur	50 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	%		%	85.13 %	404,370,000						85.13 %	0	
3 28 03 1.05 02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan PatrolPengamanan Hutan				0 Ha 32000 Ha	251,810,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Rinjani Timur	0 Ha 32000 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.05 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggu langan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	152,560,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Rinjani Timur	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah unit pengolahan HHBK di tingkat tapak	unit		unit	1 unit	457,040,000						1 unit	0	
3 28 03 1.06 01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Jumlah Pengolahan HHBK yang difasilitasi				0 4 Unit	457,040,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KTH di Wilayah Kerja Balai KPH Rinjani Timur	0 4 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%		%	17.70 %	85,000,000						17.70 %	0	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN														
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya	kelompok		kelompok	1 kelompok	85,000,000						1 kelompok	0	
3 28 05 1.01 02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				10 Kelompok	50,000,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Rinjani Timur	10 Kelompok	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 05 1.01 03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial				200 Ha	35,000,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Rinjani Timur	200 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS prioritas	DAS		DAS	4 DAS	46,000,000						4 DAS	0	
3 28 06 1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya	DAS		DAS	1 DAS	46,000,000						1 DAS	0	
3 28 06 1.01 03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat				0 10 Unit	46,000,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Rinjani Timur	0 10 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						1,505,148,928							1,902,843,028	
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	467,918,928						BB Nilai	1,322,918,928	
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	40,586,800						100 %	40,586,800	
3 28 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	11,558,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Sejorong Mataiyang	1 Dokumen	11,558,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5,832,800	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Sejorong Mataiyang	1 Dokumen	5,832,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	11,584,800	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Sejorong Mataiyang	1 Dokumen	11,584,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	11,611,200	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Sejorong Mataiyang	1 Dokumen	11,611,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	42,825,200						100 %	42,825,200	
3 28 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	25,874,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Sejorong Mataiyang	1 Dokumen	25,874,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	11,235,400	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Sejorong Mataiyang	1 Laporan	11,235,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				18 Laporan	5,715,800	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Sejorong Mataiyang	18 Laporan	5,715,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	25,659,600						100 %	25,659,600	
3 28 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	2,310,400	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Sejorong Mataiyang	1 Dokumen	2,310,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	11,449,200	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Sejorong Mataiyang	1 Laporan	11,449,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	11,900,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Sejorong Mataiyang	1 Laporan	11,900,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	98,828,350						100 %	98,828,350	
3 28 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	5,750,400	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Sejorong Mataiyang	2 Paket	5,750,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	18,085,300	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Sejorong Mataiyang	1 Paket	18,085,300	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	4,928,950	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Sejorong Mataiyang	1 Paket	4,928,950	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	11,159,500	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Sejorong Mataiyang	1 Paket	11,159,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4,860,700	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Sejorong Mataiyang	4 Paket	4,860,700	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				82 Laporan	5,495,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Sejorong Mataiyang	82 Laporan	5,495,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	48,548,500	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Sejorong Mataiyang	8 Laporan	48,548,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	70,000,000						100 %	70,000,000	
3 28 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	70,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Sejorong Mataiyang	1 Unit	70,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan							
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	44,879,978						100 %	999,879,978	
3 28 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				400 Laporan	3,468,978	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Sejorong Mataiyang	400 Laporan	3,468,978	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	36,411,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Sejorong Mataiyang	3 Laporan	36,411,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	5,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Sejorong Mataiyang	1 Laporan	960,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	145,139,000						100 %	45,139,000	
3 28 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	45,139,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Sejorong Mataiyang	7 Unit	45,139,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	100,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Sejorong Mataiyang	6 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola Prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	% %		% %	10 % 100 %	906,230,000						10 % 100 %	426,533,600	
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Panjang keliling Blok/Petak Pengelolaan Hutan	km		km	19 km	50,000,000						19 km	100,803,600	
3 28 03 1.01 02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				9 Unit	50,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Sejorong Mataiyang	9 Unit	100,803,600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan	luas lahan kritis yang di rehabilitasi	ha		ha	20 ha	430,500,000						20 ha	150,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Negara														
3 28 03 1.04 02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				150 Ha	280,500,000	Kab. Sumbawa Barat, Sekongkang, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Brang Rea, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Maluk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Kelompok Masyarakat di Wilayah Kerja Balai KPH Sejorong Mataiyang	150 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.04 04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				50 Ha	150,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Kelompok Masyarakat di Wilayah Kerja Balai KPH Sejorong Mataiyang	50 Ha	150,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	%		%	23.68 %	330,000,000						23.68 %	80,000,000	
3 28 03 1.05 02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				0 Ha 18000 Ha	250,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Sejorong Mataiyang	0 Ha 18000 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.05 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	50,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Sejorong Mataiyang	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.05 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	30,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Sejorong Mataiyang	1 Laporan	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah unit pengolahan HHBK di tingkat tapak	unit		unit	2 unit	95,730,000						2 unit	95,730,000	
3 28 03 1.06 01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Jumlah unit pengolahan HHBK yang difasilitasi				0 2 Unit	95,730,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KTH di Wilayah Kerja Balai KPH Sejorong Mataiyang	0 2 Unit	95,730,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN						85,000,000							0	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN														
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan						85,000,000							0	
3 28 05 1.01 02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				10 Kelompok	50,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)		10 Kelompok	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 05 1.01 03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial				200 Ha	35,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)		200 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS prioritas	DAS		DAS	4 DAS	46,000,000						4 DAS	153,390,500	
3 28 06 1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dipelihara dan dipulihkan fungsinya	DAS		DAS	1 DAS	46,000,000						1 DAS	153,390,500	
3 28 06 1.01 03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat				0 4 Unit	46,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Sejorong Mataiyang	0 4 Unit	153,390,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						944,562,153							0	
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	220,018,461						BB Nilai	0	
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	38,141,192						100 %	0	
3 28 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	11,554,553	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Batu Lanteh	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5,779,704	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Batu Lanteh	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	9,247,527	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Batu Lanteh	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	11,559,408	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Batu Lanteh	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	28,454,639						100 %	0	
3 28 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	5,340,447	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Batu Lanteh	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	11,557,096	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Batu Lanteh	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				18 Laporan	11,557,096	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Batu Lanteh	18 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	11,791,450						100 %	0	
3 28 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	2,259,864	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Batu Lanteh	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	9,531,586	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Batu Lanteh	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan						3,462,043							0	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Perangkat Daerah														
3 28 01 1.04 01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				0 Dokumen 1 Laporan	3,462,043	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)		0 Dokumen 1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%		%	100 %	3,462,043						100 %	0	
3 28 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	3,462,043	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Batu Lanteh	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	51,114,100						100 %	0	
3 28 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,638,579	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Batu Lanteh	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,779,704	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Batu Lanteh	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3,619,482	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Batu Lanteh	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,200,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Batu Lanteh	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3,467,822	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Batu Lanteh	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3,415,805	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Batu Lanteh	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	5,497,655	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Batu Lanteh	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	18,495,053	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Batu Lanteh	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	27,055,350						100 %	0	
3 28 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3,467,822	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Batu Lanteh	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	18,587,528	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Batu Lanteh	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	5,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Batu Lanteh	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	56,537,644						100 %	0	
3 28 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				20 Unit	52,017,337	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Batu Lanteh	20 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	4,520,307	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Batu Lanteh	1 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola Prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	% %		% %	10 % 100 %	628,543,692						10 % 100 %	0	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah data dan Informasi pemanfaatan kawasan hutan yang tersedia	dokumen		dokumen	1 dokumen	52,017,337						1 dokumen	0	
3 28 03 1.03 09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah unit Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan yang dikembangkan				1 Unit	52,017,337	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KTH diwilayah kerja Balai KPH Batu Lanteh	1 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan kritis yang di rehabilitasi	ha		ha	25 ha	206,100,000						25 ha	0	
3 28 03 1.04 02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				30 Ha	56,100,000	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Kelompok masyarakat di wilayah kerja Balai KPH Batu Lanteh	30 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.04 04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				50 Ha	150,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Kelompok masyarakat di wilayah kerja Balai KPH Batu Lanteh	50 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	%		%	45.77 %	370,426,355						45.77 %	0	
3 28 03 1.05 02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				0 Ha 15000 Ha	254,844,295	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Batu Lanteh	0 Ha 15000 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.05 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggu langan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				12 Laporan	115,582,060	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Batu Lanteh	12 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%		%	17.70 %	50,000,000						17.70 %	0	
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya	kelompok		kelompok	10 kelompok	50,000,000						10 kelompok	0	
3 28 05 1.01 02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan				10 Kelompok	50,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KTH diwilayah kerja BKPH Batu Lanteh	10 Kelompok	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Kelembagaan						Kelurahan		Bencana Dan Perubahan Iklim					
3 28 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS prioritas	DAS		DAS	4 DAS	46,000,000						4 DAS	0	
3 28 06 1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dipelihara dan dipulihkan fungsinya	DAS		DAS	1 DAS	46,000,000						1 DAS	0	
3 28 06 1.01 03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat				4 Unit	46,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Batu Lanteh	4 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						1,305,955,586							11,503,923	
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	341,501,430						BB Nilai	11,503,923	
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	39,060,974						100 %	11,503,923	
3 28 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	11,503,923	Kab. Sumbawa, Empang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Plampang	1 Dokumen	11,503,923	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5,779,704	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Plampang	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	10,217,939	Kab. Sumbawa, Empang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Plampang	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	11,559,408	Kab. Sumbawa, Empang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Plampang	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	42,274,490						100 %	0	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	24,945,203	Kab. Sumbawa, Empang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Plampang	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	11,559,408	Kab. Sumbawa, Empang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Plampang	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				18 Laporan	5,769,879	Kab. Sumbawa, Empang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Plampang	18 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	20,516,793						100 %	0	
3 28 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	2,928,229	Kab. Sumbawa, Empang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Plampang	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	11,577,903	Kab. Sumbawa, Empang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Plampang	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	6,010,661	Kab. Sumbawa, Empang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Plampang	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	%		%	100 %	3,455,107						100 %	0	
3 28 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	3,455,107	Kab. Sumbawa, Empang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Plampang	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%		%	100 %	6,349,583						100 %	0	
3 28 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	3,281,716	Kab. Sumbawa, Empang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Plampang	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	3,067,867	Kab. Sumbawa, Empang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Plampang	1 Orang	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	50,461,893						100 %	0	
3 28 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,948,934	Kab. Sumbawa, Empang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Plampang	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,788,605	Kab. Sumbawa, Empang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Plampang	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3,467,822	Kab. Sumbawa, Empang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Plampang	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,287,958	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Plampang	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2,652,884	Kab. Sumbawa, Empang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Plampang	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3,457,072	Kab. Sumbawa, Empang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Plampang	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				80 Laporan	5,363,565	Kab. Sumbawa, Empang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Plampang	80 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	18,495,053	Kab. Sumbawa, Empang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Plampang	3 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	111,775,680						100 %	0	
3 28 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				6 Unit	50,000,000	Kab. Sumbawa, Empang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Plampang	6 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				19 Unit	61,775,680	Kab. Sumbawa, Empang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Plampang	19 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	26,153,717						100 %	0	
3 28 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500 Laporan	3,467,822	Kab. Sumbawa, Empang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Plampang	500 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	17,685,895	Kab. Sumbawa, Empang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Plampang	5 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				46 Laporan	5,000,000	Kab. Sumbawa, Empang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Plampang	46 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	41,453,193						100 %	0	
3 28 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				4 Unit	36,830,586	Kab. Sumbawa, Empang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Plampang	4 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 5 Unit	4,622,607	Kab. Sumbawa, Empang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Plampang	0 Unit 5 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola Prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	% %		% %	10 % 100 %	837,277,640						10 % 100 %	0	
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJpd yang tersusun	%		%	100 %	23,118,816						100 %	0	
3 28 03 1.02 01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				2 Dokumen	23,118,816	Kab. Sumbawa, Empang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Plampang	2 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan	Jumlah data dan Informasi pemanfaatan kawasan	dokumen		dokumen	1 dokumen	38,382,300						1 dokumen	0	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Lindung	hutan yang tersedia													
3 28 03 1.03 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				1 Dokumen	38,382,300	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Plampang	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan kritis yang di rehabilitasi	ha		ha	155 ha	350,500,000						155 ha	0	
3 28 03 1.04 02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				0 Ha 150 Ha	200,500,000	Kab. Sumbawa, Lape, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Maronge, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Tarano, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Kelompok Masyarakat	0 Ha 150 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.04 04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				50 Ha	150,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Kelompok Masyarakat	50 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	%		%	36.35 %	425,276,524						36.35 %	0	
3 28 03 1.05 02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				24500 Ha	283,205,155	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Plampang	24500 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.05 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggu langan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				20 Laporan	142,071,369	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Plampang	20 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%		%	17.70 %	81,176,516						17.70 %	0	
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok perhutanan sosial (PS) yang meningkat kelasnya	kelompok		kelompok	1 kelompok	81,176,516						1 kelompok	0	
3 28 05 1.01 02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				10 Kelompok	50,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KTH diwilayah kerja BKPH Ampang Plampang	10 Kelompok	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 05 1.01 03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial				200 Ha	31,176,516	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KTH diwilayah kerja BKPH Ampang Plampang	200 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS prioritas	DAS		DAS	4 DAS	46,000,000						4 DAS	0	
3 28 06 1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dipelihara dan dipulihkan fungsinya	DAS		DAS	1 DAS	46,000,000						1 DAS	0	
3 28 06 1.01 03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat				0 4 Unit	46,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Ampang Plampang	0 4 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						2,038,554,900							0	
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	1,075,577,300						BB Nilai	0	
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	22,210,100						100 %	0	
3 28 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5,098,100	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Orong Telu	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	3,371,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Orong Telu	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	9,649,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Orong Telu	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	4,092,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Orong Telu	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	36,922,000						100 %	0	
3 28 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	22,608,500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Orong Telu	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				18 Laporan	14,313,500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Orong Telu	18 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	34,669,800						100 %	0	
3 28 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	10,550,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Orong Telu	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	12,800,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Orong Telu	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	11,319,800	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Orong Telu	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	%		%	100 %	10,642,000						100 %	0	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Perangkat Daerah														
3 28 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	10,642,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Orong Telu	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%		%	100 %	12,800,000						100 %	0	
3 28 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	12,800,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Orong Telu	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	89,828,500						100 %	0	
3 28 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3,416,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Orong Telu	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8,487,500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Orong Telu	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	10,400,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Orong Telu	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2,125,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Orong Telu	2 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				29 Laporan	65,400,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Orong Telu	29 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	685,354,900						100 %	0	
3 28 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	44,438,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Orong Telu	2 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				8 Paket	22,133,400	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Orong Telu	8 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	43,444,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Orong Telu	6 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	575,339,500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)			Balai KPH Orong Telu	1 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	33,150,000						100 %	0	
3 28 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				400 Laporan	6,400,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Orong Telu	400 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	21,750,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Orong Telu	3 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				42 Laporan	5,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Orong Telu	42 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	150,000,000						100 %	0	
3 28 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	50,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Orong Telu	8 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)			Balai KPH Orong Telu	1 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola	% %		% %	10 % 100 %	831,977,600						10 % 100 %	0	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi													
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPD yang tersusun	%		%	100 %	50,068,500						100 %	0	
3 28 03 1.02 01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	50,068,500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Orong Telu	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan kritis yang di rehabilitasi	ha		ha	137 ha	337,000,000						137 ha	0	
3 28 03 1.04 02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				100 Ha	187,000,000	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Orong Telu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	kelompok masyarakat di wilayah kerja Balai KPH Orong Telu	100 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.04 04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				50 Ha	150,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	kelompok masyarakat di wilayah kerja Balai KPH Orong Telu	50 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	%		%	34.13 %	444,909,100						34.13 %	0	
3 28 03 1.05 02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				19500 Ha	250,567,200	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Orong Telu	19500 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.05 03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan				1 Operasi	87,303,700	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Balai KPH Orong Telu	1 Operasi	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.05 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				16 Laporan	107,038,200	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Balai KPH Orong Telu	16 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%		%	17.70 %	85,000,000						17.70 %	0	
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya	kelompok		kelompok	1 kelompok	85,000,000						1 kelompok	0	
3 28 05 1.01 02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				10 Kelompok	50,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KTH di wilayah kerja Balai KPH Orong Telu	10 Kelompok	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 05 1.01 03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial				200 Ha	35,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KTH di wilayah kerja Balai KPH Orong Telu	200 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS prioritas	DAS		DAS	4 DAS	46,000,000						4 DAS	0	
3 28 06 1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dipelihara dan dipulihkan fungsinya	DAS		DAS	1 DAS	46,000,000						1 DAS	0	
3 28 06 1.01 03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat				16 Unit	46,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Masyarakat di wilayah kerja BKPH Orong Telu	16 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						2,760,382,726							0	
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	1,348,528,910						BB Nilai	0	
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	35,200,000						100 %	0	
3 28 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	8,800,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Ropang	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	8,800,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Ropang	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	8,800,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Ropang	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	8,800,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Ropang	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	29,062,000						100 %	0	
3 28 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	12,562,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Ropang	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5,500,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Ropang	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				1 Laporan	11,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Ropang	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	24,420,000						100 %	0	
3 28 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	5,500,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Ropang	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	13,420,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Ropang	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada				1 Laporan	5,500,000	Kab. Sumbawa, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Ropang	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		SKPD						Kecamatan, Semua Kelurahan							
3 28 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	%		%	100 %	10,000,000						100 %	0	
3 28 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	10,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Ropang	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%		%	100 %	13,199,310						100 %	0	
3 28 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	3,199,310	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Ropang	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Ropang	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	5,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Ropang	1 Orang	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	46,180,000						100 %	0	
3 28 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4,400,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Ropang	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4,400,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Ropang	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	4,400,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Ropang	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4,180,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Ropang	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan							
3 28 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Ropang	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	5,800,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Ropang	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	20,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Ropang	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	915,223,600						100 %	0	
3 28 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	74,250,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Ropang	2 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Paket	95,203,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Ropang	4 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	66,160,600	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Ropang	3 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	679,610,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Ropang	1 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	56,480,000						100 %	0	
3 28 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3,300,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Ropang	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber				1 Laporan	48,180,000	Kab. Sumbawa, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Ropang	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Daya Air dan Listrik yang Disediakan						Kecamatan, Semua Kelurahan							
3 28 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	5,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Ropang	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	218,764,000						100 %	0	
3 28 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	38,764,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Ropang	1 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit 5 Unit	10,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Ropang	0 Unit 5 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 5 Unit	20,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Ropang	0 Unit 5 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)			Balai KPH Ropang	1 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Ropang	1 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Peningkatan presentase kawasan hutan yang dikelola Prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	% %		% %	10 % 100 %	1,280,853,816						10 % 100 %	0	
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPD yang tersusun	%		%	100 %	49,500,000						100 %	0	
3 28 03 1.02 01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan				1 Dokumen 0 Dokumen	49,500,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan	Balai KPH Ropang	1 Dokumen 0 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun						Semua Kelurahan			(PD-6)				
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan kritis yang di rehabilitasi	ha		ha	55 ha	664,250,000						55 ha	0	
3 28 03 1.04 02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				275 Ha	514,250,000	Kab. Sumbawa, Moyo Hulu, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Ropang, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Lopok, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Lantung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Masyarakat di Wilayah Kerja Balai KPH Ropang	275 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.04 04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan				50 Ha	150,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Masyarakat di Wilayah Kerja Balai KPH Ropang	50 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	%		%	25.9 %	359,837,500						25.9 %	0	
3 28 03 1.05 02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				19000 Ha	304,837,500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Ropang	19000 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.05 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggu langan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	55,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Ropang	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah unit pengolahan HHBK di tingkat tapak	unit		unit	1 unit	207,266,316						1 unit	0	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 03 1.06 01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Jumlah unit pengolahan HHBK yang difasilitasi				0 1 Unit	207,266,316	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KTH di Wilayah Kerja Balai KPH Ropang	0 1 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%		%	17.70 %	85,000,000						17.70 %	0	
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya	kelompok		kelompok	1 kelompok	85,000,000						1 kelompok	0	
3 28 05 1.01 02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				10 Kelompok	50,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KTH di wilayah kerja Balai KPH Ropang	10 Kelompok	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 05 1.01 03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan				200 Ha	35,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KTH di wilayah kerja Balai KPH Ropang	200 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS prioritas	DAS		DAS	4 DAS	46,000,000						4 DAS	0	
3 28 06 1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dipelihara dan dipulihkan fungsinya	DAS		DAS	1 DAS	46,000,000						1 DAS	0	
3 28 06 1.01 03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat				0 3 Unit	46,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Ropang	0 3 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						3,210,403,766						24,103,100		
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	147,670,000						BB Nilai	24,103,100	
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	18,193,000						100 %	14,189,100	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	6,697,400	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	1 Dokumen	6,697,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	3,553,700	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	1 Dokumen	3,553,700	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3,938,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	1 Dokumen	3,938,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	4,003,900	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	16,122,000						100 %	9,914,000	
3 28 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	9,914,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	1 Laporan	9,914,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				1 Laporan	6,208,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	13,598,400						100 %	0	
3 28 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1,583,400	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	3,590,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	8,425,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	%		%	100 %	4,085,000						100 %	0	
3 28 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	4,085,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%		%	100 %	6,704,000						100 %	0	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				0 Dokumen	3,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	0 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	3,704,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	1 Orang	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	33,437,700						100 %	0	
3 28 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3,164,100	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	6,629,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3,168,800	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan							
3 28 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3,170,800	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	4,305,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	10,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	35,799,900						100 %	0	
3 28 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,200,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	29,599,900	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	5,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan		Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Bencana Dan Perubahan Iklim					
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	19,730,000						100 %	0	
3 28 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	18,000,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	20 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	1,730,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	4 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola Prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	% %		% %	10 % 100 %	2,931,733,766						10 % 100 %	0	
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan kritis yang di rehabilitasi	ha		ha	500 ha	2,370,300,000						500 ha	0	
3 28 03 1.04 02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				0 Ha 1615 Ha	2,220,300,000	Kab. Bima, Donggo, Semua Kelurahan Kab. Bima, Soromandi, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Dompu, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Hu'u, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Kilo, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Woja, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Pajo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KTH di Wilayah Kerja Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	0 Ha 1615 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 03 1.04 04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				50 Ha	150,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KTH di Wilayah Kerja Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	50 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	%		%	27.15 %	561,433,766						27.15 %	0	
3 28 03 1.05 02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				19500 Ha	402,420,766	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Kelompok Masyarakat di Wilayah Kerja Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	19500 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.05 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	77,498,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Masyarakat di Wilayah Kerja Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.05 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggu langan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	81,515,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Masyarakat di Wilayah Kerja Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN						85,000,000							0	
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan						85,000,000							0	
3 28 05 1.01 02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan				10 Kelompok	50,000,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan		10 Kelompok	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Pendampingan Kelembagaan						Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			(PD-6)				
3 28 05 1.01 03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial				200 Ha	35,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)		200 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS prioritas	DAS		DAS	4 DAS	46,000,000						4 DAS	0	
3 28 06 1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dipelihara dan dipulihkan fungsinya	DAS		DAS	1 DAS	46,000,000						1 DAS	0	
3 28 06 1.01 03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat				4 Unit	46,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	4 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						1,979,874,852							0	
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	492,597,050						BB Nilai	0	
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	19,000,000						100 %	0	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	6,500,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	4,500,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	3,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	17,696,000						100 %	0	
3 28 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi				1 Dokumen	8,876,000	Kab. Sumbawa, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Pelaksanaan Tugas ASN						Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			(PD-6) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)				
3 28 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	6,200,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				1 Laporan	2,620,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	13,380,000						100 %	0	
3 28 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	2,400,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	5,200,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	5,780,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	%		%	100 %	1,500,000						100 %	0	
3 28 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1,500,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%		%	100 %	5,800,000						100 %	0	
3 28 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	3,450,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	2,350,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	1 Orang	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	198,077,050						100 %	0	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,327,050	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	150,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	6,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	6,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2,300,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1,450,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	5,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	25,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	50,000,000						100 %	0	
3 28 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	50,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	28,354,000						100 %	0	
3 28 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	800,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3 28 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	22,554,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	5,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	158,790,000						100 %	0	
3 28 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	54,290,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	2 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	4,500,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	7 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang				1 Unit	100,000,000	Kab. Sumbawa, Semua	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)			Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	1 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Dipelihara/Direhabilitasi						Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola Prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	% %		% %	10 % 100 %	1,391,277,802						10 % 100 %	0	
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan kritis yang di rehabilitasi	ha		ha	410 ha	682,142,800						410 ha	0	
3 28 03 1.04 02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				421.44 Ha	532,142,800	Kab. Sumbawa, Utan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Buer, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Seteluk, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Brang Rea, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Poto Tano, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Brang Ene, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Kelompok masyarakat di wilayah kerja Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	421.44 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.04 04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				50 Ha	150,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Kelompok masyarakat di wilayah kerja Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	50 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	%		%	17.07 %	709,135,002						17.07 %	0	
3 28 03 1.05 02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				0 Ha 15500 Ha	625,232,602	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	0 Ha 15500 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.05 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	83,902,400	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%		%	17.70 %	50,000,000						17.70 %	0	
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya	kelompok		kelompok	1 kelompok	50,000,000						1 kelompok	0	
3 28 05 1.01 02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				10 Kelompok	50,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	10 Kelompok	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS prioritas	DAS		DAS	4 DAS	46,000,000						4 DAS	0	
3 28 06 1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah	Jumlah DAS yang dipelihara dan dipulihkan fungsinya	DAS		DAS	1 DAS	46,000,000						1 DAS	0	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
3 28 06 1.01 03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat				0 4 Unit	46,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	0 4 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						1,797,227,701						0		
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	879,496,640						BB Nilai	0	
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	54,917,480						100 %	0	
3 28 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	14,722,200	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brang Beh	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	13,295,640	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brang Beh	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	13,604,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brang Beh	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	13,295,640	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brang Beh	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	43,122,160						100 %	0	
3 28 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	23,852,760	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brang Beh	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	14,125,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brang Beh	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				1 Laporan	5,144,400	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brang Beh	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	27,800,960						100 %	0	
3 28 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	2,234,800	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brang Beh	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	12,761,400	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brang Beh	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	12,804,760	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brang Beh	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%		%	100 %	20,000,000						100 %	0	
3 28 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	20,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brang Beh	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	46,358,840						100 %	0	
3 28 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3,166,400	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brang Beh	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9,249,240	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brang Beh	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5,547,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brang Beh	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2,936,200	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brang Beh	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1,660,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brang Beh	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	5,800,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brang Beh	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	18,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brang Beh	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	602,807,200						100 %	0	
3 28 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	69,344,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brang Beh	1 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	68,400,200	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brang Beh	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	44,643,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brang Beh	8 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	420,420,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brang Beh	1 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	25,300,000						100 %	0	
3 28 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brang Beh	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	15,300,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brang Beh	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	5,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brang Beh	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	59,190,000						100 %	0	
3 28 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	46,670,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brang Beh	8 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	12,520,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brang Beh	8 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola Prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	% %		% %	10 % 100 %	783,228,761						10 % 100 %	0	
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	%		%	100 %	27,725,100						100 %	0	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 03 1.02 01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	27,725,100	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brang Beh	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan kritis yang di rehabilitasi	ha		ha	77.5 ha	337,000,000						77.5 ha	0	
3 28 03 1.04 02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				100 Ha	187,000,000	Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brang Beh	100 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.04 04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				50 Ha	150,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brang Beh	50 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	%		%	18.14 %	418,503,661						18.14 %	0	
3 28 03 1.05 02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				11500 Ha	316,463,761	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brang Beh	11500 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.05 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggu langan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	102,039,900	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brang Beh	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%		%	17.70 %	88,502,300						17.70 %	0	
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya	kelompok		kelompok	1 kelompok	88,502,300						1 kelompok	0	
3 28 05 1.01 02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				10 Kelompok	50,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brang Beh	10 Kelompok	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 05 1.01 03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial				200 Ha	38,502,300	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brang Beh	200 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS prioritas	DAS		DAS	4 DAS	46,000,000						4 DAS	0	
3 28 06 1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dipelihara dan dipulihkan fungsinya	DAS		DAS	1 DAS	46,000,000						1 DAS	0	
3 28 06 1.01 03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat				4 Unit	46,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Brang Beh	4 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						1,320,877,102						155,498,000		
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	478,000,902						BB Nilai	5,498,000	
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	44,419,000						100 %	0	
3 28 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	17,899,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Balai KPH Madapangga Rompu Waworada	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5,275,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Madapangga Rompu Waworada	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	10,500,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Madapangga Rompu Waworada	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3 28 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	10,745,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Madapangga Rompu Waworada	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	62,218,200						100 %	5,498,000	
3 28 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	40,050,200	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Madapangga Rompu Waworada	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	16,670,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Madapangga Rompu Waworada	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				1 Laporan	5,498,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Madapangga Rompu Waworada	1 Laporan	5,498,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	18,631,000						100 %	0	
3 28 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	2,520,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Madapangga Rompu Waworada	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan							
3 28 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	10,523,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Madapangga Rompu Waworada	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	5,588,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Madapangga Rompu Waworada	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	%		%	100 %	10,431,000						100 %	0	
3 28 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	10,431,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Madapangga Rompu Waworada	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%		%	100 %	5,123,000						100 %	0	
3 28 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	5,123,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Madapangga Rompu Waworada	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	86,948,702						100 %	0	
3 28 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,035,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Madapangga Rompu Waworada	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan							
3 28 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	40,906,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Madapangga Rompu Waworada	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5,287,958	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Madapangga Rompu Waworada	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	7,800,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Madapangga Rompu Waworada	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2,083,900	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Madapangga Rompu Waworada	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	5,550,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Madapangga Rompu Waworada	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	5,285,844	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Madapangga Rompu Waworada	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan							
3 28 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	15,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Madapangga Rompu Waworada	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	96,800,000						100 %	0	
3 28 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Paket	96,800,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Madapangga Rompu Waworada	4 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	22,000,000						100 %	0	
3 28 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Madapangga Rompu Waworada	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	15,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Madapangga Rompu Waworada	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	5,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Madapangga Rompu Waworada	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	131,430,000						100 %	0	
3 28 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	31,430,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Madapangga Rompu Waworada	2 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	100,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Madapangga Rompu Waworada	2 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola Prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	% %		% %	10 % 100 %	792,876,200						10 % 100 %	150,000,000	
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Panjang keliling Blok/Petak Pengelolaan Hutan	km		km	10 km	50,000,000						10 km	0	
3 28 03 1.01 02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				1 Unit	50,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Madapangga Rompu Waworada	1 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah data dan Informasi pemanfaatan kawasan hutan yang tersedia	dokumen		dokumen	1 dokumen	29,586,700						1 dokumen	0	
3 28 03 1.03 09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah unit Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan yang dikembangkan				5 Unit	29,586,700	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Madapangga Rompu Waworada	5 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	BIDANG KEHUTANAN														
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya	kelompok		kelompok	10 kelompok	50,000,000						10 kelompok	0	
3 28 05 1.01 02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				10 Kelompok	50,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KTH diwilayah kerja BKPH Madapangga Rompu Waworada	10 Kelompok	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						1,784,611,000							15,756,600	
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	513,146,000						BB Nilai	15,756,600	
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	47,643,200						100 %	15,756,600	
3 28 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	15,756,600	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Pelangan Tastura	1 Dokumen	15,756,600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	10,070,800	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Pelangan Tastura	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	11,100,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Pelangan Tastura	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil				1 Dokumen	10,715,800	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup	Balai KPH Pelangan Tastura	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD						Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			dan persampahan (PD-6)				
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	47,541,800						100 %	0	
3 28 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	29,875,800	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Pelangan Tastura	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	10,566,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Pelangan Tastura	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				1 Laporan	7,100,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Pelangan Tastura	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	34,140,800						100 %	0	
3 28 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	7,295,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Pelangan Tastura	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	7,930,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Pelangan Tastura	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	18,915,800	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Pelangan Tastura	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	%		%	100 %	8,570,000						100 %	0	
3 28 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	8,570,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Pelangan Tastura	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%		%	100 %	11,815,000						100 %	0	
3 28 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	6,815,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Pelangan Tastura	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				1 Orang	5,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Pelangan Tastura	1 Orang	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan							
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	48,975,700						100 %	0	
3 28 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,130,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Pelangan Tastura	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,653,500	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Pelangan Tastura	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3,102,200	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Pelangan Tastura	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4,500,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Pelangan Tastura	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	4,035,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Pelangan Tastura	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	4,980,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Pelangan Tastura	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	21,575,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Pelangan Tastura	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	142,014,500						100 %	0	
3 28 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	50,810,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Pelangan Tastura	5 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	39,692,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Pelangan Tastura	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	51,512,500	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Pelangan Tastura	3 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	33,080,000						100 %	0	
3 28 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2,280,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Pelangan Tastura	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	25,800,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai KPH Pelangan Tastura	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	5,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Pelangan Tastura	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	139,365,000						100 %	0	
3 28 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				4 Unit	35,240,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Pelangan Tastura	4 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	4,125,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Pelangan Tastura	5 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan							
3 28 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	100,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Pelangan Tastura	5 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Peningkatan presentase kawasan hutan yang dikelola Prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	% %		% %	10 % 100 %	1,159,591,500						10 % 100 %	0	
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Panjang keliling Blok/Petak Pengelolaan Hutan	km		km	2 km	50,000,000						2 km	0	
3 28 03 1.01 02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				2 Unit	50,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Pelangan Tastura	2 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPD yang tersusun	%		%	100 %	39,173,000						100 %	0	
3 28 03 1.02 01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	39,173,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Pelangan Tastura	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah data dan Informasi pemanfaatan kawasan hutan yang tersedia	dokumen		dokumen	1 dokumen	67,467,200						1 dokumen	0	
3 28 03 1.03 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di				1 Dokumen	23,346,200	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Pelangan Tastura	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Kawasan Hutan Produksi	Kawasan Hutan Produksi						Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3 28 03 1.03 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung				1 Dokumen	20,550,200	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Pelangan Tastura	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.03 09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah unit Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan yang dikembangkan				1 Unit	23,570,800	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Pelangan Tastura	1 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan kritis yang di rehabilitasi	ha		ha	165 ha	711,000,000						165 ha	0	
3 28 03 1.04 02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				300 Ha	561,000,000	Kab. Lombok Barat, Sekotong, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Lembar, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Pujut, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Kopang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Kelompok Masyarakat	300 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.04 04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				50 Ha	150,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Kelompok Masyarakat	50 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan							
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	%		%	56.5 %	291,951,300						56.5 %	0	
3 28 03 1.05 02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				21000 Ha	256,465,600	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Pelangan Tastura	21000 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.05 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggu langan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	35,485,700	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Pelangan Tastura	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%		%	17.70 %	81,289,100						17.70 %	0	
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya	kelompok		kelompok	1 kelompok	81,289,100						1 kelompok	0	
3 28 05 1.01 02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				10 Kelompok	50,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Pelangan Tastura	10 Kelompok	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 05 1.01 03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial				200 Ha	31,289,100	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Pelangan Tastura	200 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan							
3 28 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS prioritas	DAS		DAS	4 DAS	30,584,400						4 DAS	0	
3 28 06 1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dipelihara dan dipulihkan fungsinya	DAS		DAS	1 DAS	30,584,400						1 DAS	0	
3 28 06 1.01 03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat				17 Unit	30,584,400	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai KPH Pelangan Tastura	17 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						7,199,066,077							0	
2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	1,716,584,428						BB Nilai	0	
2 11 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	36,990,106						100 %	0	
2 11 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	11,559,408	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5,779,704	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	11,559,408	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	8,091,586	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	34,685,622						100 %	0	
2 11 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	17,346,510	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	11,559,408	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				1 Laporan	5,779,704	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	15,720,795						100 %	0	
2 11 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	2,311,882	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	11,559,408	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1,849,505	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	%		%	100 %	3,467,882						100 %	0	
2 11 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	3,467,882	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%		%	100 %	6,935,764						100 %	0	
2 11 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	3,467,882	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
											(PD-6)	Regional Provinsi NTB			
2 11 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	3,467,882	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	1 Orang	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	45,948,488						100 %	0	
2 11 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,779,704	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,779,704	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	6,935,645	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	4,455,500	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3,467,882	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1,035,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	18,495,053	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	50,000,000						100 %	0	
2 11 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	50,000,000	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	0 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	138,899,621						100 %	0	
2 11 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3,467,882	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	130,431,739	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	5,000,000	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	383,936,150						100 %	0	
2 11 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	42,633,178	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	11 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.09 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				3 Unit	335,974,200	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	3 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	5,328,772	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	6 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,000,000,000						1 Unit Kerja	0	
2 11 01 1.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,000,000,000	Kab. Lombok Barat, Sekotong, Buwun Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	1 Unit Kerja	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	%		%	100 %	5,482,481,649						100 %	0	
2 11 11 1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase penanganan sampah	%		%	70 %	5,482,481,649						70 %	0	
2 11 11 1.01 02	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses				1896 Ton	5,194,380,160	Kab. Lombok Barat,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan	Tempat Pemrosesan	1896 Ton	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
		akhir di TPA/TPST Regional						Gerung, Suka Makmur Kab. Lombok Barat, Sekotong, Buwun Mas Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB				
2 11 11 1.01 03	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik				1 Unit	129,346,657	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur Kab. Lombok Barat, Sekotong, Buwun Mas Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	1 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2 11 11 1.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan				1 Dokumen	158,754,832	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur Kab. Lombok Barat, Sekotong, Buwun Mas Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
TOTAL							143,427,428,584								163,661,075,676	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						1,000,000,000								0
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki KTP-el per-satuan penduduk	%		%	98,90 %	246,000,000						98,90 %	0	
2	12	02	1.01		Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	persentase penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP-El	%		%	100 %	167,500,000						100 %	0	
2	12	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan				1 Dokumen	125,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02	1.01	02	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi				1 Dokumen	42,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02	1.02		Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	persentase blanko KTP-El dan KIA yang tersedia sesuai dengan jumlah wajib E-KTP yang sudah melakukan perekaman	%		%	100 %	78,500,000						100 %	0	
2	12	02	1.02	02	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota	1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02	1.02	04	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	28,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota	1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan Bidang Catatan Sipil	%		%	100 %	90,000,000						100 %	0	
2	12	03	1.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	%		%	100 %	90,000,000						100 %	0	
2	12	03	1.01	01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil yang Ditetapkan				1 Dokumen	45,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 12 03 1.01 03	Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting				1 Dokumen	45,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 03 1.01 04	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota				0 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota	0 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan tingkat kab/kota	%		%	100 %	609,000,000						100 %	0	
2 12 04 1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah kab/kota yang menyajikan data adminduk secara valid	Kab./Kota		Kab./Kota	10 Kab./Kota	309,000,000						10 Kab./Kota	0	
2 12 04 1.02 01	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan				1 Laporan	162,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota	1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 04 1.02 02	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan				1 Laporan	70,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota	1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 04 1.02 03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				1 Dokumen	40,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 04 1.02 04	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	36,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 04 1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah kab/kota yang rutin meng up-date data adminduk	Kab./Kota		Kab./Kota	10 Kab./Kota	300,000,000						10 Kab./Kota	0	
2 12 04 1.03 01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota	1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 13 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	473,360,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DPMPD DUKCAPIL Provinsi NTB	1 Unit	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				18 Unit	120,928,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DPMPD DUKCAPIL Provinsi NTB	18 Unit	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang yang disediakan	Jenis		Jenis	3 Jenis	959,782,400						3 Jenis	0	
2 13 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DPMPD DUKCAPIL Provinsi NTB	1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	166,025,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DPMPD DUKCAPIL Provinsi NTB	4 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	792,257,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DPMPD DUKCAPIL Provinsi NTB	4 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang yang dirawat	Jenis		Jenis	4 Jenis	679,063,928						4 Jenis	0	
2 13 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				31 Unit	278,630,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DPMPD DUKCAPIL Provinsi NTB	31 Unit	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	2,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DPMPD DUKCAPIL Provinsi NTB	10 Unit	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				31 Unit	21,550,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DPMPD DUKCAPIL Provinsi NTB	31 Unit	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	376,383,928	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DPMPD DUKCAPIL Provinsi NTB	3 Unit	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan							
2 13 03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase realisasi Kerjasama Antar Desa pada kawasan kawasan lingkar hutan dan pesisir	%		%	25 %	750,000,000						25 %	0	
2 13 03 1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen kerjasama antar desa yang tersusun Jumlah dokumen kerjasama desa dengan pihak ketiga yang tersusun	Desa Desa		Desa Desa	120 Desa 315 Desa	750,000,000						120 Desa 315 Desa	0	
2 13 03 1.01 01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota				1 Dokumen	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Desa di Kabupaten se NTB	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13 03 1.01 02	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan				1 Dokumen	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Desa di Kabupaten se NTB	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13 03 1.01 03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	250,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Desa di Kabupaten se NTB	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Aparatur Desa yang mampu melaksanakan tupoksinya dengan baik	%		%	92 %	1,350,000,000						92 %	0	
2 13 04 1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang telah menyelenggarakan tata pemerinrahan desa dengan baik	Desa		Desa	244 Desa	1,350,000,000						244 Desa	0	
2 13 04 1.01 02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa				1 Dokumen	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Pemerintahan Desa	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan							
2 13 04 1.01 03	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan				1 Dokumen	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Pemerintahan Desa	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13 04 1.01 06	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				1 Dokumen	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Pemerintahan Desa	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13 04 1.01 08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	600,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Pemerintahan Desa	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13 04 1.01 09	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Pemerintahan Desa	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Bumdes Aktif Persentase Lembaga Adat Aktif Persentase Pokja Posyandu aktif Persentase Posyantek yang aktif	% % % %		% % % %	37 % 90 % 100 % 64,96 %	2,400,000,000						37 % 90 % 100 % 64,96 %	0	
2 13 05 1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang telah berperan aktif dalam pembangunan di desa	Lembaga		Lembaga	10 Lembaga	2,400,000,000						10 Lembaga	0	
2 13 05 1.01 02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan				1 Dokumen	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Adat	Masyarakat Hukum Adat													
2 13 05 1.01 03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya				1 Lembaga	700,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kabupaten/Kota	1 Lembaga	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13 05 1.01 05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				3 Dokumen	900,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Kabupaten/Kota	3 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13 05 1.01 06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				5 Laporan	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kabupaten/Kota	5 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13 05 1.01 07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				0 Laporan	0					Kabupaten/Kota	0 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13 05 1.01 08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa				1 Dokumen	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13 05 1.01 09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				0 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kabupaten/Kota	0 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
TOTAL						18,108,483,719								0	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						19,212,929,207						19,212,929,207				
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai LKjIP (SAKIP) OPD	Predikat		Predikat	A Predikat	12,128,614,509						A Predikat	12,128,614,509			
2	16	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	%		%	80 %	62,123,402						80 %	62,123,402			
2	16	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	6,922,726		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (%)	1 Dokumen	6,922,726	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
2	16	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD				1 Dokumen	1,584,696		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (%)	1 Dokumen	1,584,696	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
2	16	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1,729,022		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (%)	1 Dokumen	1,729,022	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
2	16	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD				1 Dokumen	1,584,696		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (%)	1 Dokumen	1,584,696	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
2	16	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen 0 Dokumen	1,736,671		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (%)	1 Dokumen 0 Dokumen	1,736,671	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
2	16	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah				7 Dokumen	48,565,591		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (%)	7 Dokumen	48,565,591	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
2	16	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Dinas	%		%	100 %	7,957,478,730							100 %	7,957,478,730		
2	16	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan Aparatur yang terbayarkan				75 Aparatur/Orang	7,941,249,770		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Dinas	75 Aparatur/Orang	7,941,249,770	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 16 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai pengelola administrasi keuangan				6 Orang	10,537,972	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Dinas	6 Orang	10,537,972	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Dokumen 0 Laporan	5,690,988	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Dinas	1 Dokumen 0 Laporan	5,690,988	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Barang Milik Daerah	Jenis		Jenis	1 Jenis	2,092,722						1 Jenis	2,092,722	
2 16 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Aset Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Dokumen 0 Laporan	2,092,722	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatkan Jenis Administrasi Barang Milik Daerah	1 Dokumen 0 Laporan	2,092,722	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Peningkatan Pemahaman Pegawai	%		%	100 %	32,554,379						100 %	32,554,379	
2 16 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)				5 Aparatur/Orang	32,554,379	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatkan Pemahaman Pegawai	5 Aparatur/Orang	32,554,379	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Jenis Pelayanan Administrasi Umum	%		%	100 %	667,774,940						100 %	667,774,940	
2 16 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan yang tersedia (Jenis) Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Jenis 0 Paket	14,942,460	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatkan Jenis Pelayanan Administrasi Umum	15 Jenis 0 Paket	14,942,460	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia (Jenis)				79 Jenis	98,876,328	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatkan Jenis Pelayanan Administrasi Umum	79 Jenis	98,876,328	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik yang tersedia (jenis)				3 Jenis	49,434,426	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatkan Jenis Pelayanan Administrasi Umum	3 Jenis	49,434,426	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 16 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia (Jenis)				9 Jenis	28,516,430	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatkan Jenis Pelayanan Administrasi Umum	9 Jenis	28,516,430	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia (Eksemplar)				5700 Eksemplar	102,437,777	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatkan Jenis Pelayanan Administrasi Umum	5700 Eksemplar	102,437,777	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang difasilitasi (orang)				60 Aparatur/Orang	47,891,108	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatkan Jenis Pelayanan Administrasi Umum	60 Aparatur/Orang	47,891,108	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah peserta rapat koordinasi dan konsultasi (orang)				175 Aparatur/Orang	325,676,411	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatkan Jenis Pelayanan Administrasi Umum	175 Aparatur/Orang	325,676,411	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	370,285,315						100 %	370,285,315	
2 16 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas				1 Unit	241,143,543	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatkan Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Unit	241,143,543	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel (Unit)				7 Unit	37,122,602	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatkan Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	7 Unit	37,122,602	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbeli (Unit)				9 Unit	53,051,579	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatkan Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	9 Unit	53,051,579	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung yang terbeli (Unit)				4 Unit	38,967,591	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatkan Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	4 Unit	38,967,591	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Jenis Pelayanan	%		%	100 %	2,459,875,496						100 %	2,459,875,496	
2 16 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar (surat)				900 Surat	6,983,879	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatkan Jenis Jasa Pelayanan	900 Surat	6,983,879	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan							
2 16 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan (rekening)				15 Rekening	552,136,723	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatkan Jenis Jasa Pelayanan	15 Rekening	552,136,723	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga PTT dan Kontrak (orang)				36 Orang	1,900,754,894	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatkan Jenis Jasa Pelayanan	36 Orang	1,900,754,894	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	576,429,525						100 %	576,429,525	
2 16 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas (Unit)				0 Unit 36 Unit	355,927,869	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatkan Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	0 Unit 36 Unit	355,927,869	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan (Unit)				1 Unit	43,405,838	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatkan Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Unit	43,405,838	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				106 Unit	95,963,073	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatkan Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	106 Unit	95,963,073	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah pemeliharaan aset tetap lainnya (Unit)				27 Unit	32,904,036	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatkan Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	27 Unit	32,904,036	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	48,228,709	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatkan Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	2 Unit	48,228,709	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik (%)	%		%	80 %	5,594,235,225						80 %	5,594,235,225	
2 16 02 1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan	%		%	85 %	5,594,235,225						85 %	5,594,235,225	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Provinsi	Kualitas konten Informasi Publik													
2 16 02 1.01 02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				2 Dokumen	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD	2 Dokumen	300,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 02 1.01 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah informasi yang diproduksi dan disebar melalui media publik (Informasi)				0 Dokumen 806 Informasi	1,322,289,762	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD	0 Dokumen 806 Informasi	1,322,289,762	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 02 1.01 06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik Jumlah informasi publik yang disediakan dan diumumkan oleh Perangkat Daerah (Informasi)				0 Dokumen 690 Informasi	95,853,835	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD	0 Dokumen 690 Informasi	95,853,835	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 02 1.01 07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media Jumlah Lembaga dan Pers yang terlibat dalam penyebaran informasi (Lembaga/Pers)				0 Layanan 5 Lembaga/Pers	30,142,702	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD	0 Layanan 5 Lembaga/Pers	30,142,702	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 02 1.01 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Aparatur yang terlatih dan terfasilitasi (Aparatur/ Orang) Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya				40 Aparatur/ 0 Orang	91,661,916	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD	40 Aparatur/ 0 Orang	91,661,916	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 02 1.01 11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah Jumlah Sengketa Informasi yang terselesaikan (Kasus)				0 Dokumen 2 Kasus	1,295,901,419	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD	0 Dokumen 2 Kasus	1,295,901,419	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 02 1.01 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan umlah Kelompok / Komunitas yang diberdayakan dalam penyebaran informasi (Komunitas)				0 Dokumen 15 Komunitas	2,096,713,201	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD	0 Dokumen 15 Komunitas	2,096,713,201	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 16 02 1.01 13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik (Unit)				0 Unit 10 Unit	361,672,390	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD	0 Unit 10 Unit	361,672,390	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Berbasis TIK (%)	%		%	65 %	1,490,079,473						65 %	1,490,079,473	
2 16 03 1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi						1,490,079,473							1,490,079,473	
2 16 03 1.02 01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi				2 Dokumen	530,279,473		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD	2 Dokumen	530,279,473	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 03 1.02 03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan layanan pusat data (OPD) Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				46 OPD 0 Unit	734,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD	46 OPD 0 Unit	734,200,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 03 1.02 04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah Jumlah simpul jaringan Perangkat Daerah yang terkoneksi (OPD)				0 Dokumen 30 OPD	155,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD	0 Dokumen 30 OPD	155,600,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 03 1.02 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan Jumlah Aplikasi TIK yang dikembangkan dan dimanfaatkan (aplikasi)				0 Unit 3 Aplikasi	70,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD	0 Unit 3 Aplikasi	70,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						490,688,597						490,688,597		
2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan Ketersediaan Data yang Terintegrasi (%)	%		%	30 %	490,688,597						30 %	490,688,597	
2 20 02 1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase Data yang Tervalidasi	%		%	65 %	490,688,597						65 %	490,688,597	
2 20 02 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,	Jumlah Jenis Data Yang Tersedia (jenis)				550 Jenis	45,128,326	Semua Kab/Kota,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi	Seluruh OPD	550 Jenis	45,128,326	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral							Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			pelayanan publik (PD-3)				
2 20 02 1.01 02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM Statistik yang meningkatkan pemahaman (aparatur/orang) Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				55 Aparatur/0 Orang	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Seluruh OPD	55 Aparatur/0 Orang	300,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 20 02 1.01 03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun Jumlah Metadata yang terbangun (jenis)				0 Dokumen/20 Jenis	22,179,177	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Seluruh OPD	0 Dokumen/20 Jenis	22,179,177	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 20 02 1.01 04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah (OPD)				0 Orang/46 OPD	26,320,818	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Seluruh OPD	0 Orang/46 OPD	26,320,818	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 20 02 1.01 06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan rekomendasi statistik (OPD)				0 Dokumen/7 OPD	97,060,276	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Seluruh OPD	0 Dokumen/7 OPD	97,060,276	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						400,568,285						400,568,285		
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah (%)	%		%	50 %	400,568,285						50 %	400,568,285	
2 21 02 1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	%		%	50 %	294,706,270						50 %	294,706,270	
2 21 02 1.01 01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Regulasi dan Hasil Koordinasi Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi				1 Dokumen/0 Dokumen	47,577,621	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Seluruh OPD	1 Dokumen/0 Dokumen	47,577,621	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
										Nasional	Daerah					
		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan														
2 21 02 1.01 02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Jumlah SDM Pengelola Keamanan Siber				0 Laporan 5 orang	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Seluruh OPD	0 Laporan 5 orang	150,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
2 21 02 1.01 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Pengamanan Informasi Perangkat Daerah (insiden)				0 Laporan 14 insiden	70,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Seluruh OPD	0 Laporan 14 insiden	70,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
2 21 02 1.01 04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Keamanan Informasi Perangkat Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				46 OPD 0 Perangkat Daerah	27,128,649	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Seluruh OPD	46 OPD 0 Perangkat Daerah	27,128,649	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
2 21 02 1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi						105,862,015							105,862,015		
2 21 02 1.02 01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan Komunikasi Sandi Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				46 OPD 0 Perangkat Daerah	105,862,015	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		46 OPD 0 Perangkat Daerah	105,862,015	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
TOTAL						20,104,186,089								20,104,186,089		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						35,304,449,085								37,309,000,000		
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	Nilai		Nilai	BB Nilai	13,304,449,085						BB Nilai	14,109,000,000			
2	17	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	890,000,000						6 Dokumen	990,000,000			
2	17	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	450,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, Kab/Kota se-NTB	6 Dokumen	500,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah		
2	17	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, Kab/Kota se-NTB	1 Dokumen	0	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah		
2	17	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, Kab/Kota se-NTB	1 Dokumen	40,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah		
2	17	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, Kab/Kota se-NTB	1 Dokumen	25,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah		
2	17	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, Kab/Kota se-NTB	1 Dokumen	25,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah		
2	17	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, Kab/Kota se-NTB	2 Laporan	50,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah		
2	17	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, Kab/Kota se-NTB	5 Laporan	350,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Orang		Orang	70 Orang	9,550,449,085						70 Orang	10,150,000,000	
2 17 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				72 Orang/ Bulan	9,415,449,085	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	72 Orang/ Bulan	10,000,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	95,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	20,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Industrialisasi produk unggulan (PD-9) Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	1 Laporan	25,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				3 Laporan	20,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	3 Laporan	25,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	35,000,000						1 Dokumen	45,000,000	
2 17 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen aset/barang daerah yang tersusun Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen 0 Dokumen	35,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	1 Dokumen 0 Dokumen	45,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya SDM berdasarkan Tugas dan Fungsi	SDM		SDM	5 SDM	100,000,000						5 SDM	150,000,000	
2 17 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang 0 Orang	100,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	5 Orang 0 Orang	150,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum	Kegiatan		Kegiatan	7 Kegiatan	600,000,000						7 Kegiatan	527,000,000	
2 17 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	142,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	1 Paket	35,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0 Paket 3 Jenis	20,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	0 Paket 3 Jenis	25,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Terisnya Tabung Pemadam Kebakaran dan Gas Elpiji				0 Paket 1 Tahun	10,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	0 Paket 1 Tahun	12,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan kebutuhan kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				34 Jenis 0 Paket	65,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	34 Jenis 0 Paket	70,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Jenis 0 Paket	20,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	6 Jenis 0 Paket	30,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Eksemplar bahan bacaan (Surat Kabar)				0 Dokumen 3 Eksemplar	23,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	0 Dokumen 3 Eksemplar	25,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah makan dan minum rapat dan tamu kedinasan				0 Laporan 1300 Orang/Kali	60,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	0 Laporan 1300 Orang/Kali	65,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah SPDP dalam daerah dan luar daerah program pemerintah kab/kota, provinsi dan pusat				0 Laporan 24 Dokumen	200,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	0 Laporan 24 Dokumen	200,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Akuisi Arsip Inaktif Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2000 Berkas 0 Dokumen	60,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	2000 Berkas 0 Dokumen	65,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Kebutuhan Kantor	Jenis		Jenis	7 Jenis	245,000,000						7 Jenis	200,000,000	
2 17 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia				14 unit 0 Unit	245,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	14 unit 0 Unit	200,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya							
2 17 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	1,510,000,000						3 Kegiatan	1,660,000,000	
2 17 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Keluar				0 Laporan 2500 Surat	10,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	0 Laporan 2500 Surat	10,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0 Laporan 1 Tahun	300,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	0 Laporan 1 Tahun	350,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Sumber daya air, listrik, telepon dan internet yang di bawar				0 Laporan 1 tahun	1,200,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	0 Laporan 1 tahun	1,300,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelayanan Pemeliharaan BMD	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	374,000,000						4 Kegiatan	387,000,000	
2 17 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Operasional Dinas yang di pelihara				0 Unit 27 Unit	214,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	0 Unit 27 Unit	220,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	10 Unit	17,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan kantor yang dipelihara				0 Unit 30 Unit	65,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	0 Unit 30 Unit	70,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang di pelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit 2 Unit	80,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	2 Unit 2 Unit	80,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah koperasi yang dilakukan pemeriksaan kesehatan	koperasi		koperasi	75 koperasi	2,000,000,000						75 koperasi	2,300,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 03 1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang dilakukan pemeriksaan kesehatan	koperasi		koperasi	75 koperasi	2,000,000,000						75 koperasi	2,300,000,000	
2 17 03 1.01 01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesyntambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah koperasi yang dilakukan pemeriksaa dan pengawasan Jumlah Koperasi yang terfasilitasi kebijakan terkait pengawasan				40 Koperasi 40 Koperasi	1,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas kabupaten/kota se NTB	40 Koperasi 40 Koperasi	1,100,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 03 1.01 02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang patuh terhadap peraturan pe Terwujudnya sistem pengawasan koperasi yang kuat				95 Koperasi 40 Orang	1,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas kabupaten/kota se NTB	95 Koperasi 40 Orang	1,200,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Presentase Pertumbuhan KSP/USP yang menerapkan pola syariah	%		%	16,12 %	6,000,000,000						16,12 %	6,400,000,000	
2 17 04 1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase koperasi yang menerapkan pola syariah, persentase koperasi syariah yang mengembangkan kawasan bebas riba	%		%	16.12 %	6,000,000,000						16.12 %	6,400,000,000	
2 17 04 1.01 01	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi Meningkatnya kelembagaan koperasi pola syariah dan, terwujudnya koperasi syariah kawasan bebas riba, meningkatnya koperasi dan umkm yang memperoleh akses permodalan, meningkatnya koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam				0 Unit Usaha 20 Unit	5,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Gerakan Koperasi Syariah dan UKM Kab/kota se NTB	0 Unit Usaha 20 Unit	5,200,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 04 1.01 02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran Tingkat				0 Unit Usaha	1,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur	Industrialisasi produk unggulan	Gerakan Koperasi Syariah	0 Unit Usaha	1,200,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Kesehatan Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan				35 Unit Usaha				Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	(PD-9)	dan UKM Kab/kota se NTB	35 Unit Usaha		
2 17 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						6,000,000,000							6,500,000,000	
2 17 06 1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						6,000,000,000							6,500,000,000	
2 17 06 1.01 01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi Ysaha Jumla usaha kecil yang menjadi wirausaha				0 Unit Usaha 50 PUK	2,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		0 Unit Usaha 50 PUK	2,000,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 06 1.01 02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Koperasi Berprestasi yang memanfaatkan Teknologi Digitalisasi				100 Koperasi	4,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		100 Koperasi	4,500,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						5,500,000,000							5,500,000,000	
2 17 07 1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan						5,500,000,000							5,500,000,000	
2 17 07 1.01 01	Menumbuhkembangka n UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan Jumlah usaha kecil yang menjadi wirausaha				0 Unit Usaha 50 PUK	5,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		0 Unit Usaha 50 PUK	5,500,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
2 17 07 1.01 02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan				500 Orang	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		500 Orang	0	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						2,500,000,000							2,500,000,000		
2 17 08 1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah						2,500,000,000							2,500,000,000		
2 17 08 1.01 01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi Jumlah yang difasilitasi peningkatan akses pemasaran jaringan usaha melalui Promosi/Expo dan Pameran di Provinsi lainnya				0 Unit Usaha 50 PUK	2,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		0 Unit Usaha 50 PUK	2,500,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						6,351,893,900							6,978,940,900		
2 17 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Nilai SAKIP	0 Nilai		0 Nilai	0 0 BB Nilai	880,000,000						0 0 BB Nilai	1,128,940,900		
2 17 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	4 Dokumen 4 Dokumen	108,801,200						4 Dokumen 4 Dokumen	166,500,000		
2 17 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	7,264,700	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	UPTD Balai Diklat UKM Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	4 Dokumen	11,500,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Dokumen 0 Laporan	101,536,500	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	UPTD Balai Diklat UKM Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	4 Dokumen 0 Laporan	155,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	15,879,200						1 Dokumen	17,000,000		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	15,879,200	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	UPTD Balai DIKLAT KUKM Provinsi NTB	1 Dokumen	17,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		Laporan	1 Laporan	16,229,700						1 Laporan	23,200,000	
2 17 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	16,229,700	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	UPTD Balai DIKLAT KUKM Provinsi NTB	1 Laporan	23,200,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	55,903,700						1 Tahun	66,640,900	
2 17 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Tahun	12,636,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	UPTD BALAI DIKLAT KUKM Provinsi NTB	1 Tahun	13,200,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Tahun 0 Paket	29,218,100	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	UPTD BALAI DIKLAT KUKM Provinsi NTB	1 Tahun 0 Paket	33,240,900	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Tahun 0 Paket	8,649,600	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	UPTD BALAI DIKLAT KUKM Provinsi NTB	1 Tahun 0 Paket	13,200,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Tahun 0 Dokumen	5,400,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	UPTD BALAI DIKLAT KUKM Provinsi NTB	1 Tahun 0 Dokumen	7,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Mebel	Unit		Unit	14 Unit	111,596,400						14 Unit	154,000,000	
2 17 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Pengadaan yang Disediakan				0 Paket 20 Buah	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	UPTD BALAI DIKLAT KUKM Provinsi NTB	0 Paket 20 Buah	0	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14 Unit	111,596,400	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	UPTD BALAI DIKLAT KUKM Provinsi NTB	14 Unit	154,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	468,875,800						1 Tahun	557,800,000	
2 17 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	7,698,800	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	UPTD BALAI DIKLAT KUKM Provinsi NTB	1 Laporan	7,800,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan 1 Tahun	141,780,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	UPTD BALAI DIKLAT KUKM Provinsi NTB	0 Laporan 1 Tahun	150,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	319,397,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	UPTD BALAI DIKLAT KUKM Provinsi NTB	1 Laporan	400,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah yang terpelihara	Tahun		Tahun	1 Tahun	102,714,000						1 Tahun	143,800,000	
2 17 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				6 Unit	51,240,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	UPTD BALAI DIKLAT KUKM Provinsi NTB	6 Unit	59,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit 20 Unit	5,055,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	UPTD BALAI DIKLAT KUKM Provinsi NTB	0 Unit 20 Unit	5,600,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 20 Unit	12,364,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	UPTD BALAI DIKLAT KUKM Provinsi NTB	0 Unit 20 Unit	25,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang				4 Unit	34,055,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	UPTD BALAI DIKLAT KUKM Provinsi NTB	4 Unit	54,200,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
										Nasional	Daerah					
	Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi						Timur		Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar						
2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Orang		Orang	660 Orang	4,926,131,900						660 Orang	5,300,000,000		
2 17 05 1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengurus/ Pengawas/ Anggota Koperasi yang diDiklat	Orang		Orang	660 Orang	2,347,395,000						660 Orang	2,500,000,000		
2 17 05 1.01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM Koperasi yang ditingkatkan Pengetahuan Perkoperasiannya Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				660 Orang 0 Orang	2,347,395,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	DAK Non Fisik-PK2UKM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	SDM Koperasi yang Didiklat di BALAI DIKLAT KUKM Provinsi NTB	660 Orang 0 Orang	2,500,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 05 1.02	Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah UMKM yang di DIKLAT	Orang		Orang	780 Orang	2,578,736,900						780 Orang	2,800,000,000		
2 17 05 1.02 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah SDM Pelaku UMKM yang dilatih				0 780 Orang	2,578,736,900	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	DAK Non Fisik-PK2UKM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	SDM UMKM yang mengikuti DIKLAT di BALAI DIKLAT KUKM Provinsi NTB	0 780 Orang	2,800,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	orang		orang	420 orang	545,762,000						420 orang	550,000,000		
2 17 08 1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah Pelaku UMKM yang Mendapatkan Pelayanan Penyuluhan Hukum	Orang		Orang	420 Orang	545,762,000						420 Orang	550,000,000		
2 17 08 1.01 02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum Jumlah Pelaku UMKM yang Mendapatkan Pelayanan Penyuluhan Hukum				0 Orang 420 Orang	545,762,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-PK2UKM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Pelaku UMKM yang mendapatkan Penyuluhan Hukum	0 Orang 420 Orang	550,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
TOTAL						41,656,342,985								44,287,940,900		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						13,031,085,981							0	
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai LAKIP perangkat daerah	Nilai		Nilai	A (83-85) Nilai	10,152,073,507						A (83-85) Nilai	0	
2	18	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	266,937,677						2 Dokumen	0	
2	18	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Stakeholder	4 Dokumen	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	96,937,677	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Stakeholder	2 Dokumen	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	70,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Stakeholder	1 Laporan	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan administrasi keuangan	Persen		Persen	100 Persen	7,681,004,202						100 Persen	0	
2	18	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/ Bulan	7,641,599,284	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Stakeholder	60 Orang/ Bulan	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	24,375,318	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Stakeholder	2 Dokumen	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	15,029,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Stakeholder	1 Laporan	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen BMD	Persen		Persen	100 Persen	19,249,640						100 Persen	0	
2	18	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	19,249,640	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Stakeholder	2 Laporan	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah umber daya yang disiplin dan berkapasitas	Persen		Persen	100 Persen	16,320,000						100 Persen	0	
2 18 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				4 Unit	16,320,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Stakeholder	4 Unit	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan administrasi umum	Persen		Persen	100 Persen	683,485,708						100 Persen	0	
2 18 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	220,857,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Stakeholder	4 Paket	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	54,528,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Stakeholder	3 Paket	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	9,562,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Stakeholder	3 Paket	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				60 Dokumen	204,201,899	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Stakeholder	60 Dokumen	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				25 Laporan	64,336,409	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7) Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7) Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Stakeholder	25 Laporan	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	130,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Stakeholder	20 Laporan	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen		Persen	100 Persen	986,768,268						100 Persen	0	
2 18 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	7,950,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Stakeholder	1 Laporan	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	177,670,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Stakeholder	4 Laporan	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	45,148,268	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Stakeholder	3 Laporan	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	756,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Stakeholder	12 Laporan	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	Persen		Persen	100 Persen	498,308,012						100 Persen	0	
2 18 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	36,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Stakeholder	1 Unit	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				22 Unit	190,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Stakeholder	22 Unit	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	272,308,012	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Stakeholder	1 Unit	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investor Persentase Peningkatan Minat Investasi	Persen %		Persen %	10 Persen 60 %	444,821,900						10 Persen 60 %	0	
2 18 02 1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	Jumlah dokumen	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	377,135,500						2 Dokumen	0	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Provinsi														
2 18 02 1.01 01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	120,650,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Stakeholder	1 Dokumen	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 02 1.01 02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha Di Daerah				1 Kegiatan usaha	256,485,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Stakeholder	1 Kegiatan usaha	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 02 1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah dokumen	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	67,686,400						2 Dokumen	0	
2 18 02 1.02 01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi				1 Dokumen	24,950,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Stakeholder	1 Dokumen	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 02 1.02 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi				1 Dokumen	42,736,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Stakeholder	1 Dokumen	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Cakupan Promosi Penanaman Modal Persentase calon investor yang berinvestasi	% Persen		% Persen	100 % 80 Persen	800,921,600						100 % 80 Persen	0	
2 18 03 1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen promosi	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	800,921,600						2 Dokumen	0	
2 18 03 1.01 01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Provinsi				1 Dokumen	561,148,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Stakeholder	1 Dokumen	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 03 1.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi				1 Dokumen	239,773,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Stakeholder	1 Dokumen	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Capaian Layanan Perizinan dan Non Perizinan Persentase permohonan izin yang terlayani sesuai persyaratan	% Persen		% Persen	93 % 93 Persen	636,346,900						93 % 93 Persen	0	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 04 1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen layanan perizinan kewenangan provinsi lintas kabupaten/kota	Izin		Izin	4 Izin	98,135,000						4 Izin	0	
2 18 04 1.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lintas Daerah Kabupaten/Kota				20 Pelaku Usaha	98,135,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Stakeholder	20 Pelaku Usaha	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 04 1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen layanan perizinan kewenangan daerah provinsi	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	538,211,900						3 Dokumen	0	
2 18 04 1.02 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi				3600 Pelaku Usaha	372,645,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Stakeholder	3600 Pelaku Usaha	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 04 1.02 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi				10 Kegiatan usaha	100,967,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Stakeholder	10 Kegiatan usaha	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 04 1.02 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi				50 Orang	64,598,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Stakeholder	50 Orang	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan yang taat LKPM Rasio Realisasi Investasi dengan Target Daerah	Persen %		Persen %	60 Persen 60 %	923,698,474						60 Persen 60 %	0	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
2 18 05 1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM	Perusahaan		Perusahaan	500 Perusahaan	923,698,474						500 Perusahaan	0		
2 18 05 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal				8 Kegiatan usaha	116,228,374	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Stakeholder	8 Kegiatan usaha	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 05 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				8 Pelaku Usaha	610,726,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Stakeholder	8 Pelaku Usaha	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 05 1.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan				8 Kegiatan usaha	196,743,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Stakeholder	8 Kegiatan usaha	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Cakupan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi	Persen		Persen	100 Persen	73,223,600						100 Persen	0		
2 18 06 1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah dokumen rekapitulasi izin yang terbit melalui DPMP TSP	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	73,223,600						2 Dokumen	0		
2 18 06 1.01 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	73,223,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Stakeholder	1 Dokumen	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
TOTAL						13,031,085,981								0		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						17,181,441,715							0	
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	%		%	100 %	9,181,441,715						100 %	0	
2	19	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						110,000,000							0	
2	19	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	40,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 Dokumen	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	14,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 Dokumen	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	14,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 Dokumen	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	14,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 Dokumen	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	14,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 Dokumen	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	14,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 Laporan	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	Dokumen			Dokumen	20 Dokumen	7,229,841,401					20 Dokumen	0	
2	19	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				75 Orang/ Bulan	7,121,841,401		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				75 Orang/ Bulan	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	66,430,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	7,670,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	0	Dinas Pemuda dan Olahraga

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	10,040,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Laporan	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	8,520,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				19 Dokumen	7,670,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				19 Dokumen	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Dokumen	7,670,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 Dokumen	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						3,645,700							0	
2 19 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0						1 Dokumen	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	3,645,700		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 Laporan	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0						1 Laporan	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						27,265,700							0	
2 19 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				65 Orang	27,265,700		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				65 Orang	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	0						3 Orang	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						347,669,930							0	
2 19 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0						1 Paket	0	Dinas Pemuda dan Olahraga

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0							0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				35 jenis	76,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				35 jenis	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Jenis	51,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 Jenis	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				384 eksemplar	26,269,930		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				384 eksemplar	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				20 Laporan	43,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20 Laporan	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75 OT	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				75 OT	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0							0	
2 19 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0							0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Unit	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0							0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0							0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,225,628,984							0	
2 19 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1200 nomor	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1200 nomor	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Jenis	247,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Jenis	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0							0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				28 Orang	974,128,984		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				28 Orang	0	Dinas Pemuda dan Olahraga

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						237,390,000							0	
2 19 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Unit	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan				26 Unit	171,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				26 Unit	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	40,890,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Unit	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0							0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0							0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda Peserta Pelatihan Yang Bersertifikat Presentase Pembinaan Pemuda Berprestasi	% %		% %	100 % 100 %	1,406,734,260						100 % 100 %	0	
2 19 02 1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	TerlaksananyaPelatihanKecakapan Pemuda			Orang	160 Orang	1,406,734,260						160 Orang	0	
2 19 02 1.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				25 Orang	180,420,540		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Umum	25 Orang	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 02 1.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				100 Orang	247,499,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Umum	100 Orang	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 02 1.01 04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Provinsi yang terseleksi dan Diberikan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera				250 Orang	502,469,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Umum	250 Orang	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 02 1.01 05	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan				2 Unit	232,845,220		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Umum	2 Unit	0	Dinas Pemuda dan Olahraga

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi														
2 19 02 1.01 06	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Jumlah Dokumen Penghargaan Pemuda Provinsi yang Berprestasi dan Menerima Penghargaan				20 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Umum	20 Dokumen	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 02 1.01 09	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan dari Seluruh Kabupaten/Kota				120 Orang	243,498,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Umum	120 Orang	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Presentase Pembinaan Altlet Berprestasi	%		%	100 %	6,593,265,740						100 %	0	
2 19 03 1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Presentase Sarana PrasaranaOlahraga yang Terstandar	%		%	45 %	3,000,000,000						45 %	0	
2 19 03 1.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan				2 Unit	3,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Umum	2 Unit	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 03 1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah Medali Yang Diperoleh	Medali		Medali	40 Medali	1,964,354,000						40 Medali	0	
2 19 03 1.02 01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi				5 Dokumen	159,979,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Umum	5 Dokumen	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 03 1.02 03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event				200 Orang	1,804,375,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Umum	200 Orang	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 03 1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah cabor yang dibina	cabor		cabor	3 cabor	1,628,911,740						3 cabor	0	
2 19 03 1.03 02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Atlit Pelajar yang di Bina				12 Orang	1,628,911,740		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Atlit Pelajar	12 Orang	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 03 1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah organisasi keolahragaan yang dibina	Lembaga		Lembaga	10 Lembaga	0						10 Lembaga	0	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 03 1.04 02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				10 Dokumen	0					Umum	10 Dokumen	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
TOTAL						17,181,441,715							0		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																				
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
													Nasional	Daerah						
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						14,316,728,342								0	
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	80 Nilai	8,936,223,892						80 Nilai	0		
2	15	01		1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	8 Dokumen	80,161,750						8 Dokumen	0		
2	15	01		1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana kerja tahunan SKPD dan Renstra			2 Dokumen	10,455,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0		2 Dokumen	0	Dinas Perhubungan	
2	15	01		1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD			1 Dokumen	10,476,750	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0		1 Dokumen	0	Dinas Perhubungan	
2	15	01		1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD			1 Dokumen	10,455,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0		1 Dokumen	0	Dinas Perhubungan	
2	15	01		1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD			1 Dokumen	10,455,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0		1 Dokumen	0	Dinas Perhubungan	
2	15	01		1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD			1 Dokumen	10,455,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru			0		1 Dokumen	0	Dinas Perhubungan	
2	15	01		1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			2 Laporan	10,455,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0		2 Laporan	0	Dinas Perhubungan	
2	15	01		1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi			1 Dokumen	17,410,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0		1 Dokumen	0	Dinas Perhubungan	
2	15	01		1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Keuangan Dinas Perhubungan	Orang		Orang	69 Orang	6,336,737,715						69 Orang	0		
2	15	01		1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			69 Orang/ Bulan	6,301,118,315	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0		69 Orang/ Bulan	0	Dinas Perhubungan	
2	15	01		1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga administrasi keuangan			9 Orang	24,024,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0		9 Orang	0	Dinas Perhubungan	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Dokumen	11,595,400	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	0	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen aset / barang daerah secara efektif	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	18,612,500						1 Dokumen	0	
2 15 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen aset / barang daerah secara efektif				1 Dokumen	5,043,500	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	0	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Monitoring dan evaluasi Aset Dishub				1 Dokumen	13,569,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	0	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah peningkatan SDM	Orang		Orang	6 Orang	180,000,000						6 Orang	0	
2 15 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah setel Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0 Paket 80 Setel	80,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	0 Paket 80 Setel	0	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah orang ASN yang mengikuti dilkat				6 Orang	100,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	6 Orang	0	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan adminitasi umum	Kegiatan		Kegiatan	7 Kegiatan	648,799,500						7 Kegiatan	0	
2 15 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 jenis	13,200,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 jenis	0	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor				6 Unit	53,048,100	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	6 Unit	0	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis alat tulis kantor				43 Jenis	54,818,700	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	43 Jenis	0	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan				9 Jenis	62,772,500	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	9 Jenis	0	Dinas Perhubungan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Eksemplar bahan bacaan (surat kabar)				1460 Eksemplar	11,738,200	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1460 Eksemplar	0	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu Kedinasan				2250 Orang/ kali	135,487,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	2250 Orang/ kali	0	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen SPPD Dalam Daerah dan Luar Daerah program pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan pusat				35 Laporan	317,735,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	35 Laporan	0	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Unit		Unit	12 Unit	134,750,000						12 Unit	0	
2 15 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit pengadaan mebel kantor yang memadai				2 Unit	50,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	2 Unit	0	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						84,750,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0		0	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan jasa penunjang	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	1,124,487,900						4 Kegiatan	0	
2 15 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar & masuk				2400 Surat	2,398,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	2400 Surat	0	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik				180 Rekening	378,458,300	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	180 Rekening	0	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis perlengkapan dan peralatan kantor				4 Jenis	43,631,600	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	4 Jenis	0	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Orang jasa kebersihan dan keamanan kantor				20 Orang	700,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	20 Orang	0	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan pemeliharaan BMD	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	412,674,527						3 Kegiatan	0	
2 15 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Unit Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan				1 Unit	25,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Unit	0	Dinas Perhubungan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Kendaraan Dinas Jabatan							Baru							
2 15 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit yang terpelihara dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional				29 Unit	200,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	29 Unit	0	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Paket pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor				1 Paket	187,674,527	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Paket	0	Dinas Perhubungan
2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Prasarana terminal dalam kondisi baik Persentase Prasarana transportasi darat dalam kondisi baik Persentase Sarana transportasi darat dalam kondisi baik Persentase tersedianya Fasilitas Keselamatan Jalan dalam kondisi baik	% % % %		% % % %	40 % 100 % 81.63 % 52.58 %	4,698,055,500						40 % 100 % 81.63 % 52.58 %	0	
2 15 02 1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah fasilitas pengelolaan terminal yang memadai	Dokumen		Dokumen	8 Dokumen	1,320,170,500						8 Dokumen	0	
2 15 02 1.03 01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Dokumen Fasilitas Terminal				1 Dokumen	102,768,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya konektivitas layanan transportasi	1 Dokumen	0	Dinas Perhubungan
2 15 02 1.03 02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung terminal yang dibangun				1 Unit	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya konektivitas layanan transportasi	1 Unit	0	Dinas Perhubungan
2 15 02 1.03 03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Dokumen Sosialisasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal				5 Dokumen	715,559,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya konektivitas layanan transportasi	5 Dokumen	0	Dinas Perhubungan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 02 1.03 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Dokumen Fasilitas terminal type B yang terpelihara				1 Unit	201,842,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya konektivitas layanan transportasi	1 Unit	0	Dinas Perhubungan
2 15 02 1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen manajemen rekayasa Lalu lintas dan pelanggaran angkutan	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	909,790,200						12 Dokumen	0	
2 15 02 1.05 01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen MRLL dan DRK				8 Dokumen	550,091,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatnya keselamatan transportasi darat	8 Dokumen	0	Dinas Perhubungan
2 15 02 1.05 04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen kasus pelanggaran angkutan umum berkurang				4 Dokumen	359,698,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	4 Dokumen	0	Dinas Perhubungan
2 15 02 1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kendaraan yang Laik Jalan	Unit		Unit	90 Unit	298,710,500						90 Unit	0	
2 15 02 1.07 02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Unit Pelaksana Penguji Kendaraan Bermotor Yang Dibina				9 unit	119,898,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	9 unit	0	Dinas Perhubungan
2 15 02 1.07 03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Pemeriksaan kendaraan Angkutan Umum di terminal (Ramp Check)				90 Unit Kendaraan	178,811,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	90 Unit Kendaraan	0	Dinas Perhubungan
2 15 02 1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Trayek tersedianya angkutan umum subsidi	Trayek		Trayek	5 Trayek	1,359,684,300						5 Trayek	0	
2 15 02 1.08 01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa	Jumlah Trayek Bus Disabilitas yang				5 Trayek	1,000,000,000	Semua Kab/Kota,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan	Meningkatnya konektivitas	5 Trayek	0	Dinas Perhubungan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	bersubsidi						Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	layanan transportasi			
2 15 02 1.08 02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Kab/ Kota terkendalinya angkutan umum Disabilitas				3 Kab/ Kota	359,684,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya konektivitas layanan transportasi	3 Kab/ Kota	0	Dinas Perhubungan
2 15 02 1.10	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek AKDP di Provinsi NTB	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	350,000,000						1 Dokumen	0	
2 15 02 1.10 01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota				1 Dokumen	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya konektivitas layanan transportasi	1 Dokumen	0	Dinas Perhubungan
2 15 02 1.10 02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan				1 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya konektivitas layanan transportasi	1 Dokumen	0	Dinas Perhubungan
2 15 02 1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan yang Memenuhi Manajemen Keselamatan Angkutan Umum	Unit		Unit	400 Unit	289,800,000						400 Unit	0	
2 15 02 1.13 01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan umum orang dalam trayek yang laik jalan (KPS)				400 Unit	239,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya konektivitas layanan transportasi	400 Unit	0	Dinas Perhubungan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 02 1.13 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen evaluasi Angkutan Umum Orang				1 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya konektivitas layanan transportasi	1 Dokumen	0	Dinas Perhubungan
2 15 02 1.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	jumlah angkutan umum yang laik jalan (KPS)				200	169,900,000						200	0	
2 15 02 1.14 01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	jumlah angkutan umum yang laik jalan (KPS)				200 Unit	119,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya konektivitas layanan transportasi	200 Unit	0	Dinas Perhubungan
2 15 02 1.14 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi izin penyelenggaraan angkutan taksi				1 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya konektivitas layanan transportasi	1 Dokumen	0	Dinas Perhubungan
2 15 03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Sarana dan prasana transportasi Laut dalam kondisi baik	%		%	66,06 %	682,448,950						66,06 %	0	
2 15 03 1.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Fasilitasi Perizinan Angkutan Laut	Dokumen		Dokumen	40 Dokumen	74,110,000						40 Dokumen	0	
2 15 03 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Fasilitasi Perizinan Angkutan Laut				40 Dokumen	74,110,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya konektivitas layanan transportasi	40 Dokumen	0	Dinas Perhubungan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 03 1.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	Jumlah Angkutan laut pelayaran rakyat yang diawasi	Unit		Unit	25 Unit	174,672,700						25 Unit	0	
2 15 03 1.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Jumlah Angkutan laut pelayaran rakyat yang diawasi				25 Unit	174,672,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya konektivitas layanan transportasi	25 Unit	0	Dinas Perhubungan
2 15 03 1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada ASDP Yang Dievaluasi	Unit		Unit	22 Unit	216,691,750						22 Unit	0	
2 15 03 1.05 02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Armada ASDP Yang Dievaluasi				22 Unit	216,691,750	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	22 Unit	0	Dinas Perhubungan
2 15 03 1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Dokumen Badan usaha dipelabuhan yang diawasi	Dokumen		Dokumen	122 Dokumen	41,974,500						122 Dokumen	0	
2 15 03 1.06 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha					122 Dokumen	41,974,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk	Meningkatnya konektivitas layanan transportasi	122 Dokumen	0	Dinas Perhubungan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
	Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Dokumen Badan usaha dipelabuhan yang diawasi						Semua Kelurahan			mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)					
2 15 03 1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah pelabuhan yang diawasi	Pelabuhan		Pelabuhan	5 Pelabuhan	175,000,000						5 Pelabuhan	0		
2 15 03 1.09 04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah data pelabuhan				5 Dokumen	175,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya konektivitas layanan transportasi	5 Dokumen	0	Dinas Perhubungan	
TOTAL							14,316,728,342								0	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							49,615,615,053							57,312,030,059		
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	Nilai		Nilai	A Nilai	34,292,507,646						A Nilai	38,104,140,984			
3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	dokumen		dokumen	5 dokumen	5,275,045,000						5 dokumen	5,798,949,500			
3	25	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	35,995,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Dokumen	39,594,500	Dinas Kelautan dan Perikanan		
3	25	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				9 Dokumen	150,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik			Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	9 Dokumen	165,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan		
3	25	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				9 Dokumen	36,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	9 Dokumen	39,600,000	Dinas Kelautan dan Perikanan		
3	25	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				9 Dokumen	36,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	9 Dokumen	39,600,000	Dinas Kelautan dan Perikanan		
3	25	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				9 Dokumen	36,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	9 Dokumen	36,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan		
3	25	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	125,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Laporan	137,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi yang tersusun				10 dokumen	4,856,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah			Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 dokumen	5,341,655,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan yang tersusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	23,690,429,580						1 dokumen	26,445,735,111	
3 25 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				216 Orang/Bulan	23,606,324,558	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatnya sistem pengelolaan keuangan perangkat daerah	216 Orang/Bulan	26,353,219,587	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	31,100,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya sistem pengelolaan keuangan perangkat daerah	2 Dokumen	34,210,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4 Dokumen	3,900,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya sistem pengelolaan keuangan perangkat daerah	4 Dokumen	4,290,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	10,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya sistem pengelolaan keuangan perangkat daerah	1 Laporan	11,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	28,770,565	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya sistem pengelolaan keuangan perangkat daerah	2 Dokumen	31,647,621	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				12 Laporan	4,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Meningkatnya sistem pengelolaan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	4,400,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	6,334,457		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya sistem pengelolaan keuangan perangkat daerah	2 Dokumen	6,967,903	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD yang tersusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	283,528,614						1 dokumen	311,881,475	
3 25 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang				1 Dokumen	250,000,000	Kota Mataram,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatnya sistem pengelolaan	1 Dokumen	275,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Milik Daerah SKPD						Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				barang milik daerah pada perangkat daerah			
3 25 01 1.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	23,950,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya sistem pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Laporan	26,345,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	9,578,614	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya sistem pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Laporan	10,536,475	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang tepat waktu	dokumen		dokumen	1 dokumen	39,169,825						1 dokumen	43,086,807	
3 25 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	6,169,825	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya sistem pengelolaan kepegawaian perangkat daerah	1 Dokumen	6,786,807	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	8,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya sistem pengelolaan kepegawaian perangkat daerah	1 Dokumen	8,800,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	25,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya sistem pengelolaan kepegawaian perangkat daerah	2 Dokumen	27,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi	jenis		jenis	10 jenis	449,546,476						10 jenis	494,501,125	
3 25 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	3,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	20 Paket	3,850,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				100 Paket	98,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	100 Paket	107,800,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	88,831,045	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	20 Paket	97,714,150	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				40000 Paket	9,720,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	40000 Paket	10,692,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	11,638,016	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	2 Dokumen	12,801,818	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				10 Paket	30,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	10 Paket	33,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah snack dan makan tamu yang tersedia				600 kotak	42,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	600 kotak	46,750,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana				50 kali	85,599,287	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	50 kali	94,159,216	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	18,395,130	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	1 Dokumen	20,234,643	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				4 Dokumen	61,362,998	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	4 Dokumen	67,499,298	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa penunjang yang tersedia	jenis		jenis	6 jenis	4,279,788,151						6 jenis	4,707,486,966	
3 25 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	2,800,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Laporan	2,800,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa				3 Laporan	272,896,000	Kota Mataram,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya penyediaan jasa	3 Laporan	300,185,600	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				penunjang urusan pemerintahan daerah			
3 25 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	13,817,151	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Meningkatnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2 Laporan	15,198,866	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3,990,275,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Laporan	4,389,302,500	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit BMD yang dipelihara	unit		unit	80 unit	275,000,000						80 unit	302,500,000	
3 25 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	160,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Meningkatnya sistem pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	20 Unit	176,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	15,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Meningkatnya sistem pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	10 Unit	16,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	100,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Meningkatnya sistem pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	20 Unit	110,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Luas Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	%		%	9,5 %	4,115,000,000						9,5 %	4,476,500,000	
3 25 02 1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi						550,000,000							605,000,000	
3 25 02 1.01 01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final				1 Dokumen	150,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			meningkatnya pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar	1 Dokumen	165,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		RZWP-3-K						Kelurahan				minyak dan gas bumi			
3 25 02 1.01 02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola				126311 Ha	200,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			meningkatnya pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	126311 Ha	220,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 02 1.01 04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil				100 Orang	200,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			meningkatnya pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	100 Orang	220,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 02 1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ruang laut dibawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi yang sudah memperoleh izin	unit		unit	15 unit	65,000,000						15 unit	71,500,000	
3 25 02 1.02 01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi				10 Rekomendasi	15,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Pelaku Usaha pemanfaatan ruang laut	10 Rekomendasi	16,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 02 1.02 02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan				15 Rekomendasi	50,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Pelaku Usaha pemanfaatan ruang laut	15 Rekomendasi	55,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 02 1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						3,500,000,000							3,800,000,000	
3 25 02 1.03 01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				200 Orang	3,500,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				200 Orang	3,800,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						5,154,724,941							5,670,197,435	
3 25 03 1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil						3,383,000,000							3,721,300,000	
3 25 03 1.01 01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	60,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	66,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 03 1.01 02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				5 Unit	2,223,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				5 Unit	2,445,300,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 03 1.01 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				36 Unit	1,100,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				36 Unit	1,210,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 03 1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Presentase kapal perikanan berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT yang memiliki izin usaha perikanan tangkap	%		%	35 %	380,000,000						35 %	418,000,000	
3 25 03 1.03 01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	80,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			1 Dokumen	88,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 03 1.03 02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan				36 Rekomendasi	250,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			36 Rekomendasi	275,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 03 1.03 03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				1 Dokumen	50,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			1 Dokumen	55,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 03 1.04	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil						55,000,000							60,500,000	
3 25 03 1.04 01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	25,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	27,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 03 1.04 02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan				50 Rekomendasi	30,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				50 Rekomendasi	33,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 03 1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						265,000,000						291,500,000		
3 25 03 1.05 01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	25,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	27,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 03 1.05 02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan				500 Dokumen	240,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				500 Dokumen	264,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 03 1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi						600,000,000							660,000,000	
3 25 03 1.06 01	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan				2 Pelabuhan Perikanan	300,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 Pelabuhan Perikanan	330,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 03 1.06 03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana				1 Layanan	300,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Layanan	330,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 03 1.07	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT						77,000,000							84,700,000	
3 25 03 1.07 02	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan				50 Rekomendasi	77,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				50 Rekomendasi	84,700,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 03 1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT						119,724,941							131,697,435	
3 25 03 1.09 01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku				1 Dokumen	19,724,941	Kota Mataram, Semua					1 Dokumen	21,697,435	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi						Kecamatan, Semua Kelurahan							
3 25 03 1.09 02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan				220 Rekomendasi	100,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				220 Rekomendasi	110,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 03 1.10	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						275,000,000							302,500,000	
3 25 03 1.10 02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan				550 Rekomendasi	275,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				550 Rekomendasi	302,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						5,158,637,685							8,076,972,381	
3 25 04 1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						200,000,000							220,000,000	
3 25 04 1.01 01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan				5 Rekomendasi	100,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				5 Rekomendasi	110,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 04 1.01 03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko				1 Dokumen	100,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	110,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 04 1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut						4,958,637,685							7,856,972,381	
3 25 04 1.05 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut				4 Unit	2,548,186,509	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				4 Unit	2,803,005,160	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 04 1.05 03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang tersedia				3 Unit	416,075,886	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				3 Unit	457,683,475	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 04 1.05 04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut				6 Unit	633,434,136	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 Unit	696,777,550	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 04 1.05 05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pembudidayaan ikan air payau dan air tawar yang tersedia				6 Unit	1,360,941,154	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 Unit	1,497,035,269	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 04 1.05 07	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya				10 Orang	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik				10 Orang	2,402,470,927	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN						166,793,114							183,472,425	
3 25 05 1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil						166,793,114							183,472,425	
3 25 05 1.01 01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil				12 Dokumen	106,793,114	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 Dokumen	117,472,425	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 05 1.01 02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				12 Dokumen	30,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 Dokumen	33,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 05 1.01 03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang				12 Dokumen	30,000,000	Kota Mataram, Semua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 Dokumen	33,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Nasional	Daerah				
	Mil	Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil						Kecamatan, Semua Kelurahan							
3 25 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						727,951,667						800,746,834		
3 25 06 1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						120,301,967						132,332,164		
3 25 06 1.01 02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				5 Rekomendasi	20,301,967	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			5 Rekomendasi	22,332,164	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3 25 06 1.01 03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko				3 Dokumen	100,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			3 Dokumen	110,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3 25 06 1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah produksi olahan hasil perikanan dengan dari pelaku usaha yang menerapkan Good Manufacturing Procedure	ton		ton	215700 ton	547,427,611					215700 ton	602,170,372		
3 25 06 1.02 02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing				5 Unit Usaha	547,427,611	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		unit Pengolahan ikan	5 Unit Usaha	602,170,372	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 06 1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						60,222,089						66,244,298		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 06 1.03 01	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				15 Dokumen	20,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15 Dokumen	22,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 06 1.03 02	Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitas				35 Unit Usaha	40,222,089	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				35 Unit Usaha	44,244,298	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					2,144,863,236							2,359,349,561		
3 25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	Nilai		Nilai	A Nilai	516,364,899						A Nilai	568,001,390	
3 25 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan yang tersusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	18,624,606						1 dokumen	20,487,067	
3 25 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	18,624,606	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya sistem pengelolaan keuangan perangkat daerah	2 Dokumen	20,487,067	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD yang tersusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	5,000,000						1 dokumen	5,500,000	
3 25 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	5,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya sistem pengelolaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	1 Laporan	5,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi	jenis		jenis	2 jenis	5,000,000						2 jenis	5,500,000	
3 25 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya pengelolaan administrasi umum perangkat	5 Paket	5,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						470,240,293							517,264,323	
3 25 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	108,282,598	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Laporan	119,110,858	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	361,957,695	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Laporan	398,153,465	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit BMD yang dipelihara	unit		unit	51 unit	17,500,000						51 unit	19,250,000	
3 25 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	9,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya sistem pemeliharaan barang daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	6 Unit	9,900,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	8,500,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya sistem pemeliharaan barang daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	9 Unit	9,350,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	Ton		Ton	1243385 Ton	1,628,498,337						1243385 Ton	1,791,348,171	
3 25 04 1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Presentase peningkatan produksi perikanan budidaya	%		%	2 %	1,628,498,337						2 %	1,791,348,171	
3 25 04 1.05 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut				5 Unit	1,508,184,339	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			Meningkatnya Produksi dan ketersediaan benih ikan laut dan payau di wilayah pulau Lombok	5 Unit	1,659,002,773	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 04 1.05 05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pembudidayaan ikan air payau dan air tawar yang tersedia				1 Unit	120,313,998	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Produksi dan ketersediaan benih ikan laut dan payau di wilayah pulau Lombok	1 Unit	132,345,398	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						395,454,997							435,000,497	
3 25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	Nilai		Nilai	A Nilai	194,681,620						A Nilai	214,149,782	
3 25 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan yang tersusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	3,031,913						1 dokumen	3,335,104	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	3,031,913	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Meningkatnya sistem pengelolaan keuangan perangkat daerah	1 Dokumen	3,335,104	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD yang tersusun Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi	dokumen jenis		dokumen jenis	1 dokumen 3 jenis	4,000,000						1 dokumen 3 jenis	4,400,000	
3 25 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	4,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya sistem pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Laporan	4,400,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi	jenis		jenis	3 jenis	7,000,000						3 jenis	7,700,000	
3 25 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	3,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	5 Paket	3,850,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	3,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	5 Paket	3,850,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa penunjang yang tersedia	jenis		jenis	6 jenis	155,649,707						6 jenis	171,214,678	
3 25 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	45,298,220	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Meningkatnya penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Laporan	49,828,042	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	110,351,487	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Meningkatnya penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Laporan	121,386,636	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit BMD yang dipelihara	unit		unit	6 unit	25,000,000						6 unit	27,500,000	
3 25 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	10,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya sistem pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Unit	11,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	15,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya sistem pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	2 Unit	16,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Presentase penurunan penggunaan bahan berbahaya pada produk hasil perikanan	%		%	0,5 %	200,773,377						0,5 %	220,850,715	
3 25 06 1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Laporan Hasil Uji	dokumen		dokumen	21 dokumen	200,773,377						21 dokumen	220,850,715	
3 25 06 1.02 02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing				21 Unit Usaha	200,773,377		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka menghasilkan produk yang aman konsumsi dan berdaya saing	21 Unit Usaha	220,850,715	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						887,700,000							976,470,000	
3 25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	Nilai		Nilai	A Nilai	337,700,000						A Nilai	371,470,000	
3 25 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Laporan keuangan yaang tersusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	4,500,000						1 dokumen	4,950,000	
3 25 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	4,500,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya sistem pengelolaan keuangan daerah	1 Dokumen	4,950,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD yang tersusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	4,000,000						1 dokumen	4,400,000	
3 25 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	4,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya sistem pengelolaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	1 Laporan	4,400,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa penunjang yang tersedia	jenis		jenis	6 jenis	129,200,000						6 jenis	142,120,000	
3 25 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	69,200,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Meningkatnya penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Laporan	76,120,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	60,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Meningkatnya penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Laporan	66,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit BMD yang dipelihara	unit		unit	1 unit	200,000,000						1 unit	220,000,000	
3 25 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Meningkatnya sistem pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1 Unit	220,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	Ton		Ton	1243385 Ton	550,000,000						1243385 Ton	605,000,000	
3 25 04 1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Presentase peningkatan produksi perikanan budidaya	%		%	2 %	550,000,000						2 %	605,000,000	
3 25 04 1.05 03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang tersedia				1 Unit	150,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik			Meningkatnya produksi benih ikan laut di wilayah sumbawa	1 Unit	165,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 04 1.05 04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut				1 Unit	400,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik			Meningkatnya produksi benih ikan laut di wilayah sumbawa	1 Unit	440,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						4,671,038,683						5,138,142,551		
3 25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	Nilai		Nilai	A Nilai	723,596,545						A Nilai	795,956,199	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan yang tersusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	5,558,507						1 dokumen	6,114,358	
3 25 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	5,558,507	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			meningkatnya sistem pengelolaan keuangan perangkat daerah	1 Dokumen	6,114,358	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD yang tersusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	4,000,000						1 dokumen	4,400,000	
3 25 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	4,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			meningkatnya sistem pengelolaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	1 Laporan	4,400,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						11,652,892							12,818,181	
3 25 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	9,898,714	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				5 Paket	10,888,585	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	1,754,178	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				5 Paket	1,929,596	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						638,717,380							702,589,117	
3 25 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	225,227,805	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				3 Laporan	247,750,585	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	413,489,575	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				3 Laporan	454,838,532	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						63,667,766							70,034,543	
3 25 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	9,167,927	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				3 Unit	10,084,720	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	3,931,621	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 Paket	4,324,783	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	3,647,920	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10 Paket	4,012,712	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	7,524,437	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Laporan	8,276,881	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						300,330,357							330,363,393	
3 25 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	550,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Laporan	605,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	49,780,357	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					3 Laporan	54,758,393	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	250,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Laporan	275,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						59,283,519							65,251,871	
3 25 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	47,042,773	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Unit	51,747,050	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5,414,130	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 Unit	5,995,543	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	6,826,616	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Unit	7,509,278	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan							
3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						620,000,000							682,000,000	
3 25 03 1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi						620,000,000							682,000,000	
3 25 03 1.06 02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia				1 Unit	500,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik				1 Unit	550,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 03 1.06 03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana				1 Layanan	120,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik				1 Layanan	132,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						1,935,500,000							2,129,050,000	
3 25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	Nilai		Nilai	A Nilai	180,500,000						A Nilai	198,550,000	
3 25 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan yang tersusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	3,900,000						1 dokumen	4,290,000	
3 25 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	3,900,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				meningkatnya sistem pengelolaan keuangan perangkat daerah	1 Dokumen	4,290,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD yang tersusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	4,000,000						1 dokumen	4,400,000	
3 25 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	4,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Meningkatnya sistem pengelolaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	1 Laporan	4,400,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi	jenis		jenis	3 jenis	14,400,000						3 jenis	15,840,000	
3 25 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	6,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			meningkatnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	5 Paket	6,600,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang				60 Paket	2,400,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			meningkatnya pengelolaan administrasi	60 Paket	2,640,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Disediakan						Semua Kelurahan				umum perangkat daerah			
3 25 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	6,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			meningkatnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	2 Laporan	6,600,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa penunjang yang tersedia	jenis		jenis	5 jenis	145,200,000						5 jenis	159,720,000	
3 25 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	15,200,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatnya penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Laporan	16,720,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	130,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Meningkatnya penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Laporan	143,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit BMD yang dipelihara	unit		unit	4 unit	13,000,000						4 unit	14,300,000	
3 25 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	13,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Meningkatnya sistem pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Unit	14,300,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Luas Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	%		%	9,5 %	900,000,000						9,5 %	990,000,000	
3 25 02 1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi						900,000,000							990,000,000	
3 25 02 1.01 02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola				62539 Ha	500,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik			Meningkatnya pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	62539 Ha	550,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 02 1.01 03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi				2 Ha	200,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Meningkatnya pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	2 Ha	220,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 02 1.01 04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil				10 Orang	200,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	10 Orang	220,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang-undangan	%		%	99,93 %	855,000,000						99,93 %	940,500,000	
3 25 05 1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil						855,000,000							940,500,000	
3 25 05 1.01 02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				12 Dokumen	500,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			Meningkatnya efektifitas pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	12 Dokumen	550,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 05 1.01 04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif				2 Kelompok	355,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			Meningkatnya efektifitas pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	2 Kelompok	390,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						2,133,500,000							2,346,850,000	
3 25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	Nilai		Nilai	A Nilai	633,500,000						A Nilai	696,850,000	
3 25 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan yang tersusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	6,000,000						1 dokumen	6,600,000	
3 25 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	6,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			meningkatnya sistem pengelolaan keuangan perangkat daerah	1 Dokumen	6,600,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD yang tersusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	6,000,000						1 dokumen	6,600,000	
3 25 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	6,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			meningkatnya sistem pengelolaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen	6,600,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi	jenis		jenis	4 jenis	16,500,000						4 jenis	18,150,000	
3 25 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan				5 Paket	3,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			meningkatnya pengelolaan administrasi	5 Paket	3,300,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan						Kecamatan, Semua Kelurahan				umum perangkat daerah			
3 25 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	3,500,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			meningkatnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	5 Paket	3,850,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	2,500,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			meningkatnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	6 Paket	2,750,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	7,500,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			meningkatnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	2 Laporan	8,250,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit BMD yang diadakan	unit		unit	1 unit	400,000,000						1 unit	440,000,000	
3 25 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	400,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			Unit BMD yang diadakan	5 Unit	440,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa penunjang yang tersedia	jenis		jenis	5 jenis	180,000,000						5 jenis	198,000,000	
3 25 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	50,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Laporan	55,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	130,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatnya penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Laporan	143,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit BMD yang dipelihara	unit		unit	4 unit	25,000,000						4 unit	27,500,000	
3 25 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	25,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya sistem pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Unit	27,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Luas Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	%		%	9,5 %	800,000,000						9,5 %	880,000,000	
3 25 02 1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi						800,000,000							880,000,000	
3 25 02 1.01 02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola				39312 Ha	500,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik			Meningkatnya pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	39312 Ha	550,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 02 1.01 03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi				2 Ha	300,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik			Meningkatnya pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	2 Ha	330,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang-undangan	%		%	99,93 %	700,000,000						99,93 %	770,000,000	
3 25 05 1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil						700,000,000							770,000,000	
3 25 05 1.01 02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				12 Dokumen	400,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik			Meningkatnya efektifitas pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	12 Dokumen	440,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 05 1.01 04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif				2 Kelompok	300,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik			Meningkatnya efektifitas pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	2 Kelompok	330,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						1,270,423,515						1,397,565,867		
3 25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	Nilai		Nilai	A Nilai	314,474,458						A Nilai	346,021,904	
3 25 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan yang tersusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	4,836,623						1 dokumen	5,320,285	
3 25 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	4,836,623	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			meningkatnya sistem pengelolaan keuangan perangkat daerah	1 Dokumen	5,320,285	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD yang tersusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	4,000,000						1 dokumen	4,400,000	
3 25 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	4,000,000				Meningkatnya sistem pengelolaan Barang Milik Daerah pada perangkat dae		1 Laporan	4,400,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						29,300,000							32,330,000	
3 25 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	6,000,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				5 Paket	6,600,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				600 Paket	2,300,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				600 Paket	2,530,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	21,000,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 Laporan	23,200,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa penunjang yang tersedia	jenis		jenis	4 jenis	254,681,316						4 jenis	280,149,448	
3 25 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	14,681,316	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Meningkatnya penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Laporan	16,149,448	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	240,000,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Meningkatnya penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Laporan	264,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit BMD yang dipelihara	unit		unit	4 unit	21,656,519						4 unit	23,822,171	
3 25 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	21,656,519	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Meningkatnya sistem pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Unit	23,822,171	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Luas Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	%		%	9,5 %	550,000,000						9,5 %	605,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 02 1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi						550,000,000							605,000,000	
3 25 02 1.01 02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola				31132 Ha	250,000,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			meningkatnya pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	31132 Ha	275,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 02 1.01 03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi				2 Ha	150,000,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			meningkatnya pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	2 Ha	165,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 02 1.01 04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil				10 Orang	150,000,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			meningkatnya pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	10 Orang	165,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang-undangan	%		%	99,93 %	405,949,057						99,93 %	446,543,963	
3 25 05 1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil						405,949,057							446,543,963	
3 25 05 1.01 02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				12 Dokumen	105,949,057	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			Meningkatnya efektifitas pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	12 Dokumen	116,543,963	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 05 1.01 04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif				2 Kelompok	300,000,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			Meningkatnya efektifitas pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	2 Kelompok	330,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
TOTAL							64,059,120,198							73,200,025,721	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
														Nasional	Daerah							
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						31,974,159,130								68,381,550,747			
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Dinas Pariwisata Provinsi NTB	Tahun			Tahun	BB Tahun	13,426,933,230							BB Tahun	26,819,500,295		
3	26	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Optimalisasi Layanan Administrasi Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Optimalisasi Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen Persen			Persen Persen	100 Persen 100 Persen	180,248,185							100 Persen 100 Persen	360,496,370		
3	26	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5 Dokumen	43,121,100				Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Layanan Administrasi Urusan Penunjang Kepariwisataan	5 Dokumen	86,242,200	Dinas Pariwisata	
3	26	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	16,798,200				Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Layanan Administrasi Urusan Penunjang Kepariwisataan	1 Dokumen	33,596,400	Dinas Pariwisata	
3	26	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1 Dokumen	14,097,600				Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Layanan Administrasi Urusan Penunjang Kepariwisataan	1 Dokumen	28,195,200	Dinas Pariwisata	
3	26	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					1 Dokumen	20,487,800				Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Layanan Administrasi Urusan Penunjang Kepariwisataan	1 Dokumen	40,975,600	Dinas Pariwisata	
3	26	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					1 Dokumen	13,756,800				Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Layanan Administrasi Urusan Penunjang Kepariwisataan	1 Dokumen	27,513,600	Dinas Pariwisata	
3	26	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					5 Laporan	33,348,895				Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Layanan Administrasi Urusan Penunjang Kepariwisataan	5 Laporan	66,697,790	Dinas Pariwisata	
3	26	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4 Laporan	38,637,790				Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Layanan Administrasi Urusan Penunjang Kepariwisataan	4 Laporan	77,275,580	Dinas Pariwisata	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Optimalisasi layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	9,939,064,073						100 Persen	19,843,392,981	
3 26 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang/ Bulan	9,886,959,157		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Layanan Administrasi Urusan Penunjang	80 Orang/ Bulan	19,739,183,149	Dinas Pariwisata
3 26 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				53 Dokumen	52,104,916		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Layanan Administrasi Urusan Penunjang	53 Dokumen	104,209,832	Dinas Pariwisata
3 26 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Optimalisasi Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	16,105,000						100 Persen	32,210,000	
3 26 01 1.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				2 Laporan	16,105,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Layanan Administrasi Urusan Penunjang	2 Laporan	32,210,000	Dinas Pariwisata
3 26 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Optimalisasi Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	495,150,775						100 Persen	990,670,550	
3 26 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8,309,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	16,619,600	Dinas Pariwisata
3 26 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	111,100,475		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 Paket	222,200,950	Dinas Pariwisata
3 26 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	20,441,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Paket	40,883,000	Dinas Pariwisata
3 26 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	25,200,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	50,400,000	Dinas Pariwisata
3 26 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				3 Laporan	207,468,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 Laporan	414,936,000	Dinas Pariwisata
3 26 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	122,631,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	245,631,000	Dinas Pariwisata
3 26 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalisasi Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	1,461,285,197						100 Persen	2,922,570,394	
3 26 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat				12 Laporan	5,624,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Layanan adminitrasi urusan	12 Laporan	11,248,000	Dinas Pariwisata

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Menyurat										penunjang			
3 26 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	214,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Layanan adminitrasi urusan penunjang	12 Laporan	428,000,000	Dinas Pariwisata
3 26 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	20,450,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Layanan adminitrasi urusan penunjang	12 Laporan	40,900,000	Dinas Pariwisata
3 26 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1,221,211,197		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Layanan adminitrasi urusan penunjang	12 Laporan	2,442,422,394	Dinas Pariwisata
3 26 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalisasi Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	1,335,080,000						100 Persen	2,670,160,000	
3 26 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				24 Unit	704,960,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Layanan Administrasi Urusan Penunjang	24 Unit	1,409,920,000	Dinas Pariwisata
3 26 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	600,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Layanan Administrasi Urusan Penunjang	1 Unit	1,200,000,000	Dinas Pariwisata
3 26 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				27 Unit	30,120,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Layanan Administrasi Urusan Penunjang	27 Unit	60,240,000	Dinas Pariwisata
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase desa wisata yang dikembangkan Persentase Geosite yang tertata	% %		% %	100 % 50 %	5,540,419,500						100 % 50 %	11,080,022,000	
3 26 02 1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Meningkatnya Pembangunan Kawasan Pariwisata yang Terstandar	Kawasan		Kawasan	11 Kawasan	2,000,408,500						11 Kawasan	4,000,000,000	
3 26 02 1.02 01	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				2 Dokumen	325,955,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Kawasan Pariwisata	2 Dokumen	651,910,000	Dinas Pariwisata
3 26 02 1.02 02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				1 Dokumen	378,843,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Kawasan Pariwisata	1 Dokumen	756,870,000	Dinas Pariwisata
3 26 02 1.02 03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan				1 Kawasan	750,075,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan		Kawasan Pariwisata	1 Kawasan	1,500,150,000	Dinas Pariwisata

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
										Menjamin Pemerataan					
3 26 02 1.02 04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				4 Unit	545,535,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Kawasan Pariwisata	4 Unit	1,091,070,000	Dinas Pariwisata
3 26 02 1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Meningkatnya Pembangunan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata yang Minimal Berkembang	Persen		Persen	14.14 Persen	2,500,000,000						14.14 Persen	5,000,000,000	
3 26 02 1.03 03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				17 Lokasi	1,959,749,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Destinasi Pariwisata dan Desa Wisata	17 Lokasi	3,919,499,600	Dinas Pariwisata
3 26 02 1.03 04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara				3 Unit	540,250,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Destinasi Pariwisata dan Desa Wisata	3 Unit	1,080,500,400	Dinas Pariwisata
3 26 02 1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya Pembangunan Industri Pariwisata yang Kredibel	Persen		Persen	30 Persen	1,040,011,000						30 Persen	2,080,022,000	
3 26 02 1.04 04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata				3 Laporan	651,583,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Industri Pariwisata	3 Laporan	1,303,166,000	Dinas Pariwisata
3 26 02 1.04 05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi				98 Unit Usaha	388,428,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Industri Pariwisata	98 Unit Usaha	776,856,000	Dinas Pariwisata
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Efektifitas promosi di dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan	orang		orang	5200000 orang	5,036,461,400						5200000 orang	15,472,922,800	
3 26 03 1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Meningkatnya Pemasaran Pariwisata yang Efektif dan Efesien	Orang		Orang	3000000 Orang	5,036,461,400						3000000 Orang	15,472,922,800	
3 26 03 1.01 01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan				5 Dokumen	1,341,839,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas		Wisatawan	5 Dokumen	2,683,678,400	Dinas Pariwisata

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Luar Negeri								dan Berkeadilan					
3 26 03 1.01 02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				13 Laporan	2,756,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Wisatawan	13 Laporan	5,512,800,000	Dinas Pariwisata
3 26 03 1.01 03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri				4 Dokumen	300,005,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Wisatawan	4 Dokumen	6,000,010,000	Dinas Pariwisata
3 26 03 1.01 04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				5 Dokumen	638,217,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Wisatawan	5 Dokumen	1,276,434,400	Dinas Pariwisata
3 26 04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase HaKi yang telah memberikan kontribusi dalam pertambahan nilai ekonomi kreatif Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang telah Memiliki HaKi	% Persen		% Persen	100 % 40.21 Persen	5,470,345,000						100 % 40.21 Persen	10,940,690,000	
3 26 04 1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Meningkatnya Pasar Ekonomi Kreatif	Persen		Persen	10 Persen	5,270,345,000						10 Persen	10,540,690,000	
3 26 04 1.01 01	Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia				1 Unit	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pelaku Ekonomi Kreatif	1 Unit	300,000,000	Dinas Pariwisata
3 26 04 1.01 02	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik				14 Laporan	2,143,212,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pelaku Ekonomi Kreatif	14 Laporan	4,286,425,000	Dinas Pariwisata
3 26 04 1.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif				6 Laporan	1,200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pelaku Ekonomi Kreatif	6 Laporan	2,400,000,000	Dinas Pariwisata
3 26 04 1.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar				1 Laporan	277,132,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pelaku Ekonomi Kreatif	1 Laporan	554,265,000	Dinas Pariwisata
3 26 04 1.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula				3 Laporan	1,500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pelaku Ekonomi Kreatif	3 Laporan	3,000,000,000	Dinas Pariwisata

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 04 1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Intelektual Ekonomi Kreatif	Persen		Persen	5 Persen	200,000,000						5 Persen	400,000,000	
3 26 04 1.02 07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	200,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Pelaku Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	400,000,000	Dinas Pariwisata
3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM penunjang layanan pariwisata yang memenuhi standar	%		%	100 %	2,500,000,000						100 %	4,068,415,652	
3 26 05 1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjut	Persen		Persen	5 Persen	2,500,000,000						5 Persen	4,068,415,652	
3 26 05 1.01 01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya				120 Orang	1,035,093,720		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	120 Orang	1,138,603,092	Dinas Pariwisata
3 26 05 1.01 02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata				240 Orang	253,661,760		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	240 Orang	507,323,520	Dinas Pariwisata
3 26 05 1.01 03	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan				480 Orang	242,380,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	480 Orang	484,761,600	Dinas Pariwisata
3 26 05 1.01 04	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				50 Orang	634,431,860		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	50 Orang	1,268,863,720	Dinas Pariwisata
3 26 05 1.01 09	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				20 Orang	266,651,860		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	20 Orang	533,303,720	Dinas Pariwisata
3 26 05 1.01 10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	67,780,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	135,560,000	Dinas Pariwisata

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						3,382,136,840						6,764,273,680				
3 26 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip Dinas Pariwisata Nilai Sakip Dinas Pariwisata Provinsi NTB	Tahun Tahun		Tahun Tahun	BB Tahun BB Tahun	3,057,770,040						BB Tahun BB Tahun	6,115,540,080			
3 26 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Optimaliasi Layanan Administrasi Perencanaan Penanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	5,544,000						100 Persen 100 Persen	11,088,000			
3 26 01 1.01 01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen	5,544,000			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Administrasi Urusan Penunjang	1 Dokumen	11,088,000		Dinas Pariwisata	
3 26 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Optimalisasi Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	42,758,540						100 Persen	85,517,080			
3 26 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	23,943,540			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Administrasi Urusan Penunjang	5 Paket	47,887,080		Dinas Pariwisata
3 26 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1,260,000			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Administrasi Urusan Penunjang	12 Dokumen	2,520,000		Dinas Pariwisata
3 26 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	17,555,000			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Administrasi Urusan Penunjang	1 Laporan	35,110,000		Dinas Pariwisata
3 26 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalisasi Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	2,944,039,500						100 Persen	5,888,079,000			
3 26 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	1,260,000			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Administrasi Urusan Penunjang	4 Laporan	2,520,000		Dinas Pariwisata
3 26 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	621,991,500			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Administrasi Urusan Penunjang	12 Laporan	1,243,983,000		Dinas Pariwisata
3 26 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2,320,788,000			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Administrasi Urusan Penunjang	12 Laporan	4,641,576,000		Dinas Pariwisata
3 26 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalisasi Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	65,428,000						100 Persen	130,856,000			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 7 Unit	65,428,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi Urusan Penunjang	0 Unit 7 Unit	130,856,000	Dinas Pariwisata
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase desa wisata yang dikembangkan Persentase Geosite yang tertata	% %		% %	100 % 50 %	324,366,800						100 % 50 %	648,733,600	
3 26 02 1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Meningkatnya Pengembangan Daya Tarik Pariwisata Destinasi Wisata Unggulan Islamic Center	Daya Tarik		Daya Tarik	1 Daya Tarik	150,000,000						1 Daya Tarik	300,000,000	
3 26 02 1.01 03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				1 Lokasi	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Destinasi Wisata Unggulan Daerah (Islamic Center) dan Wisata Halal	1 Lokasi	300,000,000	Dinas Pariwisata
3 26 02 1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Meningkatnya Pembangunan dan Pengembangan Destinasi Wisata Unggulan Daerah Minimal Berkembang	Destinasi		Destinasi	1 Destinasi	174,366,800						1 Destinasi	348,733,600	
3 26 02 1.03 04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara				12 Unit	174,366,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Destinasi Wisata Unggulan Islamic Center dan Wisata Halal	12 Unit	348,733,600	Dinas Pariwisata
TOTAL							35,356,295,970						75,145,824,427		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						206,017,668,721								161,165,000,000		
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip OPD	Poin		Poin	80 Poin	46,955,060,010						80 Poin	46,665,000,000			
3	27	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	15 Dokumen	221,500,000						15 Dokumen	198,500,000			
3	27	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	13,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Dokumen	12,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan		
3	27	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	20,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Dokumen	14,500,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan		
3	27	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	20,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan		
3	27	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	14,000,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan		
3	27	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	14,000,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Dokumen	13,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan		
3	27	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	25,000,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	2 Laporan	9,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan		
3	27	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	115,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	12 Laporan	120,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan		
3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi Keuangan	Jenis		Jenis	3 Jenis	43,455,933,870						3 Jenis	43,216,000,000			
3	27	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan				399 Orang/ Bulan	43,225,841,270	Semua Kab/Kota,	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan	ASN	399 Orang/ Bulan	43,000,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Tunjangan ASN						Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			(PD-9)				
3 27 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	210,092,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Dokumen	210,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	20,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Laporan	6,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Barang Milik Daerah	Jenis		Jenis	2 Jenis	28,079,705						2 Jenis	30,000,000	
3 27 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Dokumen	1,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	27,579,705	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	2 Laporan	29,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Kepegawaian	Jenis		Jenis	1 Jenis	10,000,000						1 Jenis	10,000,000	
3 27 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	10,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	2 Orang	10,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang diadakan	Jenis		Jenis	7 Jenis	520,361,800						7 Jenis	508,000,000	
3 27 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,632,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Paket	6,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	37,729,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	2 Paket	37,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan				2 Paket	57,000,000	Kota Mataram,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan	ASN	2 Paket	60,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Penggandaan	Penggandaan yang Disediakan						Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			(PD-9)				
3 27 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1440 Dokumen	15,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1440 Dokumen	0	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	35,000,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Laporan	35,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	350,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	10 Laporan	350,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1000 Dokumen	20,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1000 Dokumen	20,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah	Jenis		Jenis	3 Jenis	492,000,000						3 Jenis	752,500,000	
3 27 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Unit	250,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Paket	150,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	3 Paket	150,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	270,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	5 Unit	200,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Unit	35,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang				10 Unit	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	10 Unit	60,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Disediakan						Semua Kelurahan							
3 27 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	72,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Unit	57,500,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	Jenis		Jenis	3 Jenis	1,430,187,135						3 Jenis	1,423,000,000	
3 27 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2,387,135	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Laporan	3,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	200,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	3 Laporan	220,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1,227,800,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Laporan	1,200,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	Jenis		Jenis	4 Jenis	796,997,500						4 Jenis	527,000,000	
3 27 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	25,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Unit	25,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				35 Unit	200,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	35 Unit	280,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	21,997,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	10 Unit	22,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Paket	550,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	3 Paket	200,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitasi Sarana Pertanian	%		%	2,05 %	46,849,215,951						2,05 %	52,000,000,000	
3 27 02 1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	persen		persen	100 persen	6,465,687,470						100 persen	6,000,000,000	
3 27 02 1.01 01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				3 Laporan	6,465,687,470	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Kelompok Tani	3 Laporan	6,000,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 02 1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Persentase Ketersediaan Benih Tanaman	%		%	100 %	40,383,528,481						100 %	46,000,000,000	
3 27 02 1.02 02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura				1 Laporan	2,318,824,605	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Kelompok Tani	1 Laporan	2,500,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 02 1.02 03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran				1 Dokumen	3,098,074,280	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Kelompok Tani	1 Dokumen	3,500,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 02 1.02 04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan				1 Laporan	34,966,629,596	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Kelompok Tani	1 Laporan	40,000,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan industrialisasi pertanian Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian	unit/paket %		unit/paket %	2 unit/paket 96,79 %	112,213,392,760						2 unit/paket 96,79 %	62,500,000,000	
3 27 03 1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Pengembangan industrialiasasi pertanian Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian	unit/paket %		unit/paket %	2 unit/paket 10 %	112,213,392,760						2 unit/paket 10 %	62,500,000,000	
3 27 03 1.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani				1 Dokumen	86,402,821,813	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Kelompok Tani dan Petani	1 Dokumen	50,000,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 03 1.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani				0 Dokumen	23,810,570,947	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Kelompok Tani dan Petani	0 Dokumen	12,000,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 03 1.01 09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	2,000,000,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Kelompok Tani dan Petani	1 Laporan	500,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						6,558,239,098							5,745,700,000	
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip OPD	Poin		Poin	80 Poin	434,193,498						80 Poin	545,700,000	
3 27 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1,985,000						1 Dokumen	2,000,000	
3 27 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1,985,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Laporan	2,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi Keuangan	Jenis		Jenis	3 Jenis	7,233,268						3 Jenis	8,000,000	
3 27 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	4,114,768	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Dokumen	4,500,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3,118,500	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Laporan	3,500,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Barang Milik Daerah	Jenis		Jenis	2 Jenis	8,793,400						2 Jenis	9,500,000	
3 27 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	500,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Dokumen	1,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	8,293,400	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	2 Laporan	8,500,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang diadakan	Jenis		Jenis	6 Jenis	43,649,830					6 Jenis	82,500,000		
3 27 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,461,830	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ASN	1 Paket	25,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	7,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN	2 Paket	21,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	6,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN	2 Paket	7,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				365 Dokumen	4,158,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN	365 Dokumen	4,500,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	2,610,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN	1 Laporan	3,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	21,420,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN	2 Laporan	22,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	Jenis		Jenis	3 Jenis	307,400,000					3 Jenis	337,500,000		
3 27 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2,400,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN	1 Laporan	2,500,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	95,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ASN	2 Laporan	105,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	210,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN	2 Laporan	230,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	Jenis		Jenis	2 Jenis	65,132,000					2 Jenis	106,200,000		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
3 27 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	59,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	15 Unit	100,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	6,132,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	8 Unit	6,200,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian	%		%	96,79 %	5,500,000,000						96,79 %	5,000,000,000		
3 27 03 1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian	%		%	10 %	5,500,000,000						10 %	5,000,000,000		
3 27 03 1.01 10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				3 Unit	5,500,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	UPTD	3 Unit	5,000,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Pertanaman Yang Aman dari serangan OPT dan DPI	%		%	96,5 %	624,045,600						96,5 %	200,000,000		
3 27 05 1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Persentase Luas Serangan OPT/DPI yang dapat dikendalikan (3 % OPT & 2 % DPI dan Faktor lainnya)	Persen		Persen	5 Persen	624,045,600						5 Persen	200,000,000		
3 27 05 1.01 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				7661 Ha	100,000,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Petugas Pengamat OPT dan DPI, Kelompok Tani dan Petani	7661 Ha	200,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 05 1.01 02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				2967 Ha	524,045,600	Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Petugas Pengamat OPT dan DPI, Kelompok Tani dan Petani	2967 Ha	0	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						2,828,088,090							475,305,000		
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip OPD	Poin		Poin	80 Poin	328,088,090						80 Poin	470,805,000		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1,985,000						1 Dokumen	2,000,000	
3 27 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1,985,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Laporan	2,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi Keuangan	Jenis		Jenis	2 Jenis	7,396,455						2 Jenis	12,000,000	
3 27 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	3,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Dokumen	7,500,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	4,396,455	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Laporan	4,500,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Barang Milik Daerah	Jenis		Jenis	2 Jenis	11,945,000						2 Jenis	12,500,000	
3 27 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	500,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Dokumen	1,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	11,445,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	2 Laporan	11,500,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang diadakan	Jenis		Jenis	6 Jenis	72,067,935						6 Jenis	120,500,000	
3 27 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,107,935	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	1 Paket	5,500,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	14,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	2 Paket	21,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	3,600,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	2 Paket	4,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1440 Dokumen	7,560,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	1440 Dokumen	8,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1,800,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	1 Laporan	2,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	40,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	8 Laporan	80,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	Jenis		Jenis	3 Jenis	152,888,700						3 Jenis	189,000,000	
3 27 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4,148,700	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Laporan	4,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	58,740,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	2 Laporan	60,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	90,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Laporan	125,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	Jenis		Jenis	2 Jenis	81,805,000						2 Jenis	134,805,000	
3 27 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	67,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	20 Unit	120,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	14,805,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	18 Unit	14,805,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian	%		%	96,79 %	2,500,000,000						96,79 %	4,500,000	
3 27 03 1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian	%		%	10 %	2,500,000,000						10 %	4,500,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 03 1.01 10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	2,500,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	UPTD	1 Unit	4,500,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						2,118,434,350							1,815,004,000	
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip OPD	Poin		Poin	80 Poin	743,434,350						80 Poin	815,004,000	
3 27 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	15 Dokumen	0						15 Dokumen	2,000,000	
3 27 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	1 Laporan	2,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi Keuangan	Jenis		Jenis	2 Jenis	3,798,250						2 Jenis	4,000,000	
3 27 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1,000,000	Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Dokumen	1,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2,798,250	Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Laporan	3,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Barang Milik Daerah	Jenis		Jenis	2 Jenis	20,450,000						2 Jenis	21,000,000	
3 27 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	500,000	Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Dokumen	1,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	19,950,000	Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	2 Laporan	20,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang diadakan	Jenis		Jenis	1 Jenis	78,557,100						1 Jenis	118,600,000	
3 27 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	9,557,100	Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	3 Paket	9,600,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	11,000,000	Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	4 Paket	20,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	7,000,000	Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	2 Paket	27,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1440 Dokumen	8,000,000	Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	1440 Dokumen	9,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	3,000,000	Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	1 Laporan	3,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	40,000,000	Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	4 Laporan	50,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	Jenis		Jenis	3 Jenis	550,005,000						3 Jenis	575,500,000	
3 27 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2,205,000	Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Laporan	2,500,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	55,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	3 Laporan	80,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	492,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Laporan	493,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	Jenis		Jenis	2 Jenis	90,624,000						2 Jenis	93,904,000	
3 27 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	81,720,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	14 Unit	85,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8,904,000	Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	8 Unit	8,904,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitasi Sarana Pertanian	%		%	2,05 %	900,000,000						2,05 %	1,000,000,000	
3 27 02 1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Persentase Ketersediaan Benh Tanaman	%		%	100 %	900,000,000						100 %	1,000,000,000	
3 27 02 1.02 02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura				1 Laporan	300,000,000	Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak	Dana Insentif Daerah		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Unit Perbanyakan Benih	1 Laporan	350,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 02 1.02 03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran				96000 Kg	600,000,000	Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak Kab. Lombok Tengah, Jonggat, Puyung Kab. Lombok Tengah, Pringgarata, Pemepek Kab. Lombok Timur, Pringgasela, Pengadangan Kab. Sumbawa, Utan, Bale Brang Kab. Lombok Utara, Kayangan, Santong	Dana Insentif Daerah		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Unit Perbanyakan Benih	96000 Kg	650,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian	%		%	96,79 %	475,000,000						96,79 %	0	
3 27 03 1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian	%		%	10 %	475,000,000						10 %	0	
3 27 03 1.01 10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	475,000,000	Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak Kab. Lombok Tengah, Jonggat, Puyung Kab. Lombok Tengah, Pringgarata, Pemepek Kab. Lombok Timur, Pringgasela, Pengadangan	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan- Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	UPTD Balai Benih Induk	1 Unit	0	Dinas Pertanian dan Perkebunan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kab. Lombok Timur, Sembalun, Sembalun Lawang Kab. Sumbawa, Utan, Bale Brang Kab. Lombok Utara, Kayangan, Santong							
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						924,082,635							1,466,498,500	
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip OPD	Poin		Poin	80 Poin	449,082,635						80 Poin	466,498,500	
3 27 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1,985,000						1 Dokumen	2,000,000	
3 27 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1,985,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	1 Laporan	2,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi Keuangan	Jenis		Jenis	2 Jenis	7,557,060						2 Jenis	8,500,000	
3 27 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	5,107,410	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Dokumen	5,500,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2,449,650	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Laporan	3,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Barang Milik Daerah	Jenis		Jenis	2 Jenis	3,650,000						2 Jenis	4,500,000	
3 27 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	500,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Dokumen	1,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	3,150,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	2 Laporan	3,500,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang diadakan	Jenis		Jenis	6 Jenis	78,627,075						6 Jenis	86,500,000	
3 27 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6,144,075	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	1 Paket	6,500,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	17,000,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	2 Paket	19,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	3,600,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	2 Paket	4,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				365 Dokumen	8,883,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	365 Dokumen	9,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	3,000,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	1 Laporan	3,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Perjalanan Dinas Biasa				0 Laporan 4 Laporan 1 tahun	40,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	0 Laporan 4 Laporan 1 tahun	45,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	Jenis		Jenis	3 Jenis	283,665,000						3 Jenis	291,000,000	
3 27 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	600,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Laporan	1,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	43,065,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	3 Laporan	45,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	240,000,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	2 Laporan	245,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	Jenis		Jenis	2 Jenis	73,598,500						2 Jenis	73,998,500	
3 27 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	64,600,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	12 Unit	65,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	8,998,500	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	7 Unit	8,998,500	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian	%		%	96,79 %	475,000,000						96,79 %	1,000,000,000	
3 27 03 1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian	%		%	10 %	475,000,000						10 %	1,000,000,000	
3 27 03 1.01 10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	475,000,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	UPTD	1 Unit	1,000,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						2,945,180,660						3,013,945,110		
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip OPD	Poin		Poin	80 Poin	456,180,660						80 Poin	524,695,110	
3 27 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1,985,000						1 Dokumen	1,985,000	
3 27 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar				1 Laporan	1,985,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	1 Laporan	1,985,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Realisasi Kinerja SKPD													
3 27 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi Keuangan	Jenis		Jenis	2 Jenis	8,499,960						2 Jenis	8,499,960	
3 27 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	5,869,710	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Dokumen	5,869,710	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2,630,250		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Laporan	2,630,250	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Barang Milik Daerah	Jenis		Jenis	2 Jenis	15,500,000						2 Jenis	44,623,650	
3 27 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	500,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Dokumen	1,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Honor PTT Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				14 OB 0 Laporan 2 Laporan	15,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	14 OB 0 Laporan 2 Laporan	43,623,650	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang diadakan	Jenis		Jenis	6 Jenis	90,236,700						6 Jenis	119,602,500	
3 27 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8,872,500	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Paket	8,872,500	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	15,500,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	2 Paket	21,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	8,634,200	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	2 Paket	9,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1440 Dokumen	13,230,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1440 Dokumen	13,230,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	4,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Laporan	7,500,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	40,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	5 Laporan	60,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	Jenis		Jenis	3 Jenis	267,755,000						3 Jenis	276,500,000	
3 27 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,275,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Laporan	1,500,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	51,480,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	3 Laporan	55,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Tenaga Keamanan Jumlah Tenaga Kebersihan				1 Laporan 24 OB 48 OB	215,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Laporan 24 OB 48 OB	220,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	Jenis		Jenis	2 Jenis	72,204,000						2 Jenis	73,484,000	
3 27 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	63,720,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	13 Unit	65,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	8,484,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Unit	8,484,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian	%		%	96,79 %	2,000,000,000						96,79 %	2,000,000,000	
3 27 03 1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian	%		%	10 %	2,000,000,000						10 %	2,000,000,000	
3 27 03 1.01 10	Pembangunan, Rehabilitasi dan	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana				1 Unit	2,000,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua			Industrialisasi produk unggulan	UPTD	1 Unit	2,000,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi					Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Kecamatan, Semua Kelurahan		(PD-9)					
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Pertanaman Yang Aman dari serangan OPT dan DPI	%		%	96,5 %	489,000,000						96,5 %	489,250,000	
3 27 05 1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Persentase Luas Serangan OPT/DPI yang dapat dikendalikan (3 % OPT & 2 % DPI dan Faktor lainnya)	Persen		Persen	5 Persen	489,000,000						5 Persen	489,250,000	
3 27 05 1.01 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				695 Ha	484,000,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Kelompok Tani dan Petani	695 Ha	484,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 05 1.01 02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				30 Ha	5,000,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Kelompok Tani dan Petani	30 Ha	5,250,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						4,697,869,340							5,789,063,274	
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip OPD	Poin		Poin	80 Poin	797,249,800						80 Poin	1,086,881,780	
3 27 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	15 Dokumen	0						15 Dokumen	2,000,000	
3 27 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	0	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Laporan	2,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi Keuangan	Jenis		Jenis	3 Jenis	0						3 Jenis	9,000,000	
3 27 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	0	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Dokumen	6,500,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan				1 Laporan	0	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Laporan	2,500,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Kelurahan							
3 27 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Barang Milik Daerah	Jenis		Jenis	1 Jenis	10,200,000						1 Jenis	12,220,000	
3 27 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Dokumen	1,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	10,200,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	2 Laporan	11,220,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang diadakan	Jenis		Jenis	3 Jenis	39,089,800						3 Jenis	251,498,780	
3 27 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 jenis	4,089,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	5 jenis	4,498,780	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 jenis 0 Paket	20,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	2 jenis 0 Paket	30,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 jenis 0 Paket	15,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	5 jenis 0 Paket	27,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1440 Dokumen	0	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1440 Dokumen	11,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	0	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Laporan	3,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Konsultasi SKPD				0 Laporan 20 OP	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	0 Laporan 20 OP	176,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jenis		Jenis	3 Jenis	583,440,000						3 Jenis	641,984,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		yang diadakan													
3 27 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan				1 jenis	3,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 jenis	3,500,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan				2 jenis	129,600,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	2 jenis	142,560,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 jenis	450,840,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	3 jenis	495,924,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	Jenis		Jenis	2 Jenis	164,520,000						2 Jenis	170,179,000	
3 27 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				26 Unit	141,630,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	26 Unit	145,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 59 Unit	22,890,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	0 Unit 59 Unit	25,179,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitas Prasarana Pertanian	%		%	96,79 %	677,083,040						96,79 %	744,791,344	
3 27 03 1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Persentase Fasilitas Prasarana Pertanian	%		%	10 %	677,083,040						10 %	744,791,344	
3 27 03 1.01 10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor yang dipelihara				2 gedung	677,083,040	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	UPTD	2 gedung	744,791,344	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Tani Yang Meningkatkan Kelas Kelompoknya	%		%	5 %	3,223,536,500						5 %	3,957,390,150	
3 27 07 1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Tenaga Penyuluh Pertanian (ASN/THL dan Swadaya/Swasta) Yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang		Orang	300 Orang	1,595,000,000						300 Orang	1,840,000,000	
3 27 07 1.01 01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang mengikuti kegiatan				345 Orang	1,500,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan,			Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Penyuluh dan Kelompok Tani	345 Orang	1,650,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Pengembangan Kompetensi						Semua Kelurahan							
3 27 07 1.01 02	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi				30 Orang	95,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Penyuluh dan Kelompok Tani	30 Orang	190,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 07 1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Persentase BPP yang meningkat klasifikasi kelas BPP nya	Persen		Persen	60 Persen	1,628,536,500						60 Persen	1,867,390,150	
3 27 07 1.02 01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Kegiatan Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				9 kegiatan	1,438,536,500				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	9 kegiatan	1,582,390,150	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 07 1.02 02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Petani yang mendapatkan penyuluhan dan kegiatan pemberdayaan petani				60 orang	190,000,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	60 orang	285,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 07 1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan						0							250,000,000	
3 27 07 1.03 02	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani				1 Laporan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		1 Laporan	250,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						1,928,636,600							1,919,396,500	
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip OPD	Poin		Poin	80 Poin	898,636,600						80 Poin	959,396,500	
3 27 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1,985,000						1 Dokumen	2,000,000	
3 27 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1,985,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Laporan	2,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi Keuangan	Jenis		Jenis	2 Jenis	11,061,600						2 Jenis	2,500,000	
3 27 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi				1 tahun 12 orang/bulan	8,961,600	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 tahun 12 orang/bulan	0	Dinas Pertanian dan Perkebunan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		SKPD													
3 27 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2,100,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Laporan	2,500,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Barang Milik Daerah	Jenis		Jenis	2 Jenis	5,750,000						2 Jenis	6,500,000	
3 27 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	500,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Dokumen	1,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	5,250,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	2 Laporan	5,500,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang diadakan	Jenis		Jenis	6 Jenis	87,660,000						6 Jenis	115,500,000	
3 27 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 tahun	4,200,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 tahun	4,500,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 tahun	32,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 tahun	20,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 tahun	10,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 tahun	0	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1440 Dokumen	8,460,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1440 Dokumen	8,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 tahun	3,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 tahun	3,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 tahun 850 orang/kali	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 tahun 850 orang/kali	80,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	Jenis		Jenis	3 Jenis	632,290,000						3 Jenis	643,000,000	
3 27 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				298 buah	2,980,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	298 buah	3,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 bulan	89,310,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	12 bulan	95,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				72 org/bln 144 org/bln	540,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	72 org/bln 144 org/bln	545,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	Jenis		Jenis	2 Jenis	159,890,000						2 Jenis	189,896,500	
3 27 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	85,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	10 Unit	115,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 12 Unit 88 Unit	74,890,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	0 Unit 12 Unit 88 Unit	74,896,500	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						400,000,000							400,000,000	
3 27 03 1.01	Penataan Prasarana Pertanian						400,000,000							400,000,000	
3 27 03 1.01 10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 tahun	400,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		1 tahun	400,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang meningkat skor kelas kelompok	%		%	100 %	630,000,000						100 %	560,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 07 1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Persentase Siswa Yang Lulus	%		%	100 %	630,000,000						100 %	560,000,000	
3 27 07 1.02 01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				144 orang/bulan 21600 kg	630,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Generasi Muda Pertanian	144 orang/bulan 21600 kg	560,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						1,834,350,335							1,514,102,600	
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip OPD	Poin		Poin	80 Poin	601,141,735						80 Poin	680,894,000	
3 27 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1,985,000						1 Dokumen	2,000,000	
3 27 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1,985,000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Laporan	2,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi Keuangan	Jenis		Jenis	2 Jenis	42,201,735						2 Jenis	42,500,000	
3 27 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	35,649,500	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Dokumen	36,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	6,552,235	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Laporan	6,500,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Barang Milik Daerah	Jenis		Jenis	2 Jenis	6,270,000						2 Jenis	40,000,000	
3 27 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	500,000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Dokumen	34,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	5,770,000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	2 Laporan	6,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 27 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang diadakan	Jenis		Jenis	6 Jenis	72,660,000					6 Jenis	116,000,000		
3 27 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9,000,000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Paket	5,500,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	8,000,000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	2 Paket	19,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 tahun	4,200,000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 tahun	4,500,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1440 Dokumen	7,560,000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1440 Dokumen	8,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersdianya Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Tahun	3,900,000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Tahun	4,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan terjadinya sinkronisasi program pusat dan daerah				0 Laporan 7 Laporan	40,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	0 Laporan 7 Laporan	75,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	Jenis		Jenis	3 Jenis	376,904,000					3 Jenis	379,000,000		
3 27 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3,904,000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Laporan	4,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Rekening 2 rekening	55,000,000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Rekening 2 rekening	55,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Nasional	Daerah				
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Terpenuhinya jasa penunjang Urusan SKPD				1 Laporan 1 Tahun	318,000,000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Laporan 1 Tahun	320,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	Jenis		Jenis	2 Jenis	101,121,000						2 Jenis	101,394,000	
3 27 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	56,727,000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	6 Unit	57,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit 25 Unit	44,394,000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	14 Unit 25 Unit	44,394,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitas Prasarana Pertanian	%		%	96,79 %	400,000,000						96,79 %	0	
3 27 03 1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Persentase Fasilitas Prasarana Pertanian	%		%	10 %	400,000,000						10 %	0	
3 27 03 1.01 10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				3 Paket	400,000,000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	UPTD	3 Paket	0	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Tani Yang Menigkat Kelas Kelompoknya	%		%	5 %	833,208,600						5 %	833,208,600	
3 27 07 1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelulusan Siswa	%		%	100 %	833,208,600						100 %	833,208,600	
3 27 07 1.02 01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				1 Dokumen	833,208,600	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Generasi Muda Pertanian	1 Dokumen	833,208,600	Dinas Pertanian dan Perkebunan
TOTAL							229,852,549,829							182,904,014,984	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						79,158,854,510								74,010,246,098	
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	NILAI LAKIP OPD	Point		Point	A Point	23,980,879,144						A Point	19,012,992,747		
3	27	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan (Dokumen)	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	2,686,880,222						5 Dokumen	939,696,986		
3	27	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen penyusunan perencanaan				2 Dokumen	195,779,130	Kota Mataram, Mataram, Punia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stake Holder Lainnya	2 Dokumen	215,357,043	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3	27	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen penyusunan RKA yang dihasilkan				2 Dokumen	69,394,338	Kota Mataram, Mataram, Punia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stake Holder Lainnya	2 Dokumen	76,333,771	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3	27	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen penyusunan Perubahan RKA yang dihasilkan				2 Dokumen	70,192,541	Kota Mataram, Mataram, Punia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stake Holder Lainnya	2 Dokumen	77,211,795	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3	27	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen penyusunan DPA yang dihasilkan				2 Dokumen	65,587,059	Kota Mataram, Mataram, Punia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stake Holder Lainnya	2 Dokumen	72,145,764	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3	27	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dokumen penyusunan Perubahan DPA yang dihasilkan				2 Dokumen	69,539,259	Kota Mataram, Mataram, Punia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stake Holder Lainnya	2 Dokumen	76,493,184	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3	27	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Kinerja yang dihasilkan				0 Laporan 5 laporan	249,322,895	Kota Mataram, Mataram, Punia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stake Holder Lainnya	0 Laporan 5 laporan	149,258,382	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Statistik Sektoral Yang Dihasilkan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 buku 0 Laporan	1,967,065,000	Kota Mataram, Mataram, Punia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stake Holder Lainnya	1 buku 0 Laporan	272,897,047	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang dihasilkan (Laporan)	Laporan		Laporan	5 Laporan	17,521,770,794						5 Laporan	14,410,272,026	
3 27 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				165 Orang/ Bulan	17,205,729,415	Kota Mataram, Mataram, Punia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN, Stake Holder lainnya	165 Orang/ Bulan	14,071,426,509	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Pengelola Keuangan				0 Dokumen 5 orang/bulan	192,974,807	Kota Mataram, Mataram, Punia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN, Stake Holder lainnya	0 Dokumen 5 orang/bulan	212,272,287	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Frekwensi koordinasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 kali 0 Dokumen	50,838,721	Kota Mataram, Mataram, Punia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN, Stake Holder lainnya	12 kali 0 Dokumen	47,122,594	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan Keuangan yang dihasilkan				0 Laporan 2 laporan	13,451,765	Kota Mataram, Mataram, Punia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN, Stake Holder lainnya	0 Laporan 2 laporan	14,796,941	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Laporan Hasil pemeriksaan yang dihasilkan				0 Dokumen 1 laporan	14,849,216	Kota Mataram, Mataram, Punia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN, Stake Holder lainnya	0 Dokumen 1 laporan	16,334,138	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester yang dihasilkan				0 Laporan 12 laporan	43,926,870	Kota Mataram, Mataram, Punia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN, Stake Holder lainnya	0 Laporan 12 laporan	48,319,557	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan BMD SKPD yang dihasilkan	Laporan		Laporan	5 Laporan	77,837,016						5 Laporan	85,620,717	
3 27 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang	Dokumen perencanaan RKBMD				1 Dokumen 0 Dokumen	11,937,342	Kota Mataram,	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN	1 Dokumen 0 Dokumen	13,131,076	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						Mataram, Punia							
3 27 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen RKBMD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen 0 Dokumen	14,090,452	Kota Mataram, Mataram, Punia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN	1 Dokumen 0 Dokumen	15,499,497	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen Penilaian RKBMD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen 0 Laporan	14,228,127	Kota Mataram, Mataram, Punia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN	1 Dokumen 0 Laporan	15,650,940	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan Penatausahaan RKBMD				0 Laporan 2 Dokumen	37,581,095	Kota Mataram, Mataram, Punia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN	0 Laporan 2 Dokumen	41,339,204	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan PAD (Laporan)	Laporan		Laporan	1 Laporan	17,590,292						1 Laporan	19,349,321	
3 27 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Laporan Pelaksanaan PAD				0 Laporan 1 Bulan	17,590,292	Kota Mataram, Mataram, Punia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN, Stake holder lainnya	0 Laporan 1 Bulan	19,349,321	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Yang Dibina dan diawasi	Orang		Orang	200 Orang	100,870,121						200 Orang	110,957,135	
3 27 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen Pendataan ASN Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen 0 Dokumen	14,090,452	Kota Mataram, Mataram, Punia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN	1 Dokumen 0 Dokumen	15,499,497	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Frekwensi koordinasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				4 kali 0 Dokumen	22,948,224	Kota Mataram, Mataram, Punia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN	4 kali 0 Dokumen	25,243,047	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Laporan penilaian kinerja ASN				0 Dokumen 1 laporan	9,592,728	Kota Mataram, Mataram, Punia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN	0 Dokumen 1 laporan	10,552,001	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai mengikuti diklat				2 Orang	22,687,367	Kota Mataram, Mataram, Punia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN	2 Orang	24,956,104	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				200 Orang	8,778,066	Kota Mataram, Mataram, Punia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN	200 Orang	9,655,873	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				2 Orang	22,773,284	Kota Mataram, Mataram, Punia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN	2 Orang	25,050,613	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Yang Dibina dan diawasi	Orang		Orang	200 Orang	533,358,054						200 Orang	633,991,117	
3 27 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan komponen listrik				0 Paket 10 jenis	9,009,215	Kota Mataram, Mataram, Punia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN	0 Paket 10 jenis	9,910,136	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Perlengkapan dan peralatan kantor diadakan				0 Paket 20 unit	241,494,300	Kota Mataram, Mataram, Punia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN	0 Paket 20 unit	341,494,300	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis logistik kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 jenis 0 Paket	23,432,416	Kota Mataram, Mataram, Punia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN	20 jenis 0 Paket	25,775,657	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				200 buku 0 Paket	18,816,944	Kota Mataram, Mataram, Punia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN	200 buku 0 Paket	20,698,638	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Jumlah Media massa				0 Dokumen 2 Media	9,347,398	Kota Mataram, Mataram, Punia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN	0 Dokumen 2 Media	10,282,138	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Makan minum yang disediakan				0 Laporan 1000 orang	26,581,598	Kota Mataram, Mataram, Punia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN	0 Laporan 1000 orang	29,239,758	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekwensi rapat dan konsultasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 kali 0 Laporan	200,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	10 kali 0 Laporan	191,446,688	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen 0 Dokumen	4,676,183	Kota Mataram, Mataram, Punia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN	1 Dokumen 0 Dokumen	5,143,802	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan BMD SKPD yang dihasilkan	Laporan		Laporan	5 Laporan	1,393,588,602						5 Laporan	1,532,947,462	
3 27 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Kendaraan Roda 4, Roda 2 dan Roda 3				0 Unit 10 unit	686,704,701	Kota Mataram, Mataram, Punia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN, Stakeholder lainnya	0 Unit 10 unit	755,375,171	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang dibangun Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 unit 0 Unit	706,883,901	Kota Mataram, Mataram, Punia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, Stakeholder lainnya	1 unit 0 Unit	777,572,291	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan	Layanan		Layanan	1 Layanan	1,245,333,948						1 Layanan	836,142,879	
3 27 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat				0 Laporan 1000 Surat	10,040,948	Kota Mataram, Mataram, Punia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, Stakeholder lainnya	0 Laporan 1000 Surat	11,045,043	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis Rekening Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 rekening 0 Laporan	277,600,000	Kota Mataram, Mataram, Punia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, Stakeholder lainnya	3 rekening 0 Laporan	267,312,810	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Petugas Kebersihan dan keamanan kantor				0 Laporan 25 orang	957,693,000	Kota Mataram, Mataram, Punia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, Stakeholder lainnya	0 Laporan 25 orang	557,785,026	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD terpelihara (Unit)	unit		unit	95 unit	403,650,095						95 unit	444,015,104	
3 27 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas dipelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				16 Unit 0 Unit	188,966,502	Kota Mataram, Mataram, Punia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	16 Unit 0 Unit	207,863,152	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah perlatan dan mesin dipelihara				0 Unit 20 unit	14,683,593	Kota Mataram, Mataram, Punia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	0 Unit 20 unit	16,151,952	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit 1 Unit	200,000,000	Kota Mataram, Mataram, Punia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	0 Unit 1 Unit	220,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah gedung kantor direhab													
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pertumbuhan Populasi Ternak	%		%	10 %	46,261,107,139						10 %	45,198,698,299	
3 27 02 1.06	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Distributor Obat Hewan Yang Diawasi (Toko/Depo)	Depo/toko		Depo/toko	10 Depo/toko	963,125,608						10 Depo/toko	69,438,170	
3 27 02 1.06 01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar Jumlah sampel obat hewan yang diambil				0 Laporan 10 sampel	536,586,113	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN, Stakeholder lainnya, masyarakat, peternak	0 Laporan 10 sampel	40,244,725	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 02 1.06 02	Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Dilakukan Penindakan Laporan yang dihasilkan				0 Kasus 1 laporan	426,539,495	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN, Stakeholder lainnya, masyarakat, peternak	0 Kasus 1 laporan	29,193,445	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 02 1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Alat Pengolah Pakan yang diadakan (Unit) Jumlah bibit ternak yang diadakan (Ekor)	Unit ekor		Unit ekor	15 Unit 1000 ekor	45,297,981,531						15 Unit 1000 ekor	45,129,260,129	
3 27 02 1.07 01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit ternak Sapi/Kerbau/Kambing /Unggas yang diadakan Jumlah Sarana dan prasarana kelompok yang diadakan				1000 ekor 50 unit	41,797,981,531	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Insentif Daerah		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN, Stakeholder lainnya, masyarakat, kelompok, peternak	1000 ekor 50 unit	41,337,796,667	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 02 1.07 02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah alat pengolah pakan yang diadakan Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain Jumlah Kelompok Pakan				15 unit 0 Ton 30 Kelompok	3,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN, Stakeholder lainnya, masyarakat, kelompok, peternak	15 unit 0 Ton 30 Kelompok	3,791,463,462	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Produksi Hasil Ternak yang dipasarkan	%		%	100 %	1,511,269,858						100 %	1,162,396,843	
3 27 03 1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Unit Pelayanan yang terpelihara (Unit)	Unit		Unit	4 Unit	206,477,480						4 Unit	227,125,228	
3 27 03 1.01 05	Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan	Jumlah Rumah Sakit Hewan yang Dibangun dan Dipelihara				1 Unit	206,477,480	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN, Stakeholder lainnya, masyarakat, peternak	1 Unit	227,125,228	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 03 1.02	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak yang dikembangkan (Lokasi)	Lokasi		Lokasi	2 Lokasi	1,304,792,378						2 Lokasi	935,271,615	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
3 27 03 1.02 01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan Laporan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak				0 Laporan 1 Laporan	749,092,137	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN, Stakeholder lainnya, Masyarakat, Peternak	0 Laporan 1 Laporan	164,001,350	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 03 1.02 02	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Frewensi Pengawasan Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak				12 kali 0 Laporan	555,700,241	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN, Stakeholder lainnya, Masyarakat, Peternak	12 kali 0 Laporan	771,270,265	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Ternak Yang Terinfeksi PHMS	%		%	<1 %	5,569,576,737						<1 %	6,456,534,413	
3 27 04 1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah PHMS yang dikendalikan (Penyakit)	Penyakit		Penyakit	5 Penyakit	1,377,031,019						5 Penyakit	1,594,734,121	
3 27 04 1.01 01	Pengendalian Risiko dan Penganggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Vaksin Anthrax, SE, Rabies dan AI yang diadakan Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penganggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				30000 Dosis 0 Laporan	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN, Stakeholder, masyarakat, kelompok, peternak	30000 Dosis 0 Laporan	550,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 04 1.01 02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen pemetaan yang dihasilkan Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Dokumen 0 Laporan	416,182,805	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN, Stakeholder, masyarakat, kelompok, peternak	1 Dokumen 0 Laporan	537,801,086	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 04 1.01 03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali Jumlah obat dan peralatan pelayanan				0 Laporan 20 jenis	460,848,214	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN, Stakeholder, masyarakat, kelompok, peternak	0 Laporan 20 jenis	506,933,035	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 04 1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan	Jumlah Unit Usaha Produk Peternakan/ RPH/RPU/TPH di awasi	Unit		Unit	61 Unit	1,431,226,609						61 Unit	1,684,349,270	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	(Unit)													
3 27 04 1.02 01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan Laporan hasil penilaian resiko keamanan produk hewan				0 Laporan 1 laporan	491,801,772	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN, Stakeholder, masyarakat, kelompok, peternak, pengusaha	0 Laporan 1 laporan	510,981,949	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 04 1.02 02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Frekwensi pengawasan Penerapan persyaratan teknis produk ternak Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan				4 kali 0 Laporan	478,840,198	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN, Stakeholder, masyarakat, kelompok, peternak, pengusaha	4 kali 0 Laporan	596,724,218	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 04 1.02 03	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Frekwensi pengawasan dan pemasukan produk hewan Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi				12 kali 0 Laporan	460,584,639	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN, Stakeholder, masyarakat, kelompok, peternak, pengusaha	12 kali 0 Laporan	576,643,103	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 04 1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah RPH dan Kelompok Pengolah Hasil peternakan yang tersertifikasi	Unit		Unit	5 Unit	1,924,045,978						5 Unit	2,096,450,577	
3 27 04 1.03 01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah RPH/ Unit Usaha Produk Ternak Ber NKV Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi				5 sertifikat 0 Unit	418,156,134	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN. Stake holder, masyarakat, kelompok, peternak, UMKM	5 sertifikat 0 Unit	539,971,748	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 04 1.03 02	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah UMKM Ber NKV/ Bersertifikat dibina Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner				15 unit usaha/kelompok 0 Laporan	1,505,889,844	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN. Stake holder, masyarakat, kelompok, peternak, UMKM	15 unit usaha/kelompok 0 Laporan	1,556,478,829	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 04 1.05	Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pemotongan Betina Produktif yang dikendalikan di RPH (%)	%		%	1 %	837,273,131						1 %	1,081,000,445	
3 27 04 1.05 01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah peserta Bimtek NKV				50 orang	417,242,515	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN, Stakeholder, Masyarakat, Kelompok, Peternak	50 orang	538,966,767	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 04 1.05 02	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani Jumlah RPH diawasi				0 Kasus 61 unit	420,030,616	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN, Stakeholder, Masyarakat, Kelompok, Peternak	0 Kasus 61 unit	542,033,678	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Ternak Berbasis Korporasi	%		%	100 %	1,836,021,632						100 %	2,179,623,796	
3 27 07 1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jenis produk hasil peternakan yang dipamerkan (Kegiatan)	Kegiatan		Kegiatan	10 Kegiatan	560,536,230						10 Kegiatan	686,589,853	
3 27 07 1.02 01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Frekwensi expo/pameran Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				10 kegiatan 0 Dokumen	560,536,230	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN, Stakeholder, Masyarakat, Peternak	10 kegiatan 0 Dokumen	686,589,853	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 07 1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah Kelompok berbasis Korporasi (Korporasi)	Korporasi		Korporasi	3 Korporasi	1,275,485,402						3 Korporasi	1,493,033,943	
3 27 07 1.03 01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah k0orporasi terbentuk Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi				3 Koorporasi 0 Unit	493,430,599	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN, Stakeholder, Masyarakat, Kelompok, Peternak	3 Koorporasi 0 Unit	502,773,659	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 07 1.03 02	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah koorporasi yang dievaluasi Jumlah Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani				5 lembaga 0 Laporan	444,498,718	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN, Stakeholder, Masyarakat, Kelompok, Peternak	5 lembaga 0 Laporan	548,948,590	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 07 1.03 03	Penilain Kelayakan dan Standarisasi Manajamen Koorporasi Petani	Dokumen yang dihasilkan Jumlah Koorporasi Petani yang Dinilai Kelayakan dan Standarisasi Manajemennya				5 Dokumen 0 Unit	337,556,085	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN, Stakeholder, Masyarakat, Kelompok, Peternak	5 Dokumen 0 Unit	441,311,694	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						11,872,205,163							3,183,376,587	
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	NILAI LAKIP OPD	Point		Point	A Point	9,475,437,204						A Point	861,411,634	
3 27 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan (Dokumen)	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	21,051,967						2 Dokumen	23,157,163	
3 27 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang dihasilkan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja				2 Dokumen 0 Laporan	21,051,967	Kab. Sumbawa, Moyo Hilir, Serading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN	2 Dokumen 0 Laporan	23,157,163	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
3 27 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Yang Dibina dan diawasi	Orang		Orang	65 Orang	11,703,647						65 Orang	12,874,012	
3 27 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jenis ATK yang diadakan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				8 jenis 0 Dokumen	1,034,895	Kab. Sumbawa, Moyo Hilir, Serading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, Stake holder, Masyarakat	8 jenis 0 Dokumen	1,138,384	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD Laporan Keuangan yang dihasilkan				0 Laporan 2 laporan	10,668,752	Kab. Sumbawa, Moyo Hilir, Serading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, Stake holder, Masyarakat	0 Laporan 2 laporan	11,735,628	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Yang Dibina dan diawasi	Orang		Orang	65 Orang	57,339,430						65 Orang	63,073,374	
3 27 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen listrik Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 jenis 0 Paket	404,945	Kab. Sumbawa, Moyo Hilir, Serading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, Stake holder, Masyarakat	1 jenis 0 Paket	445,440	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1000 lembar 0 Paket	579,591	Kab. Sumbawa, Moyo Hilir, Serading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, Stake holder, Masyarakat	1000 lembar 0 Paket	637,550	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekwensi rapat dan konsultasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 kali 0 Laporan	56,354,894	Kab. Sumbawa, Moyo Hilir, Serading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, Stake holder, Masyarakat	2 kali 0 Laporan	61,990,384	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan (Unit)	Unit		Unit	50 Unit	8,900,000,000						50 Unit	228,430,709	
3 27 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang dibangun Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				7 unit 0 Unit	8,900,000,000	Kab. Sumbawa, Moyo Hilir, Serading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik			ASN,	7 unit 0 Unit	228,430,709	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan	Layanan		Layanan	1 Layanan	441,623,637						1 Layanan	485,786,001	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat				0 Laporan 1000 Surat	1,038,321	Kab. Sumbawa, Moyo Hilir, Serading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, Stakeholder, Masyarakat, Peternak	0 Laporan 1000 Surat	1,142,154	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Rekening				0 Laporan 2 jenis	56,120,857	Kab. Sumbawa, Moyo Hilir, Serading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, Stakeholder, Masyarakat, Peternak	0 Laporan 2 jenis	61,732,942	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Petugas Kebersihan dan keamanan kantor				0 Laporan 12 Orang	384,464,459	Kab. Sumbawa, Moyo Hilir, Serading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, Stakeholder, Masyarakat, Peternak	0 Laporan 12 Orang	422,910,905	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD terpelihara (Unit)	Unit		Unit	20 Unit	43,718,523						20 Unit	48,090,375	
3 27 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas dipelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit 0 Unit	37,379,571	Kab. Sumbawa, Moyo Hilir, Serading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, Stakeholder, Masyarakat	2 Unit 0 Unit	41,117,528	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dipelihara				0 Unit 1 Unit	6,338,952	Kab. Sumbawa, Moyo Hilir, Serading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, Stakeholder, Masyarakat	0 Unit 1 Unit	6,972,847	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pertumbuhan Populasi Ternak	%		%	10 %	2,396,767,959						10 %	2,321,964,953	
3 27 02 1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah Bibit Ternak Unggul Yang Dihasilkan (Ekor)	ekor		ekor	100 ekor	1,800,000,000						100 ekor	1,908,781,770	
3 27 02 1.03 03	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan				1 Laporan	1,800,000,000	Kab. Sumbawa, Moyo Hilir, Serading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN, Stakeholder, masyarakat, kelompok, peternak	1 Laporan	1,908,781,770	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 02 1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Luas Lahan HPT yang dikelola (Ha)	Ha		Ha	15 Ha	351,049,199						15 Ha	386,154,119	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 02 1.04 02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				1 Laporan	351,049,199	Kab. Sumbawa, Moyo Hilir, Serading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN, Stakeholder,	1 Laporan	386,154,119	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 02 1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah HPT yang dihasilkan (Ton)	Ton		Ton	70 Ton	245,718,760						70 Ton	27,029,064	
3 27 02 1.05 01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi				1 Laporan	245,718,760	Kab. Sumbawa, Moyo Hilir, Serading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN, Stakeholder, masyarakat, peternak	1 Laporan	27,029,064	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						9,937,171,345						2,159,271,074		
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	NILAI LAKIP OPD	Point		Point	A Point	8,151,579,065						A Point	716,736,969	
3 27 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	29,980,804						5 Dokumen	32,978,885	
3 27 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Penyusunan Perencanaan				3 Dokumen	13,481,565	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Tata Usaha - Balai Inseminasi Buatan	3 Dokumen	14,829,722	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Tahunan				1 Laporan	4,746,998	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Tata Usaha - Balai Inseminasi Buatan	1 Laporan	5,221,698	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan Monev				0 Laporan 1 Laporan	11,752,241	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Tata Usaha - Balai Inseminasi Buatan	0 Laporan 1 Laporan	12,927,465	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang dihasilkan	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	14,799,610						5 Dokumen	16,279,570	
3 27 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jenis ATK yang diadakan				25 Jenia	3,250,361	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Tata Usaha - Balai Inseminasi Buatan	25 Jenia	3,575,397	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Jumlah Pengelola Keuangan				1 Orang	4,729,554	Kab. Lombok Barat, Kediri,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk		Tata Usaha - Balai Inseminasi Buatan	1 Orang	5,202,509	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Keuangan SKPD							Lelede		Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan					
3 27 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Frekwensi koordinasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4 kali 0 Dokumen	2,395,407	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Tata Usaha - Balai Inseminasi Buatan	4 kali 0 Dokumen	2,634,948	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				17 Laporan	4,424,288	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Tata Usaha - Balai Inseminasi Buatan	17 Laporan	4,866,716	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan BMD SKPD yang dihasilkan	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	6,136,480						4 Dokumen	6,750,127	
3 27 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen perencanaan RKBMD				1 Dokumen	793,693	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Tata Usaha - Balai Inseminasi Buatan	1 Dokumen	873,062	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen RKBMD				1 Dokumen	3,255,138	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Tata Usaha - Balai Inseminasi Buatan	1 Dokumen	3,580,651	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen Penilaian RKBMD				1 Dokumen	1,180,571	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Tata Usaha - Balai Inseminasi Buatan	1 Dokumen	1,298,629	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Penatausahaan RKBMD				1 laporan	907,078	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Tata Usaha - Balai Inseminasi Buatan	1 laporan	997,785	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan PAD	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	10,210,852						2 Dokumen	11,231,938	
3 27 01 1.04 01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen Perencanaan PAD				1 Dokumen	5,076,353	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Tata Usaha - Balai Inseminasi Buatan	1 Dokumen	5,583,989	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan Pelaksanaan PAD				1 laporan	5,134,499	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Tata Usaha - Balai Inseminasi Buatan	1 laporan	5,647,949	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekap Absensi yang dihasilkan Jumlah Pengawai Yang Dibina dan diawasi	Laporan Orang		Laporan Orang	12 Laporan 42 Orang	2,629,549						12 Laporan 42 Orang	2,892,504	
3 27 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah pegawai diawasi				42 Orang	949,026	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Tata Usaha - Balai Inseminasi Buatan	42 Orang	1,043,928	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Laporan Absen Pegawai				12 Laporan	1,680,523	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Tata Usaha - Balai Inseminasi Buatan	12 Laporan	1,848,576	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pelayanan Umum Kantor	Laporan		Laporan	12 Laporan	25,951,911						12 Laporan	28,547,101	
3 27 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Jenis	3,187,024	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Tata Usaha - Balai Inseminasi Buatan	5 Jenis	3,505,726	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan dan peralatan kantor diadakan				1 Buah	694,118	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Tata Usaha - Balai Inseminasi Buatan	1 Buah	763,530	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis logistik kantor				15 Jenis	3,088,176	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Tata Usaha - Balai Inseminasi Buatan	15 Jenis	3,396,993	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan				125 buah	2,803,468	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Tata Usaha - Balai Inseminasi Buatan	125 buah	3,083,815	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Media massa				1 Media	5,606,936	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Tata Usaha - Balai Inseminasi Buatan	1 Media	6,167,629	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan minum yang disediakan				170 Orang	2,784,778	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Tata Usaha - Balai Inseminasi Buatan	170 Orang	3,063,256	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekwensi rapat dan konsultasi				1 kali	7,787,411	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Tata Usaha - Balai Inseminasi Buatan	1 kali	8,566,152	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	Unit		Unit	2 Unit	7,416,626						2 Unit	8,158,289	
3 27 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin				2 unit	7,416,626	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Tata Usaha - Balai Inseminasi Buatan	2 unit	8,158,289	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Urusan Penunjang	Laporan		Laporan	12 Laporan	310,739,902						12 Laporan	341,813,891	
3 27 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat				300 Surat	1,865,241	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Tata Usaha - Balai Inseminasi Buatan	300 Surat	2,051,765	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan				3 Jenis	56,925,971	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Tata Usaha - Balai Inseminasi Buatan	3 Jenis	62,618,568	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dipelihara				10 Unit	2,751,552	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Tata Usaha - Balai Inseminasi Buatan	10 Unit	3,026,707	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan, Keamanan dan Tenaga Administrasi yang dibayarkan				10 Orang	249,197,138	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Tata Usaha - Balai Inseminasi Buatan	10 Orang	274,116,851	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD terpelihara	Unit		Unit	16 Unit	7,743,713,331						16 Unit	268,084,664	
3 27 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas dipelihara				1 Unit	18,689,785	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Tata Usaha - Balai Inseminasi Buatan	1 Unit	20,558,764	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas pelihara (Roda 2 dan Roda 3)				3 Unit	14,661,098	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Tata Usaha - Balai Inseminasi Buatan	3 Unit	16,127,208	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlatan dan mesin dipelihara				9 Unit	10,362,448	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Tata Usaha - Balai Inseminasi Buatan	9 Unit	11,398,692	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah gedung kantor direhab				0 Unit 6 Unit	7,700,000,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Tata Usaha - Balai Inseminasi Buatan	0 Unit 6 Unit	220,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PERSENTASE PENINGKATAN POPULASI TERNAK	%		%	10 %	1,785,592,280						10 %	1,442,534,105	
3 27 02 1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Semen Beku dihasilkan	Straw		Straw	145000 Straw	1,785,592,280						145000 Straw	1,442,534,105	
3 27 02 1.05 01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi				1 Laporan	1,400,000,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Produksi dan Mutu - Balai Inseminasi Buatan	1 Laporan	1,232,673,613	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 02 1.05 02	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan yang Beredar Sampel Straw yang diperiksa				5 Ton 200 sample	280,247,820		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Produksi dan Mutu - Balai Inseminasi Buatan	5 Ton 200 sample	198,272,602	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 02 1.05 03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat				1 Laporan	105,344,460	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Produksi dan Mutu - Balai Inseminasi Buatan	1 Laporan	11,587,890	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						1,785,360,359						1,194,158,481		
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	NILAI LAKIP OPD	Point		Point	A Point	581,004,923						A Point	639,367,503	
3 27 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan (Dokumen) Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan (Dokumen)	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	4 Dokumen 5 Dokumen	24,000,000						4 Dokumen 5 Dokumen	26,662,089	
3 27 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen penyusunan perencanaan (Dokumen)				5 Dokumen 5 Dokumen	14,000,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Stake Holder Lainnya	5 Dokumen 5 Dokumen	15,633,569	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Dokumen penyusunan perencanaan (Dokumen)													
3 27 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Bulanan /Triwulan /Semesteran (Laporan) Laporan Bulanan /Triwulan /Semesteran (Laporan)				12 Laporan 12 Laporan	10,000,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Stake Holder Lainnya	12 Laporan 12 Laporan	11,028,520	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang dihasilkan (Laporan) Jumlah Laporan Keuangan yang dihasilkan (Laporan)	Laporan Laporan		Laporan Laporan	4 Laporan 5 Laporan	20,094,738						4 Laporan 5 Laporan	22,104,212	
3 27 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jenis ATK yang diadakan (Jenis) Jumlah ATK yang diadakan (Jenis)				45 Jenis 45 Jenis	20,094,738	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN dan Stake Holder lainnya	45 Jenis 45 Jenis	22,104,212	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pengawai Yang Dibina dan diawasi Jumlah Pengawai Yang Dibina dan diawasi	Orang Orang		Orang Orang	13 Orang 20 Orang	72,994,618						13 Orang 20 Orang	80,294,079	
3 27 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Perlengkapan dan peralatan kantor diadakan (Unit) Jenis Perlengkapan dan peralatan kantor diadakan (Unit)				10 Jenis 10 jenis	53,005,373	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN dan Stake Holder Lainnya	10 Jenis 10 jenis	58,305,911	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan (Lembar) Jumlah barang cetakan dan pengadaan (Lembar)				10000 lembar 10000 Lembar	2,496,644	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN dan Stake Holder Lainnya	10000 lembar 10000 Lembar	2,746,308	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Media massa Jumlah Media massa yang di sediakan				1 Exemplar 1 Exemplar	1,308,285	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN dan Stake Holder Lainnya	1 Exemplar 1 Exemplar	1,439,113	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekwensi rapat dan konsultasi Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 kali 4 Kali	16,184,316	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN dan Stake Holder Lainnya	4 kali 4 Kali	17,802,747	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen RKBMD (Dokumen) Dokumen RKBMD (Dokumen) Jumlah BMD yang diadakan (Unit)	Dokumen Dokumen Unit		Dokumen Dokumen Unit	2 Dokumen 5 Dokumen 5 Unit	170,464,340						2 Dokumen 5 Dokumen 5 Unit	187,510,774	
3 27 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang dibangun Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang				1 Unit 1 Unit	170,464,340	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Stake Holder Lainnya	1 Unit 1 Unit	187,510,774	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Disediakan													
3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan	Pelayanan		Pelayanan	1 Pelayanan	261,003,683						1 Pelayanan	287,104,051	
3 27 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Jumlah Surat yang di sediakan				500 Surat 500 Surat	1,791,935	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Stake Holder lainnya	500 Surat 500 Surat	1,971,129	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Jumlah Rekening yang di bayarkan				4 Rekening 4 Rekening	51,474,784	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Stake Holder lainnya	4 Rekening 4 Rekening	56,622,262	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dipelihara				4 Unit 4 Unit	9,874,437	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Stake Holder lainnya	4 Unit 4 Unit	10,861,880	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan, pengadministrasian dan keamanan kantor Jumlah Petugas Kebersihan,pengadministrasian dan keamanan kantor				6 Orang 6 Orang	197,862,527	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Stake Holder lainnya	6 Orang 6 Orang	217,648,780	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD terpelihara (Unit)	unit		unit	95 unit	32,447,544						95 unit	35,692,298	
3 27 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas dipelihara (Unit) Jumlah kendaraan dinas dipelihara (Unit)				5 unit 5 Unit	22,645,790	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	5 unit 5 Unit	24,910,369	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlatan dan mesin dipelihara (Unit) Jumlah perlatan dan mesin dipelihara (Unit)				8 Unit 8 Unit	9,801,754	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	8 Unit 8 Unit	10,781,929	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PERSENTASE TERNAK YANG TERINFEKSI PHMS (%)	Persen		Persen	<1 Persen	1,204,355,436						<1 Persen	554,790,978	
3 27 04 1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah PHMS yang dikendalikan (Penyakit)	Penyakit		Penyakit	5 Penyakit	892,081,223						5 Penyakit	321,289,344	
3 27 04 1.01 01	Pengendalian Risiko dan Penganggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Vaksin Anthrax, SE dan AI yang diadakan (Dosis)				50 Dosis	433,732,986	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Masyarakat/Peta ni Ternak	50 Dosis	147,106,284	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 04 1.01 03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali Jumlah obat hewan dan peralatan pelayanan (jenis) Jumlah obat hewan dan peralatan pelayanan (jenis)				0 Laporan 20 Jenis 20 Jenis	458,348,237	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Masyarakat/Peta ni Ternak	0 Laporan 20 Jenis 20 Jenis	174,183,060	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 04 1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha Produk Peternakan/ RPH/RPU/TPH di awasi (Unit)	Unit		Unit	61 Unit	312,274,213						61 Unit	233,501,634	
3 27 04 1.03 03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah pemeriksaan laboratorium penyakit hewan yang tersedia (Pnyakit)				5 Penyakit	312,274,213	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Masyarakat/Peta ni Ternak	5 Penyakit	233,501,634	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						7,277,755,294		2,246,458,694						
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	NILAI LAKIP OPD	Point		Point	A Point	354,752,891						A Point	354,752,891	
3 27 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan (Dokumen)	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	28,349,507						2 Dokumen	28,349,507	
3 27 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Kinerja yang dihasilkan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Dokumen 0 Laporan	28,349,507	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN, Stakeholder	4 Dokumen 0 Laporan	28,349,507	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang dihasilkan (Laporan)	Laporan		Laporan	1 Laporan	20,458,711						1 Laporan	20,458,711	
3 27 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Laporan Keuangan Yang Dihasilkan				0 Dokumen 1 Laporan	20,458,711	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN, Stake holder	0 Dokumen 1 Laporan	20,458,711	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah BMD yang diadakan (Unit)	Unit		Unit	15 Unit	4,806,753						15 Unit	4,806,753	
3 27 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen perencanaan RKBMD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik				1 Dokumen 0 Dokumen	4,806,753	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN, Stake holder,	1 Dokumen 0 Dokumen	4,806,753	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Daerah SKPD													
3 27 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Yang Dibina dan diawasi	Orang		Orang	25 Orang	42,068,713						25 Orang	42,068,713	
3 27 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen listrik Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 jenis 0 Paket	4,040,939		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN, Stakeholder	6 jenis 0 Paket	4,040,939	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Perlengkapan dan peralatan kantor diadakan				0 Paket 2 Unit	36,883,336	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN, Stakeholder	0 Paket 2 Unit	36,883,336	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1000 lembar 0 Paket	1,144,438	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN, Stakeholder	1000 lembar 0 Paket	1,144,438	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	Unit		Unit	50 Unit	22,843,071						50 Unit	22,843,071	
3 27 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Kendaraan Roda 2				0 Unit 1 Unit	22,843,071	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		ASN	0 Unit 1 Unit	22,843,071	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan	Layanan		Layanan	1 Layanan	151,615,401						1 Layanan	151,615,401	
3 27 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat				0 Laporan 500 Surat	3,129,158	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN, Stakeholder, Masyarakat	0 Laporan 500 Surat	3,129,158	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Rekening				0 Laporan 3 jenis	10,279,382	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN, Stakeholder, Masyarakat	0 Laporan 3 jenis	10,279,382	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Petugas Kebersihan dan keamanan kantor				0 Laporan 4 Orang	138,206,861	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN, Stakeholder, Masyarakat	0 Laporan 4 Orang	138,206,861	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD terpelihara (Unit)	Unit		Unit	30 Unit	84,610,735						30 Unit	84,610,735	
3 27 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	Jumlah kendaraan dinas dipelihara				8 Unit 0 Unit	67,227,158	Kab. Lombok Barat, Kediri,	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN	8 Unit 0 Unit	67,227,158	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya						Lelede							
3 27 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah perlatan dan mesin dipelihara				0 Unit 8 Unit	17,383,577	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN	0 Unit 8 Unit	17,383,577	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pertumbuhan Populasi Ternak	%		%	10 %	2,149,002,403						10 %	1,813,902,645	
3 27 02 1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Luas Lahan HPT yang dikelola (Ha)	Ha		Ha	15 Ha	1,426,229,938						15 Ha	1,018,852,933	
3 27 02 1.04 01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi Jumlah Laporan yang dihasilkan				0 Dokumen 10 laporan	905,060,426		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN, Stakeholder, Masyarakat, kelompok, peternak	0 Dokumen 10 laporan	885,566,469	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 02 1.04 02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi Laporan sosialisai, pembinaan dan pengawasan mutu pakan yang dihasilkan				0 Laporan 1 laporan	521,169,512	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN, Stakeholder, Masyarakat, kelompok, peternak	0 Laporan 1 laporan	133,286,464	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 02 1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah HPT yang dihasilkan (Ton) Jumlah Semen Beku dihasilkan (Straw)	Ton Straw		Ton Straw	70 Ton 145000 Straw	722,772,465						70 Ton 145000 Straw	795,049,712	
3 27 02 1.05 01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi Pakan ternak yang dihasilkan				0 Laporan 25 ton	722,772,465	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN, Stakeholder, masyarakat, kelompok, peternak	0 Laporan 25 ton	795,049,712	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA	Cakupan Produksi Hasil Ternak yang dipasarkan	%		%	100 %	4,774,000,000						100 %	77,803,158	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
 Provinsi Nusa Tenggara Barat
 Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
	PERTANIAN															
3 27 03 1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah BMD yang diadakan (Unit)	unit		unit	5 unit	4,774,000,000						5 unit	77,803,158		
3 27 03 1.01 10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi Jumlah sarana dan prasarana kantor di Pelihara				0 Unit 3 Unit	4,774,000,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	0 Unit 3 Unit	77,803,158	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
TOTAL							110,031,346,671							82,793,510,934		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
														Nasional	Daerah							
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						34,700,980,694									0		
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	16,216,439,954						BB Nilai	0				
2	23	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Dokumen		Dokumen	15 Dokumen	279,365,100						15 Dokumen	0				
2	23	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	89,365,100	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dokumen RENJA, LAKIP, Perubahan RKA, DPA dan Laporan Tahunan.	2 Dokumen	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
2	23	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	22,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dokumen RENJA, LAKIP, Perubahan RKA, DPA dan Laporan Tahunan.	1 Dokumen	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
2	23	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	25,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dokumen RENJA, LAKIP, Perubahan RKA, DPA dan Laporan Tahunan.	2 Dokumen	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
2	23	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	21,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dokumen RENJA, LAKIP, Perubahan RKA, DPA dan Laporan Tahunan.	1 Dokumen	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
2	23	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	30,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dokumen RENJA, LAKIP, Perubahan RKA, DPA dan Laporan Tahunan.	1 Dokumen	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
2	23	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				20 Laporan	12,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dokumen RENJA, LAKIP, Perubahan RKA, DPA dan Laporan Tahunan.	20 Laporan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
2	23	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	80,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dokumen RENJA, LAKIP, Perubahan RKA, DPA dan Laporan Tahunan.	6 Laporan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
2	23	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan	%		%	100 %	13,943,470,641						100 %	0				

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 23 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				105 Orang/ Bulan	13,759,465,741	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Gaji dan tunjangan ASN Perangkat Daerah serta dokumen laporan keuangan.	105 Orang/ Bulan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	146,900,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Gaji dan tunjangan ASN Perangkat Daerah serta dokumen laporan keuangan.	12 Dokumen	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	15,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Gaji dan tunjangan ASN Perangkat Daerah serta dokumen laporan keuangan.	12 Dokumen	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	5,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Gaji dan tunjangan ASN Perangkat Daerah serta dokumen laporan keuangan.	2 Dokumen	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	10,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Gaji dan tunjangan ASN Perangkat Daerah serta dokumen laporan keuangan.	1 Laporan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Gaji dan tunjangan ASN Perangkat Daerah serta dokumen laporan keuangan.	1 Dokumen	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				18 Laporan	4,921,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Gaji dan tunjangan ASN Perangkat Daerah serta dokumen laporan keuangan.	18 Laporan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	683,900	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Gaji dan tunjangan ASN Perangkat Daerah serta dokumen laporan keuangan.	2 Dokumen	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	3,884,113						100 %	0	
2 23 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	500,113	Kota Mataram, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dokumen laporan BMD SKPD	1 Dokumen	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Milik Daerah SKPD							Kecamatan, Semua Kelurahan							
2 23 01 1.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1,145,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dokumen laporan BMD SKPD	1 Laporan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	255,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dokumen laporan BMD SKPD	2 Laporan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1,984,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dokumen laporan BMD SKPD	1 Laporan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Dokumen Kepegawaian	%		%	100 %	40,195,100						100 %	0	
2 23 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	25,601,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Perangkat Daerah	1 Unit	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	12,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Perangkat Daerah	2 Dokumen	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1,083,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Perangkat Daerah	1 Dokumen	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	795,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Perangkat Daerah	12 Dokumen	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				105 Orang	215,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Perangkat Daerah	105 Orang	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	348,019,000						100 %	0	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 23 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	14,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bahan cetakan, penggandaan, peralatan dan perlengkapan perangkat daerah.	1 Paket	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	26,819,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bahan cetakan, penggandaan, peralatan dan perlengkapan perangkat daerah.	1 Paket	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	25,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bahan cetakan, penggandaan, peralatan dan perlengkapan perangkat daerah.	1 Paket	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	30,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bahan cetakan, penggandaan, peralatan dan perlengkapan perangkat daerah.	1 Paket	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	7,200,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bahan cetakan, penggandaan, peralatan dan perlengkapan perangkat daerah.	1 Dokumen	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				24 Laporan	40,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bahan cetakan, penggandaan, peralatan dan perlengkapan perangkat daerah.	24 Laporan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	200,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bahan cetakan, penggandaan, peralatan dan perlengkapan perangkat daerah.	30 Laporan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				500 Dokumen	5,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bahan cetakan, penggandaan, peralatan dan perlengkapan perangkat daerah.	500 Dokumen	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	0						100 %	0	
2 23 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah	20 Unit	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 23 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah	2 Unit	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Umum	%		%	100 %	1,284,306,000						100 %	0	
2 23 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	1,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Layanan Umum Kantor.	2 Laporan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	300,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Layanan Umum Kantor.	4 Laporan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	983,306,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Layanan Umum Kantor.	12 Laporan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	317,200,000						100 %	0	
2 23 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				7 Unit	133,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	7 Unit	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				41 Unit	184,200,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	41 Unit	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 50 Unit	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	0 Unit 50 Unit	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	2 Unit	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau				2 Unit	0	Kota Mataram, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemeliharaan sarana dan prasarana	2 Unit	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						Kecamatan, Semua Kelurahan				kantor			
2 23 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Jumlah Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	%		%	100 %	17,459,540,740						100 %	0	
2 23 02 1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	Perpustakaan		Perpustakaan	100 Perpustakaan	5,902,213,200						100 Perpustakaan	0	
2 23 02 1.01 01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service				100 Perpustakaan	2,079,033,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perpustakaan pada satuan pendidika menengah dan pendidikan khusus, komunitas literasi, perpustakaan umum dan perpustakaan desa.	100 Perpustakaan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 02 1.01 02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya				10 Perpustakaan	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perpustakaan pada satuan pendidika menengah dan pendidikan khusus, komunitas literasi, perpustakaan umum dan perpustakaan desa.	10 Perpustakaan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 02 1.01 04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				100 Perpustakaan	788,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perpustakaan pada satuan pendidika menengah dan pendidikan khusus, komunitas literasi, perpustakaan umum dan perpustakaan desa.	100 Perpustakaan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 02 1.01 09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				10000 Eksemplar	2,534,579,900	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik			Perpustakaan pada satuan pendidika menengah dan pendidikan khusus, komunitas literasi, perpustakaan umum dan perpustakaan desa.	10000 Eksemplar	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 02 1.01 10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan,				10 Dokumen	400,000,000	Semua Kab/Kota,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perpustakaan pada satuan pendidika	10 Dokumen	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi						Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				menengah dan pendidikan khusus, komunitas literasi, perpustakaan umum dan perpustakaan desa.			
2 23 02 1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Kegiatan		Kegiatan	10 Kegiatan	11,557,327,540						10 Kegiatan	0	
2 23 02 1.02 01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus				10 Lokus	11,257,327,540	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat, satuan pendidikan tingkat menengah dan pendidikan khusus.	10 Lokus	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 02 1.02 04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan				24 Perpustakaan	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat, satuan pendidikan tingkat menengah dan pendidikan khusus.	24 Perpustakaan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Peningkatan Jumlah Pelestarian Kckr Dan Naskah Kuno Milik Daerah	%		%	100 %	1,025,000,000						100 %	0	
2 23 03 1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Jumlah Pengelolaan Karya Cetak Karya Rekam	Judul		Judul	550 Judul	300,000,000						550 Judul	0	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 23 03 1.01 01	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR				550 Eksemplar	150,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penerbit, swasta dan instansi pemerintah di 10 Kab/Kota.	550 Eksemplar	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 03 1.01 02	Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam				10 Penerbit	150,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penerbit, swasta dan instansi pemerintah di 10 Kab/Kota.	10 Penerbit	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 03 1.02	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Jumlah Pengelolaan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi	Eksemplar		Eksemplar	800 Eksemplar	175,000,000						800 Eksemplar	0	
2 23 03 1.02 01	Penerbitan Katalog Induk Daerah	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan				600 Entry	100,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perpustakaan kab/kota, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan sekolah tingkat SMA/SMK di 10 Kab/kota.	600 Entry	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 03 1.02 02	Penerbitan Bibliografi Daerah	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan				260 Naskah	75,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perpustakaan kab/kota, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan sekolah tingkat SMA/SMK di 10 Kab/kota.	260 Naskah	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 03 1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Jumlah Pengelolaan dan Pelestarian Naskah Kuno Daerah	Naskah		Naskah	10 Naskah	400,000,000						10 Naskah	0	
2 23 03 1.03 01	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno				10 Orang	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sosialisasi, pendataan dan pendaftaran Naskah Kuno milik Masyarakat di 10 kab/kota	10 Orang	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 03 1.03 02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kunah yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan				10 Eksemplar	250,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sosialisasi, pendataan dan pendaftaran Naskah Kuno milik Masyarakat di 10 kab/kota	10 Eksemplar	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 03 1.04	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh	Jumlah pengelolaan koleksi budaya etnis nusantara.	Judul		Judul	50 Judul	150,000,000						50 Judul	0	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Pemerintah Daerah Provinsi														
2 23 03 1.04 01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi				50 Eksemplar	75,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan instansi pemerintah di 10 Kab/kota.	50 Eksemplar	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 03 1.04 02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi				50 Eksemplar	75,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan instansi pemerintah di 10 Kab/kota.	50 Eksemplar	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						1,800,000,000						0		
2 24 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase peningkatan jumlah pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis	%		%	100 %	1,550,000,000						100 %	0	
2 24 02 1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah Pengolahan Arsip Dinamis	Berkas		Berkas	252462 Berkas	950,000,000						252462 Berkas	0	
2 24 02 1.01 01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptaan dan Digunakan				10000 Berkas	150,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			lingkup Pemerintah Provinsi	10000 Berkas	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 24 02 1.01 02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				83905 Berkas	350,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			lingkup Pemerintah Provinsi	83905 Berkas	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 24 02 1.01 03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi				5 Laporan	450,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			lingkup Pemerintah Provinsi	5 Laporan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 24 02 1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Jumlah Arsip Statis yang Terselamatkan dan Dilestarikan	Berkas		Berkas	6000 Berkas	300,000,000						6000 Berkas	0	
2 24 02 1.02 02	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses				100 Arsip	300,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Provinsi	100 Arsip	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
2 24 02 1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Nasional	Berkas		Berkas	500 Berkas	300,000,000						500 Berkas	0		
2 24 02 1.03 01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN				150 Pengguna	300,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Provinsi	150 Pengguna	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2 24 03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase peningkatan jumlah arsip yang terselamatkan	%		%	100 %	250,000,000						100 %	0		
2 24 03 1.01	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah arsip dipermanenkan dan dimusnahkan	Berkas		Berkas	10000 Berkas	250,000,000						10000 Berkas	0		
2 24 03 1.01 01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				10000 Arsip	250,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Provinsi	10000 Arsip	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
TOTAL							36,500,980,694								0	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						12,828,992,783							14,112,392,060		
3	29	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	10,821,314,183						BB Nilai	11,903,945,600		
3	29	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	7 Sub Kegiatan	560,148,091						7 Sub Kegiatan	616,162,897		
3	29	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	101,411,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Dokumen	111,553,090	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3	29	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	63,324,422	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Dokumen	69,656,864	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3	29	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	55,944,323	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Dokumen	61,538,755	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3	29	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	52,091,988	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Dokumen	57,301,186	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3	29	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	57,099,699	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Dokumen	62,809,668	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3	29	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	56,712,359	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Laporan	62,383,594	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 29 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	173,563,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Laporan	190,919,740	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tersusunnya administrasi keuangan	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	8 Sub Kegiatan	8,338,948,714						8 Sub Kegiatan	9,172,843,585	
3 29 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				78 Orang/ Bulan	8,235,961,174	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	78 Orang/ Bulan	9,059,557,291	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	43,260,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Dokumen	47,586,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	5,763,370	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Dokumen	6,339,707	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	22,064,180	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Dokumen	24,270,598	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	19,101,940	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Laporan	21,012,134	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 29 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1,283,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Dokumen	1,411,630	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				1 Laporan	5,725,750	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Laporan	6,298,325	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	5,789,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Dokumen	6,367,900	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Laporan		Laporan	1 Laporan	28,024,777						1 Laporan	30,327,255	
3 29 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	11,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Dokumen	12,150,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Dokumen	5,500,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	4,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Laporan	4,400,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi	1 Laporan	5,500,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan		pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	perkantoran				
3 29 01 1.03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	2,524,777	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Dokumen	2,777,255	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	45,720,457						1 Laporan	50,292,503	
3 29 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	6,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Unit	6,600,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket 1 Paket	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	0 Paket 1 Paket	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	4,720,457	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Dokumen	5,192,503	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	35,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	5 Orang	38,500,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang administrasi umum kantor	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	8 Sub Kegiatan	464,442,408						8 Sub Kegiatan	510,886,649	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 29 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Jenis	12,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	10 Jenis	13,200,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Jenis	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	5 Jenis	33,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Jenis	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	2 Jenis	3,300,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Jenis	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	6 Jenis	22,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Jenis	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	10 Jenis	22,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang Disediakan				29 Jenis	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	29 Jenis	11,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	28,253,195	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi	1 Laporan	31,078,515	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan			pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	perkantoran			
3 29 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	341,189,213	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Laporan	375,308,134	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan	500,000,000						3 Sub Kegiatan	551,000,000	
3 29 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	400,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Unit	440,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.07 04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan				1 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Unit	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan				2 Buah	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	2 Buah	27,500,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	6 Unit	83,500,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran yang berkualitas	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan	512,184,833						3 Sub Kegiatan	563,403,317	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 29 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2500 Surat	6,142,306	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	2500 Surat	6,756,537	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Rekening	226,042,527	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	3 Rekening	248,646,780	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				24 Buah	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	24 Buah	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				9 Orang	280,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	9 Orang	308,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana perkatoran yang berkualitas	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	4 Sub Kegiatan	371,844,903						4 Sub Kegiatan	409,029,394	
3 29 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				7 Unit	67,657,256	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	7 Unit	74,422,982	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	206,392,801	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	8 Unit	227,032,081	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 29 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	27,495,479	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	30 Unit	30,245,027	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	70,299,367	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Unit	77,329,304	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan	%		%	100 %	327,000,000						100 %	359,700,000	
3 29 02 1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah CAT yang dievaluasi	CAT		CAT	1 CAT	160,000,000						1 CAT	176,000,000	
3 29 02 1.01 01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				10 Dokumen	35,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	10 Dokumen	38,500,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 02 1.01 02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi				1 Dokumen	95,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	1 Dokumen	104,500,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 02 1.01 03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				1 Laporan	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	1 Laporan	33,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 02 1.02	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air	Jumlah Izin pengeboran, penggalian, pemakaian serta pengusahaan air	Izin		Izin	30 Izin	75,000,000						30 Izin	82,500,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Tanah dalam Daerah Provinsi	tanah													
3 29 02 1.02 02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan				60 Rekomendasi	40,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	60 Rekomendasi	44,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 02 1.02 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Jumlah Izin yang dikendalikan dan diawasi				50 Izin	35,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	50 Izin	38,500,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 02 1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen NPA	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	92,000,000						4 Dokumen	101,200,000	
3 29 02 1.03 01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul				3 Dokumen	32,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pengguna sumur bor	3 Dokumen	35,200,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 02 1.03 02	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				3 Laporan	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pengguna sumur bor	3 Laporan	33,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 02 1.03 03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				1 Laporan	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pengguna sumur bor	1 Laporan	33,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase IUP yang melaksanakan kaidah usaha pertambangan yang baik dan benar Persentase wilayah izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan	% %		% %	10,87 % 39,00 %	210,000,000						10,87 % 39,00 %	231,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		yang baik dan benar (good mining practices)													
3 29 03 1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah izin pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang	Izin		Izin	10 Izin	85,000,000						10 Izin	93,500,000	
3 29 03 1.03 03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan				50 Izin	35,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara	50 Izin	38,500,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 03 1.03 04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah izin yang dikendalikan dan diawasi				40 Izin	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara	40 Izin	55,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 03 1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah laporan koordinasi	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	80,000,000						5 Dokumen	88,000,000	
3 29 03 1.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat				5 Laporan	40,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara	5 Laporan	44,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 29 03 1.04 04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah IPR yang dikendalikan				10 IPR	40,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara	10 IPR	44,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 03 1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan harga patokan mineral bukan logam dan batuan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	45,000,000						1 Dokumen	49,500,000	
3 29 03 1.07 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam				1 Laporan	45,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara	1 Laporan	49,500,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi (%) Prosentase Energi Terbarukan Dalam Pembangkit Listrik	% %		% %	19,18 % 5,57 %	417,000,000						19,18 % 5,57 %	458,700,000	
3 29 05 1.03	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Izin	Izin		Izin	2 Izin	50,000,000						2 Izin	55,000,000	
3 29 05 1.03 02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun				2 Rekomendasi	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	2 Rekomendasi	27,500,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 05 1.03 04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar				2 Izin	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan	Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	2 Izin	27,500,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun									pengembangan sektor unggulan (PD-2)				
3 29 05 1.04	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Jumlah fasilitas EBT yang dibangun dan direhab (Unit)	Unit		Unit	1 Unit	367,000,000						1 Unit	403,700,000	
3 29 05 1.04 01	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Jumlah kebijakan				1 Dokumen	77,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	1 Dokumen	84,700,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 05 1.04 03	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi				100 Orang	40,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	100 Orang	44,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 05 1.04 04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Jumlah fasilitas EBT yang dibangun Jumlah fasilitas EBT yang di Rehabilitasi				20 Unit 1 Unit	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	20 Unit 1 Unit	275,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Rasio elektrifikasi (%)	% %		% %	99,99 % 99,99 %	1,053,678,600						99,99 % 99,99 %	1,159,046,460	
3 29 06 1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah izin operasi ketenagalistrikan yang dikendalikan (izin)	Izin		Izin	20 Izin	55,000,000						20 Izin	60,500,000	
3 29 06 1.02 02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan				32 Rekomendasi	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pemegang izin ketenagalistrikan	32 Rekomendasi	33,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 06 1.02 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah izin yang dikendalikan dan diawasi				32 Izin	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan	Pemegang izin ketenagalistrikan	32 Izin	27,500,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
											pengembangan sektor unggulan (PD-2)				
3 29 06 1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Rumah Tangga Sasaran	RTS		RTS	575 RTS	998,678,600						575 RTS	1,098,546,460	
3 29 06 1.06 01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				1 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat	1 Dokumen	55,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 06 1.06 06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				575 RTS	948,678,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat	575 RTS	1,043,546,460	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						419,782,400							460,860,640	
3 29 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	327,461,000						BB Nilai	360,207,100	
3 29 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	0						1 Sub Kegiatan	0	
3 29 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	0	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Dokumen	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang administrasi umum kantor	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	4 Sub Kegiatan	34,563,000						4 Sub Kegiatan	38,019,300	
3 29 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	3,785,100	Kab. Sumbawa, Sumbawa,	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan	2 Paket	4,163,610	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan			mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	administrasi perkantoran			
3 29 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4,246,700	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Paket	4,671,370	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				95 Orang 1 Laporan	1,531,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	95 Orang 1 Laporan	1,684,320	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	25,000,000	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Laporan	27,500,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	4 Sub Kegiatan	271,088,000						4 Sub Kegiatan	298,196,800	
3 29 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	540,000	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Laporan	594,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	39,384,000	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Laporan	43,322,400	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 29 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1,176,000	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Laporan	1,293,600	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Orang	229,988,000	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	7 Orang	252,986,800	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana perkatoran yang berkualitas	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	21,810,000						1 Sub Kegiatan	23,991,000	
3 29 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	21,810,000	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	2 Unit	23,991,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Jumlah zona pemanfaatan air tanah yang dikendalikan	Zona		Zona	1 Zona	22,000,000						1 Zona	23,300,000	
3 29 02 1.02	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah CAT yang dievaluasi Jumlah data pengusahaan air tanah	Zona Izin		Zona Izin	1 Zona 10 Izin	22,000,000						1 Zona 10 Izin	23,300,000	
3 29 02 1.02 02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan				9 Rekomendasi	12,000,000	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	9 Rekomendasi	13,200,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 02 1.02 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Jumlah zona konservasi yang diawasi dan dikendalikan				9 Izin	10,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	9 Izin	10,100,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
										(PD-2)					
3 29 03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase IUP yang melaksanakan kaidah usaha pertambangan yang baik dan benar Persentase wilayah izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (good mining practices)	% %		% %	10,87 % 39,00 %	30,000,000						10,87 % 39,00 %	33,000,000	
3 29 03 1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah izin pertambangan mineral bukan logam dan batuan	Izin		Izin	10 Izin	30,000,000						10 Izin	33,000,000	
3 29 03 1.03 03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				9 Dokumen	15,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		9 Dokumen	16,500,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 03 1.03 04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				19 Laporan	15,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)		19 Laporan	16,500,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi (%) Prosentase Energi Terbarukan Dalam Pembangkit Listrik	% %		% %	19,18 % 5,57 %	16,321,400						19,18 % 5,57 %	17,953,540	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 29 05 1.03	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Izin	Izin		Izin	2 Izin	16,321,400						2 Izin	17,953,540	
3 29 05 1.03 02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun				1 Dokumen	6,232,600	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	1 Dokumen	6,855,860	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 05 1.03 04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun				1 Laporan	10,088,800	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	1 Laporan	11,097,680	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Rasio elektrifikasi (%)	% %		% %	99,99 % 99,99 %	24,000,000						99,99 % 99,99 %	26,400,000	
3 29 06 1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Izin Oerasi Ketenagalistrikan yang dikendalikan (Izin)	Izin		Izin	10 Izin	24,000,000						10 Izin	26,400,000	
3 29 06 1.01 02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				11 Dokumen	12,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pemegang Izin Ketenagalistrikan	11 Dokumen	13,200,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
										Nasional	Daerah					
3 29 06 1.01 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				12 Laporan	12,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan (PD-2)	Pemegang Izin Ketenagalistrikan	12 Laporan	13,200,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
TOTAL						13,248,775,183								14,573,252,700		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						33,631,948,408								33,069,662,145		
3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	11,488,309,027						BB Nilai	12,175,100,000			
3	30	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	8 Dokumen	367,500,000						8 Dokumen	414,625,000			
3	30	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	180,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Dokumen	199,000,000	Dinas Perdagangan		
3	30	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	12,500,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Dokumen	14,375,000	Dinas Perdagangan		
3	30	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	12,500,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Dokumen	14,375,000	Dinas Perdagangan		
3	30	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	12,500,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Dokumen	14,375,000	Dinas Perdagangan		
3	30	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	12,500,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	0 Dokumen	14,375,000	Dinas Perdagangan		
3	30	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	12,500,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	2 Laporan	14,375,000	Dinas Perdagangan		
3	30	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	125,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Laporan	143,750,000	Dinas Perdagangan		
3	30	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	7,920,987,327						1 Dokumen	8,006,316,445			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				59 Orang/ Bulan	7,724,987,327	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	59 Orang/ Bulan	7,811,966,445	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	140,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	12 Dokumen	161,000,000	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	3,500,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	12 Dokumen	4,025,000	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4 Dokumen	3,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	4 Dokumen	3,450,000	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	40,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Laporan	14,950,000	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	3,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Dokumen	3,450,000	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				12 Laporan	3,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	12 Laporan	3,450,000	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Dokumen	3,500,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	12 Dokumen	4,025,000	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	20,000,000						1 Dokumen	23,000,000	
3 30 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	5,500,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	BMD	1 Dokumen	6,325,000	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	5,500,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	BMD	1 Laporan	6,325,000	Dinas Perdagangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 30 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	5,500,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	BMD	2 Laporan	6,325,000	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	3,500,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	BMD	12 Laporan	4,025,000	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN terkelola Administrasi Kepegawaian	ASN		ASN	60 ASN	11,000,000						60 ASN	12,650,000	
3 30 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	11,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	2 Orang	12,650,000	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Terpenuhi Logistik Kantor	Bulan		Bulan	12 Bulan	694,500,000						12 Bulan	722,200,000	
3 30 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	10,500,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	12 Paket	12,075,000	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	210,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	9 Paket	241,500,000	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	5,500,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	2 Paket	6,325,000	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	15,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	7 Paket	17,250,000	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	43,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	4 Paket	49,450,000	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	75,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	12 Dokumen	32,775,000	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	22,500,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	12 Laporan	25,875,000	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan				24 Laporan	300,000,000	Kota Mataram, Selaprang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	24 Laporan	322,000,000	Dinas Perdagangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Konsultasi SKPD						Dasan Agung Baru							
3 30 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	13,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	12 Dokumen	14,950,000	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan BMD	Unit		Unit	1 Unit	411,000,000						1 Unit	587,650,000	
3 30 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				6 Unit	400,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	6 Unit	575,000,000	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	11,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	2 Paket	12,650,000	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Terpenuhinya Operasional Kantor	Bulan		Bulan	12 Bulan	1,033,271,700						12 Bulan	1,188,262,455	
3 30 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	5,370,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	2 Laporan	6,175,500	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Laporan	197,810,700	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	48 Laporan	227,482,305	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	830,091,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	12 Laporan	954,604,650	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Terpelihara	Unit		Unit	24 Unit	1,030,050,000						24 Unit	1,220,396,100	
3 30 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				28 Unit	206,050,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	28 Unit	215,296,100	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	150,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	5 Unit	115,000,000	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				14 Unit	10,500,000	Kota Mataram,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan	ASN	14 Unit	12,075,000	Dinas Perdagangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Selaprang, Dasan Agung Baru			(PD-9)				
3 30 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 30 Unit	33,500,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	0 Unit 30 Unit	38,525,000	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 31 Unit	22,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	0 Unit 31 Unit	25,300,000	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	580,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	5 Unit	782,000,000	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	28,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	2 Unit	32,200,000	Dinas Perdagangan
3 30 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Cakupan Pengawas an Legalitas/ Perizinan Bahan Berbahaya, Minuman Beralkohol dan Barang Pokok Penting	%		%	80 %	419,000,000						80 %	499,350,000	
3 30 02 1.01	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	Jumlah Pertimbangan Teknis SIUP-MB diterbitkan Bagi Distributor	Pertimbangan Teknsis		Pertimbangan Teknsis	7 Pertimbangan Teknsis	90,000,000						7 Pertimbangan Teknsis	103,500,000	
3 30 02 1.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				7 Dokumen	90,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Distributor dan Masyarakat	7 Dokumen	103,500,000	Dinas Perdagangan
3 30 02 1.02	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat	Jumlah Pertimbangan Teknis SIUP-Bahan Berbahaya (B2) diterbitkan Bagi Distributor	Pertimbangan Teknis		Pertimbangan Teknis	6 Pertimbangan Teknis	93,000,000						6 Pertimbangan Teknis	106,950,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Daerah Provinsi														
3 30 02 1.02 03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pemberian Surat Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perizinan Perdagangan Besar/Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission				6 Dokumen 0 Dokumen	93,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Distributor dan Masyarakat	6 Dokumen 0 Dokumen	106,950,000	Dinas Perdagangan
3 30 02 1.03	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Jumlah Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar Terkendali	Usaha		Usaha	7 Usaha	186,000,000						7 Usaha	213,900,000	
3 30 02 1.03 02	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission				6 Dokumen	93,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Distributor dan Masyarakat	6 Dokumen	106,950,000	Dinas Perdagangan
3 30 02 1.03 03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya				6 Laporan	93,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Distributor dan Masyarakat	6 Laporan	106,950,000	Dinas Perdagangan
3 30 02 1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Persentase SKA yang diterbitkan	Persen		Persen	100 Persen	50,000,000						100 Persen	75,000,000	
3 30 02 1.04 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal				175 Dokumen	50,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Eksportir	175 Dokumen	75,000,000	Dinas Perdagangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan Fasilitas Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	%		%	100 %	8,680,000,000						100 %	8,257,000,000	
3 30 03 1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Kab/Kota Tersedia Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan	Kab/Kota		Kab/Kota	10 Kab/Kota	8,680,000,000						10 Kab/Kota	8,257,000,000	
3 30 03 1.01 01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi				1300 Unit	8,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Masyarakat	1300 Unit	8,050,000,000	Dinas Perdagangan
3 30 03 1.01 03	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi				175 Orang	180,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Masyarakat	175 Orang	207,000,000	Dinas Perdagangan
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	%		%	4 %	430,000,000						4 %	954,500,000	
3 30 04 1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Komoditi Bapokting Terjamin Ketersediaan Stock dan Harga Di Tingkat Provinsi	Komoditi		Komoditi	32 Komoditi	80,000,000						32 Komoditi	92,000,000	
3 30 04 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor				8 Laporan	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Masyarakat dan Distributor	8 Laporan	46,000,000	Dinas Perdagangan
3 30 04 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor				8 laporan	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Masyarakat dan Distributor	8 laporan	46,000,000	Dinas Perdagangan
3 30 04 1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Komoditi Bapokting Terkendali Stock dan Harga Di Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi	Komoditi		Komoditi	32 Komoditi	250,000,000						32 Komoditi	287,500,000	
3 30 04 1.02 01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan				12 Laporan	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Pelaku Usaha	12 Laporan	115,000,000	Dinas Perdagangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota						Kecamatan, Semua Kelurahan							
3 30 04 1.02 02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				12 Laporan	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Pelaku Usaha	12 Laporan	172,500,000	Dinas Perdagangan
3 30 04 1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Kabupaten/kota terawasi penyaluran pupuk bersubsidi	Kab/Kota		Kab/Kota	10 Kab/Kota	100,000,000					10 Kab/Kota	575,000,000		
3 30 04 1.03 03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				4 Laporan	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Distributor	4 Laporan	575,000,000	Dinas Perdagangan
3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Tambang	%		%	5 %	1,800,000,000						5 %	2,127,500,000	
3 30 05 1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah UKM berorientasi Ekspor Unggulan Terpromosi Dagang	Ukm		Ukm	6 Ukm	1,800,000,000					6 Ukm	2,127,500,000		
3 30 05 1.01 01	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				12 Pelaku Usaha	850,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	UKM	12 Pelaku Usaha	977,500,000	Dinas Perdagangan
3 30 05 1.01 02	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal				12 Pelaku Usaha	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	UKM	12 Pelaku Usaha	287,500,000	Dinas Perdagangan
3 30 05 1.01 03	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				12 Pelaku Usaha	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	UKM	12 Pelaku Usaha	402,500,000	Dinas Perdagangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 05 1.01 04	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi				10 Produk	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	UKM	10 Produk	230,000,000	Dinas Perdagangan
3 30 05 1.01 05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina				40 Pelaku Usaha	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	UKM	40 Pelaku Usaha	230,000,000	Dinas Perdagangan
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan Penyelesaian Sengketa	%		%	90 %	2,550,000,000						90 %	2,702,500,000	
3 30 06 1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Sengketa Konsumen Yang Ditangani Di Seluruh di Kab/Kota	Kasus		Kasus	50 Kasus	2,280,000,000						50 Kasus	2,392,000,000	
3 30 06 1.01 01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif				4 BPSK	290,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Masyarakat	4 BPSK	103,500,000	Dinas Perdagangan
3 30 06 1.01 02	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif				0 LPKSM 4 LPKSM	1,900,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Masyarakat	0 LPKSM 4 LPKSM	2,185,000,000	Dinas Perdagangan
3 30 06 1.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani				55 Pengaduan	90,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Masyarakat	55 Pengaduan	103,500,000	Dinas Perdagangan
3 30 06 1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditi Teruji	Komoditi		Komoditi	10 Komoditi	90,000,000						10 Komoditi	103,500,000	
3 30 06 1.02 01	Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau				10 Komoditi	90,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Toko/Retail	10 Komoditi	103,500,000	Dinas Perdagangan
3 30 06 1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Toko Retail Di Kab/Kota yang dilakukan Pengawasan Barang Beredar/Jasa	Toko/Retail		Toko/Retail	60 Toko/Retail	180,000,000						60 Toko/Retail	207,000,000	
3 30 06 1.03 01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang				4 Laporan	90,000,000	Semua Kab/Kota,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Toko/Retail	4 Laporan	103,500,000	Dinas Perdagangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi						Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3 30 06 1.03 02	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Kasus yang Ditangani				55 Kasus	90,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Toko/Retail	55 Kasus	103,500,000	Dinas Perdagangan
3 30 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemasaran Kelompok UKM	%		%	100 %	8,264,639,381						100 %	6,353,712,145	
3 30 07 1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Jumlah Produk Dalam Negeri Terpromosi	Produk		Produk	30 Produk	5,894,639,381						30 Produk	3,687,212,145	
3 30 07 1.01 01	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kepersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri				200 UMKM	5,894,639,381	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Masyarakat dan UKM	200 UMKM	3,687,212,145	Dinas Perdagangan
3 30 07 1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Jenis Produk Dalam Negeri Terpasarkan	Jenis Produk		Jenis Produk	14 Jenis Produk	2,000,000,000						14 Jenis Produk	2,300,000,000	
3 30 07 1.02 01	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi				200 UMKM	2,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	UKM dan Masyarakat	200 UMKM	2,300,000,000	Dinas Perdagangan
3 30 07 1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UKM Terakomodir di Retail	Ukm		Ukm	15 Ukm	370,000,000						15 Ukm	366,500,000	
3 30 07 1.03 02	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				0 Laporan 4 Laporan	175,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	UKM	0 Laporan 4 Laporan	201,250,000	Dinas Perdagangan
3 30 07 1.03 03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan				12 Dokumen	95,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	UKM	12 Dokumen	109,250,000	Dinas Perdagangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Nasional	Daerah				
3 30 07 1.03 04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah orang yang mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				175 Orang	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	UKM	175 Orang	56,000,000	Dinas Perdagangan
TOTAL						33,631,948,408							33,069,662,145		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						30,768,511,655				29,588,940,300					
3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pelayanan pendukung kesekretariatan OPD	%		%	100 %	15,123,175,655						100 %	15,617,740,300		
3	31	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	402,847,000						2 Dokumen	434,000,000		
3	31	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	23,201,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Dokumen	25,000,000	Dinas Perindustrian	
3	31	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	36,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Dokumen	38,000,000	Dinas Perindustrian	
3	31	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	38,932,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Dokumen	40,000,000	Dinas Perindustrian	
3	31	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	15,051,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Dokumen	18,000,000	Dinas Perindustrian	
3	31	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	11,101,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Dokumen	13,000,000	Dinas Perindustrian	
3	31	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	28,051,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	12 Laporan	30,000,000	Dinas Perindustrian	
3	31	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	250,511,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Laporan	270,000,000	Dinas Perindustrian	
3	31	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah tunjangan dan gaji ASN	orang		orang	60 orang	8,464,791,847						60 orang	8,664,594,000		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 31 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				57 Orang/ Bulan	8,407,809,847	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	57 Orang/ Bulan	8,596,594,000	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	21,971,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Dokumen	25,000,000	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	20,011,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Laporan	25,000,000	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				2 Laporan	15,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	2 Laporan	18,000,000	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	JUmlah Dokumen perencanaan barang milik daerah yang tersusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	43,000,000						1 Dokumen	45,000,000	
3 31 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	23,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Dokumen	25,000,000	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	20,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Laporan	20,000,000	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	orang		orang	10 orang	115,000,000						10 orang	115,000,000	
3 31 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	115,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN	10 Orang	115,000,000	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana prasarana kantor yang tersedia	Unit		Unit	25 Unit	1,847,394,808						25 Unit	1,767,786,300	
3 31 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	33,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua	Lain-lain PAD Yang Sah		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	12 Paket	63,000,000	Dinas Perindustrian

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan							
3 31 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				47 Paket	21,971,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	47 Paket	30,000,000	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	389,800,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	2 Paket	400,000,000	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	30,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	1 Paket	35,000,000	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	60,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	2 Paket	98,500,000	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	171,337,508	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	1 Dokumen	180,000,000	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	400,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Laporan	350,000,000	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	741,286,300	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	60 Laporan	611,286,300	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasinal yang diadakan	Unit		Unit	1 Unit	2,220,230,000						1 Unit	2,443,360,000	
3 31 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	333,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	1 Unit	500,000,000	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	473,360,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1 Unit	473,360,000	Dinas Perindustrian

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 31 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Paket	563,870,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	ASN	6 Paket	580,000,000	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				25 Unit	250,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	25 Unit	270,000,000	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	500,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	3 Unit	500,000,000	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	100,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	1 Unit	120,000,000	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya fasilitas sarana prasarana kantor	tahun		tahun	1 tahun	1,051,912,000						1 tahun	1,085,000,000	
3 31 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1200 Laporan	13,772,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1200 Laporan	15,000,000	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	214,140,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	4 Laporan	220,000,000	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	824,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Laporan	850,000,000	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana prasarana kantor yang terpelihara	Unit		Unit	30 Unit	978,000,000						30 Unit	1,063,000,000	
3 31 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						60,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN		60,000,000	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang				15 Unit	178,000,000	Kota Mataram, Semua	Lain-lain PAD Yang Sah		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	15 Unit	198,000,000	Dinas Perindustrian

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya						Kecamatan, Semua Kelurahan							
3 31 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				3 Unit	90,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	3 Unit	100,000,000	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 50 Unit	150,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN	0 Unit 50 Unit	105,000,000	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	500,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	3 Unit	600,000,000	Dinas Perindustrian
3 31 02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Industri Provinsi	%		%	100 %	12,796,584,000						100 %	11,990,000,000	
3 31 02 1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen perencanaan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	12,796,584,000						5 Dokumen	11,990,000,000	
3 31 02 1.01 01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	327,570,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			masyarakat NTB	1 Dokumen	340,000,000	Dinas Perindustrian
3 31 02 1.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				0 Dokumen 1 Dokumen	571,040,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			masyarakat NTB	0 Dokumen 1 Dokumen	600,000,000	Dinas Perindustrian
3 31 02 1.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	3,265,264,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			masyarakat NTB	1 Dokumen	2,800,000,000	Dinas Perindustrian
3 31 02 1.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan				1 Dokumen	536,970,000	Semua Kab/Kota, Semua	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			masyarakat NTB	1 Dokumen	600,000,000	Dinas Perindustrian

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	dan Prasarana Industri	Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri						Kecamatan, Semua Kelurahan							
3 31 02 1.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	7,682,240,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			masyarakat NTB	1 Dokumen	7,200,000,000	Dinas Perindustrian
3 31 02 1.01 06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	413,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	masyarakat NTB	1 Dokumen	450,000,000	Dinas Perindustrian
3 31 03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang Meningkat dari Kecil ke Menengah	%		%	3.55 %	1,835,000,000						3.55 %	901,200,000	
3 31 03 1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah IKM yang terfasilitasi izin usaha Jumlah pengawasan izin usaha yang dilakukan	Kali		Kali	1850 30 Kali	1,835,000,000						1850 30 Kali	901,200,000	
3 31 03 1.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik						950,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			IKM		1,200,000	Dinas Perindustrian
3 31 03 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	885,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			IKM	1 Dokumen	900,000,000	Dinas Perindustrian
3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Cakupan database IKM se NTB dalam sistem informasi industri nasional	%		%	1 %	1,013,752,000						1 %	1,080,000,000	
3 31 04 1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah informasi industri yang tersusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1,013,752,000						1 Dokumen	1,080,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)														
3 31 04 1.01 01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	559,202,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		IKM	1 Dokumen	600,000,000	Dinas Perindustrian
3 31 04 1.01 02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas				1 Dokumen	369,550,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		IKM	1 Dokumen	380,000,000	Dinas Perindustrian
3 31 04 1.01 03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas				1 Dokumen	85,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		IKM	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Perindustrian
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						3,458,000,000							3,834,000,000	
3 31 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pelayanan pendukung kesekretariatan OPD	%		%	100 %	1,322,000,000						100 %	1,534,000,000	
3 31 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	10,000,000						1 Dokumen	11,000,000	
3 31 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	10,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Masyarakat NTB	1 Dokumen	11,000,000	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	8,000,000						1 Dokumen	10,000,000	
3 31 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	8,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN	1 Laporan	10,000,000	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana prasarana kantor	Paket		Paket	1 Paket	299,000,000						1 Paket	381,000,000	
3 31 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang				1 Paket	7,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN	1 Paket	9,000,000	Dinas Perindustrian

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Disediakan						Semua Kelurahan							
3 31 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	11,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	2 Paket	13,000,000	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	23,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Paket	25,000,000	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	8,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	2 Paket	12,000,000	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	10,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	3 Dokumen	12,000,000	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	40,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Laporan	60,000,000	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	200,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Laporan	250,000,000	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan operasional	Paket		Paket	2 Paket	57,000,000						2 Paket	59,000,000	
3 31 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	50,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	1 Unit	50,000,000	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	7,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	2 Unit	9,000,000	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa komunikasi air dan listrik	rekening		rekening	4 rekening	612,000,000						4 rekening	685,000,000	
3 31 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat				1 Laporan	12,000,000	Kota Mataram,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan	Pihak Ketiga	1 Laporan	15,000,000	Dinas Perindustrian

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Menyurat						Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			(PD-9)				
3 31 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	100,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Pihak Ketiga	1 Laporan	120,000,000	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	500,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Pihak Ketiga	1 Laporan	550,000,000	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara	Unit		Unit	14 Unit	336,000,000						14 Unit	388,000,000	
3 31 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit	180,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	5 Unit	200,000,000	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	6,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	3 Unit	8,000,000	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 5 Unit	50,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	0 Unit 5 Unit	60,000,000	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	100,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN	2 Unit	120,000,000	Dinas Perindustrian
3 31 02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Industri Provinsi	%		%	100 %	2,136,000,000						100 %	2,300,000,000	
3 31 02 1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	2,136,000,000						1 Dokumen	2,300,000,000	
3 31 02 1.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	536,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Masyarakat NTB	1 Dokumen	600,000,000	Dinas Perindustrian

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Nasional	Daerah				
							Kelurahan								
3 31 02 1.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	1,600,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Masyarakat NTB	1 Dokumen	1,700,000,000	Dinas Perindustrian
TOTAL						34,226,511,655							33,422,940,300		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
														Nasional	Daerah							
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH						153,134,331,792								0			
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor		skor	A skor	153,134,331,792								A skor	0		
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Ketatausahaan sesuai SOP Pemenuhan Layanan Ketatausahaan	%		%	100 %	214,518,000								100 %	0		
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun				2 Dokumen	40,465,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah			
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				2 Dokumen	66,544,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah			
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	59,215,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah			
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	48,294,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	2 Laporan	0	Sekretariat Daerah			
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan yang sesuai PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	%		%	100 %	120,372,488,466								100 %	0		
4	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1062 Orang	120,113,813,666			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan lingkup setda	1062 Orang	0	Sekretariat Daerah			
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				72 Dokumen	115,500,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan lingkup setda	72 Dokumen	0	Sekretariat Daerah			
4	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3000 Dokumen	109,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan lingkup setda	3000 Dokumen	0	Sekretariat Daerah			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	11,304,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan lingkup setda	2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	22,870,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan lingkup setda	2 Laporan	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Aset Setda sesuai PP No. 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	%		%	100 %	199,741,800						100 %	0	
4 01 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	11,841,400	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	penatausahaan aset lingkup setda	1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	137,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	penatausahaan aset lingkup setda	3 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	7,255,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	penatausahaan aset lingkup setda	1 Laporan	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	31,091,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	penatausahaan aset lingkup setda	1 Laporan	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	12,554,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	penatausahaan aset lingkup setda	1 Laporan	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Ketatausahaan sesuai SOP Pemenuhan Layanan Ketatausahaan Persentase Penatausahaan Aset Setda sesuai PP No. 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Tingkat Kepuasan Layanan Kerumahtanggaan Pimpinan	% % skor		% % skor	100 % 100 % 4.5 skor	1,876,609,250						100 % 100 % 4.5 skor	0	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	40,906,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran	12 Paket	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	125,153,150		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran	12 Paket	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	85,215,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran	12 Paket	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	37,059,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran	12 Paket	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				228 Dokumen	66,060,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran	228 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	1,021,300,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran	12 Laporan	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				144 Laporan	450,617,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran	144 Laporan	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1500 Dokumen	50,297,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran	1500 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penatausahaan Aset Setda sesuai PP No. 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	%		%	100 %	928,012,200						100 %	0	
4 01 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	pemenuhan kebutuhan BMD perkantoran	2 Unit	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Paket	414,690,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	pemenuhan kebutuhan BMD perkantoran	50 Paket	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				40 Unit	513,322,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	pemenuhan kebutuhan BMD perkantoran	40 Unit	0	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	pemenuhan kebutuhan BMD perkantoran	3 Unit	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Ketatausahaan sesuai SOP Pemenuhan Layanan Ketatausahaan Persentase Penatausahaan Aset Setda sesuai PP No. 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Tingkat Kepuasan Layanan Kerumahtanggaan Pimpinan	% % skor		% % skor	100 % 100 % 4.5 skor	10,925,190,400						100 % 100 % 4.5 skor	0	
4 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemda	12 Laporan	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1,982,750,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemda	12 Laporan	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	352,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemda	12 Laporan	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	8,590,440,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemda	12 Laporan	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penatausahaan Aset Setda sesuai PP No. 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	%		%	100 %	4,722,929,803						100 %	0	
4 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				20 Unit	731,768,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	pemeliharaan BMD lingkup Setda	20 Unit	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				217 Unit	1,852,035,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	pemeliharaan BMD lingkup Setda	217 Unit	0	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 125 Unit	149,684,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	pemeliharaan BMD lingkup Setda	0 Unit 125 Unit	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				13 Unit	1,876,942,803	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	pemeliharaan BMD lingkup Setda	13 Unit	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	112,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	pemeliharaan BMD lingkup Setda	2 Unit	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan yang sesuai PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tingkat Kepuasan Layanan Kerumahtanggaan Pimpinan	% skor		% skor	100 % 4.5 skor	4,885,705,223						100 % 4.5 skor	0	
4 01 01 1.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				24 Orang/Bulan	1,627,993,391		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pemenuhan kebutuhan gaji dan operasional KDH WKDH	24 Orang/Bulan	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.11 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				14 Paket	326,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	pemenuhan kebutuhan gaji dan operasional KDH WKDH	14 Paket	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.11 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	pemenuhan kebutuhan gaji dan operasional KDH WKDH	2 Orang	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				24 Orang/Bulan	2,931,511,832		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	pemenuhan kebutuhan gaji dan operasional KDH WKDH	24 Orang/Bulan	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Tingkat Kepuasan Layanan Kerumahtanggaan Pimpinan	skor		skor	4.5 skor	9,009,136,650						4.5 skor	0	
4 01 01 1.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	5,098,868,250				Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	pemenuhan kebutuhan kerumahtanggaan pimpinan daerah	12 Paket	0	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
4 01 01 1.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	2,630,166,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	pemenuhan kebutuhan kerumahtangga an pimpinan daerah	12 Paket	0	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				12 Paket	1,280,101,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	pemenuhan kebutuhan kerumahtangga an pimpinan daerah	12 Paket	0	Sekretariat Daerah	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4 01	SEKRETARIAT DAERAH						2,070,995,544							2,561,859,134		
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip PD	Nilai		Nilai	BB Nilai	430,505,124						BB Nilai	599,311,464		
4 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja OPD, Jumlah dokumen RKASKPD dan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD, jumlah dokumen DPA-SKPD dan dokumen perubahan DPA-SKPD, Laporan Realisasi Capaian Kinerja dan Keuangan OPD, Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja PD yang tersusun	dokumen		dokumen	8 dokumen	33,818,800						8 dokumen	37,794,669		
4 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja OPD				2 Dokumen	2,470,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyusunan perencanaan dan laporan kinerja Sekretariat Daerah Provinsi NTB	2 Dokumen	2,717,000	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD				1 dokumen	12,560,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyusunan perencanaan dan laporan kinerja Sekretariat Daerah Provinsi NTB	1 dokumen	13,816,000	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 dokumen	1,689,900	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik				Penyusunan perencanaan dan laporan kinerja Sekretariat Daerah Provinsi NTB	1 dokumen	1,858,890	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD				1 dokumen	3,270,500	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyusunan perencanaan dan laporan kinerja Sekretariat Daerah Provinsi NTB	1 dokumen	3,597,550	Sekretariat Daerah	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 dokumen	2,777,400	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyusunan perencanaan dan laporan kinerja Sekretariat Daerah Provinsi NTB	1 dokumen	3,055,140	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Realisasi Capaian Kinerja dan Keuangan				1 Laporan	5,301,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyusunan perencanaan dan laporan kinerja Sekretariat Daerah Provinsi NTB	1 Laporan	6,097,307	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang tersusun				1 dokumen	5,750,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyusunan perencanaan dan laporan kinerja Sekretariat Daerah Provinsi NTB	1 dokumen	6,652,782	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun, Bulanan/Triwulanan /Semesteran, Laporan Realisasi Keuangan dan Rekonsiliasi Keuangan	dokumen		dokumen	26 dokumen	94,933,000						26 dokumen	104,426,300	
4 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pejabat penatausahaan keuangan yang terbayar				12 OB	64,939,500	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyusunan Dokumen Laporan Akhir Tahun, Bulanan/Triwula nan/Semesteran, Laporan Realisasi Keuangan dan Rekonsiliasi Keuangan	12 OB	71,433,450	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen rekonsiliasi keuangan				2 dokumen	5,475,700	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyusunan Dokumen Laporan Akhir Tahun, Bulanan/Triwula nan/Semesteran, Laporan Realisasi Keuangan dan Rekonsiliasi Keuangan	2 dokumen	6,023,270	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang tersusun				1 dokumen	16,696,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyusunan Dokumen Laporan Akhir Tahun, Bulanan/Triwula nan/Semesteran, Laporan Realisasi Keuangan dan Rekonsiliasi Keuangan	1 dokumen	18,365,600	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan dan fisik				12 bulan	3,051,400	Kota Mataram, Mataram,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyusunan Dokumen Laporan Akhir Tahun,	12 bulan	3,356,540	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	SKPD							Pejanggik				Bulan/Triwulan/Semesteran, Laporan Realisasi Keuangan dan Rekonsiliasi Keuangan			
4 01 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen analisis keuangan				1 dokumen	4,770,400	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyusunan Dokumen Laporan Akhir Tahun, Bulan/Triwulan/Semesteran, Laporan Realisasi Keuangan dan Rekonsiliasi Keuangan	1 dokumen	5,247,440	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan BMD, Hasil Rekonsiliasi BMD dan Laporan BMD	dokumen		dokumen	3 dokumen	8,176,000						3 dokumen	8,993,600	
4 01 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah DKBMD dan DKPBMD, dan laporan aset				3 dokumen	2,506,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyusunan perencanaan BMD, Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD Biro Organisasi Setda Prov. NTB	3 dokumen	2,756,600	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2,932,500	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyusunan perencanaan BMD, Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD Biro Organisasi Setda Prov. NTB	1 Laporan	3,225,750	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pengelolaan akuntansi dan penatausahaan asset				1 dokumen	2,737,500	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyusunan perencanaan BMD, Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD Biro Organisasi Setda Prov. NTB	1 dokumen	3,011,250	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum pada Biro Organisasi Setda Prov. NTB	%		%	100 %	223,493,724						100 %	241,752,764	
4 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia				25 jenis	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyediaan administrasi umum Biro Organisasi setda Prov. NTB	25 jenis	9,059,668	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah alat tulis kantor				50 jenis	19,143,180	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyediaan administrasi umum Biro Organisasi setda Prov. NTB	50 jenis	21,057,498	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan				20 dokumen	9,505,544	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyediaan administrasi umum Biro Organisasi setda Prov. NTB	20 dokumen	10,456,098	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				24 eksemplar	6,660,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyediaan administrasi umum Biro Organisasi setda Prov. NTB	24 eksemplar	7,266,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman kegiatan dan tamu				500 porsi	37,000,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyediaan administrasi umum Biro Organisasi setda Prov. NTB	500 porsi	41,210,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi ke dalam daerah dan luar daerah				1 tahun	151,185,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyediaan administrasi umum Biro Organisasi setda Prov. NTB	1 tahun	152,703,500	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah pada Biro Organisasi Setda Prov. NTB	paket		paket	3 paket	43,153,600						3 paket	176,585,395	
4 01 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	43,153,600	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Biro Organisasi Setda Prov. NTB	2 Paket	47,468,960	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia				6 paket	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Biro Organisasi Setda Prov. NTB	6 paket	129,116,435	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Surat Menyurat pada Biro Organisasi Setda Prov. NTB	%		%	100 %	1,920,000						100 %	2,247,736	
4 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar				1200 surat	1,920,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTB	1200 surat	2,247,736	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara pada Biro Organisasi Setda Prov. NTB	unit		unit	13 unit	25,010,000						13 unit	27,511,000	
4 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				42 Unit	25,010,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemeliharaan aset daerah pada biro organisasi Setda Prov. NTB	42 Unit	27,511,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase SAKIP Perangkat Daerah yang Baik Meningkat	%		%	- %	1,640,490,420						- %	1,962,547,670	
4 01 02 1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen perangkat daerah yang difasilitasi sesuai peraturan perundang- undangan,Jumlah dokumen UPTD /UPTB, Cabang Dinas dan Instansi Vertikal yang terfasilitasi, Jumlah Dokumen Perangkat Daerah dan UPTD/UPTB Kabupaten /Kota yang terfasilitasi, Jumlah dokumen Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang tersusun, Jumlah Dokumen Jabatan Struktural yang tersusun	dokumen		dokumen	77 dokumen	366,364,100						77 dokumen	449,562,705	
4 01 02 1.01 01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah dokumen UPTD/UPTB, Cabang Dinas dan Instansi Vertikal yang terfasilitasi Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi sesuai peraturan perundang-undangan				3 dokumen 3 dokumen	138,319,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Penataan Kelembagaan Provinsi, Kabupaten/Kota dan Analisis Jabatan	3 dokumen 3 dokumen	152,151,450	Sekretariat Daerah
4 01 02 1.01 02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perangkat Daerah dan UPTD/UPTB Kabupaten/Kota yang terfasilitasi				22 dokumen	59,614,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Penataan Kelembagaan Provinsi, Kabupaten/Kota dan Analisis Jabatan	22 dokumen	108,919,990	Sekretariat Daerah
4 01 02 1.01 03	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan, dan Analisis Beban Kerja yang tersusun Jumlah dokumen jabatan struktural yang tersusun				3 dokumen 46 dokumen	168,430,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Penataan Kelembagaan Provinsi, Kabupaten/Kota dan Analisis Jabatan	3 dokumen 46 dokumen	188,491,265	Sekretariat Daerah
4 01 02 1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Tersusunnya Dokumen SAKIP Provinsi (RKT, PK, IKU, RA, CAPAIAN PK/RA, LAKIP)	%		%	100 %	1,274,126,320						100 %	1,512,984,965	
4 01 02 1.02 01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina dan difasilitasi Pelaksanaan PMPRB Jumlah Perangkat Daerah yang dibina Pelaksanaan PMPRB				10 Kab/Kota 12 PD	252,900,950	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Penilaian PMPRB, SAKIP Perangkat Daerah dan Provinsi, Budaya Kerja, Tata Laksana Pemerintahan, dan Pelayanan Publik	10 Kab/Kota 12 PD	278,191,045	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 02 1.02 02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah dokumen hasil penilaian kinerja perangkat daerah Jumlah laporan SAKIP Perangkat Daerah yang baik				43 dok 43 Laporan	283,187,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Penilaian PMPRB, SAKIP Perangkat Daerah dan Provinsi, Budaya Kerja, Tata Laksana Pemerintahan, dan Pelayanan Publik	43 dok 43 Laporan	311,505,920	Sekretariat Daerah
4 01 02 1.02 03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Laporan fasilitasi dan evaluasi perangkat daerah/unit kerja penerapan budaya kerja				1 Laporan	40,011,570	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Penilaian PMPRB, SAKIP Perangkat Daerah dan Provinsi, Budaya Kerja, Tata Laksana Pemerintahan, dan Pelayanan Publik	1 Laporan	103,249,495	Sekretariat Daerah
4 01 02 1.02 04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki SOP tata kelola pemerintahan				43 OPD	173,918,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Penilaian PMPRB, SAKIP Perangkat Daerah dan Provinsi, Budaya Kerja, Tata Laksana Pemerintahan, dan Pelayanan Publik	43 OPD	243,519,485	Sekretariat Daerah
4 01 02 1.02 05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	jumlah inovasi pelayanan publik yang termanfaatkan Jumlah unit kerja pelayanan publik yang terbina sesuai standar pelayanan				20 Inovasi 35 OPD	524,108,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Penilaian PMPRB, SAKIP Perangkat Daerah dan Provinsi, Budaya Kerja, Tata Laksana Pemerintahan, dan Pelayanan Publik	20 Inovasi 35 OPD	576,519,020	Sekretariat Daerah
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4 01	SEKRETARIAT DAERAH						6,779,328,000						6,547,522,268		
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor		Skor	A Skor	6,779,328,000						A Skor	6,547,522,268	
4 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase administrasi perencanaan dan pelaporan sesuai ketentuan	%		%	100 %	203,978,100						100 %	317,195,872	
4 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	30,729,300	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Internal Biro	5 Dokumen	44,418,023	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	13,156,900	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Internal Biro	1 Dokumen	44,418,023	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	17,683,500	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Internal Biro	1 Dokumen	42,302,879	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	14,240,600	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Internal Biro	1 Dokumen	44,418,023	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	15,531,400	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Internal Biro	1 Dokumen	42,302,879	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	28,919,700	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Internal Biro	2 Laporan	44,418,023	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	83,716,700	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Internal Biro	1 Laporan	54,918,022	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	21,185,300						100 %	26,312,205	
4 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	8,231,300	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Internal Biro	12 Dokumen	5,968,127	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	6,700,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Internal Biro	1 Laporan	7,240,552	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				3 Laporan	6,254,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Internal Biro	3 Laporan	13,103,526	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan pengelolaan administrasi BMD perangkat daerah	%		%	100 %	18,458,500						100 %	12,068,017	
4 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	18,458,500	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Internal Biro	1 Laporan	12,068,017	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian sesuai ketentuan	%		%	100 %	132,112,200						100 %	71,766,077	
4 01 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Administrasi Kepegawaian				414 Dokumen	132,112,200	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur Sipil Negara (ASN) Setda Provinsi NTB	414 Dokumen	71,766,077	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	578,016,300						100 %	579,573,947	
4 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Paket	256,311,600	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Internal Biro	25 Paket	18,479,232	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				50 Paket	68,441,900	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Internal Biro	50 Paket	94,009,749	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				11 Paket	22,200,600	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Internal Biro	11 Paket	25,559,859	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				84 Dokumen	104,400,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Internal Biro	84 Dokumen	113,239,389	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				24 Laporan	18,656,600	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Internal Biro	24 Laporan	65,042,246	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	108,005,600	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Internal Biro	24 Laporan	263,243,472	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0							158,360,459	
4 01 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				10 Unit	0	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		10 Unit	158,360,459	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	1,090,430,000						100 %	299,078,068	
4 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1200 Laporan	7,430,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Surat Masuk, Surat Keluar, Pegawai Tidak Tetap (PTT), Tenaga Non ASN	1200 Laporan	7,647,470	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1,083,000,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Surat Masuk, Surat Keluar, Pegawai Tidak Tetap (PTT), Tenaga Non ASN	12 Laporan	291,430,598	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan BMD	%		%	100 %	123,757,600						100 %	64,125,066	
4 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 160 Unit	123,757,600	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BMD Internal Biro	0 Unit 160 Unit	64,125,066	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase layanan komunikasi dan materi pimpinan (KDH/WKDH) sesuai standar	%		%	100 %	978,400,000						100 %	2,296,213,975	
4 01 01 1.13 01	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan				1200 Dokumen	259,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Gubernur dan Wakil Gubernur	1200 Dokumen	565,047,242	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.13 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				750 Laporan	159,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Gubernur dan Wakil Gubernur	750 Laporan	704,032,251	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.13 03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan				1200 Laporan	559,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Gubernur dan Wakil Gubernur	1200 Laporan	1,027,134,482	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.14	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase layanan kedinasan keprotokolan pimpinan (KDH/WKDH) sesuai standar	%		%	100 %	3,632,990,000						100 %	2,722,828,582	
4 01 01 1.14 01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				1200 Laporan	651,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Gubernur dan Wakil Gubernur	1200 Laporan	626,504,736	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.14 02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				200 Laporan	439,590,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Gubernur dan Wakil Gubernur	200 Laporan	416,980,863	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.14 03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				1250 Laporan	2,542,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Gubernur dan Wakil Gubernur	1250 Laporan	1,679,342,983	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan							
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4 01	SEKRETARIAT DAERAH						1,518,323,956							185,000,000	
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						674,076,572							0	
4 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						75,130,602							0	
4 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	12,315,181						1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	12,417,541		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	12,309,030		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 dokumen	12,392,566		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 dokumen	12,223,894		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 dokumen	13,472,390		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						22,215,308							0	
4 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						4,945,757							0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	17,269,551						1 Laporan	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						2,460,574							0	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 dokumen	1,230,287						2 dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 dokumen	1,230,287						1 dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						143,091,216							0	
4 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				25 jenis	19,823,013		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25 jenis	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				11500 explar	19,495,142		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				11500 explar	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				72 exmplar	9,743,880		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				72 exmplar	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				700 porsi	31,864,456		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				700 porsi	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 tahun	62,164,725		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 tahun	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						400,421,675							0	
4 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1,221,675		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 orang	399,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 orang	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						30,757,197							0	
4 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				38 Unit	30,757,197						38 Unit	0	Sekretariat Daerah
4 01 05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi yang terbentuk Persentase MoU dan perjanjian kerjasama yang tersusun Persentase Penanganan Masalah Hukum Litigasi	% % % %		% % % %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	844,247,384						100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	185,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Persentase Penanganan Masalah Hukum Non Litigasi dan HAM Persentase Produk Hukum Daerah Kab./Kota yang Terasilitasi Persentase Produk Hukum yang Tersosialisasi kepada masyarakat													
4 01 05 1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah, MOU dan perjanjian kerjasama	%		%	100 %	517,480,488						100 %	0	
4 01 05 1.01 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun				40 perda/pergub	122,480,488	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					40 perda/pergub	0	Sekretariat Daerah
4 01 05 1.01 02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun				700 keputusan gubernur	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				700 keputusan gubernur	0	Sekretariat Daerah
4 01 05 1.01 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya				35 perda/naskah	110,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				35 perda/naskah	0	Sekretariat Daerah
4 01 05 1.01 04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi				150 perda/perbub /perwal	185,000,000						150 perda/perbub /perwal	0	Sekretariat Daerah
4 01 05 1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum						326,766,896							185,000,000	
4 01 05 1.02 01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan				0 Kasus 3 Kasus	250,573,755	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					0 Kasus 3 Kasus	185,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 05 1.02 02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan				4 Kasus	76,193,141		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Kasus	0	Sekretariat Daerah
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4 01	SEKRETARIAT DAERAH						2,048,701,016							4,461,105,303	
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Lakip	Nilai		Nilai	BB Nilai	561,016,516						BB Nilai	714,900,000	
4 0101 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi	dokumen		dokumen	7 dokumen	57,286,416						7 dokumen	77,000,000	
4 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	9,727,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Internal Biro	1 Dokumen	11,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan							
4 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	9,727,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Internal Biro	1 Dokumen	11,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	9,727,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Internal Biro	1 Dokumen	11,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	4,615,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Internal Biro	1 Dokumen	11,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	4,615,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Internal Biro	1 Dokumen	11,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	9,727,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Internal Biro	1 Laporan	11,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	9,147,216	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Internal Biro	1 Laporan	11,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen Laporan administrasi keuangan	dokumen		dokumen	1 dokumen	30,347,800						1 dokumen	44,000,000	
4 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	13,070,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Internal Biro	1 Dokumen	23,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	5,267,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Internal Biro	1 Dokumen	6,500,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan				1 Laporan	6,840,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik	Internal Biro	1 Laporan	7,500,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Semua Kelurahan			(PD-3)				
4 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				1 Laporan	5,169,900	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Internal Biro	1 Laporan	7,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jumlah dokumen Laporan administrasi Barang Milik Daerah	dokumen		dokumen	1 dokumen	10,420,800						1 dokumen	17,000,000	
4 01 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	4,249,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	internal Biro	1 Dokumen	7,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	6,171,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	internal Biro	1 Laporan	10,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah dokumen Laporan administrasi Kepegawaian	dokumen		dokumen	1 dokumen	4,695,000						1 dokumen	7,000,000	
4 01 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	4,695,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	internal Biro	1 Dokumen	7,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah dokumen Laporan administrasi Umum	dokumen		dokumen	1 dokumen	277,289,600						1 dokumen	365,000,000	
4 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				25 Paket	38,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Internal Biro	25 Paket	44,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				15 Paket	33,535,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Internal Biro	15 Paket	38,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	8,400,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Internal Biro	4 Dokumen	16,500,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	21,944,000	Kota Mataram, Semua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi	Internal Biro	1 Laporan	26,500,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kecamatan, Semua Kelurahan			pelayanan publik (PD-3)				
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	175,410,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Internal Biro	1 Laporan	240,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	unit		unit	5 unit	70,518,900						5 unit	86,000,000	
4 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	70,518,900	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Internal Biro	5 Unit	86,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah dokumen Laporan Penyediaan Jasa penunjang urusan	dokumen		dokumen	1 dokumen	81,028,000						1 dokumen	81,500,000	
4 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Internal Biro	1 Laporan	3,500,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	79,028,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Internal Biro	1 Laporan	78,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipeliharaan	unit		unit	45 unit	29,430,000						45 unit	37,400,000	
4 01 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				3 Unit	2,750,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	internal Biro	3 Unit	3,400,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				42 Unit	26,680,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	internal Biro	42 Unit	34,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase penyelesaian kebijakan administrasi pemerintahan umum dan pengembangan otonomi daerah	%		%	100 %	1,487,684,500						100 %	3,746,205,303	
4 01 03 1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan tugas pemerintahan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	377,684,500						1 Dokumen	1,121,138,956	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 03 1.01 01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrtasi Kebijakan Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan				100 persen 0 Dokumen 1 Dokumen	90,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota	100 persen 0 Dokumen 1 Dokumen	292,036,145	Sekretariat Daerah
4 01 03 1.01 02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum				1 Dokumen	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota	1 Dokumen	334,929,950	Sekretariat Daerah
4 01 03 1.01 03	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah				1 Dokumen	137,684,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota	1 Dokumen	494,172,861	Sekretariat Daerah
4 01 03 1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan otonomi daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	630,000,000						1 Dokumen	1,711,502,353	
4 01 03 1.02 01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD				1 dokumen	125,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota	1 dokumen	440,814,581	Sekretariat Daerah
4 01 03 1.02 02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan				1 Dokumen	115,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	379,906,140	Sekretariat Daerah
4 01 03 1.02 03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan				2 Laporan	390,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota	2 Laporan	890,781,632	Sekretariat Daerah
4 01 03 1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah dokumen laporan fasilitasi kerjasama daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	480,000,000						1 Dokumen	913,563,994	
4 01 03 1.03 01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi				10 dokumen	235,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pemerintah dan Badan usaha/swasta	10 dokumen	460,719,096	Sekretariat Daerah
4 01 03 1.03 02	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi				10 Dokumen	125,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pemerintah dan Badan usaha/swasta	10 Dokumen	223,982,885	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 03 1.03 03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi				15 Laporan	120,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pemerintah dan Badan usaha/swasta	15 Laporan	228,862,013	Sekretariat Daerah
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4 01	SEKRETARIAT DAERAH						71,709,919,191							78,198,020,375	
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	Skor		Skor	A Skor	769,895,902						A Skor	1,231,196,700	
4 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase administrasi perencanaan dan pelaporan sesuai ketentuan	%		%	100 %	86,011,300						100 %	90,312,950	
4 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	12,300,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, PTT, Tenaga Knttrak Serta Pemangku Kebijakan	1 Dokumen	12,915,400	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	12,301,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, PTT, Tenaga Knttrak Serta Pemangku Kebijakan	1 Dokumen	12,916,700	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	12,278,100	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, PTT, Tenaga Knttrak Serta Pemangku Kebijakan	1 Dokumen	12,892,150	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	12,287,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, PTT, Tenaga Knttrak Serta Pemangku Kebijakan	1 Dokumen	12,902,350	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	12,290,300	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, PTT, Tenaga Knttrak Serta Pemangku Kebijakan	1 Dokumen	12,905,100	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	12,298,100	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, PTT, Tenaga Knttrak Serta Pemangku Kebijakan	1 Laporan	12,913,100	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	12,255,100	Kota Mataram, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik	ASN, PTT, Tenaga Knttrak Serta Pemangku Kebijakan	2 Laporan	12,868,150	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan			(PD-3)				
4 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	Laporan		Laporan	18 Laporan	110,854,200						18 Laporan	130,026,300	
4 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	87,428,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, PTT, Tenaga Knttrak Serta Pemangku Kebijakan	1 Dokumen	104,274,250	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	12,228,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, PTT, Tenaga Knttrak Serta Pemangku Kebijakan	1 Laporan	12,840,500	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				16 Laporan	11,196,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, PTT, Tenaga Knttrak Serta Pemangku Kebijakan	16 Laporan	12,911,550	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	2 Laporan	18,449,700						2 Laporan	19,372,950	
4 01 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	6,149,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, PTT, Tenaga Knttrak Serta Pemangku Kebijakan	1 Dokumen	6,457,550	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	12,300,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, PTT, Tenaga Knttrak Serta Pemangku Kebijakan	1 Laporan	12,915,400	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	6,149,900						1 Laporan	6,457,550	
4 01 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	6,149,900	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, PTT, Tenaga Knttrak Serta Pemangku Kebijakan	1 Dokumen	6,457,550	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	314,695,582						100 Persen	494,886,850	
4 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				40 Paket	53,664,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, PTT, Tenaga Knttrak Serta Pemangku Kebijakan	40 Paket	64,589,200	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
4 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	50,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, PTT, Tenaga Knttrak Serta Pemangku Kebijakan	7 Paket	64,575,600	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	11,220,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, PTT, Tenaga Knttrak Serta Pemangku Kebijakan	1 Dokumen	23,484,950	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	60,800,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, PTT, Tenaga Knttrak Serta Pemangku Kebijakan	1 Laporan	96,794,700	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	139,011,282	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, PTT, Tenaga Knttrak Serta Pemangku Kebijakan	1 Laporan	245,442,400	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
4 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit		Unit	10 Unit	144,899,460						10 Unit	374,401,200	
4 01 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	74,250,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, PTT, Tenaga Knttrak Serta Pemangku Kebijakan	2 Unit	258,360,450	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	70,649,460	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, PTT, Tenaga Knttrak Serta Pemangku Kebijakan	9 Unit	116,040,750	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	57,375,760						100 Persen	69,518,250	
4 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	10,337,100	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, PTT, Tenaga Knttrak Serta Pemangku Kebijakan	1 Laporan	14,726,500	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	47,038,660	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, PTT, Tenaga Knttrak Serta Pemangku Kebijakan	1 Laporan	54,791,750	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Unit		Unit	40 Unit	31,460,000						40 Unit	46,220,650	
4 01 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, PTT, Tenaga Knttrak Serta Pemangku Kebijakan	0 Unit	3,229,500	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	31,460,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, PTT, Tenaga Knttrak Serta Pemangku Kebijakan	40 Unit	42,991,150	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan							
4 01 04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kesejahteraan Rakyat dari Segi Mental Spritual, Kebutuhan Dasar dan Non Kebutuhan Dasar	%		%	100 %	70,940,023,289						100 %	76,966,823,675	
4 01 04 1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Dari Segi Mental Spiritual	Persen		Persen	100 Persen	34,754,873,489						100 Persen	38,727,016,800	
4 01 04 1.01 01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola				4 Unit	30,934,983,789	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN, PTT, Tenaga Knttrak, Pemangku Kebijakan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama serta Lembaga Keagamaan dan Forum Komunikasi Umat Beragama	4 Unit	34,715,849,250	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
4 01 04 1.01 02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi				5 Lembaga	3,819,889,700	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN, PTT, Tenaga Kntrak, Pemangku Kebijakan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama serta Lembaga Keagamaan dan Forum Komunikasi Umat Beragama	5 Lembaga	4,011,167,550	Sekretariat Daerah
4 01 04 1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Kesra Pelayanan Dasar	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	35,228,564,100						6 Dokumen	37,245,391,300	
4 01 04 1.02 01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan				3 Dokumen	34,365,750,100	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	ASN, PTT, Tenaga Kntrak, Pemangku Kebijakan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama serta Lembaga Pendidikan	3 Dokumen	36,084,037,650	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
4 01 04 1.02 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan				2 Dokumen	678,307,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	ASN, PTT, Tenaga Knttrak, Pemangku Kebijakan, Tokoh Masyrakat, Tokoh Agama serta Lembaga Pendidikan	2 Dokumen	967,621,300	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
4 01 04 1.02 03	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				1 Dokumen	184,507,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN, PTT, Tenaga Knttrak, Pemangku Kebijakan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama serta Lembaga Pendidikan	1 Dokumen	193,732,350	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
4 01 04 1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	956,585,700					3 Dokumen	994,415,575		
4 01 04 1.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata				1 Dokumen	314,567,800	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	ASN, PTT, Tenaga Knttrak, Pemangku Kebijakan, Tokoh Masyrakat, Tokoh Agama, Tokoh Budayawan Serta Lembaga Formal dan Non Formal	1 Dokumen	330,296,275	Sekretariat Daerah
4 01 04 1.03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan				1 Dokumen	355,949,100	Kab. Bima, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk	ASN, PTT, Tenaga Knttrak, Pemangku	1 Dokumen	363,746,750	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja						Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	Kebijakan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Budayawan Serta Lembaga Formal dan Non Formal			
4 01 04 1.03 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan				1 Dokumen	286,068,800	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, PTT, Tenaga Kntrak, Pemangku Kebijakan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Budayawan Serta Lembaga Formal dan Non Formal	1 Dokumen	300,372,550	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4 01	SEKRETARIAT DAERAH						3,087,622,563						96,885,772		
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Lakip Perangkat Daerah	skor		skor	A skor	271,089,378						A skor	0	
4 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase administrasi perencanaan dan pelaporan sesuai ketentuan	%		%	100 %	13,882,320						100 %	0	
4 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	4,333,566	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN dan Pemangku kebijakan	1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Nasional	Daerah				
4 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2,451,963	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN dan Pemangku kebijakan	1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2,070,205	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN dan Pemangku kebijakan	1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1,829,069	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN dan Pemangku kebijakan	1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1,833,128	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN dan Pemangku kebijakan	1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1,364,389	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN dan Pemangku kebijakan	1 Laporan	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	9,836,643						100 %	0	
4 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	5,938,599	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				ASN dan pemangku kebijakan	1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1,906,208	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN dan pemangku kebijakan	1 Laporan	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				1 Laporan	1,991,836	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN dan pemangku kebijakan	1 Laporan	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan pengelolaan administrasi BMD perangkat daerah	%		%	100 %	1,774,075						100 %	0	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1,774,075	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN	1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	167,540,849						100 %	0	
4 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				100 persen	14,169,471	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				ASN	100 persen	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				100 persen	9,155,802	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN	100 persen	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				100 persen	10,408,235	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN	100 persen	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				100 persen	6,053,016	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN	100 persen	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 persen	127,754,325	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN	100 persen	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	%		%	100 %	57,377,428						100 %	0	
4 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	57,377,428	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN	3 Unit	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	3,540,153						100 %	0	
4 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 persen	3,540,153	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN	100 persen	0	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						17,137,910							0	
4 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 persen	17,137,910	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		100 persen	0	Sekretariat Daerah
4 01 06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase bahan kebijakan perekonomian daerah Prosentase bahan kebijakan perekonomian Daerah	% %		% %	100 % 100 %	2,816,533,185						100 % 100 %	96,885,772	
4 01 06 1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah rumusan kebijakan dan koordinasi perekonomian	Rumusan		Rumusan	16 Rumusan	774,255,277						16 Rumusan	0	
4 01 06 1.01 01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				2 Dokumen	368,236,157	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, Masyarakat dan Pemangku kebijakan	2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 06 1.01 02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				2 Dokumen	406,019,120	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			ASN, Masyarakat dan Pemangku kebijakan	2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 06 1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah rumusan kebijakan sumber daya alam	Rumusan		Rumusan	6 Rumusan	738,172,737						6 Rumusan	0	
4 01 06 1.02 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				2 Dokumen	369,086,369	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			ASN, Masyarakat dan pemangku kebijakan	2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
4 01 06 1.02 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				2 Dokumen	184,543,184	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, Masayarakat dan pemangku kebijakan	2 Dokumen		0 Sekretariat Daerah
4 01 06 1.02 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				2 Dokumen	184,543,184	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, Masayarakat dan pemangku kebijakan	2 Dokumen		0 Sekretariat Daerah
4 01 06 1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD	Jumlah dokumen bahan kebijakan pengelolaan BUMD dan	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	1,304,105,171						10 Dokumen	96,885,772	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	dan BLUD	BLUD yang disusun													
4 01 06 1.03 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				2 Dokumen	904,261,606	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, Masyarakat dan Pemangku kebijakan	2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 06 1.03 02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi				2 Dokumen	123,028,789	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, Masyarakat dan Pemangku kebijakan	2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 06 1.03 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD				2 Dokumen	92,271,592	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, Masyarakat dan Pemangku kebijakan	2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
4 01 06 1.03 04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah				2 Dokumen	92,271,592	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Masyarakat dan Pemangku kebijakan	2 Dokumen	96,885,772	Sekretariat Daerah
4 01 06 1.03 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD				2 Dokumen	92,271,592	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Masyarakat dan Pemangku kebijakan	2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	9,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Dokumen	32,437,155	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	13,235,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Dokumen	5,193,045	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	4,160,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Laporan	17,620,183	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				3 Laporan	3,640,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		3 Laporan	4,811,963	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						3,640,800							4,811,963	
4 01 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	3,640,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Laporan	4,811,963	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						109,620,100							445,656,572	
4 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				75 Paket	42,859,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		75 Paket	189,765,068	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				75 Paket	10,173,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		75 Paket	189,756,068	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	5,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		2 Dokumen	11,765,089	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	10,745,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Laporan	10,928,647	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	40,441,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Laporan	43,441,700	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Nasional		Daerah			
4 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						56,615,400						111,040,897		
4 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,583,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Laporan	3,371,603	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	15,870,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Laporan	65,507,294	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	39,162,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Laporan	42,162,000	Sekretariat Daerah
4 01 08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentasi Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan	%		%	40 %	528,290,608						40 %	2,978,136,121	
4 01 08 1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentasi pelaksanaan pengendalian pembangunan	%		%	100 %	328,105,050						100 %	2,166,785,459	
4 01 08 1.01 01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	persentase data hasil monev Pelaksanaan Kegiatan APBD siap analisis				100 %	134,004,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	-	100 %	1,240,031,380	Sekretariat Daerah
4 01 08 1.01 02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN				4 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		-	4 Laporan	611,166,133	Sekretariat Daerah
4 01 08 1.01 03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Presentase data hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah				100 %	194,100,550		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	-	100 %	315,587,946	Sekretariat Daerah
4 01 08 1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah						200,185,558							811,350,662	
4 01 08 1.02 01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Analisis yang direkomendasikan				100 %	38,538,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		100 %	190,627,130	Sekretariat Daerah
4 01 08 1.02 02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase data laporan yang digunakan untuk rekomedasi				100 %	131,864,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		100 %	412,828,364	Sekretariat Daerah
4 01 08 1.02 03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Presentase hasil analisis yang di berikan rekomendasi Kebijakan Pembangunan				100 %	29,783,358		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100 %	207,895,168	Sekretariat Daerah
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01	SEKRETARIAT DAERAH						2,073,800,272							6,096,783,550	
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	Nilai		Nilai	A Nilai	478,309,961						A Nilai	288,062,715	
4 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase administrasi perencanaan dan pelaporan sesuai ketentuan	persen		persen	100 persen	34,327,756						100 persen	24,002,338	
4 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 dokumen	6,965,521	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja untuk SKPD	1 dokumen	7,487,935	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	4,774,097	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja untuk SKPD	1 Dokumen	3,197,155	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	4,808,546	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja untuk SKPD	1 Dokumen	3,234,187	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	4,868,707	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja untuk SKPD	1 Dokumen	3,298,860	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	4,793,783	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja untuk SKPD	1 Dokumen	3,218,316	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	8,117,102	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja untuk SKPD	1 Laporan	3,565,885	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	129,043,661						100 persen	31,775,153	
4 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	118,960,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja untuk SKPD	1 Dokumen	25,772,717	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
4 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	6,557,533	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja untuk SKPD	2 Laporan	2,211,848	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				18 Laporan	3,526,128	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja untuk SKPD	18 Laporan	3,790,588	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	161,497,086						100 persen	98,967,259	
4 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	25,464,104	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Penyediaan bahan perlengkapan perkantoran	4 Paket	16,623,912	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	13,121,759	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Penyediaan bahan perlengkapan perkantoran	1 Paket	14,105,891	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	10,408,236	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Penyediaan bahan perlengkapan perkantoran	2 Dokumen	11,188,853	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	12,502,987	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Penyediaan bahan perlengkapan perkantoran	1 Laporan	8,775,182	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Penyediaan bahan perlengkapan perkantoran	1 Laporan	48,273,421	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen		persen	100 persen	153,441,458						100 persen	133,317,965	
4 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	21,441,458	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	terlaksananya kegiatan surat menyurat dan pegadaan secara elektronik	1 Laporan	23,049,567	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber				1 Laporan	132,000,000	Semua Kab/Kota, Semua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk	Reformasi birokrasi dan transformasi	terlaksananya kegiatan surat menyurat dan	1 Laporan	110,268,398	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Daya Air dan Listrik yang Disediakan						Kecamatan, Semua Kelurahan		Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	pelayanan publik (PD-3)	pegadaan secara elektronik			
4 01 07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Tingkat kematangan unit kerja pengadaan barang/jasa	Level		Level	4 Level	1,595,490,311						4 Level	5,808,720,835	
4 01 07 1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pelayanan pemilihan penyedia barang dan jasa yang tepat waktu sesuai SOP	persen		persen	100 persen	1,570,866,600						100 persen	3,965,271,287	
4 01 07 1.01 01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa				1 Laporan	4,022,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pengadaan Barang Jasa Pemerintah	1 Laporan	196,715,383	Sekretariat Daerah
4 01 07 1.01 02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Laporan	1,562,822,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pengadaan Barang Jasa Pemerintah	1 Laporan	3,464,470,380	Sekretariat Daerah
4 01 07 1.01 03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa				1 Laporan	4,022,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pengadaan Barang Jasa Pemerintah	1 Laporan	304,085,524	Sekretariat Daerah
4 01 07 1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah standarisasi dokumen pengelolaan sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	standar		standar	17 standar	12,066,600						17 standar	854,987,099	
4 01 07 1.02 01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik				1 Laporan	4,022,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Laporan	353,355,229	Sekretariat Daerah
4 01 07 1.02 02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				1 Laporan	4,022,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Laporan	254,151,893	Sekretariat Daerah
4 01 07 1.02 03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				1 Laporan	4,022,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Laporan	247,479,977	Sekretariat Daerah
4 01 07 1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah UKPBJ yang memenuhi level kematangan minimal 3	Kab/Kota		Kab/Kota	10 Kab/Kota	12,557,111						10 Kab/Kota	988,462,449	
4 01 07 1.03 01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan	Jumlah O+A2922:12929rang yang Mengikuti				0 Orang 100 Orang	4,022,200	Semua Kab/Kota, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bagian Pengadaan Barang dan JAsa	0 Orang 100 Orang	215,500,489	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Jasa	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa						Kecamatan, Semua Kelurahan				Kabupaten/Kota se NTB			
4 01 07 1.03 02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa				10 Dokumen	4,022,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bagian Pengadaan Barang dan JA sa Kabupaten/Kota se NTB	10 Dokumen	184,438,592	Sekretariat Daerah
4 01 07 1.03 03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	4,512,711	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bagian Pengadaan Barang dan JA sa Kabupaten/Kota se NTB	1 Dokumen	588,523,368	Sekretariat Daerah
TOTAL							243,195,044,942						101,808,851,538		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	02				SEKRETARIAT DPRD						100,325,781,511							132,859,572,629		
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	72,533,541,311						BB Nilai	88,830,642,867		
4	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dok		dok	22 dok	441,058,200						22 dok	317,295,100		
4	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	90,911,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	1 Dokumen	27,187,700	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				1 Dokumen	82,081,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	1 Dokumen	88,644,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD				1 Dokumen	99,646,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	1 Dokumen	88,644,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD				1 Dokumen	12,968,900	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	1 Dokumen	35,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD				1 Dokumen	23,440,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	1 Dokumen	35,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	37,235,100	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	1 Laporan	29,208,400	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16 Laporan	94,776,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	16 Laporan	13,611,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi keuangan	jenis		jenis	5 jenis	14,676,111,155						5 jenis	15,390,960,773		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				129 Orang/ Bulan	14,089,492,355	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	129 Orang/ Bulan	14,730,483,373	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	257,186,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	6 Dokumen	431,005,100	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1050 Dokumen	209,977,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	1050 Dokumen	157,151,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	30,207,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	1 Laporan	50,974,800	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	89,247,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	1 Dokumen	21,346,500	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi BMD	dok		dok	7 dok	24,420,000						7 dok	26,200,000	
4 02 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2,010,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	2 Dokumen	5,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	7,475,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	2 Laporan	9,125,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	14,935,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	1 Laporan	12,075,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan kepegawaian	jenis		jenis	4 jenis	284,965,200						4 jenis	2,128,698,600	
4 02 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				6 Unit	74,553,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	6 Unit	554,605,400	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan							
4 02 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	8,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	1 Paket	754,605,400	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kependagawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kependagawaian				1 Dokumen	39,782,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	1 Dokumen	109,486,800	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang 60 Orang	8,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	0 Orang 60 Orang	260,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	100 Orang	35,001,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	128,730,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	5 Orang	415,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi umum OPD	jenis		jenis	9 jenis	1,083,100,700						9 jenis	3,778,861,800	
4 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				13 Paket	118,330,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	13 Paket	70,967,500	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	112,933,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	5 Paket	63,360,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				22 Paket	216,309,300	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	22 Paket	529,979,400	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang				5 Paket	80,565,500	Kota Mataram, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	Reformasi birokrasi dan transformasi	Aparatur	5 Paket	496,154,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Disediakan						Kecamatan, Semua Kelurahan		Dan Transformasi Pelayanan Publik	pelayanan publik (PD-3)				
4 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	195,997,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	10 Dokumen	172,800,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	133,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	12 Laporan	1,460,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	53,450,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	12 Laporan	577,940,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	97,555,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	1 Dokumen	133,260,900	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	74,959,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	12 Dokumen	274,400,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah	jenis		jenis	2 jenis	1,643,058,200						2 jenis	5,182,361,600	
4 02 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	750,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	1 Unit	1,405,940,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	360,942,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	1 Unit	400,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.07 04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan				4 Unit	100,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	4 Unit	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	276,238,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	2 Paket	1,342,513,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	70,578,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	12 Unit	1,863,998,600	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				7 Unit	85,300,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	7 Unit	169,910,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah	jenis		jenis	3 jenis	5,274,509,560						3 jenis	5,293,218,194	
4 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	15,375,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	1 Laporan	115,700,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	816,768,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	12 Laporan	1,113,301,500	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	4,442,366,560	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	12 Laporan	4,064,216,694	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah yang dipelihara	jenis		jenis	6 jenis	2,627,633,000						6 jenis	12,100,107,000	
4 02 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				4 Unit	167,600,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	4 Unit	167,600,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				72 Unit	1,368,360,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	72 Unit	1,198,060,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit 110 Unit	27,500,000	Kota Mataram, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	Reformasi birokrasi dan transformasi	Aparatur	0 Unit 110 Unit	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Mebel yang Dipelihara						Kecamatan, Semua Kelurahan		Dan Transformasi Pelayanan Publik	pelayanan publik (PD-3)				
4 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				297 Unit	357,140,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	297 Unit	572,600,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 1 Unit	35,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	0 Unit 1 Unit	15,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	377,450,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	3 Unit	7,201,847,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	294,583,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	3 Unit	2,945,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah jenis layanan keuangan DPRD	jenis		jenis	3 jenis	44,446,203,596						3 jenis	42,390,360,700	
4 02 01 1.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				65 Orang/ Bulan	43,121,913,096	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB	65 Orang/ Bulan	41,888,510,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				4 Paket	934,290,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB	4 Paket	501,850,700	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				65 Orang	390,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB	65 Orang	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah jenis layanan administrasi DPRD	jenis		jenis	3 jenis	2,032,481,700						3 jenis	2,222,579,100	
4 02 01 1.16 02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				1 Laporan	149,783,100	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB	1 Laporan	800,134,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan				43 Laporan	922,045,600	Semua Kab/Kota, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	Reformasi birokrasi dan transformasi	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB	43 Laporan	922,045,600	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Konsultasi DPRD						Kecamatan, Semua Kelurahan		Dan Transformasi Pelayanan Publik	pelayanan publik (PD-3)				
4 02 01 1.16 04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				3 Paket	960,653,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB	3 Paket	500,399,500	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%		%	100 %	27,792,240,200						100 %	44,028,929,762	
4 02 02 1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	dok		dok	9 dok	4,442,772,400						9 dok	2,107,474,000	
4 02 02 1.01 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				6 Dokumen	395,004,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD Provinsi NTB dan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB	6 Dokumen	344,610,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.01 02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda				12 Dokumen	292,172,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD Provinsi NTB dan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB	12 Dokumen	354,746,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.01 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan				1 Dokumen	3,469,500,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD Provinsi NTB dan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB	1 Dokumen	1,110,968,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.01 04	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				6 Dokumen	259,917,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD Provinsi NTB dan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB	6 Dokumen	276,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.01 05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	26,177,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD Provinsi NTB dan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB	1 Dokumen	21,150,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah laporan rekomendasi kebijakan anggaran	dok		dok	4 dok	597,386,000						4 dok	665,000,000	
4 02 02 1.02 01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	63,243,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD Provinsi NTB	1 Dokumen	170,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.02 02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan				1 Dokumen	182,834,500	Semua Kab/Kota, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	Reformasi birokrasi dan transformasi	OPD Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD	1 Dokumen	170,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		PPAS						Kecamatan, Semua Kelurahan		Dan Transformasi Pelayanan Publik	pelayanan publik (PD-3)	Provinsi NTB			
4 02 02 1.02 03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	128,887,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD Provinsi NTB	1 Dokumen	170,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.02 04	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD				1 Dokumen	122,060,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD Provinsi NTB	1 Dokumen	70,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.02 06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	100,360,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD Provinsi NTB	1 Dokumen	85,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	dok		dok	5 dok	385,573,300						5 dok	820,000,000	
4 02 02 1.03 01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				24 Laporan	82,321,100	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Komisi I. II. III, IV dan V DPRD Provinsi NTB dengan Mitra OPD provinsi NTB	24 Laporan	140,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.03 02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				24 Laporan	70,721,100	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Komisi I. II. III, IV dan V DPRD Provinsi NTB dengan Mitra OPD provinsi NTB	24 Laporan	140,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.03 03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				24 Laporan	73,621,100	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Komisi I. II. III, IV dan V DPRD Provinsi NTB dengan Mitra OPD provinsi NTB	24 Laporan	140,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.03 04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				24 Laporan	73,621,100	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Komisi I. II. III, IV dan V DPRD Provinsi NTB dengan Mitra OPD provinsi NTB	24 Laporan	140,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.03 05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				24 Laporan	73,621,100	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Komisi I. II. III, IV dan V DPRD Provinsi NTB dengan Mitra OPD provinsi NTB	24 Laporan	140,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.03 06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan				1 Dokumen	11,667,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik	Komisi I. II. III, IV dan V DPRD Provinsi NTB dengan Mitra	1 Dokumen	120,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Pemeriksa Keuangan	Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan						Semua Kelurahan		Pelayanan Publik	(PD-3)	OPD provinsi NTB			
4 02 02 1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapsitas	orang		orang	65 orang	3,152,688,600						65 orang	4,839,509,862	
4 02 02 1.04 02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				3 Dokumen	1,013,116,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB dan Tenaga Ahli dan Masyarakat	3 Dokumen	2,000,977,700	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan				12 Dokumen	1,382,477,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB dan Tenaga Ahli dan Masyarakat	12 Dokumen	1,688,072,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				200 Orang	201,849,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB dan Tenaga Ahli dan Masyarakat	200 Orang	378,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				9 Orang	435,441,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB dan Tenaga Ahli dan Masyarakat	9 Orang	300,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.04 06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				24 Dokumen	62,448,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB dan Tenaga Ahli dan Masyarakat	24 Dokumen	240,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.04 07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	57,356,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB dan Tenaga Ahli dan Masyarakat	1 Dokumen	232,460,162	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah laporan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	dok		dok	5 dok	16,129,988,000						5 dok	25,706,750,000	
4 02 02 1.05 01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				975 Laporan	1,201,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB	975 Laporan	8,832,600,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.05 02	Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				3 Dokumen	136,748,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB	3 Dokumen	100,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 02 1.05 03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				2 Dokumen	14,792,140,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB	2 Dokumen	16,774,150,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	dok		dok	2 dok	45,310,800						2 dok	712,390,400	
4 02 02 1.06 01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	28,848,900	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Anggota DPRD Provinsi NTB	1 Dokumen	396,095,400	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.06 02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				12 Laporan	16,461,900	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Anggota DPRD Provinsi NTB	12 Laporan	316,295,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah jenis fasilitasi tugas DPRD	jenis		jenis	4 jenis	3,038,521,100						4 jenis	9,177,805,500	
4 02 02 1.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				975 Dokumen	1,200,550,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB	975 Dokumen	8,500,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.08 02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	13,832,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB	1 Laporan	11,005,500	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.08 03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				3 Dokumen	156,321,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB	3 Dokumen	100,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.08 04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				4 Dokumen	1,667,817,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB	4 Dokumen	566,800,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
TOTAL							100,325,781,511							132,859,572,629	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	01				PERENCANAAN						78,765,576,821						200,000,000		
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERANGKAT DAERAH	%		%	100 %	62,250,110,621						100 %	0	
5	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perangkat daerah	dokumen		dokumen	7 dokumen	1,102,056,300						7 dokumen	0	
5	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	596,788,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Sekretariat	3 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	175,025,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Sekretariat	1 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	189,386,700	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Sekretariat	1 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Dokumen	140,855,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Sekretariat	2 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi keuangan	jenis		jenis	6 jenis	16,787,097,501						6 jenis	0	
5	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				110 Orang/ Bulan	16,566,863,101	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Sekretariat	110 Orang/ Bulan	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				157 Dokumen	93,658,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Sekretariat	157 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	26,544,100	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Sekretariat	5 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4 Dokumen	30,761,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Sekretariat	4 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	34,662,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Sekretariat	3 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				4 Dokumen	34,609,100	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Sekretariat	4 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	157,122,100						1 Laporan	0	
5 01 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Laporan	157,122,100	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Sekretariat	2 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	dokumen		dokumen	1 dokumen	336,513,900						1 dokumen	0	
5 01 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	105,053,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Sekretariat	1 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	100,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Sekretariat	1 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang 25 Orang	81,460,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Sekretariat	0 Orang 25 Orang	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				93 Orang	50,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Sekretariat	93 Orang	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi Umum	dokumen		dokumen	1 dokumen	961,375,000						1 dokumen	0	
5 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	140,365,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Sekretariat	2 Paket	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	67,937,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Sekretariat	10 Paket	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				70 Paket	309,400,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Sekretariat	70 Paket	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	294,084,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Sekretariat	2 Paket	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				3 Dokumen	149,588,300	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Sekretariat	3 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah	jenis		jenis	5 jenis	36,272,539,100						5 jenis	0	
5 01 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Sekretariat	0 Unit	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.07 04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan				5 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Sekretariat	5 Unit	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Paket	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Sekretariat	3 Paket	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	272,539,100	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Sekretariat	10 Unit	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang				1 Unit	36,000,000,000	Kota Mataram, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi	Bidang Sekretariat	1 Unit	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Disediakan						Kecamatan, Semua Kelurahan			elayanan publik (PD-3)				
5 01 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Sekretariat	1 Unit	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa pelayanan	jenis		jenis	4 jenis	5,629,496,720						4 jenis	0	
5 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3200 Laporan	127,539,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Sekretariat	3200 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	419,200,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Sekretariat	36 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				106 Laporan	58,949,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Sekretariat	106 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	5,023,807,920	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Sekretariat	4 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah	jenis		jenis	4 jenis	1,003,910,000						4 jenis	0	
5 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				79 Unit	600,400,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Sekretariat	79 Unit	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit 110 Unit	56,250,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Sekretariat	0 Unit 110 Unit	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 10 Unit	148,700,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Sekretariat	0 Unit 10 Unit	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	198,560,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Sekretariat	1 Unit	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Hasil Evaluasi yang dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan	%		%	100 %	4,345,117,300						100 %	200,000,000	
5 01 02 1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	Dokumen		Dokumen	14 Dokumen	1,885,103,700						14 Dokumen	0	
5 01 02 1.01 01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)				3 Dokumen	165,405,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang P2EPD	3 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 1.01 02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah				0 Dokumen 2 Dokumen	249,311,100	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang P2EPD	0 Dokumen 2 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 1.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				2 Berita Acara	82,741,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang P2EPD	2 Berita Acara	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 1.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				0 Berita Acara 2 Berita Acara	194,007,900	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang P2EPD	0 Berita Acara 2 Berita Acara	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 1.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi				1 Berita Acara 0 Berita Acara	861,564,700	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Bidang P2EPD	1 Berita Acara 0 Berita Acara	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 1.01 06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				5 Dokumen	332,073,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang P2EPD	5 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Hasil Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	dokumen		dokumen	1 dokumen	2,162,525,000						1 dokumen	200,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 02 1.02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				3 Dokumen 0 Dokumen	333,140,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang P2EPD	3 Dokumen 0 Dokumen	200,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 02 1.02 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				96 Orang	852,940,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang P2EPD	96 Orang	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 02 1.02 03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				150 Orang	976,445,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang P2EPD	150 Orang	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 02 1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	dokumen		dokumen	22 dokumen	297,488,600					22 dokumen	0		
5 01 02 1.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				2 Laporan	55,918,300	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang P2EPD	2 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 02 1.03 02	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya				1 Kerja Sama	24,385,100	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang P2EPD	1 Kerja Sama	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 02 1.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				14 Laporan	153,400,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang P2EPD	14 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 02 1.03 04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi				5 Dokumen	63,785,100	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang P2EPD	5 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	%		%	100 %	12,170,348,900						100 %	0	
5 01 03 1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	dokumen		dokumen	3 dokumen	2,670,115,700						3 dokumen	0	
5 01 03 1.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	256,061,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 1.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				2 Laporan	60,305,900	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 1.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				2 Laporan	171,279,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 1.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	143,978,100	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 1.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	442,074,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	4 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 1.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				4 Perangkat Daerah	55,025,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	4 Perangkat Daerah	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 1.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					4 Perangkat Daerah	385,016,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	4 Perangkat Daerah	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia													
5 01 03 1.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				2 Dokumen	1,156,374,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jmlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	dokumen		dokumen	3 dokumen	6,658,168,900						3 dokumen	0	
5 01 03 1.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				5 Dokumen	203,166,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Perekonomian dan SDA	5 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 1.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				4 Perangkat Daerah	290,552,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Perekonomian dan SDA	4 Perangkat Daerah	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 1.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				4 Perangkat Daerah	335,925,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Perekonomian dan SDA	4 Perangkat Daerah	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 1.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				3 Laporan	1,405,762,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Perekonomian dan SDA	3 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 1.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	235,417,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Perekonomian dan SDA	2 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 1.02 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				4 Perangkat Daerah	46,400,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			Bidang Perekonomian dan SDA	4 Perangkat Daerah	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 03 1.02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				4 Perangkat Daerah	1,266,247,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Perekonomian dan SDA	4 Perangkat Daerah	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 1.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				2 Laporan	2,874,696,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Perekonomian dan SDA	2 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	dokumen		dokumen	3 dokumen	2,842,064,300						3 dokumen	0	
5 01 03 1.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	643,915,900	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	4 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 1.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				4 Laporan	187,504,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	4 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 1.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				4 Laporan	120,726,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	4 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 1.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				2 Laporan	651,365,100	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 1.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	530,402,900	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 1.03 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				2 Laporan	207,012,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
5 01 03 1.03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				2 Laporan	201,763,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 03 1.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Rerja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	299,375,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
TOTAL							78,765,576,821								200,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	02				KEUANGAN						970,101,223,395							953,768,764,385		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip OPD	80		80	A 80	45,873,739,518						A 80	37,361,080,886		
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Peangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	522,946,684						12 Dokumen	544,815,084		
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	81,286,146	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD Provinsi NTB	2 Dokumen	83,724,730	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	111,016,393	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD Provinsi NTB	1 Dokumen	114,346,885	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				3 Dokumen	89,133,956	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD Provinsi NTB	3 Dokumen	91,807,975	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	73,959,651	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD Provinsi NTB	1 Dokumen	82,358,440	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	96,205,437	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD Provinsi NTB	1 Laporan	99,091,600	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	71,345,101	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD Provinsi NTB	4 Laporan	73,485,454	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	19 Dokumen	37,239,849,873						19 Dokumen	24,671,298,226		
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				160 Orang/ Bulan	36,649,784,650	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			BPKAD Provinsi NTB	160 Orang/ Bulan	24,169,621,048	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ATK yang dibutuhkan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				5 jenis 1 Dokumen	132,977,429	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD Provinsi NTB	5 jenis 1 Dokumen	33,966,752	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan				1 Dokumen 35 Orang	197,079,300	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD Provinsi NTB	1 Dokumen 35 Orang	197,841,679	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	99,573,483	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD Provinsi NTB	1 Laporan	102,560,687	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				17 Laporan	136,297,658	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD Provinsi NTB	17 Laporan	142,446,587	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran tersusun				1 Dokumen	24,137,353	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD Provinsi NTB	1 Dokumen	24,861,473	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	114,638,028						6 Dokumen	179,877,150	
5 02 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD tersusun				3 Dokumen	54,001,497	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD Provinsi NTB	3 Dokumen	55,621,542	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	36,499,178	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD Provinsi NTB	1 Laporan	99,394,152	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	24,137,353	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD Provinsi NTB	1 Laporan	24,861,456	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan Kompetensi Aparatur yang terla Jumlah Dokumen Kepegawaian	Orang Dokumen		Orang Dokumen	50 Orang 12 Dokumen	2,631,872,958						50 Orang 12 Dokumen	3,799,329,425	
5 02 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	150,331,270	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh ASN Pemprov NTB	2 Unit	103,341,208	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang 10 Orang	132,358,681	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh ASN Pemprov NTB	0 Orang 10 Orang	136,329,441	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan													
5 02 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	2,178,269,073	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh ASN Pemprov NTB	50 Orang	3,383,617,415	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	170,913,934	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh ASN Pemprov NTB	10 Orang	176,041,361	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan Cetak dan Percetakan Kantor yang tersedia	Jenis		Jenis	8 Jenis	1,860,972,879						8 Jenis	4,757,045,013	
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponem Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Jenis 1 Paket	35,506,479	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelancaran Pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD Provinsi NTB	8 Jenis 1 Paket	36,571,674	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				27 Paket	115,615,504	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelancaran Pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD Provinsi NTB	27 Paket	119,118,220	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaanya Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1250 Dokumen 1 Paket	118,412,126	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelancaran Pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD Provinsi NTB	1250 Dokumen 1 Paket	121,964,490	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Surat Kabar dan Buku tentang Pengelolaan Keuangan Daerah				50 Dokumen 7200 Eksampler	64,943,238	Kota Mataram, Mataram, Pagutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelancaran Pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD Provinsi NTB	50 Dokumen 7200 Eksampler	66,891,535	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia				1 Laporan 280 Kali	220,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelancaran Pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD Provinsi NTB	1 Laporan 280 Kali	250,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				85 Laporan	662,407,106	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelancaran Pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD Provinsi NTB	85 Laporan	682,279,319	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan							
5 02 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				140000 Dokumen	340,184,467	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelancaran Pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD Provinsi NTB	140000 Dokumen	350,009,001	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Upgrade Aplikasi/Website				5 Dokumen 2 Kali	303,903,959	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelancaran Pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD Provinsi NTB	5 Dokumen 2 Kali	3,130,210,774	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan BMD yang tersusun	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	695,000,993						6 Dokumen	509,851,022	
5 02 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	233,183,116	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD, Provinsi NTB	1 Unit	240,178,608	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	275,110,195	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD, Provinsi NTB	10 Unit	180,363,501	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	186,707,682	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD, Provinsi NTB	1 Unit	89,308,913	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Jasa		Jasa	7 Jasa	2,230,526,205						7 Jasa	2,297,441,992	
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Menyurat yang tersedia				1 Laporan 8500 Surat	125,321,423	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelaksana tupoksi, dan mitra lainnya	1 Laporan 8500 Surat	129,081,066	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Air Listrik tersedia Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Rekening 1 Laporan	608,613,734	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelaksana tupoksi, dan mitra lainnya	4 Rekening 1 Laporan	626,872,146	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Peralatan Kantor yang tersedia Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100 Unit 1 Laporan	217,359,147	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelaksana tupoksi, dan mitra lainnya	100 Unit 1 Laporan	223,879,922	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang tersedia				33 Orang 1 Laporan	1,279,231,901	Kota Mataram, Mataram,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelaksana tupoksi, dan mitra lainnya	33 Orang 1 Laporan	1,317,608,858	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						Pejanggik							
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara	Jenis		Jenis	4 Jenis	577,931,898						4 Jenis	601,422,974	
5 02 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				30 Unit	331,630,475	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BMD BPKAD Provinsi NTB	30 Unit	341,579,389	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	101,127,225	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BMD BPKAD Provinsi NTB	2 Unit	104,161	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				80 Unit	23,202,300	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BMD BPKAD Provinsi NTB	80 Unit	23,898,369	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	11,775,167	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BMD BPKAD Provinsi NTB	1 Unit	12,128,422	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	11,865,383	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BMD BPKAD Provinsi NTB	1 Unit	122,431,345	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	98,331,348	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BMD BPKAD Provinsi NTB	1 Unit	101,281,288	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu Evaluasi APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Pe Dokumen APBD/ APBD dan Pertanggungjawaban APBD/APBD Provinsi	% % % %		% % % %	100 % 100 % 100 % 100 %	922,860,099,695						100 % 100 % 100 % 100 %	914,984,016,144	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Persentase Ketepatan Waktu Evaluasi Dokumen APBD/ APBDP Kabupaten/Kota dan Pertanggungjawaban APBD/APBDP Kabupaten/Kota													
5 02 02 1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang tersusun	Dokumen		Dokumen	8 Dokumen	2,563,796,155						8 Dokumen	2,640,710,037	
5 02 02 1.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				1 Dokumen	103,582,029	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh OPD lingkup Pemprov NTB	1 Dokumen	106,689,489	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				1 Dokumen	108,390,241	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh OPD lingkup Pemprov NTB	1 Dokumen	111,641,948	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				136 Dokumen	111,695,293	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh OPD lingkup Pemprov NTB	136 Dokumen	115,046,151	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				136 Dokumen	121,488,403	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh OPD lingkup Pemprov NTB	136 Dokumen	125,133,055	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi				136 Dokumen	67,571,827	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh OPD lingkup Pemprov NTB	136 Dokumen	69,598,981	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.01 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				136 Dokumen	37,084,236	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh OPD lingkup Pemprov NTB	136 Dokumen	38,196,763	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				0 Dokumen 2 Dokumen	1,084,814,840	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh OPD lingkup Pemprov NTB	0 Dokumen 2 Dokumen	1,117,359,285	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				0 Dokumen 2 Dokumen	346,406,048	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh OPD lingkup Pemprov NTB	0 Dokumen 2 Dokumen	356,798,229	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 02 1.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokumen	103,855,815	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh OPD lingkup Pemprov NTB	1 Dokumen	106,971,490	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.01 10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				1 Dokumen	34,470,497	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh OPD lingkup Pemprov NTB	1 Dokumen	35,504,612	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.01 11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				2 Dokumen	87,148,419	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh OPD lingkup Pemprov NTB	2 Dokumen	89,762,872	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.01 12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				2 Dokumen	26,173,471	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh OPD lingkup Pemprov NTB	2 Dokumen	26,958,675	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.01 13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi				37 Orang	331,115,036	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh OPD lingkup Pemprov NTB	37 Orang	341,048,487	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
5 02 02 1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten /Kota	Dokumen		Dokumen	31 Dokumen	1,218,114,755						31 Dokumen	1,254,664,377	
5 02 02 1.02 02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Perda dan Perkada tentang Penjabaran APBD Kab/Kota Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota				10 Dokumen 1 Laporan	129,954,691	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10 Kab/Kota Se NTB	10 Dokumen 1 Laporan	133,853,331	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.02 03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Perda/Perkada tentang Perubahan APBD Kab/Kota Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota				10 Dokumen 1 Laporan	221,651,109	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10 Kab/Kota Se NTB	10 Dokumen 1 Laporan	228,300,642	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.02 04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Perda dan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				10 Dokumen 1 Laporan	223,956,257	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10 Kab/Kota Se NTB	10 Dokumen 1 Laporan	230,674,945	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Kabupaten/Kota													
5 02 02 1.02 05	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Asistentensi Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi				10 Dokumen 10 Dokumen	68,642,264	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10 Kab/Kota Se NTB	10 Dokumen 10 Dokumen	70,701,532	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.02 06	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan				1 Laporan	216,292,222	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan				10 Kab/Kota Se NTB	1 Laporan	222,787,169	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.02 11	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota				20 Orang	36,512,648	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10 Kab/Kota Se NTB	20 Orang	37,608,027	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
5 02 02 1.02 12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen laporan Keuangan Kab/Kota yang tersedia				2 Dokumen 11 Dokumen	321,105,564	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10 Kab/Kota Se NTB	2 Dokumen 11 Dokumen	330,738,731	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Provinsi NTB yang tersusun tepat Waktu	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	676,236,747						4 Dokumen	735,525,721	
5 02 02 1.04 01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				1 Laporan	122,747,476	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh Opd lingkup Pemprov NTB	1 Laporan	126,429,900	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.04 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				1 Dokumen	122,747,476	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh Opd lingkup Pemprov NTB	1 Dokumen	165,427,140	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.04 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				17 Laporan	59,956,020	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh Opd lingkup Pemprov NTB	17 Laporan	61,754,700	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.04 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi				2 Dokumen	229,426,315	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh Opd lingkup Pemprov NTB	2 Dokumen	236,309,105	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.04 08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	26,936,363	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh Opd lingkup Pemprov NTB	1 Dokumen	27,744,453	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.04 09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional				1 Dokumen	43,174,144	Kota Mataram, Mataram,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh Opd lingkup Pemprov NTB	1 Dokumen	44,469,368	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah						Pejanggik							
5 02 02 1.04 10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	27,826,983	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh Opd lingkup Pemprov NTB	1 Dokumen	28,661,792	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.04 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi				30 Orang	39,929,187	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Mataram, Pejanggik Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh Opd lingkup Pemprov NTB	30 Orang	41,127,062	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.04 12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina				4 OPD	3,492,783	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh Opd lingkup Pemprov NTB	4 OPD	3,602,201	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 02 1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Dana Bagi Hasil dan Dana Bantuan Keuangan Provinsi yang tersusun	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	917,943,667,791						4 Dokumen	910,045,883,237	
5 02 02 1.05 04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				1 Laporan	63,900,000,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penerima Bantuan Keuangan, Bantuan Mendesak , pihak bank dan Dana Bagi hasil	1 Laporan	65,817,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.05 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	415,422,682	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penerima Bantuan Keuangan, Bantuan Mendesak , pihak bank dan Dana Bagi hasil	1 Laporan	427,885,362	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.05 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	11,601,150,045	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penerima Bantuan Keuangan, Bantuan Mendesak , pihak bank dan Dana Bagi hasil	1 Laporan	11,949,184,546	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.05 10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				1 Laporan	842,027,095,064	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penerima Bantuan Keuangan, Bantuan Mendesak , pihak bank dan Dana Bagi hasil	1 Laporan	831,851,813,329	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Data Bidang Keuangan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	458,284,247						1 Dokumen	307,232,772	
5 02 02 1.06 01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah				2 Dokumen	66,658,468	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh OPD lingkup Pemprov NTB	2 Dokumen	68,658,222	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.06 02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Jumlah pemeliharaan Aplikasi keuangan Daerah				1 Dokumen 2 Kali	132,202,762	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh OPD lingkup Pemprov NTB	1 Dokumen 2 Kali	136,168,844	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.06 03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi				36 Orang	259,423,017	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh OPD lingkup Pemprov NTB	36 Orang	102,405,706	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan BMD pada PD yang Akurat dan Akuntabel	%		%	75 %	1,367,384,182						75 %	1,423,667,355	
5 02 03 1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barfang Milik Daerah yang tersusun	%		%	100 %	1,367,384,182						100 %	1,423,667,355	
5 02 03 1.01 01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	38,161,983	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BMD OPD Pemprov NTB	1 Dokumen	44,068,593	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 1.01 02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	42,785,041	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BMD OPD Pemprov NTB	2 Dokumen	44,068,593	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 1.01 03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik				1 Dokumen	125,034,975	Kota Mataram,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BMD OPD Pemprov NTB	1 Dokumen	128,785,921	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Milik Daerah	Daerah						Mataram, Pejanggik							Daerah
5 02 03 1.01 04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				3 Dokumen	27,913,527	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BMD OPD Pemprov NTB	3 Dokumen	28,750,933	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 1.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan BMD yang direkap Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				12 Dokumen 1 Laporan	566,211,530	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BMD OPD Pemprov NTB	12 Dokumen 1 Laporan	583,197,876	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 1.01 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				12 Laporan	62,102,116	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BMD OPD Pemprov NTB	12 Laporan	63,965,180	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 1.01 08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				5 Laporan	150,000,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BMD OPD Pemprov NTB	5 Laporan	165,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 1.01 09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	56,549,806	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BMD OPD Pemprov NTB	1 Laporan	58,246,300	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 1.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Persetujuan gubernur tentang Pemindahtangan Jumlah SK Penetapan dan Penggunaann BMD Jumlah SK Penghapusan BMD				1 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen	74,757,811	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BMD OPD Pemprov NTB	1 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen	77,000,545	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 1.01 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Berita Acara hasil rekonsiliasi Barang Milik daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				136 Dokumen 1 Laporan	113,375,720	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BMD OPD Pemprov NTB	136 Dokumen 1 Laporan	116,776,991	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 1.01 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	85,923,918	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BMD OPD Pemprov NTB	1 Laporan	88,501,635	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
5 02 03 1.01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				136 Orang	24,567,755	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BMD OPD Pemprov NTB	136 Orang	25,304,788	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5 02	KEUANGAN					1,047,134,022								1,112,898,043		
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip OPD	A		A	80 A	240,000,000						80 A	287,800,000		
5 02 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan , Penanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	0						2 Dokumen	14,800,000		
5 02 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	0	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD Provinsi NTB	1 Dokumen	5,800,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	0	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD Provinsi NTB	0 Dokumen	9,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Cetakan dan Penggadaan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	159,000,000						1 Dokumen	186,000,000		
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				500 Paket	50,000,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelancaran Kinerja UPTB Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah	500 Paket	65,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				30 Dokumen	25,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelancaran Kinerja UPTB Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah	30 Dokumen	35,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Makanan dan Minuman Tamu yang tersedia				1 Laporan 40 kali	29,000,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelancaran Kinerja UPTB Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah	1 Laporan 40 kali	30,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	55,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelancaran Kinerja UPTB Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah	30 Laporan	56,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Jasa Perkantoran yang tersusun	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	64,000,000						2 Dokumen	68,000,000	
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat (materai) tersedia Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				190 lembar 0 Laporan 1 Laporan	2,000,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelancaran Pelaksanaan Tupoksi UPTB Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah	190 lembar 0 Laporan 1 Laporan	3,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi dan Listrik tersedia Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Rekening 1 Laporan	62,000,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelancaran Pelaksanaan Tupoksi UPTB Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah	2 Rekening 1 Laporan	65,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara	Unit		Unit	10 Unit	17,000,000						10 Unit	19,000,000	
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	5,000,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BMD BPKAD Provinsi NTB	10 Unit	4,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	12,000,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BMD BPKAD Provinsi NTB	1 Unit	15,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan BMD pada PD yang Akurat dan Akuntabel	%		%	75 %	807,134,022						75 %	825,098,043	
5 02 03 1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tersusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	807,134,022						1 Dokumen	825,098,043	
5 02 03 1.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset yang tersertifikat Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Penanganan Sengketa Aset Pemprov yang diproses				50 Persil 1 Laporan 5 Sengketa	432,134,022	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BMD Pemprov NTB	50 Persil 1 Laporan 5 Sengketa	445,098,043	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
5 02 03 1.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen BA Hasil Pemanfaatan Aset Pemprov yang termanfaatkan Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi PemanfaatanBarang Milik Daerah				474 Dokumen 1 Dokumen	375,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BMD Pemprov NTB	474 Dokumen 1 Dokumen	380,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5 02	KEUANGAN						1,120,402,110							1,127,990,768	
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip OPD	A		A	80 A	27,750,000						80 A	35,700,000	
5 02 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan , Penanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	0						1 Dokumen	2,900,000	
5 02 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	0	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bpkad Provinsi NTB	0 Dokumen	2,900,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Barang cetakaran dan Peralatan yang tersedia	Jenis		Jenis	6 Jenis	20,750,000						6 Jenis	23,800,000	
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggadaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				600 Dokumen 1 Paket	11,000,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD Provinsi NTB	600 Dokumen 1 Paket	12,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	3,000,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD Provinsi NTB	10 Dokumen	5,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Makanan dan minuman tamu yang tersedia				1 Laporan 20 Kali	6,750,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD Provinsi NTB	1 Laporan 20 Kali	6,800,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang yang tersedia	Jenis		Jenis	1 Jenis	2,000,000						1 Jenis	3,000,000	
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa Surat Menyurat (materai) yang tersedia Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				450 lembar 1 Laporan	2,000,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	450 lembar 1 Laporan	3,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Unit		Unit	10 Unit	5,000,000						10 Unit	6,000,000	
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	5,000,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BMD BPKAD Pemprov NTB	10 Unit	6,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Ketepatan Waktu Evaluasi APBD / APBDP dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Dokumen APBD/ APBDP dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	% %		% %	100 % 100 %	1,092,652,110						100 % 100 %	1,092,290,768	
5 02 02 1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	1,092,652,110						12 Dokumen	1,092,290,768	
5 02 02 1.03 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				1 Dokumen	758,813,698	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh OPD lingkup Pemprov NTB	1 Dokumen	781,578,109	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.03 02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				1 Laporan	636,639	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh OPD lingkup Pemprov NTB	1 Laporan	655,738	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.03 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				136 Dokumen	31,995,392	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh OPD lingkup Pemprov NTB	136 Dokumen	32,956	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.03 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi				10 Dokumen	217,372,721	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh OPD lingkup Pemprov NTB	10 Dokumen	223,894,721	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya						Kelurahan Kota Mataram, Mataram, Pejanggik							
5 02 02 1.03 06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaa n Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				4 Dokumen	15,810,269	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh OPD lingkup Pemprov NTB	4 Dokumen	16,284,577	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.03 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemoton gan dan Penyeteroran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				17 Laporan	25,276,586	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh OPD lingkup Pemprov NTB	17 Laporan	26,034,883	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				1 Dokumen	17,626,323	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh OPD lingkup Pemprov NTB	1 Dokumen	18,155,113	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.03 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				136 Dokumen	5,032,801	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh OPD lingkup Pemprov NTB	136 Dokumen	5,183,785	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.03 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	10,892,646	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh OPD lingkup Pemprov NTB	1 Dokumen	11,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.03 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah				20 Orang	9,195,035	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh OPD lingkup Pemprov NTB	20 Orang	9,470,886	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Kabupaten/Kota					Semua Kelurahan								
TOTAL						972,268,759,527							956,009,653,196		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
5	02				KEUANGAN						100,683,597,250								103,327,155,229		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sistem AKIP OPD	Nilai		Nilai	A Nilai	94,439,515,950						A Nilai	97,139,897,008			
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	Dokumen		Dokumen	9 Dokumen	518,290,200						9 Dokumen	534,310,413			
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	108,442,300	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Efektifitas Kelengkapan penilaian kinerja	2 Dokumen	115,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	54,893,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Efektifitas Kelengkapan penilaian kinerja	1 Dokumen	56,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	55,655,600	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Efektifitas Kelengkapan penilaian kinerja	1 Dokumen	56,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
5	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	9,738,900	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk transformasi Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Efektifitas Kelengkapan penilaian kinerja	1 Dokumen	9,750,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
5	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	10,820,300	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Efektifitas Kelengkapan penilaian kinerja	1 Dokumen	11,820,302	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
5	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	115,735,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Efektifitas Kelengkapan penilaian kinerja	1 Laporan	119,735,511	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	163,004,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Efektifitas Kelengkapan penilaian kinerja	2 Laporan	166,004,600	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	Dokumen		Dokumen	20045 Dokumen	83,214,667,250						20045 Dokumen	85,657,097,395			
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan				390 Orang/ Bulan	82,786,397,350	Kota Mataram,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi	0	390 Orang/ Bulan	85,223,827,500	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Tunjangan ASN						Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		pelayanan publik (PD-3)				
5 02 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang diverifikasi Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				25000 Dokumen 0 Dokumen 25000 Dokumen	118,746,300	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	25000 Dokumen 0 Dokumen 25000 Dokumen	119,746,330	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				11 Laporan	79,456,100	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	11 Laporan	80,456,090	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah laporan hasil temuan yang ditindak lanjuti				2 Dokumen	70,448,500	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	2 Dokumen	71,448,500	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				0 Laporan	40,995,100		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	0 Laporan	40,995,075	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Dokumen	118,623,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Dokumen	120,623,900	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi BMD	Dokumen		Dokumen	56 Dokumen	21,269,500						56 Dokumen	22,500,000	
5 02 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	8,031,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	2 Dokumen	8,500,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				14 Laporan	9,406,500	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	14 Laporan	9,500,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	3,831,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Laporan	4,500,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Adm Pendapatan Daerah Kewenangan PD	Dokumen		Dokumen	8 Dokumen	734,318,200						8 Dokumen	808,769,200	
5 02 01 1.04 01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Proyeksi Penerimaan Retribusi Daerah				49 Milyar rupiah	408,685,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	-	49 Milyar rupiah	458,685,600	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.04 02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				2 Paket	210,549,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	-	2 Paket	225,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen Rekapitulasi dan Hasil Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah dan PLL				4 Dokumen	115,083,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	-	4 Dokumen	125,083,600	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Adm Kepegawaian	Dokumen		Dokumen	42 Dokumen	353,778,500						42 Dokumen	359,500,000	
5 02 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				44 Kali	67,220,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	44 Kali	69,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	114,312,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Dokumen	115,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	58,822,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Dokumen	60,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	55,611,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	15 Orang	57,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				120 Orang	57,813,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	120 Orang	58,500,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Adm Umum PD	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	3,603,760,500						10 Dokumen	3,620,000,000	
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan				46 Paket	26,335,000	Kota Mataram, Semua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi	0	46 Paket	27,500,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan						Kecamatan, Semua Kelurahan			pelayanan publik (PD-3)				
5 02 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	5,104,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	4 Paket	5,500,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				125 Paket	346,075,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	125 Paket	350,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				85 Paket	1,449,292,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	85 Paket	1,450,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	28,966,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	5 Dokumen	29,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				36 Laporan	244,151,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	36 Laporan	250,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	383,094,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	150 Laporan	385,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				44 Dokumen	37,526,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	44 Dokumen	38,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	1,083,217,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Dokumen	1,085,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan BMD	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	1,326,077,000						7 Dokumen	1,445,000,000	
5 02 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	272,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Unit	275,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				45 paket/buah	85,950,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	45 paket/buah	95,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan							
5 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				25 Unit/Paket	748,303,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	25 Unit/Paket	750,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.07 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				6 Paket	119,324,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	6 Paket	125,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	100,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Unit	200,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang OPD	Dokumen Persen		Dokumen Persen	3 Dokumen 100 Persen	3,712,519,500						3 Dokumen 100 Persen	3,728,000,000	
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12500 Laporan	89,339,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12500 Laporan	90,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	1,603,180,500	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	4 Laporan	1,608,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				48 Laporan	2,020,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	48 Laporan	2,030,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD Persentase pemenuhan standar pemeliharaan BMD Penunjang OPD	Dokumen Persen		Dokumen Persen	6 Dokumen 100 Persen	954,835,300						6 Dokumen 100 Persen	964,720,000	
5 02 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	28,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Unit	28,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	365,576,500	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	0 Unit	370,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				275 Unit	199,460,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	275 Unit	199,470,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				26 Unit	139,656,300	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	26 Unit	145,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	222,142,500	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	4 Unit	222,250,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Derajat Desentralisasi Fiskal	%		%	38,44 %	585,429,100						38,44 %	599,429,100	
5 02 02 1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Pertumbuhan Pendapatan Daerah	Dokumen Persen		Dokumen Persen	1 Dokumen 4.05 Persen	171,594,200						1 Dokumen 4.05 Persen	175,594,200	
5 02 02 1.01 10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Target Pendapatan Daerah				2 Dokumen	171,594,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	2 Dokumen	175,594,200	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 02 1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Proporsi Dana Transfer terhadap Pendapatan Daerah	Dokumen Persen		Dokumen Persen	1 Dokumen 63.79 Persen	413,834,900						1 Dokumen 63.79 Persen	423,834,900	
5 02 02 1.03 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Penerimaan Dana Perimbangan				3636 Milyar rupiah	413,834,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	3636 Milyar rupiah	423,834,900	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	%		%	54,03 %	5,658,652,200						54,03 %	5,587,829,121	
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Pertumbuhan Pendapatan Daerah	Dokumen Persen		Dokumen Persen	13 Dokumen 9.91 Persen	5,658,652,200						13 Dokumen 9.91 Persen	5,587,829,121	
5 02 04 1.01 01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				5 Dokumen	729,278,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	5 Dokumen	730,278,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 04 1.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				2 Laporan	1,200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	2 Laporan	1,250,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				10 Laporan	319,837,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	10 Laporan	325,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				26 Sarana dan Prasarana	1,055,187,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	26 Sarana dan Prasarana	1,060,187,500	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				3 Laporan	339,181,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	3 Laporan	339,190,500	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				3 Laporan	278,993,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	3 Laporan	280,900,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen Ketetapan	147,602,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Dokumen Ketetapan	3,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12 Laporan	179,494,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Laporan	179,894,900	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				12 Dokumen	185,776,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Dokumen	185,796,250	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				2 Dokumen SSPD	50,556,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	2 Dokumen SSPD	50,596,671	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah kasus keberatan pajak daerah yang ditindak lanjuti				1 kasus	162,710,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 kasus	162,750,700	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 04 1.01 12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				8 Laporan	537,596,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	8 Laporan	537,796,900	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				2 Laporan	472,437,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 Laporan	482,437,700	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5 02	KEUANGAN						3,708,280,300							2,093,460,300	
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sistem AKIP OPD	Nilai		Nilai	A Nilai	2,096,218,100						A Nilai	2,093,460,300	
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja OPD	Dokumen Persen		Dokumen Persen	750 Dokumen 94 Persen	42,808,600						750 Dokumen 94 Persen	0	
5 02 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				700 Dokumen	42,808,600	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	700 Dokumen	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi BMD Persentase BMD yang tertib administrasi	Dokumen Persen		Dokumen Persen	4 Dokumen 85 Persen	14,647,400						4 Dokumen 85 Persen	2,845,000	
5 02 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2,772,900	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	2 Dokumen	2,845,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	11,874,500	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	2 Laporan	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Adm Kepegawaian	Dokumen Persen		Dokumen Persen	1 Dokumen 100 Persen	29,522,200						1 Dokumen 100 Persen	30,200,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Persentase aparatur yang ditingkatkan kualitasnya													
5 02 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Pelaksanaan Imtaq dan Olahraga				48 Kali	29,522,200	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	48 Kali	30,200,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Adm Umum PD Persentase penyelesaian Administrasi Umum OPD	Dokumen Persen		Dokumen Persen	7 Dokumen 100 Persen	324,819,900						7 Dokumen 100 Persen	354,065,300	
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				16 Paket	20,569,600	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	16 Paket	24,250,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	44,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	10 Paket	65,125,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				76 Paket	144,150,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	76 Paket	152,240,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	11,410,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Paket	12,210,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				60 Eksemplar 0 Dokumen	7,990,300	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	60 Eksemplar 0 Dokumen	7,990,300	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kali Tamu difasilitasi				24 Kali	7,200,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	24 Kali	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kali Tamu difasilitasi				24 Kali	89,500,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	24 Kali	92,250,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang OPD	Persen Persen		Persen Persen	3 Persen 100 Persen	1,361,820,000						3 Persen 100 Persen	1,378,940,000	
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang di Adminstrasikan				1500 Surat	6,820,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1500 Surat	6,940,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				4 Jenis	485,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	4 Jenis	502,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan Umum				30 Orang	870,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	30 Orang	870,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD Persentase pemenuhan standar pemeliharaan BMD Penunjang OPD	Dokumen Persen		Dokumen Persen	3 Dokumen 100 Persen	322,600,000						3 Dokumen 100 Persen	327,410,000	
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	223,670,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	16 Unit	223,670,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				33 Unit	32,030,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	33 Unit	32,240,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	66,900,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Unit	71,500,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Derajat Desentralisasi Fiskal	Persen		Persen	35.20 Persen	1,612,062,200						35.20 Persen	0	
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan	Persen Persen		Persen Persen	9.91 Persen 9.91 Persen	1,612,062,200						9.91 Persen 9.91 Persen	0	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Pendapatan Pertumbuhan Pendapatan Daerah													
5 02 04 1.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan, Sosialisasi dan Publikasi Informasi Pajak Daerah				24 Kali	138,000,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	24 Kali	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Data Obyek Kendaraan Bermotor				2500 Obyek	122,363,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	2500 Obyek	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Obyek Pajak baru yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak kendaraan Bermotor				12500 Obyek	264,126,300	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12500 Obyek	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. Jumlah Rekomendasi Kesamsatan				0 Laporan 4 Rekomendasi	55,843,900	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	0 Laporan 4 Rekomendasi	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Kali Pelaksanaan Penagihan Pajak				5000 Obyek	478,723,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	5000 Obyek	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Kendaraan Bermotor yang terjaring Operasi Sadar Pajak Kendaraan Bermotor				2500 Kendaraan	553,005,100	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	2500 Kendaraan	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5 02	KEUANGAN						3,024,522,800						45,757		
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sistem AKIP OPD	Nilai		Nilai	A Nilai	1,986,199,300						A Nilai	45,757	
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja OPD	Dokumen Persen		Dokumen Persen	745 Dokumen 94 Persen	44,757,300						745 Dokumen 94 Persen	45,757	
5 02 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang diverifikasi Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				680 Dokumen 0 Dokumen	44,757,300	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTB UPPD Praya	680 Dokumen 0 Dokumen	45,757	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi BMD Persentase BMD yang tertib administrasi	Dokumen Persen		Dokumen Persen	4 Dokumen 85 Persen	7,404,900						4 Dokumen 85 Persen	0	
5 02 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen RKBMD				2 Dokumen	2,766,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTB UPPD Praya	2 Dokumen	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	4,638,900	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTB UPPD Praya	2 Laporan	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Adm Kepegawaian Persentase aparatur yang ditingkatkan kualitasnya	Dokumen Persen		Dokumen Persen	1 Dokumen 100 Persen	23,971,100						1 Dokumen 100 Persen	0	
5 02 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Pelaksanaan Imtaq dan Olahraga				48 Kali	23,971,100	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTB UPPD Praya	48 Kali	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Adm Umum PD Persentase penyelesaian Administrasi Umum OPD	Dokumen Persen		Dokumen Persen	7 Dokumen 100 Persen	454,185,700						7 Dokumen 100 Persen	0	
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	20,549,700	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTB UPPD Praya	12 Paket	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5 Paket	42,400,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTB UPPD Praya	5 Paket	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor				65 Jenis	154,923,100	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTB UPPD Praya	65 Jenis	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan				12 Jenis	16,646,400	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTB UPPD Praya	12 Jenis	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan				60 Eksemplar	7,990,300	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTB UPPD Praya	60 Eksemplar	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kali Tamu difailitasi				24 Kali	83,746,900	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTB UPPD Praya	24 Kali	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Pelaksanaan Rapat				0 Laporan 24 Kali	127,929,300	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTB UPPD Praya	0 Laporan 24 Kali	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang OPD	Dokumen Persen		Dokumen Persen	3 Dokumen 100 Persen	1,137,318,100						3 Dokumen 100 Persen	0	
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat yang diadministrasi				0 Laporan 1500 Surat	8,332,200	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTB UPPD Praya	0 Laporan 1500 Surat	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	263,056,500	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTB UPPD Praya	0 Laporan	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	865,929,400	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTB UPPD Praya	0 Laporan	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD Persentase pemenuhan standar pemeliharaan BMD Penunjang OPD	Dokumen Persen		Dokumen Persen	3 Dokumen 100 Persen	318,562,200						3 Dokumen 100 Persen	0	
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	207,483,500	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTB UPPD Praya	0 Unit	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	55,821,700	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTB UPPD Praya	0 Unit	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	55,257,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTB UPPD Praya	0 Unit	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	Persen		Persen	50.12 Persen	1,038,323,500						50.12 Persen	0	
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Pertumbuhan Pendapatan Daerah	Dokumen Persen		Dokumen Persen	7 Dokumen 9.91 Persen	1,038,323,500						7 Dokumen 9.91 Persen	0	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 04 1.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				0 Laporan	103,852,700	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	0 Laporan	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				0 Laporan	106,947,600	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	0 Laporan	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				0 Dokumen Ketetapan	177,397,800	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	0 Dokumen Ketetapan	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				0 Laporan	45,855,900	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	0 Laporan	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				0 Dokumen SSPD	349,576,200	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	0 Dokumen SSPD	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				0 Laporan	254,693,300	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	0 Laporan	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5 02	KEUANGAN						3,706,420,600							3,484,959,800	
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sistem AKIP OPD	Nilai		Nilai	A Nilai	2,299,447,000						A Nilai	2,077,852,000	
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	Dokumen		Dokumen	750 Dokumen	38,020,900						750 Dokumen	0	
5 02 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	38,020,900	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Dokumen	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi BMD	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	6,677,000						4 Dokumen	0	
5 02 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2,746,800	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	2 Dokumen	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	3,930,200	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	2 Laporan	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Adm Kepegawaian	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	22,278,700						1 Dokumen	0	
5 02 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				24 Unit	22,278,700	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	24 Unit	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Adm Umum PD	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	450,537,900						7 Dokumen	282,585,000	
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	20,218,400	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	10 Paket	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	19,032,600	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Paket	20,120,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				94 Paket	149,819,700	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	94 Paket	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				11 Paket	20,784,800	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	11 Paket	20,785,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	7,990,400	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	24 Dokumen	8,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				24 Laporan	83,677,000	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	24 Laporan	83,680,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	149,015,000	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Laporan	150,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang OPD	Dokumen Persen		Dokumen Persen	3 Dokumen 100 Persen	1,500,399,500						3 Dokumen 100 Persen	1,513,507,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	8,506,500	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Laporan	8,507,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	326,324,000	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Laporan	330,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1,165,569,000	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Laporan	1,175,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	281,533,000						3 Dokumen	281,760,000	
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	214,775,000	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	17 Unit	215,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	28,399,000	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Unit	28,400,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	38,359,000	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	6 Unit	38,360,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	Persen		Persen	50.12 Persen	1,406,973,600						50.12 Persen	1,407,107,800	
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	1,406,973,600						6 Dokumen	1,407,107,800	
5 02 04 1.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	123,014,000	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Laporan	123,015,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	145,087,000	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Laporan	145,100,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				12 Dokumen Ketetapan	249,580,000	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Dokumen Ketetapan	249,600,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12 Laporan	43,892,000	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Laporan	43,893,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				12 Dokumen SSPD	433,601,000	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Dokumen SSPD	433,700,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Laporan	411,799,600	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Laporan	411,799,800	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5 02	KEUANGAN						3,343,386,700						243,500,000		
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sistem AKIP OPD	Nilai		Nilai	A Nilai	2,447,677,500						A Nilai	188,500,000	
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	Dokumen		Dokumen	720 Dokumen	37,416,100						720 Dokumen	38,000,000	
5 02 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				700 Dokumen	37,416,100	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Sumbawa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	700 Dokumen	38,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi BMD Persentase BMD yang tertib administrasi	Dokumen Persen		Dokumen Persen	4 Dokumen 85 Persen	5,503,600						4 Dokumen 85 Persen	3,000,000	
5 02 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2	2,779,100	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Sumbawa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	2	1,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2	2,724,500	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Sumbawa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	2	2,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Adm Kepegawaian	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	23,971,100						1 Dokumen	2,000,000	
5 02 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				24 kali	23,971,100	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Sumbawa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	24 kali	2,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Adm Umum PD	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	531,618,700						7 Dokumen	27,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 paket	25,571,100	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Sumbawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	7 paket	5,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	34,440,500	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Sumbawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	5 Paket	3,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				62 jenis	161,540,000	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Sumbawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	62 jenis	1,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 jenis	23,925,100	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Sumbawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	8 jenis	5,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Jenis	7,991,000	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Sumbawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	2 Jenis	3,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				800 Laporan	94,955,000	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Sumbawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	800 Laporan	5,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				48 kali	183,196,000	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Sumbawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	48 kali	5,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan BMD Persentase pemenuhan BMD Penunjang	Dokumen Persen		Dokumen Persen	1 Dokumen 100 Persen	200,000,000						1 Dokumen 100 Persen	1,000,000	
5 02 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	200,000,000	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Sumbawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	0 Unit	1,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang OPD	Dokumen Persen		Dokumen Persen	3 Dokumen 100 Persen	1,282,760,000						3 Dokumen 100 Persen	34,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1100 surat	9,522,000	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Sumbawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1100 surat	2,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Jenis	307,428,000	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Sumbawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	4 Jenis	2,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				31 Orang	965,810,000	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Sumbawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	31 Orang	30,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD Persentase pemenuhan standar pemeliharaan BMD Penunjang OPD	Dokumen Persen		Dokumen Persen	3 Dokumen 100 Persen	366,408,000						3 Dokumen 100 Persen	83,500,000	
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	169,429,000	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	14 Unit	23,500,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				46 Unit	86,007,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	46 Unit	10,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	110,972,000	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Sumbawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Unit	50,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	Persen		Persen	50.12 Persen	895,709,200						50.12 Persen	55,000,000	
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Pertumbuhan Pendapatan Daerah	Dokumen Persen		Dokumen Persen	6 Dokumen 9.91 Persen	895,709,200						6 Dokumen 9.91 Persen	55,000,000	
5 02 04 1.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				34 kali	118,125,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	34 kali	5,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 04 1.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				89162 Laporan	114,348,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	89162 Laporan	5,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				89162 Obyek	147,602,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	89162 Obyek	5,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				4 Rekomendasi	53,287,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	4 Rekomendasi	5,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				15000 Surat	166,038,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	15000 Surat	5,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	pengendalian pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah				89126 Obyek	296,309,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	89126 Obyek	30,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5 02	KEUANGAN						2,348,006,200						2,387,997,321		
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sistem AKIP OPD	Nilai		Nilai	A Nilai	1,680,053,800						A Nilai	1,707,049,000	
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja OPD	Dokumen Persen		Dokumen Persen	743 Dokumen 94 Persen	37,144,500						743 Dokumen 94 Persen	38,545,000	
5 02 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				120 Dokumen	37,144,500	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	120 Dokumen	38,545,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi BMD	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	6,983,500						4 Dokumen	8,711,000	
5 02 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2,772,000	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	2 Dokumen	3,500,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	4,211,500	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	2 Laporan	5,211,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Adm Kepegawaian Persentase aparatur yang ditingkatkan kualitasnya	Dokumen Persen		Dokumen Persen	1 Dokumen 100 Persen	23,971,500						1 Dokumen 100 Persen	25,970,000	
5 02 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				36 Kegiatan	23,971,500	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	36 Kegiatan	25,970,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Adm Umum PD Persentase penyelesaian Administrasi Umum OPD	Dokumen Persen		Dokumen Persen	7 Dokumen 100 Persen	543,996,000						7 Dokumen 100 Persen	554,740,000	
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	12,023,000	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	5 Paket	14,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	27,744,500	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Paket	28,740,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				50 Paket	149,876,000	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	50 Paket	151,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	34,061,500	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	6 Paket	36,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	13,893,000	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Dokumen	15,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	83,220,000	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	4 Laporan	85,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	223,178,000	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Laporan	225,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang OPD	Dokumen Persen		Dokumen Persen	3 Dokumen 100 Persen	850,170,500						3 Dokumen 100 Persen	856,000,000	
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	11,459,500	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Laporan	13,500,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	172,542,000	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Laporan	174,500,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	666,169,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Laporan	668,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD	Dokumen Persen		Dokumen Persen	3 Dokumen 100 Persen	217,787,800						3 Dokumen 100 Persen	223,083,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan standar pemeliharaan BMD Penunjang OPD													
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	121,021,000	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	10 Unit	123,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				45 Unit	41,083,800	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	45 Unit	43,083,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	55,683,000	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Unit	57,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	Persen		Persen	50.12 Persen	667,952,400						50.12 Persen	680,948,321	
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Pertumbuhan Pendapatan Daerah	Dokumen Persen		Dokumen Persen	6 Dokumen 9.91 Persen	667,952,400						6 Dokumen 9.91 Persen	680,948,321	
5 02 04 1.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				10 Laporan	81,790,000	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	10 Laporan	83,790,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				23450 Laporan	79,754,000	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	23450 Laporan	81,750,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				130172 Dokumen Ketetapan	129,843,500	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	130172 Dokumen Ketetapan	132,843,500	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti				2 Laporan	45,100,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik	0	2 Laporan	47,100,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
		dan Belum Ditindaklanjuti.									(PD-3)					
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				200 Dokumen SSPD	91,753,500	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	200 Dokumen SSPD	93,753,500	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 04 1.01 12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				2484 Laporan	239,711,400	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	2484 Laporan	241,711,321	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5 02	KEUANGAN						3,444,939,300							0		
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip OPD	Nilai		Nilai	A Nilai	2,284,350,900						A Nilai	0		
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	Dokumen		Dokumen	740 Dokumen	39,186,100						740 Dokumen	0		
5 02 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				700 Dokumen	39,186,100	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	700 Dokumen	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Adm BMD	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	7,693,400						4 Dokumen	0		
5 02 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	3,513,500	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Dokumen	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	4,179,900	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Laporan	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Adm Kepegawaian	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	19,975,900						1 Dokumen	0		
5 02 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				24 Unit	19,975,900	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	24 Unit	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Adm Umum yang terselesaikan	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	437,696,100						7 Dokumen	0		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	19,620,800	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	6 Paket	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	45,122,200	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	10 Paket	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	150,704,100	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	7 Paket	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	17,340,200	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Paket	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				48 Dokumen	7,990,400	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	48 Dokumen	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				48 Laporan	84,964,300	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	48 Laporan	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				48 Laporan	111,954,100	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	48 Laporan	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan BMD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	137,816,900						1 Dokumen	0	
5 02 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	137,816,900	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Unit	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan PD	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	1,351,815,300						3 Dokumen	0	
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				24 Laporan	7,907,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	24 Laporan	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				60 Laporan	245,231,300	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	60 Laporan	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				60 Laporan	1,098,676,900	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	60 Laporan	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Nasional	Daerah				
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	290,167,200						3 Dokumen	0	
5 02 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				22 Unit	171,759,800	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0		22 Unit	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	61,947,600	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0		100 Unit	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	56,459,800	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0		1 Unit	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	Persen		Persen	54.03 Persen	1,160,588,400						54.03 Persen	0	
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	1,160,588,400						6 Dokumen	0	
5 02 04 1.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				24 Laporan	117,680,500	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		24 Laporan	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				24 Laporan	142,689,300	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		24 Laporan	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				12700 Dokumen Ketetapan	185,875,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		12700 Dokumen Ketetapan	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				4 Laporan	65,335,800	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		4 Laporan	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				30000 Dokumen SSPD	333,309,700	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		30000 Dokumen SSPD	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				24 Laporan	315,698,100	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		24 Laporan	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02	KEUANGAN						2,225,827,000							2,116,477,640	
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip OPD	Nilai		Nilai	A Nilai	1,515,593,600						A Nilai	1,538,712,000	
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	Dokumen		Dokumen	740 Dokumen	36,578,600						740 Dokumen	38,000,000	
5 02 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				224 Dokumen	36,578,600	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	224 Dokumen	38,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Adm BMD	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	6,648,000						4 Dokumen	7,500,000	
5 02 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	2,691,500	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Dokumen	3,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	3,956,500	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Laporan	4,500,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Adm Kepegawaian	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	23,971,200						1 Dokumen	24,971,200	
5 02 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				24 Unit	23,971,200	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	24 Unit	24,971,200	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Adm Umum yang terselesaikan	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	508,614,400						7 Dokumen	515,588,800	
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	20,243,400		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	-	8 Paket	21,243,400	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				120 Paket	60,031,000	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	-	120 Paket	62,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				300 Paket	123,547,500	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	-	300 Paket	124,543,500	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	16,534,600	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	-	8 Paket	17,534,600	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	7,990,600	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	-	24 Dokumen	8,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	82,966,800	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	-	12 Laporan	83,966,800	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	197,300,500	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	-	12 Laporan	198,300,500	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan BMD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	48,789,900						1 Dokumen	49,789,900	
5 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Paket	48,789,900	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	4 Paket	49,789,900	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan PD	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	599,140,800						3 Dokumen	607,011,700	
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	8,323,400	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Laporan	9,323,800	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	190,687,900	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Laporan	192,687,900	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	400,129,500	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Laporan	405,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	291,850,700						3 Dokumen	295,850,400	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	126,414,500	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	16 Unit	128,414,500	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	48,286,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	30 Unit	49,286,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	117,149,900	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	7 Unit	118,149,900	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	Persen		Persen	54.03 Persen	710,233,400						54.03 Persen	577,765,640	
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	710,233,400						7 Dokumen	577,765,640	
5 02 04 1.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	110,167,400	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Laporan	113,167,400	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	139,467,900	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Laporan	140	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				10000 Dokumen Ketetapan	132,063,100	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	10000 Dokumen Ketetapan	133,063,100	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12 Laporan	45,855,900	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Laporan	46,855,900	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				8000 Dokumen SSPD	94,572,300	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	8000 Dokumen SSPD	95,572,300	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Laporan	188,106,800	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Laporan	189,106,800	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
								Bertong									
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
5 02	KEUANGAN						2,302,108,400						2,297,000,000				
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip OPD	Nilai		Nilai	A Nilai	1,506,071,400						A Nilai	1,497,000,000			
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	Dokumen		Dokumen	740 Dokumen	33,524,900						740 Dokumen	35,000,000			
5 02 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	33,524,900					0	0 Dokumen	35,000,000		Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Adm BMD	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	6,032,100						4 Dokumen	6,500,000			
5 02 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	2,857,400		Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Dokumen	3,000,000		Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	3,174,700		Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Laporan	3,500,000		Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Adm Kepegawaian	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	24,276,400						1 Dokumen	25,000,000			
5 02 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0 Unit	24,276,400			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	0 Unit	25,000,000		Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Adm Umum yang terselesaikan	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	392,757,400						7 Dokumen	378,500,000			
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	19,393,400		Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Paket	20,000,000		Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20,000,000		Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Paket	0		Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	125,877,200		Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Paket	130,000,000		Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	21,346,600		Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Paket	21,500,000		Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	7,990,400	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	0 Dokumen	8,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	83,226,500	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	0 Laporan	84,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	114,923,300	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Laporan	115,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan PD	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	781,505,800						3 Dokumen	783,500,000	
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	11,071,200	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Laporan	12,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	235,216,800	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Laporan	236,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	535,217,800	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Laporan	535,500,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	267,974,800						3 Dokumen	268,500,000	
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	158,381,800	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	17 Unit	158,500,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 14 Unit	53,809,000	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	0 Unit 14 Unit	54,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	55,784,000	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	8 Unit	56,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	Persen		Persen	54.03 Persen	796,037,000						54.03 Persen	800,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	796,037,000						7 Dokumen	800,000,000	
5 02 04 1.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	106,386,000	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Laporan	107,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	127,436,000	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Laporan	128,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				12 Dokumen Ketetapan	143,771,400	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Dokumen Ketetapan	145,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				0 Laporan 12 Laporan	51,168,200	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	0 Laporan 12 Laporan	52,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				5000 Dokumen SSPD	95,182,600	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	5000 Dokumen SSPD	95,500,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				7000 Laporan	272,092,800	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	7000 Laporan	272,500,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5 02	KEUANGAN							2,215,344,200						2,199,264,324	
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip OPD	Nilai		Nilai	A Nilai	1,555,783,300						A Nilai	1,580,783,318	
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	Dokumen		Dokumen	740 Dokumen	36,047,400						740 Dokumen	39,047,367	
5 02 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				600 Dokumen	36,047,400	Kab. Dompu, Dompu, Bali	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	600 Dokumen	39,047,367	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Adm BMD	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	6,496,500						4 Dokumen	8,496,510	
5 02 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2,784,000	Kab. Dompu, Dompu, Bali	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi	0	2 Dokumen	3,783,981	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Milik Daerah SKPD										pelayanan publik (PD-3)				
5 02 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	3,712,500	Kab. Dompu, Dompu, Bali	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	2 Laporan	4,712,529	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Adm Kepegawaian	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	23,971,000						1 Dokumen	24,971,000	
5 02 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				24 Unit	23,971,000	Kab. Dompu, Dompu, Bali	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	24 Unit	24,971,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Adm Umumyang terselesaikan	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	473,198,900						7 Dokumen	484,198,900	
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	20,526,400	Kab. Dompu, Dompu, Bali	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Paket	22,526,400	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	41,873,600	Kab. Dompu, Dompu, Bali	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	6 Paket	42,873,600	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				70 Paket	133,181,300		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	70 Paket	135,181,300	Badan Pengelolaah Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				48 Dokumen	20,528,500	Kab. Dompu, Dompu, Bali	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	48 Dokumen	22,528,500	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				48 Dokumen	7,324,600	Kab. Dompu, Dompu, Bali	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	48 Dokumen	8,324,600	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				24 Laporan	82,993,000	Kab. Dompu, Dompu, Bali	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	24 Laporan	83,993,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	166,771,500	Kab. Dompu, Dompu, Bali	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	24 Laporan	168,771,500	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan PD	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	743,840,700						3 Dokumen	746,840,700	
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				24 Laporan	8,336,700	Kab. Dompu, Dompu, Bali	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	24 Laporan	9,336,700	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	168,908,500	Kab. Dompu, Dompu, Bali	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	24 Laporan	168,908,500	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				48 Laporan	566,595,500	Kab. Dompu, Dompu, Bali	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	48 Laporan	568,595,500	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	272,228,800						3 Dokumen	277,228,841	
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	112,564,400	Kab. Dompu, Dompu, Bali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	10 Unit	114,564,441	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 Unit	67,640,700	Kab. Dompu, Dompu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	22 Unit	68,640,700	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit 0 Unit 1 Unit	92,023,700	Kab. Dompu, Dompu, Bali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Unit 0 Unit 1 Unit	94,023,700	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	Persen		Persen	54.03 Persen	659,560,900						54.03 Persen	618,481,006	
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	659,560,900						6 Dokumen	618,481,006	
5 02 04 1.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	80,399,700	Kab. Dompu, Dompu, Bali	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Laporan	81,399,700	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek				12 Laporan	126,111,800	Kab. Dompu, Dompu, Bali	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik	0	12 Laporan	128,111,793	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah									(PD-3)				
5 02 04 1.01 07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				52500 Dokumen Ketetapan	133,956,000	Kab. Dompu, Dompu, Bali	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	52500 Dokumen Ketetapan	134,956,013	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				4 Laporan	48,079,900	Kab. Dompu, Dompu, Bali	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	4 Laporan	49,079,900	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				12 Dokumen SSPD	48,079,900	Kab. Dompu, Dompu, Bali	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Dokumen SSPD	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				24 Laporan	222,933,600	Kab. Dompu, Dompu, Bali	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	24 Laporan	224,933,600	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5 02	KEUANGAN						2,439,156,700						2,453,079,644		
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	A Nilai	1,751,319,600						A Nilai	1,750,242,544	
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan	Dokumen		Dokumen	678 Dokumen	42,077,100						678 Dokumen	44	
5 02 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				500 Dokumen	42,077,100	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	500 Dokumen	44	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi BMD	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	6,505,500						4 Dokumen	10,505,500	
5 02 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2,774,600	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	2 Dokumen	4,774,600	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	3,730,900	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	2 Laporan	5,730,900	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Adm Kepegawaian	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	23,971,200						1 Dokumen	25,971,200	
5 02 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				24 Kali	23,971,200	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	24 Kali	25,971,200	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Adm Umum PD	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	525,326,100					7 Dokumen	543,326,100		
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Dokumen	20,530,900		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0	12 Dokumen	23,530,900	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20,000,000	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0	1 Paket	25,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				67 Dokumen	133,173,000	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0	67 Dokumen	135,173,000	Badan Pengelolaah Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				11 Dokumen	16,647,800	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0	11 Dokumen	17,647,800	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				48 Dokumen	7,391,100	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0	48 Dokumen	8,391,100	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	83,266,400	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0	12 Laporan	87,266,400	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				48 Dokumen	244,316,900	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0	48 Dokumen	246,316,900	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Adm Pengadaan BMD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	132,091,500					1 Dokumen	135,091,500		
5 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Dokumen	132,091,500	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0	10 Dokumen	135,091,500	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	808,315,700					3 Dokumen	813,315,700		
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				24 Laporan	12,731,400	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0	24 Laporan	13,731,400	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Dokumen	262,587,200	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0	36 Dokumen	265,587,200	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				48 Laporan	532,997,100	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0	48 Laporan	533,997,100	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
										(PD-3)						
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	213,032,500						3 Dokumen	222,032,500		
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	101,045,000	Kab. Bima, Palibelo, Panda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	15 Unit	105,045,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				90 Unit	54,501,100	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	90 Unit	57,501,100	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Tahun	57,486,400	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Tahun	59,486,400	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	Persen		Persen	50.12 Persen	687,837,100						50.12 Persen	702,837,100		
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	687,837,100						6 Dokumen	702,837,100		
5 02 04 1.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				24 Laporan	86,118,600	Kab. Bima, Palibelo, Panda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	24 Laporan	88,118,600	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 04 1.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Pendapatan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah				48 Dokumen	133,173,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	48 Dokumen	135,173,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 04 1.01 07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				38.52 Dokumen Ketetapan	139,717,000	Kab. Bima, Palibelo, Panda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	38.52 Dokumen Ketetapan	142,717,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				4 Laporan	49,703,000	Kab. Bima, Palibelo, Panda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	4 Laporan	53,703,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				12 Dokumen SSPD	79,920,500	Kab. Bima, Palibelo, Panda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	12 Dokumen SSPD	79,920,500	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 04 1.01 12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				24 Laporan	199,205,000	Kab. Bima, Palibelo, Panda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	24 Laporan	203,205,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
TOTAL							129,441,589,450								120,602,940,015	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	03				KEPEGAWAIAN						18,098,173,570								18,098,173,570	
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen		persen	100 persen	15,758,399,397						100 persen	15,758,399,397		
5	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP BKD	perden		perden	100 perden	321,481,000						100 perden	321,481,000		
5	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	30,913,500		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	30,913,500	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	30,913,500		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	30,913,500	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	30,913,500		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	30,913,500	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	30,913,500		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	30,913,500	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	30,913,500		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	30,913,500	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	30,913,500		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	30,913,500	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	136,000,000		Semua Kab/Kota, Semua	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran	1 Laporan	136,000,000	Badan Kepegawaian Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kecamatan, Semua Kelurahan		Berdaya Saing	(PD-3)	dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
5 03 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP BKD	persen		persen	100 persen	12,472,734,652						100 persen	12,472,734,652	
5 03 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/ Bulan 90 Orang/ Bulan	12,300,772,652	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan	0 Orang/ Bulan 90 Orang/ Bulan	12,300,772,652	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				150 Dokumen	8,609,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan	150 Dokumen	8,609,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	120,308,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan	12 Dokumen	120,308,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4 Dokumen	8,609,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan	4 Dokumen	8,609,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	8,609,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan	1 Laporan	8,609,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	8,609,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan	1 Dokumen	8,609,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				12 Laporan	8,609,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan	12 Laporan	8,609,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen 1 Dokumen	8,609,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan	0 Dokumen 1 Dokumen	8,609,000	Badan Kepegawaian Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD dengan Kualitas Baik	persen		persen	90 persen	44,522,500						90 persen	44,522,500	
5 03 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	4,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah	1 Dokumen	4,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	4,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah	1 Dokumen	4,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				5 item	4,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah	5 item	4,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Daftar	4,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah	12 Daftar	4,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Berita Acara	4,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah	2 Berita Acara	4,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Dokumen	20,522,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah	12 Dokumen	20,522,500	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	4,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah	1 Dokumen	4,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						29,131,500							29,131,500	
5 03 01 1.04 01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	8,609,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Dokumen	8,609,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.04 02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Sosialisasi dan Kerjasama Potensi Retrebusi Daerah				2 Kegiatan	0		Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		2 Kegiatan	0	Badan Kepegawaian Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 01 1.04 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah sosialisasi potensi retrebusi daerah				1 Kegiatan	0		Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Kegiatan	0	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.04 04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah data objek retribusi daerah				10 objek	0		Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		10 objek	0	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.04 05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah Jumlah Potensi Retrebusi				0 Laporan 10 Dokumen	20,522,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Laporan 10 Dokumen	20,522,500	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.04 06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	jumlah penetapan wajib retribusi daerah				10 Dokumen	0		Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		10 Dokumen	0	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	jumlah dokumen laporan retrebusi daerah				1 Dokumen	0		Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Dokumen	0	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan Layanan	persen		persen	90 persen	111,135,005						90 persen	111,135,005	
5 03 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 jenis 0 Unit	4,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian	2 jenis 0 Unit	4,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian dinas dan atribut Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				3 item 0 Paket	28,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian	3 item 0 Paket	28,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian jumlah dokumen penjagaan pengelolaan administrasi kepegawaian				0 Dokumen 1 Dokumen	4,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen 1 Dokumen	4,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian jumlah dokumen kepegawaian yang terupdate dalam sistem kepegawaian				0 Dokumen 90 Dokumen	4,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen 90 Dokumen	4,000,000	Badan Kepegawaian Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai jumlah laporan kinerja pegawai				0 Dokumen 90 Laporan	4,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen 90 Laporan	4,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.05 06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	jumlah apresiasi pegawai pensiun				2 pegawai	0		Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian	2 pegawai	0	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.05 07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				0 Laporan	0		Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian	0 Laporan	0	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.05 08	Pemindahan Tugas ASN	jumlah apresiasi pegawai yang pindah tugas Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan				10 pegawai 0 Orang	6,090,005	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian	10 pegawai 0 Orang	6,090,005	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan jumlah pegawai yang melaksanakan diklat				0 Orang 20 pegawai	53,045,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian	0 Orang 20 pegawai	53,045,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan jumlah peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan				0 Orang 4 aturan	4,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian	0 Orang 4 aturan	4,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	jumlah bimbingan teknis peraturan perundang-undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				4 aturan 0 Orang	4,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian	4 aturan 0 Orang	4,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Logistik Kantor	persen		persen	100 persen	1,454,689,000						100 persen	1,454,689,000	
5 03 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 jenis 0 Paket	31,827,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	20 jenis 0 Paket	31,827,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia				6 jenis	0		Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat	6 jenis	0	Badan Kepegawaian Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
											Daerah				
5 03 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia				0 Paket 3 jenis	21,218,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	0 Paket 3 jenis	21,218,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah alat tulis kantor dan makan minum kantor yang tersedia Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 bulan 0 Paket	351,315,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Administarsi Umum Perangkat Daerah	12 bulan 0 Paket	351,315,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 jenis 0 Paket	8,609,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 jenis 0 Paket	8,609,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah bahan bacaan yang tersedia Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				5 jenis 0 Dokumen	31,827,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 jenis 0 Dokumen	31,827,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	jumlah baha/material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 jenis 0 Paket	18,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Administarsi Umum Perangkat Daerah	2 jenis 0 Paket	18,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah kunjungan tamu yang terfasilitasi Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				80 kali 0 Laporan	60,654,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	80 kali 0 Laporan	60,654,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				0 Laporan 100 kali	836,540,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Administarsi Umum Perangkat Daerah	0 Laporan 100 kali	836,540,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah arsip dinamis yang ditata Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				3 aplikasi 0 Dokumen	86,090,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 aplikasi 0 Dokumen	86,090,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD jumlah fasilitasi e-government				0 Dokumen 3 aplikasi	8,609,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	0 Dokumen 3 aplikasi	8,609,000	Badan Kepegawaian Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD dengan Kondisi Baik	persen		persen	90 persen	180,000,000						90 persen	180,000,000	
5 03 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas yangtersedia				2 unit	0		Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Pemeliharaan barang Milik Daerah	2 unit	0	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang tersedia				1 unit	0		Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Pemeliharaan barang Milik Daerah	1 unit	0	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	jumlah mebel yang tersedia				40 unit	0		Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Pemeliharaan barang Milik Daerah	40 unit	0	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang tersedia Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 paket 0 Unit	180,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Pemeliharaan barang Milik Daerah	4 paket 0 Unit	180,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang tersedia				2 paket	0		Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Pemeliharaan barang Milik Daerah	2 paket	0	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasaran agedung yang tersedia				1 paket	0		Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Pemeliharaan barang Milik Daerah	1 paket	0	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia				1 paket	0		Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Pemeliharaan barang Milik Daerah	1 paket	0	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						745,518,740							745,518,740	
5 03 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah jasa surat menyurat yang tersedia Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6000 surat 0 Laporan	5,304,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		6000 surat 0 Laporan	5,304,500	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang tersedia Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 bulan 0 Laporan	293,418,240	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		12 bulan 0 Laporan	293,418,240	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia				2 jenis 0 Laporan	21,218,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik		2 jenis 0 Laporan	21,218,000	Badan Kepegawaian Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						Semua Kelurahan			(PD-3)				
5 03 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan jumlah pelayanan umum kantor yang tersedia				0 Laporan 16 orang	425,578,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Laporan 16 orang	425,578,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						399,187,000							399,187,000	
5 03 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terpelihara				0 Unit 37 unit	180,180,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Unit 37 unit	180,180,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terpelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 unit 0 Unit	12,913,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		2 unit 0 Unit	12,913,500	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara jumlah mebel yang terpelihara				0 Unit 2 unit	5,304,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Unit 2 unit	5,304,500	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara				0 Unit 37 unit	8,609,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Unit 37 unit	8,609,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi jumlah gedung kantor yang terpelihara/terehabilitasi				0 Unit 1 gedung	86,090,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Unit 1 gedung	86,090,000	Badan Kepegawaian Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara/terehabilitasi				0 Unit 1 tahun	53,045,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Unit 1 tahun	53,045,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara/terehabilitasi				0 Unit 1 tahun	53,045,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Unit 1 tahun	53,045,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Aspek Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, Disiplin serta Perlindungan dan Pelayanan Nilai Aspek Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi Nilai Aspek Perencanaan dan Pengadaan Nilai Aspek Sistem Informasi	Nilai Nilai Nilai Nilai		Nilai Nilai Nilai Nilai	134 Nilai 115 Nilai 80 Nilai 19 Nilai	2,339,774,173						134 Nilai 115 Nilai 80 Nilai 19 Nilai	2,339,774,173	
5 03 02 1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan dan Sistem Informasi	point		point	102 point	815,178,673						102 point	815,178,673	
5 03 02 1.01 01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN				1 Dokumen	8,609,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pegawai dan Sistem Informasi Kepegawaian yang Terintegrasi	1 Dokumen	8,609,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Formasi CPNS/PPPK				0 Dokumen 400 Formasi	31,827,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pegawai dan Sistem Informasi Kepegawaian yang Terintegrasi	0 Dokumen 400 Formasi	31,827,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.01 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah CPNS/P3K terseleksi Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				400 orang 0 Dokumen	400,450,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pegawai dan Sistem Informasi Kepegawaian yang Terintegrasi	400 orang 0 Dokumen	400,450,000	Badan Kepegawaian Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 02 1.01 04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Evaluasi Penyelenggaraan Seleksi CPNS/PPPK Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN				10 Kab/Kota 0 Laporan	50,045,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pegawai dan Sistem Informasi Kepegawaian yang Terintegrasi	10 Kab/Kota 0 Laporan	50,045,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.01 05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN Jumlah koordinasi perumusan bahan kebijakan pemberhentian ASN				0 Dokumen 1 kegiatan	8,609,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pegawai dan Sistem Informasi Kepegawaian yang Terintegrasi	0 Dokumen 1 kegiatan	8,609,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah keputusan pemberhentian PNS dan PTT				0 Dokumen 245 SK	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pegawai dan Sistem Informasi Kepegawaian yang Terintegrasi	0 Dokumen 245 SK	75,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.01 07	Evaluasi Pemberhentian ASN	jumlah dokumen analisis zero growth kebutuhan ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN				1 Dokumen 0 Laporan	8,609,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pegawai dan Sistem Informasi Kepegawaian yang Terintegrasi	1 Dokumen 0 Laporan	8,609,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.01 08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	jumlah kegiatan fasilitasi KORPRI Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				4 kegiatan 0 Lembaga	100,526,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pegawai dan Sistem Informasi Kepegawaian yang Terintegrasi	4 kegiatan 0 Lembaga	100,526,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.01 09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	jumlah aplikasi pengelolaan data dan informasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN				1 aplikasi 0 Dokumen	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pegawai dan Sistem Informasi Kepegawaian yang Terintegrasi	1 aplikasi 0 Dokumen	15,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	jumlah data ASN yang tersedia didalam SIMPEG/SIMADU Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				14.143 pegawai 0 Dokumen	86,503,673	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pegawai dan Sistem Informasi Kepegawaian yang Terintegrasi	14.143 pegawai 0 Dokumen	86,503,673	Badan Kepegawaian Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 02 1.01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian jumlah dokumen tata naskah yang diakuisisi				0 Dokumen 13.95 pegawai	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pegawai dan Sistem Informasi Kepegawaian yang Terintegrasi	0 Dokumen 13.95 pegawai	15,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.01 12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	jumlah data ASN yang telah terdokumentasi secara elektronik Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				13.95 pegawai 0 Laporan	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pegawai dan Sistem Informasi Kepegawaian yang Terintegrasi	13.95 pegawai 0 Laporan	15,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Nilai Aspek Promosi dan Mutasi	point		point	32.5 point	646,090,000						32.5 point	646,090,000	
5 03 02 1.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah jumlah keputusan perpindahan PNS/PTT				0 Dokumen 230 SK	106,090,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Mutasi dan Promosi Pegawai	0 Dokumen 230 SK	106,090,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	jumlah keputusan kenaikan pangkat/gaji berkala Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				3000 SK 0 Laporan	180,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Mutasi dan Promosi Pegawai	3000 SK 0 Laporan	180,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN jumlah keputusan penempatan dan pembebasan dalam jabatan struktural				0 Dokumen 400 SK	360,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Mutasi dan Promosi Pegawai	0 Dokumen 400 SK	360,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Nilai Aspek Pengembangan karir, Perlindungan dan pelayanan	point		point	118.5 point	446,187,000						118.5 point	446,187,000	
5 03 02 1.03 02	Pengelolaan Assessment Center	jumlah ASN yang telah terpetakan kompetensinya Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				400 orang 0 Dokumen	130,962,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Kompetensi Pegawai	400 orang 0 Dokumen	130,962,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.03 03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN jumlah SPT, Surat rekomendasi, surat ijin mengikuti diklat dan sertifikasi				0 Dokumen 100 pegawai	8,609,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Kompetensi Pegawai	0 Dokumen 100 pegawai	8,609,000	Badan Kepegawaian Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 02 1.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola jumlah PNS yang mengikuti pendidikan formal				0 Dokumen 80 orang	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Kompetensi Pegawai	0 Dokumen 80 orang	60,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.03 05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat jumlah koordinasi dan kerjasama pemetaan kompetensi ASN				0 Dokumen 10 Dokumen	53,045,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Kompetensi Pegawai	0 Dokumen 10 Dokumen	53,045,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.03 06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN jumlah kerjasama pemetaan kompetensi ASN				0 Orang 10 Dokumen	53,045,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Kompetensi Pegawai	0 Orang 10 Dokumen	53,045,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.03 07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	jumlah hasil pemetaan talenta Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN				300 pegawai 0 Laporan	53,045,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Kompetensi Pegawai	300 pegawai 0 Laporan	53,045,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.03 08	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional jumlah pegawai yang mengikuti diklat jafung dan uji kompetensi				0 Orang 20 orang	19,218,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Kompetensi Pegawai	0 Orang 20 orang	19,218,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.03 12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	jumlah kegiatan sosialisasi jabatan fungsional Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN				1 Kegiatan 0 Laporan	8,609,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Kompetensi Pegawai	1 Kegiatan 0 Laporan	8,609,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.03 13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina jumlah keputusan pengangkatan penyesuaian dan pembebasan/pemberhentian dalam jabatan fungsional				0 Orang 440 SK	6,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Kompetensi Pegawai	0 Orang 440 SK	6,000,000	Badan Kepegawaian Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
											pelayanan publik (PD-3)				
5 03 02 1.03 14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional jumlah dokumen penilaian DUPAK/PAK				0 Dokumen 40 DUPAK/PAK	45,045,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Kompetensi Pegawai	0 Dokumen 40 DUPAK/PAK	45,045,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.03 15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	jumlah dokumen evaluasi pengembangan karir jabatan fungsional Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional				2 Dokumen 0 Laporan	8,609,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Kompetensi Pegawai	2 Dokumen 0 Laporan	8,609,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Nilai Aspek manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	point		point	120 point	432,318,500						120 point	432,318,500	
5 03 02 1.04 01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur jumlah kebijakan tentang evaluasi kinerja aparatur				0 Dokumen 3 peraturan	8,609,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, Disiplin serta Perlindungan dan Pelayanan	0 Dokumen 3 peraturan	8,609,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur jumlah PNS yang berkinerja baik				0 Dokumen 12893 pegawai	200,180,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, Disiplin serta Perlindungan dan Pelayanan	0 Dokumen 12893 pegawai	200,180,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.04 03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	jumlah dokumen evaluasi kinerja aparatur Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				12 Dokumen 0 Laporan	13,913,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, Disiplin serta Perlindungan dan Pelayanan	12 Dokumen 0 Laporan	13,913,500	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan jumlah pns yang diberikan penghargaan pegawai teladan				0 Orang 24 orang	8,609,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, Disiplin serta Perlindungan dan Pelayanan	0 Orang 24 orang	8,609,000	Badan Kepegawaian Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 02 1.04 05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa jumlah pns yang diberikan satya lencana karya satya				0 Orang 200 orang	40,045,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, Disiplin serta Perlindungan dan Pelayanan	0 Orang 200 orang	40,045,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.04 06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur jumlah dokumen laporan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur				0 Dokumen 1 Dokumen	31,827,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, Disiplin serta Perlindungan dan Pelayanan	0 Dokumen 1 Dokumen	31,827,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan jumlah pembinaan disiplin ASN				0 Orang 46 opd	80,090,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, Disiplin serta Perlindungan dan Pelayanan	0 Orang 46 opd	80,090,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN jumlah pns yang dijatuhi hukuman disiplin				0 Laporan 30 SK	8,609,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, Disiplin serta Perlindungan dan Pelayanan	0 Laporan 30 SK	8,609,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.04 09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani jumlah pemberian izin kawin cerai pns				0 Dokumen 20 SK	8,609,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, Disiplin serta Perlindungan dan Pelayanan	0 Dokumen 20 SK	8,609,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.04 10	Evaluasi Disiplin ASN	jumlah laporan disiplin asn Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN				12 Dokumen 0 Laporan	31,827,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, Disiplin serta Perlindungan dan Pelayanan	12 Dokumen 0 Laporan	31,827,000	Badan Kepegawaian Daerah
TOTAL							18,098,173,570						18,098,173,570		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						35,247,203,257						44,871,823,356				
5	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	%		%	100 %	18,555,514,088						100 %	23,725,961,893			
5	04	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peresetase Fasilitas Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Akuntabel dan ditindaklanjuti	%		%	100 %	255,280,734						100 %	890,923,673			
5	04	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	43,467,152	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat	2 Dokumen	54,333,935	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah		
5	04	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	50,828,691	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Dokumen	635,358,625	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah		
5	04	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	54,075,560	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Dokumen	67,594,450	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah		
5	04	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				16 Laporan	51,961,801	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat	16 Laporan	64,952,250	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah		
5	04	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	54,947,530	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat	10 Laporan	68,684,413	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah		
5	04	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah Persentase Laporan Keuangan yang Akuntabel	% %		% %	91 % 100 %	13,521,280,775						91 % 100 %	16,901,600,968			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 04 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				95 Orang/ Bulan	13,440,115,077	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat	95 Orang/ Bulan	16,800,143,846	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	34,793,669	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Dokumen	43,492,086	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	22,891,088	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Laporan	28,613,860	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				18 Laporan	23,480,941	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat	18 Laporan	29,351,176	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Data BMD Perangkat Daerah yang Akuntabel	%		%	100 %	44,205,685						100 %	55,257,106	
5 04 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	44,205,685	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Laporan	55,257,106	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perkatoran Sesuai SQ/P	%		%	100 %	698,522,044						100 %	832,899,082	
5 04 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	47,517,785	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat	10 Paket	59,397,229	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				70 Paket	191,196,469	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat	70 Paket	238,995,586	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1200 Paket	77,226,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat	1200 Paket	96,533,500	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 04 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	74,090,460	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat	2 Paket	92,613,075	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	15,977,958	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat	2 Dokumen	19,972,448	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	292,512,572	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat	25 Laporan	325,387,244	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan BMD Perangkat Daerah Sesuai dengan Perencanaan	%		%	100 %	668,558,012						100 %	835,697,515	
5 04 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				17 Unit	341,875,332	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat	17 Unit	427,344,165	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				45 Unit	326,682,680	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat	45 Unit	408,353,350	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah Sesuai SOP	%		%	100 %	2,279,063,510						100 %	2,848,829,388	
5 04 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2500 Laporan	7,145,587	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat	2500 Laporan	8,931,984	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	773,984,300	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat	3 Laporan	967,480,375	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				45 Laporan	1,497,933,623	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat	45 Laporan	1,872,417,029	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Pelayanan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	%		%	100 %	1,088,603,328						100 %	1,360,754,161	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah Sesuai SOP dan Kebutuhan													
5 04 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				21 Unit	191,014,276	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara barat	21 Unit	238,767,845	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	99,862,241	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara barat	5 Unit	124,827,801	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 369 Unit	447,726,811	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara barat	0 Unit 369 Unit	559,658,515	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	350,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara barat	2 Unit	437,500,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Fungsional Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Tekhnis Persentase Pejabat Fungsional Yang Tersertifikasi Persentasi ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial	% % % %		% % % %	0,04 % 0,15 % 0,62 % 0,10 %	16,691,689,169						0,04 % 0,15 % 0,62 % 0,10 %	21,145,861,463	
5 04 02 1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Tingkat Pembelajaran yang Sesuai dengan Standart Pembelajaran Persetase ASN yang LULUS Pengembangan Kompetensi Teknis Tingkat Ketersediaan Pengembangan Kompetensi Teknis Sesuai dengan Dokumen AKPK	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	1,442,324,048						100 % 100 % 100 %	1,927,905,061	
5 04 02 1.01 01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi				1 Dokumen	114,788,410	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Dokumen	143,485,513	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun													
5 04 02 1.01 02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun				1 Dokumen	66,441,678	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Dokumen	83,052,098	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 02 1.01 03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				210 Orang	1,045,166,100	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat	210 Orang	1,368,957,625	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 02 1.01 04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi				1 Dokumen	215,927,860	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Dokumen	332,409,825	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 02 1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang Lulus Pengembangan Kompetensi Manajerial,Fungsional,Latsar CPNS dan Pimpinan Tinggi Persentase Hasil Evaluasi, Pelaporan dan Kerjasama Penguatan Kapasitas SDM Melalui Pengembangan Kompetensi ASN Persentase Pejabat Fungsional yang Tersertifikasi	 % % %		 % % %	100 % 100 % 100 %	15,249,365,121						100 % 100 % 100 %	19,217,956,402	
5 04 02 1.02 01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan				1 Dokumen	83,996,677	Kota Mataram, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Dokumen	104,995,846	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,						Semua Kelurahan			(PD-3)				
5 04 02 1.02 02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi				2 Dokumen	113,516,363	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat	2 Dokumen	173,145,454	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 02 1.02 03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi				480 Orang	212,057,205	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat	480 Orang	296,321,506	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 02 1.02 04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar				2 Laporan	555,670,390	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat	2 Laporan	694,587,988	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 02 1.02 05	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga				3 Dokumen	182,917,647	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat	3 Dokumen	228,647,059	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 02 1.02 06	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun				1 Dokumen	66,441,678	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Dokumen	83,052,098	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 02 1.02 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				1288 Orang	13,927,322,001	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat	1288 Orang	17,502,902,501	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 02 1.02 08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi,				4 Dokumen	107,443,160		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat	4 Dokumen	134,303,950	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan						Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
TOTAL						35,247,203,257								44,871,823,356	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						72,099,665,201				81,397,842,367					
5	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai LAKIP PERANGKAT DAERAH PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERANGKAT DAERAH	Nilai Kategori		Nilai Kategori	BB Nilai BB Kategori	11,015,503,711						BB Nilai BB Kategori	15,731,298,897		
5	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	69,744,800						3 Dokumen	108,408,800		
5	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	7,005,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Dokumen	15,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	
5	05	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	14,670,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Dokumen	17,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	
5	05	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5,520,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Dokumen	1,600,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	
5	05	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	5,065,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Dokumen	17,500,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	
5	05	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	5,065,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Dokumen	13,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	
5	05	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar				1 Laporan	7,889,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat	1 Laporan	15,778,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Realisasi Kinerja SKPD										daerah			
5 05 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	24,530,800	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Laporan	28,530,800	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksanya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	bulan		bulan	12 bulan	5,132,273,811						12 bulan	8,610,505,797	
5 05 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/ Bulan	5,101,103,311	Kab. Lombok Barat, Sekotong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan pada Perangkat Daerah	50 Orang/ Bulan	8,558,164,797	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	7,170,500	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	14,341,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	5,000,000	Semua Kab/Kota, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	10,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	3,000,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	6,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5,000,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan pada Perangkat Daerah	1 Laporan	10,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	5,500,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				1 Laporan	6,000,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan pada Perangkat Daerah	1 Laporan	6,500,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi Perkantoran Optimal	LAPORAN		LAPORAN	4 LAPORAN	4,871,500						4 LAPORAN	7,743,000	
5 05 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik				1 Dokumen	2,871,500	Kab. Lombok Barat, Kediri,	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan	terlaksananya administrasi	1 Dokumen	5,743,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Daerah SKPD						Lelede			transformasi pelayanan publik (PD-3)	Barang Mili Daerah Pada Perangkat Daerah			Tenggara Barat
5 05 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2,000,000	Semua Kab/Kota, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	terlaksananya administrasi Barang Mili Daerah Pada Perangkat Daerah	1 Laporan	2,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan	Paket		Paket	1 Paket	731,408,600						1 Paket	493,283,600	
5 05 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12,175,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	14,175,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,125,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	3,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	16,814,900	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	20,814,900	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20,027,700	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	22,027,700	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1,506,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	2,506,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	8,760,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	10,760,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	70,000,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	90,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	275,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	350,000,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	55,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 05 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana Prasana Gedung Dan Bangunan Pendukung Industrialisasi	Unit		Unit	3 Unit	2,074,000,000						3 Unit	2,936,285,900	
5 05 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	1,000,000,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	3 Unit	1,361,985,900	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	46,000,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	8 Unit	399,300,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	250,000,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	4 Unit	275,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	778,000,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	4 Unit	900,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	Bulan		Bulan	12 Bulan	2,687,600,000						12 Bulan	3,150,466,800	
5 05 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	528,000,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	1 Laporan	600,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2,159,600,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	1 Laporan	2,550,466,800	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	Unit		Unit	4 Unit	315,605,000						4 Unit	424,605,000	
5 05 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				7 Unit	272,000,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah yang diadakan	7 Unit	372,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang				4 Unit	34,685,000	Kab. Lombok Barat, Kediri,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan	Laporan Pengadaan	4 Unit	36,685,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Dipelihara						Lelede		transformasi pelayanan publik (PD-3)	Barang Milik Daerah yang diadakan			Tenggara Barat	
5 05 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	8,920,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah yang diadakan	4 Unit	15,920,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%		%	65,22 %	61,084,161,490						65,22 %	65,666,543,470	
5 05 02 1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Inovasi	Inovasi		Inovasi	90 Inovasi	2,081,897,920						90 Inovasi	1,396,000,000	
5 05 02 1.01 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola				1 Dokumen	112,447,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9) Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggara n Pemerintahan dan Pengakian Peraturan	1 Dokumen	100,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 02 1.01 13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan				5 Rekomendasi	716,074,400	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggara n Pemerintahan dan Pengakian Peraturan	5 Rekomendasi	650,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 02 1.01 14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan				2 Laporan	1,253,376,520	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggara n Pemerintahan dan Pengakian Peraturan	2 Laporan	646,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 02 1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial yang tersusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	52,045,573,700						1 Dokumen	57,625,972,000	
5 05 02 1.02 01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				9 Dokumen	1,014,875,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	9 Dokumen	1,000,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 02 1.02 03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	jumlah beasiswa untuk mahasiswa dalam negeri jumlah beasiswa untuk mahasiswa luar negeri Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan				1500 orang 123 orang 1 Dokumen 100 orang 300 orang	49,939,069,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1500 orang 123 orang 1 Dokumen 100 orang 300 orang	55,500,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah Peserta Brida School Academy Jumlah peserta pelatihan rumah bahasa													
5 05 02 1.02 05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				1 Dokumen	464,857,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1 Dokumen	500,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 02 1.02 06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan				1 Dokumen	126,772,200	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1 Dokumen	70,972,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 02 1.02 09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja jumlah tenaga kerja yang di sertifikasi				1 Dokumen 32 orang	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1 Dokumen 32 orang	555,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 02 1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang tersusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	5,838,177,970						1 Dokumen	5,374,571,470	
5 05 02 1.03 01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				2 Dokumen	172,742,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2 Dokumen	166,942,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 02 1.03 02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				4 Dokumen	4,707,629,470	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	4 Dokumen	4,707,629,470	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 02 1.03 04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				4 Dokumen	433,240,100	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	4 Dokumen	100,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 02 1.03 05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan				2 Dokumen	134,356,400	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2 Dokumen	75,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 02 1.03 06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral				1 Dokumen	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1 Dokumen	250,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Nasional	Daerah				
5 05 02 1.03 07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				2 Dokumen	140,210,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2 Dokumen	75,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 02 1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Ujicoba dan model replikasi invensi	Prototipe		Prototipe	20 Prototipe	1,118,511,900						20 Prototipe	1,270,000,000	
5 05 02 1.04 02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi jumlah peralatan/mesin diuji (test report)				1 Laporan 20 unit	500,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1 Laporan 20 unit	555,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 02 1.04 03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	213,752,400	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1 Laporan	260,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 02 1.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				2 Laporan	304,759,500	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	2 Laporan	355,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 05 02 1.04 05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual produk yang di fasilitasi Hak Paten/Haki				1 Laporan 1 produk	100,000,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1 Laporan 1 produk	100,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
TOTAL							72,099,665,201							81,397,842,367	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	07				PENGELOLAAN PENGHUBUNG						11,171,858,826							14,913,000,000		
5	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip A	Point		Point	A Point	10,458,508,826						A Point	13,523,000,000		
5	07	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	114,865,243						1 Dokumen	566,000,000		
5	07	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	25,000,000		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	ASN	1 Dokumen	90,000,000	Badan Penghubung Daerah
5	07	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	17,000,000		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	ASN	1 Dokumen	35,000,000	Badan Penghubung Daerah
5	07	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	14,311,775		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN	1 Dokumen	350,000,000	Badan Penghubung Daerah
5	07	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	25,000,000		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	ASN	1 Dokumen	30,000,000	Badan Penghubung Daerah
5	07	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	13,553,468		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN	1 Laporan	39,000,000	Badan Penghubung Daerah
5	07	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	20,000,000		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	ASN	1 Laporan	22,000,000	Badan Penghubung Daerah
5	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	JUmlah Dokumen Keuangan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	5,782,079,270						1 Dokumen	6,075,000,000		
5	07	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				44 Orang/ Bulan	5,770,879,270		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	ASN	44 Orang/ Bulan	6,000,000,000	Badan Penghubung Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 07 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	11,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	ASN	1 Laporan	75,000,000	Badan Penghubung Daerah
5 07 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen kebutuhan barang daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	35,000,000						1 Dokumen	47,000,000	
5 07 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	ASN	1 Dokumen	17,000,000	Badan Penghubung Daerah
5 07 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	ASN	1 Laporan	30,000,000	Badan Penghubung Daerah
5 07 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	orang		orang	10 orang	30,000,000						10 orang	80,000,000	
5 07 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	ASN	15 Orang	80,000,000	Badan Penghubung Daerah
5 07 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	rekening		rekening	4 rekening	672,351,001						4 rekening	1,145,000,000	
5 07 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	91,699,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	ASN dan Pengunjung Wisma Anjungan NTB	2 Paket	105,000,000	Badan Penghubung Daerah
5 07 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	ASN dan Pengunjung Wisma Anjungan NTB	1 Paket	600,000,000	Badan Penghubung Daerah
5 07 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	40,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	ASN dan Pengunjung Wisma Anjungan NTB	1 Paket	45,000,000	Badan Penghubung Daerah
5 07 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	60,152,001	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	ASN dan Pengunjung Wisma Anjungan NTB	1 Paket	75,000,000	Badan Penghubung Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 07 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	80,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	ASN dan Pengunjung Wisma Anjungan NTB	4 Dokumen	90,000,000	Badan Penghubung Daerah
5 07 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	ASN dan Pengunjung Wisma Anjungan NTB	1 Laporan	230,000,000	Badan Penghubung Daerah
5 07 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan dinas yang diadakan	Unit		Unit	1 Unit	30,000,000						1 Unit	500,000,000	
5 07 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	ASN	1 Unit	500,000,000	Badan Penghubung Daerah
5 07 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana prasarana yang tersedia	Unit		Unit	25 Unit	2,417,414,000						25 Unit	3,210,000,000	
5 07 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	72,714,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	Masyarakat pengguna wisma dan anjungan NTB	1 Laporan	80,000,000	Badan Penghubung Daerah
5 07 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	660,700,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	Masyarakat pengguna wisma dan anjungan NTB	1 Laporan	700,000,000	Badan Penghubung Daerah
5 07 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	Masyarakat pengguna wisma dan anjungan NTB	1 Laporan	130,000,000	Badan Penghubung Daerah
5 07 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1,584,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	Masyarakat pengguna wisma dan anjungan NTB	1 Laporan	2,300,000,000	Badan Penghubung Daerah
5 07 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara	Unit		Unit	15 Unit	1,222,381,000						15 Unit	1,300,000,000	
5 07 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				28 Unit	681,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	ASN	28 Unit	700,000,000	Badan Penghubung Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
5 07 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	541,181,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	ASN	2 Unit	600,000,000	Badan Penghubung Daerah	
5 07 01 1.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah pelayananan pimpinan	Kali		Kali	200 Kali	154,418,312						200 Kali	600,000,000		
5 07 01 1.16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				1 Laporan	154,418,312	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	Pimpinan daerah	1 Laporan	600,000,000	Badan Penghubung Daerah	
5 07 02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Angka kunjungan wisatawan pada Anjungan NTB TMII (orang)	orang		orang	43000 orang	713,350,000						43000 orang	1,390,000,000		
5 07 02 1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah event Promosi yang dilaksanakan	Kali		Kali	8 Kali	713,350,000						8 Kali	1,390,000,000		
5 07 02 1.01 03	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan				8 Laporan	573,350,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	seluruh masyarakat	8 Laporan	990,000,000	Badan Penghubung Daerah	
5 07 02 1.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				1 Laporan	140,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PD-8)	seluruh masyarakat	1 Laporan	400,000,000	Badan Penghubung Daerah	
TOTAL							11,171,858,826								14,913,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																
6	01				INSPEKTORAT DAERAH						25,162,450,127								38,351,200,041		
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0 Nilai SAKIP Inspektorat	0 Kategori		0 Kategori	0 0 AA Kategori	22,559,650,827						0 0 AA Kategori	29,413,993,172			
6	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jml. Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Dok. Laporan		Dok. Laporan	9 Dok. Laporan	318,770,100						9 Dok. Laporan	609,331,851			
6	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	173,969,700	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Inspektorat Provinsi NTB	2 Dokumen	218,885,330	Inspektorat		
6	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	41,692,900	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Inspektorat Provinsi NTB	1 Dokumen	83,910,888	Inspektorat		
6	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	12,025,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Inspektorat Provinsi NTB	1 Dokumen	43,262,814	Inspektorat		
6	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	41,245,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Inspektorat Provinsi NTB	1 Dokumen	43,262,814	Inspektorat		
6	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	12,694,900	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Inspektorat Provinsi NTB	1 Dokumen	45,389,669	Inspektorat		
6	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	37,142,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Inspektorat Provinsi NTB	4 Laporan	174,620,336	Inspektorat		
6	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penerima Gaji/Tunjangan/Honor	orang		orang	130 orang	19,770,796,587						130 orang	23,622,446,216			
6	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				116 Orang/ Bulan	19,709,587,587	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Inspektorat Provinsi NTB	116 Orang/ Bulan	22,778,106,520	Inspektorat		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	53,145,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Inspektorat Provinsi NTB	12 Dokumen	815,069,878	Inspektorat
6 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	8,064,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Inspektorat Provinsi NTB	1 Laporan	29,269,818	Inspektorat
6 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan	Laporan		Laporan	4 Laporan	17,985,000						4 Laporan	57,721,741	
6 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	17,985,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Inspektorat Provinsi NTB	4 Laporan	57,721,741	Inspektorat
6 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Peserta Diklat	Orang		Orang	100 Orang	256,565,000						100 Orang	312,500,000	
6 01 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	256,565,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Inspektorat Provinsi NTB	100 Orang	312,500,000	Inspektorat
6 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum	Jenis, Laporan		Jenis, Laporan	107 Jenis, Laporan	868,013,500						107 Jenis, Laporan	2,301,754,997	
6 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				14 Paket	10,127,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Inspektorat Provinsi NTB	14 Paket	38,434,233	Inspektorat
6 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				14 Paket	410,236,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Inspektorat Provinsi NTB	14 Paket	375,000,000	Inspektorat
6 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				48 Paket	55,853,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Inspektorat Provinsi NTB	48 Paket	371,577,679	Inspektorat
6 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				9 Paket	58,951,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Inspektorat Provinsi NTB	9 Paket	192,572,736	Inspektorat

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	132,200,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Inspektorat Provinsi NTB	2 Laporan	449,170,349	Inspektorat
6 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	200,644,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Inspektorat Provinsi NTB	50 Laporan	875,000,000	Inspektorat
6 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang Diterima/ Diadakan	Unit		Unit	8 Unit	30,075,000						8 Unit	306,598,651	
6 01 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Inspektorat Provinsi NTB	2 Unit	67,040,350	Inspektorat
6 01 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Paket	30,075,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Inspektorat Provinsi NTB	6 Paket	239,558,301	Inspektorat
6 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis dan Belanja Jasa	Jenis, Orang		Jenis, Orang	39 Jenis, Orang	777,755,640						39 Jenis, Orang	1,295,743,994	
6 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	50,920,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Inspektorat Provinsi NTB	2 Laporan	139,628,290	Inspektorat
6 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	329,450,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Inspektorat Provinsi NTB	4 Laporan	689,523,413	Inspektorat
6 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	397,385,640	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Inspektorat Provinsi NTB	12 Laporan	466,592,291	Inspektorat
6 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Mendapat Pemeliharaan	Unit		Unit	161 Unit	519,690,000						161 Unit	907,895,722	
6 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	25,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Inspektorat Provinsi NTB	1 Unit	41,900,219	Inspektorat

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	178,290,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Inspektorat Provinsi NTB	8 Unit	312,500,000	Inspektorat
6 01 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				90 Unit	22,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Inspektorat Provinsi NTB	90 Unit	62,850,329	Inspektorat
6 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				195 Unit	148,900,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Inspektorat Provinsi NTB	195 Unit	129,153,235	Inspektorat
6 01 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Inspektorat Provinsi NTB	0 Unit	0	Inspektorat
6 01 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	145,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Inspektorat Provinsi NTB	4 Unit	361,491,939	Inspektorat
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase PD yang Meningkatkan Nilai Implementasi SAKIP-nya Persentase Penurunan Nilai Kerugian Perangkat Daerah Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Perangkat Daerah	% % %		% % %	100 % 48,89 % 90 %	1,683,819,300						100 % 48,89 % 90 %	5,194,996,804	
6 01 02 1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dok. Laporan Hasil Pengawasan Internal Jumlah Dok. Laporan Hasil Pengawasan Internal	Dok, Laporan Dok. Laporan		Dok, Laporan Dok. Laporan	75 Dok, Laporan 93 Dok. Laporan	1,312,483,300						75 Dok, Laporan 93 Dok. Laporan	3,639,270,998	
6 01 02 1.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				62 Laporan	60,720,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB.	62 Laporan	248,742,979	Inspektorat
6 01 02 1.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				39 Laporan	757,604,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB.	39 Laporan	1,251,250,000	Inspektorat

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
6 01 03 1.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				0 Rekomendasi	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB	0 Rekomendasi	50,503,049	Inspektorat	
6 01 03 1.01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				13 Rekomendasi	158,085,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB	13 Rekomendasi	615,468,966	Inspektorat	
6 01 03 1.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Dok. Laporan Hasil Pendampingan Dan Asistensi Jumlah Dok. Laporan Hasil Pendampingan Dan Asistensi	Dok. Laporan Dok. Laporan		Dok. Laporan Dok. Laporan	11 Dok. Laporan 122 Dok. Laporan	760,895,000						11 Dok. Laporan 122 Dok. Laporan	3,076,238,050		
6 01 03 1.02 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				46 Perangkat Daerah	290,585,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Seluruh OPD Lingkup Provinsi NTB	46 Perangkat Daerah	718,373,725	Inspektorat	
6 01 03 1.02 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				2 Perangkat Daerah	48,035,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Seluruh OPD Lingkup Provinsi NTB	2 Perangkat Daerah	155,637,525	Inspektorat	
6 01 03 1.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				11 Kegiatan	396,690,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Seluruh OPD Lingkup Provinsi NTB	11 Kegiatan	1,875,000,000	Inspektorat	
6 01 03 1.02 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				2 Perangkat Daerah	25,585,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Seluruh OPD Lingkup Provinsi NTB	2 Perangkat Daerah	327,226,800	Inspektorat	
TOTAL							25,162,450,127								38,351,200,041	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM															
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						17,094,487,072				17,094,487,072					
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	7,685,523,184						100 %	7,685,523,184		
8	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen		Dokumen	9 Dokumen	279,681,600						9 Dokumen	279,681,600		
8	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	49,450,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Terwujudnya Perencanaan program dan kegiatan serta pelaporan yang sinergi, koordinatif dan responsif	1 Dokumen	49,450,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
8	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	33,039,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Terwujudnya Perencanaan program dan kegiatan serta pelaporan yang sinergi, koordinatif dan responsif	1 Dokumen	33,039,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
8	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	33,039,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Terwujudnya Perencanaan program dan kegiatan serta pelaporan yang sinergi, koordinatif dan responsif	1 Dokumen	33,039,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
8	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	5,569,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Terwujudnya Perencanaan program dan kegiatan serta pelaporan yang sinergi, koordinatif dan responsif	1 Dokumen	5,569,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
8	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	5,569,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Terwujudnya Perencanaan program dan kegiatan serta pelaporan yang sinergi, koordinatif dan responsif	1 Dokumen	5,569,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
8	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Dokumen	78,015,600	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Terwujudnya Perencanaan program dan kegiatan serta pelaporan yang sinergi, koordinatif dan responsif	4 Dokumen	78,015,600	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
8	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua			Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan	Terwujudnya Perencanaan program dan kegiatan serta	2 Laporan	75,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kecamatan, Semua Kelurahan			perlindungan masyarakat (PD-10)	pelaporan yang sinergi, koordinatif dan responsif			
8 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	6,196,796,449						1 Dokumen	6,196,796,449	
8 01 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/ Bulan	6,097,475,110	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Terwujudnya administrasi keuangan yang akuntabel	55 Orang/ Bulan	6,097,475,110	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	53,608,562	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Terwujudnya administrasi keuangan yang akuntabel	1 Dokumen	53,608,562	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8 01 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	4,548,828	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Terwujudnya administrasi keuangan yang akuntabel	1 Dokumen	4,548,828	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	34,279,236	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Terwujudnya administrasi keuangan yang akuntabel	1 Laporan	34,279,236	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8 01 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	6,884,713	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Terwujudnya administrasi keuangan yang akuntabel	1 Dokumen	6,884,713	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1,535,000						1 Dokumen	1,535,000	
8 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1,535,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Meningkatnya efektifitas pelayanan adm perkantoran	1 Laporan	1,535,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis penyediaan administrasi umum SKPD	Jenis		Jenis	7 Jenis	338,895,135						7 Jenis	338,895,135	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	18,404,316	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Meningkatnya efektivitas pelayanan adm perkantoran	8 Paket	18,404,316	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8 01 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	17,112,026	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Meningkatnya efektivitas pelayanan adm perkantoran	4 Paket	17,112,026	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				23 Paket	16,929,800	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Meningkatnya efektivitas pelayanan adm perkantoran	23 Paket	16,929,800	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	21,600,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Meningkatnya efektivitas pelayanan adm perkantoran	5 Paket	21,600,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	44,848,993	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Meningkatnya efektivitas pelayanan adm perkantoran	2 Dokumen	44,848,993	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	45,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Meningkatnya efektivitas pelayanan adm perkantoran	1 Laporan	45,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	175,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Meningkatnya efektivitas pelayanan adm perkantoran	1 Laporan	175,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis pengadaan Barang Milik Daerah	Jenis		Jenis	2 Jenis	0						2 Jenis	0	
8 01 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Meningkatnya efektivitas pelayanan adm perkantoran	0 Unit	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Meningkatnya efektifitas pelayanan adm perkantoran	0 Unit	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jenis		Jenis	4 Jenis	705,135,000						4 Jenis	705,135,000	
8 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Meningkatnya efektifitas pelayanan adm perkantoran	1 Laporan	5,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	90,600,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Meningkatnya efektifitas pelayanan adm perkantoran	3 Laporan	90,600,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8 01 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	10,840,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Meningkatnya efektifitas pelayanan adm perkantoran	4 Laporan	10,840,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	598,695,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Meningkatnya efektifitas pelayanan adm perkantoran	4 Laporan	598,695,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah	Jenis		Jenis	3 Jenis	163,480,000						3 Jenis	163,480,000	
8 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	25,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Meningkatnya efektifitas pelayanan adm perkantoran	1 Unit	25,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	138,480,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Meningkatnya efektifitas pelayanan adm perkantoran	10 Unit	138,480,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8 01 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Meningkatnya efektifitas pelayanan adm perkantoran	10 Unit	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pembinaan ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa pada daerah rawan konflik	%		%	10 %	639,374,924						10 %	639,374,924	
8 01 02 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Wawasan Kebangsaan	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	639,374,924						3 Dokumen	639,374,924	
8 01 02 1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				500 Orang	389,374,924	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	500 Orang	389,374,924	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8 01 02 1.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				1 Laporan	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	1 Laporan	250,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%		%	100 %	4,408,142,524						100 %	4,408,142,524	
8 01 03 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Politik Dalam Negeri	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	4,408,142,524						1 Dokumen	4,408,142,524	
8 01 03 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang				200 Orang	3,766,614,600	Semua Kab/Kota, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman,	Meningkatnya masyarakat sadar politik	200 Orang	3,766,614,600	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						Kecamatan, Semua Kelurahan			ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)				
8 01 03 1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				100 Orang	364,977,924	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Meningkatnya masyarakat sadar politik	100 Orang	364,977,924	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8 01 03 1.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1 Laporan	276,550,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Meningkatnya masyarakat sadar politik	1 Laporan	276,550,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang aktif	%		%	83.01 %	689,599,924						83.01 %	689,599,924	
8 01 04 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Ormas	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	689,599,924						1 Dokumen	689,599,924	
8 01 04 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				100 Orang	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Meningkatnya masyarakat sadar politik	100 Orang	200,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 04 1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				100 Orang	238,799,924	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Meningkatnya masyarakat sadar politik	100 Orang	238,799,924	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8 01 04 1.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				0 Dokumen 0 Laporan 1 Laporan	250,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Meningkatnya masyarakat sadar politik	0 Dokumen 0 Laporan 1 Laporan	250,800,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Desa Bersinar (Bersih Narkoba)	%		%	86,21 %	865,219,530						86,21 %	865,219,530	
8 01 05 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	865,219,530						1 Dokumen	865,219,530	
8 01 05 1.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	393,194,606	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	1 Dokumen	393,194,606	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
8 01 05 1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				400 Orang	245,649,924	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	400 Orang	245,649,924	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8 01 05 1.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				1 Laporan	226,375,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	1 Laporan	226,375,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Cakupan mediasi potensi konflik sosial pada daerah rawan konflik	%		%	11.43 %	2,806,626,986						11.43 %	2,806,626,986	
8 01 06 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	2,806,626,986						1 Dokumen	2,806,626,986	
8 01 06 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				100 Orang	301,635,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	100 Orang	301,635,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
8 01 06 1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				100 Orang	732,731,586	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	100 Orang	732,731,586	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8 01 06 1.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				1 Laporan	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	1 Laporan	250,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8 01 06 1.01 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi				1 Dokumen	1,522,260,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	1 Dokumen	1,522,260,400	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
TOTAL						17,094,487,072							17,094,487,072		